ISSN 3063-1971

Abad Jakarta
Kota Global & Berbudaya



Profil statistik JAKARTA

Volume 8, 2026

ISSN 3063-1971

Abad Jakarta
Kota Global & Berbudaya



Profil statistik

JAKARTA

Volume 8, 2026

ISSN 3063-1971

Profil Statistik Jakarta
Volume 8 Tahun 2026

Pengarah :
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Penanggung Jawab :
Kepala Bidang Data dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Naskah:
Bidang Data dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Penyunting:
Bidang Data dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Desain Sampul:
Bidang Data dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Penerbit:
©Bidang Data dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dapat menerbitkan Buku Profil Statistik Jakarta Volume 8 Tahun 2026 sebagai kelanjutan dari komitmen menghadirkan data statistik sektoral yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Jakarta terus melangkah maju sebagai kota global yang modern, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Dalam perjalanannya, ketersediaan data yang kuat dan andal menjadi fondasi tak tergantikan bagi setiap langkah perencanaan dan evaluasi pembangunan. Publikasi ini hadir untuk memotret kondisi Jakarta secara menyeluruh mulai dari dinamika kependudukan dan tata kelola pemerintahan, hingga perekonomian, ketahanan lingkungan hidup, dan kualitas kesejahteraan rakyat.

Buku Profil Statistik Jakarta Volume 8 Tahun 2026 merupakan hasil kolaborasi aktif Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Perangkat Daerah dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Keterlibatan lintas sektor ini menjadi kunci dalam menjaga kualitas dan kelengkapan data yang disajikan, sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan transparansi informasi kepada publik.

Kami berharap publikasi ini dapat menjadi rujukan yang bermakna bagi para pengambil kebijakan, peneliti, pelaku usaha, maupun masyarakat luas, khususnya dalam mendukung semangat *evidence-based policy* yang terus kami perkuat dari tahun ke tahun. Kritik dan saran yang membangun dari seluruh pembaca sangat kami nantikan demi penyempurnaan publikasi di masa mendatang.

Semoga Buku ini memberikan manfaat nyata bagi seluruh pembaca dalam memahami wajah Jakarta yang terus bertumbuh dan bertransformasi.

Jakarta, Juli 2026
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
dan Statistik Provinsi DKI Jakarta



Marulina Dewi
NIP: 197702261997112001

ISSN 3063-1971

Buku Profil Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026

Volume 8 Tahun 2026

Daftar Isi

BAB I. Geografi dan Demografi 3
1.1. Karakteristik Wilayah 3
1.1.1. Kondisi Geografis 4
1.1.2. Wilayah Administrasi 6
1.1.3. Iklim dan Cuaca 10
1.2. Demografi 13
1.2.1. Kependudukan 13
1.2.2. Dinamika Penduduk 18

BAB II. Pemerintahan 26
2.1. Tata Kelola Pemerintahan 26
2.1.1. Pemerintahan Daerah 26
2.1.2. Aparatur Sipil 33
2.2. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 37
2.2.1. Kependudukan 37
2.2.2. Catatan Sipil 43
2.3. Komunikasi dan Informatika 45
2.3.1. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 45
2.3.2. Layanan Komunikasi 49
2.4. Kebencanaan 55
2.4.1. Bencana Alam 55
2.4.2. Penanggulangan Bencana 64
2.5. Politik dalam Negeri dan Pengawasan Hukum 91
2.5.1. Indeks Demokrasi 91
2.5.2. Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta 92
2.5.3. Politik dalam Negeri 98
2.6. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 100
2.6.1. Perlindungan Masyarakat 100
2.6.2. Ketentraman dan Ketertiban 106

BAB III. Perekonomian dan Keuangan 117
3.1. Inflasi 117
3.2. Ekonomi dan Keuangan Daerah 119
3.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 120
3.2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 121
3.2.3. Pendapatan Pajak dan Retribusi 124
3.3. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 129
3.3.1. Koperasi 129

3.3.2. Usaha Kecil, dan Menengah 134
3.4. Pertanian 136
3.4.1. Hortikultura 136
3.4.2. Kelompok Tani dan Urban Farming 153
3.4.3. Agrowisata 153
3.5. Perdagangan 154
3.5.1. PDRB Sektor Perdagangan 154
3.5.2. Neraca Perdagangan Luar Negeri (Ekspor-Impor) 157
3.6. Kelautan Perikanan 163
3.6.1. Kelautan Perikanan 163
3.6.2. Nelayan 167
3.6.3. Kawasan Perairan Berkelanjutan 170
3.7. Pangan 172
3.7.1. Konsumsi Pangan 173
3.7.2. Produksi Pangan 176
3.8. Pariwisata 179
3.9. Perhubungan 192
3.9.1. Transjakarta 192
3.9.2. Angkutan Umum 193
3.9.3. Angkutan Lainnya 201
3.9.4. Penumpang 205
3.10. Ketenagakerjaan 212
3.10.1. Pengangguran 212
3.10.2. Pelatihan Tenaga Kerja 215
3.10.3. Penempatan Kerja dan Wirausaha 217
3.10.4. Produktivitas dan Daya Saing 218
3.10.5. Perusahaan dan Hubungan Industrial 219
3.11. Penanaman Modal dan Perizinan 222
3.11.1. Realisasi Investasi 222
3.11.2. Kemudahan dan Efektivitas Perizinan 231

BAB IV. Pembangunan dan Lingkungan Hidup 251
4.1. Sumber Daya Air 251
4.2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 257
4.2.1. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 257
4.3. Kehutanan 277
4.4. Energi dan Sumber Daya Listrik 281
4.4.1. Energi dan Sumber Daya Listrik 281
4.5. Lingkungan Hidup 287
4.5.1. Pengelolaan Sampah 287
4.5.2. Kualitas Udara 296
4.5.3. Kualitas Air dan Keanekaragaman Hayati 297

BAB V. Kesejahteraan Rakyat 305
5.1. Pengeluaran per Kapita 305
5.2. Kemiskinan 306
5.3. Pendidikan 308

5.3.1. Murid, Guru, dan Sekolah 308
5.3.2. Partisipasi Siswa dan Sekolah 320
5.4. Kesehatan 337
5.4.1. Fasilitas Kesehatan 337
5.4.2. Tenaga Kesehatan 359
5.4.3. Penyakit Menular 361
5.4.4. Kesehatan Lainnya 385
5.4.5. Kesehatan Ibu dan Anak 385
5.5. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 414
5.6. Sosial 420
5.6.1. Pembangunan Manusia 420
5.6.2. Kesejahteraan Sosial 421
5.7. Kebudayaan 428
5.7.1. Museum dan Cagar Budaya 428
5.8. Kepemudaan dan Olahraga 432
5.8.1. Kegiatan Kepemudaan 432
5.8.2. Fasilitas Olahraga 436
5.9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 439
5.10. Perpustakaan dan kearsipan 450

DAFTAR ISI

Gambar 1.1. Luas Wilayah Menurut Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (Km²) 4
Gambar 1.2. Jumlah Kelurahan dan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 5
Gambar 1.3. Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 5
Gambar 1.4. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2024 7
Gambar 1.5. Rata-rata Suhu Udara (°C) Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2024 10
Gambar 1.6. Rata-rata Kelembaban Udara (%) Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2025 10
Gambar 1.7. Rata-rata Tekanan Udara (mbar) menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2024 11
Gambar 1.8. Rata-rata Kecepatan Angin (mdet) menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2024 12
Gambar 1.9. Rata-rata Penyinaran Matahari (%) menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2024 12
Gambar 1.10. Curah Hujan (mm²) menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2024 13
Gambar 1.11. Jumlah Penduduk Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025 14
Gambar 1.12. Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Jenis Kelamin di Jakarta Tahun 2025 14
Gambar 1.13. Jumlah Penduduk di Provinsi DKI Jakarta menurut Agama dan Kepercayaan, Semester I 2025 15
Gambar 1.14. Jumlah Rumah Ibadah di DKI Jakarta Tahun 2024 15
Gambar 1.15. Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²) di DKI Jakarta Tahun 2024-2026 16
Gambar 1.16. Data Jumlah Penduduk Berdasar Status Hubungan dalam Keluarga Semester I 2025 16
Gambar 1.17. Data Jumlah Kepala Keluarga 17
Gambar 1.18. Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta Semester I Tahun 2025 17
Gambar 1.19. Jumlah Pelaporan Kelahiran dan Kematian di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 18
Gambar 1.20. Jumlah Pelaporan Kelahiran dan Kematian di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025menurut Wilayah 18
Gambar 1.21. Jumlah Pelaporan Penduduk yang Datang dari Luar DKI Jakarta ke Dalam DKI Jakarta Tahun 2023-2024 19
Gambar 2.1. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 24
Gambar 2.2. Indeks Manajemen Risiko Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 24
Gambar 2.3. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 25
Gambar 2.4. Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2024 25
Gambar 2.5. Produk Naskah Dinas Gubernur Januari 2023-Juli 2025 26
Gambar 2.6. Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2023-2024 27
Gambar 2.7. Jumlah Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI Jakarta Tahun 2024 29
Gambar 2.8. Jumlah Kelurahan yang Sadar Hukum menurut Wilayah Tahun 2024 30

Gambar 2.9. Jenis Indeks Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang Terlaksana dengan Baik Tahun 2023-2024 30
Gambar 2.10. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menurut Jabatan, 2024 31
Gambar 2.11. Jumlah PNS menurut Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 32
Gambar 2.12. Jumlah PPPK menurut Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 32
Gambar 2.13. Jumlah PNS dan PPPK menurut Tingkat Kepangkatan Tahun 2024 33
Gambar 2.14. Indeks Efektivitas Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat di Bawah Koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial Periode Triwulan I 2023-Triwulan II 2025..... 34
Gambar 2.15. Data Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kelahiran Tahun 2024..... 35
Gambar 2.16. Jumlah Penduduk berdasarkan Kematian menurut Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 36
Gambar 2.17. Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) Per-1000 Kelahiran Hidup pada Tahun Terlahir di DKI Jakarta Tahun 2024 36
Gambar 2.18. Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Provinsi DKI Jakarta 37
Gambar 2.19. Data Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi DKI Jakarta 37
Gambar 2.20. Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta menurut Pekerjaan Semester I 2025 38
Gambar 2.21. Penduduk Provinsi DKI Jakarta menurut Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin Semester I 2025 38
Gambar 2.22. Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta menurut Kelompok Usia Semester I 2025 39
Gambar 2.23. Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 40
Gambar 2.24. Status Perkawinan Penduduk Provinsi DKI Jakarta (Usia >= 19 Tahun) menurut Wilayah Tahun 2023-Semester I 2025 40
Gambar 2.25. Data Wajib KTP di DKI Jakarta Semester I 2022-Semester I 2025 41
Gambar 2.26. Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga di DKI Jakarta Tahun 2024..... 42
Gambar 2.27. Rata-rata Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Jenis KK, KTP, dan KIA di DKI Jakarta Tahun 2023 42
Gambar 2.28. Persentase Pemenuhan Layanan Komunikasi Publik 43
Gambar 2.29. Jumlah Layanan Perangkat Daerah Provinsi yang Telah Menggunakan Layanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah..... 44
Gambar 2.30. Cepat Respon Masyarakat (CRM) Semester I Tahun 2024 45
Gambar 2.31. Jumlah Target dan Terpenuhi Pemenuhan Data Prioritas Triwulan I 2024 tahun Triwulan II 2025..... 45
Gambar 2.32. Jumlah Berita yang di *Publish* pada *Website* Berita Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Januari 2024-November 2025 46
Gambar 2.33. Kategori Berita yang Dipublikasikan pada Website Berita Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Januari-November 2025..... 47
Gambar 2.34. Jumlah Siaran Pers Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 47
Gambar 2.35. Jumlah Dataset di Portal satu Data Indonesia Tingkat Provinsi DKI Jakarta 48
Gambar 2.36. Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2025 48
Gambar 2.37. Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan di DKI Jakarta 49

Gambar 2.38. Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan di DKI Jakarta 50
Gambar 2.39. Nilai Perencanaan Kinerja dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024..... 50
Gambar 2.40. Predikat Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi DKI Jakarta 51
Gambar 2.41. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi DKI Jakarta 51
Gambar 2.42. Jumlah Pemenuhan Layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi Provinsi DKI Jakarta 52
Gambar 2.43. Jumlah Cakupan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 53
Gambar 2.44. Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta 53
Gambar 2.45. Jumlah Kejadian Banjir menurut Bulan di DKI Jakarta Tahun 2023-Semester I 2025 54
Gambar 2.46. Jumlah Kejadian Banjir menurut Kota/Kabupaten di DKI Jakarta Tahun 2023-Semester I 2025 55
Gambar 2.47. Jumlah RW yang Terdampak Banjir menurut Kota/Kabupaten di DKI Jakarta Tahun 2023-Semester I 2025 55
Gambar 2.48. Jumlah Jiwa dan KK yang Terdampak Banjir menurut Kota/Kabupaten di DKI Jakarta Semester I 2025 56
Gambar 2.49. Jumlah Kejadian Kebakaran menurut Bulan di DKI Jakarta Tahun 2023-September 2025 56
Gambar 2.50. Jumlah Kejadian Kebakaran menurut Kota/Kabupaten di DKI Jakarta Tahun 2023-September 2025 57
Gambar 2.51. Jumlah Kejadian Pohon Tumbang menurut Bulan di DKI Jakarta Tahun 2023 - Semester I 2025 58
Gambar 2.52. Jumlah Kejadian Pohon Tumbang menurut Kota/Kabupaten di DKI Jakarta Tahun 2023 - Semester I 2025 58
Gambar 2.53. Jumlah Pohon Tumbang menurut Bulan di DKI Jakarta Tahun 2023 - Semester I 2025 59
Gambar 2.54. Jumlah Pohon Tumbang menurut Kota/Kabupaten di DKI Jakarta Tahun 2023 - Semester I 2025 59
Gambar 2.55. Jumlah Peringatan Dini Pergerakan Tanah di DKI Jakarta Tahun 2023-Semester I 2025 60
Gambar 2.56. Jumlah Bencana di DKI Jakarta Tahun 2024 – Semester I 2025 61
Gambar 2.57. Jumlah Jenis Korban Bencana di DKI Jakarta Tahun 2024 – Semester I Tahun 2025 61
Gambar 2.58. Indeks Risiko Bencana di Provinsi DKI Jakarta..... 62
Gambar 2.59. Sepuluh Terbesar Penyebab Kejadian Bencana Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta Periode Januari-September 2025 62
Gambar 2.60. Data Pendampingan Kelurahan Tangguh Bencana..... 63
Gambar 2.61. Jumlah Petugas Penanganan Penanggulangan Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta..... 64
Gambar 2.62. Data Kondisi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Masyarakat Provinsi DKI Jakarta 2024..... 65
Gambar 2.63. Data Hidran Mandiri di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024..... 66
Gambar 2.64. Data Kepuasan Pelayanan Kantor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025..... 67
Gambar 2.65. Jumlah Lokasi Hidran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024..... 68
Gambar 2.66. Jumlah Frekuensi Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024 .. 68

Gambar 2.67. Jumlah Penanganan Kebakaran Berhasil di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024 69
Gambar 2.68. Persentase Penanggulangan Kebakaran yang Berhasil di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024 71
Gambar 2.69. Persentase Petugas Pemadam Kebakaran yang Kompeten di DKI Jakarta Tahun 2024 72
Gambar 2.70. Persentase Petugas Pemadam Kebakaran yang Kompeten menurut Jenis Diklat di DKI Jakarta Tahun 2024 73
Gambar 2.71. Jumlah RW yang Telah Dilakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Kepada Masyarakat di Semua Kelurahan Provinsi DKI Jakarta 74
Gambar 2.72. 15 RW Tingkat Kelurahan Terbanyak yang Telah Dilakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Kepada Masyarakat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024..... 75
Gambar 2.73. Jumlah Obyek Frekuensi Banyaknya Terbakar dan Taksiran Kerugian (Miliar Rupiah) pada Kejadian Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2024 76
Gambar 2.74. Jumlah Objek Bencana Kebakaran menurut Jenis dan Benda di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2024 77
Gambar 2.75. Jumlah Operasi Penyelamatan berdasarkan Kategori 78
Gambar 2.76. Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran menurut Bulan di Provinsi DKI Jakarta Periode Januari-September 2025 79
Gambar 2.77. Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta Periode Januari-September 2025 80
Gambar 2.78. Sepuluh Kecamatan Tertinggi Kejadian Bencana Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta Periode Januari-September 2025..... 81
Gambar 2.79. Jumlah Peristiwa Kebakaran menurut Penyebabnya dan Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta 82
Gambar 2.80. Jumlah Operasi Penyelamatan yang Memenuhi Kriteria Tercapainya Waktu Tanggap (*Response Time*) 30 Menit di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024..... 83
Gambar 2.81. Persentase Operasi Penyelamatan yang Memenuhi Kriteria Tercapainya Waktu Tanggap *(Response Time)* 30 Menit di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024..... 84
Gambar 2.82. Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2024..... 85
Gambar 2.83. Luas Area (m^2) yang Terbakar pada Kejadian Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta..... 86
Gambar 2.84. Jenis Korban Luka Bencana Kebakaran di DKI Jakarta Tahun 2021-2024 .. 87
Gambar 2.85. Jumlah Jiwa dan KK Bencana Kebakaran di DKI Jakarta Tahun 2021-2024 88
Gambar 2.86. Persentase Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Berhasil 89
Gambar 2.87. Jumlah Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024..... 90
Gambar 2.88. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di DKI Jakarta..... 91
Gambar 2.89. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin..... 92
Gambar 2.90. Jumlah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Jenisnya di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2024 93
Gambar 2.91. Jumlah Permasalahan yang Disampaikan Delegasi Masyarakat Kepada DPRD menurut Jenis Permasalahan di Provinsi DKI Jakarta 94

Gambar 2.92. Jumlah Permasalahan yang Disampaikan Delegasi Masyarakat Kepada DPRD menurut Jenis Permasalahan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024 95
Gambar 2.93. Indeks Demokrasi DKI Jakarta, Nasional, Pusat, dan Provinsi Tahun 2021-2024 96
Gambar 2.94. Perkembangan IDI provinsi lima wilayah teratas Tahun 2024 97
Gambar 2.95. Jumlah Massa Unjuk Rassa di DKI Jakarta. 98
Gambar 2.96. Data Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan/Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21 di DKI Jakarta Tahun 2024. 98
Gambar 2.97. Jumlah Pengaduan yang Masuk pada Angka Kriminalitas Tertangani di wilayah DKI Jakarta Tahun 2023-2024. 99
Gambar 2.98. Asal Pengaduan yang masuk pada Angka Kriminalitas Tertangani di DKI Jakarta tahun 2023-2024 100
Gambar 2.99. Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) di DKI Jakarta Tahun 2023-2024. 101
Gambar 2.100. Jumlah Jenis Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) di DKI Jakarta Tahun 2023-2024. 101
Gambar 2.101. Data Wilayah Rawan Konflik Sosial/Kemasyarakatan di DKI Jakarta Tahun 2023 – 2024. 103
Gambar 2.102. Data Wilayah Rawan Konflik Sosial/Kemasyarakatan menurut Keterangan Konflik di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024. 103
Gambar 2.103. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024 104
Gambar 2.104. Data Rawan Ketertiban Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 105
Gambar 2.105. Jenis Rawan Ketertiban Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 106
Gambar 2.106. Jumlah Sekretariat Partai Politik Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024 107
Gambar 2.107. Jumlah Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 Penduduk menurut Kota/Kabupaten DKI Jakarta Tahun 2024 107
Gambar 2.108. Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja menurut Unit Organisasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 108
Gambar 2.109. Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 109
Gambar 2.110. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi DKI Jakarta 109
Gambar 2.111. Jumlah Organisasi Massa yang Terdaftar dan Masih Aktif menurut Kelurahan di DKI Jakarta Tahun 2019-2024 110
Gambar 2.112. Jumlah Organisasi Massa yang Terdaftar dan Masih Aktif menurut Kelurahan di Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 110
Gambar 3.1. Indeks Harga Konsumen (IHK) DKI Jakarta Tahun 2020-2025 117
Gambar 3.2. Indeks Harga Konsumen DKI Jakarta per Bulan Tahun 2024-2025 118
Gambar 3.3. Inflasi Tahunan DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2024 118
Gambar 3.4. Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2025 119
Gambar 3.5. Laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta 2023-2025 120
Gambar 3.6. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menurut Sumber Penerimaan (Milyar Rupiah) DKI Jakarta Tahun 2020-2024 121
Gambar 3.7. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 123
Gambar 3.8. Data Realisasi penerimaan Pajak Daerah Bulanan 124
Gambar 3.9. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak di Provinsi DKI Jakarta. 125

Gambar 3.10. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak di Provinsi DKI Jakarta 125
Gambar 3.11. Persentase Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi 126
Gambar 3.12. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 126
Gambar 3.13. Persentase Penerimaan Pajak Daerah menurut Jenis Kendaraan DKI Jakarta Tahun 2024 127
Gambar 3.14. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah menurut Jenis Kendaraan Tahun 2024 127
Gambar 3.15. Persentase Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah 128
Gambar 3.16. Jumlah Modal Usaha, Volume, dan Sisa Hasil Usaha di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 130
Gambar 3.17. Jumlah Koperasi Aktif dan Pasif di DKI Jakarta Tahun 2024 131
Gambar 3.18. Persentase Koperasi Aktif yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023-2024 132
Gambar 3.19. Jumlah Anggota Koperasi di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 132
Gambar 3.20. Jumlah Anggota Koperasi di DKI Jakarta menurut Wilayah Tahun 2023-2024 133
Gambar 3.21. Jumlah Koperasi yang Berkualitas Tahun 2023 133
Gambar 3.22. Persentase Koperasi Konvensional yang Bertransformasi Digital (Modern) Tahun 2023 134
Gambar 3.23. Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal menurut Wilayah di DKI Jakarta Tahun 2023 135
Gambar 3.24. Jumlah Peningkatan Omzet Industri Kecil dan Menengah Tahun 2023-2024 135
Gambar 3.25. Persentase Pertumbuhan Total Laba Bersih BUMDT DKI Jakarta Tahun 2023-2024 136
Gambar 3.26. Jumlah Produksi Sayuran dan Buah Semusim di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 136
Gambar 3.27. Jumlah Produksi Sayuran dan Buah Semusim menurut Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 137
Gambar 3.28. Jumlah Luas Panen dan Produksi Sayuran dan Buah-buahan Semusim di Provinsi DKI Jakarta 138
Gambar 3.29. Data Luas Panen dan Produksi Sayuran dan Buah-buahan Semusim di Provinsi DKI Jakarta 139
Gambar 3.30. Data Luas Panen dan Produksi Tanaman Hias di Provinsi DKI Jakarta 140
Gambar 3.31. Data Luas Panen dan Produksi Tanaman Hias di Provinsi DKI Jakarta 141
Gambar 3.32. Data Luas Panen Tanaman Obat di Provinsi DKI Jakarta (503) 142
Gambar 3.33. Data Produksi Tanaman Obat di Provinsi DKI Jakarta (503) 144
Gambar 3.34. Jumlah Kelompok Tani di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 (505) 145
Gambar 3.35. Jumlah *Urban Farming* menurut Wilayah di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 146
Gambar 3.36. Persentase Peningkatan Produksi Pertanian DKI Jakarta Tahun 2023-2024 147
Gambar 3.37. Persentase Peningkatan Produksi Peternakan DKI Jakarta Tahun 2023-2024 148
Gambar 3.38. Jumlah Hasil Produksi Benih Padi di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 149
Gambar 3.39. Persentase Luas Lahan Produksi Benih Padi di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 150
Gambar 3.40. Jumlah Produksi Pertanian menurut Wilayah DKI Jakarta Tahun 2024 150

Gambar 3.41. Jumlah Pemasaran Produk Pertanian menurut Wilayah DKI Jakarta Tahun 2024 151
Gambar 3.42. Jumlah Omzet Penjualan Hortikultura menurut Lokasi di DKI Jakarta Tahun 2024 152
Gambar 3.43. Jumlah peternak menurut Jenis Ternak di DKI Jakarta Tahun 2023-2025 153
Gambar 3.44. Data Kebun Bibit dan Agrowisata 154
Gambar 3.45. Persentase Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan Tahun 2023-2024 155
Gambar 3.46. Persentase Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan Tahun 2023-2024 155
Gambar 3.47. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan Tahun 2023-2024 155
Gambar 3.48. Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian 156
Gambar 3.49. Data Ekspor Bersih Perdagangan 157
Gambar 3.50. Nilai Ekspor Nonmigas Provinsi DKI Jakarta 158
Gambar 3.51. Jumlah Ekspor dan Impor Barang DKI Jakarta, 2020-2024 (Juta USD) 158
Gambar 3.52. 10 (Sepuluh) Negara Tujuan Ekspor Tebesar 159
Gambar 3.53. 10 Negara Pengimpor Terbesar menurut Nilai FOB (USD) Tahun 2025 .. 160
Gambar 3.54. 10 Negara Tujuan Ekspor Terbesar menurut Nilai FOB (USD) Tahun 2025 161
Gambar 3.55. Sepuluh Komoditas Utama Ekspor dengan Nilai FOB Tertinggi Tahun 2025 162
Gambar 3.56. Sepuluh Komoditas Utama Impor dengan Nilai CIF Tertinggi Tahun 2025 162
Gambar 3.57. Jumlah Produksi Perikanan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 164
Gambar 3.58. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya menurut Wilayah DKI Jakarta Tahun 2023-2024 164
Gambar 3.59. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap menurut Pelabuhan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 165
Gambar 3.60. Jumlah Produksi dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan Tahun 2023-2024 165
Gambar 3.61. Jumlah Produksi Ikan Konsumsi di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2023-2024 166
Gambar 3.62. Jumlah Pekerja Nelayan dan Nelayan Pemilik di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 167
Gambar 3.63. Jumlah Kapal Perikanan yang Melakukan Bongkar Muat menurut Triwulan Tahun 2023-2024 167
Gambar 3.64. Data Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan (PPISHP), Balai Benih Ikan (BBI), dan Tempat Promosi Hasil Perikanan (TPHTP) (M3), Tahun 2023-2024 168
Gambar 3.65. Jumlah Kepatuhan pelaku Usaha kelautan dan Perikanan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 169
Gambar 3.66. Persentase kebutuhan Usaha Kelautan dan Perikanan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 169
Gambar 3.67. Data Kawasan Lindung Perairan DKI Jakarta Tahun 2023-2024 170
Gambar 3.68. Indeks Kesehatan Laut di Wilayah Kewenangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 170
Gambar 3.69. Penyerapan Bahan Baku, Produksi Olahan dan Penggunaan Garam di Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) Muara Angke Tahun 2023 171

Gambar 3.70. Persentase Luasan Kawasan Perairan dan Pesisir yang Memiliki Ekosistem Pesisir Esensial dalam Kondisi Sedang dan Baik 171
Gambar 3.71. Data Luas Kawasan Konservasi yang Dipulihkan Kondisi Ekosistemnya Tahun 2022-2024 172
Gambar 3.72. Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023-2024 173
Gambar 3.73. Persentase Wilayah Tahan Pangan Tahun 2023-2024 174
Gambar 3.74. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) DKI Jakarta Tahun 2023-2024 174
Gambar 3.75. Persentase Ketersediaan Pangan menurut Jenis Pangan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 175
Gambar 3.76. Harga Rata-rata Bahan Pangan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 175
Gambar 3.77. Persentase Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 176
Gambar 3.78. Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 177
Gambar 3.79. Pemasukan dan Pengeluaran Stok Beras (Ton) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2025 177
Gambar 3.80. Stok Beras Periode Tiap Akhir Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2025 178
Gambar 3.81. Jumlah Populasi Ternak di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 178
Gambar 3.82. Data Rumah Potong Hewan (RPH) menurut Wilayah di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 179
Gambar 3.83. Jumlah Peserta Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi Tahun 2023-2024 180
Gambar 3.84. Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Tahun 2024 180
Gambar 3.85. Jumlah Wisatawan Memasuki Pintu Masuk Bandara menurut Semester Tahun 2023-2025 181
Gambar 3.86. Jumlah Pengunjung Event di DKI Jakarta menurut Penyelenggara Semester I Tahun 2025 182
Gambar 3.87. Jumlah Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pariwisata (Akomodasi Makan dan Minum) menurut Nilai Rupiah Tahun 2024-2025 183
Gambar 3.88. Persentase Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pariwisata (Akomodasi Makan dan Minum) menurut Nilai Rupiah Tahun 2024-2025 183
Gambar 3.89. Nilai Ketertarikan Masyarakat Terhadap Pariwisata DKI Jakarta Tahun 2024 184
Gambar 3.90. Jumlah Responden Ketertarikan Masyarakat Terhadap Pariwisata DKI Jakarta Tahun 2024 185
Gambar 3.91. Jumlah Wisatawan Memasuki Pintu Masuk Bandara menurut Triwulan Tahun 2023-2025 185
Gambar 3.92. Nilai Ketertarikan Masyarakat Terhadap Pariwisata DKI Jakarta Tahun 2024 186
Gambar 3.93. Jumlah Responden Ketertarikan Masyarakat Terhadap Pariwisata DKI Jakarta Tahun 2024 186
Gambar 3.94. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata menurut Bulan di DKI Jakarta Tahun 2025 187
Gambar 3.95. Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara di DKI Jakarta Tahun 2025 187
Gambar 3.96. Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara di DKI Jakarta Tahun 2025 188
Gambar 3.97. 10 Terbesar Wisatawan Mancanegara Berdasarkan Kebangsaan ke DKI Jakarta Tahun 2024-2025 188
Gambar 3.98. Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Bintang menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2024 dan 2025 189

Gambar 3.99. Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Nonbintang di DKI Jakarta Tahun 2024 190
Gambar 3.100. Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik menurut Bulan (Hari) di DKI Jakarta Tahun 2025 191
Gambar 3.101. Jumlah Rata-rata Lama Menginap Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara pada Hotel Berbintang di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 192
Gambar 3.102. Jumlah Halte Transjakarta menurut Wilayah DKI Jakarta, 2023-2024 ... 193
Gambar 3.103. Jumlah Titik Integrasi Antar Moda menurut Wilayah DKI Jakarta Tahun 2023-2024 193
Gambar 3.104. Jumlah Kendaraan Angkutan Umum yang Terintegrasi menurut Jenis Bus di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 194
Gambar 3.105. 10 Terbesar Kendaraan Angkutan Umum yang Terintegrasi menurut Jenis Bus di DKI Jakarta Tahun 2024 195
Gambar 3.106. Jumlah Pemasangan Rambu-rambu/Marka Jalan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024..... 195
Gambar 3.107. Jumlah Armada Bus Sekolah Tahun 2022-2024 196
Gambar 3.108. Luas Terminal Angkutan Jalan menurut Tipe dan Jenis Terminal 197
Gambar 3.109. Jumlah Penumpang Datang dan Penumpang Berangkat Angkutan Umum menurut Bulan DKI Jakarta Tahun 2024 197
Gambar 3.110. Jumlah Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut Wilayah di DKI Jakarta Tahun 2024-2025 198
Gambar 3.111. Jumlah Kendaraan Angkutan Jenis IV (Kendaraan Bermotor Umum Roda Tiga) Tahun 2018-2025 199
Gambar 3.112. Jumlah Kendaraan Umum di DKI Jakarta Tahun 2019-2024 199
Gambar 3.113. Indeks Fatalitas Kecelakaan Angkutan Umum Pertahun menurut Triwulan DKI Jakarta Tahun 2023-2025 200
Gambar 3.114. Jumlah Angkutan Massal Bus Rapid Transit menurut Tipe Bus di Provinsi DKI Jakarta, 2025 201
Gambar 3.115. Jumlah Armada Angkutan Perairan di Kepulauan Seribu Tahun 2022-2024 202
Gambar 3.116. Data Jumlah Lokasi Dermaga Penyebrangan Tahun 2024 203
Gambar 3.117. Operator Angkutan Perairan di Kepulauan Seribu Tahun 2023-2024 204
Gambar 3.118. Kecepatan Rata-rata di Ruas Jalan yang Dikenakan Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas pada Jam Sibuk menurut Wilayah Tahun 2024-2025 204
Gambar 3.119. Jumlah Perjalanan Penduduk Menggunakan Transportasi Publik Tahun 2023-2024 206
Gambar 3.120. Jumlah Armada Bus Transjakarta menurut Jenis Tipe Bus Tahun 2023-2024 207
Gambar 3.121. Jumlah Armada Bus Transjakarta menurut Jenis Bahan Bakar Tahun 2023-2024 207
Gambar 3.122. Jumlah Angkutan Umum Kapal Berangkat dan Tiba Berbasis Perairan Tahun 2025 208
Gambar 3.123. Jumlah Penumpang Naik dan Turun Angkutan Umum Kapal Berbasis Perairan Tahun 2025 208
Gambar 3.124. Jumlah Penumpang Angkutan Umum yang Terlayani per Hari menurut Jenis Angkutan Umum di DKI Jakarta Tahun 2024-2025 209
Gambar 3.125. Jumlah Penumpang Angkutan Umum yang Terlayani Perhari menurut bulan di DKI Jakarta Tahun 2024-2025 210
Gambar 3.126. Jumlah Bus Transjakarta yang Beroperasi menurut Jenis Layanan di DKI Jakarta Tahun 2024-2025 210

Gambar 3.127. Jumlah Penumpang Bus Transjakarta yang Beroperasi menurut Jenis Layanan di DKI Jakarta Tahun 2024-2025 211
Gambar 3.128. Jumlah Penumpang *Mass Rapid Transit* (MRT) menurut Bulan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 212
Gambar 3.129. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi DKI Jakarta, 2025 213
Gambar 3.130. Pencari Kerja Terdaftar menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di DKI Jakarta Tahun 2022-2024 214
Gambar 3.131. Jumlah Peserta Pelatihan dan Peserta Tersertifikasi menurut Unit Kerja Tahun 2023 - 2024 215
Gambar 3.132. Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang Mendapatkan Sertifikat Kompetensi di DKI Jakarta Tahun 2023 - 2024 216
Gambar 3.133. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Reguler) Tahun 2023 216
Gambar 3.134. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat *(Mobile Training Unit)* Tahun 2023 217
Gambar 3.135. Jumlah Pencari Kerja yang Berwirausaha DKI Jakarta Tahun 2024-2025 217
Gambar 3.136. Jumlah Tenaga Kerja Formal yang Ditempatkan menurut Tahun 2023-2024 218
Gambar 3.137. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di DKI Jakarta Tahun 2022-2024 219
Gambar 3.138. Data Hubungan Industrial menurut Jumlah Perusahaan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2025 220
Gambar 3.139. Data Hubungan Industrial menurut Jumlah Pekerja di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2025 220
Gambar 3.140. Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja menurut Jenis Perselisihan Sengketa Tahun 2024-2025 221
Gambar 3.141. Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja menurut Suku Dinas DKI Jakarta Tahun 2025 221
Gambar 3.142. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Modal Asing di DKI Jakarta Tahun 2020-2025..... 222
Gambar 3.143. Perkembangan Penanaman Modal Asing DKI Jakarta Tahun 202-2025 . 222
Gambar 3.144. Data Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2023-2025 223
Gambar 3.145. Jumlah Proyek Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut Jumlah Proyek 2023-2025 224
Gambar 3.146. Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2023-2025..... 225
Gambar 3.147. Sepuluh Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 2023-2025 226
Gambar 3.148. Jumlah Usaha Jasa Makanan dan Minuman Pariwisata yang Memiliki Perizinan Tahun 2023-2024 227
Gambar 3.149. Jumlah Usaha Jasa Perjalanan Wisata Pariwisata yang Memiliki Perizinan Tahun 2023-2024..... 227
Gambar 3.150. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Perusahaan Jasa Perjalanan Wisata menurut Wilayah DKI Jakarta Tahun 2023-2024 228
Gambar 3.151. Jumlah Usaha SPA yang Memiliki Perizinan..... 229
Gambar 3.152. Jumlah Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Pariwisata yang Memiliki Perizinan..... 229
Gambar 3.153. Jumlah Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran Pariwisata..... 230
Gambar 3.154. Persentase Promosi Proyek-proyek di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 230

Gambar 3.155. Data Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Online menurut Triwulanan 2022-2025 231
Gambar 3.156. Jumlah IMB Bangunan dan Retrubusi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024 232
Gambar 3.157. Jumlah Retribusi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024 232
Gambar 3.158. Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan menurut Jenis Penggunaan Tahun 2024 233
Gambar 3.159. Jumlah Retribusi menurut Jenis Penggunaan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024 234
Gambar 3.160. Realisasi Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2022-2024 234
Gambar 3.161. Persentase Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menurut Triwulan Tahun 2023-2025 235
Gambar 4.1. 10 Kapasitas Terbesar Pengolahan Air Minum yang Beroperasi menurut Nama Instalasi Pengolahan Air DKI Jakarta Tahun 2023-2024 252
Gambar 4.2. Persentase Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak Tahun 2023-2024 253
Gambar 4.3. Jumlah Lokasi Pembangunan Jaringan Tata Air dan Pemeliharaan Saluran Air/Darurat/Rawan menurut Wilayah di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 254
Gambar 4.4. Data Kedalaman Muka Air Tanah Pada Sumur Pantau menurut Lokasi DKI Jakarta Tahun 2024-2025 255
Gambar 4.5. Data Kedalaman Muka Air Tanah Pada Sumur Pantau di 5 (lima) Wilayah menurut Bulan DKI Jakarta Tahun 2023-2024 256
Gambar 4.6. Pertumbuhan Pendapatan Usaha di DKI Jakarta Tahun 2022-2024 257
Gambar 4.7. Luas Tempat Pemakaman Umum (TPU) di DKI Jakarta Tahun 2024 258
Gambar 4.8. Data Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tahun 2023-2024 258
Gambar 4.9. Jumlah Tempat Pemakaman Umum menurut Wilayah Tahun 2023-2024 259
Gambar 4.10. Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun menurut Jenis Makam 2023-2024 260
Gambar 4.11. Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kabupaten Kepulauan Seribu menurut Jenis Taman Tahun 2023-2024 260
Gambar 4.12. Jumlah Rumah Susun yang Dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 261
Gambar 4.13. Jumlah Unit, Blok, dan Tower Rumah Susun yang Dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 262
Gambar 4.14. Data Rumah Susun yang Dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta 263
Gambar 4.15. Jumlah Tower dan Blok Rumah Susun Sederhana menurut Lokasi Luas Area Tipe dan Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 264
Gambar 4.16. Jumlah Rumah Susun Sederhana menurut Wilayah di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 265
Gambar 4.17. Persentase Rusun Terhuni dan Layak Huni di DKI Jakarta Tahun 2022-2024 266
Gambar 4.18. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh DKI Jakarta Tahun 2022-2024 267
Gambar 4.19. Jumlah Luas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang ditingkatkan 268

Gambar 4.20. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak 269
Gambar 4.21. Persentase Unit Hunian Layak yang Terbangun Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024 270
Gambar 4.22. Data Jalur Hijau Kota menurut Wilayah di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 271
Gambar 4.23. Jumlah Pelanggan dan Volume Air Bersih yang Disalurkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 272
Gambar 4.24. Data Capaian Uraian Kerja Pelayanan Air Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) menurut Triwulan I dan III Tahun 2025 273
Gambar 4.25. Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi DKI Jakarta, 2025 274
Gambar 4.26. Persentase Rumah Tangga dengan Status Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di DKI Jakarta Tahun 2024 274
Gambar 4.27. Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Tahun 2024 275
Gambar 4.28. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di DKI Jakarta Tahun 2024 276
Gambar 4.29. Persentase Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di DKI Jakarta menurut Wilayah Administrasi Tahun 2024 276
Gambar 4.30. Data Hutan Kota di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2023-2024 277
Gambar 4.31. Data Taman Kota DKI Jakarta Tahun 2024 278
Gambar 4.32. Jumlah Pohon Pelindung menurut Jenisnya di Provinsi DKI Jakarta 279
Gambar 4.33. Jumlah Pohon Pelindung menurut Jenisnya di Provinsi DKI Jakarta 280
Gambar 4.34. Data Rasio Elektrifikasi 281
Gambar 4.35. Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik menurut Wilayah DKI Jakarta Tahun 2022-2024 282
Gambar 4.36. Jumlah Pelanggan Listrik PLN (Juta) di Provinsi DKI Jakarta 283
Gambar 4.37. Jumlah Pelanggan Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Juta) di Indonesia Tahun 2018-2024 283
Gambar 4.38. Persentase Bauran Energi Terbarukan Tahun 2023-2024 284
Gambar 4.39. Jumlah Rumah Tangga Terpasang Listrik dan Pelanggan Listrik Terpasang Elektrifikasi di Kepulauan Seribu Tahun 2022-2024 285
Gambar 4.40. Rasio Elektrifikasi di Kepulauan Seribu Tahun 2022-2024 285
Gambar 4.41. Jumlah Pelanggan dan Jumlah Daya Terjual menurut Cabang di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 286
Gambar 4.42. Jumlah Pelanggan Listrik menurut Unit Pelayanan Pelanggan di Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 2018-2025 287
Gambar 4.43. Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Pemilahan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 288
Gambar 4.44. Persentase Penanganan Sampah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 289
Gambar 4.45. Persentase Pengelolaan Sampah menurut Wilayah DKI Jakarta Tahun 2024 290
Gambar 4.46. Persentase Pengurangan Sampah menurut Wilayah DKI Jakarta Tahun 2023-2024 291
Gambar 4.47. Jumlah Lokasi Saringan Sampah Sungai di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 291
Gambar 4.48. 10 Terbesar Lokasi Saringan Sampah Sungai di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 292

Gambar 4.49. Jumlah Pengumpulan Sampah B3 Rumah Tangga menurut Wilayah DKI Jakarta Tahun 2024-2025 293
Gambar 4.50. Jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) di DKI Jakarta 2022-2024 294
Gambar 4.51. Jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) menurut Jenis Tipe di DKI Jakarta 2022-2024 294
Gambar 4.52. Jumlah Hasil Penimbangan Sampah Masuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang menurut Ritasi Tahun 2023-2025 295
Gambar 4.53. Data Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 296
Gambar 4.54. Data Kualitas Air Teluk dan Laut Berdasarkan Jenis Lokasi dan Kondisi Permukaan Air Laut Tahun 2024 297
Gambar 4.55. Kualitas Air Teluk dan Laut Berdasarkan Kondisi Permukaan Air Laut Tahun 2023-204 298
Gambar 4.56. Jumlah Penegakan Hukum Lingkungan menurut Wilayah DKI Jakarta Tahun 2022-2024 299
Gambar 4.57. Jumlah Penambahan Jumlah Fauna yang Dikonservasi menurut Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 300
Gambar 5.1. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) di DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2020-2025 305
Gambar 5.2. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) menurut Kota/Kabupaten di DKI Jakarta 2024-2025 305
Gambar 5.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Tahun 2020-Maret 2025 306
Gambar 5.4. Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) di DKI Jakarta Tahun 2020-Maret 2025 307
Gambar 5.5. Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan (Rupiah/Kapita/Bulan) di DKI Jakarta Tahun 2020-Maret 2025 307
Gambar 5.6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di DKI Jakarta Tahun 2020- Maret 2025 308
Gambar 5.7. Jumlah Anak Usia 4-18 Tahun Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Sekolah (APS) di DKI Jakarta Tahun 2024 309
Gambar 5.8. Persentase Jumlah Anak Usia 4-18 Tahun Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Sekolah (APS) di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 309
Gambar 5.9. Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia di DKI Jakarta Tahun 2024 310
Gambar 5.10. Jumlah Guru di Bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia di DKI Jakarta Tahun 2024 310
Gambar 5.11. Jumlah Murid di Bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia di DKI Jakarta Tahun 2024 311
Gambar 5.12. Jumlah Siswa Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di DKI Jakarta Tahun 2024 311
Gambar 5.13. Jumlah Siswa Putus Sekolah menurut Kota/Kabupaten di DKI Jakarta Tahun 2024 312
Gambar 5.14. Jumlah Guru Sekolah pada Pendidikan Dasar dan Menengah di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 313
Gambar 5.15. Jumlah Murid Sekolah pada Pendidikan Dasar dan Menengah di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 313
Gambar 5.16. Jumlah Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Sekolah (APS) di DKI Jakarta 2024 314

Gambar 5.17. Persentase Anak Usia 16-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Sekolah (APS) di DKI Jakarta 2023-2024 314
Gambar 5.18. Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Sekolah (APS) di DKI Jakarta 2024 315
Gambar 5.19. Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Sekolah (APS) di DKI Jakarta 2023-2024 316
Gambar 5.20. Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di DKI Jakarta 2024 316
Gambar 5.21. Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di DKI Jakarta 2023-2024..... 317
Gambar 5.22. Jumlah Guru Profesional di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 317
Gambar 5.23. Jumlah Guru Profesional Bersertifikasi di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 318
Gambar 5.24. Persentase Guru Profesional Bersertifikasi di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 319
Gambar 5.25. Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Negeri Terakreditasi A menurut Jenjang Pendidikan di DKI Jakarta Tahun 2024 319
Gambar 5.26. Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Swasta Terakreditasi A menurut Jenjang Pendidikan di DKI Jakarta Tahun 2024 320
Gambar 5.27. Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) Memenuhi Kompetensi Minimum di DKI Jakarta Tahu 2022-2024..... 321
Gambar 5.28. Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) Memenuhi Kompetensi Minimum di DKI Jakarta Tahun 2023-2024..... 321
Gambar 5.29. Jumlah Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di DKI Jakarta 322
Gambar 5.30. Jumlah Penduduk Usia 7-15 Tahun di DKI Jakarta..... 322
Gambar 5.31. Jumlah Sekolah pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di DKI Jakarta Tahun 2023-2024..... 323
Gambar 5.32. Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun di DKI Jakarta Tahun 2023-2024.... 323
Gambar 5.33. Rasio Perbandingan Antara Jumlah Sekolah Jenjang SMA dan SMK dengan Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun di DKI Jakarta..... 324
Gambar 5.34. Jumlah Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sesuai Jenis Serapan Lulusan di DKI Jakarta..... 324
Gambar 5.35. Persentase Hasil dari Perbandingan Antara Jumlah Lulusan SMK Sesuai Jenis Serapan Lulusan dengan Jumlah Lulusan SMK Seluruh Jenis Serapan Lulusan di DKI Jakarta..... 325
Gambar 5.36. Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMA/SMK/MA, SMP/MTs..... 325
Gambar 5.37. Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi DKI Jakarta..... 326
Gambar 5.38. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024..... 326
Gambar 5.39. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 327
Gambar 5.40. Jumlah Kelulusan Sekolah Peserta Didik yang Menyelesaikan Pendidikan di DKI Jakarta 327
Gambar 5.41. Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di DKI Jakarta Tahun 2024..... 328
Gambar 5.42. Jumlah Sekolah Terakreditasi menurut Jenjang Pendidikan di DKI Jakarta Tahun 2024 328
Gambar 5.43. Jumlah Sekolah Penerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP) menurut Jenjang Pendidikan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 329

Gambar 5.44. Jumlah Sekolah Penerima Biaya Operasional Sekolah (BOS) menurut Jenjang Pendidikan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 330
Gambar 5.45. Jumlah Sekolah Penerima Biaya Operasional Sekolah (BOS) menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan di DKI Jakarta Tahun 2024..... 330
Gambar 5.46. Jumlah Siswa Berkebutuhan Khusus Bersekolah menurut Jenjang Pendidikan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 331
Gambar 5.47. Jumlah Siswa Inklusi Berkebutuhan Khusus Bersekolah menurut Status Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2024..... 331
Gambar 5.48. Jumlah Sekolah yang Sudah Menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di DKI Jakarta Tahun 2024..... 331
Gambar 5.49. Jumlah Sekolah yang Sudah Menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus menurut Status Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2024..... 332
Gambar 5.50. Jumlah Sekolah dengan Status Akreditasi di DKI Jakarta Tahun 2024..... 332
Gambar 5.51. Jumlah Sekolah dengan Status Akreditasi menurut Status Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2024 333
Gambar 5.52. Harapan Lama Sekolah (HLS) di DKI Jakarta Tahun 2022-2024 334
Gambar 5.53. Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin di DKI Jakarta Tahun 2024..... 334
Gambar 5.54. Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin di DKI Jakarta Tahun 2020-2025 335
Gambar 5.55. Angka Partisipasi Murni (APM) di DKI Jakarta 2023-2025 335
Gambar 5.56. Angka Partisipasi Kasar (APK) di DKI Jakarta 2023-2025 336
Gambar 5.57. Data Kartu Jakarta Pintar Plus Provinsi DKI Jakarta..... 336
Gambar 5.58. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar menurut Kelas di DKI Jakarta Tahun 2024 .. 338
Gambar 5.59. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar menurut Status RS di DKI Jakarta Tahun 2024..... 338
Gambar 5.60. Jumlah Sasaran dan Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan yang Mencapai Target di DKI Jakarta Tahun 2024 339
Gambar 5.61. Data Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang Mencapai Target di DKI Jakarta Tahun 2024 339
Gambar 5.62. Jumlah Rumah Bersalin menurut Wilayah di DKI Jakarta Tahun 2023 – 2024..... 340
Gambar 5.63. Jumlah Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Epidemiologi < 24 Jam di DKI Jakarta Tahun 2024..... 341
Gambar 5.64. Sepuluh Kelurahan Terbanyak mengalami KLB yang dilakukan Epidemiologi < 24 Jam di DKI Jakarta Tahun 2024 341
Gambar 5.65. Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di DKI Jakarta Tahun 2024 343
Gambar 5.66. Jumlah Kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di DKI Jakarta Tahun 2023-2024..... 343
Gambar 5.67. Jumlah Klinik per Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024..... 345
Gambar 5.68. Jumlah Klinik per Kecamatan menurut Status Kepemilikan dan Jenis Klinik di DKI Jakarta Tahun 2024..... 345
Gambar 5.69. Jumlah Rumah Sakit dengan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan di DKI Jakarta Tahun 2024 346
Gambar 5.70. Jenis Rumah Sakit dengan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus Diberikan Sarana Kesehatan di DKI Jakarta Tahun 2022-2024 346
Gambar 5.71. Jumlah Keluarga Ketuk Pintu Layani dengan Hati (KPLDH) yang Dikunjungi dan Diintervensi di DKI Jakarta Tahun 2024 347
Gambar 5.72. Nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS) di DKI Jakarta Tahun 2024..... 347

Gambar 5.73. Jumlah Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standard di Provinsi DKI Jakarta 348
Gambar 5.74. Jumlah Pos Pelayanan Terpadu di DKI Jakarta Tahun 2024 349
Gambar 5.75. Jumlah Puskesmas Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta 350
Gambar 5.76. Jenis Tenaga Kesehatan yang Kompeten di DKI Jakarta Tahun 2024 350
Gambar 5.77. Jumlah Tenaga Penunjang Kesehatan yang kompeten di DKI Jakarta Tahun 2024 351
Gambar 5.78. Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit menurut Jenis Kelas Rumah Sakit di DKI Jakarta Tahun 2024 352
Gambar 5.79. Jumlah SDM yang Menerapkan *Hospitality* sesuai standar dalam Pelayanan DKI Jakarta 353
Gambar 5.80. Jumlah Tenaga Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta 353
Gambar 5.81. Jumlah Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standard di Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta 353
Gambar 5.82. Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 354
Gambar 5.83. Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik PEMPROV DKI Jakarta 355
Gambar 5.84. Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar berdasarkan jenis kelaminnya di KDI Jakarta Tahun 2024 356
Gambar 5.85. Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standard di DKI Jakarta tahun 2023-2024 357
Gambar 5.86. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 357
Gambar 5.87. Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Melaksanakan Revitalisasi pelayanan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 358
Gambar 5.88. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 359
Gambar 5.89. Jumlah Jenis Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis, Umum dan Gigi di DKI Jakarta Tahun 2025 360
Gambar 5.90. Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 360
Gambar 5.91. Jumlah Deteksi Dini Hepatitis B bagi Ibu Hamil (Bumil) di DKI Jakarta Tahun 2024 361
Gambar 5.92. Jumlah Deteksi Dini Hepatitis B bagi Ibu Hamil (Bumil) Jenis Reaktif dan Non Reaktif di DKI Jakarta Tahun 2024 362
Gambar 5.93. Jumlah kasus AFP Nonpolio yang dilaporkan di DKI Jakarta periode Tahun 2022-2024 363
Gambar 5.94. Jumlah kasus pelaporan akibat keracunan pada waktu tertentu di DKI Jakarta tahun 2024 363
Gambar 5.95. Jumlah Kecamatan yang terjangkit akibat keracunan di DKI Jakarta Tahun 2024 364
Gambar 5.96. Jumlah Kasus Penderita Tuberkulosis (TBC) di DKI Jakarta Tahun 2024 .. 364
Gambar 5.97. Jumlah Kasus Potensi Wabah Penyakit di DKI Jakarta Tahun 2024 365
Gambar 5.98. Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam Program *Direct Observed Treatment Short* (DOTS) di DKI Jakarta Tahun 2024 366
Gambar 5.99. Jumlah Kematian Ibu Hamil di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 367
Gambar 5.100. Cakupan Jumlah Puskesmas dengan Ketersediaan ≥ 80% Obat dan Vaksin Essensial di DKI Jakarta Tahun 2024 368
Gambar 5.101. Jumlah Ibu Hamil dengan Komplikasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standard di DKI Jakarta Tahun 2024 368

Gambar 5.102. Data Pasien Tuberkulosis (TB) yang Meninggal di DKI Jakarta Tahun 2024 369
Gambar 5.103. Jumlah Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Demam Berdarah di DKI Jakarta Tahun 2024 370
Gambar 5.104. Jumlah Penderita HIV/AIDS di DKI Jakarta tahun 2022-2024 371
Gambar 5.105. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobat dan Sembuh dengan Program DOTS di DKI Jakarta Tahun 2024 372
Gambar 5.106. Jumlah Suspek Kasus Campak menurut Jenis Kelamin di DKI Jakarta Tahun 2024 373
Gambar 5.107. Jumlah Kasus Demam Berdarah menurut Jenis Kelamin di DKI Jakarta Tahun 2024 374
Gambar 5.108. Jumlah Kasus Diare menurut Kategori Usia di DKI Jakarta Tahun 2024 375
Gambar 5.109. Jumlah Kasus Penyakit Hepatitis di DKI Jakarta tahun 2024 375
Gambar 5.110. Jumlah Kasus Penyakit Pneunomia berdasarkan Jenis Kelamin di DKI Jakarta Tahun 2024 376
Gambar 5.111. Jumlah Kasus Penyakit Tyhpoid Jenis Kelamin di DKI Jakarta Tahun 2024 377
Gambar 5.112. Jumlah Kasus Positif Covid-19 di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 378
Gambar 5.113. Jumlah Penemuan Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat di DKI Jakarta Tahun 2024 379
Gambar 5.114. Sepuluh Kecamatan Terbanyak Penemuan Kusta Baru Tanpa Cacat di DKI Jakarta Tahun 2024 379
Gambar 5.115. Proporsi UKBM Aktif di DKI Jakarta Tahun 2024 380
Gambar 5.116. Total Kasus Sembuh dan Meninggal Covid-19 di DKI Jakarta Tahun 2024 381
Gambar 5.117. Total Vaksin Covid-19 di DKI Jakarta tahun 2024 382
Gambar 5.118. Jumlah Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 382
Gambar 5.119. Tiga Penyakit Menular Terbanyak di DKI Jakarta Tahun 2025 383
Gambar 5.120. Jumlah Penyakit Menular Terbanyak di DKI Jakarta Tahun 2025 384
Gambar 5.121. Jumlah Kematian Ibu pada proses persalinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 385
Gambar 5.122. Jumlah Kematian Ibu Hamil di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 386
Gambar 5.123. Jumlah Kematian Bayi Neonatal dan Post Neonatal di DKI Jakarta Tahun 2024 387
Gambar 5.124. Sepuluh Jenis Penyakit Terbanyak Rawat Jalan di Puskesmas DKI Jakarta Tahun 2024 388
Gambar 5.125. Sepuluh Penyakit Terbanyak Rawat Jalan di RSUD DKI Jakarta Tahun 2024 388
Gambar 5.126. Persentase Balita Kurus yang telah mendapatkan PMT di DKI Jakarta Tahun 2024 389
Gambar 5.127. Jumlah Balita 0-59 Bulan yang ditimbang di DKI Jakarta Tahun 2024 389
Gambar 5.128. Jumlah Balita Berat Badan Kurang (BB/U) di DKI Jakarta Tahun 2024 390
Gambar 5.129. Pelayanan Kesehatan Balita Berusia 0-59 Bulan Sesuai Standar menurut Jenis Kelamin di DKI Jakarta Tahun 2024 390
Gambar 5.130. Jumlah balita gizi buruk menurut kelompok usia di DKI Jakarta Tahun 2024 391
Gambar 5.131. Jumlah Perkiraan dan Realisasi Penemuan Pneunomia Balita di DKI Jakarta Tahun 2024 392
Gambar 5.132. Persentase Realisasi Penemuan Pneunomia Balita di DKI Jakarta Tahun 2024 392

Gambar 5.133. Data Bayi Usia 0-6 Bulan Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif Tahun 2024 393
Gambar 5.134. Cakupan Kunjungan Bayi yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di DKI Jakarta Tahun 2024..... 393
Gambar 5.135. Sepuluh Kecamatan Terbanyak Kunjungan Ibu Hamil Antenatal Keempat (K4) di DKI Jakarta Tahun 2024 394
Gambar 5.136. Jumlah Ibu Hamil dengan Komplikasi yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar di DKI Jakarta Tahun 2024..... 395
Gambar 5.137. Jumlah Kunjungan Ibu Nifas Pasca Melahirkan di DKI Jakarta Tahun 2024..... 396
Gambar 5.138. Jumlah Cakupan Imunisasi Dasar pada Bayi menurut Jenis Kelamin di DKI Jakarta Tahun 2024 396
Gambar 5.139. Jumlah cakupan imunisasi dasar pada bayi menurut jenis kelamin di DKI Jakarta Tahun 2024 397
Gambar 5.140. Jumlah Balita dan Balita ditimbang di DKI Jakarta Tahun 2024 398
Gambar 5.141. Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Belanja Daerah (PBI APBD) yang telah dilakukan validasi di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 398
Gambar 5.142. Jumlah kelahiran Bayi Hidup menurut Kota/Kabupaten di DKI Jakarta Tahun 2022-2024..... 399
Gambar 5.143. Data pelayanan kesehatan balita Berusia 0-59 bulan sesuai standar di DKI Jakarta Tahun 2024..... 400
Gambar 5.144. Jumlah Penduduk DKI Jakarta yang menjadi Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan di wilayah DKI Jakarta tahun 2024..... 401
Gambar 5.145. Jumlah Penduduk DKI Jakarta yang menjadi Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menurut jenisnya di DKI Jakarta 401
Gambar 5.146. Jumlah Penjaringan Kesehatan Siswa Sekolah Dasar (SD) Tahun 2024... 402
Gambar 5.147. Persentase Anak Sekolah yang Imunisasi menurut Kategori Imunisasi di DKI Jakarta Tahun 2024..... 403
Gambar 5.148. Hasil Imunisasi Bacilus Calmetter Guerin (BCG) dan Dipheri Pertusis Tetaus (DPT) Bayi di Puskesmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024..... 404
Gambar 5.149. Data Imunisasi Polio Bayi di Puskesmas DKI Jakarta Tahun 2024 405
Gambar 5.150. Hasil Imunisasi Wanita Usia Subur menurut Kategori Suntik di Puskesmas Provinsi DKI Jakarta..... 406
Gambar 5.151. Jumlah Jenis Fasilitas Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ... 407
Gambar 5.152. Jumlah Kasus Penyakit menurut Jenis Penyakit di DKI Jakarta Tahun 2023-2025 407
Gambar 5.153. Jumlah Capaian ABAT Program Edukasi HIV/AIDS di DKI Jakarta..... 408
Gambar 5.154. Jumlah Capaian ABAT Program Edukasi HIV/AIDS di DKI Jakarta Tahun 2022-2024 408
Gambar 5.155. Jumlah Capaian ABAT Program Edukasi HIV/AIDS untuk Kaum Muda menurut Kota/Kabupaten di DKI Jakarta Tahun 2022-2024 409
Gambar 5.156. Jumlah Kondisi Bayi Lahir di DKI Jakarta Tahun 2023 – 2024..... 410
Gambar 5.157. Persentase Alasan Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Tidak Berobat Jalan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025..... 411
Gambar 5.158. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 412
Gambar 5.159. Jumlah Kasus Diare di DKI Jakarta Tahun 2024..... 413
Gambar 5.160. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selaam Sebulan Terakhir di DKI Jakarta Tahun 2023-2025 414

Gambar 5.161. Jumlah Kesesuaian Panduan Rancang Kota Sistem Pusat Pelayanan dengan Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit di DKI Jakarta 415
Gambar 5.162. Persentanse Kesesuain Panduan Rancang Kota Sistem Pusat Pelayanan dengan Pedoman Kawasan Berorientasi Transit Provinsi DKI Jakarta 415
Gambar 5.163. Jumlah Lokasi Halte menurut Jenis Halte di DKI Jakarta Tahun 2022-2024 416
Gambar 5.164. Data Lokasi Jalan *Flyover/Underpass* menurut Wilayah di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 417
Gambar 5.165. Data Lokasi Jembatan Penyeberangan Orang di DKI Jakarta Tahun 2024 417
Gambar 5.166. Panjang Jalan (Km) berdasarkan klasifikasi Provinsi di DKI Jakarta Tahun 2022-2024 418
Gambar 5.167. Persentase Panjang Jalan dengan kondisi mantap di Provinsi DKI Jakarta 419
Gambar 5.168. Jalur Pedestrian yang dilengkapi Fasilitas Pendukung pada Lokasi Transportasi Massal di DKI Jakarta 419
Gambar 5.169. Persentase Jalur Pedestrian yang dilengkapi Fasilitas Pendukung pada Lokasi Transportasi Massal Provinsi DKI Jakarta 420
Gambar 5.170. Status Aspirasi Masyarakat dari Forum Musrenbang/Rembuk RW di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 421
Gambar 5.171. Angka Harapan Hidup menurut Kota/Kabupaten dan Jenis Kelamin di DKI Jakarta Tahun 2024 422
Gambar 5.172. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial Provinsi DKI Jakarta Semester 2 2024 422
Gambar 5.173. Jumlah Binaan Pusat Santunan Keluarga Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 423
Gambar 5.174. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 424
Gambar 5.175. Jumlah Kapasitas Panti Sosial Loka Bina Karya di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 424
Gambar 5.176. Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menurut Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 425
Gambar 5.177. Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menurut Kecamatan di provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 425
Gambar 5.178. Jumlah Petugas Pembantu Keluarga Berencana Daerah (PPKB) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 426
Gambar 5.179. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial menurut Jenisnya di DKI Jakarta Tahun 2024 426
Gambar 5.180. Jumlah Kapasitas Panti Sosial Loka Binaan Karya menurut Jenis Binaan Di Provinsi DKI Jakarta 427
Gambar 5.181. Jumlah Kapasitas Panti Sosial Loka Bina Karya menurut Jenis Binaan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 427
Gambar 5.182. Data Struktur dan Benda Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya yang Dilindungi 428
Gambar 5.183. Data Museum di Provinsi DKI Jakarta 429
Gambar 5.184. Data Koleksi Museum 429
Gambar 5.185. Data Sanggar Seni Budaya 430
Gambar 5.186. Data Sanggar Seni Budaya di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 431
Gambar 5.187. Data Penyelenggaraan Pergelaran Seni dan Budaya 432
Gambar 5.188. Data Kegiatan Kepemudaan di Provinsi DKI Jakarta 433
Gambar 5.189. Data Kegiatan Kepemudaan di Provinsi DKI Jakarta 434

Gambar 5.190. Data Nama Atlet Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar 434
Gambar 5.191. Data Paskibraka Provinsi DKI Jakarta 435
Gambar 5.192. Jumlah Fasilitas Olahraga menurut Jenisnya 436
Gambar 5.193. Jumlah Fasilitas Olahraga menurut Jenisnya 437
Gambar 5.194. Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi 438
Gambar 5.195. Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi 438
Gambar 5.196. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Lembaga Masyarakat yang Melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan di DKI Jakarta Tahun 2024 439
Gambar 5.197. Jumlah Daftar Kampung Keluarga Berkualitas di DKI Jakarta Tahun 2022-2024 440
Gambar 5.198. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melayani Keluarga Berencana (KB) di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 440
Gambar 5.199. Jumlah Jenis Fasilitas Kesehatan yang Melayani Keluarga Berencana (KB) di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 441
Gambar 5.200. Jumlah Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa di Provinsi DKI Jakarta 442
Gambar 5.201. Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 443
Gambar 5.202. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di DKI Jakarta Tahun 2022-2024 .. 443
Gambar 5.203. Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif menurut Bulan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 444
Gambar 5.204. Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) Baru menurut Bulan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 444
Gambar 5.205. Peserta Keluarga Berencana Baru menurut Metode Kontrasepsi di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 445
Gambar 5.206. *Age Specific Fertility Rate* (Kelompok Umur 15-19 Tahun) di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 446
Gambar 5.207. Jumlah Keluarga yang Diintervensi Kesenjangan Gender dan Anak 446
Gambar 5.208. Jumlah Kekerasan Terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan yang Dialami di DKI Jakarta Tahun 2024 447
Gambar 5.209. Jumlah Korban Terhadap Perempuan Dewasa menurut Jenis Kekerasan yang Dialami di DKI Jakarta Tahun 2024 448
Gambar 5.210. Persentase Pembinaan kepada Perempuan dan Anak dalam Keluarga untuk Meningkatkan Kualitas Keluarga 448
Gambar 5.211. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa di DKI Jakarta 449
Gambar 5.212. Jumlah Perpustakaan Sekolah, Ibadah, dan Perguruan Tinggi di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 450
Gambar 5.213. Jumlah Perpustakaan Umum di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 451
Gambar 5.214. Jumlah Taman Bacaan Masyarakat di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 451
Gambar 5.215. Jumlah Judul Buku dan Eksemplar berdasarkan Wilayah di Perpustakaan DKI Jakarta Tahun 2024 452
Gambar 5.216. Jumlah Judul Buku dan Eksemplar berdasarkan Jenis Buku di Perpustakaan DKI Jakarta Tahun 2024 452
Gambar 5.217. Nilai Indeks Tingkat Kegemaran Membaca di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024 453
Gambar 5.218. Jumlah Komunitas Perpustakaan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 453
Gambar 5.219. Jumlah Taman Bacaan Masyarakat di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 454
Gambar 5.220. Jumlah Perpustakaan Berbasis Teknologi di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 454

Gambar 5.221. Jumlah Pengguna Jasa Perpustakaan Keliling di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 455
Gambar 5.222. Daftar Armada Perpustakaan Keliling di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024 455
Gambar 5.223. Daftar Kondisi Kendaraan Armada Perpustakaan Keliling di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024 456
Gambar 5.224. Jumlah Pengunjung Perpustakaan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 456
Gambar 5.225. Jumlah Anggota Perpustakaan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 457
Gambar 5.226. Jumlah Masyarakat yang Dilayani Terkait dengan Kearsipan Baik Konsultasi Arsip, Penyelamatan Arsip, serta Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip di DKI Jakarta Tahun 2024-Juli 2025 457
Gambar 5.227. Jumlah Jenis Layanan Masyarakat yang Dilayani Terkait dengan Kearsipan Baik Konsultasi Arsip, Penyelamatan Arsip, serta Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip di DKI Jakarta Tahun 2024-Juli 2025458
Gambar 5.228. Daftar Titik Layanan Perpustakaan Keliling menurut Wilayah Administrasi di DKI Jakarta Tahun 2023-2024 458
Gambar 5.229. Jumlah Arsip Statis yang Telah Dialihmediakan ke Dalam Format Digital di DKI Jakarta Semester I Tahun 2024, Semester II Tahun 2024, Semester I Tahun 2025 459

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Letak Geografis Kota dan Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 6
Tabel 1.2. Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah Tahun 2023-2024 7
Tabel 1.3. umlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis Keselamatan Bangunan di DKI Jakarta 8
Tabel 1.4. Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau Tahun 2023-2024 8
Tabel 1.5. Jumlah Bangunan Gedung yang Ramah Disabilitas Tahun 2023-2024 9
Tabel 1.6. Jumlah Bidang Tanah Milik Masyarakat yang Terinventarisasi dan Terfasilitasi dalam Rangka Perencanaan Penggunaan Tanah untuk Mendukung Peningkatan Sertifikasi di Kawasan Pemukiman Tahun 2023-2024 10
Tabel 2.1. Indeks Sistem Merit Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 28
Tabel 2.2. Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tahun 2024 28
Tabel 2.3. Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah Tahun 2023-2024 29
Tabel 2.4. Nilai Dimensi Keanekaragaman dan Kolaborasi Tahun 2023-2024 30
Tabel 2.5. Kerja Sama yang Terimplementasi Tahun 2022-2024 30
Tabel 2.6. Persentase Kerjasama Dalam Negeri yang Terimplementasi Tahun 2023-2024 30
Tabel 2.7. Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Terimplementasi Tahun 2023-2024 30
Tabel 2.8. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Kelompok Umur di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 34
Tabel 2.9. Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 36
Tabel 3.1. Persentase Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi 126
Tabel 3.2. Persentase Koperasi Konvensional yang Bertransformasi Digital (Modern) Tahun 2023 134
Tabel 3.3. Tabel Nama Lokasi Agrowisata yang Dikembangkan Tahun 2024 184
Tabel 3.4. Data Pelabuhan di DKI Jakarta Tahun 2024 202
Tabel 5.1. Status Penerima Imunisasi Wanita Usia Subur Tahun 2024 406



01

Geografi Dan Demografi

GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI JAKARTA

Luas wilayah:
660.98 km²



BATAS WILAYAH

Utara	: Laut Jawa
Barat	: Provinsi Banten
Selatan	: Provinsi Jawa Barat
Timur	: Provinsi Jawa Barat

LETAK GEOGRAFIS

LU	: -5.202.416
LS	: -6.372.626
BB	: 106.390.448
BT	: 106.973.391

P — JAKARTA PUSAT — 47,57 KM²

WNI	1.049.860	526.834	523.026
WNA	1.217	731	486

U — JAKARTA UTARA — 147,21 KM²

WNI	1.828.806	919.938	908.868
WNA	1.995	1.144	851

B — JAKARTA BARAT — 125,00 KM²

WNI	2.553.188	1.283.287	1.269.901
WNA	1.443	880	563

S — JAKARTA SELATAN — 144,94 KM²

WNI	2.323.644	1.159.371	1.164.273
WNA	3.048	2.043	1.005

T — JAKARTA TIMUR — 185,54 KM²

WNI	3.224.519	1.616.429	1.608.090
WNA	780	548	232

KS — KEP. SERIBU — 10,72KM²

WNI	30.497	15.431	15.066
WNA	0	0	0

1.1. Karakteristik Wilayah

Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan pusat perekonomian, pemerintahan, dan kebudayaan di Indonesia. Terletak di pesisir barat laut Pulau Jawa, provinsi ini memiliki luas 660,98 km², menjadikannya sebagai provinsi dengan wilayah terkecil di Indonesia. Namun, luas yang terbatas ini tidak mengurangi signifikansinya sebagai pusat kegiatan nasional dan internasional.

Wilayah DKI Jakarta terbagi menjadi dua bagian, yakni daratan dan kepulauan, dengan wilayah Kepulauan Seribu sebagai satu-satunya kabupaten administrasi yang terpisah daratan utama.

Secara administratif, DKI Jakarta terdiri dari lima kota administrasi, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, serta satu kabupaten administrasi Kepulauan Seribu. Setiap wilayahnya memiliki karakteristik tersendiri yang mendukung perkembangan sosial dan ekonomi kota. Misalnya, Jakarta Pusat sebagai pusat pemerintahan, hingga Jakarta Utara dengan peran strategisnya dalam perdagangan melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Dari sisi geografis, posisi DKI Jakarta membuatnya beriklim tropis dengan suhu rata-rata 28 – 31° C serta dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau, yang secara langsung memengaruhi pola kehidupan masyarakat. Kondisi geografis ini juga menempatkan DKI Jakarta dalam tantangan besar terkait isu lingkungan, seperti banjir akibat curah hujan tinggi dan kenaikan permukaan air laut. Sebagai kota metropolitan dengan daya tarik ekonomi yang kuat, DKI Jakarta mengalami urbanisasi yang pesat, menjadikannya salah satu kota dengan penduduk terpadat. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) DKI Jakarta pada tahun 2025 mencapai 11.010.514 jiwa, dengan 8.481 jiwa penduduk Warga Negara Asing (WNA). Secara total, jumlah penduduk WNI serta WNA di DKI Jakarta yakni 11.018.997 jiwa.

Secara historis, status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta. Namun, dengan diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, peran Jakarta sebagai ibu kota akan berakhir setelah pemindahan resmi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hingga saat ini, pemerintahan pusat masih beroperasi di Jakarta, dengan gubernur dan wakil gubernur sebagai pemimpin eksekutif yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dengan peran strategisnya, DKI Jakarta tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan nasional, meskipun tantangan kepadatan penduduk urbanisasi, serta isu lingkungan terus menjadi perhatian utama dalam pembangunan berkelanjutan.



1.1.1. Kondisi Geografis

Secara astronomis, DKI Jakarta berada di bagian barat laut pulau Jawa, dengan titik koordinat -5.202416 LU - -6.372626 LS dan 106.390448 BB – 106.973391 BT. Dataran di DKI Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan titik tertinggi pada 79 mdpl. Luas DKI Jakarta sendiri adalah 661,21 km². Sementara jika dilihat dari perbatasan, DKI Jakarta berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten di sebelah barat, Kota Depok Provinsi Jawa Barat di sebelah selatan, dan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat di sebelah timur.

Secara geologis, dataran di DKI Jakarta terdiri dari endapan *pleistocene* yang terdapat pada kurang lebih 50m di bawah permukaan tanah. Dataran Jakarta juga tergolong ke dalam dataran aluvial pantai dan sungai. Dataran ini mempunyai bentang alam datar, sungai *bermeander* (sungai yang mempunyai alur berbelok-belok, sehingga hampir menyerupai huruf "S" berulang), yang sebelumnya merupakan dataran rawa, balik rawa pantai, laguna, ataupun rawa belakang akibat limpasan yang melampaui tanggul alam. Berlokasi di Pulau Jawa yang dilewati cincin api *(ring of fire),* Jakarta rentan akan bencana alam seperti banjir, penurunan muka tanah *(land subsidence),* hingga gempa bumi. Sebagai kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, DKI Jakarta juga rawan akan bencana non-alam seperti kebakaran.

Meskipun merupakan provinsi terkecil di Indonesia, secara administratif, DKI Jakarta termasuk provinsi yang cukup luas. Hal ini terbukti dengan banyaknya kelurahan dan kecamatan yang terdapat di DKI Jakarta. Pada tahun 2024, terdapat setidaknya 1 kabupaten administrasi, 5 kota administrasi, 44 kecamatan, 267 kelurahan, 2.748 RW, dan 30.511 RT di seluruh DKI Jakarta. Jumlah kecamatan dan kelurahan terbanyak adalah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan dengan jumlah yang sama dengan 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Sedangkan jumlah RW dan RT terbanyak ada di Jakarta Timur, dengan detail 712 RW dan 7.953 RT.



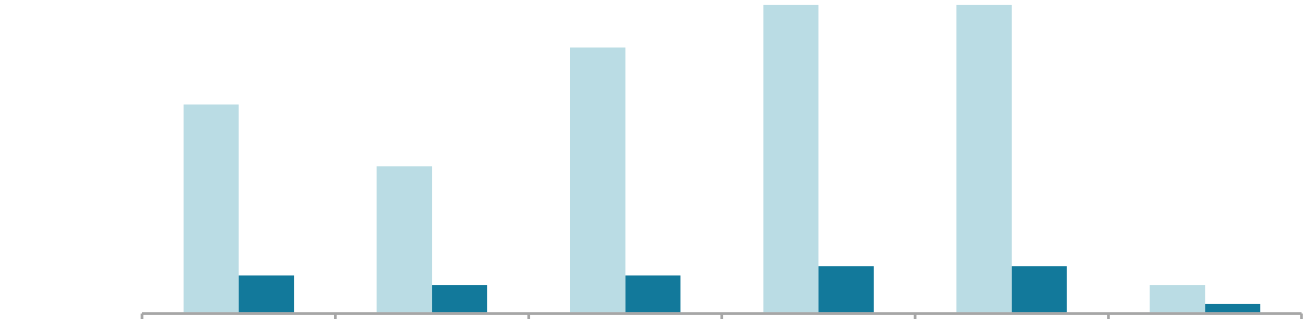
Gambar 1.1. Luas Wilayah Menurut Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (Km²)

	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Luas Wilayah	47,93	147,13	125,38	144,75	185,07	10,95

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Setiap kota administrasi di DKI Jakarta memiliki karakteristik geografis dan pemanfaatan lahan yang berbeda. Jakarta Timur tercatat sebagai kota administrasi dengan wilayah terluas, diikuti oleh Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, sedangkan Jakarta Pusat menjadi yang terkecil. Sementara itu, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu memiliki luas wilayah yang paling kecil dibandingkan kota-kota lainnya, dengan karakteristik kepulauan yang tersebar di perairan utara Jakarta sebanyak 112 pulau.

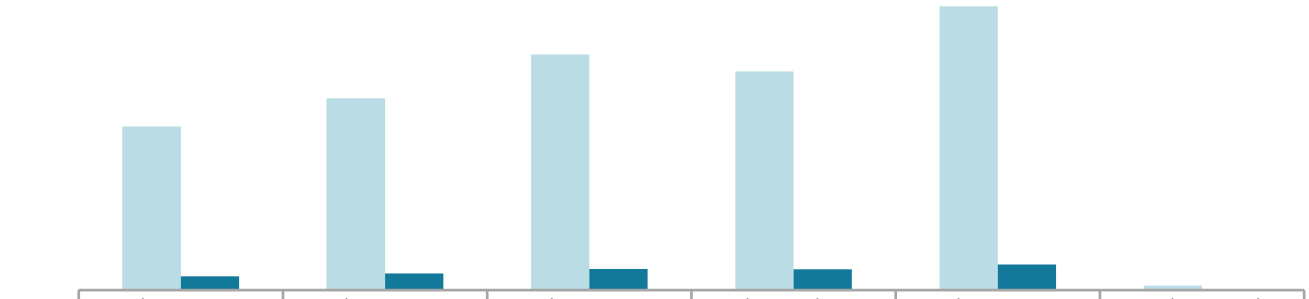
Gambar 1.2. Jumlah Kelurahan dan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Kelurahan	44	31	56	65	65	6
Kecamatan	8	6	8	10	10	2

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 1.3. Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
RT	4.533	5.315	6.525	6.058	7.953	127
RW	386	460	587	579	712	24

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Pada perhitungan tahun 2024, Kecamatan Tanah Abang merupakan kecamatan yang terluas di Jakarta Pusat dengan 9,30 km². Cempaka Putih merupakan yang terkecil dengan 2,38 km². Terdapat total 8 kecamatan, 44 kelurahan, 386 RW, dan 4.533 RT di Jakarta Pusat. Kemudian di Jakarta Utara, terdapat 6 kecamatan, 31 kelurahan, 460 RW, dan 5.315 RT. Kecamatan terluas di Jakarta Utara adalah Penjaringan dengan 45,41 km², dan yang terkecil adalah Pademangan dengan 11,92 km².

Bergeser ke Jakarta Barat, terdapat 8 kecamatan dengan yang terluas adalah Kalideres (30,23 km2) dan yang terkecil adalah Tambora dengan 5,40 km². Terdapat 56 kelurahan, 587 RW, 6.525 RT di wilayah administratif ini. Sedangkan di Jakarta Selatan, Pasar Minggu merupakan yang terluas dengan 15,35 km² dan Setiabudi merupakan yang terkecil dengan 6,26 km². Terdapat 10 kecamatan, 65 kelurahan, 579 RW, dan 6.058 RT di kota ini.

Sementara Jakarta Timur, yang merupakan wilayah administratif yang terluas di Provinsi DKI Jakarta, memiliki 10 kecamatan dengan Cakung sebagai yang terluas (42,28 km²) dan Matraman sebagai yang terkecil dengan 4,88 km². Terdapat 65 kelurahan, 712 RW, dan 7.953 RT. Kemudian di Kepulauan Seribu, terdapat 2 kecamatan dengan yang terbesar adalah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara (6,88 km²) dan Kepulauan Seribu Selatan yang terkeci (4,07 km²). Terdapat 6 kelurahan, 24 RW, dan 127 RT di wilayah ini.

1.1.2. Wilayah Administrasi

Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki luas wilayah yang relatif kecil dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Meskipun memiliki luas yang terbatas, tingkat pemanfaatan lahan di Jakarta sangat tinggi, mencerminkan kepadatan aktivitas ekonomi, perumahan, serta infrastruktur perkotaan. DKI Jakarta pun memiliki struktur administrasi yang unik, dengan pemerintahannya yang terbagi pada lima kota administrasi, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur serta Kabupaten Kepulauan Seribu. Tidak seperti provinsi lain di Indonesia, DKI Jakarta tidak memiliki pemerintahan daerah tingkat dua berupa kabupaten dan kota yang dipimpin oleh bupati atau wali kota, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai gantinya, kota dan kabupaten administratif berada langsung di bawah kewenangan gubernur.

Tabel 1.1. Letak Geografis Kota dan Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

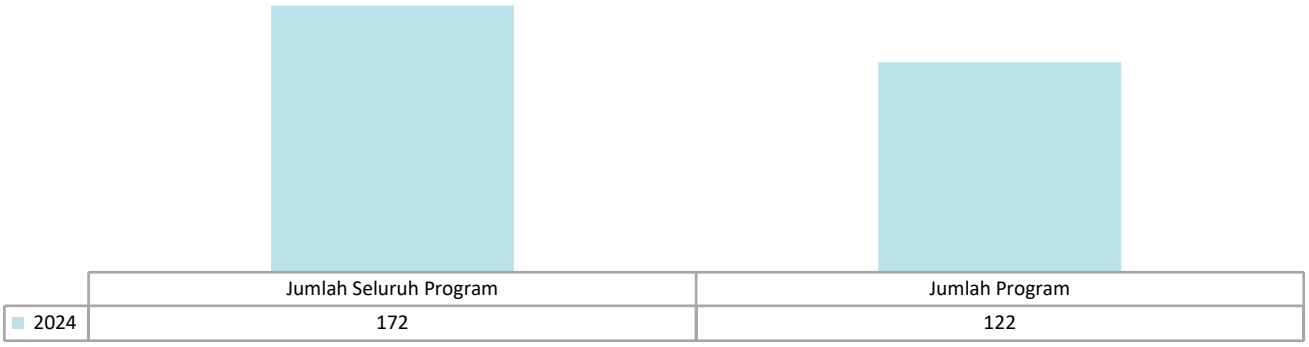
Kota/Kabupaten	Lintang Utara	Lintang Selatan	Bujur Barat	Bujur Timur
Jakarta Pusat	-6.135.322	-6.229.305	106.791.862	106.881.125
Jakarta Utara	-6.074.112	-6.183.112	106.711.462	106.972.581
Jakarta Barat	-6.095.579	-6.225.213	106.685.805	106.828.310
Jakarta Selatan	-6.202.699	-6.364.743	106.736.782	106.866.842
Jakarta Timur	-6.152.824	-6.372.626	106.838.274	106.973.391
Kepulauan Seribu	-5.202.416	-6.040.184	106.390.448	106.847.793

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan Provinsi DKI Jakarta

Jakarta Pusat sebagai wilayah terkecil dan pusat pemerintahan terletak pada koordinat lintang sekitar –6.135.322 hingga –6.229.305 serta bujur 106.791.862 hingga 106.881.125. Sementara itu, Jakarta Timur yang merupakan kota dengan luas wilayah terbesar berada di koordinat –6.152.824 hingga –6.372.626 serta 106.838.274 hingga 106.973.391. Jakarta Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan memiliki peran penting dalam aktivitas pelabuhan dan industri maritim, memiliki rentang lintang –6.074.112 hingga –6.183.112 serta bujur 106.711.462 hingga 106.972.581. Jakarta Barat dan Jakarta Selatan yang merupakan pusat permukiman dan perdagangan, masing-masing terletak pada koordinat lintang dan bujur yang mencerminkan perbedaan pola pemanfaatan lahan di kedua wilayah tersebut. Berbeda dari lima kota administratif lainnya, Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki letak geografis yang lebih utara, dengan rentang koordinat –5.202.416 hingga –6.040.184 pada lintang serta 106.390.448 hingga 106.847.793 pada bujur. Dalam konteks pembangunan perkotaan sendiri, pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi indikator utama dalam memastikan tata kota yang terstruktur dan berkelanjutan.



Gambar 1.4. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2024



Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Data di tabel di atas menunjukkan kesesuaian pemanfaatan ruang dihitung dengan membandingkan luas penggunaan lahan pada sub zona yang sesuai dengan pelaksanaan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang (ITBX) dengan luas subzona dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Terdapat 122 program yang terdapat kesesuaian dari total 172 program. Selanjutnya, jaminan kepastian hukum atas tanah sering kali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah DKI Jakarta. Selain di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, tidak jarang sengketa lahan kerap kali terjadi antar pemangku kepentingan. Tanah yang belum dilakukan penyertifikatan cenderung memiliki banyak konflik pertanahan. Maka dari itu, dikatakan bahwa pentingnya memiliki sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Untuk mengurangi bahkan menghilangkan konflik tersebut, sertifikasi menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi warga, sekaligus mendukung penataan lingkungan permukiman agar lebih tertata dan berkelanjutan.

Tabel 1.2. Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah Tahun 2023-2024

Tahun	Jumlah Penyelesaian	Jumlah Target
2023	1.036	1.036
2024	21.228	21.228

Sumber: Kanwil Badan Pertahanan Nasional Provinsi DKI Jakarta

Sertifikat tanah dalam data ini dapat berupa sertifikat hak atas tanah perorangan, kepemilikan tanah bersama, SKBG, dan HM Sarusun. Baik tahun 2023 dan 2024, persentase penyelesaian sertifikasi tanah tembus 100%. Jumlah target pada tahun 2024 juga meningkat signifikan hingga lebih dari 21 kali. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2024, lokasi meliputi seluruh wilayah DKI Jakarta, tidak terbatas pada kampung kota.

Adapun kampung-kampung yang menjadi sasaran program ini antara lain Kampung Krapu, Kampung Tongkol, Kampung Lodan, Kampung Akuarium, Kampung Kunir, Kampung Rawa Barat, Kampung Rawa Timur, serta beberapa kampung lainnya.

Tabel 1.3. Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis Keselamatan Bangunan di DKI Jakarta

Periode Data	Jumlah Bangunan	Jumlah Sesuai Standar
2024	16	16

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya adalah data bangunan gedung pemda dan gedung nonpemda dengan tinggi bangunan di atas 8 lantai yang merupakan bangunan gedung baru yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan. Di Jakarta, terdapat total 16 bangunan yang terdaftar dan semuanya sudah sesuai dengan standar. Dengan kata lain, 100% gedung-gedung tersebut sudah sesuai dengan standar. Perhitungan kinerja didapat dengan membandingkan jumlah bangunan gedung baru yang memenuhi standar teknis keselamatan dibagi jumlah pembangunan gedung di tahun berjalan dan dikali 100%.

Salah satu indikator penting dalam mewujudkan kota yang lebih ramah lingkungan adalah penerapan kaidah Bangunan Gedung Hijau (BGH). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengamanatkan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung secara nasional untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Selanjutnya pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 21 Tahun 2021 Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau disebutkan bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau di Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Tabel 1.4. Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau Tahun 2023-2024

Periode Data	Jumlah Gedung	Jumlah Gedung Hijau
2023	1.550	129
2024	1.550	141

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan Provinsi DKI Jakarta

Bangunan yang memenuhi standar BGH di atas mencakup gedung milik Pemda maupun non-Pemda. Standar ini mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan material bangunan yang efisien, pengelolaan limbah konstruksi, penerapan teknologi hemat energi, serta optimalisasi pencahayaan dan ventilasi alami. Di DKI Jakarta sendiri, pada tahun 2024 terdapat 1.550 jumlah gedung yang tersebar di seluruh wilayah. Jumlah ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9,10% atau sekitar 141 gedung merupakan gedung hijau. Jumlah ini naik 9,30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan jumlah bangunan yang ramah disabilitas guna memastikan bahwa fasilitas publik maupun swasta dapat diakses oleh semua orang tanpa hambatan. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu pemantauan terhadap jumlah bangunan yang telah menerapkan standar aksesibilitas menjadi indikator penting dalam mewujudkan kota yang lebih inklusif dan ramah bagi semua.





Tabel 1.5. Jumlah Bangunan Gedung yang Ramah Disabilitas Tahun 2023-2024

Tahun	Jumlah Gedung	Jumlah Gedung Ramah Disabilitas
2023	1.550	129
2024	1.550	141

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Jumlah gedung yang ramah disabilitas sama persis dengan jumlah gedung hijau. Bangunan yang dikategorikan ramah disabilitas mencakup infrastruktur yang dirancang untuk memudahkan akses bagi individual dengan keterbatasan fisik. Ini termasuk jalur landai, pintu otomatis, area parkir khusus, lift dengan tombol braille (tombol yang menggunakan kombinasi titik timbul, digunakan untuk membantu orang dengan gangguan penglihatan), toilet khusus, serta sistem navigasi yang lebih ramah bagi pengguna kursi roda maupun tunanetra, seperti *guiding block*.

Guiding block sendiri merupakan markah yang sengaja dipasang untuk membantu penyandang disabilitas, khususnya penyandang tunanetra ketika berjalan menuju sebuah bangunan publik. *Guiding block* sendiri memiliki dua tekstur, yakni garis-garis dan bulat, yang mana keduanya mempunyai fungsi masing-masing. Tertera dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan menjelaskan bahwa tekstur yang terdapat pada *guiding block* dibuat bukan tanpa alasan. Tekstur garis-garis sendiri diartikan sebagai petunjuk arah perjalanan yang aman dilalui, sementara tekstur bulat ditujukan sebagai peringatan terhadap perubahan di sekitar jalan menuju bangunan yang dilewati.

Tabel 1.6. Jumlah Bidang Tanah Milik Masyarakat yang Terinventarisasi dan Terfasilitasi dalam Rangka Perencanaan Penggunaan Tanah untuk Mendukung Peningkatan Sertifikasi di Kawasan Pemukiman Tahun 2023-2024

Tahun	Jumlah Rencana	Jumlah Inventarisasi
2023	3.908	3.908
2024	3.908	3.908

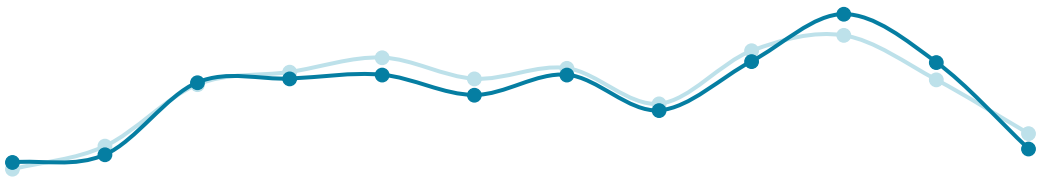
Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Kemudian, terdapat 3.908 jumlah rencana bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dari 3.908 terencana. Bidang tanah yang dimaksud adalah bidang tanah milik masyarakat yang berada di dalam area kampung kota sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 878 Tahun 2018 dan kampung lainnya.

1.1.3. Iklim dan Cuaca

Sebagai negara dengan iklim tropis, Indonesia diberkahi suhu yang relatif stabil sepanjang tahun. Termasuk di DKI Jakarta. Pergerakan suhu antara satu musim dengan musim lain bisa dibilang tidak terlalu drastis. Iklim tropis menyebabkan wilayah DKI Jakarta hanya memiliki dua musim: panas (kemarau) dan hujan. Kedua musim tersebut tentu saja berkaitan dengan suhu minimum dan maksimum yang terjadi setiap tahunnya.

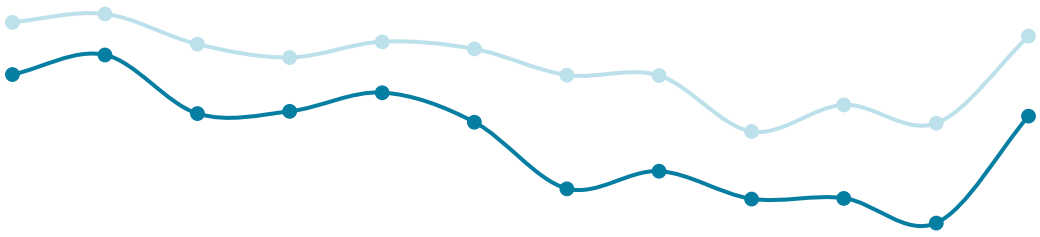
Gambar 1.5. Rata-rata Suhu Udara (°C) Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2024



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Tanjung Priok	28,08	28,32	28,96	29,09	29,24	29,02	29,13	28,76	29,31	29,47	29,01	28,45
Kemayoran	28,15	28,23	28,98	29,02	29,06	28,85	29,06	28,69	29,20	29,69	29,19	28,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Gambar 1.6. Rata-rata Kelembaban Udara (%) Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2025



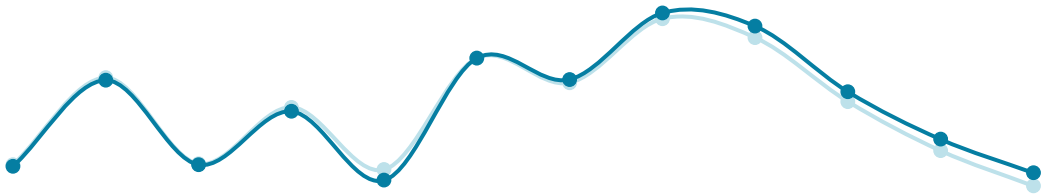
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Tanjung Priok	81,91	82,37	80,67	79,92	80,81	80,40	78,93	78,90	75,75	77,25	76,22	81,12
Kemayoran	78,96	80,07	76,76	76,88	77,94	76,27	72,52	73,50	71,94	71,98	70,58	76,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada awal tahun, kelembaban udara berada dalam kisaran yang cukup tinggi, terutama pada bulan Februari yang menjadi puncak kelembaban tertinggi dalam tahun tersebut. Persentase kenaikan 0,46% di Stasiun Pengamatan Tanjung Priok dan 1,11% di Stasiun Pengamatan Kemayoran. Sebaliknya, periode dengan tingkat kelembaban terendah tercatat pada September di Stasiun Pengamatan Tanjung Priok (75,75%) dan November di Stasiun Pengamatan Kemayoran (70,58%).

Perbedaan kelembaban antara kedua lokasi ini dapat dikaitkan dengan karakteristik geografis. Tanjung Priok yang terletak di pesisir cenderung memiliki kelembaban udara yang lebih tinggi dibandingkan Kemayoran yang berada lebih ke dalam wilayah perkotaan. Tren penurunan kelembaban pun mulai terlihat sejak pertengahan tahun, terutama pada bulan Agustus hingga Oktober, sebelum akhirnya meningkat kembali menjelang Desember.

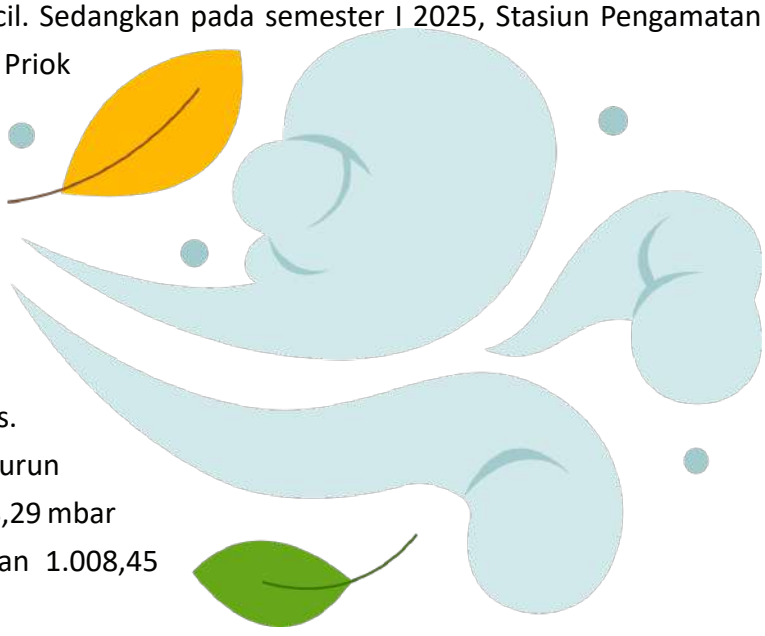
Gambar 1.7. Rata-rata Tekanan Udara (mbar) menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2024



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Tanjung Priok	1.008,55	1.009,61	1.008,56	1.009,25	1.008,49	1.009,85	1.009,55	1.010,33	1.010,10	1.009,32	1.008,72	1.008,29
Kemayoran	1.008,53	1.009,58	1.008,55	1.009,20	1.008,36	1.009,85	1.009,59	1.010,40	1.010,24	1.009,44	1.008,86	1.008,45

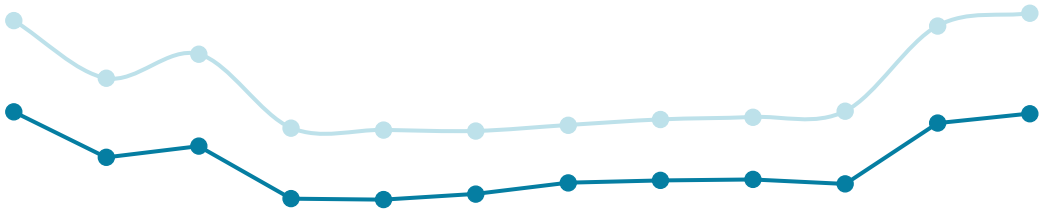
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Sama halnya dengan tren yang terlihat pada suhu udara dan kelembaban udara, tekanan udara di DKI Jakarta sepanjang tahun 2025 mengalami perubahan dari bulan ke bulan dengan pola yang khas di dua stasiun pengamatan. Tekanan udara di Kemayoran tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan Tanjung Priok pada Semester II 2025, meskipun memiliki selisih relatif kecil. Sedangkan pada semester I 2025, Stasiun Pengamatan Tanjung Priok mencatatkan angka tekanan udara yang sedikit lebih tinggi.



Pada awal tahun, tekanan udara tercatat stabil di atas 1.008,50 mbar dan mengalami kenaikan moderat pada Februari sebelum berfluktuasi hingga mencapai titik tertinggi pada Agustus. Setelahnya, tekanan udara berangsur turun hingga pada Desember mencatatkan 1.008,29 mbar di Stasiun Pengamatan Tanjung Priok dan 1.008,45 mbar pada Desember.

Gambar 1.8. Rata-rata Kecepatan Angin (mdet) menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2024

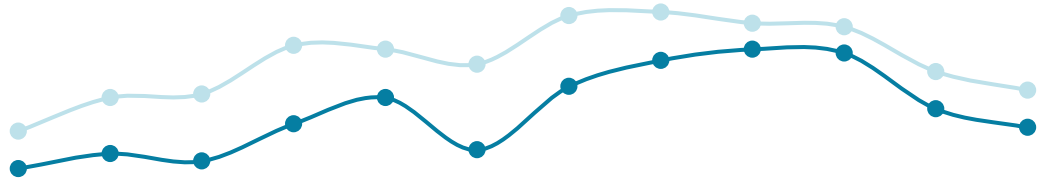


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Kemayoran	2,61	2,26	2,63	2,02	1,99	1,80	1,65	1,74	1,78	2,08	2,78	2,87
Tanjung Priok	4,93	3,63	3,95	2,45	2,42	2,58	2,90	2,97	3,00	2,87	4,61	4,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Kecepatan angin di DKI Jakarta pada tahun 2025 juga menunjukkan pola yang berbeda di dua stasiun pengamatan. Tanjung Priok mencatat kecepatan angin lebih tinggi dibandingkan dengan Kemayoran dengan selisih rata-rata hampir dua kali lipat. Embusan angin di Tanjung Priok pada awal tahun terbilang cukup kencang, sebelum mengalami penurunan pada bulan-bulan berikutnya. Kecepatan rendah pun terjadi pada pertengahan tahun, tepatnya di sekitar bulan April hingga Agustus. Kecepatan rata-rata terendah terjadi pada bulan Juni. Di Kemayoran, kecepatan angin cenderung lebih tenang dan stabil sepanjang tahun.

Gambar 1.9. Rata-rata Penyinaran Matahari (%) menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2024



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Tanjung Priok	3,50	4,40	4,50	5,80	5,70	5,30	6,60	6,70	6,40	6,30	5,10	4,60
Kemayoran	2,50	2,90	2,70	3,70	4,40	3,00	4,70	5,40	5,70	5,60	4,10	3,60

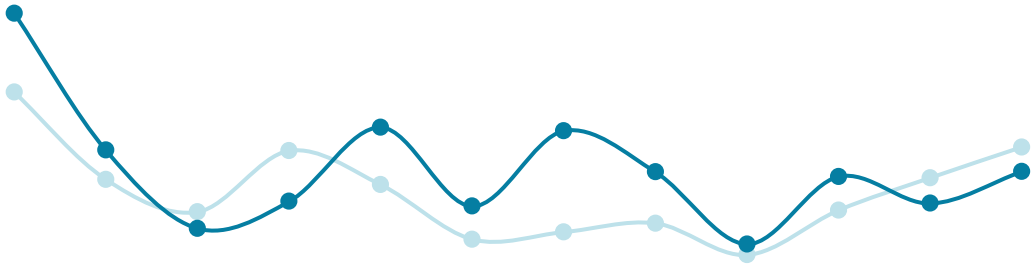
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada durasi penyinaran matahari di DKI Jakarta tahun 2024, Tanjung Priok secara konsisten mencatat durasi penyinaran yang lebih panjang dibandingkan Kemayoran, dengan perbedaan yang paling signifikan terjadi pada bulan-bulan pertengahan tahun.

Di awal tahun, intensitas sinar matahari relatif rendah di kedua lokasi, sebelum mulai mengalami peningkatan menjelang pertengahan tahun. Agustus menjadi periode dengan paparan matahari tertinggi di Tanjung Priok dengan 6,70 jam dan di Stasiun Pengamatan Kemayoran, paparan terlama terjadi pada September dengan 5,70 jam.

Secara keseluruhan, Kemayoran cenderung menerima lebih sedikit paparan sinar matahari dibandingkan dengan Tanjung Priok di hampir semua bulan. Pada bulan penyinaran paling optimal, Kemayoran masih mencatat durasi yang lebih rendah dibandingkan dengan Tanjung Priok.

Gambar 1.10. Curah Hujan (mm²) menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2024



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Tanjung Priok	379,40	203,20	137,70	261,10	192,70	82,40	97,00	114,80	50,90	141,10	206,50	268,60
Kemayoran	538,60	262,20	104,40	158,80	308,50	149,10	301,40	218,30	72,70	209,10	154,90	219,20

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Curah Hujan di DKI Jakarta sepanjang tahun 2025 memperlihatkan intensitas tertingginya pada awal dan akhir tahun ini, sementara periode pertengahan tahun mengalami penurunan drastis. Januari menjadi puncak musim hujan di kedua stasiun pengamatan, dengan jumlah curah hujan yang hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan bulan Maret. Bahkan, di Stasiun Pengamatan Kemayoran, curah hujan pada Januari lebih tinggi lebih dari lima kali yang terjadi pada Maret.

Tanjung Priok mencatat curah hujan yang cukup ekstrem pada Januari, sebelum mengalami penurunan signifikan memasuki Maret. Bahkan, pada Juni, curah hujan di wilayah ini hanya sekitar 21,24%% dari total curah hujan yang tercatat Januari.

1.2. Demografi

Demografi, merupakan studi statistik mengenai populasi manusia, terutama dalam kaitannya mengenai ukuran, kepadatan, distribusi, dan statistik vital lainnya (kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya). Akar dari demografi statistik dapat ditemukan dari hasil buah pikir John Graunt, seorang statistisi asal Britania Raya dalam karyanya berjudul *Natural and Political Observations Made upon the Bills of Mortality* yang terbit pada 1662[1]. Hingga saat ini, demografi menjadi sebuah elemen penting dalam statistika, terutama dalam data yang menyangkut kependudukan.

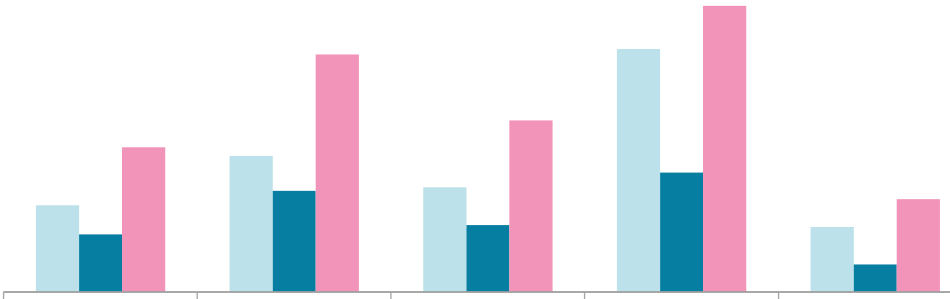
1.2.1. Kependudukan

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan wewenang Disdukcapil. Sepanjang tahun 2023, Disdukcapil merilis beberapa data, di antaranya jumlah penduduk WNI, WNA, kepadatan penduduk, piramida penduduk agama penduduk, dan sebagainya.

Berdasarkan data terbaru dari Disdukcapil, pada tahun 2025 tercatat adanya pola yang menarik dalam komposisi penduduk di berbagai wilayah administratif. Memperlihatkan bahwa komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di DKI Jakarta relatif seimbang, meskipun terdapat variasi jumlah di setiap wilayah administrasi.

1 Demography. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/demography. Diakses pada 20 Februari 2024, pukul 10.11 WIB.

Gambar 1.11. Jumlah Penduduk Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

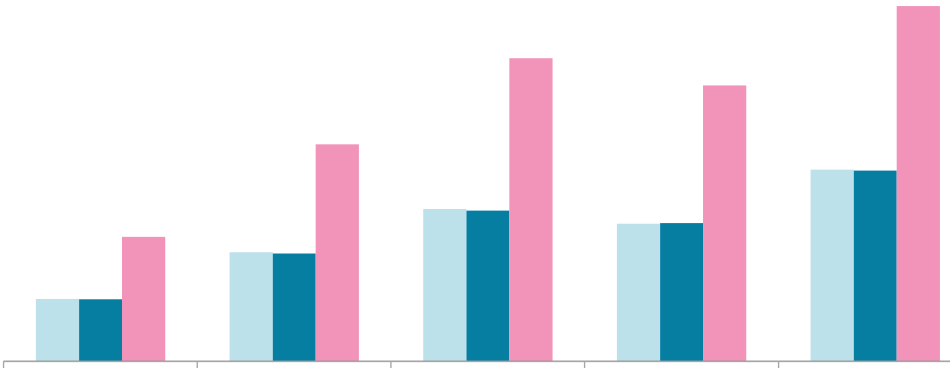


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Laki-laki	731	1.144	880	2.043	548	0
Perempuan	486	851	563	1.005	232	0
Jumlah	1.217	1.995	1.443	3.048	780	0

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Secara total, jumlah penduduk Warga Negara Asing (WNA) yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan dengan jumlah 5.346 jiwa berbanding 3.137 jiwa. Jakarta Selatan merupakan yang paling banyak terdapat WNA dengan 3.048 jiwa atau sekitar 35,93%, diikuti Jakarta Utara dengan 1.995 jiwa atau sekitar 23,52% dari total WNA.

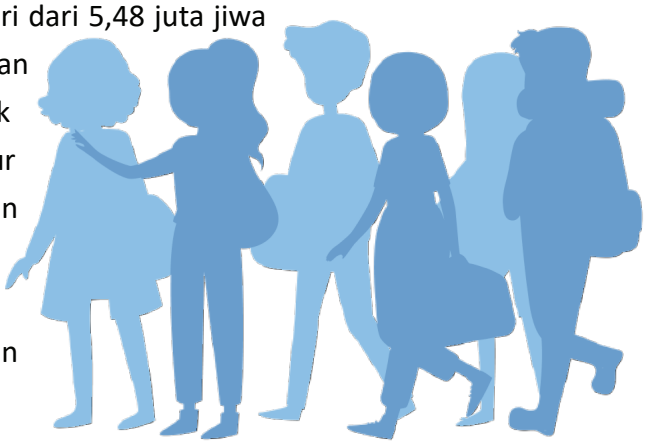
Gambar 1.12. Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Jenis Kelamin di Jakarta Tahun 2025



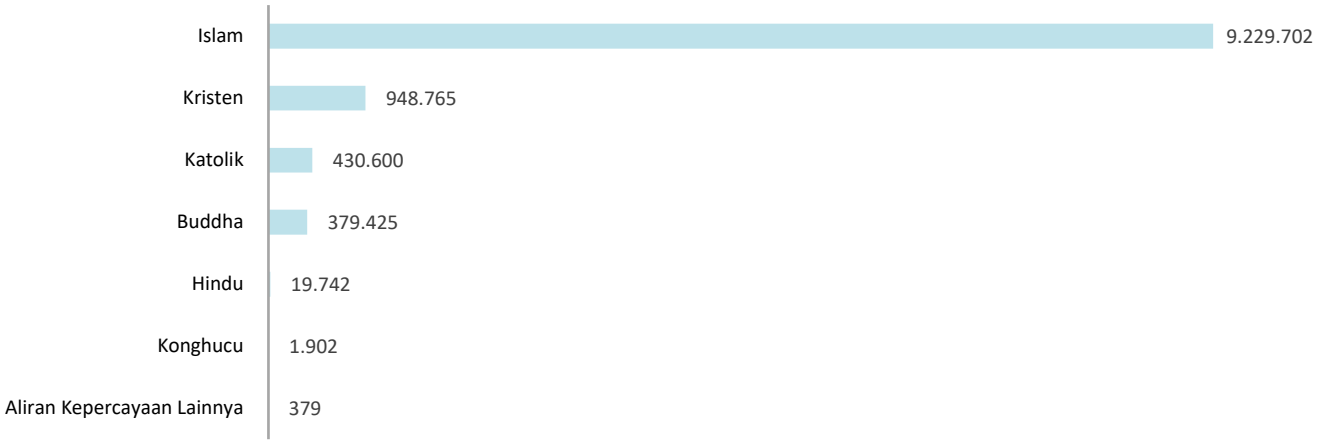
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Laki-laki	526.834	919.938	1.283.287	1.159.371	1.616.429	15.431
Perempuan	523.026	908.868	1.269.901	1.164.273	1.608.090	15.066
Jumlah	1.049.860	1.828.806	2.553.188	2.323.644	3.224.519	30.497

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya, jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) di DKI Jakarta adalah 11,01 juta orang yang terdiri dari 5,48 juta jiwa penduduk perempuan dan 5,52 juta jiwa penduduk laki-laki. Jakarta Timur merupakan wilayah dengan penduduk WNI terbanyak dengan 3,22 juta jiwa. Jakarta Barat memiliki selisih antara perempuan dan laki-laki paling banyak dengan 13.386 orang.



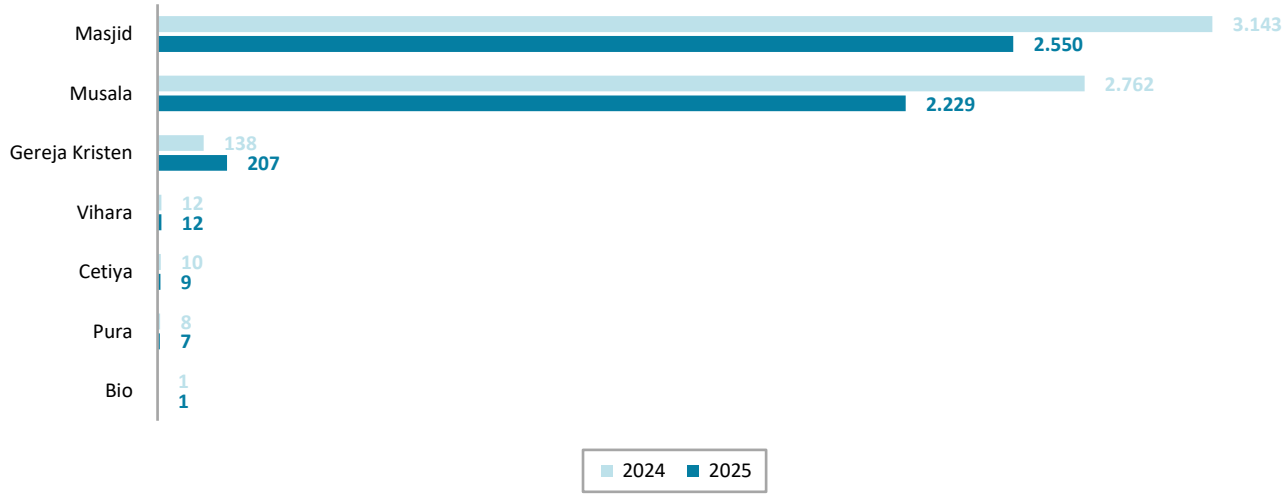
Gambar 1.13. Jumlah Penduduk di Provinsi DKI Jakarta menurut Agama dan Kepercayaan, Semester I 2025



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Terdapat enam agama yang diakui di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selain keenam agama tersebut, terdapat kepercayaan lain seperti Sunda Wiwitan, Kejawen, dan sebagainya. Di DKI Jakarta, mayoritas penduduk memeluk agama Islam dengan jumlah 9,22 juta pada semester I tahun 2025. Jumlah pemeluk agama Islam mencapai 83,83%, disusul beragama Kristen dengan 948.765 pemeluk atau 8,62% dan Katolik dengan 430.600 penduduk atau 3,91% dari total penduduk. Paling sedikit merupakan aliran kepercayaan lainnya dengan 379 pemeluk.

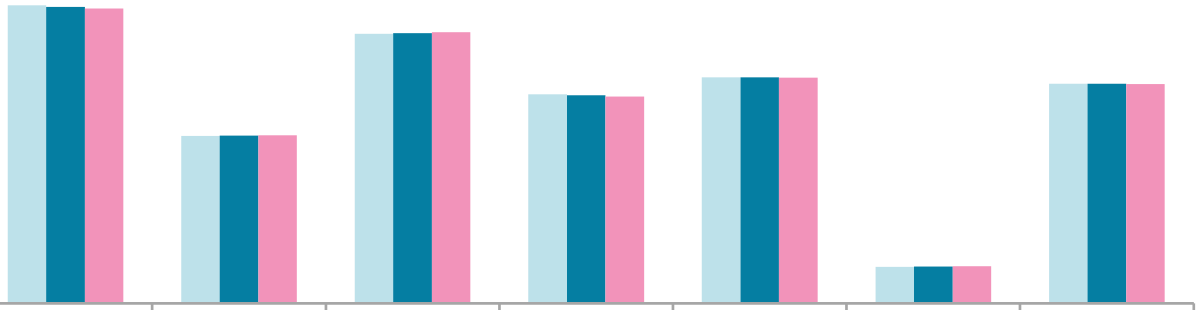
Gambar 1.14. Jumlah Rumah Ibadah di DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber: Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Sepanjang tahun 2024, jumlah rumah ibadah di DKI Jakarta adalah 6.074 dengan 51,75% di antaranya adalah Masjid atau sekitar 5.143 tempat, 45,47% di antaranya adalah Musala atau sekitar 2.762 tempat, dan 2,27% adalah Gereja Kristen atau sekitar 2,27%, dan seterusnya hingga beberapa tempat ibadah bagi agama Budha (Cikung Bio, Cetya, Vihara) dan Hindu (Ganesha Pooja, Sri Nilacala Jagannttha Ksetra Dama, Kuil, Mandhir, Temple, Pura).

Gambar 1.15. Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²) di DKI Jakarta Tahun 2024-2026

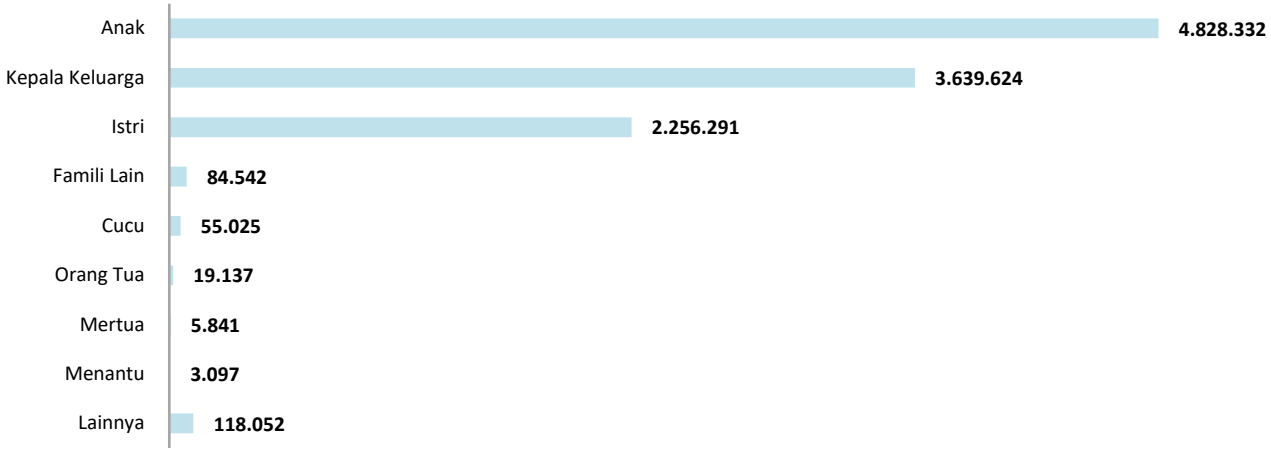


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta
2024	21.955	12.333	19.837	15.390	16.633	2.686	16.165
2025	21.831	12.356	19.898	15.311	16.628	2.712	16.155
2026	21.699	12.378	19.953	15.233	16.622	2.736	16.142

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Bertambahnya jumlah penduduk DKI Jakarta tentu menyebabkan penambahan luas kepadatan penduduk per kilometer persegi (km²). Kepadatan penduduk itu sendiri diartikan sebagai banyaknya jumlah penduduk persatuan luas wilayah. Ukuran persebaran penduduk yang umum digunakan adalah kepadatan penduduk kasar atau *Crude Population Density* (CPD) yang menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi. Berdasarkan data-data yang dihimpun Disdukcapil DKI Jakarta, kepadatan penduduk DKI Jakarta tahun 2024 adalah 16.155 jiwa/km². Angka ini turun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 16.165 jiwa/km². Penurunan ini turut disumbang oleh turunnya angka kepadatan penduduk di sebagian besar wilayah seperti Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Jakarta Pusat alami penurunan tertinggi, sedangkan Jakarta Timur alami penurunan terkecil. Ketiga wilayah lainnya alami peningkatan kepadatan. Beberapa faktor yang menyebabkan turunnya kepadatan penduduk di DKI Jakarta di antaranya adalah biaya hidup dan harga properti yang tinggi, pengendalian hunian liar, atau meningkatnya kualitas hidup dan terintegrasinya transportasi di daerah penyangga seperti Kota Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi.

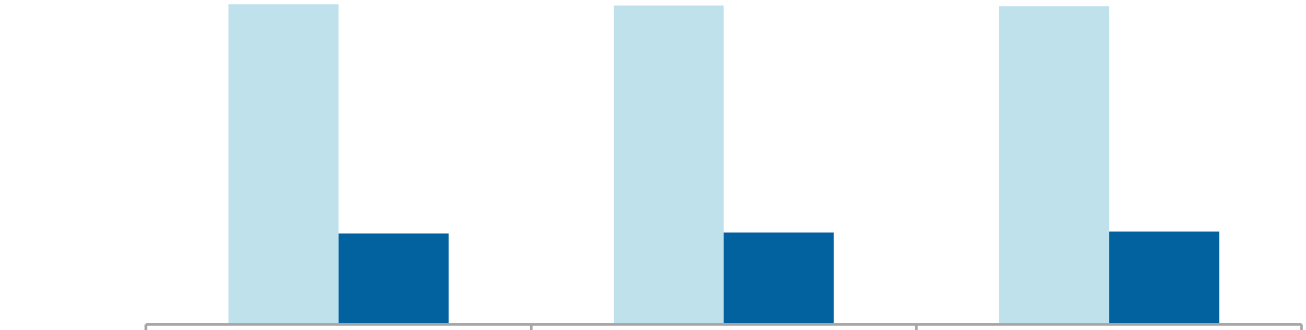
Gambar 1.16. Data Jumlah Penduduk Berdasar Status Hubungan dalam Keluarga Semester I 2025



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya, secara status hubungan dalam keluarga, terdapat 4,82 juta penduduk berstatus sebagai anak. Jumlah ini merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan status lainnya dengan jumlah 43,85% dari keseluruhan. Jumlah total yang terdata sendiri adalah 11,01 juta orang. Kepala Keluarga merupakan yang paling banyak kedua dengan 3,63 juta orang atau sekitar 33,06%.

Gambar 1.17. Data Jumlah Kepala Keluarga

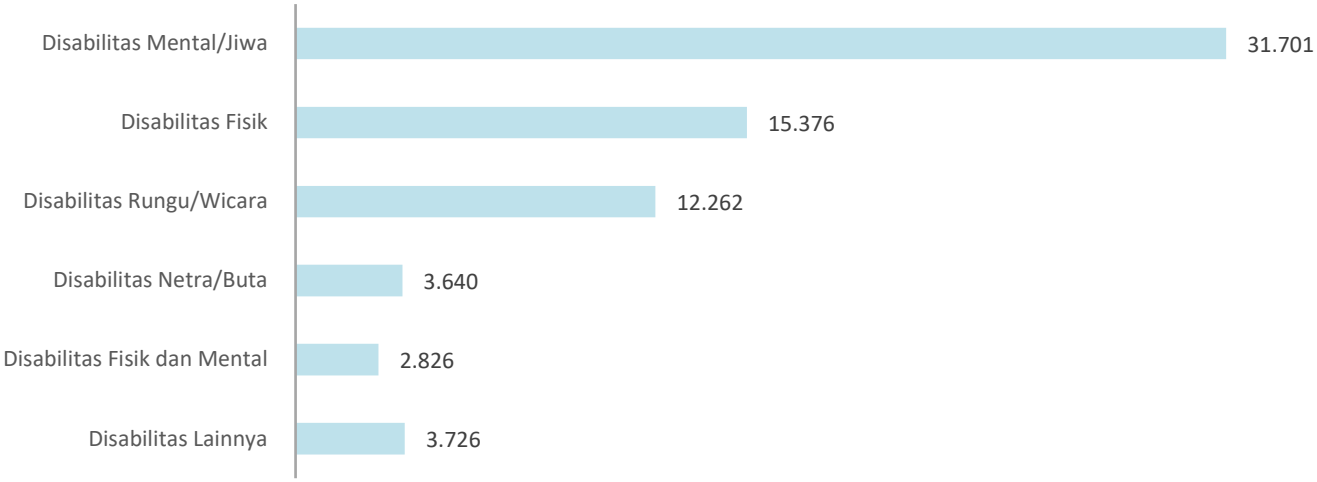


	2023	2024	Semester I 2025
Laki-laki	77,89%	77,60%	77,40%
Perempuan	22,11%	22,40%	22,60%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

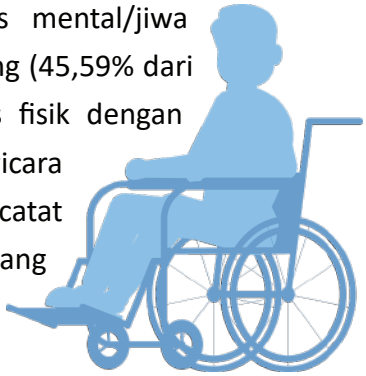
Berbicara mengenai Kepala Keluarga, definisinya adalah individu (biasanya suami atau ayah) yang bertanggung jawab memimpin, menafkahi, dan melindungi anggota keluarganya, serta memiliki kewajiban moral dan hukum atas kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 2,81 juta kepala keluarga berjenis kelamin laki-laki pada semester I tahun 2025. Jumlah ini berkontribusi sebesar 77,40% dari total. Sedangkan jumlah kepala keluarga berjenis kelamin perempuan adalah 822.530 orang atau sekitar 22,60%.Pemprov DKI Jakarta juga mendata warga dengan disabilitas. Disabilitas sendiri terbagi atas beberapa jenis, di antaranya fisik dan mental; netra/buta; rungu/wicara; fisik; dan mental/jiwa.

Gambar 1.18. Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta Semester I Tahun 2025



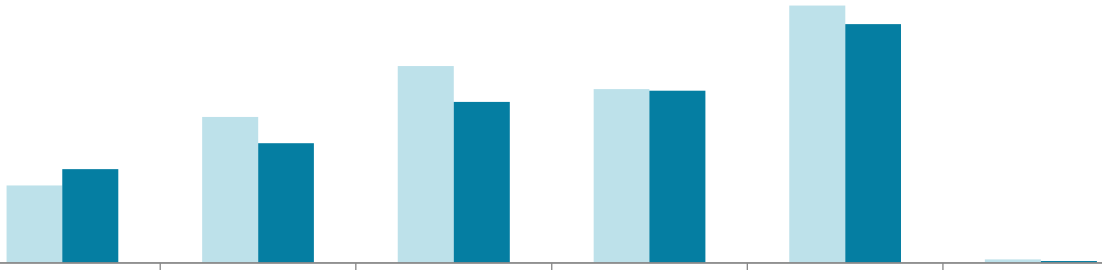
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Secara jumlah, penduduk dengan disabilitas mental/jiwa merupakan yang terbanyak dengan 31.701 orang (45,59% dari total penduduk disabilitas), disusul disabilitas fisik dengan 15.376 orang (22,11%) dan disabilitas rungu/wicara dengan 12.262 orang (17,64%). Secara total, tercatat 69.531 penduduk DKI Jakarta yang menyandang disabilitas.



1.2.2. Dinamika Penduduk

Gambar 1.19. Jumlah Pelaporan Kelahiran dan Kematian di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

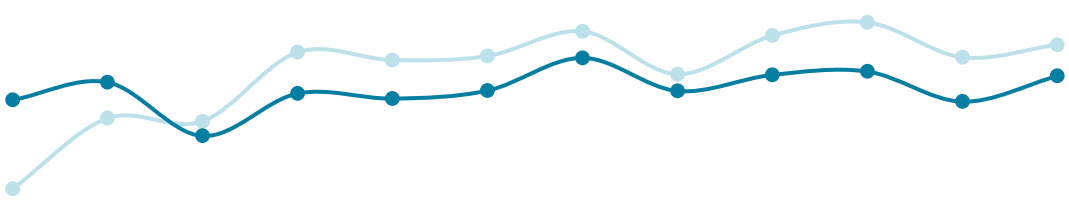


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Kelahiran	9.089	17.130	23.084	20.375	30.164	397
Kematian	10.992	14.025	18.895	20.204	27.996	234

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2025, DKI Jakarta mencatatkan angka kelahiran yang lebih besar dibandingkan dengan kematian. Tercatat setidaknya terjadi 100.239 pelaporan kelahiran dibandingkan 92.346 pelaporan kematian. Jakarta Timur merupakan provinsi dengan jumlah pelaporan kelahiran (30.164) dan kematian (27.996) terbanyak. Jakarta Pusat merupakan satu-satunya wilayah yang jumlah pelaporan kelahirannya lebih kecil dibandingkan dengan kematian. Ada pun pelaporan kelahiran di Jakarta Pusat adalah 9.089 dan kematian 10.992.

Gambar 1.20. Jumlah Pelaporan Kelahiran dan Kematian di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 menurut Wilayah

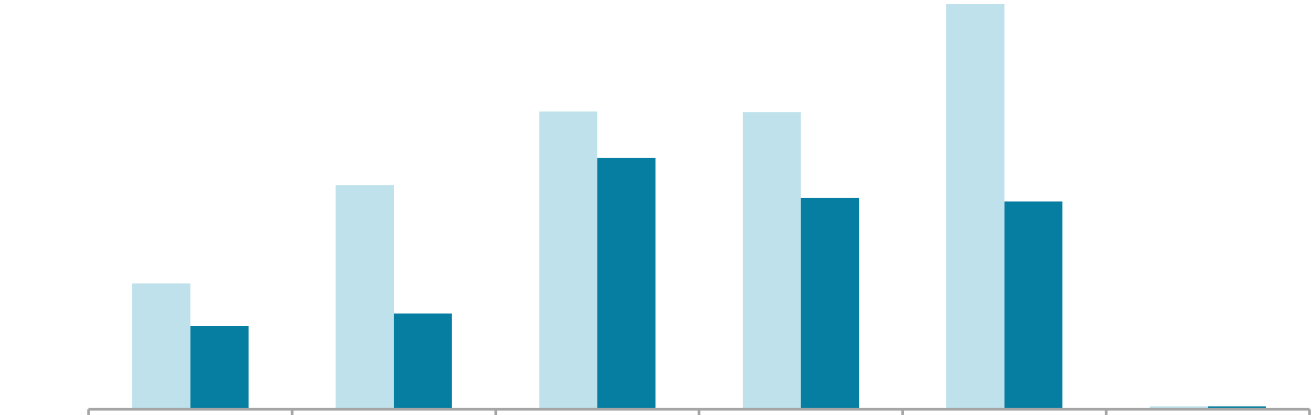


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Kelahiran	3.969	6.617	6.506	9.086	8.794	8.945	9.870	8.266	9.711	10.205	8.900	9.370
Kematian	7.300	7.965	5.959	7.545	7.356	7.654	8.877	7.640	8.242	8.367	7.242	8.199

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Jika ditelisik lebih lanjut, jumlah pelaporan kelahiran terbanyak terjadi pada Oktober dengan 10.205 pelaporan, sementara pelaporan kematian terbanyak terjadi pada Juli dengan 8.877 pelaporan. Selain kelahiran dan kematian, pergerakan jumlah penduduk juga dipengaruhi oleh pelaporan penduduk yang datang dari luar Jakarta ke ibu kota. Mengingat DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan saat ini, Jakarta tentu saja memiliki daya tarik tersendiri.

Gambar 1.21. Jumlah Pelaporan Penduduk yang Datang dari Luar DKI Jakarta ke Dalam DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	12.514	22.281	29.606	29.557	41.970	272
2024	8.293	9.531	25.006	21.007	20.667	279

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Jumlah pelaporan penduduk yang datang dari luar provinsi ke DKI Jakarta pada tahun 2024 adalah 84.783. Jumlah ini alami penurunan secara *year-on-year* sebesar 37,75% atau sekitar 51.417 orang. Hanya Kepulauan Seribu yang alami pertumbuhan dengan 7 orang atau sekitar 2,57%. Penurunan terbesar dialami Jakarta Utara dengan 57,22% atau sekitar 12.750 orang.





02

Pemerintahan

Kota **Kolaborasi** Sumber **Inovasi**



7
kerja sama luar negeri



149
kerja sama dalam negeri



100%
semuanya terimplementasi

Cepat, Tepat, Tercatat!

Banyak akta yang telah diterbitkan selama 2025:

189.144
kelahiran

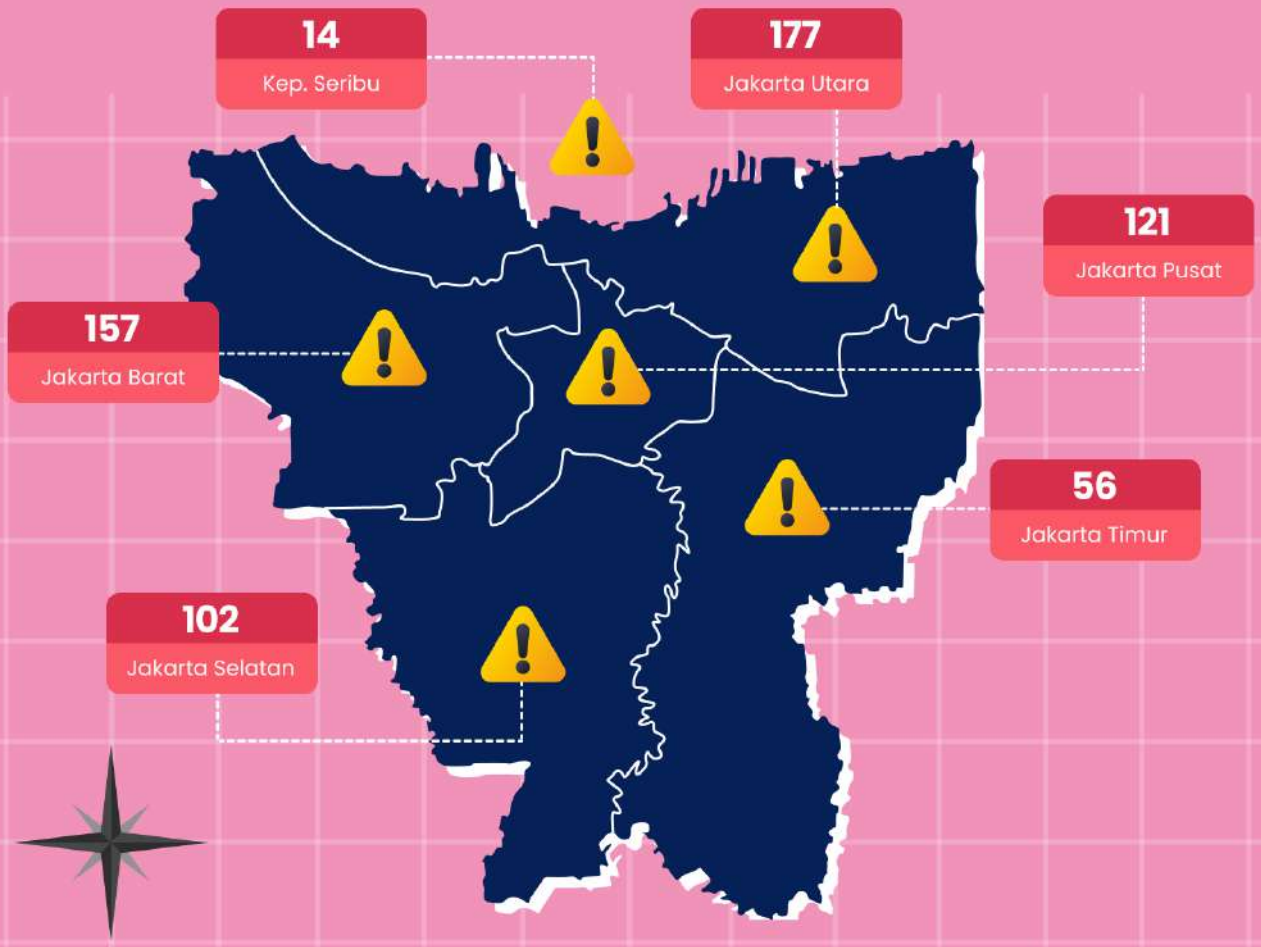
92.346
kematian

38.863
perkawinan

14.062
perceraian

Pemerintah Tanggap, Masyarakat Selamat

Sepanjang 2025, terjadi **sebanyak 627**
bencana alam di Jakarta





623 orang korban bencana



Dominasi bencana yang terjadi adalah kebakaran

Jakarta Bebas Kriminalitas!



1.287

Data Kasus Pelanggaran dilimpahkan ke JPU



94,93%

kasus pelanggaran K3 terselesaikan



>5.000

Satuan Polisi Pamong Praja



125

kasus kriminal tertangani



>3.000

Petugas Perlindungan Masyarakat /Linmas

2.1. Tata Kelola Pemerintahan

2.1.1. Pemerintahan Daerah

Efektivitas pengendalian korupsi merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Di tingkat daerah, pengendalian korupsi tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menggambarkan kematangan sistem pengawasan internal, konsistensi kepemimpinan, serta budaya organisasi yang menjunjung prinsip *good governance*[1].

Gambar 2.1. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Penilaian Mandiri	Evaluasi BPKP
2023	3,91	3,27
2024	3,96	3,49

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kecenderungan perbaikan pada periode 2023-2024, baik berdasarkan penilaian mandiri maupun evaluasi eksternal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nilai penilaian mandiri meningkat sebanyak 1,28%. Sejalan dengan itu, hasil evaluasi BPKP juga menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan, dengan tumbuh sebesar 6,73%.

Gambar 2.2. Indeks Manajemen Risiko Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Penilaian Mandiri	Evaluasi BPKP
2023	4,31	3,41
2024	4,27	3,51

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nasional

1 Bappenas Working Papers, "Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah", Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Bappenas Working Papers https://workingpapers.bappenas.go.id › download, (Jumat, 23 Januari 2026, 10.44)

Sementara itu, Indeks Manajemen Risiko periode 2023-2024 terlihat stabil, dengan arah perbaikan pada penilaian eksternal. Nilai penilaian mandiri tercatat sedikit menurun, yakni sebanyak 0,93%. Sebaliknya, hasil evaluasi BPKP menunjukkan peningkatan sebesar 2,93%.

Gambar 2.3. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024

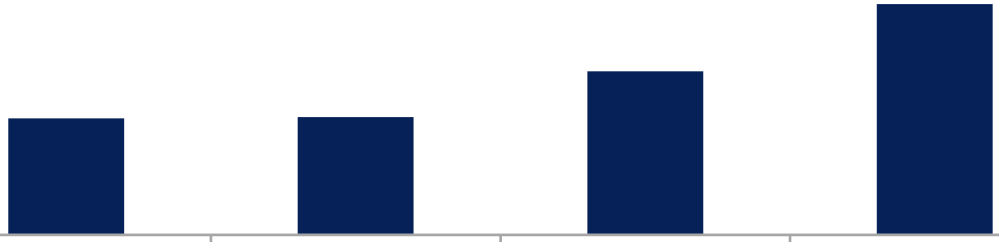


	Penilaian Mandiri	Evaluasi BPKP
2023	4,31	3,41
2024	4,16	3,80

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Nilai Maturinitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi DKI Jakarta pada periode 2023-2024 menunjukkan kecenderungan perbaikan dari sisi evaluasi eksternal, meskipun diiringi dengan penyesuaian pada penilaian internal. Nilai penilaian mandiri mengalami penurunan sebesar 3,48% tahun 2024. Di sisi lain hasil evaluasi BPKP memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan, dengan kenaikan sekitar 11,44%.

Gambar 2.4. Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2024



	2021	2022	2023	2024
Nilai Indeks	78,88	78,98	82,47	93,72

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan memiliki pelayanan berkualitas. Dasar hukum indeks reformasi birokrasi adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tabel 2.1. Indeks Sistem Merit Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024

Tahun	Target	Capaian
2023	326.00	335.50
2024	335.50	350.50

Sumber: Komisi Aparatur Sipil Negara

Indeks sistem merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah dengan dasar hukum berikut: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN); Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2024, capaian Indeks Sistem Merit Provinsi DKI Jakarta adalah 350,50. Capaian tersebut melebihi target 2023 yang berada di angka 335,50. Hal ini membuat capaian Provinsi DKI Jakarta masuk ke dalam kategori IV dengan predikat sangat baik.

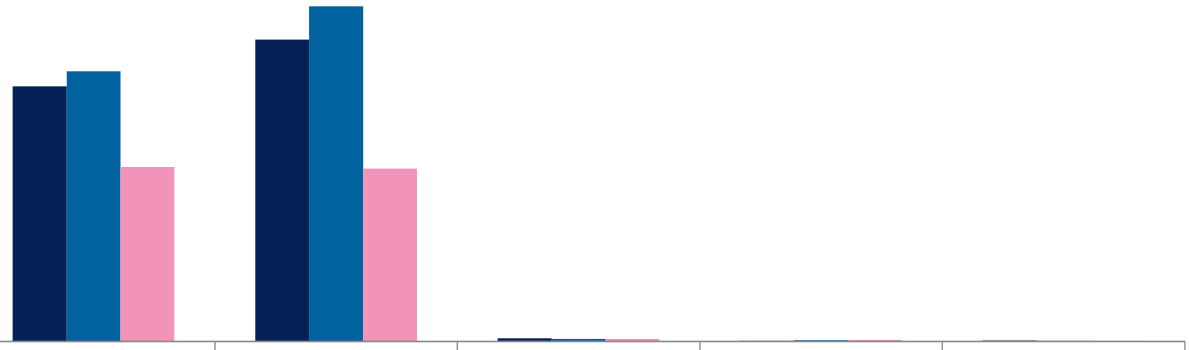
Tabel 2.2. Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tahun 2024

Periode Data	Evaluasi Mandiri	Evaluasi Pusat
2024	372	320

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Data ini berisi tentang indeks sistem merit, yakni ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Metode pengukurannya dilakukan dengan menilai delapan aspek sistem merit yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta. Hasil evaluasi mandiri Provinsi DKI Jakarta, Indeks Sistem Merit memiliki nilai 372, sedangkan hasil evaluasi pusat adalah 320. Nilai sistem merit pusat didapatkan dari hasil evaluasi Komisi Aparatur Sipil Negara.

Gambar 2.5. Produk Naskah Dinas Gubernur Januari 2023-Juli 2025

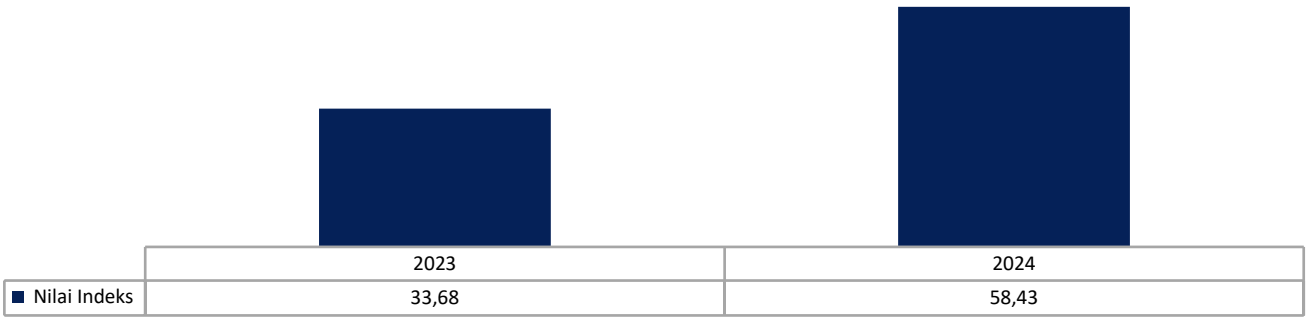


	Keputusan Gubernur	Surat Umum Gubernur	Instruksi Gubernur	Surat Edaran Gubernur	Seruan Gubernur
2023	855	1.012	11	3	4
2024	906	1.123	9	5	2
2025	585	580	9	6	3

Sumber: Biro Kepala Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Produk naskah gubernur merupakan produk hukum dan surat biasa yang ditandatangani oleh gubernur, di antaranya Instruksi Gubernur (Ingub), Keputusan Gubernur (Kepgub), Seruan Gubernur, Surat Edaran Gubernur, dan Surat Umum Gubernur. Pada Januari hingga Juli 2025, terdapat 585 Keputusan Gubernur, 580 Surat Umum Gubernur, 9 Instruksi Gubernur, 6 Surat Edaran Gubernur, dan 3 Seruan Gubernur. Sejak Januari hingga Juli 2025, produk naskah gubernur terbanyak terjadi pada bulan Juli dengan 216 produk. Pada tahun sebelumnya, 2024, terbanyak terjadi pada Juli dengan 258 produk.

Gambar 2.6. Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2023-2024



Sumber: Biro Hukum Sekretariat Daerah

Data ini memuat Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2024 dalam pengukuran nasional oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Adapun nilai Indeks yang dicapai oleh pemerintahan provinsi DKI Jakarta pada tahun tersebut adalah 58,43. Pengukuran dilakukan berdasarkan Surat Edaran (SE) Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan dengan memperhatikan kerangka IKK terdiri dari: 1 = Kurang (<= 59,99) 2 = Cukup (60-70.99) 3 = Sedang (71-80.99) 4 = Baik (81-89.99) 5 = Sangat baik (>= 90). Dengan demikian, nilai indeks kualitas kebijakan pembentukan produk hukum daerah masih dapat ditingkatkan.

Tabel 2.3. Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah Tahun 2023-2024

Tahun	Jumlah Indikator Aksi	Nilai Capaian
2023	8	97,92
2024	7	100,00

Sumber: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nilai capaian pelaksanaan aksi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM. Indikator ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 dan mengacu pada pedoman yang disusun oleh Sekretariat Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dengan indikator penilaian secara substantif dan terukur yang diperbaharui setiap tahunnya. Pada tahun 2024, terdapat 7 aksi yang dijadikan sebagai indikator pelaporan aksi HAM daerah, dengan nilai capaian 100.00.

Tabel 2.4. Nilai Dimensi Keanekaragaman dan Kolaborasi Tahun 2023-2024

Tahun	Target	Capaian
2023	4,17	1,73
2024	4,18	2,60

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Pilar kapasitas inovasi terdiri dari dua dimensi: dimensi interaksi dan keberagaman; dan dimensi penelitian dan pengembangan. Dimensi interaksi dan keberagaman termasuk salah satu komponen pembentuk pilar kapasitas inovasi. Pada tahun 2024, target nilai dimensi keanekaragaman dan kolaborasi adalah 4,18. Sedangkan capaian pada tahun yang sama adalah 2,60. Baik angka capaian dan target meningkat pada tahun ini, dari target tahun 2023 yang sebesar 4,17 dan capaian sebesar 1,73.

Tabel 2.5. Kerja Sama yang Terimplementasi Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Kerja Sama yang Terimplementasi	Jumlah Usulan Kerjasama yang Terverifikasi
2022	378	378
2023	193	193
2024	156	156

Sumber: Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Jumlah kerja sama pada tahun 2024 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2024, terdapat 156 jumlah kerja sama yang terimplementasi dibandingkan dengan 193 jumlah kerja sama pada tahun 2023. Terjadi penurunan sebesar 19,17%. Meski demikian, jumlah kerja sama yang terimplementasi mencapai 100% pada tahun 2022 hingga 2024.

Tabel 2.6. Persentase Kerjasama Dalam Negeri yang Terimplementasi Tahun 2023-2024

Tahun	Jumlah Kerja Sama yang Terimplementasi	Jumlah Usulan Kerjasama yang Terverifikasi
2023	189	189
2024	149	149

Sumber: Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Secara definisi, persentase kerja sama dalam negeri yang terimplementasi terdiri dari Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan kerja sama dengan daerah lain; sinergi dengan pemerintah pusat (nota kesepakatan); dan perjanjian pinjam pakai serta Nota Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK). Singkatnya, data ini adalah ukuran seberapa banyak kerja sama dengan berbagai pihak yang berhasil diwujudkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada 2024, di Jakarta terdapat 149 usulan kerja sama dalam negeri terverifikasi. Dari jumlah tersebut, 149 usulan berhasil terimplementasi dengan tingkat persentase mencapai 100%.

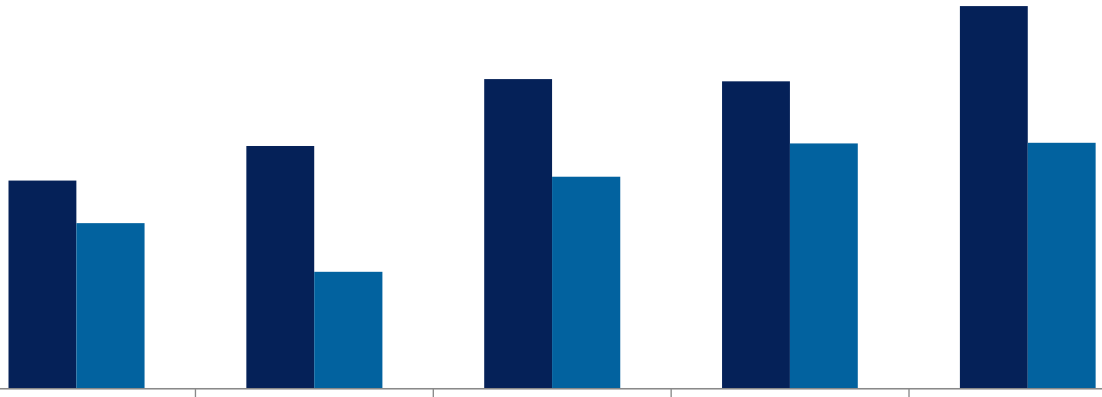
Tabel 2.7. Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Terimplementasi Tahun 2023-2024

Tahun	Jumlah Kerja Sama yang Terimplementasi	Jumlah Usulan Kerjasama yang Terverifikasi
2023	4	4
2024	7	7

Sumber: Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya, persentase kerja sama luar negeri yang terimplementasi terdiri dari *Memorandum of Understanding (MoU), Letter of Intent (LOI)*, dan kesepakatan lainnya antara Pemprov DKI Jakarta dengan mitra luar negeri seperti *sister city*, lembaga, dan organisasi luar negeri. Sepanjang 2024, terdapat 7 usulan kerja sama luar negeri terverifikasi. Dari jumlah tersebut, 7 kerja sama luar negeri berhasil terimplementasi dengan persentase 100%. Secara persentase, capaian tersebut sama dengan persentase kerja sama dalam negeri.

Gambar 2.7. Jumlah Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI Jakarta Tahun 2024



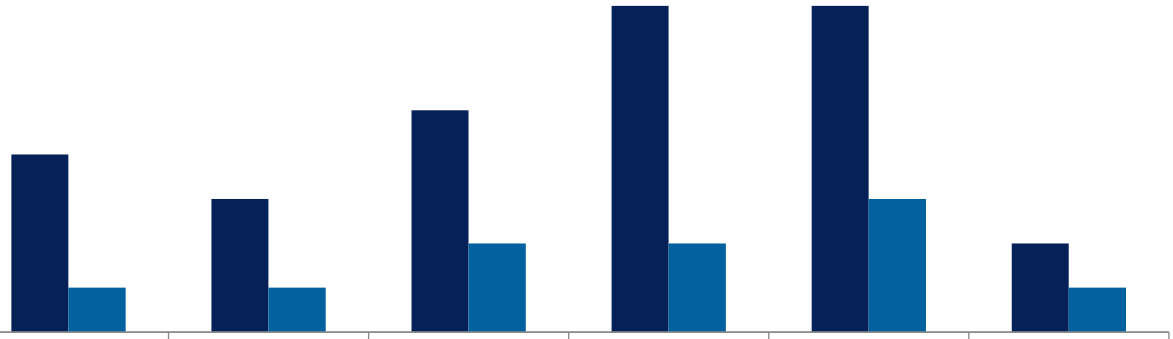
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
LMK	385	449	573	569	708
FKDM	306	216	392	454	455

Sumber: Suku Dinas Provinsi DKI Jakarta

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang dibentuk dengan tujuan (FKDM) merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Sedangkan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) menurut Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan, terdapat 2.684 LMK di DKI Jakarta, Jakarta Timur merupakan wilayah dengan LMK terbanyak dengan 708 LMK. Selain itu, terdapat 1.823 FKDM, dengan yang terbanyak berada di wilayah Jakarta Timur (455 FKDM).



Gambar 2.8. Jumlah Kelurahan yang Sadar Hukum menurut Wilayah Tahun 2024

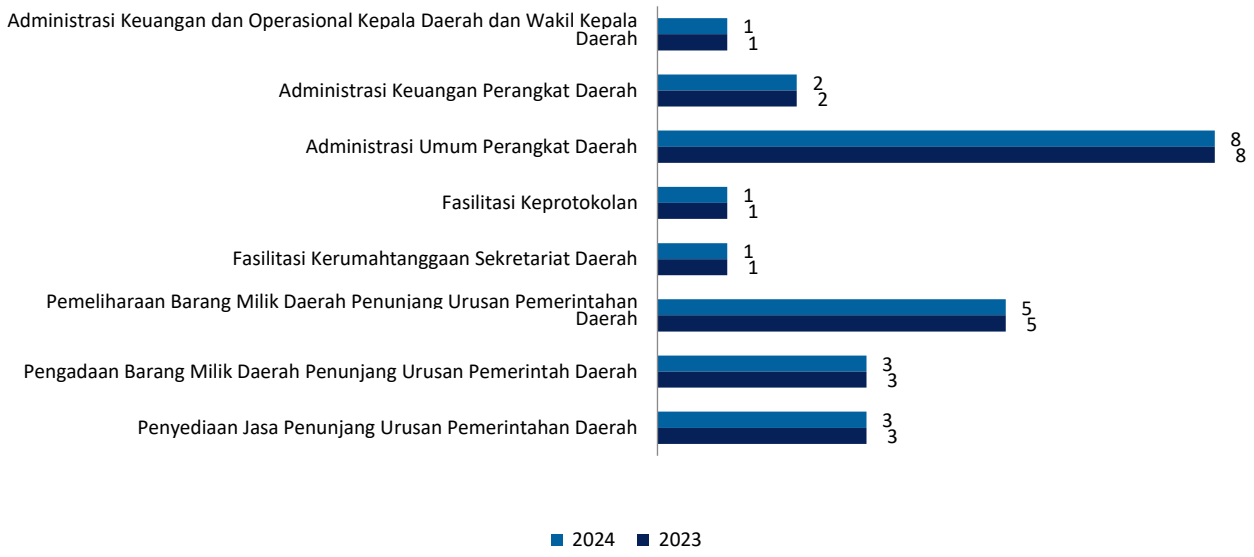


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	4	3	5	8	8	2
2024	1	1	2	2	3	1

Sumber: Biro Hukum Sekretariat Daerah

Data di atas memuat daftar kelurahan yang telah mendapat predikat sebagai Kelurahan Sadar Hukum dan mengikuti Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum. Hal ini didasari Permen Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.-8.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Secara definisi, kelurahan sadar hukum adalah kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai kelurahan sadar hukum. Terdapat 10 kelurahan sadar hukum di DKI Jakarta dengan yang terbanyak berada di wilayah Jakarta Timur sebanyak 3 kelurahan. Persentase kepuasan pelayanan kompleks balai kota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan baik meliputi beberapa hal berikut: Indeks Kepuasan Administrasi Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Indeks Kepuasan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Indeks Kepuasan Administrasi Keuangan dan Oper

Gambar 2.9. Jenis Indeks Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang Terlaksana dengan Baik Tahun 2023-2024



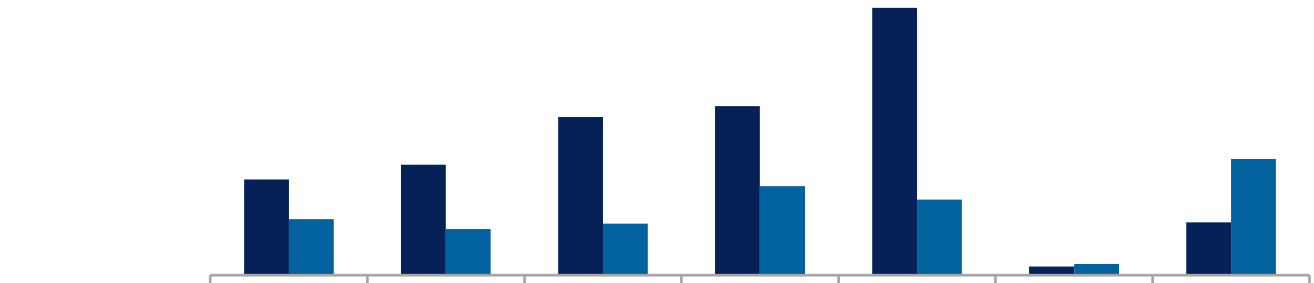
Sumber: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Persentase kepuasan pelayanan kompleks balai kota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan baik meliputi beberapa hal berikut: Indeks Kepuasan Administrasi Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Indeks Kepuasan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Indeks Kepuasan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Indeks Kepuasan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; dan Indeks Kepuasan Fasilitasi Keprotokolan. Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki total jenis pelayan terbanyak dengan 8 jenis, sedangkan yang paling sedikit adalah administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, dan fasilitasi keprotokolan dengan masing-masing 1 jenis pelayanan. Adapun seluruh indeks kepuasan layanan memiliki persentase tertinggi dengan 100% pada tahun 2023 dan 2024 dengan jumlah jenis pelayanan yang sama persis baik tahun 2023 maupun 2024.

2.1.2. Aparatur Sipil

Aparatur Sipil Negara (ASN)merupakan status yang memiliki peran tidak hanya sebagai pegawai negeri sipil semata, namun juga sebagai aparat yang bekerja dengan nilai budaya Indonesia yang terbuka, inovatif, pelayanan masyarakat, dan tidak membedakan anggota lainnya baik dari segi agama, ras, golongan, maupun suku bangsa. Mengacu pada definisi tersebut, orang yang bekerja di lingkungan pemerintahan, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, dapat dikatakan sebagai ASN.

Gambar 2.10. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menurut Jabatan, 2024



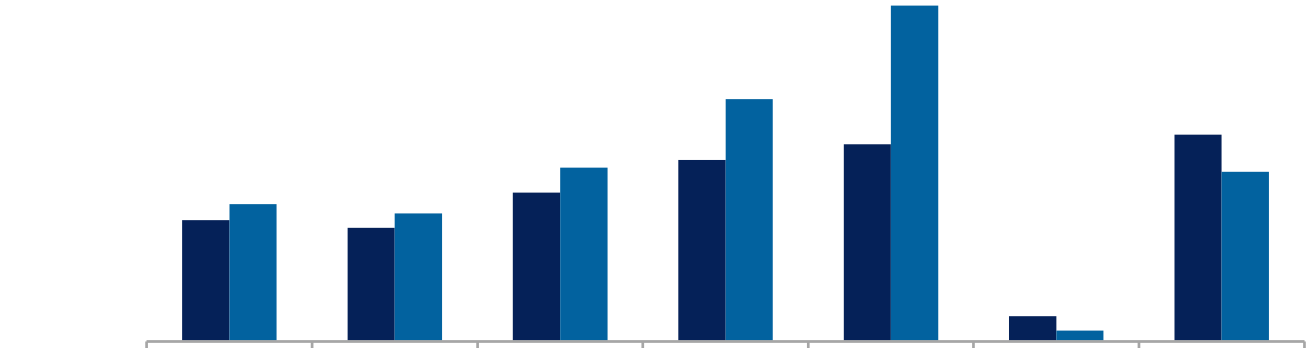
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu	Provinsi
Jabatan Fungsional	4.652	5.373	7.686	8.218	12.993	417	2.560
Jabatan Struktural	2.726	2.237	2.505	4.329	3.669	539	5.641

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Secara umum, ASN di lingkungan Provinsi DKI Jakarta terbagi atas Jabatan Fungsional dan Struktural. Total ASN adalah 63.545 orang yang terbagi atas 41.899 orang dengan Jabatan Fungsional dan 21.646 orang Jabatan Struktural. ASN Jakarta Timur merupakan yang paling banyak dengan total 16.662 orang yang terbagi atas 12.993 orang Fungsional dan 3.669 orang struktural.

Ada pun dari seluruh ASN yang menduduki Jabatan Fungsional, terbagi atas 24.758 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 17.141 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sedangkan seluruh Jabatan Struktural diduduki oleh PNS.

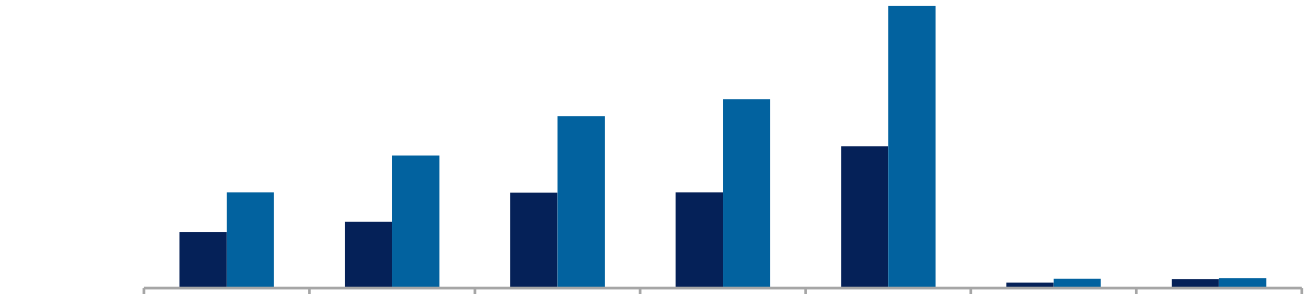
Gambar 2.11. Jumlah PNS menurut Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu	Provinsi
Laki-laki	2.564	2.404	3.152	3.839	4.171	538	4.375
Perempuan	2.905	2.706	3.676	5.127	7.129	229	3.589

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Gambar 2.12. Jumlah PPPK menurut Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu	Provinsi
Laki-laki	704	832	1.200	1.205	1.784	70	112
Perempuan	1.205	1.668	2.163	2.376	3.578	119	125

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, PNS perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki dengan 25.361 berbanding 21.043 orang. Jika disederhanakan, sebanyak 55 dari 100 PNS DKI adalah perempuan, atau sekitar 54,7%. Hanya Kabupaten Kepulauan Seribu dan Provinsi yang memiliki lebih banyak PNS laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Seperti halnya PNS, mayoritas PPPK juga berjenis kelamin perempuan. Tercatat 11.234 orang PPPK perempuan dan 5.907 orang laki-laki. Artinya, sekitar 66 dari 100 PPPK di DKI Jakarta adalah perempuan. Baik di Suku Dinas maupun Provinsi, PPPK terbanyak merupakan perempuan.

Tabel 2.8. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Kelompok Umur di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

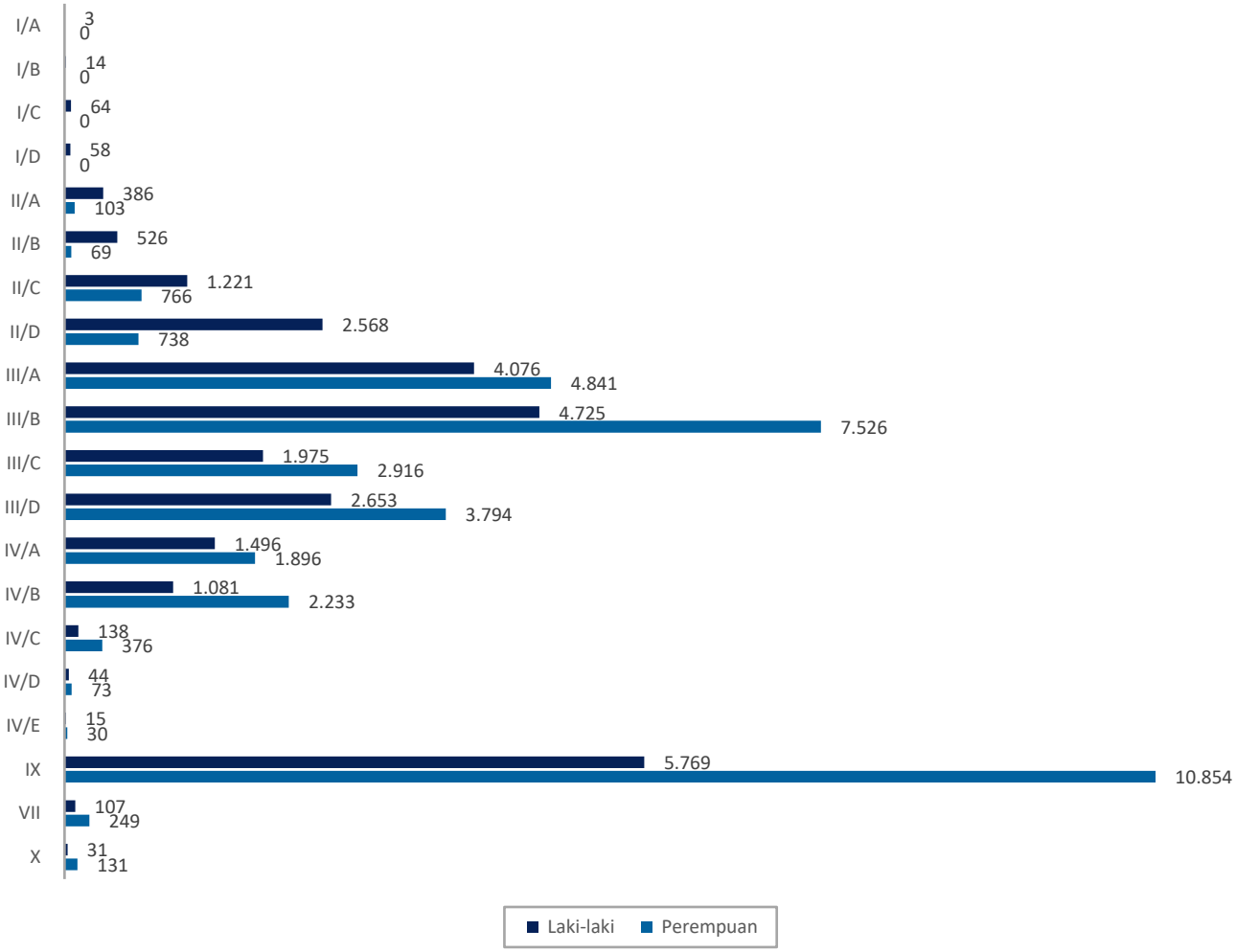
Kelompok Umur	PNS	PPPK
< 25	116	2
25 - 29	4.736	1.772
30 - 34	3.859	3.886

Kelompok Umur	PNS	PPPK
35 - 39	5.150	3.052
40 - 44	6.465	3.654
45 - 49	6.986	2.412
50 - 54	8.265	1.477
> 55	10.827	886

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya, berdasarkan kelompok umur, mayoritas ASN berada di kelompok usia lebih dari 55 tahun dengan 11.713 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah di bawah 25 tahun dengan 118 orang. Mayoritas ASN yang berusia lebih dari 55 tahun adalah PNS dengan 10.827 orang, dan PPPK 886 orang.

Gambar 2.13. Jumlah PNS dan PPPK menurut Tingkat Kepangkatan Tahun 2024



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Pada PNS, terdapat golongan I hingga IV, sedangkan huruf biasanya menjelaskan tingkatan pada golongan tersebut. Sedangkan pada PPPK, terdapat golongan jabatan IX dan VII. Pada tahun 2024, di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, golongan IX merupakan yang paling banyak dengan 16.623 orang, yang terdiri dari 5.769 laki-laki dan 10.854 orang perempuan. Jumlah terbanyak kedua adalah golongan III/B dengan jumlah 12.251 orang yang terdiri dari 4.725 laki-laki dan 7.526 orang perempuan.

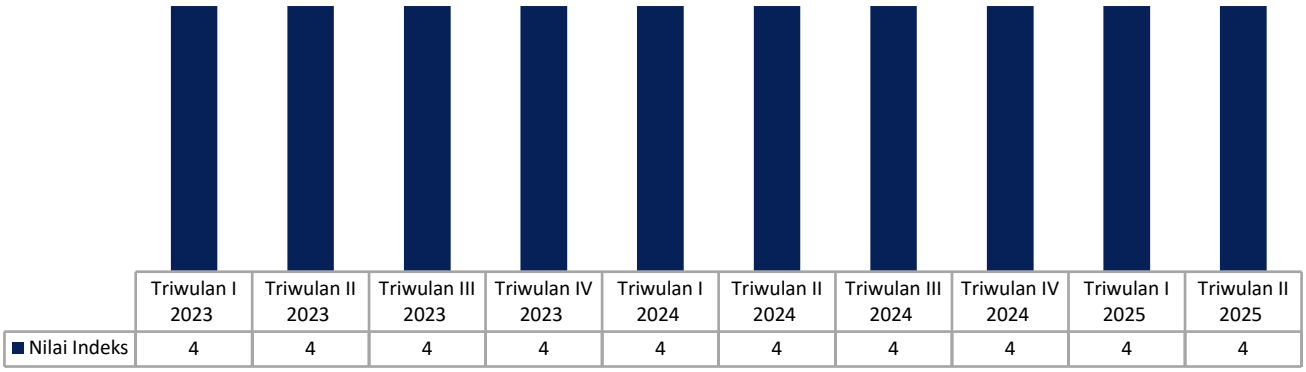
Tabel 2.9. Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pendidikan	PNS	PPPK
SD	79	0
SMP	245	5
SMA	8.904	37
D1	79	0
D2	562	1
D3	4.371	358
S1	27.787	16.709
S2	3.948	31
S3	65	0

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Secara tingkat pendidikan, mayoritas PNS maupun PPPK merupakan lulusan S1 dengan 27.787 orang PNS dan 16.709 PPPK. Jumlah ini berkontribusi sebanyak 70,43% dari total ASN yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Baik PNS dan PPPK, jumlah paling sedikit adalah lulusan S3 dengan 65 orang PNS dan 0 orang PPPK. Pada PPPK, selain lulusan S3, juga tidak ada pegawai lulusan D1 dan SD.

Gambar 2.14. Indeks Efektivitas Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat di Bawah Koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial Periode Triwulan I 2023-Triwulan II 2025



	Triwulan I 2023	Triwulan II 2023	Triwulan III 2023	Triwulan IV 2023	Triwulan I 2024	Triwulan II 2024	Triwulan III 2024	Triwulan IV 2024	Triwulan I 2025	Triwulan II 2025
Nilai Indeks	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Sumber: Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

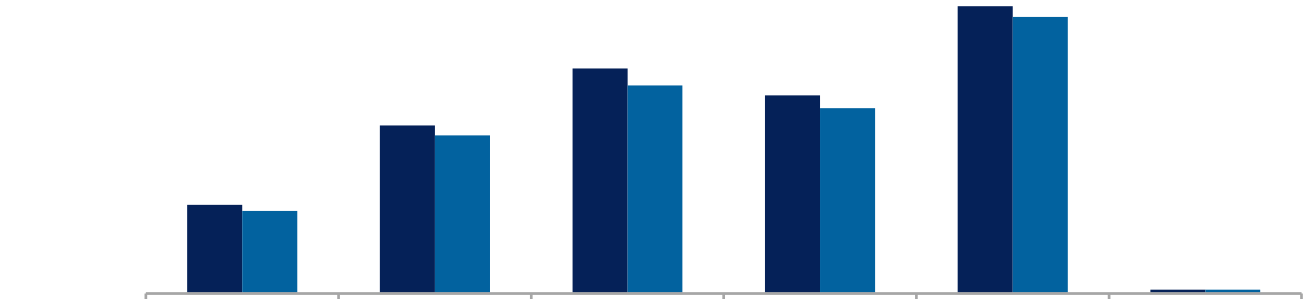
Data ini menunjukkan Indeks Efektivitas Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta. Adapun efektivitas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan yang diukur terkait penyelesaian meliputi beberapa hal berikut: pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan; penyusunan kebijakan baik dengan pemerintah pusat ataupun yang berada di dalam lingkup pemerintah daerah (berupa diseminasi kebijakan pemerintah pusat, penelaahan kebijakan, laporan, ataupun nota dinas TL rapat koordinasi). Sejak triwulan I 2023 hingga triwulan II 2025, Provinsi DKI Jakarta konsisten mencapai angka 4 dengan kategori sangat tinggi.

2.2. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

2.2.1. Kependudukan

Kelahiran menjadi salah satu indikator utama dalam dinamika kependudukan suatu wilayah, termasuk di Provinsi DKI Jakarta. Tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta jumlah selama tahun 2023, yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin serta wilayah administrasi.

Gambar 2.15. Data Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kelahiran Tahun 2024



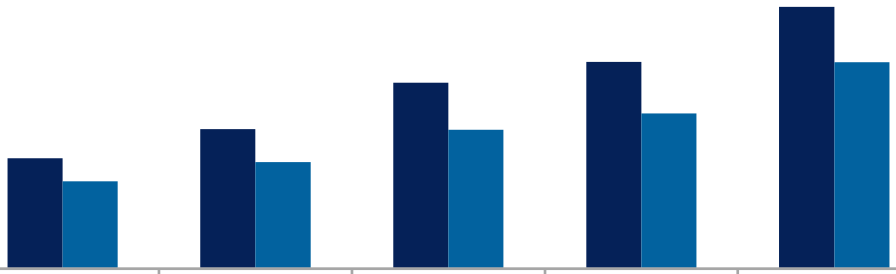
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Laki-laki	4.941	9.369	12.535	11.052	16.486	206
Perempuan	4.605	8.821	11.589	10.329	15.417	206

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2024, jumlah kelahiran di Jakarta adalah 105.556 yang terdiri atas 54.589 laki-laki dan 50.967 perempuan. Kelahiran paling banyak terjadi di Jakarta Timur dengan 31.903 pencatatan atau sekitar 30,22% dari total kelahiran. Meskipun perbedaan ini tergolong kecil, pola ini sejalan dengan tren demografi umum di mana kelahiran bayi laki-laki biasanya sedikit lebih banyak dibandingkan bayi perempuan. Fenomena ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis dan sosial, yang juga terlihat di berbagai wilayah lain di Indonesia maupun secara global.



Gambar 2.16. Jumlah Penduduk berdasarkan Kematian menurut Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

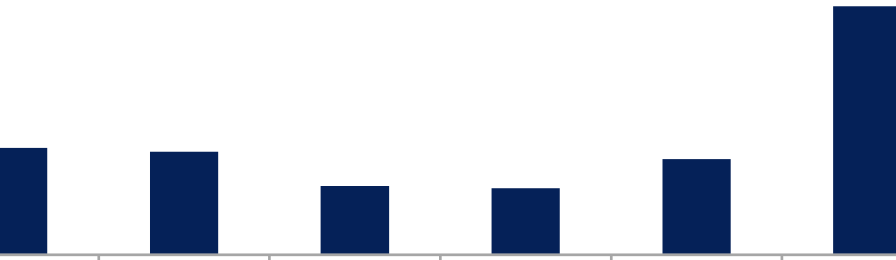


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Laki-laki	6.296	7.960	10.622	11.800	15.890	152
Perempuan	4.988	6.090	7.931	8.855	11.789	154

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Di lain sisi, pada tahun 2024 jumlah kematian di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa angka pelaporan kematian laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan hampir di seluruh wilayah administratif. Pengecualian terjadi di Kepulauan Seribu yang memiliki jumlah kematian perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dengan 152 kematian laki-laki dan 154 perempuan.

Gambar 2.17. Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) Per-1000 Kelahiran Hidup pada Tahun Terlahir di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta
Jumlah	8,49	8,19	5,47	5,29	7,59	21,84	6,88

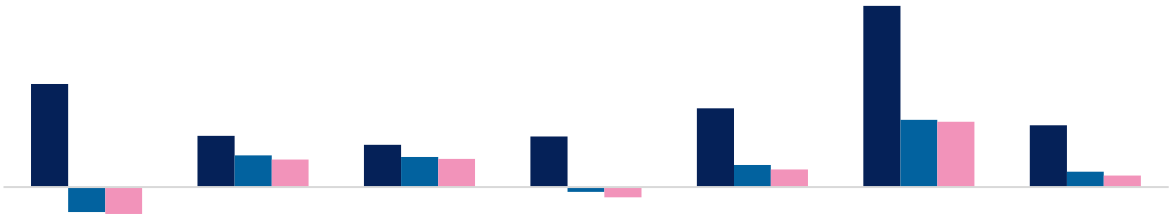
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2024, Provinsi DKI Jakarta mencatat Angka Kematian Bayi (AKB) yang bervariasi di setiap wilayah administratif. Berdasarkan data yang tersedia, Kepulauan Seribu mencatat angka tertinggi, yakni 21,84 kematian bayi per-1.000 kelahiran hidup. Wilayah dengan AKB tertinggi berikutnya adalah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Jakarta Selatan merupakan yang paling rendah dengan 5,29 kematian bayi.

Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi salah satu indikator utama dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan ibu dan anak. menurut *World Health Organization* (WHO), AKB dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam periode tertentu. AKB yang tinggi dapat mencerminkan berbagai faktor yang berkaitan dengan akses dan kualitas layanan kesehatan, status gizi, sanitasi, serta tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama

Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai lembaga terkait secara rutin memantau angka kematian bayi guna menilai efektivitas program kesehatan ibu dan anak. Dalam laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) terbaru, AKB di tingkat nasional mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun, meskipun masih terdapat perbedaan antar daerah, termasuk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 2.18. Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Provinsi DKI Jakarta

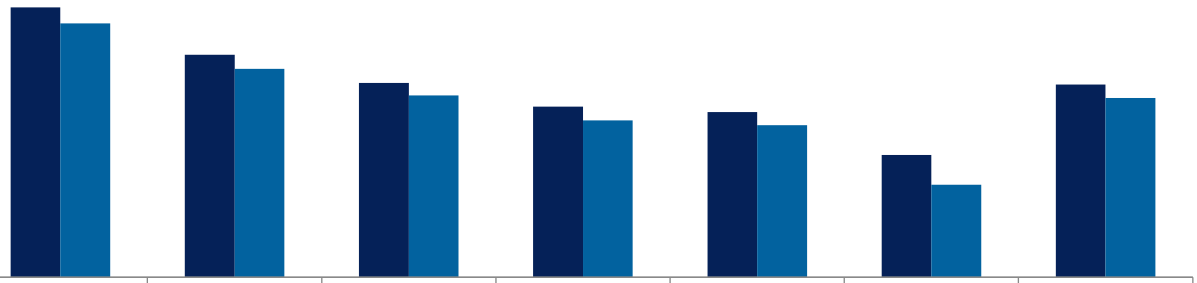


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta
2010-2020	1,53	0,76	0,63	0,75	1,17	2,69	0,92
2020-2025	-0,37	0,47	0,45	-0,07	0,33	1,00	0,23
2020-2026	-0,40	0,41	0,42	-0,15	0,26	0,97	0,17

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, Jakarta alami pertumbuhan penduduk sebesar 0,23% pada tahun 2025. Pertumbuhan ini terjadi di hampir semua wilayah. Peningkatan tertinggi dialami oleh Kepulauan Seribu dengan 1,00% disusul Jakarta Utara dengan 0,47%. Dua wilayah yang alami penurunan adalah Jakarta Pusat (0,37%) dan Jakarta Selatan (0,07%).

Gambar 2.19. Data Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi DKI Jakarta



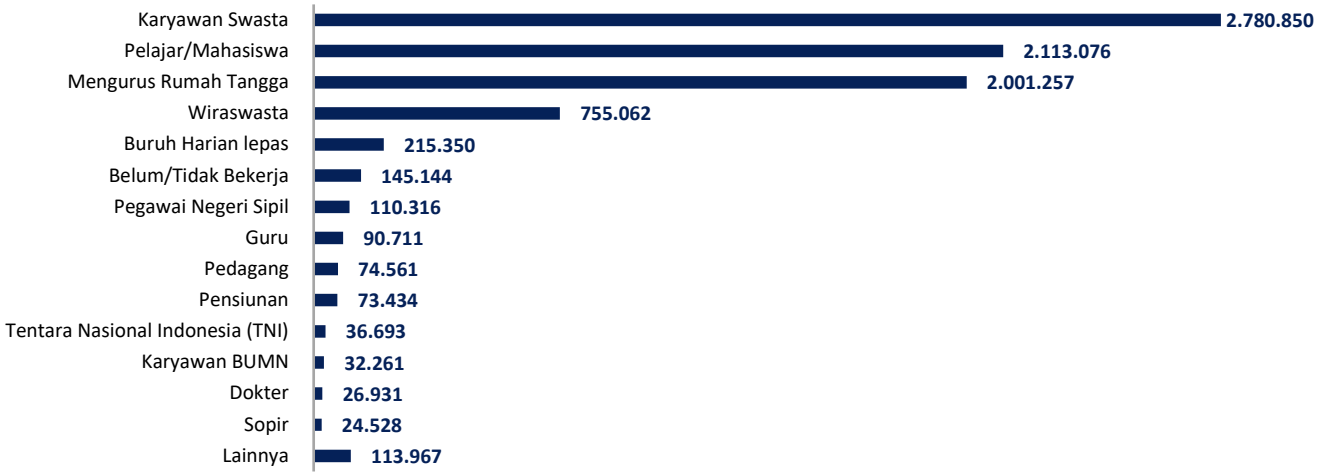
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta
2025	102,35	101,41	100,85	100,38	100,27	99,42	100,82
2026	102,03	101,13	100,60	100,11	100,01	98,83	100,55

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Rasio jumlah penduduk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Baik perbandingan jumlah penduduk perempuan maupun laki-laki tidak berbeda jauh. Pada tahun 2025, rasio perbandingan laki-laki dibanding perempuan ada di Kepulauan Seribu dengan 99,42 laki-laki per 100 penduduk perempuan. Sedangkan yang paling tinggi adalah Jakarta Pusat dengan 102,35 laki-laki dibandingkan dengan 100 penduduk perempuan.



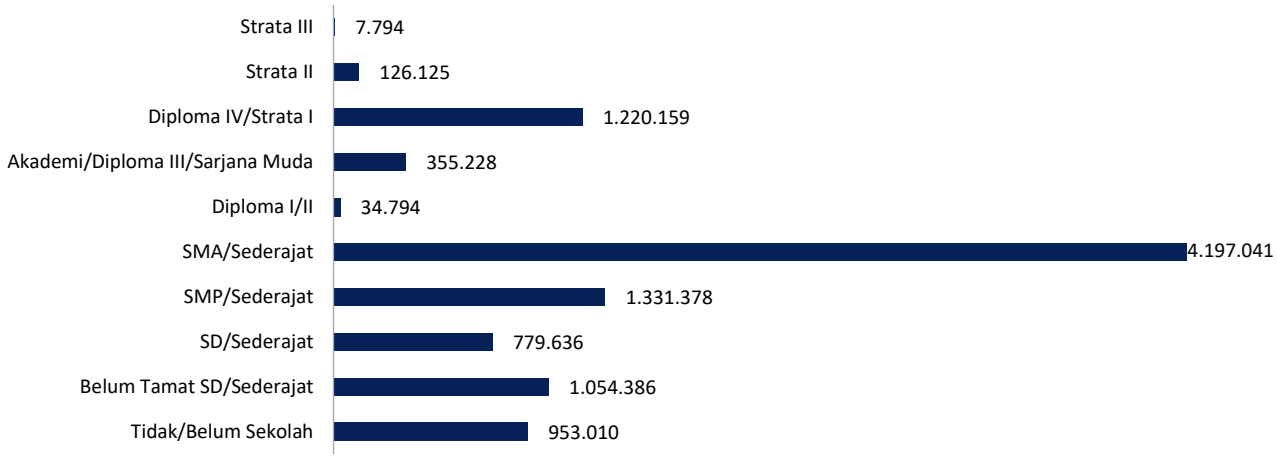
Gambar 2.20. Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta menurut Pekerjaan Semester I 2025



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Mayoritas penduduk DKI Jakarta yang bekerja memiliki profesi sebagai karyawan swasta, dengan jumlah mencapai hingga 2.78 juta orang. Posisi berikutnya diisi oleh pelajar/mahasiswa dengan 2,11 juta orang, mengurus rumah tangga dengan 2.00 juta orang, serta wiraswasta sebanyak 755.062. Di sisi lain, jumlah tenaga kerja paling sedikit adalah profesi sopir dengan 24.528 orang dan dokter dengan 26.931 orang.

Gambar 2.21. Penduduk Provinsi DKI Jakarta menurut Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin Semester I 2025

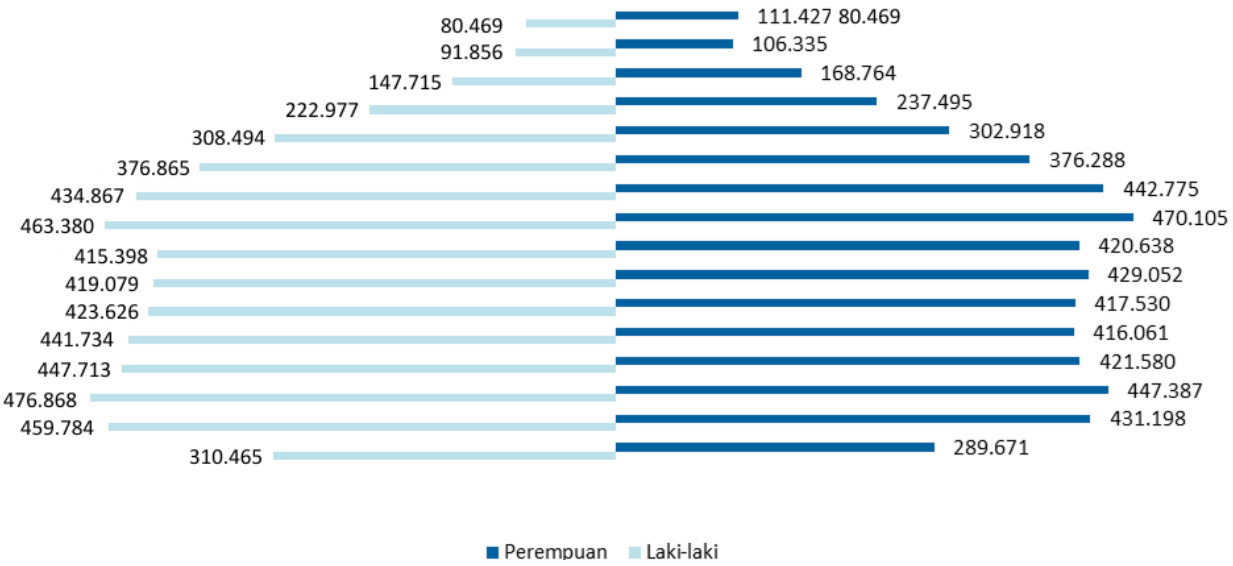


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Mayoritas penduduk DKI Jakarta memiliki tingkat pendidikan SMA/sederajat, dengan total 4,19 juta orang, yang secara persentase sebesar 41,72% dari total. Pada jenjang di bawahnya, terdapat 1,33 juta orang telah menyelesaikan pendidikan SMP/sederajat atau 13,23%. Sementara itu, mereka yang menamatkan SD/sederajat berjumlah 779.636 orang atau sekitar 7,75% dari total. Di sisi lain, jumlah penduduk yang tidak/belum sekolah juga masih memperlihatkan angka yang cukup tinggi, yakni 953.010 orang. Pada pendidikan tinggi, jumlah penduduk yang menempuh Diploma I/II jauh lebih sedikit dibandingkan jenjang lainnya, dengan total keseluruhan hanya 34.794 orang. Namun, pada jenjang Diploma III/ Sarjana Muda, terdapat peningkatan jumlah dengan 355.228 orang menyelesaikan jenjang pendidikan ini atau sekitar 3,53%. Sementara, pada jenjang Diploma IV/Strata I (S1), jumlahnya meningkat secara signifikan dengan total keseluruhan sebanyak 1,22 juta.

Lebih lanjut, jumlah penduduk dengan pendidikan Strata II (S2) memperlihatkan angka hampir sepuluh kali lebih sedikit dari penduduk yang menyelesaikan pendidikan Diploma IV/Strata I. Sementara terdapat 7.794 penduduk yang menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata III.

Gambar 2.22. Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta menurut Kelompok Usia Semester I 2025



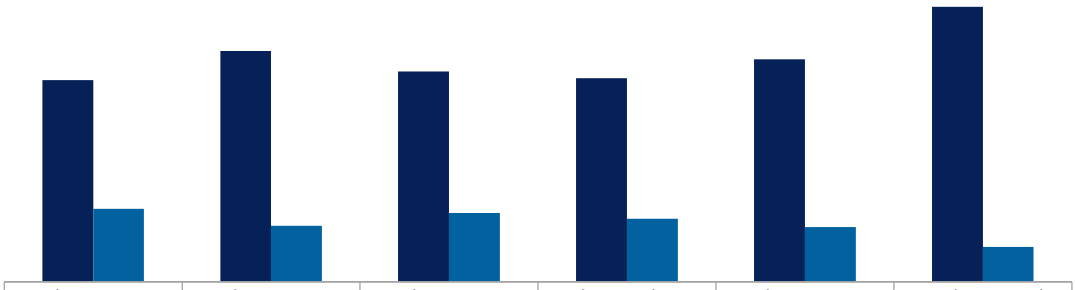
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Selain memahami bagaimana struktur demografi terbentuk berdasarkan jumlah penduduk dan jenis kelamin, kelompok usia juga menjadi indikator penting untuk diketahui. Sebelumnya, telah terlihat bahwa jumlah penduduk di setiap wilayah DKI Jakarta relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan sedikit variasi di beberapa daerah. Namun, distribusi penduduk berdasarkan usia juga memainkan peran penting dalam menentukan dinamika sosial dan ekonomi suatu wilayah.

Piramida penduduk DKI Jakarta pada semester I 2025 berikut menggambarkan distribusi jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin. Secara umum, piramida ini menunjukkan karakteristik struktur demografi yang mencerminkan dinamika kependudukan DKI Jakarta. Berdasarkan kategori dari BPS Provinsi DKI Jakarta, usia muda memiliki rentang usia 0-14 tahun, usia produktif

15-64 tahun, dan usia tua 65 tahun ke atas. Distribusi penduduk DKI Jakarta pada semester I 2025 memperlihatkan proporsi terbesar berada pada kelompok usia produktif sebesar 71,65% dari total penduduk keseluruhan, dengan kelompok usia 40-44 tahun tampak mendominasi. Diikuti penduduk usia muda dengan 21,94%, dan sisanya penduduk usia tua hanya 6,42%.

Gambar 2.23. Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



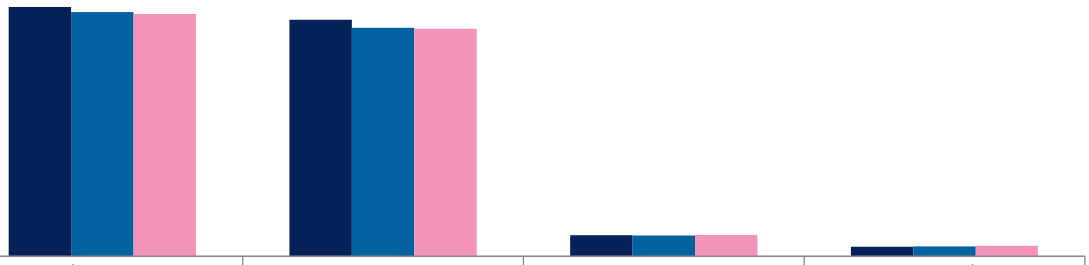
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Ketergantungan Muda	29,78	34,10	31,05	30,04	32,84	40,59
Ketergantungan Tua	10,77	8,26	10,16	9,28	8,07	5,15

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan *(dependency ratio)* adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia nonproduktif (penduduk usia di bawah 15 tahun atau lebih dari 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Adapun rasio ketergantungan muda adalah perbandingan jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Di DKI Jakarta, jumlahnya pada tahun 2024 tertinggi berada di wilayah Kepulauan Seribu dengan 40,59 sedangkan yang paling kecil adalah Jakarta Pusat dengan 29,78. Sebaliknya, pada angka rasio ketergantungan tua, Jakarta Pusatlah yang tertinggi dengan 10,77 dan terendah Kepulauan Seribu dengan 5,15.

Gambar 2.24. Status Perkawinan Penduduk Provinsi DKI Jakarta (Usia >= 19 Tahun) menurut Wilayah Tahun 2023-Semester I 2025



	Belum Kawin	Kawin	Cerai Mati	Cerai Hidup
2023	5.470.818	5.192.749	462.062	211.934
2024	5.355.404	5.012.460	455.665	214.687
Semester I 2025	5.317.845	4.994.191	469.816	228.662

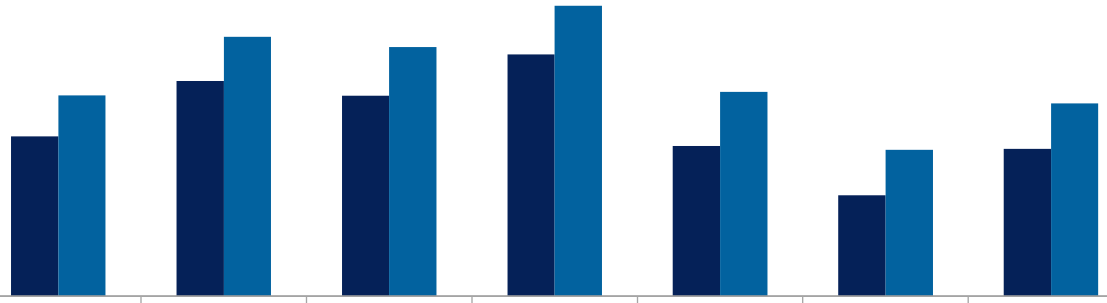
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Pada semester I tahun 2025, Disdukcapil mencatat setidaknya 5,31 juta warga DKI Jakarta berstatus belum kawin, 4,99 juta warga kawin, 469.816 cerai mati, dan 228.662 cerai hidup. Semester sebelumnya, tepatnya pada tahun 2024, angka cerai mati adalah 455.665 orang dan cerai hidup 214.687 orang. Sedangkan warga dengan status belum kawin adalah 5,35 juta orang dan yang kawin adalah 5,01 juta orang.

2.2.2. Catatan Sipil

Sebagai kota metropolitan dengan tingkat mobilitas penduduk tinggi, Jakarta memiliki sistem pencatatan sipil yang terus diperbarui untuk memastikan keakuratan data demografi. Informasi kependudukan menjadi landasan utama dalam perencanaan kebijakan pemerintah, baik dalam pengelolaan infrastruktur, layanan publik, hingga perencanaan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tahun 2023, tercatat adanya pola yang menarik dalam komposisi penduduk di berbagai wilayah administratif. Memperlihatkan bahwa komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di DKI Jakarta relatif seimbang, meskipun terdapat variasi jumlah di setiap wilayah administrasi.

Gambar 2.25. Data Wajib KTP di DKI Jakarta Semester I 2022-Semester I 2025



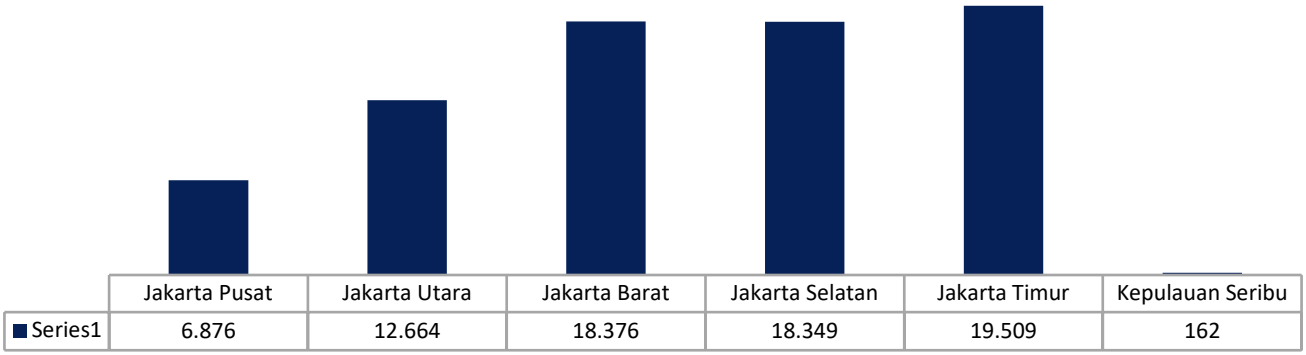
	Semester I 2022	Semester II 2022	Semester I 2023	Semester II 2023	Semester I 2024	Semester II 2024	Semester I 2025
Laki-laki	4.104.268	4.175.010	4.156.306	4.209.023	4.091.757	4.028.761	4.088.207
Perempuan	4.156.828	4.231.583	4.218.678	4.271.272	4.161.382	4.087.077	4.146.645

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta



Penduduk Indonesia berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk. Di Jakarta, jumlah penduduk yang wajib KTP pada semester I tahun 2025 adalah 8,23 juta penduduk yang terdiri dari 4,08 juta penduduk laki-laki dan 4,14 penduduk perempuan. Jumlah penduduk yang wajib KTP mengalami penurunan 0,22% dibandingkan dengan semester I tahun 2024. Secara spesifik, terjadi penurunan 0,09% pada penduduk laki-laki dan 0,35% pada penduduk perempuan. Jika ditinjau berdasarkan wilayah, Jakarta Timur merupakan yang terbanyak dengan 2,39 juta penduduk wajib KTP yang terdiri dari 1,18 juta laki-laki dan 1,20 juta perempuan. Sedangkan Kepulauan Seribu merupakan yang paling sedikit dengan 21.375 orang.

Gambar 2.26. Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga di DKI Jakarta Tahun 2024



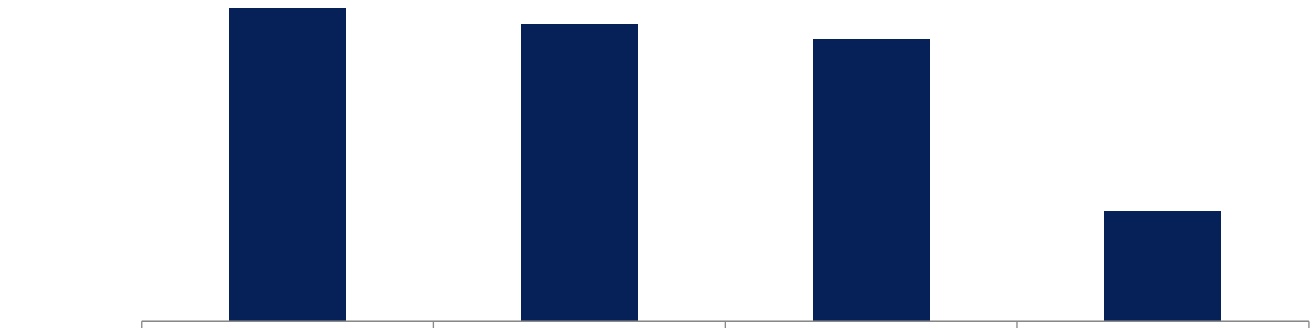
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Series1	6.876	12.664	18.376	18.349	19.509	162

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Terdapat 70 ribu lebih Kartu Keluarga (KK) diterbitkan sepanjang tahun 2024 di DKI Jakarta. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Jakarta Timur merupakan wilayah administrasi dengan populasi penduduk terbesar, dengan 25,69% dari total keseluruhan KK yang diterbitkan adalah di wilayah ini. Sementara wilayah dengan penerbitan KK paling sedikit adalah di Kepulauan Seribu, hanya 0,21% dari total keseluruhan KK yang diterbitkan pada tahun 2024. Selain kepemilikan KK, dalam sistem administrasi kependudukan, kepemilikan dokumen resmi lainnya seperti KTP dan Kartu Identitas Anak (KIA) juga menjadi indikator penting dalam menjamin hak-hak sipil setiap warga negara. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) menekankan bahwa kepemilikan dokumen kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi, tetapi juga menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional, pencatatan administrasi kependudukan di DKI Jakarta terus diperkuat untuk memastikan seluruh penduduk memiliki dokumen identitas yang sah. Dengan berbagai upaya digitalisasi dan program jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil DKI Jakarta, sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan tanpa perlu mendatangi kantor Dukcapil, tingkat kepemilikan dokumen kependudukan di DKI Jakarta terus menunjukkan angka yang tinggi dan merata.

Gambar 2.27. Rata-rata Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Jenis KK, KTP, dan KIA di DKI Jakarta Tahun 2023



	KTP-EL	Dokumen Dafduk	KIA	Dokumen Capil
Persentase	100,00	99,11	98,21	88,34

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

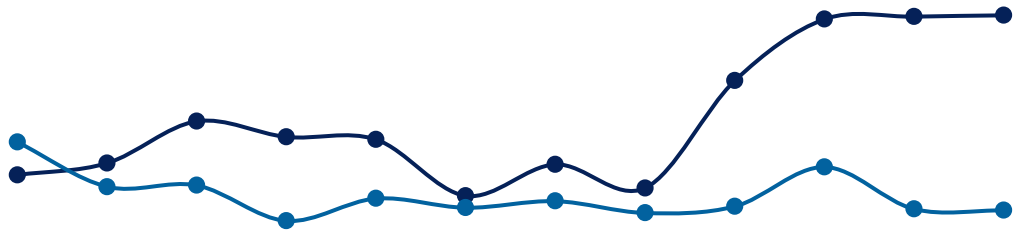
Berkas selanjutnya, pada tahun 2024, sebanyak 100% warga DKI Jakarta yang sudah memenuhi syarat usia memiliki KTP-el. Dibandingkan dengan 99,11% kepemilikan dokumen dafduk (pendaftaran penduduk), 98,21% Kartu Identitas Anak (KIA), dan 88,34% dokumen catatan sipil.

2.3. Komunikasi dan Informatika

2.3.1. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Perkembangan serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengubah wajah perkotaan di seluruh dunia, khususnya DKI Jakarta, mendorong implementasi konsep Kota Cerdas *(Smart City)* guna pengembangan kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup warganya. Infrastruktur komunikasi yang baik, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi dan stabil, menjadi fondasi bagi inovasi dan layanan berbasis digital yang dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan penduduk.

Gambar 2.28. Persentase Pemenuhan Layanan Komunikasi Publik



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
PPID DKI Jakarta	84	93	125	113	111	68	92	74	156	203	205	206
Jalahoaks	109	75	76	49	66	59	64	55	60	90	58	57

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

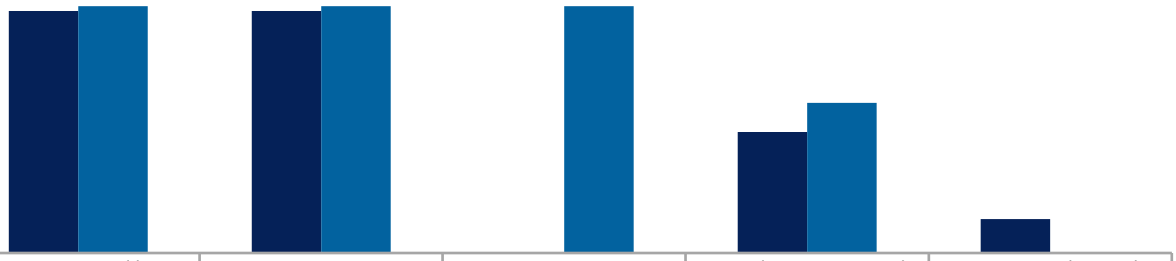
Seluruh permohonan layanan informasi dan komunikasi publik yang masuk melalui kanal Jalahoaks dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DKI Jakarta pada tahun 2024 telah ditindaklanjuti sepenuhnya, mencatatkan tingkat pemenuhan hingga 100%. Sebagai sebuah pengembangan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta, Jalahoaks merupakan kanal informasi yang dapat diandalkan warga sebagai media pengecekan fakta dan edukasi literasi digital bagi masyarakat Jakarta.

Sementara PPID DKI Jakarta memiliki tanggung jawab serta tugas yang salah satunya adalah memberikan layanan informasi kepada publik. Hal ini selaras dengan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Gubernur No. 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 13 Tahun 2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Maka dari itu, capaian dari pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik ini menunjukkan komitmen dari Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan layanan informasi yang transparan dan responsif kepada masyarakat DKI Jakarta.

Capaian pemenuhan layanan informasi yang telah disampaikan sebelumnya sejalan dengan hasil pemenuhan data prioritas dari tahun 2023 hingga 2024. Seluruh target data yang telah ditetapkan setiap triwulan berhasil dipenuhi sepenuhnya, dengan tingkat pencapaian 100%.

Gambar 2.29. Jumlah Layanan Perangkat Daerah Provinsi yang Telah Menggunakan Layanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah



	Pengamanan Aplikasi *Website* dan IT *Security*	Pengamanan Email bersandi	Proxy Internet	*Virtual Private Network* (VPN)	Kontra Penginderaan dan *Jammer*
2023	50	50	0	25	7
2024	51	51	51	31	0

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

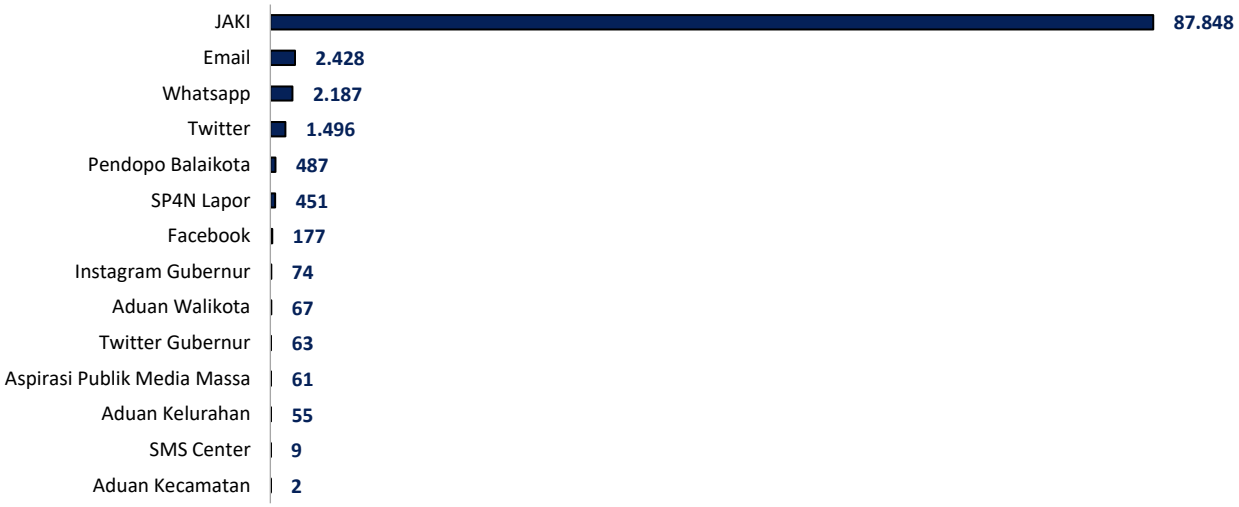
Sebagai salah satu bagian dari ekosistem digital, keamanan informasi menjadi aspek krusial dalam pengelolaan data pemerintahan. Pada tahun 2024, penggunaan email bersandi meningkat tipis dari sebelumnya 50 perangkat daerah menjadi 51. Begitu pula dengan pengamanan *website* dan *Information Technology* (IT) *security* yang kini mencakup lebih banyak layanan dibandingkan tahun sebelumnya.

Virtual Private Network (VPN), yang berfungsi untuk mengamankan koneksi internal, juga alami peningkatan dari semula 25 tahun 2023 menjadi 31 tahun 2024. Secara definisi, VPN merupakan cara aman untuk mengakses *Local Area Network* (LAN) yang berada pada jangkauan tertentu, dengan menggunakan internet atau jaringan umum lainnya untuk melakukan transmisi data paket secara pribadi.



Pada cakupannya secara keseluruhan, setiap OPD di Provinsi DKI Jakarta tercatat telah menerapkan layanan persandian dalam pengamanan informasi mereka. Dengan total OPD yang seluruhnya telah mengadopsi sistem ini, memberikan capaian 100% dalam penerapan keamanan informasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Gambar 2.30. Cepat Respon Masyarakat (CRM) Semester I Tahun 2024

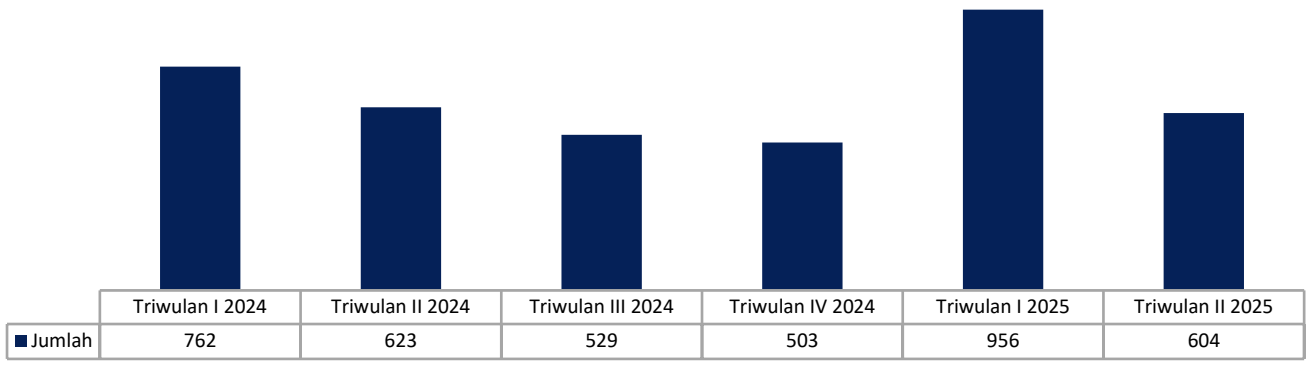


Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Jakarta Kini (JAKI), merupakan aplikasi resmi milik Pemprov DKI Jakarta yang merupakan platform layanan terintegrasi untuk warga DKI Jakarta. Dengan fungsinya yang dapat digunakan untuk banyak keperluan seperti melaporkan masalah, mengecek harga pangan, mengetahui lokasi banjir dan lain-lain, JAKI menjadi kanal utama dalam sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM) di semester I tahun 2025, dengan total hampir 90 ribu laporan yang masuk di kanal ini dalam satu semester. JAKI mengungguli kanal lainnya dengan selisih yang sangat signifikan. Sebagai perbandingan, kanal pelaporan melalui email, yang menempati posisi kedua, hanya mencatat 2,54% dari jumlah laporan yang masuk melalui JAKI. Selain itu, beberapa kanal digital lain seperti WhatsApp dan Twitter (sekarang X) juga cukup banyak dimanfaatkan warga, meskipun angkanya masih jauh di bawah JAKI.

Di sisi lain, kanal pelaporan melalui jalur formal seperti SP4N Lapor! Dan Pendopo Balai Kota menunjukkan bahwa aduan langsung kepada pemerintah tetap digunakan, meskipun dalam jumlah yang jauh lebih kecil. Di antara berbagai kanal yang tersedia, aduan melalui kecamatan menjadi yang paling jarang digunakan, dengan hanya 2 laporan sepanjang semester 1 tahun 2025.

Gambar 2.31. Jumlah Target dan Terpenuhi Pemenuhan Data Prioritas Triwulan I 2024 tahun Triwulan II 2025



	Triwulan I 2024	Triwulan II 2024	Triwulan III 2024	Triwulan IV 2024	Triwulan I 2025	Triwulan II 2025
Jumlah	762	623	529	503	956	604

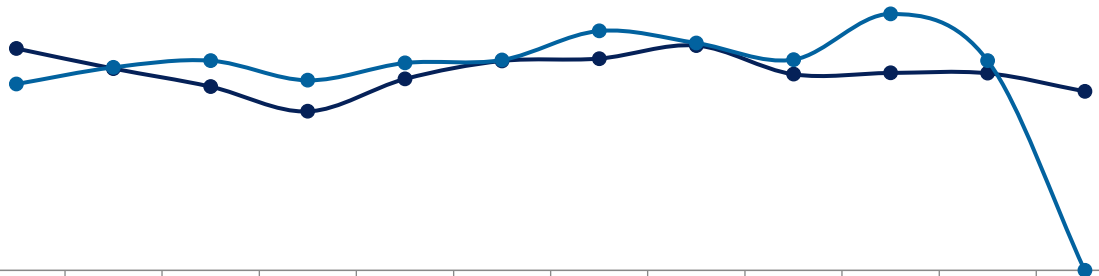
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dalam memastikan keterbukaan data dan akses informasi bagi publik, Portal Open Data Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu sumber rujukan utama yang menyediakan berbagai dataset sepanjang tahunnya. Konsep open data/*open government* pada dasarnya mengandung makna bahwa pemerintah yang terbuka/transparan, mengundang elemen rakyat untuk berpartisipasi dan mengajak segenap unsur masyarakat berkolaborasi memecahkan pelbagai masalah demi kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, upaya untuk menerapkan konsep open data/*open government* dimulai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kemudian melalui klausul dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pada Bagian Keempat, yaitu Kewajiban Badan Publik di Pasal 8, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Bagian Ketiga yaitu tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik di Pasal 23. Kemudian juga, dalam UU KIP ini berbagai lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah didorong untuk menggunakan teknologi digital dalam publikasi dari data-data terkait. Pada Portal Open Data Provinsi DKI Jakarta, terlihat konsistensi dalam penyediaan dataset ini tercermin dari jumlah yang bervariasi di setiap bulannya, dengan lonjakan signifikan pada beberapa periode tertentu. Grafik di atas menampilkan data prioritas yang dipenuhi/dihasilkan oleh produsen data dibandingkan dengan jumlah daftar data prioritas daerah. Penyusunan Daftar Data Prioritas dilakukan pada Forum Satu Data Tingkat Daerah dan merupakan kesepakatan dari Produsen Data, Sekretaris Satu Data Tingkat Daerah, dan Walidata. Pada semester triwulan II 2025, jumlah data yang terpenuhi adalah 604 data dengan persentase 100% dari target. Pemenuhan data mencapai 100% setidaknya sejak triwulan I 2023 hingga triwulan II 2025.

Dalam era digital ini, transparansi dan keterbukaan informasi tentu menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Salah satu indikator yang mencerminkan keterbukaan ini adalah jumlah berita yang dipublikasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kanal berita resminya. Mengacu pada konsep open government, publikasi berita yang konsisten menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses informasi bagi masyarakat.

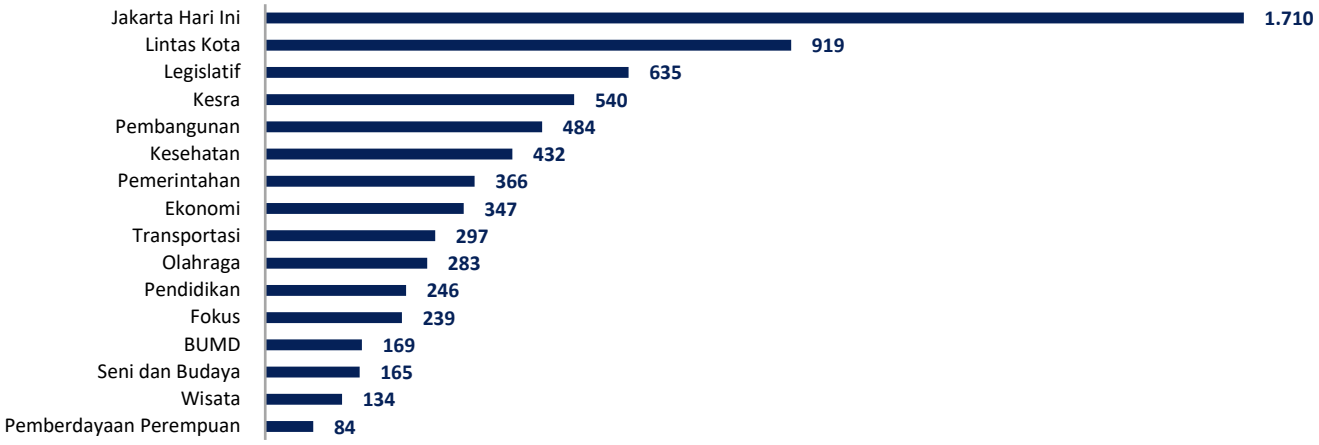
Gambar 2.32. Jumlah Berita yang di *Publish* pada *Website* Berita Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Januari 2024-November 2025



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2024	665	605	551	477	574	628	635	674	588	592	591	537
2025	559	609	629	570	622	631	718	682	632	769	629	-

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Gambar 2.33. Kategori Berita yang Dipublikasikan pada Website Berita Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Januari-November 2025



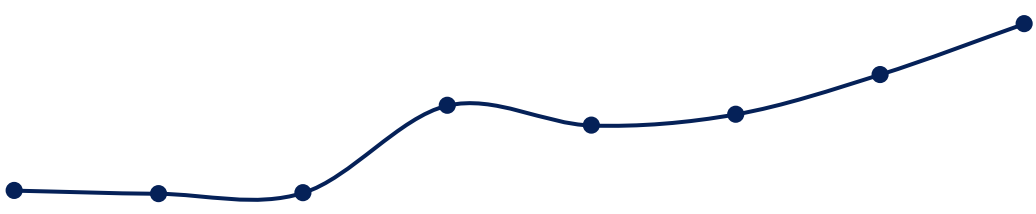
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Hingga tulisan ini dibuat, tepatnya pada 14 Februari 2026, rekap jumlah berita yang dipublikasi pada website berita resmi pemerintah pada tahun 2025, tepatnya Januari hingga November adalah 7.050 judul. Angka ini masih akan terus bertambah karena data di atas belum termasuk bulan Desember. Sejauh ini, Oktober merupakan bulan dengan judul berita terbanyak dengan 769 judul. Kategori berita terbanyak yang dipublikasi adalah Jakarta Hari Ini dengan 1.710 judul, disusul Lintas Kota dengan 919 judul, dan Legislatif dengan 635 judul. Pemberdayaan perempuan merupakan kategori paling sedikit dengan 84 judul.

2.3.2. Layanan Komunikasi

Siaran pers yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan dinamika komunikasi publik pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kebijakan, program, dan kegiatan kepada masyarakat melalui media massa dan media daring. Berdasarkan data triwulanan yang dihimpun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sepanjang tahun 2024 total siaran pers yang dirilis dan ditayangkan mencapai 636 siaran pers.

Gambar 2.34. Jumlah Siaran Pers Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



	Triwulan I 2024	Triwulan II 2024	Triwulan III 2024	Triwulan IV 2024	Triwulan I 2025	Triwulan II 2025	Triwulan III 2025	Triwulan IV 2025
Jumlah	134	130	131	241	216	230	280	344

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada Triwulan I Tahun 2024, jumlah siaran pers tercatat sebanyak 134 rilis, kemudian mengalami sedikit penurunan pada Triwulan II 2024 menjadi 130 rilis. Selanjutnya, pada Triwulan III 2024, jumlah siaran pers relatif stabil dengan 131 rilis. Peningkatan signifikan terjadi pada Triwulan IV 2024, di mana jumlah siaran pers meningkat tajam menjadi 241 rilis, atau hampir dua kali lipat dibandingkan triwulan sebelumnya, seiring meningkatnya intensitas penyampaian informasi strategis pemerintah daerah. Memasuki tahun 2025, aktivitas komunikasi publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menunjukkan intensitas yang tinggi. Pada Triwulan I 2025, jumlah siaran pers tercatat sebanyak 216 rilis, kemudian kembali meningkat pada Triwulan II 2025 dengan total 230 rilis. Kondisi ini mencerminkan konsistensi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan fungsi komunikasi publik secara berkelanjutan.

Gambar 2.35. Jumlah Dataset di Portal satu Data Indonesia Tingkat Provinsi DKI Jakarta

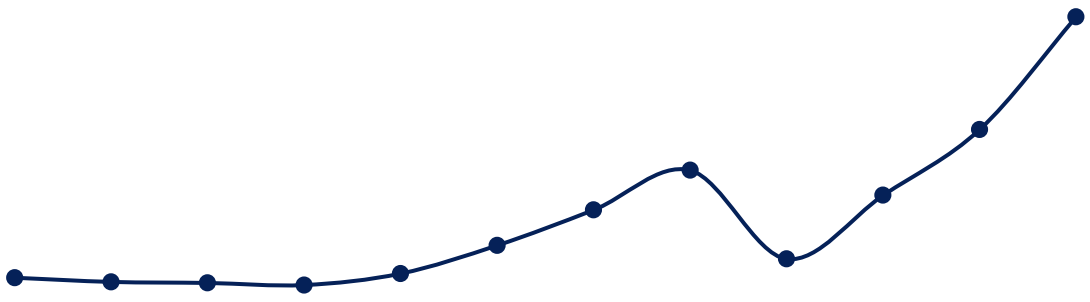


	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025	TW II 2025	TW III 2025	TW IV 2025
Jumlah	762	623	529	503	956	604	593	505

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Jumlah dataset yang dipublikasikan pada Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi DKI Jakarta mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan keterbukaan data serta mendukung perencanaan pembangunan berbasis data. Berdasarkan data yang dihimpun dari seluruh perangkat daerah, total dataset yang tersedia mencapai 3.977 dataset. Kontribusi dataset berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah yang bervariasi. Perbedaan jumlah dataset antar perangkat daerah menunjukkan variasi kapasitas, karakteristik tugas, serta ketersediaan data sektoral yang dikelola oleh masing-masing OPD.

Gambar 2.36. Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2025

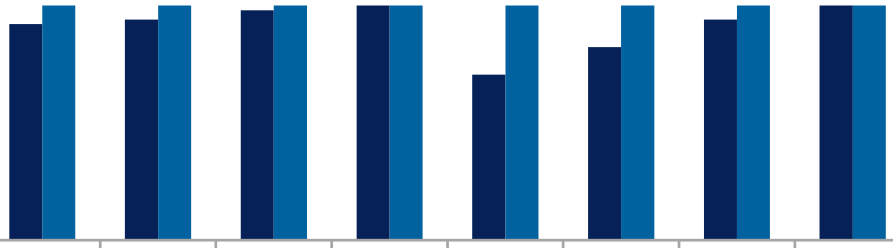


	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025	TW II 2025	TW III 2025	TW IV 2025
Jumlah	29	25	24	22	33	60	94	132	47	108	171	279

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Penyelenggaraan statistik sektoral di Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung sistem data yang terpadu, akurat, dan berkelanjutan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebanyak 1.156 kegiatan. Kontribusi penyelenggaraan statistik sektoral berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan intensitas yang berbeda-beda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Perbedaan jumlah penyelenggaraan statistik sektoral antar OPD mencerminkan variasi kebutuhan data, ruang lingkup urusan pemerintahan, serta kapasitas pengelolaan statistik di masing-masing perangkat daerah.

Gambar 2.37. Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan di DKI Jakarta



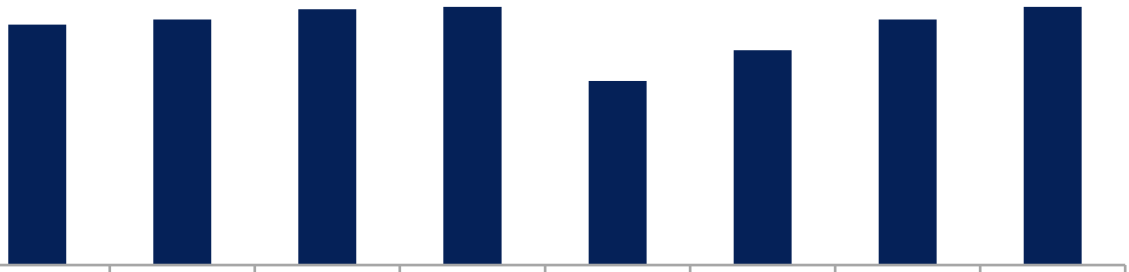
	Triwulan I 2024	Triwulan II 2024	Triwulan III 2024	Triwulan IV 2024	Triwulan I 2025	Triwulan II 2025	Triwulan III 2025	Triwulan IV 2025
Perangkat Daerah yang Menggunakan	47	48	50	51	36	42	48	51
Jumlah Perangkat Daerah	51	51	51	51	51	51	51	51

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pemanfaatan data statistik oleh perangkat daerah merupakan indikator penting dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berbasis data. Berdasarkan data triwulanan, persentase perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta yang menggunakan data statistik menunjukkan kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu, meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada Triwulan I Tahun 2024, jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik tercatat sebanyak 47 perangkat daerah, dengan persentase sebesar 92,16 persen. Angka ini meningkat pada Triwulan II 2024 menjadi 48 perangkat daerah atau setara dengan 94,12 persen. Selanjutnya, pada Triwulan III 2024, jumlah perangkat daerah kembali meningkat menjadi 50 perangkat daerah dengan persentase 98,04 persen. Puncaknya terjadi pada Triwulan IV 2024, di mana seluruh 51 perangkat daerah telah menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan, sehingga persentasenya mencapai 100 persen.



Gambar 2.38. Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan di DKI Jakarta

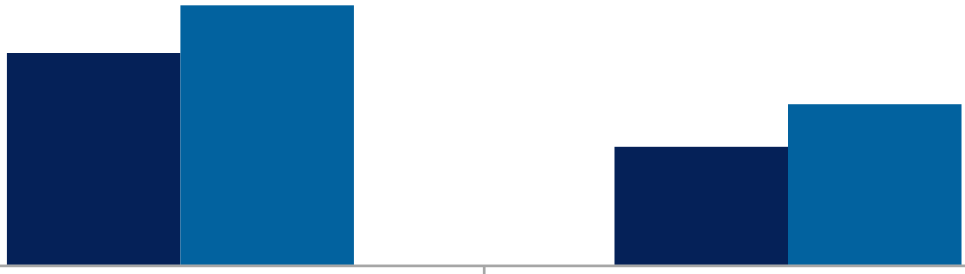


	Triwulan I 2024	Triwulan II 2024	Triwulan III 2024	Triwulan IV 2024	Triwulan I 2025	Triwulan II 2025	Triwulan III 2025	Triwulan IV 2025
Persentase	92,16	94,12	98,04	100,00	70,59	82,35	94,12	100,00

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik tercatat sebanyak 36 perangkat daerah, dengan persentase 70,59 persen. Angka ini kemudian meningkat pada Triwulan II 2025 menjadi 42 perangkat daerah atau sebesar 82,35 persen. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya penguatan kembali pemanfaatan data statistik oleh perangkat daerah dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Gambar 2.39. Nilai Perencanaan Kinerja dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Target	Capaian
2023	26,00	25,56
2024	26,30	25,76

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nilai Perencanaan Kinerja dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi DKI Jakarta menggambarkan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merumuskan perencanaan kinerja yang selaras antara tujuan, sasaran, indikator, dan target pembangunan daerah. Evaluasi ini dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, dan pada grafik ditampilkan perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, target Nilai Perencanaan Kinerja ditetapkan sebesar 26 dengan capaian sebesar 25,56, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja berada sedikit di bawah target yang direncanakan. Selanjutnya, pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan target menjadi 26,3 dan diikuti dengan peningkatan capaian menjadi 25,76. Meskipun capaian pada kedua tahun tersebut belum sepenuhnya mencapai target, tren peningkatan dari tahun 2023 ke 2024

menunjukkan adanya upaya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas perencanaan kinerja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berjalan relatif baik, namun masih memerlukan penguatan, terutama dalam penajaman indikator kinerja dan peningkatan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program, agar perencanaan kinerja dapat semakin efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan pedoman Evaluasi AKIP yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Gambar 2.40. Predikat Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi DKI Jakarta

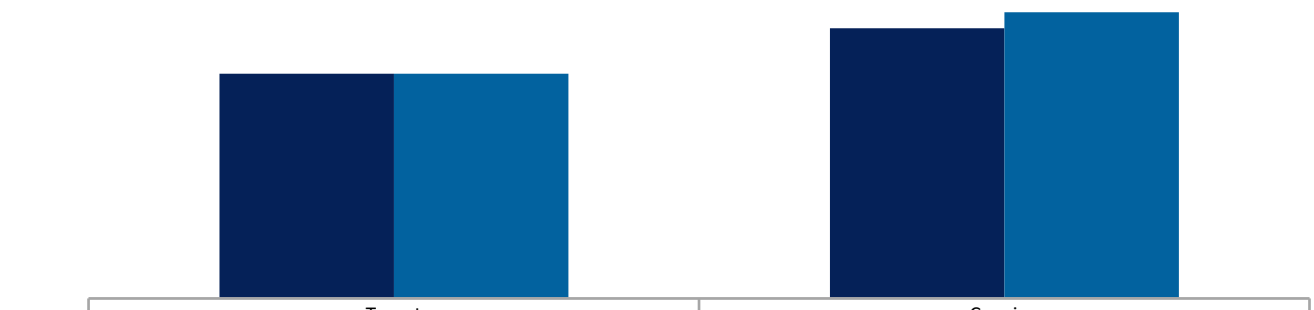


	Target	Capaian
2024	84,00	81,66

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Pada tahun 2023, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di DKI Jakarta adalah 4,21. Pada tahun 2024, angkanya kembali meningkat menjadi 4,46. Lonjakan ini menempatkan Jakarta sebagai salah satu pionir digitalisasi birokrasi di Indonesia. Peningkatan ini terjadi seiring dengan upaya masif Pemprov DKI Jakarta dalam mengintegrasikan berbagai layanan publik ke dalam satu platform terpadu serta penguatan infrastruktur teknologi informasi di seluruh wilayah kota administratif. Proses pencapaian nilai 4,46 tersebut dilakukan melalui optimalisasi empat domain utama: kebijakan internal, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE yang lebih berorientasi pada kebutuhan pengguna. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi simbol prestasi administratif, tetapi juga menjadi fondasi bagi Jakarta dalam bertransformasi menjadi Kota Global yang efisien, di mana seluruh layanan masyarakat dapat diakses secara cepat dan akurat melalui sistem digital yang terintegrasi.

Gambar 2.41. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi DKI Jakarta



	Target	Capaian
2023	3,50	4,21
2024	3,50	4,46

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Di tahun 2023, Indeks SPBE berhasil mencatatkan capaian yang melampaui target. Dengan pencapaian ini, Indeks SPBE mengalami kelebihan sebesar 20,29% dari target awal. Dalam upaya meningkatkan keterjangkauan layanan digital, penyediaan layanan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, bahwa teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, tetapi sudah menjadi suatu keharusan. Sementara itu, Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta mencatat, bahwa layanan TIK pada tahun 2023 telah mencakup 51 perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kesiapan pemerintah dalam mengadopsi sistem berbasis elektronik juga dinilai melalui kematangan layanan TIK. Tingkat kematangan layanan TIK ini dapat memperlihatkan seberapa baik infrastruktur, kebijakan, serta implementasi digital telah diterapkan dalam ekosistem pemerintahan di DKI Jakarta.

Gambar 2.42. Jumlah Pemenuhan Layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi Provinsi DKI Jakarta

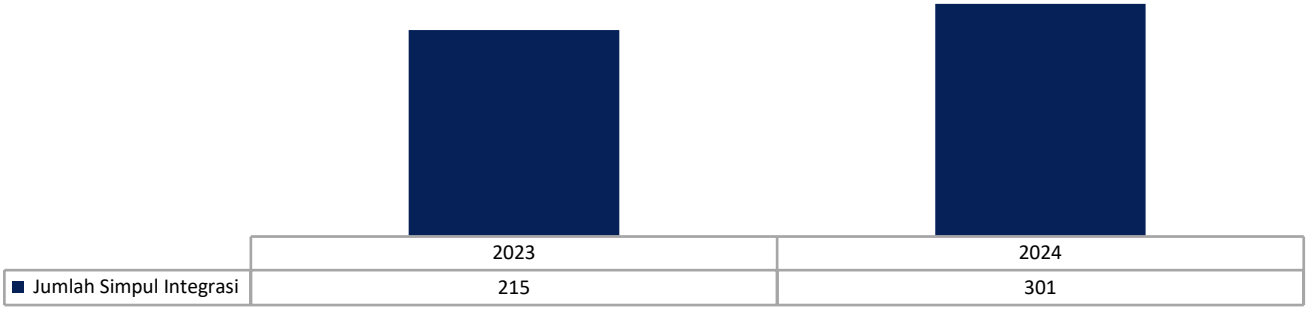


	2023	2024
Jumlah OPD	51	51

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat fondasi transformasi digital guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta, tercatat bahwa jumlah pemenuhan layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) menjangkau seluruh Perangkat Daerah di lingkungan provinsi. Pada periode tahun 2023 hingga 2024, tercatat sebanyak 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mendapatkan pemenuhan layanan TIK secara penuh. Konsistensi angka ini menunjukkan bahwa strategi digitalisasi Jakarta tidak lagi sekadar wacana, melainkan sebuah standar operasional yang wajib dipenuhi oleh setiap instansi. Upaya ini dilakukan secara terpusat melalui integrasi infrastruktur digital guna memastikan seluruh layanan publik, mulai dari tingkat dinas hingga badan administratif, beroperasi di atas platform teknologi yang mumpuni. Stabilitas data dalam dua tahun terakhir mencerminkan komitmen Jakarta sebagai kota global yang mengandalkan kematangan digital sebagai tulang punggung pelayanan masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan TIK di 51 OPD ini, sinkronisasi data antarinstansi menjadi lebih cepat dan akurat, yang pada akhirnya mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan dalam satu ekosistem digital yang terpadu.

Gambar 2.43. Jumlah Cakupan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	2023	2024
Jumlah Simpul Integrasi	215	301

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2023, jumlah cakupan yang tercatat mencapai 215, dan mengalami peningkatan signifikan menjadi 301 cakupan pada tahun 2024. Peningkatan ini terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan jejaring perangkat daerah serta sistem layanan terkait. Kenaikan jumlah simpul integrasi tersebut menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas keterhubungan antar aplikasi dan layanan publik guna mewujudkan layanan yang lebih efisien, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penguatan cakupan Sistem Penghubung Layanan (SPL) dilakukan melalui pengembangan integrasi sistem antar perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sebagai tulang punggung transformasi digital pemerintahan.

Gambar 2.44. Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta



	2022	2023	2024
Jumlah	181	182	201

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu periode 2022 hingga 2024. Data ini menggambarkan upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik melalui peningkatan kapasitas dan legalitas pejabat PPID pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD). Pada tahun 2022, jumlah pejabat PPID yang telah memiliki sertifikat tercatat sebanyak 181 orang. Angka ini meningkat menjadi 182 orang pada tahun 2023, menunjukkan adanya penambahan meskipun relatif terbatas. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana jumlah kepemilikan sertifikat PPID mencapai 201 orang, atau bertambah 19 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

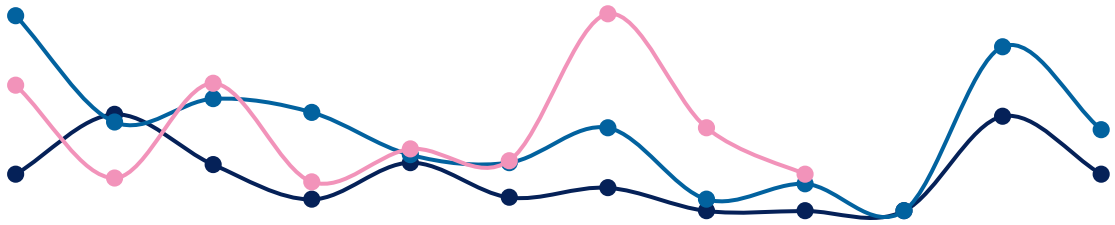
Lonjakan ini mengindikasikan adanya penguatan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan PPID yang lebih intensif di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Peningkatan jumlah sertifikasi paling menonjol terjadi pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem keterbukaan informasi publik secara berjenjang dan berkelanjutan serta diharapkan dapat berdampak langsung pada kualitas layanan informasi kepada masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Provinsi DKI Jakarta.

2.4. Kebencanaan

2.4.1. Bencana Alam

Kejadian bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2023, tahun 2024, hingga Semester I Tahun 2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi baik secara waktu kejadian maupun wilayah terdampak. Berdasarkan data bulanan, kejadian banjir terjadi hampir sepanjang tahun dengan intensitas yang berbeda pada setiap bulan dan tahun.

Gambar 2.45. Jumlah Kejadian Banjir menurut Bulan di DKI Jakarta Tahun 2023-Semester I 2025



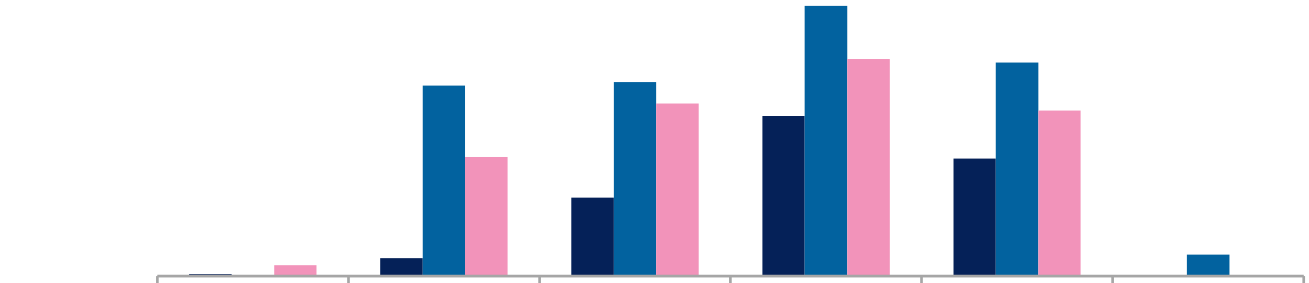
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2023	19	50	24	6	25	7	12	0	0	0	49	19
2024	101	46	58	51	29	25	43	6	14	0	85	42
2025	65	17	66	15	32	26	102	43	19			

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2023, kejadian banjir terbanyak tercatat terjadi pada bulan Februari sebanyak 50 kejadian. Pada tahun 2024, kejadian banjir terjadi sepanjang hampir seluruh bulan dengan jumlah yang relatif lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kejadian terbanyak ada di bulan Januari sebanyak 101 kejadian. Memasuki tahun 2025 (Semester I), kejadian banjir masih tercatat cukup tinggi. Pada bulan Januari 2025 terjadi 65 kejadian, Februari 17 kejadian, Maret 66 kejadian, April 15 kejadian, Mei 32 kejadian, dan Juni 26 kejadian.



Gambar 2.46. Jumlah Kejadian Banjir menurut Kota/Kabupaten di DKI Jakarta Tahun 2023-Semester I 2025

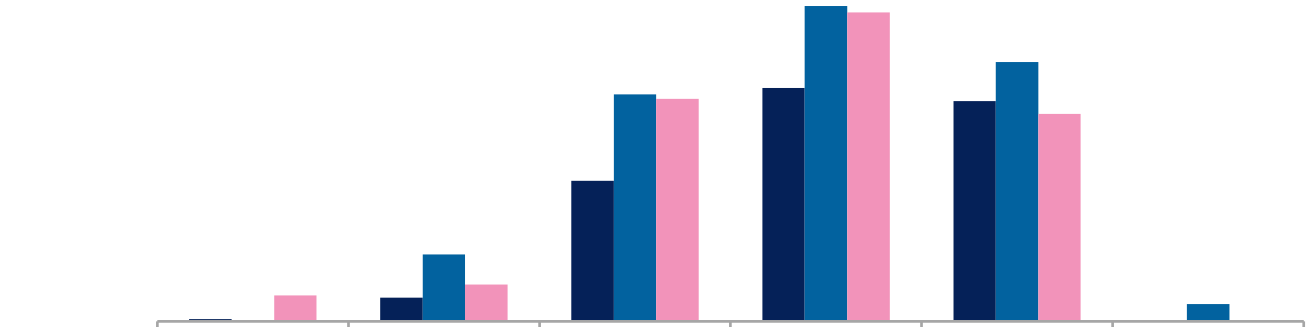


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	1	10	44	90	66	0
2024	0	107	109	152	120	12
Jan-Sept 2025	6	67	97	122	93	0

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Ditinjau menurut wilayah administrasi, pada tahun 2023, kejadian banjir paling banyak terjadi di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebanyak 90 kejadian, diikuti oleh Jakarta Timur sebanyak 66 kejadian, Jakarta Barat sebanyak 44 kejadian, Jakarta Utara sebanyak 10 kejadian, dan Jakarta Pusat sebanyak 1 kejadian. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mencatat kejadian banjir pada tahun tersebut. Pada tahun 2024, seluruh kota/kabupaten di Provinsi DKI Jakarta mengalami kejadian banjir. Jumlah kejadian terbanyak tercatat di Jakarta Selatan sebanyak 152 kejadian, Jakarta Timur sebanyak 120 kejadian, Jakarta Barat sebanyak 109 kejadian, Jakarta Utara sebanyak 107 kejadian, serta Kepulauan Seribu sebanyak 12 kejadian, sementara Jakarta Pusat tidak mencatat kejadian banjir. Pada Semester I Tahun 2025, kejadian banjir kembali terjadi di hampir seluruh wilayah, dengan jumlah tertinggi di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan masing-masing sebanyak 59 kejadian, diikuti Jakarta Timur sebanyak 53 kejadian, Jakarta Utara sebanyak 48 kejadian, dan Jakarta Pusat sebanyak 2 kejadian. Kepulauan Seribu kembali tidak mencatat kejadian banjir pada periode ini.

Gambar 2.47. Jumlah RW yang Terdampak Banjir menurut Kota/Kabupaten di DKI Jakarta Tahun 2023-Semester I 2025

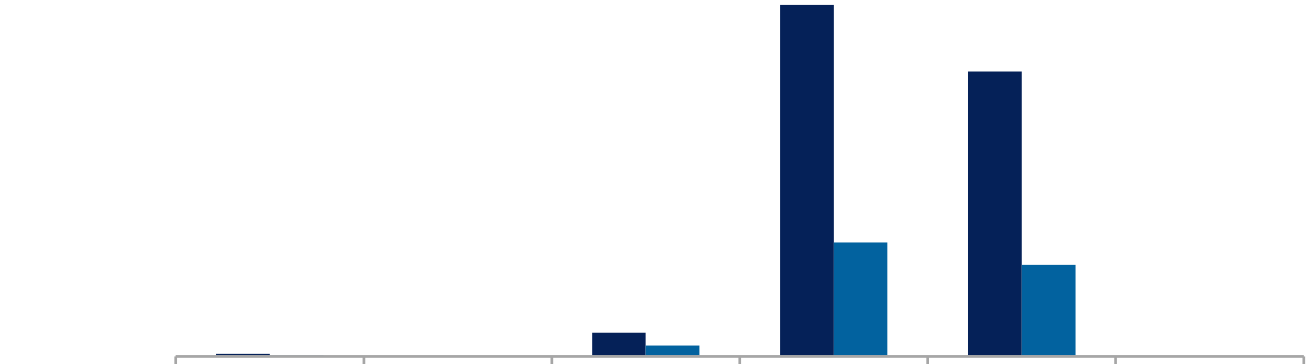


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	1	11	65	108	102	0
2024	0	31	105	146	120	8
Jan-Sept 2025	12	17	103	143	96	0

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Dampak kejadian banjir juga terlihat dari jumlah Rukun Warga (RW) terdampak. Pada tahun 2023, RW terdampak tercatat di Jakarta Selatan sebanyak 108 RW, Jakarta Timur 102 RW, Jakarta Barat 65 RW, Jakarta Utara 11 RW, dan Jakarta Pusat 1 RW, sementara Kepulauan Seribu tidak mencatat RW terdampak. Pada tahun 2024, jumlah RW terdampak meningkat, dengan Jakarta Selatan sebanyak 146 RW, Jakarta Timur 120 RW, Jakarta Barat 105 RW, Jakarta Utara 31 RW, Kepulauan Seribu 8 RW, dan Jakarta Pusat 0 RW. Pada Semester I Tahun 2025, RW terdampak tercatat di Jakarta Selatan sebanyak 74 RW, Jakarta Barat 70 RW, Jakarta Timur 53 RW, Jakarta Utara 12 RW, dan Jakarta Pusat 3 RW, sementara Kepulauan Seribu tidak mencatat RW terdampak.

Gambar 2.48. Jumlah Jiwa dan KK yang Terdampak Banjir menurut Kota/Kabupaten di DKI Jakarta Semester I 2025

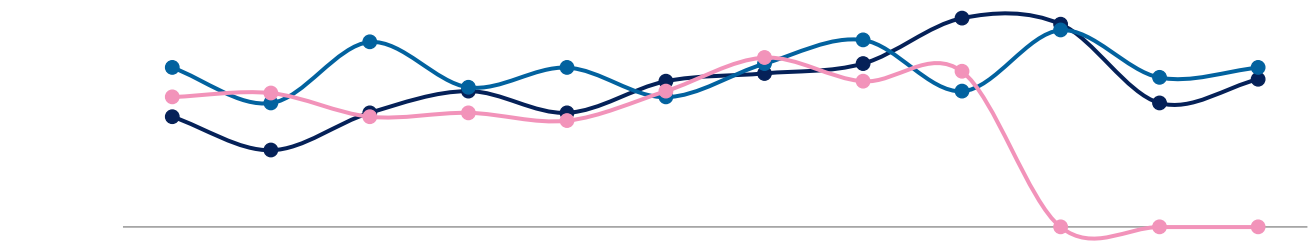


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jiwa Terdampak	71	0	707	10.526	8.528	0
KK Terdampak	20	0	322	3.411	2.742	0

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Pada Semester I Tahun 2025, dampak terhadap penduduk tercatat sebanyak 7.245 jiwa terdampak dengan total 2.443 kepala keluarga (KK). Dampak terbesar terjadi di Jakarta Timur dengan 3.788 jiwa dan 1.193 KK, diikuti Jakarta Selatan sebanyak 2.957 jiwa dan 1.000 KK, serta Jakarta Barat dengan 500 jiwa dan 250 KK. Sementara itu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu tidak mencatat adanya jiwa maupun KK terdampak pada periode tersebut.

Gambar 2.49. Jumlah Kejadian Kebakaran menurut Bulan di DKI Jakarta Tahun 2023-September 2025

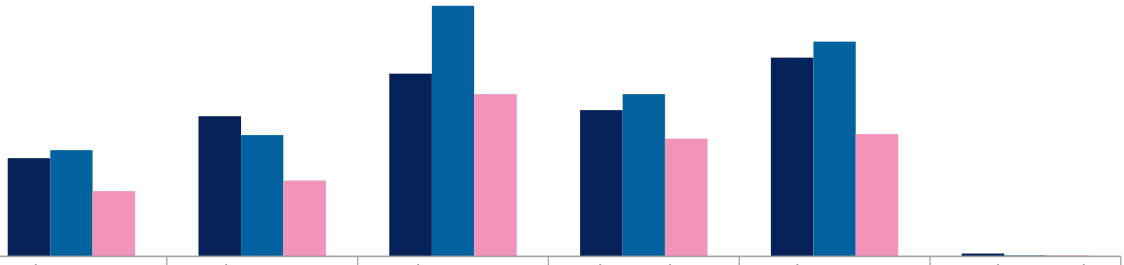


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2023	56	39	58	69	58	74	78	83	106	103	63	75
2024	81	63	94	71	81	66	83	95	69	100	76	81
2025	66	68	56	58	54	69	86	74	79			

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kebakaran merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di wilayah perkotaan dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Di Provinsi DKI Jakarta, kejadian kebakaran masih menjadi peristiwa yang cukup sering terjadi setiap tahunnya. Data kejadian kebakaran tahun 2023 hingga September 2025 memperlihatkan gambaran mengenai perkembangan jumlah kejadian kebakaran baik berdasarkan waktu kejadian dalam satu tahun maupun berdasarkan wilayah administrasi. Berdasarkan data jumlah kejadian kebakaran menurut bulan, terlihat bahwa kejadian kebakaran di DKI Jakarta selama periode tahun 2023 hingga September 2025 menunjukkan pola yang fluktuatif sepanjang tahun. Pada tahun 2023, jumlah kejadian kebakaran tertinggi tercatat pada bulan September sebanyak 106 kejadian, disusul bulan Agustus sebanyak 83 kejadian dan Juli sebanyak 78 kejadian, sedangkan jumlah terendah terjadi pada bulan Februari yaitu 39 kejadian. Pada tahun 2024, kejadian kebakaran tertinggi terjadi pada bulan Agustus sebanyak 95 kejadian dan Maret sebanyak 94 kejadian, sementara yang terendah terjadi pada bulan Februari yaitu 63 kejadian. Hingga September 2025, kejadian kebakaran tertinggi tercatat pada bulan Juli sebanyak 86 kejadian, diikuti bulan September sebanyak 79 kejadian dan Agustus sebanyak 74 kejadian, sedangkan jumlah terendah terjadi pada bulan Mei sebanyak 54 kejadian. Data tersebut menunjukkan bahwa kejadian kebakaran cenderung meningkat pada beberapa bulan tertentu dalam setahun.

Gambar 2.50. Jumlah Kejadian Kebakaran menurut Kota/Kabupaten di DKI Jakarta Tahun 2023-September 2025



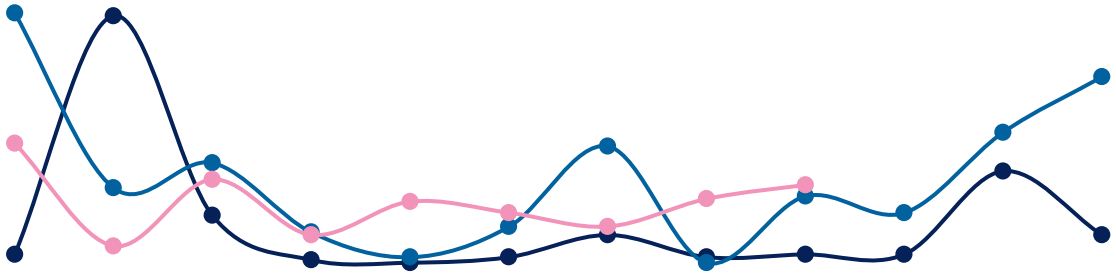
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	110	157	205	164	223	3
2024	119	136	281	182	241	1
Jan-Sept 2025	73	85	182	132	137	1

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Dilihat berdasarkan wilayah administrasi, jumlah kejadian kebakaran di DKI Jakarta selama tahun 2023 hingga September 2025 menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antar wilayah. Pada tahun 2023, kejadian kebakaran paling banyak terjadi di Jakarta Timur sebanyak 223 kejadian, diikuti Jakarta Barat sebanyak 205 kejadian dan Jakarta Selatan sebanyak 164 kejadian, sedangkan jumlah paling sedikit terjadi di Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 3 kejadian. Pada tahun 2024, wilayah dengan kejadian kebakaran tertinggi adalah Jakarta Barat sebanyak 281 kejadian, disusul Jakarta Timur sebanyak 241 kejadian dan Jakarta Selatan sebanyak 182 kejadian, sementara Kepulauan Seribu tercatat hanya 1 kejadian. Hingga September 2025, kejadian kebakaran masih didominasi oleh Jakarta Barat sebanyak 182 kejadian, diikuti Jakarta Timur sebanyak 137 kejadian dan Jakarta Selatan sebanyak 132 kejadian, sedangkan

Kepulauan Seribu tetap menjadi wilayah dengan kejadian paling sedikit yaitu 1 kejadian. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah dengan kepadatan penduduk dan aktivitas yang tinggi memiliki kecenderungan kejadian kebakaran yang lebih besar dibandingkan wilayah dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah.

Gambar 2.51. Jumlah Kejadian Pohon Tumbang menurut Bulan
di DKI Jakarta Tahun 2023 - Semester I 2025

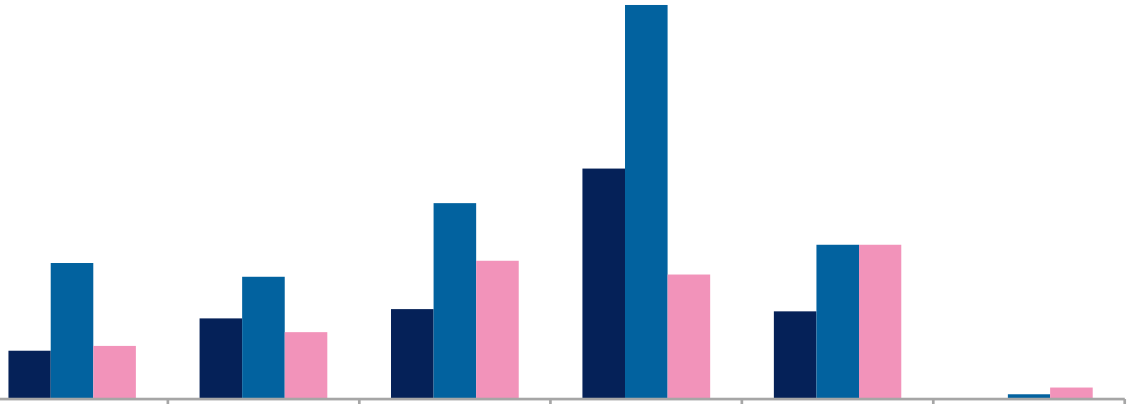


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2023	8	94	22	6	5	7	15	7	8	8	38	15
2024	95	32	41	16	7	18	47	5	29	23	52	72
2025	48	11	35	15	27	23	18	28	33			

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kejadian pohon tumbang merupakan salah satu bencana non-alam yang kerap terjadi di Provinsi DKI Jakarta dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keselamatan masyarakat, lalu lintas, serta infrastruktur perkotaan. Berdasarkan data kejadian pohon tumbang selama tahun 2023 hingga Semester I Tahun 2025, terlihat adanya fluktuasi kejadian baik menurut waktu kejadian maupun wilayah administrasi.

Gambar 2.52. Jumlah Kejadian Pohon Tumbang menurut Kota/Kabupaten
di DKI Jakarta Tahun 2023 - Semester I 2025



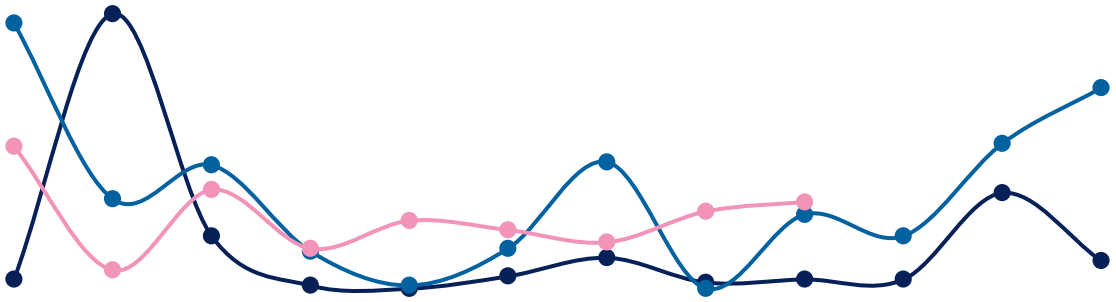
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	21	35	39	100	38	0
2024	59	53	85	171	67	2
Jan-Sept 2025	23	29	60	54	67	5

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan wilayah administrasi, kejadian pohon tumbang paling banyak terjadi di Jakarta Timur sebanyak 46 kejadian, diikuti Jakarta Barat sebanyak 37 kejadian, Jakarta Selatan sebanyak 30 kejadian, Jakarta Utara sebanyak 26 kejadian, Jakarta Pusat sebanyak 16 kejadian, serta Kepulauan Seribu sebanyak 4 kejadian.



Gambar 2.53. Jumlah Pohon Tumbang menurut Bulan di DKI Jakarta Tahun 2023 - Semester I 2025

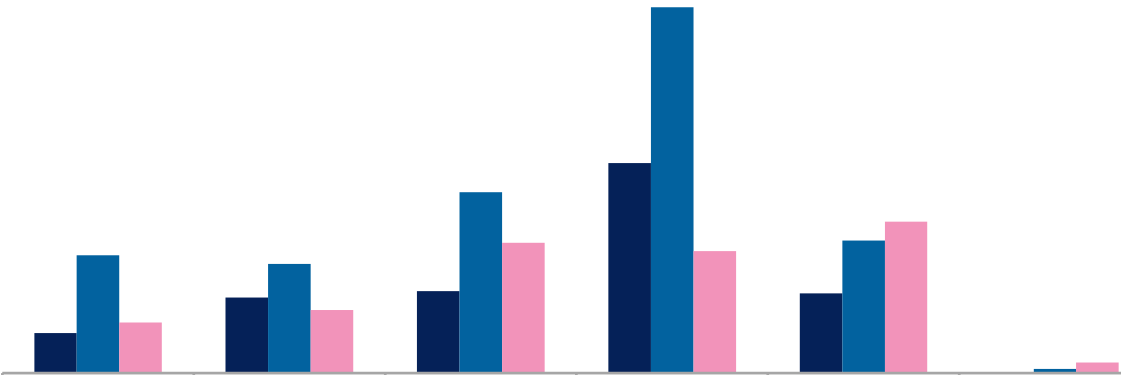


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2023	8	94	22	6	5	9	15	7	8	8	36	14
2024	91	34	45	17	6	18	46	5	29	22	52	70
2025	51	11	37	18	27	24	20	30	33			

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Selain jumlah kejadian, data juga menunjukkan jumlah pohon tumbang yang tercatat. Pada semester I tahun 2025, jumlah pohon tumbang terbanyak terjadi pada bulan Januari sebanyak 51 pohon dan Maret sebanyak 37 pohon.

Gambar 2.54. Jumlah Pohon Tumbang menurut Kota/Kabupaten di DKI Jakarta Tahun 2023 - Semester I 2025

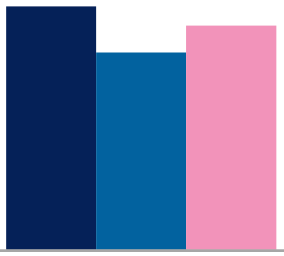


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	19	36	39	100	38	0
2024	56	52	86	176	63	2
Jan-Sept 2025	24	30	62	58	72	5

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Secara keseluruhan, data kejadian dan jumlah pohon tumbang di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2023–Semester I 2025 menunjukkan bahwa Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur merupakan wilayah dengan tingkat kejadian dan dampak pohon tumbang relatif tinggi. Informasi statistik ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pemeliharaan pohon, mitigasi risiko bencana perkotaan, serta peningkatan keselamatan dan ketahanan lingkungan di wilayah DKI Jakarta.

Gambar 2.55. Jumlah Peringatan Dini Pergerakan Tanah di DKI Jakarta Tahun 2023-Semester I 2025



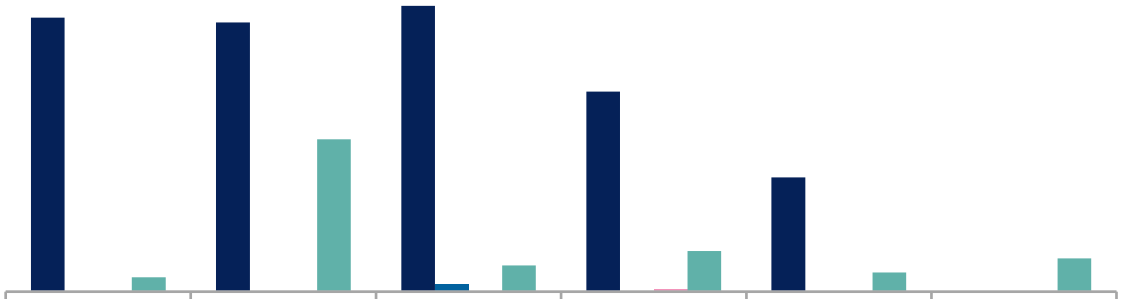
	Menengah	Menengah Tinggi	Nihil
2023	127	10	9
2024	103	17	0
2025	117	30	0

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peringatan dini pergerakan tanah merupakan salah satu upaya mitigasi bencana yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak kejadian longsor atau pergerakan tanah di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data peringatan dini pergerakan tanah selama tahun 2023 hingga Semester I Tahun 2025, jumlah peringatan yang dikeluarkan menunjukkan variasi menurut tingkat potensi kejadian. Pada tahun 2024, jumlah peringatan dini pergerakan tanah kategori menengah - tinggi meningkat menjadi 17 peringatan, sedangkan kategori menengah menurun menjadi 103 peringatan. Pada periode ini, tidak tercatat peringatan dengan kategori nihil, yang mengindikasikan adanya peningkatan kewaspadaan terhadap potensi pergerakan tanah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Memasuki Semester I Tahun 2025, peringatan dini pergerakan tanah kembali tercatat dengan 9 peringatan kategori menengah–tinggi dan 67 peringatan kategori menengah, sementara kategori nihil tidak tercatat. Jumlah ini menunjukkan bahwa potensi pergerakan tanah masih perlu diantisipasi, khususnya pada wilayah dengan karakteristik tanah dan topografi yang rentan.



Gambar 2.56. Jumlah Bencana di DKI Jakarta Tahun 2024 – Semester I 2025

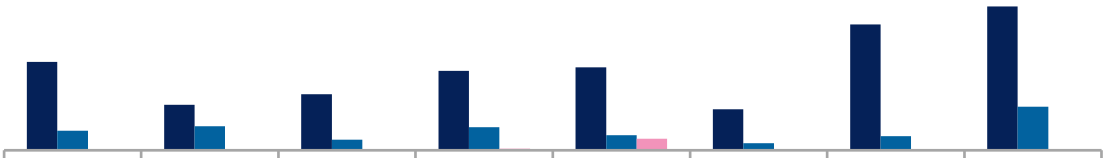


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Kebakaran	115	113	143	84	48	0
Cuaca Ekstrem	0	0	3	0	0	0
Banjir	0	0	0	1	0	0
Bencana Lainnya	6	64	11	17	8	14

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Selama tahun 2024 hingga Semester I Tahun 2025, kejadian bencana di Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh bencana kebakaran dan bencana lainnya, dengan sebaran yang berbeda di setiap kota/kabupaten. Berdasarkan wilayah, Jakarta Barat mencatat jumlah kebakaran tertinggi sebanyak 179 kejadian, disusul Jakarta Selatan 78 kejadian, sementara Kepulauan Seribu tidak mencatat kejadian kebakaran. Untuk bencana cuaca ekstrem, kejadian hanya tercatat di Jakarta Barat sebanyak 3 kejadian dan Jakarta Timur sebanyak 1 kejadian, sedangkan wilayah lainnya tidak mencatat kejadian. Bencana banjir hanya tercatat di Jakarta Selatan sebanyak 1 kejadian, sementara kota/kabupaten lain tidak mencatat kejadian banjir pada periode ini. Adapun bencana lainnya paling banyak terjadi di Jakarta Utara sebanyak 54 kejadian.

Gambar 2.57. Jumlah Jenis Korban Bencana di DKI Jakarta Tahun 2024 – Semester I 2025

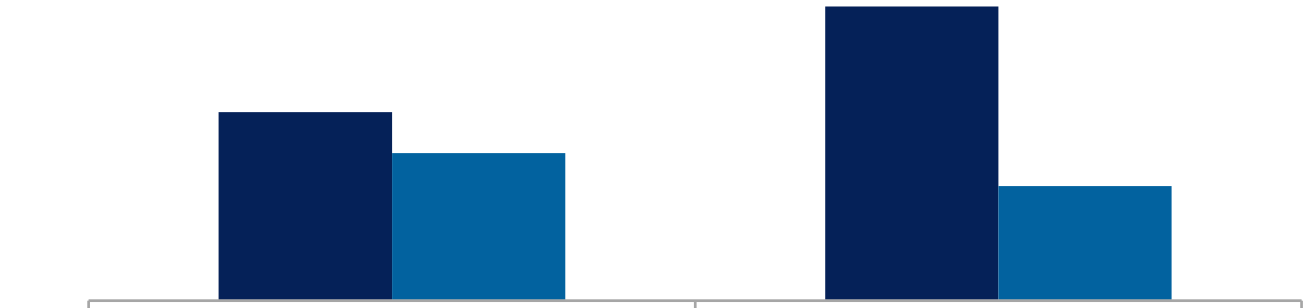


	Triwulan I 2024	Triwulan II 2024	Triwulan III 2024	Triwulan IV 2024	Triwulan I 2025	Triwulan II 2025	Triwulan III 2024	Triwulan IV 2024
Korban Luka	99	51	63	89	93	46	141	238
Korban Meninggal	22	27	12	26	17	8	16	49
Korban Hilang	0	1	0	2	13	0	1	1

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Dari sisi dampak terhadap manusia, data jenis korban bencana menunjukkan fluktuasi sepanjang periode pengamatan. Data terakhir pada Triwulan II Tahun 2025, jumlah korban menurun dengan 46 korban luka, 8 korban meninggal, dan tidak tercatat korban hilang. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa bencana di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 hingga Semester I 2025 didominasi oleh kejadian kebakaran dengan konsentrasi tinggi di wilayah Jakarta Barat, sementara dampak korban manusia berfluktuasi antartriwulan dan menunjukkan perlunya penguatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, serta penanganan bencana secara terpadu di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Gambar 2.58. Indeks Risiko Bencana di Provinsi DKI Jakarta

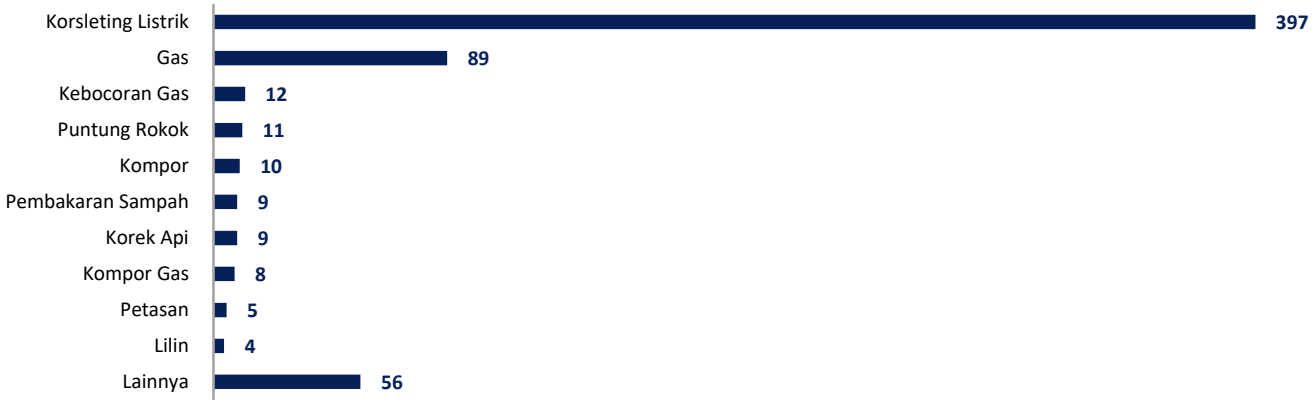


	Target	Capaian
2023	60,12	61,31
2024	59,66	59,29

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta

Indeks Risiko Bencana (IRB) digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana dengan mempertimbangkan komponen ancaman, kerentanan, dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan target IRB sebesar 60,12, sementara capaian aktual mencapai 61,31. Memasuki tahun 2024, target IRB diturunkan menjadi 59,66, mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menekan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan. Capaian IRB tahun 2024 tercatat sebesar 59,29, yang berarti lebih rendah dari target dan menunjukkan perbaikan kondisi risiko bencana dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas kebijakan pengurangan risiko bencana, baik melalui penguatan sistem peringatan dini, peningkatan infrastruktur pengendali bencana, maupun peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi. Secara tren, IRB DKI Jakarta mengalami penurunan dari 61,31 pada tahun 2023 menjadi 59,29 pada tahun 2024, atau turun sebesar 2,02 poin. Penurunan ini menandakan arah kebijakan penanggulangan bencana yang semakin tepat sasaran dan terukur. Namun demikian, nilai IRB yang masih berada di kisaran 59–61 menunjukkan bahwa DKI Jakarta tetap menghadapi tingkat risiko bencana yang perlu dikelola secara berkelanjutan.

Gambar 2.59. Sepuluh Terbesar Penyebab Kejadian Bencana Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta Periode Januari-September 2025



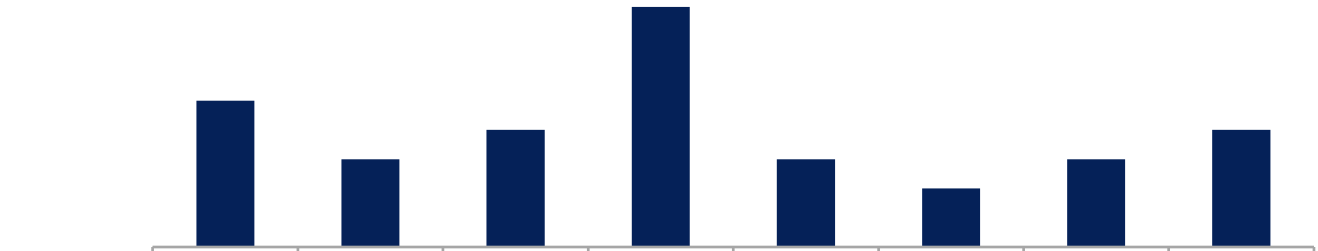
Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data kejadian bencana kebakaran yang dihimpun di Provinsi DKI Jakarta selama periode Januari hingga September 2025, terlihat bahwa kebakaran masih didominasi oleh faktor teknis dan aktivitas rumah tangga. Sepanjang periode tersebut, korsleting listrik menjadi penyebab utama kebakaran dengan jumlah kejadian mencapai 397 kasus, jauh melampaui penyebab lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan instalasi listrik, baik akibat usia bangunan, penggunaan peralatan listrik berlebih, maupun instalasi yang tidak memenuhi standar keselamatan, masih menjadi tantangan besar dalam pengendalian risiko kebakaran di wilayah perkotaan padat seperti DKI Jakarta.

2.4.2. Penanggulangan Bencana

Bencana alam dan non alam menjadi ancaman yang dapat memberikan efek negatif, baik dari segi sosial ekonomi, keselamatan, dan kerusakan lingkungan. Pendampingan kelurahan tangguh bencana menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat mengenai potensi bencana di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan tersebut dilakukan secara berkala pada tiap triwulan guna melakukan pemantauan serta evaluasi mengenai kondisi kerawanan bencana. Selain itu, turut memastikan kesiapan aparat serta masyarakat dalam melakukan penanganan darurat. Di bawah ini terdapat data terkait hasil pendampingan kelurahan tangguh bencana berdasarkan pada jumlah korban luka pada setiap periode pelaksanaan:

Gambar 2.60. Data Pendampingan Kelurahan Tangguh Bencana



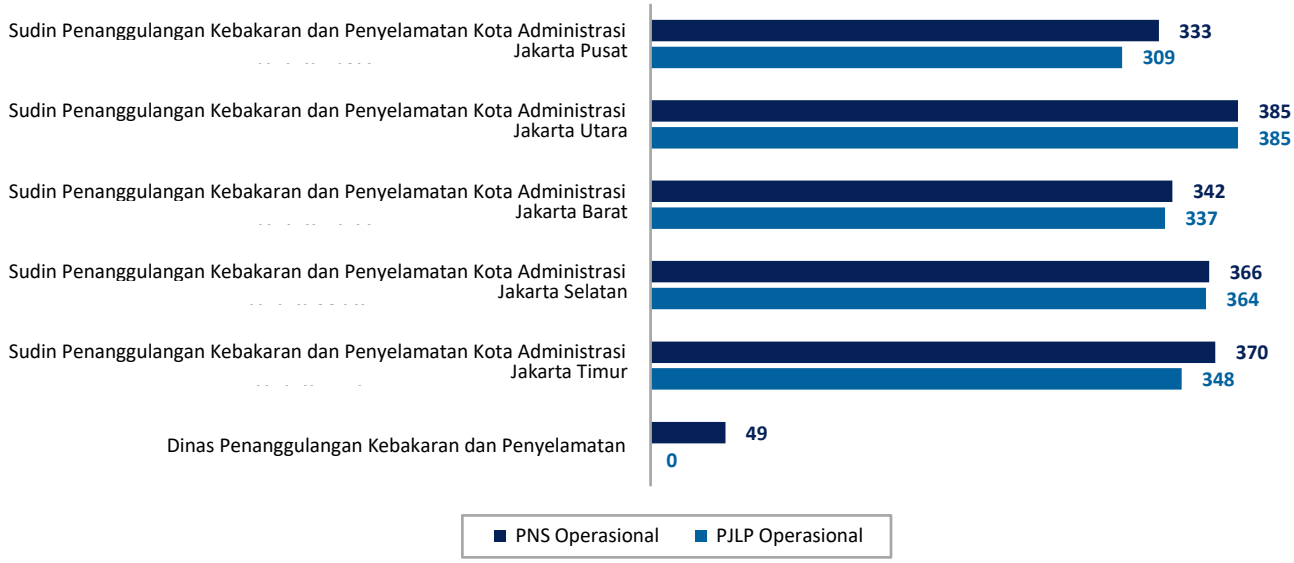
	Triwulan I 2024	Triwulan II 2024	Triwulan III 2024	Triwulan IV 2024	Triwulan I 2025	Triwulan II 2025	Triwulan III 2024	Triwulan IV 2024
Korban Luka	5	3	4	9	3	2	3	4

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Data pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa, terdapat fluktuasi jumlah korban yang mengalami luka pada kegiatan pendampingan kelurahan tangguh bencana setiap triwulan. Pada Triwulan I tahun 2024, jumlah korban luka tercatat sebanyak lima orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi tiga orang pada Triwulan II, dan kembali mengalami peningkatan menjadi empat orang pada Triwulan III. Selanjutnya pada Triwulan IV tercatat kembali mengalami peningkatan menjadi sembilan orang. Sementara itu pada tahun 2025, tercatat terdapat jumlah korban luka yang lebih rendah. Triwulan I terdapat tiga orang dan dua orang pada Triwulan II. Pada sisi lain, Triwulan III sebanyak tiga orang, dan Triwulan IV sejumlah empat orang. Secara keseluruhan, data di atas menggambarkan jumlah korban luka yang masih terjadi setiap periode pendampingan. Meski dengan demikian, jumlah korban luka tidak selalu menunjukkan peningkatan dan cenderung mengalami perubahan pada setiap triwulan.

Ketersediaan data menjadi hal penting guna memberikan dukungan dalam perencanaan dan evaluasi kinerja. Salah satu ketersediaan data adalah terkait data sumber daya manusia. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesiapsiagaan dan pelayanan publik di bidang penanggulangan kebakaran di Provinsi DKI Jakarta, informasi terkait petugas diperlukan guna memberikan kepastian proses penanganan, pencegahan, serta layanan penyelamatan untuk dapat berjalan secara optimal di seluruh wilayah. Berdasarkan hal tersebut, berikut terdapat data mengenai jumlah petugas penanganan penanggulangan kebakaran di Provinsi DKI Jakarta:

Gambar 2.61. Jumlah Petugas Penanganan Penanggulangan Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta

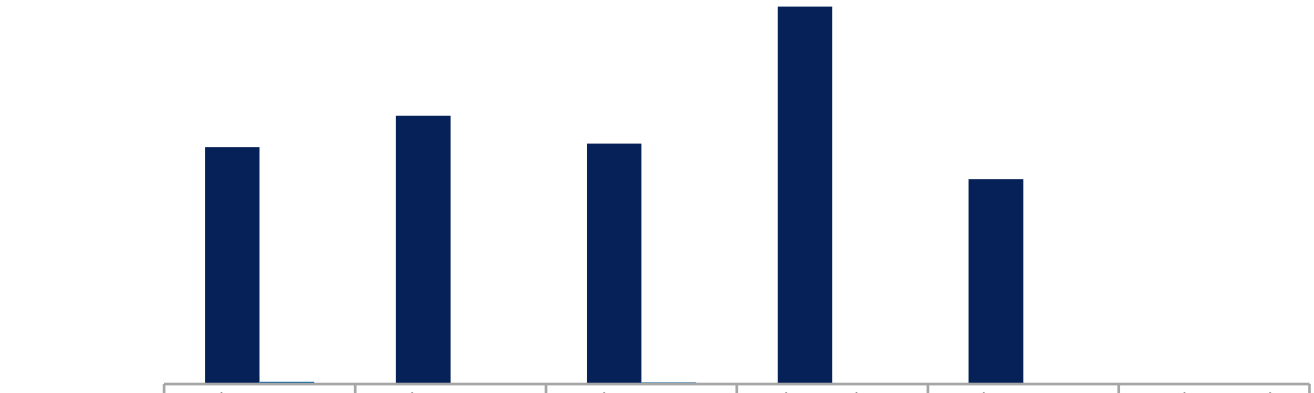


Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan pada data di atas memperlihatkan bagaimana setiap unit kerja di DKI Jakarta memiliki kekuatan petugas operasional yang berbeda-beda. Selain itu, tergambarkan terkait strategi penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing wilayah. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta memiliki 49 PNS operasional tanpa dukungan PJLP operasional. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah PNS operasional dan PJLP operasional di Suku Dinas (Sudin).Salah satu unit dengan kapasitas yang besar berada pada Sudin Jakarta Timur. Terdapat 370 PNS operasional dan 348 PJLP operasional. Hal tersebut dapat diartikan bahwa, di wilayah tersebut terdapat kebutuhan tenaga yang tinggi. Pada sisi lain, Sudin Jakarta Utara terdapat 385 PNS operasional dan 385 PJLP operasional. Komposisi tersebut menunjukkan adanya distribusi petugas yang simetris. Sementara itu, Sudin Jakarta Selatan menunjukkan jumlah petugas mencapai 366 PNS operasional dan 364 PJLP operasional. Jumlah tersebut berbeda dengan Sudin Jakarta Barat yang memiliki 342 PNS operasional dan 337 PJLP operasional. Proporsi di wilayah tersebut menunjukkan jumlah yang relatif seimbang. Selain itu, Sudin Jakarta Pusat tercatat mempunyai 333 PNS operasional dan 309 PJLP operasional. Apabila dibandingkan dengan wilayah lain, angka tersebut merupakan petugas dengan jumlah paling sedikit. Berdasarkan pada uraian di atas bahwa, terdapat perbedaan jumlah serta proporsi petugas. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa, penataan SDM dilakukan secara terukur. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya melakukan penempatan petugas

operasional yang responsif yang disesuaikan kebutuhan lapangan. Sehingga dengan demikian, efektivitas dalam layanan pemadaman dan penyelamatan dapat terlaksana. Setelah mengetahui data terkait jumlah petugas penanganan penanggulangan kebakaran di Provinsi DKI Jakarta, terdapat aspek lain yang turut menjadi perhatian. Ketersediaan APAR dengan jumlah yang banyak, belum tentu sesuai dengan kondisi APAR. Guna memberikan gambaran secara lebih lengkap terkait kesiapan sarana keselamatan kebakaran di lingkungan warga, berikut terdapat data terkait kondisi APAR di Provinsi DKI Jakarta tahun 2024:

Gambar 2.62. Data Kondisi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Masyarakat Provinsi DKI Jakarta 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Kondisi Baik	1.310	1.483	1.328	2.085	1.133	6
Kondisi Rusak	13	6	9	3	0	0

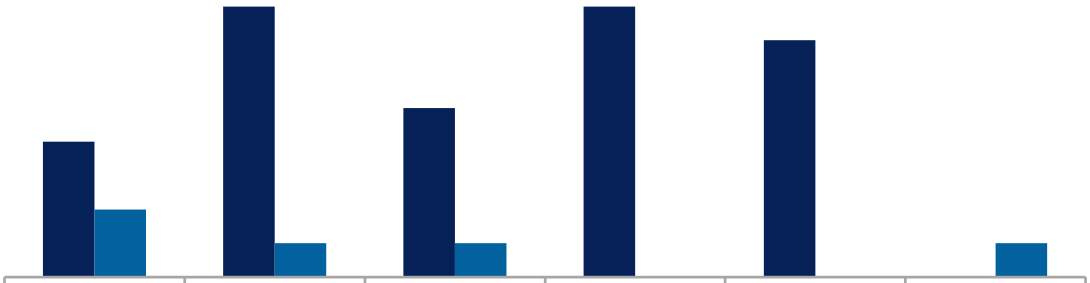
Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Data yang tersedia di atas memberikan gambaran terkait kondisi APAR yang dimiliki masyarakat di DKI Jakarta. APAR didominasi oleh unit dengan fungsi baik. Terdapat 2.085 APAR dengan kondisi baik di Jakarta Selatan. Sementara itu, terdapat tiga APAR dengan kondisi rusak. Hal ini dapat diartikan bahwa, terdapat tingkat kepedulian masyarakat yang tinggi dalam pemeliharaan sarana keselamatan kebakaran. Jakarta Utara memiliki 1.483 APAR dengan kondisi baik dan enam APAR dengan kondisi rusak. Disusul Jakarta Barat memiliki 1.328 APAR dengan kondisi baik dan sembilan APAR dengan kondisi buruk. Pada wilayah Jakarta Pusat memiliki sebanyak 1.310 APAR dengan kondisi baik dan 13 APAR dengan kondisi buruk. Jakarta Timur memiliki 1.133 APAR dengan kondisi baik dan tidak tercatat memiliki APAR dengan kondisi rusak. Sementara itu, Kepulauan Seribu memiliki APAR dengan jumlah paling rendah yaitu enam APAR dengan kondisi baik dan tidak memiliki APAR dengan kondisi rusak. Jumlah tersebut sangat kecil dan memperlihatkan perlunya perhatian khusus dalam penyediaan dan pemeliharaan perangkat keselamatan di wilayah kepulauan.

Berdasarkan uraian di atas menandakan bahwa, meskipun sebagian besar APAR di wilayah DKI Jakarta berada dalam kondisi baik, terdapat disparitas antarwilayah dengan jumlah yang cukup besar. Diperlukan pemeliharaan secara merata serta peningkatan edukasi dalam penggunaan APAR. Maka dengan demikian, masyarakat memiliki kesiapsiagaan dalam pemadaman kebakaran. Setelah membahas terkait jumlah dan kondisi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang dimiliki masyarakat, aspek selanjutnya yang perlu untuk dijadikan perhatian adalah terkait sistem proteksi kebakaran

berupa ketersediaan hidran mandiri. Hidran mandiri berguna sebagai sumber air tahap awal yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebelum unit pemadam tiba di lokasi kejadian bencana kebakaran. Berdasarkan keberadaan sarana ini beserta kondisi fungsionalnya, memberikan cerminan pada tingkat kesiapan dalam menghadapi potensi kebakaran. Guna memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai infrastruktur pendukung tersebut, tersaji data di bawah ini terkait hidran mandiri di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024:

Gambar 2.63. Data Hidran Mandiri di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Bisa Digunakan	4	8	5	8	7	0
Tidak Bisa Digunakan	2	1	1	0	0	1

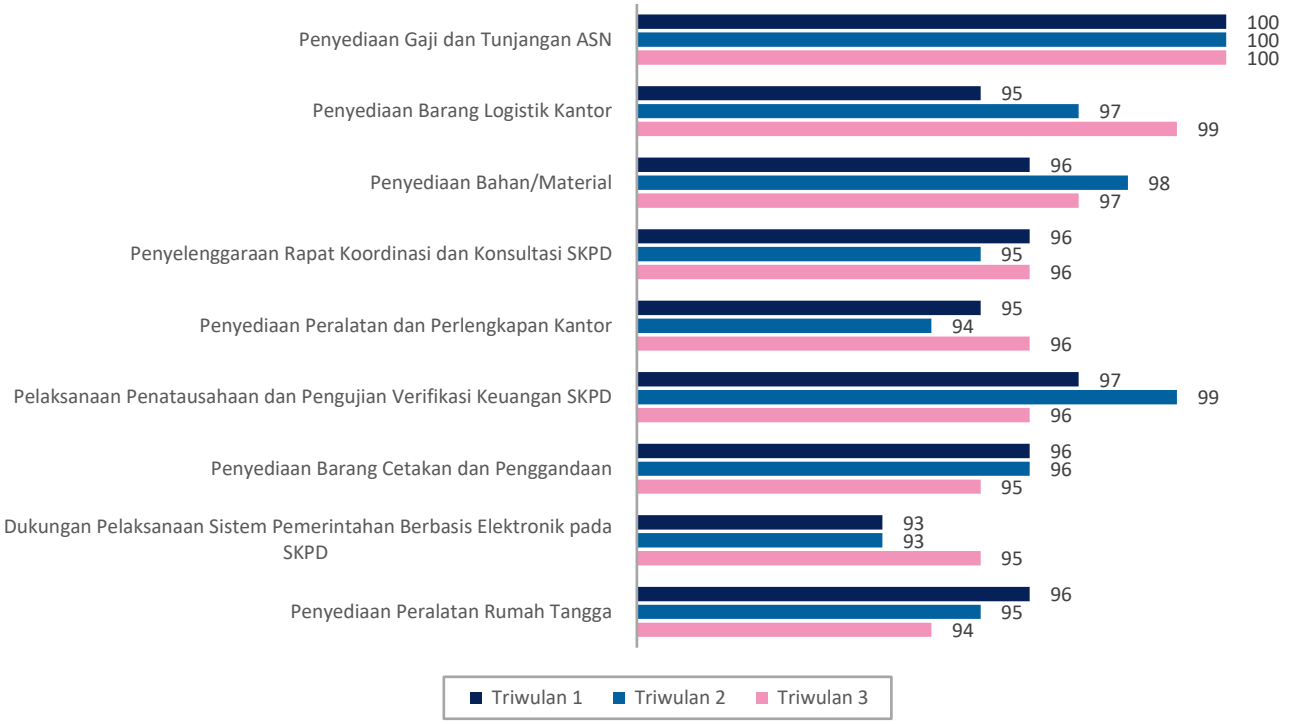
Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Data hidran mandiri di atas menunjukkan variasi kemampuan wilayah dalam penanggulangan kebakaran. Jakarta Selatan memiliki delapan unit hidran yang seluruhnya dapat digunakan. Sementara itu, di Jakarta Utara memiliki delapan unit hidran dan terdapat satu unit hidran yang tidak bisa digunakan. Jakarta Timur turut menunjukkan kesiapan yang tinggi dengan terdapat tujuh unit hidran yang seluruhnya dapat digunakan. Sementara itu, hidran yang berfungsi di Jakarta Barat berjumlah lima unit dan terdapat satu unit yang tidak berfungsi. Kondisi tersebut menandakan masih diperlukannya upaya perbaikan pada sebagian fasilitas hidran guna memastikan kesiapan sarana penanggulangan bencana kebakaran. Di Jakarta Pusat, terdapat empat hidran yang berfungsi dan terdapat dua unit tidak dapat digunakan. Data tersebut memberi gambaran bahwa, Jakarta Pusat menjadi wilayah dengan rasio ketidakfungsian lebih besar apabila dibandingkan dengan wilayah yang lain. Di sisi lain, Kepulauan Seribu tidak terdapat hidran yang dapat digunakan, dan masih ditemukan satu unit hidran yang tidak berfungsi. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa terdapat keterbatasan sarana pemadaman kebakaran. Karakteristik wilayah Kepulauan Seribu yang merupakan pulau-pulau terpisah menjadikan ketersediaan serta kesiapan hidran menjadi hal penting. Kesiapan hidran berguna sebagai bentuk respons cepat dalam keadaan darurat kebakaran.

Secara keseluruhan dari data yang tersedia, sebagian besar wilayah DKI Jakarta memiliki hidran mandiri yang berfungsi dengan baik. Sementara itu, masih ditemukan wilayah yang memerlukan perhatian terkait hidran yang tidak dapat digunakan. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya evaluasi secara rutin dan perbaikan infrastruktur agar tetap berfungsi optimal. Ketersediaan hidran dan perbaikan yang tepat dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat di DKI Jakarta. Setelah meninjau berbagai aspek terkait kesiapsiagaan kebakaran serta sarana pendukungnya, selanjutnya dilakukan pembahasan terkait kualitas layanan administrasi yang diberikan oleh kantor

pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan penilaian mutu layanan, efektivitas penyelenggaraan kegiatan, serta responsivitas terhadap kebutuhan pengguna layanan. Penilaian dilakukan secara triwulan sehingga dapat memberikan gambaran dinamis terkait konsistensi kinerja dan area yang perlu ditingkatkan. Maka dengan demikian, berikut terdapat data mengenai nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kantor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025:

Gambar 2.64. Data Kepuasan Pelayanan Kantor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Data Indeks Kepuasan triwulan satu, dua, dan tiga menunjukkan layanan kantor di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025 berada pada tingkat tinggi dan stabil. Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN meraih skor 100 di tiap triwulan, menegaskan layanan berjalan sangat baik tanpa kendala dengan kepuasan maksimal. Pada Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, nilai kepuasan stabil meski sedikit menurun dari 96 di Triwulan satu menjadi 94 di Triwulan tiga, namun tingkat kepuasan tetap tergolong tinggi. Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menunjukkan peningkatan tren dari nilai 93 menjadi 95 di Triwulan tiga, mencerminkan perbaikan implementasi. Sementara itu, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang konsisten di angka 96-97 menggambarkan proses yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian mempertahankan kualitas sangat baik dengan fluktuasi nilai antara 97, 99, dan 96 yang menunjukkan pelayanan memuaskan. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami dinamika hingga kembali meningkat ke 96 pada Triwulan tiga sebagai hasil respons perbaikan kualitas. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi juga berjalan efektif dengan nilai yang tetap tinggi antara 96 hingga 98. Penyediaan Bahan/Material sempat meningkat ke 98 namun turun menjadi 94 di Triwulan tiga, sedangkan Penyediaan Barang Logistik Kantor justru

mengalami tren peningkatan konsisten hingga mencapai 99. Secara keseluruhan, kualitas pelayanan kantor pemerintah DKI Jakarta tahun 2025 berjalan efektif dan responsif, namun tetap memerlukan perhatian guna menjaga mutu di triwulan mendatang.

Gambar 2.65. Jumlah Lokasi Hidran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024

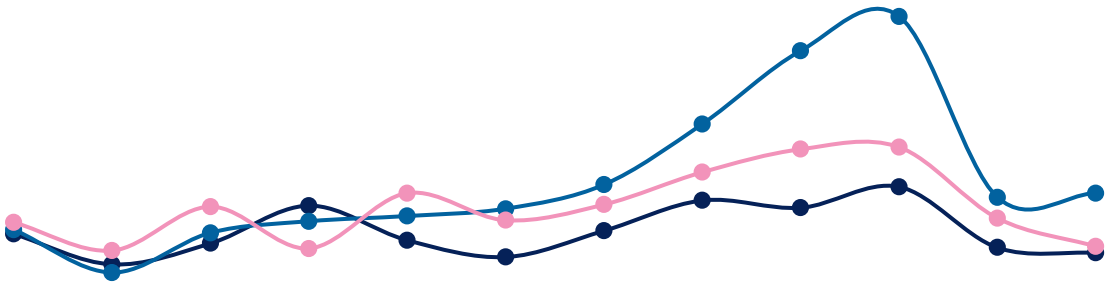


	2022	2023	2024
Jumlah	1.212	1.209	933

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data yang ditampilkan, terdapat perubahan data dari tahun ke tahun terkait jumlah lokasi hidran di Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2022, tercatat ada 1.212 lokasi, kemudian terjadi penurunan menjadi 1.209 lokasi pada 2023. Kemudian terjadi penurunan kembali di tahun berikutnya sebanyak 933 lokasi. Adanya data tersebut menunjukkan dinamika pengelolaan, pendataan, atau kondisi lapangan yang memengaruhi ketersediaan hidran di wilayah ibu kota. Setelah mengamati terkait data ketersediaan hidran yang mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir, selanjutnya penting juga untuk melihat terkait kondisi kejadian kebakaran di lapangan. Frekuensi kebakaran dapat mencerminkan tingkat risiko di suatu wilayah. Hal tersebut turut serta menjadi dasar bagi kebutuhan sarana proteksi terutama hidran. Sehingga, terdapat data untuk memberi gambaran secara lebih jelas mengenai pola fluktuasi kejadian kebakaran di Provinsi DKI Jakarta selama tiga tahun terakhir. Data tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 2.66. Jumlah Frekuensi Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024



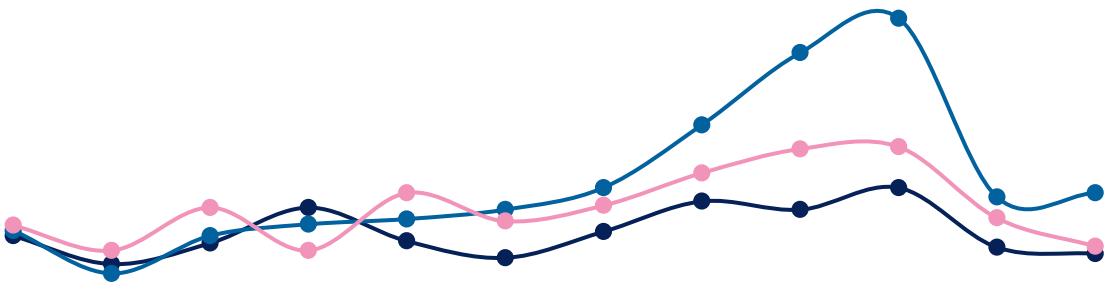
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2022	138	109	129	165	132	116	141	170	163	183	125	120
2023	142	101	139	150	155	162	185	243	313	346	173	177
2024	149	122	164	124	177	151	166	197	219	221	153	126

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Data pada periode 2022–2024 di atas menunjukkan terkait jumlah kejadian kebakaran dengan pergerakan yang dinamis pada tiap bulannya. Pada tahun 2022, kejadian kebakaran berada pada kisaran 109-170 kejadian per bulan. Selanjutnya terdapat lonjakan tinggi yang terjadi pada Agustus, yaitu sebesar 170 kejadian. Kemudian terjadi lonjakan kembali di bulan Oktober dengan 183 kejadian. Sementara itu, terdapat nilai terendah yang terjadi pada Februari, yaitu 109 kejadian. Terdapat variasi yang lebih signifikan di tahun 2023. Pada Januari terdapat 142 kejadian kebakaran. Angka tersebut kemudian terjadi peningkatan yang tajam pada Oktober dengan 346 kejadian. Meski demikian, bulan-bulan terakhir menunjukkan penurunan kembali, dengan Desember berada pada angka 177 kejadian. Pola fluktuasi masih terlihat di tahun 2024. Kejadian terendah tercatat pada Februari sebanyak 122 kejadian, sedangkan puncak tertinggi terjadi pada Oktober dengan 221 kejadian. Sepanjang tahun, frekuensinya bergerak di kisaran 122 hingga 221 kejadian. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa, jumlah frekuensi kebakaran tidak terjadi secara drastis seperti pada tahun sebelumnya.

Sehingga dengan demikian, data di tahun 2022-2024 menunjukkan jumlah frekuensi kebakaran terbanyak terjadi di tahun 2023. Pada tahun tersebut terjadi lonjakan yang paling signifikan terutama pada bulan Oktober. Sementara itu, pada tahun 2024 menunjukkan kestabilan jumlah frekuensi kebakaran. Pada tahun 2022, data memperlihatkan adanya pola fluktuasi yang relatif moderat. Sehingga dengan adanya Informasi tersebut dapat memberikan acuan penting terutama dalam memberikan strategi mitigasi bencana. Selain itu, optimalisasi fasilitas proteksi kebakaran dapat lebih diperhatikan. Setelah dilakukan peninjauan terhadap frekuensi kejadian kebakaran dari tahun ke tahun, diperlukan juga untuk dilakukan peninjauan terkait kemampuan penanganan kebakaran. Tentunya hal tersebut sebagai bentuk dari respons di lapangan. Tingkat keberhasilan dalam penanganan kebakaran memberikan cerminan pada efektivitas operasi pemadaman, kesiapan personel, dan dukungan sarana prasarana, dan hidran. Berikut terdapat data mengenai keberhasilan penanganan kebakaran di Provinsi DKI Jakarta dalam tiga tahun terakhir:

Gambar 2.67. Jumlah Penanganan Kebakaran Berhasil di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2022	136	109	129	163	131	115	140	169	161	182	125	119
2023	141	100	136	147	152	161	182	242	311	344	173	177
2024	146	122	163	122	177	150	165	196	219	221	153	126

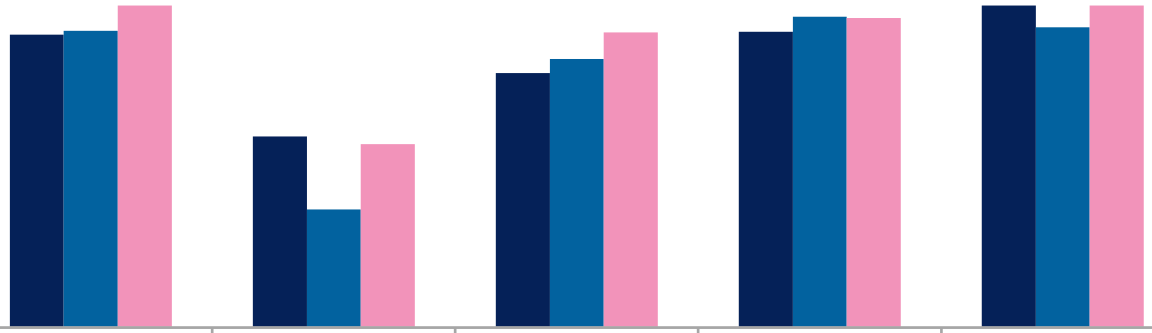
Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Data tersebut menunjukkan bahwa, terdapat variasi terkait kemampuan penanganan kebakaran di DKI Jakarta sepanjang 2022-2024. Pada tahun 2022, jumlah penanganan berhasil bergerak dari 109 kejadian pada Februari. Angka tersebut merupakan titik terendah. Kemudian mencapai 182 penanganan kebakaran pada Oktober. Angka tersebut merupakan capaian tertinggi pada tahun tersebut. Berdasarkan pada data tersebut, secara umum tahun 2022 menunjukkan fluktuasi moderat dengan kecenderungan peningkatan pada pertengahan menuju akhir tahun. Memasuki tahun 2023, tingkat penanganan kebakaran mengalami lonjakan lebih signifikan apabila dibanding dengan tahun sebelumnya. Pada awal tahun terdapat 141 penanganan kebakaran. Setelah itu terjadi peningkatan tajam sebanyak 344 penanganan kebakaran pada Oktober. Bulan tersebut menjadikan jumlah penanganan kebakaran terbanyak selama periode tiga tahun. Meskipun dengan demikian, terjadi penurunan dengan capaian 177 penanganan pada Desember. Angka tersebut menunjukkan bahwa, intensitas terhadap penanganan masih relatif tinggi hingga akhir tahun.

Selanjutnya pada tahun 2024, terdapat pola pergerakan yang lebih stabil, meskipun tetap menunjukkan dinamika bulanan. Pada Februari dan April menjadikan penanganan dengan jumlah terendah, yaitu sebesar 122 penanganan. Sementara itu, terdapat puncak penanganan kebakaran yang berada pada Oktober, yaitu sebesar 221 penanganan kebakaran. Kisaran penanganan berhasil tahun 2024 berada di antara 122 hingga 221 kejadian, menunjukkan rentang yang lebih sempit apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Data tiga tahun di atas memperlihatkan bahwa, keberhasilan penanganan kebakaran paling tinggi terdapat pada 2023. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan 2022 dan 2024 menunjukkan pola stabil, dengan variasi yang tidak begitu drastis seperti pada 2023. Informasi tersebut memberikan gambaran terutama terkait kapasitas penanganan kebakaran. Pada sisi lain, penanganan kebakaran dapat beradaptasi dengan mengikuti dinamika risiko di lapangan. Aktivitas pemadaman di Jakarta bergerak cukup dinamis di tahun 2022 hingga 2024. Selain itu juga terdapat peningkatan yang cukup tajam, serta terdapat pula periode yang memperlihatkan kecenderungan yang cukup stabil. Pola tersebut dapat terjadi mengingat berbagai faktor seperti kondisi cuaca, aktivitas masyarakat, dan karakteristik lingkungan yang ada pada setiap wilayah. Setelah memahami dinamika tersebut, penting untuk melihat bagaimana setiap wilayah kota di DKI Jakarta untuk dapat mempertahankan tingkat keberhasilan penanganan kejadian kebakaran. Berdasarkan data tersebut menjadi gambaran apakah pelayanan yang diberikan tetap konsisten dan merata, meskipun jumlah kejadian berubah dari waktu ke waktu.



Gambar 2.68. Persentase Penanggulangan Kebakaran yang Berhasil di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2022	99,55%	97,97%	98,95%	99,59%	100,00%
2023	99,61%	96,83%	99,17%	99,83%	99,66%
2024	100,00%	97,85%	99,59%	99,81%	100,00%

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

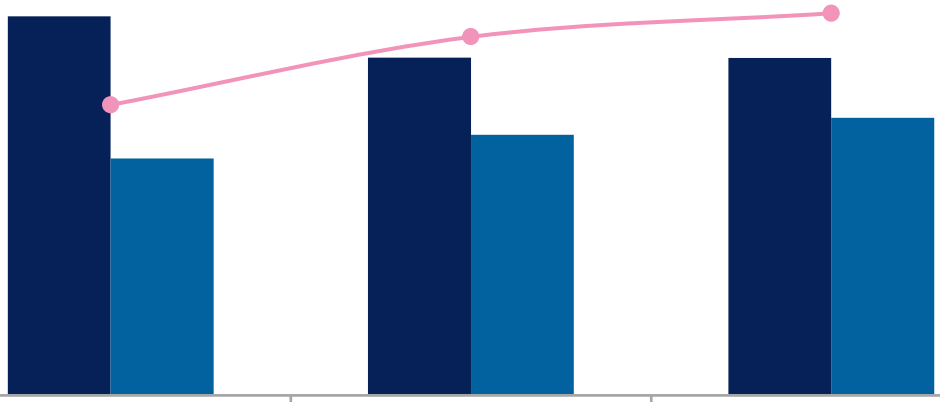
Data persentase penanggulangan kebakaran menunjukkan bahwa seluruh wilayah di Provinsi DKI Jakarta mampu mempertahankan tingkat keberhasilan penanganan yang sangat tinggi pada periode 2022–2024. Jakarta Pusat berada pada kisaran 99,55% hingga mencapai 100% pada 2024. Selanjutnya terdapat Jakarta Utara yang mampu mempertahankan keberhasilan di atas 96%. Sementara itu, terdapat Jakarta Barat dengan persentase stabil pada kisaran 98% hingga 99%. Selanjutnya terdapat Jakarta Selatan yang menunjukkan capaian secara konsisten, yaitu berada di atas 99% dari tahun ke tahun. Sementara itu, Jakarta Timur menjadi wilayah dengan tingkat keberhasilan paling stabil, dengan nilai yang mendekati atau mencapai 100% pada seluruh tahun pengamatan.

Berdasarkan pada data di atas, dapat diartikan bahwa kualitas layanan penanggulangan kebakaran yang ada di seluruh wilayah Jakarta berjalan dengan baik dan relatif merata. Meski dengan demikian terdapat jumlah kejadian kebakaran yang bervariasi di tiap tahunnya. Adanya data tersebut dapat dijadikan untuk bahan evaluasi serta peningkatan penanggulangan kebakaran di tahun berikutnya.

Setelah melihat data terkait penanggulangan kebakaran, diperlukan juga terkait adanya data kompetensi para petugas yang terlibat langsung di lapangan. Data tersebut dapat digunakan untuk menjaga mutu pelayanan pemadaman kebakaran di seluruh wilayah Jakarta. Maka dengan demikian, data mengenai persentase petugas yang kompeten dapat sebagai gambaran terkait seberapa kuat fondasi sumber daya manusia dalam mendukung capaian operasional tersebut.



Gambar 2.69. Persentase Petugas Pemadam Kebakaran yang Kompeten di DKI Jakarta Tahun 2024



	2022	2023	2024
Jumlah Pegawai	6.345	5.652	5.649
Jumlah Peserta	3.968	4.362	4.646
Persentase	62,54%	77,18%	82,24%

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

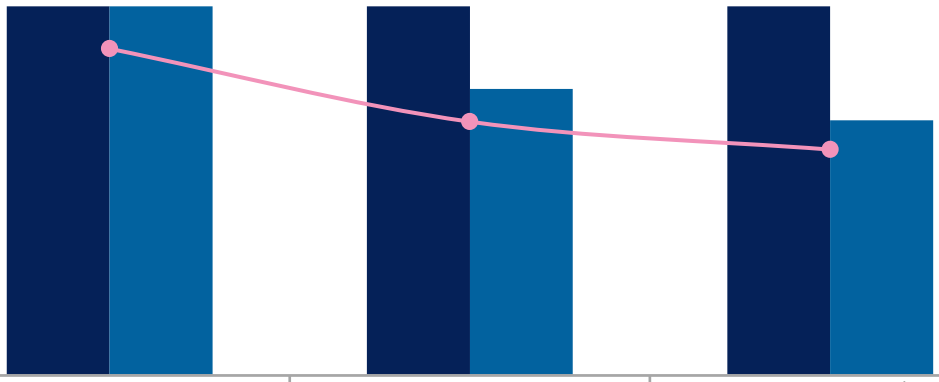
Berdasarkan data tahun 2022-2024, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam persentase petugas pemadam kebakaran yang dinyatakan kompeten. Pada tahun 2022, dari total 6.345 pegawai, sebanyak 3.968 mengikuti pelatihan atau uji kompetensi, menghasilkan tingkat kompetensi sebesar 62,54%. Pada tahun 2023, dari total 5.652 pegawai, sebanyak 4.362 mengikuti pelatihan atau uji kompetensi, menghasilkan tingkat kompetensi sebesar 77,18%. Sementara itu, pada tahun 2024, dari total 5.649 pegawai, sebanyak 4.646 mengikuti pelatihan atau uji kompetensi, menghasilkan tingkat kompetensi sebesar 82,24%.

Peningkatan keterampilan personel dapat terlihat dari data di atas. Sementara itu, kenaikan persentase kompetensi juga memperkuat gambaran terkait keberhasilan penanggulangan kebakaran di berbagai wilayah Jakarta. Sehingga dengan demikian, kualitas sumber daya manusia menjadi hal penting dalam mendukung terjadinya bencana kebakaran.

Setelah mengetahui data kompetensi petugas pemadam kebakaran yang terus meningkat dapat terlihat bahwa, keberhasilan operasional di lapangan didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan kompetensi tersebut tidak terjadi secara instan, melainkan melalui berbagai proses pendukung seperti pembelajaran, pelatihan, dan peningkatan kemampuan yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut tentunya diperlukan data pendukung terkait persentase pemadam kebakaran yang kompeten menurut jenis diklat. Hal ini membantu menggambarkan area kemampuan apa saja yang diperkuat sepanjang proses pelatihan, sekaligus menunjukkan prioritas pengembangan yang diterapkan pada tahun 2024.

Sehingga dengan demikian, diperlukan data pendukung mengenai persentase petugas pemadam kebakaran yang kompeten berdasarkan pada jenis diklat yang diikuti. Informasi tersebut dapat membantu untuk memberikan gambaran kemampuan sumber daya manusia. Selain itu, juga dapat memberikan petunjuk prioritas pengembangan yang diterapkan pada tahun 2024.

Gambar 2.70. Persentase Petugas Pemadam Kebakaran yang Kompeten menurut Jenis Diklat di DKI Jakarta Tahun 2024



	Damkar I	*Fire Rescue*	*Medical First Responder/First Aid Advance*
Jumlah Pegawai	1.883	1.883	1.883
Jumlah Peserta	1.883	1.462	1.301
Persentase	100,00%	77,64%	69,09%

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

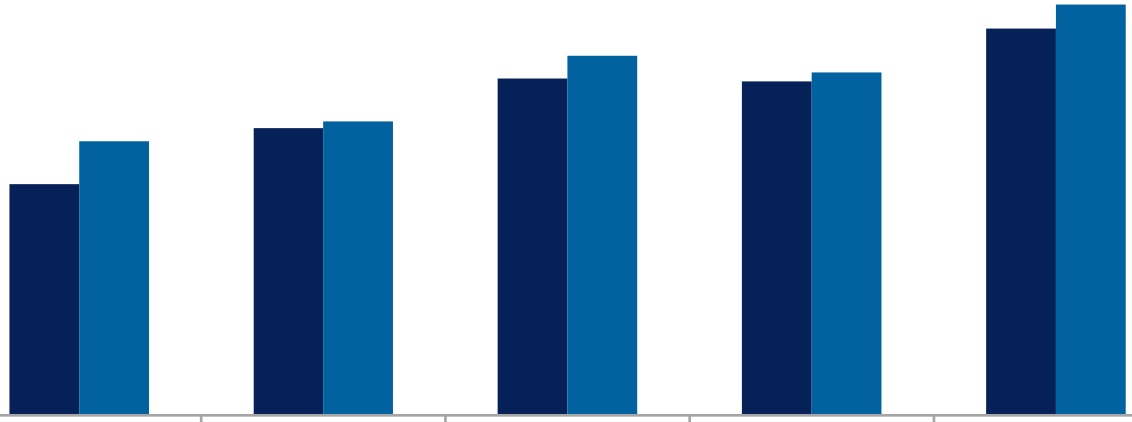
Grafik di atas memberikan gambaran mengenai distribusi jumlah petugas pemadam kebakaran yang kompeten. Berdasarkan jenis diklat di DKI Jakarta pada tahun 2024 terdiri dari Damkar I, *Fire Rescue*, serta *Medical First Responder/First Aid Advance* dengan total 1.883 pegawai. Damkar I merupakan jenis diklat dengan proporsi peserta paling tinggi, yaitu sebanyak 1.883 peserta. Jenis diklat ini mencapai persentase sebesar 100%. Sementara itu, Fire Rescue terdapat 1.462 peserta. Jenis diklat ini mencapai persentase sebesar 77,64%. Sedangkan diklat *Medical First Responder/First Aid Advance* tercatat terdapat 1.301 peserta dengan persentase mencapai 69,09%. Jumlah ini menjadi jumlah terendah apabila dibandingkan dengan jumlah peserta diklat pada jenis yang lain.

Secara keseluruhan, data tersebut menggambarkan kompetensi petugas yang tidak hanya ditingkatkan pada sisi teknis pemadaman. *Medical First Responder/First Aids Advance* turut menjadi bagian dalam hal ini. Maka dengan ini, kesiapan petugas di lapangan mencakup berbagai aspek yang relevan dengan kebutuhan operasional penanggulangan kebakaran.

Kesiapan petugas pemadam kebakaran terlihat dari peningkatan kompetensi melalui berbagai jenis diklat. Selain itu, kesiapan petugas pemadam kebakaran terus diperkuat dari tahun ke tahun. Upaya yang dilakukan tersebut tentu saja harus beriringan dengan keterlibatan masyarakat sebagai upaya untuk pencegahan bencana kebakaran. Pentingnya peran warga di tingkat RW terkait pemahaman dasar mengenai potensi bahaya dapat membantu mengurangi risiko kejadian kebakaran. Pada konteks tersebut, pencegahan kebakaran dapat disosialisasikan guna memastikan masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai serta memiliki kesiapan apabila berada pada situasi darurat.



Gambar 2.71. Jumlah RW yang Telah Dilakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Kepada Masyarakat di Semua Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

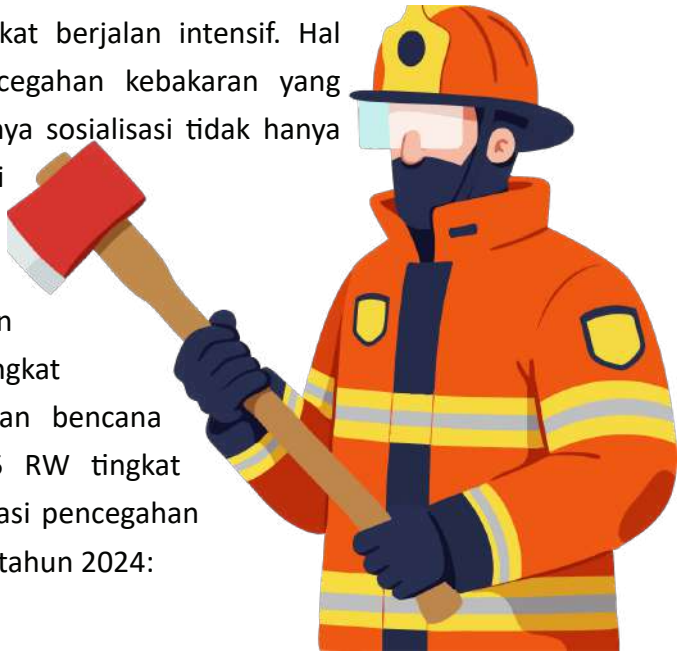


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2023	306	380	446	442	512
2024	363	389	476	454	544

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Grafik di atas menunjukkan bahwa, terdapat lima kota administrasi DKI Jakarta yang menerima sosialisasi RW terkait upaya pencegahan kebakaran. Terdapat peningkatan jumlah RW yang terjangkau kegiatan sosialisasi pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan jumlah RW yang telah dilakukan sosialisasi salah satunya berada di Jakarta Pusat. Terdapat 306 RW di tahun 2023 menjadi 363 RW di tahun 2024. Jakarta Utara bertambah dari 380 RW menjadi 389 RW. Pada sisi lain, Jakarta Barat mendapatkan 446 RW menjadi 476 RW. Kenaikan terjadi di Jakarta Selatan dari 442 RW menjadi 454 RW. Sementara itu, Jakarta Timur tetap menjadi wilayah dengan cakupan terluas, dari 512 menjadi 544 RW.

Bertambahnya jumlah RW yang tersentuh kegiatan sosialisasi menandakan bahwa, upaya edukasi ke masyarakat terus diperluas serta diperkuat. Maka dengan ini, kapasitas pencegahan kebakaran tidak hanya bertumpu pada petugas, tetapi turut melalui kesiapsiagaan di tingkat komunitas. Sehingga dengan ini, bencana kebakaran dapat dilakukan pencegahan.



Pendekatan edukasi yang dilakukan ke masyarakat berjalan intensif. Hal tersebut dikarenakan perluasan sosialisasi pencegahan kebakaran yang menjangkau banyak RW. Dampak dari dilakukannya sosialisasi tidak hanya terlihat di tingkat kota, tetapi juga terlihat sampai level kelurahan. Melihat capaian per kelurahan memberikan gambaran secara mendetail mengenai wilayah mana yang memiliki jangkauan sosialisasi paling besar, sekaligus mencerminkan tingkat keterlibatan komunitas dalam upaya pencegahan bencana kebakaran. Berikut merupakan data terkait 15 RW tingkat kelurahan terbanyak yang telah dilakukan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta tahun 2024:

Gambar 2.72. 15 RW Tingkat Kelurahan Terbanyak yang Telah Dilakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Kepada Masyarakat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



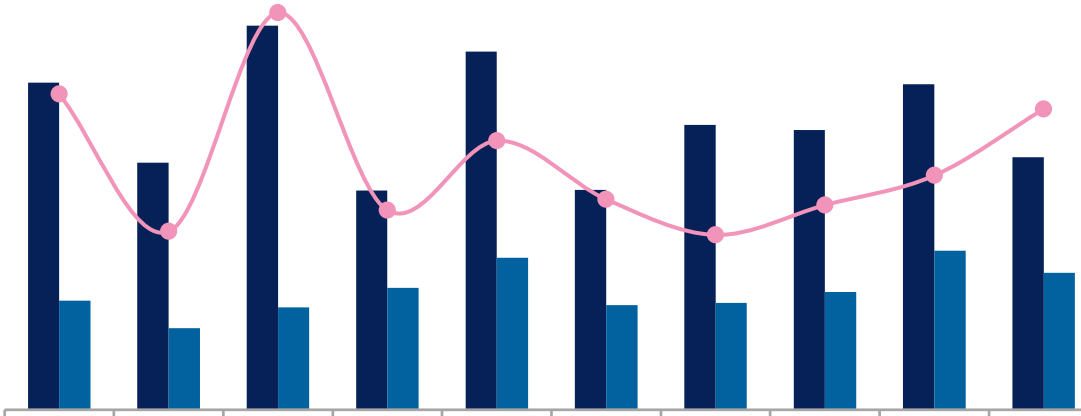
Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data di atas terkait daftar 15 kelurahan dengan jumlah RW terbanyak yang telah menerima sosialisasi pencegahan kebakaran menunjukkan variasi cakupan antarwilayah. Tercatat terdapat 14 RW yang mendapatkan sosialisasi di beberapa kelurahan seperti, Cengkareng Timur, Duren Sawit, Duri Kosambi, Penggilingan, dan Pondok Pinang. Selain itu di kelurahan lain terdapat 15 RW seperti, Bintaro, Klender, Pademangan Barat, Semper Barat, Sunter Agung dan Sunter Jaya. Sementara itu terdapat kelurahan dengan cakupan yang lebih tinggi di Penjaringan yang mencapai 16 RW. Kelapa Gading Barat terdapat 17 RW dan Kelapa Gading Timur terdapat 18 RW. Posisi tertinggi diduduki Pegangsaan Dua dengan total 21 RW yang menerima sosialisasi. Kelurahan tersebut menjadikan wilayah dengan jangkauan sosialisasi paling luas pada 2024. Variasi ini menandakan adanya kebutuhan dan intensitas kegiatan yang berbeda pada masing-masing kelurahan. Data yang tersedia turut menggambarkan upaya aktif guna mempersiapkan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran.

Upaya pencegahan bencana kebakaran melalui peningkatan jangkauan sosialisasi di berbagai RW dan kelurahan berguna untuk mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan. Sementara itu, pemahaman mengenai dampak kebakaran tidak hanya dapat dilihat dari sisi pencegahannya, melainkan juga dari rekam jejak kejadian yang terjadi setiap tahun. Melihat perkembangan jumlah objek yang terbakar, frekuensi peristiwa, serta besarnya taksiran kerugian dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai tantangan yang dihadapi dan seberapa besar risiko ekonomi yang ditanggung akibat kebakaran. Berikut merupakan data pendukung sesuai uraian di atas:



Gambar 2.73. Jumlah Obyek Frekuensi Banyaknya Terbakar dan Taksiran Kerugian (Miliar Rupiah) pada Kejadian Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2024



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Obyek	4.700	3.549	5.514	3.147	5.144	3.156	4.093	4.017	4.673	3.625
Frekuensi	1.569	1.171	1.471	1.751	2.183	1.505	1.535	1.691	2.286	1.969
Kerugian	377,81	213,48	475,22	238,94	322,05	252,06	209,49	245,11	280,51	360,06

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

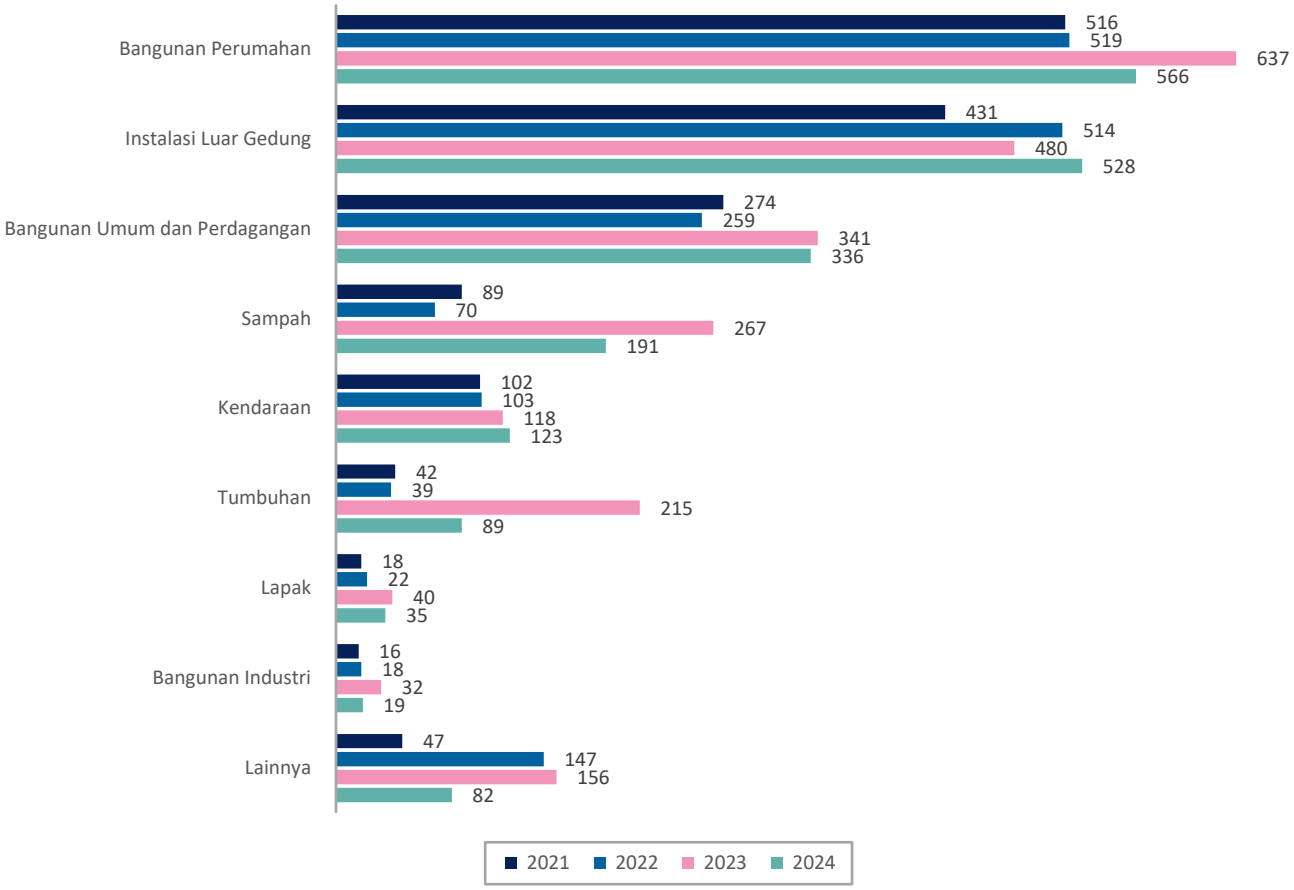
Data yang tersaji memperlihatkan terjadinya fluktuasi jumlah objek yang terbakar, frekuensi kejadian serta besaran kerugian materiil dari tahun 2015 hingga 2024. Jumlah objek terbakar tertinggi sebesar 5.514 objek pada tahun 2017. Sementara itu, jumlah objek terbakar terendah terjadi pada tahun 2018 dengan total 3.147 objek. Frekuensi kejadian tertinggi tercatat pada 2023 dengan 2.286 peristiwa. Sementara itu, frekuensi terendah terjadi pada 2016 dengan total 1.171 peristiwa. Kerugian kebakaran terbesar terjadi pada tahun 2017 yang ditaksir mencapai 475,22 miliar rupiah. Kerugian terendah terjadi pada tahun 2021 yang ditaksir mencapai 209,49 miliar rupiah.

Secara keseluruhan, data yang disajikan di atas memberikan gambaran meskipun terdapat upaya pencegahan yang dilakukan, risiko yang diakibatkan dari kebakaran masih memberikan dampak yang signifikan. Dampak tersebut baik dari sisi jumlah kejadian maupun taksiran kerugian yang dicapai. Sehingga dengan ini, edukasi masyarakat harus tetap dilakukan secara berkelanjutan.

Pergerakan jumlah kejadian kebakaran serta taksiran kerugian yang dapat ditimbulkan dari tahun ke tahun memberikan gambaran umum mengenai skala risiko yang dihadapi. Namun, pemahaman mengenai objek yang terdampak menjadi aspek penting guna mengetahui pola kerentanan di berbagai lingkungan. Setiap jenis objek memiliki risiko yang berbeda-beda, sehingga distribusi kejadian berdasarkan kategori objek dapat membantu dalam memetakan area yang butuh perhatian lebih terutama dalam upaya pencegahan maupun penanganan.



Gambar 2.74. Jumlah Objek Bencana Kebakaran menurut Jenis dan Benda di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2024

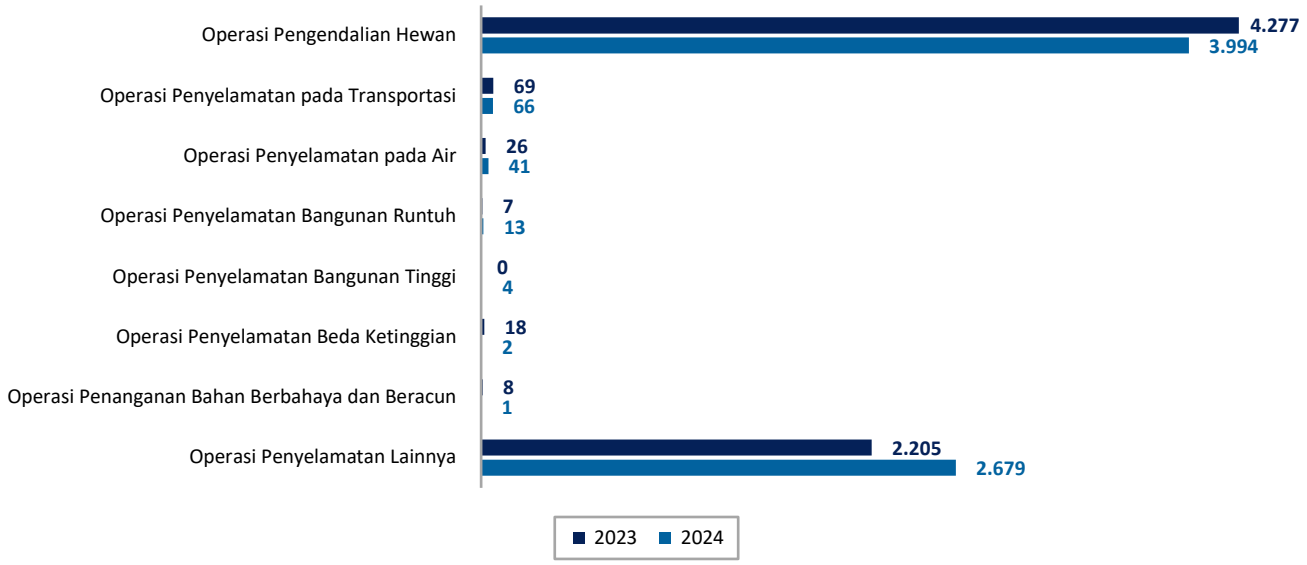


Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Data tahun 2021-2024 menunjukkan bahwa objek yang paling sering terdampak kebakaran di DKI Jakarta adalah bangunan perumahan dan instalasi luar gedung. Bangunan perumahan berada pada kisaran 516 hingga 637 kejadian, dengan puncaknya pada 2023. Instalasi luar gedung berada pada kisaran 431 hingga 528 kejadian, dengan puncaknya pada 2024. Bangunan umum dan perdagangan berada pada kisaran 259 hingga 341 kejadian, dengan puncaknya pada 2023. Sementara itu, sampah berada pada kisaran 89 hingga 267 kejadian, dengan puncaknya pada 2023. Objek kendaraan berada pada kisaran 102 hingga 123 kejadian, dengan puncaknya pada 2024. Tumbuhan berada pada kisaran 39 hingga 215 kejadian, dengan puncaknya pada 2023. Pada sisi lain, objek lapak berada pada kisaran 18 hingga 40 kejadian, dengan puncaknya pada 2023. Beberapa kategori lain seperti bangunan industri dan objek yang dikategorikan sebagai lainnya juga mengalami perubahan jumlah kejadian dari tahun ke tahun. Objek bangunan industri berada pada kisaran 16 hingga 32 kejadian, dengan puncaknya pada 2023. Selanjutnya, pada kategori lainnya berada pada kisaran 47 hingga 156 kejadian, dengan puncaknya pada 2023. Secara keseluruhan, pola ini memberikan gambaran bahwa objek yang paling rentan terhadap kebakaran merupakan area hunian dan fasilitas penunjang. Sementara itu, peningkatan insidental terjadi pada tahun-tahun tertentu di beberapa kategori yang lain. informasi yang ada dapat menjadi dasar untuk menentukan strategi pencegahan dengan tepat terhadap objek dengan tingkat risiko tertinggi. Selain dilakukannya penanganan kebakaran, berbagai jenis operasi penyelamatan

turut menjadi bagian penting dari layanan yang diberikan oleh petugas di lapangan. Pada data keragaman objek kebakaran yang ditampilkan sebelumnya menunjukkan bahwa, risiko di lingkungan perkotaan tidak hanya terbatas pada kejadian kebakaran. Pada praktiknya, petugas juga menghadapi berbagai situasi darurat lain yang membutuhkan respons cepat dan keahlian khusus. Gambaran mengenai jenis operasi penyelamatan yang dilakukan dapat mempermudah dalam memahami ruang lingkup tugas serta beban kerja yang didapatkan petugas.

Gambar 2.75. Jumlah Operasi Penyelamatan berdasarkan Kategori



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Data yang tersedia menunjukkan jenis operasi penyelamatan berdasarkan kategori di Provinsi tahun 2023-2024. Pada data tersebut, operasi pengendalian hewan menjadi kategori penyelamatan dengan frekuensi tertinggi. Tercatat terdapat 4.277 operasi penyelamatan pada tahun 2023 menjadi 3.994 operasi penyelamatan pada tahun 2024. Sementara itu, beberapa kategori menunjukkan perubahan yang signifikan, seperti operasi penyelamatan pada air, yang meningkat dari 26 pada 2023 menjadi 44 operasi penyelamatan di tahun berikutnya. Perubahan juga ditunjukkan pada operasi penyelamatan pada transportasi dari 69 turun ke 66 operasi penyelamatan. Penurunan turut terjadi pada penanganan bahan berbahaya dan beracun dari delapan menjadi satu operasi penyelamatan. Pada sisi lain, peningkatan terjadi pada jenis penyelamatan operasi penyelamatan bangunan runtuh. Terdapat tujuh operasi penyelamatan dari 2023 menjadi 13 operasi penyelamatan pada 2024. Sementara itu, jenis pelayanan operasi penyelamatan beda ketinggian mencatat jumlah operasi yang relatif kecil. Terdapat 18 operasi penyelamatan pada tahun 2023 menjadi dua operasi penyelamatan pada tahun 2024.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, beban tugas yang dimiliki petugas penyelamatan DKI Jakarta meliputi berbagai bentuk situasi darurat. Dominasi operasi penyelamatan terdapat pada operasi pengendalian hewan dan operasi penyelamatan lainnya. Sehingga, jumlah kejadian menunjukkan adanya dinamika kebutuhan layanan penyelamatan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan serta aktivitas pada masyarakat. Operasi penyelamatan yang dilakukan petugas memberikan gambaran terkait dinamika kejadian di lapangan yang beragam serta berlangsung sepanjang tahun.

Guna memahami pola bencana kebakaran secara mendetail, melihat distribusi kejadian per bulan dapat memberikan gambaran mengenai periode yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Informasi tersebut dapat sebagai dasar perencanaan, baik dalam penyusunan strategi pencegahan serta penyiapan sumber daya operasional.

Gambar 2.76. Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran menurut Bulan di Provinsi DKI Jakarta Periode Januari-September 2025



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep
Jumlah	66	68	56	58	54	69	86	74	79

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

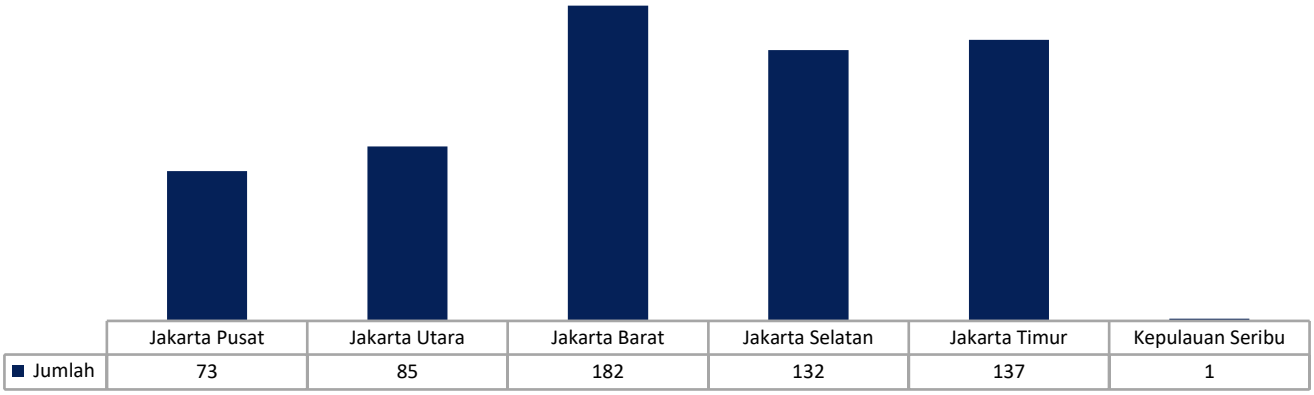
Data kejadian kebakaran per bulan menunjukkan variasi yang cukup jelas sepanjang tahun. Jumlah kejadian berada pada kisaran 54 hingga 86 kejadian per bulan. Pada bulan Januari tercatat terdapat 66 kejadian bencana kebakaran. Sementara itu, bulan Februari terdapat 68 kejadian. Angka tersebut mengalami penurunan di bulan berikutnya menjadi 56 kejadian. April terdapat 58 kejadian dan Mei terdapat 54 kejadian sekaligus menjadi angka dengan kejadian terendah. Terjadi peningkatan menjadi 69 kejadian pada bulan Juni. Angka tersebut kembali menunjukkan peningkatan menjadi 86 kejadian pada bulan Juli. Peningkatan pada bulan tersebut sekaligus menjadi angka dengan kejadian tertinggi. Secara lebih lanjut, terjadi penurunan pada bulan berikutnya menjadi 74 kejadian dan kembali meningkat menjadi 79 pada bulan September.

Berdasarkan uraian di atas, pola tersebut menggambarkan adanya fluktuasi musiman yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor tersebut antara lain cuaca, aktivitas masyarakat, serta faktor lingkungan lainnya. Maka dengan demikian, dengan memahami pola per bulan, langkah pencegahan serta penyiapan petugas dapat dilakukan penyesuaian. Hal ini berguna agar respons terhadap potensi kebakaran menjadi lebih optimal.

Pola kejadian kebakaran yang menunjukkan variasi sepanjang bulan, memberikan gambaran dinamika risiko di Jakarta yang menunjukkan perubahan sesuai aktivitas masyarakat dan kondisi lingkungan. Guna meminimalisir terjadinya risiko yang besar, pemantauan kejadian tidak hanya dilakukan berdasarkan waktu, melainkan juga berdasarkan wilayah. Pemantauan berbasis wilayah turut sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Kebakaran, yang menekankan pentingnya kecepatan respons dan kapasitas penanganan pada setiap wilayah administrasi.

Melihat distribusi kejadian di tiap kota/kabupaten, dapat memberikan gambaran terkait area yang memerlukan perhatian lebih intensif. Perhatian tersebut dapat berupa penguatan pencegahan, peningkatan jumlah petugas, maupun penyebaran sarana prasarana pemadaman. Informasi yang tersedia merupakan dasar penting guna melakukan evaluasi serta penyesuaian strategi operasional di lapangan.

Gambar 2.77. Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta
Periode Januari-September 2025



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jumlah	73	85	182	132	137	1

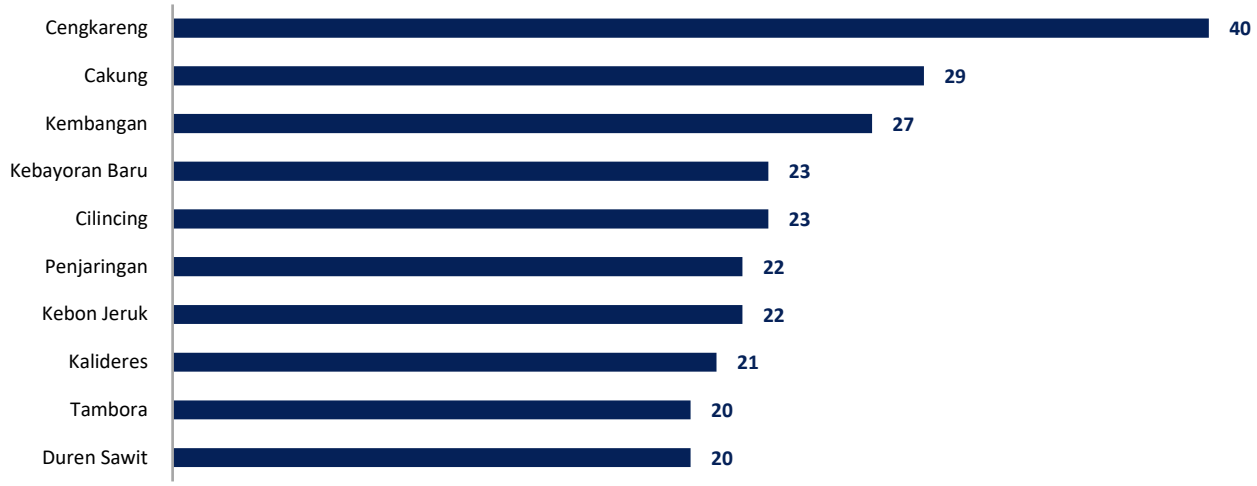
Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Data kejadian kebakaran pada periode Januari-September 2025 di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan perbedaan distribusi yang cukup menonjol antarwilayah. Jakarta Pusat terdapat 73 kejadian kebakaran. Jakarta Utara terdapat 85 kejadian kebakaran. Selanjutnya terdapat Jakarta Barat dengan 182 kejadian kebakaran sekaligus menjadi jumlah kejadian tertinggi. Pada sisi lain, Jakarta Selatan terdapat 132 jumlah kejadian kebakaran dan Jakarta Timur terdapat 137 kejadian kebakaran. Sementara itu, Kepulauan Seribu mendapatkan jumlah kejadian kebakaran paling rendah dengan satu kejadian. Variasi ini memberikan pandangan terkait perbedaan karakteristik risiko kebakaran yang terjadi di tiap wilayah. Kawasan dengan kepadatan penduduk serta aktivitas ekonomi yang tinggi, memiliki kecenderungan kejadian kebakaran yang lebih besar. Hal ini berbeda apabila dibandingkan dengan wilayah yang memiliki sebaran penduduk rendah.

Pemetaan kejadian kebakaran yang dapat dilihat pada bulan sebelumnya memberikan gambaran terkait pola musiman yang dapat memengaruhi tingkat kerawanan terjadinya kebakaran. Namun, pola yang ada dapat lebih berguna apabila disandingkan dengan distribusi kejadian per wilayah. Setiap kota yang ada di DKI Jakarta memiliki karakteristik lingkungan, tingkat kepadatan, dan aktivitas masyarakat yang berbeda. Maka dengan demikian, risiko kebakaran dapat lebih bervariasi. Pemantauan wilayah seperti ini merupakan bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Secara lebih lanjut, dengan memahami wilayah yang memiliki data kejadian lebih tinggi, langkah pencegahan serta penguatan kesiapsiagaan dapat diarahkan menjadi lebih efektif.

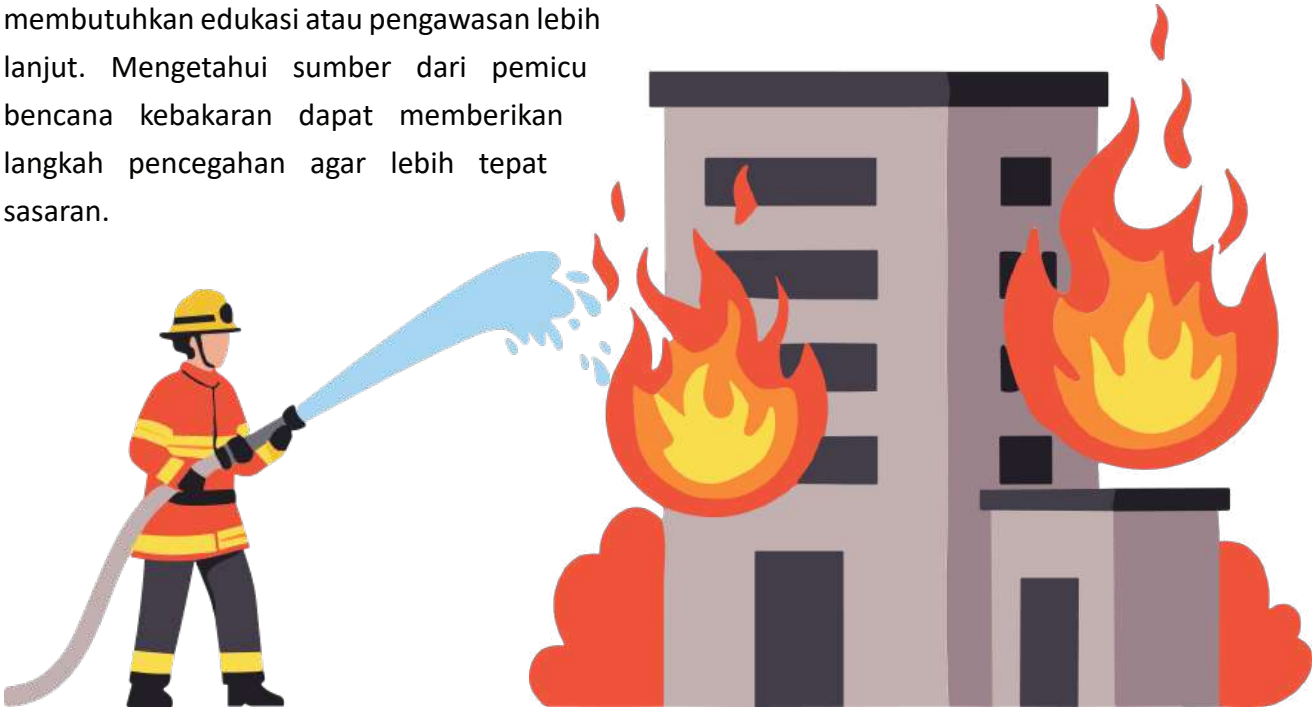


Gambar 2.78. Sepuluh Kecamatan Tertinggi Kejadian Bencana Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta Periode Januari-September 2025

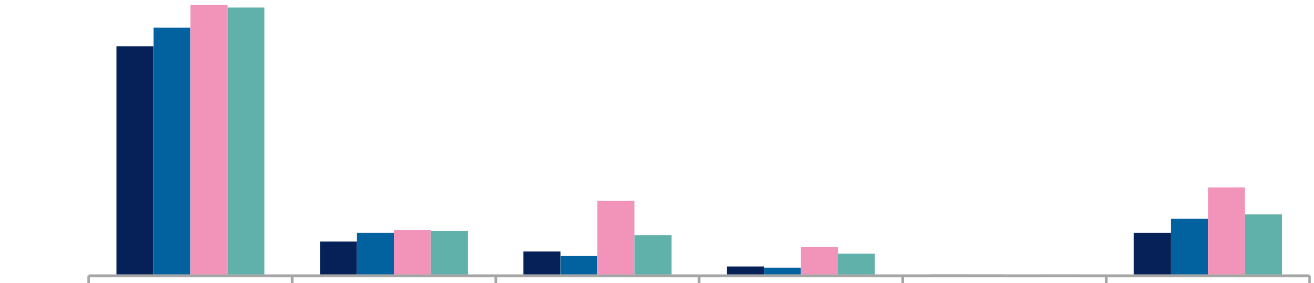


Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Data di atas menunjukkan bahwa, Cengkareng merupakan kecamatan dengan jumlah kecamatan tertinggi terjadinya bencana kebakaran dengan total 40 kejadian. Cakung menempati posisi ke dua dengan terdapat 29 kejadian kebakaran. Kembangan terdapat 27 kejadian kebakaran. Sementara itu, Kebayoran Baru dan Cilincing terdapat 23 kejadian kebakaran. Penjaringan dan Kebon Jeruk turut memiliki jumlah kejadian kebakaran yang sama, yaitu sebanyak 22 kejadian. Selanjutnya terdapat Kalideres terdapat 21 kejadian kebakaran. Pada sisi lain, kejadian kebakaran terendah berada di Tambora dan Duren Sawit dengan 20 kejadian. Kejadian bencana kebakaran tertinggi tersebar di empat wilayah administrasi. Kejadian kebakaran didominasi oleh Jakarta Barat dengan lima kecamatan, yaitu Tambora, Kalideres, Kebon Jeruk, Kembangan, dan Cengkareng. Berdasarkan data tersebut, faktor dari penyebab kebakaran penting untuk diketahui. Informasi mengenai penyebab kebakaran dapat membantu memberikan pola risiko yang muncul di masyarakat serta memberikan gambaran terkait area mana yang membutuhkan edukasi atau pengawasan lebih lanjut. Mengetahui sumber dari pemicu bencana kebakaran dapat memberikan langkah pencegahan agar lebih tepat sasaran.



Gambar 2.79. Jumlah Peristiwa Kebakaran menurut Penyebabnya dan Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta



	Listrik	Gas	Membakar Sampah	Rokok	Lilin	Lainnya
2021	1.031	154	109	42	5	193
2022	1.113	193	89	36	4	256
2023	1.216	205	337	130	1	397
2024	1.204	202	183	99	5	276

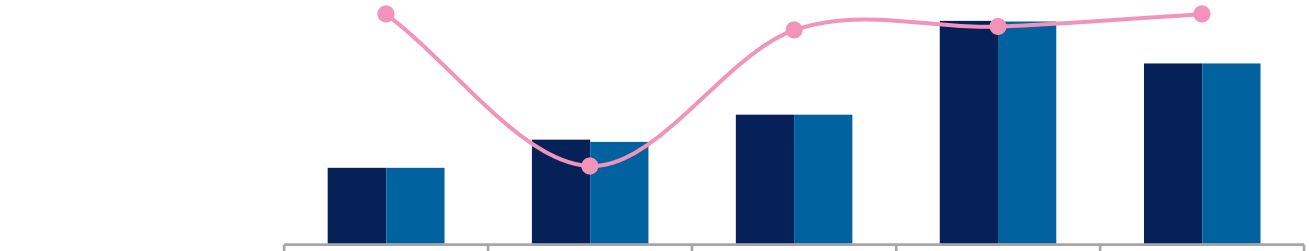
Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Data peristiwa kebakaran menurut penyebabnya tahun 2021-2024 di atas menunjukkan bahwa, listrik menjadi penyebab kebakaran paling dominan. Listrik menjadi penyebab terbanyak setiap tahun. Pada 2021 terdapat 1.031 kejadian, dan meningkat menjadi 1.113 kejadian pada 2022. Pada 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 1.216 kejadian. Selanjutnya pada 2024 mengalami penurunan menjadi 1.204 kejadian. Penyebab lain seperti gas cenderung relatif stabil. Pada 2021 terdapat 154 kejadian dan mengalami peningkatan menjadi 193 kejadian di tahun 2022. Pada tahun selanjutnya masih terdapat peningkatan menjadi 205 kejadian dan terpantau mengalami penurunan menjadi 202 kejadian di tahun 2024. Membakar sampah turut menjadi penyebab kebakaran. Pada 2021 terdapat 109 kejadian, sementara itu mengalami penurunan menjadi 89 kejadian di tahun 2022. Pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan yang cukup tajam menjadi 337 kejadian di tahun 2023. Penurunan kembali terjadi di tahun berikutnya menjadi 283 kejadian. Rokok turut menjadi penyebab kebakaran selanjutnya. Pada 2021 terdapat 42 kejadian kebakaran. Angka tersebut menurun menjadi 36 di tahun 2022, namun mengalami kenaikan di tahun berikutnya menjadi 130 kejadian. Pada 2024 terjadi penurunan secara drastis menjadi 99 kejadian.

Sementara itu, kejadian kebakaran yang diakibatkan oleh lilin berada pada tingkat yang rendah sepanjang 2021-2024. Kejadian tersebut dapat dirincikan lima kejadian di tahun 2021 dan empat kejadian di tahun 2022. Angka tersebut terus mengalami penurunan menjadi satu kejadian di tahun berikutnya dan kembali mengalami peningkatan sebanyak lima kejadian di tahun 2024. Kategori lainnya mencatat variasi kejadian dari tahun ke tahun. Pada 2021 terdapat 193 kejadian dan mengalami peningkatan menjadi 256 kejadian di tahun 2022. Angka tersebut kembali mengalami peningkatan menjadi 397 kejadian di tahun 2023 dan mengalami penurunan di tahun berikutnya menjadi 276 kejadian. Maka dengan demikian, kebakaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Secara keseluruhan, pola tersebut mempertegas bahwa bahaya listrik masih menjadi faktor risiko terbesar. Hal tersebut perlu untuk dijadikan fokus utama dalam upaya pencegahan kebakaran. Selain itu, diperlukan juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya kebakaran.

Penyebab kebakaran yang terjadi dari tahun ke tahun memberikan gambaran bahwa upaya pencegahan perlu dilakukan dari berbagai hal. Upaya tersebut dapat berupa edukasi hingga pengawasan instalasi yang berpotensi menimbulkan bahaya. Kualitas layanan penyelamatan turut menjadi bagian penting selain dilakukannya aspek pencegahan. Salah satu indikator kinerja yang turut diperhatikan adalah waktu tanggap (response time). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adanya informasi terkait capaian *response time* per wilayah, data memberikan gambaran terkait bagaimana kemampuan operasional dapat diterapkan secara nyata di lapangan.

Gambar 2.80. Jumlah Operasi Penyelamatan yang Memenuhi Kriteria Tercapainya Waktu Tanggap (*Response Time*) 30 Menit di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
Penyelamatan	729	996	1.234	2.122	1.719
Penyelamatan Berhasil	729	973	1.231	2.118	1.719
Persentase	100,00%	97,69%	99,76%	99,81%	100,00%

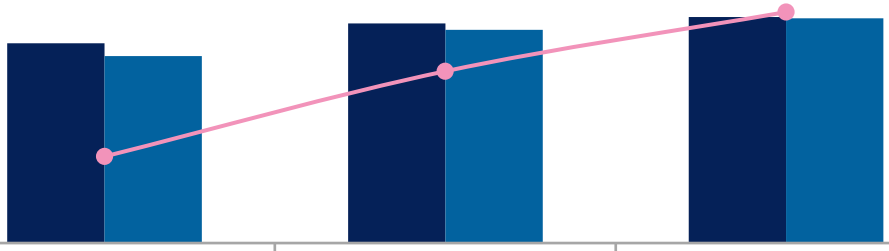
Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Tingkat pemenuhan *response time* yang tinggi ditunjukkan pada data di atas. Jakarta Pusat dan Jakarta Timur mencapai 100% pemenuhan dari total operasi penyelamatan dengan masing-masing sebanyak 729 dan 1.719 penyelamatan. Sementara itu Jakarta Selatan mencapai 99,81% dengan rincian terdapat 2.118 operasi berhasil dari 2.122 penyelamatan yang dilakukan. Sementara itu, Jakarta Barat mencapai 99,76% dengan rincian terdapat 1.231 operasi berhasil dari 1.234 penyelamatan yang dilakukan. Selanjutnya terdapat Jakarta Utara mencapai 97,69% dengan rincian terdapat 973 operasi berhasil dari 996 penyelamatan yang dilakukan.

Secara lebih lanjut, data di atas memberikan gambaran bahwa kemampuan yang dimiliki petugas dalam memenuhi standar waktu tanggap berada pada level yang sangat baik. Tentunya dari hal ini memberikan cerminan kesiapsiagaan. Selain itu efektivitas penanganan kebakaran turut tergambarkan.

Setelah tersajinya data terkait penyebab serta pola risiko kebakaran yang berubah setiap tahunnya, selanjutnya penting untuk mengetahui terkait kemampuan operasional yang dimiliki petugas dalam memberikan merespons darurat. Kecepatan serta ketepatan respons merupakan faktor utama dalam mengurangi dampak kebakaran, terutama yang berada di wilayah perkotaan dengan kepadatan tinggi. Indikator ini juga berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Kebakaran, yang menekankan pentingnya waktu tanggap sebagai salah satu ukuran keberhasilan layanan. Sehingga dengan demikian, capaian *response time* di masing-masing kota memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas sistem penyelamatan yang dijalankan petugas di lapangan.

Gambar 2.81. Persentase Operasi Penyelamatan yang Memenuhi Kriteria Tercapainya Waktu Tanggap *(Response Time)* 30 Menit di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024



	2022	2023	2024
Penyelamatan	6.015	6.610	6.800
Penyelamatan Berhasil	5.629	6.419	6.770
Persentase	93,58%	97,11%	99,56%

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

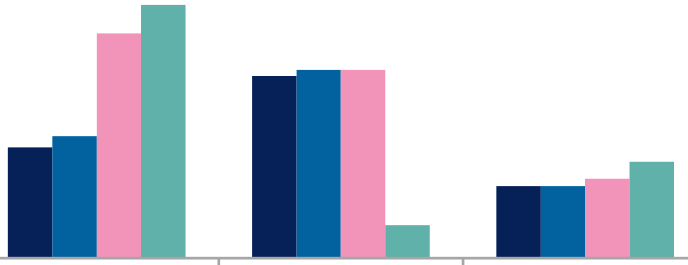
Data menunjukkan terkait persentase operasi penyelamatan dari 2022 hingga 2024. Pada 2022 terdapat 5.629 penyelamatan berhasil dari 6.015 penyelamatan dengan persentase mencapai 93,58%. Pada tahun berikutnya terdapat 6.419 penyelamatan berhasil dari 6.610 penyelamatan dengan persentase mencapai 97,11%. Sedangkan pada 2024 terdapat 6.770 penyelamatan berhasil dari 6.800 penyelamatan dengan persentase mencapai 99,56%.

Berdasarkan uraian di atas, data yang tersaji dari 2022 hingga 2024 menunjukkan capaian persentase dari operasi penyelamatan. Terdapat pemenuhan kriteria response time yang menunjukkan tren peningkatan secara konsisten. Peningkatan tersebut memberikan cerminan efektivitas dari sistem respons darurat. Hal ini didukung oleh peningkatan kesiapsiagaan petugas, koordinasi operasional yang lebih baik, serta optimalisasi sarana dan prasarana penunjang. Pada 2024 menunjukkan capaian persentase yang hampir mendekati nilai maksimal. Capaian tersebut perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan evaluasi secara lebih lanjut, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan inovasi manajemen penanganan kedaruratan guna memberikan pelayanan penyelamatan yang cepat, tepat dan andal bagi masyarakat.

Capaian *response time* menunjukkan kemampuan operasional penyelamatan yang terus menguat tiap tahunnya di tingkat provinsi. Hal tersebut bisa terjadi karena di dukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung. Terdapat komponen penting guna mempercepat mobilisasi dan memperluas jangkauan layanan. Komponen tersebut berupa ketersediaan armada, pos pemadam, dan peralatan penunjang. Sehingga dengan demikian, perkembangan sarana dan prasarana menjadi indikator yang sangat penting dalam memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.



Gambar 2.82. Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2024



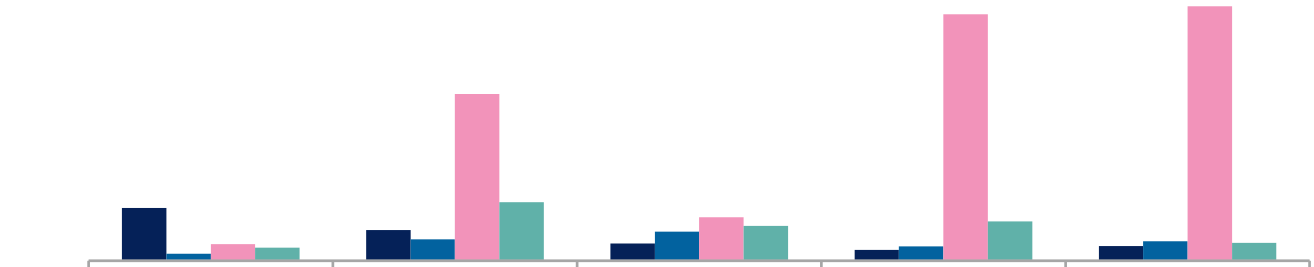
	Mobil Pompa	Mobil Rescue	Pos Pemadam	Mobil Tangga	Mobil Ambulans
2021	198	326	129	11	10
2022	218	337	129	11	10
2023	402	337	142	11	10
2024	453	59	172	11	10

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Terdapat perkembangan yang bervariasi pada sarana dan prasarana di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta dari tahun 2021-2024. Mobil pompa mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Pada 2021 terdapat 198 unit dan meningkat menjadi 218 unit di tahun 2022. Angka tersebut kembali mengalami peningkatan menjadi 402 unit di tahun 2023 dan menjadi 453 di tahun berikutnya. Peningkatan tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam mempercepat penanganan kebakaran di berbagai wilayah.

Mobil *rescue* dari total 326 unit pada tahun 2021 menjadi 337 di tahun 2022 dan 2023. Angka tersebut mengalami penurunan secara drastis menjadi 59 unit di tahun 2024. Penurunan yang terjadi tersebut memberikan gambaran terhadap perubahan klasifikasi, penggantian armada, atau pengalihan fungsi peralatan tertentu. Sementara itu, tren naik ditunjukkan pada jenis sarana pos pemadam, dari 129 pada 2021 dan 2022, menjadi 142 di tahun 2023. Angka tersebut kembali mengalami peningkatan menjadi 172 unit di tahun berikutnya. Peningkatan jumlah pos tersebut berpotensi memperpendek jalur tempuh armada ke lokasi kejadian. Di sisi lain, jenis sarana mobil tangga dan ambulans memiliki jumlah yang stabil pada 2021-2024. Masing-masing sarana berjumlah sebelas dan sepuluh unit. Secara keseluruhan, data tersebut memberikan gambaran adanya penguatan pada beberapa jenis sarana, seperti mobil pompa dan pos pemadam. Meski terjadi penurunan jenis pada sarana tertentu, kombinasi peningkatan sarana strategis dan stabilitas peralatan pendukung dapat menjadi salah satu penjelasan mengapa capaian operasional di tahun-tahun terakhir semakin membaik. Perubahan terkait jumlah sarana dan prasarana memberikan gambaran mengenai bagaimana kapasitas operasional penanggulangan kebakaran yang terus bergerak menyesuaikan kebutuhan yang ada di lapangan. Namun dengan demikian, kelengkapan sarana yang tersedia saja belum cukup, efektivitasnya baru terlihat dari seberapa besar dampak kejadian kebakaran dapat dikendalikan. Salah satu indikator yang dapat memberikan penjelasan terkait kondisi tersebut adalah luas area yang terbakar tiap tahunnya. Melihat perkembangan antarwilayah berguna mengetahui apakah peningkatan kapasitas sudah memberikan kontribusi pada pengurangan dampak kebakaran secara fisik.

Gambar 2.83. Luas Area (m²) yang Terbakar pada Kejadian Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2021	90.653,00	52.858,00	29.537,00	18.690,50	25.083,00
2022	12.144,00	36.564,25	50.185,00	24.858,75	33.617,00
2023	28.323,00	285.662,00	74.424,00	422.526,00	435.869,80
2024	22.291,50	100.492,00	60.044,00	67.648,00	30.948,00

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

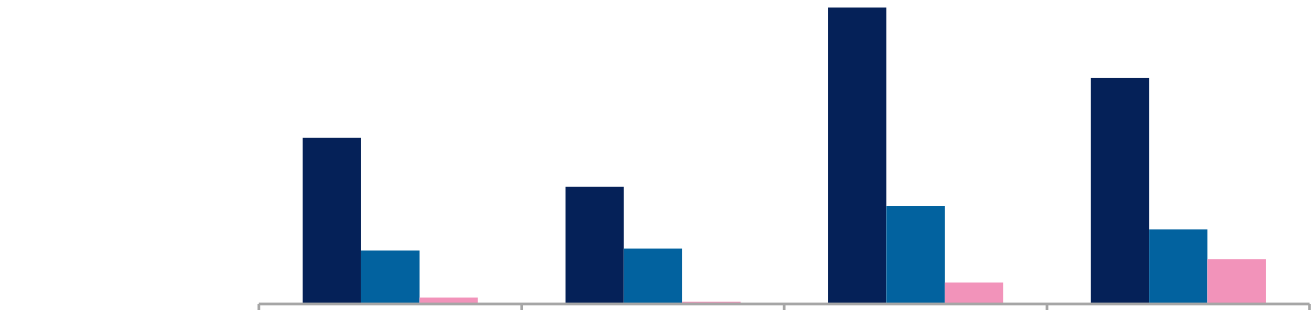
Terdapat variasi antarwilayah yang cukup besar mengenai luas area terbakar dari tahun ke tahun di DKI Jakarta periode 2021-2024. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur mencatat lonjakan yang signifikan mengenai luas area yang terbakar pada 2023. Berdasarkan data masing-masing mencapai 74.424 m², 422.526 m², dan 435.869,80 m². Tahun tersebut memberikan gambaran terkait kebakaran dengan area yang besar. Jakarta Utara turut menunjukkan peningkatan luas area yang terbakar. Pada 2023 sebesar 285.662 m² dan mengalami penurunan pada 2024. Sementara itu, Jakarta Pusat menggambarkan tren fluktuatif, dengan area terbakar dari 90.653 m² tahun 2021 turun menjadi 12.144 m² pada 2022. Angka tersebut kembali mengalami kenaikan pada 2023 menjadi 28.323 m² dan turun kembali menjadi 22.291,50 m² pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2024, sebagian besar wilayah mencatat terjadinya penurunan luas area yang terbakar apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jakarta Timur mengalami penurunan secara drastis menjadi 30.948 m², Jakarta Selatan menjadi 67.648 m², dan Jakarta Barat menjadi 60.044 m². Penurunan yang terjadi tersebut memberikan indikasi bahwa adanya perbaikan respons atau kondisi yang lebih terkendali apabila dibandingkan dengan tahun 2023.

Data yang tersedia memberikan gambaran terkait dampak kebakaran yang tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah kejadian, tetapi juga kondisi objek yang terbakar, kepadatan wilayah, kecepatan respons, sampai dengan faktor lingkungan. Maka dengan demikian, hal ini memberikan gambaran penting bagi evaluasi operasional dan penentuan strategi pencegahan di masing-masing kota.

Dampak kebakaran tidak hanya terlihat dari sisi material, melainkan turut berhubungan dengan risiko keselamatan manusia. Hal tersebut terlihat dari fluktuasi luas area yang terbakar dari tahun ke tahun. Apabila area yang terdampak kebakaran semakin luas atau terjadi di lingkungan yang padat, potensi korban luka atau jiwa dapat meningkat. Sehingga dengan ini, data jumlah korban tiap tahunnya menjadi langkah penting guna memberikan penilaian sejauh mana kondisi keselamatan masyarakat dan petugas di lapangan dapat dijaga selama penanganan kebakaran.

Gambar 2.84. Jenis Korban Luka Bencana Kebakaran di DKI Jakarta Tahun 2021-2024



	2021	2022	2023	2024
Korban Luka Masyarakat	78	55	139	106
Korban Jiwa Masyarakat	25	26	46	35
Korban Luka Petugas	3	1	10	21

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Data korban kebakaran menunjukkan dinamika yang cukup signifikan di DKI Jakarta dari tahun 2021-2024. Korban luka masyarakat mencapai 78 orang pada 2021 dan menurun menjadi 55 orang pada 2022. Jumlah korban kembali mengalami peningkatan menjadi 139 orang pada 2023 dan kembali mengalami penurunan menjadi 106 orang pada 2024.

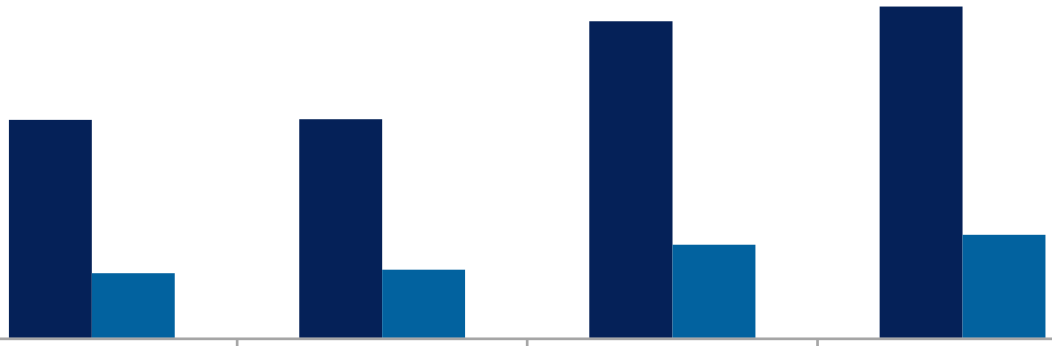
Sementara itu, korban jiwa masyarakat turut mengalami peningkatan dari 25 jiwa pada 2021 menjadi 26 jiwa pada 2022. Angka tersebut kembali mengalami peningkatan menjadi 46 jiwa di tahun 2023 dan kembali mengalami penurunan menjadi 35 jiwa di tahun berikutnya.

Sementara itu, korban luka petugas, terlihat tren yang meningkat setiap tahunnya. Terdapat tiga petugas yang mengalami luka pada 2021 dan menurun menjadi satu petugas di tahun 2022. Kemudian bertambah menjadi sepuluh petugas di tahun 2023 dan 21 petugas di tahun 2024. Peningkatan ini memberikan gambaran terkait kompleksitas kejadian atau tingkatan risiko yang dihadapi petugas saat menangani kebakaran yang terjadi.

Secara lebih lanjut, data di atas memberikan gambaran meskipun upaya penanggulangan dan peningkatan kapasitas operasional terus dilakukan, risiko mengenai keselamatan masyarakat dan petugas masih bisa terjadi. Selain itu, angka korban yang menunjukkan fluktuasi memerlukan penguatan aspek pencegahan, edukasi keselamatan, dan prosedur kerja aman bagi semua pihak yang terlibat.

Perkembangan jumlah korban luka dan jiwa pada kejadian kebakaran yang dijelaskan sebelumnya memberikan gambaran terkait dampak terhadap keselamatan manusia yang dapat berganti mengikuti skala dan karakter kejadian. Selain korban yang terluka atau meninggal, penting untuk dilakukan pembahasan mengenai seberapa besar jumlah penduduk yang terdampak secara sosial, baik secara individu maupun keluarga. Data terkait jumlah jiwa dan kepala keluarga (KK) yang terdampak bencana kebakaran turut memberikan gambaran secara lebih dalam pada kehidupan sehari-hari di masyarakat. Hal tersebut termasuk berdampak pada pemberian penanganan secara lebih lanjut berupa bantuan sosial atau hunian sementara.

Gambar 2.85. Jumlah Jiwa dan KK Bencana Kebakaran di DKI Jakarta Tahun 2021-2024



	2021	2022	2023	2024
Jumlah Jiwa	8.411	8.440	12.201	12.764
Jumlah KK	2.519	2.648	3.607	3.997

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

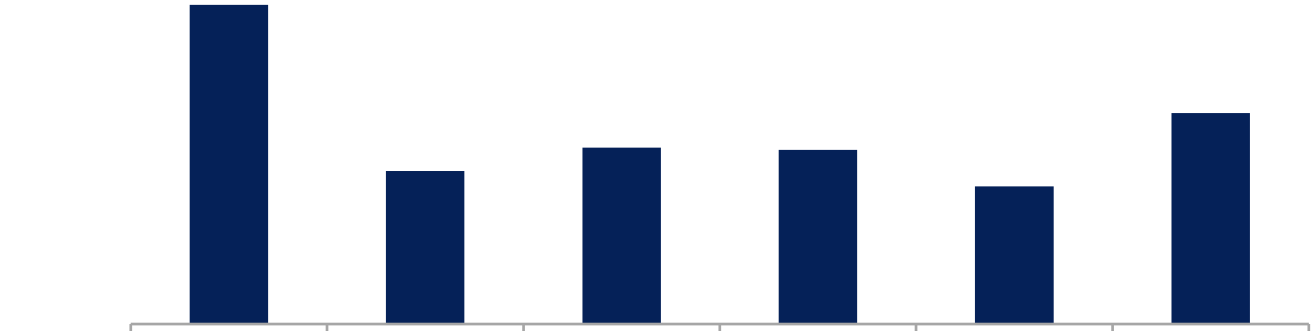
Data di atas memberikan gambaran terkait peningkatan yang cukup konsisten dalam jumlah jiwa dan KK yang terdampak kebakaran di DKI Jakarta pada 2021-2024. Tercatat terdapat 8.411 jiwa dan 2.519 KK terdampak pada 2021. Angka tersebut meningkat menjadi 8.440 jiwa dan 2.648 KK pada 2022. Selanjutnya terjadi lonjakan menjadi 12.201 jiwa dan 3.607 KK di tahun 2023. Peningkatan kembali berlanjut menjadi 12.764 jiwa serta 3.997 KK di tahun 2024.

Terjadinya lonjakan jumlah KK selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa dampak kebakaran semakin meluas pada tingkat keluarga. Hal ini mengartikan kebutuhan dalam melakukan penanganan sosial serta pemulihan pasca kebakaran turut semakin besar. Maka dengan demikian, data tersebut memberikan gambaran kebakaran tidak hanya berdampak pada keselamatan fisik individu, tetapi juga turut berpengaruh terhadap stabilitas keluarga dan kehidupan sosial masyarakat secara lebih luas. Informasi tersebut sangat penting guna mendukung rancangan dukungan pasca bencana secara lebih komprehensif.

Peningkatan jumlah jiwa dan keluarga yang terdampak kebakaran setiap tahunnya memberikan gambaran terhadap pentingnya upaya pencegahan dan penanganan kebakaran. Upaya yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan respons pada saat kejadian, tetapi juga mencakup kegiatan pencegahan, edukasi kepada masyarakat, serta kesiapsiagaan petugas penanganan bencana. Untuk memahami bagaimana efektivitas itu berubah dari waktu ke waktu, data persentase keberhasilan pencegahan dan penanganan kebakaran per triwulan dapat memberikan gambaran secara rinci mengenai konsistensi kinerja operasional.



Gambar 2.86. Persentase Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Berhasil



	Triwulan I 2024	Triwulan II 2024	Triwulan III 2024	Triwulan IV 2024	Triwulan I 2025	Triwulan II 2025
Persentase	63,67	60,20	60,69	60,64	59,88	61,41

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Data di atas memberikan informasi terkait keberhasilan pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan di DKI Jakarta dari triwulan satu pada 2024 hingga triwulan dua pada 2025. Pada triwulan satu 2024 menunjukkan persentase sebesar 63,67% dan turun menjadi 60,20% di triwulan dua 2024. Angka tersebut kembali mengalami peningkatan menjadi 60,69% di triwulan tiga 2024 dan kembali mengalami penurunan menjadi 60,64% di tahun selanjutnya. Triwulan dua, tiga, dan empat pada 2024 menunjukkan angka yang hampir serupa, hal ini menandakan adanya stabilitas performa meskipun tidak terjadi peningkatan secara signifikan.

Memasuki triwulan satu pada 2025 menunjukkan angka sebesar 59,88%. Angka tersebut berada pada angka terendah yang setelahnya mengalami kenaikan menjadi 61,41% di triwulan dua pada 2025. Secara lebih lanjut, pola ini menggambarkan kinerja pencegahan dan penanganan kebakaran berada pada kisaran yang stabil, tetapi belum menghasilkan peningkatan yang tajam. Terjadinya fluktuasi kecil dapat disebabkan oleh variasi jumlah kejadian, kondisi lingkungan, serta dinamika operasional di lapangan.

2.5. Politik dalam Negeri dan Pengawasan Hukum

2.5.1. Indeks Demokrasi

Demokrasi menurut Abraham Lincoln pada pidatonya dalam peristiwa *Gettysburg Address* merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Lincoln, 1863)[2]. Secara lebih lanjut, demokrasi menjadi tatanan hidup dalam bernegara yang dipilih berbagai negara yang ada di dunia. Demokrasi pada dasarnya dipahami sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Meski dengan demikian, pelaksanaannya berbeda-beda di setiap negara. Diperlukan alat ukur guna mengetahui secara objektif sejauh mana kualitas demokrasi dijalankan dalam suatu negara atau wilayah. Salah satu instrumen yang dapat digunakan di Indonesia adalah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

IDI ditentukan menggunakan metode baru sejak 2021. Pada riset IDI yang dilakukan dengan metode baru tersebut menggunakan konsep dasar demonopolisasi yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial. Guna mengukur perkembangan demokrasi, demonopolisasi dioperasikan melalui tiga

2 Lincoln, A. (1863). Gettysburg Address. *Retrieved from* https://www.britannica.com/topic/Gettysburg-Address

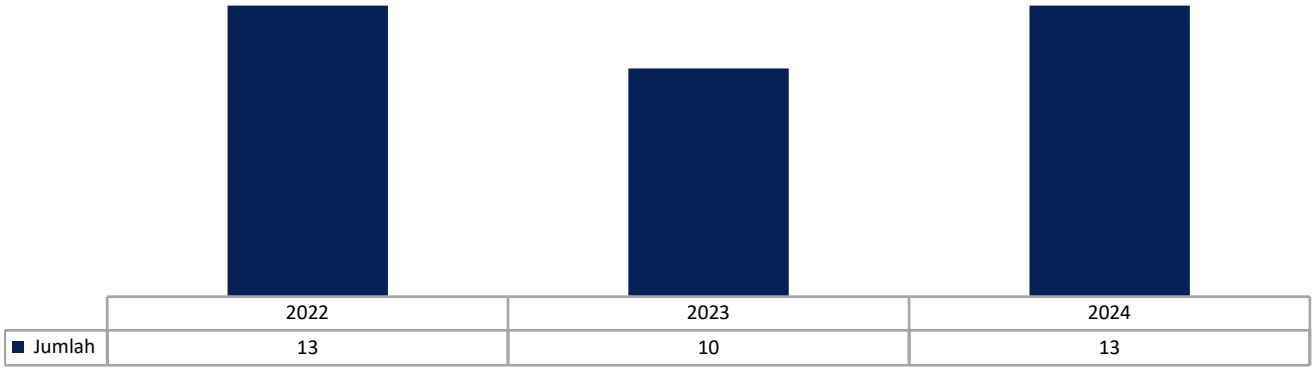
aspek (kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Secara lebih rinci terdiri dari 22 indikator berupa tujuh indikator aspek kebebasan, tujuh indikator aspek kesetaraan, dan delapan indikator aspek kapasitas lembaga demokrasi (BPS Provinsi Jambi, 2022)[3].

Berdasarkan data BPS (2025) bahwa, nilai dari IDI tahun 2024 secara nasional tercatat sebesar 79,81. Sementara itu, pada tingkat pusat sebesar 81,87 dan provinsi mencapai 78,50. Adanya nilai yang berbeda tersebut memberikan gambaran terkait variasi tingkat perkembangan demokrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Secara lebih lanjut, Provinsi DKI Jakarta mencapai nilai IDI sebesar 84,99. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional. Sehingga dengan demikian, perkembangan demokrasi yang ada pada Provinsi DKI Jakarta cenderung lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata provinsi di Indonesia (BPS, 2025)[4].

2.5.2. Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Salah satu rangkaian kegiatan yang memerlukan koordinasi dan pembahasan yang matang adalah penyusunan rancangan peraturan daerah. Rapat menjadi wadah guna menyamakan persepsi, menelaah substansi, serta memberikan kepastian di setiap ketentuan yang dirumuskan dengan relevan dan sesuai kebutuhan daerah. Selain itu, forum pembahasan turut memberikan peran penting untuk mengakomodasi masukan dari berbagai pihak. Hal ini berguna agar regulasi yang dihasilkan lebih komprehensif. Melihat frekuensi rapat yang dilakukan, dapat digunakan untuk menambah pemahaman dinamika dan keseriusan dalam mendorong kualitas peraturan daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 2.87. Jumlah Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024



	2022	2023	2024
Jumlah	13	10	13

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

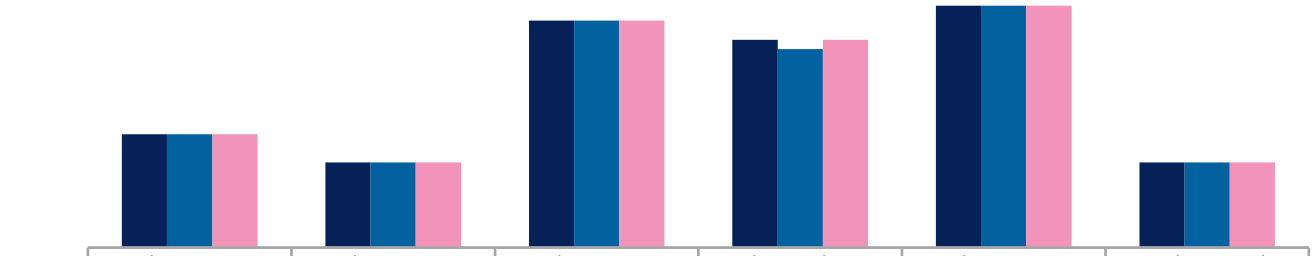
Berdasarkan data yang tersaji di atas mengenai pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022-2024, menunjukkan bahwa adanya pola yang relatif stabil dengan fluktuasi yang kecil. Pada 2022 dan 2024, masing-masing rapat pembahasan rancangan tercatat sebanyak 13 kali. Pada tahun tersebut menunjukkan adanya intensitas pembahasan yang cukup aktif. Sementara itu pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah rapat menjadi sepuluh kali. Melalui data yang tersedia di atas dapat diketahui

3 Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2022). Mengenal metode baru penghitungan IDI dan membedah Indeks Demokrasi Jambi. https://jambi.bps.go.id/id/news/2022/09/19/322/mengenal-metode-baru-penghitungan-idi-dan-membedah-indeks-demokrasi-jambi.html

4 Badan Pusat Statistik. (2025). [Metode baru] Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut provinsi. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2MCMy/-metode-baru--aspek-indeks-demokrasi-indonesia--idi--menurut-provinsi.htm

bahwa, kegiatan pembahasan regulasi tetap berjalan secara konsisten. Hal tersebut tentu saja sejalan dengan kebutuhan guna memberikan kepastian dalam kualitas peraturan daerah. Setelah mengetahui jumlah rapat pembahasan rancangan peraturan daerah, selanjutnya penting untuk memahami komposisi anggota DPRD yang berperan dalam proses tersebut. Guna memberikan pengarahan, pengawasan, serta persetujuan rancangan dalam rapat-rapat resmi, keberadaan anggota legislatif merupakan unsur penting. Jumlah dari anggota DPRD di tiap wilayah dapat memberikan pengaruh terkait intensitas diskusi serta kedalaman pembahasan substansi kebijakan. Distribusi anggota DPRD penting untuk diketahui, sehingga dapat melihat terkait representasi dan kapasitas lembaga legislatif dalam mendukung proses penyusunan peraturan di DKI Jakarta.

Gambar 2.88. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di DKI Jakarta



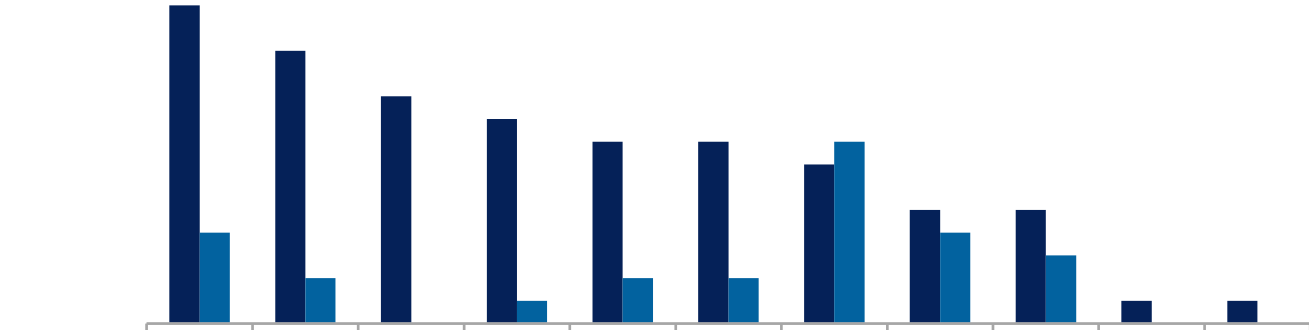
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2022	12	9	24	22	30	9
2023	12	9	24	21	30	9
2024	12	9	24	22	30	9

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Data di atas memberikan petunjuk bahwa jumlah anggota DPR per wilayah di DKI Jakarta relatif stabil sepanjang tahun 2022-2024. Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat menunjukkan jumlah anggota yang sama setiap tahunnya, yaitu masing-masing wilayah berjumlah 12, sembilan, dan 24 anggota. Jumlah yang sama setiap tahunnya turut terjadi di Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu, yaitu berjumlah 30 dan sembilan anggota. Sementara itu, hanya Jakarta Selatan menunjukkan perubahan dari 22 anggota di tahun 2022. Jumlah tersebut turun menjadi 21 anggota di tahun 2023 dan kembali menjadi 22 anggota di tahun 2024.Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, komposisi perwakilan di setiap wilayah cenderung stabil tanpa adanya perubahan yang signifikan setiap tahunnya. Stabilitas yang terjadi memberikan gambaran terkait konsistensi alokasi kursi DPRD yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan serta proporsi wilayah administratif di Provinsi DKI Jakarta. Adanya struktur keanggotaan yang tetap, diharapkan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan DPRD dapat dijalankan secara berkelanjutan dan optimal dalam memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu turut memberikan pemenuhan aspirasi masyarakat di tiap wilayah.

Setelah dilakukan pembahasan mengenai persebaran jumlah anggota DPRD di tiap wilayah Jakarta, secara lebih lanjut terdapat pembahasan mengenai komposisi berdasarkan partai politik. Representasi politik di lembaga legislatif dapat tergambarkan mengenai data tersebut. Hal tersebut mempengaruhi arah pembahasan dan penyusunan kebijakan daerah. Komposisi berdasarkan jenis kelamin turut menunjukkan tingkatan keterwakilan yang lebih inklusif. Adanya struktur tersebut, dinamika kerja DPRD dapat terlihat dengan lebih jelas, baik dari sisi politik maupun tata kelola.

Gambar 2.89. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin



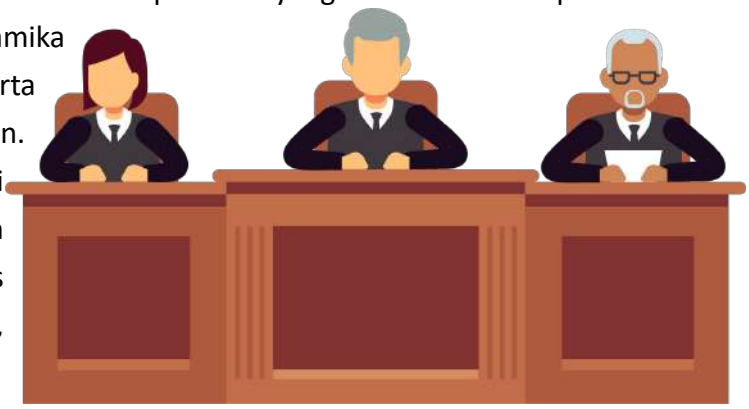
	PKS	Gerindra	PKB	Nasdem	Golkar	PAN	PDIP	Demokrat	PSI	Perindo	PPP
Laki-laki	14	12	10	9	8	8	7	5	5	1	1
Perempuan	4	2	0	1	2	2	8	4	3	0	0

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

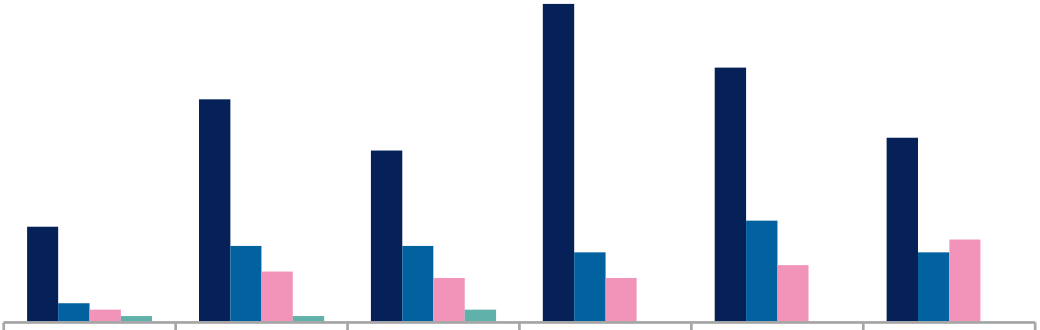
Data di atas menggambarkan variasi komposisi anggota DPRD DKI Jakarta berdasarkan partai politik. Jumlah anggota terbanyak diduduki oleh PKS dengan 18 anggota yang terdiri dari 14 laki-laki dan empat perempuan. Selanjutnya terdapat Gerindra dengan 14 anggota yang terdiri dari 12 laki-laki dan dua perempuan. PKB terdapat 10 anggota yang keseluruhan merupakan laki-laki. Sementara itu Nasdem turut beranggotakan 20 orang dengan komposisi sembilan laki-laki dan satu perempuan. Golkar dan PAN turut berjumlah masing-masing terdapat sepuluh anggota dengan komposisi delapan laki-laki dan dua perempuan. PDIP memiliki total 15 anggota dengan komposisi terdapat tujuh laki-laki dan delapan perempuan. Sementara itu, Demokrat terdapat sembilan anggota dengan laki-laki berjumlah lima orang dan perempuan berjumlah empat orang. PSI terdapat delapan anggota dengan lima orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Selanjutnya terdapat Perindo dan PPP yang masing-masing terdapat satu anggota berjenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa, variasi gender sudah terlihat. Meski sudah terdapat variasi, komposisi antara laki-laki dan perempuan menunjukkan angka yang tidak seimbang. Sementara itu, masih terdapat partai politik yang tidak beranggotakan perempuan, yaitu pada PKB, Perindo, dan PPP.

Setelah melihat bagaimana komposisi anggota DPRD DKI Jakarta yang dilihat berdasarkan partai politik, penting juga untuk melihat bagaimana representasi tersebut tercermin dalam keluaran kerja lembaga legislatif. Penyusunan keputusan dan regulasi daerah dilakukan oleh setiap anggota dewan, baik melalui fraksinya maupun pimpinan. Jumlah keputusan yang dihasilkan setiap tahun turut menunjukkan gambaran mengenai dinamika kerja politik, intensitas pembahasan, serta prioritas kebijakan yang tengah diupayakan. Adanya pemahaman mengenai variasi produk keputusan memberikan penilaian atas aktivitas dan tingkat produktivitas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan.



Gambar 2.90. Jumlah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Jenisnya di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2024



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Keputusan DPRD	15	35	27	50	40	29
Keputusan Pimpinan DPRD	3	12	12	11	16	11
Peraturan Daerah	2	8	7	7	9	13
Pertimbangan DPRD	1	1	2	0	0	0

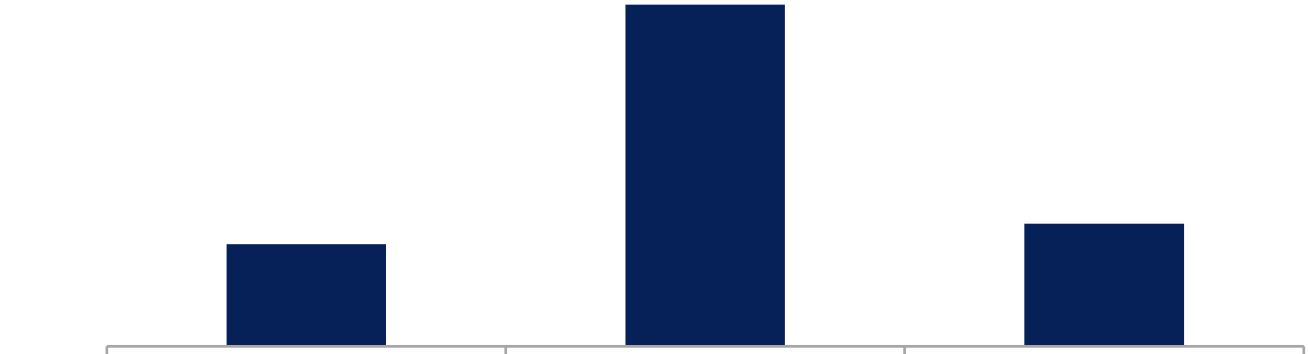
Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Fluktuasi terlihat cukup jelas pada jumlah Keputusan DPRD sepanjang tahun 2019-2024. Sementara itu, di tahun 2019 terdapat 15 keputusan, angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 35 putusan di tahun 2020. Angka keputusan mengalami penurunan menjadi 27 pada 2021 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 50 putusan di tahun 2022. Pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 40 putusan dan menjadi 29 putusan di tahun 2024. Selanjutnya terdapat keputusan pimpinan DPRD yang menunjukkan variasi angka putusan. Pada tahun 2019 terdapat tiga putusan, sementara itu terdapat 12 putusan pada tahun 2020 dan 2021. Angka putusan tersebut kembali mengalami penurunan menjadi sebelas putusan pada tahun 2022. Peningkatan kembali terjadi pada tahun berikutnya dengan sebanyak 16 putusan dan kembali mengalami penurunan menjadi sebelas putusan di tahun 2024. Selain keputusan pimpinan DPRD, terdapat kategori peraturan daerah (Perda). Pada 2019 terdapat dua Perda dan mengalami peningkatan menjadi delapan Perda pada tahun 2020. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan menjadi tujuh Perda. Peningkatan kembali terjadi pada tahun berikutnya menjadi sembilan Perda dan 13 Perda di tahun 2024. Adapun jumlah pertimbangan DPRD menunjukkan angka yang relatif kecil setiap tahun. Pada 2019 dan 2020 terdapat satu pertimbangan DPRD dan meningkat di tahun selanjutnya menjadi dua pertimbangan DPRD. Pada tahun berikutnya bahkan menunjukkan angka nol selama tiga tahun berturut-turut.

Berdasarkan pada uraian di atas bahwa, angka keputusan DPRD tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan 50 keputusan DPRD. Sementara itu, angka tertinggi lainnya terdapat pada keputusan pimpinan DPRD yang berjumlah 16 keputusan pada tahun 2023. Penetapan Perda tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan 13 Perda dan dua pertimbangan DPRD pada tahun 2021. Secara keseluruhan data ini memberikan gambaran bahwa, meskipun beberapa kategori keputusan sangat bervariasi, aktivitas legislatif tetap berjalan secara konsisten serta menghasilkan regulasi yang diperlukan guna memberikan dukungan terkait tata kelola pemerintahan daerah. Setelah mengetahui data terkait jenis keputusan yang dihasilkan oleh DPRD setiap tahun, terdapat aspek lain yang penting untuk diperhatikan. Aspek tersebut adalah bagaimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi atau permasalahan

yang dihadapi kepada lembaga legislatif. Tingkat penyampaian permasalahan dari masyarakat dapat mencerminkan keterlibatan publik, responsivitas DPRD, serta dinamika isu yang berkembang pada periode tertentu. Intensitas pengaduan atau penyampaian masalah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor pada setiap tahun, hal tersebut dapat dimulai dari situasi sosial-ekonomi hingga kualitas layanan pemerintah. Adanya pemahaman terkait pola penyampaian permasalahan, dapat dilihat seberapa besar ruang partisipasi masyarakat dimanfaatkan dalam proses demokrasi lokal.

Gambar 2.91. Jumlah Permasalahan yang Disampaikan Delegasi Masyarakat Kepada DPRD menurut Jenis Permasalahan di Provinsi DKI Jakarta



	2022	2023	2024
Jumlah	5	17	6

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

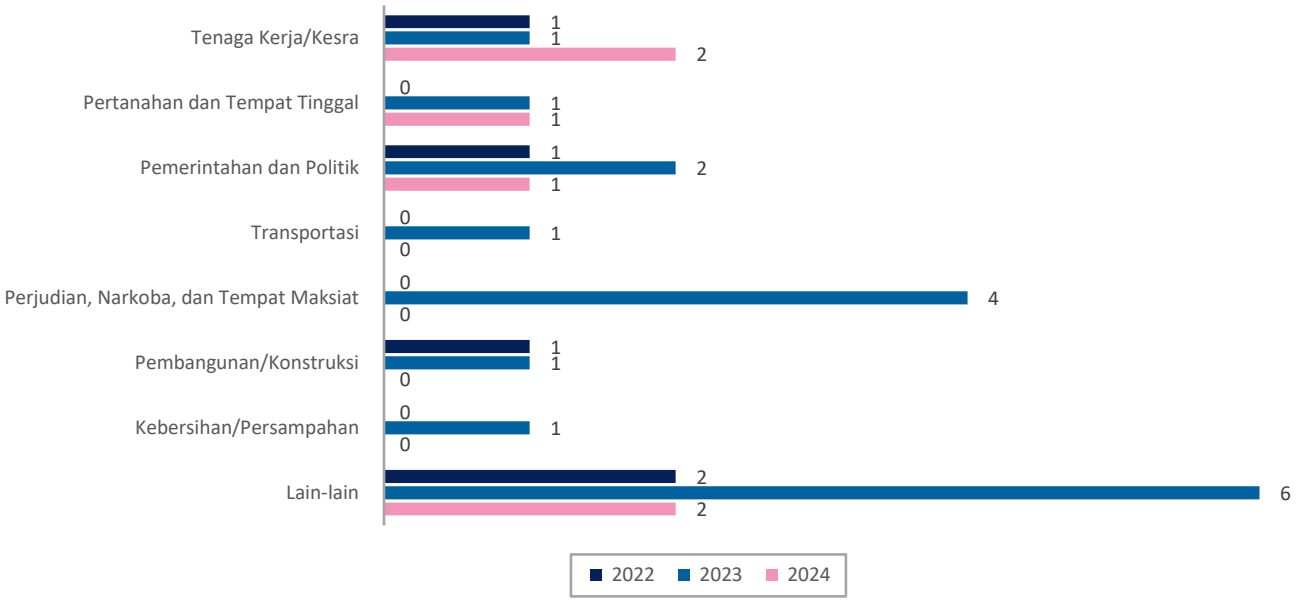
Data yang tersedia di atas memberikan gambaran bahwa, dari tahun ke tahun jumlah permasalahan yang disampaikan delegasi masyarakat kepada DPRD mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada 2022 terdapat lima permasalahan yang masuk, angka tersebut menunjukkan tingkat penyampaian aspirasi yang masih terbatas. Pada tahun berikutnya, terjadi peningkatan tajam menjadi 17 permasalahan. Hal tersebut memberikan tanda adanya dorongan yang lebih besar dari masyarakat untuk menyampaikan isu yang sedang dihadapi kepada DPRD. Peningkatan yang terjadi tersebut bisa berkaitan dengan meningkatnya kesadaran mengenai mekanisme pengaduan atau munculnya isu-isu baru yang dirasa memerlukan perhatian legislatif.

Pada tahun 2024, jumlah permasalahan menunjukkan penurunan menjadi enam laporan. Angka tersebut tidak jauh berbeda apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara itu, jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan lonjakan pada 2023. Penurunan ini dapat memberikan gambaran bahwa, permasalahan mampu diselesaikan atau dinamika isu yang muncul pada 2023 tidak berulang dengan skala yang sama. Maka dengan ini, fluktuasi yang terjadi memberikan indikasi bahwa permasalahan yang disampaikan masyarakat bersifat situasional dan dapat berubah mengikuti konteks sosial serta interaksi masyarakat dengan lembaga DPRD.

Setelah melihat adanya fluktuasi dari permasalahan yang disampaikan masyarakat kepada DPRD dari tahun ke tahun, langkah selanjutnya adalah memahami lebih jauh terkait permasalahan apa saja yang paling banyak diadukan. Data mengenai hal tersebut penting karena tidak hanya menunjukkan jumlah aspirasi, tetapi turut memberikan perhatian mengenai isu-isu apa saja yang sering dirasakan masyarakat. Dilakukan peninjauan pada setiap kategorinya, dapat mengetahui apakah persoalan yang

muncul berkaitan dengan layanan publik, pembangunan, ketertiban, atau aspek sosial yang lain. Hal ini dapat membantu memberikan gambaran secara lebih jauh terhadap prioritas masyarakat yang perlu untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

Gambar 2.92. Jumlah Permasalahan yang Disampaikan Delegasi Masyarakat Kepada DPRD menurut Jenis Permasalahan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024



Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Data terkait jenis permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat pada tahun 2022-2024 memberikan gambaran mengenai dinamika yang cukup beragam pada setiap kategori. Pada tahun 2022 jenis permasalahan dengan kategori lain-lain menjadi laporan yang paling banyak disampaikan, yaitu sebanyak dua laporan. Sementara itu, jenis permasalahan seperti pembangunan/konstruksi, pemerintahan dan politik, serta tenaga kerja/kesra masing-masing mendapatkan satu laporan. Pada tahun yang sama, beberapa kategori seperti kebersihan/persampahan, transportasi, pertanahan dan tempat tinggal, serta perjudian, narkoba, dan tempat maksiat tidak menunjukkan adanya laporan. Jumlah laporan menunjukkan perbedaan pada tahun 2023. Kategori lain-lain masih mendominasi di tahun tersebut dengan enam laporan. Sementara itu, jenis permasalahan perjudian, narkoba, dan tempat maksiat menunjukkan peningkatan menjadi empat laporan. Jenis permasalahan pemerintahan dan politik turut mengalami peningkatan dengan dua laporan. Sementara itu terdapat jumlah laporan yang sama, yaitu masing-masing dengan satu laporan pada jenis permasalahan kebersihan/persampahan, pembangunan/konstruksi, transportasi, pertanahan dan tempat tinggal, serta tenaga kerja/kesra.

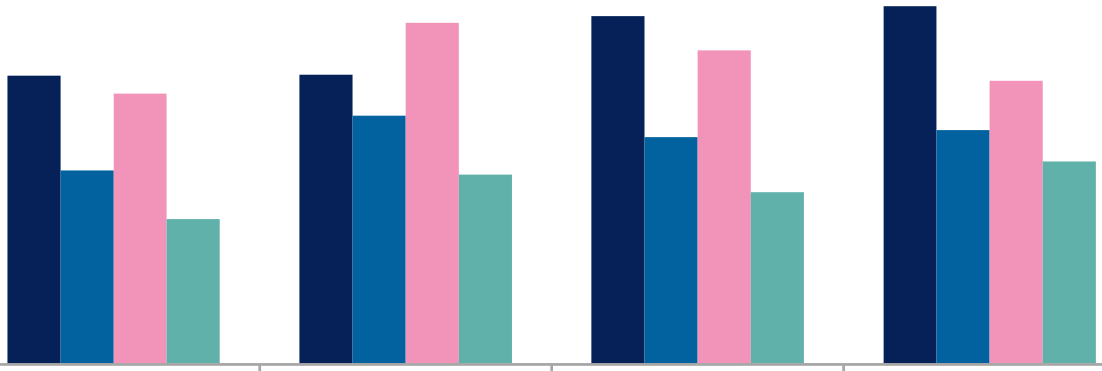
Sementara itu, pada 2024 jumlah laporan kembali mengalami penurunan pada hampir semua jenis permasalahan. Jenis permasalahan dengan kategori lain-lain menurun menjadi dua laporan. Pemerintahan dan politik serta pertanahan dan tempat tinggal masing-masing mendapatkan satu laporan. Pada jenis permasalahan seperti kebersihan/persampahan, pembangunan/konstruksi, transportasi, serta perjudian, narkoba, dan tempat maksiat tidak mendapatkan laporan sama sekali. Pada sisi lain, tenaga kerja/kesra menunjukkan peningkatan dengan mendapatkan dua laporan apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, data di atas menunjukkan bahwa dinamika jenis permasalahan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial pada tahun berjalan. Puncak dari penyampaian laporan terjadi pada 2023. Sementara itu, penurunan laporan turut terlihat pada tahun selanjutnya.

2.5.3. Politik dalam Negeri

Indeks demokrasi menjadi salah satu indikator utama guna melihat bagaimana proses dan praktik demokrasi berjalan di suatu wilayah. Melalui indeks ini, dapat dijadikan penilaian aspek seperti kebebasan sipil, hak-hak politik, dan efektivitas lembaga demokrasi. Perkembangan indeks dari tahun ke tahun turut memberikan petunjuk perbaikan atau tantangan yang muncul dalam penyelenggaraan demokrasi. Membandingkan capaian di tingkat daerah dengan tren nasional, pusat, dan provinsi, dapat memberikan gambaran secara lebih akurat mengenai posisi DKI Jakarta dalam konteks demokrasi secara lebih luas.

Gambar 2.93. Indeks Demokrasi DKI Jakarta, Nasional, Pusat, dan Provinsi Tahun 2021-2024



	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	82,08	82,13	84,57	84,99
Nasional*	78,12	80,41	79,51	79,81
Pusat	81,33	84,29	83,14	81,87
Provinsi**	76,08	77,95	77,21	78,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

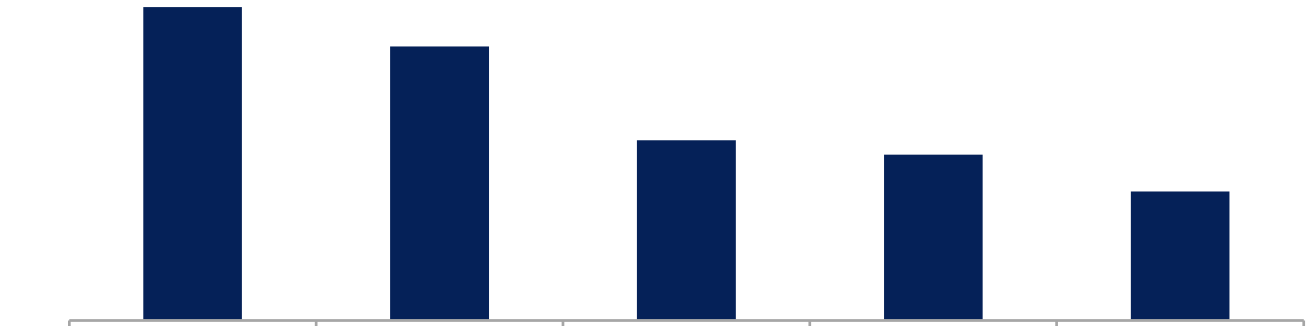
Data Indeks Demokrasi memberikan gambaran mengenai catatan tren kenaikan yang cukup konsisten di DKI Jakarta pada tahun 2021-2024. Indeks yang pada tahun 2021 berada pada angka 82,08 mengalami peningkatan menjadi 82,13 di tahun berikutnya. Kenaikan terus terjadi pada tahun 2023 pada angka 84,57 dan menjadi 84,99 pada tahun 2024. Terjadinya kenaikan mengindikasikan adanya perbaikan pada aspek-aspek demokrasi yang diukur, seperti partisipasi publik, penguatan lembaga politik, serta meningkatnya ruang kebebasan sipil. Stabilitas kenaikan indeks turut memberikan petunjuk bahwa proses demokrasi di Jakarta berjalan dengan baik.

Nilai indeks nasional pada tahun 2021 berada pada 78,12 dan meningkat menjadi 80,41 di tahun 2022. Angka tersebut menurun menjadi 79,51 pada tahun 2023 dan mengalami sedikit kenaikan menjadi 79,81 pada tahun 2024. Berdasarkan data, nilai indeks nasional cenderung berada pada kisaran 78-79, sementara itu DKI Jakarta berada pada kisaran 82-84. Apabila dibandingkan dengan indeks nasional, DKI Jakarta menduduki rata-rata nasional pada seluruh tahun pengamatan. Gap tersebut memberikan gambaran bahwa, kualitas demokrasi di Jakarta berada dalam kategori yang baik. Hal tersebut dapat

terjadi oleh pengaruh tingginya akses informasi, ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas, serta intensitas kegiatan politik yang lebih tinggi di ibu kota. Perbandingan dengan nilai indeks pusat dan provinsi turut memperkuat posisi DKI Jakarta sebagai wilayah dengan praktik demokrasi yang relatif stabil. Indeks pusat pada tahun 2021 berada pada nilai 81,33 dan meningkat menjadi 84,29 pada tahun 2022. Angka tersebut kemudian mengalami penurunan menjadi 83,14 pada tahun 2023 dan berlanjut menjadi 81,87 pada tahun 2024. Sementara itu pada indeks provinsi, pada tahun 2021 mendapatkan nilai 76,08 dan meningkat menjadi 77,95 pada tahun 2022. Angka tersebut mengalami penurunan menjadi 77,21 pada tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 78,50 pada tahun 2024. Berdasarkan pada data di atas, indeks pusat berada pada rentang 81-84, sedangkan indeks provinsi pada rentang 76-78. Berdasarkan performa secara konsisten lebih tinggi apabila dibandingkan pada kedua level tersebut. DKI Jakarta memberikan kapasitas kelembagaan secara lebih baik dalam menjaga kualitas demokrasi lokal. Secara keseluruhan, pola tersebut memberikan gambaran bahwa Jakarta berada pada posisi yang stabil dan terus mengalami penguatan dalam aspek-aspek demokrasi formal atau partisipatif.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berguna sebagai alat ukur dalam melakukan penilaian perkembangan kualitas demokrasi pada setiap provinsi di Indonesia. Semakin tinggi nilai indeks menggambarkan bahwa, semakin baik pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara lebih lanjut, beberapa provinsi tercatat mencapai indeks yang lebih unggul dari provinsi lainnya pada tahun 2024. Perbandingan tersebut penting guna mengetahui daerah dengan tingkat demokrasi terbaik sekaligus mengetahui posisi Provinsi DKI Jakarta dalam lingkup nasional. Berikut tersaji data lima provinsi dengan nilai Indeks Demokrasi Indonesia tertinggi pada tahun 2024:

Gambar 2.94. Perkembangan IDI provinsi lima wilayah teratas Tahun 2024



	DI Yogyakarta	Bali	Kalimantan Barat	Jawa Tengah	DKI Jakarta
IDI	89,25	88,34	86,17	85,84	84,99

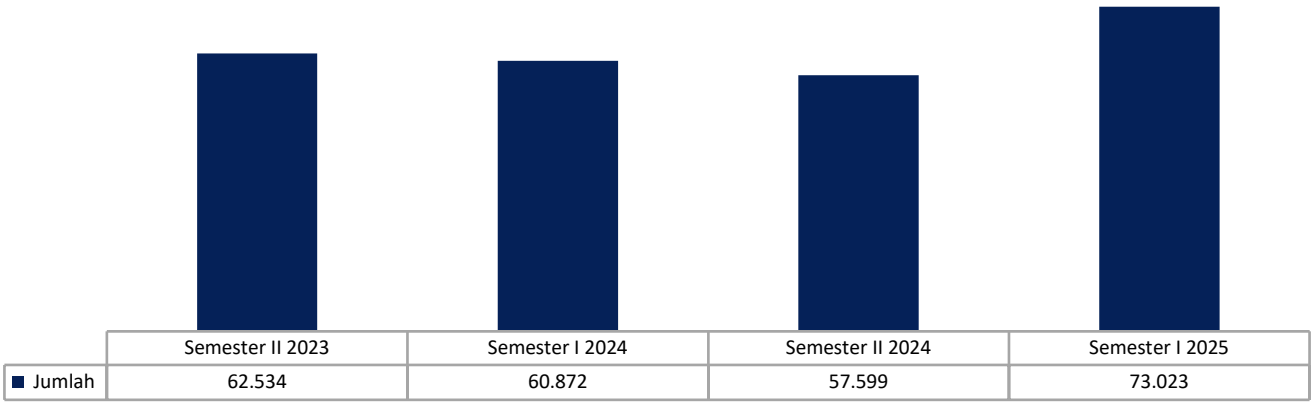
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Data pada tahun 2024 di atas menunjukkan bahwa, Provinsi DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan nilai Indeks Demokrasi Indonesia paling tinggi (89,25). Sementara itu, Bali menduduki posisi berikutnya dengan 88,34 dan Kalimantan Barat sebesar 86,17. Jawa Tengah mencapai 85,84 dan DKI Jakarta sebesar 84,99. Pada data tersebut, DKI Jakarta tidak menempati posisi pertama. Secara lebih lanjut, menunjukkan tingkat kualitas demokrasi di Provinsi DKI Jakarta masih tergolong tinggi. Hal tersebut dikarenakan berada pada posisi di atas sebagian besar provinsi lainnya di Indonesia.

2.6. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

2.6.1. Perlindungan Masyarakat

Gambar 2.95. Jumlah Massa Unjuk Rassa di DKI Jakarta.



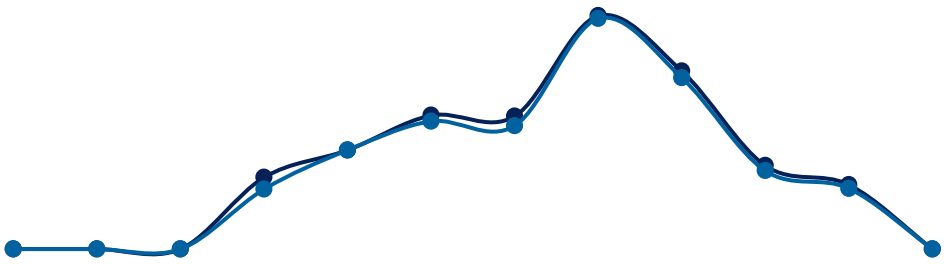
	Semester II 2023	Semester I 2024	Semester II 2024	Semester I 2025
Jumlah	62.534	60.872	57.599	73.023

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan menyampaikan secara lisan, tulisan, dsb. Secara umum, unjuk rasa dilakukan secara demontrastatif di muka umum. Dan secara bertanggung jawab tidak boleh di lakukan pada tempat tertentu seperti : tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, objek serta menghormati pihak yang lain. Secara umum, Peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum di atur pada Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaran, Pengamanan, dan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Dari data dan grafik di atas membandingkan nilai jumlah unjuk rasa yang ada di DKI Jakarta. Terjadi penurunan jumlah dari tahun 2023 ke 2024 yaitu saat semester I di tahun 2024 sebanyak 1.662 massa, pada semester II tahun 2.024 turun sebanyak 3.273. Namun terjadi kenaikan yang signifikan pada semester I tahun 2.025 yaitu sebanyak 15.424. Hal tersebut dipengaruhi karena adanya ketidakstabilitasan politik di Indonesia secara khusus demostrasi terkait DPR yang telah memakan korban jiwa serta menimbulkan unjuk rasa di setiap titik wilayah di DKI Jakarta.

Gambar 2.96. Data Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan/Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21 di DKI Jakarta Tahun 2024.

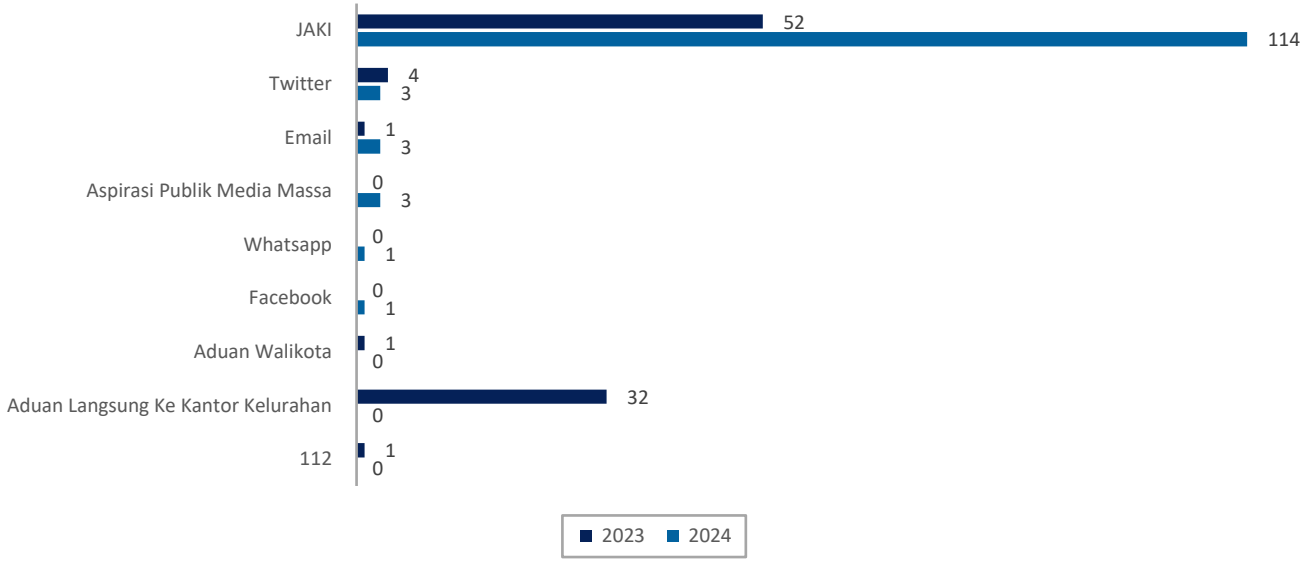


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Jumlah Kasus	0	0	0	97	134	181	180	316	241	113	87	0
Jumlah yang Dilimpahkan	0	0	0	81	134	173	167	312	232	106	82	0

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Berkas perkara P21 ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) adalah pemberitahuan dari Jaksa kepada penyidik (kepolisian) agar berkas perkara yang telah lengkap baik dari segi formil ataupun segi materiil, dan siap untuk dilimpahkan ke tahap penuntut. Dalam perkara pidana, fungsi dari P21 ini adalah penyelidikan telah selesai dan perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan, Jaksa dapat menyusun surat dakwaan berdasarkan berkas, serta menjadi dasar bagi pelaksanaan tahap ke-II yaitu penyerahan tersangka dengan barang bukti dari penyidikan ke penuntut umum. Berkas perkara P-21 juga berkorelasi bahwa efektivitas aparat penegak hukum dalam memantau proses pelanggaran Perda (peraturan daerah). Dari data dan grafik diatas menunjukkan tren perbandingan antara jumlah kasus pelanggaran perda terhadap jumlah kasus yang telah dilimpahkan ke JPU. Pada periode Triwulan I (Jakarta – Maret) serta bulan desember menunjukkan tidak adanya kasus pelanggara perda di wilayah DKI Jakarta sepanjang tahun 2024. kasus terjadi pada bulan April dan memuncak pada bulan Agustus dengan jumlah kasus terbanyak adalah 316 kasus. Jika dilihat persentasenya, rasio antara jumlah kasus yang dilimpahkan dengan jumlah kasus pelanggaran perda nilai jumlahnya mencapai ≥ 93% setiap bulannya. Nilai persentase tertinggi terjadi pada bulan mei yaitu sebanyak 100% dan terendah terjadi pada bulan mei yaitu sebanyak 84%. Hal tersebut muncul ketika aparat penegak hukum masih beradaptasi di saat triwulan I tidak adanya kasus yang terjadi pada periode tersebut. Secara keseluruhan, dari data tersebut mengindikasikan keseriusan aparat penegak hukum di DKI Jakarta dalam memantau kasus dan menyelesaikan pelanggaran perda di wilayah DKI Jakarta guna memberikan rasa aman dan nyaman di masyarakat.

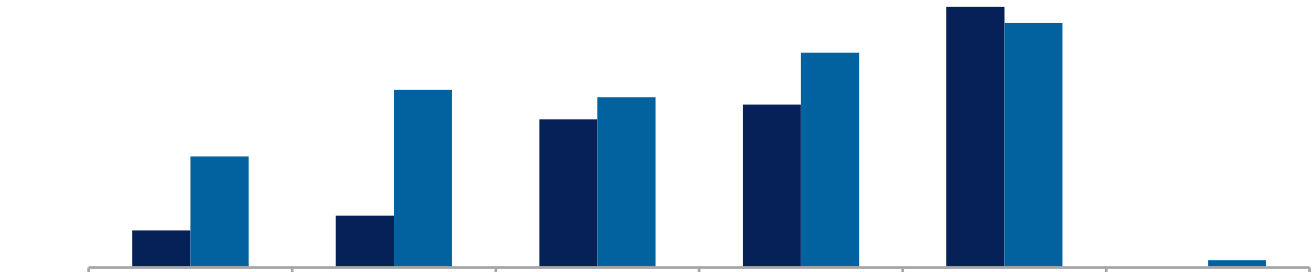
Gambar 2.97. Jumlah Pengaduan yang Masuk pada Angka Kriminalitas Tertangani di wilayah DKI Jakarta Tahun 2023-2024.



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta



Gambar 2.98. Asal Pengaduan yang masuk pada Angka Kriminalitas Tertangani di DKI Jakarta tahun 2023-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	5	7	20	22	37	0
2024	15	24	23	29	33	1

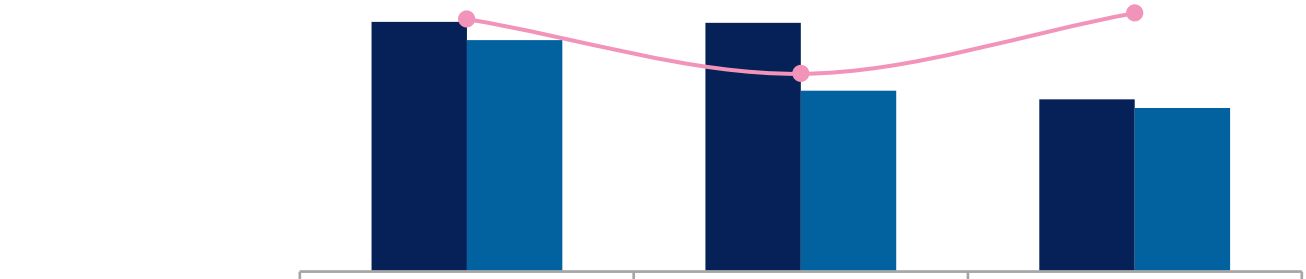
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Angka kriminalitas atau risiko terkena kejahatan adalah jumlah kejahatan setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun yang bersangkutan dikalikan 10.000. Dalam mengantisipasi kriminalitas perlu kolaborasi antara masyarakat dengan POLRI/SATPOL PP sehingga dihasilkan lingkungan/ masyarakat yang aman, nyaman, dan sehat serta terhindar dari kejahatan. Jumlah pengaduan kriminalitas yang tertangani merupakan salah satu bentuk indikator peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian kriminal serta respons aparat yang semakin aktif dalam menindaklanjuti pengaduan.

Dari data dan grafik pertama membandingkan nilai jumlah aduan yang masuk pada angka kriminalitas yang tertangani berdasarkan sebaran wilayah. Wilayah Jakarta Timur merupakan jumlah pengaduan tertinggi pada periode tahun 2023-2024 di mana sebanyak 37 pengaduan di tahun 2023 yang tertangani dan turun 4 kasus sebanyak 33 pengaduan di tahun 2024. Di susul pada Jakarta Selatan dan Jakarta Barat di tahun 2023 dan 2024 yang masing-masing naik sebanyak (22 menjadi 29) dan (20 menjadi 23). Lalu Jakarta Pusat dan Jakarta Utara juga mengalami tren peningkatan yang signifikan khususnya di ta'(Costplay)24. Dengan masing-masing kasus adalah (5 menjadi 15) kasus dan (7 dan 24) kasus lalu paling sedikit, Wilayah Kepulauan Seribu tetap menjadi jumlah pengaduan paling rendah yaitu masing-masing (0 menjadi 1) kasus. Dari data tersebut menggambarkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengaduan kanal kriminalitas.

Dari data dan grafik kedua membandingkan nilai angka kriminalitas yang dapat ditinjau dari asal pengaduannya. Terlihat pola yang mencolok asal pengaduan pelaporan angka kriminalitas yang semula Aplikasi JAKI menjadi kanan pengaduan paling dominan dengan peningkatan yang signifikan sebanyak 62 pengaduan menjadi 114 di tahun 2024. Sebaliknya pengaduan langsung ke kantor kelurahan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Semula berjumlah 32 di tahun 2023 menurun menjadi 0 pengaduan di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan pergeseran pola pengaduan yang semula pengaduan bertemu langsung menuju layanan digital yang lebih cepat dan praktis. Kanal lain seperti email, media sosial, dan layanan darurat berkontribusi relatif kecil namun tetap menunjukkan bahwa sistem pengaduan kriminalitas di DKI Jakarta yang bersifat multikanal sehingga memberi ruang untuk masyarakat dengan pilihan minat dan akses yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, data dan grafik di atas memberikan gambaran bahwa pengelolaan pengaduan kriminalitas di DKI Jakarta yang semakin adaptif, responsif, dan terdigitalisasi sesuai kebutuhan masyarakat.

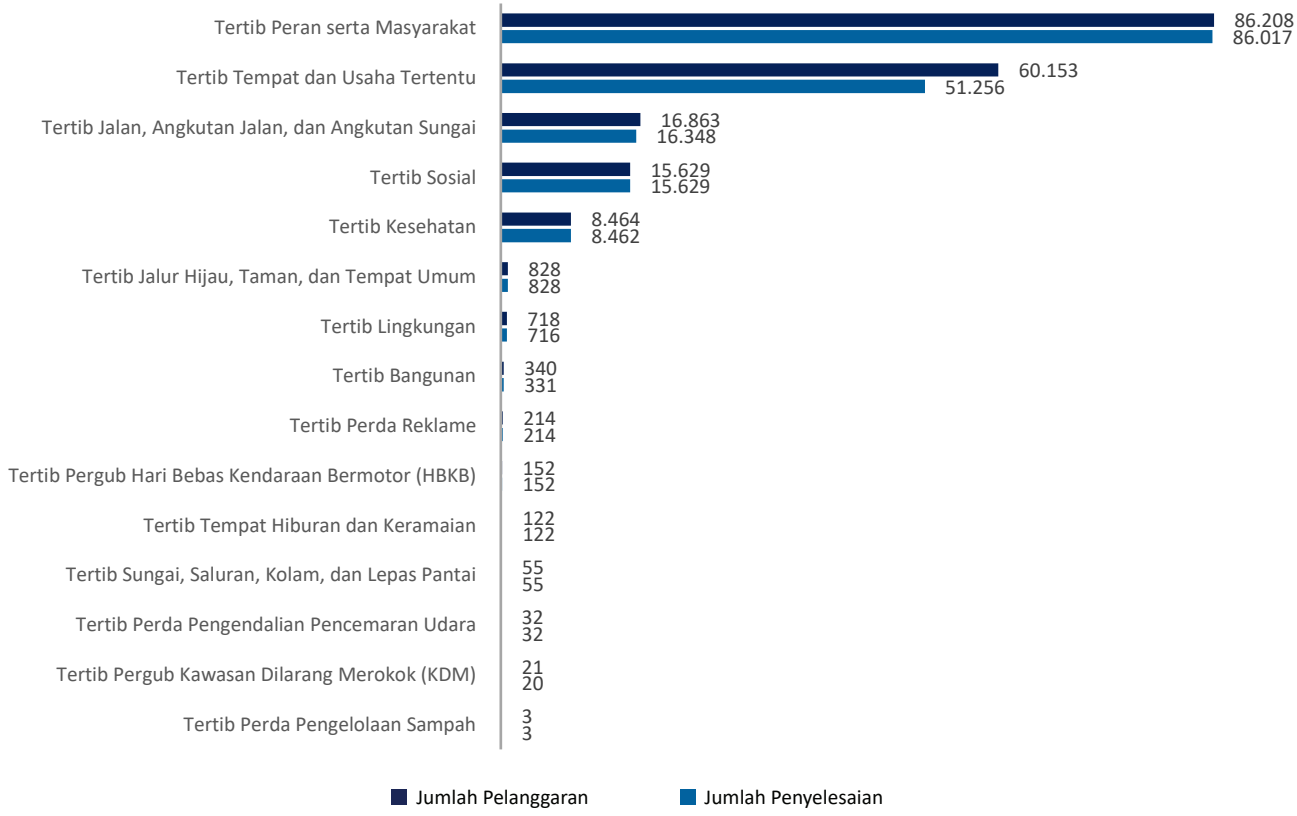
Gambar 2.99. Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) di DKI Jakarta Tahun 2023-2024.



	2022	2023	2024
Jumlah Pelanggaran	275.171	274.043	189.802
Jumlah Penyelesaian	255.127	199.169	180.185
Persentase Penyelesaian	92,72%	72,68%	94,93%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 2.100. Jumlah Jenis Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) di DKI Jakarta Tahun 2023-2024.



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

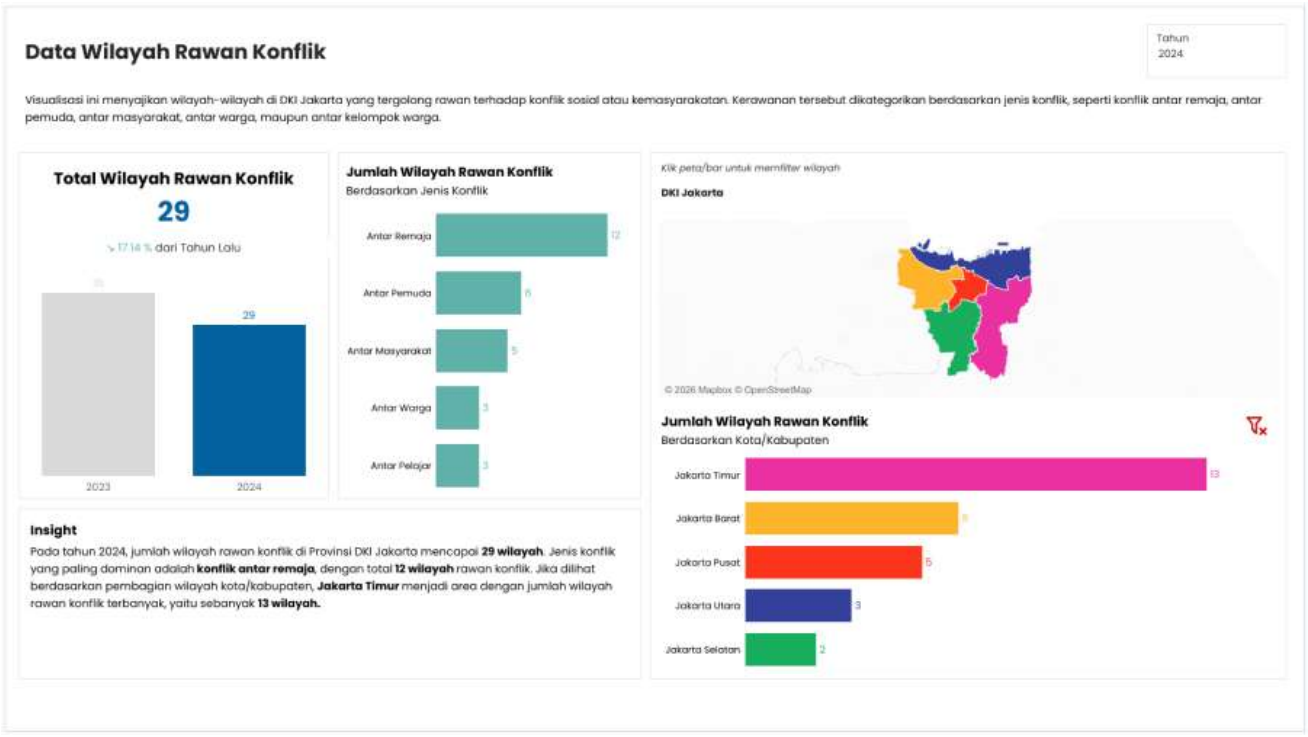
Tingkat penyelesaian K3 merupakan indikator untuk mengukur efektivitas penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan keindahan lingkungan. Kegiatan ini meliputi penanganan aksi unjuk rasa, penertiban pedagang kaki lima (PKL), pengelolaan gelandangan dan pengemis, serta pengaturan pemasangan spanduk atau reklame. Tingkat penyelesaian ini mencerminkan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

Data dan grafik pertama membandingkan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di DKI Jakarta pada periode 2022–2024. Pada tahun 2022, persentase penyelesaian pelanggaran mencapai 92,72%. Angka ini sempat menurun signifikan pada tahun 2023 menjadi 72,68%, namun kembali meningkat tajam pada tahun 2024 sebesar 22,26% hingga mencapai 94,93%. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya perbaikan besar dalam tata kelola, koordinasi lapangan, serta mekanisme penindakan, sehingga pelanggaran K3 di masyarakat dapat teratasi dengan lebih efektif.

Data dan grafik kedua menggambarkan rincian jenis pelanggaran K3. Jika dilihat berdasarkan rasio penyelesaiannya, mayoritas variabel mencatat persentase penyelesaian sebesar 100%, meliputi:

- Tertib peran serta masyarakat, tertib sosial, dan tertib kesehatan.
- Tertib jalur hijau dan taman, serta tertib reklame (Perda).
- Tertib Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB/Pergub).
- Tertib tempat hiburan, keramaian, serta tertib sungai, saluran, dan kolam.
- Tertib pengendalian pencemaran udara (Perda).

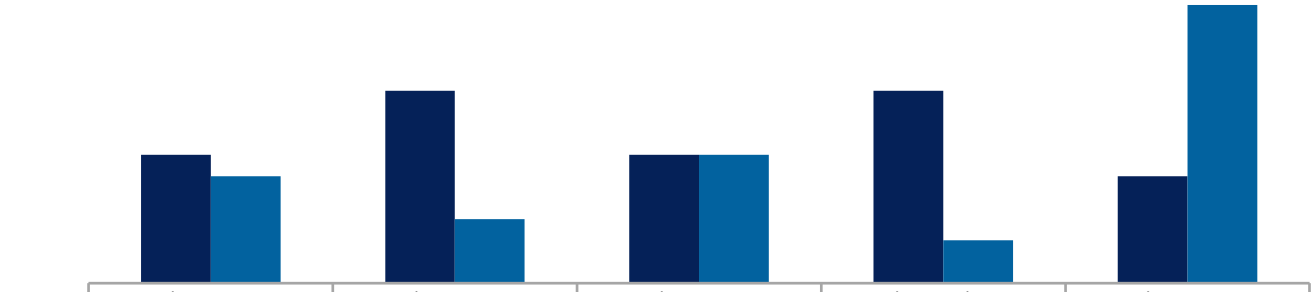
Sementara itu, beberapa variabel lainnya mencatat angka penyelesaian yang juga sangat tinggi, yaitu tertib jalan dan angkutan (97%), tertib bangunan (97%), tertib kawasan dilarang merokok (95%), serta tertib tempat usaha tertentu (85%). Pola ini menunjukkan bahwa hampir seluruh jenis pelanggaran ditangani secara cepat dan konsisten oleh aparat penegak ketertiban. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran positif terkait penyelenggaraan ketertiban umum di DKI Jakarta yang berhasil meningkatkan kualitas penanganan kasus di lapangan.







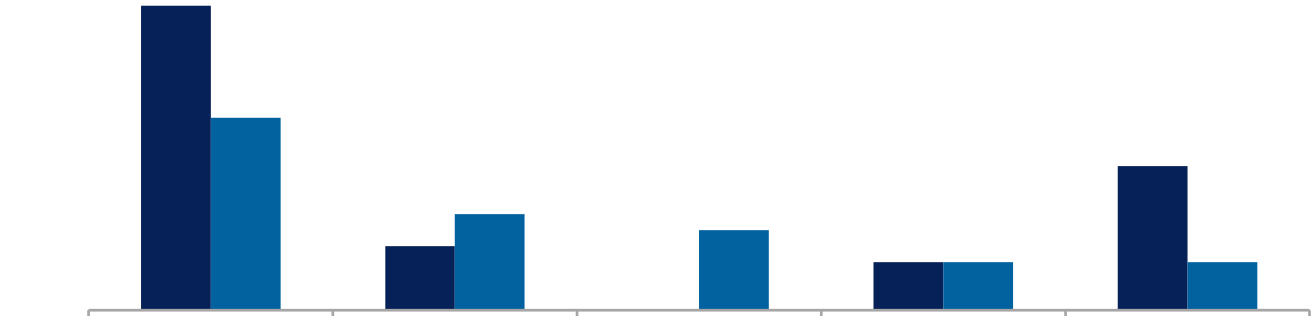
Gambar 2.101. Data Wilayah Rawan Konflik Sosial/Kemasyarakatan di DKI Jakarta Tahun 2023 – 2024.



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2023	6	9	6	9	5
2024	5	3	6	2	13

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Gambar 2.102. Data Wilayah Rawan Konflik Sosial/Kemasyarakatan menurut Keterangan Konflik di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024.



	Antar Remaja	Antar Pemuda	Antar Masyarakat	Antar Pelajar	Antar Warga
2023	19	4	0	3	9
2024	12	6	5	3	3

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Wilayah rawan konflik adalah suatu kawasan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan, pergolakan, atau masalah sosial yang mengakibatkan terganggunya keharmonisan masyarakat. menurut Badan Pusat Statistik (BPS), faktor yang paling berpengaruh terhadap kerawanan sosial adalah tingkat kepadatan penduduk yang tinggi yang tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal, sehingga berdampak pada angka kemiskinan.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur dan memantau perkembangan kondisi ini disebut Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS). Di DKI Jakarta, konflik sosial umumnya dipicu oleh beberapa faktor utama, yaitu sengketa tanah, kekerasan komunal, konflik lingkungan, serta dinamika politik.

Data dan grafik pertama menggambarkan fluktuasi jumlah wilayah rawan konflik di DKI Jakarta pada periode 2023–2024. Terjadi penurunan titik konflik di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan, dengan penurunan paling signifikan berada di Jakarta Pusat. Sebaliknya, wilayah Jakarta Timur mengalami peningkatan sebanyak 8 kasus konflik. Hal ini selaras dengan faktor kepadatan penduduk yang sangat tinggi di wilayah tersebut. Sementara itu, jumlah kasus di wilayah Jakarta Barat terpantau stabil.

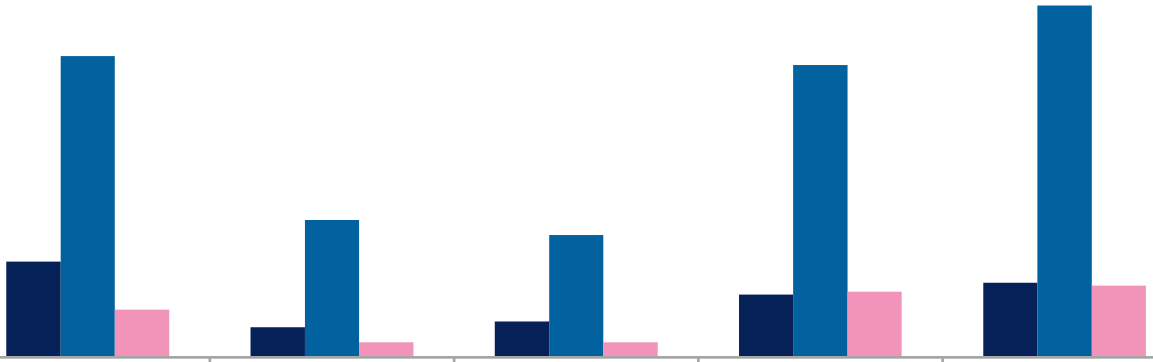
Data dan grafik kedua menunjukkan klasifikasi kelompok yang terlibat dalam konflik di DKI Jakarta. Terdapat peningkatan pada kategori konflik antar-pemuda sebanyak 2 kasus, diikuti oleh konflik antar-warga sebanyak 5 kasus. Berdasarkan data tersebut, potensi konflik sosial dapat diminimalkan dengan mengatasi akar penyebab masalah, membangun jaringan komunitas yang kuat, mempromosikan toleransi dan saling pengertian, serta memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang terdampak.

2.6.2. Ketentraman dan Ketertiban

Organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki peran penting dalam membangun partisipasi warga dan mendukung fungsi pemerintahan di tingkat lokal. Sebagai bagian dari infrastruktur politik, umumnya ormas memiliki basis massa yang cukup besar dan tokoh-tokoh yang berpengaruh[5]. Di Indonesia, keberadaan ormas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Ormas menjadi Undang-Undang, yang menegaskan pentingnya legalitas melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi ormas yang ingin memperoleh pengakuan formal dari negara.

Di Provinsi DKI Jakarta, proses penerbitan SKT difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)[6], sementara penetapannya berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Ormas yang telah mendapatkan SKT kemudian dicatat dalam daftar resmi ormas terdaftar di tingkat provinsi.

Gambar 2.103. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2022	32	10	12	21	25
2023	101	46	41	98	118
2024	16	5	5	22	24

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

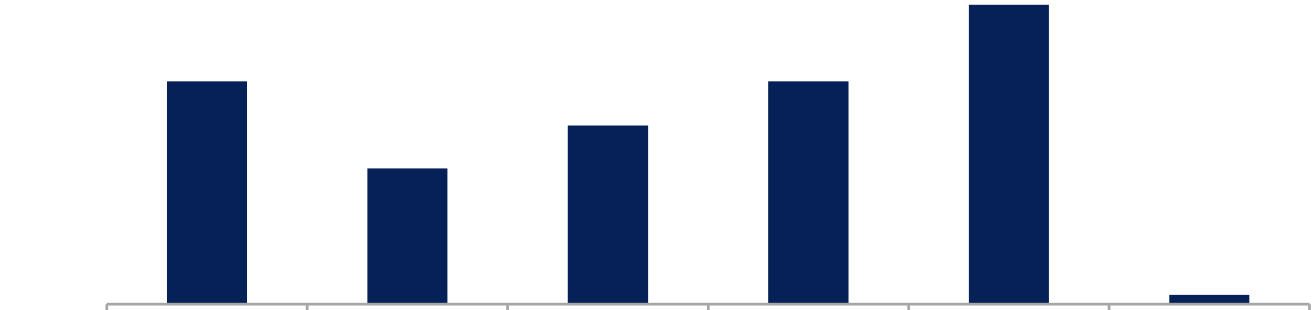
5 Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Partisipasi Organisasi Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan Pemerintah", https://setkab.go.id/partisipasi-organisasi-kemasyarakatan-dalam-penyusunan-kebijakan-pemerintah/

6 PPID DKI Jakarta, "Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah", https://ppid.jakarta.go.id/assets/home/ppidNew/struktur-organisasi/2022/Badan_Kesatuan_Bangsa_Dan_Politik.pdf, (Kamis, 22 Januari 2025, 10.15)

Pada tahun 2022-2024, data menunjukkan dinamika signifikan pada jumlah ormas terdaftar di lima wilayah kota administratif DKI Jakarta. Seluruh wilayah mencatat lonjakan yang sangat tinggi pada tahun 2023, sebelum kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dari sisi distribusi wilayah, data memperlihatkan bahwa Jakarta Selatan dan Jakarta Timur menjadi dua wilayah dengan dinamika pertumbuhan ormas yang paling besar. Kedua wilayah tersebut memiliki profil demografis yang padat dan heterogen, serta ruang aktivitas publik yang luas (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024). Sementara Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara menunjukkan pola yang sejalan namun dalam skala lebih rendah.

Dinamika ormas yang terdaftar secara formal selama periode 2022-2024 mencerminkan tingginya partisipasi warga Jakarta dalam kehidupan sosial dan kelembagaan. Namun, aktivitas masyarakat di ruang publik juga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan ketertiban umum.

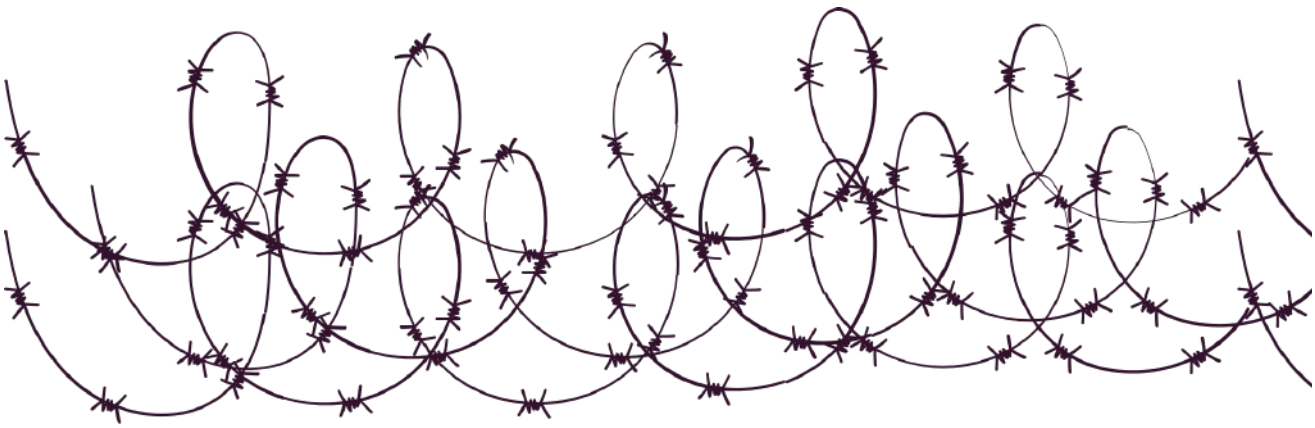
Gambar 2.104. Data Rawan Ketertiban Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



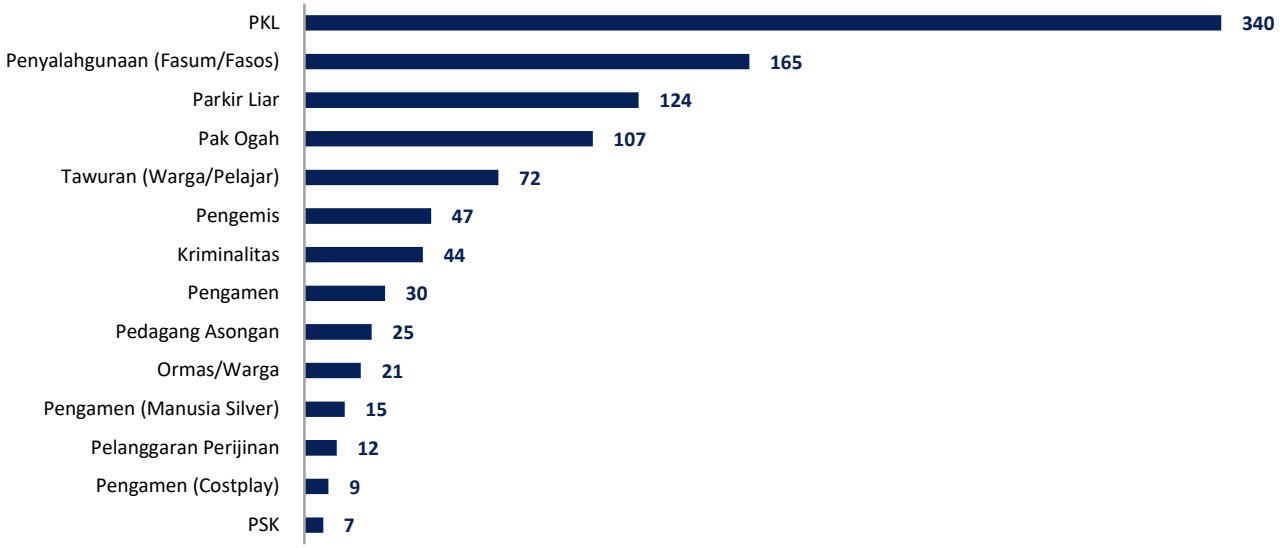
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jumlah	212	129	170	212	286	9

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2024, potensi gangguan ketertiban umum tersebar di seluruh wilayah administratif DKI Jakarta dengan intensitas yang bervariasi. Secara total, kejadian rawan ketertiban umum mencapai 1.018 kasus yang tersebar tidak merata antar wilayah. Jakarta Timur mencatat kontribusi terbesar dengan sekitar 28,09% dari total kejadian. Sementara Kepulauan Seribu dengan angka terendah, hanya mencatat 0,88% dari total kejadian.



Gambar 2.105. Jenis Rawan Ketertiban Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



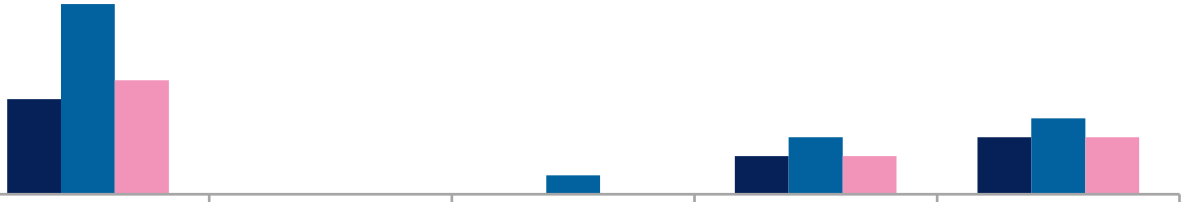
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Ditinjau berdasarkan jenis kerawanan, gangguan ketertiban umum di Jakarta pada tahun 2024 didominasi oleh aktivitas ekonomi informal dan pemanfaatan ruang publik yang tidak sesuai peruntukan. Pedagang kaki lima (PKL) menjadi kategori paling dominan dengan kontribusi sebanyak 33,40% dari keseluruhan kejadian. Penyalahgunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial menyusul dengan proporsi 16,21%, diikuti parkir liar sebesar 12,18% dan aktivitas Pak Ogah sekitar 10,51%. Secara kumulatif, empat kategori tersebut mencakup sebanyak 72,30% total kejadian rawan ketertiban umum, dapat menegaskan bahwa persoalan utama ketertiban di Jakarta masih berkaitan erat dengan tekanan ekonomi perkotaan dan keterbatasan ruang kota dalam mengakomodasi aktivitas masyarakat.

Jenis kerawanan yang bersifat sosial, seperti tawuran warga atau pelajar, menyumbang sekitar 7,07% dari total kejadian, sementara kriminalitas berada pada kisaran 4,32%. Keberadaan pengemis dan pengamen secara keseluruhan mencerminkan kerentanan sosial kelompok tertentu yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perlindungan sosial dan pasar kerja formal. Meskipun secara persentase lebih kecil dibanding pelanggaran ruang publik, jenis kerawanan ini memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap rasa aman dan ketenteraman masyarakat. Secara keseluruhan, data rawan ketertiban umum tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga gangguan ketertiban di DKI Jakarta bersumber dari interaksi antara ekonomi informal dan pengelolaan ruang publik.



Gambar 2.106. Jumlah Sekretariat Partai Politik Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024



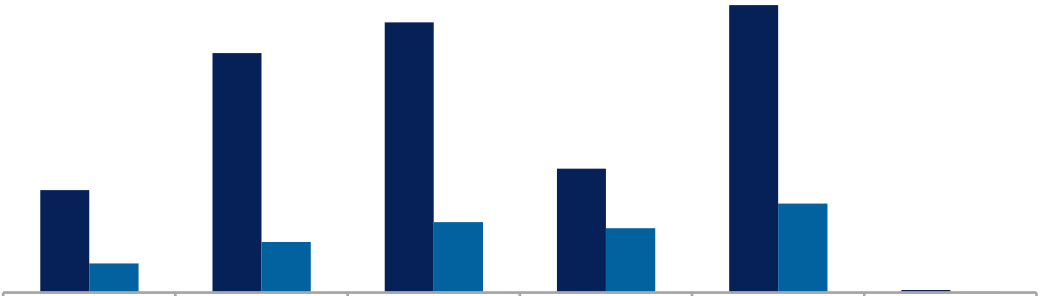
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2022	5	0	0	2	3
2023	10	0	1	3	4
2024	6	0	0	2	3

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Keberadaan sekretariat partai politik menjadi indikator penting dalam melihat intensitas aktivitas kelembagaan politik di tingkat provinsi. Selama periode 2022-2024, jumlah sekretariat partai politik di DKI Jakarta menunjukkan pola fluktuatif, dari 10 unit pada 2022, meningkat menjadi 18 unit pada 2023, lalu menurun kembali menjadi 11 unit pada 2024, atau turun sebesar 38,89%.

Secara spasial, sekretariat partai politik tingkat provinsi terkonsentrasi di Jakarta Pusat dengan proporsi lebih dari 50,00% pada setiap tahun pengamatan. Sebaliknya, Jakarta Utara tidak mencatat keberadaan sekretariat selama tiga tahun berturut-turut, dengan Jakarta Barat yang hanya mencatat kontribusi yang sangat terbatas. Dalam konteks dinamika rawan ketertiban umum yang masih menjadi tantangan di DKI Jakarta, keberadaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) memegang peran strategis sebagai unsur pengamanan berbasis komunitas.

Gambar 2.107. Jumlah Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 Penduduk menurut Kota/Kabupaten DKI Jakarta Tahun 2024



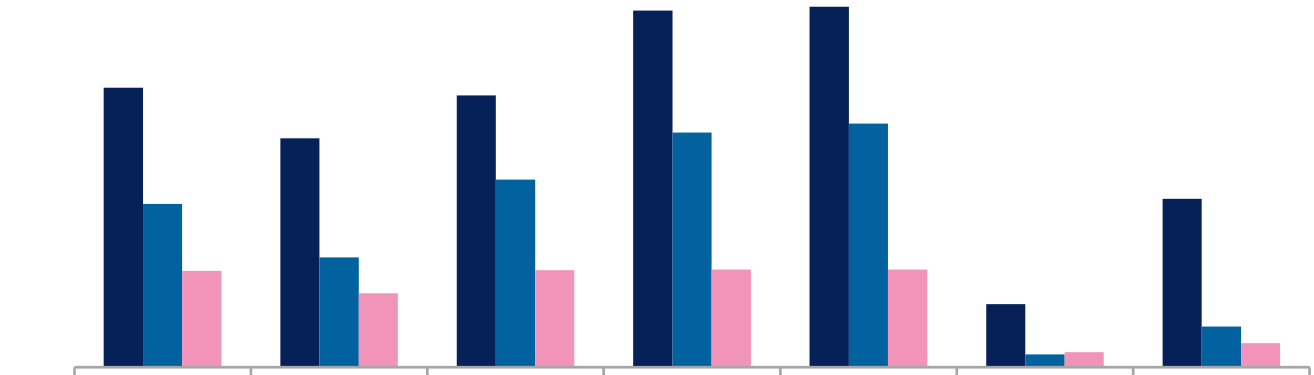
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Petugas Satlinmas	372	868	980	449	1.235	10
Jumlah Penduduk (10.000)	105,73	183,20	255,68	233,14	323,04	3,03

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2024, rasio Linmas per 10.000 penduduk menunjukkan variasi yang cukup signifikan antarwilayah. Jakarta Utara mencatat rasio tertinggi dengan sekitar 4,74 petugas Linmas per 10.000 penduduk, disusul Jakarta Barat dan Jakarta Timur yang masing-masing berada pada kisaran 3,83 dan 3,82 per 10.000 penduduk. Jakarta Pusat berada pada kisatan 3,52 per 10.000 penduduk, sementara Kepulauan Seribu mencatat sekitar 3,30 per 10.000 penduduk. Sebaliknya, Jakarta Selatan memiliki rasio terendah, yakni sekitar 1,93 petugas Linmas per 10.000 penduduk.

Jika dikaitkan dengan pola kerawanan ketertiban umum, wilayah dengan tingkat kejadian yang relatif tinggi tidak selalu diimbangi oleh rasio Linmas yang proporsional. Jakarta Timur misalnya, meskipun menyumbang lebih dari seperempat total kejadian rawan ketertiban umum, hanya memiliki rasio Linmas kisaran 3,82 per 10.000 penduduk, sedangkan Jakarta Selatan juga mencatat tingkat kerawanan tinggi justru memiliki rasio terendah. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan antara beban ketertiban dan kapasitas perlindungan masyarakat di tingkat lokal.

Gambar 2.108. Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja menurut Unit Organisasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



	Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat	Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara	Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat	Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan	Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur	Satpol PP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Satpol PP Provinsi
PNS	435	356	423	555	561	98	262
PTT	254	171	292	365	379	20	63
PJLP	150	115	151	152	152	23	37

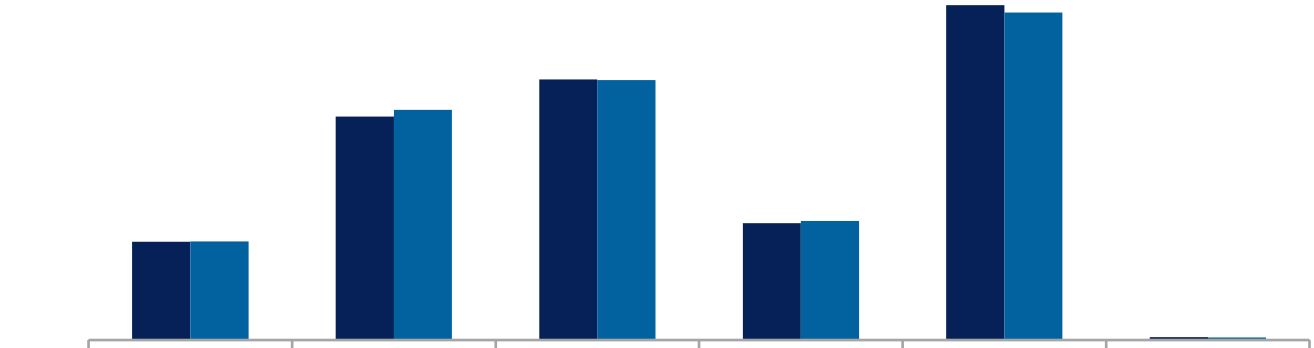
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Dalam menjaga ketertiban umum, peran Satuan Polisi Pamong Praja di DKI Jakarta juga turut didukung oleh struktur kepegawaian yang berlapis. Tahun 2024, total PNS Satpol PP paling banyak berada di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, masing-masing mencapai lebih dari 550 personel, sementara Satpol PP Provinsi memiliki 9,74% personel dari total keseluruhan. Pola serupa terlihat pada PTT, di mana Jakarta Timur kembali memiliki jumlah tertinggi dengan 24,55% dari total keseluruhan personel, disusul Jakarta Selatan dengan selisih 3,84% personel dibanding Jakarta Timur.



Dukungan terhadap ketertiban umum juga diperkuat oleh keberadaan PJLP Satpol PP yang relatif merata antarwilayah kota, dengan kisaran 150 personel per kota administrasi, sementara Kepulauan Seribu memiliki jumlah yang lebih kecil namun proporsional dengan wilayah dan penduduknya. Jika digabungkan, komposisi PNS, PTT, dan PJLP membentuk sistem pengamanan ketertiban yang saling melengkapi, dari segi fungsi pengendalian, pelayanan, hingga respons lapangan. Struktur ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas, ketertiban, dan kenyamanan ruang publik Jakarta sepanjang tahun 2024.

Gambar 2.109. Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	371	843	982	440	1.263	11
2024	372	868	980	449	1.235	10

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Sementara itu, jumlah petugas Linmas di DKI Jakarta periode 2023-2024 cenderung stabil, dengan perubahan yang relatif kecil antarwilayah. Jakarta Timur konsisten menjadi wilayah dengan jumlah Linmas terbanyak, meski mengalami penurunan sekitar 2,22% pada tahun 2024 dari 1.263 petugas pada tahun sebelumnya. Sebaliknya, Jakarta Utara mencatat peningkatan sebanyak 2,97% dalam rentang waktu dua tahun.

Wilayah lain menunjukkan dinamika yang lebih moderat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan mengalami kenaikan tipis. Masing-masing sekitar 0,27% dan 2,05%, sementara Jakarta Barat relatif stagnan dengan perubahan 0,20%. Kepulauan Seribu tetap memiliki jumlah Linmas paling sedikit, namun perubahannya sejalan dengan karakter wilayah dan jumlah penduduk.

Secara keseluruhan, pergerakan data ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan distribusi petugas Linmas sebagai garda terdepan dalam mendukung ketertiban umum dan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat lokal. Upaya dalam mencapai ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi DKI Jakarta juga tercermin dalam capaian kinerja, berdasarkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada tahun 2023-2024.

Gambar 2.110. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi DKI Jakarta

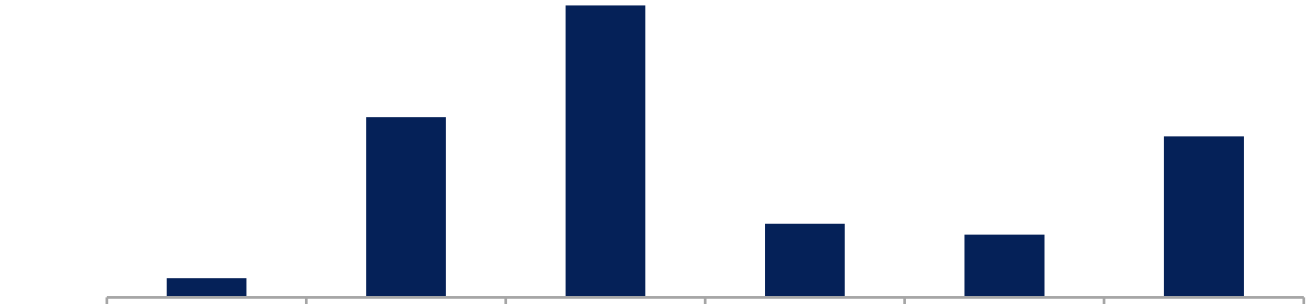


	Capaian Perda Perkada Sesuai Mutu	Pelayanan Ganti Rugi	Capaian SPM
2023	98,37	100,00	99,19
2024	100,00	100,00	100,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2023, hampir seluruh indikator layanan dasar telah dipenuhi, dengan celah kinerja yang sangat kecil, yakni kurang dari 1,00%. Memasuki tahun 2024 kinerja tersebut semakin menguat. Seluruh indikator SPM sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum tercatat mencapai 100%, baik pada aspek penegakan Perda/Perkada sesuai mutu maupun pelayanan ganti rugi. Peningkatan sebesar 0,81 poin persentase dibanding tahun sebelumnya menjadi tanda bahwa adanya upaya konsistensi penguatan tata kelola, sekaligus memperlihatkan bahwa dukungan sumber daya berhasil diterjemahkan menjadi layanan dasar yang sepenuhnya memenuhi standar minimal bagi masyarakat DKI Jakarta.

Gambar 2.111. Jumlah Organisasi Massa yang Terdaftar dan Masih Aktif menurut Kelurahan di DKI Jakarta Tahun 2019-2024

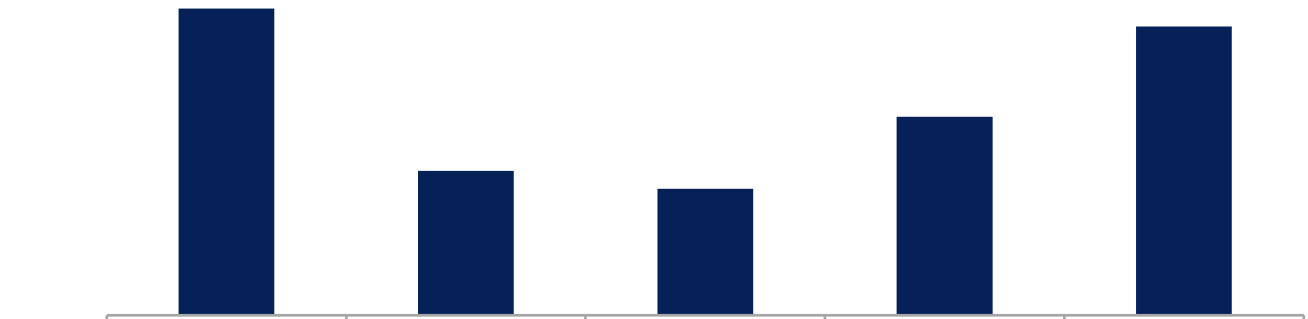


	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah	7	66	107	27	23	59

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Keberadaan organisasi massa (ormas) yang terdaftar dan masih aktif di tingkat kelurahan menunjukkan dinamika yang cukup tajam sepanjang periode 2019-2024. Jumlah ormas aktif meningkat signifikan, 15 kali lipat dalam dua tahun (2019-2021). Namun setelah mencapai puncaknya, terjadi penurunan tajam pada 2021-2022 hingga berada di angka 23-27 organisasi, yang mencerminkan kontraksi sekitar 74,77% dibanding tahu 2021. Pada tahun 2024, jumlah ormas aktif kembali meningkat sebanyak 156,52% dibanding tahun 2023, meskipun capaian ini masih berada pada kisaran 55,14% dari kondisi puncak.

Gambar 2.112. Jumlah Organisasi Massa yang Terdaftar dan Masih Aktif menurut Kelurahan di Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
Jumlah	17	8	7	11	16

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Secara spasial pada 2024, distribusi ormas aktif memperlihatkan konsentrasi di wilayah administrasi tertentu. Jakarta Pusat dan Jakarta Timur secara kumulatif menampung sebanyak 55,93% dari total ormas aktif, masing-masing berkontribusi 28,81% dan 27,12%, diikuti Jakarta Selatan sebanyak 18,64%. Sementara itu, Jakarta Utara dan Jakarta Barat memiliki proporsi relatif lebih kecil, masing-masing 13,56% dan 11,86%.





03

Perekonomian Dan Keuangan

Nilai Ekspor melalui Jakarta:

USD 65,471,21

- **Tiongkok**
- Amerika Serikat
- Singapura
- Filipina
- Malaysia
- Vietnam
- Thaiand
- Hongkong
- India
- Jepang





- **Amerika Serikat**
- Tiongkok
- Jepang
- Thailand
- Vietnam
- Filipina
- India
- Korea Selatan
- Malaysia
- Singapura

Nilai Impor melalui Jakarta:

USD 109.891,93



Jakarta semakin menjadi magnet wisata



Top 3 Asal Wisatawan tahun 2025:

1. Tiongkok
2. Malaysia
3. Singapura

>1 jt
wisatawan

800
tenaga kerja pariwisata tersertifikasi

875
industri pariwisata yang memiliki perizinan

86,96
Nilai Ketertarikan Masyarakat Terhadap Pariwisata Provinsi DKI Jakarta

Pangan Aman untuk Jakarta Kuat

91,31
Skor PPH

82.22
indeks ketahanan pangan



>51 rb
produksi pertanian

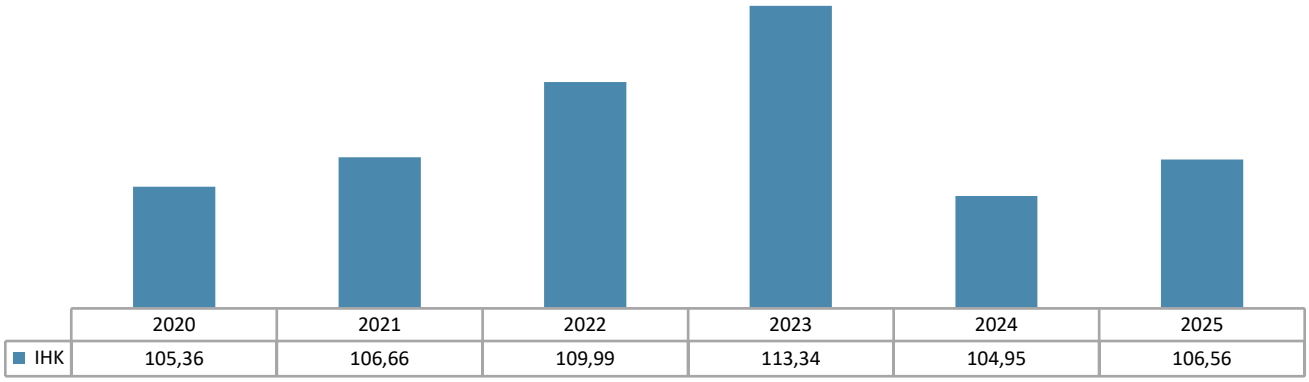
>22 rb
produksi peternakan

>200 rb
produksi perikanan

3.1. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode waktu[1]. Inflasi yang tinggi dapat mendistorsi perekonomian suatu wilayah melalui penurunan daya beli masyarakat sebagai akibat dari kenaikan biaya hidup, penurunan daya saing sebagai akibat dari depresiasi mata uang, serta penurunan investasi sebagai akibat dari ketidakpastian ekonomi[2]. Oleh karenanya, pengendalian inflasi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan inflasi yang stabil terjaga, suatu daerah dapat menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya saing ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan alat ukur terhadap perubahan harga rata-rata barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dalam suatu periode waktu tertentu. IHK didasarkan pada keranjang belanja yang mencakup berbagai jenis barang dan jasa yang umum dikonsumsi rumah tangga yang diberi bobot berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga pada masing-masing komoditas. Saat ini IHK menggunakan tahun dasar 2018 sebagai acuan dengan nilai 100. Dalam 5 tahun terakhir sejak 2018, tren kenaikan IHK meningkat secara konstan namun masih relatif terjaga. Kenaikan tersebut menggambarkan bahwa harga berbagai barang dan jasa di wilayah DKI Jakarta pada periode tersebut secara umum bergerak naik

Gambar 3.1. Indeks Harga Konsumen (IHK) DKI Jakarta Tahun 2020-2025



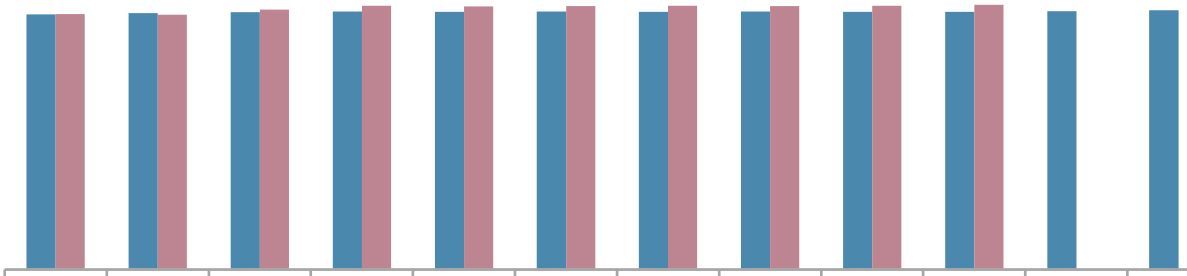
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IHK	105,36	106,66	109,99	113,34	104,95	106,56

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dinamika Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi DKI Jakarta sepanjang 2020–2024 terbagi dalam dua pola pergerakan, di mana periode 2020 hingga 2023 diwarnai oleh tren pertumbuhan indeks (inflasi) yang berkelanjutan dari angka 105,36 hingga mencapai level tertinggi di 113,34. Kenaikan kumulatif selama empat tahun tersebut mencerminkan peningkatan harga-harga secara bertahap seiring pemulihan ekonomi. Selanjutnya, tren menanjak ini berubah menurun pada tahun 2024 ketika indeks terkoreksi menjadi 104,95, yang berarti terdapat penurunan harga.

1 I*nternational Monetary Fund.* https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Series/Back-to-Basics/Inflation
2 Dorrance, G. S. (1963). *The Effect of Inflation on Economic Development (Les conséquences de l'inflation sur la croissance économique)(Los efectos de la inflación sobre el desarrollo económico). Staff Papers-International Monetary Fund*, 1-47. https://www.elibrary.imf.org/view/journals/024/1963/001/article-A001-en.xml

Gambar 3.2. Indeks Harga Konsumen DKI Jakarta per Bulan Tahun 2024-2025

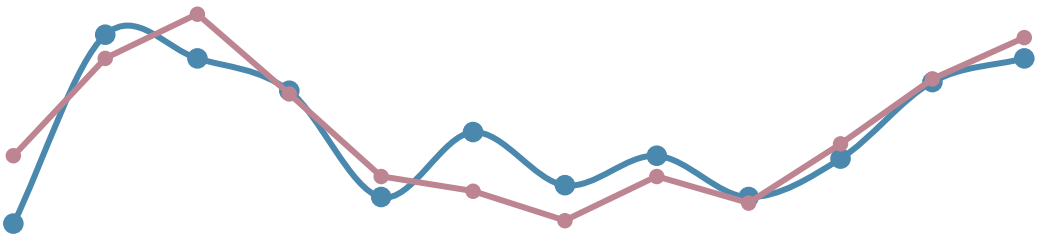


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2024	103,95	104,42	104,81	105,08	104,97	105,10	105,04	105,08	104,97	105,00	105,30	105,69
2025	104,10	103,80	105,88	107,40	107,14	107,28	107,40	107,35	107,49	107,82	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan DKI Jakarta sepanjang tahun 2024 menunjukkan tren kenaikan bertahap yang dibuka dengan level terendah pada Januari sebesar 103,95. IHK bergerak naik secara konsisten pada kuartal pertama hingga mencapai angka 105,08 pada bulan April, sebelum memasuki fase fluktuatif yang relatif stabil di kisaran level 105 sepanjang periode Mei hingga September. Setelah mengalami dinamika naik-turun yang moderat di pertengahan tahun, tren harga kembali mengalami akselerasi penguatan secara beruntun mulai bulan Oktober (105,00) hingga menutup tahun pada level tertinggi di bulan Desember sebesar 105,69, mencerminkan adanya pola tekanan inflasi yang menguat di awal dan akhir tahun.

Gambar 3.3. Inflasi Tahunan DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2024



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
DKI Jakarta	-0,19	0,45	0,37	0,26	-0,10	0,12	-0,06	0,04	-0,10	0,03	0,29	0,37
Nasional	0,04	0,37	0,52	0,25	-0,03	-0,08	-0,18	-0,03	-0,12	0,08	0,30	0,44

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dinamika inflasi bulanan DKI Jakarta sepanjang tahun 2024 menunjukkan volatilitas harga yang cukup unik dibandingkan tren nasional, diawali dengan kondisi deflasi sebesar 0,19% pada Januari di saat nasional masih mencatatkan inflasi positif. Tekanan harga di ibu kota sempat melonjak pada Februari ke level 0,45% sebelum melandai dan memasuki fase deflasi berulang pada pertengahan tahun, yakni di bulan Mei (0,10%), Juli (0,06%), dan September (0,10%). Menariknya, terdapat divergensi tren pada bulan Juni dan Agustus, di mana DKI Jakarta justru mencatatkan inflasi positif masing-masing sebesar 0,12% dan 0,04%, berbeda arah dengan tingkat nasional yang mengalami deflasi pada periode tersebut.

Menjelang akhir tahun, pola pergerakan harga kembali selaras dan menguat secara signifikan, di mana inflasi DKI Jakarta dan Nasional sama-sama mengalami tren kenaikan pada November dan Desember, menutup tahun dengan angka inflasi masing-masing sebesar 0,37% dan 0,44%.

Gambar 3.4. Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
UMP	4.416.187	4.641.854	4.901.798	5.067.381	5.396.761

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Sejalan dengan dinamika indikator harga konsumen, kebijakan pengupahan di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2021 hingga 2025 memperlihatkan komitmen peningkatan kesejahteraan pekerja melalui tren kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang bersifat progresif dan konsisten setiap tahunnya. Pergerakan nominal upah tercatat terus meningkat, bergerak dari Rp4.416.187 pada tahun 2021 mencapai angka tertinggi Rp5.396.761 pada tahun 2025. Kenaikan yang progresif terlihat pada penetapan tahun 2025, di mana UMP mengalami pertumbuhan sebesar 6,50% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp5.067.381. Secara akumulatif, rentang kenaikan selama lima tahun terakhir ini merepresentasikan lonjakan pendapatan minimum sebesar 22,20%, yang mengindikasikan responsivitas pemerintah daerah dalam menyesuaikan standar upah terhadap laju inflasi dan kebutuhan hidup layak di ibu kota.

3.2. Ekonomi dan Keuangan Daerah

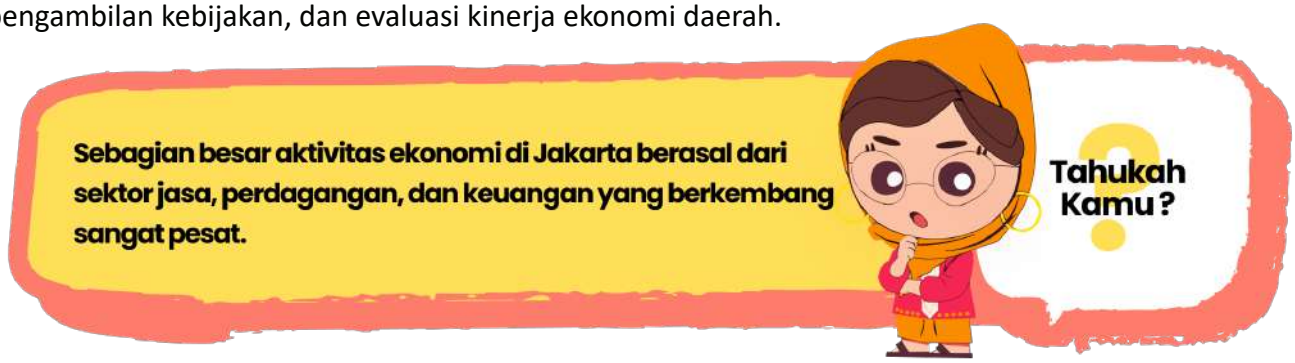
Ekonomi dan keuangan daerah merujuk pada semua aktivitas ekonomi yang terjadi di tingkat regional seperti dalam sebuah kota, kabupaten, atau provinsi yang melibatkan produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa di wilayah tersebut. Ekonomi dan keuangan daerah memegang peran penting sebagai bagian integral dari perekonomian nasional. Ekonomi daerah menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui keunggulan komparatif dan kekhasan sektor-sektor ekonomi di dalamnya yang lebih lanjut disebut sebagai *factor endowments*[3, 4]. Sebagai contoh, daerah pantai pada umumnya memiliki karakteristik ekonomi yang berbasis sektor perikanan dan pariwisata. Sementara itu, daerah perdesaan memiliki karakteristik ekonomi berbasis sektor pertanian dan perkebunan. Dalam kerangka makroekonomi, pengelolaan keuangan daerah merupakan pilar fundamental yang menentukan kapasitas fiskal suatu wilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan pajak dan retribusi secara langsung mencerminkan ketahanan ekonomi regional terhadap dinamika ekonomi nasional. Penerimaan yang stabil memberikan ruang fiskal yang cukup bagi daerah untuk melakukan intervensi kebijakan, membiayai penyediaan infrastruktur publik, serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar.

3 OECD iLibrary. 2022. *The Role of Local Goverments in Economic Development Policy.* https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c4fa35e5-en/index.html?itemId=/content/component/c4fa35e5-en

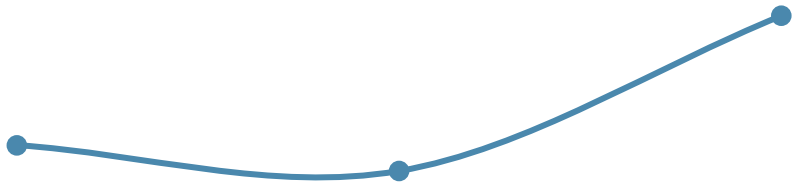
4 Sokoloff, K. L., & Engerman, S. L. (2000). *History lessons: institutions, factor endowments, and paths of development in the new world. Journal of Economic perspectives*, 14(3), 217-232.

3.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Angka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menilai perkembangan dan kemajuan suatu daerah. Melalui angka ini, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui sejauh mana aktivitas ekonomi mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi yang baik menunjukkan adanya peningkatan produksi barang dan jasa, terbukanya peluang kerja, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis terhadap angka pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja ekonomi daerah.



Gambar 3.5. Laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta 2023-2025



	2023	2024	2025
Jumlah	4,96	4,91	5,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada rentang periode 2023 hingga 2025 memperlihatkan dinamika fluktuatif yang ditandai dengan fase perlambatan moderat sebelum akhirnya mencatatkan akselerasi pemulihan (*rebound*) di akhir periode. Setelah berada di level 4,96% pada tahun 2023, laju pertumbuhan sempat mengalami koreksi penurunan tipis sebesar 0,05 persen poin atau menyusut relatif sebesar 1,01% menjadi 4,91% pada tahun 2024. Kendati demikian, momentum perekonomian berhasil berbalik arah pada tahun 2025, di mana laju pertumbuhan kembali terakselerasi menembus ambang batas psikologis 5% hingga mencapai angka 5,21%. Pertumbuhan positif pada tahun terakhir ini merepresentasikan peningkatan kinerja sebesar 0,30 persen poin atau tumbuh relatif sebesar 6,11% dibandingkan capaian tahun sebelumnya, yang secara umum mengindikasikan semakin membaiknya resiliensi makro ekonomi, pulihnya aktivitas lintas sektoral, serta efektivitas stimulus kebijakan daerah dalam memacu kembali roda perekonomian ibu kota.



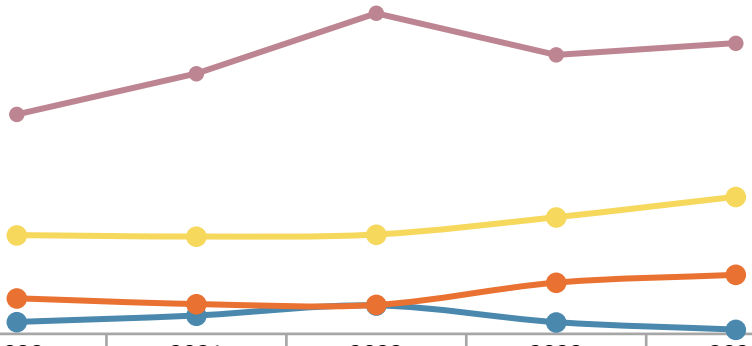
3.2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Salah satu aspek utama dari ekonomi dan keuangan daerah adalah pengelolaan anggaran publik. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya keuangan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Rencana keuangan tersebut lebih lanjut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam tata kelola keuangan daerah, APBD memiliki sejumlah fungsi penting di antaranya: 1) fungsi otorisasi sebagai dasar dalam penerapan pendapatan dan belanja daerah selama periode berlangsung; 2) fungsi perencanaan sebagai pedoman dalam pengelolaan kegiatan di tahun yang sedang berlangsung; 3) fungsi pengawasan sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pemerintah sewaktu pelaksanaan kegiatan; 4) fungsi alokasi dalam penanganan isu prioritas daerah seperti kemiskinan dan pengangguran; 5) fungsi distribusi yang mengedepankan keadilan dan kepatutan, dan 6) fungsi stabilitas dalam menjaga keseimbangan dasar perekonomian daerah[5].

Postur APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan komponen utama dalam APBD, komponen ini mencakup penerimaan keuangan dari berbagai sumber seperti Pendapatan Asli Daerah (Pajak dan Retribusi), hasil pengelolaan aset daerah, bagi hasil pajak dari pemerintah pusat, serta sumber daya alam seperti minyak, gas, atau pertambangan. Sementara itu, dari sisi belanja, belanja daerah mengatur alokasi dana untuk berbagai kegiatan dan program pemerintah daerah. Komponen ini meliputi pengeluaran untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan sosial sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Gambar 3.6. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menurut Sumber Penerimaan (Milyar Rupiah) DKI Jakarta Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Lain-lain Pendapatan yang sah	2.030	3.153	4.907	1.997	704
Pendapatan Asli Daerah	38.086	45.182	55.663	48.442	50.467
Pendapatan Transfer	17.119	16.874	17.226	20.224	23.776
Penerimaan Pembiayaan	6.166	5.166	5.015	8.895	10.256

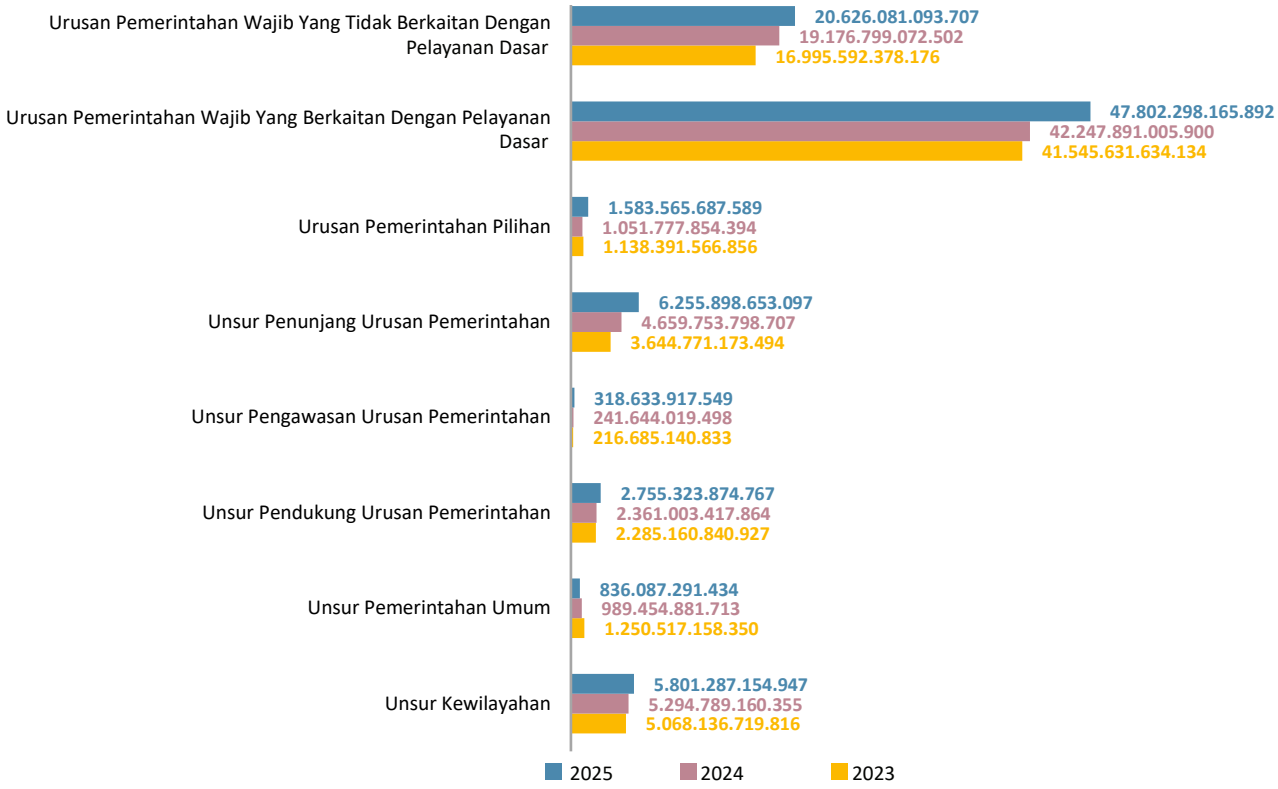
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

5 Hartono, et al. 2021. Akuntansi Sektor Publik

Kinerja realisasi pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta sepanjang periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika pemulihan ekonomi yang cukup solid, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi tulang punggung utama kemandirian fiskal daerah. Secara umum, PAD mencatatkan tren kenaikan yang signifikan pasca-tahun 2020, di mana realisasi bergerak dari Rp38,08 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp45,18 triliun pada tahun 2021, atau tumbuh sebesar 18,64%. Tren positif ini berlanjut hingga mencapai puncaknya di tahun 2022 dengan angka Rp55,66 triliun, yang mencerminkan pertumbuhan tahunan sebesar 23,19%. Meskipun sempat mengalami koreksi sebesar 12,97% pada tahun 2023 menjadi Rp48,44 triliun, performa PAD kembali menguat pada tahun 2024 dengan kenaikan 4,17% menjadi Rp50,46 triliun, menandakan pulihnya aktivitas perekonomian ibu kota yang berdampak positif terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pos Pendapatan Transfer yang sebelumnya stagnan di kisaran Rp16–17 triliun pada 2020 hingga 2022, mengalami kenaikan yang cukup signifikan mulai tahun 2023 hingga menyentuh angka tertinggi sebesar Rp23,77 triliun pada tahun 2024. Tren serupa terlihat pada Penerimaan Pembiayaan yang mencatatkan kenaikan tajam, dari yang semula berkisar di angka Rp5–6 triliun pada awal periode, melonjak dua kali lipat menjadi Rp10,25 triliun pada tahun 2024. Peningkatan pada kedua sektor ini memberikan bantalan fiskal yang kuat bagi APBD DKI Jakarta di tengah fluktuasi komponen pendapatan lainnya. Sebaliknya, pos Lain-lain Pendapatan yang Sah justru menunjukkan volatilitas dengan tren penurunan drastis di akhir periode. Setelah sempat berkinerja sangat baik dengan mencapai angka Rp4,90 triliun pada tahun 2022, penerimaan dari sektor ini menyusut tajam pada tahun-tahun berikutnya, hingga menyentuh titik terendah sebesar Rp704 miliar pada tahun 2024. Penurunan drastis pada sektor ini menjadi catatan tersendiri dalam struktur pendapatan daerah, namun berkat kompensasi dari kenaikan Pendapatan Transfer dan Penerimaan Pembiayaan yang substansial, stabilitas anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap terjaga dengan baik hingga akhir tahun anggaran 2024.

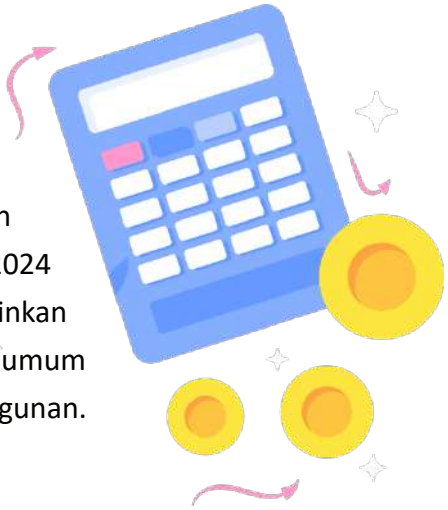


Gambar 3.7. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

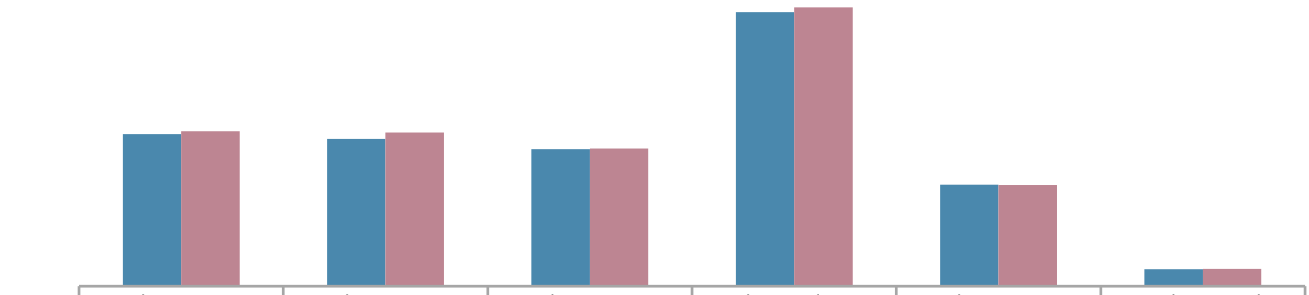
Jika dilihat berdasarkan unsur sektoral, struktur postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta pada periode 2023 hingga 2025 memperlihatkan tren kebijakan fiskal yang ekspansif pada hampir seluruh sektor, dengan prioritas pendanaan yang tetap terpusat kuat pada pemenuhan layanan dasar masyarakat. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang mendominasi postur anggaran mengalami peningkatan sebesar 13,15% dari posisi Rp42.247.891 trilyun pada tahun 2024 menjadi Rp47.802.298 trilyun pada tahun 2025. Akselerasi pertumbuhan anggaran yang lebih progresif secara persentase tercatat pada Urusan Pemerintahan Pilihan, yang meningkat signifikan sebesar 50,56% menjadi Rp1.583.565 trilyun, disusul oleh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang naik 34,25% menjadi Rp6.255.898 trilyun, serta Unsur Pengawasan yang naik 31,86% menjadi Rp318.633,91 trilyun. Tren penguatan anggaran juga diikuti oleh pos Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tumbuh 7,56% menjadi Rp20.626.081 trilyun. Di tengah tren positif pada berbagai sektor strategis tersebut, langkah efisiensi anggaran terus diterapkan secara konsisten pada Unsur Pemerintahan Umum yang mengalami kontraksi lanjutan sebesar 15,50%, menyusut dari Rp989.454,88 trilyun pada tahun 2024 menjadi Rp836.087,29 trilyun pada tahun 2025, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menekan belanja birokrasi umum demi memperbesar porsi belanja produktif dan akselerasi pembangunan.



3.2.3. Pendapatan Pajak dan Retribusi

Pajak dan retribusi daerah memegang peranan penting sebagai instrumen utama dalam memperkuat kemandirian fiskal suatu daerah. Sebagai komponen terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), kontribusi ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik, tetapi juga menjadi indikator tingkat partisipasi serta kepatuhan masyarakat dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah. Dengan pengelolaan yang optimal, penerimaan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki fleksibilitas dalam menjalankan program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.

Gambar 3.8. Data Realisasi penerimaan Pajak Daerah Bulanan (Rupiah)

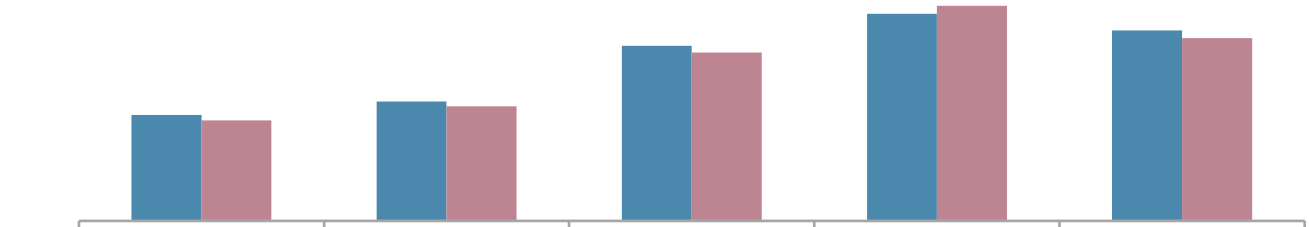


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	7.982.744.943.437	7.729.400.168.187	7.190.124.482.370	14.387.574.497.330	5.336.812.854.199	898.464.810.994
2024	8.137.797.778.564	8.073.786.880.841	7.224.035.084.080	14.766.226.046.678	5.316.588.849.180	913.901.954.198

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 di seluruh wilayah administrasi. Secara konsisten, wilayah Jakarta Selatan mempertahankan posisinya sebagai kontributor utama penerimaan pajak dengan pertumbuhan sebesar 2,64%, di mana realisasi meningkat dari Rp14,38 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp14,76 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan yang cukup tinggi juga dicatatkan oleh Jakarta Utara yang naik sebesar 4,53%, bergerak dari Rp7,72 triliun menjadi Rp8,07 triliun, diikuti Jakarta Pusat yang mencatatkan kenaikan sebesar 1,88% dan Kepulauan Seribu pun menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 1,67%. Jika ditinjau dari tren bulanan, pola penerimaan pajak menunjukkan adanya siklus yang khas sepanjang tahun. Terdapat puncak-puncak penerimaan yang signifikan pada pertengahan dan akhir tahun. Pada tahun 2024, lonjakan penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Juni dengan realisasi mencapai Rp7,07 triliun, diikuti oleh bulan Agustus sebesar Rp8,13 triliun. Pola serupa juga terlihat pada tahun 2023, meskipun dengan nominal yang lebih rendah. Puncak-puncak ini sering kali berkaitan dengan periode pembayaran jenis pajak tertentu yang memiliki tenggat waktu pada bulan-bulan tersebut. Sementara itu, awal tahun (Januari–April) cenderung menunjukkan realisasi yang lebih stabil dan moderat, dengan angka penerimaan bulanan berada di kisaran Rp2,3–Rp2,6 triliun. Pola ini mengindikasikan bahwa aktivitas pembayaran pajak oleh wajib pajak cenderung meningkat secara bertahap dan mencapai puncaknya pada periode-periode tertentu. Secara keseluruhan, data bulanan ini memperlihatkan bahwa strategi optimalisasi penerimaan pada bulan-bulan dengan potensi tinggi berhasil mendorong pertumbuhan realisasi pajak daerah secara signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Gambar 3.9. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak di Provinsi DKI Jakarta

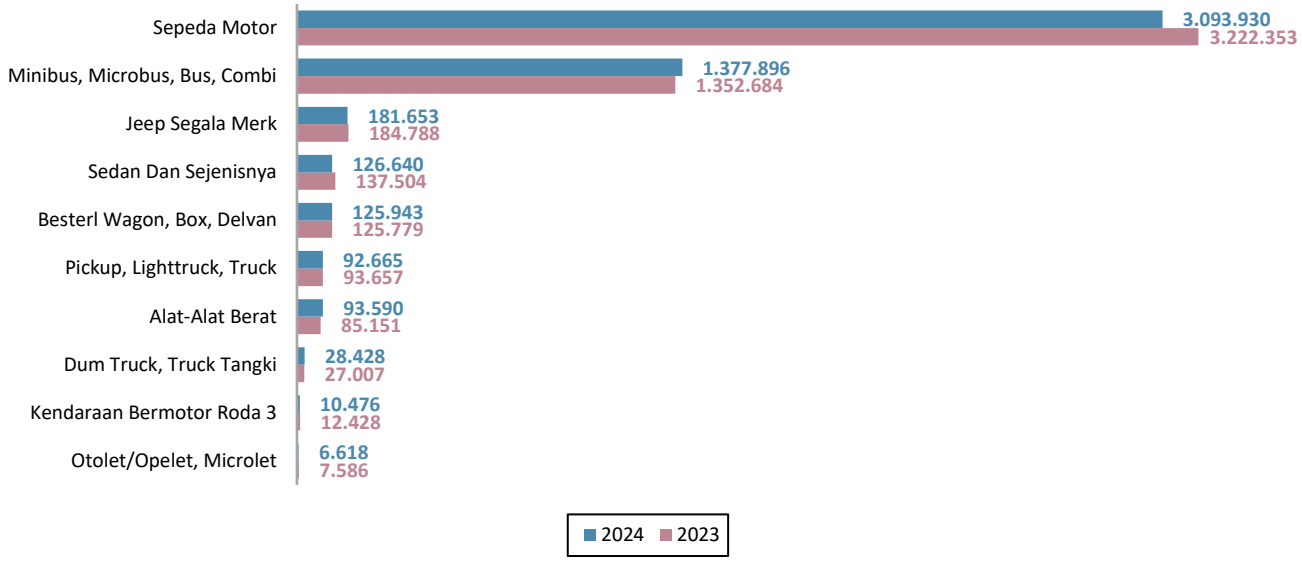


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2023	695.618	785.950	1.152.243	1.362.597	1.252.529
2024	659.828	752.939	1.107.737	1.414.599	1.202.736

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan wilayah, tren pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2023 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup kontras antarwilayah administrasi. Jakarta Selatan mencatatkan diri sebagai satu-satunya wilayah yang mengalami pertumbuhan positif dalam jumlah kendaraan yang membayar pajak, meningkat 3,82% dari 1.362.597 unit pada tahun 2023 menjadi 1.414.599 unit pada tahun 2024. Hal ini mengukuhkan posisi Jakarta Selatan sebagai wilayah dengan basis wajib pajak kendaraan terbesar dan paling patuh. Sebaliknya, empat wilayah administrasi lainnya justru mengalami kontraksi atau penurunan jumlah kendaraan yang membayar pajak. Penurunan terbesar secara nominal terlihat di Jakarta Timur, di mana angka kepatuhan menyusut masing-masing sebesar 3,98% dan 3,86%.

Gambar 3.10. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Ditinjau dari komposisi jenis kendaraan, sepeda motor masih mendominasi struktur wajib pajak kendaraan di DKI Jakarta, meskipun jumlah yang membayar pajak mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 3,22 juta unit sepeda motor yang menunaikan kewajiban pajaknya, namun angka ini turun menjadi 3,09 juta unit pada tahun 2024, atau menyusut sebesar 4,04%. Penurunan pada kategori

kendaraan populasi terbesar ini berdampak cukup besar terhadap agregat total penerimaan. Selain sepeda motor, penurunan partisipasi bayar pajak juga teramati pada segmen kendaraan pribadi roda empat seperti Sedan dan Jeep, serta kategori kendaraan niaga kecil seperti Pickup/Truk Ringan. Meskipun terjadi penurunan pada segmen kendaraan pribadi dan sepeda motor, terdapat tren positif pada kategori kendaraan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi produktif dan infrastruktur. Kategori Minibus, Microbus, dan Bus mengalami peningkatan jumlah unit yang membayar pajak dari 1,35 juta unit (2023) menjadi 1,37 juta unit (2024), yang merepresentasikan pertumbuhan sebesar 1,48%. Pertumbuhan yang cukup impresif juga terlihat pada kategori Alat-alat Berat yang naik dari 85.151 unit menjadi 93.590 unit, atau melonjak sebesar 9,91%, serta Dum Truck/Truk Tangki yang juga mencatatkan kenaikan tipis.

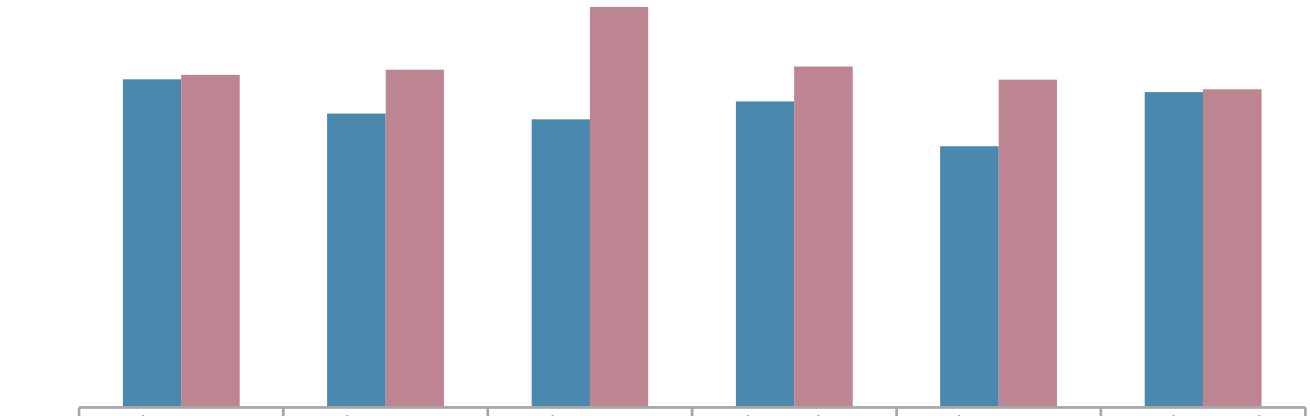
Gambar 3.11. Persentase Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi

Tahun	Realisasi	Persentase
2023	43.978.435.530.396	100,846
2024	44.924.302.140.385	104,625

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kinerja penerimaan pajak dan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan konsisten melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, total realisasi penerimaan tercatat mengalami kenaikan menjadi Rp44,92 triliun, tumbuh 4,63% dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp43,97 triliun, yang mengindikasikan manajemen fiskal daerah telah berjalan optimal.

Gambar 3.12. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah



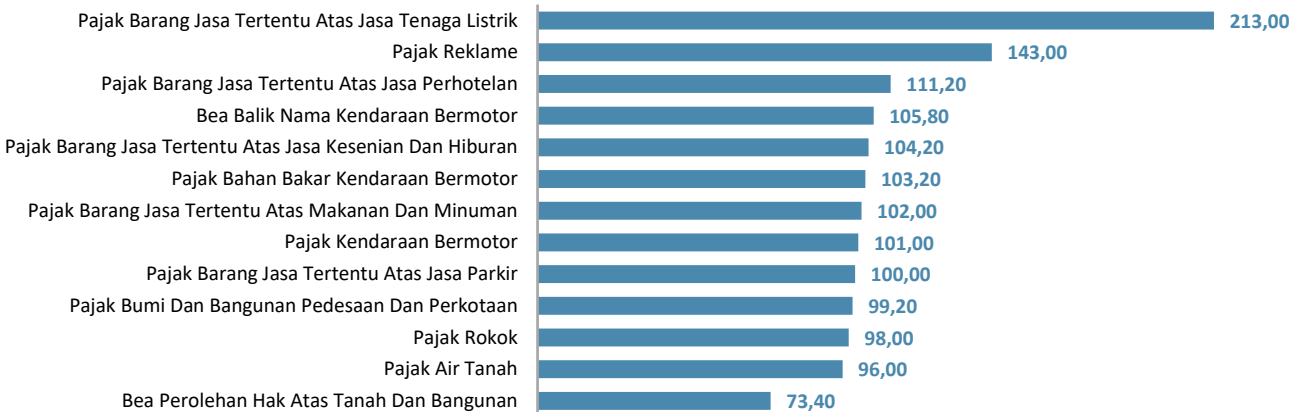
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	101,05	90,58	88,80	94,29	80,49	97,19
2024	102,50	104,00	123,42	105,00	101,00	98,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kinerja realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023–2024 menunjukkan tren positif dengan peningkatan capaian persentase di seluruh wilayah administrasi, di mana Jakarta Barat mencatatkan lonjakan kinerja paling signifikan dari 88,80% pada tahun 2023 menjadi 123,42% pada tahun 2024. Peningkatan kinerja ini juga diikuti oleh Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan yang berhasil mengubah status capaian

dari di bawah target pada tahun sebelumnya menjadi melampaui 100% pada tahun 2024; Jakarta Timur meningkat dari posisi terendah 80,49%menjadi 101,00%, Jakarta Utara naik menjadi 104,60%, dan Jakarta Selatan mencapai 105,00%. Sementara itu, Jakarta Pusat mempertahankan konsistensi capaian di atas target dengan kenaikan menjadi 102,50 persen, sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu meskipun mengalami pertumbuhan menjadi 98,00 persen, tercatat sebagai satu-satunya wilayah dengan realisasi sedikit di bawah 100 persen pada akhir periode 2024.

Gambar 3.13. Persentase Penerimaan Pajak Daerah menurut Jenis Kendaraan DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Gambar 3.14. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah menurut Jenis Kendaraan Tahun 2024

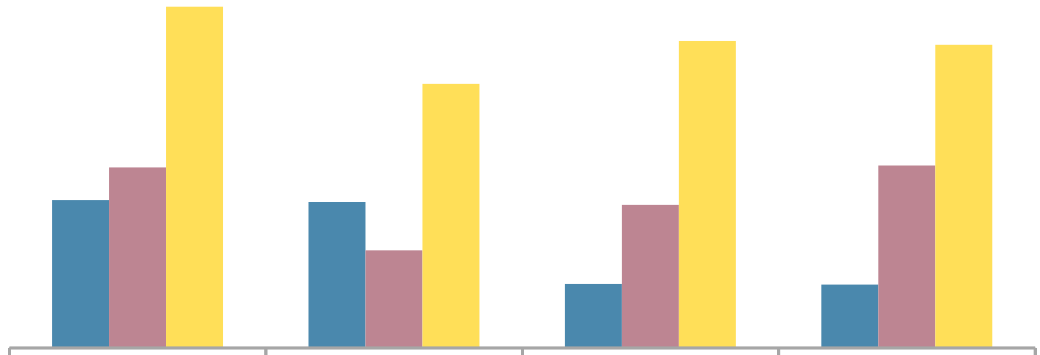


Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Capaian realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2024 memperlihatkan tingkat efektivitas pemungutan yang variatif berdasarkan persentase capaian terhadap target. Dari sisi persentase kinerja, Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Atas Jasa Tenaga Listrik mencatatkan prestasi tertinggi dengan angka realisasi mencapai 213,00%, jauh melampaui target yang ditetapkan. Tren pelampauan target yang signifikan juga dicatatkan oleh Pajak Reklame dengan capaian 143,00%, serta PBJT Atas Jasa Perhotelan sebesar 111,20 persen. Selain itu, beberapa jenis pajak strategis lainnya juga berhasil menembus angka di atas 100 persen, antara lain Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Ditinjau dari besaran nominal kontribusi terhadap kas daerah, struktur penerimaan tahun 2024 didominasi oleh pajak berbasis aset properti dan kendaraan, meskipun terdapat divergensi antara besaran nominal dengan capaian persentase. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi penyumbang nominal terbesar dengan nilai realisasi Rp9,93 triliun, namun secara persentase capaiannya berada sedikit di bawah target, yakni 99,20%. Kontributor terbesar kedua adalah Pajak Kendaraan Bermotor dengan nominal Rp9,65 triliun. Sementara itu, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memberikan kontribusi nominal yang signifikan sebesar Rp6,16 triliun, namun mencatatkan persentase realisasi terendah dibandingkan jenis pajak lainnya, yaitu 73,40 persen. Jenis pajak lain yang secara persentase belum mencapai 100% adalah Pajak Rokok (98,00%) dan Pajak Air Tanah (96,00%). Pada klaster pajak berbasis konsumsi dan aktivitas usaha lainnya, nominal realisasi menunjukkan angka yang solid. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menyumbang Rp6,64 triliun, diikuti oleh PBJT Atas Makanan dan Minuman sebesar Rp4,28 triliun, serta PBJT Atas Jasa Perhotelan senilai Rp2,12 triliun. Penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tercatat sebesar Rp1,79 triliun. Selanjutnya, Pajak Reklame dan PBJT Atas Jasa Tenaga Listrik memberikan kontribusi di kisaran Rp949 miliar hingga Rp959 miliar, sedangkan PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan menyumbang Rp624 miliar. Komponen dengan nominal realisasi terkecil pada tahun 2024 adalah Pajak Air Tanah yang tercatat sebesar Rp87,8 miliar.

Gambar 3.15. Persentase Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah



	Target Retribusi	Penerimaan Retribusi	Target Retribusi	Penerimaan Retribusi
	2023		2024	
Retribusi Jasa Umum	132.424.404.100	130.727.594.972	57.235.449.938	56.788.904.165
Retribusi Jasa Usaha	161.664.824.000	87.502.939.050	128.105.364.474	163.452.260.359
Retribusi Perizinan Tertentu	305.910.771.900	236.613.908.937	275.014.336.282	271.723.536.370

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kinerja penerimaan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan efektivitas realisasi yang signifikan dibandingkan tahun 2023, khususnya pada komponen Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Berdasarkan persentase capaian target, Retribusi Jasa Usaha mencatatkan lompatan kinerja paling drastis. Jika pada tahun 2023 realisasinya hanya mencapai 54,13 dengan nilai Rp87,50 miliar, pada tahun 2024 capaian ini melonjak menjadi 128% dengan nilai realisasi sebesar Rp163,45 miliar. Kenaikan ini terjadi meskipun target anggaran pada pos ini mengalami penyesuaian penurunan dari Rp161,66 miliar (2023) menjadi Rp128,10 miliar (2024), namun realisasi nominal justru meningkat hampir dua kali lipat.

Perbaikan kinerja yang substansial juga terlihat pada Retribusi Perizinan Tertentu, yang merupakan kontributor nominal terbesar dalam struktur retribusi daerah. Tingkat ketercapaian target pada pos ini meningkat dari 77,35% pada tahun 2023 menjadi 99,00% pada tahun 2024. Secara nominal, realisasi penerimaan naik dari Rp236,61 miliar menjadi Rp271,72 miliar. Hal ini mengindikasikan adanya optimalisasi pemungutan retribusi perizinan yang lebih efektif mendekati target yang ditetapkan sebesar Rp275,01 miliar pada tahun 2024.

Sementara itu, Retribusi Jasa Umum menunjukkan tren yang berbeda. Secara persentase, pos ini mempertahankan tingkat realisasi yang sangat stabil dan tinggi, bergerak dari 98,72 persen pada tahun 2023 menjadi 99,00 persen pada tahun 2024. Namun, dari sisi nominal, terjadi penurunan volume penerimaan yang tajam. Realisasi Retribusi Jasa Umum turun lebih dari setengahnya, dari Rp130,72 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp56,78 miliar pada tahun 2024. Penurunan realisasi ini sejalan dengan penyesuaian target anggaran yang juga diturunkan secara signifikan dari Rp132,42 miliar menjadi Rp57,23 miliar.

3.3. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

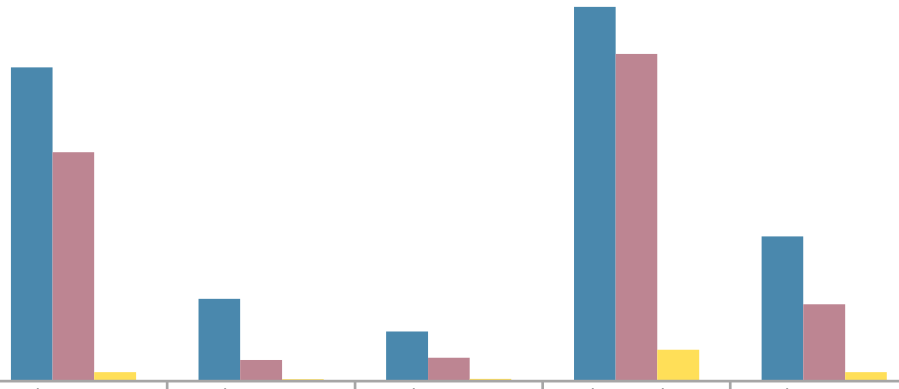
3.3.1. Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Lebih lanjut, pada pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 di jelaskan, koperasi memiliki peran sebagai soko guru untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Arifandy et al (2020) menyatakan dari sudut pandang ekonomi makro, bahwa Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) dalam perekonomian Indonesia berperan sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja terbesar, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta menjadi kontributor dalam menjaga neraca pembayaran melalui ekspor.



Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) KUKM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi menjelaskan koperasi aktif adalah koperasi yang dalam tiga tahun terakhir secara berturut – turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Sedangkan, Koperasi tidak aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan RAT dalam tiga tahun berturut – turut dan/ atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.

Gambar 3.16. Jumlah Modal Usaha, Volume, dan Sisa Hasil Usaha di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



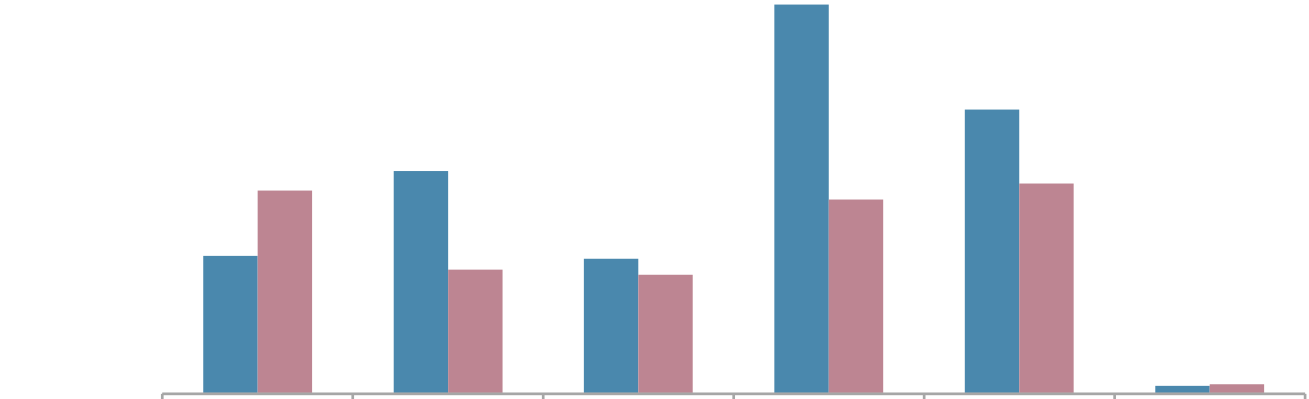
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Modal Usaha	687.117.618.672	179.748.597.928	108.661.917.130	819.329.074.453	316.530.360.627	84.000.000
Volume Usaha	500.898.176.158	46.012.534.181	51.434.798.592	716.456.292.802	168.141.943.191	27.000.000
Sisa Hasil Usaha	19.584.953.171	4.371.642.994	4.979.036.863	68.429.267.912	19.339.856.459	19.465.000

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Kinerja koperasi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 memperlihatkan perbedaan ukuran jumlah, volume, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang cukup kontras, dengan dominasi ekosistem koperasi yang terpusat kuat di wilayah Jakarta Selatan. Berdasarkan indikator kesehatan finansial, koperasi di Jakarta Selatan tampil sebagai kontributor terbesar dengan mencatatkan akumulasi Modal Usaha senilai Rp819,33 miliar serta Sisa Hasil Usaha (SHU) tertinggi mencapai Rp68,43 miliar. Capaian modal koperasi di Jakarta Selatan ini unggul sekitar 19,24% dibandingkan Jakarta Pusat yang berada di posisi kedua dengan modal Rp687,12 miliar. Keunggulan Jakarta Selatan semakin terlihat pada aspek produktivitas dan efisiensi usaha, di mana perolehan SHU-nya jauh melampaui wilayah lain, bahkan tercatat lebih dari tiga kali lipat atau 253,83% lebih tinggi dibandingkan koperasi di Jakarta Timur yang memperoleh SHU sebesar Rp19,34 miliar. Sementara itu, pergerakan ekonomi koperasi di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu memberikan kontribusi yang jauh lebih kecil, menandakan bahwa konsentrasi aktivitas koperasi yang bervolume tinggi dan *profitable* masih terpusat di kawasan selatan dan pusat ibu kota.



Gambar 3.17. Jumlah Koperasi Aktif dan Pasif di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Koperasi Aktif	278	449	272	785	573	16
Koperasi Pasif	410	250	240	392	424	19

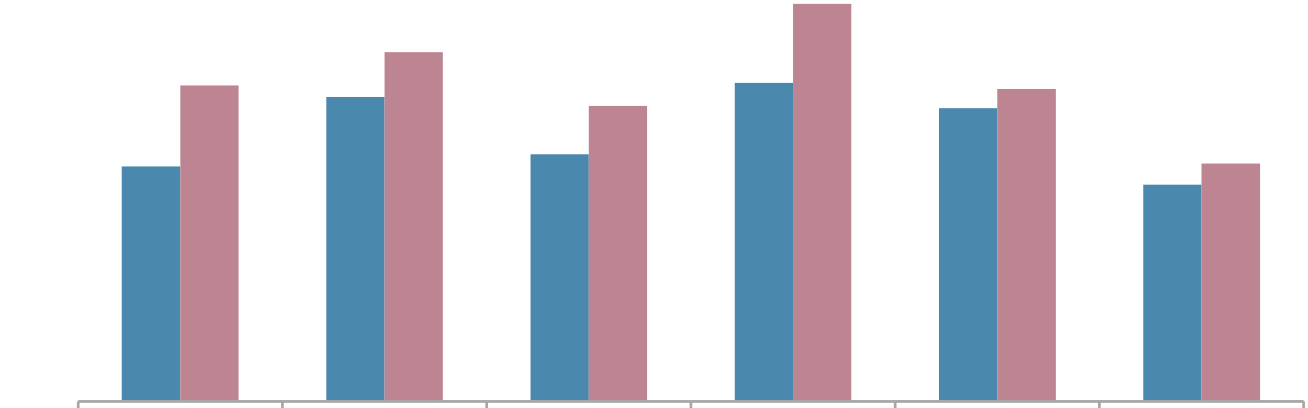
Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Lanskap perkoperasian di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 mencatatkan total 4.108 unit koperasi, dengan komposisi yang didominasi oleh koperasi aktif sebanyak 2.373 unit atau setara dengan 57,77%, sementara itu, koperasi pasif berjumlah 1.735 unit atau 42,23%. Jika ditinjau berdasarkan sebaran wilayah, Jakarta Selatan tampil sebagai barometer ekosistem koperasi paling sehat yang mencatatkan jumlah koperasi aktif tertinggi sebanyak 785 unit; angka ini mendominasi struktur koperasi aktif wilayah tersebut dengan proporsi mencapai 66,69% dari total koperasi, mengungguli proporsi koperasi pasif sebesar 33,31% (392 unit).

Tren positif di mana proporsi koperasi aktif lebih besar dari 50% juga terjadi di Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sebaliknya, tantangan struktural terlihat di Jakarta Pusat dan Kabupaten Kepulauan Seribu, di mana proporsi koperasi pasif justru lebih dominan; Jakarta Pusat mencatat proporsi koperasi pasif sebesar 59,59% (410 unit), sedangkan Kepulauan Seribu mencatat 54,29% (19 unit), mengindikasikan perlunya intervensi khusus untuk merevitalisasi badan usaha di kedua wilayah tersebut.



Gambar 3.18. Persentase Koperasi Aktif yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023-2024



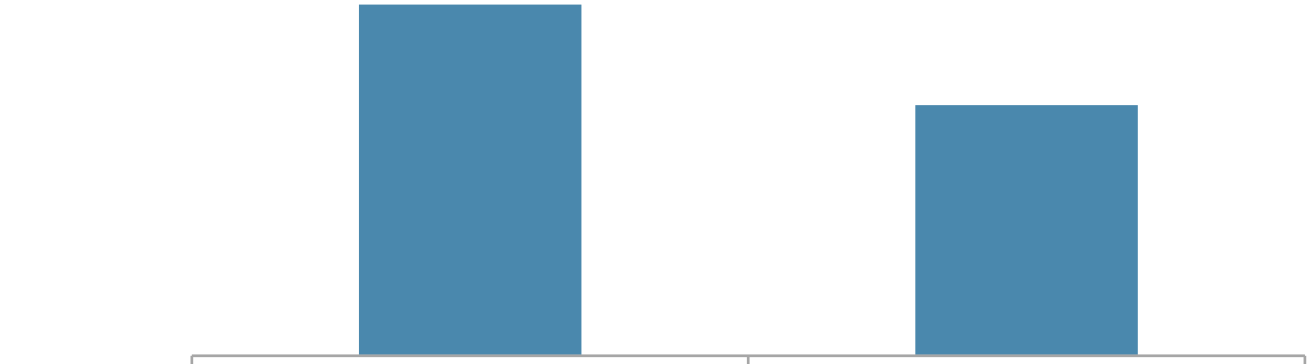
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	46,51	60,21	48,87	63,04	58,05	42,86
2024	62,53	69,09	58,49	79,57	61,81	47,06

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta

Kepatuhan koperasi aktif terhadap peraturan perundang-undangan merupakan indikator penting dalam menilai kredibilitas dan tata kelola koperasi Tingkat kepatuhan koperasi aktif terhadap peraturan perundang-undangan di Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan tren perbaikan yang positif dan merata di seluruh wilayah administrasi. Jakarta Selatan mengukuhkan posisinya sebagai wilayah dengan tingkat kepatuhan tertinggi, mencatatkan kenaikan kinerja paling signifikan sebesar 16,53 poin dari 63,04% pada tahun 2023 menjadi 79,57% pada tahun 2024.

Peningkatan kepatuhan yang progresif juga ditunjukkan oleh Jakarta Pusat yang tumbuh 16,02 poin menjadi 62,53%, serta Jakarta Barat yang meningkat dari 48,87% menjadi 58,49%. Sementara itu, Jakarta Utara dan Jakarta Timur mencatatkan pertumbuhan yang lebih moderat dengan capaian akhir masing-masing sebesar 69,09% dan 61,81%. Meskipun Kabupaten Kepulauan Seribu masih mencatatkan tingkat kepatuhan terendah sebesar 47,06%, kenaikan dari posisi 42,86% pada tahun sebelumnya tetap mengindikasikan adanya upaya pembenahan tata kelola dan peningkatan kesadaran hukum yang berkelanjutan di seluruh lini perkoperasian ibu kota.

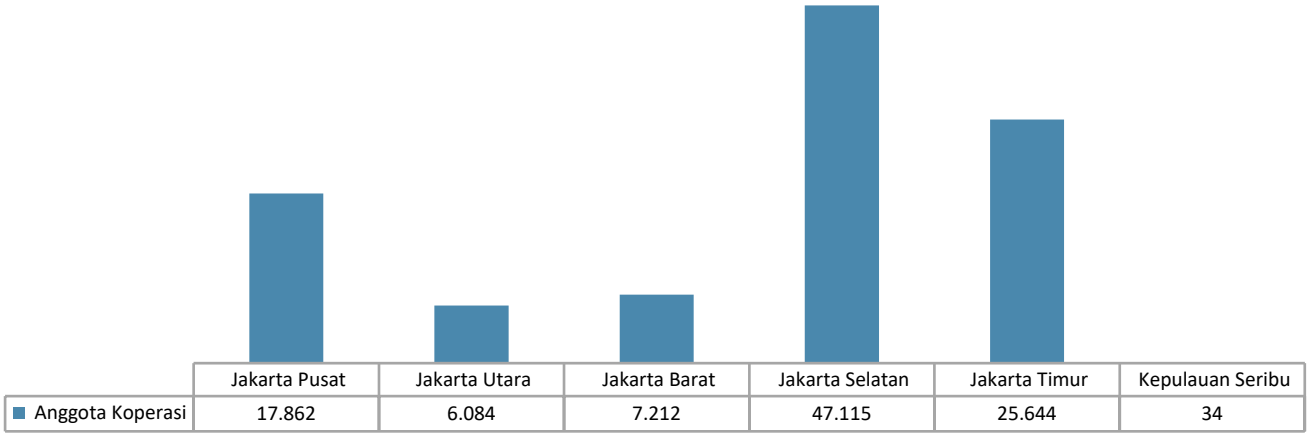
Gambar 3.19. Jumlah Anggota Koperasi di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	2023	2024
Anggota Koperasi	178.545	103.951

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta

Gambar 3.20. Jumlah Anggota Koperasi di DKI Jakarta menurut Wilayah Tahun 2023-2024

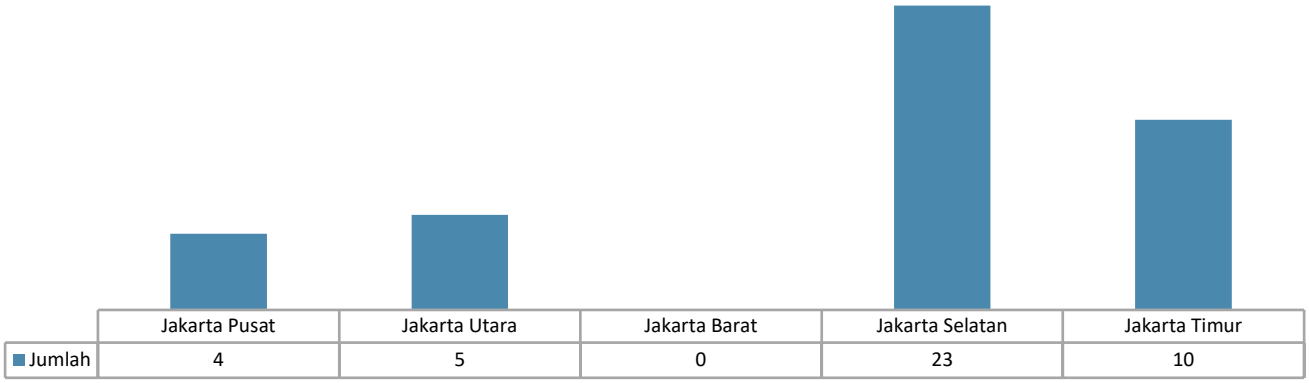


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Anggota Koperasi	17.862	6.084	7.212	47.115	25.644	34

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta

Jumlah anggota koperasi di DKI Jakarta tahun 2024 yang berjumlah 103.951 orang, turun cukup signifikan 41,78% dibandingkan tahun 2023 dengan anggota yang berjumlah 178.545 orang. Jika dilihat berdasarkan wilayah, Jakarta Selatan mencatat jumlah anggota koperasi terbanyak, yakni 47.115 orang atau 45,32% dari total anggota koperasi di DKI Jakarta. Dominasi ini sejalan dengan tingginya jumlah unit koperasi, baik yang aktif maupun pasif, di wilayah tersebut. Tren ini menyoroti perlunya strategi revitalisasi koperasi agar tetap relevan dan mampu menarik minat masyarakat, baik melalui digitalisasi, peningkatan akses permodalan, maupun inovasi model bisnis yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi saat ini.

Gambar 3.21. Jumlah Koperasi yang Berkualitas Tahun 2023



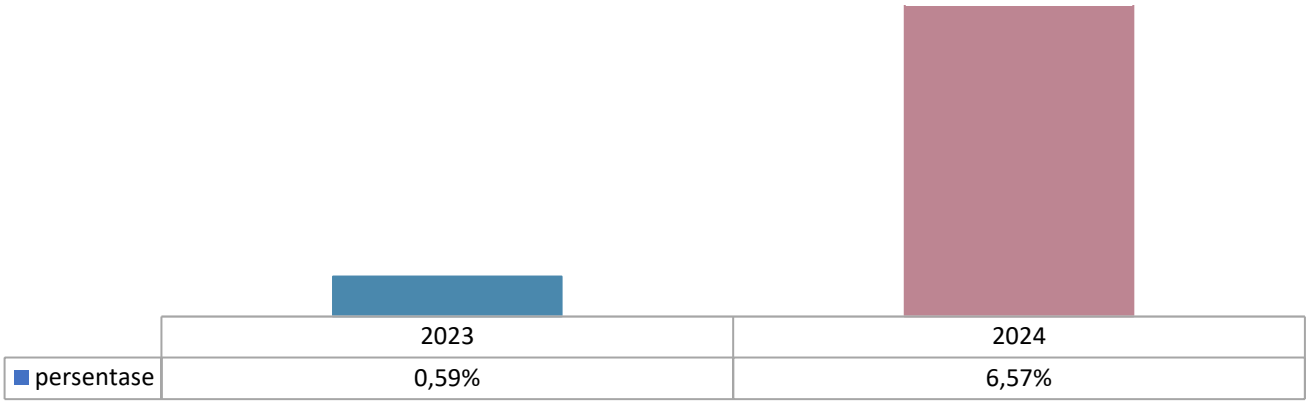
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
Jumlah	4	5	0	23	10

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta

Kualitas koperasi tidak hanya diukur dari jumlahnya, tetapi juga dari aspek kepatuhan terhadap regulasi dan kinerja usaha. Salah satu indikator utama dalam menilai kualitas koperasi adalah jumlah koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK).

Pada tahun 2024, jumlah koperasi berkualitas tercatat sebanyak 42 unit. Berdasarkan sebaran wilayah, Jakarta Selatan mendominasi jumlah koperasi berkualitas dengan 23 unit atau mencakup 54,76% dari total koperasi berkualitas. Kontribusi ini diikuti oleh Jakarta Timur dengan 10 unit atau setara 23,81%, serta Jakarta Utara dan Jakarta Pusat yang berkontribusi masing-masing sebanyak 5 unit (11,90%) dan 4 unit (9,52%).

Gambar 3.22. Persentase Koperasi Konvensional yang Bertransformasi Digital (Modern) Tahun 2023



Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta

Tabel 3.2. Persentase Koperasi Konvensional yang Bertransformasi Digital (Modern) Tahun 2023

Periode Data	Jumlah Koperasi Bertransformasi Digital	Jumlah Koperasi Aktif	Persentase
2023	13	2.207	0,59%
2024	156	2.373	6,57%

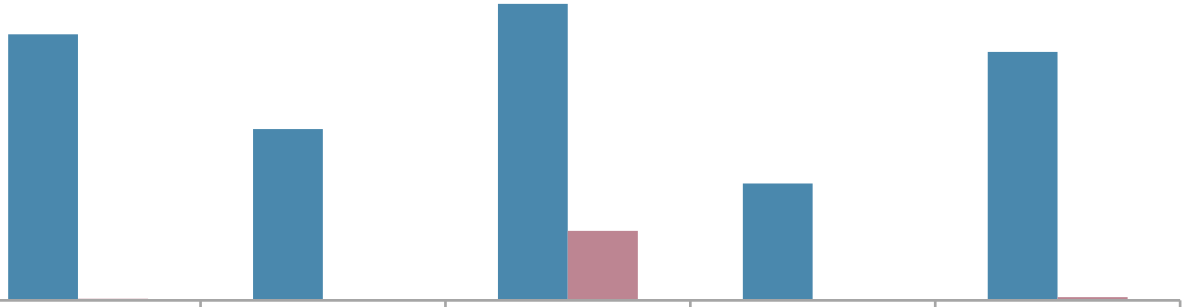
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta

Transformasi digital koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi, daya saing, dan jangkauan pasar koperasi di era digital. Walaupun proporsi koperasi konvensional yang bertransformasi digital di Provinsi DKI Jakarta secara agregat masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total populasi koperasi aktif, tren perkembangannya pada tahun 2024 menunjukkan lonjakan kinerja yang sangat signifikan. Pada tahun 2023, tingkat adopsi teknologi masih berada pada level yang sangat marginal, yakni hanya 0,59% atau setara dengan 13 unit dari total 2.207 koperasi. Pada tahun 2024, persentase koperasi modern meroket menjadi 6,57%, dengan realisasi jumlah mencapai 156 unit dari total 2.373 koperasi aktif. Meskipun capaian persentase tersebut masih berada di bawah satu digit, kenaikan volume koperasi yang melakukan modernisasi ini setara dengan12 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yang menandai titik balik penting pergeseran paradigma pengelolaan koperasi menuju digitalisasi yang lebih masif.

3.3.2. Usaha Kecil, dan Menengah

Sebagai pusat ekonomi nasional, perekonomian DKI Jakarta tidak bisa terpisahkan dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi roda penggerak utama perekonomian dan penyediaan lapangan kerja. Dengan jumlah yang mendominasi struktur usaha di Jakarta, UMKM memainkan peran strategis dalam mendukung daya beli masyarakat, mendorong inovasi, serta memperkuat rantai pasok industri yang lebih besar. Fleksibilitas UMKM dalam beradaptasi terhadap perubahan pasar menjadikannya sebagai sektor yang tahan terhadap berbagai tantangan ekonomi, termasuk krisis global dan disrupsi teknologi. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta mencerminkan besarnya peran sektor ini dalam menciptakan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan.

Gambar 3.23. Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal menurut Wilayah di DKI Jakarta Tahun 2023

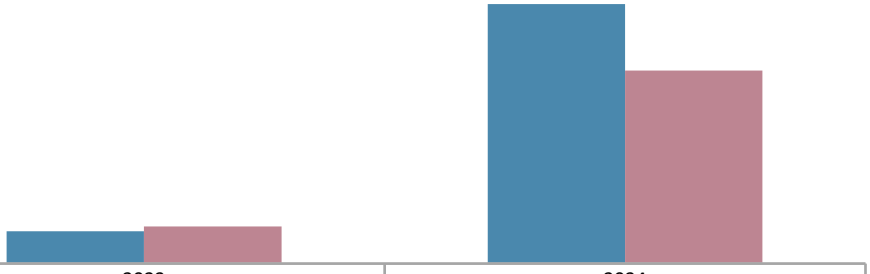


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2023	714	460	1.078	314	667
2024	5	1	187	4	9

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta

Sektor usaha informal menjadi bagian tak terpisahkan dari perekonomian DKI Jakarta, terutama dalam menyediakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan pasar lokal. Dinamika keberadaan kelompok pedagang atau usaha informal di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2023 hingga 2024 mencatatkan fenomena penyusutan data yang sangat signifikan dan merata di seluruh wilayah administrasi. Jakarta Barat, yang pada tahun 2023 memiliki basis kelompok informal terbesar sebanyak 1.078 unit, mengalami penurunan drastis sebesar 82,65% menjadi 187 unit pada tahun 2024. Angka ini masih tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan wilayah lain yang mengalami penurunan hingga taraf hampir nihil. Penurunan yang jauh lebih tinggi terjadi di Jakarta Pusat yang menyusut tajam sebesar 99,30% dari 714 unit menjadi hanya 5 unit, diikuti oleh Jakarta Timur yang turun 98,65% dari 667 unit menjadi 9 unit.

Gambar 3.24. Jumlah Peningkatan Omzet Industri Kecil dan Menengah Tahun 2023-2024



	2023	2024
Jumlah Omzet Sebelum Difasilitasi	81.571.867.624	667.538.782.583
Jumlah Omzet Setelah Difasilitasi	93.918.967.170	488.989.154.007

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta

Fasilitas pendampingan pemasaran produk UMKM diharapkan tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha melalui peningkatan pendapatan. Dampak fasilitasi pemerintah terhadap kinerja finansial Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada periode 2023–2024 menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif, ditandai dengan kenaikan persentase omzet yang signifikan serta ekspansi masif pada skala nilai usaha yang terlibat. Efektivitas program pembinaan terlihat

menguat secara signifikan pada tahun 2024, di mana rata-rata peningkatan omzet IKM setelah mendapatkan fasilitasi mencapai angka 36,51%, tumbuh lebih dari dua kali lipat atau meningkat 141,30% (secara relatif) dibandingkan capaian tahun 2023 yang berada di level 15,13%. Hal ini mengindikasikan bahwa program fasilitasi tidak hanya berhasil meningkatkan profitabilitas tetapi juga mampu menjangkau spektrum industri dengan volume usaha yang jauh lebih besar.

Gambar 3.25. Persentase Pertumbuhan Total Laba Bersih BUMDT DKI Jakarta Tahun 2023-2024



Sumber: Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah

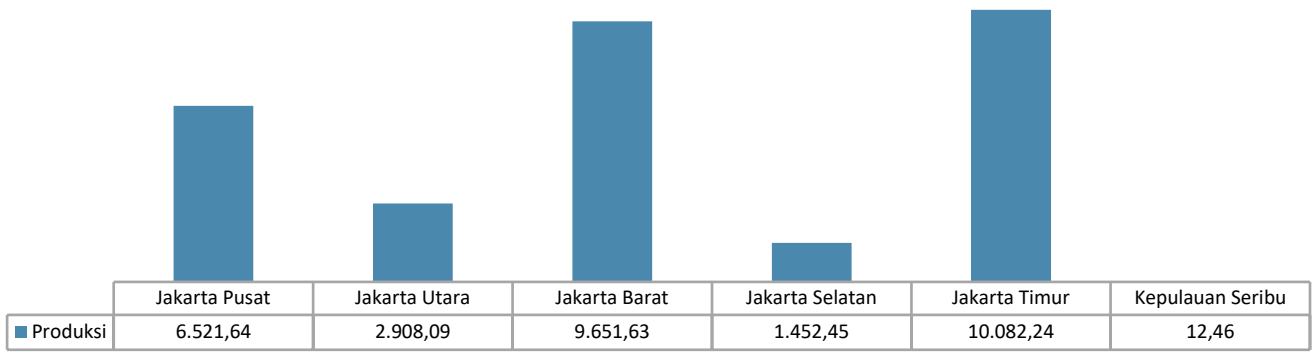
Beralih ke capaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kinerja profitabilitas BUMD di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2023–2024 memperlihatkan pembalikan tren yang signifikan, bergerak dari fase ekspansi laba menuju zona kontraksi. Setelah berhasil membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 25,61% pada tahun 2023, kinerja keuangan perusahaan daerah mengalami tekanan pada tahun 2024 hingga pertumbuhan terkoreksi cukup signifikan sebesar 25,40%.

3.4. Pertanian

3.4.1. Hortikultura

Indikator penting guna mengetahui kapasitas sektor pertanian di wilayah perkotaan dapat diketahui melalui produksi sayuran dan buah-buahan semusim. DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi, meski dengan demikian aktivitas pertanian tetap berlanjut serta tetap berkontribusi terhadap ketersediaan pangan lokal. Data di bawah ini dapat memberikan gambaran jumlah produksi sayuran dan buah-buahan semusim pada masing-masing wilayah administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Informasi yang tersedia menunjukkan terkait sebaran dan perbedaan tingkat produksi antar wilayah.

Gambar 3.26. Jumlah Produksi Sayuran dan Buah Semusim di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

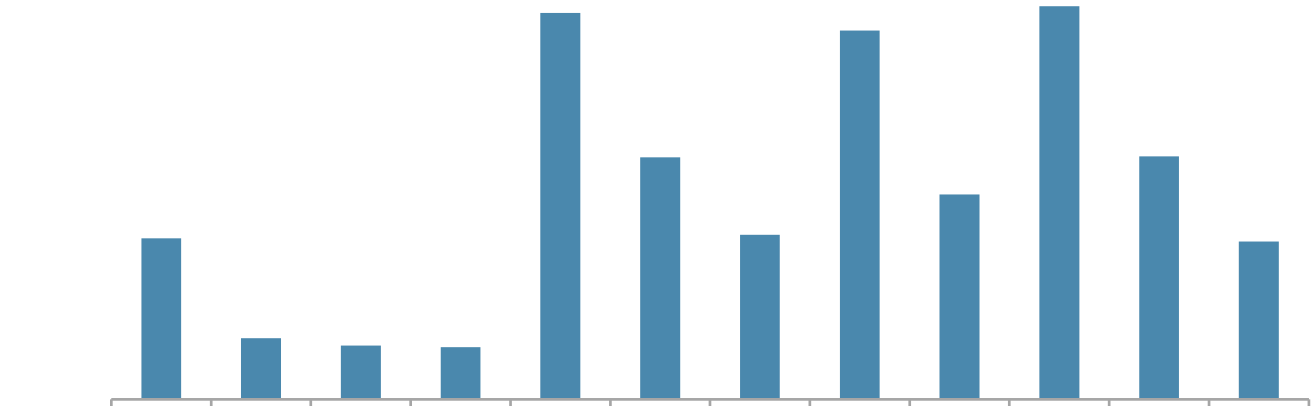


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Produksi	6.521,64	2.908,09	9.651,63	1.452,45	10.082,24	12,46

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan pada data di atas, memperlihatkan produksi tertinggi tercatat di Jakarta Timur dengan jumlah 10.082,24 selanjutnya diikuti oleh Jakarta Barat yang mencapai 9.651,63. Jakarta Pusat turut menunjukkan angka produksi yang signifikan sebesar 6.521,64. Pada sisi lain, Jakarta Utara mencapai 2.908,09 dan Jakarta Selatan 1.452,45. Produksi terendah terdapat di Kepulauan Seribu, yaitu 12,46. Perbedaan tersebut memperlihatkan Jakarta Timur dan Jakarta Barat merupakan wilayah dengan ketersediaan lahan yang relatif lebih luas apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Secara umum, distribusi produksi masih terkonsentrasi pada wilayah daratan utama DKI Jakarta. Produksi sayuran dan buah-buahan semusim menjadi salah satu indikator penting guna mengetahui dinamika pada sektor pertanian di DKI Jakarta. Meskipun wilayah tersebut didominasi oleh aktivitas perkotaan, kegiatan budidaya hortikultura tetap berlangsung serta menunjukkan fluktuasi dari waktu ke waktu. Selain adanya perbedaan antarwilayah administrasi, variasi produksi turut dapat diamati berdasarkan periode bulan dalam satu tahun. Sehingga dengan demikian, penyajian data produksi menurut bulan memberikan gambaran secara rinci terkait pola musiman dan kecenderungan produksi sepanjang tahun 2024.

Gambar 3.27. Jumlah Produksi Sayuran dan Buah Semusim menurut Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



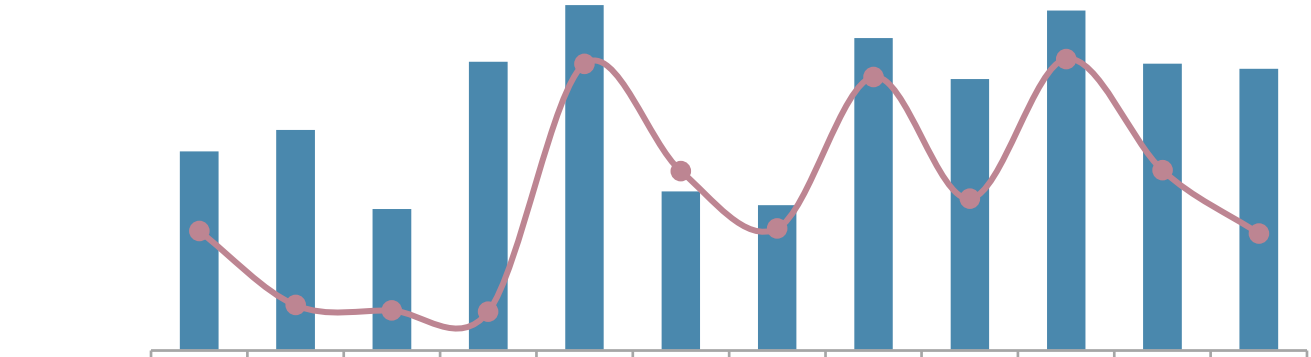
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Produksi	1.983,19	752,28	661,93	642,25	4.756,42	2.977,53	2.023,31	4.540,36	2.519,64	4.839,00	2.990,43	1.942,17

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa, produksi sayuran dan buah-buahan semusim di DKI Jakarta selama tahun 2024 menggambarkan pola yang berfluktuasi. Awal tahun tercatat terdapat produksi sebesar 1.983,19 dan mengalami penurunan menjadi 752,28 pada bulan Februari. Maret tercatat terdapat sebesar 661,93 dan 642,25 pada April. Peningkatan secara signifikan tergambarkan pada Mei yang mencapai 4.756,42 dan kembali mengalami penurunan pada Juni sebesar 2.977,53. penurunan kembali terjadi pada Juli dengan capaian sebesar 2.023,31. Angka tersebut kembali mengalami peningkatan sebanyak 4.540,36 pada Agustus. September mencatat terdapat sebesar 2.519,64 dan Oktober sebanyak 4.839,00. Dua bulan terakhir menunjukkan angka penurunan, yaitu pada November sebesar 2.990,43 dan Desember sebesar 1.942,17. Meski terdapat keterbatasan ruang di wilayah metropolitan, sektor pertanian di perkotaan menjadi salah satu sektor yang mempunyai peran penting

dalam memberikan dukungan terhadap ketersediaan pangan. Data DKI Jakarta terkait luas panen dan jumlah produksi dapat memberikan gambaran terkait potensi hasil pertanian semusim yang masih diusahakan di setiap wilayah. Adanya data tersebut turut memberikan bantuan pemahaman mengenai seberapa besar kontribusi tiap kota administrasi dalam menjalankan kegiatan budidaya tanaman pangan berkelanjutan. Melihat pola produksi dan luas lahan yang digunakan, dapat dijadikan penilaian mengenai efektivitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian di tengah kondisi urban.

Gambar 3.28. Jumlah Luas Panen dan Produksi Sayuran dan Buah-buahan Semusim di Provinsi DKI Jakarta



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Luas	107,41	107,88	106,13	109,39	110,65	106,52	106,22	109,92	109,01	110,53	109,35	109,24
Produksi	1.983,19	752,28	661,93	642,25	4.756,42	2.977,53	2.023,31	4.540,36	2.519,64	4.839,00	2.990,43	1.942,17

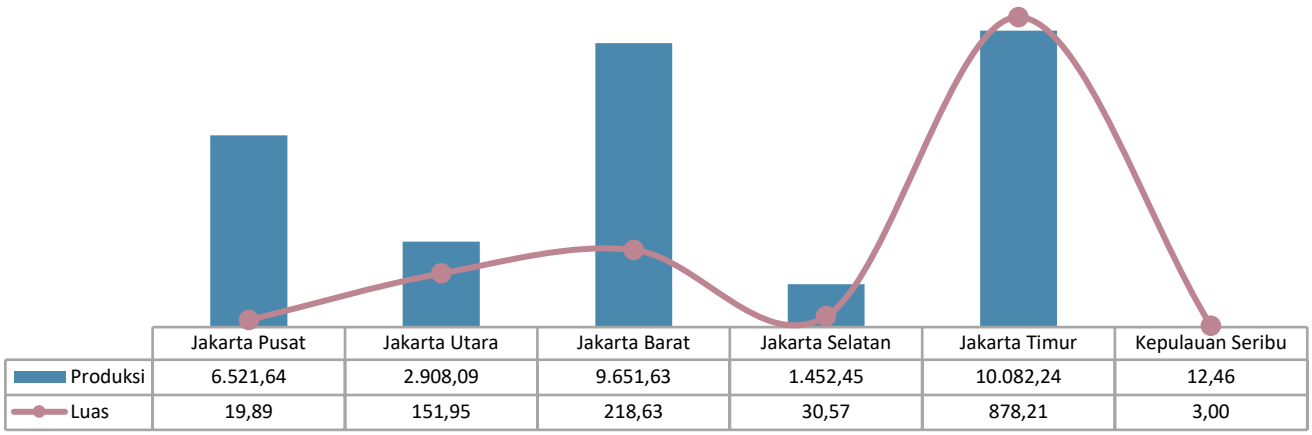
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data di atas terdapat rincian bahwa, pada Januari luas panen tercatat sebesar 107,41 dengan produksi mencapai 1.983,19 yang menunjukkan awal tahun mendapatkan hasil panen cukup baik. Pada Februari mendapatkan peningkatan luas panen menjadi 107,88 namun mengalami produksi yang menurun menjadi 752,28. Adanya data tersebut menunjukkan terjadinya penurunan produktivitas. Pada bulan berikutnya, luasan panen turun menjadi 106,13 dan produksi kembali mengalami penurunan ke angka 661,93. Memasuki April, meski terjadi peningkatan luas panen menjadi 109,39, produksi kembali memasuki titik terendah yaitu 642,25. Perbedaan kondisi terlihat pada Mei dengan luas panen mencapai 110,65 dan produksi melonjak tajam menjadi 4.756,42 sebagai capaian produksi yang tinggi. Memasuki pertengahan tahun, luas panen mencapai 106,52 dengan produksi mencapai 2.977,53. Capaian produksi tersebut menurun tajam apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada bulan Juli menunjukkan luas panen sebesar 106,22 dengan produksi mencapai 2.023,31. Sementara itu, pada bulan Agustus terdapat luasan sebesar 109,92 dengan produksi mencapai 4.540,36. Pada September luas panen sebesar 109,01 dan terjadi penurunan produksi menjadi 2.519,64. Memasuki bulan Oktober terdapat luas panen sebesar 110,53 dengan produksi mencapai 4.839 sekaligus yang terbesar sepanjang tahun. Selanjutnya pada November, luas panen mencapai 109,35 dengan produksi sebesar 2.990,43. Sementara itu pada Desember terdapat luas panen sebesar 109,24 dengan produksi mencapai 1.942,17. Angka tersebut mengalami penurunan menjelang akhir tahun. Berdasarkan pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, luasan panen sayuran dan buah-buahan semusim di Provinsi DKI Jakarta cenderung stabil sepanjang tahun meski terdapat fluktuasi. Meski dengan demikian, terdapat variasi produksi yang signifikan setiap bulan meski pada saat luas panen relatif sama. Sehingga dengan demikian, tingkat produksi tidak selalu

ditentukan oleh luas panen, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Faktor tersebut dapat berupa produktivitas lahan, kondisi iklim, dan pengelolaan pertanian. Oleh karena itu, upaya peningkatan hasil pertanian tidak hanya difokuskan pada perluasan atau stabilitas luas panen, tetapi juga pada peningkatan produktivitas dan efisiensi budidaya agar produksi lebih konsisten di sepanjang tahun.

Setelah dilakukan pembahasan mengenai variasi luas panen dan produksi sayuran serta buah-buahan semusim antarwilayah di DKI Jakarta, gambaran tersebut akan semakin lengkap apabila dilakukan penelusuran terkait jenis komoditasnya. Setiap jenis tanaman memiliki kebutuhan lahan, teknik budidaya, dan tingkat produktivitas yang berbeda, sehingga kontribusinya terhadap total produksi tidak selalu berbanding lurus dengan luas pertanaman yang digunakan. Pemahaman ini penting untuk melihat komoditas mana yang paling dominan dan yang berpotensi untuk dikembangkan. Sehingga dengan demikian, arah pengembangan pertanian perkotaan dapat direncanakan lebih efektif serta disesuaikan berdasarkan karakteristik masing-masing komoditas.

Gambar 3.29. Data Luas Panen dan Produksi Sayuran dan Buah-buahan Semusim di Provinsi DKI Jakarta



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Produksi	6.521,64	2.908,09	9.651,63	1.452,45	10.082,24	12,46
Luas	19,89	151,95	218,63	30,57	878,21	3,00

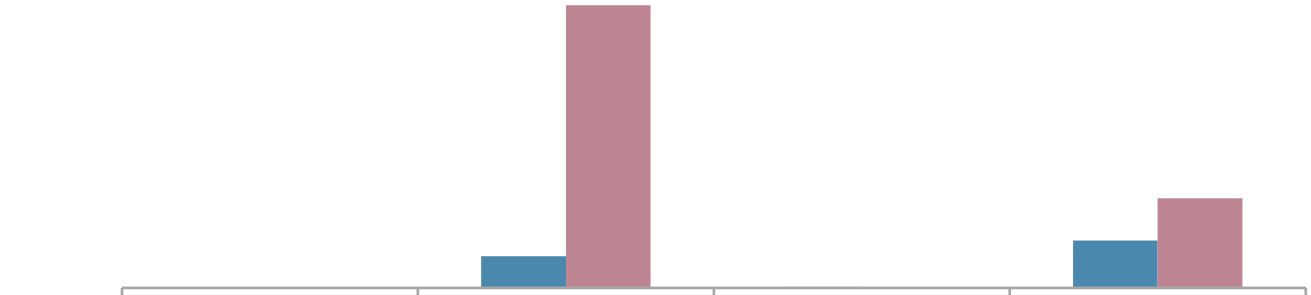
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data pada jumlah luas panen dan produksi sayuran dan buah-buahan semusim di Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, terlihat adanya ketimpangan antarwilayah yang cukup jelas. Jakarta Timur menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar dengan rincian luas panen mencapai 878,21 dengan produksi mencapai 10.082,24. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa, sentra utama pertanian musim di DKI Jakarta berada di Jakarta Timur. Selanjutnya terdapat Jakarta Barat dengan luas panen mencapai 218,63 dan produksi mencapai 9.651,63. Meski luas panen jauh lebih kecil dibandingkan Jakarta Timur, produktivitas menunjukkan jumlah yang tinggi. Selanjutnya terdapat Jakarta Utara dengan luas panen mencapai 151,95 dengan produksi mencapai 2.908,09. Angka tersebut relatif lebih rendah, serta mengindikasikan tingkat produktivitas lahan yang belum optimal. Sementara itu, Jakarta Pusat menunjukkan kontribusi yang lebih terbatas, baik dari sisi luas panen maupun produksi. Luas panen mencapai 19,89 dengan produksi mencapai 6.521,64. Jakarta Selatan mencapai luas panen sebesar 30,57 dengan produksi mencapai 1.452,45. Pada sisi lain, Kepulauan Seribu mencatat angka paling rendah dengan luas panen hanya 3,00 dengan produksi mencapai 12,46.

Data tersebut mencerminkan keterbatasan lahan dan aktivitas pertanian semusim di wilayah kepulauan. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa aktivitas pertanian sayuran dan buah-buahan semusim di DKI Jakarta sangat terpusat di wilayah tertentu. Adanya data tersebut diperlukan strategi pengelolaan dan peningkatan produktivitas yang disesuaikan dengan karakteristik pada masing-masing wilayah.

Tanaman pangan tidak selalu menjadi fokus utama pada sektor pertanian di perkotaan. Tanaman hias turut memiliki peranan penting karena menjadi bagian dari kegiatan ekonomi kreatif dan penghijauan kota. Setiap wilayah turut memiliki kapasitas serta karakteristik lahan yang berbeda, sehingga kontribusi terhadap produksi tanaman hias turut bervariasi. Adanya data luas panen dan jumlah produksinya, dapat memberikan gambaran perkembangan tanaman hias dan sejauh mana wilayah-wilayah di Jakarta dapat memanfaatkan sebagai bagian dari ruang hijau dan aktivitas usaha masyarakat.

Gambar 3.30. Data Luas Panen dan Produksi Tanaman Hias di Provinsi DKI Jakarta



	Jakarta Pusat	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
Luas	25	27.426	820	41.178
Produksi	25	244.619	800	77.661

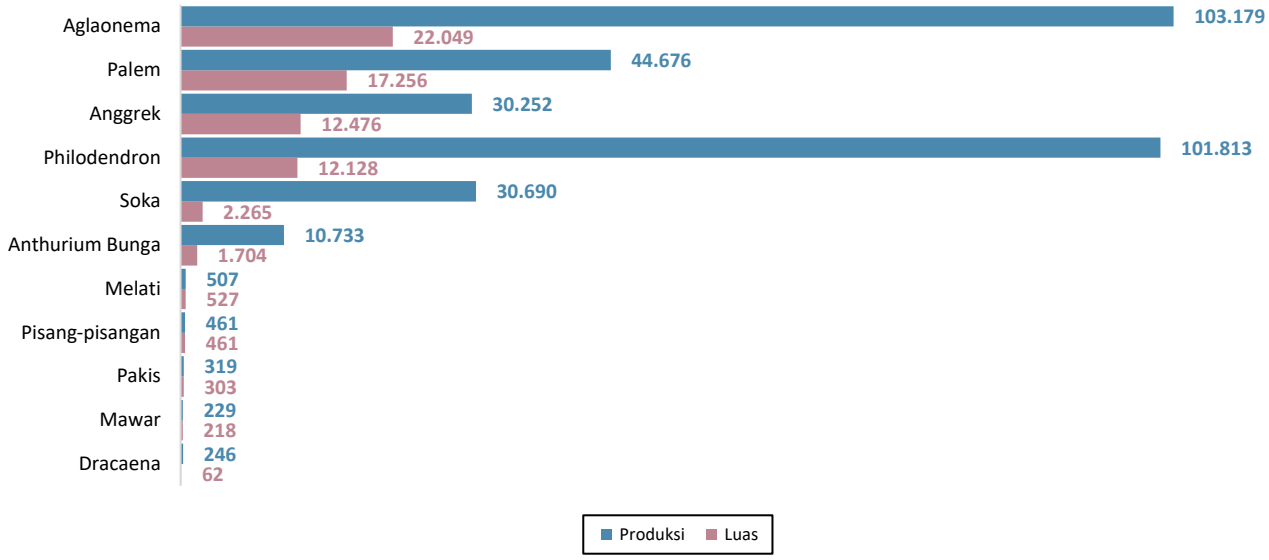
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan grafik di atas terkait jumlah luas panen dan produksi tanaman hias menurut wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, terlihat perbedaan yang cukup signifikan antarwilayah. Jakarta Barat menjadi wilayah dengan kontribusi paling dominan dengan rincian luas panen sebesar 27.426 dan produksi mencapai 244.619, sehingga menunjukkan perannya sebagai sentra utama tanaman hias di DKI Jakarta. Sementara itu, Jakarta Timur menempati posisi kedua dengan luas panen mencapai 41.178 dan produksi mencapai 77.661 yang memberikan gambaran kapasitas lahan tidak sebanding dengan produksi yang dihasilkan apabila dibandingkan dengan Jakarta Barat. Pada sisi lain, Jakarta Selatan menunjukkan luas panen yang relatif kecil yaitu mencapai 820 dengan produksi 800. Data tersebut menunjukkan keterbatasan skala usaha tanaman hias. Jakarta Pusat mencatat angka terendah apabila dibandingkan dengan wilayah lain. Luas panen dan produksi berada pada angka 25. Hal tersebut sejalan dengan keterbatasan ruang dan dominasi fungsi perkotaan.

Secara keseluruhan, uraian di atas memberikan petunjuk terkait produksi tanaman hias di DKI Jakarta yang masih terpusat pada wilayah tertentu. Maka dengan demikian, pengembangan ke depannya perlu mempertimbangkan potensi lahan, efisiensi produksi, serta karakteristik wilayah guna menjadikan distribusi dan produktivitas tanaman hias yang seimbang.

Setelah melihat perbedaan luas panen dan produksi tanaman hias di tiap wilayah Jakarta, data akan semakin lengkap apabila diketahui secara detail terkait jenis tanamannya. Setiap jenis tanaman hias mempunyai karakteristik budidaya yang berbeda sehingga berpengaruh pada tingkat produktivitas. Sehingga dengan demikian, tidak selalu sebanding dengan luas lahan yang digunakan. Adanya pemahaman mengenai kontribusi tiap jenis tanaman dapat digunakan untuk melihat komoditas apa saja yang dominan dan berpotensi untuk dikembangkan. Informasi ini turut memberikan gambaran mengenai preferensi budidaya di Jakarta dan bagaimana tanaman hias dikelola sebagai bagian dari pertanian perkotaan.

Gambar 3.31. Data Luas Panen dan Produksi Tanaman Hias di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan grafik jumlah luas panen dan produksi tanaman hias menurut jenis tanaman di Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, terlihat bahwa terdapat dominasi pada beberapa jenis tanaman hias baik dari sisi luas panen maupun produksi. Dominasi tersebut diduduki oleh Aglonema dan Philodendron. Luas panen Aglonema sebesar 22.049 dengan produksi mencapai 103.179, sementara itu Philodendron luas panen mencapai 12.128 dengan 101.813 produksi. Adanya dominasi tersebut didukung oleh luas panen yang relatif besar. Tanaman Palem dan Anggrek menduduki posisi berikutnya dengan produksi yang cukup signifikan, meski memiliki luas panen yang cukup kecil. Luas panen tanaman palem mencapai 17.256 dengan produksi mencapai 44.676 sementara itu tanaman Anggrek dengan luas panen mencapai 12.476 dengan produksi mencapai 30.252.

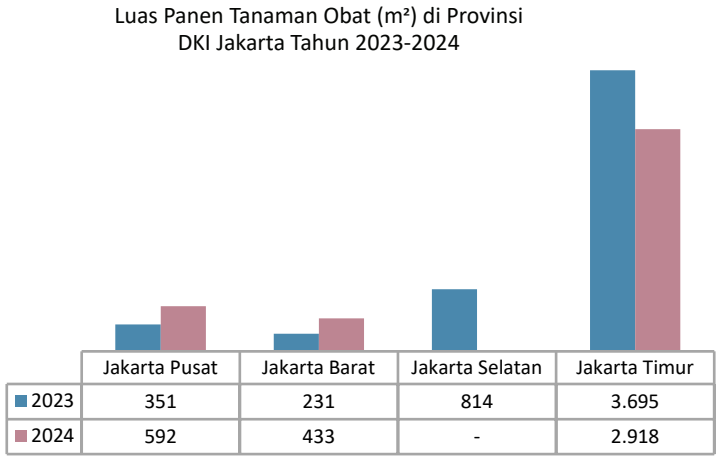
Sementara itu, pada tanaman Soka dan Anthurium Bunga menduduki produksi menengah dengan luas panen yang terbatas. Tanaman Soka mempunyai luas panen sebesar 2.265 dengan produksi mencapai 30.690 sementara itu, pada tanaman Anthurium bunga mencapai 1.704 luas panen dan 10.733 produksi. Data tersebut menandakan adanya skala budidaya yang lebih kecil. Tanaman hias lain seperti Melati, Pisang-pisangan, Pakis, Mawar, dan Dracaena menunjukkan kontribusi yang rendah baik dari segi luas panen maupun panen. Pada tanaman Melati, mendapatkan luas panen sebesar 527 dengan produksi mencapai 507. Pada tanaman Pisang-pisangan luas panen dan produksi

masing-masing mencapai 461. Tanaman Pakis mencapai 303 pada luas panen dan 319 pada produksi. Sementara itu, tanaman Mawar mencapai 218 luas panen dengan 229 produksi. Dracaena menjadi tanaman dengan luas panen terkecil yaitu hanya 62 dengan 246 produksi.

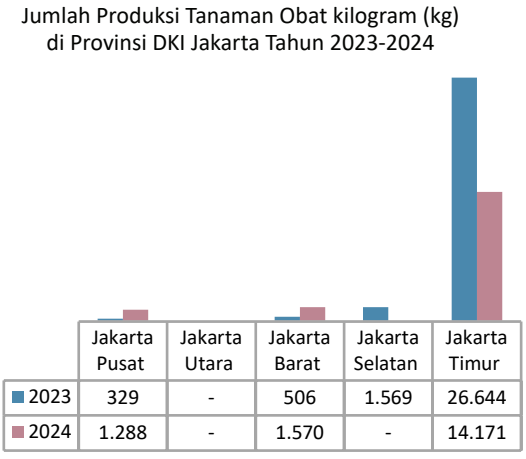
Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan adanya konsentrasi terhadap produksi tanaman hias di DKI Jakarta. Hal tersebut tentunya mempertimbangkan nilai ekonomi dan permintaan pasar. Maka dengan demikian, pengembangan terhadap jenis tanaman dapat difokuskan pada optimalisasi produktivitas tanaman unggulan. Optimalisasi produktivitas dilakukan tanpa mengesampingkan diversifikasi jenis tanaman hias yang lain.

Setelah mengetahui rincian terkait luas panen dan produksi tanaman hias berdasarkan jenisnya, selanjutnya penting untuk melihat gambaran komoditas lain berupa tanaman obat. Tanaman obat mempunyai karakteristik dan kebutuhan lahan yang berbeda apabila dibandingkan dengan tanaman hias. Hal ini turut mempengaruhi mengenai distribusi luas panen maupun produksinya. Selain menjadi komoditas ekonomi, tanaman obat berperan mendukung kesehatan masyarakat serta menjadi bagian dari pemanfaatan ruang hijau produktif. Pemahaman mengenai penyebaran dan tingkat produktivitas tanaman obat memberikan gambaran terkait potensi pertanian non pangan yang dapat dikembangkan terutama di wilayah perkotaan.

Gambar 3.32. Data Luas Panen Tanaman Obat di Provinsi DKI Jakarta



	Jakarta Pusat	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2023	351	231	814	3.695
2024	592	433	-	2.918



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2023	329	-	506	1.569	26.644
2024	1.288	-	1.570	-	14.171

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Tanaman obat menjadi salah satu komoditas pertanian dengan nilai strategis, baik dari sisi kesehatan masyarakat atau pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Selain itu, melalui tanaman obat menunjukkan adanya upaya dalam optimalisasi lahan terbatas melalui pertanian perkotaan yang berkelanjutan. Berdasarkan data mengenai luas panen di atas, terlihat dinamika dari pemanfaatan lahan di masing-masing wilayah. Jakarta Pusat dan Jakarta Barat menunjukkan peningkatan luas panen tanaman obat. Luas panen Jakarta Pusat pada 2023 mencapai 351 dan meningkat menjadi 592 di tahun 2024. Sementara itu, Jakarta Barat pada 2023 mencapai 231 dan meningkat menjadi 433 di tahun berikutnya. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya perluasan atau optimalisasi lahan untuk tanaman obat. Luas panen di Jakarta Selatan mencapai 814 di tahun 2023 dan tercatat tidak memiliki luas panen di tahun 2024. Selanjutnya terdapat Jakarta Utara yang tidak memiliki catatan mengenai luas panen tanaman

obat dari tahun ke tahun. Sementara itu, Jakarta Timur justru mengalami penurunan luas panen dari 3.695 pada 2023 menjadi 2.918 di tahun berikutnya. Meski terjadi penurunan luas panen, Jakarta Timur masih menjadi wilayah dengan luas panen terbesar apabila dibandingkan dengan wilayah lain.

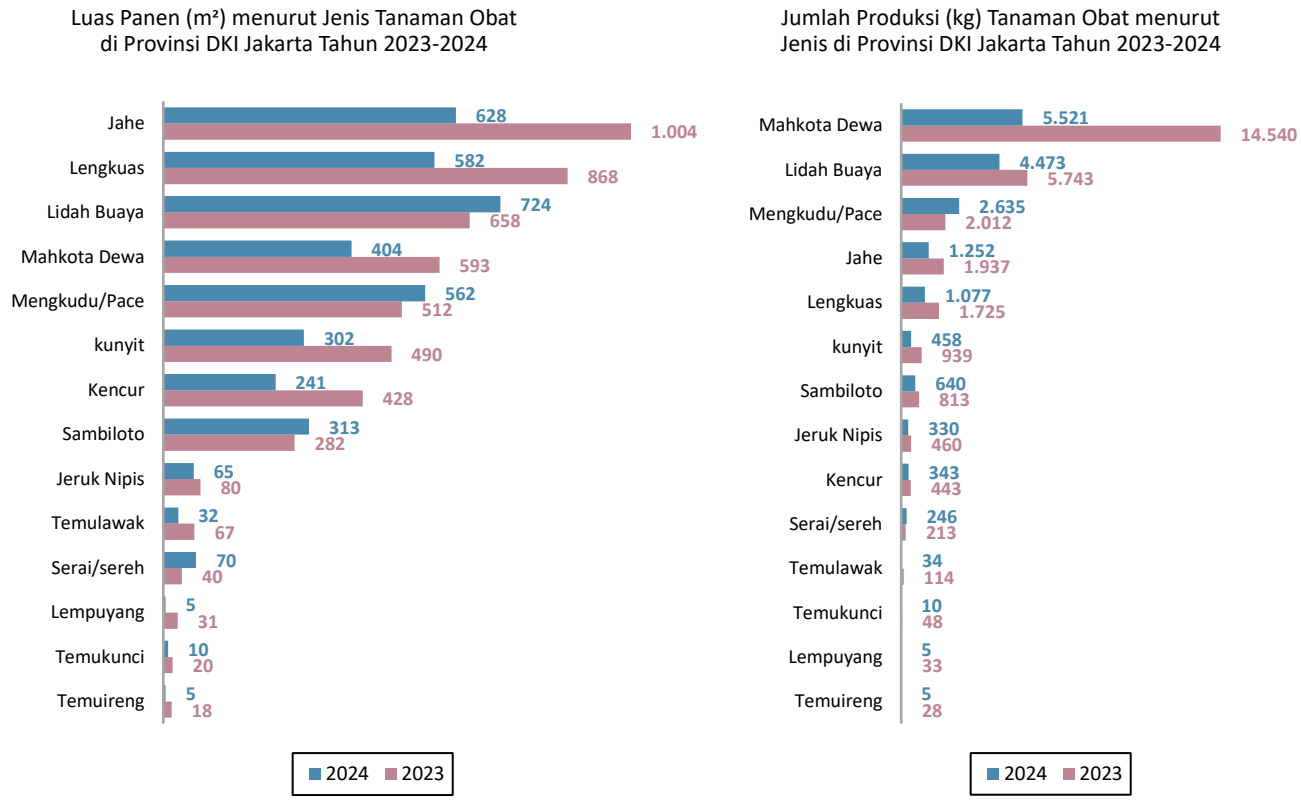
Sejalan dengan data di atas, jumlah produksi tanaman obat turut memperlihatkan variasi antarwilayah. Jakarta Pusat mengalami peningkatan produksi dari 329 pada 2023 meningkat menjadi 1.288 di tahun berikutnya. Peningkatan turut terjadi di Jakarta Barat dari 506 di tahun 2023 menjadi 1.570 di tahun 2024. Hal tersebut memberikan gambaran meski skala lahan relatif terbatas, produktivitas tanaman obat masih dapat diupayakan produksinya. Jakarta Utara justru tidak memiliki catatan mengenai jumlah produksi tanaman obat dari tahun ke tahun. Selanjutnya terdapat Jakarta Selatan, pada 2023 tercatat menghasilkan produksi tanaman obat sebesar 1.569, pada tahun selanjutnya tidak lagi tercatat adanya produksi tanaman obat. Sementara itu, Jakarta Timur masih menjadi wilayah dengan produksi tertinggi meski terjadi penurunan jumlah produksi. Pada 2023 mencapai 26.644 dan turun menjadi 14.171 di tahun 2024.

Sehingga dengan demikian, data di atas memberikan gambaran terkait pengembangan tanaman obat di DKI Jakarta masih terkonsentrasi di sebagian wilayah, terutama di Jakarta Timur. Sementara itu, wilayah lain tercatat cenderung mengalami fluktuasi. Pentingnya strategi pemanfaatan lahan secara lebih merata dan berkelanjutan dapat lebih diupayakan kedepannya. Hal tersebut berguna agar potensi tanaman obat dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari pertanian perkotaan. Selain itu mendukung kesehatan masyarakat serta aktivitas ekonomi lokal.

Setelah mengetahui terkait data luas panen dan produksi tanaman obat, selanjutnya diperlukan data pendukung terkait data luas panen menurut jenis tanaman obat dan jumlah produksi tanaman obat menurut jenisnya. Beragamnya jenis tanaman obat yang dibudidayakan memberikan gambaran mengenai pola pemanfaatan lahan, preferensi komoditas, serta potensi pengembangan agrikultur nonpangan di wilayah perkotaan. Analisis yang didasarkan pada jenis tanaman obat menjadi relevan untuk memahami komoditas apa saja yang lebih dominan dan berkelanjutan dilakukan pengembangan. Oleh karena itu, penyajian data menurut jenis tanaman obat memberikan gambaran komprehensif mengenai arah dan dinamika pengelolaan tanaman obat di Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 3.33. Data Produksi Tanaman Obat di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data luas panen tanaman obat tahun 2023-2024, tanaman jahe, lengkuas, dan lidah buaya merupakan komoditas dengan luas panen terbesar di DKI Jakarta. Pada 2023, luas panen jahe tercatat terdapat 1.004 dan menjadi 582 di tahun 2024. Lengkuas menunjukkan angka sebesar 868 pada 2023 dan turun menjadi 582 pada 2024. Sementara itu, lidah buaya sebanyak 658 pada 2023 dan mengalami kenaikan menjadi 724 pada 2024. Pada sisi lain, terdapat jenis tanaman dengan luas panen terendah terdapat pada temuireng dengan jumlah mencapai 18 pada 2023 dan mengalami penurunan menjadi lima di tahun berikutnya. Sementara itu kapulaga dan kejibeling tidak tercatat adanya luas panen.

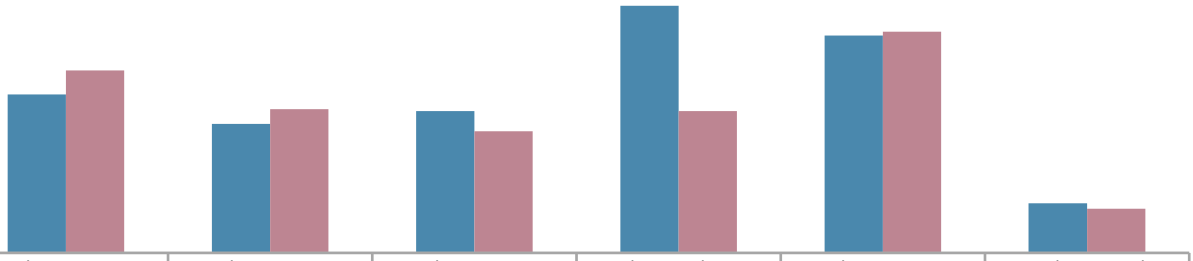
Selanjutnya terdapat jenis tanaman menurut produksi. Produksi terbanyak terdapat pada mahkota dewa yaitu sebanyak 14.540 pada 2023 dan menurun menjadi 5.521 pada 2024. Selain itu terdapat lidah buaya dengan jumlah 5.743 pada 2023 dan mengalami penurunan menjadi 4.473 pada tahun 2024. Selanjutnya terdapat mengkudu/pace dengan jumlah 2.012 pada 2023 dan meningkat menjadi 2.635 pada 2024. Pada sisi lain, terdapat jenis tanaman obat dengan produksi terendah yaitu ada pada temuireng dengan jumlah 28 pada 2023 dan lima pada tahun 2024. Selain itu terdapat Lempuyang dengan jumlah 33 pada tahun 2023 dan turun menjadi lima pada 2024. Sementara itu kapulaga dan kejibeling tidak tercatat adanya luas panen.

Secara keseluruhan, data di atas memberikan gambaran bahwa tanaman obat di DKI Jakarta belum bervariasi dan masih terpusat pada beberapa jenis tanaman utama. Hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan luas panen dan tingkat produktivitas. Adanya catatan mengenai jenis tanaman menurut luas panen menunjukkan peluang untuk penguatan budidaya tanaman obat unggulan sekaligus

diversifikasi komoditas guna meningkatkan keberlanjutan pertanian non pangan di wilayah perkotaan.

Pada produksi tanaman obat, terlihat adanya fluktuasi. Hal tersebut cenderung mengalami penurunan terutama pada sebagian besar komoditas utama. Maka dengan demikian, diperlukan upaya penguatan produktivitas serta keberlanjutan dari budidaya tanaman obat. Setelah dibahas mengenai tanaman obat yang dibudidayakan berdasarkan jenisnya, menarik untuk diketahui secara lebih lanjut terkait bagaimana kapasitas kelembagaan pertanian kota berkembang setiap tahun. jumlah kelompok tani aktif menjadi salah satu indikator yang sering digunakan. Hal tersebut dikarenakan keberadaan kelompok tani menunjukkan adanya komunitas yang terorganisir serta memiliki peran dalam mendukung kegiatan pertanian di perkotaan. Perubahan jumlah kelompok tani memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi masyarakat, dinamika kegiatan budidaya, serta keberlanjutan program pertanian. Sehingga dengan demikian, dapat melihat bagaimana peran masyarakat dan pemerintah daerah berjalan berdampingan dalam mengembangkan pertanian di DKI Jakarta.

Gambar 3.34. Jumlah Kelompok Tani di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	86	70	77	147	118	27
2024	99	78	66	77	120	24

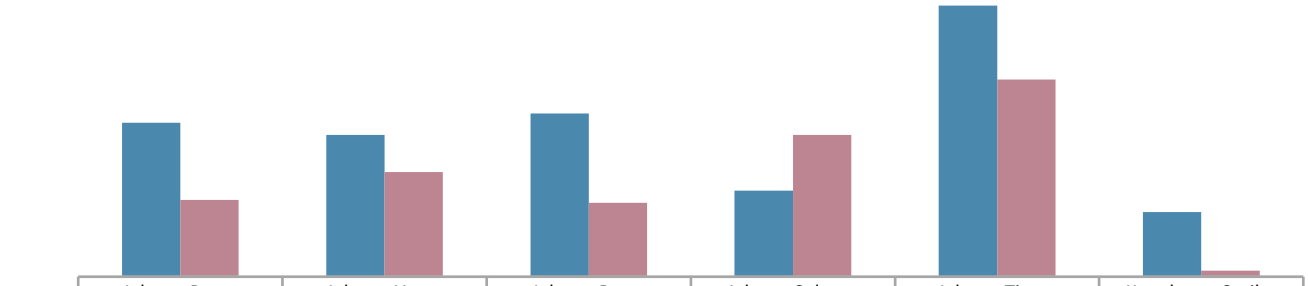
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Data mengenai kelompok tani di DKI Jakarta tahun 2023-2024 di atas memberikan gambaran terkait adanya perbedaan jumlah kelompok tani di wilayah DKI Jakarta. Jakarta Pusat mengalami peningkatan sejak tahun 2023 dari 86 menjadi 99 kelompok tani di tahun 2024. Hal tersebut memberikan tanda adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan budidaya atau penguatan kelembagaan kelompok tani. Jakarta Utara turut mengalami peningkatan dari 70 ke 78 kelompok tani. Sementara itu, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan mengalami penurunan signifikan. Jakarta Barat dari 77 menjadi 66 dan Jakarta Selatan dari 147 menjadi 77 kelompok tani. Jakarta Timur mengalami peningkatan dari 118 menjadi 120 kelompok tani. Sementara itu Kepulauan Seribu mengalami penurunan dari 27 menjadi 24 kelompok tani. Angka tersebut cenderung stabil apabila dilihat dari wilayah dengan keterbatasan lahan dan jumlah penduduk yang kecil.

Secara keseluruhan, uraian data di atas menggambarkan perkembangan dari jumlah kelompok tani. Data tersebut menunjukkan ketidakmerataan jumlah kelompok tani di seluruh wilayah Jakarta. Meski di beberapa wilayah mencatat adanya peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan, wilayah lain justru mengalami penurunan secara signifikan. Pola tersebut menjadi dasar guna melihat kembali kebutuhan pendampingan, pemerataan program, dan strategi penguatan kelompok tani agar kegiatan pertanian perkotaan tetap berjalan secara berkelanjutan.

Setelah mengetahui terkait perubahan data dari kelompok tani di berbagai wilayah Jakarta, gambaran terkait perkembangan pertanian kota dapat semakin lengkap apabila dilakukan peninjauan dari kegiatan urban farming di masyarakat. Urban farming tidak selalu hanya mencerminkan pemanfaatan ruang terbatas untuk aktivitas budidaya. Hal tersebut turut menunjukkan tingkat kesadaran serta keterlibatan warga dalam menjaga ketahanan pangan lokal. Adanya dinamika dari jumlah kegiatan urban farming dapat memberikan gambaran semangat masyarakat dalam mengembangkan pertanian perkotaan, baik secara mandiri maupun komunitas. Sehingga dengan demikian, dapat melihat seberapa kuat budaya bertani di perkotaan dari tahun ke tahun.

Gambar 3.35. Jumlah *Urban Farming* menurut Wilayah di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	50	46	53	28	88	21
2024	25	34	24	46	64	2

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

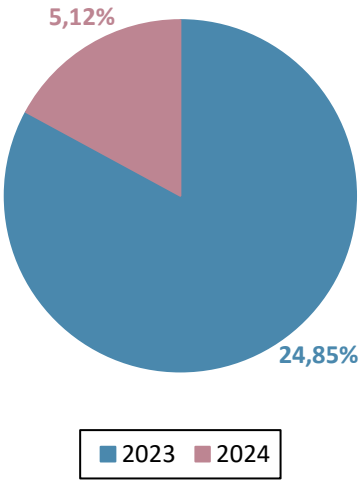
Menggambarkan adanya jumlah kegiatan *urban farming* pada 2023-2024. Data tersebut menunjukkan adanya perubahan yang signifikan di hampir seluruh wilayah DKI Jakarta. Jakarta Pusat pada 2023 terdapat 50 menjadi 25 di tahun 2024. Selanjutnya terdapat Jakarta Utara yang terdapat 46 di tahun 2023 menjadi 34 di tahun 2024. Jakarta Barat turut mengalami penurunan dari 53 pada 2023 menjadi 24 pada 2024. Sementara itu, terdapat Jakarta Selatan yang mengalami peningkatan dari 28 di tahun 2023 menjadi 46 pada tahun selanjutnya. Terjadinya peningkatan tersebut memberikan dorongan secara positif dalam pengembangan pertanian perkotaan. Jakarta Timur turut mengalami penurunan dari 88 di tahun 2023 menjadi 64 di tahun 2024. Penurunan secara drastis terdapat di Kepulauan Seribu dengan jumlah 21 di tahun 2023 menjadi dua di tahun 2024.

Secara keseluruhan, terjadinya perubahan jumlah kegiatan urban farming memberikan petunjuk terkait perkembangan pertanian perkotaan di Jakarta. Secara lebih lanjut, menunjukkan kecenderungan yang bersifat dinamis dan tidak merata di seluruh wilayah. Sementara itu, terdapat wilayah yang menunjukkan penurunan signifikan dan terdapat wilayah yang mengalami peningkatan. Pola tersebut memberikan gambaran bahwa, keberlanjutan urban farming sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat serta dukungan kebijakan. Sementara itu, dukungan dari kapasitas ruang yang tersedia turut memberikan pengaruh.

Setelah mengetahui dinamika perkembangan urban farming di berbagai wilayah Jakarta, penting untuk mengetahui terkait bagaimana aktivitas pertanian yang tercermin dalam angka produksi secara keseluruhan. Capaian produksi dipengaruhi oleh perubahan jumlah kegiatan budidaya. Adanya

persentase dari peningkatan produksi pertanian setiap tahun menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas program, tingkat partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan kegiatan pertanian di perkotaan. Pemahaman dari perubahan persentase tersebut, bisa melihat apakah tren produksi selaras dengan aktivitas pertanian yang berkembang di lapangan.

Gambar 3.36. Persentase Peningkatan Produksi Pertanian DKI Jakarta Tahun 2023-2024



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

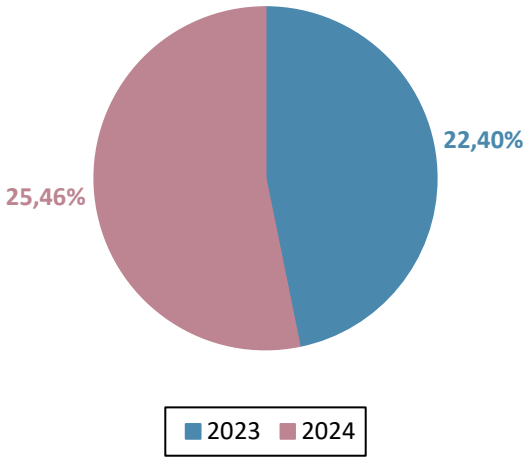
Data di atas menggambarkan bahwa, persentase peningkatan produksi pertanian di DKI Jakarta mengalami penurunan yang signifikan. pada 2023, tercatat terdapat capaian produksi sebesar 24,85%. Angka tersebut menandakan geliat pertanian perkotaan yang cukup kuat. Besaran angka tersebut dapat disebabkan oleh tingginya aktivitas kelompok tani serta banyaknya kegiatan budidaya pada tahun tersebut, termasuk urban farming yang masih aktif di berbagai wilayah. Sementara itu pada 2024, persentase peningkatan produksi terjadi penurunan tajam yaitu sebesar 5,12%. Penurunan tersebut sejalan dengan data sebelumnya yang menunjukkan menurunnya jumlah kegiatan urban farming di sebagian besar wilayah Jakarta. Kondisi tersebut menggambarkan aktivitas pertanian yang berkurang sehingga berdampak langsung pada capaian produksi. Selain itu juga bisa karena faktor lain, seperti ketersediaan lahan, perubahan program, maupun kendala lingkungan yang memengaruhi hasil produksi.

Secara keseluruhan, kedua tahun tersebut apabila diperbandingkan memberikan gambaran performa produksi pertanian di Jakarta dipengaruhi oleh dinamika sektor pertanian perkotaan itu sendiri. Apabila partisipasi masyarakat dan aktivitas kelompok tani mengalami peningkatan, capaian produksi cenderung mengalami kenaikan. Sementara itu, apabila aktivitas mengalami penurunan, dampaknya terlihat langsung dalam persentase peningkatan yang lebih kecil. Pola tersebut sudah menjadi dasar terhadap evaluasi untuk memperkuat kembali kegiatan pertanian kota agar peningkatan produksi dapat kembali stabil di tahun kedepannya.

Setelah tersajinya data terkait persentase peningkatan produksi pertanian yang mengalami perubahan dari tahun 2023 ke 2024, sektor lain yang perlu diperhatikan adalah sektor peternakan. Hal tersebut merupakan bagian penting dalam ketahanan pangan daerah. Produksi peternakan memiliki dinamika yang berbeda dari pertanian tanaman, terutama karena dipengaruhi oleh faktor seperti pakan,

kesehatan hewan, dan kapasitas kandang. Memantau persentase peningkatan produksi dapat memberikan gambaran mengenai stabilitas sektor peternakan serta efektivitas program pembinaan yang dijalankan. Sehingga dengan demikian, dapat melihat apakah sektor peternakan berada pada jalur pertumbuhan yang positif atau memerlukan penguatan secara lebih lanjut.

Gambar 3.37. Persentase Peningkatan Produksi Peternakan DKI Jakarta Tahun 2023-2024



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Data menunjukkan bahwa produksi peternakan di DKI Jakarta mengalami tren peningkatan yang positif pada dua tahun terakhir. Pada 2023, persentase peningkatan produksinya mencapai 22,40%, sebuah capaian yang menunjukkan bahwa sektor peternakan masih berjalan stabil meskipun menghadapi berbagai tantangan perkotaan. Peningkatan ini menandakan bahwa ketersediaan sarana, pemeliharaan, dan manajemen peternakan masih berada pada kondisi yang cukup baik.

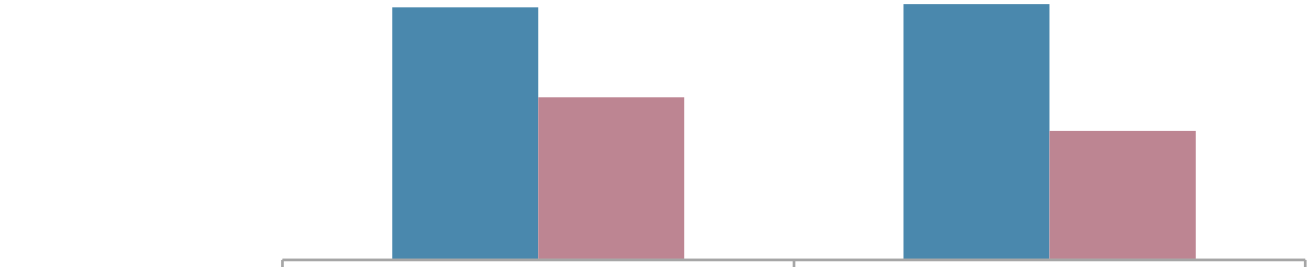
Pada tahun 2024, persentase peningkatan produksi mengalami kenaikan menjadi 25,46%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa sektor peternakan tidak hanya mempertahankan performanya, tetapi bahkan memperbaikinya. Perbaikan ini dapat berasal dari penguatan program pembinaan peternak, peningkatan kualitas pakan, kondisi kesehatan hewan yang lebih baik, atau bertambahnya jumlah peternak aktif yang memperluas kapasitas produksinya. Perubahan positif ini juga mencerminkan adanya adaptasi yang baik terhadap kebutuhan pasar dan struktur kota.

Secara keseluruhan, tren peningkatan dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor peternakan di Jakarta memiliki ketahanan yang cukup baik dan terus mengalami perkembangan. Stabilitas ini penting untuk menjaga ketersediaan produk peternakan bagi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem usaha kecil di bidang peternakan. Dengan perkembangan yang konsisten seperti ini, sektor peternakan dapat menjadi salah satu penopang penting dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah perkotaan.

Setelah tersedianya data peningkatan produksi pada sektor peternakan, penting untuk melakukan pembahasan terkait benih terutama pada benih padi. Guna menjaga keberlanjutan budidaya tanaman pangan, produksi benih merupakan elemen kunci. Secara lebih lanjut, kualitas dan ketersediaan benih turut menentukan hasil panen di masa yang akan datang. Produksi benih padi di Jakarta, dilakukan

melalui kebun bibit. Sehingga dengan demikian, perubahan produksi dapat menggambarkan efisiensi terhadap pengelolaan dan kapasitas produksi benih. Adanya pemahaman dari pergerakan angka produksi, dapat menggambarkan seberapa stabil sektor perbenihan berjalan di tengah dinamika pertanian perkotaan.

Gambar 3.38. Jumlah Hasil Produksi Benih Padi di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	2023	2024
Kebun bibit sawah abadi	29.537	29.894
Kebun bibit ujung menteng	19.000	15.077

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Data di atas mengenai jumlah hasil produksi benih padi di DKI Jakarta Tahun 2023-2024. Data pada tahun 2023-2024 menggambarkan produksi benih padi di Kebun Bibit Sawah Abadi cenderung stabil. Kenaikan terjadi dari 29.537 di tahun 2023 menjadi 29.894 di tahun 2024. Konsistensi dalam kegiatan produksi benih dan pengelolaan kebun tergambarkan melalui data tersebut. Terjadinya stabilitas tersebut turut menunjukkan kapasitas produksi yang masih terjaga meski lahan pertanian cenderung terbatas. Sementara itu, Kebun Bibit Ujung Menteng menunjukkan kondisi yang berbeda. Pada tahun 2019 benih yang dihasilkan mencapai 19.000 dan mengalami penurunan menjadi 15.077 pada tahun berikutnya. Terjadinya penurunan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari luas lahan efektif yang berkurang, penyesuaian jenis varietas yang ditanam, atau perubahan kondisi lingkungan. Meski terjadi penurunan, Kebun Bibit Ujung Menteng tetap memiliki peran penting sebagai penyediaan benih padi di Jakarta. Sehingga dengan demikian, sektor perbenihan padi di Jakarta masih perlu mendapatkan perhatian berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dari produksi benih padi di Sawah Abadi dan Ujung Menteng. Secara lebih lanjut, peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui optimalisasi lahan, perbaikan teknik perbenihan, dan penyesuaian varietas. Maka dengan demikian, keberlanjutan pertanian di Jakarta dapat tetap terjaga di tengah tantangan ruang perkotaan.

Setelah dilakukan pembahasan mengenai jumlah produksi benih padi yang berlokasi di kebun bibit sawah abadi dan kebun bibit ujung menteng, penting juga untuk melakukan peninjauan persentase luas lahan yang digunakan dalam proses produksi benih padi. Informasi terkait luas lahan dapat memberikan gambaran mengenai apakah kapasitas produksi benih mengalami perubahan akibat penyesuaian ruang, intensifikasi, atau efisiensi pengelolaan lahan. Pertanian perkotaan yang identik dengan keterbatasan lahan, persentase luas lahan menjadi indikator relevan guna memberikan pemahaman sejauh mana dapat mempertahankan upaya perbenihan. Sehingga dengan demikian, dapat dilakukan penilaian apakah kestabilan produksi benih memiliki kaitan erat dengan perubahan penggunaan lahan.

Gambar 3.39. Persentase Luas Lahan Produksi Benih Padi di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

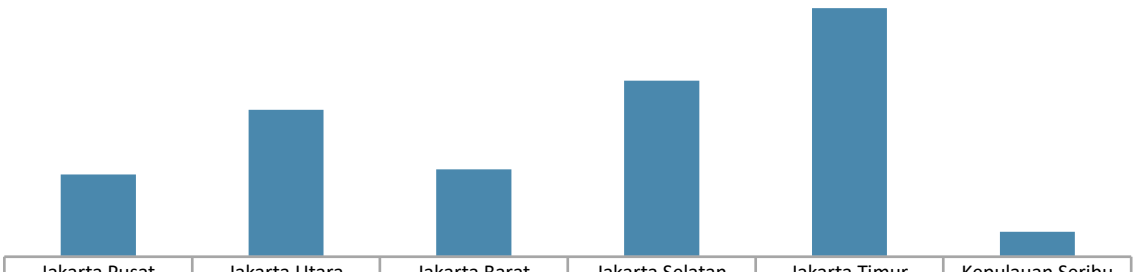


	2023	2024
Kebun bibit sawah abadi	3,00	3,00
Kebun bibit ujung menteng	1,70	1,70

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Data di atas memberikan informasi mengenai persentase luas lahan untuk produksi benih padi di Kebun Bibit Sawah Abadi menunjukkan angka yang stabil, yaitu sebesar 3,00% pada 2023 dan 2024. Konsistensi tersebut memberikan gambaran mengenai ruang produksi benih yang digunakan tidak menunjukkan adanya perubahan selama dua tahun berturut-turut. Maka dengan demikian, kestabilan produksi benih yang terjadi didukung oleh kondisi lahan. Pada sisi lain, kestabilan luas lahan produksi benih turut terjadi di Kebun Bibit Ujung Menteng. Pada data di atas menunjukkan angka sebesar 1,70% pada 2023 dan 2024. Persentase luas lahan jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan Kebun Bibit Sawah Abadi. Meski dengan demikian, ruang produksi tetap tersedia dan tidak mengalami pengurangan. Apabila di lihat kembali pada Gambar 3.36. Data Produksi Benih Padi bahwa, perubahan produksi benih padi di Jakarta tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh penyusutan atau penambahan lahan. Pengamatan yang dilakukan pada dua kebun bibit menunjukkan luas lahan yang stabil namun terdapat pergerakan ke arah yang berbeda mengenai hasil produksi. Sehingga dengan demikian, produktivitas benih bergantung pada faktor teknis dan operasional. Secara lebih lanjut dapat dilakukan evaluasi strategi budidaya agar hasil yang diperoleh dapat meningkat meski di lahan yang terbatas.Setelah dilakukan pengamatan mengenai kondisi penggunaan lahan dan produksi benih padi di Jakarta, selanjutnya penting juga untuk melakukan pengamatan mengenai bagaimana hasil produksi pertanian secara keseluruhan tersebar di setiap wilayah kota. Setiap wilayah mempunyai karakteristik ruang, potensi, serta skala aktivitas pertanian yang berbeda sehingga jumlah produksi yang dihasilkan turut bervariasi. Adanya perbandingan antarwilayah pada tahun berjalan, dapat mengetahui kontribusi pada masing-masing area guna memberikan dukungan pertanian perkotaan. Hal tersebut turut membantu melihat wilayah mana saja yang berpotensi dalam meningkatkan kapasitas produksi.

Gambar 3.40. Jumlah Produksi Pertanian menurut Wilayah DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jumlah Produksi	29,80	53,22	31,62	63,76	102,92	9,02

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

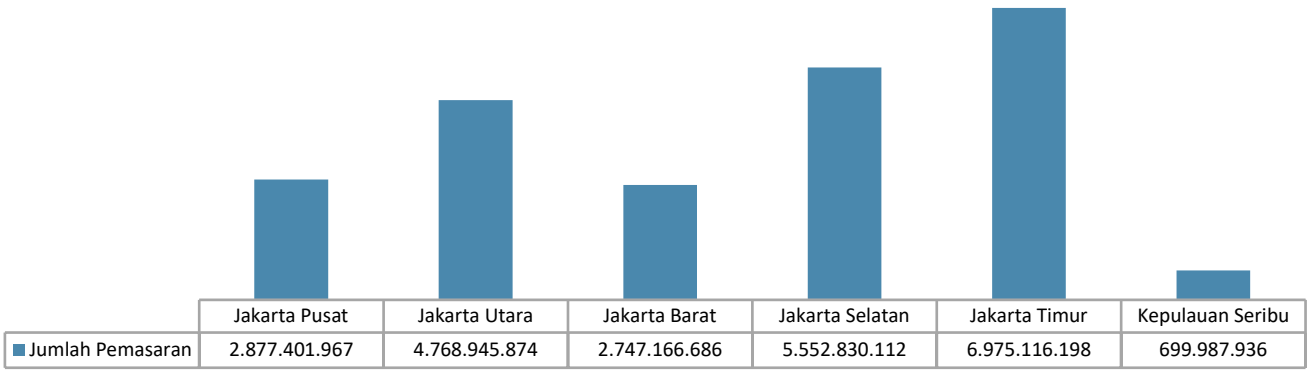
Data di atas menunjukkan bahwa, produksi produk pertanian tertinggi berada di Jakarta Timur mencapai 102,92. Angka tersebut melampaui wilayah lainnya serta memberikan indikasi bahwa Jakarta Timur memiliki kapasitas lahan, aktivitas budidaya, atau dukungan komunitas yang besar. Posisi kedua ditempati oleh Jakarta Selatan dengan produksi mencapai 63,76. Hal tersebut menggambarkan aktivitas pertanian yang cukup aktif. Secara lebih lanjut, kedua wilayah tersebut memiliki iklim urban farming dan budidaya komoditas pertanian yang cukup berkembang.

Produksi tingkat menengah berada pada Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Masing-masing mencatat 53,22 dan 31,62 yang menggambarkan adanya aktivitas pertanian yang stabil meski tidak sebesar wilayah selatan dan timur. Selanjutnya, Jakarta Pusat terdapat 29,80 dan Kepulauan Seribu sebesar 9,02. Angka produksi di Kepulauan Seribu menunjukkan angka terendah apabila dibandingkan dengan wilayah lain. Hal tersebut turut dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang berbentuk kepulauan yang banyak digunakan untuk aktivitas pesisir.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, sebaran produksi pertanian tahun 2024 menunjukkan kapasitas pertanian perkotaan yang tidak merata. Selain itu, turut dipengaruhi kondisi geografis serta ketersediaan ruang. Jakarta Timur dan Jakarta Selatan memiliki ruang yang lebih luas daripada wilayah lain. Hal tersebut menunjukkan adanya kemampuan wilayah dalam menyumbang produksi yang lebih besar. Gambaran tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan komunitas untuk dapat melakukan optimalisasi wilayah mengenai potensi yang dihasilkan.

Setelah melihat data mengenai sebaran produksi pertanian di berbagai wilayah Jakarta, secara lebih lanjut penting untuk mengetahui bagaimana hasil produksi mampu diserap pasar. Jumlah pemasaran produksi pertanian merupakan indikator penting yang menunjukkan seberapa besar komoditas dapat diterima, dimanfaatkan, dan bernilai ekonomi di masyarakat. Angka pemasaran tersebut turut memberikan gambaran mengenai efektivitas rantai distribusi, kapasitas pelaku usaha, serta permintaan konsumen di setiap wilayah. Perputaran ekonomi pertanian paling kuat dapat dilihat dengan memahami pola pemasarannya. Selain itu, potensi pengembangan dapat diketahui dengan lebih mudah.

Gambar 3.41. Jumlah Pemasaran Produk Pertanian menurut Wilayah DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jumlah Pemasaran	2.877.401.967	4.768.945.874	2.747.166.686	5.552.830.112	6.975.116.198	699.987.936

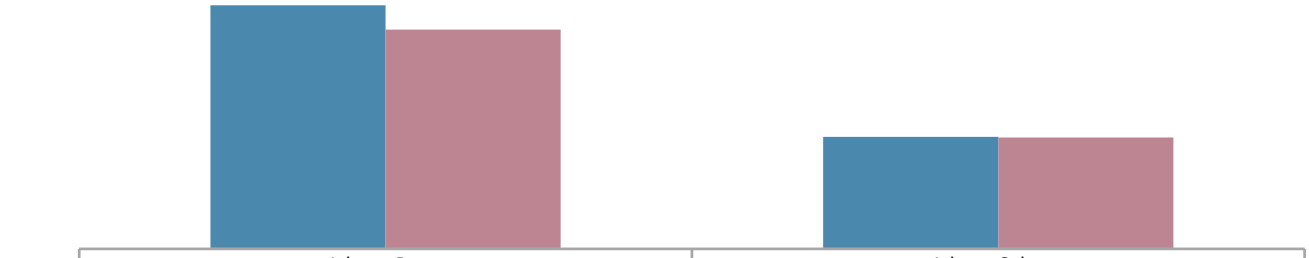
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data mengenai jumlah pemasaran produk pertanian menurut wilayah DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan bahwa, jumlah pemasaran tertinggi diduduki oleh Jakarta Timur, yaitu 6.975.116.198. Posisi berikutnya adalah Jakarta Selatan dengan pemasaran mencapai 5.552.830.112. Sementara itu, Jakarta Utara mencatat jumlah pemasaran yang cukup tinggi, yaitu 4.768.945.874. Secara lebih lanjut, ketiga wilayah tersebut memiliki aktivitas pemasaran yang kuat dan daya serap pasar yang baik pada komoditas pertanian.

Pada posisi lain, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat mencatat pemasaran yang jauh lebih rendah. Masing-masing sebesar 2.747.166.686 dan 2.877.401.967. Meski skala produksi tidak sebesar wilayah lain, angka tersebut masih menunjukkan aktivitas pemasaran yang aktif. Posisi paling rendah berikutnya berada di Kepulauan Seribu, yaitu dengan jumlah 699.987.936. Terjadinya kondisi tersebut sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan lahan atau akses distribusi. Meski memiliki skala yang kecil, produk pertanian lokal masih memiliki ruang pemasaran. Adanya kondisi tersebut menegaskan bahwa, wilayah kepulauan memiliki potensi khusus yang dapat dikembangkan melalui pendekatan yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas memperlihatkan bahwa, performa ekonomi pertanian perkotaan yang ada di Jakarta menunjukkan variasi antarwilayah. Tingginya angka pemasaran dipengaruhi oleh tingkat produksi di suatu wilayah. Pola tersebut dapat dijadikan dasar dalam merumuskan strategi penguatan distribusi, peningkatan kapasitas produksi, dan pemanfaatan pasar lokal agar seluruh wilayah memiliki peran optimal dalam rantai ekonomi pertanian di Jakarta.

Gambar 3.42. (529) Jumlah Omzet Penjualan Hortikultura menurut Lokasi di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Barat	Jakarta Selatan
2024	60.865.205.550	28.003.220.000
2025	54.749.925.000	27.799.015.000

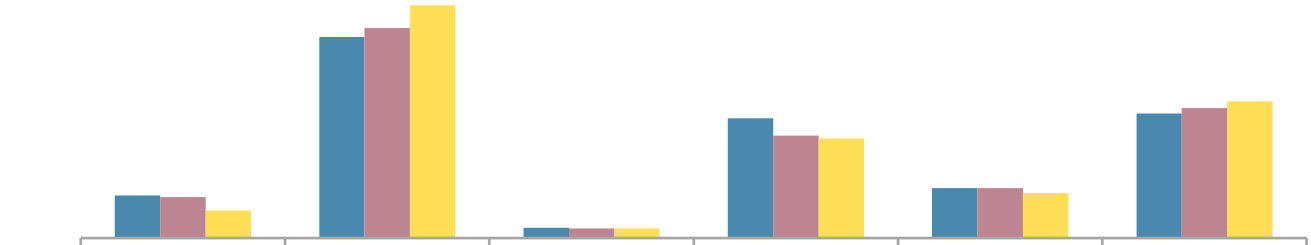
Sumber: Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian

Kinerja omzet penjualan hortikultura di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2024 hingga 2025 memperlihatkan penurunan tren pada sentra pemasaran utama, meskipun terdapat pertumbuhan positif pada segmen pembibitan. Pasar Bunga Rawabelong sebagai kontributor terbesar mengalami penurunan omzet sebesar 10,05%, menyusut dari Rp60,86 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp54,75 miliar pada tahun 2025. Tren penurunan tipis juga dialami oleh Taman Anggrek Ragunan yang mencatatkan penurunan sebesar 0,86%, bergerak dari Rp26,60 miliar menjadi Rp26,37 miliar.

Sebaliknya, kinerja positif justru ditunjukkan oleh Penangkar Bibit Ragunan yang berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,71%, meningkat dari Rp1,40 miliar menjadi Rp1,43 miliar, yang mengindikasikan adanya peningkatan minat spesifik masyarakat terhadap aktivitas pembibitan tanaman di tengah tekanan permintaan pada pasar bunga potong dan tanaman hias jadi.

3.4.2. Kelompok Tani dan *Urban Farming*

Gambar 3.43. Jumlah peternak menurut Jenis Ternak di DKI Jakarta Tahun 2023-2025



	Itik	Kambing	Kerbau	Kuda	Sapi Perah	Sapi Potong
2023	63	299	15	178	74	185
2024	61	312	14	152	74	193
2025	41	346	14	148	67	203

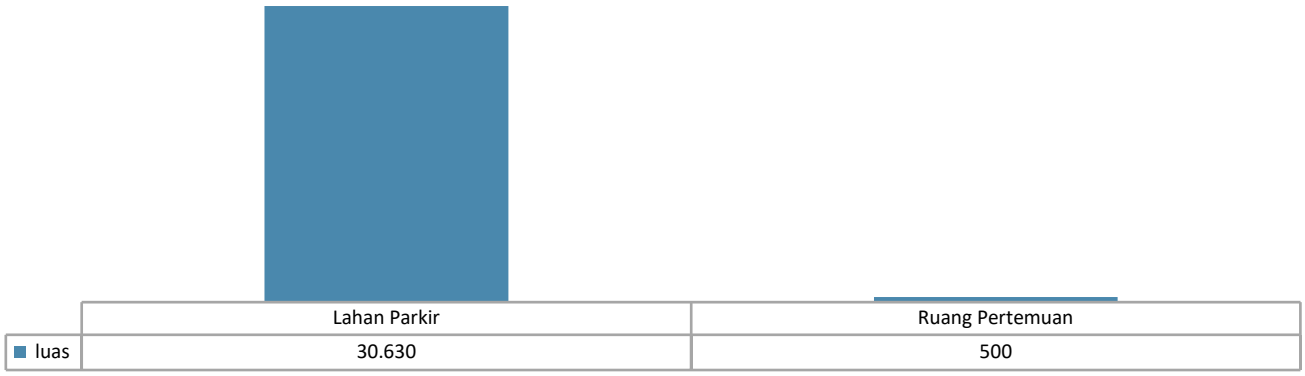
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Jumlah peternak berdasarkan jenis komoditas ternak di Provinsi DKI Jakarta pada rentang waktu 2023 hingga 2025 memperlihatkan tren yang bervariasi, di mana tren ekspansi terus berlanjut pada komoditas ternak ruminansia potong di tengah gelombang penyusutan populasi peternak pada komoditas lainnya. Peternak Kambing tercatat tidak hanya mendominasi populasi secara keseluruhan, tetapi juga mencatatkan akselerasi pertumbuhan tertinggi sebesar 10,90% pada tahun terakhir, bergerak naik dari 312 orang pada tahun 2024 menjadi 346 orang pada tahun 2025. Tren pertumbuhan yang konsisten dan sejalan juga dialami oleh peternak Sapi Potong yang meningkat sebesar 5,18%, bertambah dari 193 orang menjadi 203 orang. Berbanding terbalik dengan capaian positif tersebut, sektor peternakan unggas khususnya Itik mengalami kontraksi paling ekstrem dengan penurunan jumlah peternak mencapai 32,79%, menyusut drastis dari 61 orang menjadi hanya 41 orang. Penurunan kinerja juga mulai melanda peternak Sapi Perah yang pada dua tahun sebelumnya stabil, kini terkoreksi sebesar 9,46% menjadi 67 orang, diikuti oleh peternak Kuda yang terus menyusut perlahan sebesar 2,63% menjadi 148 orang.

3.4.3. Agrowisata

Setelah dilakukan pembahasan mengenai pemasaran produk pertanian yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta, selanjutnya penting untuk melihat mengenai dukungan fasilitas yang tersedia di kebun bibit dan kawasan agrowisata. Ketersediaan fasilitas berupa lahan parkir dan ruang pertemuan menjadi hal penting dalam memberikan dukungan untuk terlaksananya kegiatan edukasi, pembinaan, hingga kunjungan masyarakat. Adanya peninjauan mengenai luas fasilitas yang ada, secara lebih lanjut dapat memberikan gambaran mengenai kesiapan infrastruktur pendukung dalam mendorong kegiatan pertanian kota dan agrowisata secara lebih masif.

Gambar 3.44. Data Kebun Bibit dan Agrowisata



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data mengenai fasilitas lahan parkir di kebun bibit dan kawasan agrowisata memiliki luas yang sangat besar, yaitu 30.630. Besaran lahan tersebut menandakan bahwa terdapat kesiapan dalam menampung jumlah pengunjung. Secara lebih lanjut, lahan parkir yang luas mendukung kelancaran aktivitas di lapangan. Maka dengan demikian, masyarakat dapat mengakses fasilitas pertanian dengan lebih nyaman dan teratur.

Selain lahan parkir, turut tersedia data ruang pertemuan sebesar 500. Angka tersebut jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan luas lahan parkir. Meski dengan demikian, keberadaan ruang pertemuan tetap penting karena berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, rapat komunitas, maupun diskusi teknis terkait pengeloalan kebun. Kapasitas ruang pertemuan yang memadai dapat membantu dalam memperkuat proses edukasi dan interaksi baik antar petugas, komunitas, serta masyarakat atau pengunjung.

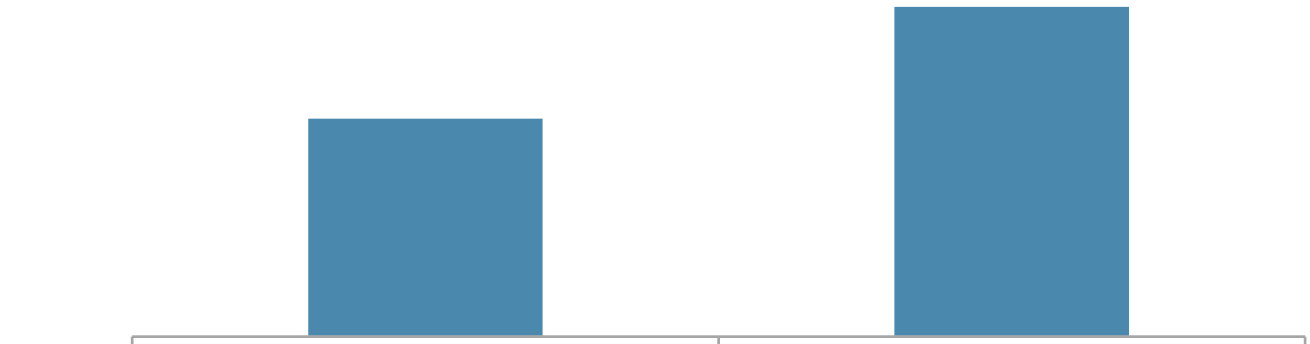
Berdasarkan uraian di atas bahwa, kombinasi fasilitas memperlihatkan kawasan tersebut tidak hanya berfokus pada produksi dan pembibitan. Secara lebih lanjut turut berfokus pada ruang interaksi publik. Ruang interaksi publik memberikan dukungan dalam pengembangan pertanian perkotaan secara komprehensif.

3.5. Perdagangan

3.5.1. PDRB Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan memegang peranan penting dalam struktur perekonomian di DKI Jakarta. Sektor ini menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi dan distribusi barang serta jasa. Sebagai pusat bisnis dan konsumsi, Jakarta berperan sebagai hub perdagangan skala lokal, nasional, maupun internasional, yang secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, sektor ini berperan strategis dalam menjaga kelancaran arus pasokan kebutuhan masyarakat serta mendukung stabilitas harga. Dengan dinamika ekonomi perkotaan yang terus berkembang, sektor perdagangan menjadi elemen kunci dalam memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi DKI Jakarta.

Gambar 3.45. Persentase Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan Tahun 2023-2024

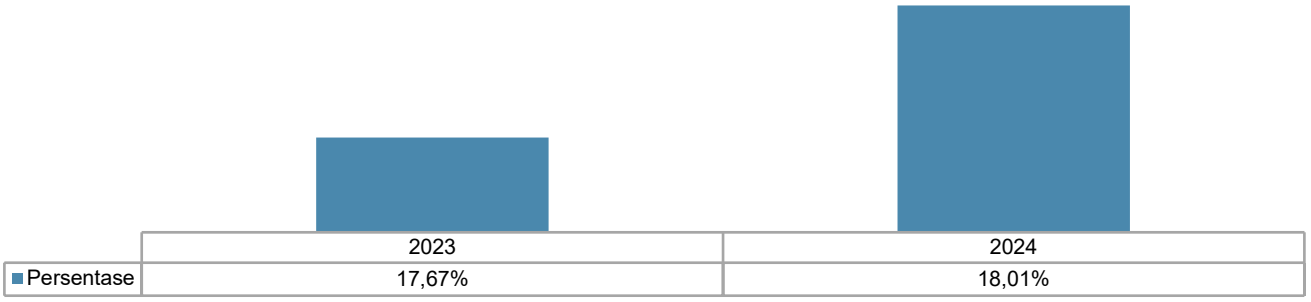


	2023	2024
Persentase	4,52%	6,87%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2023–2024 menunjukkan tren kinerja positif dan menggembirakan. Pada tahun 2024, persentase pertumbuhan sektor ini tercatat mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebersar 2,35% poin atau laju pertumbuhan sebesar 51,99% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan semakin kuatnya momentum pemulihan aktivitas perdagangan serta tingginya permintaan pasar domestik yang menjadi katalisator utama penggerak roda perekonomian ibu kota pada periode tersebut.

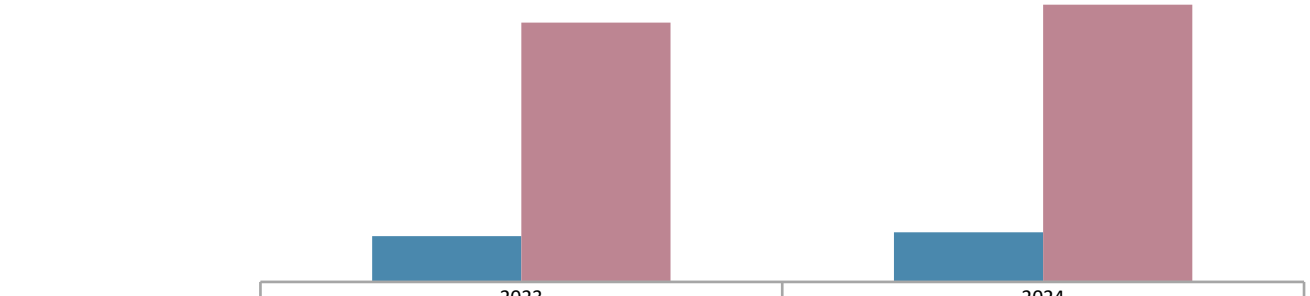
Gambar 3.46. Persentase Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan Tahun 2023-2024



	2023	2024
Persentase	17,67%	18,01%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Gambar 3.47. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan Tahun 2023-2024

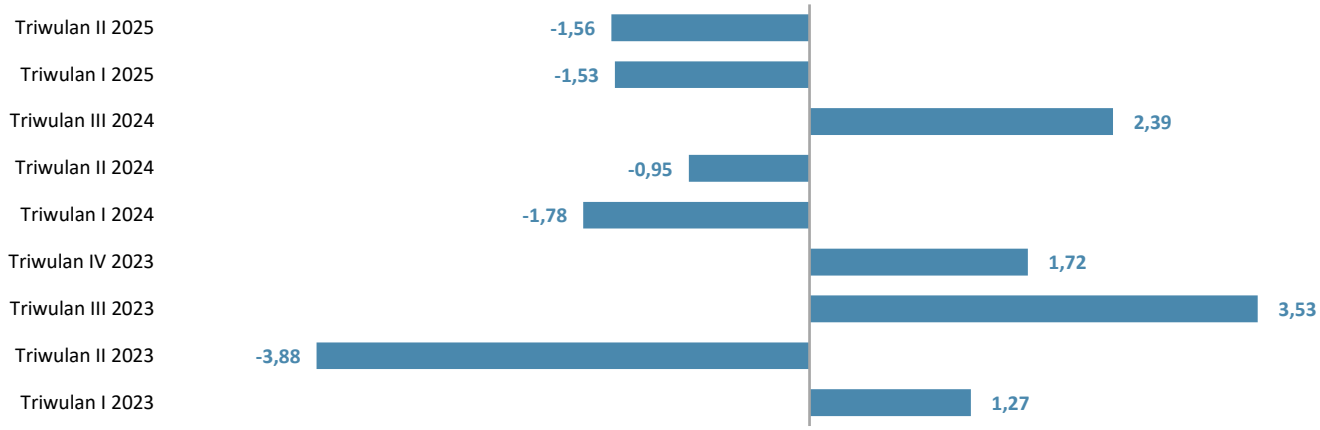


	2023	2024
PDRB Sektor Perdagangan	608.324.720	662.470.000
PDRB	3.442.980.931	3.679.360.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Peran sektor perdagangan dalam menopang struktur perekonomian Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren penguatan yang positif pada periode 2023–2024, ditandai dengan peningkatan kontribusi baik secara persentase maupun nilai nominal. Pada tahun 2023, proporsi kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat 0,34% menjadi 18,01% pada tahun 2024. Peningkatan kontribusi ini didorong oleh laju pertumbuhan nominal PDRB Sektor Perdagangan yang progresif, yakni tumbuh sebesar 8,90% dari Rp608,32 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp662.47 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan kinerja sektor ini tercatat melampaui laju pertumbuhan PDRB total Jakarta yang meningkat sebesar 6,87%. yang menegaskan posisi strategis sektor perdagangan sebagai salah satu mesin utama akselerasi pertumbuhan ekonomi ibu kota yang tumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata sektor lainnya secara agregat.

Gambar 3.48. Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

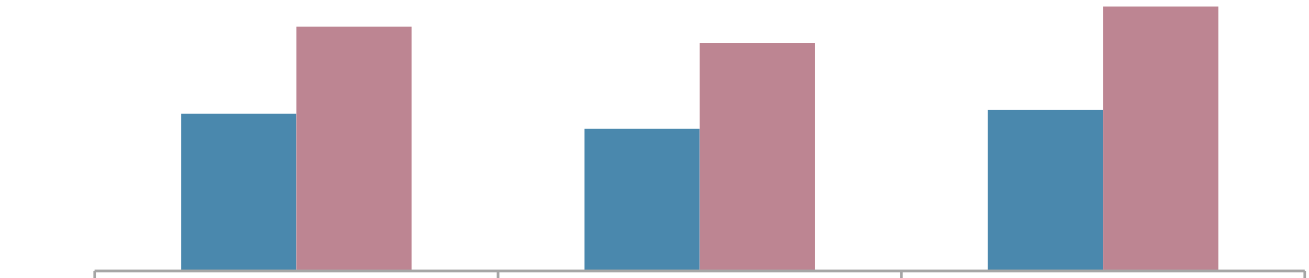
Pada sektor perindustrian, dinamika pertumbuhan sektor perindustrian di Provinsi DKI Jakarta sepanjang periode Triwulan I 2023 hingga Triwulan II 2025 memperlihatkan tren yang fluktuatif dengan pola kontraksi dan ekspansi yang bergantian secara tajam. Pada tahun 2023, sektor ini sempat mengalami tekanan terdalam pada Triwulan II dengan pertumbuhan negatif sebesar -3,88%, namun berhasil bangkit mencatatkan pemulihan pada Triwulan III hingga mencapai puncak kinerja tertinggi periode ini di level 3,53%. Sayangnya, stabilitas pertumbuhan positif tersebut tidak bertahan lama karena memasuki tahun 2024, sektor industri kembali masuk ke zona kontraksi selama dua triwulan berturut-turut, yakni -1,78% pada Triwulan I dan -0,95% pada Triwulan II. Meskipun sempat terjadi *rebound* pada Triwulan III 2024 dengan pertumbuhan 2,39%, tren pelemahan kembali berulang pada awal tahun 2025 di mana kinerja sektor perindustrian kembali terkontraksi di kisaran -1,53% pada Triwulan I dan berlanjut menjadi -1,56% pada Triwulan II.



3.5.2. Neraca Perdagangan Luar Negeri (Ekspor-Impor)

Dalam struktur perekonomian terbuka, neraca perdagangan atau net ekspor menjadi salah satu indikator fundamental makro ekonomi suatu negara . Neraca perdagangan sendiri merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor dalam periode tertentu. Kegiatan ekspor maupun impor memiliki peran penting dalam perekonomian. Beberapa manfaat utama dari ekspor di antaranya memperluas pasar, menambah devisa negara, serta memperluas lapangan kerja. Di sisi lain, selain untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh dalam negeri, transfer teknologi dan pemenuhan bahan baku untuk keperluan produksi dalam negeri yang didapatkan dari impor dapat memberikan nilai tambah *(added value)* bagi perekonomian. Lebih lanjut, Arshad (2005:163) menjelaskan bahwa kecenderungan impor yang besar tidak sepenuhnya buruk bagi suatu negara atau daerah karena akan merangsang kegiatan investasi, apabila barang yang diimpor merupakan barang modal, barang mentah, dan barang setengah jadi untuk keperluan perindustrian . Di sisi lain, kegiatan impor juga akan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Oleh karenanya kegiatan impor dan ekspor harus berjalan dengan seimbang, sebagai contoh dalam pengembangan industri substitusi impor dalam negeri harus sejalan dengan penggalakan ekspor produk yang dihasilkan oleh industri dalam negeri.

Gambar 3.49. Data Ekspor Bersih Perdagangan

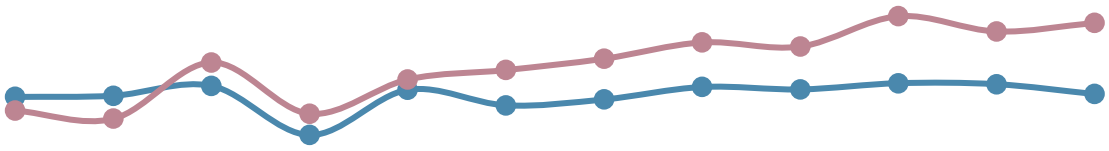


	2022	2023	2024
Ekspor	64.163,45	58.038,51	65.741,21
Impor	99.795,03	93.073,51	109.891,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Kinerja perdagangan luar negeri Provinsi DKI Jakarta sepanjang periode 2022 hingga 2024 memperlihatkan pola pemulihan yang dinamis, di mana aktivitas ekspor dan impor sempat mengalami kontraksi serentak pada tahun 2023 sebelum akhirnya bangkit mencatatkan pertumbuhan positif yang signifikan pada tahun 2024. Data ekspor dan impor menunjukkan bahwa setelah nilai ekspor terkoreksi turun sebesar 9,55% pada tahun 2023, kinerja ekspor berhasil *rebound* pada tahun 2024 dengan kenaikan sebesar 13,27%, bergerak dari USD58.038,51 juta menjadi USD65.741,21 juta. Tren serupa namun dengan intensitas pertumbuhan yang lebih menguat terjadi pada sisi impor, yang setelah menyusut 6,74% pada tahun 2023, melonjak naik sebesar 18,07% pada tahun 2024 mencapai nilai tertinggi USD109.891,93. Meskipun terjadi pemulihan kinerja pada kedua sisi, struktur neraca perdagangan Jakarta secara konsisten mencatatkan defisit di mana nilai impor selalu mendominasi nilai ekspor, dengan kesenjangan yang semakin melebar pada tahun 2024 akibat laju pertumbuhan impor yang lebih cepat dibandingkan ekspor.

Gambar 3.50. Nilai Ekspor Nonmigas Provinsi DKI Jakarta

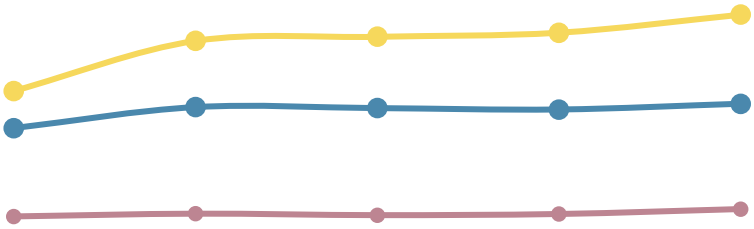


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2023	912,05	919,91	984,06	663,05	958,74	856,99	895,52	976,94	961,12	1.001,6	995,04	930,63
2024	823,50	769,94	1.137,6	802,00	1.026,2	1.087,6	1.161,6	1.268,1	1.240,8	1.439,1	1.339,6	1.395,5

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dinamika nilai ekspor nonmigas Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2023 hingga 2024 memperlihatkan pola pemulihan yang kuat, di mana kinerja tahun 2024 yang sempat tertinggal pada awal tahun berhasil membalikkan keadaan dengan tren penguatan yang konsisten sejak kuartal kedua. Data bulanan menunjukkan bahwa pada periode Januari dan Februari, nilai ekspor 2024 masih berada di bawah capaian 2023, namun momentum positif mulai terbentuk secara solid pasca-bulan April di mana kurva 2024 terus menanjak menjauhi kinerja tahun sebelumnya. Puncak kinerja tahun 2024 tercatat pada bulan Oktober dengan nilai USD1.439,17 juta, yang merepresentasikan lonjakan pertumbuhan sebesar 43,67% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang hanya mencapai 1.001,68. Tren positif ini terus terjaga hingga akhir tahun, di mana bulan Desember 2024 ditutup dengan angka USD1.395,54 juta, tumbuh mengesankan sebesar 49,96% dibandingkan Desember 2023. Hal ini menandakan stabilitas permintaan pasar ekspor nonmigas yang semakin kokoh pada paruh kedua tahun 2024.

Gambar 3.51. Jumlah Ekspor dan Impor Barang DKI Jakarta, 2020-2024 (Juta USD)



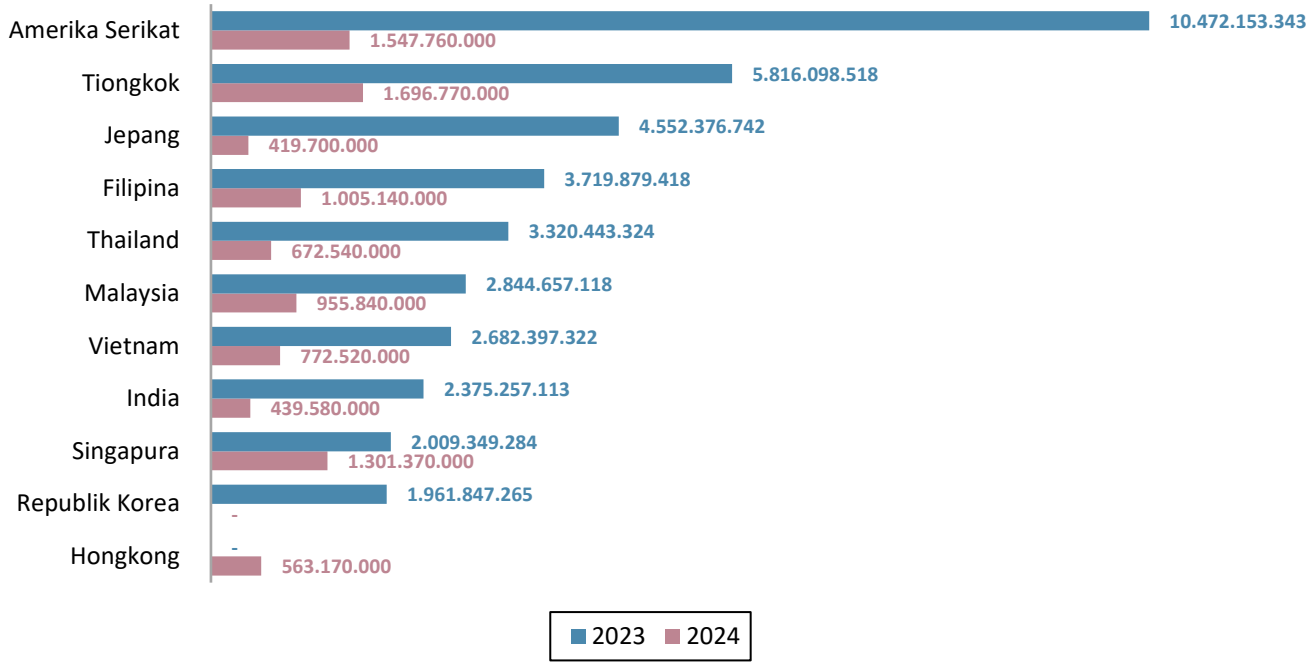
	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor Melalui DKI Jakarta	53.675,01	64.068,41	63.563,47	62.886,56	65.741,21
Ekspor Produk DKI Jakarta	9.871,71	11.227,94	10.501,23	11.076,45	13.534,67
Impor Produk Melalui Jakarta	72.037,16	96.899,38	98.920,75	100.956,77	109.891,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Perkembangan arus perdagangan barang di Provinsi DKI Jakarta sepanjang periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif pada seluruh indikator ekspor dan impor, khususnya pada tahun terakhir pengamatan. Nilai Ekspor Melalui DKI Jakarta berhasil mencatatkan pemulihan kinerja pada tahun 2024 dengan capaian sebesar USD 65,74 miliar, tumbuh 4,54% dibandingkan tahun 2023 yang sebelumnya sempat

terkoreksi di angka USD 62,88 miliar. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada Ekspor Produk Asli DKI Jakarta yang melonjak sebesar 22,19%, bergerak dari USD 1,08 miliar pada tahun 2023 menjadi USD 13,53 miliar pada tahun 2024, menandakan peningkatan daya saing komoditas lokal di pasar global. Di sisi lain, aktivitas Impor Produk Melalui Jakarta pada tahun 2020 terus menunjukkan dominasi nilai yang konsisten meningkat setiap tahunnya tanpa mengalami fluktuasi penurunan sejak 2020, nilai impor menembus angka USD 109.89 atau tumbuh 8,85% dari capaian tahun sebelumnya, yang sekaligus memperlebar selisih neraca perdagangan karena nilai impor tersebut jauh melampaui total nilai ekspor.

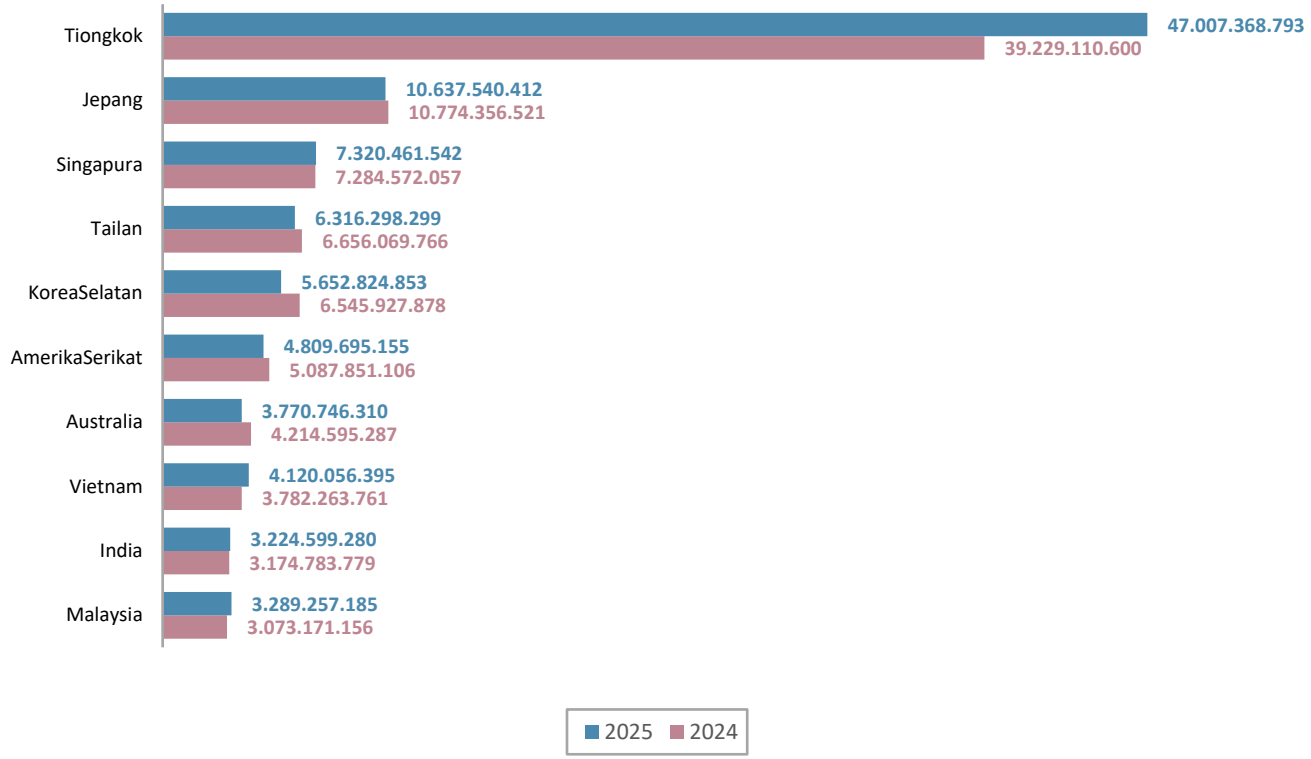
Gambar 3.52. 10 (Sepuluh) Negara Tujuan Ekspor Tebesar



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

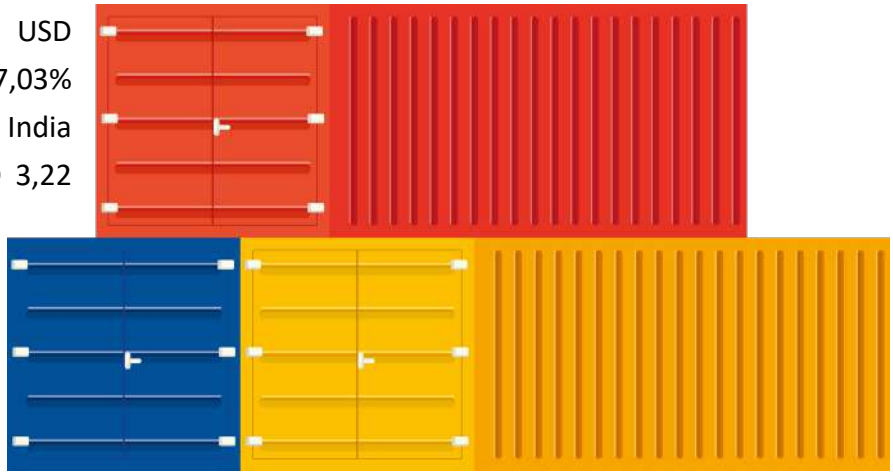
Pada periode 2023–2024 terjadi pergeseran struktur mitra dagang utama DKI Jakarta yang disertai dengan kontraksi nilai Free on Board (FOB) yang signifikan di hampir seluruh negara tujuan ekspor. Amerika Serikat yang pada tahun 2023 mendominasi secara sebagai tujuan ekspor terbesar dengan nilai mencapai USD 10,47 miliar, mengalami penurunan drastis sebesar 85,22% menjadi USD 1,55 miliar pada tahun 2024. Akibat penurunan tajam tersebut, posisi puncak negara tujuan ekspor pada tahun 2024 bergeser kepada Tiongkok dengan nilai realisasi sebesar USD 1,69 miliar, meskipun angka ini juga mencerminkan koreksi negatif sebesar 70,83% jika dibandingkan dengan capaian Tiongkok pada tahun sebelumnya yang sebesar USD 5,82 miliar. Tren perlambatan nilai ekspor juga dialami oleh mitra strategis lainnya di kawasan Asia, seperti Jepang yang menyusut tajam 90,78% menjadi USD 419,7 juta, serta Singapura yang terkoreksi sebesar 35,23% menjadi USD 1,30 miliar, yang secara keseluruhan mengindikasikan adanya volatilitas permintaan global atau perubahan pola rantai pasok yang mempengaruhi volume perdagangan ke negara-negara mitra utama secara masif pada periode tersebut.

Gambar 3.53. 10 Negara Pengimpor Terbesar menurut Nilai FOB (USD) Tahun 2025

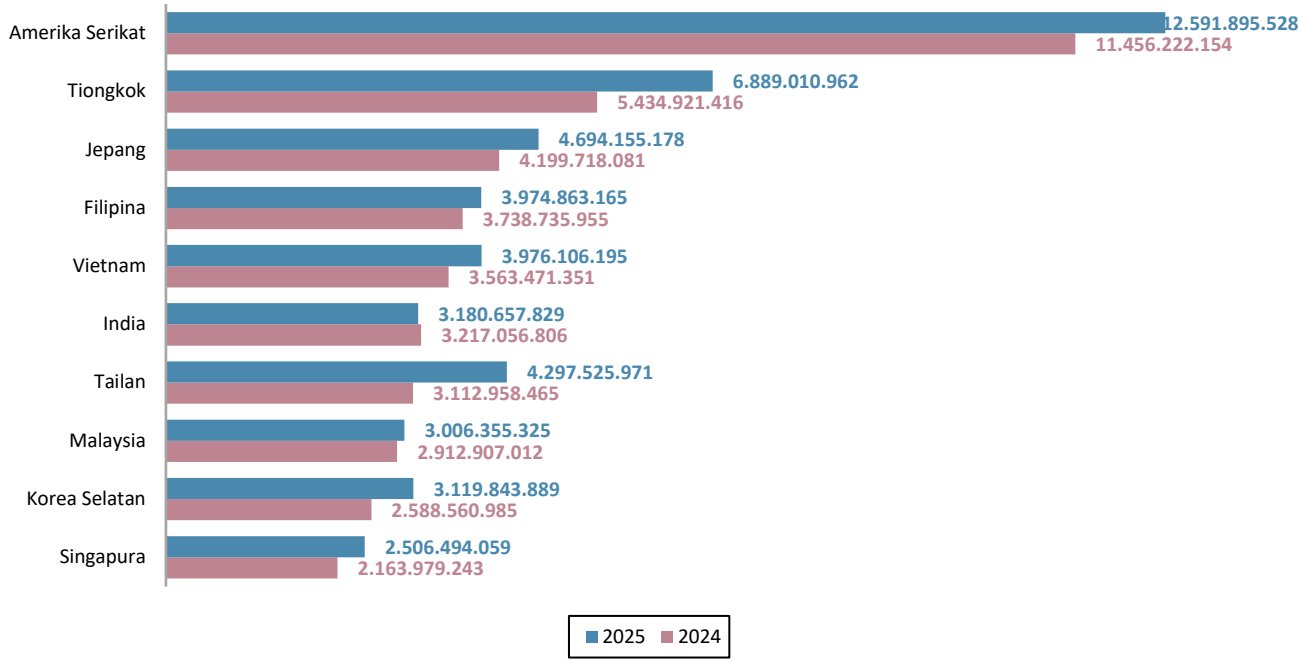


Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Struktur negara asal impor terbesar berdasarkan nilai Free on Board (FOB) yang masuk melalui DKI Jakarta pada periode 2024 hingga 2025 memperlihatkan dominasi Tiongkok sebagai mitra dagang utama dengan tren pertumbuhan yang sangat ekspansif. Nilai impor dari Tiongkok tercatat mengalami lonjakan signifikan sebesar 19,83%, bergerak naik dari USD 39,23 miliar pada tahun 2024 menjadi USD 47,01 miliar pada tahun 2025. Selanjutnya, Jepang yang berada di peringkat kedua dengan nilai USD 10,64 miliar, justru mengalami penurunan kinerja tipis sebesar 1,27%. Tren penurunan nilai impor juga dialami oleh sejumlah mitra dagang strategis lainnya, di mana Korea Selatan mencatatkan penurunan terdalam sebesar 13,64% menjadi USD 5,65 miliar, diikuti oleh Australia yang menyusut 10,53% menjadi 3,77 USD miliar, serta Amerika Serikat dan Thailand yang masing-masing terkoreksi sebesar 5,47% dan 5,10%. Di tengah pelemahan kinerja dari negara-negara maju tersebut, penguatan justru terlihat pada mitra kawasan Asia Tenggara dan Selatan, di mana Vietnam mencatatkan pertumbuhan impor sebesar 8,93% menjadi USD 4,12 miliar, Malaysia tumbuh 7,03% menjadi USD 3,29 miliar, dan India meningkat 1,57% menjadi USD 3,22 miliar, yang mengindikasikan adanya dinamika penguatan rantai pasok regional pada tahun 2025.



Gambar 3.54. 10 Negara Tujuan Ekspor Terbesar menurut Nilai FOB (USD) Tahun 2025

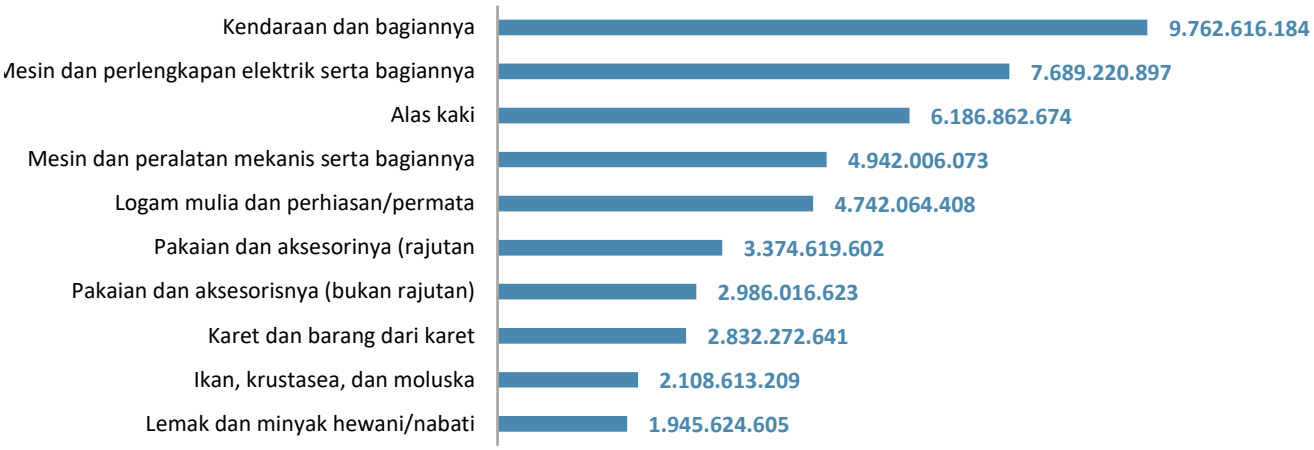


Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Ekspor Provinsi DKI Jakarta berdasarkan nilai Free on Board (FOB) pada periode 2024 hingga 2025 memperlihatkan tren pertumbuhan yang positif di hampir seluruh mitra dagang utama. Amerika Serikat secara konsisten mengukuhkan posisinya sebagai pasar ekspor terbesar dengan nilai realisasi menembus USD 12,59 miliar pada tahun 2025, mencatatkan pertumbuhan yang sebesar 9,91% dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di angka USD 11,45 miliar. Posisi kedua ditempati oleh Tiongkok yang menunjukkan kenaikan nilai ekspor sebesar 26,76%, bergerak naik dari USD 5,43 miliar menjadi USD 6,88 miliar. Pertumbuhan yang lebih tinggi secara persentase dicatatkan oleh Thailand yang nilai ekspornya meningkat cukup tajam sebesar 38,05% menjadi USD 4,29 miliar. Tren penguatan nilai ekspor ini juga diikuti oleh mitra dagang kawasan Asia lainnya secara merata, seperti Korea Selatan yang tumbuh 20,52% menjadi USD 3,11 miliar USD dan Singapura meningkat 15,83% menjadi USD 2,50 miliar. Di tengah dominasi tren pertumbuhan positif tersebut, India menjadi satu-satunya dalam daftar sepuluh besar yang mengalami kontraksi kinerja, di mana nilai ekspornya terkoreksi tipis sebesar 1,13%, menyusut dari USD 3,21 miliar pada tahun 2024 menjadi USD 3,18 miliar pada tahun 2025, yang secara keseluruhan tetap menegaskan semakin kuatnya daya saing dan penetrasi produk ekspor ibu kota di pasar global.



Gambar 3.55. Sepuluh Komoditas Utama Ekspor dengan Nilai FOB Tertinggi Tahun 2025



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Jika dilihat berdasarkan jenis komoditas, komoditas unggulan ekspor Provinsi DKI Jakarta berdasarkan nilai *Free on Board* (FOB) pada tahun 2025 memperlihatkan dominasi yang sangat kuat dari sektor industri manufaktur padat modal, khususnya otomotif dan elektronik. Komoditas Kendaraan dan bagiannya mengukuhkan posisi di peringkat teratas sebagai penyumbang devisa terbesar dengan nilai realisasi yang sangat masif mencapai USD 9,76 miliar. Besaran nilai ekspor sektor otomotif ini mencatatkan keunggulan sebesar 26,96% dibandingkan komoditas Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya yang menempati posisi kedua dengan sumbangsih sebesar USD 7.689,22 miliar. Di luar kedua sektor tersebut, industri padat karya juga menunjukkan daya saing global yang solid, dipimpin oleh komoditas Alas kaki di urutan ketiga dengan nilai USD 6,19 miliar. Posisi selanjutnya diisi secara berurutan oleh Mesin dan peralatan mekanis USD 4,94 serta Logam mulia dan perhiasan 4,74 miliar. Sementara itu, lima komoditas penyokong lainnya melengkapi daftar sepuluh besar dengan rentang nilai antara USD 1.945 miliar hingga USD 3,37miliar, yang meliputi produk tekstil (pakaian rajutan dan bukan rajutan), karet, produk perikanan laut, hingga lemak dan minyak hewani/nabati, yang secara keseluruhan mencerminkan portofolio perdagangan luar negeri ibu kota yang terdiversifikasi namun bertumpu kuat pada ketangguhan sektor industri kendaraan dan mesin pada tahun 2025.

Gambar 3.56. Sepuluh Komoditas Utama Impor dengan Nilai CIF Tertinggi Tahun 2025



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Sementara itu, berdasarkan nilai *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) pada tahun 2025, komoditas ekspor memperlihatkan dominasi yang sangat kuat dari sektor barang modal dan komponen teknologi tinggi. Komoditas Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya menempati posisi puncak sebagai penyerap devisa terbesar dengan nilai realisasi menembus USD 21,96 miliar. Besarnya nilai impor pada sektor ini tercatat unggul sebesar 14,98% dibandingkan komoditas Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya yang berada di peringkat kedua dengan nilai USD 19,11 miliar. Jauh di bawah hegemoni kedua kelompok mesin tersebut, komoditas Kendaraan dan bagiannya menempati urutan ketiga dengan kontribusi sebesar USD 9,11 miliar, disusul oleh Plastik dan barang dari plastik senilai USD 6,62 miliar. Sementara itu, enam komoditas bahan baku dan penunjang industri lainnya, mulai dari Besi dan baja, Instrumen Optik dan Fotografi, Logam mulia, Bahan bakar mineral, hingga berbagai produk kimia, melengkapi daftar sepuluh besar dengan rentang nilai impor yang lebih moderat antara USD 2,23 miliar hingga USD 4,37 miliar, yang secara keseluruhan menegaskan tingginya kebutuhan mesin mekanik dan elektronik dalam menopang aktivitas manufaktur serta pembangunan infrastruktur ibu kota di sepanjang tahun 2025.

3.6. Kelautan Perikanan

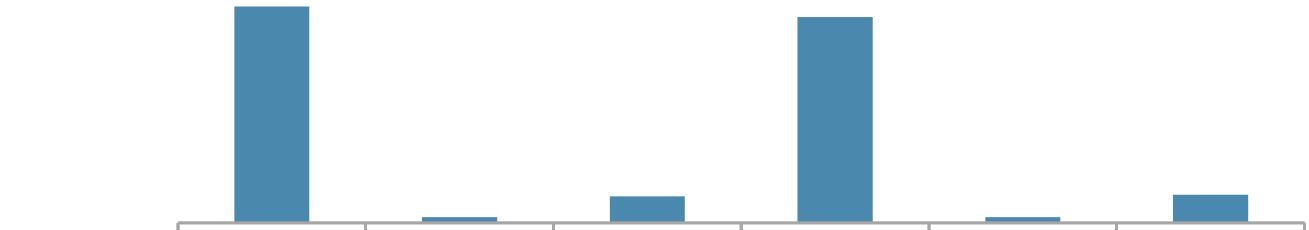
Secara geografis DKI Jakarta memiliki perairan seluas 6.997,50 km² . Perairan ini terletak di utara Jakarta dan mengelilingi pulau-pulau yang ada di Kepulauan Jakarta. Dengan luas tersebut produksi perikanan adalah salah satu mata pencaharian yang memiliki potensi besar. Karenanya DKI Jakarta memiliki dinas yang secara intensif mengelolanya. Dinas tersebut adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP). Dalam situsnya, DKPKP memiliki visi yaitu “Terwujudnya Ketahanan Pangan Dan Laut Biru Yang Berkelanjutan Menuju Jakarta Maju, Lestari Dan Berbudaya Untuk Keberadaban, Keadilan Dan Kesejahteraan Bagi Semua”.

Dalam konteks tersebut, pengelolaan dan pengembangan produksi perikanan di DKI Jakarta tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir dan laut. Produksi perikanan berkontribusi langsung terhadap penyediaan pangan sumber protein, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan rantai pasok pangan perkotaan

3.6.1. Kelautan Perikanan

Produksi perikanan merupakan salah satu indikator utama dalam menggambarkan kinerja sektor kelautan dan perikanan di DKI Jakarta, sekaligus mencerminkan dinamika pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah pesisir dan perairan sekitarnya. Di tengah keterbatasan wilayah tangkap dan meningkatnya tekanan aktivitas perkotaan, produksi perikanan Jakarta tidak hanya bersumber dari kegiatan penangkapan, tetapi juga dari perikanan budidaya dan aktivitas pascapanen yang terintegrasi dengan sistem distribusi dan konsumsi perkotaan. Penyajian statistik produksi perikanan menjadi penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai volume, jenis komoditas, pola produksi, serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah dan ketahanan pangan, sehingga dapat mendukung perencanaan kebijakan yang berbasis data, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Gambar 3.57. Jumlah Produksi Perikanan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024

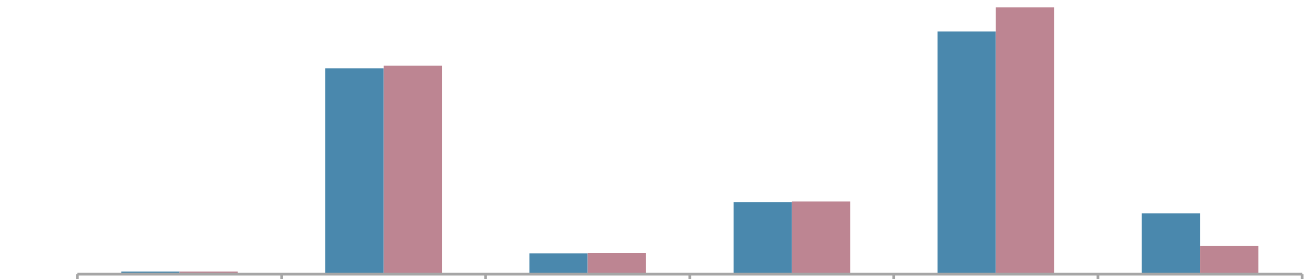


	Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Budidaya	Olahan Hasil Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Budidaya	Olahan Hasil Perikanan
	2024			2023		
Jumlah Produksi	190.671,58	5.210,76	23.323,31	181.489,73	4.976,20	24.866,51

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Perkembangan jumlah produksi perikanan di Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2023 hingga 2024 memperlihatkan divergensi tren antara sektor hulu dan hilir, di mana aktivitas produksi primer (tangkap dan budidaya) mengalami penguatan kinerja sementara sektor pengolahan justru terkoreksi. Produksi Perikanan Tangkap, yang merupakan penyumbang volume terbesar dalam struktur perikanan daerah, tumbuh solid sebesar 5,06% menjadi 190,67 ribu ton pada tahun 2024. Serupa, Produksi Perikanan Budidaya juga mencatatkan peningkatan sebesar 4,71% menjadi 5,21 ribu ton. Di sisi lain, capaian positif di sektor produksi primer tersebut tidak sejalan dengan kinerja Olahan Hasil Perikanan yang mengalami penurunan sebesar 6,21% menjadi 23,32 ribu ton, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam aktivitas hilirisasi atau penyerapan bahan baku untuk industri pengolahan ikan pada periode tersebut.

Gambar 3.58. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya menurut Wilayah DKI Jakarta Tahun 2023-2024



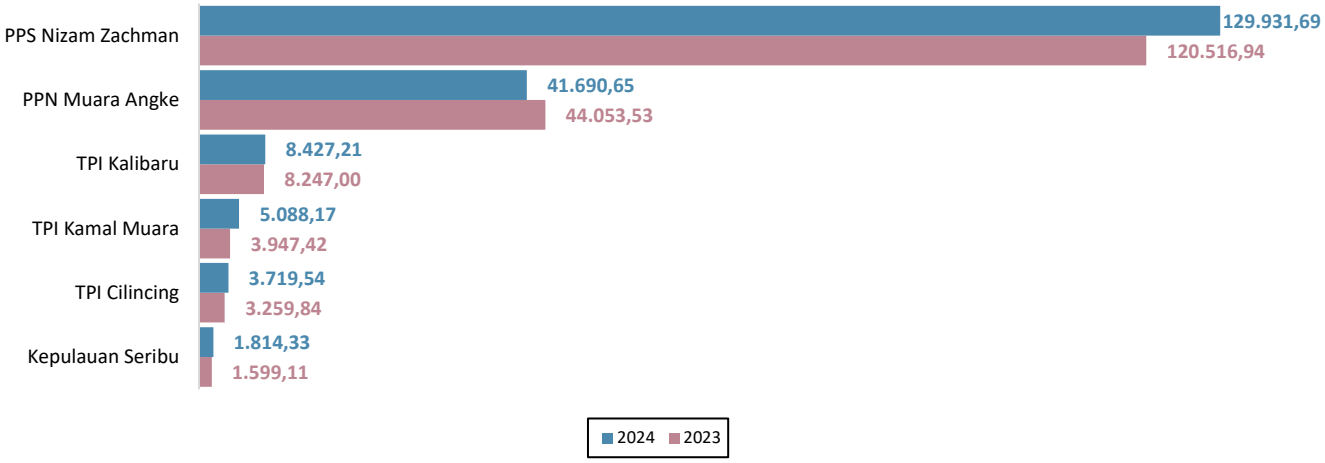
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	0,63	49,07	4,98	17,19	57,88	14,49
2024	0,63	49,67	5,07	17,32	63,90	6,73

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Sementara itu, kinerja produksi perikanan budidaya di Provinsi DKI Jakarta sepanjang periode 2023 hingga 2024 memperlihatkan dominasi yang semakin kuat dari wilayah daratan, khususnya Jakarta Timur, di tengah penurunan drastis produktivitas di wilayah kepulauan. Jakarta Timur mengukuhkan diri sebagai sentra produksi terbesar dengan capaian yang meningkat signifikan sebesar 10,40% menjadi 63,90 ton pada tahun 2024. Pertumbuhan positif dengan intensitas yang lebih moderat juga dicatatkan oleh Jakarta Utara yang naik 1,22% menjadi 49,67 ton, Jakarta Barat tumbuh 1,81% menjadi 5,07 ton,

serta Jakarta Selatan yang meningkat tipis 0,76% menjadi 17,32 ton, sementara Jakarta Pusat tercatat stagnan di angka 0,63 ton. Sebaliknya, kontraksi produksi yang cukup tajam terjadi di Kabupaten Kepulauan Seribu, di mana volume produksi merosot hingga 53,55%, menyusut menjadi hanya 6,73 ton.

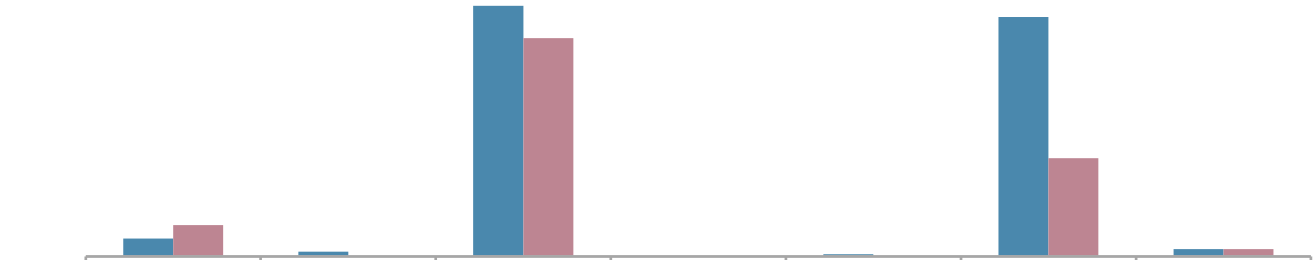
Gambar 3.59. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap menurut Pelabuhan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Di sisi lain, Kinerja produksi perikanan tangkap di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan lokasi pendaratan pada periode 2023–2024 menunjukkan tren pertumbuhan positif yang dominan di hampir seluruh pelabuhan, dengan PPS Nizam Zachman yang mendominasi sebagai sentra utama. Pelabuhan samudera ini mencatatkan kenaikan produksi sebesar 7,81%, bergerak naik menjadi 129,93 ribu ton pada tahun 2024. Meskipun demikian, persentase pertumbuhan tertinggi justru terjadi pada pelabuhan-pelabuhan dengan skala volume yang lebih kecil, di mana TPI Kamal Muara mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 28,90% menjadi 5,09 ribu ton, disusul oleh TPI Cilincing yang tumbuh 14,10% menjadi 3,72 ribu ton, serta Kepulauan Seribu yang meningkat 13,46% menjadi 1,81 ribu ton. Pertumbuhan moderat juga dialami oleh TPI Kalibaru sebesar 2,19%. Di tengah tren positif tersebut, PPN Muara Angke menjadi satu-satunya yang mengalami pertumbuhan negatif, dengan volume produksi menyusut sebesar 5,36% menjadi 41,69 ribu ton, yang mengindikasikan adanya penurunan aktivitas pendaratan ikan di kawasan tersebut pada tahun 2024.

Gambar 3.60. Jumlah Produksi dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan Tahun 2023-2024



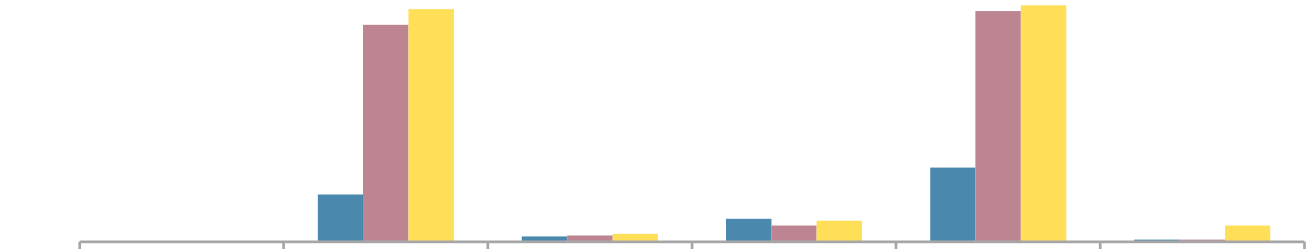
	Pelumatan daging ikan	Pembekuan	Pemindangan	Penanganan produk segar	Pengasapan/ Pemanggangan	Penggaraman/ Pengeringan	Pengolahan lainnya
2023	870,52	237,94	12.040,68	11,48	108,31	11.513,87	356,40
2024	1.511,18	1,95	10.498,94	-	4,42	4.731,30	351,23

Sumber: Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Kinerja produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan pada periode 2023 hingga 2024 memperlihatkan tren kontraksi yang dominan di sebagian besar lini pengolahan, dengan pengecualian tunggal pada kategori pelumatan daging ikan yang justru tumbuh positif. Data statistik mencatat bahwa sektor Penggaraman dan Pengeringan, yang sebelumnya menjadi salah satu pilar utama, mengalami penurunan volume yang signifikan sebesar 58,91% menjadi 4.731,30 ton pada tahun 2024. Penurunan juga dialami oleh kategori Pemindangan yang terkoreksi sebesar 12,80% menjadi 10.498,94 ton, meskipun kategori ini tetap bertahan sebagai kontributor volume terbesar. Tren pertumbuhan negatif yang lebih mencolok terlihat pada metode pengolahan lainnya seperti Pembekuan dan Pengasapan/ Pemanggangan yang masing-masing merosot hingga 99,18% dan 95,92%. Di tengah arus penurunan kinerja tersebut, kategori Pelumatan Daging Ikan menjadi satu-satunya

subsektor yang mencatatkan kinerja yang mengesankan dengan pertumbuhan sebesar 73,59%, bergerak naik menjadi 1.511,18 ton, yang mengindikasikan adanya pergeseran preferensi produksi atau peningkatan permintaan pasar terhadap produk olahan berbasis daging lumat pada tahun 2024.

Gambar 3.61. Jumlah Produksi Ikan Konsumsi di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2022	68.980	20.020.516	2.235.400	9.742.100	31.490.977	926.658
2023	84.560	92.209.088	2.693.100	6.849.640	98.002.584	867.510
2024	226.060	98.812.537	3.308.618	8.978.330	100.441.423	6.944.645

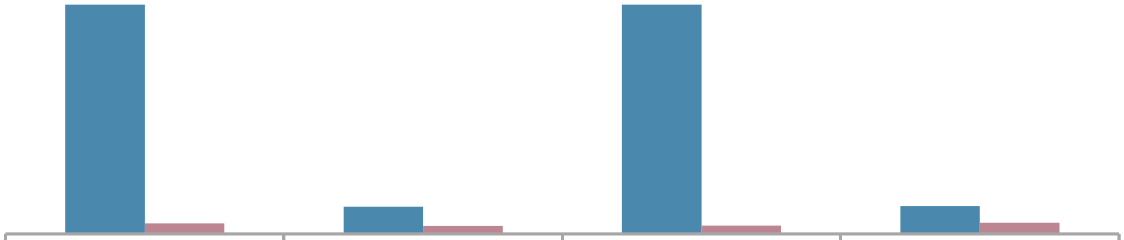
Sumber: Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Sementara itu, produksi ikan konsumsi di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2023 hingga 2024 memperlihatkan peningkatan kinerja yang signifikan di seluruh wilayah, dengan Jakarta Timur dan Jakarta Utara sebagai sentra produksi utama ibu kota. Kepulauan Seribu mencatatkan peningkatan kinerja paling signifikan dengan akselerasi pertumbuhan yang mencapai lebih dari 8 kali lipat, yang membuat volume produksi melesat dari 867,51 ribu ekor menjadi 6,94 juta ekor pada tahun 2024. Pertumbuhan dengan intensitas yang signifikan secara persentase juga dicatatkan oleh Jakarta Pusat yang meroket tajam sebesar 167,34% menjadi 226,06 ribu ekor. Tren positif juga dialami oleh Jakarta Selatan dan Jakarta Barat yang masing-masing tumbuh sebesar 31,08% dan 22,86%. Melengkapi capaian tersebut, wilayah Jakarta Timur tetap bertahan sebagai produsen terbesar dengan pertumbuhan moderat sebesar 2,49% menjadi 100,44 juta ekor, diikuti oleh Jakarta Utara yang meningkat sebesar 7,16% menjadi 98,81 juta ekor. Secara umum, capaian ini menandakan adanya pemerataan produktivitas yang semakin menguat di seluruh lini wilayah perikanan Jakarta pada tahun 2024.

3.6.2. Nelayan

Nelayan merupakan salah satu aktor kunci dalam sektor kelautan dan perikanan yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan, mendukung perekonomian pesisir, serta mempertahankan mata pencaharian tradisional di wilayah DKI Jakarta. Meskipun berhadapan dengan keterbatasan ruang pesisir, tekanan urbanisasi, dan dinamika lingkungan pesisir perkotaan, aktivitas kenelayanan di Jakarta tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur ekonomi sektoral dan sosial masyarakat pesisir.

Gambar 3.62. Jumlah Pekerja Nelayan dan Nelayan Pemilik di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024

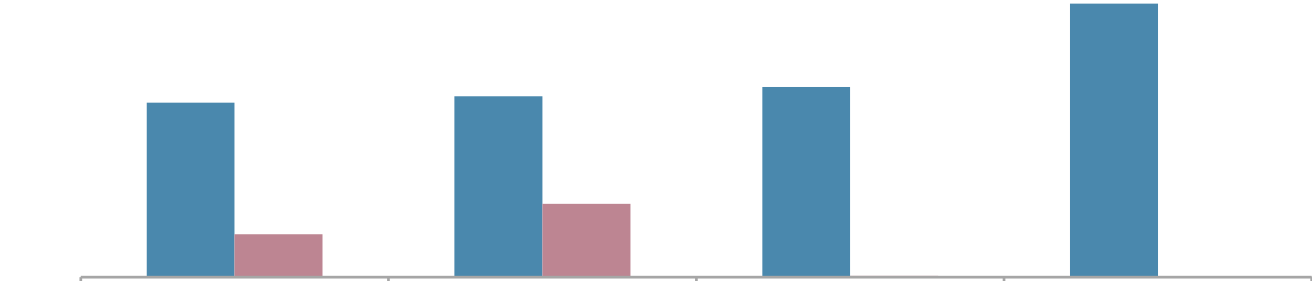


	2023		2024	
	Nelayan Pekerja	Nelayan Pemilik	Nelayan Pekerja	Nelayan Pemilik
Jakarta Utara	23.130	2.754	23.235	2.804
Kepulauan Seribu	1.085	822	846	1.128

Sumber: Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Profil ketenagakerjaan sektor perikanan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023–2024 menunjukkan dominasi Jakarta Utara sebagai basis utama nelayan, dengan tren pertumbuhan yang stabil namun kontras dengan Kepulauan Seribu yang fluktuatif. Di Jakarta Utara, populasi nelayan cenderung stagnan dengan kenaikan tipis, di mana jumlah Nelayan Pekerja tumbuh 0,45% menjadi 23.235 orang dan Nelayan Pemilik meningkat 1,82% menjadi 2.804 orang. Sebaliknya, transformasi status profesi yang signifikan terjadi di Kepulauan Seribu, di mana jumlah Nelayan Pekerja mengalami kontraksi tajam sebesar 22,03%, menyusut dari 1.085 orang menjadi 846 orang. Menariknya, penurunan jumlah pekerja ini diikuti oleh lonjakan jumlah Nelayan Pemilik yang meningkat sebesar 37,23%, bergerak dari 822 orang menjadi 1.128 orang, yang mengindikasikan adanya fenomena mobilitas vertikal atau peralihan status yang masif dari buruh nelayan menjadi pemilik usaha perikanan mandiri di wilayah kepulauan tersebut pada tahun 2024.

Gambar 3.63. Jumlah Kapal Perikanan yang Melakukan Bongkar Muat menurut Triwulan Tahun 2023-2024

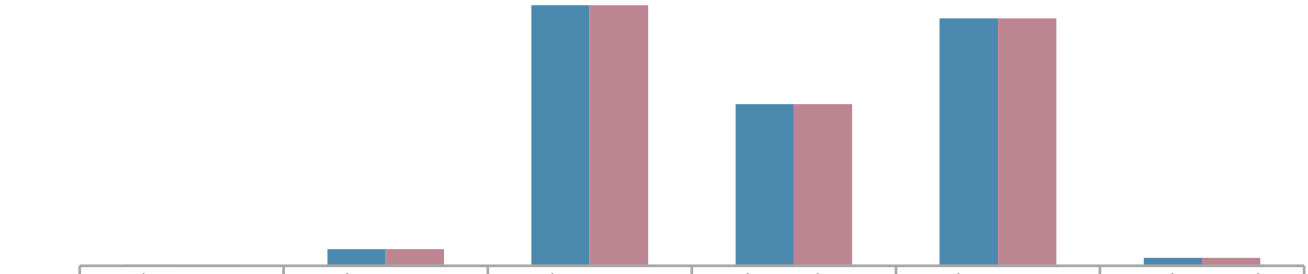


	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
2023	1.109	1.150	1.210	1.759
2024	273	466	9	1

Sumber: Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Aktivitas bongkar muat kapal perikanan di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2023 hingga 2024 memperlihatkan anomali penurunan kinerja yang sangat tajam. Pada tahun 2023, tren aktivitas menunjukkan pola pertumbuhan yang konsisten positif dari Triwulan I hingga mencapai puncaknya di Triwulan IV dengan 1.759 kapal. Namun, kondisi ini berbalik menurun drastis pada tahun 2024, di mana volume aktivitas mengalami kemerosotan tajam sejak awal tahun. Pada Triwulan I 2024, jumlah kapal merosot sebesar 75,38% menjadi 273 unit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun sempat terjadi pemulihan parsial pada Triwulan II dengan kenaikan menjadi 466 unit (namun masih terkoreksi 59,48% secara tahunan), paruh kedua tahun 2024 mencatatkan penurunan aktivitas yang nyaris lebih ekstrem. Jumlah kapal menyusut hingga 99,26% pada Triwulan III menjadi hanya 9 unit, dan mencapai titik nadir pada Triwulan IV dengan penurunan 99,94% menjadi hanya 1 unit kapal.

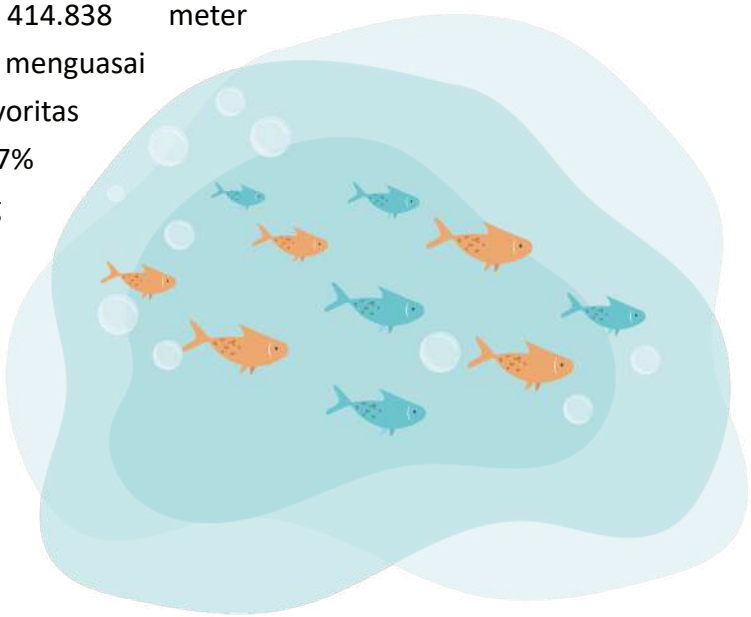
Gambar 3.64. Data Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan (PPISHP), Balai Benih Ikan (BBI), dan Tempat Promosi Hasil Perikanan (TPHTP) (M3), Tahun 2023-2024



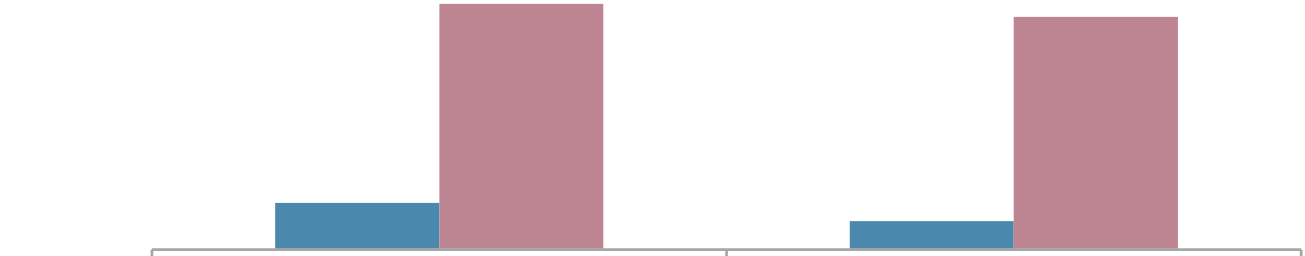
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	630	10.448	163.738	101.486	155.502	5.000
2024	630	10.448	163.738	101.486	155.502	5.000

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Kondisi eksisting infrastruktur pendukung perikanan di Provinsi DKI Jakarta sepanjang periode 2023 hingga 2024 tidak mencatatkan perubahan jumlah. Balai Benih Ikan (BBI) mendominasi struktur aset fisik dengan luas area mencapai 414.838 meter persegi, atau menguasai porsi mayoritas sebesar 94,97% dari total luas sarana prasarana yang ada. Fasilitas pendukung lainnya mempertahankan luasan yang konstan, yakni Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan (PPISHP) seluas 10.448 meter persegi, Tempat Promosi Hasil Perikanan (TPHP) seluas 6.518 meter persegi, dan Balai Benih Ikan Laut (BBIL) seluas 5.000 meter persegi.



Gambar 3.65. Jumlah Kepatuhan pelaku Usaha kelautan dan Perikanan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024

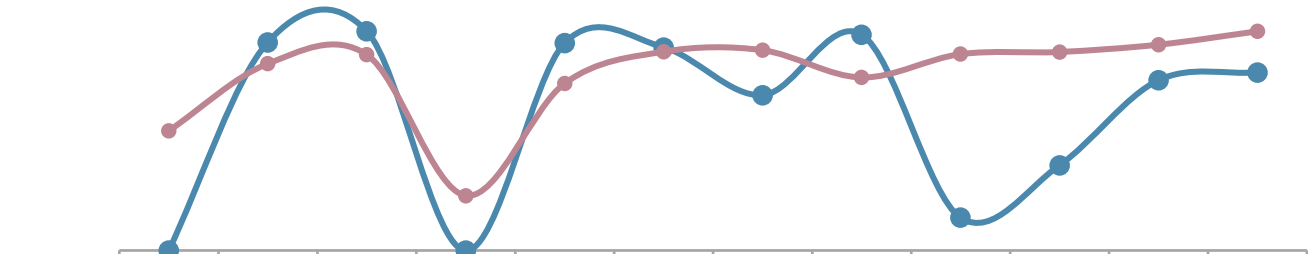


	2023	2024
Pelanggaran	105	64
Pelaku Usaha	570	525

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Kinerja pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan Provinsi DKI Jakarta pada periode 2023 hingga 2024 menunjukkan perbaikan indikator ketertiban yang cukup signifikan, ditandai dengan penurunan angka pelanggaran yang signifikan sebesar 39,05%, menjadi 64 kasus pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah Pelaku Usaha yang terdata berkurang sebesar 7,89% dari 570 unit menjadi 525 unit. Fakta bahwa laju penurunan pelanggaran jauh lebih cepat dibandingkan penurunan jumlah pelaku usaha mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran hukum dan efektivitas pembinaan regulasi yang berhasil menekan potensi penyimpangan operasional di lapangan pada tahun terakhir.

Gambar 3.66. Persentase kebutuhan Usaha Kelautan dan Perikanan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2023	-	94,87%	100%	-	94,57%	92,59%	70,83%	98,44%	15,00%	38,89%	77,61%	81,19%
2024	54,55%	85,19%	89,36%	25,00%	76,19%	90,70%	91,38%	78,95%	89,58%	90,57%	93,90%	100,00%

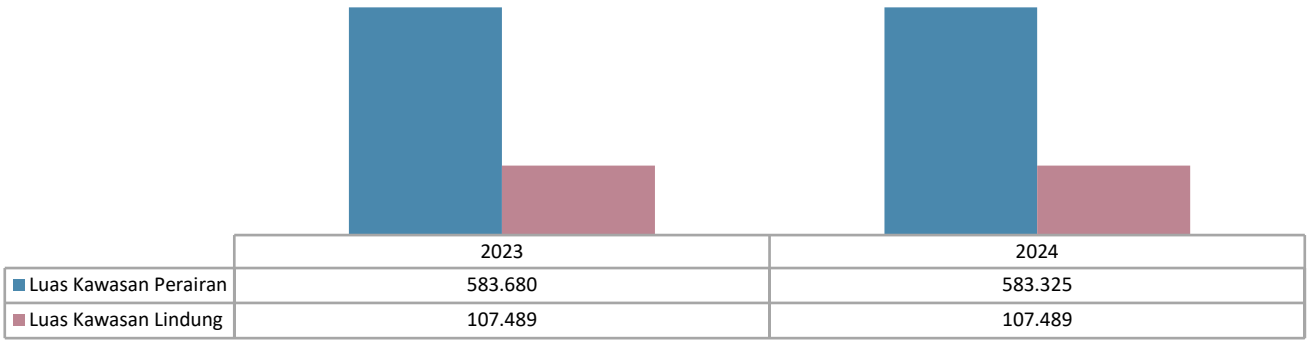
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Dinamika tren tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan di Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2023 hingga 2024 memperlihatkan pemulihan kinerja pada semester kedua tahun 2024, setelah sebelumnya mengalami volatilitas tajam pada periode yang sama tahun 2023. Meskipun sempat tertekan ke titik terendah pada April 2024 sebesar 25%, Peningkatan perbaikan kinerja paling signifikan terlihat pada bulan September, di mana tingkat kepatuhan tahun 2024 meningkat tajam menjadi 89,58%, jauh meninggalkan capaian September 2023 yang sempat merosot ke level kritis 15%. Tren positif yang serupa terjadi pada bulan Oktober 2024 dengan capaian 90,57%, unggul signifikan dibandingkan Oktober 2023 yang hanya 38,89%. Puncak dari tren pemulihan ini tercatat pada bulan Desember 2024 yang berhasil menyentuh angka sempurna 100%.

3.6.3. Kawasan Perairan Berkelanjutan

Kawasan perairan berkelanjutan merupakan fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan kelestarian ekosistem pesisir di DKI Jakarta. Sebagai wilayah metropolitan yang berbatasan langsung dengan laut dan memiliki karakteristik perairan yang kompleks, Jakarta menghadapi tantangan berupa tekanan aktivitas ekonomi, pencemaran, serta degradasi lingkungan pesisir. Oleh karena itu, pengembangan kawasan perairan berkelanjutan menjadi pendekatan strategis untuk memastikan bahwa fungsi ekologis perairan tetap terjaga, sekaligus mendukung aktivitas perikanan, pariwisata bahari, dan perlindungan masyarakat pesisir.

Gambar 3.67. Data Kawasan Lindung Perairan DKI Jakarta Tahun 2023-2024

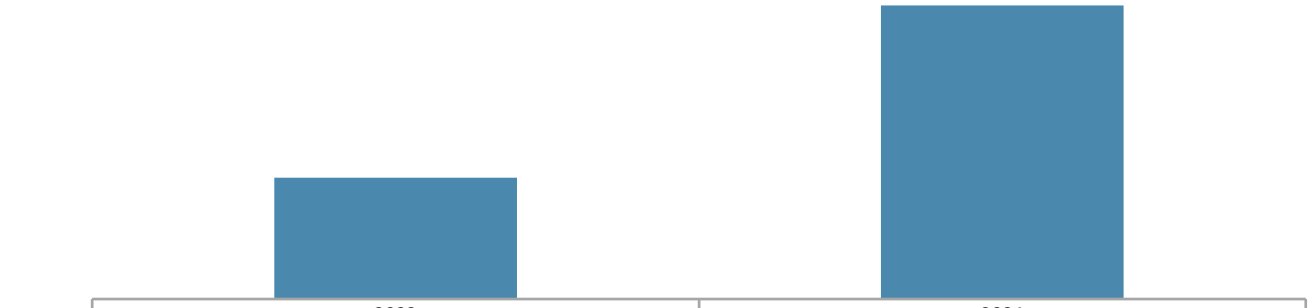


	2023	2024
Luas Kawasan Perairan	583.680	583.325
Luas Kawasan Lindung	107.489	107.489

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Status pengelolaan wilayah perairan Provinsi DKI Jakarta pada periode 2023 hingga 2024 memperlihatkan peta konservasi sumber daya alam yang terukur dan stabil, di mana luasan kawasan lindung dipertahankan secara konsisten di tengah koreksi tipis pada total luasan ekosistem perairan. Dari total Luas Kawasan Perairan yang tercatat sebesar 583.325 hektare pada tahun 2024 (sedikit menurun dari 583.680 hektare pada 2023), area yang dialokasikan sebagai Luas Kawasan Lindung tetap bertahan meliputi 107.489 hektare. Rasio ini mengindikasikan bahwa cakupan perlindungan ekologis menjangkau sekitar 18,43% dari keseluruhan potensi wilayah perairan yang ada, sementara proporsi utama 81,57% atau seluas 475.836 hektare masih berstatus sebagai kawasan perairan umum atau non-lindung, yang mengindikasikan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas zona konservasi inti meskipun terjadi dinamika perubahan pada total bentang perairan.

Gambar 3.68. Indeks Kesehatan Laut di Wilayah Kewenangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024

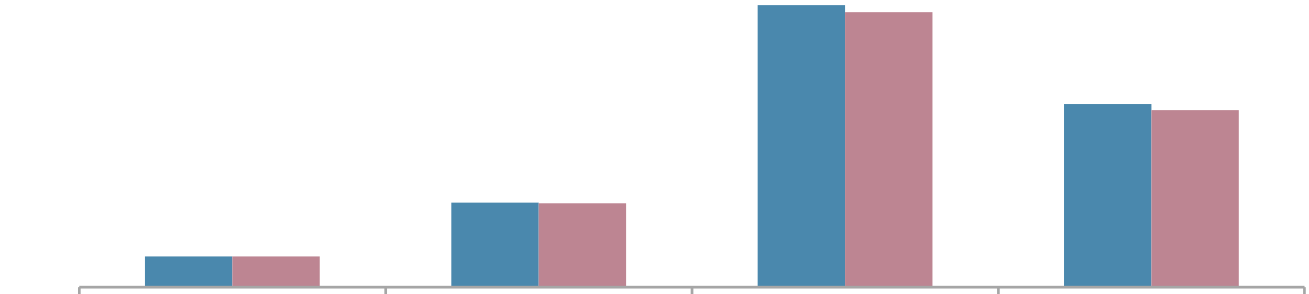


	2023	2024
indeks	68,77%	69,65%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Kualitas ekosistem perairan di wilayah kewenangan Provinsi DKI Jakarta pada periode 2023 hingga 2024 menunjukkan tren perbaikan yang positif, sebagaimana tercermin dari peningkatan skor Indeks Kesehatan Laut *(Ocean Health Index)*. Indeks tersebut mengalami kenaikan dari 68,77% pada tahun 2023 menjadi 69,65% pada tahun 2024. Meskipun kenaikan ini terlihat moderat dengan selisih sebesar 0,88 persen poin atau tumbuh relatif sebesar 1,28%, capaian ini tetap mengindikasikan adanya progres keberhasilan dalam upaya pengelolaan konservasi, pengendalian pencemaran, serta pemulihan daya dukung lingkungan laut yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Gambar 3.69. Penyerapan Bahan Baku, Produksi Olahan dan Penggunaan Garam di Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) Muara Angke Tahun 2023

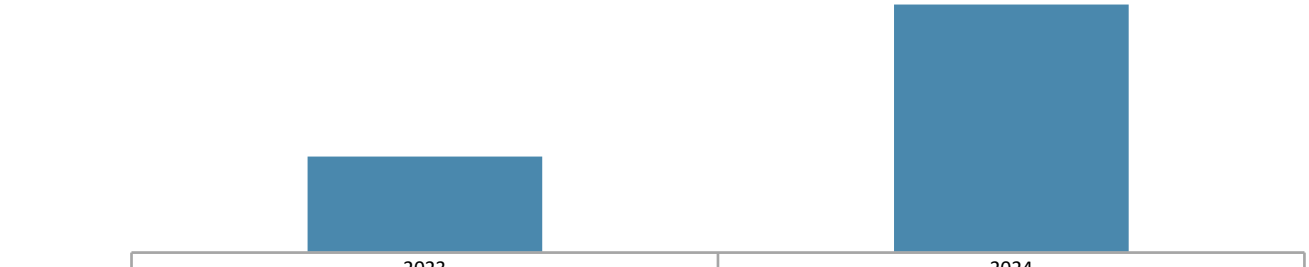


Jenis Uraian	Penggunaan Garam	Penyerapan Bahan Baku	Produksi Olahan
2023	5.574,32	18.606,55	12.085,16
2024	5.537,95	18.132,00	11.676,57

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Kinerja operasional di sentra Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) Muara Angke sepanjang periode 2023 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan kinerja yang merata pada seluruh lini aktivitas, yang mencerminkan adanya penurunan intensitas produksi. Indikator utama yakni Penyerapan Bahan Baku mengalami koreksi sebesar 2,55% menjadi 18.132,00 ton pada tahun 2024. Penurunan volume *input* tersebut berdampak linier terhadap *output*, di mana Produksi Olahan menyusut sebesar 3,38% menjadi 11.676,57 ton. Sejalan dengan berkurangnya volume pengolahan, Penggunaan Garam sebagai material pendukung utama juga mencatatkan penurunan tipis sebesar 0,65% menjadi 5.537,95 ton, yang secara keseluruhan mengindikasikan adanya perlambatan produktivitas atau kendala pasokan di kawasan pengolahan tradisional tersebut pada tahun terakhir.

Gambar 3.70. Persentase Luasan Kawasan Perairan dan Pesisir yang Memiliki Ekosistem Pesisir Esensial dalam Kondisi Sedang dan Baik

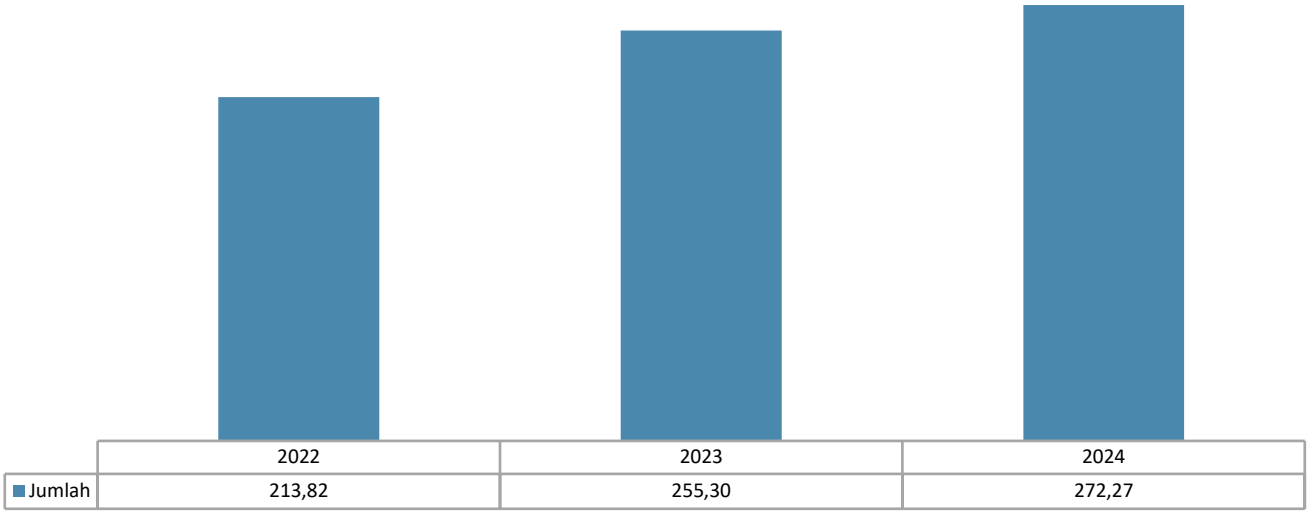


	2023	2024
Persentase	36,56%	36,58%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Kualitas lingkungan pesisir di wilayah kewenangan Provinsi DKI Jakarta, khususnya pada indikator luasan kawasan yang memiliki ekosistem esensial dalam kondisi sedang dan baik, menunjukkan tren stabilitas yang tinggi pada periode 2023 hingga 2024. Persentase luasan ini mengalami kenaikan yang sangat tipis sebesar 0,o2 persen poin menjadi 36,58% pada tahun 2024. Pertumbuhan ini merefleksikan bahwa kondisi ekosistem pesisir cenderung stagnan, di mana upaya pelestarian yang dilakukan mampu mempertahankan kualitas lingkungan eksisting namun belum menghasilkan ekspansi perbaikan yang signifikan secara kuantitatif dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Gambar 3.71. Data Luas Kawasan Konservasi yang Dipulihkan Kondisi Ekosistemnya Tahun 2022-2024



	2022	2023	2024
Jumlah	213,82	255,30	272,27

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Upaya pemulihan kondisi ekosistem di kawasan konservasi di DKI Jakarta menunjukkan tren perluasan yang konsisten dan positif sepanjang periode 2022 hingga 2024. Luasan area yang berhasil dipulihkan mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 19,40%, bergerak naik dari 213,82 hektare pada tahun 2022 menjadi 255,30 hektare pada tahun 2023. Momentum perbaikan ekologis ini terus berlanjut hingga tahun 2024 dengan capaian luasan mencapai 272,27, atau tumbuh sebesar 6,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara akumulatif sejak tahun 2022, luas kawasan konservasi yang telah terpulihkan kondisinya meningkat sebesar 27,34%, mengindikasikan efektivitas program konservasi dalam memperluas cakupan wilayah yang mendapatkan intervensi pemulihan ekosistem.

3.7. Pangan

Berdasarkan ketentuan umum Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu, pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan / atau pembuatan makanan atau minuman.

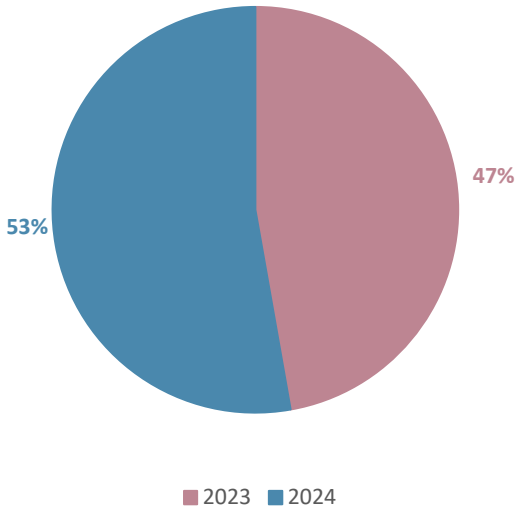
3.7.1. Konsumsi Pangan

menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas), ketersediaan pangan merupakan kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Dalam upaya mencapai sasaran strategis terkait ketersediaan pangan, Bapanas pun memiliki strategi yang dilakukan sebagai berikut:

1. Penguatan Cadangan Pangan Nasional melalui Perum BULOG dan BUMN Pangan
2. Pengendalian impor dan ekspor pangan
3. Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan
4. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah.

Hal itu selaras dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan membentuk satuan tugas ketahanan pangan, dengan salah satu keputusan terkait keanggotaan tersebut adalah melakukan pemantauan ketersediaan dan harga sebelas bahan pangan di DKI Jakarta meliputi beras, jagung, bawang putih, cabe merah keriting, cabe rawit merah, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng.

Gambar 3.72. Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023-2024



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Perkembangan kondisi ketahanan pangan pada periode 2023 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan kinerja yang positif, yang mencerminkan semakin membaiknya stabilitas ketersediaan dan aksesibilitas pangan bagi masyarakat. Skor Indeks Ketahanan Pangan mengalami kenaikan 5% poin dari 47% pada tahun 2023 menjadi 53% pada tahun 2024,yang mengindikasikan keberhasilan berbagai program strategis dalam menjaga stabilitas pasokan serta memperkuat sistem ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

Gambar 3.73. Persentase Wilayah Tahan Pangan Tahun 2023-2024

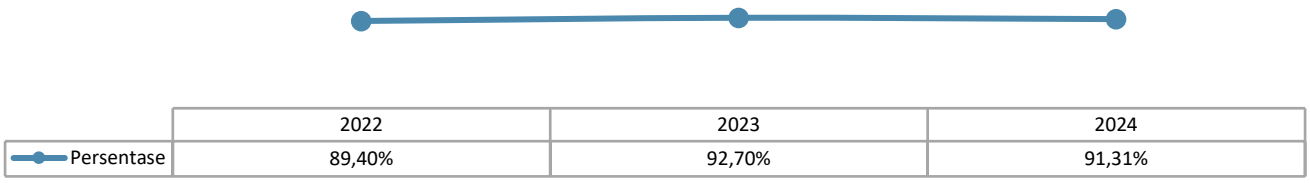


	2024	2025
Jumlah Kecamatan	44	44
Total Kecamatan	44	44

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Kualitas ketahanan pangan di tingkat kewilayahan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 mencatatkan pencapaian kinerja yang merata, yang mencerminkan meratanya akses dan ketersediaan pangan di seluruh struktur administrasi kota. Berdasarkan data pemetaan wilayah, tercatat bahwa jumlah wilayah yang berstatus Tahan Pangan mencapai 44 kecamatan, angka yang sama persis dengan total seluruh kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Capaian rasio 100% ini mengindikasikan bahwa tidak ada satu pun wilayah kecamatan yang teridentifikasi mengalami kerawanan pangan, menegaskan keberhasilan sistem distribusi logistik dan stabilitas pasokan yang mampu menjangkau seluruh lapisan wilayah tanpa terkecuali

Gambar 3.74. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) DKI Jakarta Tahun 2023-2024

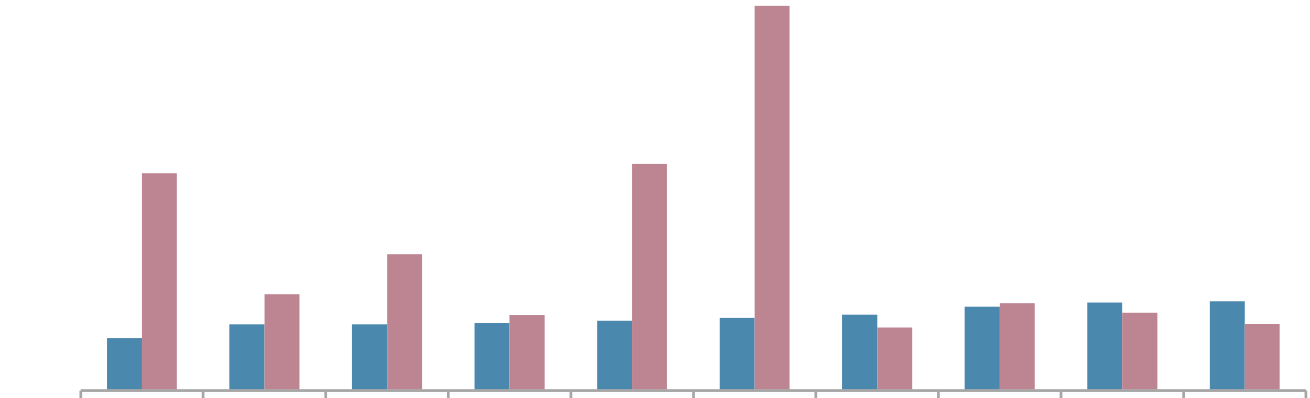


	2022	2023	2024
Persentase	89,40%	92,70%	91,31%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Di samping itu, kualitas konsumsi pangan masyarakat Provinsi DKI Jakarta tercermin melalui capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pada periode 2022 hingga 2024, skor PPH DKI Jakarta memperlihatkan pola fluktuasi dengan kecenderungan koreksi tipis di akhir periode setelah sempat mencapai puncak kinerja. Pada tahun 2023, skor PPH berada mengalami peningkatan kinerja yang positif sebesar 3,30 % poin menjadi 92,70%. Namun, tren positif tersebut mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 sebesar 1,39% poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, capaian 2024 ini masih tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi awal tahun 2022, yang mengindikasikan bahwa secara umum kualitas keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat ibu kota masih terjaga pada level yang baik di atas angka 90%.

Gambar 3.75. Persentase Ketersediaan Pangan menurut Jenis Pangan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

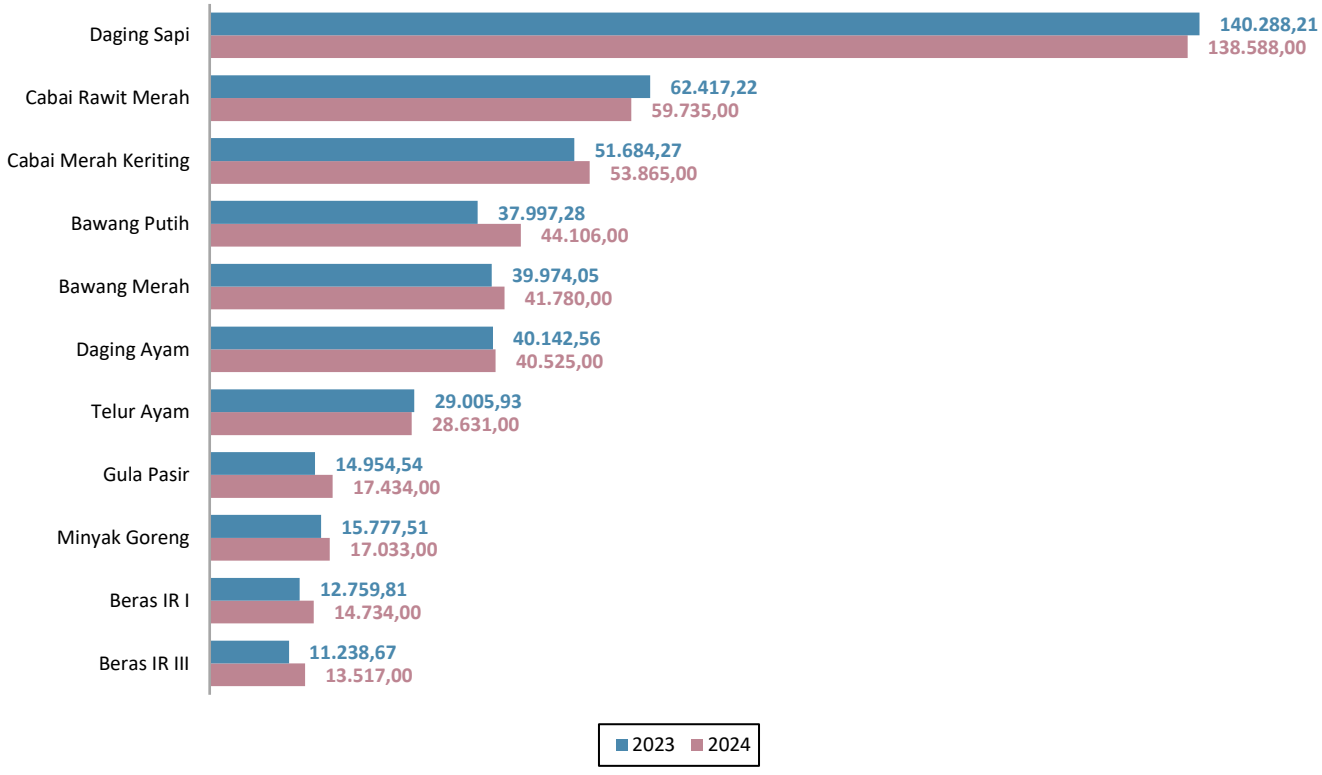


	Ikan	Gula	Buah	Daging Ayam	Telur	Susu	Minyak Goreng	Sayur	Beras	Daging Sapi
2023	86,51	109,47	109,50	111,49	115,05	120,00	125,17	138,52	145,10	147,32
2024	358,68	158,97	224,91	124,75	373,61	651,65	104,18	144,07	128,46	109,89

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Dari sisi ketersediaan dan kebutuhan pangan, kondisi neraca pangan strategis di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2023–2024 menunjukkan status surplus yang solid pada kesepuluh jenis komoditas utama, di mana tingkat ketersediaan secara konsisten melampaui angka kebutuhan masyarakat. Komoditas Beras sebagai pangan pokok memiliki ketersediaan sebesar 115,54, unggul 28,46% di atas kebutuhan yang tercatat sebesar 89,94. Surplus yang jauh lebih tinggi terlihat pada komoditas Ikan dan Susu. Ketersediaan Ikan mencapai 86,12 atau melampaui kebutuhan (24,01) hingga lebih dari 258%, sementara Susu mencatatkan ketersediaan 41,38 berbanding kebutuhan yang hanya 6,35.

Gambar 3.76. Harga Rata-rata Bahan Pangan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



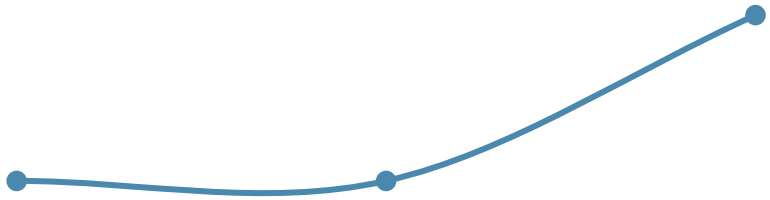
Sumber: Perumda Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta

Sementara itu, ditinjau dari harga rata-rata bahan pangan pokok di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2023 hingga 2024, data memperlihatkan tekanan inflasi yang terjadi pada mayoritas komoditas pangan pokok. Lonjakan harga paling tajam dialami oleh komoditas beras, di mana Beras IR III naik sebesar 20,27% dari Rp11.238,67 pada tahun 2023 menjadi Rp13.517,00 pada tahun 2024, disusul oleh Beras IR I yang juga mengalami kenaikan harga sebesar 15,47% menjadi Rp14.734,00. Peningkatan harga yang cukup tinggi juga terjadi di komoditas Gula Pasir yang naik 16,58% menjadi Rp17.434,00 dan Bawang Putih yang meningkat 16,08% menjadi Rp44.106,00. Di tengah arus kenaikan harga mayoritas bahan pangan tersebut, terdapat tiga komoditas yang berhasil mencatatkan deflasi atau penurunan harga pokok, yakni Cabai Rawit Merah yang terkoreksi turun paling dalam sebesar 4,30% menjadi Rp59.735,00, Telur Ayam yang menyusut 1,29% menjadi Rp28.631,00, serta Daging Sapi yang turun 1,21% menjadi Rp138.588,00, sebuah kondisi yang secara keseluruhan mengindikasikan adanya pergeseran beban pengeluaran rumah tangga ibu kota yang semakin berat pada pemenuhan kebutuhan karbohidrat pokok dan bumbu dapur dasar.

3.7.2. Produksi Pangan

Produksi pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat, terutama di wilayah perkotaan yang padat penduduk seperti Jakarta. Ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi, kesehatan masyarakat, serta ketahanan sosial suatu daerah. Di tengah keterbatasan lahan dan tingginya ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah, upaya menjaga dan meningkatkan produksi pangan menjadi isu strategis perkotaan yang perlu dijaga keberlanjutannya.

Gambar 3.77. Persentase Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

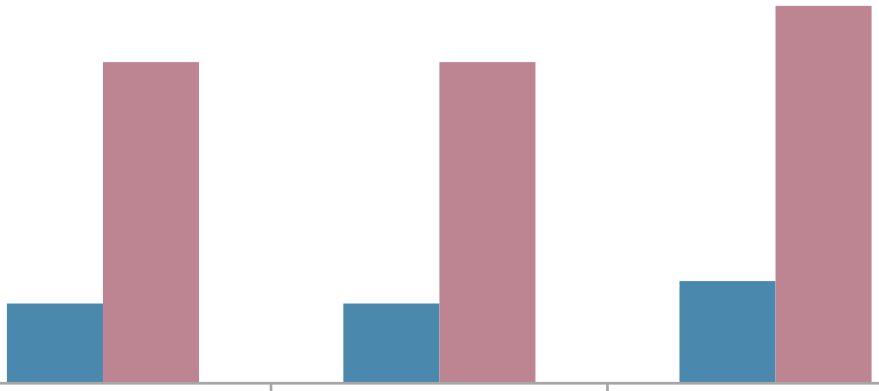


	2023	2023	2024
Persentase	24,85%	24,85%	25,46%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta



Gambar 3.78. Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

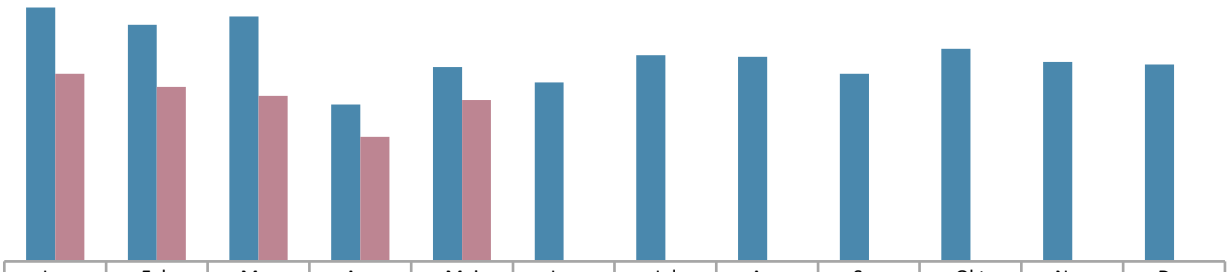


	2023	2023	2024
Pertambahan Jumlah Produksi	4.532,52	4.532,52	5.798,60
Jumlah Produksi Pertanian	18.238,00	18.238,00	22.770,52

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Kinerja produksi di sektor pangan dan hortikultura Provinsi DKI Jakarta pada periode 2023 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang solid, baik dari segi akumulasi jumlah produksi maupun laju pertumbuhannya. Jumlah Produksi Pertanian mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 24,85%, bergerak naik dari 18.238,00 unit pada tahun 2023 menjadi 22.770,52 unit pada tahun 2024. Peningkatan kapasitas produksi ini juga tercermin pada indikator Pertambahan Jumlah Produksi yang tumbuh sebesar 27,93% dari 4.532,52 menjadi 5.798,60. Secara proporsional, persentase peningkatan produksi terhadap total basis produksi juga menunjukkan perbaikan kinerja yang positif, meningkat dari 24,85% pada tahun 2023 menjadi 25,46% pada tahun 2024, yang mengindikasikan semakin produktifnya lahan atau sistem pertanian perkotaan yang dikembangkan di ibu kota.

Gambar 3.79. Pemasukan dan Pengeluaran Stok Beras (Ton) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2025



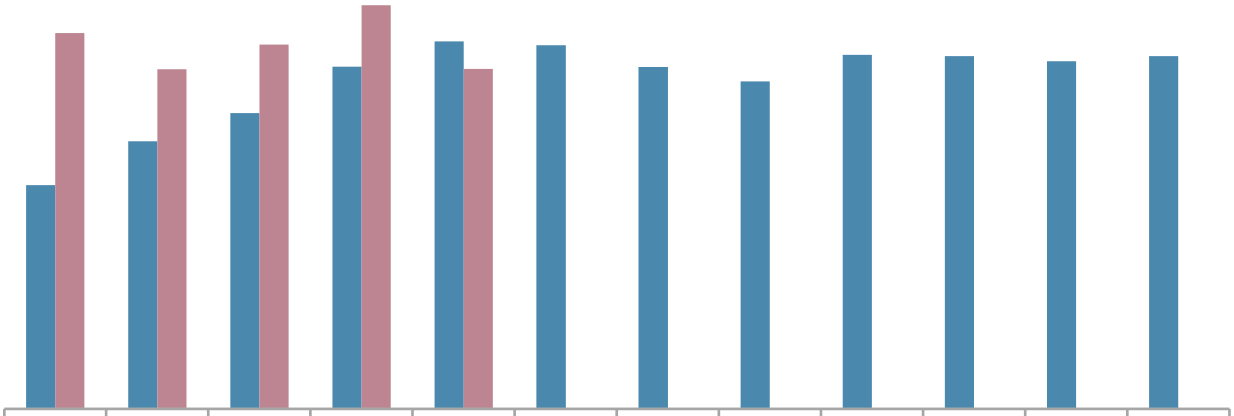
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2024	179.409	167.193	173.129	110.855	137.373	126.566	145.673	144.610	132.644	150.234	140.944	139.234
2025	132.619	123.208	117.025	87.981	114.117	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: PT Food Station Tjipinang Jaya

Dinamika ketersediaan stok beras di Provinsi DKI Jakarta pada lima bulan pertama tahun 2025 memperlihatkan tren penurunan volume yang konsisten jika disandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Seluruh bulan dari Januari hingga Mei 2025 mengalami kontraksi kinerja tahunan *(year-on-year)*, di mana penurunan terdalam tercatat pada bulan Maret sebesar 32,41%, dengan volume menyusut dari 173.129 ton menjadi 117.025 ton. Tren penyusutan berlanjut hingga menyentuh titik terendah

pada bulan April 2025 dengan volume hanya 87.981 ton atau turun 20,63% dibandingkan April 2024. Meskipun masih berada di zona defisit dengan selisih 16,93% dibanding tahun sebelumnya, bulan Mei 2025 mulai menunjukkan sinyal pemulihan stok dengan kenaikan volume menjadi 114.117 ton, mengindikasikan adanya upaya stabilisasi pasokan pasca-lebaran atau intervensi pasar yang mulai berdampak setelah mencapai level terendah pada bulan sebelumnya.

Gambar 3.80. Stok Beras Periode Tiap Akhir Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2025

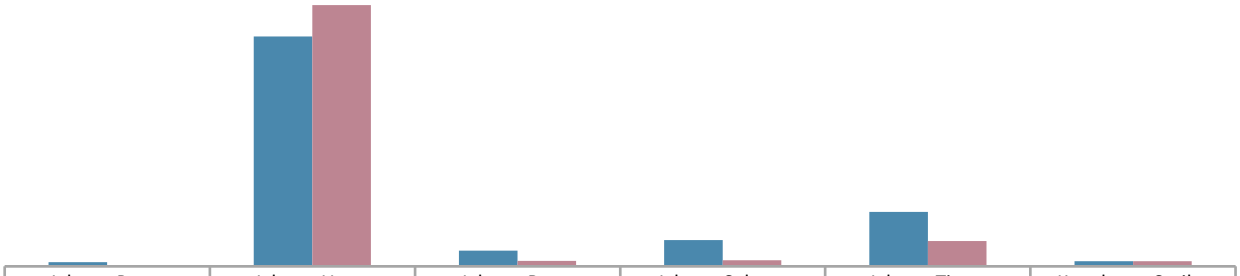


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2024	30.097	35.990	39.751	45.986	49.389	48.883	45.935	43.995	47.572	47.414	46.744	47.416
2025	50.516	45.632	48.953	54.264	45.680	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: PT Food Station Tjipinang Jaya

Kondisi cadangan stok beras di Provinsi DKI Jakarta pada semester pertama tahun 2025 memperlihatkan tren penguatan yang signifikan pada empat bulan pertama, sebelum mengalami koreksi pada bulan kelima jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Bulan Januari 2025 menjadi momen dengan lonjakan surplus terbesar, di mana stok beras meroket sebesar 67,84% dari 30.097 ton pada tahun 2024 menjadi 50.516 ton. Tren positif ini berlanjut secara konsisten hingga bulan April 2025 yang mencatatkan volume tertinggi sebesar 54.264 ton atau tumbuh 18,00% dibandingkan April 2024. Kendati demikian, dinamika ketersediaan pangan mengalami pergeseran pada bulan Mei 2025, di mana stok tercatat menyusut sebesar 7,51% menjadi 45.680 ton dibandingkan capaian bulan Mei 2024 yang sebesar 49.389 ton, mengindikasikan perlunya atensi terhadap stabilitas pasokan memasuki pertengahan tahun setelah performa yang sangat kuat di awal tahun.

Gambar 3.81. Jumlah Populasi Ternak di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024

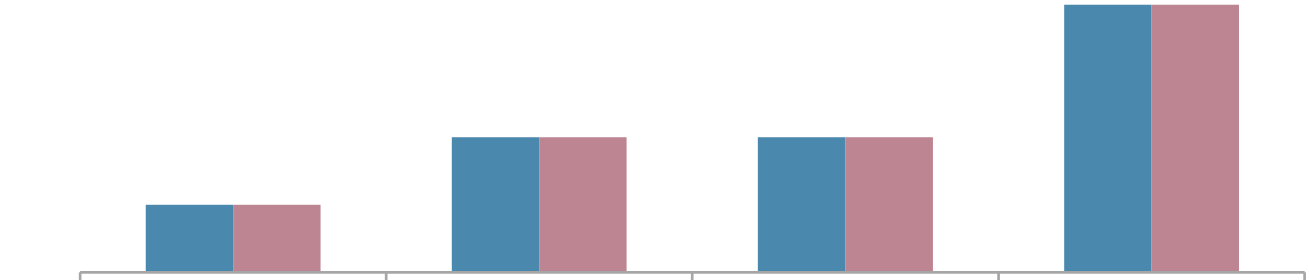


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	313	17.046	1.178	1.952	4.040	387
2024	-	19.353	416	460	1.889	382

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Populasi ternak di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2023 hingga 2024 didominasi oleh Jakarta Utara sebagai sentra peternakan utama dengan pertumbuhan positif di antara penurunan populasi yang cukup signifikan di wilayah lainnya Jakarta Utara sendiri mengalami kenaikan populasi sebesar 13,53%, bergerak dari 17.046 ekor pada tahun 2023 menjadi 19.353 ekor pada tahun 2024. Kontras dengan capaian tersebut, wilayah administrasi lain mengalami kontraksi yang dalam, dengan penurunan tertinggi terjadi di Jakarta Selatan sebesar 76,43% menjadi 460 ekor, diikuti oleh Jakarta Barat yang menyusut 64,69% menjadi 416 ekor, dan Jakarta Timur yang berkurang 53,24% menjadi 1.889 ekor. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Seribu mencatatkan penurunan tipis yang relatif stabil sebesar 1,29% menjadi 382 ekor, sedangkan Jakarta Pusat mencatatkan kehilangan populasi total pada tahun 2024 dari sebelumnya 313 ekor.

Gambar 3.82. Data Rumah Potong Hewan (RPH) menurut Wilayah di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2023	1	2	2	4
2024	1	2	2	4

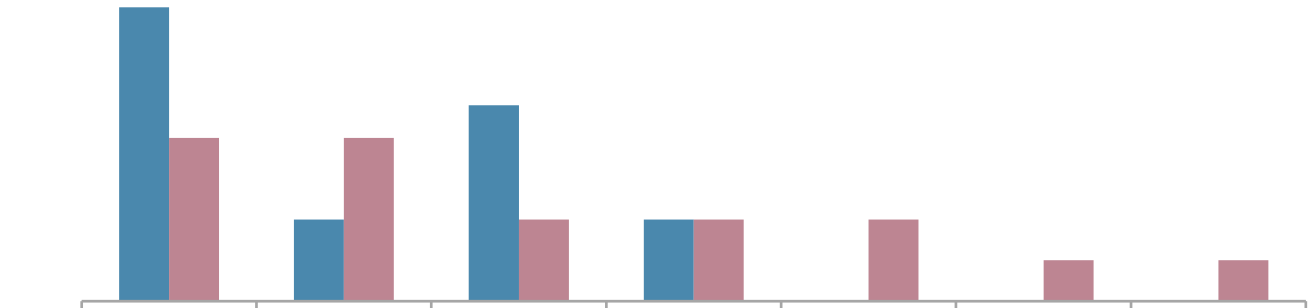
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Ketersediaan infrastruktur penunjang peternakan berupa Rumah Potong Hewan (RPH) di Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan kondisi stagnan tanpa adanya ekspansi fisik maupun pengurangan fasilitas di seluruh wilayah administrasi. Total RPH yang beroperasi bertahan konstan sebanyak 9 unit, dengan konsentrasi fasilitas terbesar berada di Jakarta Timur yang memiliki 4 unit RPH atau mencapai 44,44% dari total infrastruktur provinsi. Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan masing-masing berkontribusi dengan 2 unit RPH, sedangkan Jakarta Utara hanya memiliki 1 unit RPH. Ketiadaan perubahan data pada kedua tahun pengamatan ini mengindikasikan bahwa kapasitas terpasang RPH eksisting saat ini dianggap masih memadai untuk melayani volume pemotongan hewan di ibu kota, atau belum adanya realisasi investasi baru untuk penambahan sarana tersebut pada periode berjalan.

3.8. Pariwisata

Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 268 produk atau jasa ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya. Jumlah tersebut berasal dari 265 nama usaha, yang menunjukkan adanya sebagian pelaku usaha yang melakukan lebih dari satu pendaftaran. Pendaftaran kekayaan intelektual ini mencerminkan upaya pelaku ekonomi kreatif dalam melindungi identitas, nilai tambah, dan daya saing produk atau jasa yang dihasilkan sepanjang periode pendataan.

Gambar 3.83. Jumlah Peserta Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi Tahun 2023-2024



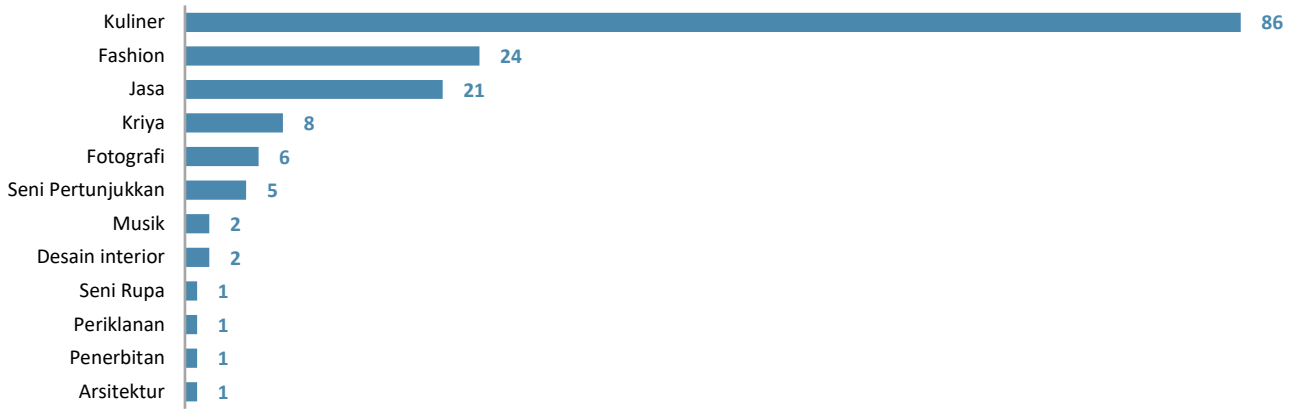
	Hotel dan Restoran	Kepemanduan	MICE	SPA	Edukator Museum	Fotografi	Musik
2023	360	100	240	100	0	0	0
2024	200	200	100	100	100	50	50

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pada 2023–2024, sertifikasi tenaga kerja pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan upaya penguatan kompetensi SDM melalui berbagai bidang keahlian dan lokasi pelaksanaan. Sepanjang periode tersebut, jumlah peserta yang tersertifikasi tercatat stabil, masing-masing sebanyak 800 peserta pada 2023 dan 800 peserta pada 2024. Stabilnya jumlah peserta ini menggambarkan kesinambungan pelaksanaan program sertifikasi, sekaligus menjadi gambaran kapasitas pembinaan kompetensi yang dapat dipertahankan dari tahun ke tahun.

Dari sisi bidang sertifikasi, struktur pada 2023 masih terkonsentrasi pada layanan inti pariwisata, terutama Hotel dan Restoran sebanyak 360 peserta (45,0%) dan MICE sebanyak 240 peserta (30,0%), sedangkan Kepemanduan dan SPA masing-masing 100 peserta (12,5%). Memasuki 2024, komposisi peserta bergeser menjadi lebih beragam: Hotel dan Restoran serta Kepemanduan sama-sama menjadi bidang terbesar dengan 200 peserta (masing-masing 25,0%), diikuti Edukator Museum, MICE, dan SPA masing-masing 100 peserta (12,5%), serta penambahan bidang ekonomi kreatif seperti Fotografi dan Musik masing-masing 50 peserta (6,25%). Perubahan ini mencerminkan perluasan cakupan sertifikasi ke bidang-bidang yang lebih variatif, diiringi penurunan peserta pada Hotel dan Restoran (turun 160 peserta) dan MICE (turun 140 peserta), sementara SPA relatif stabil.

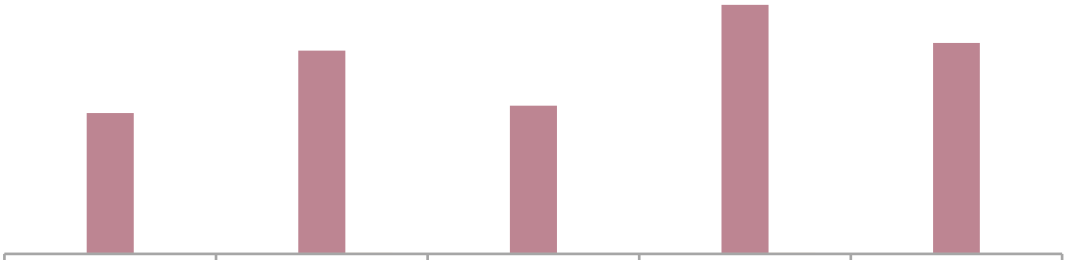
Gambar 3.84. Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2024, jumlah usaha ekonomi kreatif yang tercatat sebanyak 158 pelaku usaha yang tersebar pada 16 subsektor. Struktur usaha menunjukkan konsentrasi yang cukup tinggi pada beberapa subsektor utama. Kuliner menjadi subsektor dengan jumlah pelaku usaha terbesar, yaitu 86 unit atau sekitar 54,4 persen dari total usaha ekonomi kreatif. Kondisi ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi kreatif masih sangat bertumpu pada subsektor berbasis konsumsi yang dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain kuliner, subsektor *fashion* mencatat 24 pelaku usaha atau sekitar 15,2 persen, sedangkan subsektor jasa berjumlah 21 pelaku usaha atau sekitar 13,3 persen. Ketiga subsektor tersebut secara bersama-sama mencakup lebih dari delapan puluh persen keseluruhan usaha ekonomi kreatif. Subsektor lainnya berada pada skala yang relatif kecil, antara lain seni pertunjukkan, musik, fotografi, kriya, desain, dan subsektor kreatif berbasis teknologi. Jumlah pelaku usaha pada subsektor-subsektor ini secara individual masih terbatas, sehingga kontribusinya terhadap total usaha ekonomi kreatif belum signifikan. Pola ini mencerminkan bahwa ekosistem ekonomi kreatif masih belum merata, dengan sebagian besar pelaku usaha terkonsentrasi pada subsektor tertentu, sementara subsektor lain masih berkembang secara terbatas.

Gambar 3.85. Jumlah Wisatawan Memasuki Pintu Masuk Bandara menurut Semester Tahun 2023-2025

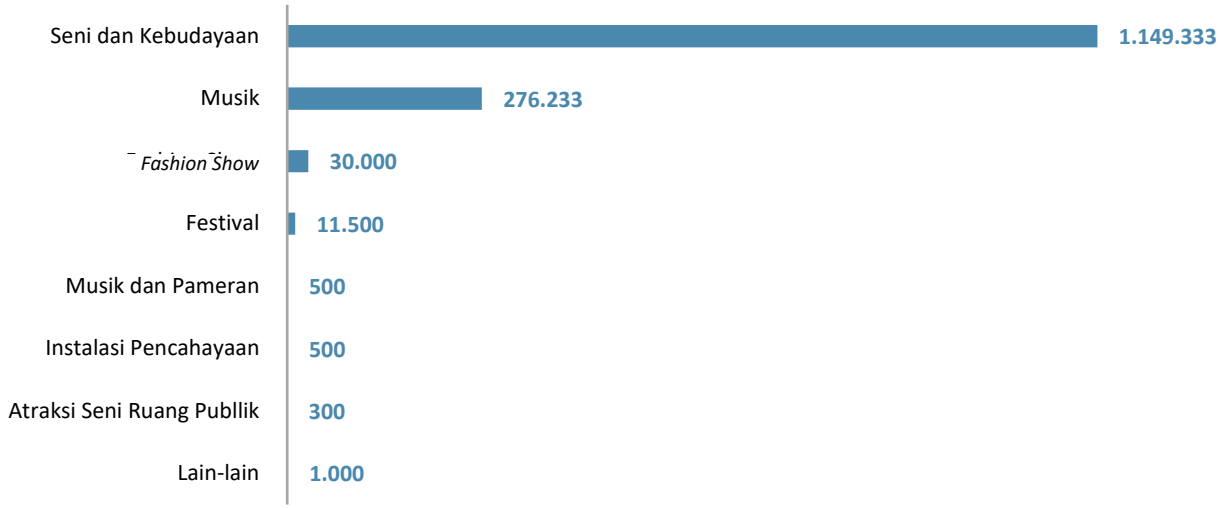


	Semester I 2023	Semester II 2023	Semester I 2024	Semester II 2024	Semester I 2025
Halim Perdana Kusuma	493	1.251	454	1.052	985
Soekarno Hatta	799.716	1.153.289	839.864	1.432.748	1.195.416
Tanjung Priok	1.971	6.339	4.645	6.154	4.268

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada periode Semester I 2023 sampai dengan Semester I 2025, data menunjukkan dinamika jumlah wisatawan yang masuk melalui dua pintu masuk, yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma. Secara agregat, total wisatawan pada Semester I 2023 tercatat 802.180 orang dan meningkat pada Semester II 2023 menjadi 1.160.879 orang. Memasuki Semester I 2024, jumlahnya menjadi 844.963 orang, kemudian mencapai puncak pada Semester II 2024 sebesar 1.439.954 orang. Pada Semester I 2025, total wisatawan tercatat 1.200.669 orang. Jika dibandingkan antarperiode yang sejenis *(year-on-year),* Semester I 2024 naik 5,33 persen dibanding Semester I 2023, dan Semester I 2025 meningkat lebih tinggi, yaitu 42,10 persen dibanding Semester I 2024. Sementara itu, Semester II 2024 juga menunjukkan kenaikan 24,04 persen dibanding Semester II 2023. Pola ini mengindikasikan adanya lonjakan yang relatif kuat terutama pada Semester II 2024, diikuti penguatan pada Semester I 2025. Dilihat dari komposisinya, arus wisatawan sangat terkonsentrasi pada Bandara Soekarno-Hatta yang secara konsisten menyumbang sekitar lebih dari 99 persen dari total wisatawan setiap semester.
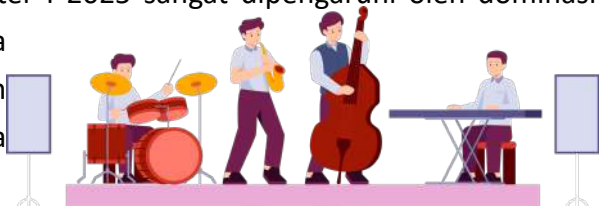
Gambar 3.86. Jumlah Pengunjung Event di DKI Jakarta menurut Penyelenggara Semester I Tahun 2025



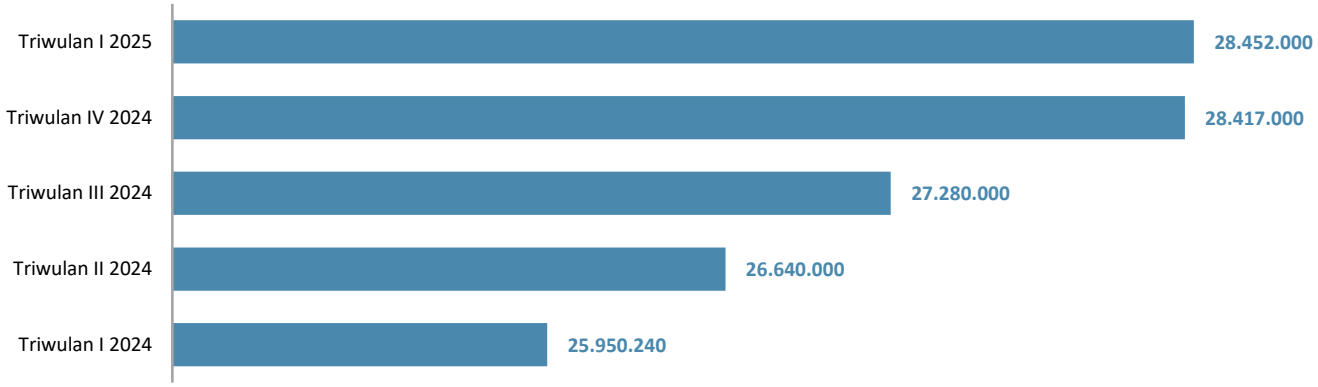
Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Penyelenggaraan berbagai *event* di Provinsi DKI Jakarta pada Semester I tahun 2025 menunjukkan dinamika aktivitas sosial, budaya, dan hiburan yang cukup tinggi serta menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik. Beragam jenis *event* yang diselenggarakan, mulai dari kegiatan seni, budaya, hingga hiburan, mampu menarik minat pengunjung dalam jumlah yang besar sepanjang periode Januari hingga Juni 2025. Kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ruang apresiasi kreativitas dan budaya, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menghidupkan aktivitas pariwisata serta ekonomi kreatif di wilayah DKI Jakarta. Melalui penyelenggaraan *event* yang beragam, pemerintah daerah bersama berbagai pihak terkait berupaya menghadirkan pengalaman rekreasi dan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong meningkatnya kunjungan pada berbagai kegiatan yang diselenggarakan di ibu kota.

Data pada Semester I tahun 2025 di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa aktivitas *event* paling banyak menarik kunjungan melalui kegiatan berbasis seni, budaya, dan hiburan, dengan total pengunjung tercatat 1.469.366 orang. Dilihat dari jenis *event* yang ditampilkan pada grafik, Seni dan Kebudayaan menjadi penyumbang terbesar dengan 1.149.333 pengunjung (78,22%), diikuti Musik sebanyak 276.233 pengunjung (18,80%); dua kategori ini menunjukkan bahwa minat masyarakat paling kuat terkonsentrasi pada event yang menghadirkan pengalaman budaya dan hiburan. Kategori lain tercatat jauh lebih kecil, yaitu *Fashion Show* sebanyak 30.000 pengunjung (2,04%) dan Festival sebanyak 11.500 pengunjung (0,78%), sedangkan kategori dengan jumlah kunjungan paling sedikit meliputi Musik dan Pameran dan Instalasi Pencahayaan hanya 500 pengunjung serta Atraksi Seni Ruang Publik hanya 300 pengunjung. Secara keseluruhan, pola pada grafik ini menunjukkan bahwa bagaimana pengunjung *event* terbentuk pada Semester I 2025 sangat dipengaruhi oleh dominasi *event* Seni dan Kebudayaan serta Musik, sementara kategori lainnya berperan sebagai pelengkap dalam keragaman penyelenggaraan event di DKI Jakarta pada periode tersebut.



Gambar 3.87. Jumlah Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Sektor Pariwisata (akomodasi makan dan minum) menurut Nilai Rupiah Tahun 2024-2025

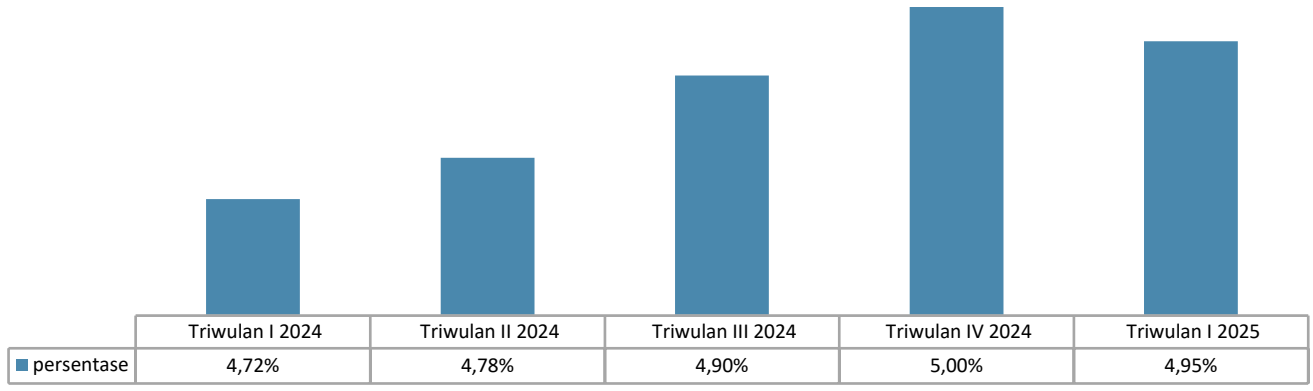


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Sektor pariwisata, khususnya pada kelompok usaha akomodasi serta penyediaan makan minum, merupakan salah satu sektor yang berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, kegiatan wisata, serta konsumsi layanan penginapan dan kuliner. Perkembangan sektor ini dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan besarnya nilai tambah yang dihasilkan serta laju pertumbuhan PDRB yang menunjukkan dinamika perkembangan sektor tersebut dari waktu ke waktu. Sepanjang tahun 2023 hingga awal tahun 2025, kinerja sektor akomodasi dan makan minum menunjukkan kecenderungan meningkat, yang menandakan bahwa aktivitas ekonomi pada sektor pariwisata tetap bergerak positif seiring meningkatnya kegiatan masyarakat dan permintaan terhadap layanan terkait pariwisata.

Dilihat dari nilai PDRB, sektor akomodasi dan makan minum menunjukkan peningkatan secara bertahap selama tahun 2023. Pada Triwulan I 2023 nilai PDRB tercatat sebesar 23.685.494, kemudian meningkat menjadi 24.770.048 pada Triwulan II 2023. Peningkatan tersebut berlanjut pada Triwulan III 2023 dengan nilai PDRB mencapai 25.419.399, dan kembali meningkat pada Triwulan IV 2023 menjadi 26.101.268. Tren peningkatan nilai tambah sektor ini juga berlanjut hingga periode berikutnya, di mana pada Triwulan I 2025 nilai PDRB sektor akomodasi dan makan minum tercatat sebesar 28.452.000, yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi pada sektor ini tetap berkembang pada awal tahun 2025.

Gambar 3.88. Persentase Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Sektor Pariwisata (Akomodasi Makan dan Minum) menurut Nilai Rupiah Tahun 2024-2025



	Triwulan I 2024	Triwulan II 2024	Triwulan III 2024	Triwulan IV 2024	Triwulan I 2025
persentase	4,72%	4,78%	4,90%	5,00%	4,95%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Sementara itu, dari sisi laju pertumbuhan, sektor akomodasi dan makan minum juga menunjukkan perkembangan yang relatif stabil. Pada Triwulan I 2023 laju pertumbuhan tercatat sebesar 4,49 persen, kemudian meningkat menjadi 4,65 persen pada Triwulan II 2023. Selanjutnya pada Triwulan III 2023 pertumbuhan meningkat menjadi 4,79 persen dan tetap berada pada angka yang sama pada Triwulan IV 2023. Pada periode yang lebih baru, yakni Triwulan I 2025, laju pertumbuhan sektor ini tercatat sebesar 4,95 persen, yang menunjukkan bahwa sektor akomodasi dan makan minum masih mampu mempertahankan kinerja pertumbuhan yang positif pada awal tahun tersebut.

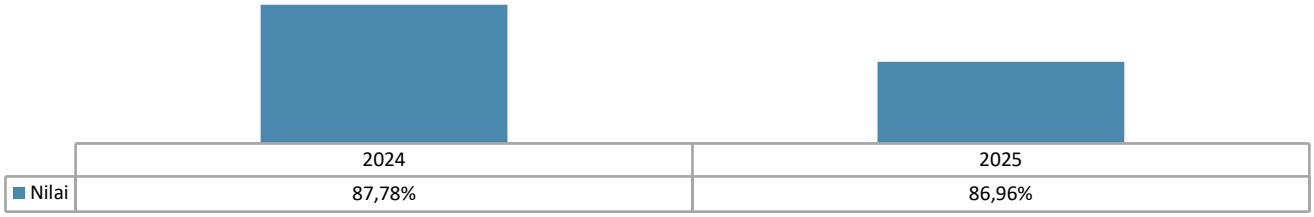
Tabel 3.3. Tabel Nama Lokasi Agrowisata yang Dikembangkan Tahun 2024

Kota/Kabupaten	Nama Lokasi	Alamat Lokasi
Jakarta Timur	Kebun Bibit Ujung Menteng	Jl. Tambun Rengas Selatan RT 02/08 No. 28 A Timur
Jakarta Utara	Vezo *Grapes Farm*	Jln. Raya Cakung Cilincing SPBU Pertamina RT 002/ RW01

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Melalui pengembangan agrowisata, masyarakat dapat memperoleh pengalaman wisata yang menggabungkan unsur pembelajaran mengenai pertanian, lingkungan, serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Di wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta, pengembangan agrowisata juga berperan dalam mendukung konsep ruang terbuka hijau, *urban farming*, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketahanan pangan dan lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan lokasi agrowisata menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk menghadirkan alternatif destinasi wisata edukatif sekaligus memperkaya ragam kegiatan pariwisata di wilayah perkotaan. Pada tahun 2024 tercatat 2 lokasi agrowisata yang dikembangkan di wilayah DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Lokasi agrowisata yang tercatat antara lain Kebun Bibit Ujung Menteng dan Vezo *Grapes Farm*. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan agrowisata di DKI Jakarta pada tahun 2023 dan 2024 telah tersebar di berbagai wilayah administrasi, dengan konsentrasi pengembangan yang relatif lebih banyak berada di Jakarta Pusat dibandingkan wilayah lainnya.

Gambar 3.89. Nilai Ketertarikan Masyarakat Terhadap Pariwisata DKI Jakarta Tahun 2024

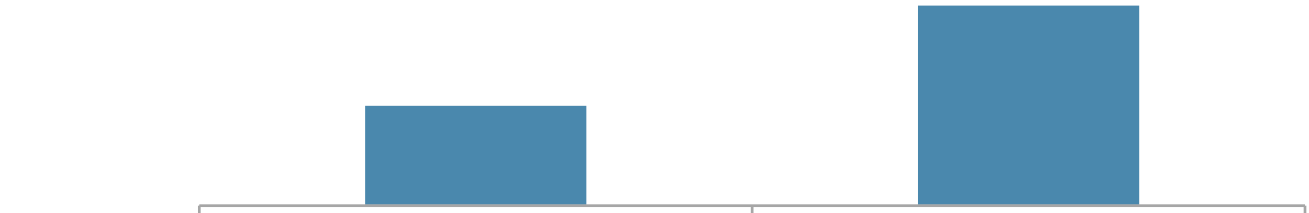


Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Keberhasilan sektor pariwisata DKI Jakarta menunjukkan performa yang sangat impresif sepanjang tahun 2024 dipicu oleh konsistensi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan revitalisasi ruang publik dan diversifikasi atraksi wisata, mulai dari wisata sejarah di Kota Tua hingga wisata modern di kawasan pusat kota. Proses pengumpulan data ini dilakukan secara sistematis untuk memotret sejauh mana kualitas pelayanan,

fasilitas, dan keamanan di objek wisata mampu memenuhi ekspektasi publik. Dengan capaian mendekati angka 90, Jakarta berhasil membuktikan bahwa integrasi transportasi publik menuju titik-titik wisata telah mempermudah aksesibilitas pengunjung, yang secara langsung meningkatkan nilai kepuasan dan minat kunjung kembali masyarakat.

Gambar 3.90. Jumlah Responden Ketertarikan Masyarakat Terhadap Pariwisata DKI Jakarta Tahun 2024

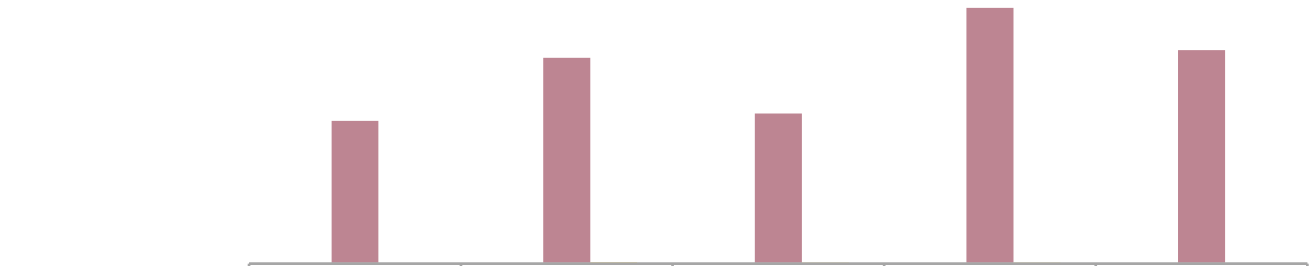


	2024	2025
Jumlah Responden	1.949	2.034

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2024, nilai ketertarikan masyarakat terhadap pariwisata di DKI Jakarta tercatat sebesar 87,78 berdasarkan hasil pengolahan terhadap 1.949 responden. Angka ini menunjukkan bahwa minat terhadap aktivitas wisata di ibu kota berada pada kategori tinggi dan mencerminkan adanya daya tarik yang tetap kuat di tengah dinamika sosial dan ekonomi perkotaan. Tingginya nilai tersebut mengindikasikan bahwa berbagai destinasi, atraksi, serta fasilitas penunjang pariwisata masih relevan dan diminati, sekaligus menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha dan pemangku kebijakan dalam menjaga keberlanjutan sektor ini. Sementara itu, tahun 2025, nilainya adalah 86,96% dari 2.034 responden. Jumlah ini alami penurunan 0,82%, sedangkan jumlah responde alami peningkatan 85 orang.

Gambar 3.91. Jumlah Wisatawan Memasuki Pintu Masuk Bandara menurut Triwulan Tahun 2023-2025



	Semester I 2023	Semester II 2023	Semester I 2024	Semester II 2024	Semester I 2025
Halim Perdana Kusuma	493	1.251	454	1.052	985
Soekarno Hatta	799.716	1.153.289	839.864	1.432.748	1.195.416
Tanjung Priok	1.971	6.339	4.645	6.154	4.268

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada periode Semester I 2023 sampai dengan Semester I 2025, data menunjukkan dinamika jumlah wisatawan yang masuk melalui dua pintu masuk, yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma. Secara agregat, total wisatawan pada Semester I 2023 tercatat 802.180 orang dan meningkat pada Semester II 2023 menjadi 1.160.879 orang. Memasuki Semester I 2024, jumlahnya menjadi 844.963 orang, kemudian mencapai puncak pada Semester II 2024 sebesar 1.439.954 orang. Pada

Semester I 2025, total wisatawan tercatat 1.200.669 orang. Jika dibandingkan antarperiode yang sejenis *(year-on-year)*, Semester I 2024 naik 5,33 persen dibanding Semester I 2023, dan Semester I 2025 meningkat lebih tinggi, yaitu 42,10 persen dibanding Semester I 2024. Sementara itu, Semester II 2024 juga menunjukkan kenaikan 24,04 persen dibanding Semester II 2023. Pola ini mengindikasikan adanya lonjakan yang relatif kuat terutama pada Semester II 2024, diikuti penguatan pada Semester I 2025. Dilihat dari komposisinya, arus wisatawan sangat terkonsentrasi pada Bandara Soekarno-Hatta yang secara konsisten menyumbang sekitar 99,35–99,69 persen dari total wisatawan setiap semester.

Gambar 3.92. Nilai Ketertarikan Masyarakat Terhadap Pariwisata DKI Jakarta Tahun 2024

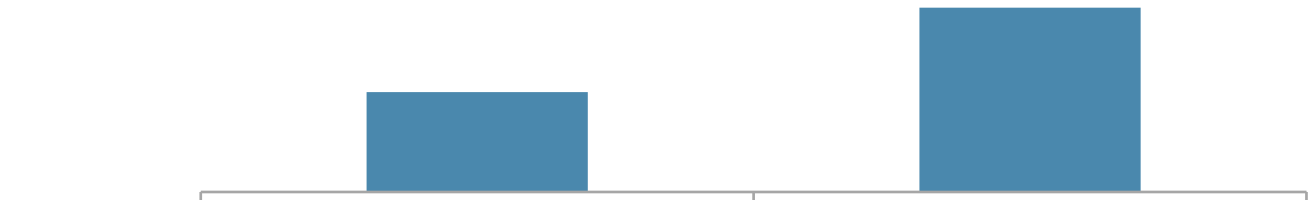


	2024	2025
Nilai	87,78%	86,96%

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Keberhasilan sektor pariwisata DKI Jakarta menunjukkan performa yang sangat impresif sepanjang tahun 2024 dipicu oleh konsistensi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan revitalisasi ruang publik dan diversifikasi atraksi wisata, mulai dari wisata sejarah di Kota Tua hingga wisata modern di kawasan pusat kota. Proses pengumpulan data ini dilakukan secara sistematis untuk memotret sejauh mana kualitas pelayanan, fasilitas, dan keamanan di objek wisata mampu memenuhi ekspektasi publik. Dengan capaian mendekati angka 90, Jakarta berhasil membuktikan bahwa integrasi transportasi publik menuju titik-titik wisata telah mempermudah aksesibilitas pengunjung, yang secara langsung meningkatkan nilai kepuasan dan minat kunjung kembali masyarakat.

Gambar 3.93. Jumlah Responden Ketertarikan Masyarakat Terhadap Pariwisata DKI Jakarta Tahun 2024

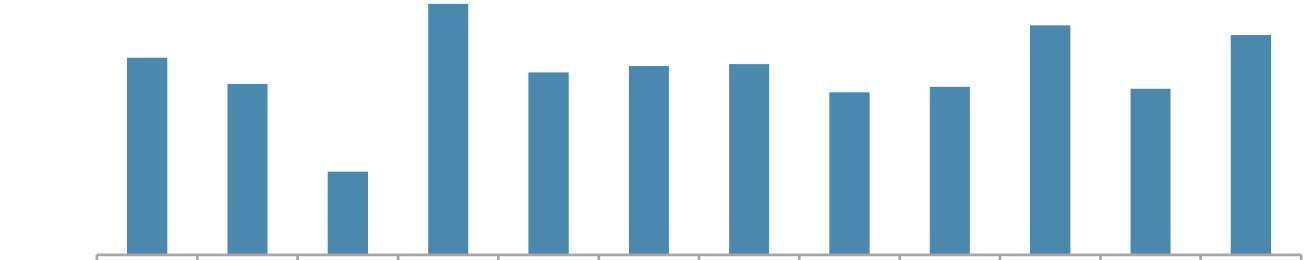


	2024	2025
Jumlah Responden	1.949	2.034

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2024, nilai ketertarikan masyarakat terhadap pariwisata di DKI Jakarta tercatat sebesar 87,78 berdasarkan hasil pengolahan terhadap 1.949 responden. Angka ini menunjukkan bahwa minat terhadap aktivitas wisata di ibu kota berada pada kategori tinggi dan mencerminkan adanya daya tarik yang tetap kuat di tengah dinamika sosial dan ekonomi perkotaan. Tingginya nilai tersebut mengindikasikan bahwa berbagai destinasi, atraksi, serta fasilitas penunjang pariwisata masih relevan dan diminati, sekaligus menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha dan pemangku kebijakan dalam menjaga keberlanjutan sektor ini.

Gambar 3.94. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata menurut Bulan di DKI Jakarta Tahun 2025

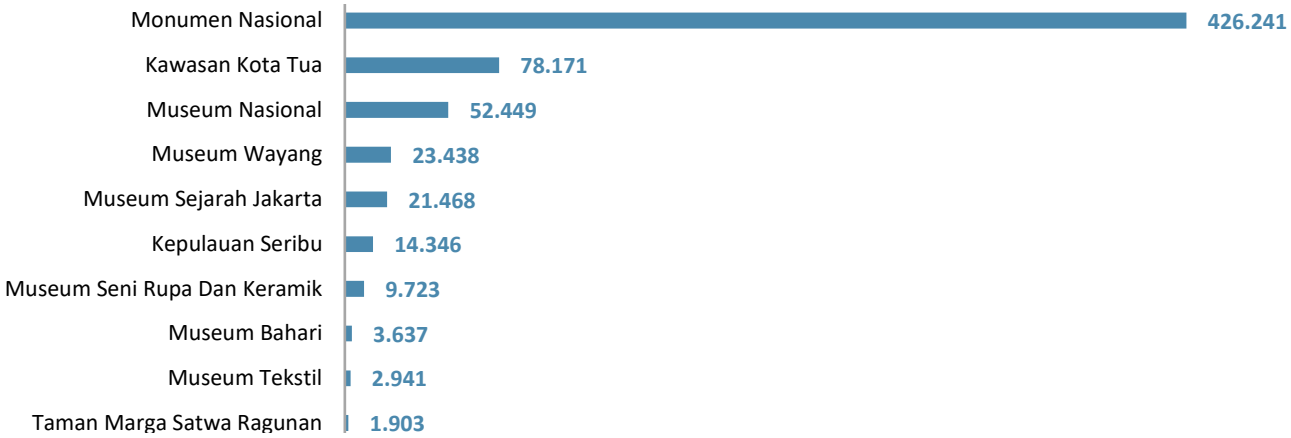


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Jumlah	2.670.879	2.316.033	1.125.359	4.057.802	2.472.351	2.559.958	2.584.921	2.201.058	2.276.946	3.110.959	2.249.687	2.981.116

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Perkembangan kunjungan wisatawan ke obyek wisata di Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 menunjukkan pola fluktuatif sepanjang tahun dengan kecenderungan meningkat pada periode tertentu. Data memperlihatkan bahwa pergerakan jumlah kunjungan dipengaruhi oleh momentum libur nasional, cuti bersama, serta musim liburan, dengan kontribusi terbesar berasal dari wisatawan nusantara dibandingkan wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata di DKI Jakarta tahun 2025 berfluktuasi dengan total tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 4.057.802 kunjungan, sedangkan terendah pada bulan Maret sebesar 1.125.359 kunjungan. Pada awal tahun, kunjungan tercatat sebesar 2.670.879 kunjungan pada Januari dan menurun pada Februari menjadi 2.316.033 kunjungan, sebelum mencapai titik terendah di Maret. Selanjutnya, terjadi lonjakan signifikan pada April, kemudian relatif stabil di kisaran 2,2 juta hingga 3,1 juta kunjungan hingga akhir tahun, dengan peningkatan kembali pada Desember sebesar 2.981.116 kunjungan.

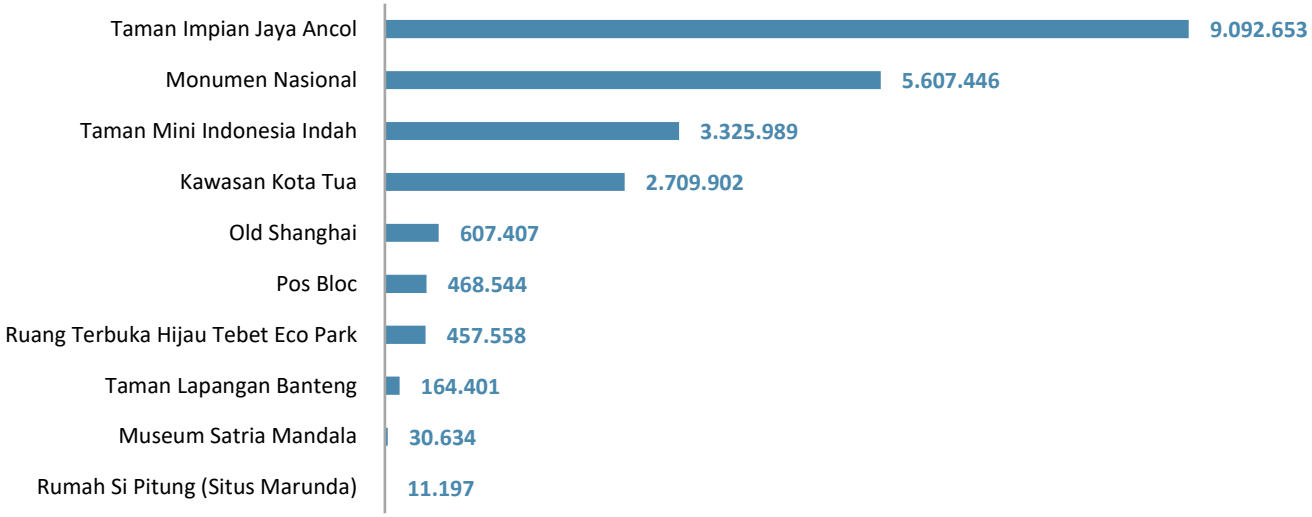
Gambar 3.95. Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara di DKI Jakarta Tahun 2025



Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Kunjungan wisatawan mancanegara ke obyek wisata di DKI Jakarta menunjukkan pola yang lebih terkonsentrasi pada destinasi tertentu. Kunjungan mancanegara tertinggi adalah Monumen Nasional sebesar 426.241 kunjungan, sedangkan obyek wisata lainnya menerima kunjungan dalam jumlah yang jauh lebih kecil. Preferensi wisatawan mancanegara cenderung terfokus pada destinasi tertentu yang memiliki daya tarik internasional.

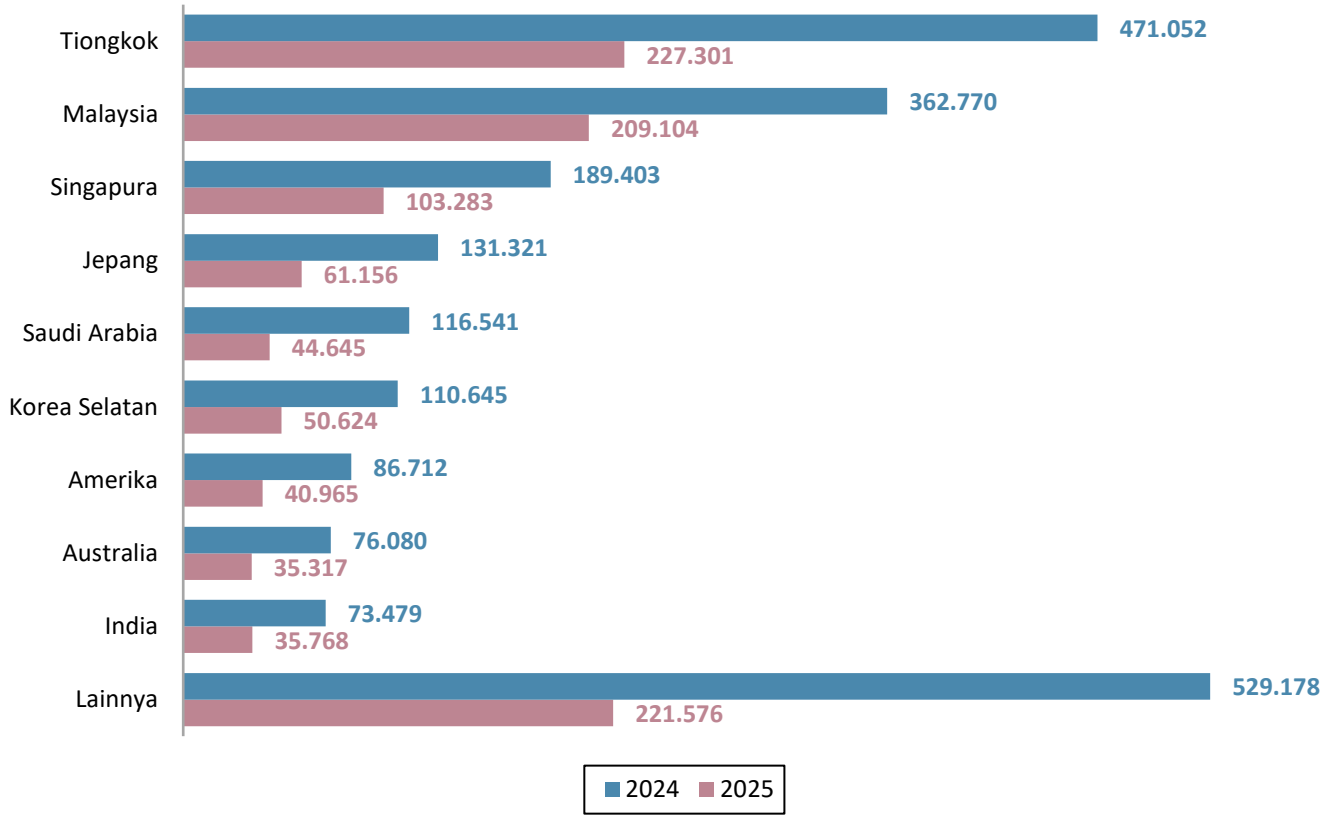
Gambar 3.96. Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara di DKI Jakarta Tahun 2025



Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Kunjungan wisatawan nusantara mendominasi seluruh obyek wisata di DKI Jakarta tahun 2025. Obyek wisata dengan kunjungan nusantara tertinggi tercatat pada Taman Impian Jaya Ancol sebesar 9.092.653 kunjungan, sementara obyek dengan kunjungan terendah adalah Rumah Si Pitung (Situs Marunda) sebesar 11.197 kunjungan. Secara umum, seluruh obyek wisata menunjukkan bahwa mayoritas pengunjung berasal dari dalam negeri, dengan selisih yang sangat signifikan dibandingkan wisatawan mancanegara. Hal ini menegaskan bahwa pasar domestik menjadi penggerak utama kunjungan wisata di DKI Jakarta.

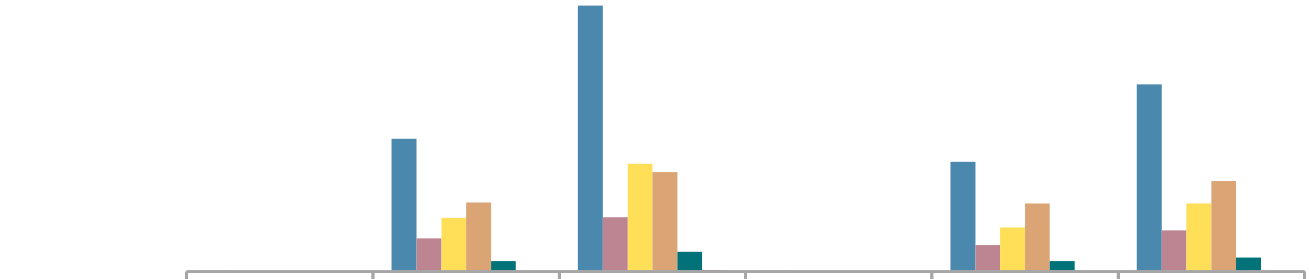
Gambar 3.97. 10 Terbesar Wisatawan Mancanegara Berdasarkan Kebangsaan ke DKI Jakarta Tahun 2024-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Jakarta tetap berperan sebagai salah satu pintu masuk utama wisatawan asing ke Indonesia, baik sebagai tujuan akhir kunjungan maupun sebagai kota transit menuju daerah lain. Kunjungan wisatawan mancanegara terjadi sepanjang tahun dengan variasi yang dipengaruhi oleh musim liburan internasional serta aktivitas ekonomi dan pertemuan berskala global yang terpusat di wilayah DKI Jakarta. Wisatawan dari kawasan Asia masih menjadi penyumbang terbesar jumlah kunjungan, diikuti oleh kawasan Eropa dan Amerika. Pada tahun 2025 ini, pengunjung terbanyak berasal dari kewarganegaraan atau kebangsaan tiongkok sebanyak 227.301 orang, disusul dengan Malaysia sebanyak 209.104. Pola ini mencerminkan peran strategis Jakarta sebagai pusat kegiatan bisnis, pemerintahan, dan jasa, selain sebagai destinasi pariwisata perkotaan.

Gambar 3.98. Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Bintang menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2024 dan 2025



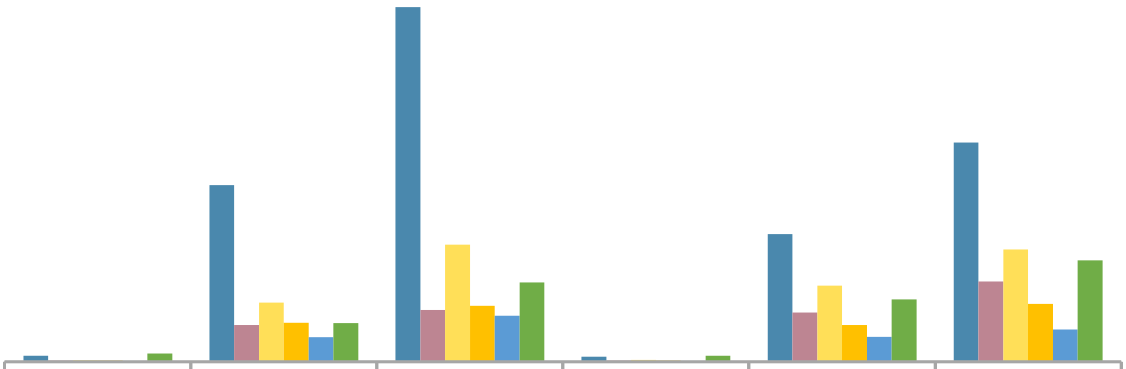
	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur
	2024			2025		
Jakarta Pusat	205	28.213	56.426	207	23.288	39.730
Jakarta Utara	46	7.087	11.586	39	5.644	8.796
Jakarta Barat	101	11.450	22.900	86	9.391	14.476
Jakarta Selatan	120	14.680	21.144	126	14.469	19.266
Jakarta Timur	22	2.253	4.217	22	2.300	3.028
Kepulauan Seribu	2	128	380	-	-	-

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Ketersediaan akomodasi merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung aktivitas pariwisata dan mobilitas wisatawan di suatu wilayah. Data jumlah akomodasi, kamar, dan tempat tidur dapat menggambarkan kapasitas layanan penginapan yang tersedia bagi pengunjung. Oleh karena itu, perkembangan jumlah fasilitas akomodasi di wilayah DKI Jakarta perlu dianalisis untuk melihat dinamika penyediaan sarana pariwisata dari waktu ke waktu. Pada tahun 2025, jumlah akomodasi yang tersedia di DKI Jakarta tercatat sebanyak 480 unit, sedikit menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 496 unit. Penurunan ini juga diikuti oleh berkurangnya kapasitas kamar dari 63.811 kamar pada 2024 menjadi 55.092 kamar pada 2025, serta jumlah tempat tidur yang turun dari 116.653 tempat tidur menjadi 85.296 tempat tidur. Secara wilayah, Jakarta Pusat menjadi daerah dengan jumlah akomodasi terbanyak pada tahun 2025, yaitu 207 unit, meskipun jumlah kamar dan tempat tidurnya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Jakarta Selatan menunjukkan peningkatan jumlah akomodasi dari 120 unit pada 2024 menjadi 126 unit pada 2025, yang menunjukkan adanya penambahan fasilitas penginapan di wilayah tersebut. Di sisi lain, Kepulauan Seribu tidak tercatat memiliki akomodasi pada tahun 2025, berbeda dengan tahun 2024 yang masih memiliki 2 unit

akomodasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi fasilitas penginapan di DKI Jakarta masih terpusat di wilayah perkotaan utama, khususnya Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, yang berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi, bisnis, dan pariwisata.

Gambar 3.99. Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Nonbintang di DKI Jakarta Tahun 2024



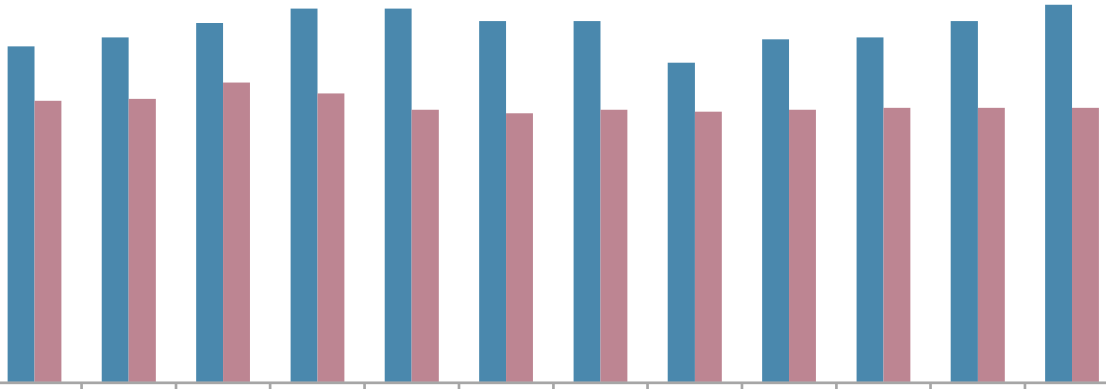
	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur
	2024			2025		
Jakarta Pusat	177	5.264	10.559	146	3.800	6.527
Jakarta Utara	31	1.090	1.540	35	1.470	2.390
Jakarta Barat	47	1.759	3.489	51	2.264	3.340
Jakarta Selatan	38	1.156	1.669	32	1.092	1.726
Jakarta Timur	18	735	1.368	17	743	961
Kepulauan Seribu	244	1.147	2.360	179	1.852	3.019

Sumber: Jakarta Dalam Angka Tahun 2026

Jumlah akomodasi hotel nonbintang di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 menunjukkan peran penting sektor ini dalam menyediakan alternatif penginapan yang lebih terjangkau bagi wisatawan maupun pelaku perjalanan. Berdasarkan data yang tersedia, tercatat terdapat 555 unit akomodasi hotel nonbintang dengan total 11.151 kamar dan 20.985 tempat tidur yang tersebar di enam wilayah administrasi. Sebaran fasilitas tersebut menunjukkan konsentrasi terbesar berada di Jakarta Pusat dengan 177 akomodasi, 5.264 kamar, dan 10.559 tempat tidur, yang mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi dan pariwisata di kawasan tersebut. Selain itu, Kepulauan Seribu juga memiliki jumlah akomodasi yang cukup besar yaitu 244 unit dengan 1.147 kamar dan 2.360 tempat tidur, sejalan dengan fungsinya sebagai kawasan destinasi wisata bahari. Sementara itu, wilayah lain seperti Jakarta Barat memiliki 47 akomodasi dengan 1.759 kamar dan 3.489 tempat tidur, Jakarta Selatan sebanyak 38 akomodasi dengan 1.156 kamar dan 1.669 tempat tidur, serta Jakarta Utara sebanyak 31 akomodasi dengan 1.090 kamar dan 1.540 tempat tidur. Adapun jumlah paling sedikit terdapat di Jakarta Timur dengan 18 akomodasi, 735 kamar, dan 1.368 tempat tidur. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan hotel nonbintang di DKI Jakarta cenderung terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki aktivitas pariwisata dan ekonomi yang lebih tinggi.



Gambar 3.100. Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik menurut Bulan (Hari) di DKI Jakarta Tahun 2025



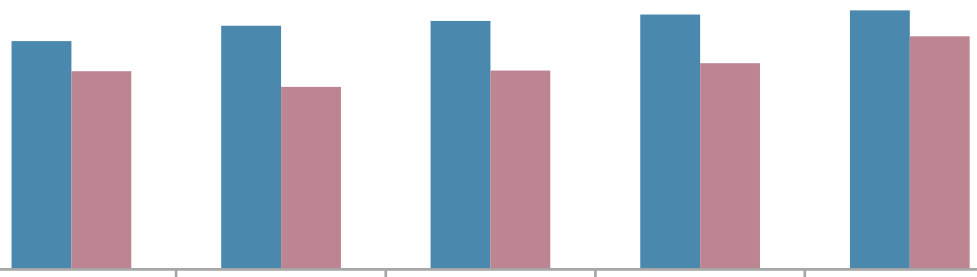
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Tamu Asing	1,86	1,91	1,99	2,07	2,07	2,00	2,00	1,77	1,90	1,91	2,00	2,09
Tamu Domestik	1,56	1,57	1,66	1,60	1,51	1,49	1,51	1,50	1,51	1,52	1,52	1,52

Sumber: Jakarta Dalam Angka Tahun 2026 Hal. 715

Rata-rata lama menginap tamu merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan pola tinggal wisatawan di suatu daerah. Indikator ini menunjukkan berapa lama wisatawan memanfaatkan fasilitas akomodasi selama berada di suatu wilayah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai intensitas aktivitas pariwisata serta potensi pemanfaatan sektor perhotelan di DKI Jakarta sepanjang tahun. Pada tahun 2025, rata-rata lama menginap tamu di hotel DKI Jakarta menunjukkan perbedaan antara tamu asing dan tamu domestik. Sepanjang tahun tersebut, tamu asing tercatat memiliki rata-rata lama menginap berkisar antara 1,77 hingga 2,09 hari, sedangkan tamu domestik berada pada kisaran 1,49 hingga 1,66 hari. Lama menginap tamu asing relatif lebih tinggi dibandingkan tamu domestik, dengan nilai tertinggi terjadi pada Desember sebesar 2,09 hari, sementara nilai terendah terjadi pada Agustus sebesar 1,77 hari. Sementara itu, lama menginap tamu domestik tertinggi tercatat pada Maret sebesar 1,66 hari, sedangkan yang terendah terjadi pada Juni sebesar 1,49 hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa wisatawan asing cenderung tinggal lebih lama dibandingkan wisatawan domestik, yang umumnya memiliki durasi kunjungan yang lebih singkat. Pola tersebut menggambarkan bahwa aktivitas pariwisata di DKI Jakarta selama tahun 2025 masih didominasi oleh kunjungan dengan durasi relatif singkat, baik untuk tujuan bisnis maupun perjalanan singkat lainnya.



Gambar 3.101. Jumlah Rata-rata Lama Menginap Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara pada Hotel Berbintang di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025



	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4	Bintang 5
Wisatawan Mancanegara	1,78	1,90	1,94	1,99	2,02
Wisatawan Nusantara	1,55	1,43	1,55	1,61	1,82

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2025 (periode Januari sampai Juni 2025), rata-rata lama menginap tamu pada hotel berbintang di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara cenderung tinggal lebih lama dibanding wisatawan nusantara. Indikator ini menggambarkan rata-rata jumlah malam yang dihabiskan tamu selama menginap, sehingga dapat digunakan untuk membaca karakter perjalanan dan intensitas aktivitas pariwisata di hotel berbintang.

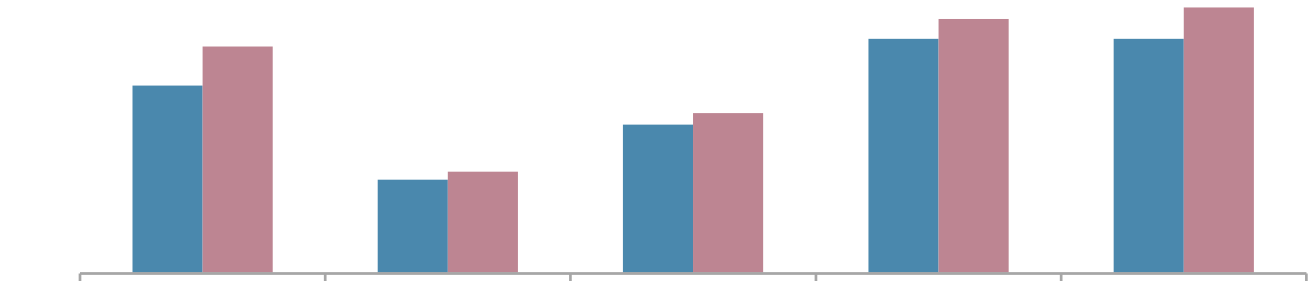
Secara rata-rata selama Januari–Juni 2025, lama menginap wisatawan mancanegara tercatat 1,93 malam, sedangkan wisatawan nusantara 1,59 malam, atau terdapat selisih sekitar 0,34 malam. Secara bulanan, rerata lama menginap kedua kelompok tamu mencapai nilai tertinggi pada Maret 2025, yaitu 2,04 malam untuk wisatawan mancanegara dan 1,68 malam untuk wisatawan nusantara. Sementara itu, nilai terendah wisatawan mancanegara terjadi pada Januari 2025 sebesar 1,85 malam, sedangkan wisatawan nusantara terendah pada Juni 2025 sebesar 1,51 malam. Pola ini memperlihatkan fluktuasi yang relatif moderat, namun cukup menegaskan perbedaan perilaku lama tinggal antara tamu mancanegara dan tamu nusantara di hotel berbintang DKI Jakarta.

3.9. Perhubungan

3.9.1. Transjakarta

Transportasi publik merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung mobilitas masyarakat perkotaan serta mendorong terciptanya sistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan. Di Provinsi DKI Jakarta, pengembangan transportasi berbasis bus rapid transit melalui layanan Transjakarta menjadi salah satu strategi utama pemerintah daerah untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi kemacetan, dan memperluas jangkauan layanan transportasi massal. Salah satu elemen penting dalam sistem tersebut adalah keberadaan halte sebagai titik naik dan turun penumpang yang berfungsi menghubungkan masyarakat dengan jaringan layanan transportasi publik. Oleh karena itu, ketersediaan dan sebaran halte Transjakarta menjadi indikator penting dalam menggambarkan tingkat pelayanan transportasi publik di wilayah perkotaan. Data mengenai jumlah dan distribusi halte tidak hanya menunjukkan perkembangan infrastruktur transportasi dari waktu ke waktu, tetapi juga memberikan gambaran mengenai upaya perluasan layanan dan peningkatan konektivitas antarwilayah di dalam maupun sekitar DKI Jakarta.

Gambar 3.102. Jumlah Halte Transjakarta menurut Wilayah DKI Jakarta, 2023-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2023	48	24	38	60	60
2024	58	26	41	65	68

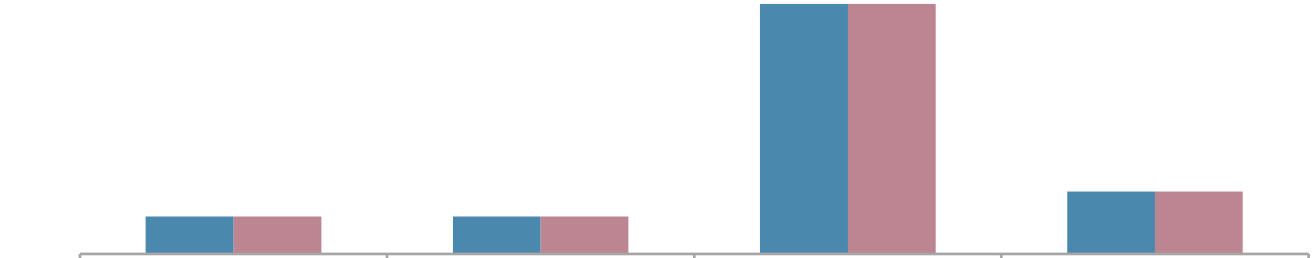
Sumber: PT Transportasi Jakarta

Berdasarkan kompilasi Data Halte Transjakarta, jumlah halte yang tercatat pada periode 2024 mencapai 258 halte. Data ini menggambarkan apa yang terjadi pada infrastruktur titik layanan Transjakarta, yaitu adanya penambahan jumlah halte dibandingkan tahun sebelumnya, periode 2023, yang berjumlah 230 halte. Dengan demikian, secara keseluruhan terjadi kenaikan 39 halte atau sekitar 17,0 persen. Peningkatan terbesar terjadi di Jakarta Pusat yang naik dari 48 halte menjadi 58 halte. Jakarta Timur meningkat dari 60 menjadi 68 halte, disusul Jakarta Selatan dari 60 menjadi 65 halte, Jakarta Barat dari 38 menjadi 41 halte, dan Jakarta Utara dari 24 menjadi 26 halte, ini menunjukkan penguatan titik layanan pada kawasan dengan aktivitas mobilitas yang tinggi.

3.9.2. Angkutan Umum

Ketersediaan armada angkutan umum merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kapasitas pelayanan transportasi publik di suatu wilayah. Armada yang memadai berperan dalam menunjang mobilitas masyarakat serta mendukung kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, informasi mengenai jumlah armada angkutan umum menjadi data yang penting untuk memantau perkembangan layanan transportasi dari waktu ke waktu. Data armada angkutan umum pada periode 2019–2023 memberikan gambaran mengenai jumlah kendaraan yang beroperasi menurut operator atau perusahaan pengelola, sehingga dapat digunakan untuk melihat dinamika penyediaan armada, peran operator dalam pengelolaan transportasi publik, serta perubahan jumlah armada yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 3.103. Jumlah Titik Integrasi Antar Moda menurut Wilayah DKI Jakarta Tahun 2023-2024

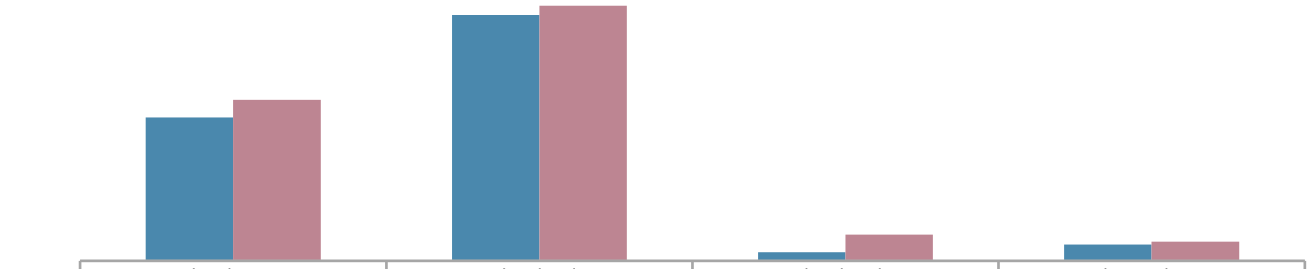


	Jakarta Pusat	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2023	3	3	20	5
2024	3	3	20	5

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2024, jumlah titik integrasi antar moda transportasi di DKI Jakarta tercatat sebanyak 15 lokasi yang tersebar di beberapa kota administrasi. Titik integrasi ini merupakan simpul perpindahan antar moda transportasi yang dirancang untuk mempermudah mobilitas masyarakat melalui sistem transportasi yang saling terhubung. Sebaran titik integrasi antar moda pada tahun 2024 masih terkonsentrasi di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebanyak 8 lokasi, diikuti Jakarta Pusat sebanyak 4 lokasi, Jakarta Timur sebanyak 2 lokasi, dan Jakarta Barat sebanyak 1 lokasi. Berdasarkan jumlah moda yang terintegrasi, sebagian besar lokasi menghubungkan 2 moda transportasi sebanyak 8 titik, sementara 5 titik mengintegrasikan 3 moda, dan 2 titik telah mencapai integrasi 4 moda, yaitu Stasiun Tebet dan Kawasan Berorientasi Transit (KBT) Dukuh Atas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan integrasi transportasi di Jakarta pada tahun 2024 masih didominasi simpul dua moda, namun beberapa kawasan strategis telah berkembang menjadi simpul integrasi multi-moda yang mendukung konektivitas transportasi perkotaan secara lebih efisien.

Gambar 3.104. Jumlah Kendaraan Angkutan Umum yang Terintegrasi menurut Jenis Bus di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



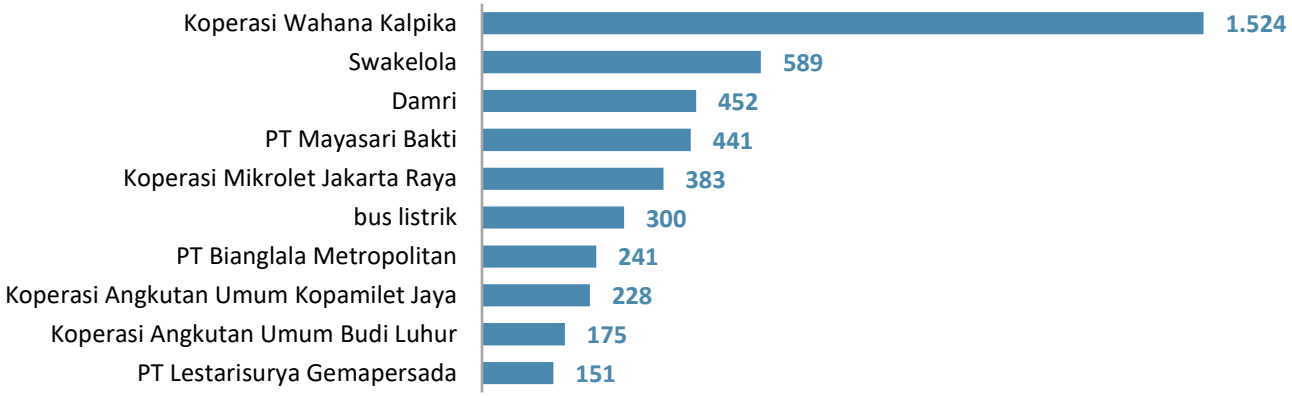
	bus besar	bus kecil	bus listrik	bus sedang
2023	1.645	2.817	100	188
2024	1.845	2.923	300	222

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Ketersediaan armada angkutan umum yang memadai serta terkoordinasi antarmoda berperan dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat, mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, serta menekan tingkat kemacetan dan dampak lingkungan di wilayah perkotaan. Berdasarkan hasil pengolahan data, jumlah kendaraan angkutan umum yang terintegrasi di DKI Jakarta pada 2024 tercatat sebanyak 5.290 unit, meningkat dibandingkan 2023 yang berjumlah 4.750 unit, atau mengalami kenaikan sebesar 540 unit (11,37 persen).

Dilihat menurut jenis bus, struktur armada angkutan umum terintegrasi pada 2024 masih didominasi oleh bus kecil sebanyak 2.923 unit, diikuti oleh bus besar 1.845 unit, bus sedang 222 unit, serta bus listrik 300 unit. Jika dibandingkan dengan 2023, jumlah bus kecil meningkat sebesar 106 unit, bus besar bertambah 200 unit, bus sedang naik 34 unit, sementara bus listrik mengalami peningkatan paling signifikan sebesar 200 unit, dari 100 unit pada 2023 menjadi 300 unit pada 2024. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan armada tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah kendaraan, tetapi juga mengarah pada peningkatan kapasitas angkut serta percepatan transisi menuju moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.

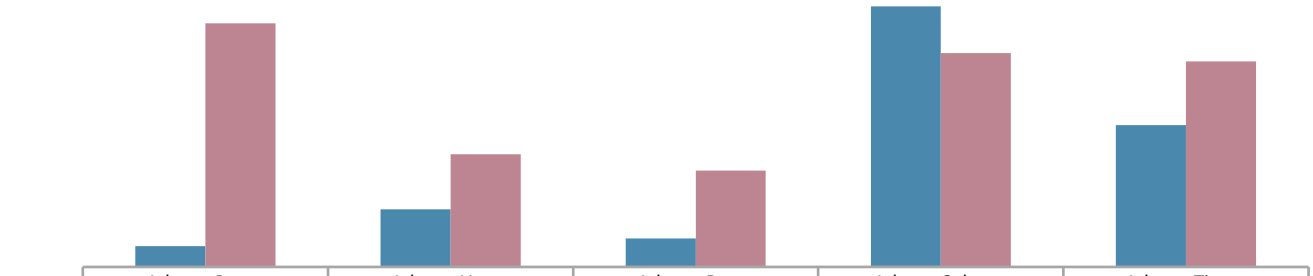
Gambar 3.105. 10 Terbesar Kendaraan Angkutan Umum yang Terintegrasi menurut Jenis Bus di DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2024, konsentrasi armada angkutan umum terintegrasi juga terlihat pada 10 operator dengan jumlah kendaraan terbesar, yang memberikan kontribusi dominan terhadap total armada di DKI Jakarta. Koperasi Wahana Kalpika tercatat sebagai operator dengan jumlah kendaraan terintegrasi terbesar, yaitu 1.524 unit bus kecil, diikuti oleh Swakelola dengan 569 unit bus besar, Perum Damri sebanyak 452 unit bus besar, dan PT Mayasari Bakti dengan 441 unit bus besar. Selain itu, kontribusi signifikan juga berasal dari Koperasi Mikrolet Jakarta Raya sebanyak 383 unit bus kecil, Koperasi Angkutan Umum Kopamilet Jaya sebanyak 228 unit, Koperasi Angkutan Umum Budi Luhur sebanyak 175 unit, serta PT Lestarisurya Gemapersada dengan 151 unit. Keberadaan 300 unit bus listrik yang masuk dalam kelompok operator terbesar pada tahun 2024 menegaskan mulai menguatnya peran transportasi berkelanjutan dalam sistem angkutan umum terintegrasi.

Gambar 3.106. Jumlah Pemasangan Rambu-rambu/Marka Jalan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024



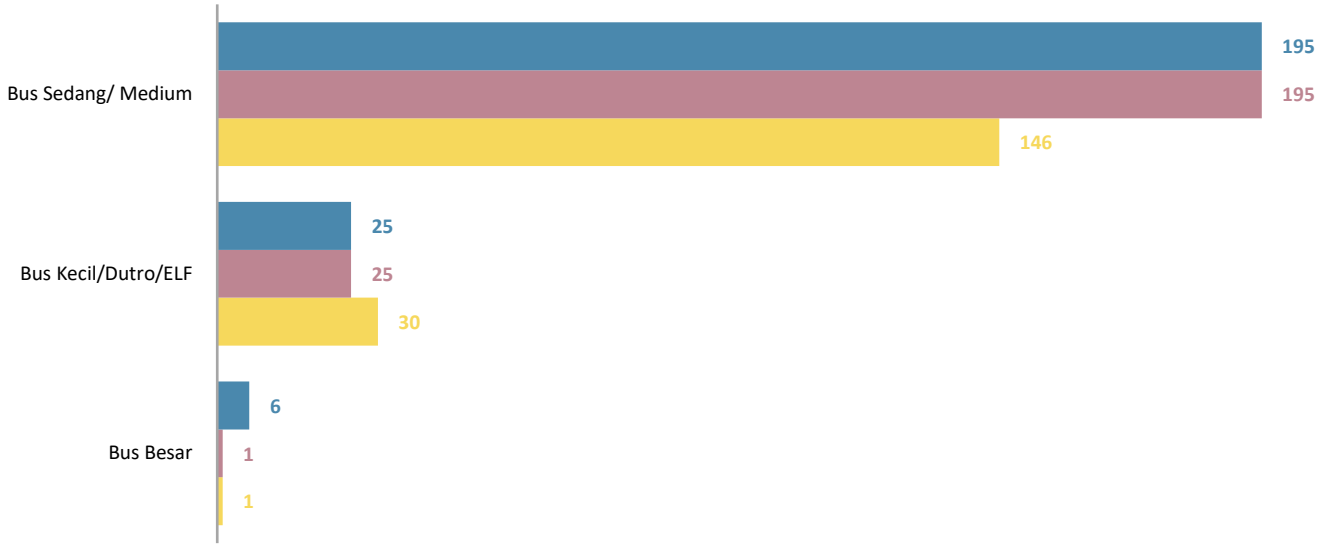
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2023	50	138	68	623	339
2024	582	269	230	511	491

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Pada 2023–2024, pemasangan rambu-rambu lalu lintas di wilayah administrasi DKI Jakarta menunjukkan penguatan upaya penataan dan keselamatan berlalu lintas melalui penambahan rambu di berbagai koridor jalan. Berdasarkan catatan administrasi pemasangan rambu, total rambu yang terpasang pada 2024 mencapai 2.083 unit, meningkat 71,0% dibanding 2023 yang sebanyak 1.218 unit. Pemasangan pada 2024 paling banyak terjadi di Jakarta Pusat sebanyak 582 unit atau 27,9%), diikuti Jakarta Selatan

sebanyak 511 unit atau 24,5%. Jenis rambu pemasangan 2024 didominasi rambu standar sebanyak 1.903 unit atau 91,4% disusul rambu pendahulu petunjuk jurusan sebanyak 128 unit atau 6,1% dan rambu pendahulu petunjuk jurusan mini sebanyak 52 unit atau 2,5%, sementara rambu tipe F tidak tercatat terpasang. Secara dinamika wilayah, Jakarta Pusat mengalami kenaikan terbesar (bertambah 532 unit dibanding 2023), sedangkan Jakarta Selatan justru menurun, ini mengindikasikan sebaran prioritas pemasangan yang bergeser. Peningkatan pemasangan ini menggambarkan cara penguatan fasilitas perlengkapan jalan dilakukan melalui penambahan rambu, terutama rambu standar, untuk mendukung keteraturan dan keselamatan mobilitas di DKI Jakarta.

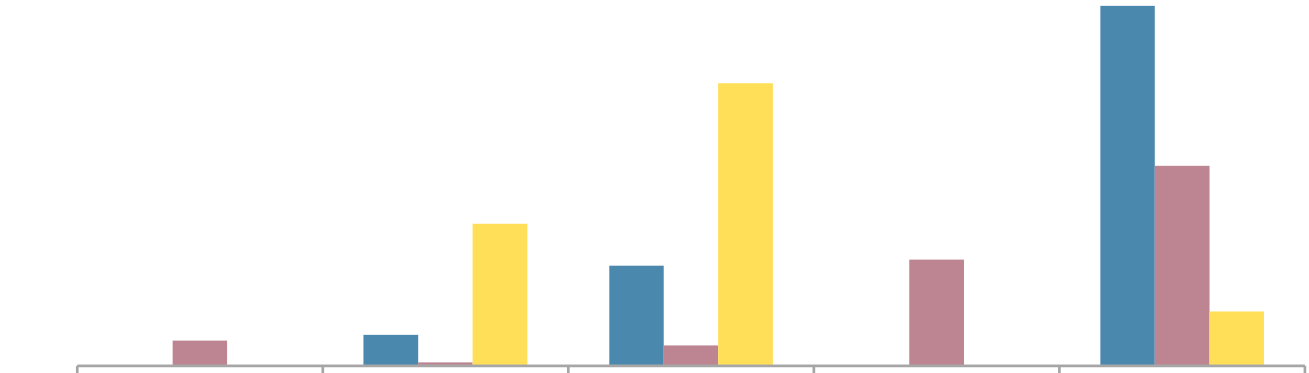
Gambar 3.107. Jumlah Armada Bus Sekolah Tahun 2022-2024



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data jumlah armada bus sekolah di DKI Jakarta, pada periode 2022 hingga 2024 terlihat perkembangan kapasitas layanan transportasi sekolah yang dikelola pemerintah daerah. Informasi ini penting untuk melihat bagaimana pemerintah daerah meningkatkan layanan transportasi sekolah sebagai bagian dari penyediaan fasilitas publik yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan bagi peserta didik. Pada tahun 2022, total armada bus sekolah tercatat sebanyak 177 unit, yang terdiri atas 1 unit bus besar, 30 unit bus kecil atau Dutro atau ELF, dan 146 unit bus sedang atau medium. Pada 2023, jumlah armada meningkat menjadi 221 unit dengan komposisi 1 unit bus besar, 25 unit bus kecil atau Dutro atau ELF, dan 195 unit bus sedang atau medium. Selanjutnya pada 2024, total armada kembali bertambah menjadi 246 unit, dengan rincian 1 unit bus besar, 25 unit bus kecil atau Dutro atau ELF, serta 220 unit bus sedang atau medium. Pada ketiga tahun tersebut, bus sedang atau medium secara konsisten menjadi jenis armada yang paling dominan. Dari sisi pertumbuhan jumlah armada, terjadi peningkatan yang berkelanjutan sepanjang periode pengamatan. Jumlah armada bertambah 44 unit dari 2022 ke 2023, dan kembali meningkat 25 unit dari 2023 ke 2024. Peningkatan terutama berasal dari penambahan armada bus sedang atau medium, sementara jumlah bus besar tetap tidak berubah dan bus kecil atau Dutro atau ELF relatif stabil pada periode 2023–2024.

Gambar 3.108. Luas Terminal Angkutan Jalan menurut Tipe dan Jenis Terminal



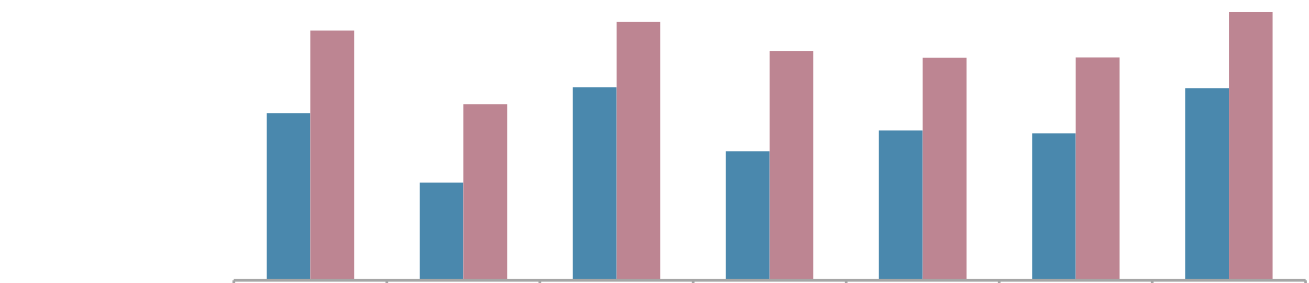
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
A	-	21.926	70.688	-	282.000
B	17.834	2.452	14.282	75.000	141.468
TMB	-	100.454	200.000	-	38.480

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Terminal angkutan jalan merupakan salah satu simpul penting dalam sistem transportasi darat yang berfungsi mengatur pergerakan penumpang dan barang di wilayah perkotaan. Pada tahun 2024, keberadaan terminal di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas transportasi yang terintegrasi, tertib, dan mendukung mobilitas masyarakat. Data mengenai jumlah, tipe layanan, serta sebaran terminal memberikan gambaran mengenai kondisi infrastruktur terminal yang tersedia serta perannya dalam mendukung kelancaran sistem transportasi darat di kawasan metropolitan.

Pada tahun 2024, pendataan terminal angkutan jalan menunjukkan sebaran fasilitas yang melayani mobilitas orang dan barang di beberapa wilayah di DKI Jakarta. Terdapat 20 terminal yang teridentifikasi, dengan komposisi layanan didominasi Terminal Tipe B (Layanan Dalam Kota) sebanyak 18 terminal (90%), sementara Terminal Tipe A (Layanan Antar Kota Antar Provinsi/AKAP) sebanyak 3 terminal (15%) dan Terminal Mobil Barang (TMB) sebanyak 4 terminal (20%), sebagian terminal memiliki lebih dari satu fungsi layanan. Dari sisi sebaran wilayah, Jakarta Timur menjadi wilayah dengan terminal terbanyak sebanyak 8 terminal, selanjutnya diikuti Jakarta Selatan sebanyak 5 terminal.

Gambar 3.109. Jumlah Penumpang Datang dan Penumpang Berangkat Angkutan Umum menurut Bulan DKI Jakarta Tahun 2024



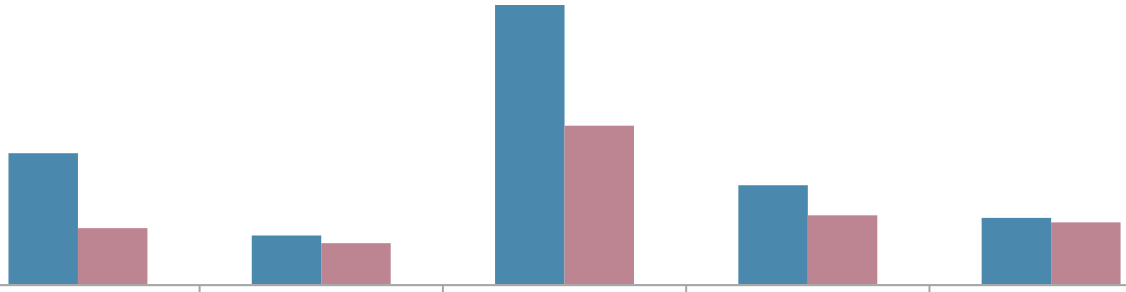
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Penumpang Datang	67.265	62.595	69.014	64.709	66.106	65.912	68.952
Penumpang Berangkat	72.846	67.869	73.414	71.455	70.996	71.027	74.091

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Pergerakan mobilitas melalui terminal angkutan umum di DKI Jakarta dapat dilihat dari arus kedatangan dan keberangkatan bus beserta jumlah penumpangnya. Data ini menggambarkan seberapa besar layanan terminal dimanfaatkan masyarakat, sekaligus menjadi dasar untuk memantau kepadatan, kebutuhan armada, dan pola perjalanan dari waktu ke waktu.

Sepanjang tahun 2024, tercatat 905.866 bus datang dan 844.021 bus berangkat, dengan 13.358.101 penumpang datang serta 17.332.087 penumpang berangkat. Sementara itu, pada Januari–Juli 2025 tercatat 501.698 bus datang dan 464.553 bus berangkat, dengan 9.191.529 penumpang datang serta 11.678.807 penumpang berangkat. Ini mengindikasikan peningkatan rata-rata keterisian/volume penumpang per perjalanan. Aktivitas penumpang paling terkonsentrasi di Terminal Cililitan yang menyumbang sekitar 50,18% dari total penumpang datang dan 45,87% dari total penumpang berangkat di Januari–Juli 2025. Dari sisi waktu, puncak penumpang berangkat pada 2025 terjadi pada bulan Mei sekitar 1.733.589 penumpang, sedangkan volume terendah terjadi pada bukan Juli sekitar 1.581.278 penumpang, hal ini menunjukkan adanya fluktuasi musiman dalam permintaan perjalanan.

Gambar 3.110. Jumlah Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut Wilayah di DKI Jakarta Tahun 2024-2025



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2024	8.399	3.151	17.825	6.356	4.288
2025	3.623	2.668	10.152	4.442	3.987

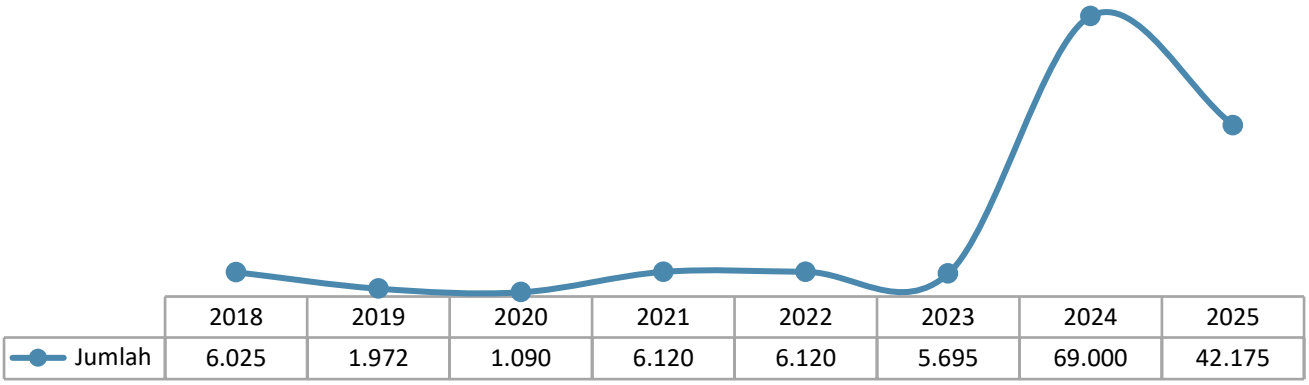
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, keselamatan, serta kelancaran mobilitas di wilayah DKI Jakarta. Data penindakan ini memberikan gambaran mengenai intensitas pengawasan serta jenis pelanggaran yang ditindak oleh petugas sepanjang tahun, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan penertiban transportasi perkotaan.

Pada tahun 2025, penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di DKI Jakarta tercatat sebanyak 24.872 tindakan yang dilakukan oleh petugas terkait sepanjang periode pengawasan. Penindakan ini dilakukan melalui berbagai metode seperti operasi cabut pentil (OCP) roda dua, tilang oleh Dinas Perhubungan, penderekan kendaraan, stop operasi, angkut motor, serta OCP roda empat sebagai bagian dari upaya penegakan ketertiban lalu lintas. Dari sisi jenis tindakan, OCP roda dua menjadi penindakan yang paling dominan dengan 11.228 tindakan, diikuti tilang Dishub sebanyak 6.644 tindakan, sedangkan tindakan lainnya seperti stop operasi, angkut motor, dan OCP roda empat

relatif lebih sedikit. Jika dilihat berdasarkan wilayah, penindakan paling banyak terjadi di Jakarta Barat sebanyak 10.152 tindakan, diikuti Jakarta Selatan sebanyak 4.442 tindakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan aturan lalu lintas dilakukan secara intensif di berbagai wilayah kota, khususnya pada kawasan dengan aktivitas mobilitas yang tinggi, sebagai upaya menjaga ketertiban lalu lintas serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan di wilayah DKI Jakarta.

Gambar 3.111. Jumlah Kendaraan Angkutan Jenis IV (Kendaraan Bermotor Umum Roda Tiga) Tahun 2018-2025

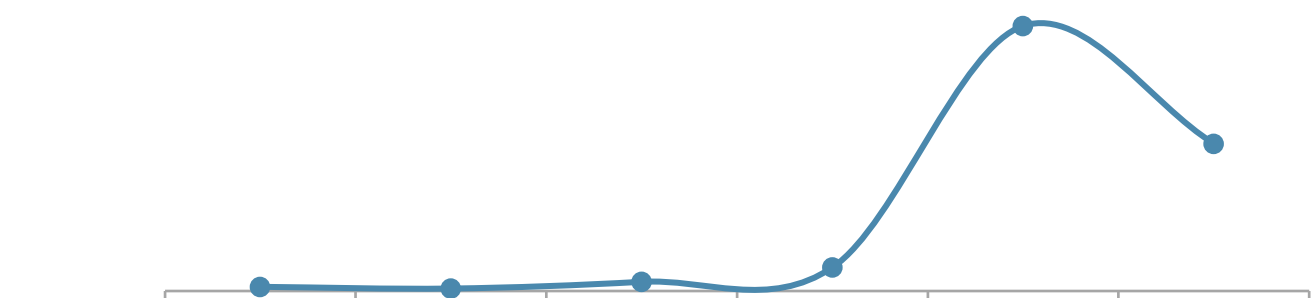


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah	6.025	1.972	1.090	6.120	6.120	5.695	69.000	42.175

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Angkutan umum roda tiga atau bajaj merupakan salah satu moda transportasi perkotaan yang masih berperan dalam melayani mobilitas jarak pendek di wilayah DKI Jakarta. Keberadaan armada ini menjadi bagian dari sistem transportasi lokal yang melengkapi moda lain, terutama untuk menjangkau kawasan permukiman dan jalan lingkungan yang tidak terlayani angkutan berkapasitas besar. Oleh karena itu, perkembangan jumlah kendaraan angkutan jenis IV (bajaj) perlu dipantau untuk melihat dinamika layanan transportasi, kebijakan penataan angkutan, serta perubahan kebutuhan mobilitas masyarakat dari waktu ke waktu. Jumlah kendaraan angkutan Jenis IV (kendaraan bermotor umum roda tiga/bajaj) di DKI Jakarta selama 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup tajam. Secara kuantitatif, jumlah armada tercatat 1.090 unit pada 2020 (titik terendah). Setelah itu terjadi pemulihan kuat pada 2021 dengan 6.120 unit, dan kondisi ini stagnan pada 2022 tetap 6.120 unit. Memasuki 2023, jumlah menurun menjadi 5.695 unit, sebelum kembali naik pada 2024 menjadi 6.025 unit.

Gambar 3.112. Jumlah Kendaraan Umum di DKI Jakarta Tahun 2019-2024

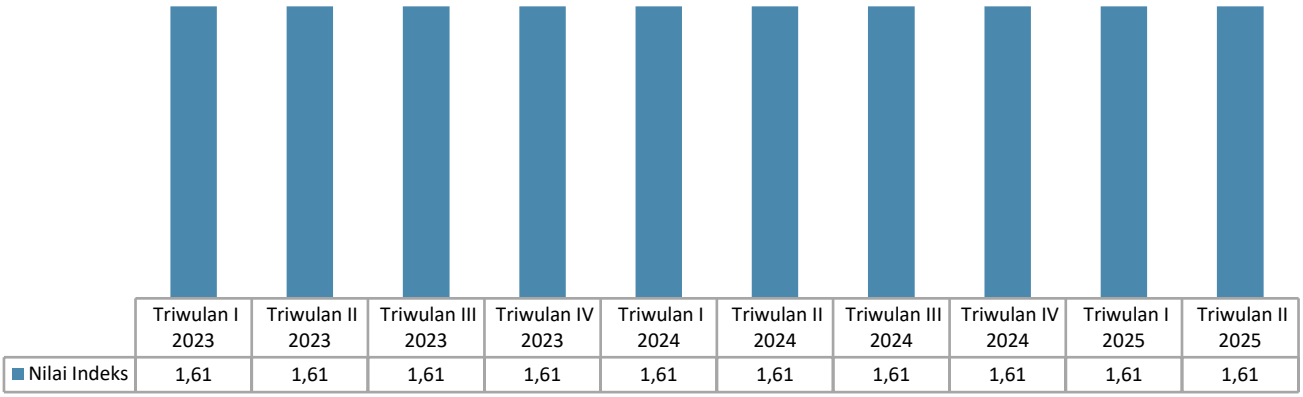


	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah	15.932	9.343	35.264	90.616	1.019.595	566.515

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Statistik jumlah kendaraan umum di DKI Jakarta memberikan gambaran mengenai perkembangan armada transportasi yang melayani mobilitas penumpang maupun distribusi barang di wilayah ibu kota. Data ini mencakup berbagai jenis kendaraan umum seperti taksi, mobil barang, bus pariwisata, dan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang beroperasi dalam kurun waktu 2019–2024. Melalui data tersebut dapat diketahui bagaimana perubahan jumlah armada terjadi dari waktu ke waktu, sekaligus menjadi dasar untuk melihat dinamika kebutuhan transportasi serta aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di DKI Jakarta. Total jumlah kendaraan umum di DKI Jakarta berfluktuasi lalu melonjak tajam pada 2024 yaitu mencapai 1.019.595 unit atau bertambah 928.979 unit dibanding 2023. Di 2024, komposisi terbesar berasal dari mobil barang 354.320 unit (34,75%) dan bus AKAP 343.025 unit (33,64%), disusul taksi 276.590 unit (27,13%) dan bus pariwisata 45.660 unit (4,48%). Secara ringkas, data menunjukkan dominasi armada logistik dan angkutan antarkota dalam, yang mencerminkan peran penting pergerakan barang dan mobilitas penumpang lintas wilayah di DKI Jakarta. Total jumlah kendaraan umum di DKI Jakarta berfluktuasi lalu melonjak tajam pada 2024 yaitu mencapai 1.019.595 unit atau bertambah 928.979 unit dibanding 2023. Di 2024, komposisi terbesar berasal dari mobil barang 354.320 unit (34,75%) dan bus AKAP 343.025 unit (33,64%), disusul taksi 276.590 unit (27,13%) dan bus pariwisata 45.660 unit (4,48%). Secara ringkas, data menunjukkan dominasi armada logistik dan angkutan antarkota dalam, yang mencerminkan peran penting pergerakan barang dan mobilitas penumpang lintas wilayah di DKI Jakarta.

Gambar 3.113. Indeks Fatalitas Kecelakaan Angkutan Umum Pertahun menurut Triwulan DKI Jakarta Tahun 2023-2025



	Triwulan I 2023	Triwulan II 2023	Triwulan III 2023	Triwulan IV 2023	Triwulan I 2024	Triwulan II 2024	Triwulan III 2024	Triwulan IV 2024	Triwulan I 2025	Triwulan II 2025
Nilai Indeks	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61

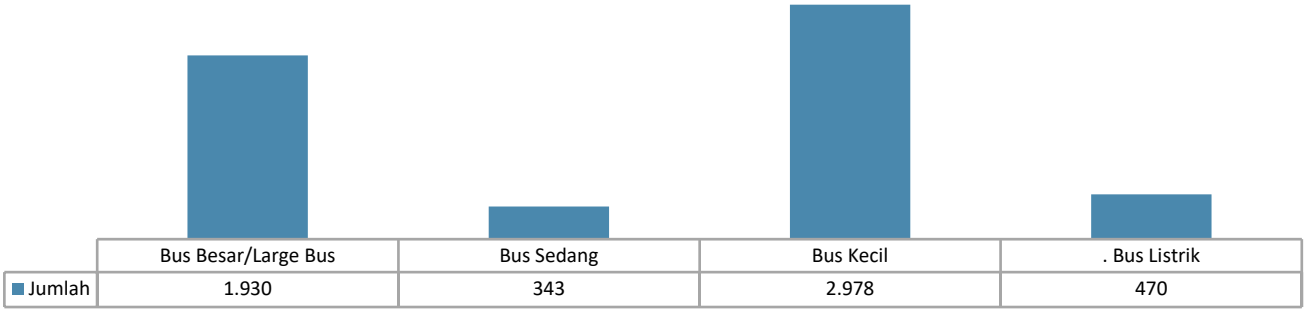
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan tingkat keselamatan transportasi publik. Indikator ini menunjukkan tingkat fatalitas yang terjadi pada kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dalam suatu periode tertentu, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi terhadap kondisi keselamatan transportasi serta efektivitas kebijakan pengendalian kecelakaan.

Berdasarkan data triwulanan periode Triwulan I 2023 hingga Triwulan II 2025, indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum tercatat sebesar 1,61 pada setiap periode pengamatan. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat fatalitas kecelakaan pada angkutan umum relatif stabil sepanjang

periode tersebut tanpa mengalami perubahan yang signifikan. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat fatalitas kecelakaan angkutan umum masih berada pada pola yang sama dari tahun ke tahun. Stabilnya nilai indeks ini mengindikasikan bahwa meskipun mobilitas transportasi publik terus berlangsung, tingkat fatalitas yang terjadi pada kecelakaan angkutan umum belum menunjukkan peningkatan maupun penurunan yang berarti. Oleh karena itu, data ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam merumuskan kebijakan peningkatan keselamatan transportasi umum guna menekan risiko fatalitas kecelakaan di masa mendatang.

Gambar 3.114. Jumlah Angkutan Massal Bus Rapid Transit menurut Tipe Bus di Provinsi DKI Jakarta, 2025



	Bus Besar/Large Bus	Bus Sedang	Bus Kecil	. Bus Listrik
Jumlah	1.930	343	2.978	470

Sumber: Jakarta Dalam Angka Tahun 2026

Transportasi umum merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan, khususnya di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tingkat pergerakan penduduk sangat tinggi. Keberadaan berbagai jenis armada angkutan umum menjadi penopang utama aktivitas harian masyarakat sekaligus mendukung sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan Berdasarkan data jumlah angkutan umum yang beroperasi menurut perusahaan di DKI Jakarta pada tahun 2025, tercatat terdapat beberapa jenis armada yang melayani masyarakat dengan komposisi yang berbeda. Bus kecil menjadi jenis armada dengan jumlah terbanyak yaitu sebanyak 2.978 unit, diikuti oleh bus besar sebanyak 1.930 unit, kemudian bus listrik sebanyak 470 unit, dan bus sedang sebanyak 343 unit. Data ini menunjukkan bahwa armada berkapasitas kecil masih mendominasi operasional transportasi umum karena lebih fleksibel dalam menjangkau berbagai wilayah pelayanan. Sementara itu, keberadaan bus listrik menunjukkan adanya upaya pengembangan transportasi yang lebih ramah lingkungan di wilayah ibu kota. Secara keseluruhan, jumlah armada tersebut menggambarkan bagaimana perusahaan transportasi menyediakan layanan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan dengan berbagai kapasitas kendaraan yang disesuaikan dengan karakteristik rute dan permintaan penumpang.

3.9.3. Angkutan Lainnya

Pelabuhan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang, khususnya di wilayah kepulauan. Di Provinsi DKI Jakarta, keberadaan pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi laut, tetapi juga sebagai penghubung utama antara wilayah daratan Jakarta dengan kawasan Kepulauan Seribu. Oleh karena itu, informasi mengenai lokasi dan sebaran pelabuhan menjadi penting untuk menggambarkan kondisi infrastruktur transportasi laut yang tersedia di wilayah tersebut.

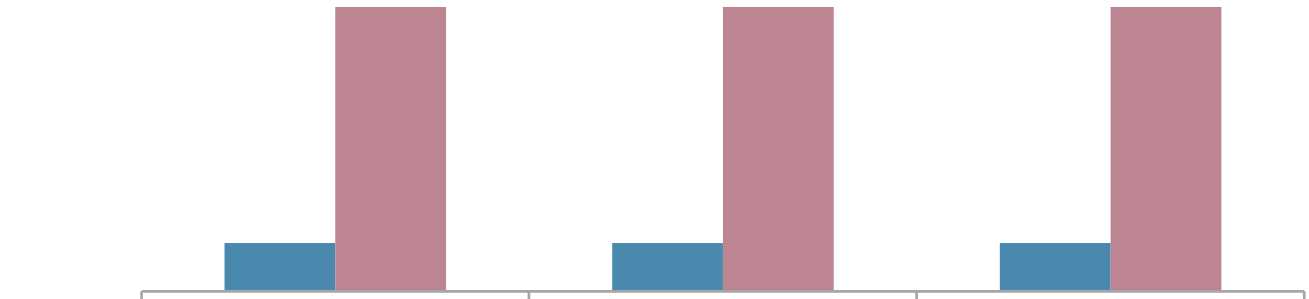
Tabel 3.4. Data Pelabuhan di DKI Jakarta Tahun 2024

Periode Data	Wilayah	Nama Pelabuhan
2024	Jakarta Utara	Muara Angke
2024	Kabupaten Kepulauan Seribu	Pulau Kelapa
2024	Kabupaten Kepulauan Seribu	Pulau Harapan
2024	Kabupaten Kepulauan Seribu	Pulau Sebira
2024	Kabupaten Kepulauan Seribu	Pulau Untung Jawa
2024	Kabupaten Kepulauan Seribu	Pulau Pari
2024	Kabupaten Kepulauan Seribu	Pulau Lancang
2024	Kabupaten Kepulauan Seribu	Pulau Pramuka
2024	Kabupaten Kepulauan Seribu	Pulau Panggang
2024	Kabupaten Kepulauan Seribu	Pulau Tidung
2024	Kabupaten Kepulauan Seribu	Pulau Payung

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data pelabuhan tahun 2024 yang bersumber dari portal Satu Data Jakarta, tercatat beberapa pelabuhan yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Di Jakarta Utara terdapat Pelabuhan Muara Angke yang berfungsi sebagai salah satu titik keberangkatan utama menuju Kepulauan Seribu. Sementara itu, di Kabupaten Kepulauan Seribu terdapat beberapa pelabuhan yang melayani mobilitas masyarakat antar pulau, antara lain Pelabuhan Pulau Kelapa, Pulau Harapan, Pulau Sebira, dan Pulau Untung Jawa. Keberadaan pelabuhan-pelabuhan tersebut menunjukkan bahwa fasilitas transportasi laut difokuskan pada wilayah kepulauan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pariwisata, serta mobilitas penduduk. Dengan adanya jaringan pelabuhan tersebut, konektivitas antara pulau-pulau di Kepulauan Seribu dan wilayah daratan Jakarta dapat tetap terjaga sehingga aktivitas transportasi laut dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Gambar 3.115. Jumlah Armada Angkutan Perairan di Kepulauan Seribu Tahun 2022-2024



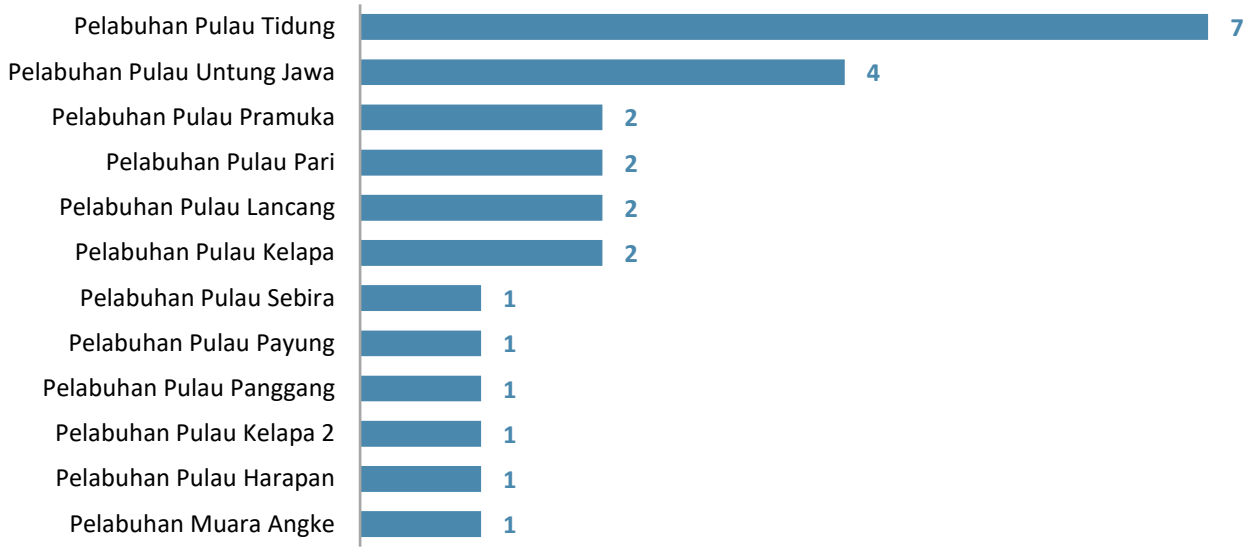
	2022	2023	2024
Kapal Fiber	630	630	630
Kapal kayu	5.182	5.182	5.182

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Armada angkutan perairan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu selama periode 2022–2024 menunjukkan kondisi yang relatif stabil, baik dari sisi jumlah armada maupun kapasitas angkut penumpang. Berdasarkan hasil olahan data, pada tahun 2022 tercatat total kapasitas angkut sebesar 5.812 penumpang, yang terdiri atas 630 penumpang dari kapal fiber dan 5.182 penumpang dari kapal kayu. Struktur kapasitas ini tetap sama pada tahun 2023 dan kembali tidak mengalami perubahan pada tahun 2024,

sehingga total kapasitas angkut armada angkutan perairan selama tiga tahun berturut-turut berada pada angka yang sama, yaitu 5.812 penumpang per tahun. Stabilitas kapasitas angkut selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan bahwa hingga tahun 2024 belum terjadi penambahan maupun pengurangan armada yang signifikan, baik dari sisi jumlah kapal maupun kemampuan daya angkutnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyediaan layanan angkutan perairan di Kepulauan Seribu masih berfokus pada pemeliharaan armada yang ada, dengan fungsi utama mendukung konektivitas wilayah kepulauan, aktivitas sosial ekonomi masyarakat, serta pergerakan wisatawan. Ke depan, data ini dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan transportasi perairan, khususnya dalam menyesuaikan kapasitas layanan dengan perkembangan kebutuhan mobilitas dan pariwisata di Kepulauan Seribu.

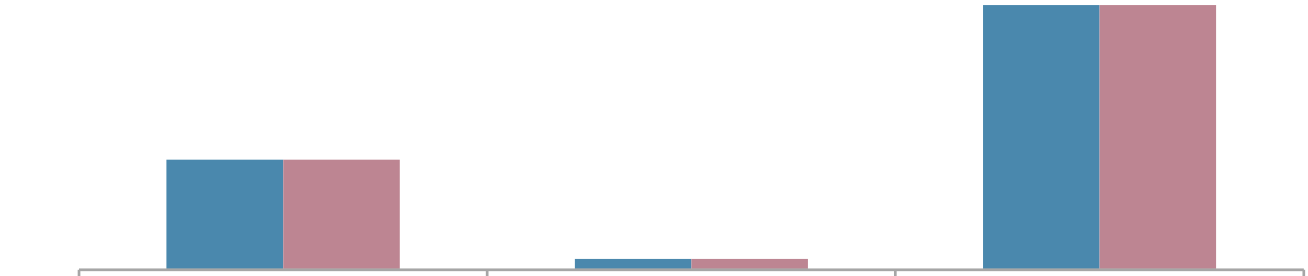
Gambar 3.116. Data Jumlah Lokasi Dermaga Penyebrangan Tahun 2024



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2024, jumlah lokasi dermaga penyeberangan tercatat sebanyak 25 dermaga yang tersebar pada 12 lokasi pelabuhan. Keberadaan dermaga penyeberangan ini berperan penting sebagai prasarana transportasi laut yang mendukung mobilitas penduduk, distribusi logistik, serta aktivitas sosial dan ekonomi antar pulau. Sebaran lokasi dermaga menggambarkan titik-titik utama pelayanan penyeberangan yang menghubungkan kawasan permukiman, pusat pelayanan publik, dan destinasi pariwisata, khususnya di wilayah kepulauan. Berdasarkan sebarannya, Pelabuhan Pulau Tidung merupakan lokasi dengan jumlah dermaga penyeberangan terbanyak, yaitu 7 dermaga, mencerminkan tingginya kebutuhan layanan transportasi laut di wilayah tersebut. Selanjutnya, Pelabuhan Pulau Untung Jawa memiliki 4 dermaga. Beberapa pelabuhan tercatat memiliki 2 dermaga, yaitu Pelabuhan Pulau Kelapa, Pelabuhan Pulau Lancang, Pelabuhan Pulau Pari, dan Pelabuhan Pulau Pramuka. Sementara itu, pelabuhan lainnya masing-masing memiliki 1 dermaga, meliputi Pelabuhan Muara Angke, Pelabuhan Pulau Harapan, Pelabuhan Pulau Kelapa 2, Pelabuhan Pulau Panggang, Pelabuhan Pulau Payung, dan Pelabuhan Pulau Sebira. Pola ini menunjukkan bahwa penyediaan dermaga penyeberangan cenderung mengikuti tingkat aktivitas dan kebutuhan layanan transportasi laut pada masing-masing lokasi pelabuhan.

Gambar 3.117. Operator Angkutan Perairan di Kepulauan Seribu Tahun 2023-2024



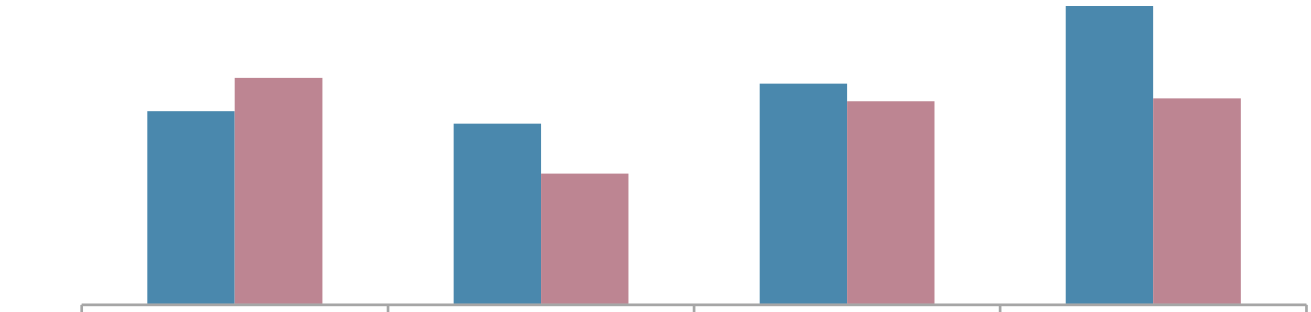
	DISHUB UPAP	PT ASDP	PT SSA
2023	10	1	24
2024	10	1	24

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Layanan angkutan perairan di Kepulauan Seribu dikelola oleh tiga operator, yaitu PT SSA, DISHUB UPAP, dan PT ASDP. Keberadaan operator dan armada ini berperan sebagai penopang mobilitas masyarakat dan konektivitas antarpulau, terutama untuk akses penyeberangan, pelayanan publik, serta pergerakan barang dan orang yang bergantung pada transportasi laut sebagai moda utama di wilayah kepulauan.

Pada tahun 2024 total armada tercatat sebanyak 37 unit. Data ini menggambarkan kondisi terkini penyedia layanan transportasi laut yang berperan dalam menunjang mobilitas masyarakat antarwilayah pulau, distribusi logistik, serta aktivitas pariwisata yang menjadi salah satu penggerak ekonomi wilayah kepulauan. Secara komposisi, PT SSA masih menjadi operator dengan armada terbanyak pada 2024, yakni 25 unit atau 67,57 persen dari total armada. DISHUB UPAP mengoperasikan 11 unit atau 29,73 persen, sedangkan PT ASDP tetap dengan 1 unit atau 2,70 persen. Dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 35 unit, terjadi penambahan dua unit armada pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas layanan transportasi perairan, meskipun struktur penguasaan armada masih relatif didominasi oleh PT SSA. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa keberlanjutan konektivitas dan pemerataan pelayanan transportasi laut di Kepulauan Seribu tetap bergantung pada peran utama operator swasta dengan dukungan pemerintah daerah melalui DISHUB UPAP.

Gambar 3.118. Kecepatan Rata-rata di Ruas Jalan yang Dikenakan Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas pada Jam Sibuk menurut Wilayah Tahun 2024-2025



	Jakarta Pusat	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2024	23,96	22,39	27,36	37,38
2025	28,08	16,22	25,19	25,55

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Kecepatan rata-rata kendaraan pada ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan kondisi kelancaran mobilitas perkotaan. Data ini menunjukkan bagaimana efektivitas pengaturan lalu lintas dalam mengendalikan kepadatan kendaraan di sejumlah ruas jalan utama di wilayah DKI Jakarta. Dengan melihat perkembangan kecepatan kendaraan pada jam sibuk, pemerintah dapat menilai sejauh mana kebijakan pembatasan lalu lintas mampu menjaga kelancaran arus kendaraan sekaligus mengurangi kemacetan.

Berdasarkan data kecepatan rata-rata kendaraan pada ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk di DKI Jakarta, terlihat bahwa pada tahun 2024 kecepatan rata-rata kendaraan tercatat sekitar 22,39 km/jam. Pemantauan dilakukan pada sejumlah ruas jalan utama di wilayah Jakarta, seperti di Jakarta Pusat pada ruas Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, dan Jalan Majapahit, yang merupakan kawasan dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas kendaraan yang tinggi. Kecepatan kendaraan di ruas tersebut bervariasi, misalnya sekitar 22,58 km/jam di Jalan Gajah Mada, 21,43 km/jam di Jalan Hayam Wuruk, dan sekitar 13,50 km/jam di Jalan Majapahit, yang menunjukkan perbedaan tingkat kepadatan lalu lintas pada masing-masing ruas jalan.

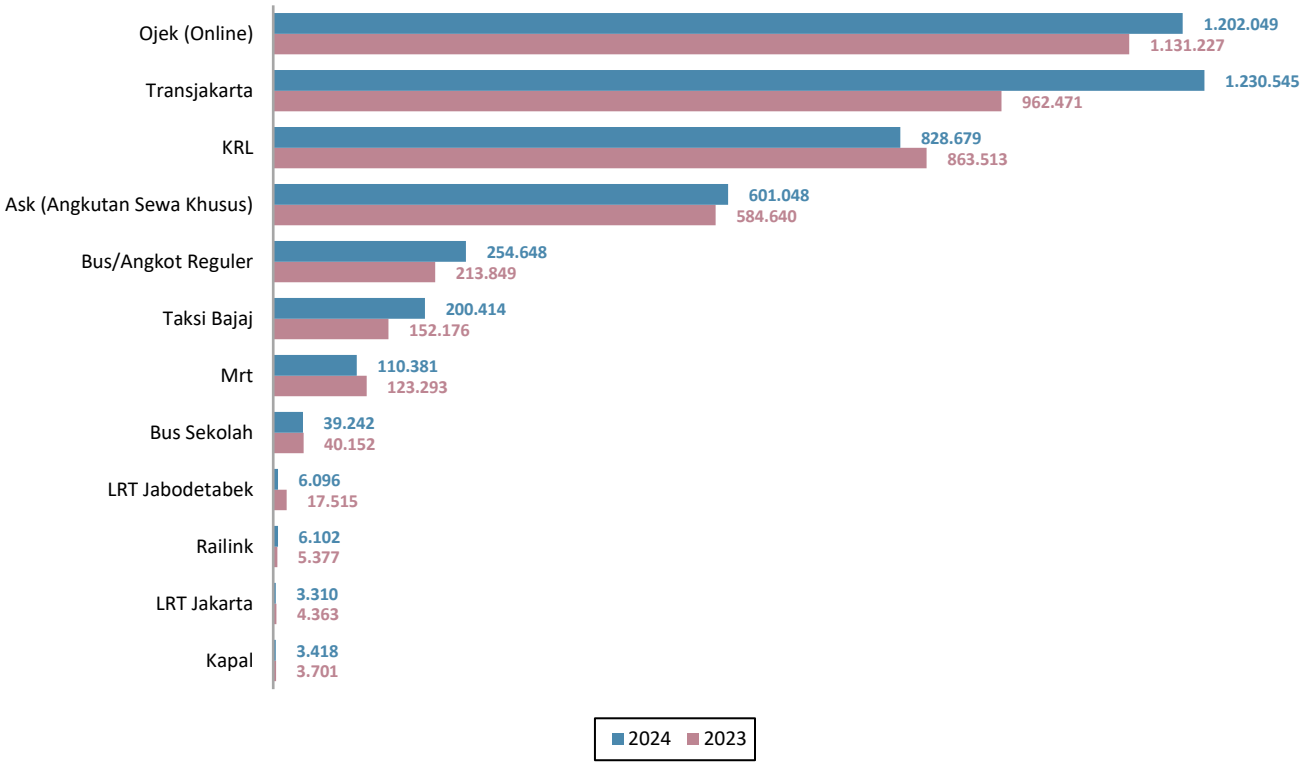
Pada tahun 2025, kecepatan rata-rata kendaraan pada ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk tercatat sekitar 16,22 km/jam, atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kondisi lalu lintas pada jam sibuk masih menghadapi tekanan akibat tingginya volume kendaraan dan aktivitas perkotaan. Data ini digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk mengevaluasi kebijakan pembatasan lalu lintas serta merumuskan langkah pengelolaan transportasi yang lebih efektif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

3.9.4. Penumpang

Mobilitas penduduk di wilayah perkotaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan penggunaan transportasi publik. Persentase perjalanan penduduk yang menggunakan berbagai moda transportasi publik menjadi indikator penting untuk melihat pola pergerakan masyarakat serta tingkat ketergantungan terhadap layanan transportasi massal. Data ini memberikan gambaran mengenai jenis moda yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

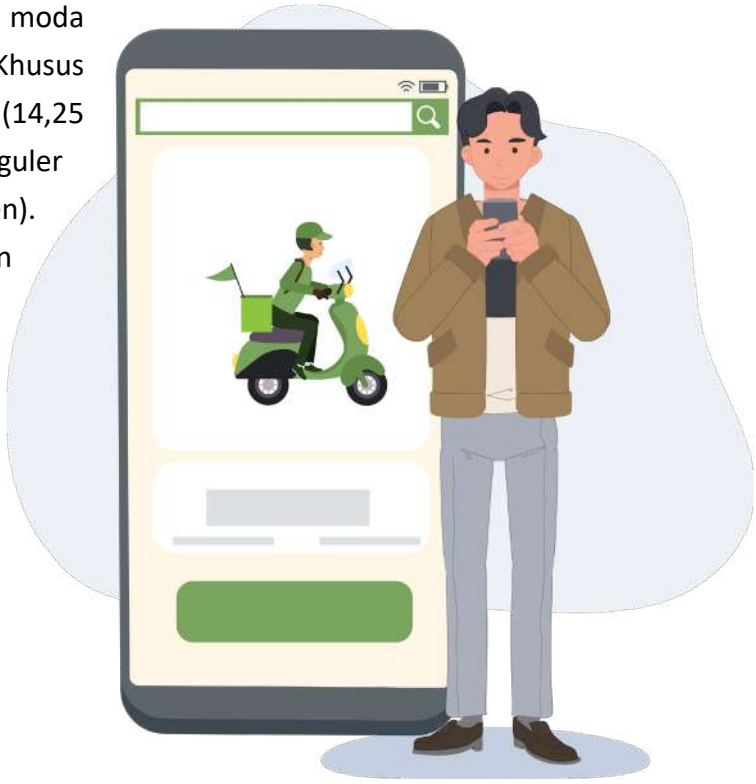


Gambar 3.119. Jumlah Perjalanan Penduduk Menggunakan Transportasi Publik Tahun 2023-2024

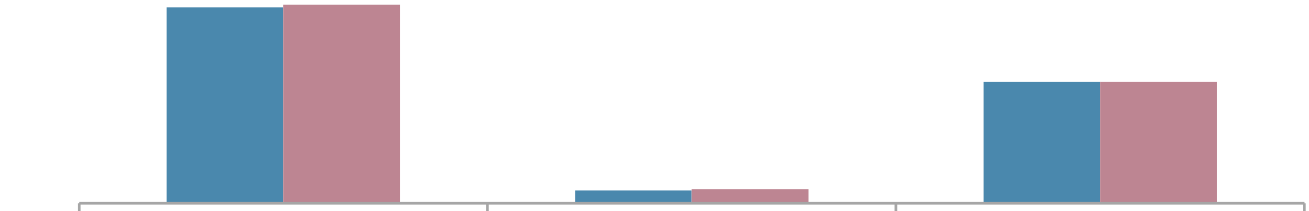


Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data tahun 2023, perjalanan penduduk dengan menggunakan transportasi publik didominasi oleh moda berbasis layanan daring dan angkutan massal di kawasan perkotaan. Moda ojek online menjadi yang paling banyak digunakan dengan 1.131.227 perjalanan atau sekitar 27,58 persen, diikuti oleh Transjakarta sebanyak 962.471 perjalanan (23,46 persen) serta KRL *Commuter Line* sebesar 863.513 perjalanan (21,05 persen). Selain itu, moda Angkutan Sewa Khusus (ASK) mencatat 584.640 perjalanan (14,25 persen), sementara bus atau angkot reguler mencapai 213.849 perjalanan (5,21 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 masyarakat cenderung memilih moda yang fleksibel, mudah diakses, dan memiliki jangkauan luas, sehingga layanan transportasi berbasis jalan dan layanan daring masih menjadi pilihan utama dalam menunjang mobilitas harian penduduk.



Gambar 3.120. Jumlah Armada Bus Transjakarta menurut Jenis Tipe Bus
Tahun 2023-2024



	Bus Kecil	Bus Sedang	Bus Besar
2023	2.817	188	1.745
2024	2.855	202	1.745

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Pada periode 2023–2024, armada bus Transjakarta menunjukkan perkembangan yang relatif stabil dengan kecenderungan peningkatan jumlah unit. Secara umum, komposisi armada masih didominasi oleh bus kecil dan bus besar, yang menjadi tulang punggung layanan operasional. Gambaran ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menjaga ketersediaan armada guna mendukung layanan transportasi publik yang andal dan menjangkau berbagai kawasan pelayanan. Berdasarkan data, jumlah armada meningkat dari 4.750 unit pada 2023 menjadi 4.802 unit pada 2024, atau bertambah 52 unit. Penambahan tersebut seluruhnya berasal dari bus kecil yang meningkat 38 unit dan bus sedang yang bertambah 14 unit, sementara jumlah bus besar tidak mengalami perubahan. Pada 2024, bus kecil tetap menjadi tipe dengan jumlah terbanyak, disusul bus besar, sedangkan bus sedang memiliki porsi paling kecil.

Gambar 3.121. Jumlah Armada Bus Transjakarta menurut Jenis Bahan Bakar
Tahun 2023-2024

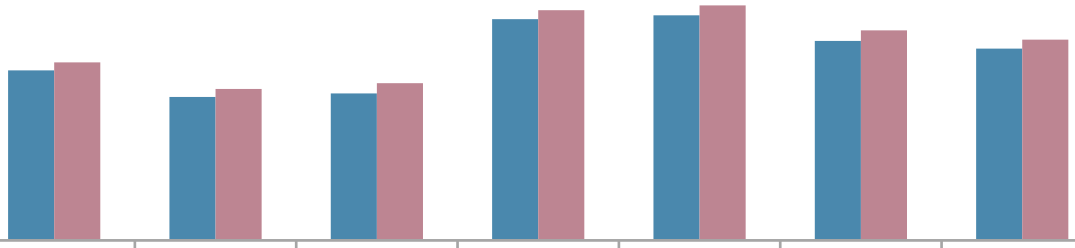


	2023	2024
BBM	4.650	4.702
Listrik	100	100

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan bahan bakarnya, jumlah bus berbahan bakar BBM meningkat dari 4.650 unit pada 2023 menjadi 4.702 unit pada 2024, atau bertambah 52 unit. Sebaliknya, jumlah bus listrik tetap 100 unit pada kedua tahun tersebut tanpa perubahan. Dengan demikian, peningkatan total armada sepenuhnya berasal dari penambahan bus berbahan bakar BBM, sementara armada bus listrik dipertahankan jumlahnya. Pola ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek penguatan layanan masih bertumpu pada armada konvensional untuk menjaga kapasitas dan keandalan operasional, sementara bus listrik tetap diposisikan sebagai bagian dari strategi transisi menuju sistem transportasi perkotaan yang lebih berkelanjutan.

Gambar 3.122. Jumlah Angkutan Umum Kapal Berangkat dan Tiba Berbasis Perairan Tahun 2025

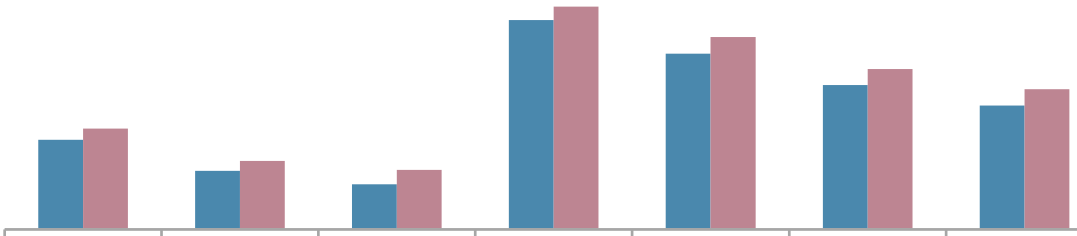


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Kapal Berangkat	1.429	1.203	1.234	1.859	1.891	1.674	1.611
Kapal Tiba	1.495	1.271	1.319	1.934	1.973	1.765	1.686

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Transportasi umum berbasis perairan merupakan salah satu moda pendukung mobilitas masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan DKI Jakarta, khususnya yang menghubungkan daratan dengan kawasan Kepulauan Seribu. Keberadaan layanan ini berperan penting dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, serta mobilitas wisatawan dan penduduk lokal. Oleh karena itu, pemantauan terhadap jumlah perjalanan kapal dan pergerakan penumpang menjadi indikator penting untuk melihat dinamika penggunaan angkutan umum berbasis perairan di wilayah tersebut. Berdasarkan data operasional angkutan umum berbasis perairan di DKI Jakarta tahun 2024, tercatat sebanyak 10.901 perjalanan kapal berangkat dan 11.443 kapal tiba yang melayani rute dari dan menuju beberapa pelabuhan utama seperti Muara Angke serta wilayah Kepulauan Seribu.

Gambar 3.123. Jumlah Penumpang Naik dan Turun Angkutan Umum Kapal Berbasis Perairan Tahun 2025

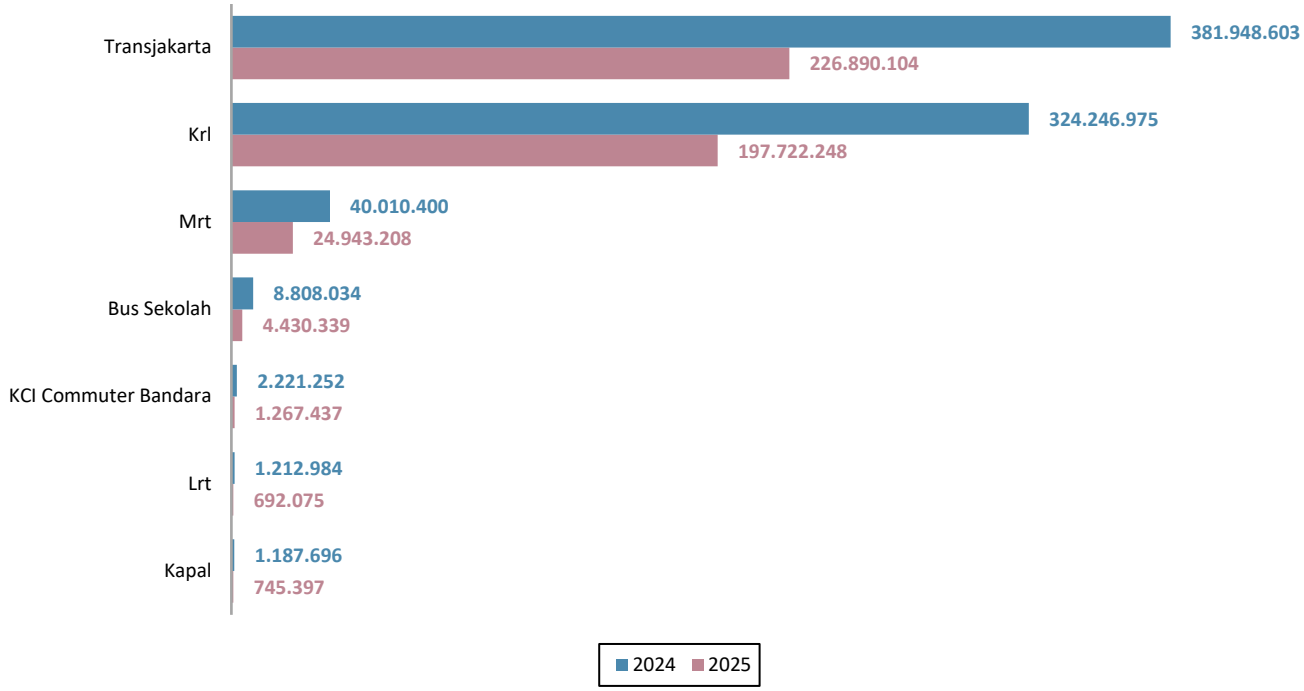


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Penumpang Naik	37.236	24.370	18.822	87.187	73.156	60.057	51.606
Penumpang Turun	42.004	28.489	24.720	92.696	80.045	66.691	58.318

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

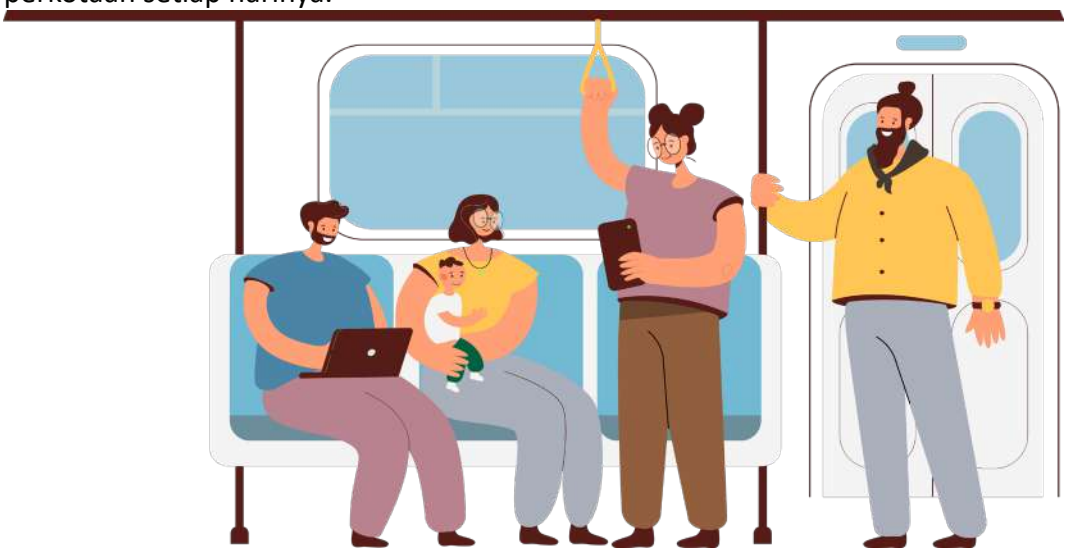
Selama periode 2025 juga, jumlah penumpang yang naik mencapai 352.434 orang, sementara penumpang yang turun tercatat sebanyak 392.963 orang. Aktivitas penumpang tertinggi terjadi pada periode tertentu yang menunjukkan meningkatnya mobilitas masyarakat menuju kawasan kepulauan, baik untuk keperluan pekerjaan, aktivitas ekonomi, maupun wisata. Data ini menggambarkan bahwa layanan transportasi perairan masih menjadi sarana penting bagi masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di wilayah kepulauan, sekaligus menunjukkan bagaimana frekuensi perjalanan kapal dan pergerakan penumpang menjadi indikator utama dalam melihat intensitas mobilitas masyarakat di jalur transportasi laut tersebut.

Gambar 3.124. Jumlah Penumpang Angkutan Umum yang Terlayani per Hari menurut Jenis Angkutan Umum di DKI Jakarta Tahun 2024-2025

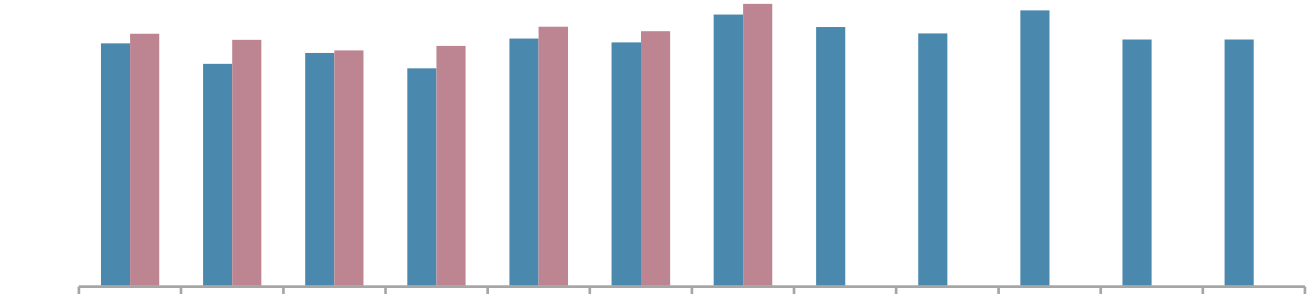


Sumber:Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Transportasi umum merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung mobilitas masyarakat perkotaan. Di DKI Jakarta, berbagai moda transportasi publik disediakan untuk melayani kebutuhan perjalanan harian penduduk. Pada tahun 2025, jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari di DKI Jakarta didominasi oleh moda Transjakarta, dengan rata-rata sekitar 1,08 juta penumpang per hari, diikuti oleh KRL *Commuter Line* dengan rata-rata sekitar 941 ribu penumpang per hari. Moda dengan jumlah penumpang yang relatif lebih kecil antara lain KCI *Commuter* Bandara sekitar 6 ribu penumpang per hari, serta kapal dan LRT yang masing-masing melayani sekitar 3 ribu penumpang per hari. Tingginya jumlah penumpang pada moda Transjakarta dan KRL menunjukkan bahwa kedua moda tersebut menjadi tulang punggung transportasi publik di Jakarta karena jangkauan layanan yang luas dan frekuensi perjalanan yang tinggi, sehingga mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan setiap harinya.



Gambar 3.125. Jumlah Penumpang Angkutan Umum yang Terlayani Perhari menurut bulan di DKI Jakarta Tahun 2024-2025

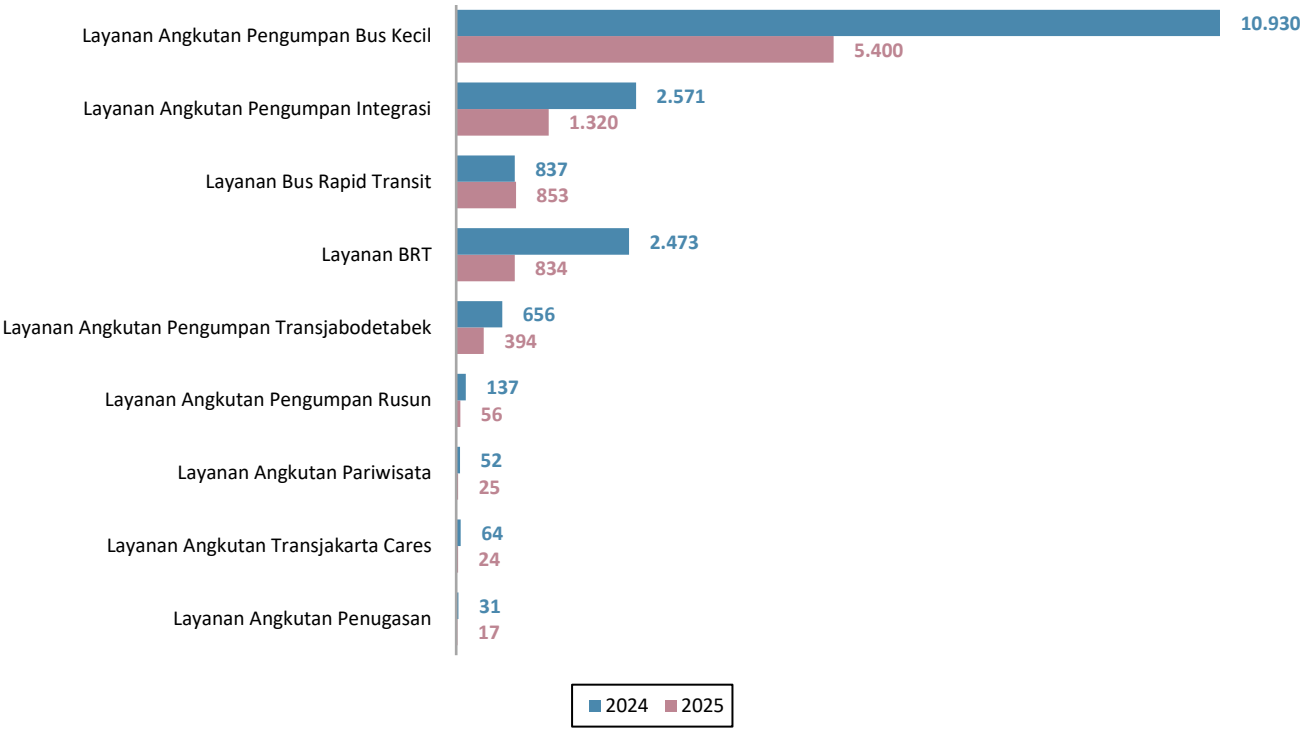


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2024	62.286.52	57.080.09	59.880.98	55.902.44	63.550.89	62.566.82	69.677.56	66.486.08	64.824.22	70.766.38	63.319.27	63.294.63
2025	64.754.21	63.251.28	60.523.12	61.652.38	66.618.29	65.469.57	74.421.93	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari di DKI Jakarta Tahun 2025 menunjukkan variasi sepanjang bulan Januari hingga Juli. Pada Januari, rata-rata penumpang tercatat sekitar 298 ribu penumpang per hari, kemudian meningkat pada Februari menjadi sekitar 322 ribu penumpang per hari. Memasuki Maret, jumlah penumpang mengalami penurunan menjadi sekitar 278 ribu penumpang per hari, sebelum kembali meningkat pada April dengan rata-rata 293 ribu penumpang per hari. Tren peningkatan berlanjut pada Mei dan Juni, masing-masing sekitar 306 ribu dan 311 ribu penumpang per hari. Sementara itu, pada Juli jumlah penumpang mencapai rata-rata sekitar 342 ribu penumpang per hari, yang menjadi angka tertinggi pada periode tersebut. Peningkatan jumlah penumpang ini menunjukkan tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat di wilayah DKI Jakarta dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kegiatan sosial masyarakat sehari-hari.

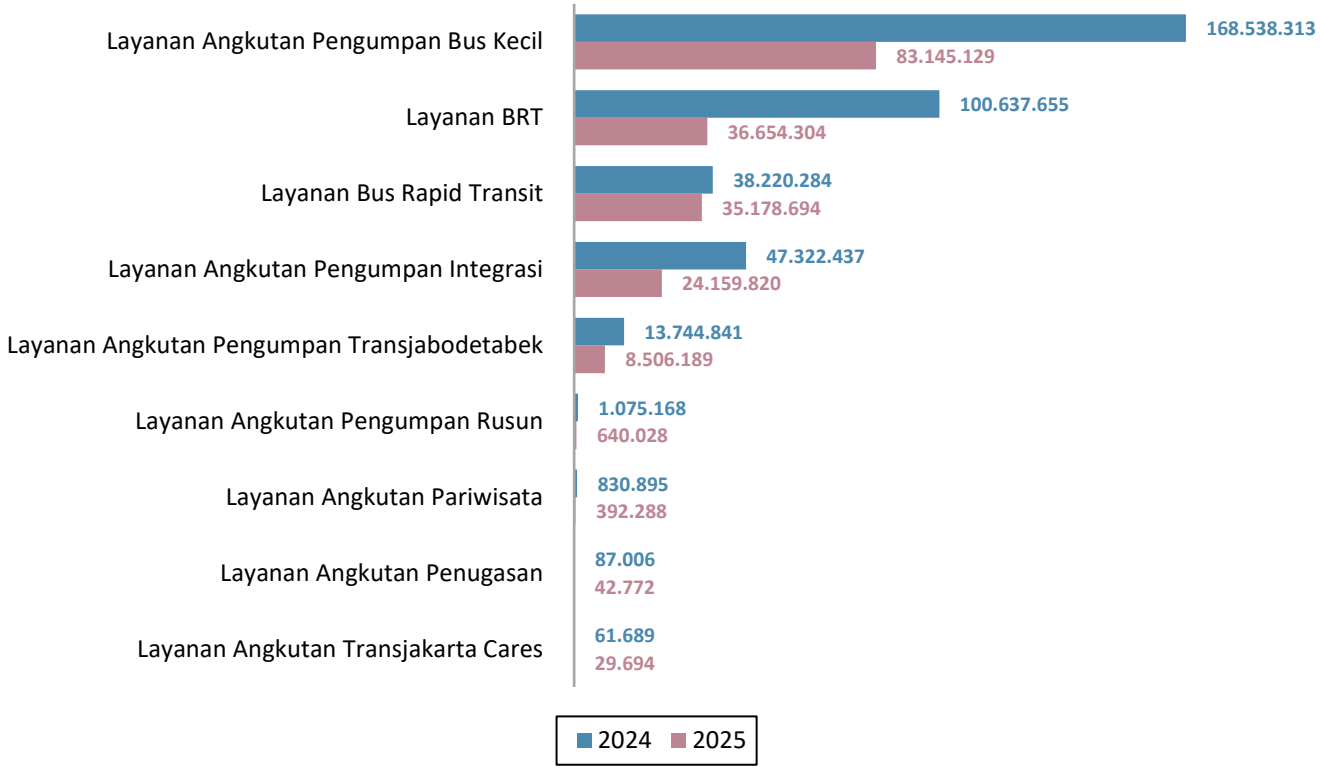
Gambar 3.126. Jumlah Bus Transjakarta yang Beroperasi menurut Jenis Layanan di DKI Jakarta Tahun 2024-2025



Sumber: PT Transportasi Jakarta

Layanan bus Transjakarta merupakan salah satu moda transportasi publik utama di DKI Jakarta yang berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat perkotaan. Pengoperasian armada bus serta jumlah penumpang yang dilayani menjadi indikator penting dalam menggambarkan tingkat pemanfaatan transportasi massal di Jakarta. Oleh karena itu, data mengenai jumlah bus yang beroperasi dan jumlah penumpang Transjakarta perlu dianalisis untuk melihat perkembangan layanan transportasi publik di wilayah tersebut. Jumlah bus Transjakarta yang beroperasi di DKI Jakarta selama periode 2024–2025 menunjukkan variasi operasional dari waktu ke waktu. Pada tahun 2024, jumlah bus yang beroperasi mencapai sekitar 17.751 unit. Sementara itu, tahun 2025 jumlah bus yang tercatat beroperasi sekitar 8.923 unit. Variasi jumlah armada ini menunjukkan bahwa penyediaan layanan bus oleh Transjakarta terus disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat serta kondisi operasional layanan transportasi di wilayah DKI Jakarta.

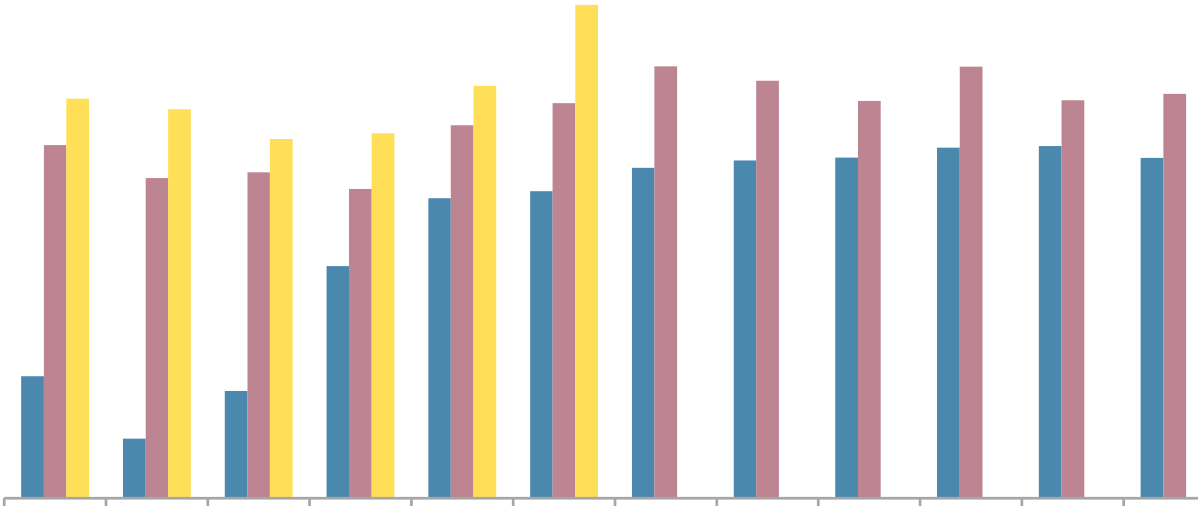
Gambar 3.127. Jumlah Penumpang Bus Transjakarta yang Beroperasi menurut Jenis Layanan di DKI Jakarta Tahun 2024-2025



Sumber: PT Transportasi Jakarta

Sementara itu, dari sisi penggunaan layanan, jumlah penumpang Transjakarta juga menunjukkan tingkat pemanfaatan yang tinggi oleh masyarakat. Pada tahun 2023, jumlah penumpang tercatat sekitar 370.518.288 penumpang. Sementara tahun 2025, jumlah penumpang yang tercatat mencapai sekitar 188.748.918 orang. Data ini menunjukkan bahwa Transjakarta tetap menjadi salah satu moda transportasi yang banyak digunakan masyarakat untuk mendukung aktivitas sehari-hari di DKI Jakarta, baik untuk perjalanan kerja, pendidikan, maupun aktivitas lainnya di kawasan perkotaan.

Gambar 3.128. Jumlah Penumpang *Mass Rapid Transit* (MRT) menurut Bulan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2023	1.092.508	532.671	960.406	2.079.745	2.688.158	2.750.562	2.960.596	3.024.172	3.050.531	3.140.481	3.153.726	3.048.562
2024	3.163.257	2.868.163	2.920.796	2.768.974	3.340.972	3.539.619	3.868.155	3.740.153	3.557.530	3.865.578	3.563.874	3.623.267
2025	3.579.538	3.483.799	3.219.035	3.268.690	3.692.387	4.419.821	-	-	-	-	-	-

Sumber: PT MRT Jakarta (Perseroda)

Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta merupakan salah satu moda transportasi publik berbasis rel yang berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat di DKI Jakarta. Berdasarkan data, jumlah penumpang MRT Jakarta sepanjang tahun 2024 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada akhir tahun. Pada Januari 2024 tercatat sebanyak 3.163.257 penumpang, kemudian menurun pada Februari 2024 menjadi 2.868.163 penumpang, dan sedikit meningkat pada Maret 2024 sebesar 2.920.796 penumpang. Jumlah penumpang kembali meningkat pada November 2024 sebesar 3.340.972 penumpang dan mencapai angka tertinggi pada Desember 2024 sebanyak 3.539.619 penumpang. Sementara itu, pada awal tahun 2025 jumlah penumpang MRT masih relatif tinggi dengan 3.868.155 penumpang pada Januari, 3.740.153 penumpang pada Februari, dan 3.557.530 penumpang pada Maret 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa MRT Jakarta terus dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai moda transportasi yang cepat, efisien, dan mendukung mobilitas perkotaan, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan penggunaan transportasi publik di wilayah DKI Jakarta.

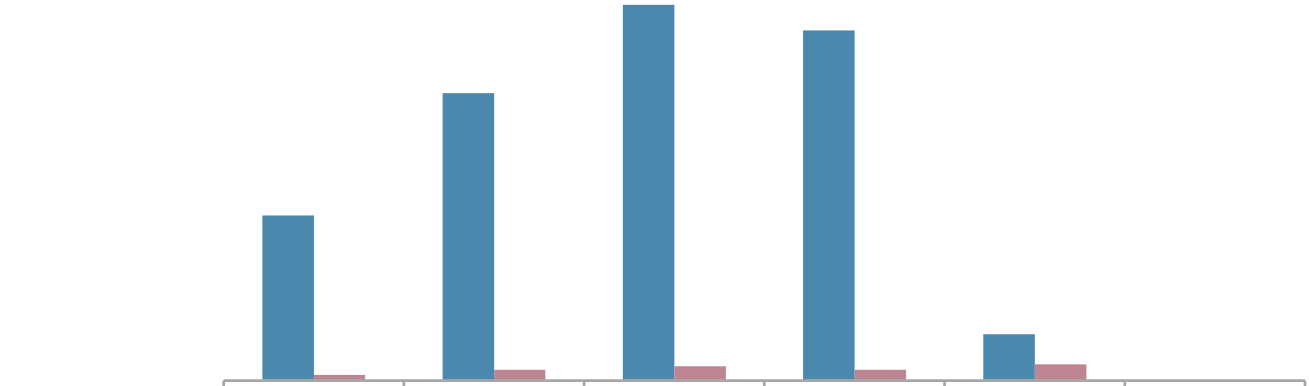
3.10. Ketenagakerjaan

3.10.1. Pengangguran



Pada tahun 2024, jumlah penduduk pengangguran di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan variasi yang cukup signifikan menurut kategori pernah bekerja dan tidak pernah bekerja serta sebaran wilayah kota/kabupaten. Secara keseluruhan, jumlah pengangguran di DKI Jakarta tercatat sebanyak 337.992 orang.

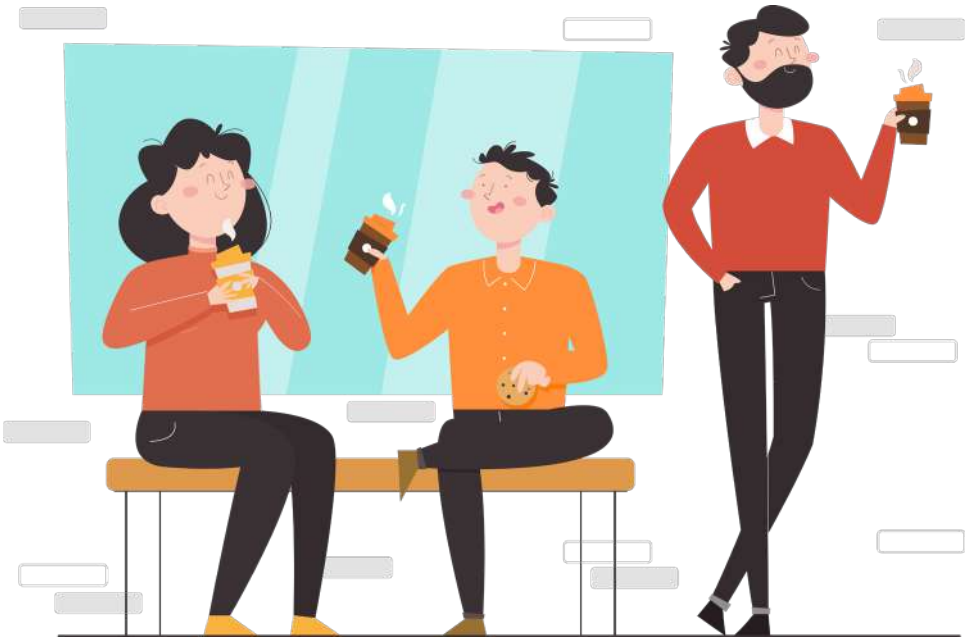
Gambar 3.129. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi DKI Jakarta, 2025



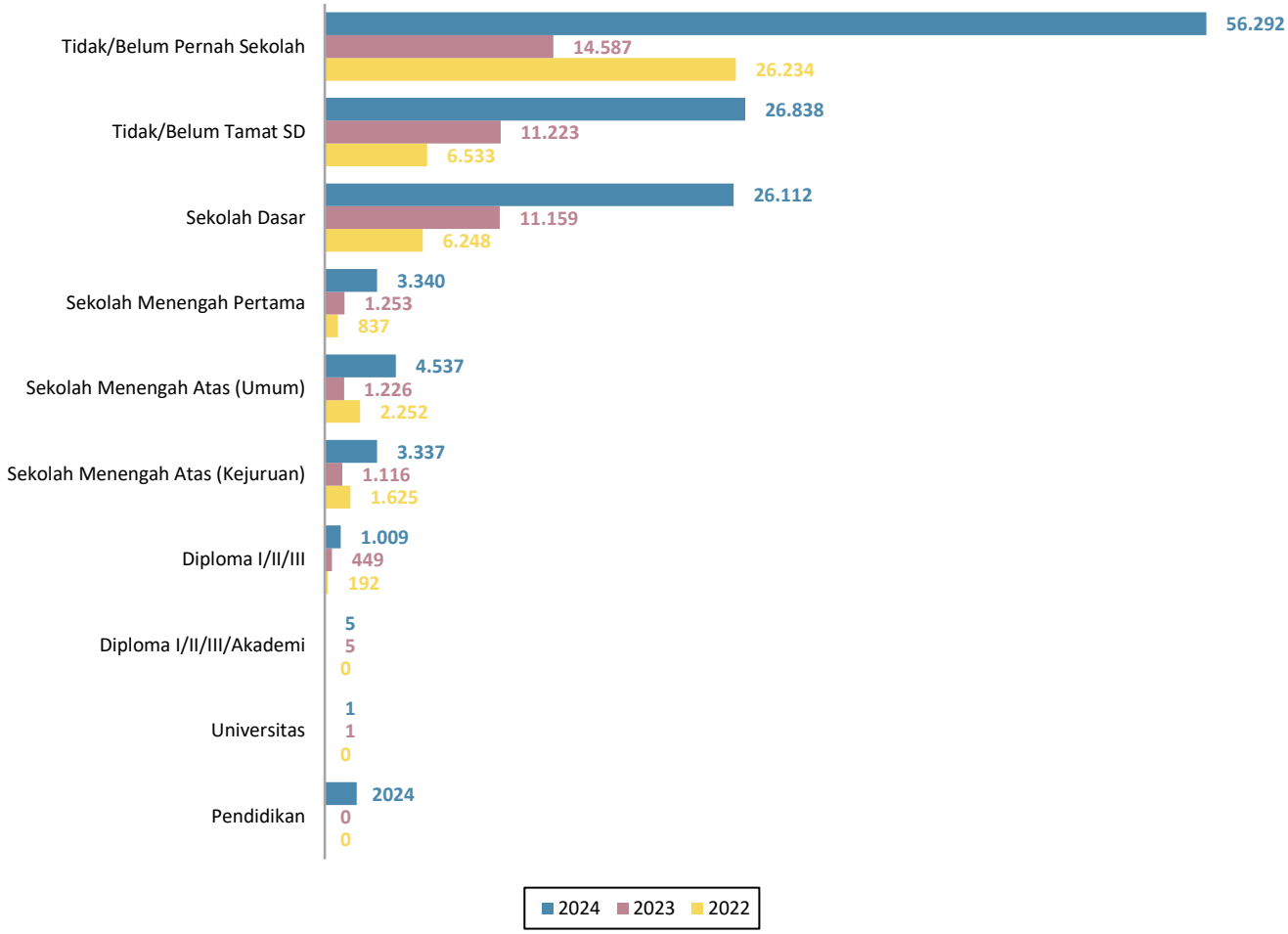
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Pernah Bekerja	513.631	894.576	1.169.339	1.089.825	144.687	222
Tidak Pernah Bekerja	18.346	33.741	44.543	33.827	50.990	965

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Jumlah penduduk yang pernah bekerja di wilayah DKI Jakarta paling banyak terdapat di Jakarta Barat sebanyak 1.169.339 orang, diikuti oleh Jakarta Selatan sebanyak 1.089.825 orang, Jakarta Utara sebanyak 894.576 orang, dan Jakarta Pusat sebanyak 513.631 orang. Sementara itu, jumlah yang lebih kecil terdapat di Jakarta Timur sebanyak 144.687 orang dan Kepulauan Seribu sebanyak 222 orang. Di sisi lain, penduduk yang tidak pernah bekerja paling banyak terdapat di Jakarta Timur sebanyak 50.990 orang, diikuti Jakarta Barat sebanyak 44.543 orang, Jakarta Utara sebanyak 33.741 orang, Jakarta Selatan sebanyak 33.827 orang, serta Jakarta Pusat sebanyak 18.346 orang. Adapun jumlah paling sedikit terdapat di Kepulauan Seribu sebanyak 965 orang. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024, pengangguran di DKI Jakarta masih didominasi oleh penduduk yang tidak pernah bekerja, khususnya di Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, yang mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan akses pasar kerja bagi pencari kerja baru.



Gambar 3.130. Pencari Kerja Terdaftar menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di DKI Jakarta Tahun 2022-2024



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

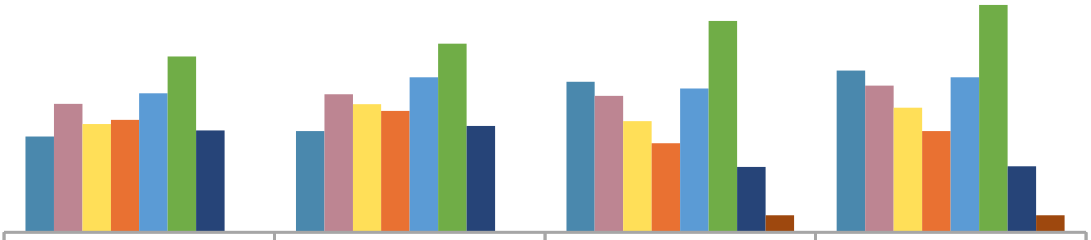
Ditinjau dari jenjang pendidikan tinggi, pencari kerja lulusan universitas mengalami peningkatan signifikan, dari 6.248 orang pada tahun 2022 menjadi 11.159 orang pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa lulusan pendidikan tinggi semakin aktif memasuki pasar kerja formal di Jakarta, seiring dengan meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi dan tingginya ekspektasi terhadap pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi akademik. Fenomena ini juga mengindikasikan kompetisi yang semakin ketat di segmen tenaga kerja terdidik. Sebaliknya, pada jenjang pendidikan menengah atas, terjadi pergeseran yang cukup mencolok. Jumlah pencari kerja lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) umum mengalami penurunan tajam dari 26.234 orang pada tahun 2022 menjadi 14.587 orang pada tahun 2023. Penurunan ini berkontribusi besar terhadap berkurangnya total pencari kerja terdaftar dan dapat mencerminkan meningkatnya penyerapan tenaga kerja lulusan SMA atau peralihan ke jalur pendidikan lanjutan dan pelatihan keterampilan. Sementara itu, pencari kerja lulusan Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMAK) justru meningkat dari 6.533 orang pada tahun 2022 menjadi 11.223 orang pada tahun 2023, yang mengindikasikan tingginya mobilitas lulusan vokasi dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian spesifik mereka. Pada jenjang pendidikan diploma, baik Diploma maupun akademi, jumlah pencari kerja mengalami penurunan. Lulusan Diploma tercatat menurun dari 1.625 orang pada tahun 2022 menjadi 1.116 orang pada tahun 2023,

sedangkan lulusan Diploma/Akademi turun dari 2.252 orang menjadi 1.226 orang pada periode yang sama. Penurunan ini dapat diartikan sebagai meningkatnya daya serap pasar kerja terhadap lulusan diploma yang umumnya memiliki keterampilan terapan yang dibutuhkan oleh sektor industri dan jasa di Jakarta. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama, jumlah pencari kerja relatif kecil dan cenderung menurun. Lulusan Sekolah Menengah Pertama tercatat meningkat dari 837 orang pada tahun 2022 menjadi 1.253 orang pada tahun 2023, sementara lulusan Sekolah Dasar meningkat dari 192 orang menjadi 449 orang. Adapun pencari kerja dengan latar belakang tidak atau belum tamat SD serta yang tidak atau belum pernah sekolah jumlahnya sangat minimal, menunjukkan bahwa pasar kerja formal di Jakarta semakin menuntut kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi.

3.10.2. Pelatihan Tenaga Kerja

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta. Pelatihan kerja berbasis kompetensi diselenggarakan untuk membekali peserta dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, serta diakhiri dengan uji kompetensi sebagai bentuk pengakuan atas kemampuan yang telah diperoleh. Oleh karena itu, persentase peserta pelatihan yang memperoleh sertifikat kompetensi menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pelatihan kerja.

Gambar 3.131. Jumlah Peserta Pelatihan dan Peserta Tersertifikasi menurut Unit Kerja Tahun 2023 - 2024

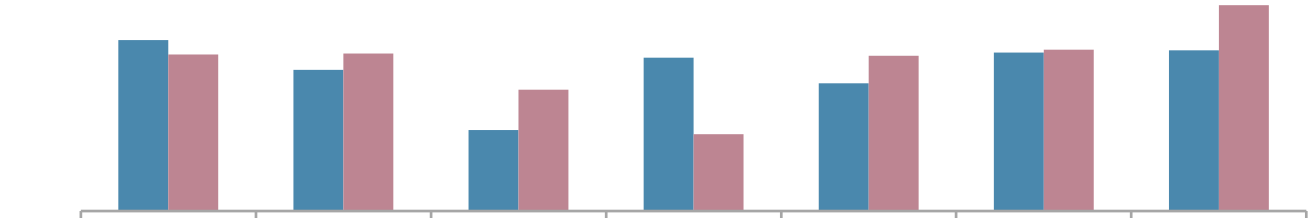


	2023		2024	
	Peserta Pelatihan	Peserta Tersertifikasi	Peserta Pelatihan	Peserta Tersertifikasi
PPKD Jakarta Pusat	568	600	893	960
PPKD Jakarta Utara	763	820	810	870
PPKD Jakarta Barat	642	760	660	740
PPKD Jakarta Selatan	667	720	528	600
PPKD Jakarta Timur	825	920	854	920
PPKPI Pasar Rebo	1.043	1.120	1.255	1.350
PPKKPL Condet	605	632	388	392
P3D	-	-	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Persentase peserta pelatihan kerja yang memperoleh sertifikat kompetensi di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan capaian yang relatif tinggi dan cenderung meningkat dalam dua tahun terakhir. Pada 2023, dari 5.572 peserta pelatihan tercatat 5.113 orang memperoleh sertifikat kompetensi atau sebesar 91,76 persen. Pada 2024, jumlah peserta meningkat menjadi 5.932 orang dengan 5.488 peserta tersertifikasi atau sebesar 92,52 persen. Kenaikan sebesar 0,75 poin persentase tersebut mencerminkan perbaikan efektivitas penyelenggaraan pelatihan dan uji kompetensi, sekaligus menunjukkan konsistensi kualitas *output* pelatihan kerja di DKI Jakarta.

Gambar 3.132. Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang Mendapatkan Sertifikat Kompetensi di DKI Jakarta Tahun 2023 - 2024

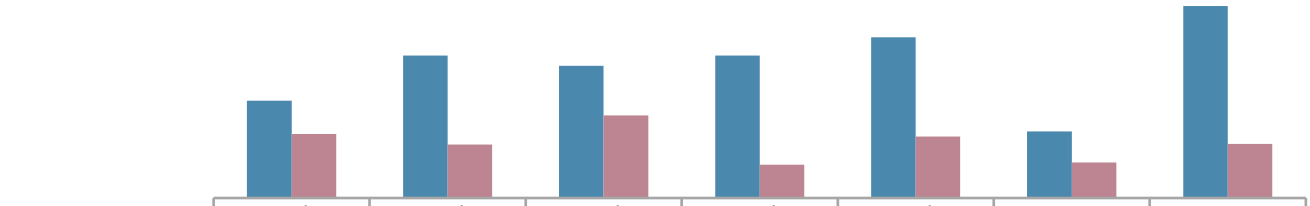


	PPKD Jakarta Pusat	PPKD Jakarta Utara	PPKD Jakarta Barat	PPKD Jakarta Selatan	PPKD Jakarta Timur	PPKPI Pasar Rebo	PPKKPL Condet
2023	94,67	91,27	84,34	92,64	89,70	93,25	93,49
2024	93,02	93,15	88,96	83,85	92,86	93,58	98,70

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Ditinjau menurut unit pelaksana, terdapat variasi capaian antar pusat pelatihan. Pada 2023, persentase tertinggi tercatat di PPKKPL Condet sebesar 95,73 persen, sedangkan persentase terendah berada di PPKD Jakarta Barat sebesar 84,47 persen. Sementara itu pada 2024, capaian tertinggi terdapat pada P3D dengan 100,00 persen, dan untuk unit sejenis dengan tahun sebelumnya, PPKKPL Condet tetap menunjukkan kinerja tinggi sebesar 98,98 persen. Persentase terendah pada 2024 tercatat di PPKD Jakarta Selatan sebesar 88,00 persen. Secara umum, sebagian besar unit pelatihan telah mencapai tingkat sertifikasi di atas 88 persen, yang mengindikasikan bahwa mayoritas peserta pelatihan berhasil menyelesaikan proses uji kompetensi dan memperoleh pengakuan formal atas keterampilannya. Tren peningkatan ini mencerminkan penguatan tata kelola pelatihan berbasis kompetensi di DKI Jakarta. Tingginya proporsi peserta tersertifikasi menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas hasil pelatihan kerja, karena sertifikat kompetensi berfungsi sebagai bukti standar kemampuan yang diakui dan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja.

Gambar 3.133. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Reguler) Tahun 2023



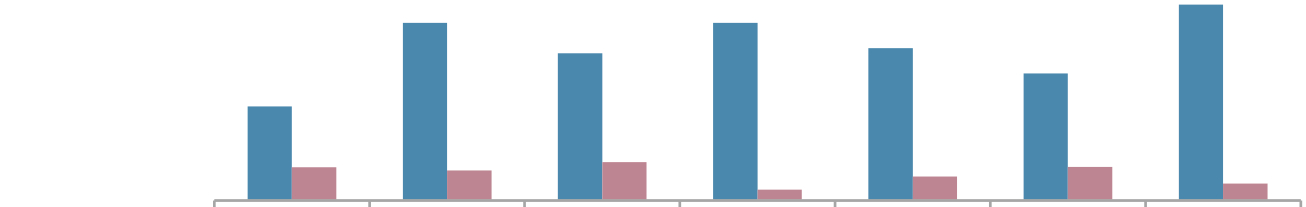
	PPKD Jakarta Pusat	PPKD Jakarta Utara	PPKD Jakarta Barat	PPKD Jakarta Selatan	PPKD Jakarta Timur	PPKKPL Condet	PPKPI Pasar Rebo
Jumlah Dilatih	1.160	1.700	1.580	1.700	1.920	794	2.460
Jumlah Ditempatkan	766	640	987	398	732	423	645

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui unit-unit pelaksana pelatihan kerja menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi (reguler) bagi 11.314 tenaga kerja, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengurangan tingkat pengangguran di wilayah DKI Jakarta. Program ini dilaksanakan di berbagai Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) dan Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Lainnya (PPKPL/PPKPI) yang tersebar di lima wilayah administrasi dan Jakarta Timur

bagian timur. Dari total peserta yang dilatih, sebanyak 4.591 orang berhasil ditempatkan ke dunia kerja, sehingga rasio penempatan tenaga kerja pasca pelatihan tercatat sebesar 40,58 persen, yang menunjukkan bahwa lebih dari dua dari lima peserta pelatihan berhasil terserap ke pasar kerja formal maupun sektor produktif lainnya.

Gambar 3.134. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat *(Mobile Training Unit)* Tahun 2023



	PPKD Jakarta Pusat	PPKD Jakarta Utara	PPKD Jakarta Barat	PPKD Jakarta Selatan	PPKD Jakarta Timur	PPKKPL Condet	PPKPI Pasar Rebo
Jumlah Dilatih	370	700	580	700	600	500	780
Jumlah Ditempatkan	131	118	151	43	94	132	66

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2023, program pelatihan berbasis masyarakat melalui *Mobile Training Unit* (MTU) di Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 4.230 orang tenaga kerja dilatih dan 735 orang berhasil ditempatkan. Pelatihan ini dilaksanakan oleh beberapa unit pelaksana, yaitu PPKD Jakarta Barat, PPKD Jakarta Pusat, PPKD Jakarta Selatan, PPKD Jakarta Timur, PPKD Jakarta Utara, PPKKPL Condet, dan PPKPI Pasar Rebo. Secara keseluruhan, capaian penempatan tenaga kerja dari program MTU berada pada kisaran 17,4 persen, yang menunjukkan bahwa sekitar satu dari enam peserta pelatihan berhasil memperoleh penempatan kerja setelah mengikuti pelatihan. Dari sisi jumlah peserta, PPKPI Pasar Rebo merupakan unit dengan jumlah peserta dilatih terbesar, yakni 780 orang atau sekitar 18,4 persen dari total peserta MTU.

3.10.3. Penempatan Kerja dan Wirausaha

Pencari kerja yang berwirausaha merupakan bagian penting dalam dinamika ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta karena mencerminkan alternatif penciptaan lapangan kerja di luar sektor formal. Berdasarkan data tahun 2023 hingga Triwulan III Tahun 2024, jumlah pencari kerja yang berwirausaha menunjukkan variasi yang cukup signifikan baik menurut wilayah kota/kabupaten maupun jenis kelamin.

Gambar 3.135. Jumlah Pencari Kerja yang Berwirausaha DKI Jakarta Tahun 2024-2025

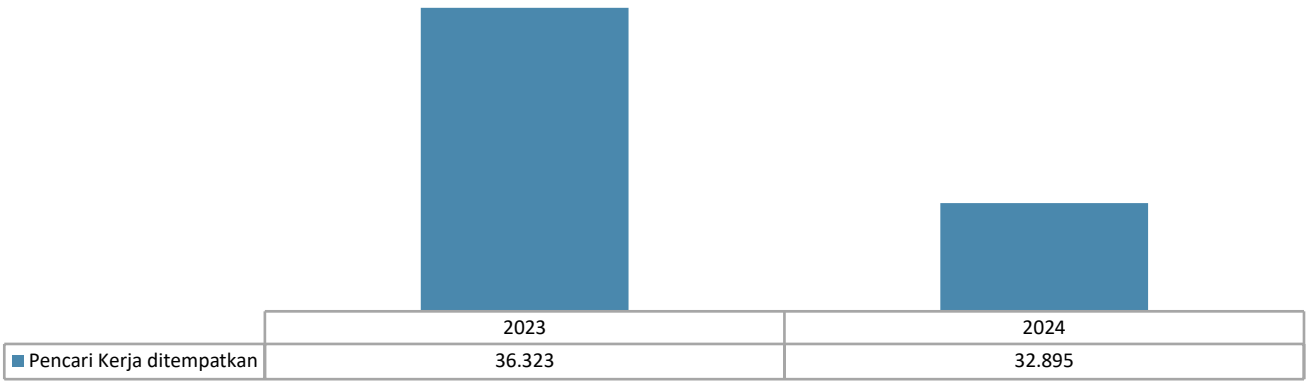


	Laki-laki	Perempuan
2024	160	1.709
2025	77	675

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Ditinjau dari jenis kelamin, pada tahun 2025, pencari kerja yang berwirausaha didominasi oleh perempuan sebanyak 675 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 77 orang. Dominasi perempuan ini juga berlanjut pada 2024, di mana pencari kerja perempuan yang berwirausaha tercatat sebanyak 1.709 orang, jauh lebih tinggi dibandingkan pencari kerja laki-laki yang hanya 675 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat signifikan dalam kegiatan kewirausahaan pencari kerja di Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 3.136. Jumlah Tenaga Kerja Formal yang Ditempatkan menurut Tahun 2023-2024



	2023	2024
Pencari Kerja ditempatkan	36.323	32.895

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data terbaru, jumlah pencari kerja terdaftar tercatat sebanyak 36.531 orang, sementara pencari kerja yang berhasil ditempatkan mencapai 32.895 orang. Dengan demikian, persentase penempatan tenaga kerja formal mencapai 90,05 persen. Angka ini mencerminkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi dari sistem layanan penempatan tenaga kerja di DKI Jakarta, baik melalui mekanisme antar kerja, *job matching*, maupun kolaborasi dengan dunia usaha dan industri.

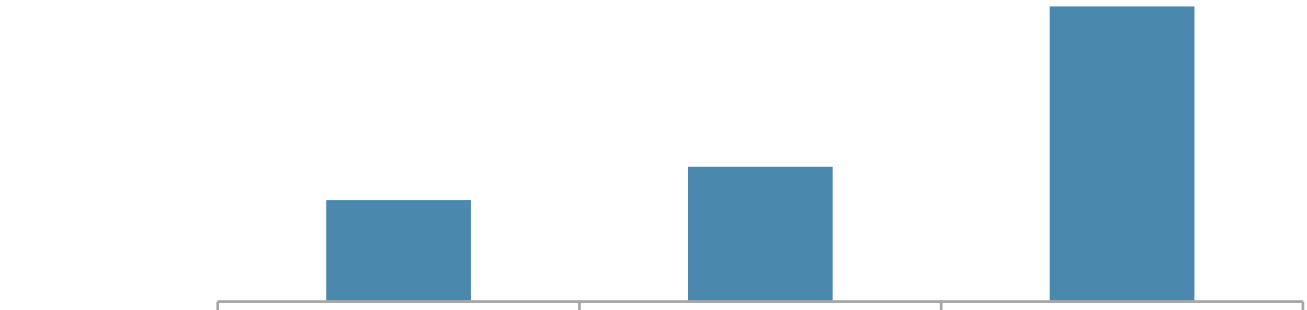
Tingginya persentase penempatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan program penempatan tenaga kerja yang dijalankan pemerintah daerah cukup responsif terhadap kebutuhan pasar kerja. Hal ini juga menandakan bahwa sebagian besar pencari kerja terdaftar memiliki kualifikasi yang relatif sesuai dengan kebutuhan sektor formal, serta didukung oleh sistem informasi pasar kerja yang semakin terintegrasi.

3.10.4. Produktivitas dan Daya Saing



Produktivitas tenaga kerja menggambarkan seberapa besar nilai tambah ekonomi yang dihasilkan rata-rata oleh setiap tenaga kerja, sehingga menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kinerja ekonomi dan efisiensi pemanfaatan tenaga kerja di suatu wilayah. Pada Provinsi DKI Jakarta, data menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja terus meningkat sepanjang 2022 hingga 2024.

Gambar 3.137. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di DKI Jakarta Tahun 2022-2024



	2022	2023	2024
Tingkat Produktivitas	400.701.360	404.213.741	421.130.119

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

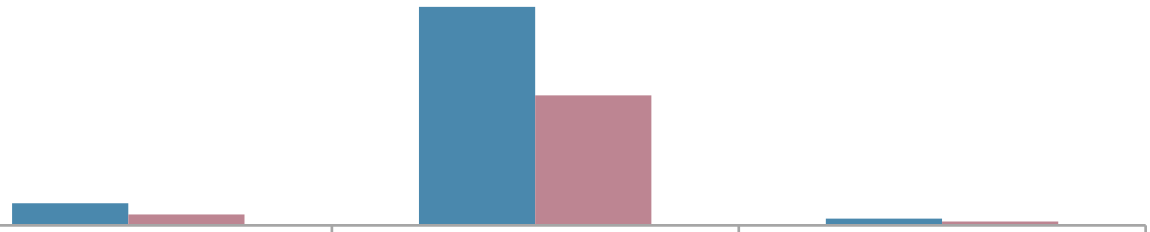
Produktivitas tenaga kerja menggambarkan seberapa besar nilai tambah ekonomi yang dihasilkan rata-rata oleh setiap tenaga kerja, sehingga menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kinerja ekonomi dan efisiensi pemanfaatan tenaga kerja di suatu wilayah. Pada Provinsi DKI Jakarta, data menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja terus meningkat sepanjang 2022 hingga 2024. Nilai produktivitas tercatat sebesar 400,7 juta rupiah per tenaga kerja pada 2022, lalu naik menjadi 404,2 juta rupiah per tenaga kerja pada 2023, dan meningkat lebih kuat menjadi 421,1 juta rupiah per tenaga kerja pada 2024. Kenaikan ini terjadi seiring meningkatnya total PDRB, dari 1.953,46 triliun rupiah pada 2022 menjadi 2.050,47 triliun rupiah pada 2023, kemudian mencapai 2.151,04 triliun rupiah pada 2024, sementara jumlah tenaga kerja juga bertambah dari 4.875.102 orang pada 2022 menjadi 5.072.737 orang pada 2023 dan 5.107.780 orang pada 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas terutama terjadi ketika pertumbuhan ekonomi lebih cepat daripada pertambahan tenaga kerja, karena secara perhitungan produktivitas diperoleh dari pembagian PDRB dengan jumlah tenaga kerja; dengan kata lain, produktivitas membaik ketika perekonomian menghasilkan nilai tambah yang lebih besar tanpa diikuti kenaikan jumlah tenaga kerja yang sepadan.

3.10.5. Perusahaan dan Hubungan Industrial

Pada tahun 2023, jumlah pekerja atau buruh pada perusahaan yang menjadi peserta Jamsostek di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebanyak 4.630.825 orang, yang tersebar di seluruh wilayah kota dan kabupaten administrasi. Wilayah dengan jumlah pekerja peserta Jamsostek terbanyak adalah Jakarta Selatan, yaitu 1.851.118 orang atau 39,97 persen dari total peserta Jamsostek di DKI Jakarta. Selanjutnya, Jakarta Pusat mencatat 1.067.699 orang atau 23,06 persen, diikuti Jakarta Utara sebanyak 629.211 orang (13,59 persen), Jakarta Barat sebanyak 563.422 orang (12,17 persen), dan Jakarta Timur sebanyak 518.177 orang (11,19 persen). Sementara itu, jumlah pekerja peserta Jamsostek paling sedikit tercatat di Kepulauan Seribu, yaitu sebanyak 1.198 orang atau 0,03 persen dari total peserta.



Gambar 3.138. Data Hubungan Industrial menurut Jumlah Perusahaan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2025



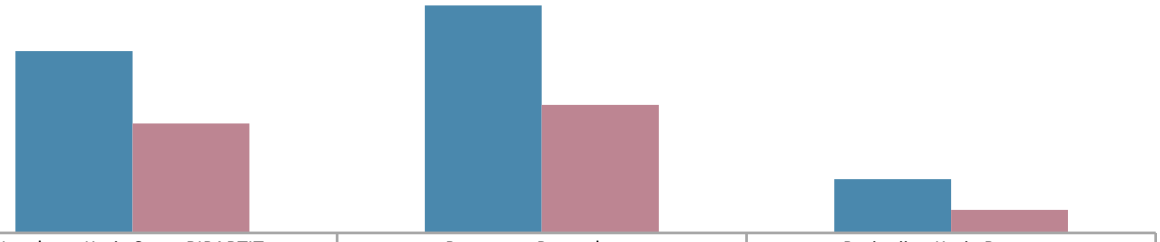
	Lembaga Kerja Sama BIPARTIT	Peraturan Perusahaan	Perjanjian Kerja Bersama
2024	213	2.421	63
2025	106	1.264	37

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2024, jumlah Lembaga Kerja Sama Bipartit tercatat sebanyak 213 perusahaan dengan cakupan 143.702 pekerja. Sementara itu, Peraturan Perusahaan menjadi sarana yang paling dominan, dengan jumlah 2.421 perusahaan dan mencakup 214.525 pekerja. Adapun Perjanjian Kerja Bersama pada tahun 2024 tercatat di 63 perusahaan dengan jumlah pekerja yang tercakup sebanyak 42.564 orang. Data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sebagian besar perusahaan di DKI Jakarta menggunakan Peraturan Perusahaan sebagai dasar pengaturan hubungan kerja.

Memasuki tahun 2025, jumlah sarana hubungan industrial mengalami penurunan pada seluruh jenis sarana. Lembaga Kerja Sama Bipartit tercatat sebanyak 106 perusahaan dengan 86.506 pekerja. Peraturan Perusahaan tercatat di 1.264 perusahaan dengan cakupan 101.041 pekerja, sedangkan Perjanjian Kerja Bersama tercatat sebanyak 37 perusahaan dengan 18.137 pekerja. Secara keseluruhan, pada tahun 2025 tercatat 1.407 perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial dengan total 205.684 pekerja yang tercakup.

Gambar 3.139. Data Hubungan Industrial menurut Jumlah Pekerja di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2025

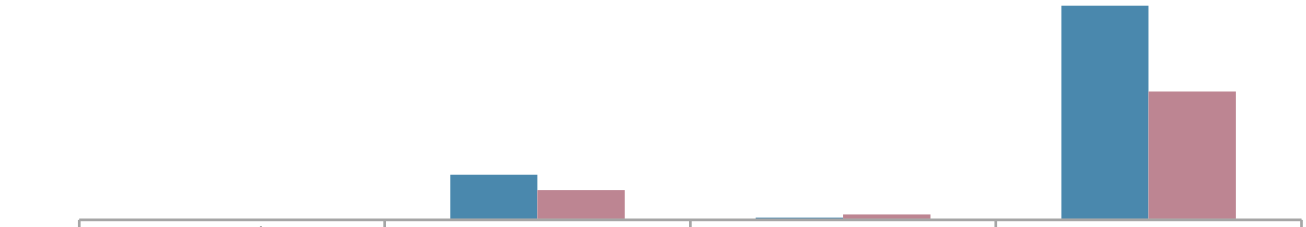


	Lembaga Kerja Sama BIPARTIT	Peraturan Perusahaan	Perjanjian Kerja Bersama
2024	143.702	214.525	42.564
2025	86.506	101.041	18.137

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Jika dibandingkan, jumlah perusahaan pengguna sarana hubungan industrial menurun dari 2.697 perusahaan pada tahun 2024 menjadi 1.407 perusahaan pada tahun 2025, demikian pula jumlah pekerja yang tercakup menurun dari 400.791 pekerja pada tahun 2024 menjadi 205.684 pekerja pada tahun 2025. Penurunan ini terjadi pada seluruh jenis sarana, baik LKS Bipartit, Peraturan Perusahaan, maupun Perjanjian Kerja Bersama.

Gambar 3.140. Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja menurut Jenis Perselisihan Sengketa Tahun 2024-2025

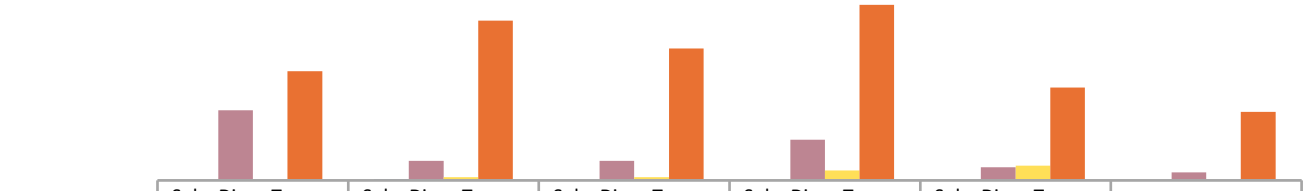


	Antar SP/SB	Hak	Kepentingan	PHK
2024	2	159	8	758
2025	1	105	19	454

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Perselisihan hubungan industrial di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 hingga tahun 2025 menunjukkan dinamika yang bervariasi menurut jenis perselisihan dan unit kerja penanganannya. Berdasarkan data, jenis perselisihan yang dicatat meliputi perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB), perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada tahun 2024, jumlah perselisihan hubungan industrial yang ditangani tercatat sebanyak 927 kasus, yang didominasi oleh perselisihan PHK sebanyak 758 kasus, diikuti perselisihan hak sebanyak 159 kasus, perselisihan kepentingan sebanyak 8 kasus, dan perselisihan antar SP/SB sebanyak 2 kasus.

Gambar 3.141. Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja menurut Suku Dinas DKI Jakarta Tahun 2025



	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Antar SP/SB	-	1	-	-	-	-
Hak	43	12	12	25	8	5
Kepentingan	-	2	2	6	9	-
PHK	67	98	81	109	57	42

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

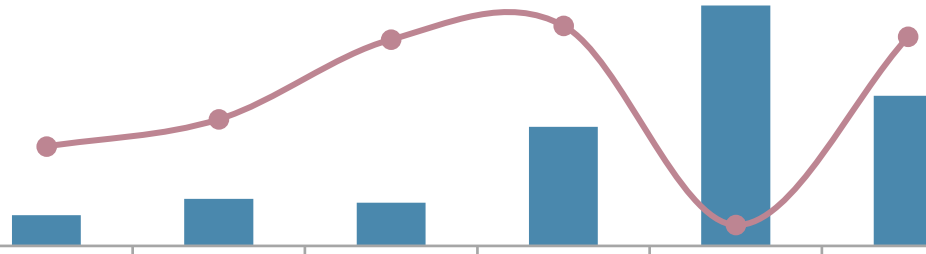
Memasuki tahun 2025, jumlah perselisihan hubungan industrial yang tercatat menurun menjadi 579 kasus, dengan komposisi perselisihan PHK sebanyak 454 kasus, perselisihan hak sebanyak 105 kasus, perselisihan kepentingan sebanyak 19 kasus, dan perselisihan antar SP/SB sebanyak 1 kasus. Berdasarkan unit kerja, perselisihan terbanyak pada tahun 2025 ditangani oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan sebanyak 140 kasus, disusul Jakarta Utara sebanyak 113 kasus, Jakarta Barat sebanyak 95 kasus, Jakarta Pusat sebanyak 110 kasus dan Jakarta Timur sebanyak 74 kasus. Sama seperti tahun sebelumnya, perselisihan PHK tetap menjadi jenis perselisihan yang paling dominan di seluruh wilayah, dengan jumlah tertinggi di Jakarta Selatan sebanyak 109 kasus dan Jakarta Utara sebanyak 98 kasus.

3.11. Penanaman Modal dan Perizinan

3.11.1. Realisasi Investasi

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor asing, baik berupa perorangan maupun badan usaha asing, untuk menjalankan usaha di Indonesia. Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor dalam negeri, baik individu maupun badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari Indonesia. Baik PMA maupun PMDN merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang saling melengkapi, di mana investasi asing dapat mempercepat modernisasi industri dan transfer teknologi, sementara investasi dalam negeri memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan regional.

Gambar 3.142. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Modal Asing di DKI Jakarta Tahun 2020-2025



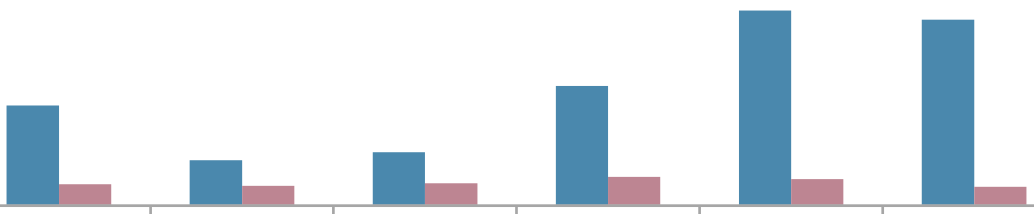
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Proyek	17.667	27.120	24.950	68.704	138.728	86.641
Investasi (Juta Rupiah)	42.954.743,90	54.708.229,00	89.223.588,70	95.202.092,30	8.981.520,00	90.394.938,46

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Tren Penanaman Modal Asing (PMA) di DKI Jakarta selama periode 2020-2023 cenderung fluktuatif dan kemudian menguat pada 2023, baik dari sisi jumlah proyek maupun nilai investasi. PMA DKI Jakarta pada tahun 2023 mencatatkan kenaikan jumlah proyek yang signifikan hingga 124% menjadi 20.028 proyek dengan kenaikan nilai investasi sebesar 29% menjadi USD4.83 miliar.

Selanjutnya, tren Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) DKI Jakarta selama periode 2020-2024 cenderung fluktuatif dari sisi jumlah proyek, namun konsisten meningkat dari sisi nilai investasi. PMDN DKI Jakarta pada tahun 2023 mencatatkan kenaikan yang signifikan sebesar 175% menjadi 68.704 proyek, namun dengan kenaikan nilai investasi yang hanya sebesar 6,7% menjadi Rp.95,2 triliun

Gambar 3.143. Perkembangan Penanaman Modal Asing DKI Jakarta Tahun 202-2025

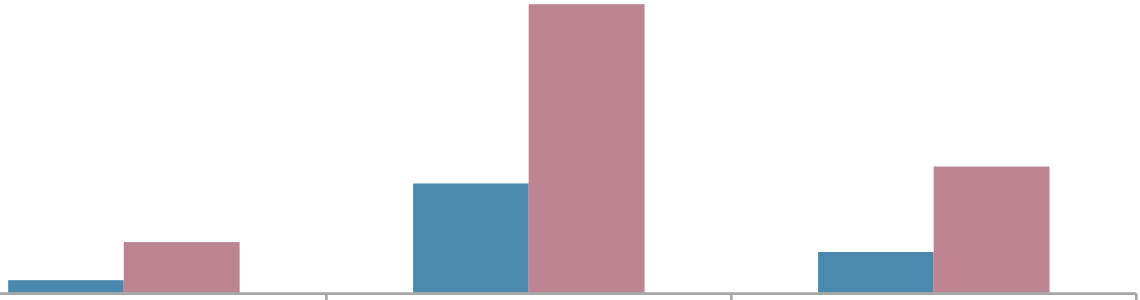


	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Proyek	16.787	7.620	8.942	20.028	42.048	31.133
Investasi (USD Juta)	3.613,26	3.330,57	3.744,07	4.830,02	4.476,02	3.152,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Kinerja Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi DKI Jakarta sepanjang periode 2020 hingga 2025 memperlihatkan tren yang fluktuatif, ditandai dengan pencapaian puncak investasi pada pertengahan periode yang kemudian diikuti oleh kontraksi tajam di akhir periode. Setelah berangsur pulih dari tekanan awal pandemi dan mencapai rekor nilai investasi tertinggi pada tahun 2023 sebesar USD 4,83 (dengan 20.028 proyek), volume proyek pada 2024 melonjak tajam sebesar 109,95% menjadi 42.048 unit, namun nilai realisasinya justru terkoreksi turun sebesar 7,33% menjadi USD 4,48. Anomali ini mengindikasikan adanya pergeseran minat investor asing menuju sektor-sektor atau proyek dengan padat modal yang lebih rendah (skala kecil). Memasuki tahun 2025, ekosistem investasi global tampaknya memberikan tekanan lebih lanjut, yang berdampak pada penyusutan kinerja PMA; jumlah proyek menurun sebesar 25,96% menjadi 31.133 unit, sejalan dengan penurunan nilai investasi sebesar 29,58% ke angka USD 3,15, menjadikan capaian tahun 2025 sebagai titik terendah secara nominal selama enam tahun terakhir, yang merefleksikan sikap rasionalisasi dan kehati-hatian pemodal asing di ibu kota.

Gambar 3.144. Data Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2023-2025



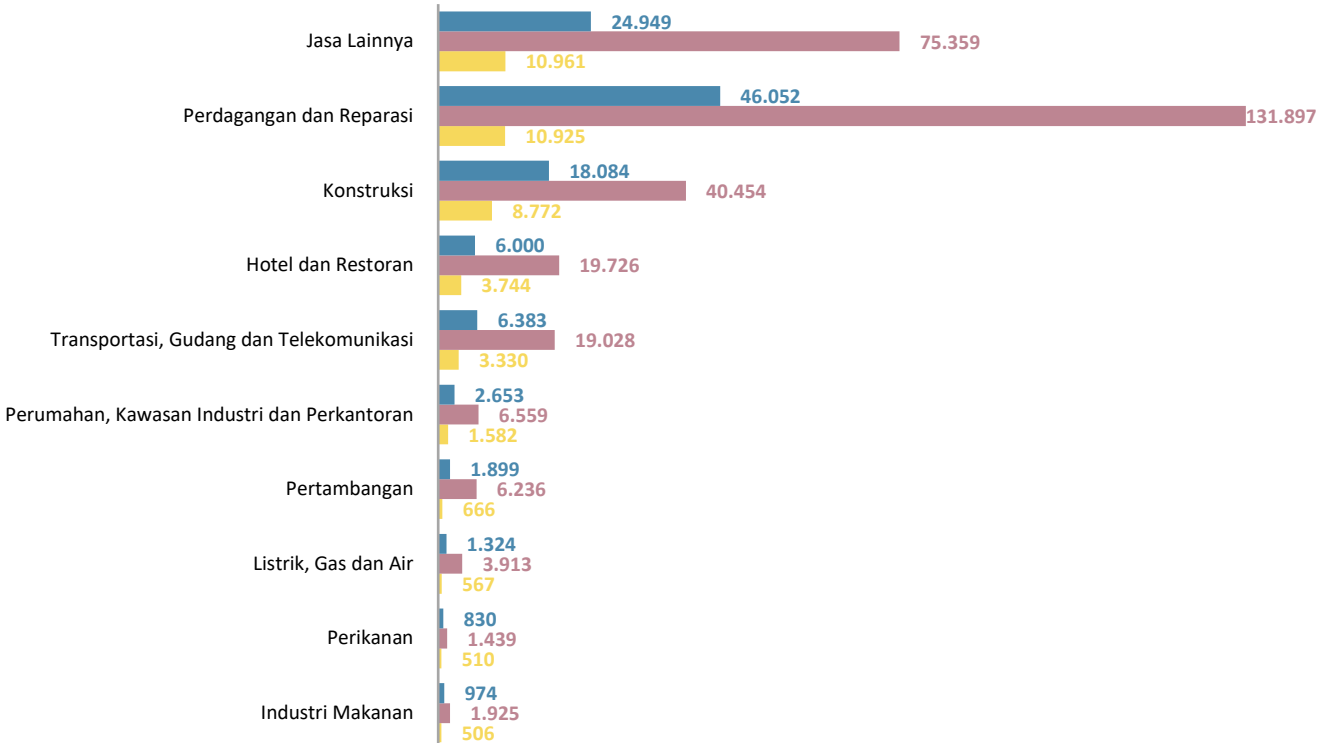
	2023	2024	2025
PMA	9.095	74.680	28.257
PMDN	34.921	249.136	86.194

Sumber: Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal

Realisasi jumlah proyek investasi di DKI Jakarta, yang mencakup Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), menunjukkan dinamika pertumbuhan yang selama periode 2023 hingga 2025. Secara umum, PMDN secara konsisten mendominasi jumlah proyek dibandingkan PMA, yang mencerminkan kuatnya peran investor domestik dalam menggerakkan roda perekonomian ibu kota. Tren investasi ini menjadi indikator vital mengenai iklim usaha yang dinamis serta tingginya minat pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Jakarta. Memasuki tahun 2025, meskipun terjadi koreksi volume dibandingkan puncak tahun 2024, jumlah proyek tetap berada di level yang solid dengan realisasi 28.257 proyek PMA dan 86.194 proyek PMDN, yang masih jauh lebih tinggi dibandingkan capaian tahun dasar 2023.



Gambar 3.145. Jumlah Proyek Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut Jumlah Proyek 2023-2025

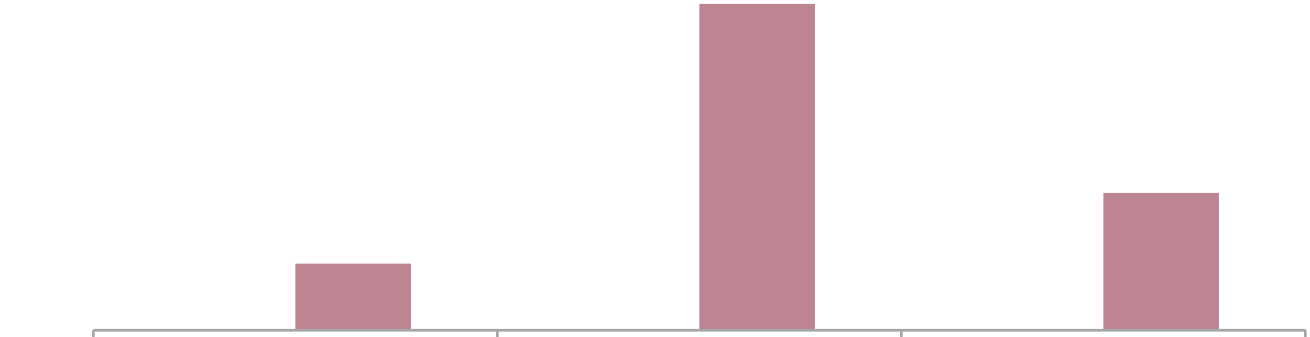


Sumber: Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditinjau berdasarkan sektor usaha, preferensi investasi di DKI Jakarta selama periode 2023-2025 memperlihatkan pola yang konsisten, di mana sektor tersier mendominasi struktur proyek investasi. Sektor Perdagangan dan Reparasi menjadi kontributor utama dengan jumlah proyek terbesar di setiap tahunnya. Pada puncaknya di tahun 2024, sektor ini mencatatkan realisasi sebanyak 131.897 proyek (gabungan PMA/PMDN), diikuti oleh penurunan menjadi 46.052 proyek pada tahun 2025. Dominasi sektor ini menegaskan karakteristik Jakarta sebagai pusat perdagangan dan distribusi utama nasional. Posisi kedua ditempati oleh sektor Jasa Lainnya, yang mencatatkan 75.359 proyek pada tahun 2024 dan 24.949 proyek pada tahun 2025. Sektor Konstruksi juga memegang peranan strategis dengan jumlah proyek yang signifikan, mencapai 40.454 proyek pada tahun 2024 dan 18.084 proyek pada tahun 2025, yang mencerminkan geliat pembangunan infrastruktur dan properti yang terus berlanjut. Sebaliknya, sektor-sektor primer seperti Pertambangan, Perikanan, serta Industri Makanan memiliki kontribusi jumlah proyek yang relatif lebih kecil.



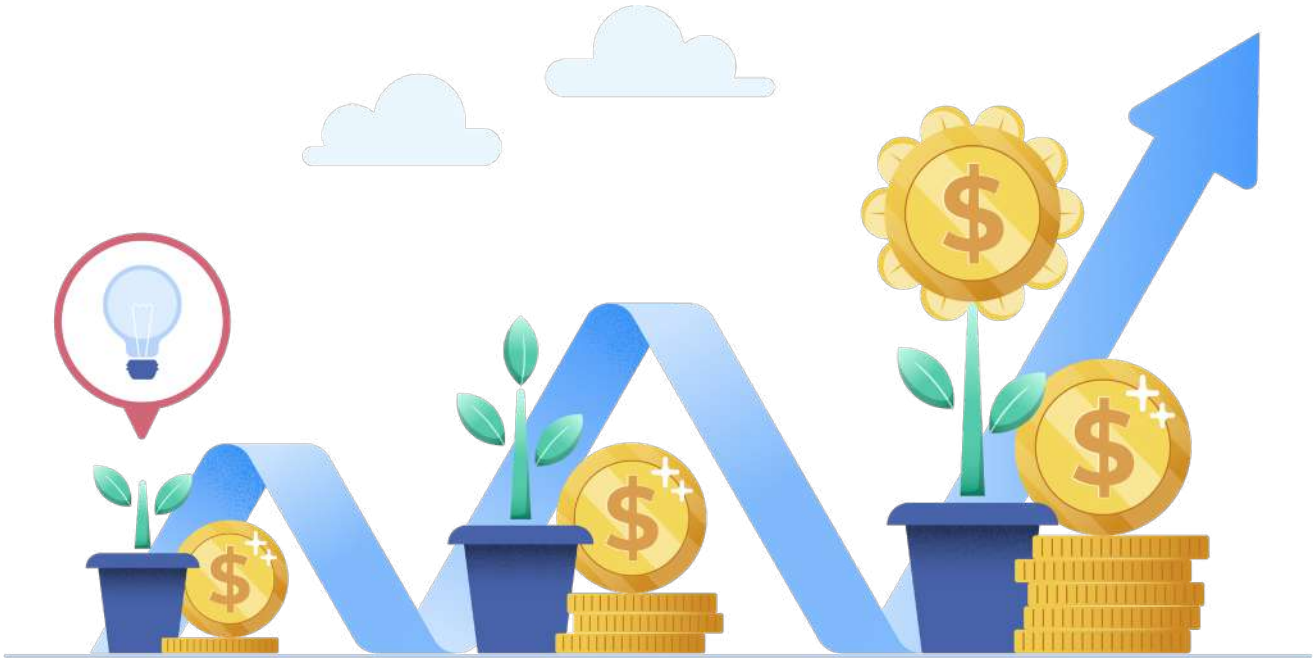
Gambar 3.146. Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2023-2025



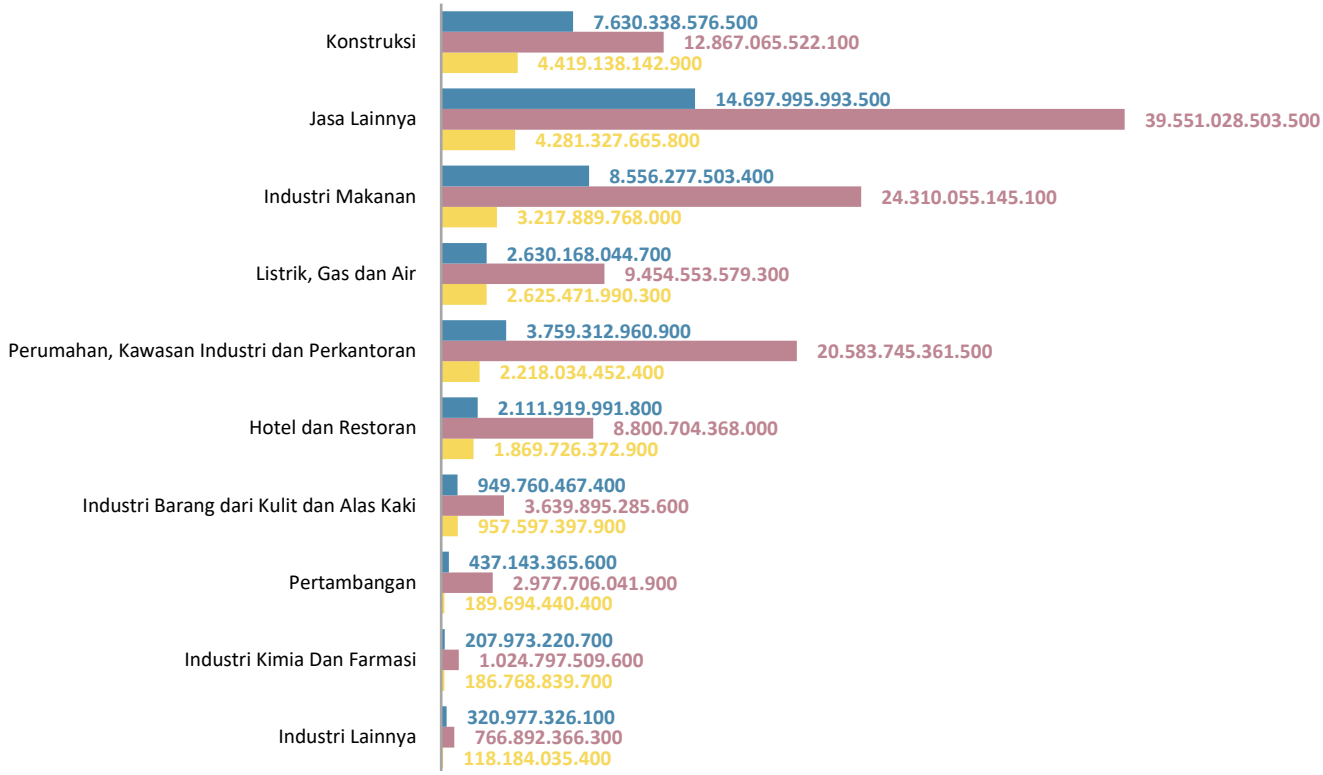
	2023	2024	2025
PMA	1.073.314.100	7.559.091.494	1.720.225.000
PMDN	20.480.667.300.000	128.402.106.300.000	42.242.453.500.000

Sumber: Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal

Realisasi nilai investasi di DKI Jakarta, yang mencakup PMA dan PMDN, menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2023-2025. Secara agregat, PMDN menunjukkan dominasi nilai yang jauh lebih besar dibandingkan PMA, menegaskan bahwa kekuatan modal dalam negeri masih menjadi penopang utama struktur investasi di DKI Jakarta. Pada tahun 2023, nilai investasi PMDN tercatat sebesar Rp20,48 triliun sementara PMA sebesar Rp1,07 triliun. Memasuki tahun 2024, terjadi akselerasi pertumbuhan investasi yang luar biasa, di mana nilai realisasi PMDN melonjak hingga 526,94% mencapai angka Rp128,4 triliun. Tren serupa juga dialami oleh PMA yang mencatatkan kenaikan tajam sebesar 604,27% menjadi Rp7,56 triliun. Meskipun pada tahun 2025 terdapat penurunan nilai baik PMDN maupun PMA, capaian ini masih menunjukkan pertumbuhan positif jika dibandingkan dengan tahun 2023, yakni kenaikan sebesar 106,25% untuk PMDN dan 60,27% untuk PMA.



Gambar 3.147. Sepuluh Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 2023-2025

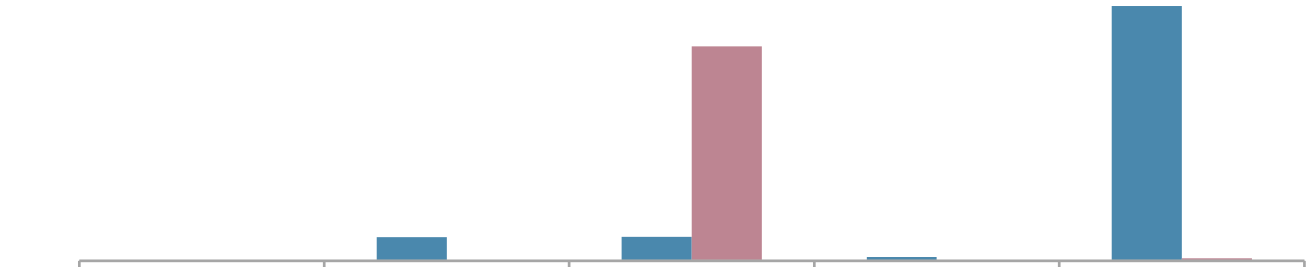


Sumber: Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditinjau berdasarkan sektor usaha, distribusi nilai investasi di DKI Jakarta memperlihatkan konsentrasi modal yang besar pada sektor jasa dan industri pengolahan. Sektor Jasa Lainnya secara konsisten menempati posisi teratas sebagai penyumbang nilai investasi terbesar, khususnya pada tahun 2024 yang mencatatkan angka Rp39,55 triliun. Meskipun mengalami penurunan 62,84% pada tahun 2025 menjadi Rp14,7 triliun, sektor ini tetap menjadi primadona bagi para investor. Hal ini mengindikasikan bahwa ekosistem bisnis di Jakarta sangat kondusif bagi pengembangan beragam layanan jasa yang mendukung aktivitas perkotaan. Selain sektor jasa, Industri Makanan menunjukkan kinerja positif dengan menduduki peringkat kedua terbesar pada tahun 2024, mencatatkan nilai investasi sebesar Rp24,3 triliun, sebelum terkoreksi 64,8% menjadi Rp8,56 triliun pada tahun 2025. Sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran serta sektor Konstruksi juga memberikan kontribusi signifikan, masing-masing dengan nilai Rp20,58 triliun dan Rp12,87 triliun pada puncak tahun 2024. Menariknya, pada tahun 2025, sektor Konstruksi menunjukkan ketahanan yang cukup baik dengan nilai Rp7,63 triliun. Data ini mencerminkan pergeseran pola investasi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik (properti dan konstruksi), tetapi juga semakin menguat pada sektor industri sekunder (makanan) dan sektor tersier (jasa lainnya).



Gambar 3.148. Jumlah Usaha Jasa Makanan dan Minuman Pariwisata yang Memiliki Perizinan Tahun 2023-2024

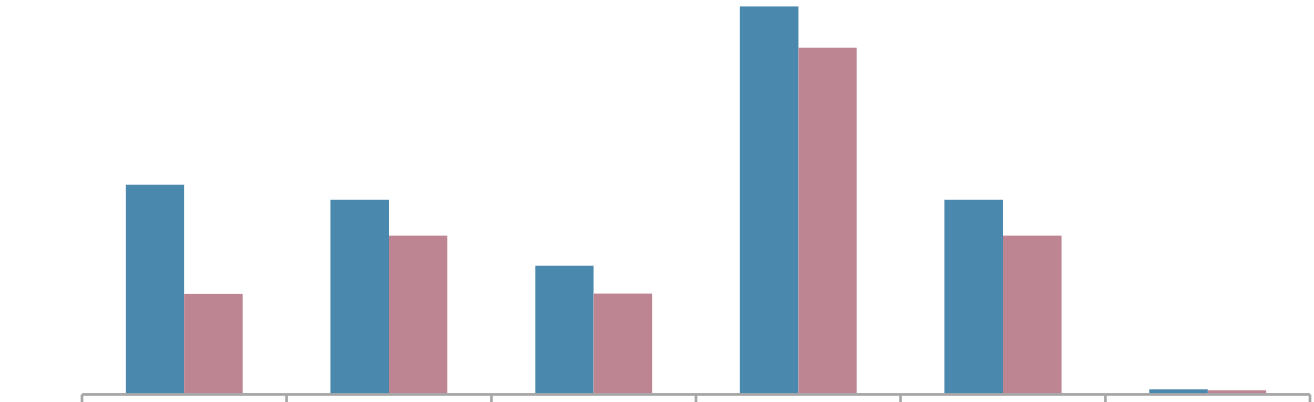


	Tidak diketahui	Usaha Besar	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Mikro
2023	77	4.083	4.107	659	43.699
2024	1	7	36.764	-	453

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Profil skala usaha pada sektor jasa makanan dan minuman pariwisata berizin di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 mengalami lonjakan signifikan pada kategori usaha kecil di tengah penyusutan drastis kategori lainnya. Usaha Kecil mencatatkan pertumbuhan eksponensial sebesar 795,16%, melonjak dari 4.107 unit pada tahun 2023 menjadi 36.764 unit pada tahun 2024, menjadikannya entitas usaha paling dominan dalam lanskap industri kuliner saat ini. Fenomena ini berbanding terbalik dengan kinerja Usaha Mikro yang sebelumnya mendominasi, namun kini mengalami kontraksi tajam sebesar 98,96%, menyusut dari 43.699 unit menjadi hanya 453 unit. Tren penurunan signifikan juga melanda skala usaha yang lebih tinggi, di mana Usaha Besar terkoreksi hingga 99,83% dari 4.083 unit menjadi hanya 7 unit, sementara Usaha Menengah mengalami penurunan total 100% dengan tidak adanya unit terdata pada tahun 2024 dibandingkan 659 unit pada tahun sebelumnya, yang mengindikasikan adanya reklasifikasi data perizinan yang mendasar atau perubahan karakteristik usaha secara menyeluruh pada periode tersebut.

Gambar 3.149. Jumlah Usaha Jasa Perjalanan Wisata Pariwisata yang Memiliki Perizinan Tahun 2023-2024

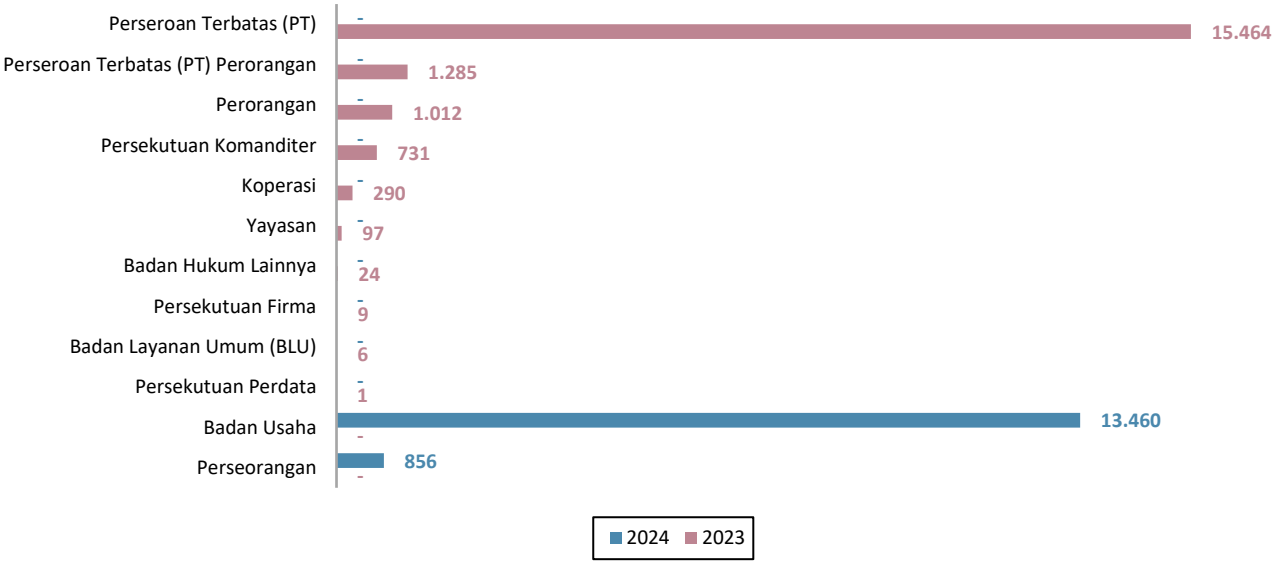


	Jakarta Pusat	Jakarta Timur	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	3.761	3.493	2.306	6.960	3.493	94
2024	1.800	2.845	1.811	6.219	2.845	76

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Sementara itu, pada sektor usaha Jasa Perjalanan Wisata di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023–2024, jumlah tenaga kerja menunjukkan tren kontraksi atau penurunan yang merata di seluruh wilayah administrasi. Jakarta Selatan konsisten mempertahankan posisinya sebagai basis ketenagakerjaan terbesar dengan total 6.219 tenaga kerja pada tahun 2024, meskipun angka ini mengalami koreksi penurunan sebesar 10,65% dibandingkan tahun 2023 yang mencatatkan 6.960 orang. Penurunan yang paling tajam dan signifikan terjadi di Jakarta Pusat, di mana jumlah tenaga kerja menyusut drastis hingga 52,14%, berkurang dari 3.761 orang menjadi 1.800 orang. Tren negatif serupa juga dialami oleh wilayah Jakarta Barat yang mengalami penurunan sebesar 21,47% menjadi 1.811 orang, serta Jakarta Timur yang terkoreksi sebesar 18,55% menjadi 2.845 orang. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai wilayah dengan kontribusi terkecil turut mencatatkan penurunan sebesar 19,15% dari 94 orang menjadi 76 orang.

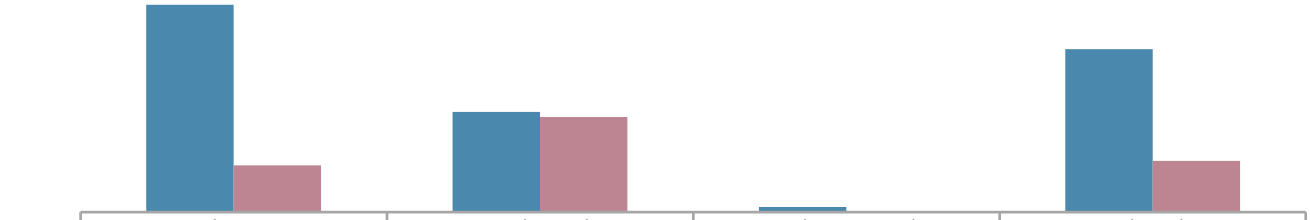
Gambar 3.150. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Perusahaan Jasa Perjalanan Wisata menurut Wilayah DKI Jakarta Tahun 2023-2024



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Pada jasa perjalanan wisata pariwisata di DKI Jakarta tahun 2023–2024 memperlihatkan dinamika penurunan jumlah pelaku usaha yang terdaftar secara formal, baik pada segmen korporasi maupun perorangan. Pada tahun 2023, struktur usaha didominasi mutlak oleh Perseroan Terbatas (PT) sebanyak 15.464 unit, yang jauh melampaui bentuk usaha lainnya. Namun, memasuki tahun 2024, data agregat menunjukkan kontraksi kinerja di mana kategori Badan Usaha (gabungan entitas berbadan hukum) hanya tercatat sebanyak 13.460 unit, sebuah angka yang secara nominal lebih rendah dibandingkan jumlah PT saja pada tahun sebelumnya. Tren penurunan yang spesifik dan terukur juga dialami oleh segmen usaha Perseorangan, yang menyusut sebesar 15,42% dari 1.012 unit pada tahun 2023 menjadi 856 unit pada tahun 2024, mengindikasikan adanya tantangan keberlanjutan bisnis atau rasionalisasi jumlah pelaku usaha skala mikro dalam industri perjalanan wisata pada periode tersebut.

Gambar 3.151. Jumlah Usaha SPA yang Memiliki Perizinan

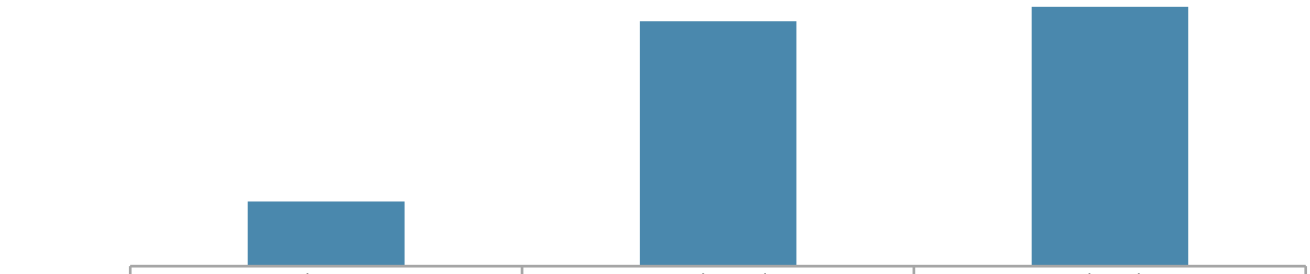


	Usaha Besar	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Mikro
2023	745	257	13	418
2024	120	244	-	131

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Pada sektor usaha SPA yang memiliki perizinan di DKI Jakarta tahun 2023–2024 memperlihatkan tren penurunan penyerapan tenaga kerja yang sangat signifikan di seluruh kategori skala usaha. Kategori Usaha Besar, yang pada tahun 2023 menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 745 orang, mengalami kontraksi terdalam secara nominal dengan penurunan drastis sebesar 83,89% menjadi hanya 120 orang pada tahun 2024. Tren negatif yang masif juga dialami oleh Usaha Mikro yang menyusut sebesar 68,66% dari 418 orang menjadi 131 orang, serta Usaha Menengah yang mencatatkan penurunan total 100% dengan tidak adanya tenaga kerja terserap pada tahun 2024 dibandingkan 13 orang pada tahun sebelumnya. Di tengah gelombang penurunan ini, Usaha Kecil menunjukkan ketahanan relatif yang paling baik dengan tingkat koreksi terendah sebesar 5,06%, bergerak moderat dari 257 orang menjadi 244 orang, yang mengindikasikan bahwa segmen usaha kecil lebih mampu mempertahankan stabilitas operasional dan retensi tenaga kerjanya dibandingkan skala usaha lainnya dalam menghadapi dinamika industri SPA pada periode tersebut.

Gambar 3.152. Jumlah Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Pariwisata yang Memiliki Perizinan



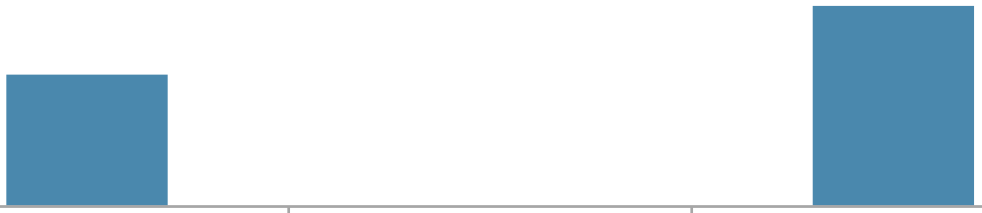
	Usaha Besar	Usaha Kecil	Usaha Mikro
Jumlah TKI	1.576	5.976	6.416

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Pada sektor usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pariwisata berizin di DKI Jakarta tahun 2024, jumlah tenaga kerja memperlihatkan dominasi yang signifikan dari segmen usaha skala mikro dan kecil sebagai tumpuan utama lapangan kerja. Usaha Mikro menjadi kontributor terbesar dengan menyerap 6.416 tenaga kerja, atau berkontribusi sebesar 45,93% dari total tenaga kerja di sektor ini. Posisi ini ditempel ketat oleh Usaha Kecil yang berkontribusi menyerap 5.976 orang atau setara dengan 42,78%.

Akumulasi dari kedua segmen ini menegaskan bahwa mayoritas (88,71%) kekuatan ketenagakerjaan di industri hiburan dan rekreasi, ditopang oleh pelaku usaha skala menengah ke bawah. Sebaliknya, Usaha Besar memiliki kontribusi yang paling minim dengan jumlah serapan hanya 1.576 tenaga kerja atau 11,28%, yang mengindikasikan bahwa karakteristik industri ini lebih bersifat padat karya pada level operasional skala mikro dan kecil dibandingkan korporasi skala besar.

Gambar 3.153. Jumlah Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran Pariwisata



	Usaha Besar	Usaha Kecil	Usaha Mikro
Jumlah	2.650	2	5.041

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Terakhir, penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE) pariwisata berizin di DKI Jakarta tahun 2024 menunjukkan perbedaan yang kontras antara skala usaha besar, kecil, dan mikro. Usaha Mikro menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan jumlah 5.041 orang, atau berkontribusi sebesar 65,53% dari total tenaga kerja di sektor ini. Kontribusi signifikan lainnya disumbangkan oleh Usaha Besar yang menyerap 2.650 tenaga kerja atau setara dengan 34,45%. Akumulasi kedua segmen ini mencapai 99,97% dari total penyerapan, menyisakan celah yang sangat lebar pada segmen Usaha Kecil yang hanya mencatatkan 2 tenaga kerja atau 0,03%. Struktur ini mengindikasikan bahwa ekosistem ketenagakerjaan industri MICE Jakarta sangat bertumpu pada pelaku usaha level akar rumput dan korporasi besar, sementara peran usaha skala kecil dalam penyerapan tenaga kerja tercatat sangat minim pada periode tersebut.

Gambar 3.154. Persentase Promosi Proyek-proyek di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	2023	2024
Persentase	75,00%	61,11%

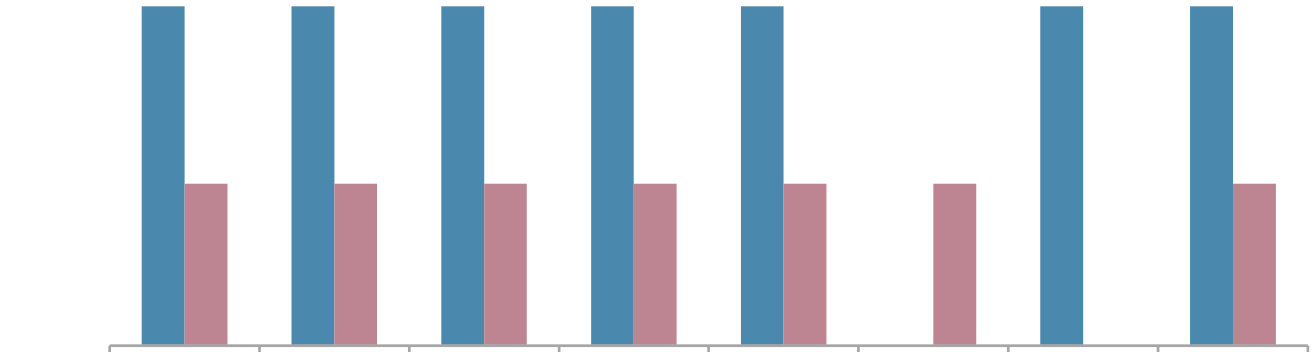
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Kinerja promosi proyek-proyek investasi di Provinsi DKI Jakarta yang melingkupi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sektor swasta mengalami penurunan sebesar 18,52% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 61,11%. Penurunan ini mengindikasikan adanya dinamika dalam strategi pemasaran investasi daerah, yang mungkin dipengaruhi oleh selektivitas kurasi proyek yang lebih ketat atau penyesuaian fokus prioritas promosi pada tahun berjalan.

3.11.2. Kemudahan dan Efektivitas Perizinan

Efektivitas dan kemudahan perizinan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan dan iklim usaha di Provinsi DKI Jakarta. Sistem perizinan yang sederhana, transparan, dan terintegrasi tidak hanya mencerminkan kapasitas institusional pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, serta kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Penyajian data perizinan menjadi instrumen penting untuk menggambarkan kinerja reformasi birokrasi, tingkat efisiensi layanan, serta dinamika kebutuhan perizinan lintas sektor, yang pada akhirnya mendukung perumusan kebijakan berbasis data dan penguatan daya saing Jakarta menuju kota global.

Gambar 3.155. Data Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Online menurut Triwulanan 2022-2025



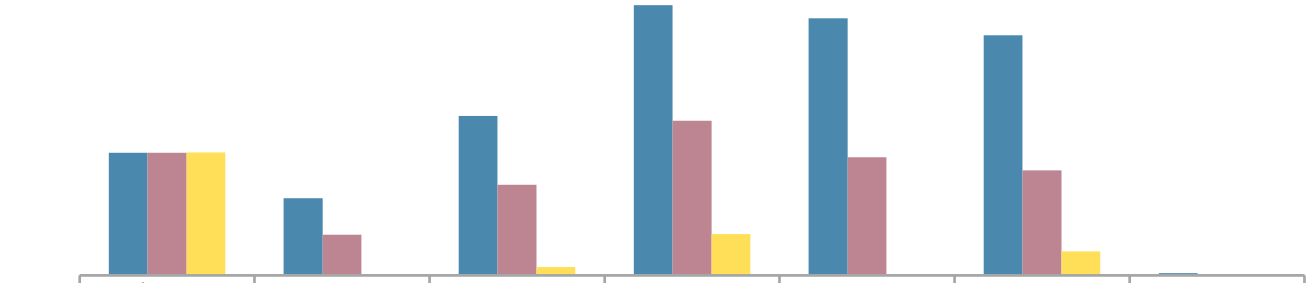
	Triwulan 1 2024	Triwulan 1 2025	Triwulan 2 2024	Triwulan 2 2025	Triwulan 3 2024	Triwulan 4 2022	Triwulan 4 2023	Triwulan 4 2024
Jakevo	262	262	262	262	262	-	262	262
OSS RBA	108	108	108	108	108	108	-	108

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Layanan perizinan dan nonperizinan secara online di Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi Jakevo dan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) menunjukkan tingkat operasional layanan yang tinggi dan stabil sepanjang periode 2024 hingga pertengahan 2025. Data mencatat bahwa Jakevo secara konsisten menjadi platform dominan dengan menyediakan akses terhadap 262 jenis layanan, melampaui OSS RBA yang memfasilitasi 108 jenis layanan. Angka ketersediaan layanan pada kedua platform ini bertahan konstan tanpa fluktuasi mulai dari Triwulan I tahun 2024 hingga Triwulan II tahun 2025. Stabilitas jumlah layanan saat ini menegaskan kesiapan ekosistem digital Jakarta, di mana Jakevo berperan vital sebagai ujung tombak pelayanan perizinan daerah yang spesifik, melengkapi sistem OSS RBA nasional untuk menjamin kepastian dan kemudahan akses investasi.



Gambar 3.156. Jumlah IMB Bangunan dan Retrubusi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024

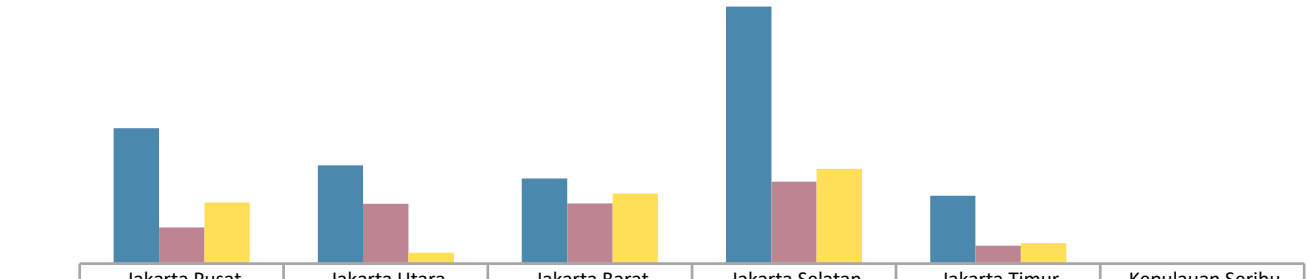


Kota/Kabupaten	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2022	1.271	2.625	4.454	4.234	3.955	37
2023	669	1.491	2.548	1.945	1.730	6
2024	10	135	682	23	394	-

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Tren penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di DKI Jakarta sepanjang periode 2022 hingga 2024 memperlihatkan dinamika penurunan volume yang signifikan dan konsisten di seluruh wilayah administrasi. Pada tahun 2022, aktivitas perizinan bangunan masih berada pada level yang tinggi, didominasi oleh Jakarta Barat dengan 4.454 izin dan Jakarta Selatan dengan 4.234 izin. Namun, terjadi kontraksi tajam pada tahun 2023, di mana realisasi di hampir seluruh wilayah menyusut cukup tajam sekitar 40% hingga 50% dari tahun sebelumnya. Jakarta Barat turun menjadi 2.548 izin, sementara Jakarta Selatan berkurang menjadi 1.945 izin. Pola penurunan seragam ini juga teramati di Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat. Memasuki tahun 2024, tren penurunan berlanjut ke level yang lebih ekstrem, yang mengindikasikan adanya pergeseran fundamental dalam administrasi perizinan atau penurunan drastis volume pengajuan IMB. Meskipun volume menyusut tajam, Jakarta Barat tetap bertahan sebagai wilayah dengan jumlah penerbitan tertinggi, yakni 682 izin, diikuti oleh Jakarta Timur sebanyak 394 izin dan Jakarta Utara 135 izin. Anomali yang mencolok terlihat di Jakarta Selatan; sebagai wilayah yang sebelumnya selalu menjadi kontributor utama, pada tahun 2024 hanya mencatatkan 23 izin, jumlah yang sangat kecil dibandingkan potensi wilayahnya. Kondisi serupa terjadi di Jakarta Pusat yang hanya menerbitkan 10 izin, serta Kabupaten Kepulauan Seribu yang tidak mencatatkan adanya penerbitan IMB pada tahun tersebut.

Gambar 3.157. Jumlah Retribusi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024

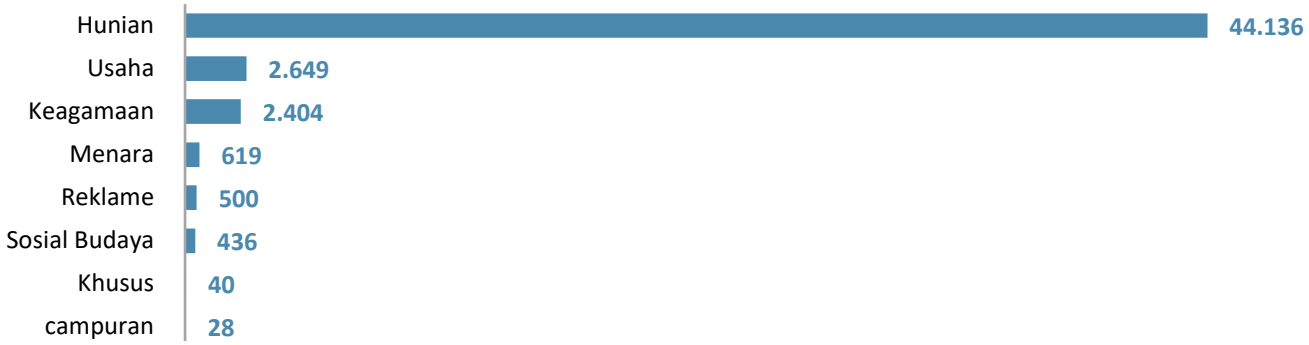


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2022	19.283.093.298	13.989.034.529	12.145.085.521	36.648.819.263	9.645.932.328	1.500.000
2023	5.147.112.494	8.536.215.425	8.591.573.899	11.689.892.384	2.572.560.971	-
2024	8.729.155.800	1.527.057.500	10.005.444.802	13.479.670.815	2.899.421.300	-

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Kinerja realisasi penerimaan retribusi daerah menurut wilayah administrasi sepanjang periode 2022 hingga 2024 memperlihatkan dinamika kontraksi yang signifikan pasca-tahun 2022, diikuti dengan pola pemulihan yang tidak merata pada akhir periode. Secara umum, tahun 2022 menjadi titik puncak penerimaan bagi seluruh wilayah, dengan Jakarta Selatan konsisten memimpin sebagai kontributor terbesar senilai Rp36,65 miliar. Meskipun seluruh wilayah mengalami penurunan tajam pada tahun 2023, tren positif mulai terlihat pada tahun 2024 di mana Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat berhasil mencatatkan *rebound* atau kenaikan kembali penerimaan; Jakarta Selatan menguat menjadi Rp13,48 miliar, sementara Jakarta Pusat dan Jakarta Barat masing-masing naik menjadi Rp8,73 miliar dan Rp10,00 miliar. Kontras dengan tren pemulihan tersebut, Jakarta Utara justru mengalami penurunan lanjutan yang signifikan pada tahun 2024 menjadi Rp1,52 miliar, sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu tercatat tidak memiliki realisasi penerimaan pada dua tahun terakhir.

Gambar 3.158. Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan menurut Jenis Penggunaan Tahun 2024

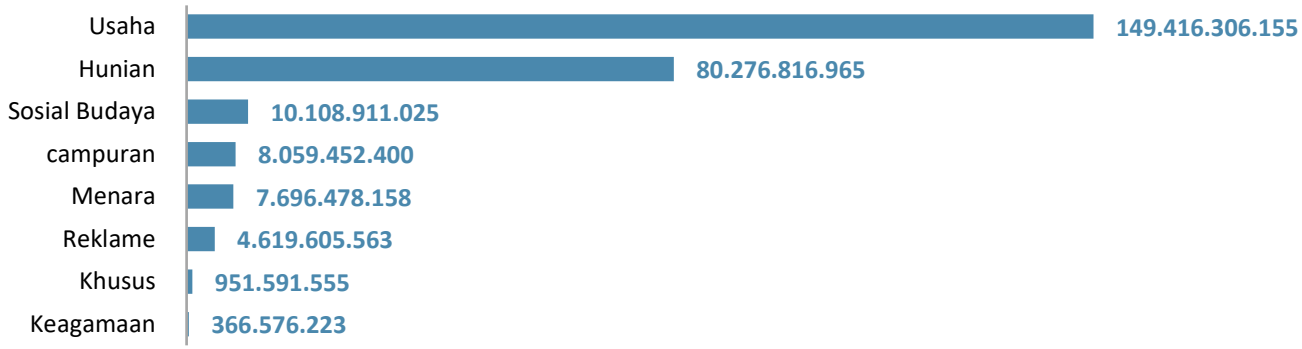


Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di DKI Jakarta sepanjang periode 2022 hingga 2024 didominasi oleh jenis penggunaan izin hunian yang mencatatkan total 44.136 izin. Menyusul Jauh di bawah kategori hunian, IMB Usaha dan Keagamaan menempati urutan berikutnya dengan volume yang relatif berimbang, masing-masing sebanyak 2.649 izin dan 2.404 izin, sementara fungsi penunjang infrastruktur kota seperti Menara, Reklame, dan Sosial Budaya memberikan kontribusi minor di kisaran 400 hingga 600 izin. Adapun kategori Khusus dan Campuran menjadi segmen dengan realisasi terkecil di bawah 50 izin, yang mengindikasikan bahwa pembangunan gedung multifungsi atau spesifik bukan menjadi tren dominan dalam lanskap tata ruang Jakarta pada periode tersebut.



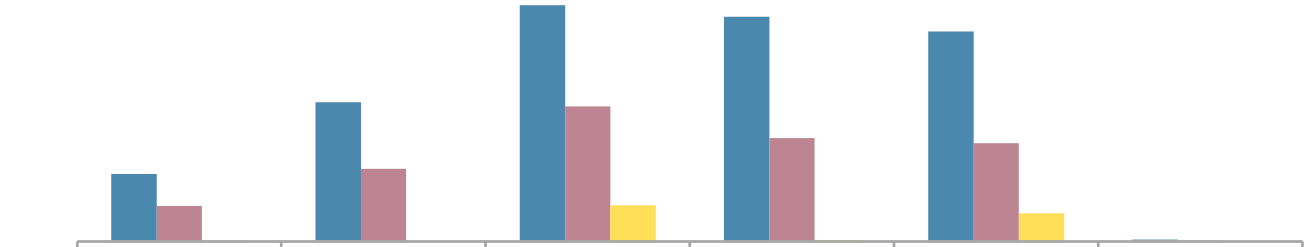
Gambar 3.159. Jumlah Retribusi menurut Jenis Penggunaan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Ditinjau dari struktur nilai retribusi IMB, IMB berjenis usaha tampil sebagai kontributor pendapatan daerah terbesar. Meskipun secara jumlah unit kalah jauh dibandingkan hunian, fungsi Usaha mencatatkan nilai realisasi retribusi tertinggi mencapai Rp149,41 miliar, atau menguasai porsi dominan sebesar 57,14% dari total penerimaan retribusi. Angka ini mencerminkan keunggulan nilai ekonomi yang signifikan, bahkan tercatat lebih tinggi 86,12% dibandingkan fungsi Hunian yang berada di posisi kedua dengan realisasi Rp80,27 miliar atau berkontribusi sebesar 30,70%. Di posisi selanjutnya, kontribusi pendapatan didukung oleh fungsi Sosial Budaya, Campuran, dan Menara yang bergerak moderat di kisaran Rp7 miliar hingga Rp10 miliar, sementara fungsi Keagamaan mencatatkan sumbangsih nominal terkecil sebesar Rp366 juta atau hanya 0,14% dari total retribusi.

Gambar 3.160. Realisasi Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2022-2024



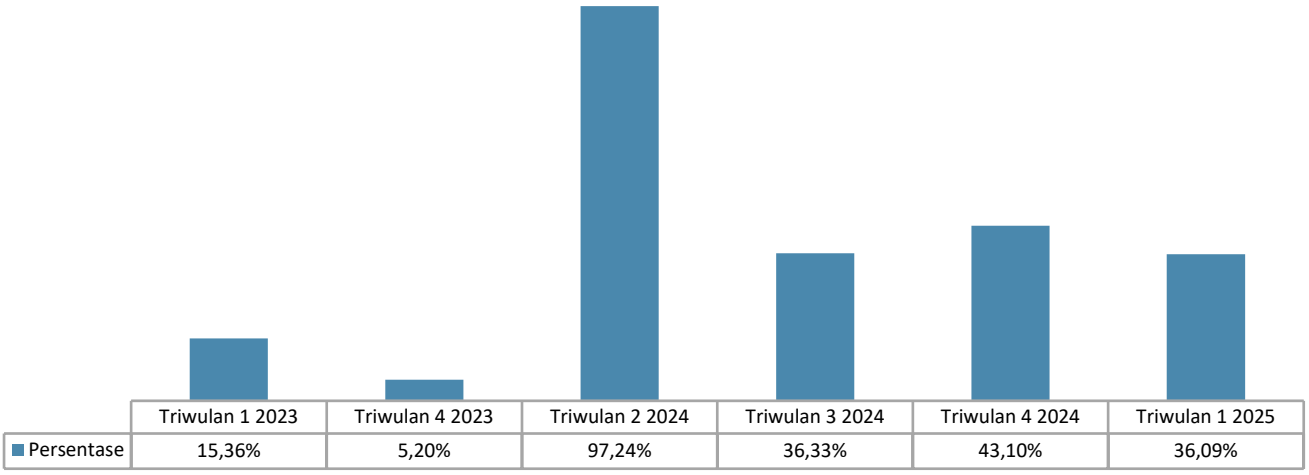
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2022	1.271	2.626	4.454	4.233	3.955	37
2023	669	1.368	2.548	1.945	1.853	12
2024	10	-	682	23	529	-

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Kinerja realisasi pelayanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di DKI Jakarta sepanjang periode 2022 hingga 2024 memperlihatkan tren penurunan volume yang signifikan dan merata di seluruh wilayah administrasi. Jakarta Barat konsisten mencatatkan jumlah perizinan tertinggi meskipun mengalami kontraksi tajam sebesar 73,23% dari 2.548 izin pada tahun 2023 menjadi 682 izin pada tahun 2024. Penurunan serupa juga dialami oleh Jakarta Timur yang menyusut sebesar 71,45% menjadi 529 izin. Kondisi yang jauh lebih ekstrem terlihat di wilayah lainnya, di mana Jakarta Selatan mengalami

penurunan drastis hingga 98,82% menjadi hanya 23 izin, dan Jakarta Pusat turun 98,51% menjadi 10 izin. Sementara itu, Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu mencatatkan penurunan total hingga 100% dengan tidak adanya realisasi izin yang tercatat pada tahun 2024, berbeda dengan tahun sebelumnya yang masing-masing masih mencatatkan 1.368 dan 12 izin.

Gambar 3.161. Persentase Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menurut Triwulan Tahun 2023-2025

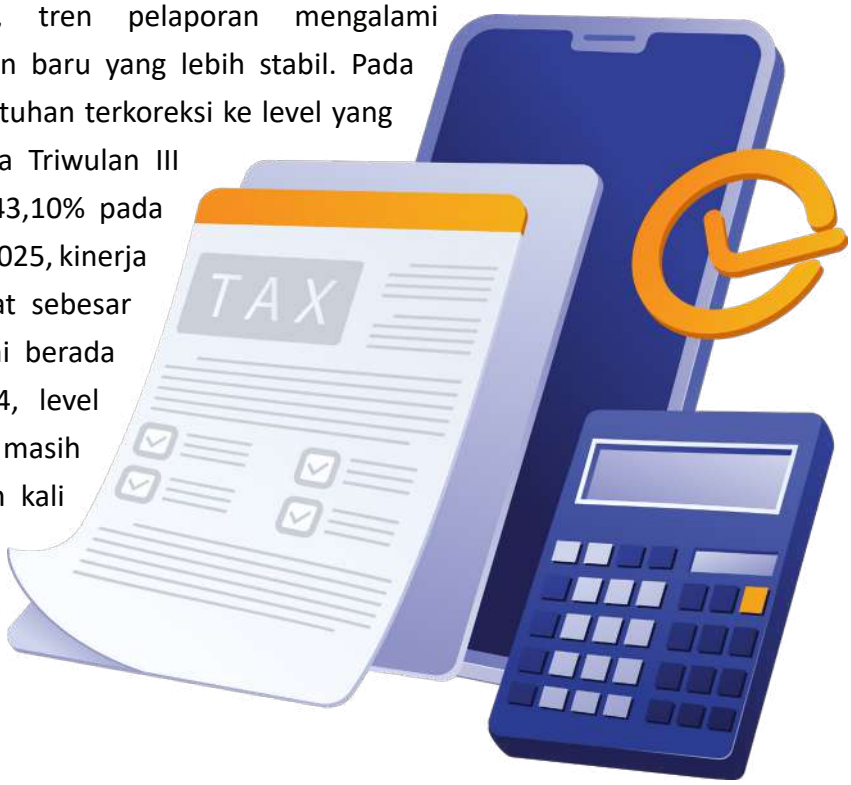


	Triwulan 1 2023	Triwulan 4 2023	Triwulan 2 2024	Triwulan 3 2024	Triwulan 4 2024	Triwulan 1 2025
Persentase	15,36%	5,20%	97,24%	36,33%	43,10%	36,09%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di DKI Jakarta menunjukkan volatilitas yang tinggi dengan titik balik kinerja terjadi pada tahun 2024. Periode tahun 2023 ditandai dengan tingkat partisipasi yang relatif rendah, di mana persentase pelaporan bergerak turun dari 15,36% pada Triwulan I menjadi hanya 5,20% pada Triwulan IV. Kondisi yang kontras terjadi pada Triwulan II tahun 2024, di mana tingkat kepatuhan meroket tajam mencapai angka tertinggi 97,24%.

Pasca-puncak capaian tersebut, tren pelaporan mengalami penyesuaian menuju keseimbangan baru yang lebih stabil. Pada semester kedua 2024, tingkat kepatuhan terkoreksi ke level yang lebih moderat, yakni 36,33% pada Triwulan III dan meningkat kembali menjadi 43,10% pada Triwulan IV. Memasuki awal tahun 2025, kinerja pelaporan pada Triwulan I tercatat sebesar 36,09%. Meskipun angka-angka ini berada di bawah rekor Triwulan II 2024, level kepatuhan saat ini secara konsisten masih jauh lebih tinggi (lebih dari enam kali lipat) dibandingkan titik terendah pada akhir tahun 2023, yang menandakan adanya perbaikan basis kepatuhan jangka panjang di kalangan investor Jakarta.





04

Pembangunan Dan Lingkungan Hidup

Maju Kotanya

Hijau Lingkungannya!

9,10%

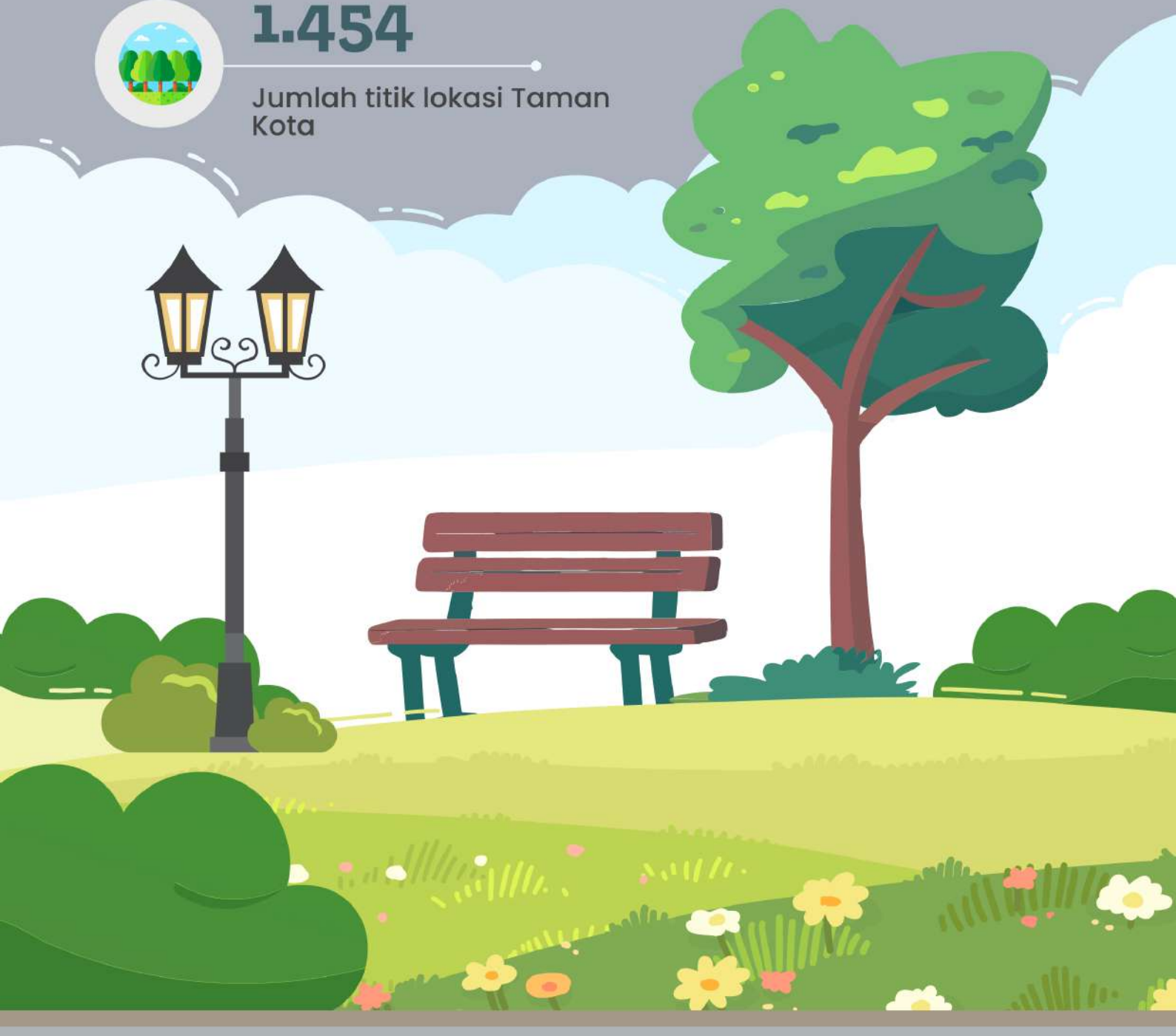
Jumlah gedung Hijau

>20.000

Pohon pelindung di Jakarta

1.454

Jumlah titik lokasi Taman Kota



Bebas Sampah

Masyarakat Nyaman!

>72%

presentase penanganan sampah

>36.000

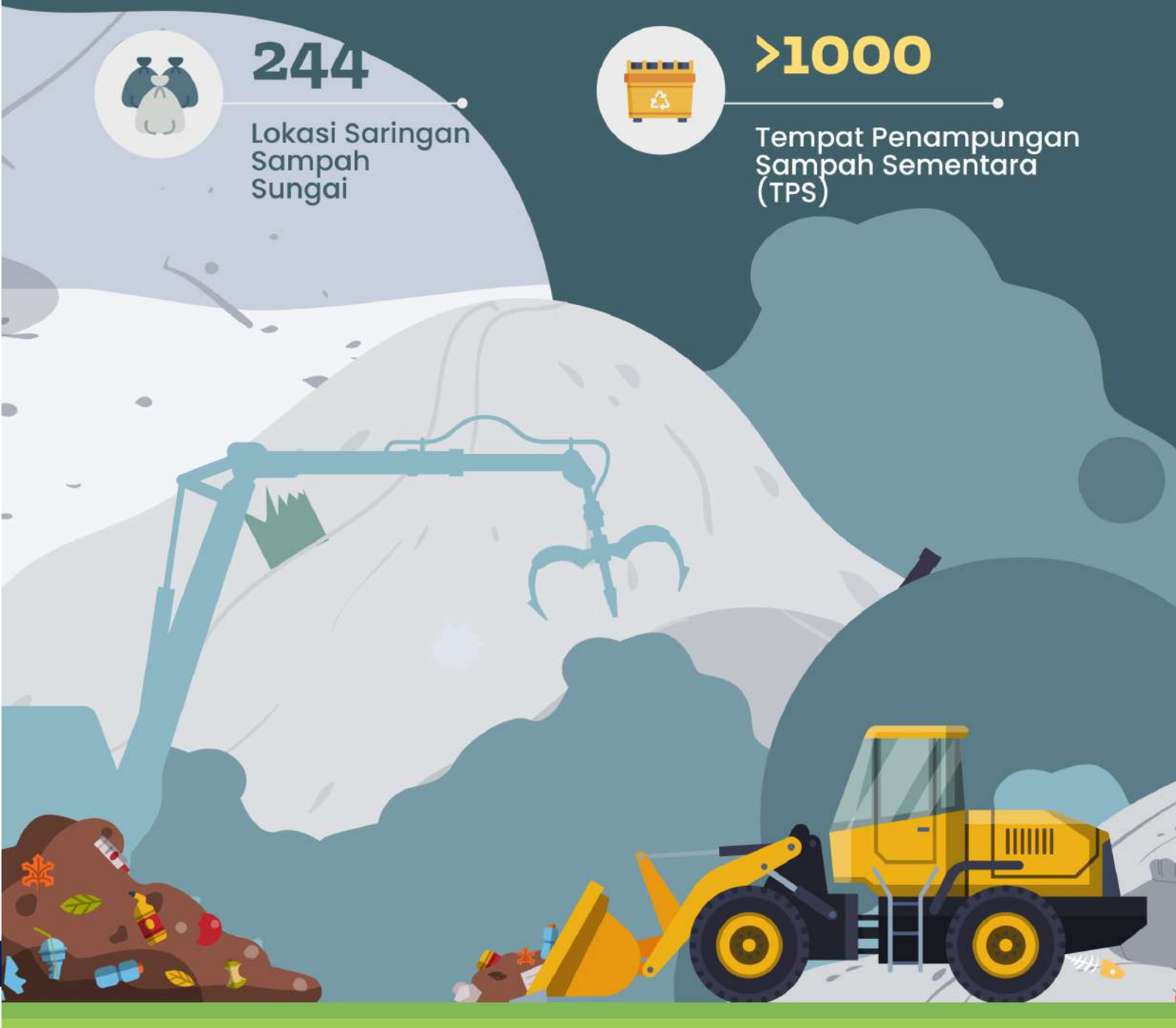
sampah B3 yang dikelola

244

Lokasi Saringan Sampah Sungai

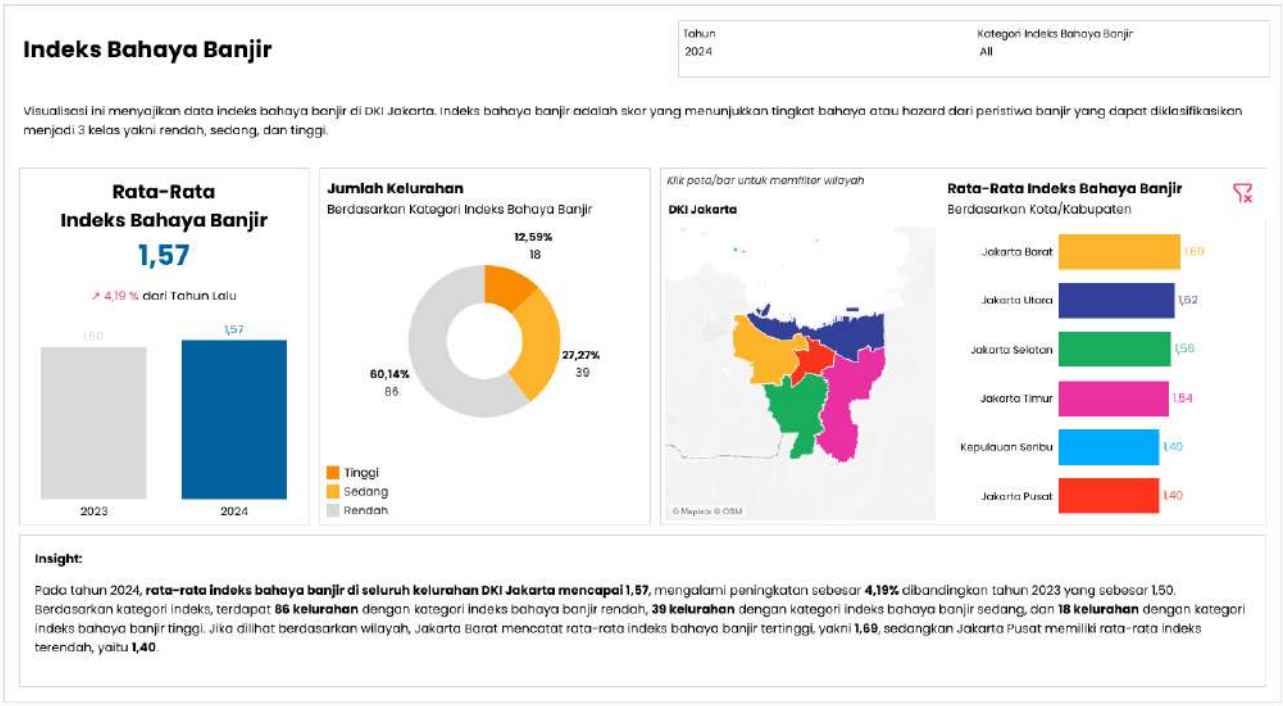
>1000

Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)



4.1. Sumber Daya Air

Indeks bahaya banjir merupakan salah satu indikator krusial guna memahami tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap ancaman banjir. Adanya pengelompokan kategori rendah, sedang, dan tinggi dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui distribusi risiko serta wilayah mana saja yang memerlukan perhatian secara lebih besar. Secara lebih lanjut, hal tersebut digunakan untuk penyusunan perencanaan mitigasi, penataan ruang, hingga prioritas program pengendalian banjir. Secara lebih lanjut, dengan mengetahui persentasenya, gambaran terhadap potensi bahaya dapat terlihat lebih jelas. Hal tersebut tentunya mempengaruhi kecepatan dalam penanganan bencana.





Kamu bisa scan atau klik QR ini kalau mau melihat lebih lanjut mengenai topik diatas...

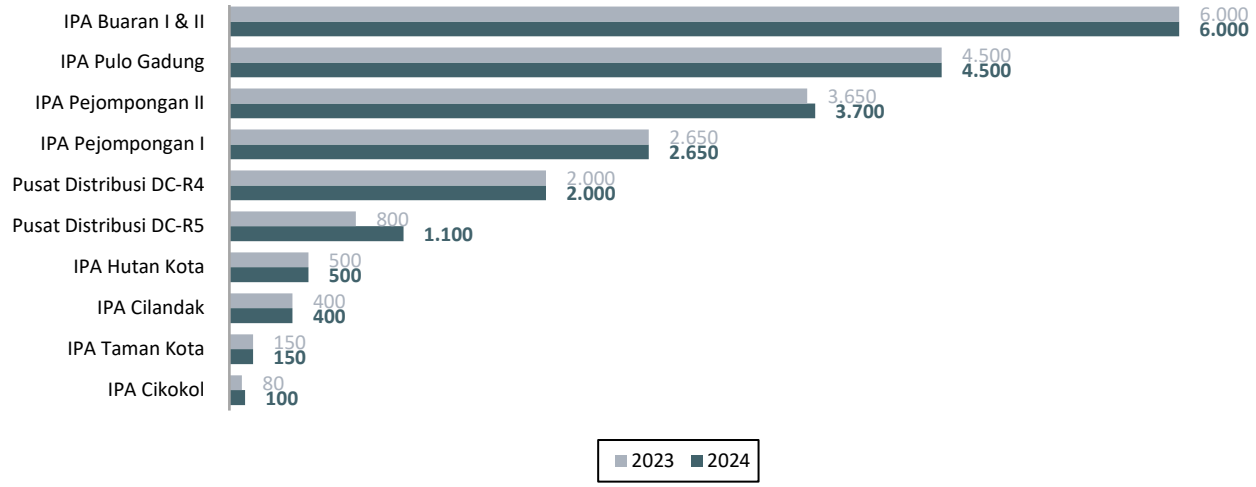
Berdasarkan pada data di atas dapat dijelaskan bahwa, rata-rata indeks bahaya banjir di DKI Jakarta tahun 2024 menunjukkan angka sebesar 1,57. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 4,19% apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang menunjukkan angka 1,50. Terjadinya kenaikan menggambarkan adanya peningkatan dari tingkat kerawanan banjir secara umum dalam satu tahun terakhir. Perubahan tersebut mengindikasikan perlunya penguatan langkah mitigasi serta evaluasi kebijakan pengelolaan banjir yang telah diterapkan.

Selanjutnya mengenai jumlah kelurahan berdasarkan kategori indeks bahaya banjir, sebagian besar kelurahan berada pada kategori rendah, yaitu sebesar 60,14% (86 kelurahan). Sementara itu, 27,27% (39 kelurahan) merupakan kategori sedang, dan 12,59% (18 kelurahan) merupakan kategori tinggi. Komposisi tersebut menggambarkan bahwa meski mayoritas wilayah relatif aman, masih terdapat sejumlah kelurahan dengan tingkat kerawanan yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Kelurahan yang berada pada kategori tinggi menjadi prioritas dalam perencanaan penanganan dan pengurangan risiko banjir. Apabila dilakukan peninjauan berdasarkan kota/kabupaten, Jakarta Barat menduduki rata-rata indeks bahaya banjir paling tinggi, yaitu sebesar 1,69. Posisi berikutnya terdapat Jakarta Utara sebesar 1,62. Jakarta Selatan dan Jakarta Timur memiliki nilai masing-masing sebesar 1,56 dan 1,54. Nilai terendah diduduki oleh Kepulauan Seribu dan Jakarta Pusat, yaitu sebesar 1,40. Data tersebut menggambarkan adanya variasi kondisi geografis, tata ruang, serta sistem pengendalian banjir di setiap wilayah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, peningkatan rata-rata indeks bahaya banjir serta terdapat kelurahan dengan kategori sedang dan tinggi menggambarkan bahwa risiko banjir yang ada di DKI Jakarta belum sepenuhnya terkendali. Secara lebih lanjut, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, baik melalui peningkatan infrastruktur drainase, pengelolaan tata ruang, dan partisipasi masyarakat dalam melakukan penjagaan lingkungan. Langkah-langkah tersebut penting untuk menekan potensi risiko serta meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana banjir di masa yang akan datang.

Setelah mengetahui data terkait nilai indeks bahaya banjir di setiap wilayah Jakarta, selanjutnya penting untuk melakukan peninjauan mengenai ketersediaan infrastruktur alam seperti situ, danau, embung, dan waduk yang berguna untuk melakukan penampungan air. Keberadaan badan air tersebut memiliki peran penting dalam mengurangi risiko banjir. Mekanisme tersebut berupa menahan limpasan air hujan dan menjaga stabilitas hidrologi kawasan. Keberadaan badan air di setiap wilayah dapat membantu untuk menjelaskan perbedaan tingkat risiko banjir. Hal tersebut dikarenakan wilayah dengan tampungan air berkapasitas besar memiliki ketahanan lebih baik daripada wilayah dengan tampungan air berkapasitas kecil. Sehingga dengan memahami distribusinya, mitigasi banjir dapat dirancang lebih tepat sesuai kondisi masing-masing wilayah.

Gambar 4.1. 10 Kapasitas Terbesar Pengolahan Air Minum yang Beroperasi menurut Nama Instalasi Pengolahan Air DKI Jakarta Tahun 2023-2024

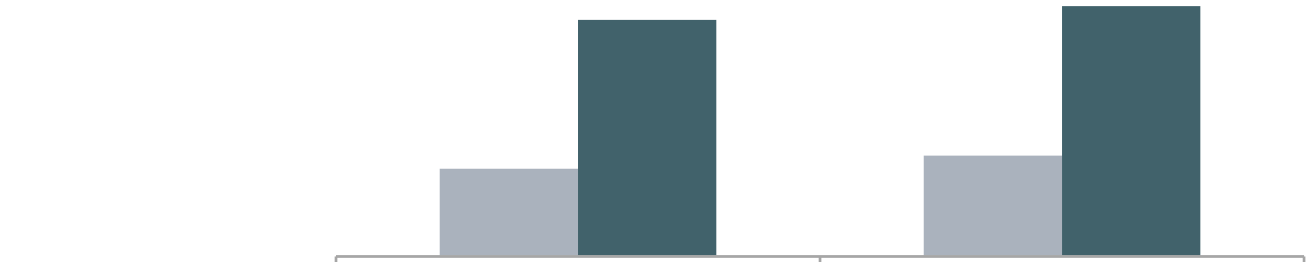


Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data mengenai sepuluh kapasitas terbesar pengelolaan air minum yang beroperasi menurut nama instalasi pengolahan air DKI Jakarta tahun 2023-2024 dapat dijelaskan bahwa, kapasitas pengolahan air minum di sebagian besar instalasi relatif stabil tanpa adanya perubahan yang signifikan antar tahun. IPA Buaran I & II merupakan instalasi dengan kapasitas terbesar, yakni sebesar 6.000 liter. Selanjutnya terdapat IPA Pulo Gadung dengan kapasitas mencapai 4.500 liter, serta IPA Pejompongan II dengan kapasitas 3.650 pada 2023 dan 3.700 liter pada 2024. Pada instalasi lain, IPA Pejompongan I tercatat berkapasitas 2.650 liter, diikuti Pusat Distribusi DC-R4 sebesar 2.000 liter. Sementara itu, Pusat Distribusi DC-R5 sebesar 800 liter pada 2023 dan 1.100 liter pada 2024. Sementara itu, IPA Hutan Kota dan IPA Cilandak masing-masing sebesar 500 liter dan 400 liter. Selanjutnya terdapat IPA Taman Kota sebesar 150 liter dan IPA Cikokol sebesar 80 liter pada 2023 dan 100 liter pada 2024.

Berdasarkan uraian di atas menggambarkan bahwa, kapasitas pengolahan air minum bervariasi. Meski dengan demikian, sistem pengolahan air minum yang beroperasi berada pada kondisi yang stabil. Kapasitas yang tersedia masih dipertahankan guna memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih di wilayah DKI Jakarta. Jumlah pelanggan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kebutuhan layanan publik, terutama layanan air bersih. Memahami kondisi dan jenis sumur yang digunakan pelanggan merupakan hal yang penting. Informasi ini dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai ketersediaan sumber air, tingkat pemanfaatan fasilitas, serta potensi kebutuhan peningkatan layanan. Secara lebih lanjut dengan melihat kategorinya, dapat memberikan gambaran seberapa besar sumur aktif digunakan, berapa banyak yang menjadi cadangan, hingga jumlah sumur yang sudah tidak berfungsi. Pemahaman ini membantu untuk memberikan gambaran terkait kualitas layanan serta kesiapan sistem pendukung air di lapangan.

Gambar 4.2. Persentase Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak Tahun 2023-2024



	2023	2024
Persentase Akses Sanitasi Layak	93,50%	94,01%
Persentase Akses Air Minum Layak	99,42%	99,96%

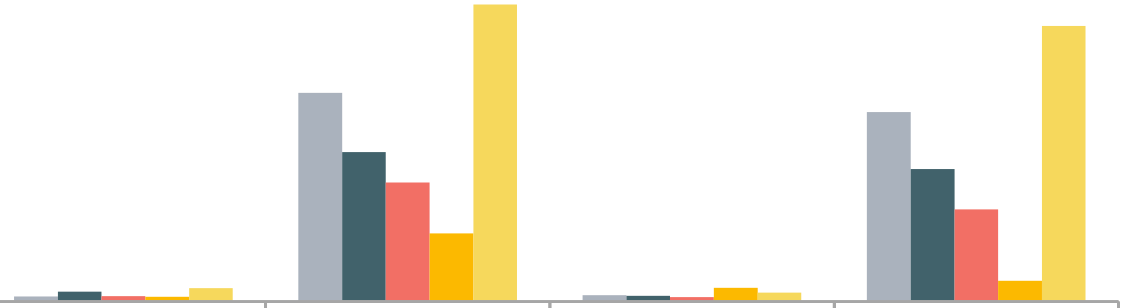
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Data terkait persentase akses layanan air minum dan sanitasi layak tahun 2023-2024 di atas memberikan gambaran bahwa, pada 2023 persentase akses sanitasi layak sebesar 93,50% dan mengalami peningkatan menjadi 94,01% pada 2024. Persentase akses air minum layak mengalami peningkatan dari 99,42% pada 2023 menjadi 99,96% pada 2024. Secara keseluruhan, pola tersebut memberikan gambaran perbaikan dalam penyediaan layanan dasar terutama berkaitan pada kesehatan lingkungan di DKI Jakarta.

Terjadinya peningkatan pada kedua indikator tersebut sangat penting karena ketersediaan air minum layak dan sanitasi yang baik berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, termasuk pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Secara lebih lanjut, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini tetap perlu dilakukan, terutama pada wilayah yang aksesnya masih belum optimal.

Setelah tersajinya data mengenai peningkatan akses air minum dan sanitasi layak menunjukkan capaian layanan dasar yang semakin baik, langkah berikutnya adalah memahami bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga serta memperbaiki infrastruktur pendukungnya. Pembangunan jaringan tata air serta pemeliharaan saluran air dan area rawan menjadi komponen krusial guna memastikan layanan tersebut tetap berjalan secara optimal. Melalui data yang tersaji, kita dapat melihat bagaimana distribusi pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan dilakukan di setiap wilayah sebagai bagian dari upaya dalam menjaga keberlanjutan sistem air perkotaan.

Gambar 4.3. Jumlah Lokasi Pembangunan Jaringan Tata Air dan Pemeliharaan Saluran Air/Darurat/Rawan menurut Wilayah di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	2023		2024	
	Lokasi Pembangunan	Lokasi Pemeliharaan	Lokasi Pembangunan	Lokasi Pemeliharaan
Jakarta Pusat	33	1.327	41	1.205
Jakarta Utara	62	950	37	842
Jakarta Barat	34	756	29	585
Jakarta Selatan	31	432	87	132
Jakarta Timur	85	1.888	56	1.751

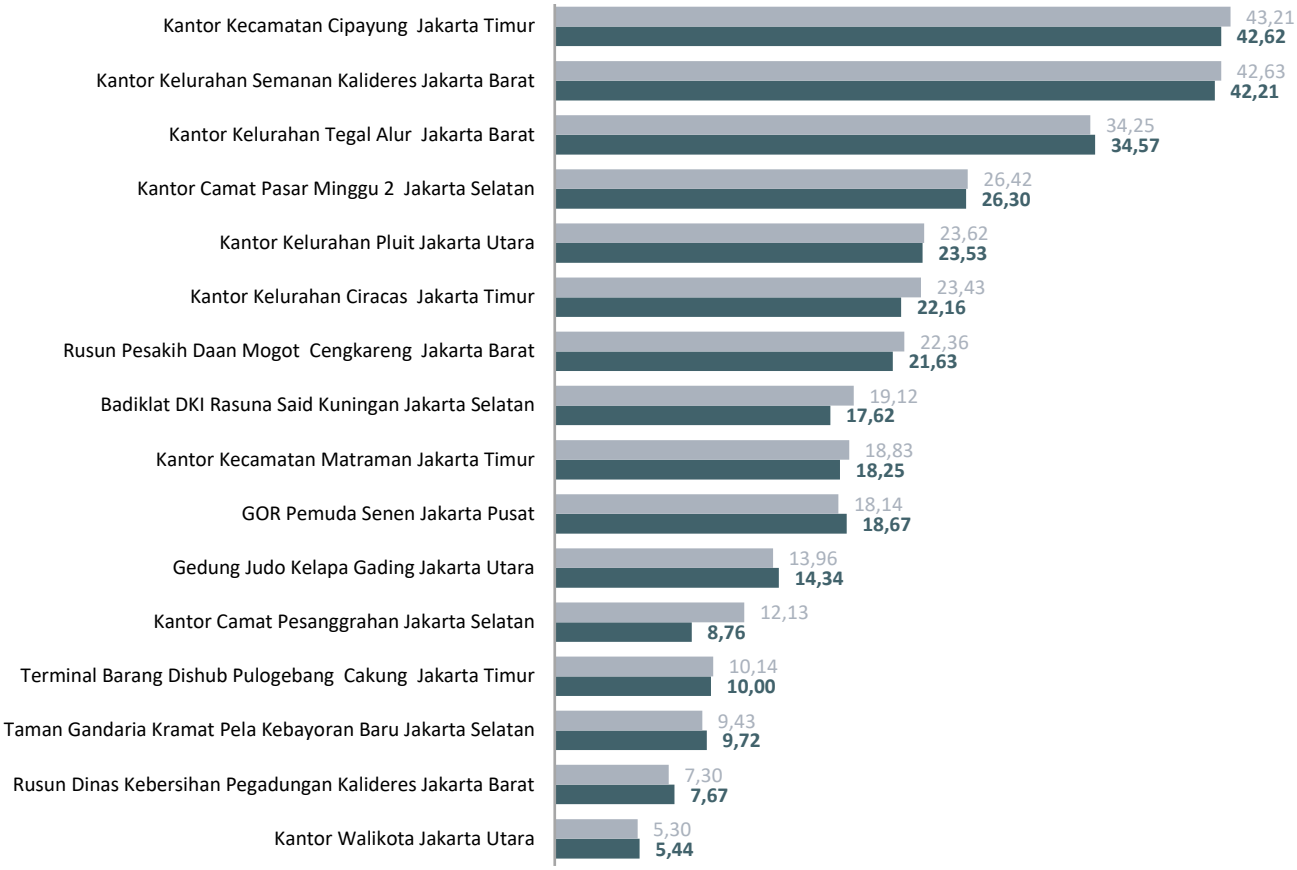
Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Di atas terdapat data mengenai jumlah lokasi pembangunan jaringan tata air dan pemeliharaan saluran air/darurat/rawan menurut wilayah di DKI Jakarta tahun 2023-2024. Lokasi pembangunan di Jakarta Timur sebesar 85 lokasi pada 2023 dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya menjadi 56 lokasi. Penurunan kembali terjadi di Jakarta Utara, yaitu terdapat 62 lokasi pada 2023 menjadi 37 lokasi pada 2024. Jakarta Barat mencatat sebanyak 34 lokasi pada 2023 dan menurun menjadi 29 lokasi pada 2024. Pada sisi lain terdapat peningkatan di Jakarta Pusat dengan 33 lokasi pada 2023 menjadi 41 lokasi pada 2024. Disusul Jakarta Selatan dengan 31 lokasi pada 2023 meningkat drastis menjadi 87 lokasi pada 2024.

Lokasi pemeliharaan di Jakarta Timur sebesar 1.888 pada 2023 menjadi 1.751 di tahun berikutnya. Jakarta Pusat sebesar 1.327 pada 2023 dan kembali mengalami penurunan di tahun berikutnya menjadi 1.205 lokasi. Jakarta Utara tercatat sebesar 950 pada 2023 kemudian menurun menjadi 842 pada 2024. Sementara itu, Jakarta Barat sebanyak 756 pada 2023 dan menurun 585 pada 2024. Selanjutnya terdapat Jakarta Selatan dengan jumlah 432 pada 2023 menjadi 132 di 2024.

Berdasarkan data pada uraian di atas, pemeliharaan saluran air menjadi kegiatan dominan apabila dibandingkan pembangunan baru. Secara lebih lanjut, pola tersebut memberikan gambaran infrastruktur air di DKI Jakarta membutuhkan perawatan rutin agar tetap berfungsi optimal, terutama mengingat faktor curah hujan, kepadatan penduduk, serta potensi kawasan rawan genangan. Pemerintah terus melakukan intervensi di wilayah-wilayah prioritas guna memastikan jaringan tata air tetap mendukung kebutuhan masyarakat dan mengurangi risiko banjir. Kedalaman muka air tanah menjadi salah satu indikator krusial guna melakukan pemantauan mengenai kondisi lingkungan dan potensi risiko penurunan tanah di wilayah pesisir maupun perkotaan. Perubahan kedalaman muka air tanah bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pemanfaatan air tanah, curah hujan, serta kondisi geologi wilayah. Sehingga dengan demikian, data perbandingan antar tahun diperlukan guna melihat dinamika yang terjadi.

Gambar 4.4. Data Kedalaman Muka Air Tanah Pada Sumur Pantau menurut Lokasi DKI Jakarta Tahun 2024-2025



Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2024, kedalaman muka air tanah terdalam terdapat pada Kantor Kelurahan Semanan, Jakarta Barat (42,63 m), diikuti Kantor Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur (43,21 m), serta Kantor Kelurahan Tegal Alur, Jakarta Barat (34,25 m). Di Kantor Camat Pasar Minggu 2, Jakarta Selatan terdapat (26,42 m), serta pada Kantor Kelurahan Pluit, Jakarta Utara (23,62 m). Secara lebih lanjut terdapat pada, Rusun Pesakih Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat (22,36 m), Kantor Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur (23,43 m), Badiklat DKI Rasuna Said, Jakarta Selatan (19,12 m), Kantor Kecamatan Matraman, Jakarta Timur (18,83 m), serta GOR Pemuda Senen, Jakarta Pusat (18,14 m).

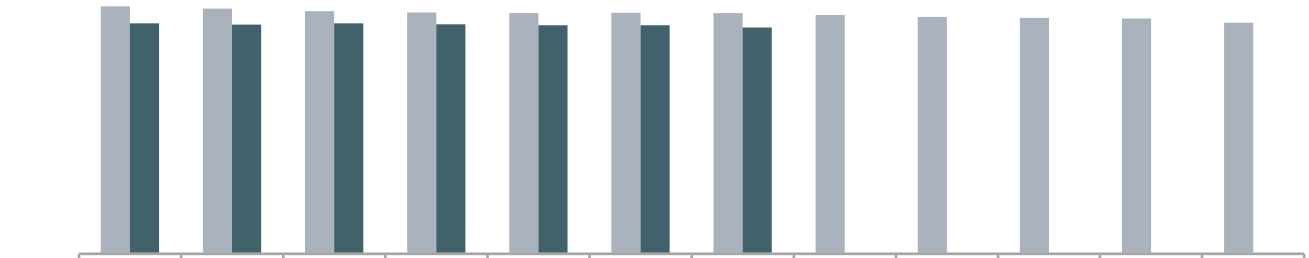
Pada Gedung Judo Kelapa Gading, Jakarta Utara terdapat (13,96 m), Kantor Camat Pesanggrahan, Jakarta Selatan (12,13 m), Terminal Barang Dishub Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur (10,14 m), Taman Gandaria Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (9,43 m), Rusun Dinas Kebersihan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat (7,30 m), dan Kantor Walikota Jakarta Utara (5,30 m).

Sementara itu pada tahun 2025, sebagian besar lokasi memperlihatkan adanya perubahan kedalaman apabila dibandingkan dengan tahun lalu. Terutama pada Kantor Walikota Jakarta Utara yang mengalami peningkatan (5,44 m), Rusun Dinas Kebersihan Pegadungan (7,67 m), Taman Gandaria (9,72 m), Terminal Pulogebang (10,00 m), serta Kantor Camat Pesanggrahan menurun menjadi (8,76 m). selanjutnya pada lokasi lain seperti pada Kantor Kelurahan Semanan (42,21 m) dan Kantor Kecamatan Cipayung (42,62 m).

berdasarkan pada penjelasan di atas bahwa, terdapat variasi kedalaman muka air tanah antar lokasi di DKI Jakarta, dengan beberapa titik yang memperlihatkan adanya perubahan dari tahun 2024 ke 2025. Sementara itu, lokasi dengan kedalaman yang relatif tinggi terdapat pada wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Terjadinya perubahan diperlukan adanya pemantauan sebagai bagian dalam melakukan pengelolaan sumber daya air tanah serta mitigasi risiko lingkungan.

Kedalaman muka air tanah menjadi salah satu indikator yang berguna dalam memantau kondisi sumber daya air. Hal tersebut terutama di wilayah perkotaan, khususnya di DKI Jakarta dengan tingkat eksploitasi air tanah yang cukup tinggi. Pemantauan dilakukan melalui sumur pantau yang berlokasi pada lima wilayah administrasi guna melihat perubahan kedalaman muka air tanah yang terjadi dari waktu ke waktu. Data di bawah ini menggambarkan perbandingan kondisi terkini serta kecenderungan fluktuasi yang terjadi setiap bulannya.

Gambar 4.5. Data Kedalaman Muka Air Tanah Pada Sumur Pantau di 5 (lima) Wilayah menurut Bulan DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2024	21,85	21,67	21,45	21,33	21,28	21,31	21,28	21,09	20,94	20,83	20,78	20,42
2025	20,38	20,24	20,37	20,28	20,20	20,20	20,01	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

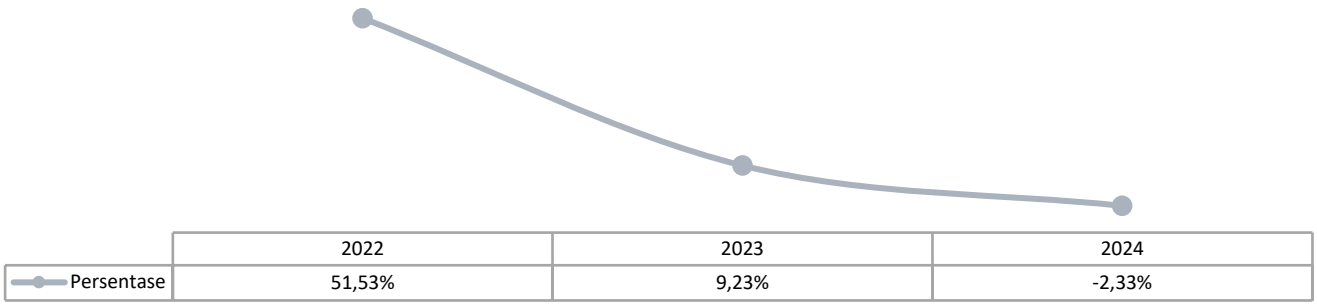
Berdasarkan pada data di atas memperlihatkan bahwa, tahun 2024 kedalaman muka air tanah cenderung relatif stabil yang berada pada kisaran 20-22 m. Secara lebih spesifik pada Januari (21,85 m), Februari (21,67 m), dan Maret (21,45 m). Catatan memperlihatkan pada bulan berikutnya bahwa, pada April (21,33 m), Mei (21,28 m), Juni (21,31 m), dan Juli (21,28 m). Pada Agustus hingga Desember terdapat kecenderungan penurunan kedalaman, yakni pada Agustus (21,09 m), September (20,94 m), Oktober (20,83 m), November (20,78 m), dan Desember (20,42 m).

Pada Januari 2025 hingga Juli tercatat kedalaman yang lebih dangkal apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara lebih lanjut Januari (20,38 m), Februari (20,24 m), Maret (20,37 m), April (20,28 m), Mei (20,20 m), Juni (20,20 m), dan Juli (20,01 m). Berdasarkan data tersebut secara umum memperlihatkan bahwa, terdapat penurunan kedalaman muka air tanah pada tahun 2025 dibandingkan 2024. Hal ini memerlukan perhatian dalam pengelolaan sumber daya air, guna menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan ketersediaan di masa yang akan datang.

4.2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan pendapatan usaha memberikan gambaran terhadap kondisi ekonomi di suatu wilayah. Melalui pertumbuhan yang dilihat dari tahun ke tahun, dapat mengetahui pergerakan dari aktivitas usaha, apakah mengalami peningkatan, perlambatan, atau bahkan mengalami penurunan. Informasi tersebut membantu untuk memahami dinamika iklim usaha serta respons pelaku ekonomi terhadap berbagai kondisi yang terjadi. Memahami pola yang terjadi, pemerintah dan pelaku usaha dapat mengambil langkah perencanaan dengan akurat.

Gambar 4.6. Pertumbuhan Pendapatan Usaha di DKI Jakarta Tahun 2022-2024

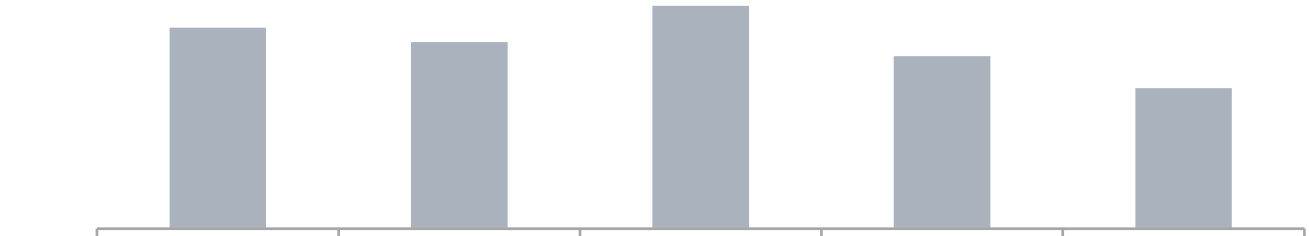


	2022	2023	2024
Persentase	51,53%	9,23%	-2,33%

Sumber: Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

Data terkait pertumbuhan pendapatan usaha di atas menunjukkan bahwa, pada 2022 menunjukkan angka positif sebesar 51,53%. Angka tersebut mencerminkan perkembangan kondisi usaha. Secara lebih lanjut, tren positif tersebut tidak bertahan lama. Penurunan terjadi pada tahun berikutnya menjadi 9,23% dan kembali mengalami penurunan secara drastis menjadi -2,33%. Dua tahun terakhir tersebut menunjukkan perlambatan aktivitas usaha. Perlambatan tersebut memberikan gambaran berbagai faktor, mulai dari perubahan kondisi pasar hingga penyesuaian pelaku usaha terhadap dinamika ekonomi sepanjang tahun. Secara lebih lanjut, penurunan yang terjadi dapat menjadi pertanda diperlukannya strategi pemulihan atau penguatan usaha guna memberikan dorongan aktivitas perekonomian. Data mengenai fasilitas pemakaman menjadi informasi penting sebagai penyediaan layanan publik yang berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Ketersediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di setiap wilayah membantu memberikan informasi kapasitas layanan serta kesiapan pemerintah dalam menyediakan ruang yang memadai bagi warga. Secara lebih lanjut, dapat dilihat mengenai luas TPU di seluruh wilayah DKI Jakarta sehingga perencanaan pengelolaan lahan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan proporsional.

Gambar 4.7. Luas Tempat Pemakaman Umum (TPU) di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
Jumlah	94.869,25	88.061,11	114.768,08	81.397,41	66.289,53

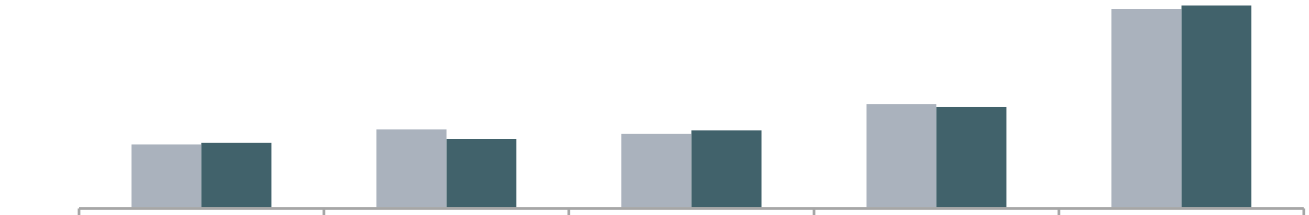
Sumber: Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta

Data di atas merupakan luas TempatPemakaman Umum (TPU) di Jakarta pada 2024. Jakarta Barat tercatat memiliki TPU dengan luas 114.768,08 ha. Wilayah berikutnya terdapat pada Jakarta Pusat dengan 94.869,25 ha. Sementara itu, Jakarta Utara memiliki luas 94.869,25 ha. Pada sisi lain, Jakarta Selatan terdapat luas sebesar 81.397,41 ha dan Jakarta Timur seluas 66.289,53 ha.

Berdasarkan uraian di atas, Jakarta Barat menunjukkan kapasitas yang jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan wilayah lain. Ketersediaan TPU tersebut memberikan gambaran dari upaya pemerintah dalam terpenuhinya fasilitas pemakaman. Sementara itu, wilayah dengan luas terkecil berada di Jakarta Timur. Sehingga dengan demikian, penyebaran jumlah TPU menunjukkan adanya perbedaan kapasitas antarwilayah dengan penyesuaian kondisi geografis, kebutuhan penduduk, serta ketersediaan lahan.

Setelah mengetahui luas Tempat Pemakaman Umum (TPU) di setiap wilayah, penting untuk mengetahui jumlah jenazah yang terisi di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang ada di DKI Jakarta. Informasi tersebut membantu dalam memberikan gambaran dinamika penyediaan fasilitas pemakaman sebagai bagian dari layanan dasar masyarakat.

Gambar 4.8. Data Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tahun 2023-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2023	146.803	181.519	171.259	238.877	456.957
2024	150.368	159.528	178.957	232.383	464.977

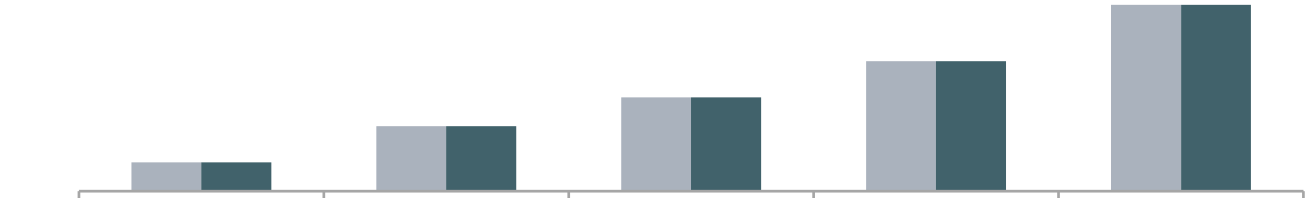
Sumber: Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan pada gambar di atas, menampilkan data mengenai jumlah jenazah yang terisi di Tempat Pemakaman Umum (TPU) di DKI Jakarta pada 2023-2024. Apabila melihat pada data luas tempat Pemakaman Umum (TPU) sebelumnya, terdapat ketidakseimbangan ketersediaan lahan dengan tingkat pemanfaatannya di setiap wilayah. Hal tersebut terlihat pada Jakarta Timur yang menempati urutan pertama dengan jumlah jenazah terisi

meningkat setiap tahun. Pada 2023 berjumlah 456.957 menjadi 464.977 pada tahun berikutnya. Kondisi tersebut sangat kontras dengan luas TPU Jakarta Timur yang menjadi terkecil dari wilayah lain. Sementara itu, Jakarta Barat memiliki luas TPU terbesar namun memiliki jumlah jenazah terisi relatif rendah. Meski jumlah jenazah terjadi peningkatan dari 171.259 pada 2023 menjadi 178.957 pada 2024 bahwa, hal ini mengindikasikan ketersediaan lahan yang lebih luas memberikan ruang yang lebih memadai dalam menampung kebutuhan pemakaman. Sementara itu, Jakarta Selatan menurun dari 238.877 pada 2023 menjadi 232.383 pada 232.383. Penurunan turut terjadi pada Jakarta Utara dari 181.259 pada 2023 menjadi 159.528 pada 2024. Pada sisi lain, Jakarta Pusat mencatat kenaikan jumlah jenazah terisi dari 146.803 pada 2023 menjadi 150.368 pada 2024.

Berdasarkan pada uraian di atas, apabila data mengenai jumlah jenazah terisi di TPU dibandingkan dengan luas TPU, menunjukkan wilayah dengan luas TPU yang lebih kecil tidak selalu memiliki jumlah jenazah yang terisi rendah. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengelolaan kapasitas dan perencanaan pemakaman yang mempertimbangkan keseimbangan antara ketersediaan lahan dan kebutuhan pemakaman di Jakarta. Tidak hanya ke dua data di atas, data mengenai jumlah tempat pemakaman umum menurut agama turut berguna dalam menentukan kebijakan.

Gambar 4.9. Jumlah Tempat Pemakaman Umum menurut Wilayah Tahun 2023-2024



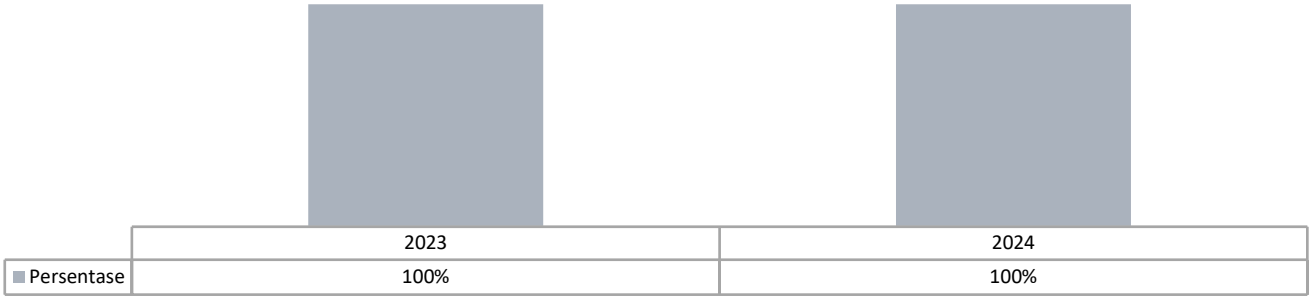
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2023	4	9	13	18	32
2024	4	9	13	18	32

Sumber: Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

Data dari tahun 2023-2024 tersebut memberikan gambaran jumlah TPU di seluruh wilayah DKI Jakarta. Jakarta Timur berjumlah 32 TPU pada 2023 dan 2024. Situasi serupa terdapat di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat dengan masing-masing berjumlah 18, sembilan, dan empat TPU. Data tersebut memberikan gambaran mengenai jumlah yang stabil selama dua tahun terakhir. Tidak adanya penambahan fasilitas menandakan kapasitas TPU yang mencukupi.

Data mengenai jumlah tempat pemakaman umum (TPU) di berbagai wilayah DKI Jakarta pada periode 2023-2024 memberikan gambaran terkait kapasitas layanan pemakaman yang tersedia di perkotaan. Data yang tersaji selanjutnya dapat memberikan gambaran secara spesifik mengenai kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola sebagai area makam di Kepulauan Seribu. Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki karakteristik lahan yang terbatas sehingga pengelolaan RTH menjadi aspek penting dalam mendukung fungsi makam. Hal tersebut, berbeda dengan wilayah daratan Jakarta yang memiliki variasi jumlah TPU. Melalui indikator persentase pengelolaan RTH, dapat melihat bagaimana efektivitas pengelolaan lahan makam dilakukan di wilayah kepulauan. Data yang tersaji dapat menjadi informasi pelengkap sebelumnya, khususnya terkait ketersediaan serta pengelolaan ruang pemakaman di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Gambar 4.10. Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kabupaten Kepulauan Seribu menurut Jenis Makam Tahun 2023-2024



	2023	2024
Persentase	100%	100%

Gambar: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola sebagai area makam di Kabupaten Kepulauan Seribu mencapai 100% pada tahun 2023 dan tahun 2024. Angka tersebut sangat stabil dalam dua tahun. Kondisi tersebut menggambarkan seluruh lahan yang digunakan sebagai makam telah dikelola dengan optimal. Konsistensi ini turut menunjukkan sistem pengelolaan di wilayah kepulauan berjalan efektif meski memiliki keterbatasan lahan dan kondisi geografis yang berbeda dari wilayah daratan Jakarta.

Capaian 100% memperlihatkan Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki tingkat keselarasan yang baik antara kebutuhan pemakaman dan ketersediaan ruang hijau. Efisiensi dalam pengelolaan lahan menjadi kunci bagi wilayah yang relatif kecil. Kualitas tata ruang mampu dijaga dengan konsisten dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu contoh pengelolaan lahan makam yang ideal bagi daerah yang memiliki keterbatasan ruang

Setelah tersajinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola sebagai area makam di Kabupaten Kepulauan Seribu, selanjutnya terdapat data mengenai pengelolaan RTH yang diperuntukkan sebagai taman di wilayah yang sama. Perbandingan penting dalam memberikan gambaran alokasi ruang hijau di wilayah kepulauan yang dibagi ke dalam berbagai fungsi publik. Tidak hanya dibagi untuk pemakaman, melainkan juga ruang rekreasi dan estetika lingkungan. Keterbatasan wilayah yang ada turut menentukan keputusan dalam pengelolaan ruang hijau. Maka dengan demikian, pemahaman terhadap persentase RTH taman dapat membantu menilai keseimbangan pemanfaatan lahan antara fungsi ekologis, sosial, dan kebutuhan masyarakat setempat.

Gambar 4.11. Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kabupaten Kepulauan Seribu menurut Jenis Taman Tahun 2023-2024



	2023	2024
Persentase	88,19%	88,19%

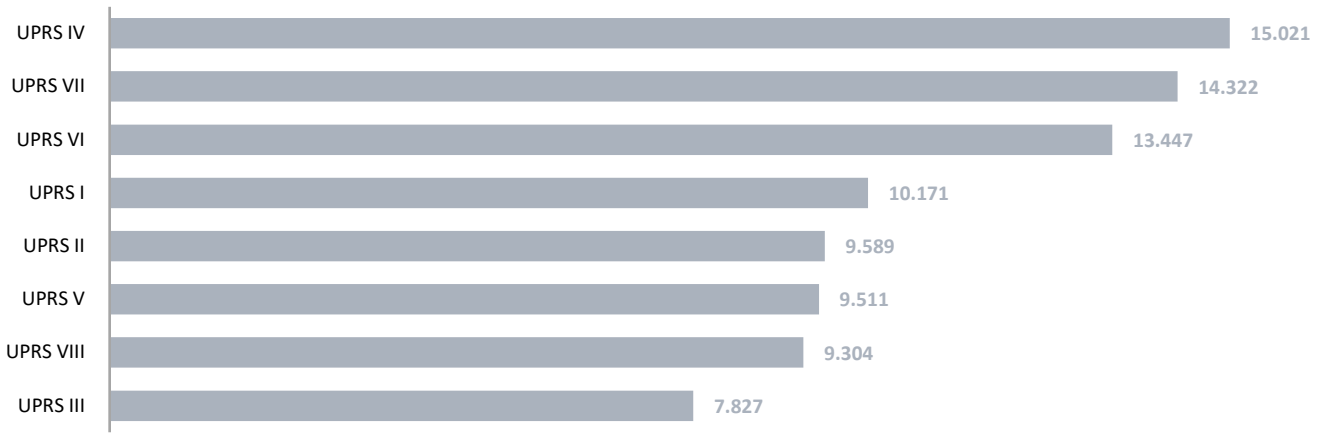
Gambar: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Data yang tersaji di atas memberikan informasi mengenai persentase RTH yang dikelola lingkup Kabupaten Kepulauan Seribu menurut jenis taman Jakarta Tahun 2023-2024. Data tersebut menunjukkan angka yang stagnan yaitu berada pada 88,19% sejak 2023 hingga 2024. Angka yang cenderung konsisten menggambarkan pengelolaan taman di wilayah kepulauan mampu berjalan dengan stabil. Hal tersebut turut menunjukkan sebagian besar ruang dialokasikan untuk taman secara optimal dan dikelola secara berkelanjutan. Taman menjadi salah satu komponen penting dalam struktur ruang. Keterbatasan lahan serta tingginya kebutuhan ruang publik yang ramah lingkungan, keberadaan taman menunjukkan nilai dalam mendukung kualitas hidup masyarakat. Fungsi dari taman tidak hanya berupa tempat rekreasi, tetapi juga memiliki kontribusi ekologis guna menjaga kualitas udara, serta mendukung ketahanan lingkungan pesisir.

Apabila dibandingkan dengan data sebelumnya terkait RTH jenis makam yang mencapai 100% pada periode yang sama, terlihat kedua jenis pengelolaan ruang hijau dilakukan dengan intensitas yang tinggi dan konsisten. Secara lebih lanjut, pemerintah daerah berkomitmen dalam mempertahankan kualitas dan kuantitas ruang hijau meski berada di wilayah kepulauan. Konsistensi tersebut menjadi indikator strategi pengelolaan ruang terbuka hijau berjalan dengan baik dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) menjadi salah satu solusi hunian yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Pengelolaannya dilakukan melalui Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS), yang bertanggungjawab memastikan operasional, perawatan, hingga pemerataan akses bagi warga yang membutuhkan. Keberadaan UPRS menjadi krusial karena setiap unit pengelola memegang cakupan wilayah dan jumlah hunian yang berbeda. Secara lebih lanjut, melalui data terbaru tahun 2024, terlihat bagaimana masing-masing UPRS berperan dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Jakarta.

Gambar 4.12. Jumlah Rumah Susun yang Dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

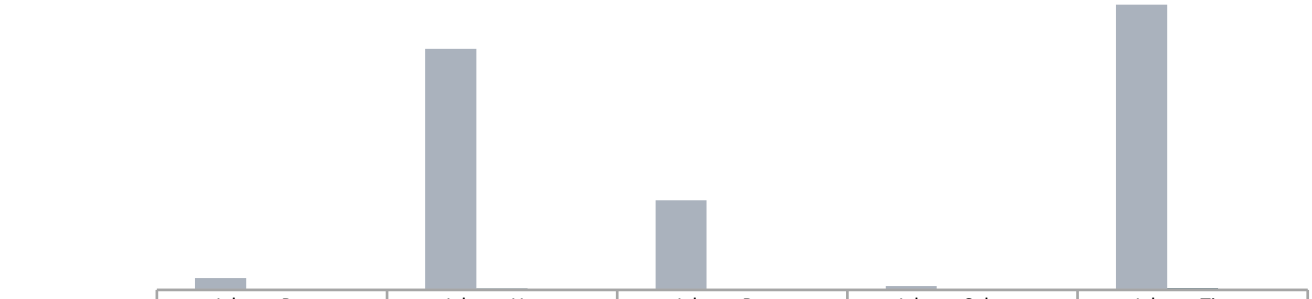


Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Data yang tersaji di atas menunjukkan jumlah rumah susun yang dikelola oleh UPRS di DKI Jakarta pada tahun 2024 memiliki variasi yang cukup signifikan antar unit. UPRS IV merupakan unit yang memiliki jumlah pengelolaan terbesar, yaitu 15.021 unit. Sementara itu terdapat UPRS VII dengan 14.322 unit dan UPRS VI sebesar 13.447 unit. Ketiga jumlah di atas memberikan gambaran mengenai peran penting dalam menyediakan hunian bagi masyarakat. Selanjutnya terdapat UPRS I dengan 10.171 unit dan UPRS II dengan 9.589 unit. Angka yang lebih kecil berada pada UPRS V dengan 9.511 dan UPRS VIII sebesar 9.304 unit. Sementara itu, jumlah terkecil berada pada UPRS III dengan 7.827 unit. Secara keseluruhan, variasi jumlah unit yang dikelola antar-UPRS menggambarkan perbedaan kebutuhan dan distribusi hunian pada masing-masing wilayah di Jakarta. Pada UPRS I, UPRS II, UPRS V, dan UPRS VIII menempati kisaran 9.000-10.000 unit. Kisaran angka tersebut menggambarkan beban kerja yang relatif seimbang. Adanya pembagian tersebut, sistem pengelolaan dapat berjalan dengan efektif karena setiap UPRS dapat menyesuaikan kapasitas dalam memastikan kelayakan dan kenyamanan penghuni rusunawa. Data ini juga menjadi dasar penting dalam perencanaan kebutuhan hunian di tahun yang akan datang.

Setelah sebelumnya terlihat bagaimana Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) menangani jumlah rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang cukup besar di berbagai wilayah Jakarta, selanjutnya tersedia data yang dapat memberikan gambaran lebih detail mengenai struktur fisik hunian yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Apabila data sebelumnya berfokus pada jumlah unit rusun yang dikelola tiap UPRS, kali ini informasi diperluas hingga mencakup jumlah unit, blok, dan tower yang ada di masing-masing kota administratif. Pendekatan ini penting dalam memberikan pemahaman kapasitas fisik serta sebaran infrastruktur hunian vertikal di Jakarta.

Gambar 4.13. Jumlah Unit, Blok, dan Tower Rumah Susun yang Dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



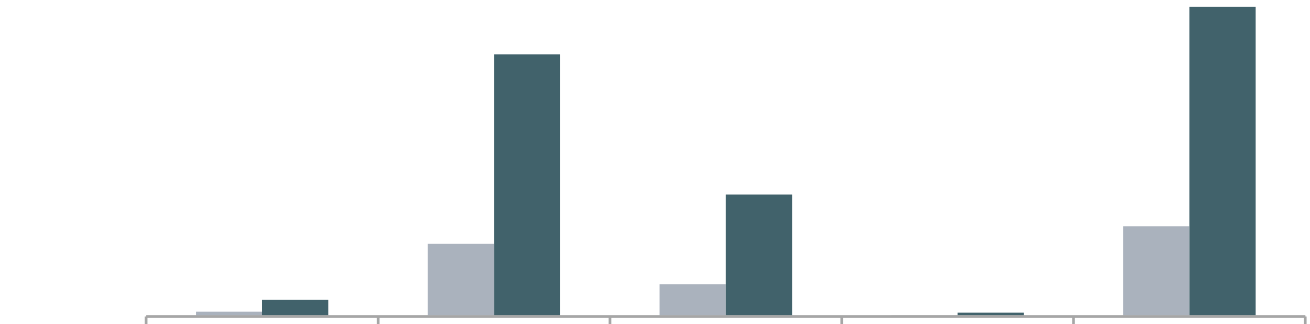
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
Jumlah Unit	601	12.217	4.540	189	14.458
Jumlah Blok	2	54	18	-	71
Jumlah Tower	2	30	16	1	35

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Data di atas menunjukkan jumlah unit rumah susun yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan variasi antarwilayah. Jakarta Timur merupakan wilayah yang memiliki unit terbanyak, yaitu 14.458 unit. Posisi berikutnya terdapat di Jakarta Utara dengan 12.217 unit. Jakarta Barat menunjukkan jumlah yang lebih sedikit yaitu sebesar 4.540 unit, sedangkan Jakarta Pusat berjumlah 601 unit. Jumlah paling sedikit berada pada Jakarta Selatan dengan 189 unit.

Perbedaan jumlah menunjukkan konsentrasi pembangunan hunian vertikal yang lebih besar di wilayah dengan kebutuhan atau ketersediaan lahan tertentu. Apabila dilihat dari aspek struktur bangunan, jumlah blok dan tower turut memberikan perbedaan kapasitas yang dimiliki setiap wilayah. Jakarta Timur memiliki 71 blok dan 35 tower. Sementara itu, Jakarta Utara memiliki 54 blok dengan 30 tower. Kedua wilayah tersebut menjadikan wilayah dengan infrastruktur rusun yang paling masif. Sementara itu, Jakarta Barat memiliki 18 blok dan 16 tower. Wilayah lain seperti Jakarta Pusat memiliki dua blok dan tower. Pada sisi lain, Jakarta Selatan tidak memiliki blok dan hanya memiliki satu tower. Kondisi yang terjadi tersebut menggambarkan bagaimana penyediaan hunian vertikal di Jakarta yang dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat, kondisi wilayah, serta prioritas pembangunan pada setiap kota administratif. Setelah mengetahui persebaran jumlah unit, blok, dan tower rumah susun yang dikelola di berbagai wilayah Jakarta, data selanjutnya menggambarkan mengenai tingkat keterhunian serta jumlah jiwa yang tinggal di dalamnya. Informasi tersebut menjadi penting untuk memberikan penilaian seberapa besar pemanfaatan hunian yang telah disediakan pemerintah. Selain itu, data keterhunian juga membantu mengidentifikasi wilayah dengan kebutuhan pelayanan dan fasilitas pendukung yang lebih tinggi. Secara lebih lanjut dengan memahami dinamika jumlah unit terhuni dan jumlah jiwa, pemerintah dapat merancang kebijakan pengelolaan rusun yang lebih efektif dan responsif sesuai kebutuhan warga.

Gambar 4.14. Data Rumah Susun yang Dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
Unit Terhuni	586	9.005	4.000	122	11.164
Jumlah Jiwa	2.054	32.437	15.077	460	39.164

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

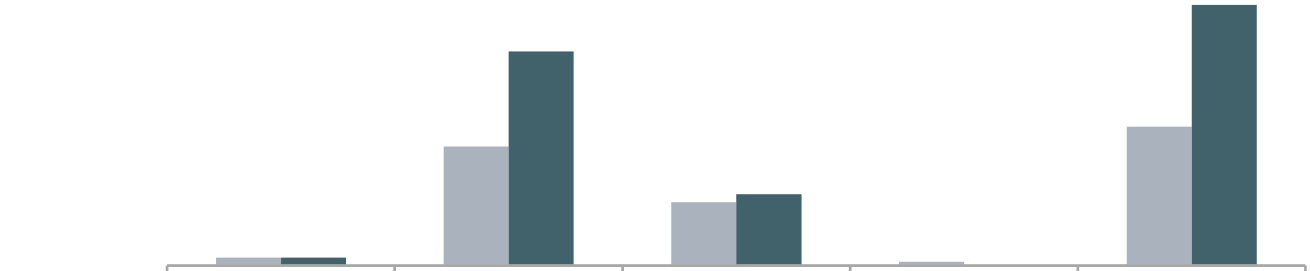
Data di atas menunjukkan jumlah unit terhuni di setiap wilayah rumah susun pada 2024. Data di atas menunjukkan variasi secara signifikan. Jakarta Timur tercatat memiliki unit terhuni sebesar 11.164 unit. Wilayah tersebut menjadi jumlah terbanyak apabila dibandingkan dengan wilayah lain. Sementara itu, Jakarta Utara sebesar 9.005 unit dan Jakarta Barat sebesar 4.000 unit. Jumlah yang cenderung sedikit berada pada Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan dengan masing-masing sebesar 586 unit dan 122 unit. Perbedaan ini menggambarkan konsentrasi hunian yang lebih tinggi di wilayah Timur dan Utara.

Apabila dilihat dari jumlah jiwa yang menempati unit-unit tersebut, Jakarta Timur kembali menunjukkan angka tertinggi, yaitu sebesar 39.164 jiwa. Sementara itu, Jakarta Utara mencapai 32.437 jiwa. Selanjutnya terdapat Jakarta Barat dengan 15.077 jiwa. Terdapat Jakarta Pusat dan Jakarta Utara yang masing-masing sebesar 2.054 jiwa dan 460 jiwa. Proporsi tersebut dapat memberikan gambaran

terhadap tingkat kepadatan dan kebutuhan layanan sosial di masing-masing wilayah. Memahami distribusi jumlah jiwa dengan detail, perencanaan fasilitas umum, pelayanan sosial, hingga pemenuhan kebutuhan dasar dapat dilakukan dengan lebih optimal. Setelah disajikannya data mengenai tingkat keterhunian rumah susun tersebar di berbagai wilayah Jakarta, secara lebih lanjut dapat dilakukan arahan mengenai kondisi permukiman yang menjadi bagian lain dari upaya peningkatan kualitas hidup warga. Pengelolaan kawasan permukiman tidak hanya selesai pada penyediaan hunian vertikal, melainkan juga mencakup peningkatan lingkungan tempat tinggal yang lebih luas. Pada konteks tersebut, perbaikan kawasan kumuh dan peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian ruang tinggal warga agar tetap layak dan aman. Data di bawah ini, dapat menggambarkan mengenai wilayah yang mendapatkan peningkatan fasilitas permukiman pada 2023.



Gambar 4.15. Jumlah Tower dan Blok Rumah Susun Sederhana menurut Lokasi Luas Area Tipe dan Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



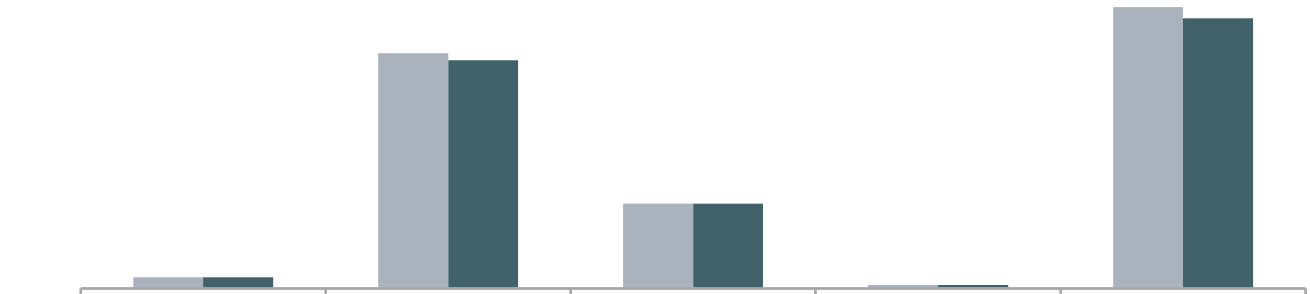
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
Jumlah Tower	2	30	16	1	35
Jumlah Blok	2	54	18	-	71

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Data di atas menunjukkan persebaran rumah susun sederhana di DKI Jakarta yang bervariasi antarwilayah pada 2024. Jakarta Timur merupakan wilayah dengan jumlah blok dan tower terbanyak, yaitu masing-masing sebanyak 71 unit dan 35 tower. Jumlah tersebut menggambarkan kapasitas hunian vertikal yang lebih besar apabila dibandingkan dengan wilayah yang lain. Jakarta Utara turut memiliki jumlah yang signifikan dengan 54 unit dan 30 tower. Jumlah tersebut turut menandakan konsentrasi pembangunan yang cukup tinggi. Pada sisi lain terdapat Jakarta Barat dengan 18 unit dan 16 tower, sementara itu Jakarta Pusat mencatat terdapat dua unit dan tower. Jumlah paling sedikit berada pada Jakarta Selatan dengan satu unit dan tidak terdapat tower. Perbedaan tersebut menggambarkan di setiap wilayah memiliki kebutuhan serta prioritas pembangunan hunian vertikal yang berbeda. Maka dengan demikian, penyediaan rumah susun turut serta menyesuaikan kondisi dan karakteristik wilayah.

Setelah mengetahui data mengenai persebaran lokasi rumah susun sederhana di berbagai wilayah Jakarta pada 2024 sebelumnya, penting untuk mengetahui karakteristik jumlah unit hunian yang tersedia setiap tahunnya. Informasi tersebut membantu dalam menggambarkan kapasitas hunian yang dikelola pemerintah daerah serta bagaimana perubahan kebutuhan hunian setiap tahunnya. Data tahunan dapat menunjukkan stabilitas, peningkatan, atau pengurangan jumlah unit yang disediakan di setiap wilayah. Sehingga dengan demikian, karakteristik unit rumah susun turut menjadi salah satu indikator yang penting guna memberikan penilaian terhadap kesiapan dan pemerataan fasilitas hunian vertikal di Jakarta.

Gambar 4.16. Jumlah Rumah Susun Sederhana menurut Wilayah di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2023	601	12.590	4.540	189	15.058
2024	601	12.217	4.540	189	14.458

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

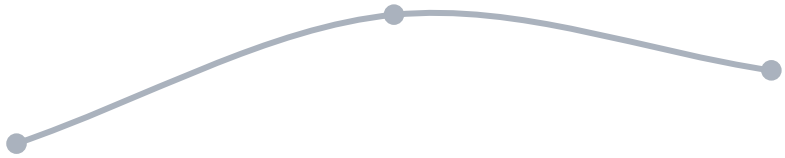
Data yang tersaji menginformasikan mengenai jumlah rumah susun sederhana menurut wilayah di DKI Jakarta tahun 2023-2024. Jakarta Timur menjadi wilayah dengan unit terbanyak, yaitu sebanyak 15.058 unit pada 2023 dan menurun menjadi 14.458 unit pada 2024. Posisi terbanyak berikutnya terdapat di Jakarta Utara dengan 12.590 unit pada 2023 menjadi 12.217 unit pada 2024. Selanjutnya terdapat Jakarta Barat dengan 4.540 unit pada 2023 dan 2024. Pada 2023 dan 2024 wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, masing-masing berjumlah 601 unit dan 189 unit.

Berdasarkan data di atas menunjukkan jumlah unit rumah susun sederhana yang relatif stabil pada 2023 dan 2024. Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan menunjukkan kondisi paling stabil dengan jumlah unit yang sama dari 2023 dan 2024. Stabilitas yang terjadi menggambarkan tidak adanya perubahan yang besar dalam kapasitas hunian pada beberapa wilayah. Sementara itu, terjadinya penurunan di wilayah lain dapat di artikan adanya dinamika pemanfaatan atau pengelolaan unit hunian. Secara lebih lanjut, penyebaran unit rusun tetap didominasi oleh wilayah dengan populasi tertinggi dan kebutuhan hunian yang lebih besar. Wilayah tersebut seperti Jakarta Timur dan Jakarta Utara.

Rumah susun menjadi solusi strategis dalam penyediaan hunian layak di wilayah perkotaan. Rumah susun tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, melainkan cerminan dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Maka dengan demikian, tingkat keterhunian dan kelayakan huni dari rumah susun menjadi indikator penting guna memberikan penilaian efektivitas pengelolaan perumahan vertikal. Kondisi rumah susun yang dilakukan pemantauan, digunakan untuk memastikan

fasilitas dan lingkungan hunian sesuai dengan standar yang ditetapkan. Perubahan kondisi sosial, teknis bangunan, serta pola pemanfaatan hunian dapat memengaruhi kualitas dan tingkat keterhunian rumah susun dari waktu ke waktu. Gambaran tren dari tahun ke tahun dapat memberikan pemahaman secara komprehensif terhadap dinamika tersebut.

Gambar 4.17. Persentase Rusun Terhuni dan Layak Huni di DKI Jakarta Tahun 2022-2024



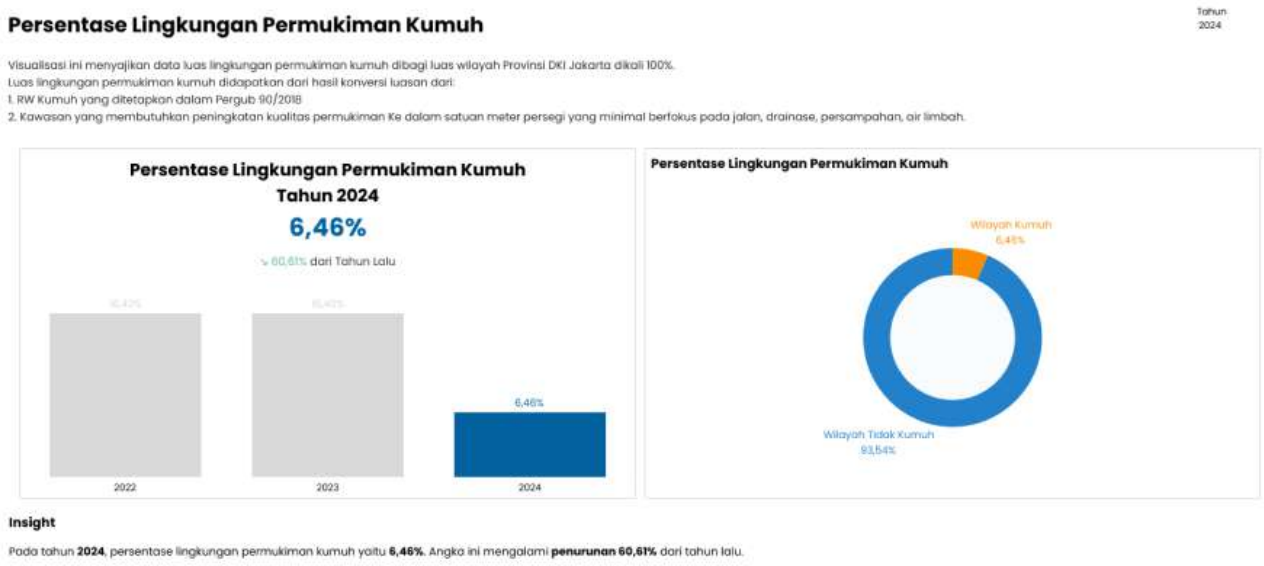
	2022	2023	2024
Persentase	85,21%	88,19%	86,90%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Grafik yang tersaji di atas, memperlihatkan adanya dinamika yang cukup fluktuatif. Persentase rumah susun terhuni dan layak huni di DKI Jakarta pada 2022 menunjukkan angka 85,21%. Sementara itu meningkat menjadi 88,19% pada 2023. Namun dengan demikian, pada tahun berikutnya dalam periode pengamatan, persentase tersebut mengalami penurunan menjadi 86,90%. Terjadinya penurunan dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam segi perawatan bangunan, jumlah penghuni yang mengalami perubahan, atau faktor eksternal lain yang memengaruhi kelayakan huni. Secara lebih lanjut, tren ini menegaskan pentingnya upaya berkelanjutan dalam menjaga kualitas dan daya tarik rumah susun agar tetap layak huni dan diminati oleh masyarakat.

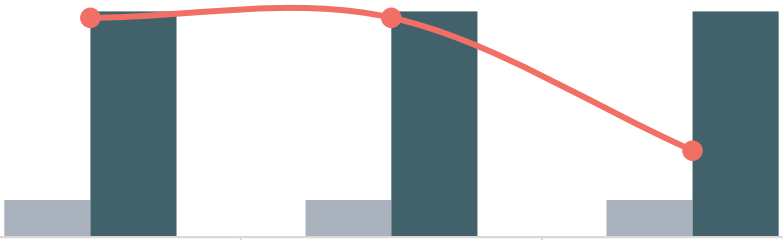
Seiring berkembangnya keterhunian rumah susun serta meningkatnya jumlah unit yang sesuai standar kelayakan huni di DKI Jakarta, selanjutnya dapat dilakukan perluasan fokus pembahasan pada kondisi lingkungan permukiman secara menyeluruh. Kualitas hunian tidak selalu ditentukan hanya pada kondisi fisik bangunan, melainkan turut dipengaruhi pada kualitas lingkungan di sekitarnya. Maka dengan demikian, pemantauan mengenai keberadaan dan sebaran kawasan permukiman kumuh menjadi elemen penting dalam menjamin terpenuhinya hunian yang layak. Data mengenai luas kawasan kumuh memberikan gambaran mengenai tingkat permasalahan lingkungan permukiman yang masih perlu ditangani dalam beberapa tahun terakhir.







Gambar 4.18. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh DKI Jakarta Tahun 2022-2024



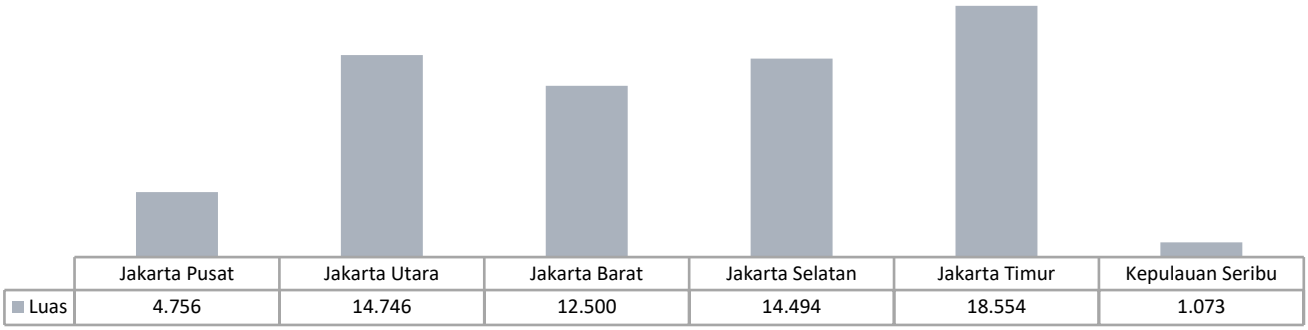
	2022	2023	2024
Luas Lingkungan Permukiman Kumuh	10.794	10.794	10.794
Luas Wilayah DKI Jakarta	65.625	65.625	65.625
Persentase	16,40	16,40	6,46

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Data di atas menggambarkan luas lingkungan permukiman kumuh di DKI Jakarta pada 2022-2024 berada pada angka yang sama yaitu sebesar 10.794 ha. Konsistensi tersebut menggambarkan bahwa, belum terdapat pengurangan atau penambahan luasan kawasan kumuh selama dua tahun. Sementara itu, luas wilayah administratif DKI Jakarta pada 2022-2024 stagnan pada angka 65.625 ha. Angka tersebut menjadi acuan dalam menentukan proporsi kawasan kumuh pada keseluruhan wilayah. Sementara itu, persentase lingkungan permukiman kumuh selama 2022-2023 menunjukkan angka yang sama yaitu sebesar 16,40%, sedangkan tahun 2024 menunjukkan angka 6,46%.

Berdasarkan pada uraian data di atas bahwa, meski tidak terdapat perubahan pada luasan dalam periode tersebut, kondisi yang ada memerlukan upaya penanganan kawasan kumuh agar hasilnya lebih terasa dalam jangka panjang. Selain itu, angka yang stabil menjadi indikator bahwa intervensi yang dilakukan belum cukup signifikan dalam menurunkan luasan kawasan kumuh. Secara lebih lanjut, data yang tersedia dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan strategi penataan lingkungan guna meningkatkan kualitas kawasan permukiman di Jakarta. Setelah menguraikan terkait luas kawasan permukiman kumuh di Jakarta yang cenderung stabil dalam dua tahun, secara lebih lanjut penting untuk mengetahui terkait upaya peningkatan kualitas lingkungan yang dilakukan pemerintah daerah. Salah satu indikatornya merupakan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman. Persentase dari peningkatan PSU dapat membantu dalam menunjukkan wilayah mana yang menerima penanganan dengan intensif. Selain itu dapat mengetahui fokus perbaikan lingkungan yang didistribusikan antarwilayah. Memahami hal tersebut, dapat melihat gambaran dengan lengkap mengenai arah pembangunan permukiman secara berkelanjutan.

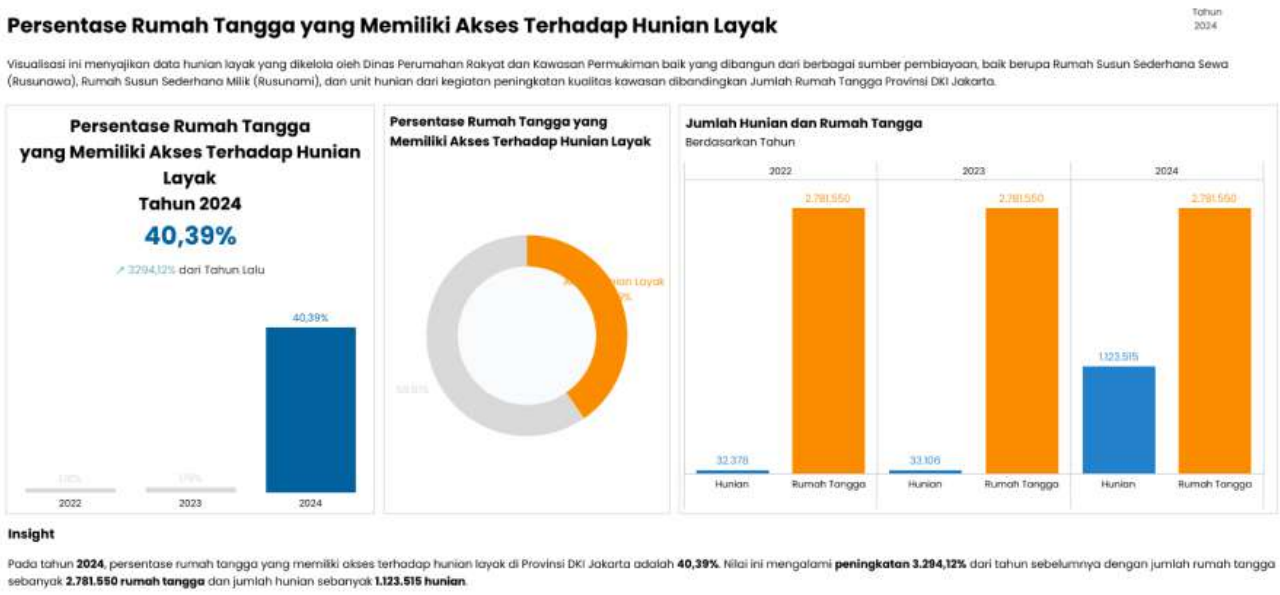
Gambar 4.19. Jumlah Luas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang ditingkatkan



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Luas	4.756	14.746	12.500	14.494	18.554	1.073

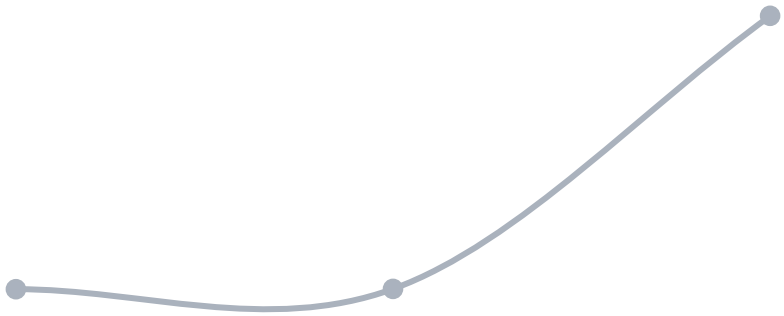
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Jakarta Utara merupakan wilayah dengan persentase peningkatan PSU paling tinggi dengan 0,15%. Jakarta Barat menyusul dengan 0,09%. Sementara itu, Jakarta Pusat tercatat sebesar 0,05%. Pada sisi lain, terdapat persentase yang sama pada Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu sebesar 0,04%. Peningkatan tetap penting karena bagian dari pemerataan pembangunan antar wilayah. Secara lebih lanjut, data di atas menunjukkan pemerintah daerah terus melakukan intervensi dalam peningkatan kualitas PSU, meski memiliki intensitas yang berbeda. Hal tersebut menjadi strategi dalam menciptakan permukiman yang layak dan nyaman bagi warga di Jakarta. Data PSU kawasan permukiman yang ditingkatkan sebelumnya merupakan bagian dari data yang memperlihatkan upaya perbaikan kualitas permukiman. Hunian layak turut menjadi salah satu indikator utama dalam pembangunan permukiman karena langsung berkaitan dengan kenyamanan, kesehatan, dan kualitas hidup warga. Maka dengan demikian, data terkait jumlah hunian layak yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) menjadi penting guna melihat sejauh mana ketersediaan hunian dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga di Jakarta. Informasi tersebut membantu memberikan gambaran terkait kesiapan pemerintah dalam menyediakan hunian yang aman dan layak untuk masyarakat.





Gambar 4.20. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak



	2022	2023	2024
Persentase	1,16%	1,19%	40,39%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Data tersebut menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak 2022-2024. Persentase pada 2022 menunjukkan angka sebesar 1,16%. Angka tersebut meningkat menjadi 1,19% pada tahun berikutnya. Meski peningkatan tidak terjadi secara drastis, angka tersebut menggambarkan upaya pemerintah guna memberikan akses terhadap hunian layak. Pada tahun 2024 lonjakan terjadi secara signifikan dengan persentase mencapai 40,39%. Lonjakan drastis tersebut menggambarkan upaya signifikan pemerintah untuk memperluas akses pada hunian yang memenuhi standar kelayakan.

Perubahan tersebut mencerminkan peningkatan kapasitas layanan hunian yang lebih inklusif dan terstruktur bagi warga di Jakarta. Setelah mengetahui persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak 2022-2024 di atas, secara lebih lanjut penting untuk memahami bagaimana ketersediaan hunian tersebut berbanding dengan jumlah rumah tangga di Jakarta. Perbandingan tersebut membantu menunjukkan sejauh mana kebutuhan hunian layak telah terpenuhi, sekaligus menunjukkan tantangan penyediaan hunian yang masih di hadapi. Mengetahui persentase dapat melakukan penilaian apakah peningkatan jumlah unit yang tersedia memberikan dampak secara signifikan pada cakupan layanan hunian layak. Data di bawah ini dapat memberikan gambaran dengan terukur mengenai kondisi tersebut yang terjadi dari tahun ke tahun.

Gambar 4.21. Persentase Unit Hunian Layak yang Terbangun Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024



	2022	2023	2024
Persentase	1,31%	1,32%	1,32%

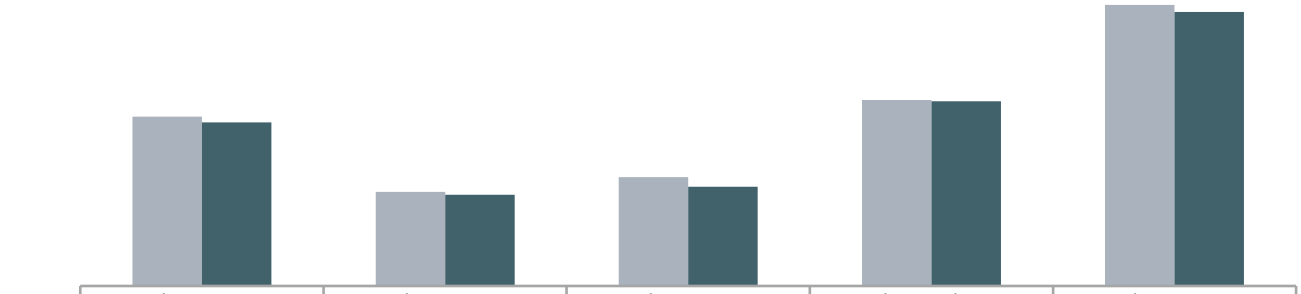
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Data di atas menggambarkan persentase unit hunian layak yang terbangun di Provinsi DKI Jakarta pada 2022-2024. Persentase menunjukkan angka relatif kecil. Pada 2022 persentase hunian layak mencapai 1,31%, kemudian mengalami kenaikan menjadi 1,32% pada tahun berikutnya. Meski terjadi kenaikan yang relatif kecil, angka tersebut masih terjaga hingga tahun berikutnya. Kondisi ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan penyediaan hunian dengan lebih terjangkau dan layak untuk masyarakat.

Penyediaan ruang terbuka hijau serta fasilitas penunjangnya menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kualitas lingkungan di kawasan perkotaan. Setelah melihat perkembangan dari penyediaan hunian layak sebelumnya, gambaran mengenai jalur hijau kota dapat melengkapi pemahaman mengenai bagaimana Jakarta terus berupaya dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat serta nyaman. Jalur hijau tidak hanya berguna sebagai estetika, melainkan memiliki peran ekologis yang signifikan, seperti dalam mengurangi polusi, menjaga atau menurunkan suhu udara, serta menjadi ruang penyangga bagi aktivitas kota.



Gambar 4.22. Data Jalur Hijau Kota menurut Wilayah di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



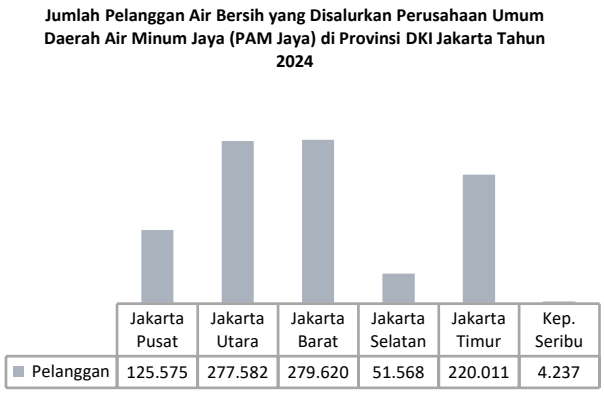
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2023	780.545	433.236	501.322	857.165	1.295.093
2024	754.036,67	420.196,22	457.436,77	850.914,45	1.261.813,49

Sumber: Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

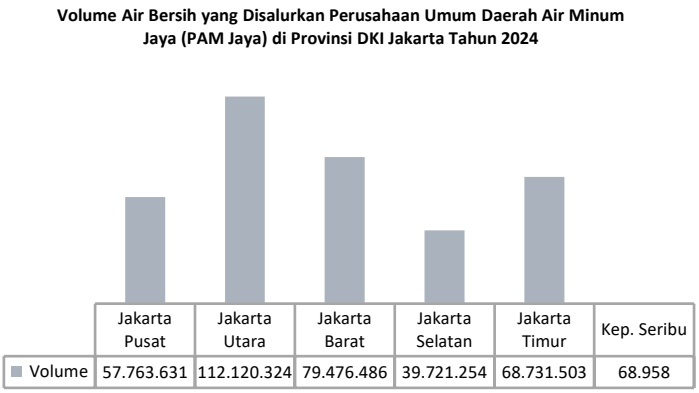
Data jalur hijau kota yang tersaji periode 2023-2024 menggambarkan adanya variasi apabila dibandingkan antarwilayah. Jakarta Timur tercatat memiliki jalur hijau sebesar 1.295.093 m² pada 2023 dan mengalami penurunan menjadi 1.261.813,49 m² pada 2024. Wilayah lain yang turut menunjukkan penurunan terjadi pada Jakarta Selatan, yaitu sebesar 857.165 m² pada 2023 menjadi 850.914,45 m² pada 2024. Selanjutnya terdapat Jakarta Pusat dengan total 780.545 m² pada 2023 menurun menjadi 754.036,67 m² pada tahun berikutnya. Wilayah Jakarta Barat menunjukkan jumlah jalur hijau sebesar 501.322 m² pada 2023 dan mengalami penurunan menjadi 457.436,77 m² pada 2024. Sementara itu, Jakarta Utara pada 2023 dengan total 433.236 m² dan turun menjadi 420.196,22 m² pada 2024.Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa, meski terdapat fluktuasi, keberadaan jalur hijau masih menjadi bagian penting dalam pengelolaan lingkungan kota. Secara lebih lanjut, adanya keterbatasan lahan serta kebutuhan pembangunan yang terus mengalami peningkatan turut berpengaruh terhadap perubahan luas kawasan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kebijakan guna menjaga keseimbangan lingkungan yang beriringan dengan pembangunan perkotaan. Perkembangan jalur hijau kota yang tertera pada data sebelumnya menunjukkan upaya berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan, secara lebih lanjut penting untuk memahami bagaimana layanan dasar seperti penyediaan air bersih dikelola di wilayah DKI Jakarta. Ketersediaan air bersih merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung kehidupan perkotaan yang sehat. Ketersediaan air bersih turut menggambarkan kinerja pelayanan publik di tingkat wilayah.



Gambar 4.23. Jumlah Pelanggan dan Volume Air Bersih yang Disalurkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kep. Seribu
Pelanggan	125.575	277.582	279.620	51.568	220.011	4.237



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kep. Seribu
Volume	57.763.631	112.120.324	79.476.486	39.721.254	68.731.503	68.958

Sumber: Perumda Air Minum Jaya Provinsi DKI Jakarta

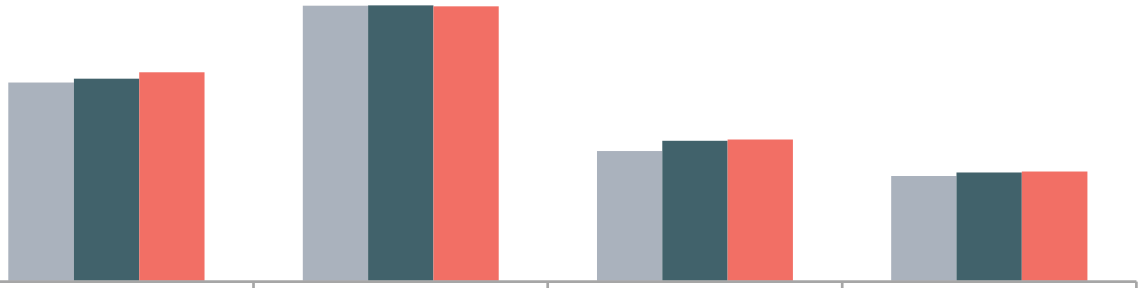
Berdasarkan pada data mengenai jumlah pelanggan dan volume air bersih yang disalurkan Perusahaan Umum Air Minum Jaya (PAM Jaya) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 bahwa, Jakarta Utara melayani 277.582 pelanggan dengan volume air bersih 112.120.324 m³. Sementara itu, Jakarta Barat mencatat 279.620 pelanggan dengan volume mencapai 79.476.486 m³. Pada sisi lain, terdapat Jakarta Timur dengan 220.011 pelanggan dan volume mencapai 68.731.503 m³. Jakarta Pusat mendapat 125.575 pelanggan dengan 57.763.631 m³. Wilayah Jakarta Selatan memiliki 51.568 pelanggan dengan 39.721.254 m³ dan Kepulauan Seribu mencapai 4.237 pelanggan dengan 68.958 m³.

Data di atas menggambarkan distribusi air bersih di DKI Jakarta yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik kepadatan penduduk dan kebutuhan wilayah. Seperti di Jakarta Utara dengan pelanggan yang jauh lebih sedikit dari pada Jakarta Barat, namun volume air jauh lebih besar. Variasi mengenai jumlah pelanggan dan volume air yang disalurkan menunjukkan adanya tantangan sekaligus komitmen dalam menjaga akses air bersih agar merata ke seluruh warga Jakarta.



Kinerja dari pelayanan publik menjadi salah satu aspek penting dalam memberikan penilaian keberhasilan dalam penyediaan layanan dasar kepada masyarakat. Evaluasi kinerja tersebut pada umumnya berdasarkan pada berbagai indikator yang menggambarkan kualitas, jangkauan, hingga efektivitas layanan yang diberikan. Selain itu, pemantauan secara berkala turut diperlukan guna mengetahui perkembangan capaian serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Adanya data kinerja yang terukur, diharapkan dapat menjadi dasar dalam perbaikan serta peningkatan layanan agar lebih optimal.

Gambar 4.24. Data Capaian Uraian Kerja Pelayanan Air Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) menurut Triwulan I dan III Tahun 2025



	Cakupan Pelayanan	Kualitas Air	Nrw	Tekanan Air
Trwilaun 1	71,59	99,20	46,94	37,98
Triwulan 2	72,87	99,22	50,63	39,20
Triwulan 3	75,24	98,87	51,01	39,58

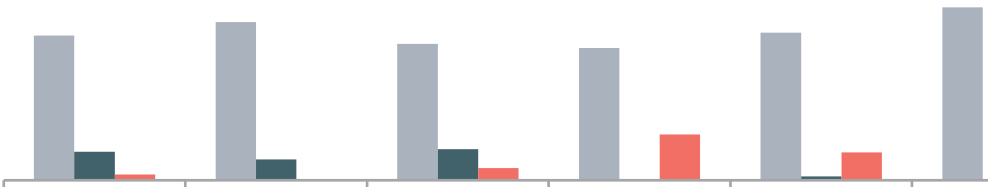
Sumber: Perumda Air Minum Jaya Provinsi DKI Jakarta

Grafik di atas menggambarkan bahwa, capaian kinerja pelayanan air bersih oleh PAM Jaya menunjukkan tren yang mengalami peningkatan pada beberapa indikator dari triwulan I hingga triwulan III pada 2025. Cakupan pelayanan meningkat dari triwulan I sebesar 71,59% menjadi 72,87% pada triwulan II kemudian naik menjadi 75,24% pada triwulan III. Selanjutnya mengenai kualitas air relatif stabil dan sangat tinggi. Pada triwulan I yaitu 99,2%, selanjutnya mengalami peningkatan menjadi 99,22% pada triwulan II, dan mengalami penurunan pada triwulan III menjadi 98,97%. Berdasarkan data, nilai *Non-Revenue Water* (NRW) mengalami peningkatan pada triwulan I sebesar 46,94% menjadi 50,63% pada triwulan II dan kembali meningkat menjadi 51,01% pada triwulan III.

Pada sisi lain, peningkatan turut terlihat pada tekanan air. Pada triwulan I sebesar 39,2% menjadi 39,58% pada triwulan II. Selanjutnya peningkatan kembali terlihat pada triwulan III sebesar 39,58%. Secara keseluruhan data tersebut menggambarkan adanya perbaikan pada cakupan pelayanan dan tekanan air. Meski pada peningkatan nilai NRW menjadi perhatian karena menunjukkan potensi inefisiensi dalam distribusi.

Distribusi sumber air minum menjadi salah satu indikator yang krusial dalam melakukan penilaian terhadap kualitas hidup serta akses layanan dasar di masyarakat. Ketersediaan serta pilihan sumber air minum tidak serta merta hanya dipengaruhi oleh kondisi geografis, melainkan oleh infrastruktur, kebijakan, dan tingkat ekonomi masyarakat pada suatu wilayah. Adanya perbedaan karakteristik wilayah perkotaan dan kepulauan dipengaruhi oleh pola pemanfaatan sumber air rumah tangga. Sehingga dengan demikian, penting untuk melihat bagaimana variasi penggunaan sumber air minum di setiap kabupaten/kota agar bisa memberikan gambaran secara komprehensif terhadap kondisi akses air minum di Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 4.25. Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi DKI Jakarta, 2025



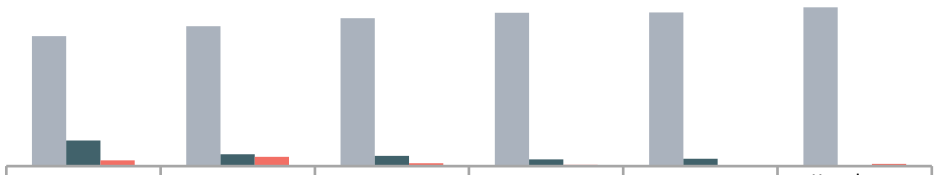
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Air Dalam Kemasan	80,54	88,17	75,9	73,64	82,23	96,25
Leding	15,99	11,7	17,27	-	2,16	-
Sumur Bor	3,21	-	6,83	25,49	15,61	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan grafik mengenai Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi DKI Jakarta 2025 di atas bahwa, penggunaan air dalam kemasan mendominasi di seluruh wilayah. Persentase tertinggi mengenai hal tersebut terdapat pada Kepulauan Seribu (96,25%) dan Jakarta Utara (88,17%). Posisi berikutnya terdapat di Jakarta Timur (82,23%), Jakarta Pusat (80,54%), Jakarta Barat (75,9%) dan Jakarta Selatan (73,64%). Penggunaan air leding memiliki jumlah yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan air kemasan. Nilai tertinggi diduduki oleh Jakarta Barat (17,27%), Jakarta Pusat (15,99%), Jakarta Utara (11,7%), dan Jakarta Timur (2,16%). Sementara itu, tidak terdapat catatan pada Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu. Jumlah paling sedikit terdapat pada sumur bor, yaitu Jakarta Selatan (25,49%), Jakarta Timur (15,61%), Jakarta Barat (6,83%), dan Jakarta Pusat (3,21%). Sedangkan pada Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu tidak terdapat catatan. Secara keseluruhan, data di atas memperlihatkan adanya ketergantungan pada air dalam kemasan serta adanya variasi pemanfaatan sumber air lain.

Ketersediaan dan penggunaan fasilitas tempat buang air besar menjadi salah satu indikator yang penting dalam menilai kondisi sanitasi serta kualitas hidup masyarakat. Akses pada fasilitas yang layak tidak hanya berkaitan pada kenyamanan, melainkan turut berdampak pada kesehatan lingkungan dan pencegahan penyakit. Sehingga, data terhadap status penggunaan fasilitas tempat buang air besar perlu dianalisis. Hal tersebut guna mengetahui kondisi sanitasi rumah tangga secara umum.

Gambar 4.26. Persentase Rumah Tangga dengan Status Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Ada Fasilitas, Digunakan Sendiri	80,68	86,81	91,83	95,14	95,33	98,55
Ada Fasilitas, Digunakan Rumah Tangga Tertentu/Komunal	15,76	7,28	6,39	4,06	4,52	-
Ada Fasilitas, MCK Umum	3,56	5,70	1,68	0,80	-	1,25

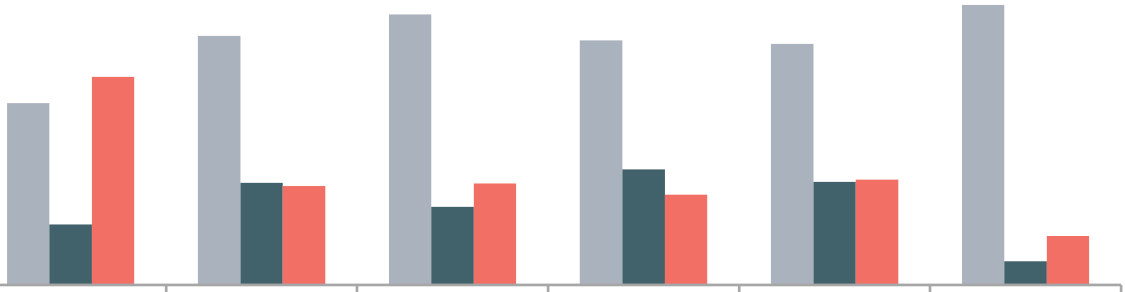
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Sebagian besar rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta telah memiliki fasilitas sanitasi yang digunakan sendiri. Persentase tertinggi terdapat di Kepulauan Seribu sebesar 98,55 persen, diikuti oleh Jakarta Timur sebesar 95,33 persen, Jakarta Selatan sebesar 95,14 persen, Jakarta Barat sebesar 91,83 persen, Jakarta Utara sebesar 86,81 persen, dan Jakarta Pusat sebesar 80,68 persen.

Sementara itu, rumah tangga yang menggunakan fasilitas bersama atau komunal masih ditemukan di beberapa wilayah. Persentase tertinggi terdapat di Jakarta Pusat sebesar 15,76 persen, diikuti Jakarta Utara sebesar 7,28 persen, Jakarta Barat sebesar 6,39 persen, Jakarta Timur sebesar 4,52 persen, dan Jakarta Selatan sebesar 4,06 persen, sedangkan di Kepulauan Seribu tidak terdapat penggunaan fasilitas komunal.

Adapun penggunaan MCK umum relatif lebih kecil dibandingkan dua kategori lainnya. Persentase tertinggi terdapat di Jakarta Utara sebesar 5,7 persen, diikuti Jakarta Pusat sebesar 3,56 persen, Jakarta Barat sebesar 1,68 persen, Kepulauan Seribu sebesar 1,25 persen, dan Jakarta Selatan sebesar 0,8 persen, sementara di Jakarta Timur tidak terdapat rumah tangga yang menggunakan MCK umum.

Gambar 4.27. Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Tahun 2024

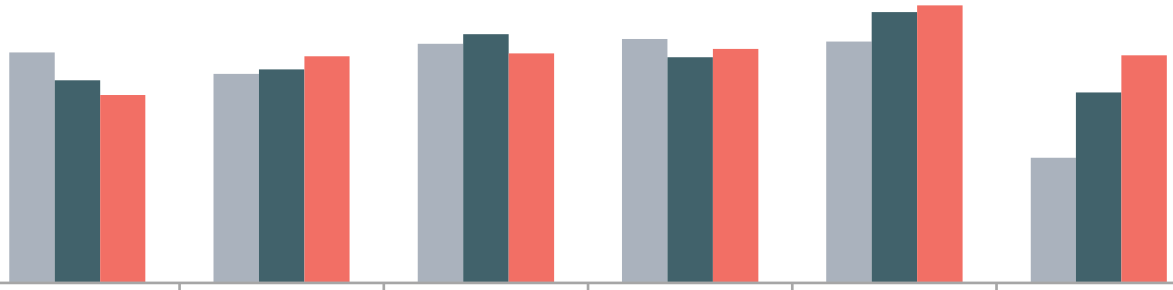


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Milik Sendiri	40,37	55,29	60,10	54,29	53,56	83,48
Kontrak/Sewa	13,41	22,71	17,38	25,69	22,92	5,23
Lainnya	46,22	22,00	22,52	20,03	23,40	10,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Status kepemilikan tempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh rumah tangga yang memiliki rumah sendiri di sebagian besar wilayah. Persentase tertinggi terdapat di Kepulauan Seribu sebesar 83,48 persen, diikuti Jakarta Barat sebesar 60,10 persen, Jakarta Utara sebesar 55,29 persen, Jakarta Timur sebesar 53,56 persen, dan Jakarta Selatan sebesar 54,29 persen. Sementara itu, persentase rumah tangga yang memiliki rumah sendiri paling rendah terdapat di Jakarta Pusat sebesar 40,37 persen. Untuk status tempat tinggal kontrak atau sewa, persentase tertinggi terdapat di Jakarta Selatan sebesar 25,69 persen, diikuti Jakarta Timur sebesar 22,92 persen, Jakarta Utara sebesar 22,71 persen, Jakarta Barat sebesar 17,38 persen, dan Jakarta Pusat sebesar 13,41 persen. Adapun persentase terendah terdapat di Kepulauan Seribu sebesar 5,23 persen. Sementara itu, kategori lainnya memiliki persentase yang cukup besar di beberapa wilayah, terutama di Jakarta Pusat sebesar 46,22 persen, yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan wilayah lain. Di wilayah lainnya, persentase kategori ini tercatat sebesar 23,40 persen di Jakarta Timur, 22,52 persen di Jakarta Barat, 22,00 persen di Jakarta Utara, 20,03 persen di Jakarta Selatan, dan 10,85 persen di Kepulauan Seribu.

Gambar 4.28. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	93,09	90,96	93,96	94,46	94,19	82,55
2024	90,30	91,39	94,94	92,61	97,15	89,10
2025	88,85	92,72	93,00	93,45	97,81	92,80

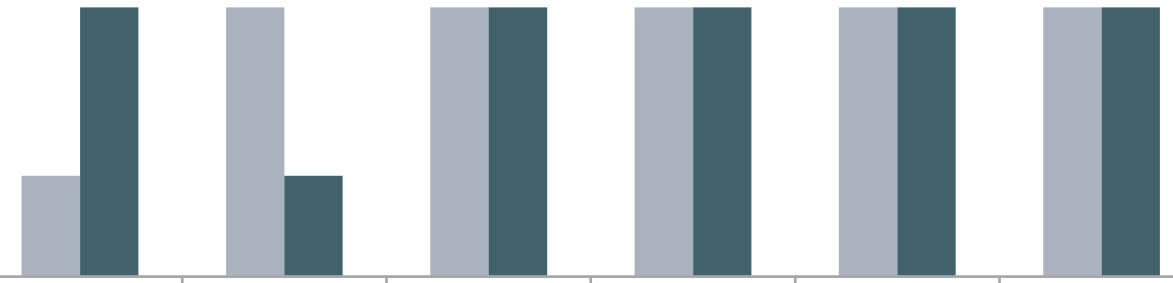
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Data tahun 2023–2025, terlihat adanya dinamika perkembangan persentase pada masing-masing kota/kabupaten di Provinsi DKI Jakarta. Pada Jakarta Pusat, persentase menunjukkan tren menurun dari 93,09 persen pada 2023 menjadi 90,30 persen pada 2024, dan kembali turun menjadi 88,85 persen pada 2025. Sementara itu, Jakarta Utara menunjukkan tren peningkatan secara bertahap, dari 90,96 persen pada 2023 menjadi 91,39 persen pada 2024, dan meningkat lagi menjadi 92,72 persen pada 2025.

Di Jakarta Barat, persentase meningkat dari 93,96 persen pada 2023 menjadi 94,94 persen pada 2024, namun sedikit menurun menjadi 93,00 persen pada 2025. Jakarta Selatan mengalami penurunan dari 94,46 persen pada 2023 menjadi 92,61 persen pada 2024, kemudian kembali meningkat menjadi 93,45 persen pada 2025.

Sementara itu, Jakarta Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 94,19 persen pada 2023 menjadi 97,15 persen pada 2024, dan kembali meningkat menjadi 97,81 persen pada 2025, yang merupakan nilai tertinggi di antara wilayah lainnya pada tahun 2025. Kepulauan Seribu juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 82,55 persen pada 2023 menjadi 89,10 persen pada 2024, dan meningkat lagi menjadi 92,80 persen pada 2025.

Gambar 4.29. Persentase Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di DKI Jakarta menurut Wilayah Administrasi Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2024	100,00	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

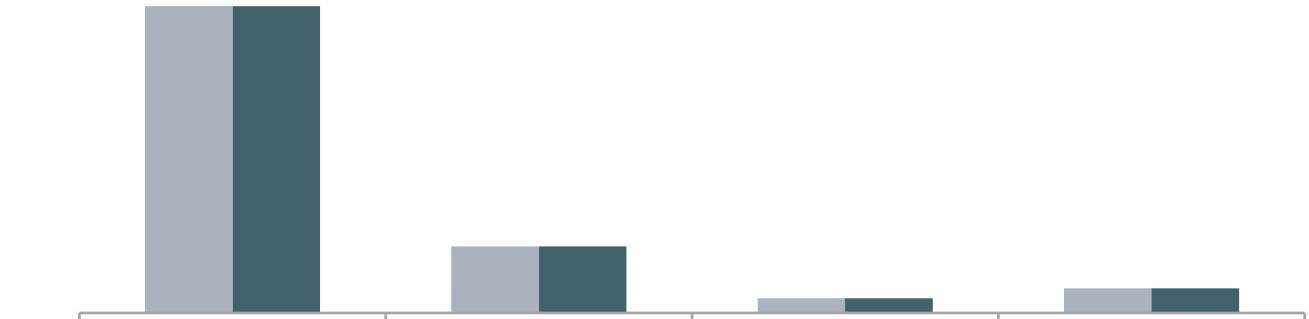
Hampir seluruh kota/kabupaten di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan capaian yang sangat tinggi, yakni mendekati 100 persen. Pada Jakarta Pusat, capaian meningkat dari 99,99 persen pada 2023 menjadi 100,00 persen pada 2024. Sementara itu, Jakarta Utara mengalami sedikit penurunan dari 100,00 persen pada 2023 menjadi 99,99 persen pada 2024, meskipun nilainya tetap sangat tinggi.

Di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu, capaian tercatat stabil pada angka 100,00 persen baik pada tahun 2023 maupun 2024. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa capaian di seluruh wilayah DKI Jakarta sudah sangat optimal dan merata, dengan hampir seluruh wilayah mencapai 100 persen pada periode tersebut.

4.3. Kehutanan

Hutan kota menjadi salah satu elemen penting dalam pengelolaan lingkungan di perkotaan seperti di DKI Jakarta. Kawasan tersebut memiliki kegunaan dalam menjaga kualitas udara, mengurangi panas, serta menyediakan ruang ekologi guna mendukung keberlangsungan berbagai jenis flora dan fauna. Sementara itu, hutan kota turut berperan sebagai ruang publik yang dapat digunakan masyarakat untuk kegiatan edukasi dan rekreasi terbatas. Berikut terdapat data mengenai distribusi luas hutan kota di beberapa wilayah administrasi Jakarta:

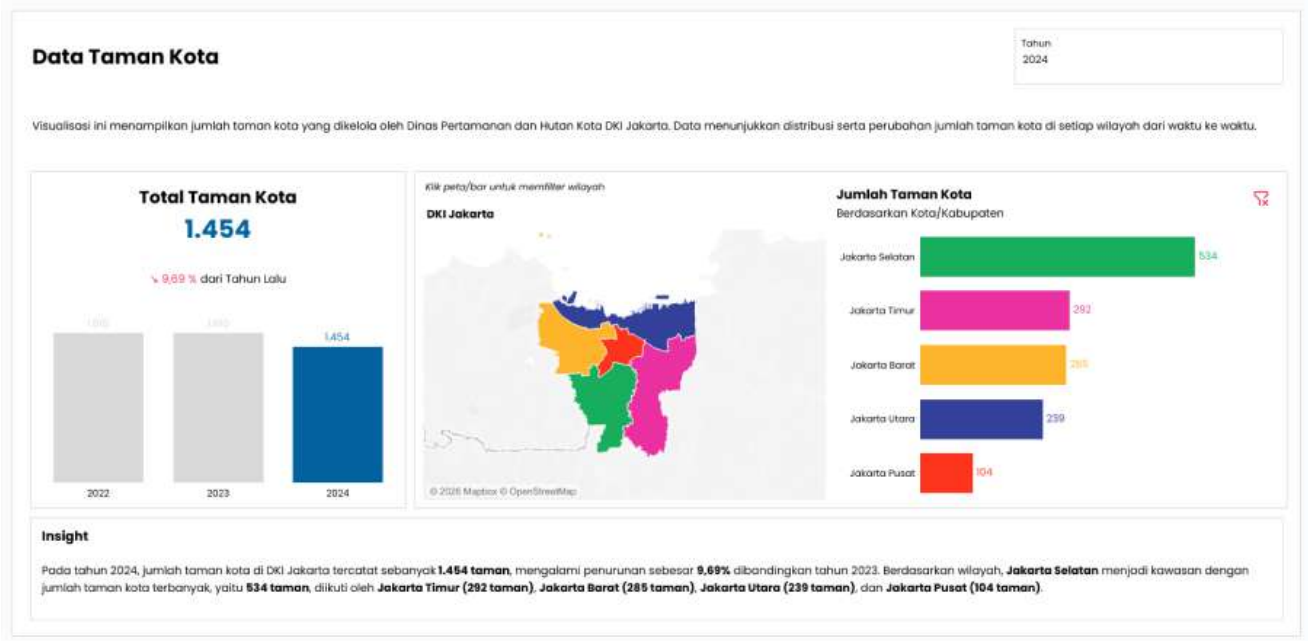
Gambar 4.30. Data Hutan Kota di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2023	37,14	5,95	1,32	2,21
2024	37,14	5,95	1,32	2,21

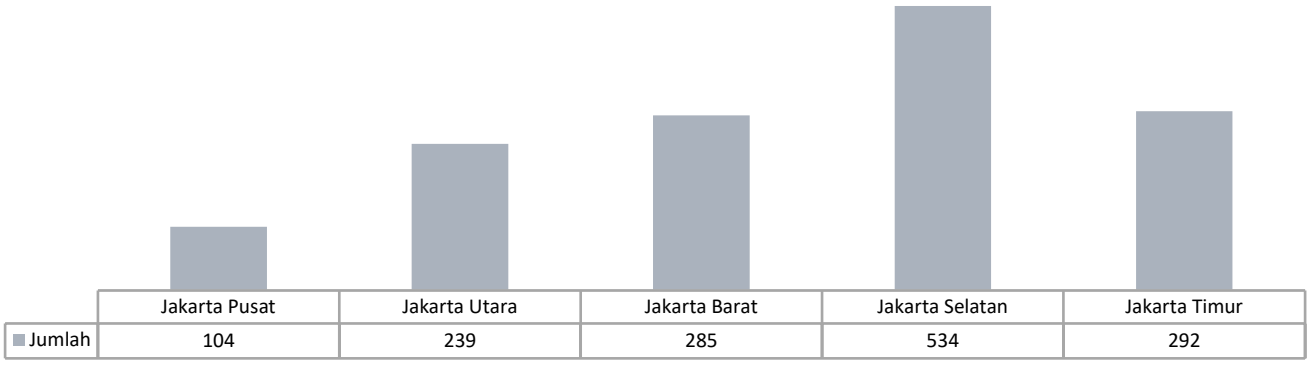
Sumber: Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

Data mengenai luas hutan kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2024 menunjukkan wilayah Jakarta Utara memiliki luasan hutan kota paling besar dari wilayah lain, yaitu tercatat terdapat 37,14 ha. Semantra itu, Jakarta Barat memiliki luas 5,95 ha, dan Jakarta Timur dengan luas 2,21 ha. Wilayah dengan luas hutan kota paling kecil berada pada Jakarta Selatan dengan 1,32 ha. Angka tersebut tidak menunjukkan pengurangan atau perluasan wilayah luas hutan kota dalam dua tahun. Meski dengan demikian, perbedaan luasan antarwilayah mencerminkan kondisi tata ruang masing-masing daerah. Luas hutan kota sesuai dengan data sebelumnya menunjukkan angka yang relatif stabil selama dua tahun. Taman kota memiliki akses yang lebih mudah serta dapat dimanfaatkan warga untuk aktivitas harian berupa olahraga, rekreasi, atau sekedar berkumpul. Sehingga dengan demikian, pemerataan jumlah titik taman kota menjadi indikator penting dalam melihat kualitas lingkungan di perkotaan.





Gambar 4.31. Data Taman Kota DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
Jumlah	104	239	285	534	292

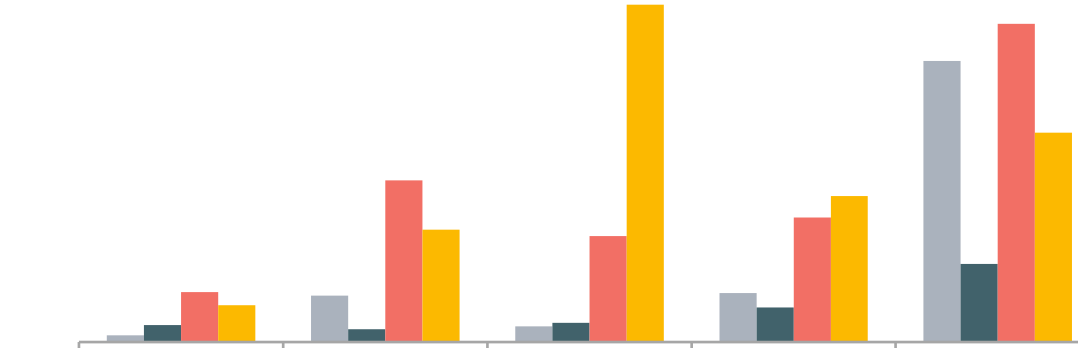
Sumber: Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta



Data mengenai jumlah titik lokasi taman kota menurut wilayah di DKI Jakarta tahun 2024 menunjukkan perbedaan jumlah secara signifikan di setiap wilayah. Jakarta Selatan memiliki jumlah paling banyak mencapai 534 lokasi. Lokasi terbanyak berikutnya berada di Jakarta Timur dengan 292 lokasi, disusul Jakarta Barat yang memiliki 285 titik taman kota. sementara itu, Jakarta Utara berjumlah 239 lokasi. Wilayah dengan jumlah titik lokasi taman kota paling sedikit berada di Jakarta Pusat dengan 104 lokasi, hal tersebut dikarenakan keterbatasan lahan karena di dominasi oleh kawasan perkantoran, pemerintahan, dan pusat bisnis. Secara lebih lanjut, data yang tersaji memberikan gambaran setiap wilayah memiliki

karakter serta kemampuan ruang yang berbeda dalam menyediakan fasilitas taman kota bagi warganya. Setelah dilakukan pembahasan terkait titik taman kota yang berguna sebagai ruang interaksi dan aktivitas masyarakat, gambaran mengenai kualitas lingkungan perkotaan semakin lengkap apabila dilakukan peninjauan dari jumlah pohon pelindung. Kehadiran pohon pelindung tidak hanya berfungsi untuk memperindah kawasan, melainkan juga berfungsi menurunkan suhu, mengurangi polusi udara, serta meningkatkan kenyamanan pejalan kaki. Oleh karena itu, distribusi pohon pelindung di tiap wilayah menjadi indikator penting dalam menilai upaya peningkatan ruang hijau sekaligus adaptasi terhadap perubahan iklim.

Gambar 4.32. Jumlah Pohon Pelindung menurut Jenisnya di Provinsi DKI Jakarta



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2021	155	1.101	375	1.162	6.705	-
2022	404	300	452	820	1.862	-
2023	1.189	3.852	2.527	2.970	7.587	-
2024	879	2.677	8.127	3.481	4.993	2

Sumber: Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

Data di atas menunjukkan pertumbuhan signifikan jumlah pohon pelindung di beberapa wilayah dalam rentang 2021-2024. Pada Jakarta Barat tercatat 375 pohon pada 2021 dan meningkat menjadi 452 pohon pada 2022. Pada tahun selanjutnya terjadi peningkatan menjadi 2.527 pohon pada 2023 dan meningkat drastis menjadi 8.127 pohon pada tahun berikutnya. Wilayah lain di Jakarta Timur secara konsisten mencatat angka yang cukup tinggi. Pada 2021 terdapat 6.705 pohon, kemudian turun menjadi 1.862 pohon pada 2022. Kenaikan kembali terjadi pada tahun 2023 dengan 7.587 pohon dan kembali mengalami penurunan menjadi 4.993 pohon di tahun berikutnya.

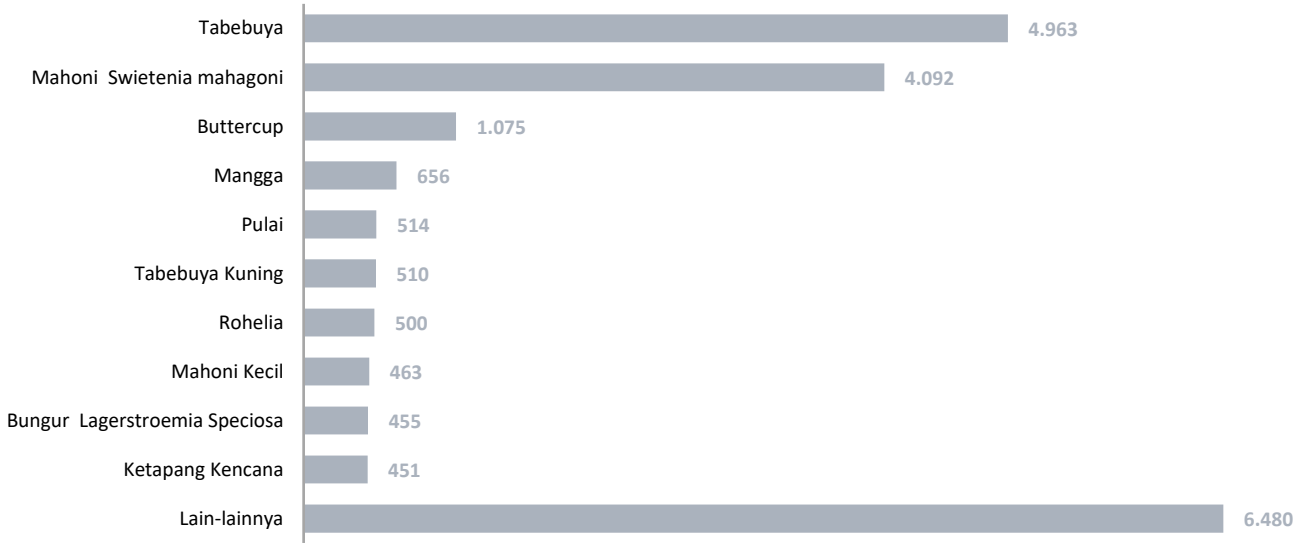
Jakarta Selatan tercatat terdapat 1.162 pohon pada 2021 dan turun menjadi 820 pohon pada tahun 2022. Pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan drastis menjadi 2.970 pohon dan kembali meningkat menjadi 3.481 pohon pada 2024. Pada sisi lain, Jakarta Utara turut memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Jakarta Utara mencatat sebanyak 1.101 pohon pada 2021 dan mengalami penurunan menjadi 300 pohon pada tahun berikutnya. Tahun 2023 mencatat sebanyak 3.853 pohon dan kembali mengalami penurunan menjadi 2.677 pohon pada 2024.

Jakarta Pusat memperlihatkan data berupa, pada 2021 tercatat terdapat 155 pohon dan menjadi 404 pada 2022. Sementara itu, meningkat menjadi 1.189 pada 2023 kemudian mengalami penurunan menjadi 879 pada tahun berikutnya. Pada sisi lain, Kepulauan Seribu tidak menunjukkan catatan jumlah pohon sejak 2021 hingga 2023. Sementara itu terdapat catatan dua pohon pada tahun 2024.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat pola pada tahun tertentu yang menunjukkan peningkatan jumlah secara signifikan. Peningkatan tersebut terjadi pada tahun 2023. Pada tahun selanjutnya kembali mengalami penurunan. Sehingga dengan demikian, pemerintah perlu melakukan evaluasi serta ketepatan strategi dalam menentukan kebijakan terkait pohon pelindung di DKI Jakarta.

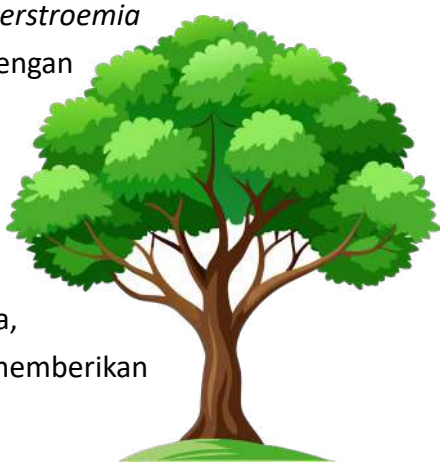
Setelah dilakukan pembahasan mengenai distribusi pohon pelindung yang tersebar di wilayah DKI Jakarta pada 2021-2024, selanjutnya penting untuk memahami jenis-jenis pohon yang banyak ditanam. Variasi jenis pohon memberikan dampak berbeda terhadap kualitas lingkungan, mulai dari kemampuan menyerap polusi, meningkatkan keteduhan, hingga ketahanan terhadap kondisi cuaca di perkotaan. Melalui data tersebut, strategi penghijauan dapat diterapkan dengan lebih rinci.

Gambar 4.33. Jumlah Pohon Pelindung menurut Jenisnya di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan pada data mengenai sepuluh terbesar pohon pelindung menurut jenisnya di Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 di atas bahwa, Tabebuya menjadi jenis pohon pelindung dengan jumlah terbesar, yaitu mencapai 4.963 pohon. Jumlah terbesar berikutnya terdapat pada Mahoni Swietenia Mahagoni dengan jumlah 4.092 pohon. Selanjutnya terdapat *Buttercup* dengan jumlah sebanyak 1.075 pohon dan Mangga berjumlah 656 pohon. Terdapat beberapa jenis pohon dengan jumlah yang hampir sama, yaitu Pulai berjumlah 514 pohon, Tabebuya Kuning sebanyak 510 pohon, dan Rohelia sebanyak 500 pohon. Sementara itu, Mahoni Kecil sebanyak 463 pohon, Bungur *Lagerstroemia Speciosa* sebanyak 455, dan Ketapang sebanyak 451. Jenis pohon dengan kategori lain-lain tercatat terdapat 6.480 pohon.

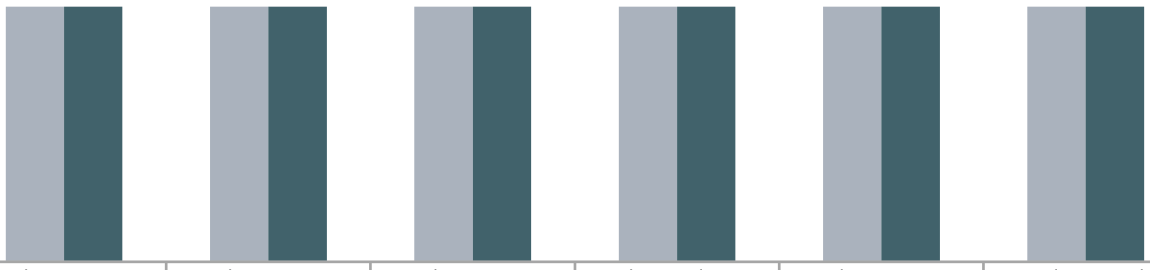


Keberagaman jenis tidak hanya berfungsi sebagai estetika kota. Fungsi lain yang dapat dirasakan adalah memperkuat ketahanan lingkungan terhadap penyakit tanaman, perubahan cuaca, serta tantangan ekologis yang lain. Keberagaman komposisi yang ada, ruang hijau di Jakarta dapat berfungsi dengan lebih optimal dalam memberikan dukungan kualitas hidup masyarakat.

4.4. Energi dan Sumber Daya Listrik

Ketersediaan akses listrik menjadi indikator penting dalam memberikan penilaian terhadap kualitas layanan dasar dan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah. Rasio elektrifikasi menunjukkan sejauh mana rumah tangga mampu terlayani oleh jaringan listrik, sehingga memberikan gambaran pemerataan pembangunan infrastruktur. Sehingga dengan demikian, pemantauan rasio elektrifikasi di Provinsi DKI Jakarta menjadi penting untuk mengetahui konsistensi dan keberlanjutan pelayanan listrik di seluruh wilayah administrasi.

Gambar 4.34. Data Rasio Elektrifikasi



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2024	100%	100%	100%	100%	100%	100%

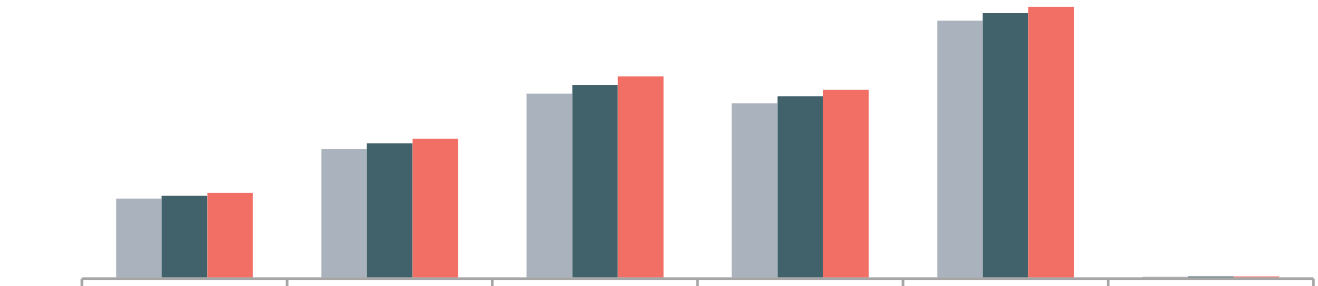
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Data mengenai elektrifikasi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 dan 2024 memberikan gambaran terkait konsistensi capaian di seluruh wilayah administrasi. Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu mencatat rasio elektrifikasi mencapai 100% selama dua tahun berturut-turut. Capaian tersebut menggambarkan seluruh rumah tangga di wilayah telah memiliki akses penuh terhadap layanan listrik. Konsistensi capaian selama dua tahun tersebut menandakan infrastruktur kelistrikan di DKI Jakarta telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Selain itu, tidak terdapatnya penurunan atau ketimpangan antarwilayah turut memperlihatkan adanya pemerataan layanan energi yang optimal. Kondisi tersebut merupakan hal penting dalam pengembangan pembangunan lainnya, karena listrik merupakan fasilitas mendasar dalam mendukung berbagai kegiatan sosial, ekonomi serta pelayanan publik.

Setelah dilakukan pembahasan mengenai rasio elektrifikasi di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan capaian 100%, analisis selanjutnya perlu untuk diarahkan pada aspek kuantitatif yang lebih rinci. Tingkat pemerataan akses listrik memiliki kaitan erat dengan jumlah rumah tangga yang tercatat dan menggunakan layanan listrik. Sehingga dengan demikian, data pada gambar di bawah ini menyajikan perkembangan jumlah rumah tangga pengguna listrik di DKI Jakarta sebagai gambaran konkret mengenai cakupan dan dinamika pemanfaatan listrik di setiap wilayah.



Gambar 4.35. Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik menurut Wilayah DKI Jakarta Tahun 2022-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2022	314.856	511.018	728.415	690.312	1.015.938	8.539
2023	326.112	532.936	761.935	717.987	1.045.980	8.783
2024	338.522	550.442	795.781	744.113	1.069.061	9.161

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Data di atas menunjukkan jumlah rumah tangga pengguna listrik di DKI Jakarta yang terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2022 hingga 2024. Jakarta Timur menjadi wilayah dengan jumlah pengguna paling banyak, yaitu sebesar 1.015.938 pada 2022, kemudian naik menjadi 1.045.980 pada 2023 dan kembali meningkat menjadi 1.069.061 pada tahun berikutnya. Rumah tangga pengguna listrik terbanyak kedua berikutnya terdapat pada Jakarta Barat, yang meningkat dari 728.415 pada 2022 menjadi 761.935 pada 2023 dan kembali meningkat menjadi 795.781 pada 2024. Sementara itu, Jakarta Selatan turut menunjukkan peningkatan angka setiap tahunnya. Pada 2022 terdapat 690.312 menjadi 717.987 pada 2023 kemudian meningkat sebesar 744.113 pada tahun berikutnya. Jakarta Utara juga mencatat pertumbuhan yang konsisten, yaitu dari 511.018 rumah tangga pengguna listrik pada 2022 menjadi 532.936 pada 2023, dan naik ke 550.442 pada 2024. Kenaikan serupa turut terlihat pada Jakarta Pusat, yaitu pada 2022 sebesar 314.856 menjadi 326.112 pada 2023 dan terus meningkat ke tahun berikutnya sebesar 338.522. Berdasarkan pada uraian di atas, data tersebut memperlihatkan peningkatan dari pemanfaatan listrik yang stabil dan merata di seluruh wilayah Jakarta dalam tiga tahun.

Setelah mengetahui perkembangan jumlah rumah tangga pengguna listrik di berbagai wilayah DKI Jakarta, secara lebih lanjut penting untuk memahami bagaimana tren pertumbuhan pelanggan listrik secara keseluruhan di tingkat provinsi. Data pelanggan PLN dari tahun ke tahun memberikan informasi secara lebih luas mengenai kebutuhan energi listrik masyarakat serta peningkatan akses listrik secara umum. Melakukan pemantauan terhadap pergerakan jumlah pelanggan, dapat melihat pola konsumsi energi yang terus bertumbuh seiring bertambahnya populasi dan meningkatnya aktivitas ekonomi di DKI Jakarta.



Gambar 4.36. Jumlah Pelanggan Listrik PLN (Juta) di Provinsi DKI Jakarta



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pelanggan Jakarta	4.395.066	4.583.706	4.755.494	4.915.913	5.064.418	5.225.077	5.403.929

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Data di atas menggambarkan jumlah pelanggan listrik PLN di Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga 2024. Jumlah pelanggan tercatat sebanyak 4.395.066 pada 2018 dan meningkat menjadi 4.583.706 pada tahun berikutnya. Jumlah tersebut kembali mengalami kenaikan menjadi 4.755.494 pelanggan pada 2020 kemudian menjadi 4.915.913 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi perubahan menjadi 5.064.418 pelanggan, kemudian menjadi 5.225.077 pelanggan pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2024 turut terjadi peningkatan menjadi 5.403.929 pelanggan. Berdasarkan data yang tersedia menandakan bahwa, kenaikan jumlah pelanggan selama tujuh tahun menunjukkan pertumbuhan permintaan listrik yang terus terjadi di Jakarta.

Secara lebih lanjut, setelah melihat mengenai jumlah pelanggan listrik di Provinsi DKI Jakarta yang meningkat secara konsisten selama tujuh tahun. Selanjutnya, menarik untuk membandingkan dengan kondisi di tingkat nasional. Pergerakan jumlah pelanggan listrik PT PLN secara nasional turut menggambarkan secara lebih luas mengenai perkembangan akses energi di Indonesia. Data nasional yang tersaji, dapat memahami apakah pola pertumbuhan di DKI Jakarta sejalan dengan tren umum di seluruh Indonesia atau justru memiliki karakteristik perubahan yang berbeda.

Gambar 4.37. Jumlah Pelanggan Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Juta) di Indonesia Tahun 2018-2024



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pelanggan Indonesia	71.917.397	75.705.614	79.000.033	82.543.980	85.636.198	89.153.278	92.877.292

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Jumlah pelanggan listrik PLN di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan selama tujuh tahun. Pada 2018 tercatat terdapat sebanyak 71.917.397 pelanggan kemudian menjadi 75.705.614 pada tahun selanjutnya. Peningkatan kembali tercatat menjadi 79.000.033 pelanggan pada 2020 dan meningkat menjadi 82.543.980 pelanggan pada 2021. Jumlah pelanggan kemudian meningkat menjadi 85.636.198 pada 2022. Pertumbuhan jumlah pelanggan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2023 dan 2024 terjadi peningkatan dengan masing-masing mencapai 89.153.278 pelanggan dan 92.877.292 pelanggan. Kenaikan yang cenderung stabil setiap tahun memperlihatkan

adanya perluasan jaringan listrik, peningkatan rasio elektrifikasi, serta bertambahnya kebutuhan listrik seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Pemanfaatan energi terbarukan merupakan salah satu indikator penting dalam upaya meningkatkan keberlanjutan dan ketahanan energi pada suatu daerah. Persentase bauran energi terbarukan menggambarkan kontribusi sumber energi ramah lingkungan apabila dibandingkan dengan energi fosil dalam memenuhi kebutuhan energi. Melalui data terbaru dapat dilihat bagaimana tren dalam pemanfaatan energi bersih berkembang dari tahun ke tahun.

Gambar 4.38. Persentase Bauran Energi Terbarukan Tahun 2023-2024



	2023	2024
Persentase	55%	45%

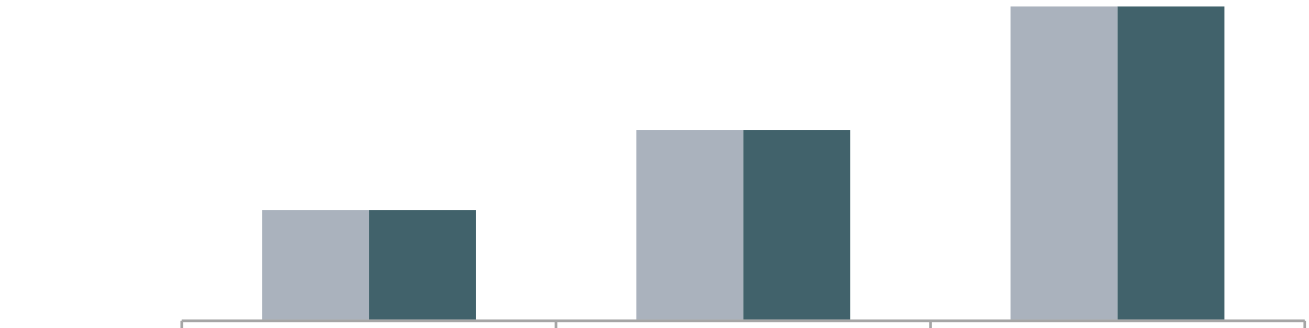
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Data menunjukkan bahwa, persentase bauran energi terbarukan di DKI Jakarta mencapai 45% pada 2023. Angka tersebut menggambarkan hampir setengah dari total penggunaan energi sumber terbarukan. Kondisi tersebut menjadi fondasi penting dalam memberikan penguatan kebijakan energi bersih di tahun selanjutnya. Proporsi energi terbarukan mengalami peningkatan menjadi 55% pada 2024. Kenaikan ini menggambarkan adanya dorongan yang lebih kuat dalam mengadopsi teknologi energi terbarukan.

Akses terhadap listrik merupakan salah satu indikator fundamental dalam peningkatan kualitas hidup di masyarakat. Ketersediaan listrik yang stabil secara lebih lanjut berdampak pada kegiatan perekonomian, pelayanan publik, serta kenyamanan dan produktivitas warga. Di wilayah kepulauan, ketersediaan listrik menjadi lebih krusial karena kondisi geografis yang berbeda dengan wilayah di daratan. Sehingga dengan demikian, pemantauan jumlah rumah tangga yang terpasang listrik serta pelanggan listrik aktif menjadi komponen penting dalam melihat perkembangan pembangunan layanan dasar di wilayah yang bersangkutan.



Gambar 4.39. Jumlah Rumah Tangga Terpasang Listrik dan Pelanggan Listrik Terpasang Elektrifikasi di Kepulauan Seribu Tahun 2022-2024



	2022	2023	2024
Rumah Tangga	8.539	8.783	9.161
Pelanggan Listrik	8.539	8.783	9.161

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Data 2022 menunjukkan jumlah rumah tangga terpasang listrik di Kepulauan Seribu yang mencapai 8.539 dan angka tersebut sama dengan jumlah pelanggan listrik pada tahun yang sama. Kondisi ini menandakan bahwa, keseluruhan rumah tangga yang sudah terpasang listrik turut tercatat sebagai pelanggan aktif, sehingga terdapat gambaran meratanya cakupan layanan listrik. Selanjutnya pada tahun 2023, terjadi peningkatan mencapai 8.783 rumah tangga terpasang listrik, dengan jumlah pelanggan listrik yang turut berada pada jumlah yang sama. Kenaikan tersebut memperlihatkan adanya perluasan akses listrik yang diiringi oleh bertambahnya jumlah rumah tangga terlayani. Sementara itu pada tahun 2024, jumlah rumah tangga terpasang listrik meningkat kembali menjadi 9.161 dan dengan jumlah yang sama seluruhnya tercatat sebagai pelanggan listrik. Peningkatan yang konsisten selama tiga tahun tersebut menggambarkan keberlanjutan upaya dari perluasan elektrifikasi di Kepulauan Seribu.

Pada data yang tersaji di atas menunjukkan jumlah rumah tangga terpasang listrik dan jumlah pelanggan listrik di Kepulauan Seribu selalu berada pada angka yang sama setiap tahun. Secara lebih lanjut menunjukkan bahwa, seluruh rumah tangga yang terpasang listrik turut menjadi pelanggan aktif. Data tersebut dapat diartikan layanan listrik telah menjangkau seluruh rumah tangga. Sejalan dengan kondisi tersebut rasio elektrifikasi di Kepulauan Seribu sejak tahun 2022-2024 tetap menunjukkan capaian maksimal. Hal ini mengindikasikan wilayah yang bersangkutan telah mencapai kondisi elektrifikasi penuh tanpa adanya rumah tangga yang belum terlayani.

Gambar 4.40. Rasio Elektrifikasi di Kepulauan Seribu Tahun 2022-2024

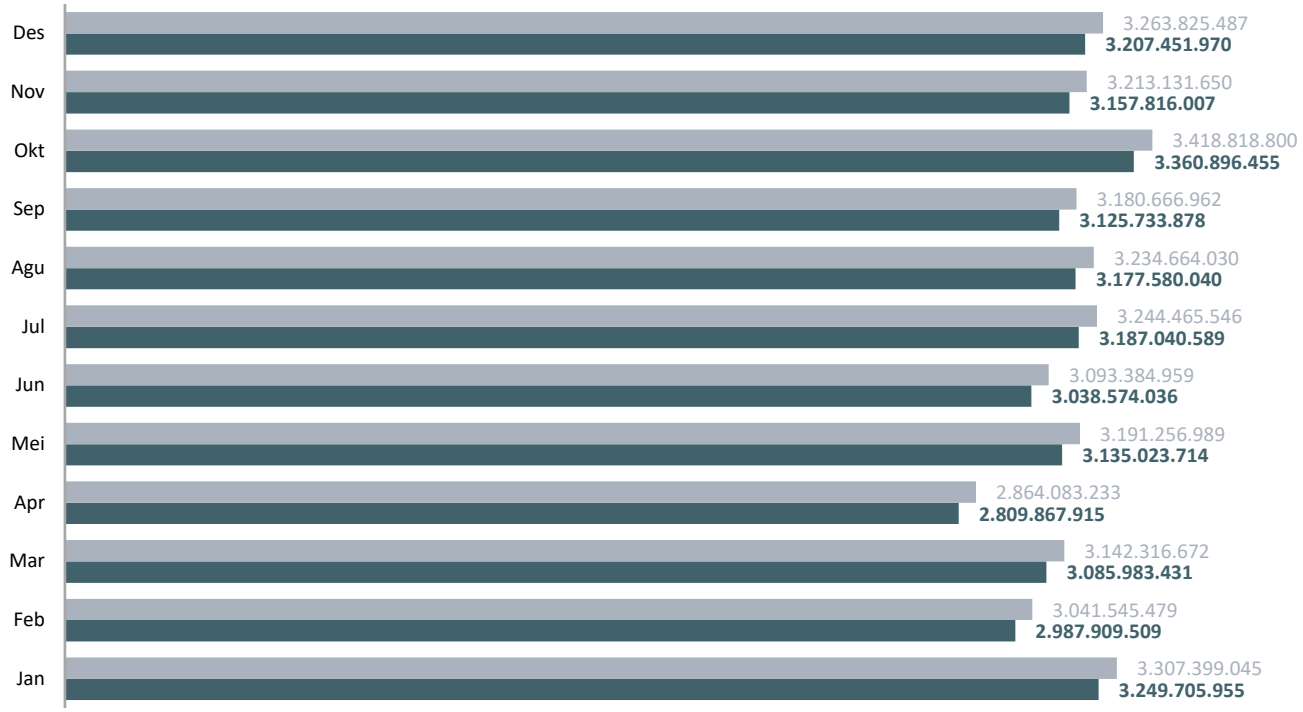


	2022	2023	2024
Rasio	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Rasio elektrifikasi di Kepulauan Seribu menunjukkan angka 100% selama 2022-2024. Penyediaan layanan dasar menunjukkan keberhasilan, terutama mengingat adanya tantangan geografis di wilayah kepulauan yang membutuhkan upaya distribusi energi yang lebih kompleks dari pada wilayah daratan. Capaian 100% pada elektrifikasi tersebut turut menggambarkan stabilitas pasokan dan keandalan pelayanan listrik di Kepulauan Seribu. Terpenuhinya kebutuhan listrik seluruh rumah tangga, menunjukkan wilayah memiliki fondasi yang kuat dalam pengembangan kegiatan perekonomian, sosial, dan pelayanan publik. Keberlanjutan rasio yang mencapai angka maksimal turut menggambarkan efektivitas dalam pengelolaan infrastruktur energi yang dapat menjaga pencapaian elektrifikasi penuh sepanjang waktu. Ketersediaan dan distribusi tenaga listrik menjadi salah satu aspek penting guna memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Data mengenai jumlah pelanggan, daya terpasang, produksi, serta distribusi listrik dapat menunjukkan kapasitas serta pemanfaatan energi listrik yang terdapat pada suatu wilayah. Informasi tersebut turut menjadi dasar dalam memberikan penilaian keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan listrik. Secara lebih lanjut terdapat data pendukung di bawah ini:

Gambar 4.41. Jumlah Pelanggan dan Jumlah Daya Terjual menurut Cabang di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

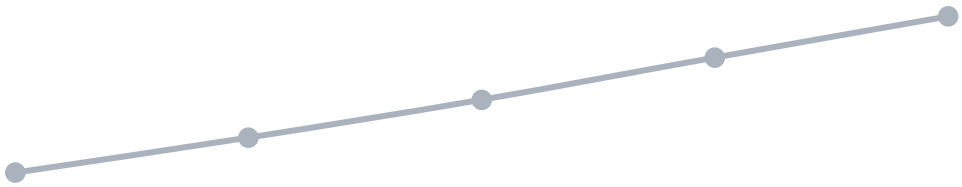


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data yang tersedia di atas bahwa, jumlah pelanggan tercatat sebanyak 5.403.929 pelanggan dengan daya terpasang sebesar 22.419.129 kW. Sementara itu, listrik yang dipakai sendiri sebesar 288.268.359 kWh dan jumlah listrik terjual tercatat sebanyak 38.198.376.743 kWh. Sementara itu, listrik siap jual mencapai 41.610.277.765 kWh. Data tersebut menggambarkan kapasitas listrik yang tersedia lebih besar apabila dibandingkan jumlah listrik yang terjual. Maka dengan demikian masih

terdapat cadangan daya dalam sistem kelistrikan. Kapasitas penyediaan listrik menempati posisi yang memadai dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Selisih antara listrik siap jual dan listrik terjual memperlihatkan adanya ruang cadangan yang dapat mendukung peningkatan kebutuhan listrik di masa yang akan datang. Ketersediaan dan pemanfaatan listrik menjadi salah satu indikator penting pada perkembangan wilayah perkotaan. Adanya pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, kebutuhan terhadap energi listrik terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan di Provinsi DKI Jakarta, tercerminkan dari bertambahnya jumlah pelanggan listrik yang terlayani pada unit pelayanan pelanggan setiap tahun. Maka dengan demikian, data jumlah pelanggan listrik dapat menunjukkan gambaran terhadap perkembangan konsumen energi serta dinamika kebutuhan listrik masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

Gambar 4.42. Jumlah Pelanggan Listrik menurut Unit Pelayanan Pelanggan di Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 2018-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah	4.915.913	5.064.418	5.225.077	5.403.929	5.578.664

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

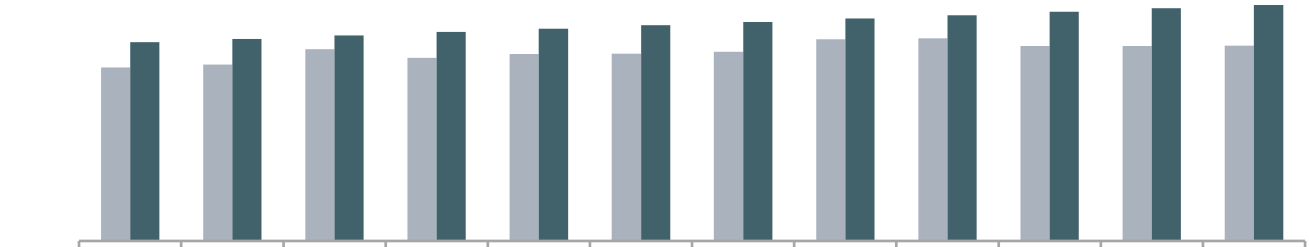
Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa, jumlah pelanggan listrik di Provinsi DKI Jakarta memperlihatkan tren peningkatan secara konsisten selama periode 2021-2025. Pada 2021, pelanggan tercatat sebanyak 4.915.913 pelanggan. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 5.064.418 pelanggan. Secara lebih lanjut, peningkatan kembali terlihat selama tiga tahun berikutnya. Pada 2023 terdapat sebanyak 5.225.077 pelanggan, sementara itu pada 2024 sebanyak 5.403.929 dan pada 2025 menjadi periode dengan jumlah pelanggan tertinggi yaitu sebanyak 5.578.664 pelanggan. Keseluruhan data menggambarkan adanya pertumbuhan jumlah pelanggan listrik yang stabil. Secara lebih lanjut mengindikasikan adanya peningkatan kebutuhan serta akses masyarakat terhadap layanan listrik di Provinsi DKI Jakarta.

4.5. Lingkungan Hidup

4.5.1. Pengelolaan Sampah

Data mengenai persentase rumah tangga mengenai pemilahan sampah di DKI Jakarta tahun 2023 dan 2024 menggambarkan perkembangan perilaku dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga sepanjang tahun. Pemilahan sampah menjadi salah satu indikator penting dalam memberikan dukungan pengurangan sampah serta meningkatkan efektivitas pengolahan serta daur ulang. Melalui data yang tersaji dari bulan Januari hingga Desember, terlihat tren partisipasi rumah tangga dalam melakukan pemilahan sampah yang mengalami perubahan atau terjadi peningkatan.

Gambar 4.43. Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Pemilahan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2023	16,13	16,39	17,80	17,00	17,36	17,41	17,58	18,75	18,82	18,12	18,11	18,14
2024	18,46	18,77	19,09	19,41	19,72	20,04	20,35	20,67	20,98	21,30	21,62	21,93

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta

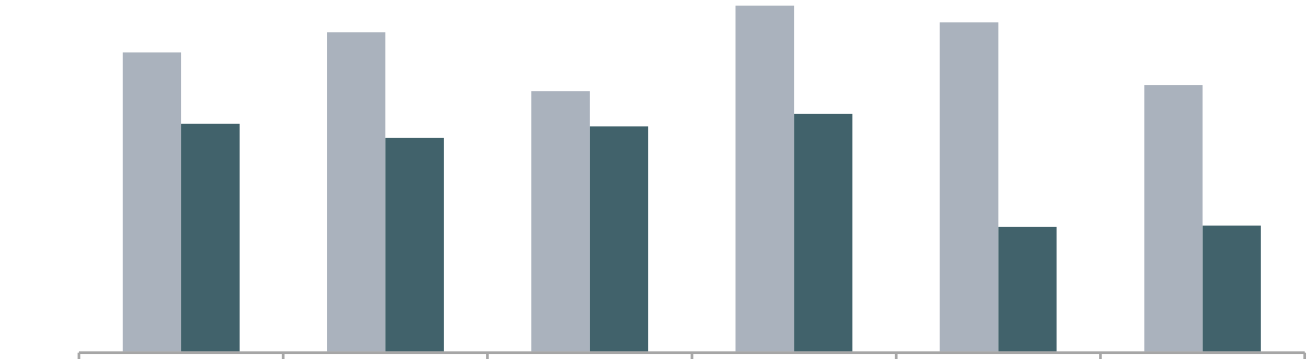
Data yang tersedia di atas menunjukkan persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah di DKI Jakarta terdapat tren peningkatan pada tahun 2024 dan konsisten lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya di setiap bulan. Januari 2023 tercatat terdapat persentase sebesar 16,13% sementara itu pada 2024 naik lebih tinggi menjadi 18,46%. Angka tersebut mengindikasikan adanya peningkatan partisipasi sejak awal tahun. Pola tersebut berlanjut pada Februari, pada 2023 terdapat 16,39% sementara pada 2024 menjadi 18,46%. Secara lebih lanjut, capaian tersebut memperlihatkan pertumbuhan yang stabil. Memasuki Maret 2023 menunjukkan angka 17,80% meningkat menjadi 19,09% pada tahun selanjutnya. Secara lebih lanjut, terjadi penguatan kesadaran pemilihan sampah pada kuartal pertama. Pada April, persentase 2023 tercatat terdapat 17% dan pada 2024 meningkat menjadi 19,41%, hal ini menandakan peningkatan yang semakin konsisten. Kenaikan terus mengalami kelanjutan sampai bulan berikutnya, pada 2023 sebesar 17,36% dan 2024 sebesar 19,72%. Pada Juni 2023 sebesar 17,41% dan tembus menjadi 20,04% pada 2024. Persentase yang tinggi menandakan mulai terjadi perluasan praktik pemilahan sampah di pertengahan tahun.

Pada Juli 2023, tercatat terdapat 17,58% kemudian menjadi 20,35% pada tahun berikutnya. Kemudian pada Agustus 2023 naik menjadi 18,75% dan menjadi 20,67% pada 2024. Pada bulan tersebut menunjukkan pertumbuhan partisipasi yang tidak terlalu tajam. Memasuki September 2023, tercatat terdapat 18,82% dan meningkat menjadi 20,98% pada tahun selanjutnya. Tren peningkatan masih menunjukkan pergerakan hingga menjelang akhir tahun. Pada Oktober, persentase 2023 sebesar 18,12% sedangkan pada 2024 naik menjadi 21,30%. Data tersebut mengindikasikan terjadi kestabilan angka persentase. Hal serupa terlihat pada November 2023, terdapat persentase sebesar 18,11% sementara pada tahun berikutnya meningkat tajam menjadi 21,62%. Pada penghujung tahun 2023, terdapat capaian sebesar 18,14% sedangkan pada 2024 meningkat menjadi 21,93% yang menandakan partisipasi rumah tangga dalam pemilahan sampah semakin kuat.

Berdasarkan uraian di atas tergambarkan bahwa, tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Secara lebih lanjut, dapat menjadi indikasi positif adanya perbaikan perilaku masyarakat dan dukungan program/kampanye lingkungan. Selain itu, data yang tersaji turut menandakan adanya kesadaran rumah tangga mengenai pentingnya pemilahan sampah yang merupakan langkah awal dalam pengelolaan sampah.

Data yang tersaji sebelumnya menunjukkan tingkat partisipasi rumah tangga dalam pemilahan sampah di DKI Jakarta yang terus meningkat dari tahun 2023 dan 2024. Peningkatan yang terjadi secara lebih lanjut menggambarkan semakin menguatnya perhatian masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sejalan dengan hal tersebut, efektivitas dalam penanganan sampah oleh pemerintah daerah menjadi aspek penting guna memastikan upaya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga berdampak optimal. Sehingga dengan demikian, data mengenai persentase penanganan sampah antarkota di DKI Jakarta memberikan gambaran yang saling melengkapi terhadap kondisi pengelolaan sampah secara keseluruhan.

Gambar 4.44. Persentase Penanganan Sampah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	72,39	72,55	72,08	72,76	72,63	72,13
2024	71,82	71,71	71,80	71,90	71,00	71,01

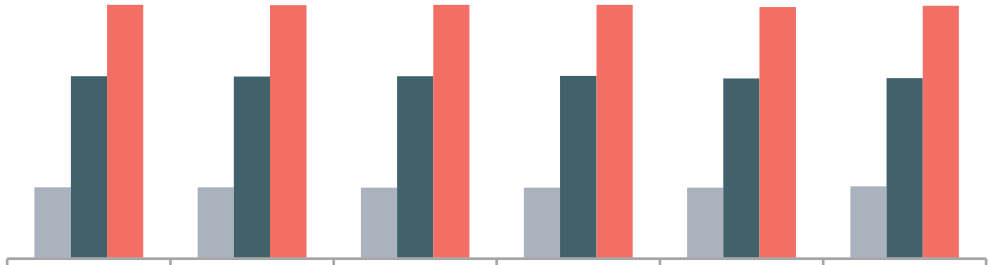
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Data mengenai persentase penanganan sampah di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan perubahan angka sejak 2023-2024. Perubahan tersebut terjadi dengan ditandai adanya penurunan nilai. Jakarta Selatan pada 2023 mendapatkan persentase sebesar 72,76% turun menjadi 71,90% pada 2024. Sementara itu, Jakarta Timur menunjukkan angka sebesar 72,63% pada 2023 menjadi 71% pada 2024. Terdapat Jakarta Utara dengan persentase sebesar 72,55% pada 2023 menjadi 71,71% pada 2024. Jakarta Pusat turut mengalami penurunan yang signifikan, pada 2023 mendapatkan nilai sebesar 72,39% menjadi 71,82% pada 2024. Selanjutnya terdapat Kepulauan Seribu, pada 2023 dengan persentase mencapai 72,13% kemudian turun menjadi 71,01% pada 2024. Pada sisi lain, Jakarta Barat menunjukkan persentase sebesar 72,08% pada 2023 dan turun menjadi 71,80% pada 2024. Secara lebih lanjut apabila dibandingkan dengan antarwilayah, penurunan paling kecil terjadi di Jakarta Barat. Hal ini menunjukkan kestabilan wilayah terutama dalam mempertahankan capaian penanganan sampah. Sementara itu, penurunan paling besar terjadi di Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu. Penurunan tersebut mengindikasikan kedua wilayah tersebut menghadapi hambatan yang lebih signifikan, baik dari sisi kapasitas layanan, dan cakupan penanganan. Sementara itu, faktor geografis turut memengaruhi penanganan sampah terutama di Kepulauan Seribu yang mempunyai tantangan logistik dan transportasi.

Data ini memperlihatkan persentase penanganan sampah di DKI Jakarta yang masih menduduki level cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi dalam pengelolaan sampah, mulai dari peningkatan pemilahan di tingkat rumah tangga, optimalisasi pengangkutan dan fasilitas

pengolahan, sehingga penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar capaian penanganan sampah dapat kembali meningkat dan lebih berkelanjutan. Capaian penanganan sampah terlihat melalui persentase penanganan sampah pada pembahasan sebelumnya. Data sebelumnya menunjukkan variasi dalam hal tingkat keberhasilan penanganan sampah antarwilayah. Guna memberikan gambaran secara komprehensif, diperlukan pemantauan lanjutan mengenai tingkat persentase pengelolaan sampah secara lebih mendalam terutama pada masing-masing kota administrasi. Berikut terdapat data yang dapat memberikan sudut pandang dengan memperlihatkan perbandingan capaian pengelolaan sampah antara tahun 2023 dan 2024.

Gambar 4.45. Persentase Pengelolaan Sampah menurut Wilayah DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Persentase Pengurangan Sampah	28,07	28,11	28,06	28,06	28,02	28,48
Persentase Penanganan Sampah	71,82	71,71	71,80	71,90	71,00	71,01
Persentase Pengelolaan Sampah	99,89	99,82	99,86	99,96	99,02	99,48

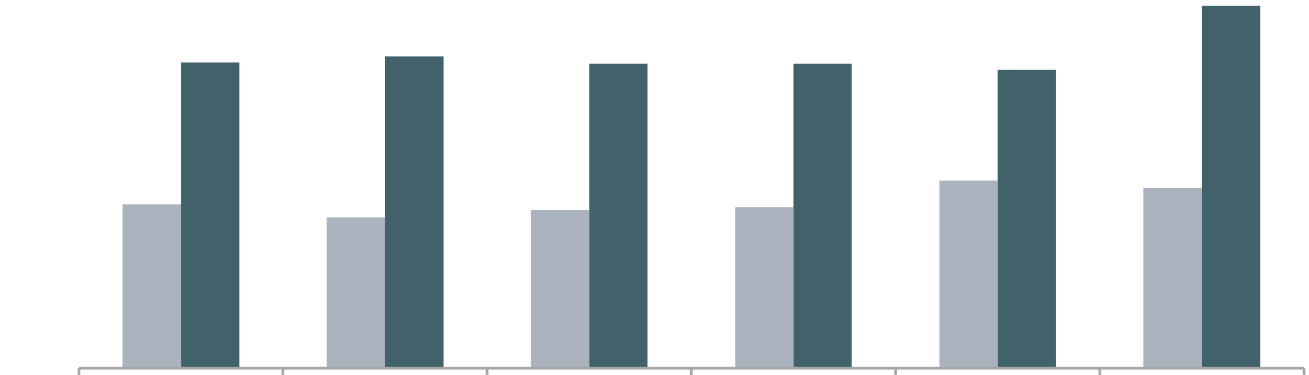
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Data mengenai persentase pengelolaan sampah pada 2023 dan 2024 menggambarkan capaian yang tinggi dan relatif merata antarwilayah. Jakarta Timur mencapai 99,90% pada 2023 menurun menjadi 99,02% pada 2024. Sementara itu, Jakarta Selatan mencapai 99,85% pada 2023 meningkat menjadi 99,96% pada 2024. Jakarta Utara mencapai 99,57% pada 2023 meningkat menjadi 99,82% pada tahun berikutnya. Sementara itu, Jakarta Pusat mencapai 99,51% pada 2023 meningkat menjadi 99,89% pada 2024. Kepulauan Seribu turut mengalami peningkatan dari 99,35% pada 2023 menjadi 99,48% pada 2024. Pada sisi lain, Jakarta Barat mencapai 99,15% pada 2023 meningkat drastis menjadi 99,86% pada 2024.

Uraian di atas menunjukkan layanan pengelolaan sampah tahun 2023 yang berada pada level yang sangat optimal. Sementara itu, pada 2024 menunjukkan adanya penurunan persentase dalam pengelolaan sampah yang terjadi pada Jakarta Timur. Secara lebih lanjut, pada tahun tersebut mengindikasikan masih adanya upaya dalam mempertahankan kualitas pengelolaan sampah yang sangat baik.

Capaian pengelolaan sampah pada 2023 dan 2024 memperlihatkan kualitas pengelolaan yang cenderung stabil dengan persentase yang sangat tinggi. Selain adanya aspek pengelolaan, upaya dalam pengurangan sampah turut menjadi indikator penting guna memberikan penilaian efektivitas sistem persampahan secara lebih menyeluruh. Sehingga dengan demikian, data di bawah ini dapat memberikan gambaran mengenai persentase pengurangan sampah di tiap wilayah, sehingga dapat dilihat seberapa jauh kebijakan dan program pengurangan sampah di tingkat kota administrasi.

Gambar 4.46. Persentase Pengurangan Sampah menurut Wilayah DKI Jakarta Tahun 2023-2024



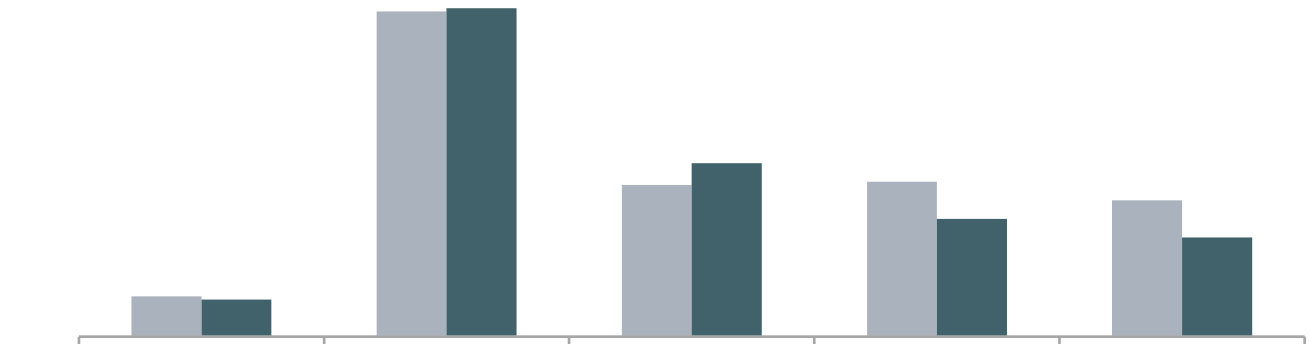
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	27,11	27,02	27,07	27,09	27,27	27,22
2024	28,07	28,11	28,06	28,06	28,02	28,48

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data di atas dapat diuraikan bahwa, persentase pengurangan sampah di DKI Jakarta menunjukkan capaian yang relatif seragam. Jakarta Timur mencapai 27,27% pada 2023 meningkat menjadi 28,02% pada 2024. Sementara itu, Kepulauan Seribu mencapai 27,22% pada 2023 menjadi 28,48% pada 2024. Jakarta Pusat menunjukkan 27,11% pada 2023 menjadi 28,07% pada 2024. Secara lebih lanjut, Jakarta Selatan menunjukkan 27,09% pada 2023 menjadi 28,06% pada 2024. Jakarta Barat sebesar 27,07% pada 2023 meningkat menjadi 28,06% pada 2024. Pada sisi lain, Jakarta Utara sebesar 27,02% menjadi 28,11% pada 2024. Secara lebih lanjut, peningkatan di seluruh wilayah mengindikasikan adanya perbaikan dalam implementasi program pengurangan sampah.

Setelah melihat mengenai perkembangan dalam pengurangan sampah dan pengelolaan sampah di berbagai wilayah pada 2023-2024, aspek lainnya yang turut menjadi perhatian adalah mengenai keberadaan sarana penyaring sampah sungai. Fasilitas tersebut memiliki peran langsung dalam mencegah sampah masuk menuju aliran sungai dan berdampak pada kualitas lingkungan perkotaan. Sehingga dengan demikian, data berikut memberikan gambaran terkait jumlah lokasi saringan sampah sungai di DKI Jakarta pada 2023 dan 2024. Secara lebih lanjut, memperlihatkan upaya pengendalian sampah di jalur sungai dari waktu ke waktu.

Gambar 4.47. Jumlah Lokasi Saringan Sampah Sungai di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2023	13	105	49	50	44
2024	12	106	56	38	32

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Jumlah mengenai lokasi saringan sampah sungai tersebar cukup bervariasi di setiap wilayah. Jakarta Utara memiliki jumlah saringan sampah sebesar 105 lokasi pada 2023 menjadi 106 lokasi pada 2024. Sementara itu, Jakarta Selatan mencapai 50 lokasi pada 2023 turun menjadi 38 lokasi pada 2024. Jakarta Barat mencapai 49 lokasi pada 2023 dan meningkat menjadi 56 lokasi pada 2024. Pada sisi lain, Jakarta Timur mencapai 44 lokasi pada 2023 menjadi 32 lokasi pada 2024. Pada sisi lain, Jakarta Pusat mencapai 13 lokasi pada 2023 menurun menjadi 12 lokasi pada 2024. Berdasarkan uraian di atas, terjadinya perubahan jumlah lokasi saringan sampah dapat terjadi karena dilakukannya penyesuaian prioritas dan kebutuhan dalam pengelolaan sampah sungai di setiap wilayah setiap tahun.

Distribusi mengenai jumlah lokasi saringan sampah sungai di berbagai wilayah DKI Jakarta pada 2023 dan 2024 mampu menggambarkan upaya pemerintah dalam menangani permasalahan sampah. Pada sisi lain, data mengenai lokasi saringan sampah terbesar turut menjadi perhatian. Informasi tersebut membantu dalam memahami titik-titik kritis pengendalian sampah sungai, sekaligus menunjukkan area yang membutuhkan perhatian lebih. Selanjutnya, berikut tersaji data mengenai sepuluh lokasi saringan sampah sungai dengan jumlah penyaringan tertinggi pada 2024.

Gambar 4.48. 10 Terbesar Lokasi Saringan Sampah Sungai di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

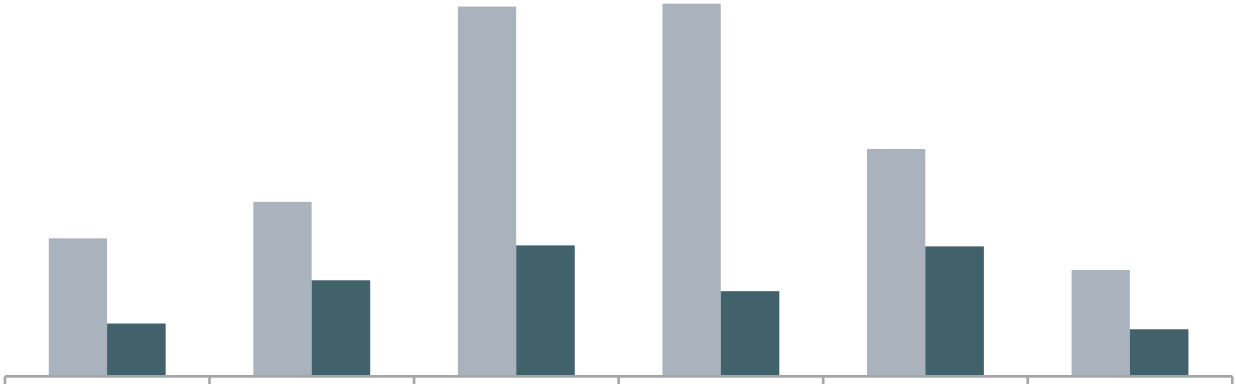


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Pada 2024 memperlihatkan bahwa saringan TB Simatupang (Baru) menjadi lokasi dengan jumlah penyaringan sampah paling besar, yaitu mencapai 22.580 m³. Angka tersebut jauh melampaui lokasi lainnya. Hal tersebut menandakan kawasan tersebut menjadi titik utama penumpukan sampah sungai, sehingga memerlukan pengelolaan intensif. Lokasi selanjutnya terdapat saringan Cengkareng Drain yang mencapai 2.381 m³, disusul saringan TB Simatupang yang mencapai 2.178 m³ dan saringan Sampah Pasar Uler sebesar 1.289 m³. Jumlah saringan yang jauh lebih sedikit terdapat pada saringan sampah PGC yang mencapai 954 m³. Sementara itu, saringan sampah Jagorawi mencapai 944 m³ dan saringan sampah Cawang Kompor mencapai 845 m³. Jumlah yang jauh lebih sedikit terdapat pada saringan sampah HEK Kramat Jati dengan 818 m³ dan 689 m³ pada saringan sampah *Spill Way* Pluit. Terdapat variasi tersebut menggambarkan perbedaan intensitas aliran sampah di setiap lokasi dan pentingnya pengelolaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Pengelolaan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah tangga menjadi bagian yang krusial guna melakukan penjagaan terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sampah B3 seperti lampu bekas, baterai, dan limbah kimia rumah tangga membutuhkan adanya penanganan khusus agar tidak menimbulkan pencemaran tanah dan air. Maka dengan demikian, data mengenai jumlah pengumpulan sampah B3 perlu dilakukan analisis guna mengetahui perkembangan serta perbandingannya di setiap wilayah. Berikut terdapat data guna mendukung pembahasan tersebut:

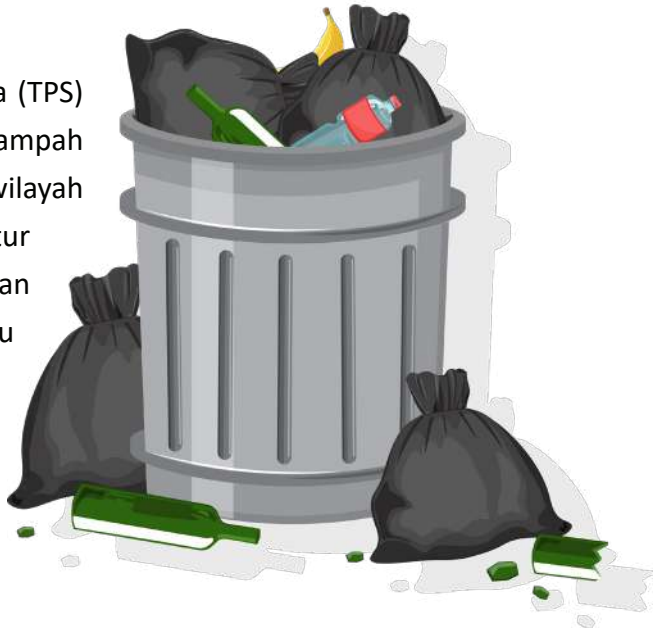
Gambar 4.49. Jumlah Pengumpulan Sampah B3 Rumah Tangga menurut Wilayah DKI Jakarta Tahun 2024-2025



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2024	9.346	11.811	25.041	25.511	15.380	7.193
2025	3.575	6.501	8.861	5.762	8.798	3.187

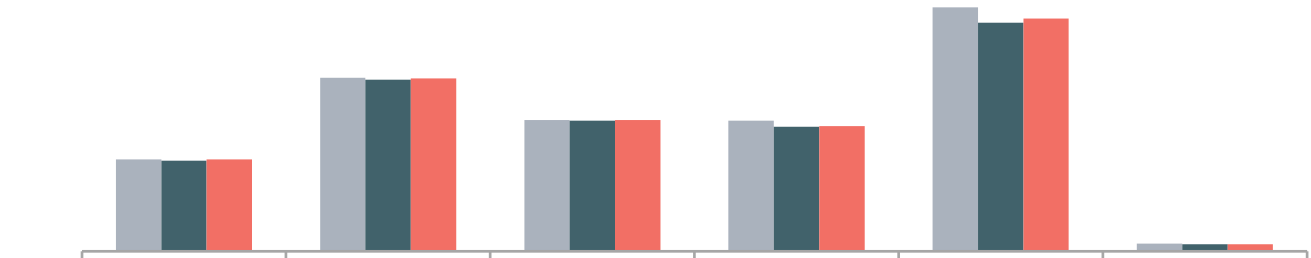
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Data pada 2024 di atas memperlihatkan bahwa, Jakarta Selatan menjadi pengumpulan sampah B3 rumah tangga tertinggi (25.511). Posisi selanjutnya terdapat pada Jakarta Barat (25.041), Jakarta Timur (15.380), Jakarta Utara (11.811), Jakarta Pusat (9.346), dan Kepulauan Seribu (7.193). pada sisi lain, tahun 2025 menunjukkan penurunan di setiap wilayah. Secara lebih rinci, Jakarta Barat (8.861), Jakarta Timur (8.798), Jakarta Utara (6.501), Jakarta Selatan (5.762), Jakarta Pusat (3.575), dan Kepulauan Seribu (3.187). Apabila dibandingkan pada kedua tahun tersebut, seluruh wilayah mengalami penurunan mengenai jumlah pengumpulan sampah B3 pada 2025. Penurunan paling signifikan terdapat pada Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.



Jumlah Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) berperan penting dalam sistem pengelolaan sampah di perkotaan. TPS yang tersedia di setiap wilayah administrasi menggambarkan kesiapan infrastruktur dasar untuk menampung sampah sebelum dilakukan pengangkutan ke tempat pengolahan atau pembuangan akhir. Sehingga dengan demikian, analisis mengenai jumlah TPS pada kota/ kabupaten di DKI Jakarta periode 2022–2024 diperlukan guna mengetahui pola distribusi serta perkembangan setiap tahun.

Gambar 4.50. Jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) di DKI Jakarta 2022-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2022	139	262	198	197	368	12
2023	137	259	197	188	345	11
2024	139	261	198	189	351	11

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Data pada 2022 hingga 2024 di atas memperlihatkan bahwa, jumlah TPS di DKI Jakarta cenderung stabil meski mengalami sedikit fluktuasi yang ada pada beberapa wilayah. Adapun perkembangan jumlah keseluruhan TPS di DKI Jakarta adalah 1176 unit pada tahun 2022, lalu menurun pada tahun 2023 menjadi 1137 unit dan meningkat tipis kembali pada 2024 menjadi 1149 unit. Selama tiga tahun berturut-turut, jumlah TPS di Jakarta Timur adalah yang paling tertinggi atau yang paling mendominasi, yaitu 368 unit pada tahun 2022, 345 unit pada tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 351 unit pada tahun 2024. Pada sisi lain, selama tiga tahun berturu-turut juga Kepulauan Seribu mempunyai jumlah TPS yang paling sedikit, yaitu 12 unit pada tahun 2022 dan 11 unit pada tahun 2023 dan 2024. Berdasarkan pada uraian tersebut bahwa, wilayah yang memiliki kepadatan serta aktivitas penduduk yang tinggi seperti Jakarta Timur dan Jakarta Utara mempunyai keberadaan TPS yang jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan wilayah lain. Pembahasan sebelumnya telah dilakukan analisis mengenai distribusi jumlah TPS yang didasarkan pada wilayah administrasi. Secara lebih lanjut akan dilakukan pembahasan yang berfokus pada klasifikasi atau tipe TPS di DKI Jakarta. Analisis tersebut membantu untuk melengkapi gambaran sebelumnya dengan menunjukkan komposisi jenis TPS yang tersedia. Maka dengan demikian, tidak hanya diketahui persebarannya, melainkan turut diketahui karakteristik fasilitas penampungan sampah yang digunakan pada 2022-2024.

Gambar 4.51. Jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) menurut Jenis Tipe di DKI Jakarta 2022-2024



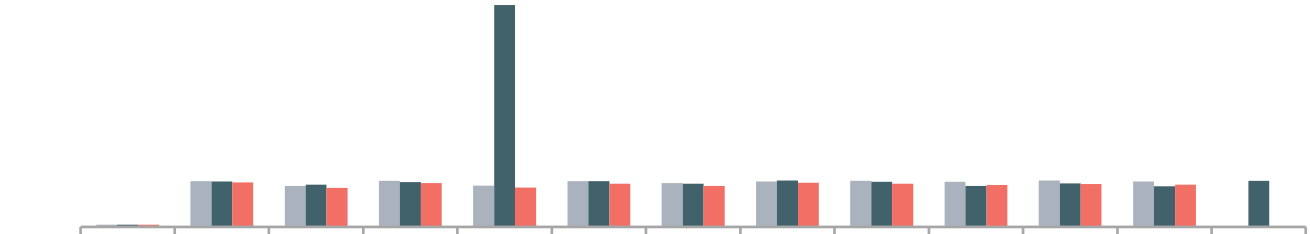
	Tipe 1	Tipe 2	Tipe 3	Tipe 4	TPS 3R
2022	82	264	22	772	36
2023	117	252	22	746	0
2024	117	252	22	746	12

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan pada gambar di atas, TPS dengan tipe 4 menjadi paling dominan jumlahnya selama 2022-2024, yaitu pada 772 unit (2022), 746 unit pada 2023 2024. Selanjutnya terdapat Tipe 2 dengan 264 unit (2022), jumlah tersebut turun menjadi 252 unit pada 2023 dan 2024. Pada tipe 1 menunjukkan peningkatan dari 82 unit (2022) menjadi 117 unit pada 2023 2024. Pada sisi lain, Tipe 3 menunjukkan angka yang stabil yaitu sebanyak 22 unit dari 2022-2024. TPS 3R mengalami penurunan jumlah yang signifikan, yaitu dari 36 unit (2022) menjadi 0 unit pada 2023 dan menjadi 12 unit pada 2024. Berdasarkan data tersebut, komposisi mengenai TPS di DKI Jakarta didominasi oleh Tipe 4.

Jumlah timbulan sampah yang masuk ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang merupakan indikator utama guna mengetahui terkait beban pengelolaan sampah DKI Jakarta. Volume sampah yang dilakukan penimbangan setiap bulan menggambarkan tingkat produksi sampah pada masyarakat yang disertai efektivitas sistem pengangkutan dan pengelolaan. Maka dengan ini, data hasil penimbangan sampah yang didasarkan menurut ritasi (jumlah perjalanan angkutan sampah) pada 2023-2025 menjadi hal penting. Secara lebih lanjut, hal tersebut dilakukan dianalisis guna mengetahui pola fluktuasi serta kecenderungan volume sampah dari waktu ke waktu.

Gambar 4.52. Jumlah Hasil Penimbangan Sampah Masuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang menurut Ritasi Tahun 2023-2025



Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2023	40.476	36.195	40.761	36.456	40.411	38.793	40.312	40.779	39.813	41.076	40.095	-
2024	40.331	37.334	39.563	216.396	40.540	38.175	41.106	39.838	36.241	38.459	36.049	40.713
2025	39.306	34.482	38.683	34.936	38.291	36.293	39.025	38.168	36.992	37.939	37.456	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

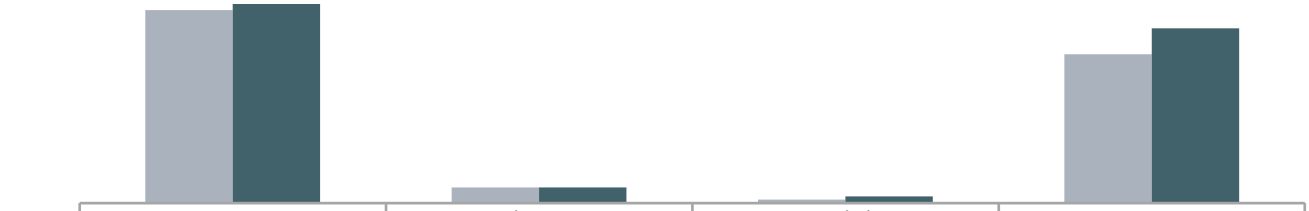
Data yang disajikan di atas memperlihatkan bahwa, sejak 2023 jumlah hasil penimbangan sampah relatif stabil yang berada pada kisaran 38-41 ribu ton per bulan. Namun pada tahun 2023 terlihat tidak terdapat catatan pada bulan Desember. Pada tahun berikutnya yakni tahun 2024 memperlihatkan pola yang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, penimbangan sampah berada pada kisaran 35-40 ribu ton per bulan. Pada tahun 2024 hasil penimbangan sampah tidak mencapai angka 41.000 ton. Sementara itu, pada data paling terbaru yaitu tahun 2025 memperlihatkan adanya kecenderungan yang sedikit lebih rendah apabila dibandingkan pada dua tahun sebelumnya. Dari bulan Januari hingga Desember, angka penimbangan sampah hanya dibawah 40.000 ton. Adapun hasil penimbangan tertinggi ada di awal tahun yaitu bulan Januari sebesar 39.306 ton. Sedangkan, hasil penimbangan terendah ada di bulan berikutnya yaitu bulan Februari hanya 334.482 ton. Akhir tahun 2025 yakni bulan Desember belum memperlihatkan adanya catatan mengenai jumlah hasil penimbangan sampah. Penjelasan di atas secara umum menggambarkan bahwa, volume sampah yang masuk ke TPST

Bantargebang pada 2023 hingga 2025 cenderung stabil. Meski dengan demikian terdapat fluktuasi bulanan yang menunjukkan tidak terlalu signifikan. Tercatat bahwa pada 2025 terdapat kecenderungan yang sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024. Hal tersebut dapat mengindikasikan adanya perubahan pola produksi sampah atau peningkatan dalam pengurangan sampah pada sumbernya.

4.5.2. Kualitas Udara

Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas tinggi sehingga memiliki tantangan besar dalam melakukan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Upaya dalam penurunan emisi menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Sehingga dengan demikian, diperlukan adanya pemantauan capaian penurunan emisi secara berkala guna mengetahui efektivitas program yang sedang berjalan. Berikut terdapat data mengenai penurunan emisi GRK di DKI Jakarta pada 2022-2023 guna sebagai dasar dalam memahami perkembangan kinerja mitigasi di berbagai sektor.

Gambar 4.53. Data Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca



	Energi	Kehutanan	Limbah	Transportasi
2022	60,30%	4,89%	1,04%	46,46%
2023	62,21%	4,89%	2,10%	54,53%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data tahun 2022-2023 di atas menunjukkan sektor energi mencapai penurunan emisi GRK dari 60,30% pada 2022 menjadi 62,21% pada 2023. Terjadinya kenaikan tersebut menandakan adanya pengurangan yang konsisten. Pada sisi lain, sektor transportasi turut mengalami peningkatan signifikan dari 46,46% pada 2022 menjadi 54,53% pada 2023. Angka tersebut menunjukkan dampak positif dari upaya perbaikan transportasi publik. Pada sektor limbah, peningkatan penurunan emisi menunjukkan angka yang relatif lebih kecil yaitu 1,04% pada 2022 menjadi 2,10% pada 2023. Hal tersebut menggambarkan peningkatan pengelolaan sampah. Sementara itu, sektor kehutanan menunjukkan nilai yang stabil pada 4,89% selama 2022 dan 2023. Angka tersebut menunjukkan kondisi tutupan vegetasi dan upaya rehabilitasi lahan yang cenderung konsisten tanpa perubahan signifikan. Secara lebih lanjut, data capaian menunjukkan dinamika mitigasi emisi GRK di Jakarta yang terus mengalami perkembangan dengan variasi kontribusi antar sektor.

4.5.3. Kualitas Air dan Keanekaragaman Hayati

Kualitas air laut menjadi indikator penting dalam memberikan penilaian terhadap kondisi lingkungan pesisir dan perairan sekitar. Setiap lokasi baik muara, pulau, maupun teluk memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memengaruhi tingkat pencemaran dan kondisi perairannya. Data kualitas air laut tahun 2024 menggambarkan mengenai sebaran kondisi permukaan air laut berdasarkan kategori

kualitas, mulai dari kondisi baik, tercemar ringan dan tercemar sedang. Adanya informasi tersebut menjadi dasar guna mengetahui bagaimana tingkat pencemaran pada berbagai jenis lokasi pesisir. Melihat perbandingan antar kategori, dapat diketahui lokasi mana yang relatif lebih bersih serta wilayah yang membutuhkan perhatian lebih mengenai pengelolaan lingkungan laut.

Gambar 4.54. Data Kualitas Air Teluk dan Laut Berdasarkan Jenis Lokasi dan Kondisi Permukaan Air Laut Tahun 2024

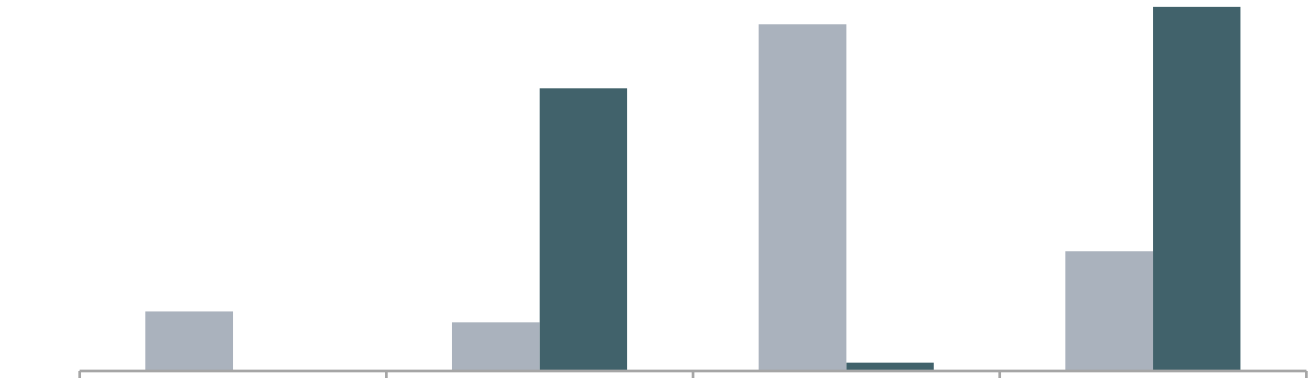


	Baik	Cemar sedang	Tercemar ringan
Muara	92	1.564	368
Pulau	644	-	92
Teluk	1.288	-	828

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Pada 2024, kualitas air laut di DKI Jakarta menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan berdasarkan jenis lokasi, berupa muara, pulau, dan teluk. Pada kategori kondisi baik, wilayah teluk menjadi lokasi dengan jumlah terbesar yaitu 1.288 dan disusul pulau sebanyak 644 serta muara yang mencapai 92. Pada kategori cemar sedang, pencemaran hanya tercatat di muara yaitu sebesar 1.564 sedangkan pada wilayah pulau dan teluk tidak memiliki catatan. Perlu diketahui, untuk mengukur kondisi baik, tercemar ringan, sedang, dan berat diperlukan beberapa parameter. Parameter yang sama belum tentu menghasilkan kondisi yang sama. Ada pun penentuan kondisi final tergantung hasil pengukuran. Sementara itu, pada kategori tercemar ringan, wilayah teluk menunjukkan catatan jumlah paling besar yaitu 828, muara sebanyak 368, dan pulau sebanyak 92. Berdasarkan uraian mengenai data di atas, wilayah teluk dan pulau lebih banyak berada pada kondisi baik. Namun meski dengan demikian, teluk masih memiliki jumlah tercemar ringan yang cukup besar. Sementara itu, muara menjadi lokasi dengan kerentanan yang tinggi mengenai penurunan kualitas air karena dominasi pencemaran berada pada tingkat cemar sedang serta tercemar ringan. Maka dengan demikian, wilayah ini perlu menjadi prioritas dalam pengendalian sumber pencemar dari daratan maupun aliran sungai. Kualitas air laut menjadi indikator penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir serta mendukung aktivitas masyarakat di wilayah perairan DKI Jakarta. Perubahan kondisi permukaan air laut dari tahun ke tahun dapat memberikan cerminan efektivitas pengendalian pencemaran sekaligus menunjukkan area yang masih membutuhkan perhatian lebih. Maka dengan demikian, data terkait kualitas air teluk dan laut tahun 2023 dan 2024 di bawah ini berguna dalam memberikan gambaran perbandingan kondisi perairan sesuai kategori tercemar berat, tercemar sedang, tercemar ringan, dan baik. Secara lebih lanjut, evaluasi serta perumusan langkah perbaikan dapat dilakukan.

Gambar 4.55. Kualitas Air Teluk dan Laut Berdasarkan Kondisi Permukaan Air Laut Tahun 2023-204



	Tercemar Berat	Tercemar Sedang	Tercemar Ringan	Baik
2023	330	270	1.918	662
2024	-	1.564	46	2.024

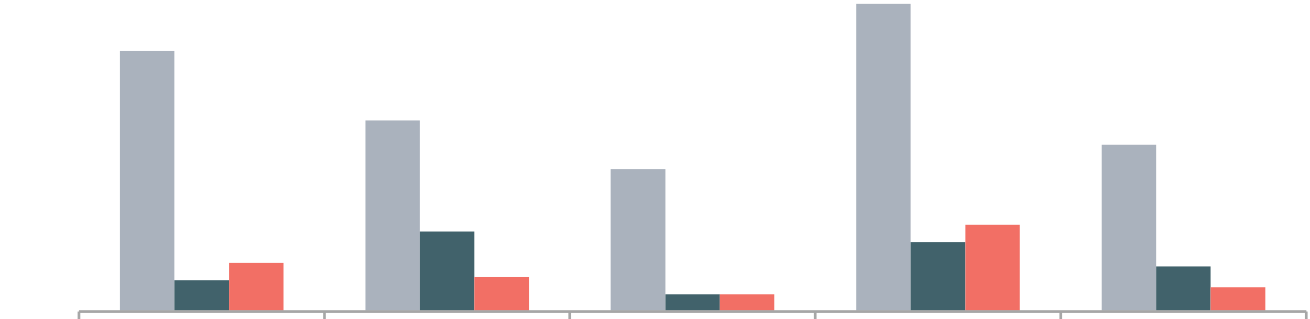
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Data di atas memperlihatkan pada 2023, kondisi permukaan air laut terbagi ke dalam empat kategori. Sebanyak 330 titik tercemar berat, sedangkan 270 titik berada pada kategori tercemar sedang. Sementara itu, terdapat 1.918 titik dengan kategori tercemar ringan. Kategori air baik tercatat sebanyak 662 titik. Berdasarkan uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa, pada kategori tercemar ringan menjadi kelompok dengan jumlah tertinggi dan data mengenai kategori air baik menunjukkan sebagian wilayah perairan masih memiliki kualitas yang terjaga pada tahun tersebut.

Pada 2024, terjadi perubahan mengenai distribusi kategori. Kategori tercemar berat tidak lagi menunjukkan catatan, sementara itu kategori tercemar sedang menunjukkan peningkatan yang signifikan menjadi 1.564 titik. Selanjutnya pada kategori tercemar ringan, jumlahnya menurun drastis menjadi 46 titik. Sebaliknya, kondisi air baik mengalami peningkatan yang sangat besar, yaitu mencapai 2.024 titik. Catatan tersebut menggambarkan adanya perbaikan kualitas laut di sebagian besar wilayah pengamatan.

Secara lebih lanjut, perbandingan antar tahun memperlihatkan pergeseran dari pencemaran ringan menuju peningkatan titik pada kategori baik. Meski dengan demikian, kategori tercemar sedang masih muncul cukup dominan pada tahun 2024. Data di atas menjadi penting untuk dijadikan pemantauan lanjutan mengenai kualitas ekosistem laut dan efektivitas pengelolaan lingkungan perairan. Penegakan hukum lingkungan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di wilayah perkotaan. Upaya tersebut dilakukan melalui pengawasan, penindakan terhadap pelanggaran, dan penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap wilayah di DKI Jakarta mempunyai karakteristik serta tantangan lingkungan yang berbeda. Maka dengan demikian, jumlah mengenai tindakan penegakan hukum dapat bervariasi setiap tahun. Berikut terdapat data yang menyajikan jumlah penegakan hukum lingkungan menurut wilayah administrasi di DKI Jakarta pada 2022 hingga 2024. Melalui data di bawah ini, dapat tergambarkan mengenai aktivitas penegakan hukum dilakukan dan bagaimana perubahan tiap tahun pada masing-masing wilayah.

Gambar 4.56. Jumlah Penegakan Hukum Lingkungan menurut Wilayah DKI Jakarta Tahun 2022-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2022	75	55	41	101	48
2023	9	23	5	20	13
2024	14	10	5	25	7

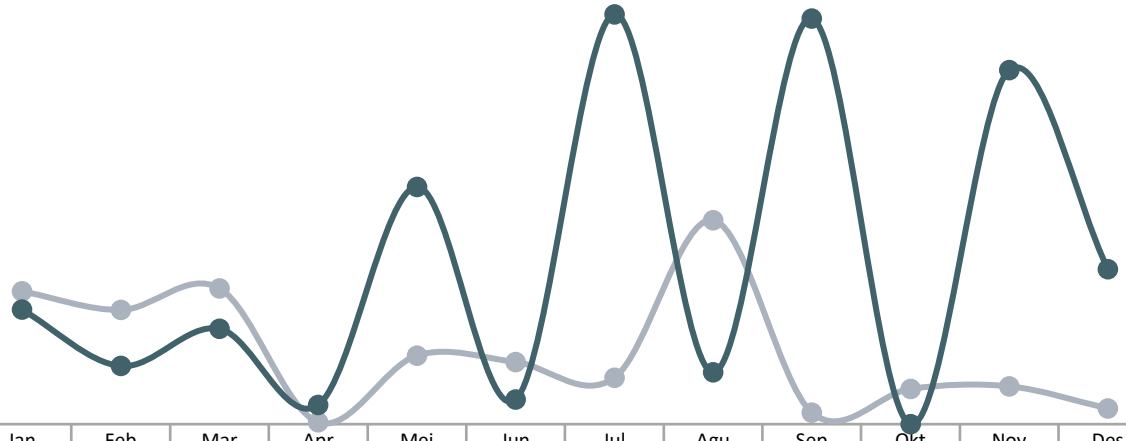
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Data mengenai jumlah penegakan hukum lingkungan di atas memperlihatkan bahwa, pada 2022 jumlah penegakan hukum lingkungan tertinggi berada di Jakarta Selatan dengan 101 kasus. Posisi berikutnya ditempati Jakarta Pusat dengan 75 kasus, Jakarta Utara dengan 55 kasus, Jakarta Timur dengan 48 kasus, dan Jakarta Barat menjadi wilayah dengan kasus paling sedikit yaitu 41 kasus. Pada tahun berikutnya, Jakarta Utara menempati posisi paling tinggi yaitu 23 kasus, kemudian di susul Jakarta Selatan dengan 20 kasus, dan Jakarta Timur dengan 13 kasus. Pada sisi lain, terdapat wilayah dengan penegakan hukum lingkungan yang jauh lebih rendah, yaitu pada Jakarta Pusat dengan 9 kasus dan Jakarta Barat dengan 5 kasus. Selanjutnya pada 2024, terjadi variasi angka penegakan hukum lingkungan terutama di setiap wilayah. Jakarta Selatan kembali menjadi wilayah dengan penegakan hukum lingkungan tertinggi dengan 25 kasus. Selanjutnya terdapat Jakarta Pusat dengan 14 kasus, Jakarta Utara dengan 10 kasus, Jakarta Timur dengan 7 kasus, dan Jakarta Barat dengan 5 kasus.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, penegakan hukum lingkungan di wilayah DKI Jakarta mengalami perubahan dari 2022-2024. Terjadi penurunan signifikan pada 2023 di seluruh wilayah apabila dibandingkan dengan 2022. Memasuki tahun 2024, jumlah penegakan hukum kembali mengalami peningkatan meski belum mencapai tingkat pada tahun 2022. Jakarta Selatan tetap berada pada wilayah dengan jumlah penegakan hukum tertinggi, sementara itu Jakarta Barat dan Jakarta Timur cenderung berada pada tingkat yang lebih rendah serta relatif stabil. Maka dengan demikian, pola ini menggambarkan adanya fluktuasi dalam penegakan hukum lingkungan antarwilayah.

Upaya mengenai konservasi fauna di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melakukan pemantauan jumlah penambahan fauna yang berhasil dikonservasi setiap bulannya. Pemantauan ini penting guna melihat dinamika peningkatan populasi fauna yang mendapatkan perlindungan di berbagai fasilitas konservasi. Secara lebih lanjut data berikut menyajikan penambahan jumlah fauna yang dikonservasi di DKI Jakarta pada 2023 dan 2024 berdasarkan bulan. Melalui data tersebut, tergambarkan pola fluktuasi jumlah fauna yang berhasil ditambahkan ke dalam sistem konservasi.

Gambar 4.57. Jumlah Penambahan Jumlah Fauna yang Dikonservasi menurut Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2023	123.150	105.900	125.810	1.810	63.700	57.640	43.200	189.090	10.880	32.840	35.145	14.650
2024	106.240	54.009	88.580	18.030	220.000	23.040	379.800	48.160	375.780	-	328.050	143.680

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan grafik mengenai jumlah penambahan fauna yang dikonservasi menurut bulan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2024, menunjukkan adanya perbedaan pola antara kedua tahun. Pada 2023, penambahan fauna relatif stabil pada awal tahun. Selanjutnya pada 2024 tercatat penambahan fauna yang menunjukkan fluktuasi jauh lebih tinggi. Pada awal tahun tercatat terdapat 106.240 ekor. Namun terjadi penurunan dari bulan Februari hingga April. Berdasarkan data, lonjakan kembali terlihat pada Mei. Adapun jumlah penambahan fauna yang tertinggi adalah pada bulan Juli sebesar 379.800 ekor dan yang terendah adalah bulan April hanya 18.030 ekor. Sedangkan, bulan Oktober tidak menunjukkan catatan penambahan.

Berdasarkan uraian data di atas, upaya mengenai konservasi fauna di Provinsi DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan intensitas yang jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2023 menampilkan pola yang lebih stabil dan konsisten, sementara itu pada 2024 ditandai dengan lonjakan besar pada bulan tertentu. Hal tersebut secara lebih lanjut mengindikasikan bahwa, program konservasi pada 2024 dilaksanakan dengan lebih terarah. Hal tersebut berbeda dengan 2023 yang terlihat dilakukan secara tertata sepanjang tahun.




ZOO



05

Kesejahteraan Rakyat



>30.000
Guru tersertifikasi

>94.000
guru profesional



3.825
Sekolah Terakreditasi A!

SIAP MEMAJUKAN PENDIDIKAN JAKARTA!



13,31
Rata-rata Harapan Lama Sekolah



>300 Layanan Kesehatan

Sesuai Standar!



>7.000
Fasilitas Kesehatan



>40%
sarana kefarmasian sesuai standar



>59.000
tenaga kesehatan kompeten

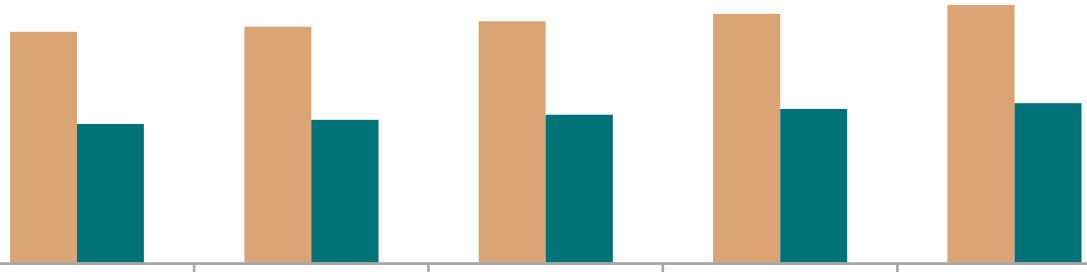
FASKES LENGKAP, KESEHATAN TERLINDUNGI



5.1. Pengeluaran per Kapita

Secara sederhana, pengeluaran per kapita memiliki arti sebagai biaya konsumsi yang dikeluarkan sebuah rumah tangga selama sebulan dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Anggota rumah tangga di sini mengacu pada beberapa orang yang mendiami sebuah bangunan fisik dan tinggal Bersama. Dengan kata lain, semakin tinggi pengeluaran per kapita seseorang, maka semakin tinggi pula akses seseorang tersebut terhadap layanan dan fasilitas dalam ekonomi dan sosial. Misalnya, memiliki pilihan yang lebih banyak dan beragam dalam hal kesehatan dan pendidikan.

Gambar 5.1. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) di DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2020-2025

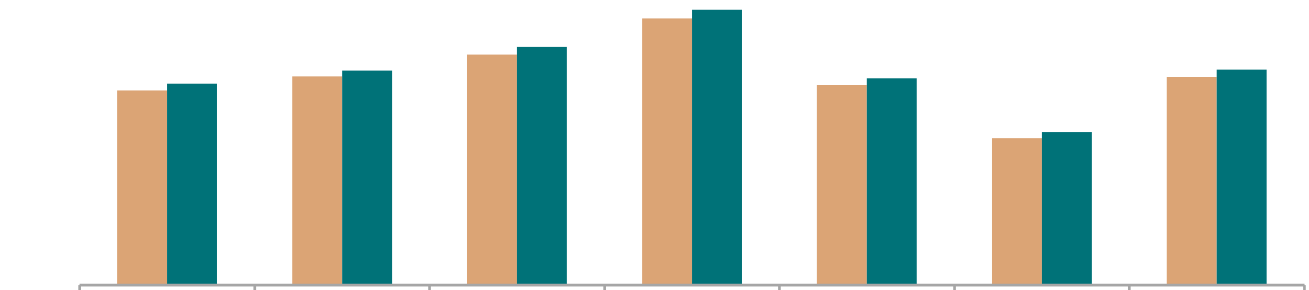


	2021	2022	2023	2024	2025
DKI Jakarta	18.520	18.927	19.373	19.953	20.676
Nasional	11.156	11.479	11.899	12.341	12.802

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pengeluaran per kapita Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,65% dari tahun 2022. Dari yang awalnya berjumlah Rp18.927.000,00 menjadi Rp19.373.000,00. Jika dijabarkan menjadi per bulan, total pengeluaran per kapita Jakarta adalah sebanyak Rp1.614.416,00. Kemudian jika dibandingkan dengan nasional, pengeluaran per kapita Jakarta unggul jauh dengan selisih sebesar Rp7.474.000,00.

Gambar 5.2. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) menurut Kota/Kabupaten di DKI Jakarta 2024-2025



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta
2024	18.661	20.032	22.119	25.573	19.193	14.110	19.953
2025	19.309	20.584	22.831	26.387	19.824	14.691	20.676

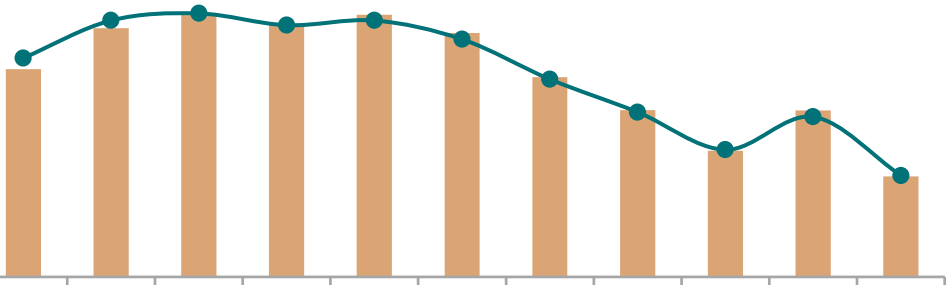
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Jika dilihat berdasarkan wilayah, pengeluaran per kapita tertinggi berada di wilayah Jakarta Selatan dengan Rp.26.387.000,00 atau sebanyak Rp2.081.250,00 per bulan. Angka ini naik sebesar 3,11% dari tahun sebelumnya. Kemudian, pengeluaran per kapita terkecil berada di wilayah Kepulauan Seribu dengan Rp1.126.916,00 per bulan. Jika disimpulkan, kenaikan pengeluaran per kapita DKI Jakarta mengindikasikan bahwa ekonomi masyarakat semakin membaik. Bahkan perbaikan ini terus terjadi sejak tahun 2020. Selain itu pengeluaran per kapita DKI Jakarta juga menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

5.2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan di berbagai negara dan daerah, karena dampaknya yang luas terhadap stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia. Tingginya tingkat kemiskinan dapat menghambat proses pembangunan secara keseluruhan, memperbesar ketimpangan, serta melemahkan daya saing suatu wilayah. Selain itu, kemiskinan juga meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap krisis, baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan, sehingga berpotensi menimbulkan masalah lanjutan yang lebih kompleks.

Gambar 5.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Tahun 2020-Maret 2025



	Mar 2020	Sep 2020	Mar 2021	Sep 2021	Mar 2022	Sep 2022	Mar 2023	Mar 2024	Sep 2024	Mar 2025	Sep 2025
Penduduk Miskin (Ribu Orang)	480,86	496,84	501,92	498,29	502,04	494,93	477,83	464,93	449,07	464,87	439,12
Persentase Penduduk Miskin	4,53	4,69	4,72	4,67	4,69	4,61	4,44	4,30	4,14	4,28	4,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta sepanjang periode Maret 2020 hingga Maret 2025 menunjukkan dinamika fluktuatif yang cenderung membaik pasca-pandemi, meskipun kembali menghadapi tekanan pada awal tahun 2025. Data statistik mencatat bahwa setelah berhasil menekan angka kemiskinan ke titik terendah pada September 2024 dengan jumlah 449,07 ribu orang atau 4,14%, jumlah penduduk miskin kembali mengalami kenaikan pada Maret 2025 menjadi 464,87 ribu orang atau setara dengan 4,28%. Kenaikan ini merepresentasikan penambahan jumlah penduduk miskin sebesar 3,52% dibandingkan semester sebelumnya, namun jika disandingkan secara tahunan *(year-on-year)* dengan posisi Maret 2024 yang tercatat sebesar 464,93 ribu orang, kondisi kemiskinan pada Maret 2025 relatif stagnan dengan penurunan jumlah yang sangat tipis sebesar 0,01%, yang mengindikasikan adanya tantangan stabilitas ekonomi pada peralihan tahun meskipun tren jangka panjang sejak puncak pandemi tahun 2021 masih memperlihatkan pola pemulihan.

Gambar 5.4. Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) di DKI Jakarta Tahun 2020-Maret 2025

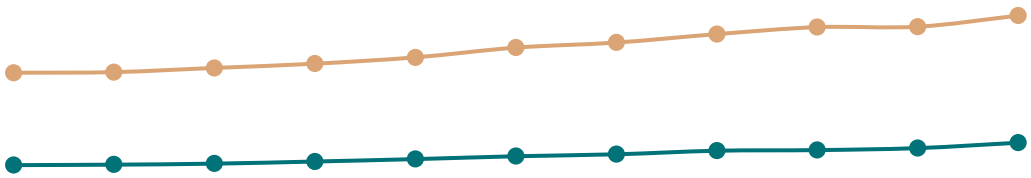


	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Mar	Sep	Mar	Sep
	2020		2021		2022		2023	2024		2025	
Garis Kemiskinan	680.401	683.339	697.638	715.052	738.955	773.370	792.515	825.288	846.085	852.768	897.768

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Perkembangan nilai Garis Kemiskinan (GK) di Provinsi DKI Jakarta sepanjang periode Maret 2020 hingga Maret 2025 menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dan berkesinambungan. Hal ini mencerminkan peningkatan standar biaya hidup minimum masyarakat dari waktu ke waktu. GK bergerak naik secara signifikan dari Rp680.401 per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi Rp852.768 pada Maret 2025, yang mencerminkan akumulasi pertumbuhan sebesar 25,33% dalam kurun waktu lima tahun. Tren kenaikan ini juga terlihat dalam jangka pendek secara tahunan *(year-on-year)*, di mana nilai GK pada Maret 2025 mengalami peningkatan sebesar 3,33% dibandingkan posisi Maret 2024 yang tercatat sebesar Rp825.288, serta tumbuh tipis sebesar 0,79% jika dibandingkan dengan survei semester sebelumnya pada September 2024 yang berada di angka Rp846.085.

Gambar 5.5. Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan (Rupiah/Kapita/Bulan) di DKI Jakarta Tahun 2020-Maret 2025

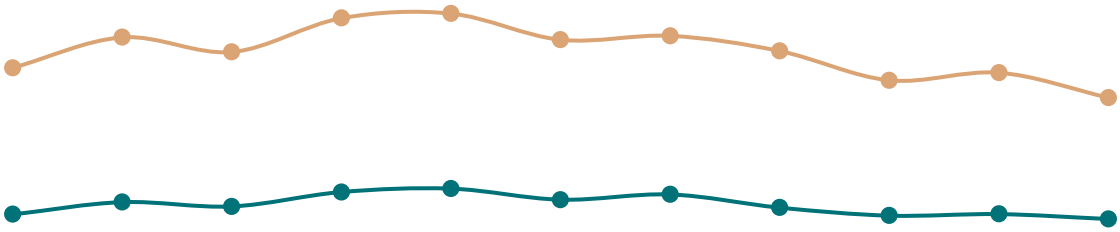


	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Mar	Sep	Mar	Sep
	2020		2021		2022		2023	2024		2025	
Makanan	466.156	467.847	479.332	490.918	508.239	534.819	548.628	571.647	590.704	591.933	622.175
Non Makanan	214.245	215.491	218.306	224.134	230.716	238.551	243.887	253.641	255.381	260.835	275.593

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada Maret 2025, nilai Garis Kemiskinan Makanan (GKM) mencapai Rp591.933 per kapita per bulan, yang secara proporsional mencakup 69,41% dari total garis kemiskinan, jauh melampaui Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang tercatat sebesar Rp260.835 atau berkontribusi 30,59%. GKM pada Maret 2025 mengalami kenaikan sebesar 3,55% dibandingkan posisi Maret 2024 yang sebesar Rp571.647, sedangkan GKNM mencatatkan pertumbuhan yang sedikit lebih rendah sebesar 2,84% dari capaian tahun sebelumnya Rp253.641, yang mengindikasikan bahwa tekanan kenaikan harga kebutuhan pokok pangan masih menjadi faktor dominan dalam pergeseran batas kemiskinan di ibu kota.

Gambar 5.6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di DKI Jakarta Tahun 2020- Maret 2025



	Mar 2020	Sep 2020	Mar 2021	Sep 2021	Mar 2022	Sep 2022	Mar 2023	Mar 2024	Sep 2024	Mar 2025	Sep 2025
	2020		2021		2022		2023	2024		2025	
P1	0,590	0,690	0,642	0,753	0,768	0,682	0,695	0,645	0,549	0,574	0,492
P2	0,110	0,150	0,136	0,183	0,194	0,158	0,175	0,132	0,106	0,111	0,095

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

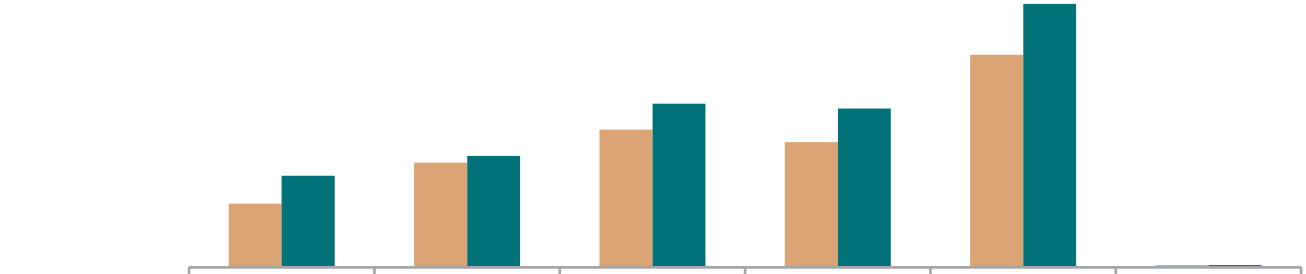
Dinamika kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta pada periode Maret 2020 hingga Maret 2025 tidak hanya ditandai dengan kenaikan Garis Kemiskinan, tetapi juga menunjukkan perbaikan kualitas kemiskinan yang tercermin dari penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan pada akhir periode. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), yang mengukur rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sempat memburuk hingga mencapai titik tertinggi 0,77 pada Maret 2022, namun berhasil ditekan secara konsisten hingga menyentuh angka 0,57 pada Maret 2025. Penurunan P1 sebesar 0,20 poin dari puncaknya mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Pola serupa terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin; setelah mencapai level tertinggi 0,19 pada Maret 2022, indeks ini turun menjadi 0,11 pada Maret 2025. Stabilitas P2 di angka 0,11 selama tiga periode survei terakhir (Sep 2024 - Mar 2025) menunjukkan bahwa ketimpangan di antara penduduk miskin semakin mengecil dan relatif terkendali.

5.3. Pendidikan

5.3.1. Murid, Guru, dan Sekolah

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak penyandang disabilitas. Upaya penyediaan layanan pendidikan yang inklusif dan merata menjadi salah satu fokus penting dalam pembangunan sektor pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Melalui penyelenggaraan pendidikan khusus, pemerintah berupaya memastikan bahwa anak dengan berbagai jenis hambatan dapat memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Partisipasi anak usia 4–18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus menjadi indikator yang dapat menggambarkan tingkat akses dan keterjangkauan layanan pendidikan bagi kelompok tersebut. Selain itu, data partisipasi ini juga memberikan gambaran mengenai distribusi peserta didik pendidikan khusus di berbagai wilayah administrasi di DKI Jakarta. Dengan melihat perkembangan data dari waktu ke waktu, dapat diketahui kecenderungan peningkatan maupun perubahan sebaran partisipasi anak disabilitas dalam pendidikan khusus.

Gambar 5.7. Persentase Jumlah Anak Usia 4-18 Tahun Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Sekolah (APS) di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

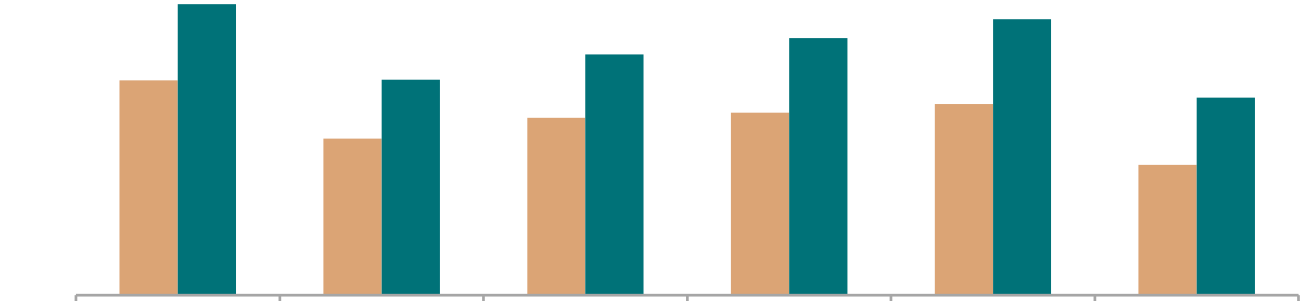


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jumlah Penduduk	2.001	3.284	4.311	3.922	6.650	78
Jumlah Siswa	2.871	3.488	5.121	4.975	9.049	76

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik IndonesiaRepublik Indonesia

Berdasarkan jumlah peserta didik, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 25.580 anak usia 4–18 tahun penyandang disabilitas di DKI Jakarta yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 21.369 anak, atau bertambah sekitar 4.211 anak. Partisipasi terbesar pada tahun 2024 terdapat di Jakarta Timur sebanyak 9.049 anak, diikuti oleh Jakarta Barat 5.121 anak, Jakarta Selatan 4.975 anak, Jakarta Utara 3.488 anak, dan Jakarta Pusat sebanyak 2.871 anak. Sementara itu, jumlah partisipasi paling sedikit terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu yaitu 76 anak, yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang relatif lebih kecil dibandingkan wilayah administrasi lainnya.

Gambar 5.8. Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Sekolah (APS) di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

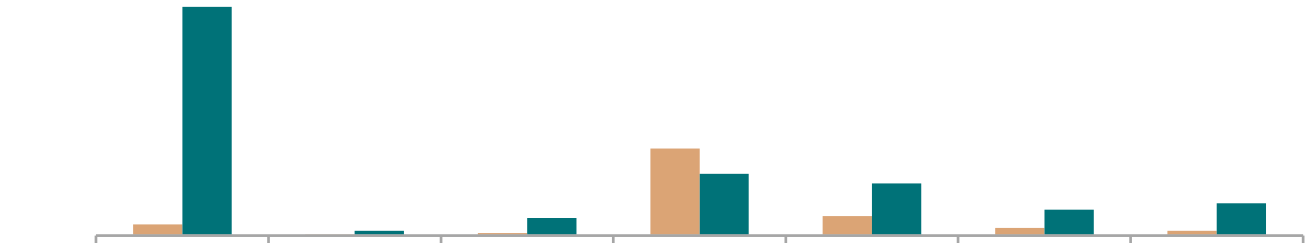


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	105,85	77,12	87,52	90,02	94,30	64,29
2024	143,48	106,21	118,79	126,85	136,08	97,44

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Pada tahun 2024 wilayah Jakarta Pusat juga menunjukkan kontribusi terbesar terhadap total partisipasi pendidikan khusus di DKI Jakarta. Selanjutnya diikuti oleh wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan yang juga memiliki proporsi cukup besar terhadap total jumlah anak disabilitas yang mengikuti pendidikan khusus. Sementara itu, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat memiliki persentase partisipasi yang lebih kecil dibandingkan wilayah lainnya, dan Kabupaten Kepulauan Seribu mencatat persentase paling rendah. Partisipasi pendidikan khusus di DKI Jakarta masih terkonsentrasi pada wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih besar.

Gambar 5.9. Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia di DKI Jakarta Tahun 2024

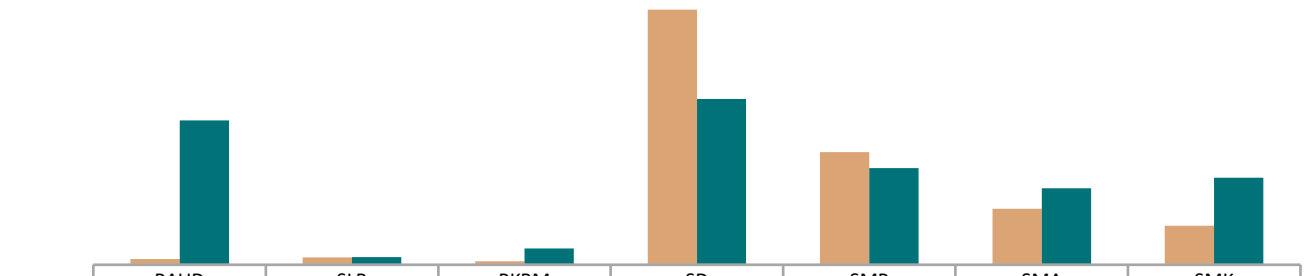


	PAUD	SLB	PKBM	SD	SMP	SMA	SMK
Negeri	167	13	39	1.305	293	117	73
Swasta	3.949	74	263	926	782	390	484

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi DKI Jakarta. Ketersediaan satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan peserta didik mencerminkan kapasitas layanan pendidikan yang disediakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2024, pendidikan yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesiadi DKI Jakarta meliputi berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga pendidikan khusus melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) dan pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Keberadaan berbagai jenjang pendidikan tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang merata serta mendukung proses pembelajaran bagi masyarakat usia sekolah di wilayah DKI Jakarta. Jumlah satuan pendidikan di DKI Jakarta yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia mencapai 6.868 sekolah. Jumlah sekolah terbanyak terdapat pada jenjang PAUD sebanyak 3.949 sekolah, diikuti oleh SD sebanyak 926 sekolah, SMP sebanyak 782 sekolah, SMK sebanyak 484 sekolah, dan SMA sebanyak 390 sekolah. Selain itu, terdapat 74 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menyelenggarakan pendidikan khusus serta 263 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyediakan layanan pendidikan nonformal. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan di DKI Jakarta tersebar pada berbagai jenjang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.

Gambar 5.10. Jumlah Guru di Bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia di DKI Jakarta Tahun 2024

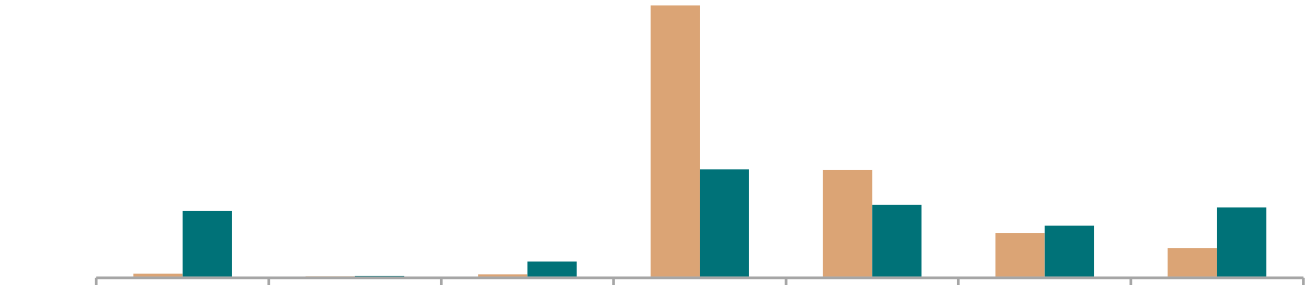


	PAUD	SLB	PKBM	SD	SMP	SMA	SMK
Negeri	480	640	309	22.427	9.900	4.914	3.424
Swasta	12.691	653	1.417	14.564	8.475	6.712	7.638

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Dari sisi tenaga pendidik, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 52.150 guru yang mengajar pada berbagai jenjang pendidikan di DKI Jakarta. Jumlah guru terbesar terdapat pada jenjang SD sebanyak 14.564 guru, diikuti oleh PAUD sebanyak 12.691 guru. Pada jenjang SMP terdapat 8.475 guru, SMK sebanyak 7.638 guru, dan SMA sebanyak 6.712 guru. Sementara itu, pada pendidikan nonformal dan pendidikan khusus terdapat 1.417 guru di PKBM serta 653 guru di SLB. Jumlah tenaga pendidik tersebut menunjukkan peran penting guru dalam mendukung proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan.

Gambar 5.11. Jumlah Murid di Bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia di DKI Jakarta Tahun 2024

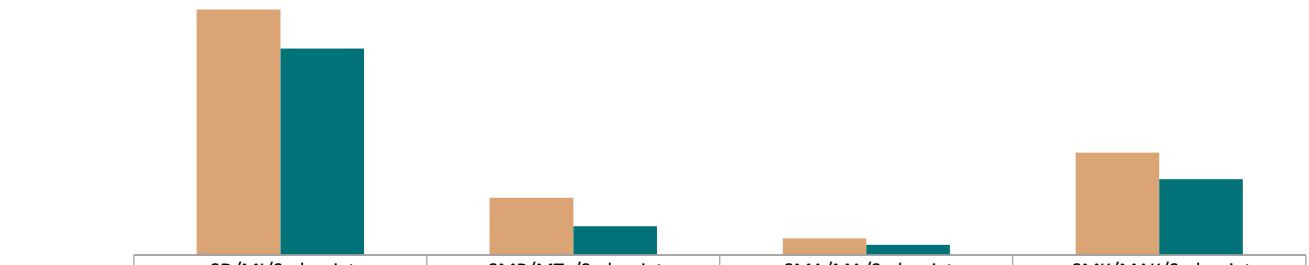


	PAUD	SLB	PKBM	SD	SMP	SMA	SMK
Negeri	7.860	2.796	6.890	533.339	211.413	87.933	58.074
Swasta	131.297	3.496	32.230	212.310	143.038	101.947	137.788

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Jumlah peserta didik dari sekolah swasta pada tahun 2024 mencapai 762.106 murid di berbagai jenjang pendidikan di DKI Jakarta. Peserta didik terbanyak berada pada jenjang SD sebanyak 212.310 siswa, diikuti oleh SMP sebanyak 143.038 siswa, SMK sebanyak 137.788 siswa, dan PAUD sebanyak 131.297 anak. Pada jenjang SMA tercatat sebanyak 101.947 siswa, sementara pendidikan nonformal melalui PKBM diikuti oleh 32.230 peserta didik. Adapun pendidikan khusus melalui SLB melayani 3.496 siswa. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik berada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai bagian utama dari sistem pendidikan formal di DKI Jakarta.

Gambar 5.12. Jumlah Siswa Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di DKI Jakarta Tahun 2024

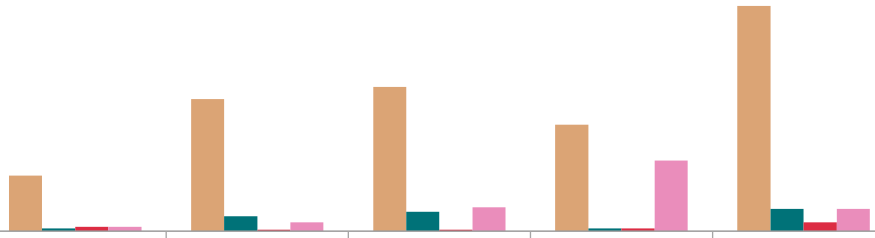


	SD/MI/Sederajat	SMP/MTs/Sederajat	SMA/MA/Sederajat	SMK/MAK/Sederajat
Laki-laki	240	56	16	100
Perempuan	202	28	10	74

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Fenomena putus sekolah masih menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Meskipun akses pendidikan di wilayah ini relatif lebih baik dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia, sebagian siswa masih tidak dapat menyelesaikan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Berdasarkan jenjang pendidikan, jumlah siswa putus sekolah di DKI Jakarta tahun 2024 paling banyak terjadi pada jenjang SD/MI/sederajat yaitu sebanyak 442 siswa, terdiri dari 240 siswa laki-laki dan 202 siswa perempuan. Selanjutnya pada jenjang SMK/MAK/ sederajat tercatat 174 siswa yang putus sekolah, dengan komposisi 100 siswa laki-laki dan 74 siswa perempuan. Pada jenjang SMP/MTs/sederajat, jumlah siswa putus sekolah mencapai 84 siswa, terdiri dari 56 siswa laki-laki dan 28 siswa perempuan. Sementara itu, jumlah paling sedikit terdapat pada jenjang SMA/MA/sederajat yaitu sebanyak 26 siswa, yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kasus putus sekolah di DKI Jakarta masih lebih banyak terjadi pada jenjang pendidikan dasar, yang menjadi tahap awal pendidikan formal.

Gambar 5.13. Jumlah Siswa Putus Sekolah menurut Kota/Kabupaten di DKI Jakarta Tahun 2024

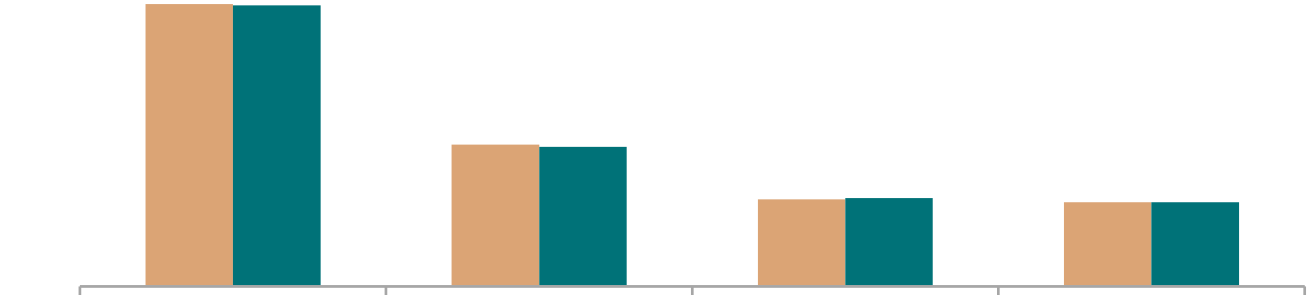


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
SD/MI/Sederajat	37	88	96	71	150	0
SMP/MTs/Sederajat	2	10	13	2	15	0
SMA/MA/Sederajat	3	1	1	2	6	0
SMK/MAK/Sederajat	3	6	16	47	15	0

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Dilihat menurut wilayah kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta, jumlah siswa putus sekolah tahun 2024 menunjukkan perbedaan antarwilayah. Pada jenjang SD/MI/sederajat, jumlah tertinggi terdapat di Jakarta Timur sebanyak 150 siswa, diikuti Jakarta Barat sebanyak 96 siswa, Jakarta Utara sebanyak 88 siswa, Jakarta Selatan sebanyak 71 siswa, dan Jakarta Pusat sebanyak 37 siswa, sedangkan Kepulauan Seribu tidak tercatat siswa putus sekolah pada jenjang ini. Pada jenjang SMP/MTs/sederajat, jumlah terbanyak juga berada di Jakarta Timur, sementara wilayah lainnya mencatat jumlah yang lebih kecil. Untuk jenjang SMA/MA/sederajat, jumlah siswa putus sekolah tertinggi juga tercatat di Jakarta Timur sebanyak 6 siswa. Sementara itu pada jenjang SMK/MAK/sederajat, jumlah terbesar terdapat di Jakarta Selatan yaitu 47 siswa, diikuti Jakarta Barat sebanyak 16 siswa, Jakarta Timur sebanyak 15 siswa, Jakarta Utara sebanyak 6 siswa, dan Jakarta Pusat sebanyak 3 siswa, sedangkan Kepulauan Seribu tidak tercatat kasus putus sekolah pada jenjang ini. Pola ini menunjukkan bahwa wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih besar cenderung memiliki jumlah siswa putus sekolah yang lebih tinggi.

Gambar 5.14. Jumlah Guru Sekolah pada Pendidikan Dasar dan Menengah di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

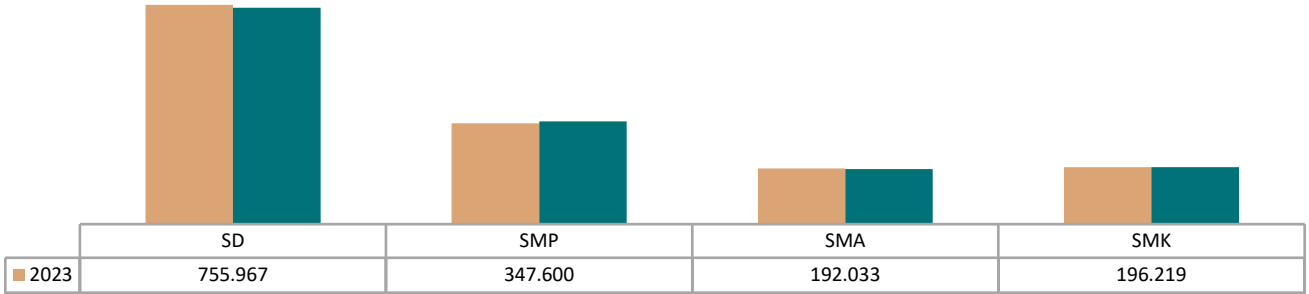


	SD	SMP	SMA	SMK
2023	37.161	18.682	11.482	11.098
2024	36.991	18.375	11.626	11.062

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Ketersediaan guru, jumlah murid, serta rasio guru terhadap murid merupakan indikator penting dalam menggambarkan kondisi layanan pendidikan dasar dan menengah di suatu wilayah. Pada tahun 2024, jumlah guru pada pendidikan dasar dan menengah di DKI Jakarta masih didominasi oleh jenjang Sekolah Dasar (SD). Tercatat sebanyak 36.991 guru SD, sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 37.161 guru. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 18.375 guru pada tahun 2024, juga mengalami penurunan dari 18.682 guru pada tahun 2023. Sementara itu, jumlah guru Sekolah Menengah Atas (SMA) mengalami peningkatan dari 11.482 guru pada tahun 2023 menjadi 11.626 guru pada tahun 2024. Adapun pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tercatat 11.062 guru pada tahun 2024, sedikit berkurang dibandingkan 11.098 guru pada tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga pendidik masih terkonsentrasi pada jenjang pendidikan dasar karena jumlah satuan pendidikan dan peserta didik pada jenjang tersebut relatif lebih besar.

Gambar 5.15. Jumlah Murid Sekolah pada Pendidikan Dasar dan Menengah di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



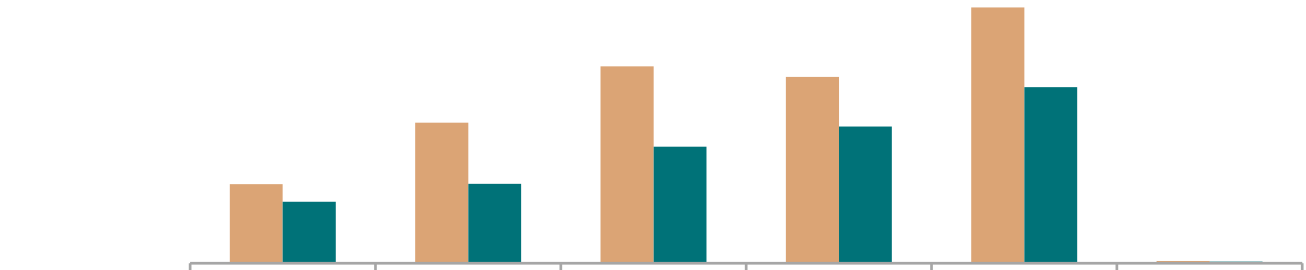
	SD	SMP	SMA	SMK
2023	755.967	347.600	192.033	196.219
2024	745.649	354.451	189.880	195.862

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Jumlah murid pada pendidikan dasar dan menengah di DKI Jakarta pada tahun 2024 juga paling banyak berada pada jenjang SD. Tercatat sebanyak 745.649 murid SD pada tahun 2024, sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 755.967 murid. Pada jenjang SMP, jumlah murid meningkat dari 347.600 murid pada tahun 2023 menjadi 354.451 murid pada tahun 2024. Sementara itu, pada jenjang SMA jumlah murid mengalami

sedikit penurunan dari 192.033 murid pada tahun 2023 menjadi 189.880 murid pada tahun 2024. Hal yang sama terjadi pada jenjang SMK, di mana jumlah murid berkurang dari 196.219 murid pada tahun 2023 menjadi 195.862 murid pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur peserta didik di DKI Jakarta masih didominasi oleh jenjang pendidikan dasar, sedangkan pada jenjang menengah jumlahnya relatif lebih kecil.

Gambar 5.16. Jumlah Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Sekolah (APS) di DKI Jakarta 2024

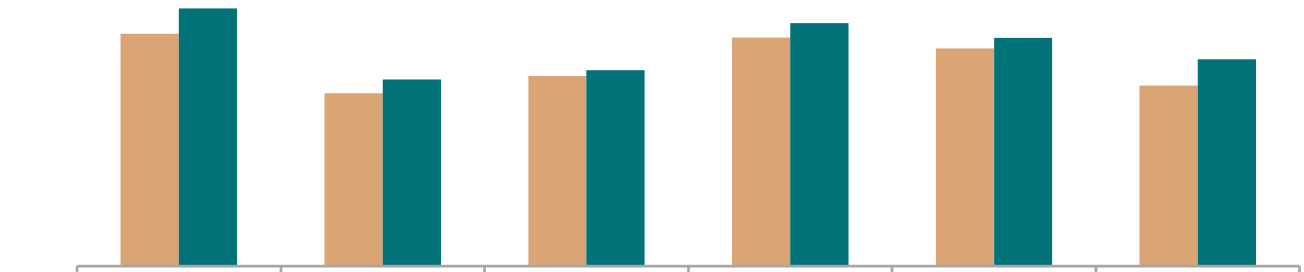


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jumlah Penduduk	47.801	84.807	118.844	112.489	154.288	1.454
Jumlah Siswa	37.170	47.804	70.260	82.444	106.309	907

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Partisipasi pendidikan pada jenjang menengah merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk usia sekolah melanjutkan pendidikan setelah jenjang dasar. Di Provinsi DKI Jakarta, tingkat keterlibatan penduduk usia 16–18 tahun dalam pendidikan menengah dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS). Pada tahun 2024, jumlah anak usia 16–18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebanyak 344.894 siswa. Partisipasi terbesar berasal dari Jakarta Timur dengan 106.309 siswa, diikuti Jakarta Selatan sebanyak 82.444 siswa, serta Jakarta Barat sebanyak 70.260 siswa. Sementara itu, Jakarta Utara mencatat 47.804 siswa dan Jakarta Pusat sebanyak 37.170 siswa. Jumlah partisipasi paling kecil terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu dengan 907 siswa, yang sejalan dengan jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit dibandingkan wilayah administrasi lainnya. Sebaran ini menunjukkan bahwa wilayah dengan jumlah penduduk lebih besar cenderung memiliki jumlah peserta didik usia 16–18 tahun yang lebih tinggi pada jenjang pendidikan menengah.

Gambar 5.17. Persentase Anak Usia 16-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Sekolah (APS) di DKI Jakarta 2023-2024

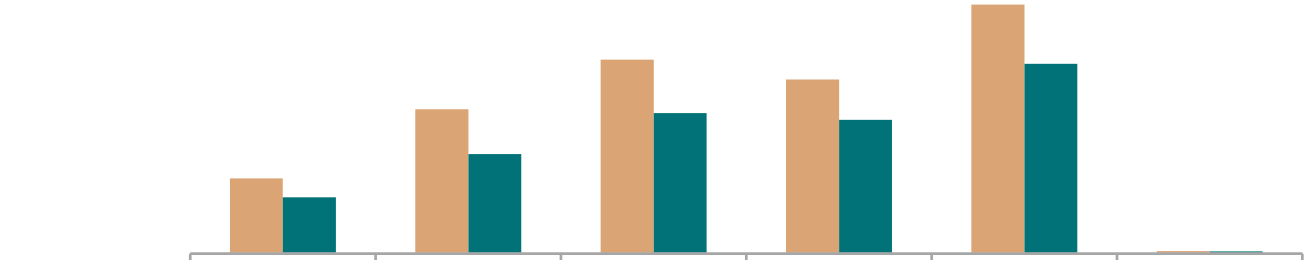


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	70,14	52,13	57,35	68,97	65,70	54,51
2024	77,76	56,37	59,12	73,29	68,90	62,38

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Dilihat dari persentasenya, tingkat partisipasi sekolah usia 16–18 tahun pada tahun 2024 menunjukkan variasi antar wilayah di DKI Jakarta. Jakarta Pusat memiliki APS tertinggi sebesar 77,76 persen, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 70,14 persen. Jakarta Selatan juga menunjukkan partisipasi yang relatif tinggi yaitu 73,29 persen pada 2024, naik dari 68,97 persen pada 2023. Sementara itu, Jakarta Timur meningkat dari 65,70 persen pada 2023 menjadi 68,90 persen pada 2024. Jakarta Barat mengalami peningkatan dari 57,35 persen menjadi 59,12 persen, dan Jakarta Utara dari 52,13 persen menjadi 56,37 persen. Di sisi lain, Kepulauan Seribu mencatat kenaikan cukup signifikan dari 54,51 persen pada 2023 menjadi 62,38 persen pada 2024.

Gambar 5.18. Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Sekolah (APS) di DKI Jakarta 2024



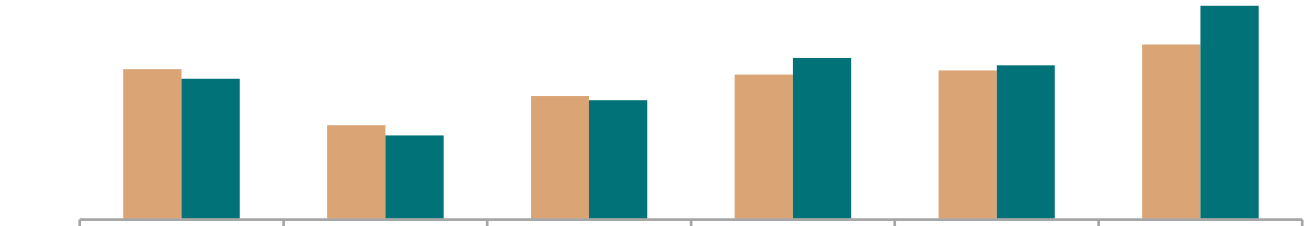
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jumlah Penduduk	148.597	285.119	382.509	343.286	491.446	5.021
Jumlah Siswa	111.135	196.245	277.454	264.217	374.417	4.140

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Partisipasi anak usia sekolah merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana akses pendidikan dasar dapat dijangkau oleh penduduk usia sekolah di suatu wilayah. Di Provinsi DKI Jakarta, pemantauan terhadap anak usia 7–15 tahun yang mengikuti pendidikan menjadi bagian dari evaluasi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar. Pada tahun 2024, jumlah anak usia 7–15 tahun di DKI Jakarta yang berpartisipasi dalam pendidikan tercatat sebanyak 1.227.608 siswa yang tersebar di enam wilayah administrasi. Jumlah terbesar berada di Jakarta Timur dengan 374.417 siswa, diikuti Jakarta Barat sebanyak 277.454 siswa dan Jakarta Selatan sebanyak 264.217 siswa. Sementara itu, Jakarta Utara mencatat 196.245 siswa dan Jakarta Pusat sebanyak 111.135 siswa. Wilayah dengan jumlah partisipasi paling kecil adalah Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu sebanyak 4.140 siswa, yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia sekolah yang relatif lebih sedikit dibandingkan wilayah administratif lainnya. Data ini menunjukkan bahwa wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi cenderung memiliki jumlah peserta didik usia sekolah yang lebih besar, sehingga kebutuhan terhadap layanan pendidikan juga lebih tinggi.



Gambar 5.19. Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Sekolah (APS) di DKI Jakarta 2023-2024

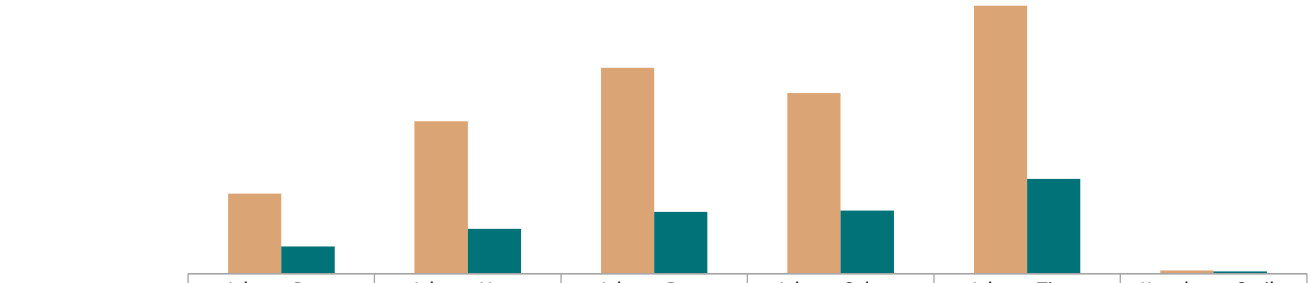


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	75,79	69,92	72,97	75,24	75,65	78,40
2024	74,79	68,83	72,54	76,97	76,19	82,45

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Dilihat dari persentasenya, tingkat partisipasi sekolah anak usia 7–15 tahun di DKI Jakarta secara umum berada pada kisaran yang relatif tinggi pada periode 2023–2024. Rata-rata APS meningkat dari sekitar 74,66 persen pada tahun 2023 menjadi 75,30 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2024, Kepulauan Seribu mencatat persentase tertinggi yaitu 82,45 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 78,40 persen. Sementara itu, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur juga menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi masing-masing sebesar 76,97 persen dan 76,19 persen. Di sisi lain, Jakarta Utara memiliki persentase partisipasi yang relatif lebih rendah yaitu 68,83 persen, sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 69,92 persen. Perubahan ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum partisipasi pendidikan dasar di DKI Jakarta cukup baik, masih terdapat variasi antarwilayah yang mencerminkan perbedaan kondisi demografis, akses pendidikan, dan karakteristik sosial di masing-masing daerah.

Gambar 5.20. Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di DKI Jakarta 2024



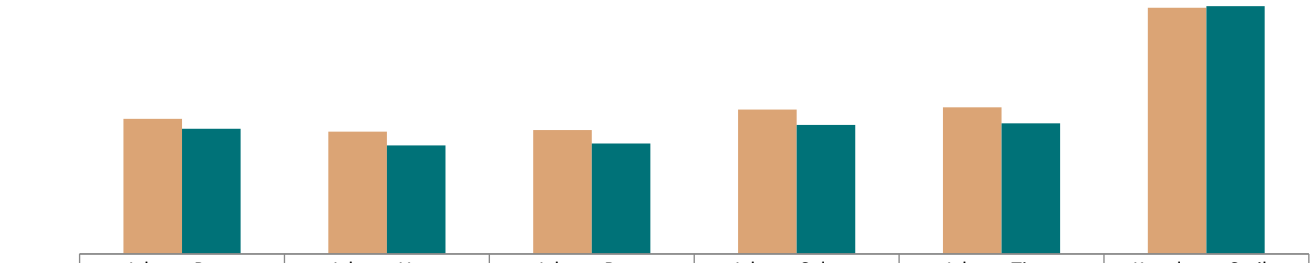
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jumlah Penduduk	32.348	61.670	83.260	72.980	108.334	1.243
Jumlah Siswa	10.995	18.170	24.983	25.545	38.382	836

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Partisipasi anak usia dini dalam pendidikan merupakan indikator penting untuk melihat akses dan keterlibatan masyarakat terhadap layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Di Provinsi DKI Jakarta, partisipasi anak usia 5–6 tahun dalam PAUD menjadi salah satu gambaran kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar. Pada tahun 2024, jumlah anak usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebanyak 118.911 anak yang tersebar di enam wilayah

administrasi. Partisipasi terbesar terdapat di Jakarta Timur dengan 38.382 anak, diikuti oleh Jakarta Selatan sebanyak 25.545 anak dan Jakarta Barat sebanyak 24.983 anak. Sementara itu, Jakarta Utara mencatat 18.170 anak dan Jakarta Pusat sebanyak 10.995 anak. Jumlah partisipasi paling sedikit terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu 836 anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih besar cenderung memiliki jumlah peserta PAUD yang lebih tinggi, sementara wilayah dengan populasi relatif kecil seperti Kepulauan Seribu memiliki jumlah peserta yang jauh lebih sedikit.

Gambar 5.21. Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di DKI Jakarta 2023-2024

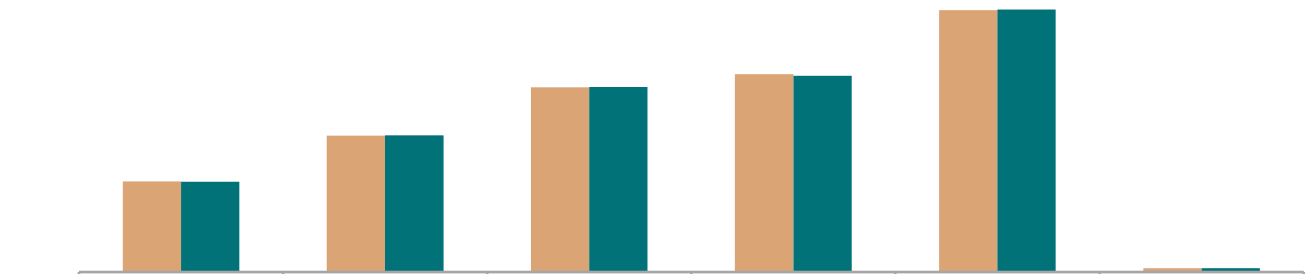


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	36,70	33,21	33,61	39,17	39,77	66,80
2024	33,99	29,46	30,01	35,00	35,43	67,26

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Jika dilihat dari sisi persentase partisipasi, terdapat kecenderungan penurunan APS anak usia 5–6 tahun di sebagian besar wilayah DKI Jakarta antara tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, APS di Jakarta Pusat sebesar 36,70 persen dan menurun menjadi 33,99 persen pada tahun 2024. Penurunan juga terjadi di Jakarta Utara dari 33,21 persen menjadi 29,46 persen, serta di Jakarta Barat dari 33,61 persen menjadi 30,01 persen. Kondisi serupa terlihat di Jakarta Selatan yang turun dari 39,17 persen menjadi 35,00 persen, dan Jakarta Timur dari 39,77 persen menjadi 35,43 persen. Berbeda dengan wilayah lainnya, Kepulauan Seribu justru mengalami sedikit peningkatan dari 66,80 persen pada 2023 menjadi 67,26 persen pada 2024, sekaligus menjadi wilayah dengan tingkat partisipasi PAUD tertinggi di DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah peserta relatif kecil, proporsi anak usia 5–6 tahun yang mengikuti PAUD di wilayah tersebut tergolong sangat tinggi.

Gambar 5.22. Jumlah Guru Profesional di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

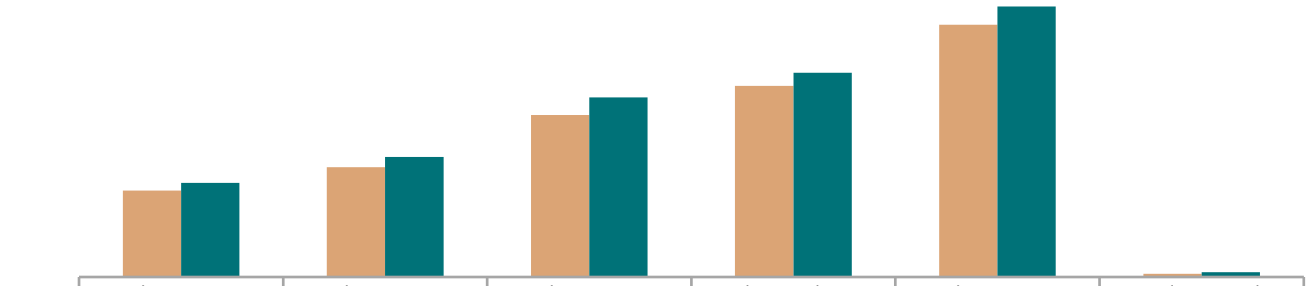


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	9.763	14.679	19.890	21.312	28.216	417
2024	9.729	14.731	19.938	21.152	28.291	403

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Guru profesional merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas karena berperan langsung dalam proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi peserta didik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui berbagai kebijakan, termasuk program sertifikasi guru. Jumlah guru profesional di DKI Jakarta pada tahun 2023 tercatat sebanyak 94.277 orang, sedangkan pada tahun 2024 relatif stabil menjadi 94.244 orang. Secara wilayah, jumlah guru profesional terbesar berada di Jakarta Timur, yaitu 28.216 guru pada 2023 dan meningkat menjadi 28.291 guru pada 2024, diikuti oleh Jakarta Selatan dengan 21.312 guru pada 2023 dan 21.152 guru pada 2024, serta Jakarta Barat yang meningkat dari 19.890 guru menjadi 19.938 guru. Sementara itu, Jakarta Utara juga mengalami sedikit peningkatan dari 14.679 guru menjadi 14.731 guru, sedangkan Jakarta Pusat sedikit menurun dari 9.763 guru menjadi 9.729 guru. Wilayah dengan jumlah guru profesional paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu 417 guru pada 2023 dan 403 guru pada 2024, yang mencerminkan jumlah satuan pendidikan dan penduduk yang relatif lebih kecil dibandingkan wilayah lainnya.

Gambar 5.23. Jumlah Guru Profesional Bersertifikasi di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



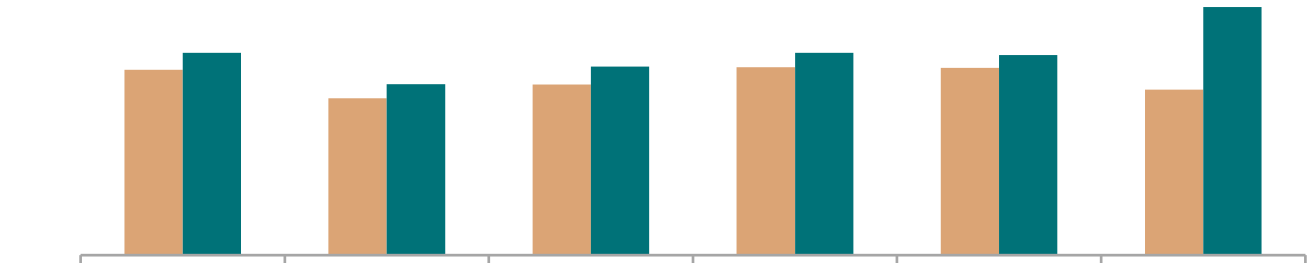
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	3.567	4.541	6.687	7.898	10.415	136
2024	3.882	4.964	7.414	8.439	11.165	197

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Jumlah guru profesional yang telah memiliki sertifikasi di DKI Jakarta menunjukkan peningkatan pada periode 2023–2024. Pada tahun 2023 terdapat 33.244 guru profesional bersertifikasi, dan meningkat menjadi 36.061 guru pada tahun 2024. Peningkatan ini terlihat di seluruh wilayah administrasi. Jakarta Timur menjadi wilayah dengan jumlah guru bersertifikasi terbanyak, yaitu dari 10.415 guru pada 2023 menjadi 11.165 guru pada 2024. Selanjutnya Jakarta Selatan meningkat dari 7.898 guru menjadi 8.439 guru, dan Jakarta Barat dari 6.687 guru menjadi 7.414 guru. Jakarta Utara juga meningkat dari 4.541 guru menjadi 4.964 guru, sedangkan Jakarta Pusat bertambah dari 3.567 guru menjadi 3.882 guru. Di Kepulauan Seribu, jumlah guru bersertifikasi meningkat dari 136 guru pada 2023 menjadi 197 guru pada 2024, menunjukkan adanya upaya peningkatan profesionalisme tenaga pendidik di wilayah tersebut.



Gambar 5.24. Persentase Guru Profesional Bersertifikasi di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

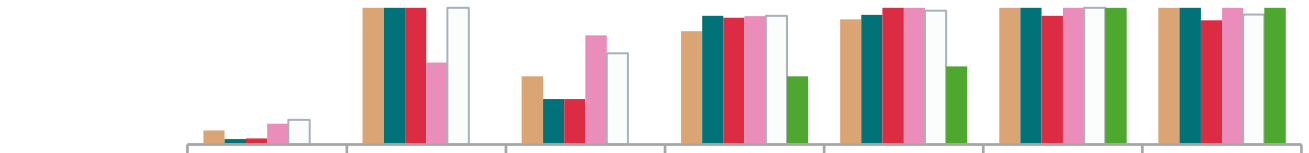


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	36,54	30,94	33,62	37,06	36,91	32,61
2024	39,90	33,70	37,19	39,90	39,46	48,88

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Persentase guru profesional yang telah bersertifikasi di DKI Jakarta juga mengalami peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, persentase guru profesional bersertifikasi di berbagai wilayah berkisar antara 30,94 persen hingga 37,06 persen, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 33,70 persen hingga 48,88 persen. Kabupaten Kepulauan Seribu mencatat persentase tertinggi pada tahun 2024 yaitu 48,88 persen, meningkat signifikan dari 32,61 persen pada 2023. Sementara itu, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan masing-masing mencapai 39,90 persen pada 2024, diikuti oleh Jakarta Timur sebesar 39,46 persen dan Jakarta Barat sebesar 37,19 persen. Jakarta Utara memiliki persentase sebesar 33,70 persen pada 2024, meningkat dari 30,94 persen pada 2023. Kenaikan persentase ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah guru yang telah memenuhi standar profesional melalui sertifikasi, yang diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan di DKI Jakarta.

Gambar 5.25. Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Negeri Terakreditasi A menurut Jenjang Pendidikan di DKI Jakarta Tahun 2024



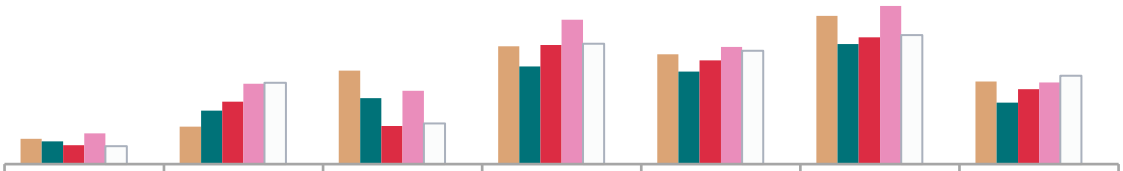
	PAUD	SLB	PKBM	SD	SMP	SMA	SMK
Jakarta Pusat	10,34	100,00	50,00	82,91	91,67	100,00	100,00
Jakarta Utara	4,00	100,00	33,33	94,12	94,87	100,00	100,00
Jakarta Barat	4,55	100,00	33,33	92,81	100,00	94,12	90,91
Jakarta Selatan	15,15	60,00	80,00	93,86	100,00	100,00	100,00
Jakarta Timur	17,95	100,00	66,67	94,25	97,89	100,00	95,24
Kepulauan Seribu	0,00	0,00	0,00	50,00	57,14	100,00	100,00

Sumber: Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah Provinsi DKI Jakarta

Akreditasi sekolah merupakan salah satu indikator penting untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan. Di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024, persentase satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi A menggambarkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah negeri maupun swasta pada berbagai jenjang pendidikan. Pada tahun 2024, persentase satuan pendidikan sekolah negeri yang terakreditasi A di DKI Jakarta menunjukkan variasi menurut jenjang pendidikan. Jenjang

pendidikan menengah seperti SMA dan SMK tercatat memiliki persentase tertinggi, bahkan di beberapa wilayah mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh satuan pendidikan negeri pada jenjang tersebut telah memenuhi standar mutu tertinggi akreditasi. Pada jenjang SMP dan SD, persentase sekolah negeri yang terakreditasi A juga cukup tinggi meskipun masih bervariasi antarwilayah. Sebaliknya, pada jenjang PAUD, SLB, dan PKBM, persentasenya relatif lebih rendah atau bahkan belum terdapat satuan pendidikan negeri yang memperoleh akreditasi A di beberapa wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar nonformal dan pendidikan khusus masih memerlukan perhatian lebih agar kesenjangan kualitas antarjenjang pendidikan dapat diminimalkan.

Gambar 5.26. Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Swasta Terakreditasi A menurut Jenjang Pendidikan di DKI Jakarta Tahun 2024



	PAUD	SLB	PKBM	SD	SMP	SMA	SMK
Jakarta Pusat	13,49	20,00	50,00	62,89	58,67	79,07	44,19
Jakarta Utara	12,19	28,57	35,29	52,24	49,36	64,10	32,84
Jakarta Barat	10,05	33,33	20,31	63,64	55,46	67,62	40,00
Jakarta Selatan	16,42	42,86	39,13	77,09	62,58	84,42	43,69
Jakarta Timur	9,57	43,48	21,79	64,25	60,48	68,97	47,20
Kepulauan Seribu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah Provinsi DKI Jakarta

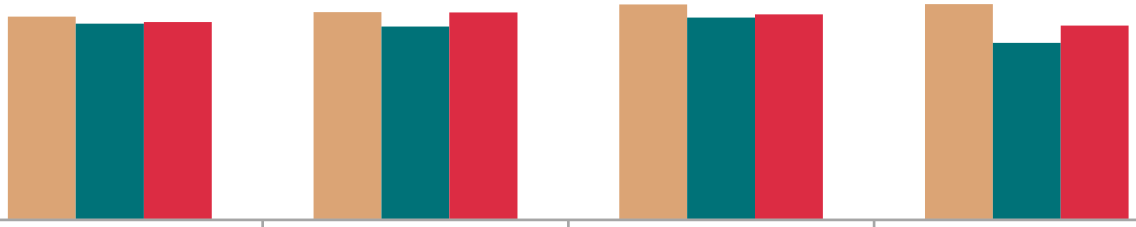
Berbeda dengan sekolah negeri, persentase satuan pendidikan sekolah swasta yang terakreditasi A pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang relatif lebih rendah pada beberapa jenjang pendidikan. Berdasarkan data , sejumlah jenjang seperti PAUD, SLB, PKBM, SD, SMP, SMA, hingga SMK, terdapat wilayah yang belum memiliki satuan pendidikan swasta dengan akreditasi A. Hal ini menggambarkan bahwa mutu lembaga pendidikan swasta pada beberapa jenjang masih bervariasi dan belum merata dalam memenuhi standar akreditasi tertinggi. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan sarana prasarana, manajemen lembaga, serta kapasitas sumber daya pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan pembinaan terhadap satuan pendidikan swasta menjadi penting untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan di Provinsi DKI Jakarta.

5.3.2. Partisipasi Siswa dan Sekolah

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) pada aspek literasi menjadi tolak ukur penting untuk melihat sejauh mana peserta didik mampu memahami, mengolah, dan menggunakan informasi secara efektif[1]. Perubahan pada capaian dari waktu ke waktu mencerminkan dinamika mutu pendidikan, sekaligus efektivitas intervensi kebijakan dan praktik pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan.

1 Asesmen Nasional – Tahun 2025, https://anbk.kemdikbud.go.id/,(Kamis, 29 Januari 2025, 08.51)

Gambar 5.27. Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) Memenuhi Kompetensi Minimum di DKI Jakarta Tahu 2022-2024

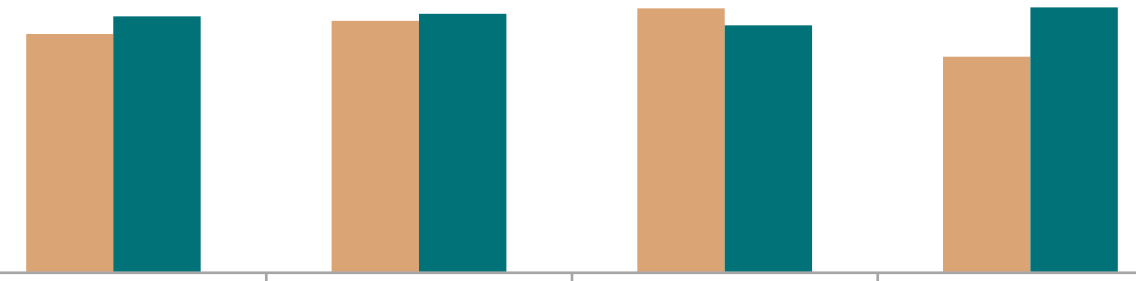


	SD	SMP	SMA	SMK
2022	93,37	95,48	99,06	99,13
2023	90,21	88,77	93,02	81,34
2024	90,84	95,25	94,39	89,29

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Jika ditinjau dalam kurun 2022-2024, capaian persentase siswa yang memenuhi kompetensi minimum literasi menunjukkan fluktuasi antarjenjang dan antarwaktu. Setelah mencatat performa yang sangat tinggi pada 2022, semua jenjang mengalami penurunan pada 2023. Penurunan terbesar terjadi di jenjang SMK, dengan pengurangan sebanyak 17,79 persen poin, diikuti oleh SMP sekitar 6,71 persen poin. Memasuki 2024, tren capaian kembali membaik. Tingkat SMP mengalami kenaikan signifikan sebesar 6,48 persen poin, sementara SMK meningkat hingga 7,95 persen poin. Adapun SD dan SMA menunjukkan peningkatan yang lebih moderat, masing-masing naik 0,63 persen poin dan 1,37 persen poin dibanding tahun sebelumnya.

Gambar 5.28. Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) Memenuhi Kompetensi Minimum di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	SD	SMP	SMA	SMK
2023	79,80	84,16	88,35	72,16
2024	85,62	86,52	82,63	88,60

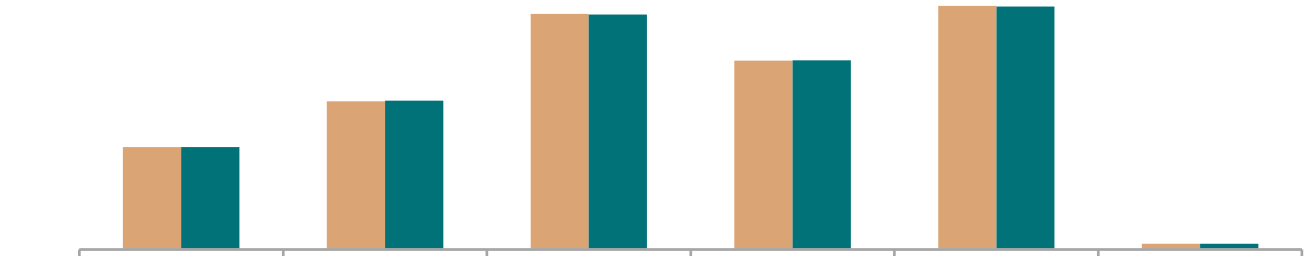
Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Jika pada aspek literasi terlihat adanya dinamika capaian antar jenjang pendidikan, pola yang relatif serupa juga tercermin pada kompetensi numerasi. Namun, numerasi menghadirkan tantangan yang lebih kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berhitung, tetapi juga penalaran logis dan pemecahan masalah[2]. Pada periode 2023-2024, capaian numerasi siswa di DKI Jakarta menunjukkan kecenderungan yang beragam antar jenjang. Jenjang SMK mencatat peningkatan paling signifikan, dengan

2 Pusat Asesmen Pendidikan, https://pusmendik.kemdikbud.go.id/an/page/asesmen_kompetensi_minimum (29 Januari 2026. 10.04)

persentase siswa yang memenuhi kompetensi minimum naik sekitar 16,44 persen poin. Peningkatan ini juga terjadi pada jenjang SD, yang naik 5,82 persen poin, serta jenjang SMP yang sedikit meningkat sebesar 2,36 persen poin. Di sisi lain, jenjang SMA justru mengalami penurunan capaian numerasi hingga 5,72 persen poin.

Gambar 5.29. Jumlah Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di DKI Jakarta

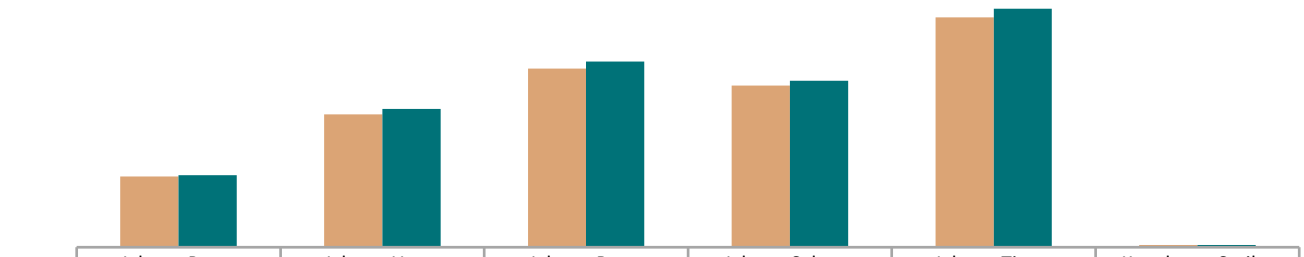


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	366	530	843	676	872	21
2024	366	532	841	677	869	21

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Secara umum, jumlah sekolah jenjang SD dan SMP di DKI Jakarta pada 2024 relatif stabil dibandingkan 2023, dengan perubahan yang bersifat sangat terbatas. Jakarta Utara dan Jakarta Selatan mencatat kenaikan tipis, masing-masing bertambah 2 sekolah dan 1 sekolah, yang setara dengan kenaikan di bawah 0,50%. Sebaliknya, Jakarta Barat dan Jakarta Timur mengalami penurunan ringan, masing-masing berkurang 2 sekolah dan 3 sekolah. Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu tidak mengalami perubahan sama sekali.

Gambar 5.30. Jumlah Penduduk Usia 7-15 Tahun di DKI Jakarta



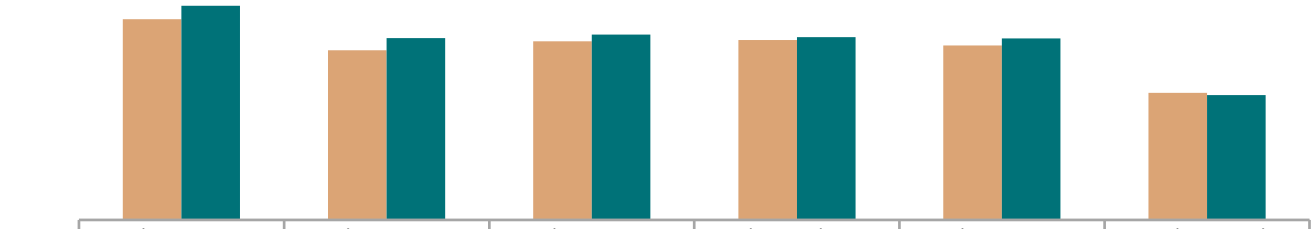
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	146.019	273.975	367.822	333.384	473.698	4.718
2024	148.597	285.119	382.509	343.286	491.446	5.021

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Berbeda dengan jumlah sekolah yang cenderung stagnan, jumlah penduduk usia 7-15 tahun di seluruh wilayah DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan tren peningkatan merata. Kenaikan populasi usia sekolah dasar dan menengah pertama yang tidak diiringi pertumbuhan jumlah sekolah secara signifikan menandakan adanya peningkatan tekanan pada kapasitas layanan pendidikan. Jakarta Timur mencatat kenaikan terbesar secara absolut, bertambah sekitar 3,75%, disusul Jakarta Barat dengan kenaikan 3,99% dan Jakarta Selatan yang meningkat 2,97%. Wilayah dengan basis penduduk lebih kecil seperti Kepulauan

Seribu juga mengalami pertumbuhan, yakni sebesar 6,42%, meskipun secara jumlah absolut masih terbatas. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan daya tampung, distribusi siswa, serta kualitas layanan pendidikan di usia sekolah yang sudah ada, agar pertumbuhan penduduk usia sekolah dapat diakomodasi secara optimal dan merata di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Gambar 5.31. Jumlah Sekolah pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

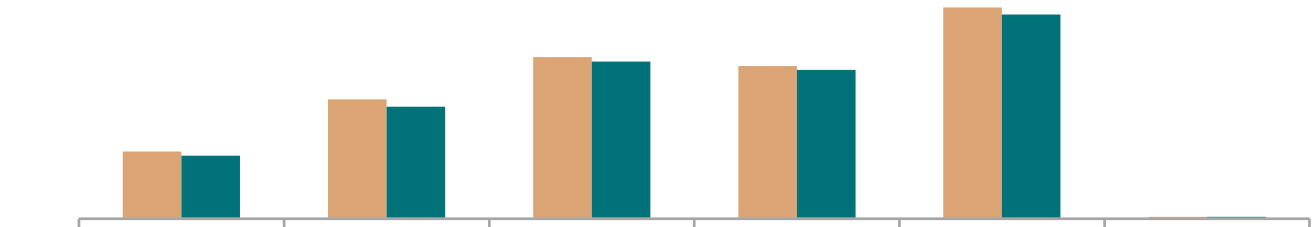


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	22,16	18,70	19,72	19,83	19,23	14,00
2024	23,64	20,05	20,45	20,18	20,03	13,76

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Selain itu, jumlah sekolah pada jenjang pendidikan SMA dan SMK di DKI Jakarta pada tahun 2024 juga menunjukkan perubahan yang sangat terbatas. Secara wilayah, Jakarta Utara dan Jakarta Timur mengalami kenaikan masing-masing 1 hingga 2 sekolah, sementara Jakarta Barat bertambah 2 sekolah. Di sisi lain, Jakarta Selatan justru mencatat penurunan tipis sekitar 0,87%, sedangkan Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu tidak mengalami perubahan.

Gambar 5.32. Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

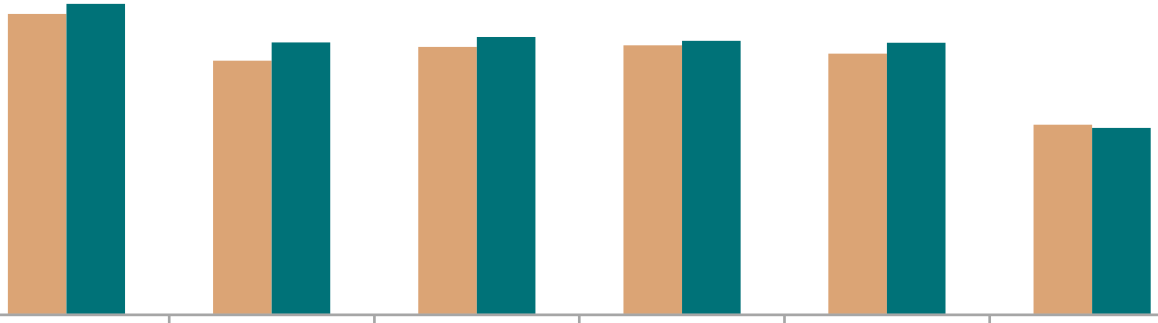


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	50.984	90.387	122.223	115.465	159.628	1.429
2024	47.801	84.807	118.844	112.489	154.288	1.454

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Berbeda dengan jenjang usia 7-15 tahun yang meningkat, jumlah penduduk usia 16-18 tahun pada 2024 justru mengalami penurunan di hampir seluruh wilayah. Jakarta Pusat mencatat penurunan paling tajam secara persentase, sekitar 6,24%, disusul Jakarta Utara 6,17% dan Jakarta Timur 3,35%. Penurunan juga terjadi di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, masing-masing sekitar 2,76% dan 2,58%, sementara Kepulauan Seribu menjadi satu-satunya wilayah yang mencatat kenaikan tipis sekitar 1,75%. Tren ini menunjukkan adanya penyusutan kelompok usia sekolah menengah atas, yang berimplikasi langsung pada kebutuhan layanan pendidikan SMA dan SMK.

Gambar 5.33. Rasio Perbandingan Antara Jumlah Sekolah Jenjang SMA dan SMK dengan Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun di DKI Jakarta

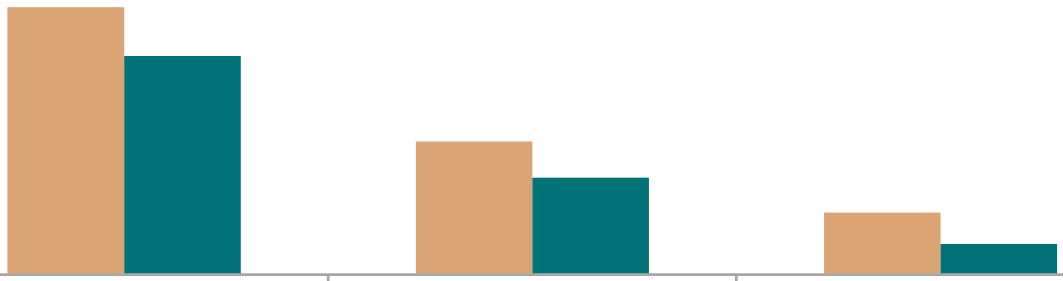


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	22,16	18,70	19,72	19,83	19,23	14,00
2024	23,64	20,05	20,45	20,18	20,03	13,76

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Kombinasi antara jumlah sekolah yang relatif stabil dan penurunan jumlah penduduk usia 16-18 tahun mendorong kenaikan rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah di hampir seluruh wilayah pada 2024. Jakarta Pusat mencatat peningkatan rasio paling signifikan, dengan kenaikan sekitar 6,68%. Jakarta Barat dan Jakarta Selatan juga mengalami kenaikan rasio masing-masing sekitar 3,70% dan 1,77%, sementara Jakarta Timur dan Jakarta Utara meningkat di kisaran 4,16% dan 7,22%. Sebaliknya, Kepulauan Seribu mengalami penurunan rasio sekitar 1,71%, memperlihatkan dinamika demografis yang berbeda dibanding wilayah lain. Secara keseluruhan, peningkatan rasio ini mengindikasikan potensi peningkatan daya tampung per sekolah, sekaligus membuka ruang bagi penguatan kualitas layanan pendidikan menengah atas di DKI Jakarta.

Gambar 5.34. Jumlah Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sesuai Jenis Serapan Lulusan di DKI Jakarta

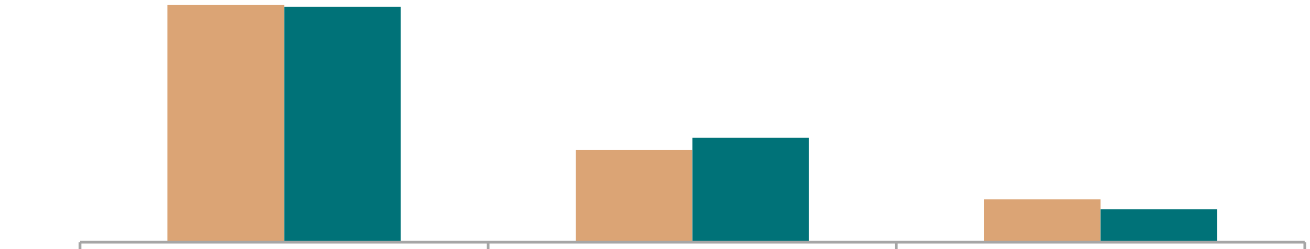


	Sudah Bekerja	Melanjutkan ke Perguruan Tinggi	Berwirausaha
2023	37.062	14.413	6.714
2024	23.654	10.504	3.310

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Pada 2024, seluruh jenis serapan lulusan SMK mengalami penurunan jumlah dibanding 2023. Lulusan yang sudah bekerja berkurang sebanyak 36,18%. Lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi juga menurun sekitar 27,17%. Penurunan paling tajam terjadi pada lulusan yang berwirausaha, yang turun hingga 50,70%. Penurunan serentak ini mengindikasikan adanya kontraksi jumlah lulusan SMK atau perubahan kondisi transisi lulusan ke dunia kerja, pendidikan lanjut, dan kewirausahaan.

Gambar 5.35. Persentase Hasil dari Perbandingan Antara Jumlah Lulusan SMK Sesuai Jenis Serapan Lulusan dengan Jumlah Lulusan SMK Seluruh Jenis Serapan Lulusan di DKI Jakarta

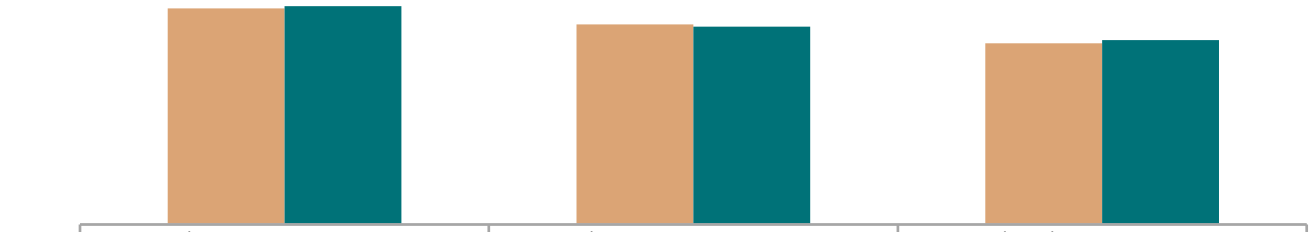


	Sudah Bekerja	Melanjutkan ke Perguruan Tinggi	Berwirausaha
2023	63,69	24,77	11,54
2024	63,13	28,03	8,83

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Proporsi lulusan yang sudah bekerja hanya turun tipis, 0,56 persen poin. Sebaliknya, persentase lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi meningkat hingga 3,26 persen poin. Di sisi lain, persentase lulusan yang berwirausaha menurun cukup nyata sekitar 2,71 persen poin, mengindikasikan berkurangnya daya tarik atau peluang kewirausahaan bagi lulusan SMK pada 2024. Tingkat partisipasi sekolah menjadi indikator kunci untuk melihat sejauh mana sistem pendidikan mampu menahan peserta didik tetap berada pada jalur pendidikan formal sesuai kelompok usianya. Dalam konteks tersebut, Angka Partisipasi Murni (APM) memberikan gambaran mengenai keterjangkauan dan keberlanjutan pendidikan pada setiap jenjang, sekaligus menjadi penanda awal potensi keberhasilan atau tantangan dalam transisi antar jenjang pendidikan di DKI Jakarta.

Gambar 5.36. Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMA/SMK/MA, SMP/MTs

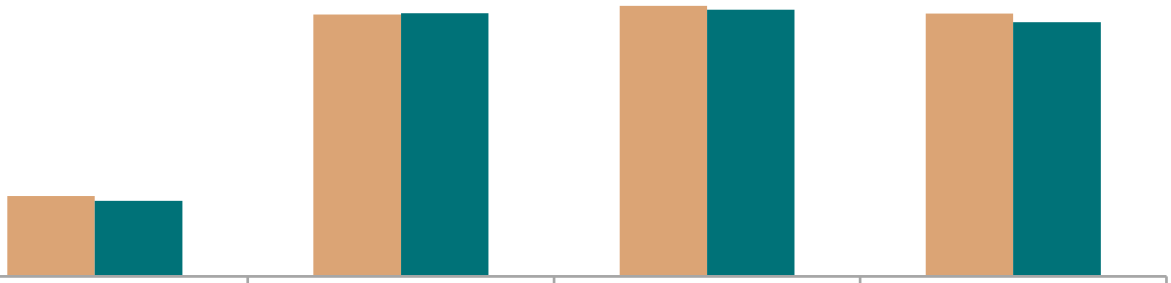


	SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI)	SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs)	SMA/SMK/Madrasah Aliyah (MA)
2023	95,15	88,21	79,83
2024	96,14	87,15	81,28

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Pada periode 2023-2024, APM di DKI Jakarta menunjukkan dinamika yang berbeda antar jenjang pendidikan. Pada jenjang SD/MI, APM meningkat sebanyak 0,99 persen poin, memperlihatkan keterjangkauan pendidikan dasar bagi penduduk usia sekolah yang semestinya. Kenaikan ini mencerminkan konsistensi DKI Jakarta dalam menjaga hampir seluruh anak usia SD tetap bersekolah pada jenjang yang sesuai. Sebaliknya, pada jenjang SMP/MTs, APM justru mengalami penurunan sekitar 1,06 persen poin. Penurunan ini mengindikasikan adanya sebagian kecil penduduk usia SMP yang tidak lagi bersekolah pada jenjang semestnya. Sementara itu, pada jenjang SMA/SMK/MA, APM kembali menunjukkan penguatan dengan kenaikan sebesar 1,45 persen poin.

Gambar 5.37. Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi DKI Jakarta



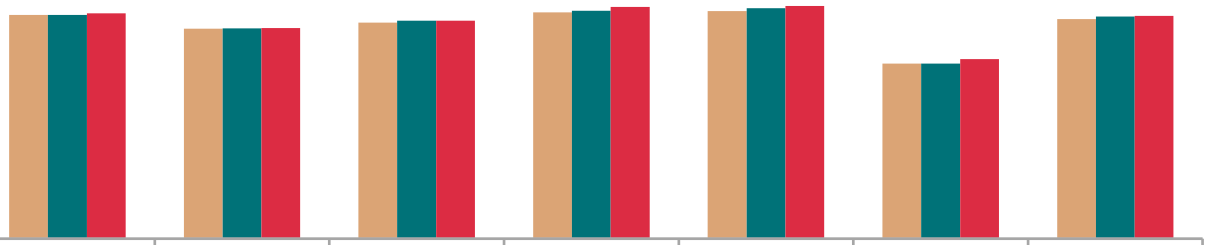
	PAUD/RA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
2023	31	102	106	102
2024	29	102	103	99

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Melengkapi gambaran partisipasi pendidikan, Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan cakupan akses pendidikan yang lebih luas, termasuk peserta didik di luar kelompok usia ideal. Pada jenjang PAUD/TA, APK menurun sekitar 2,00 persen poin, mengindikasikan adanya penurunan partisipasi pada pendidikan usia dini. Sementara itu, SD/MI memperlihatkan akses pendidikan dasar masih sangat luas, dengan tercatat APK pada jenjang pendidikan ini tetap stabil 102%.

Pada jenjang SMP/MTs, APK menurun sebanyak 3,00 persen poin, begitupun dengan jenjang SMA/SMK/MA yang mengalami penurunan sekitar 3,00 persen poin. Hal ini menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan partisipasi pendidikan pada usia remaja, sekaligus menjadi sinyal penting untuk dapat memperkuat transisi peserta didik dari pendidikan dasar menuju pendidikan menengah.

Gambar 5.38. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta
2022	11,53	10,82	11,13	11,66	11,73	9,02	11,31
2023	11,54	10,84	11,23	11,75	11,88	9,03	11,45
2024	11,61	10,85	11,24	11,95	11,99	9,26	11,49

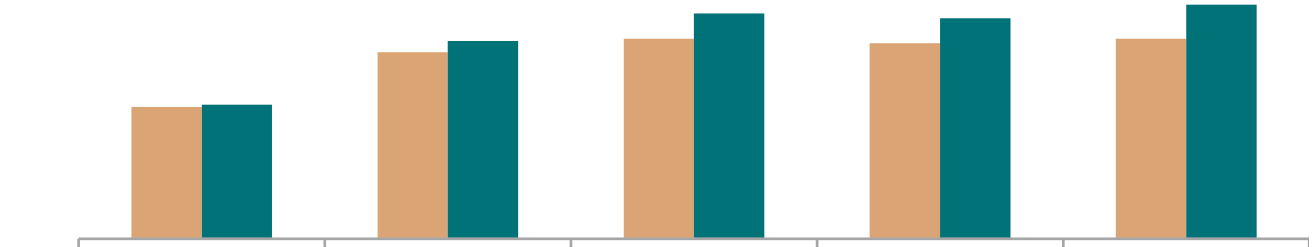
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS), terlihat tren peningkatan bertahap selama tahun 2022 hingga 2024. Secara provinsi, terjadi kenaikan RLS sebesar 0,18 tahun dalam dua tahun terakhir. Hal ini memperlihatkan perbaikan akumulasi capaian pendidikan penduduk, meskipun peningkatannya berlangsung relatif kecil.

Secara wilayah, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan konsisten mencatat RLS tertinggi. Jakarta Timur mengalami peningkatan sebanyak 0,26 tahun, sementara Jakarta Selatan bertambah 0,29 tahun dari 2022 hingga 2024, menjadi kenaikan tertinggi di antara wilayah kota. Sementara Jakarta Utara menunjukkan kenaikan lebih terbatas dari 10,82 tahun

menjadi 10,85 tahun. Di sisi lain, Kepulauan Seribu mengalami peningkatan paling signifikan secara relatif, dengan bertambah hingga 0,24 tahun. Peningkatan RLS memperlihatkan durasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal semakin panjang. Namun, capaian tersebut tidak berdiri sendiri, karena penguatan kompetensi juga ditopang oleh jalur pendidikan nonformal. Di tengah tuntutan dunia kerja yang semakin kompetitif dan mengglobal, kompetensi yang didapat dari pendidikan nonformal, khususnya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) bisa melengkapi pengetahuan yang didapat dari jalur pendidikan formal[3]. Dalam konteks ini, perkembangan jumlah LKP menjadi penting untuk melihat bagaimana akses peningkatan keterampilan masyarakat terus diperluas di luar sistem sekolah formal.

Gambar 5.39. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

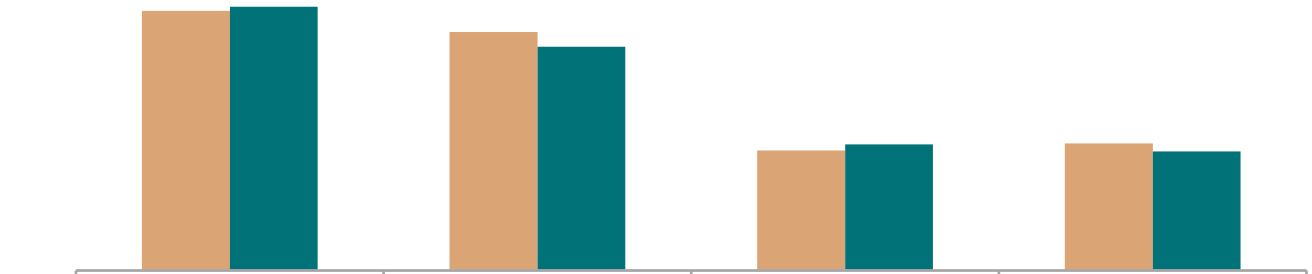


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2023	58	82	88	86	88
2024	59	87	99	97	103

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Jumlah LKP di DKI Jakarta menunjukkan geliat peningkatan yang cukup terasa dalam satu tahun terakhir. Secara total, hampir seluruh wilayah mengalami penambahan lembaga pada 2024, dengan lonjakan paling menonjol terjadi di Jakarta Timur yang naik hingga 17,05%. Jakarta Barat dan Jakarta Selatan juga mencatat pertumbuhan yang sama kuat, masing-masing meningkat sebanyak 11 lembaga. Di sisi lain, Jakarta Utara bertambah sebanyak 6,10%, sementara Jakarta Pusat mengalami kenaikan paling tipis, hanya 1 lembaga. Pola ini menunjukkan bahwa ekspansi LKP cenderung lebih dinamis di wilayah dengan basis penduduk besar dan kebutuhan peningkatan keterampilan yang tinggi, terutama di Jakarta Timur, Barat, dan Selatan, yang secara kolektif menyumbang sebagian besar pertumbuhan LKP di tahun 2024.

Gambar 5.40. Jumlah Kelulusan Sekolah Peserta Didik yang Menyelesaikan Pendidikan di DKI Jakarta



	SD	SMP	SMA	SMK
2023	130.240	119.741	60.271	63.683
2024	132.388	112.274	63.211	59.739

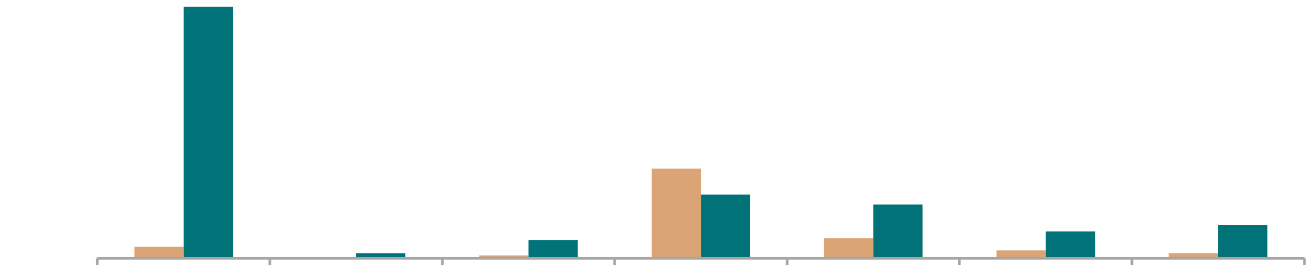
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

3 Kemendikdasmen, “Jadi Penopang Kemajuan Bangsa, Khursus dan Pelatihan Berkualitas Mampu Meningkatkan Daya Saing”. https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/11599-jadi-penopang-kemajuan-bangsa-kursus-dan-pelatihan-berkualit . (Jumat, 6 Februari 2026. 08.53)

Sementara itu, jumlah peserta didik yang menyelesaikan pendidikan mencatat dinamika yang berbeda antar jenjang. Pada tingkat SD, jumlah kelulusan mengalami peningkatan 1,65%, sebaliknya kelulusan SMP menurun hingga 6,24%. Pada jenjang menengah atas, jumlah lulusan SMA meningkat sekitar 4,88%. Sementara lulusan SMK menurun sebanyak 6,19%.

Perbedaan tren antar jenjang ini mengindikasikan adanya variasi dinamika transisi peserta didik, khususnya pada jenjang menengah pertama dan kejuruan yang mengalami penurunan jumlah kelulusan. Di sisi lain, peningkatan kelulusan pada jenjang dasar dan menengah atas mencerminkan keberlanjutan capaian pendidikan yang relatif stabil pada jalur pendidikan umum.

Gambar 5.41. Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di DKI Jakarta Tahun 2024



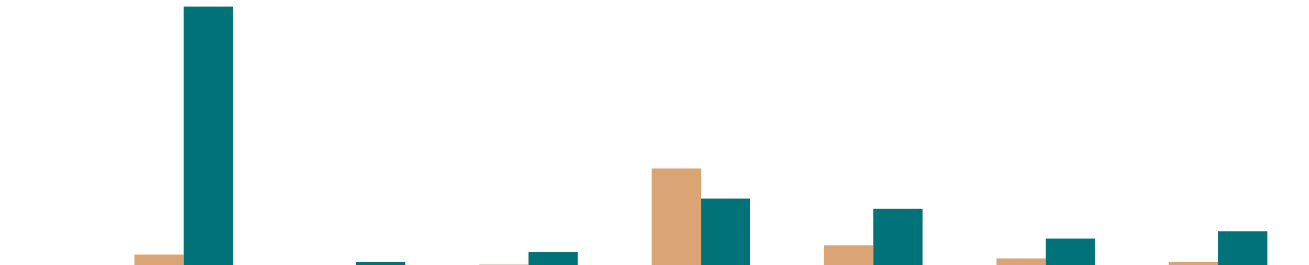
	PAUD	SLB	PKBM	SD	SMP	SMA	SMK
Negeri	167	13	39	1.305	293	117	73
Swasta	3.949	74	263	926	782	390	484

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Komposisi satuan pendidikan tahun 2024 menunjukkan dominasi kuat penyelenggara swasta pada sebagian besar jenjang. Pada PAUD, jumlah lembaga swasta mencapai 95,94% dari total, jauh melampaui jumlah PAUD negeri. Pola serupa terlihat pada SMP, dengan 72,74% swasta, SMA sekitar 76,92% swasta, SMK sebanyak 86,89% swasta hingga PKBM memiliki 87,09% swasta dari total sekolahnya.

Sementara itu, peran sekolah negeri masih paling menonjol pada jenjang SD, yang menyumbang sekitar 58,49% dari total sekolah dasar. Struktur ini menegaskan bahwa perluasan akses pendidikan di DKI Jakarta sangat bergantung pada kontribusi sektor swasta sebagai mitra penyedia layanan pendidikan.

Gambar 5.42. Jumlah Sekolah Terakreditasi menurut Jenjang Pendidikan di DKI Jakarta Tahun 2024



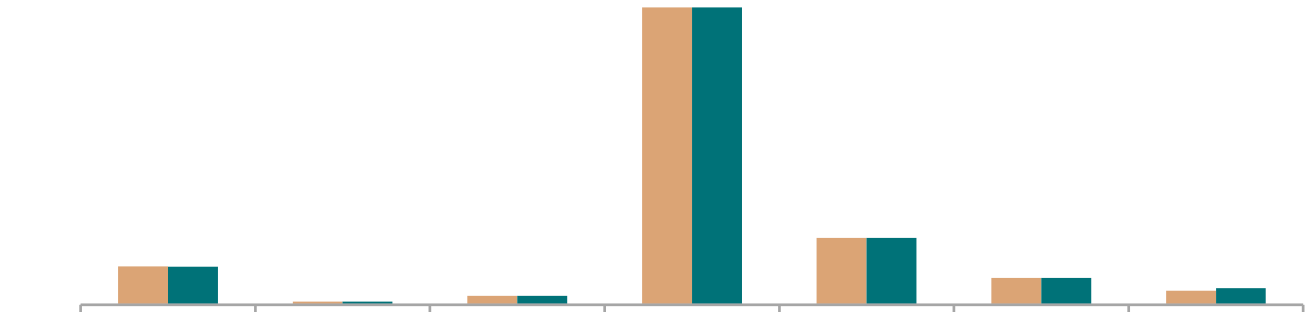
	PAUD	SLB	PKBM	SD	SMP	SMA	SMK
Negeri	167	13	39	1.295	292	117	73
Swasta	3.687	73	203	901	769	377	476

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Dari sisi mutu, cakupan akreditasi menunjukkan tingkat kesiapan yang sangat tinggi. Hampir seluruh sekolah negeri telah terakreditasi, dengan cakupan mendekati 100% di semua jenjang dan hanya menyisakan selisih sangat kecil pada SD dan SMP. Pada sekolah swasta, tingkat akreditasi juga telah menjangkau mayoritas satuan pendidikan, yakni sekitar 98,65% pada SLB dengan persentase tertinggi di sektor swasta, disusul SMK 98,35%, kemudian SMP 98,34%, SD 97,30%, SMA 96,67%, PAUD 93,37%. Sementara itu, PKBM menjadi jenjang dengan persentase sekolah swasta terendah, yakni 77,19%.

Aspek pemerataan akses bagi seluruh peserta didik menjadi pembahasan penting pada ranah pendidikan. Salah satu indikator pentingnya adalah perkembangan jumlah sekolah yang telah memenuhi syarat penyelenggaraan pendidikan inklusi di DKI Jakarta. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menegaskan bahwa pendidikan inklusi bukan lagi sekadar program tambahan, melainkan kebijakan utama dalam sistem pendidikan nasional[4]. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Gambar 5.43. Jumlah Sekolah Penerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP) menurut Jenjang Pendidikan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



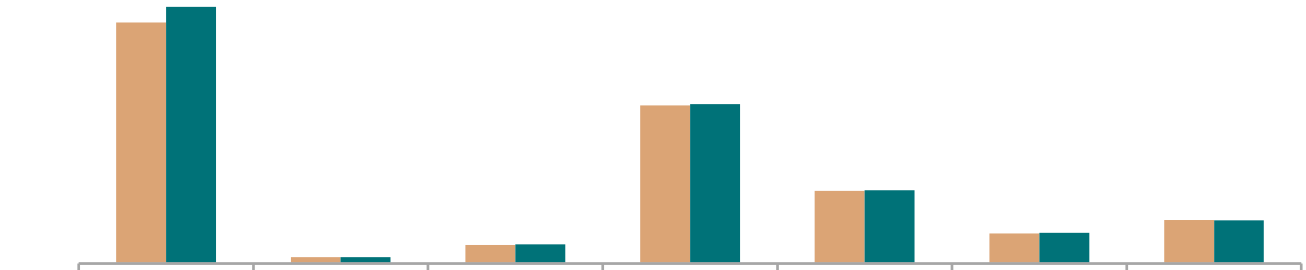
	PAUD	SLB	PKBM	SD	SMP	SMA	SMK
2023	168	13	39	1.305	293	117	61
2024	167	13	39	1.305	293	117	73

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Dukungan pembiayaan pendidikan melalui Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada 2023-2024 pun menunjukkan dinamika yang relatif stabil dengan penguatan pada jenjang tertentu. Sebagian besar jenjang tidak mengalai perubahan jumlah sekolah penerima, namun masih terdapat indikasi penyesuaian prioritas pada jenjang pendidikan yang membutuhkan dukungan operasional lebih spesifik. Perubahan paling menonjol pada BOP terjadi pada jenjang SMK yang mengalami peningkatan sebanyak 19,67%. Di sisi lain, jenjang PAUD mengalami penurunan sangat tipis, hanya 0,60%, sementara jenjang lainnya cenderung stagnan.

4 Kebijakan Pemerintah Untuk Pendidikan Inklusi: Apa yang Perlu Diketahui?, https://s3pi.fip.unesa.ac.id/post/kebijakan-pemerintah-untuk-pendidikan-inklusi-apa-yang-perlu-diketahui (Jumat, 6 Februari 2026. 10.39).

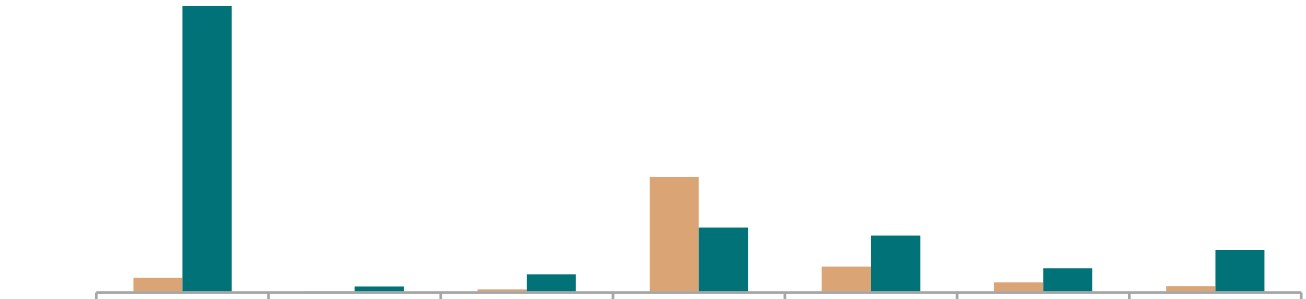
Gambar 5.44. Jumlah Sekolah Penerima Biaya Operasional Sekolah (BOS) menurut Jenjang Pendidikan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	PAUD	SLB	PKBM	SD	SMP	SMA	SMK
2023	3.087	82	236	2.025	929	387	556
2024	3.413	83	245	2.042	937	392	553

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

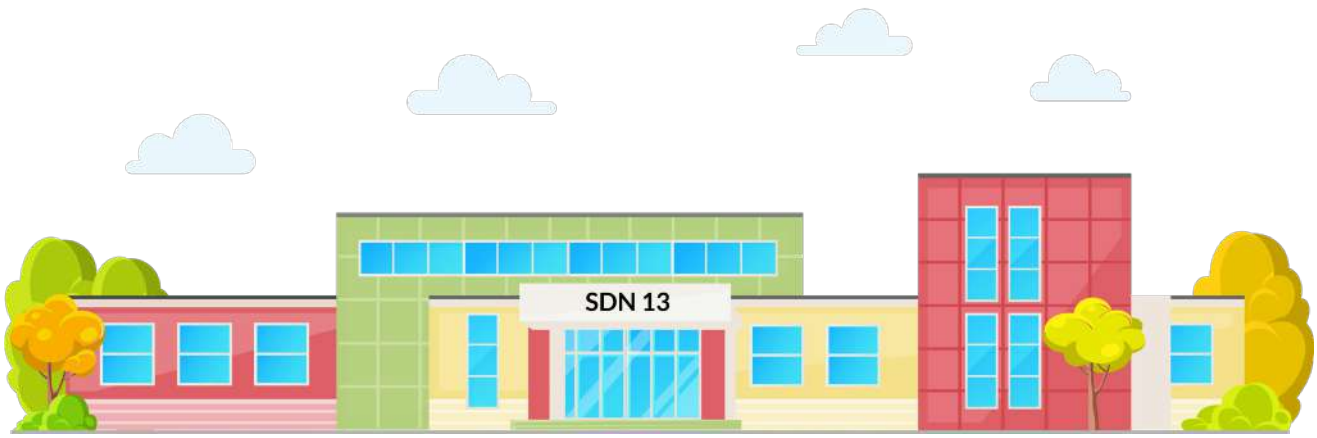
Gambar 5.45. Jumlah Sekolah Penerima Biaya Operasional Sekolah (BOS) menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan di DKI Jakarta Tahun 2024



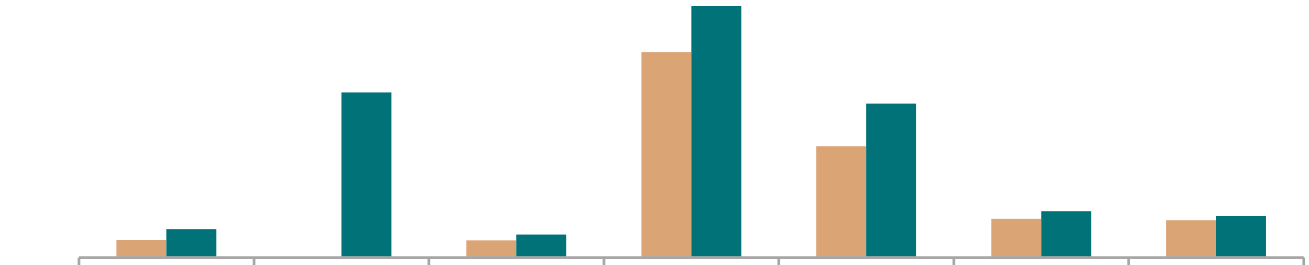
	PAUD	SLB	PKBM	SD	SMP	SMA	SMK
Negeri	167	13	39	1.306	293	117	73
Swasta	3.246	70	206	736	644	275	480

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Berpindah dari BOP ke Biaya Operasional Sekolah (BOS), pola peningkatan terlihat lebih merata di hampir seluruh jenjang. Secara rinci, penerima BOS jenjang PAUD meningkat sekitar 10,56%, begitupun dengan SLB yang naik 1,22%, PKBM naik sekitar 3,81%, SD bertambah sebanyak 0,84%, SMP meningkat 0,86%, dan SMA naik 1,29%. Satu-satunya jenjang yang mengalami penurunan adalah SMK dengan penurunan sekitar 0,54%. Jika dilihat dari status sekolah tahun 2024, terlihat bahwa kontribusi signifikan dari sekolah swasta dalam memperluas akses pendidikan di DKI Jakarta. Tercatat bahwa penerima BOS didominasi sekolah swasta pada jenjang PAUD, SMP, SMA, dan SMK, dengan 57,38% ada pada jenjang PAUD dari total keseluruhan sekolah swasta.



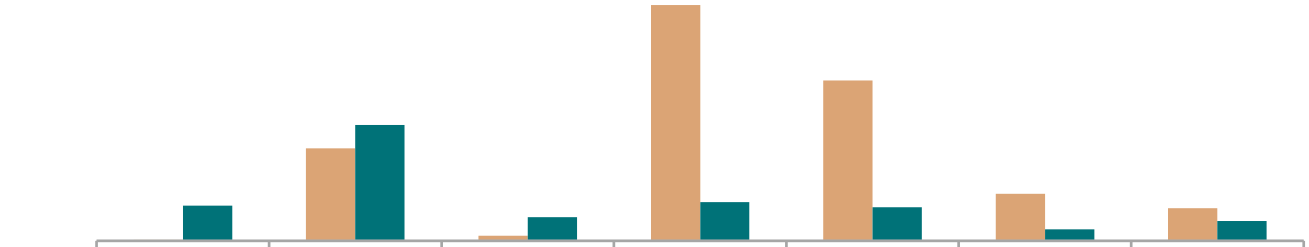
Gambar 5.46. Jumlah Siswa Berkebutuhan Khusus Bersekolah menurut Jenjang Pendidikan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	PAUD	SLB	PKBM	SD	SMP	SMA	SMK
2023	666	0	653	7.826	4.239	1.479	1.426
2024	1.089	6.292	875	9.577	5.862	1.764	1.589

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 5.47. Jumlah Siswa Inklusi Berkebutuhan Khusus Bersekolah menurut Status Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2024



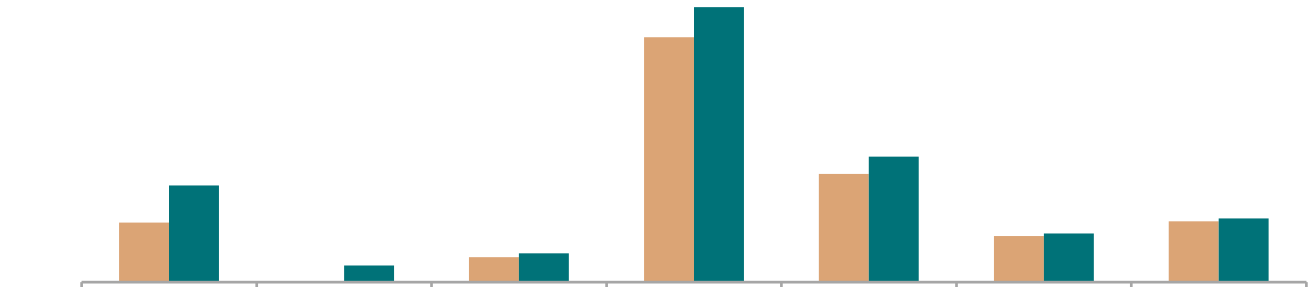
	PAUD	SLB	PKBM	SD	SMP	SMA	SMK
Negeri	26	2.796	154	8.410	4.846	1.418	984
Swasta	1.063	3.496	721	1.167	1.016	346	605

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Seiring dengan dukungan pembiayaan, penguatan pendidikan inklusif menjadi indikator penting pada perkembangan sistem pendidikan. Peningkatan jumlah siswa berkebutuhan khusus menunjukkan bahwa akses pendidikan semakin terbuka bagi seluruh kelompok masyarakat.

Jumlah siswa inklusi meningkat pada hampir seluruh jenjang pada 2024. Kenaikan terbesar terjadi pada jenjang SLB yang melonjak dari tidak tercatat pada 2023, menjadi ribuan siswa pada 2024. Jenjang PAUD meningkat sekitar 63,51%. Mayoritas siswa inklusi SD dan SMP bersekolah di sekolah negeri, sementara PAUD, SLB, PKBM, serta sebagian SMA dan SMK, sekolah swasta masih memegang peranan besar.

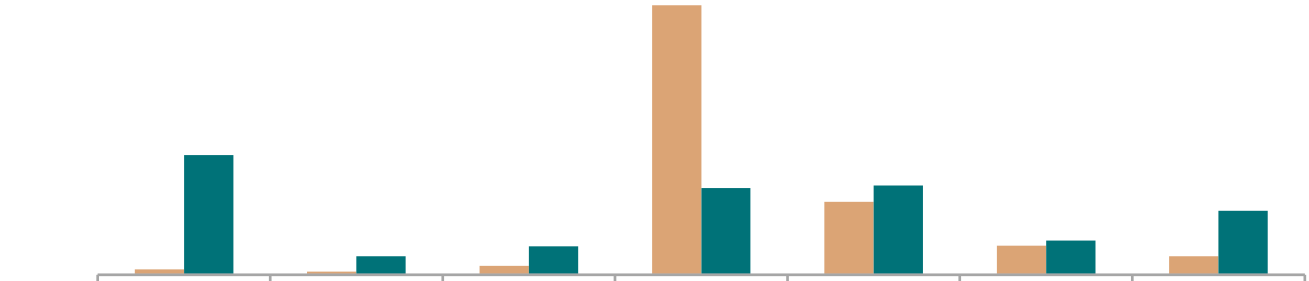
Gambar 5.48. Jumlah Sekolah yang Sudah Menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di DKI Jakarta Tahun 2024



	PAUD	SLB	PKBM	SD	SMP	SMA	SMK
2023	300	0	126	1.233	545	232	306
2024	487	85	146	1.383	631	246	321

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 5.49. Jumlah Sekolah yang Sudah Menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus menurut Status Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2024

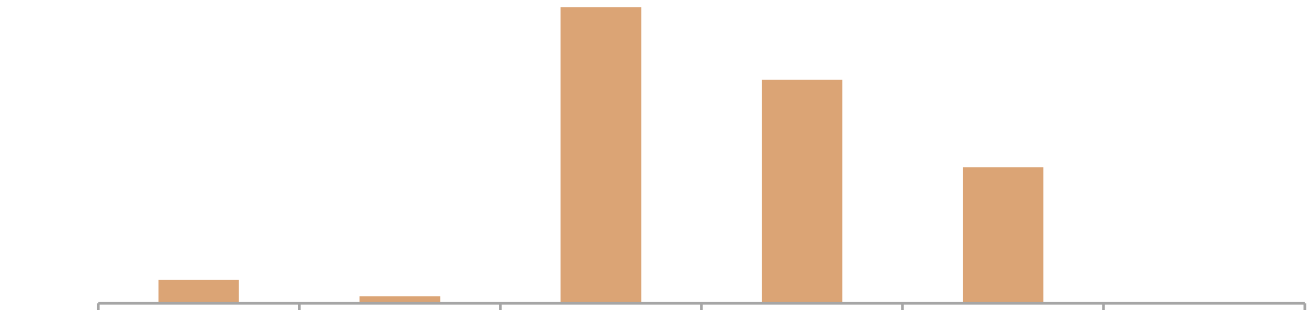


	PAUD	SLB	PKBM	SD	SMP	SMA	SMK
Negeri	22	13	35	1.046	284	113	72
Swasta	465	72	111	337	347	133	249

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Peningkatan jumlah siswa inklusi berjalan beriringan dengan bertambahnya sekolah yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Jumlah sekolah inklusi meningkat di seluruh jenjang, dengan kenaikan terbesar pada PAUD sebesar 62,33%, diikuti PKBM sekitar 15,87%, dan SMP sebanyak 15,78%. Sementara itu, SD dengan jumlah sekolah terbanyak turut mengalami kenaikan sebanyak 12,17%. Di sisi lain, juga terdapat kenaikan jumlah sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus di jenjang SMA dan SMK, meski hanya 6,03% dan 4,90% pada setiap jenjang. Pada 2024, sekolah negeri mendominasi di jenjang SD dan SMP, sedangkan sekolah swasta lebih didominasi pada jenjang PAUD, SMP, dan SMK. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan ekosistem pendidikan inklusif yang semakin berkembang dari sisi pembiayaan, partisipasi siswa, serta kesiapan satuan pendidikan.

Gambar 5.50. Jumlah Sekolah dengan Status Akreditasi di DKI Jakarta Tahun 2024



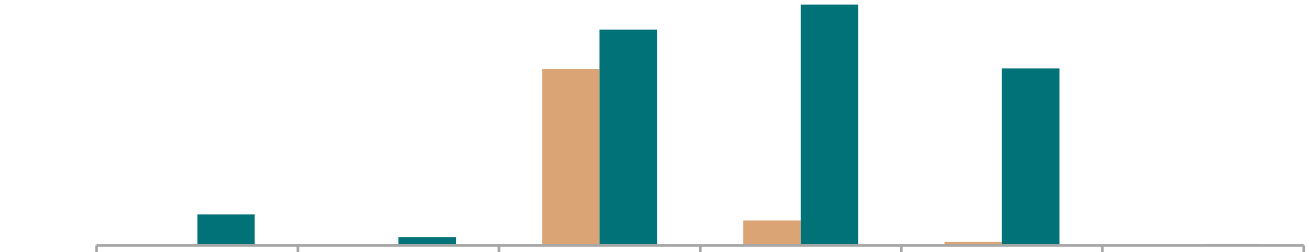
	Belum Terakreditasi	Tidak Terakreditasi	A	B	C	Terakreditasi
Jumlah	301	92	3.825	2.887	1.758	12

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Jika melihat pada akreditasi sekolah, mayoritas sekolah di DKI Jakarta pada tahun 2024 telah berada pada kategori akreditasi baik. Hal ini terlihat dari dominasi sekolah dengan akreditasi A yang mencakup sekitar 43,10% dari total sekolah, diikuti akreditasi B sebesar 32,53% dan akreditasi C sekitar 18,91%. Sementara itu, sekolah yang belum terakreditasi mencapai 3,39% dan yang tidak terakreditasi hanya sekitar 1,04% dari keseluruhan sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebanyak 95,44% sekolah di DKI Jakarta telah berada pada kategori terakreditasi (A-C). Dari sisi perbandingan mutu,

terlihat bahwa distribusi akreditasi semakin terkonsentrasi pada kategori mutu yang lebih tinggi. Jumlah sekolah berakreditasi A tercatat sekitar 1,3 kali lipat lebih banyak dibandingkan sekolah berakreditasi B, serta sekitar 2,1 kali lebih banyak dibandingkan sekolah berakreditasi C. Selain itu, jumlah sekolah berakreditasi B juga 1,6 kali lebih banyak dibandingkan sekolah berakreditasi C.

Gambar 5.51. Jumlah Sekolah dengan Status Akreditasi menurut Status Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2024



	Belum Terakreditasi	Tidak Terakreditasi	A	B	C	Terakreditasi
Negeri	0	11	1.720	243	33	0
Swasta	301	81	2.105	2.644	1.725	12

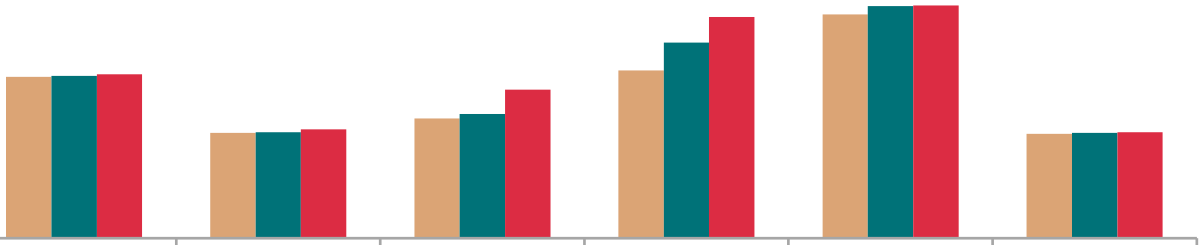
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Jika ditinjau menurut status sekolah, perbedaan komposisi terlihat cukup kontras. Pada sekolah negeri, sekitar 85,70% berakreditasi A, sedangkan 12,11% berakreditasi B dan hanya 1,64% berakreditasi C. Sekolah negeri yang tidak berakreditasi hanya sekitar 0,55%, sementara tidak terdapat sekolah negeri yang belum terakreditasi. Jumlah sekolah negeri berakreditasi A bahkan mencapai 7 kali lipat dibandingkan sekolah negeri berakreditasi B, serta 52 kali lipat dibandingkan sekolah negeri berakreditasi C. Sebaliknya, pada kelompok swasta distribusi akreditasi lebih beragam. Sekolah swasta berakreditasi A mencapai 30,65%, sedangkan akreditasi B sekitar 38,50% dan akreditasi C sebesar 25,12%. Sekolah swasta yang belum terakreditasi masih mencapai sekitar 4,38%, dan yang tidak terakreditasi sebanyak 1,18%. Jumlah sekolah swasta berakreditasi B bahkan 1,3 kali lebih banyak dibandingkan akreditasi A, memperlihatkan bahwa sebagian besar sekolah swasta masih berada pada kategori mutu menengah. Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan kualitas akreditasi sekolah negeri relatif lebih terkonsentrasi pada kategori tertinggi, sementara sekolah swasta memiliki distribusi mutu yang lebih beragam. Hal ini mengindikasikan pentingnya upaya peningkatan mutu berkelanjutan terutama pada sekolah swasta guna memperbaiki kesenjangan kualitas pendidikan di DKI Jakarta. Selain menggambarkan mutu satuan pendidikan melalui status akreditasi sekolah, kualitas pembangunan pendidikan juga dapat dilihat dari capaian partisipasi pendidikan penduduk. Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan hal tersebut adalah Harapan Lama Sekolah (HLS), yang menunjukkan perkiraan lamanya anak usia 7 tahun ke atas akan menempuh pendidikan formal di masa mendatang[5].



5 Badan Pusat Statistik, "Detail Metadata Indikator Statistik", https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/65505 (Rabu, 11 Februari 2026. 09.55).

Gambar 5.52. Harapan Lama Sekolah (HLS) di DKI Jakarta Tahun 2022-2024

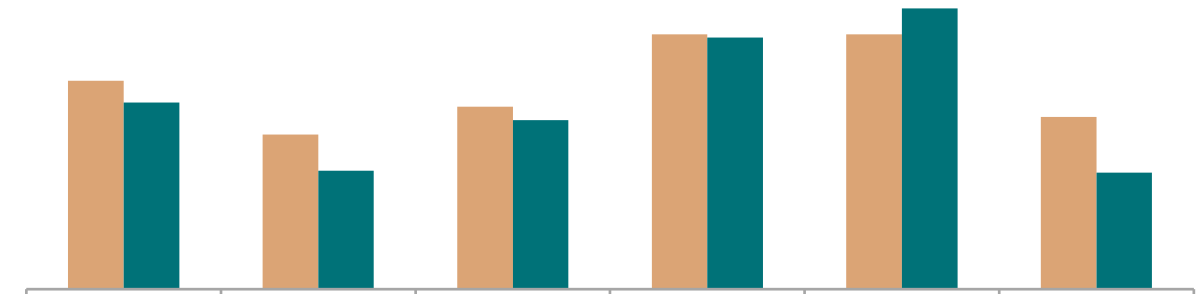


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2022	13,28	12,66	12,82	13,35	13,97	12,65
2023	13,29	12,67	12,87	13,66	14,06	12,66
2024	13,31	12,70	13,14	13,94	14,07	12,67

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada periode 2022-2024, seluruh wilayah administrasi mengalami kenaikan HLS, meskipun dengan laju yang bervariasi. Secara umum, peningkatan HLS pada periode 2023-2024 berada pada kisaran 0,01 hingga 0,28 tahun. Jika dibandingkan secara tahunan, peningkatan paling signifikan pada periode 2023-2024 terjadi di Jakarta Selatan, yang naik sekitar 0,28 tahun, disusul Jakarta Barat yang meningkat sekitar 0,27 tahun dalam dua tahun terakhir (2022-2024). Sementara itu, wilayah lain menunjukkan kenaikan yang relatif lebih kecil, seperti Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu, hanya bertambah sekitar 0,01 tahun pada periode 2023-2024. Dilihat dari posisi antarwilayah pada tahun 2024, Jakarta Timur masih menjadi wilayah dengan HLS tertinggi yaitu sekitar 14,07 tahun, atau sekitar 1,40 tahun lebih tinggi dibandingkan Kepulauan Seribu sebagai wilayah dengan HLS terendah. Kenaikan terbesar terjadi di Jakarta Selatan yang meningkat sekitar 0,59 tahun dalam dua tahun terakhir, sedangkan kenaikan terkecil terjadi di Kepulauan Seribu dengan peningkatan sekitar 0,02 tahun.

Gambar 5.53. Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin di DKI Jakarta Tahun 2024



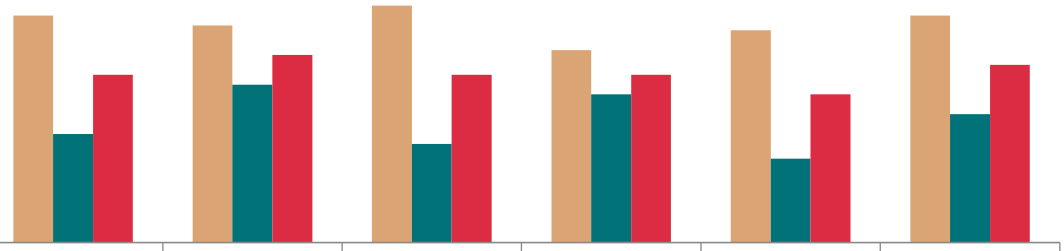
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Laki-laki	13,52	13,00	13,27	13,97	13,97	13,17
Perempuan	13,31	12,65	13,14	13,94	14,22	12,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2024, HLS perempuan secara umum sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki di sebagian wolayah. Selisih terbesar terlihat di Jakarta Timur, di mana HLS perempuan sekitar 0,25 tahun lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sebaliknya, di Jakarta Utara HLS laki-laki 0,35 tahun lebih tinggi dibandingkan perempuan. Secara keseluruhan, selisih HLS antara laki-laki dan perempuan di setiap wilayah relatif kecil, berada pada kisaran 0,03 hingga 0,35 tahun.

Selain itu, dukungan pemerintah terhadap akses pendidikan juga tercermin dalam program bantuan pendidikan. Salah satu program strategis yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Gambar 5.54. Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin di DKI Jakarta Tahun 2020-2025



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	99,81	99,79	99,83	99,74	99,78	99,81
Perempuan	99,57	99,67	99,55	99,65	99,52	99,61
Laki+-Laki+Perempuan	99,69	99,73	99,69	99,69	99,65	99,71

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Di lain sisi, tingkat melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas di DKI Jakarta selama periode 2020-2025 menunjukkan kondisi yang sangat tinggi dan relatif stabil, dengan persentase selalu berada kisaran di atas 99%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk dewasa di DKI jakarta telah memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, angka melek aksara laki-laki secara konsisten sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2025, tingkat melek aksara laki-laki mencapai 99,81%, sedangkan perempuan 99,61%. Meski demikian, kesenjangan antara keduanya sangat kecil, memperlihatkan akses terhadap pendidikan dasar bagi laki-laki dan perempuan di DKI Jakarta relatif merata.

Tingginya tingkat melek akasara di DKI Jakarta menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis. Namun demikian, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai akses dan partisipasi penduduk dalam sistem pendidikan formal, perlu juga dilihat indikator lain yang menggambarkan keterlibatan penduduk usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Salah satu tolak ukur yang digunakan adalah Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan sesuai dengan kelompok usia maupun secara keseluruhan pada setiap jenjang pendidikan.

Gambar 5.55. Angka Partisipasi Murni (APM) di DKI Jakarta 2023-2025

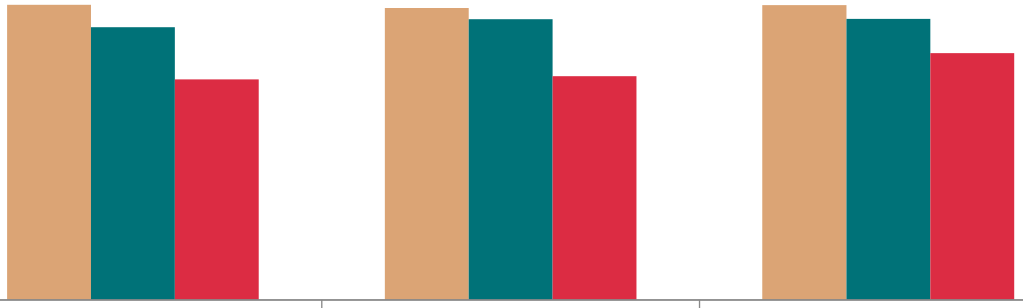


	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SM/Sederajat
2023	98,44	84,95	60,81
2024	98,39	88,67	64,85
2025	98,47	87,55	69,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

APM di DKI Jakarta selama periode 2023-2025 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan tertinggi masih berada pada jenjang SD/ sederajat, dengan persentase yang relatif stabil dan mendekati 99% setiap tahunnya. Pada jenjang SMP/sederajat, APM mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebelum menurun tipis pada tahun 2025, namun tetap pada kisaran di atas 85%. Sementara itu, APM pada jenjang SMA/sederajat menunjukkan tren peningkatan yang cukup jelas, dari 60,81% pada tahun 2023 menjadi hampir 70% di tahun 2025, menunjukkan semakin banyak penduduk usia sekolah menengah yang bersekolah sesuai dengan kelompok usianya.

Gambar 5.56. Angka Partisipasi Kasar (APK) di DKI Jakarta 2023-2025

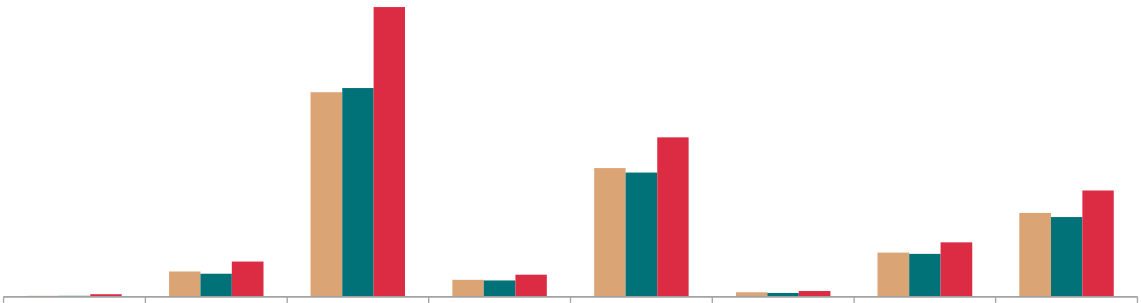


	2023	2024	2025
SD/Sederajat	103,63	102,49	103,49
SMP/Sederajat	95,78	98,63	98,76
SM/Sederajat	77,40	78,52	86,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) juga menunjukkan pola yang relatif serupa. APK pada jenjang SD/sederajat secara konsisten berada di atas 100%, yang menunjukkan bahwa selain penduduk usia sekolah, terdapat pula peserta didik dari kelompok usia di luar usia resmi sekolah yang masih mengikuti pendidikan pada jenjang tersebut. Pada jenjang SMP/sederajat, APK mengalami peningkatan bertahap hingga mendekati 99% pada tahun 2024. Adapun jenjang SMA/sederajat, APK menunjukkan peningkatan paling signifikan, dari 77,40% menjadi lebih dari 80% pada tahun 2025, yang mengindikasikan semakin luasnya partisipasi penduduk dalam pendidikan menengah di DKI Jakarta.

Gambar 5.57. Data Kartu Jakarta Pintar Plus Provinsi DKI Jakarta



	PKBM	MI	SD	MTS	SMP	MA	SMA	SMK
Tahap I 2024	1.080	26.541	214.425	17.808	135.046	4.488	46.355	87.906
Tahap II 2024	1.083	24.097	218.822	17.137	130.204	3.980	44.896	83.403
Tahap I 2025	2.696	36.730	303.720	23.246	167.073	5.921	56.914	111.322

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Jumlah penerima KJP Plus pada tahap I tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan penyaluran pada tahun 2024, dengan hampir seluruh jenjang pendidikan mengalami kenaikan jumlah penerima. Jika dibandingkan tahap II tahun 2024, dengan tahap I tahun 2025, peningkatan terbesar terjadi pada jenjang SD yang bertambah sekitar 84.898 penerima atau meningkat sekitar 38,80%. Kenaikan signifikan juga terjadi pada jenjang SMP yang meningkat sekitar 36.869 penerima atau naik sebesar 28,32%, serta SMK yang bertambah sekitar 27.919 penerima atau 33,47%. Pada jenjang pendidikan dasar lainnya, jumlah penerima pada MI meningkat dari tahap II tahun 2024 ke tahap I tahun 2025 sebesar 52,43%, sedangkan MTS meningkat sekitar 35,65%. Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah umum, penerima SMA meningkat sekitar 26,77% dan MA meningkat sekitar 48,77%. Peningkatan tertinggi secara persentase terjadi pada peserta didik PKBM yang meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahap sebelumnya.

Jika dibandingkan antar jenjang, pada tahap I tahun 2025, penerima KJP Plus masih didominasi oleh jenjang SD yang mencakup sekitar 42,92% dari total penerima. Jenjang SMP menyusul dengan porsi sekitar 23,61%, diikuti SMK sekitar 15,73% dan SMA sekitar 8,04%. Sedangkan jenjang pendidikan berbasis keagamaan dan kesetaraan memiliki proporsi yang relatif lebih kecil, di bawah 6,00%.

5.4. Kesehatan

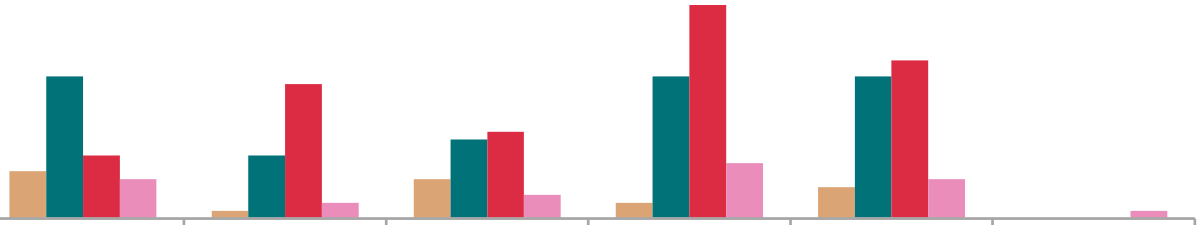
Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan menjadi indikator penting dalam menjamin akses pelayanan kesehatan yang memadai bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah DKI Jakarta. Dengan jumlah penduduk yang besar dan tersebar di berbagai wilayah, DKI Jakarta membutuhkan sistem layanan kesehatan yang terdistribusi dengan baik dan mampu menjawab kebutuhan yang beragam. Selain itu, efektivitas layanan serta pelayanan yang cepat dan tepat guna perlu dihadirkan untuk menciptakan kualitas pelayanan yang lebih baik ke depannya. Selain aspek sarana, keberadaan tenaga kesehatan yang kompeten serta memiliki standar nasional maupun internasional turut menentukan kualitas layanan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, baik melalui distribusi tenaga, pelatihan, maupun dukungan administratif, guna meningkatkan efektivitas dan dampak pelayanan kepada masyarakat.

5.4.1. Fasilitas Kesehatan

Salah satu elemen penting dalam menghadirkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat adalah fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas, klinik, sarana kefarmasian, serta Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Seluruh fasilitas tersebut harus memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Fasilitas kesehatan berperan sebagai titik awal akses masyarakat terhadap layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, khususnya di wilayah DKI Jakarta.



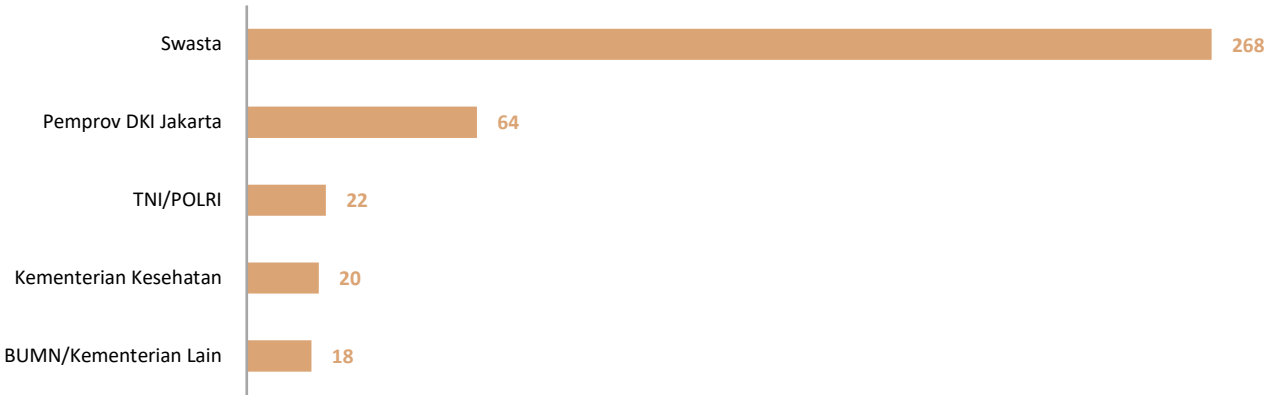
Gambar 5.58. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar menurut Kelas di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Tipe A	6	1	5	2	4	0
Tipe B	18	8	10	18	18	0
Tipe C	8	17	11	27	20	0
Tipe D	5	2	3	7	5	1

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 5.59. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar menurut Status RS di DKI Jakarta Tahun 2024.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

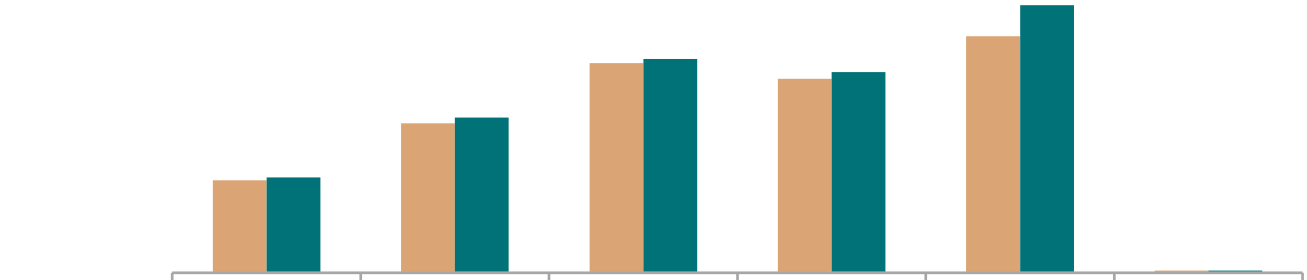
Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian merupakan sarana dan prasarana kesehatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Rumah sakit diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe, yaitu Tipe A, Tipe B, Tipe C, dan Tipe D. Pembagian tipe rumah sakit berdasarkan pelayanan kefarmasian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020. Berdasarkan peraturan tersebut, klasifikasi rumah sakit adalah sebagai berikut:

- Tipe A berjumlah ≤ 250 tempat tidur,
- Tipe B berjumlah ≤ 200 tempat tidur,
- Tipe C berjumlah ≤ 100 tempat tidur, dan
- Tipe D berjumlah ≤ 50 tempat tidur.

Berdasarkan data dan grafik pertama, fasilitas kesehatan sesuai standar kefarmasian menurut sebaran wilayah menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan Tipe A didominasi oleh wilayah Jakarta Pusat sebanyak 6 faskes. Fasilitas kesehatan Tipe B didominasi oleh wilayah Jakarta Utara sebanyak 18 faskes, sedangkan fasilitas kesehatan Tipe C dan Tipe D didominasi oleh wilayah Jakarta Selatan dengan masing-masing sebanyak 27 dan 7 faskes. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan fasilitas kesehatan yang sesuai standar kefarmasian secara cukup konsisten di seluruh wilayah daratan. Namun, ketersediaan fasilitas kesehatan Tipe A, Tipe B, dan Tipe

C masih terbatas di wilayah Kepulauan Seribu. Kondisi ini menyesuaikan karakteristik geografis wilayah Kepulauan Seribu yang berbentuk kepulauan, sehingga penduduk dapat mengakses layanan kesehatan di wilayah lain. Pada grafik kedua, fasilitas kesehatan berdasarkan status kepemilikan didominasi oleh fasilitas kesehatan milik swasta dengan jumlah 268 faskes, disusul oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 64 faskes, TNI/Polri sebanyak 22 faskes, Kementerian Kesehatan sebanyak 20 faskes, serta BUMN/kementerian lain sebanyak 18 faskes. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan ruang yang cukup baik bagi fasilitas kesehatan milik nonpemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan sesuai standar pelayanan kefarmasian, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

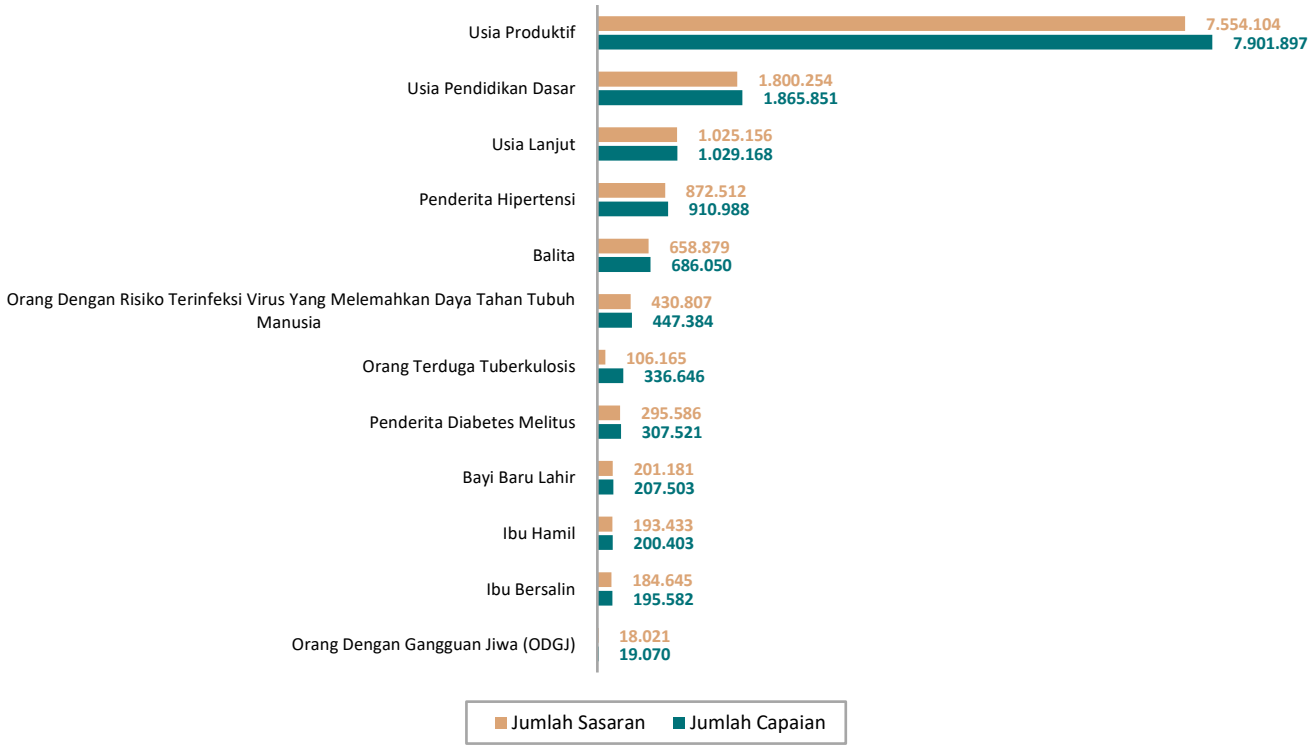
Gambar 5.60. Jumlah Sasaran dan Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan yang Mencapai Target di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jumlah Sasaran	1.395.186	2.252.949	3.163.266	2.925.658	3.568.155	35.529
Jumlah Capaian	1.441.174	2.340.668	3.227.601	3.029.406	4.034.446	34.768

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 5.61. Data Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang Mencapai Target di DKI Jakarta Tahun 2024



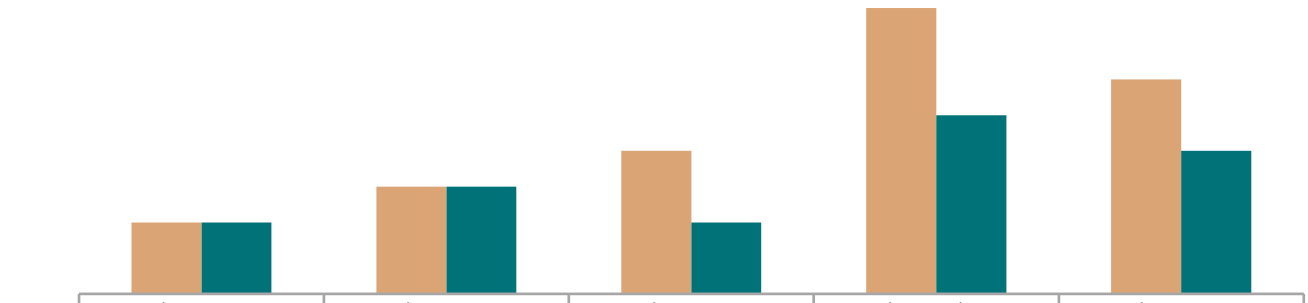
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan yang mencapai target merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintah serta wajib dipenuhi dan berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 6 Tahun 2024 tentang Standard Teknis SPM Bidang Kesehatan[6]. Pemenuhan mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar dilaporkan oleh gubernur dan bupati/wali kota secara berkala kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri serta Menteri Kesehatan. Harapannya, masyarakat di setiap daerah dapat menerima standar pelayanan minimal di bidang kesehatan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan di wilayah masing-masing.

Berdasarkan data dan grafik pertama, terlihat sebaran indikator capaian SPM di seluruh wilayah DKI Jakarta. Persentase capaian dibandingkan dengan jumlah sasaran, dari yang terbesar hingga terkecil, adalah Jakarta Timur sebesar 113%, Jakarta Utara sebesar 104%, Jakarta Pusat sebesar 103%, Jakarta Barat sebesar 102%, dan Kepulauan Seribu sebesar 98%. Secara keseluruhan, data tersebut menjelaskan bahwa capaian di wilayah daratan DKI Jakarta telah sesuai dengan ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah DKI Jakarta telah memberikan pelayanan minimal sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Namun demikian, diperlukan evaluasi secara khusus untuk wilayah Kepulauan Seribu.

Data dan grafik kedua menggambarkan variabel indikator SPM per bidang kesehatan. Persentase capaian terbesar hingga terkecil pada masing-masing variabel adalah Orang Terduga Tuberkulosis sebesar 317%, Ibu Bersalin sebesar 106%, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebesar 106%, Ibu Hamil sebesar 104%, Penderita Diabetes Melitus sebesar 104%, Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus sebesar 104%, Balita sebesar 104%, serta Usia Pendidikan Dasar sebesar 104%. Secara keseluruhan, data tersebut mengindikasikan bahwa seluruh variabel SPM bidang kesehatan di DKI Jakarta telah memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.

Gambar 5.62. Jumlah Rumah Bersalin menurut Wilayah di DKI Jakarta Tahun 2023 – 2024



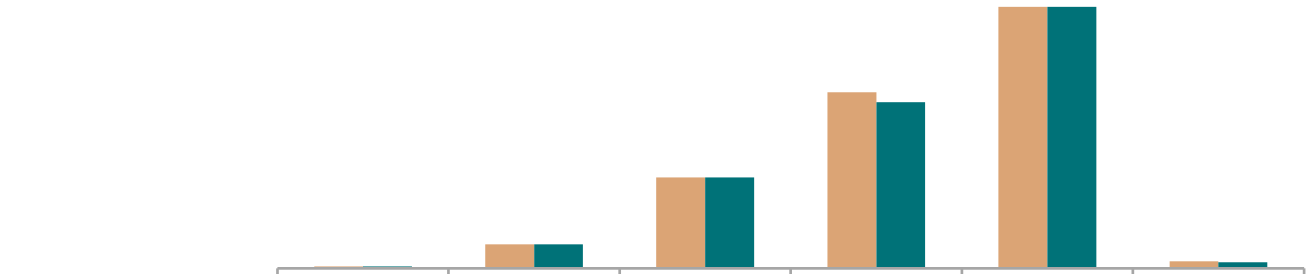
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2023	2	3	4	8	6
2024	2	3	2	5	4

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

6 https://peraturan.bpk.go.id/Download/347288/Permenkes%20Nomor%206%20Tahun%202024.pdf

Selain rumah sakit, fasilitas kesehatan seperti rumah bersalin berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan, khususnya selama proses persalinan bagi ibu dan bayi. Standarisasi ruang bersalin yang baik umumnya mencakup ruang tindakan persalinan yang dilengkapi toilet, ruang tindakan neonatus, ruang pembersihan bayi, ruang bayi, ruang konsultasi atau klinik kebidanan, serta ruang tunggu yang dilengkapi dengan toilet. Dengan adanya ruang bersalin yang memenuhi standar tersebut, tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan persalinan secara optimal sehingga kesehatan ibu dan bayi dapat terjaga dengan baik. Berdasarkan data dan grafik di atas, terlihat tren penurunan jumlah rumah bersalin di wilayah DKI Jakarta sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Penurunan tercatat sebanyak 7 rumah bersalin, yang masing-masing terjadi di wilayah Jakarta Barat sebanyak 2 rumah bersalin, Jakarta Selatan sebanyak 3 rumah bersalin, dan Jakarta Timur sebanyak 2 rumah bersalin. Penurunan fasilitas kesehatan ini perlu dievaluasi agar rumah bersalin di DKI Jakarta memiliki kualitas dan standar yang lebih baik, sehingga layanan persalinan bagi ibu dan anak dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

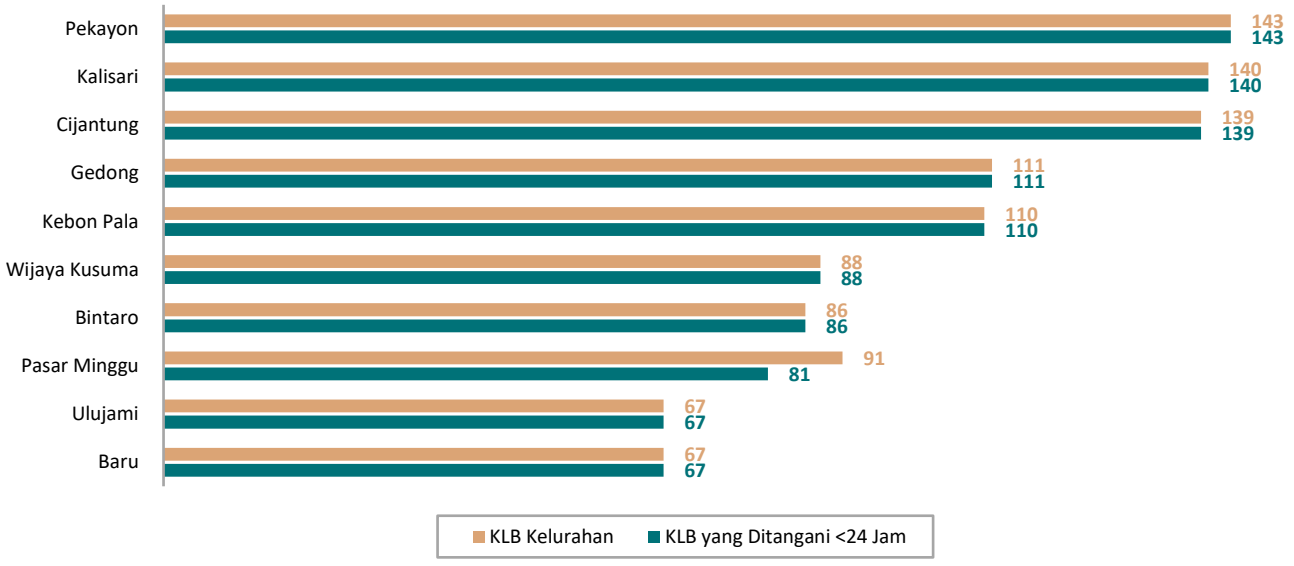
Gambar 5.63. Jumlah Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Epidemiologi < 24 Jam di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
KLB Kelurahan	8	92	347	672	1.054	27
KLB yang Ditangani <24 Jam	8	92	347	634	1.054	24

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 5.64. Sepuluh Kelurahan Terbanyak mengalami KLB yang dilakukan Epidemiologi < 24 Jam di DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Kejadian Luar Biasa (KLB) merupakan salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa yang merebak dan berkembang menjadi wabah penyakit. Istilah KLB dapat dipahami sebagai peringatan dini sebelum terjadinya wabah. Adapun istilah wabah digunakan untuk kondisi yang lebih parah dan meluas dibandingkan dengan KLB. Berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan No. 1501/Menteri/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan [7].

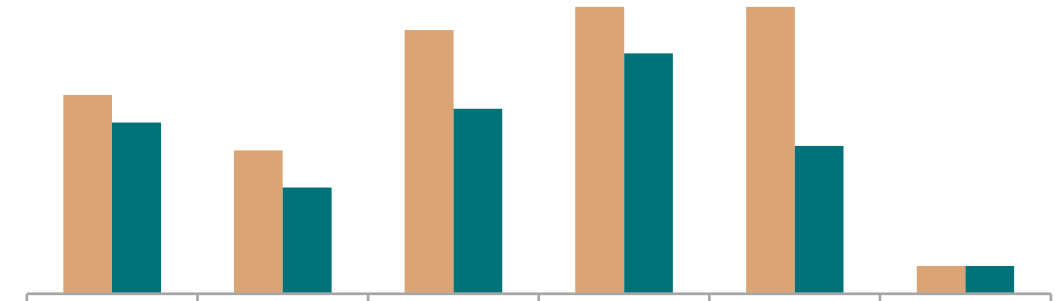
Suatu kejadian dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa apabila memenuhi beberapa unsur, antara lain:

- Timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada/tidak dikenal.
- Peningkatan kejadian penyakit/kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. (jam, hari, minggu).
- Peningkatan kejadian penyakit/kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya (jam, hari, minggu, bulan, tahun).
- Jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat/lebih jika dibandingkan dengan angka rata-rata perbulan dalam tahun sebelumnya.

Penanggulangan KLB dalam waktu kurang dari 24 jam menandakan adanya respons cepat sejak laporan diterima hingga penyelidikan dimulai. Penanggulangan ini mencakup identifikasi faktor penyebab, penanganan penderita (pengobatan dan isolasi), upaya pencegahan (vaksinasi dan sanitasi), pemusnahan sumber penyebab, penanganan jenazah, dan langkah lainnya. Pelaporan dapat dilakukan melalui telepon, faksimil, atau media lain, yang kemudian diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi, seperti puskesmas dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kabupaten/kota, dengan standar waktu penanganan yang ketat, yaitu maksimal 24 jam. Berdasarkan data dan grafik pertama, ditunjukkan distribusi penanganan KLB di seluruh wilayah DKI Jakarta pada tahun 2024. Terdapat empat wilayah di DKI Jakarta dengan rasio penanganan KLB di tingkat kelurahan dalam waktu kurang dari 24 jam sebesar 100%, yaitu Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara itu, Jakarta Selatan memiliki persentase sebesar 94,30%, dan persentase terendah terdapat di Kepulauan Seribu sebesar 88,39%. Data tersebut menunjukkan bahwa sistem surveilans epidemiologi di DKI Jakarta telah berjalan secara optimal dan mampu menangani potensi KLB dengan cepat di hampir seluruh wilayah. Data dan grafik kedua membandingkan nilai distribusi kelurahan dengan penanganan KLB kurang dari 24 jam tertinggi di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2024. Dari sepuluh kelurahan, terdapat sembilan kelurahan dengan persentase penanganan sebesar 100%, yaitu Baru, Ulujami, Bintaro, Wijaya Kusuma, Kebon Pala, Gedong, Cijantung, Kalisari, dan Pekayon. Sementara itu, satu kelurahan, yaitu Pasar Baru, memiliki persentase penanganan KLB sebesar 89%. Data tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar kasus KLB di tingkat kelurahan berhasil ditangani dengan cepat tanpa keterlambatan respons. Hal ini mencerminkan kesiapsiagaan yang kuat dari tenaga epidemiologi di lapangan, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

7 https://labkesmasbatam.id/wp-content/uploads/2022/10/PMK-No.-1501-Th-2010-ttg-Jenis-Penyakit-Menular-Tertentu-Yang-Menimbulkan-Wabah.pdf

Gambar 5.65. Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di DKI Jakarta Tahun 2024

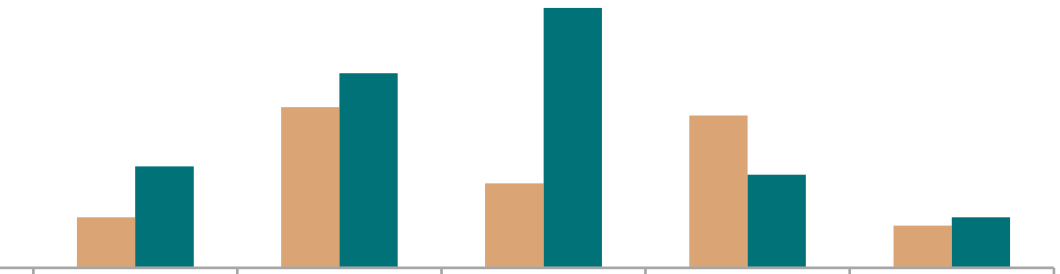


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Kelurahan STBM	43	31	57	65	65	6
Kelurahan Melakukan STBM	37	23	40	52	32	6

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Ada berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk menurunkan penyakit menular yang ada di masyarakat. Salah satu pendekatannya adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang dapat menurunkan penyakit menular seperti diare dengan persentase keberhasilannya adalah 94%. menurut Kementerian Kesehatan, pilar STBM yang dapat diterapkan oleh masyarakat yang ada di Kelurahan antara lain:[8] Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah rangga, pengamanan sampai rumah tangga, dan pengamanan limbah cair rumah tangga. Dari data dan grafik di atas membandingkan nilai jumlah kelurahan dengan jumlah kelurahan yang telah melakukan STBM di wilayah DKI Jakarta. Persentase kelurahan yang telah melaksanakan STBM paling banyak berada di Kepulauan Seribu 100%, Jakarta Pusat sebesar 86%, Jakarta Selatan sebesar 80%, Jakarta Utara sebesar 74%, Jakarta Barat sebesar 70%, dan paling kecil adalah Jakarta Timur sebanyak 49%. Secara keseluruhan, wilayah DKI Jakarta sudah melakukan komitmen STBM yang sangat baik untuk setiap kelurahannya secara khusus Kepulauan Seribu walaupun berbentuk Kepulauan namun tetap menjaga sanitas yang sangat baik untuk seluruh warganya. dan perlu monitoring dan pendampingan khususnya wilayah Jakarta Timur sehingga setiap masyarakat dapat hidup bersih dan sanitasi yang layak walaupun luas dan padatnya di kawasan tersebut.

Gambar 5.66. Jumlah Kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	9	6	19	10	18	5
2024	9	12	23	38	11	6

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

8 Kemenkes, "Turunkan Angka Penyakit Menular Melalui STBM", https://kemkes.go.id/id/%20turunkan-angka-penyakit-menular-melalui-stbm, (Rabu, 28 Januari 2026, 15:00)

Berdasarkan data dan grafik di atas, ditunjukkan perbandingan antara jumlah kelurahan dan jumlah kelurahan yang telah melaksanakan STBM di wilayah DKI Jakarta. Persentase kelurahan yang telah melaksanakan STBM tertinggi terdapat di Kepulauan Seribu sebesar 100%, diikuti Jakarta Pusat sebesar 86%, Jakarta Selatan sebesar 80%, Jakarta Utara sebesar 74%, Jakarta Barat sebesar 70%, dan persentase terendah terdapat di Jakarta Timur sebesar 49%.

Secara keseluruhan, wilayah DKI Jakarta telah menunjukkan komitmen yang sangat baik dalam pelaksanaan STBM di setiap kelurahan. Kepulauan Seribu, meskipun memiliki karakteristik wilayah kepulauan, tetap mampu menjaga sanitasi yang baik bagi seluruh warganya. Namun demikian, diperlukan monitoring dan pendampingan secara berkelanjutan, khususnya di wilayah Jakarta Timur, agar seluruh masyarakat dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan memiliki akses terhadap sanitasi yang layak, meskipun wilayah tersebut memiliki tingkat kepadatan dan luas kawasan yang tinggi.

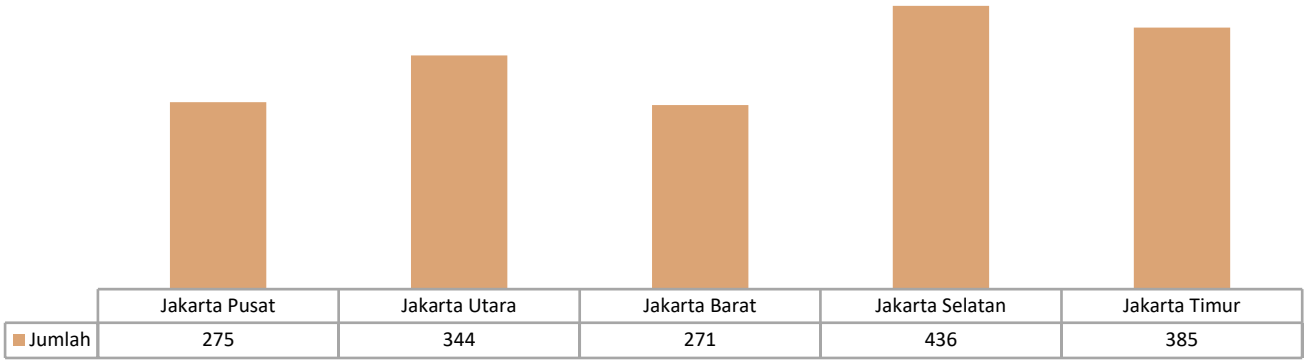
Desa atau kelurahan *Open Defecation Free* (ODF) adalah desa atau kelurahan yang 100% masyarakatnya telah melakukan buang air besar di jamban sehat, sehingga mencerminkan perubahan perilaku masyarakat yang termasuk dalam pelaksanaan STBM. menurut Al Asyary, Karakteristik desa/kelurahan dikatakan ODF jika memenuhi syarat-syarat seperti :

1. Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban dan membuang kotoran bayi hanya ke jamban.
2. Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar.
3. Tidak ada bau yang tidak sedap akibat kotoran tinja manusia.
4. Ada peningkatan kualitas jamban yang ada supaya semua menuju jamban yang sehat.
5. Ada mekanisme monitoring akibat peningkatan kualitas jamban.
6. Ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat.
7. Ada mekanisme monitoring umum yang dibuat oleh masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai jamban sehat.
8. DI sekolah terdapat sarana jamban dan tempat cuci tangan (dengan sabun) yang dapat digunakan murid-murid saat jam sekolah.
9. Terdapat analisis kelembagaan yang kuat untuk menciptakan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien sehingga tujuan ODF dapat tercapai[9].

Berdasarkan data dan grafik di atas, dari total 267 kelurahan terdapat 99 kelurahan di wilayah DKI Jakarta yang telah memenuhi karakteristik desa atau kelurahan ODF pada tahun 2024. Terdapat tren peningkatan dibandingkan tahun 2023 di wilayah Jakarta Selatan sebanyak 28 kelurahan, disusul Jakarta Utara sebanyak 6 kelurahan, Jakarta Barat sebanyak 4 kelurahan, serta Kepulauan Seribu sebanyak 1 kelurahan. Sebaliknya, wilayah Jakarta Timur mengalami tren penurunan sebanyak 7 kelurahan, sedangkan wilayah Jakarta Pusat menggambarkan nilai kondisi yang relatif konsisten. Penurunan di wilayah Jakarta Timur perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi, mengingat tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Oleh karena itu, setiap kelurahan perlu berada dalam kondisi sanitasi yang bersih dan sehat, khususnya bagi kelurahan yang melaksanakan program ODF.

9 Al Alsyary, Open Defecation Free (ODF): Pengelolaan Risiko Penyakit Berbasis Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan. (Jakarta, 2022). Hal.18.

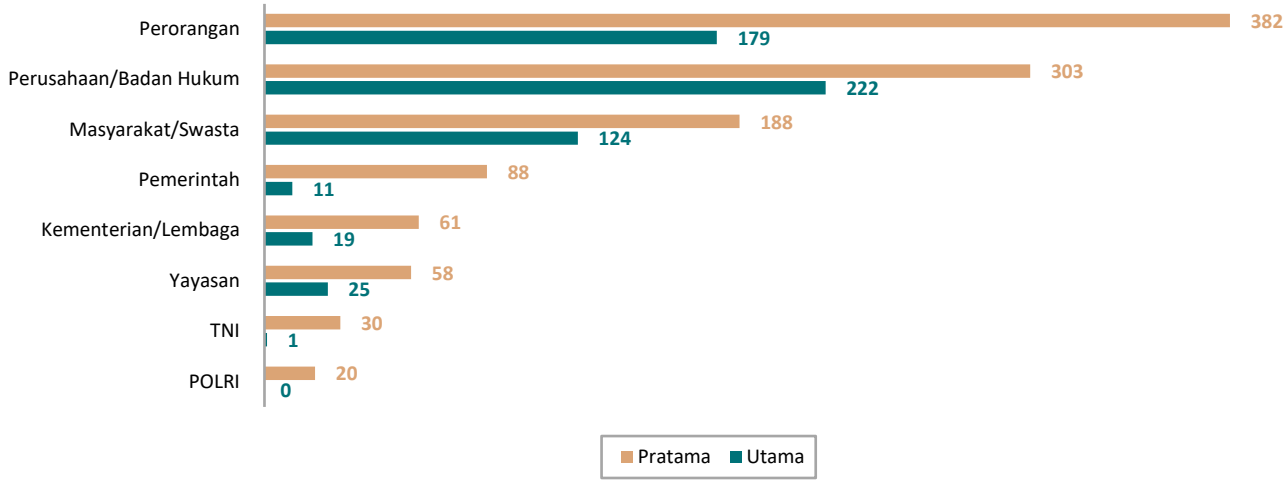
Gambar 5.67. Jumlah Klinik per Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
Jumlah	275	344	271	436	385

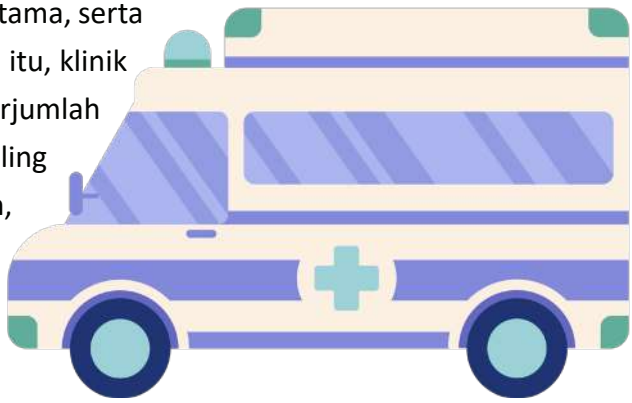
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 5.68. Jumlah Klinik per Kecamatan menurut Status Kepemilikan dan Jenis Klinik di DKI Jakarta Tahun 2024

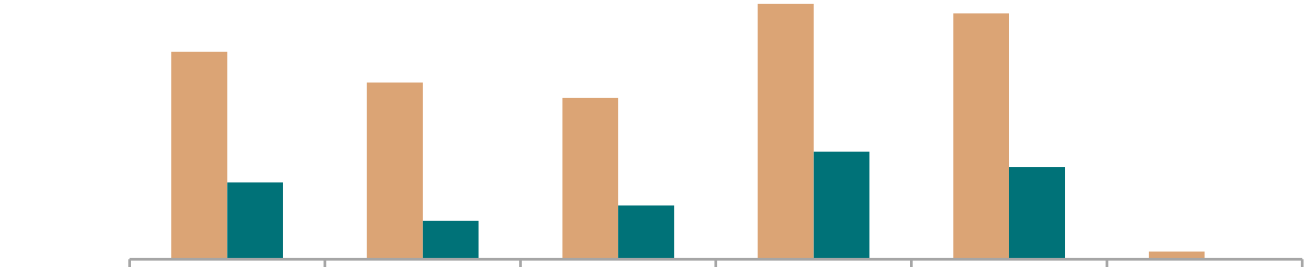


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Jakarta Selatan memiliki jumlah klinik terbanyak, yaitu 436 klinik, disusul Jakarta Timur sebanyak 385 klinik, Jakarta Utara sebanyak 344 klinik, Jakarta Pusat sebanyak 275 klinik, dan Jakarta Barat sebanyak 271 klinik. Data dan grafik kedua membandingkan nilai dinamika pengelolaan klinik di DKI Jakarta sepanjang tahun 2024, khususnya klinik pratama dan klinik utama. menurut Kementerian Kesehatan, klinik pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar, meliputi pelayanan dokter umum, dokter gigi umum, tindakan medis sederhana, pelayanan kebidanan sederhana, serta pelayanan administrasi rekam medis. Kategori perorangan menjadi penyumbang terbesar jumlah klinik pratama, yaitu sebanyak 382 klinik. Selanjutnya diikuti oleh perusahaan atau badan hukum sebanyak 303 klinik pratama, masyarakat/swasta sebanyak 188 klinik pratama, serta klinik pemerintah sebanyak 88 klinik pratama. Selain itu, klinik pratama yang dikelola oleh kementerian/lembaga berjumlah 61 klinik, yayasan sebanyak 58 klinik, dan jumlah paling kecil dikelola oleh TNI dan Polri. Secara keseluruhan, hampir 70% klinik di DKI Jakarta dikelola oleh sektor privat, seperti perorangan, perusahaan, dan swasta, baik klinik pratama maupun klinik utama.



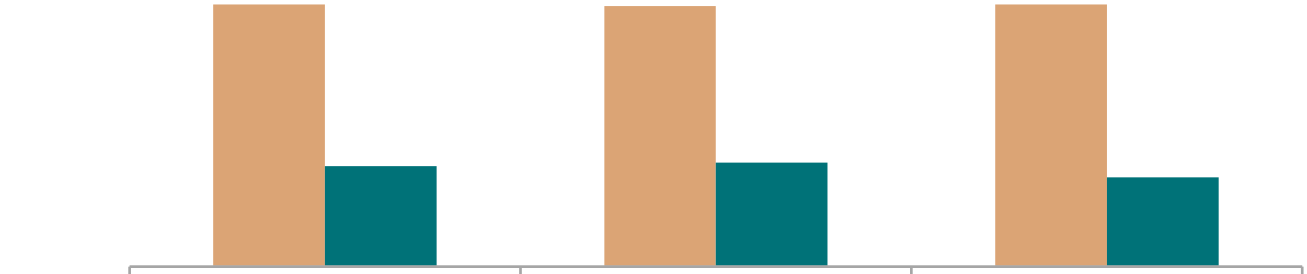
Gambar 5.69. Jumlah Rumah Sakit dengan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
RS. Umum	27	23	21	37	32	1
RS. Khusus	10	5	7	14	12	0

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 5.70. Jenis Rumah Sakit dengan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus Diberikan Sarana Kesehatan di DKI Jakarta Tahun 2022-2024



	2022	2023	2024
RS. Umum	141	140	141
RS. Khusus	54	56	48

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Unit Gawat Darurat (UGD) merupakan salah satu tujuan utama yang penting saat pasien datang ke fasilitas kesehatan dalam keadaan mengancam nyawa. Oleh sebab itu, baik Klinik maupun Rumah Sakit wajib menyediakan ruang UGD dalam aktivitas pelayannya. Pelayanan gawat darurat dibagi kedalam 5 tingkatan yaitu:

- Level 1 (harus segera ditolong)
- Level 2 (Gawat darurat)
- Level 3 (Berpotensi mengalami perburukan)
- Level 4 (Kondisi serius namun bukan kegawat darurat)
- Level 5 (Tidak mendesak)

Secara umum pelayanan gawat darurat pada level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang harus memiliki pelayanan dokter umum on site selama 24 jam. Jenis-jenis pelayanan dan fasilitas untuk pelayanan gawat darurat pada level 1 di atur berdasarkan Kementerian Kesehatan No. 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan[10].

Berdasarkan data dan grafik pertama, ditunjukkan persebaran pelayanan gawat darurat Level 1 di seluruh wilayah DKI Jakarta. Wilayah dengan jumlah agregasi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus tertinggi adalah Jakarta Selatan sebanyak 51 rumah sakit, disusul Jakarta Timur sebanyak 44

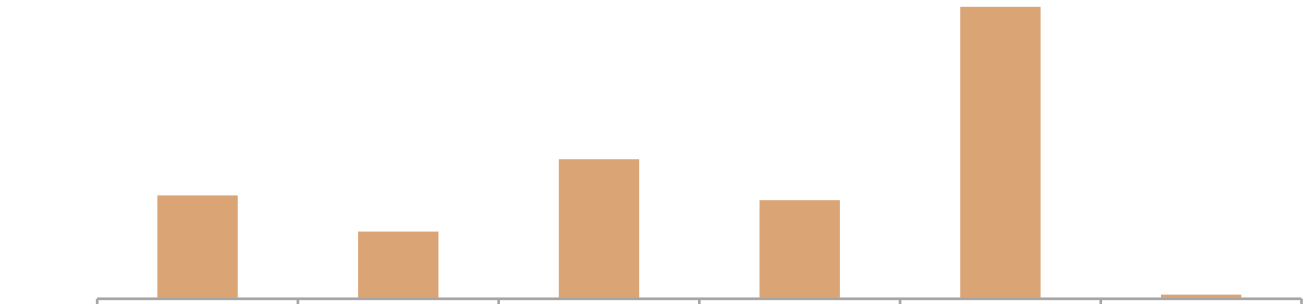
10 https://pdf2.sumselgo.id/ppiddinkes/unggah/33242327-PMK47-tahun-2018-tentang-pelayanan-kegawatdaruratan.pdf

rumah sakit, Jakarta Pusat sebanyak 37 rumah sakit, serta Jakarta Utara dan Jakarta Barat yang masing-masing memiliki 28 rumah sakit. Wilayah dengan jumlah paling sedikit adalah Kepulauan Seribu dengan 1 rumah sakit. Secara keseluruhan, wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih besar dan aktivitas perkotaan yang lebih intens, seperti Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, cenderung memiliki kapasitas layanan gawat darurat yang lebih tinggi, baik pada rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus. Kondisi ini menggambarkan komitmen dan kesiapsiagaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan layanan kegawatdaruratan di wilayah perkotaan. Namun demikian, pelayanan gawat darurat tetap diupayakan tersedia secara optimal, termasuk di wilayah Kepulauan Seribu.

Data dan grafik kedua membandingkan nilai jumlah rumah sakit dengan pelayanan gawat darurat Level 1 di DKI Jakarta pada periode 2022–2024. Jumlah rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan gawat darurat Level 1 terlihat relatif konsisten dan stabil dari tahun ke tahun. Terdapat penurunan yang tidak signifikan, yaitu sebanyak satu rumah sakit umum pada tahun 2023, kemudian kembali meningkat satu rumah sakit pada tahun 2024. Hal ini menjelaskan bahwa kapasitas layanan gawat darurat rumah sakit umum di DKI Jakarta telah berada pada kondisi yang stabil.

Sementara itu, rumah sakit khusus menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, dengan peningkatan sebanyak dua rumah sakit pada tahun 2023, namun kemudian mengalami penurunan sebanyak delapan rumah sakit. Data tersebut mencerminkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan spesialis di wilayah DKI Jakarta. Secara keseluruhan, data tersebut mengindikasikan bahwa DKI Jakarta memiliki kesiapan layanan gawat darurat yang kuat dan relatif stabil dari waktu ke waktu, dengan distribusi layanan yang dominan di wilayah perkotaan dan padat penduduk.

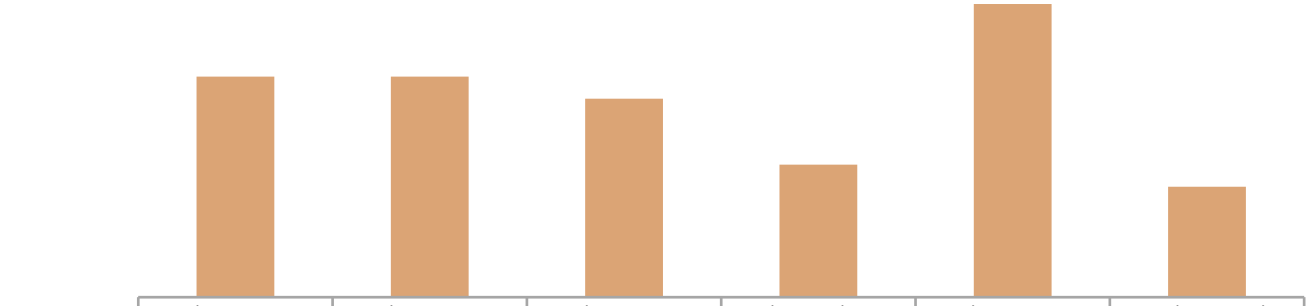
Gambar 5.71. Jumlah Keluarga Ketuk Pintu Layani dengan Hati (KPLDH) yang Dikunjungi dan Diintervensi di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jumlah	20.934	13.590	28.233	19.952	59.128	834

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 5.72. Nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS) di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Nilai Indeks	0,64	0,64	0,63	0,60	0,69	0,59

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah dapat mengukur derajat kesehatan masyarakat, baik di tingkat daerah maupun nasional, yang meliputi aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan melalui indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS). Dengan mengetahui nilai IKS, pemerintah daerah dapat merumuskan intervensi kebijakan kesehatan di wilayahnya guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu program yang dapat meningkatkan nilai IKS di daerah adalah program pendekatan berbasis keluarga, contohnya program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH). Berbagai kegiatan dalam program KPLDH antara lain sensus kesehatan, pengajaran budaya hidup sehat oleh komunitas, vaksinasi, pemantauan jentik nyamuk (jumantik), serta pemeriksaan masalah kesehatan secara rutin. Berdasarkan data dan grafik pertama, ditunjukkan distribusi jumlah pelaksanaan program KPLDH di wilayah DKI Jakarta. Jakarta Timur merupakan wilayah dengan jumlah kunjungan tertinggi, yaitu mencapai 59.128 keluarga. Selanjutnya diikuti oleh Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan dengan masing-masing jumlah kunjungan sebanyak 28.233, 20.934, dan 19.952 keluarga. Sementara itu, wilayah Kepulauan Seribu mencatat jumlah kunjungan terendah, yaitu sebanyak 834 keluarga. Data tersebut mengindikasikan bahwa wilayah dengan jumlah penduduk yang besar menjadi fokus utama pelaksanaan program KPLDH. Semakin banyak keluarga yang dikunjungi, semakin besar pula potensi intervensi kesehatan untuk mendorong perubahan perilaku hidup sehat. Data dan grafik kedua menggambarkan sebaran nilai IKS di seluruh wilayah DKI Jakarta. Jakarta Timur memiliki nilai IKS tertinggi, yaitu sebesar 0,69, disusul Jakarta Pusat dan Jakarta Utara dengan masing-masing sebesar 0,64, serta Jakarta Barat sebesar 0,63. Sementara itu, Jakarta Selatan memiliki nilai IKS sebesar 0,60, dan Kepulauan Seribu mencatat nilai IKS terendah sebesar 0,59. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat kunjungan KPLDH yang tinggi cenderung memiliki nilai IKS yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa program KPLDH efektif dalam meningkatkan perilaku hidup sehat. Sebaliknya, wilayah dengan jumlah kunjungan yang relatif rendah cenderung memiliki nilai IKS yang lebih rendah pula.

Gambar 5.73. Jumlah Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standard di Provinsi DKI Jakarta



	2023	2024
Puskesmas	336	336
RSUD	32	31

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

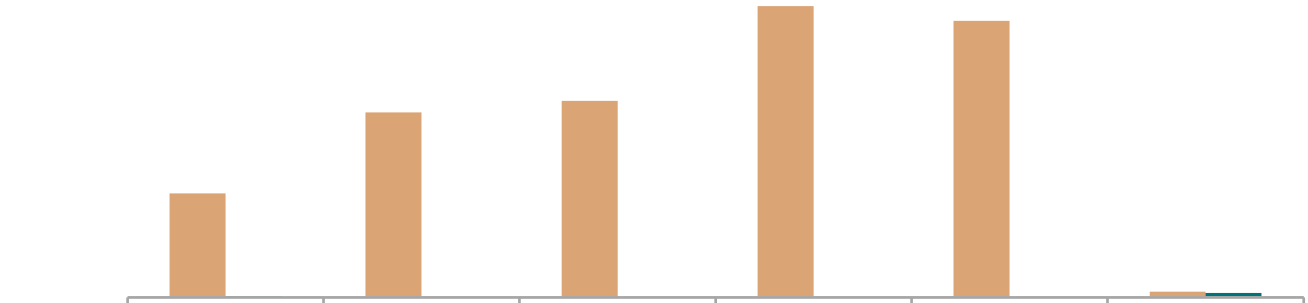
Pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus diberikan secara optimal agar masyarakat memiliki kualitas hidup yang baik. Dalam implementasinya, pemerintah mengatur standar minimal yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan[11].

11 https://peraturan.bpk.go.id/Details/111713/permenkes-no-4-tahun-2019

Berdasarkan data dan grafik di atas, ditunjukkan bahwa jumlah fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2023–2024 yang telah memenuhi standar relatif konsisten dari tahun ke tahun. Untuk unit puskesmas, jumlahnya berada pada angka 336 baik pada tahun 2023 maupun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan puskesmas di DKI Jakarta relatif stabil, serta upaya standarisasi layanan kesehatan dasar telah berjalan secara merata di seluruh wilayah.

Sementara itu, jumlah RSUD mengalami penurunan yang tidak signifikan, dari 32 RSUD pada tahun 2023 menjadi 31 RSUD pada tahun 2024. Secara keseluruhan, data dan grafik tersebut menunjukkan bahwa wilayah DKI Jakarta memiliki kinerja layanan kesehatan yang relatif stabil, khususnya pada fasilitas puskesmas dan RSUD.

Gambar 5.74. Jumlah Pos Pelayanan Terpadu di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Aktif	450	798	849	1.257	1.193	25
Tidak Aktif	6	0	1	0	0	20

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

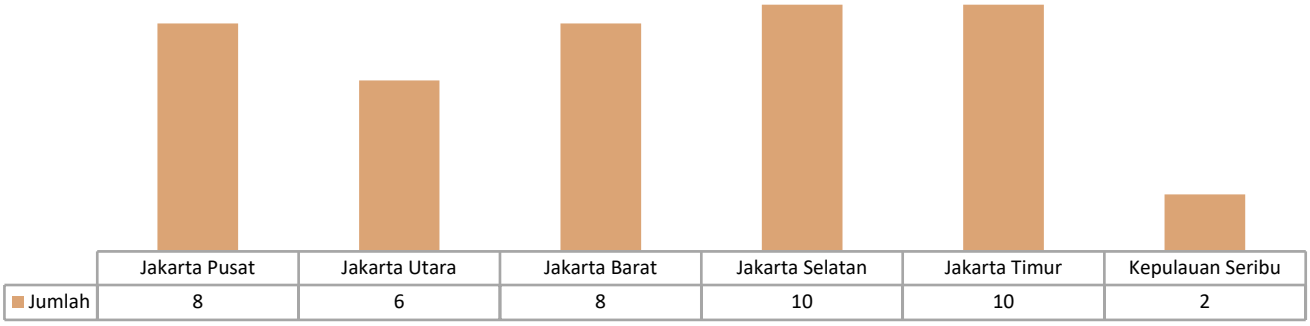
Posyandu merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang berperan sebagai garda terdepan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di DKI Jakarta. Posyandu berfungsi sebagai sarana untuk mendukung tumbuh kembang bayi, menurunkan angka kematian ibu, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu pada masa kehamilan dan persalinan. Berdasarkan status pelayanannya, posyandu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu posyandu aktif dan posyandu tidak aktif. menurut Kementerian Kesehatan, faktor-faktor yang membuat posyandu aktif adalah :

1. Melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 8 kali/tahun yaitu melakukan kegiatan hari bukan layanan posyandu minimial 8 kali/tahun dalam bulan yang berbeda.
2. Mempunayi kader minimal 5 orang yang disahkan dengan surat keputusan Kepala Desa/Lurah.
3. Mempunyai sebanyak 3 dari 4 layanan di posyandu memenuhi cakupan minimal 50% sebanyak 8 bulan dalam setahun (Gizi, KIA, KB, Imunisasi)
4. Memiliki alat pertumbuhan (alat ukur panjang, badan bayi, alat ukur tinggi badan, timbangan bayi, timbangan dewasa dan perlengkapan)[12].

12 Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, “Penjelasan DO Indikator Posyandu Aktif” (Jakarta) Hal. 4

Berdasarkan data dan grafik di atas, persentase posyandu tidak aktif paling tinggi terdapat di tiga wilayah, yaitu Kepulauan Seribu sebesar 44,4%, Jakarta Pusat sebesar 1,33%, dan Jakarta Barat sebesar 0,12%. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa posyandu aktif di wilayah perkotaan DKI Jakarta telah mencapai ≥ 98%, sehingga kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi dapat dikatakan telah berjalan secara optimal. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan wilayah Kepulauan Seribu yang hanya mencapai 65,6%. Oleh karena itu, diperlukan inovasi layanan kesehatan agar meskipun wilayah tersebut berbentuk kepulauan dan memiliki keterbatasan aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak tetap dapat diberikan secara optimal.

Gambar 5.75. Jumlah Puskesmas Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta

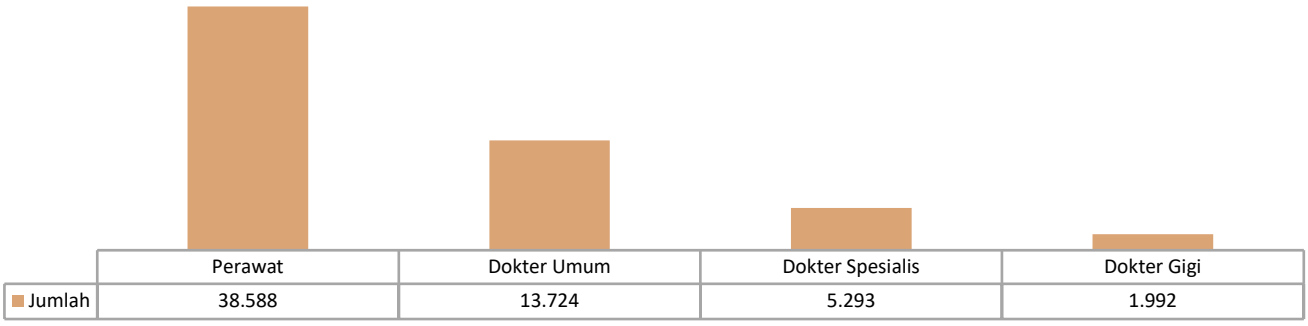


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jumlah	8	6	8	10	10	2

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Selain klinik dan rumah sakit, puskesmas merupakan garda terdepan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan puskesmas sangat penting karena memiliki jangkauan aksesibilitas yang paling dekat dengan masyarakat. Dari total 44 kecamatan yang ada di wilayah DKI Jakarta, tersedia 44 puskesmas yang melayani seluruh kecamatan tersebut, baik pada tahun 2023 maupun 2024. Data dan grafik tersebut mengindikasikan bahwa persentase ketersediaan puskesmas untuk menjangkau seluruh kecamatan di wilayah DKI Jakarta telah mencapai 100%.

Gambar 5.76. Jenis Tenaga Kesehatan yang Kompeten di DKI Jakarta Tahun 2024



	Perawat	Dokter Umum	Dokter Spesialis	Dokter Gigi
Jumlah	38.588	13.724	5.293	1.992

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

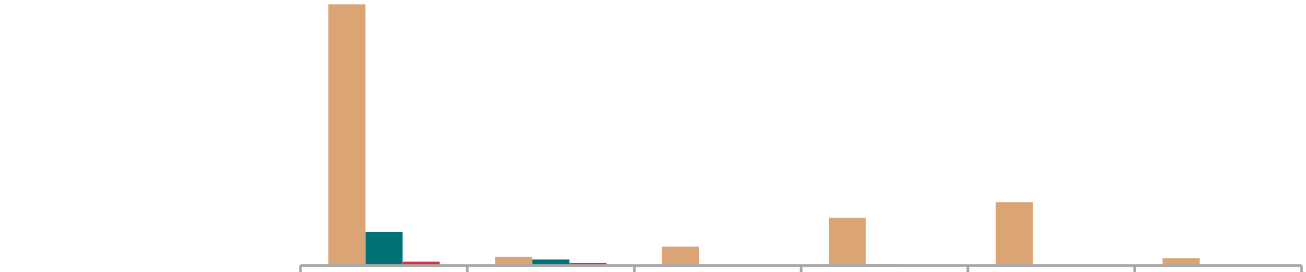
Tenaga kesehatan yang kompeten merupakan setiap orang yang bekerja atau mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki kemampuan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk menjalankan praktik di bidang kesehatan. Untuk dapat dikatakan kompeten, tenaga kesehatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sehingga diakui oleh negara. Peraturan yang mengatur tentang tenaga kesehatan yang

kompeten tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan[13]. Jenis-jenis tenaga kesehatan yang dimaksud antara lain perawat, dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, tenaga psikologis, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga kebidanan, dan lain-lain.

Berdasarkan data dan grafik di atas, membandingkan nilai proporsi tenaga kesehatan yang kompeten di DKI Jakarta pada tahun 2024. Dari jumlah agregat sebanyak 59.597 tenaga kesehatan yang kompeten, persentase terbesar merupakan perawat sebesar 65%, diikuti oleh dokter umum sebesar 23%, dokter spesialis sebesar 9%, dan persentase paling kecil adalah dokter gigi sebesar 3%.

Jenis tenaga perawat yang dikategorikan sebagai kompeten meliputi perawat kesehatan masyarakat, perawat kesehatan anak, perawat maternitas, perawat geriatri, dan lain-lain. Secara keseluruhan, data tersebut mengindikasikan bahwa peran perawat sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan, khususnya dalam mendukung aktivitas pengasuhan, pemeliharaan, serta edukasi kesehatan, baik dalam kondisi sakit maupun sehat.

Gambar 5.77. Jumlah Tenaga Penunjang Kesehatan yang kompeten di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Tenaga Dukungan Manajemen	3.305	110	239	604	802	95
Pejabat Struktural	424	79	10	12	9	2
Tenaga Pendidik	49	31	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Selain tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, tenaga penunjang kesehatan mempunyai kontribusi penting dalam keberhasilan pelayanan kesehatan. menurut Peraturan Kementerian Kesehatan No. 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, Tenaga penunjang kesehatan terdiri dari tiga jenis yaitu:

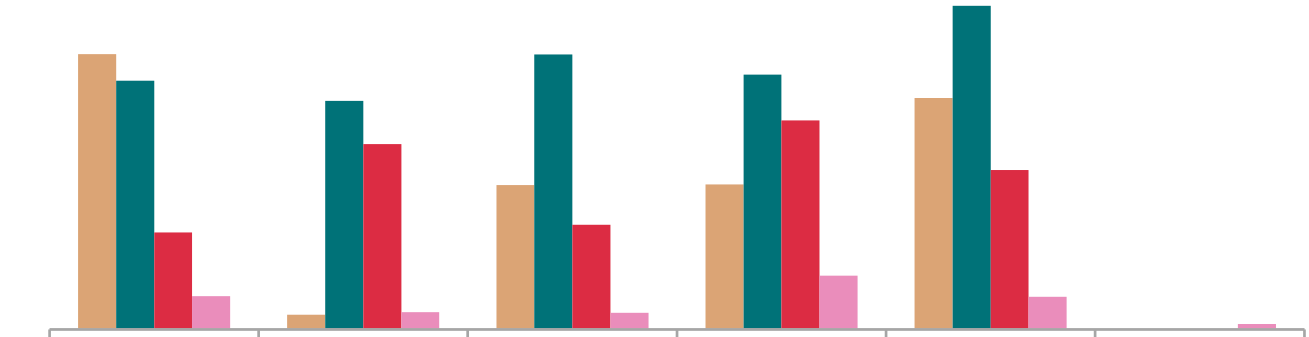
1. Tenaga dukungan manajemen yang meliputi profesi seperti: Pengelola program kesehatan, Staf penunjang administrasi, Staf penunjang teknologi, Staf penunjang perencanaan dan Tenaga penunjang kesehatan lainnya.
2. Pejabat Strukutral yang meliputi profesi seperti: Kepala Instansi Kesehatan & Kepala Tata Usaha di bidang kesehatan.
3. Tenaga Pendidik yang meliputi profesi seperti: Pustakawan, Tenaga administrasi, Laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi di bidang kesehatan[14].

13 https://peraturan.bpk.go.id/Details/117618/permenkes-no-36-tahun-2014
14 ttps://peraturan.bpk.go.id/Details/152506/permenkes-no-3-tahun-2020

Berdasarkan data dan grafik di atas, ditunjukkan total agregasi tenaga penunjang yang kompeten di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2024. Tenaga dukungan manajemen tercatat sebanyak 5.115 orang, dengan jumlah terbanyak berada di wilayah Jakarta Pusat sebanyak 3.305 orang dan jumlah paling sedikit di wilayah Kepulauan Seribu sebanyak 95 orang. Untuk tenaga pejabat struktural, jumlah terbanyak juga terdapat di wilayah Jakarta Pusat, yaitu sebanyak 424 orang, sedangkan jumlah paling sedikit terdapat di wilayah Kepulauan Seribu sebanyak 2 orang. Sementara itu, tenaga pendidik paling banyak dijumpai di wilayah Jakarta Pusat sebanyak 49 orang, dan tidak ditemukan di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, maupun Kepulauan Seribu.

Secara keseluruhan, wilayah DKI Jakarta menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya peran tenaga penunjang kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Namun demikian, diperlukan peningkatan jumlah tenaga pendukung, khususnya tenaga pendidik, di beberapa wilayah seperti Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Gambar 5.78. Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit menurut Jenis Kelas Rumah Sakit di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
A	2.523	135	1.321	1.327	2.121	0
B	2.279	2.094	2.520	2.334	3.037	0
C	888	1.698	959	1.915	1.461	0
D	305	157	151	491	297	50

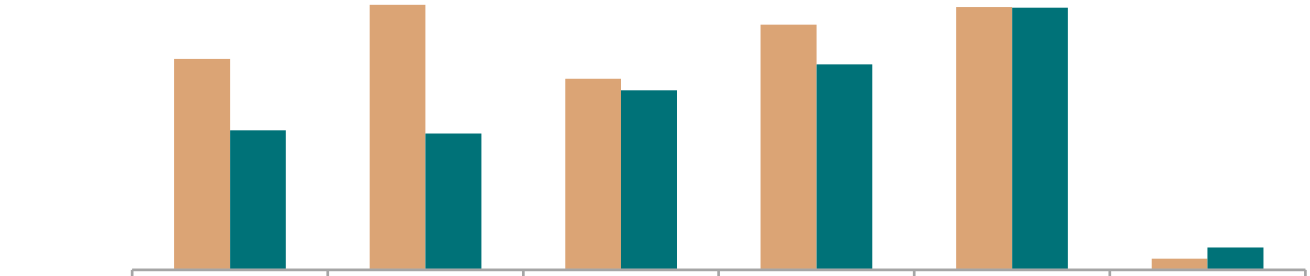
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Salah satu klasifikasi pembagian jenis Rumah Sakit adalah berdasarkan ketersediaan tempat tidur. Peraturan yang relevan dengan hal tersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, jenis pembagiannya Rumah Sakit berdasarkan kapasitas tempat tidurnya antara lain:

1. Rumah Sakit tipe A mempunyai ≤ 250 tempat tidur.
2. Rumah Sakit tipe B mempunyai ≤ 200 tempat tidur.
3. Rumah Sakit tipe C mempunyai ≤ 100 tempat tidur.
4. Rumah Sakit tipe D mempunyai ≤ 50 tempat tidur.

Grafik di atas menjelaskan bahwa hanya wilayah Jakarta Utara yang belum memenuhi klasifikasi berdasarkan kapasitas tempat tidur untuk Rumah Sakit Tipe A, sedangkan wilayah Kepulauan Seribu tidak memiliki Rumah Sakit bertipe A,B, dan C hanya mempunyai Rumah Sakit tipe D yaitu RSUD Kepulauan Seribu.

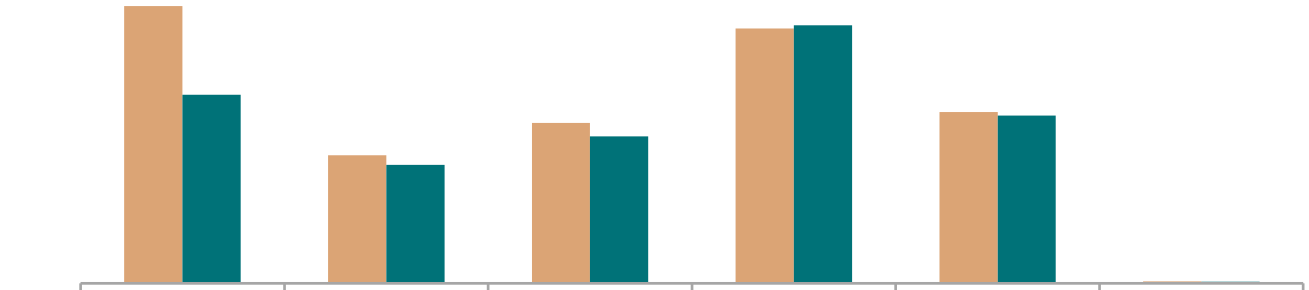
Gambar 5.79. Jumlah SDM yang Menerapkan *Hospitality* sesuai standar dalam Pelayanan DKI Jakarta



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
RSUD	2.723	3.420	2.467	3.165	3.390	147
Puskesmas	1.801	1.761	2.319	2.651	3.385	291

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

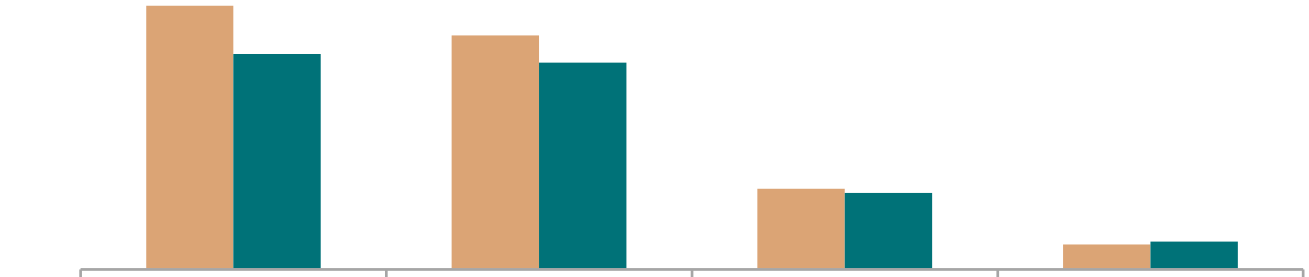
Gambar 5.80. Jumlah Tenaga Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	9.240	3.976	4.985	7.913	5.322	58
2024	5.862	3.679	4.566	8.020	5.215	54

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 5.81. Jumlah Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standard di Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta



	Dokter Umum	Dokter spesialis	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis
2023	13.817	12.170	4.200	1.307
2024	11.201	10.757	3.977	1.461

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

QR 5.79.

Puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada masyarakat serta lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Setiap puskesmas wajib didukung oleh tenaga kesehatan yang memenuhi standar, memiliki keterampilan, serta kewenangan dalam melaksanakan upaya tersebut.

menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan jenis tenaga kesehatan di puskesmas antara lain dokter, perawat, bidan, nutrisionis, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan lingkungan, dan tenaga laboratorium[15]. Dengan

15 https://peraturan.bpk.go.id/Details/288060/permenkes-no-6-tahun-2024

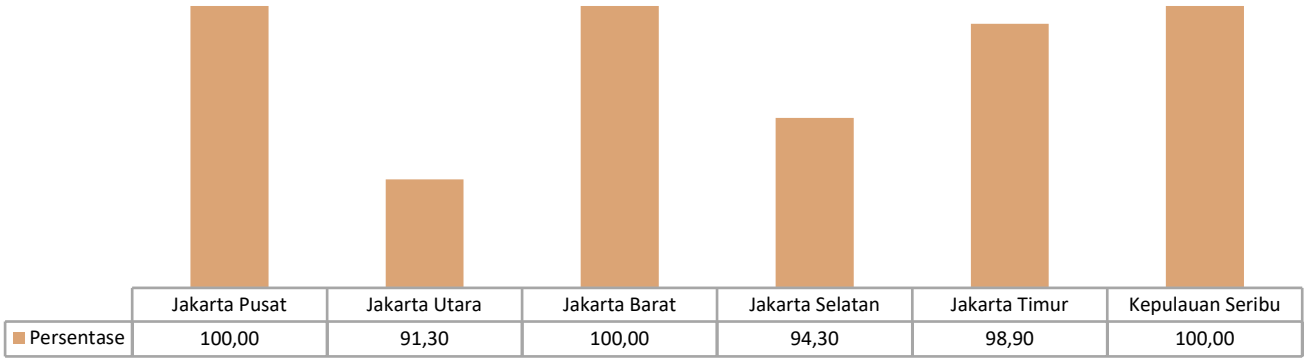
QR 5.80.-5.81.

tersedianya tenaga kesehatan yang memenuhi standar di puskesmas hingga tingkat kecamatan, hal tersebut mengindikasikan bahwa layanan tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk menjamin aksesibilitas pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat. Kondisi ini memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat ketika mengalami gangguan kesehatan di wilayah tempat tinggalnya. Berdasarkan data dan grafik pertama, ditunjukkan sebaran tenaga kesehatan sesuai standar di puskesmas tingkat kecamatan di Provinsi DKI Jakarta. Wilayah Jakarta Pusat mengalami tren penurunan yang signifikan, yaitu sebanyak 3.378 tenaga kesehatan, disusul oleh Jakarta Barat sebanyak 419 tenaga, Jakarta Utara sebanyak 297 tenaga, dan Jakarta Timur sebanyak 107 tenaga. Penurunan paling sedikit terjadi di wilayah Kepulauan Seribu, yaitu sebanyak 4 tenaga kesehatan. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan wilayah Jakarta Selatan yang justru mengalami peningkatan signifikan, yaitu sebanyak 107 tenaga kesehatan. Distribusi ini menunjukkan perlunya evaluasi terkait pemerataan layanan kesehatan sesuai standar di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan data dan grafik kedua, terlihat tren perubahan jumlah tenaga kesehatan pada periode 2023–2024. Dokter umum mengalami penurunan sebanyak 2.616 tenaga, dokter spesialis menurun sebanyak 1.413 tenaga, dan dokter gigi mengalami penurunan sebanyak 223 tenaga. Namun demikian, profesi dokter gigi spesialis menunjukkan tren peningkatan sebanyak 154 tenaga.

Secara keseluruhan, data tersebut mengindikasikan adanya pergeseran fokus pemenuhan sumber daya manusia serta redistribusi layanan kesehatan di tingkat puskesmas di DKI Jakarta, khususnya pada penguatan kompetensi spesialis dokter gigi.

Gambar 5.82. Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Persentase	100,00	91,30	100,00	94,30	98,90	100,00

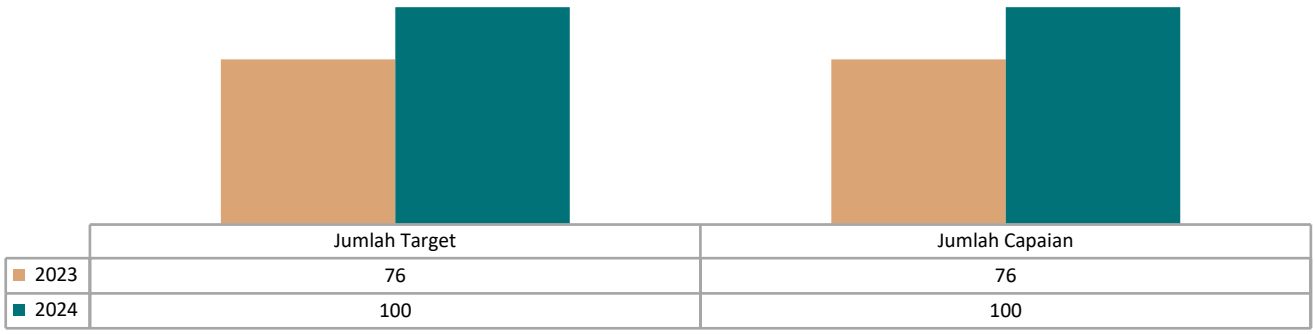
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang perkembangannya sangat dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan serta pengembangan dan kemajuan teknologi, khususnya di bidang kesehatan. Oleh karena itu, mutu dan kualitas pelayanan rumah sakit perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan dampak dan manfaat yang optimal bagi masyarakat, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Salah satu langkah dalam pengembangan dan pemenuhan layanan unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD) di wilayah DKI Jakarta adalah pengembangan sarana dan prasarana alat kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan data dan grafik di atas, ditunjukkan persentase pemenuhan layanan unggulan RSD di wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024. Persentase tertinggi terdapat di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu yang masing-masing mencapai 100%. Selanjutnya, wilayah Jakarta Timur mencapai 98,30%, Jakarta Selatan sebesar 94,30%, dan Jakarta Utara sebesar 91,30%. Data tersebut mengindikasikan bahwa hampir seluruh wilayah di DKI Jakarta telah menghadirkan layanan unggulan di RSD, dengan capaian persentase di seluruh wilayah mencapai ≥ 90%.

Meskipun wilayah Kepulauan Seribu memiliki karakteristik geografis berupa kepulauan, kondisi tersebut tidak menghambat fasilitas rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang unggul dan berkualitas bagi masyarakat.

Gambar 5.83. Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik PEMPROV DKI Jakarta



	Jumlah Target	Jumlah Capaian
2023	76	76
2024	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

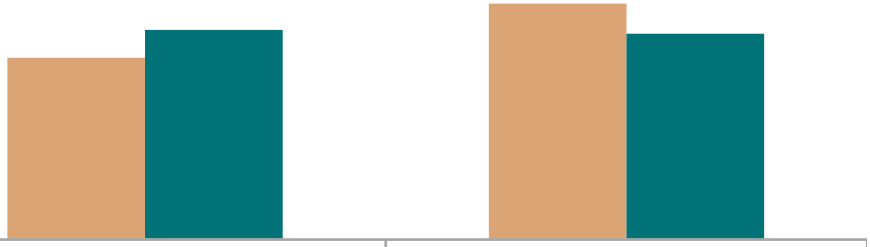
Fasilitas pelayanan kesehatan yang baik harus memenuhi standar akreditasi di bidang kesehatan. Penerapan standar akreditasi mendorong setiap fasilitas kesehatan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanannya kepada pasien, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Standar akreditasi pada fasilitas pelayanan kesehatan mencakup puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi. Ketentuan mengenai standar akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi[16].



Berdasarkan data dan grafik di atas, ditunjukkan persentase perbandingan antara jumlah target dan capaian standar akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terlihat adanya tren kenaikan yang signifikan, yaitu sebesar 24%, hingga mencapai 100% pada periode tahun 2023–2024. Data tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghadirkan fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai dengan standar akreditasi bagi seluruh masyarakat.

16 https://peraturan.bpk.go.id/Details/245554/permenkes-no-34-tahun-2022

Gambar 5.84. Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar berdasarkan jenis kelaminnya di KDI Jakarta Tahun 2024



	Laki-Laki	Perempuan
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	401.337	520.902
Estimasi Penderita	462.722	454.804

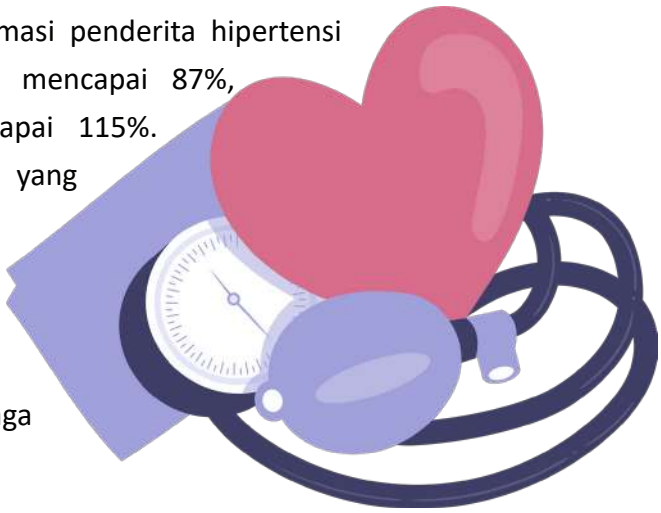
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Hipertensi, atau yang lebih dikenal sebagai penyakit darah tinggi, sering disebut sebagai silent killer. Penyakit ini kerap menyerang tanpa menimbulkan tanda atau gejala yang jelas pada tubuh. menurut Kementerian Kesehatan, hipertensi merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik pada tubuh seseorang ≥ 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari datau sama dengan 90 mmHg.

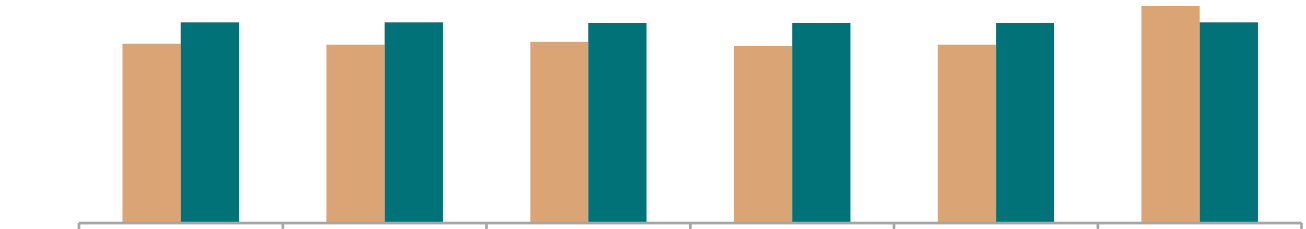
Tujuan pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi yang tidak diharapkan, sehingga kualitas hidup penderita dapat tetap terjaga dengan baik. Selain itu, manfaat bagi penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar antara lain sebagai berikut:

1. Mendapatkan monitoring tekanan darah nya secara teratur.
2. Mendapatkan arahan tentang pola hidup yang sehat terutama tentang diet yang seimbang dan sehat
3. Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk senantiasa melakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit dalam sehari serta mendapatkan KIE tentang tata cara pengelolaan stress yang baik.
4. Mendapatkan obat sesuai dengan kondisi dan keluhannya.

Berdasarkan data dan grafik di atas, rasio antara jumlah individu yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan estimasi penderita hipertensi menunjukkan bahwa pada kelompok laki-laki mencapai 87%, sedangkan pada kelompok perempuan mencapai 115%. Tingginya persentase penderita hipertensi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar, baik pada laki-laki maupun perempuan, menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi penderita hipertensi guna menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatan mereka.



Gambar 5.85. Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standard di DKI Jakarta tahun 2023-2024

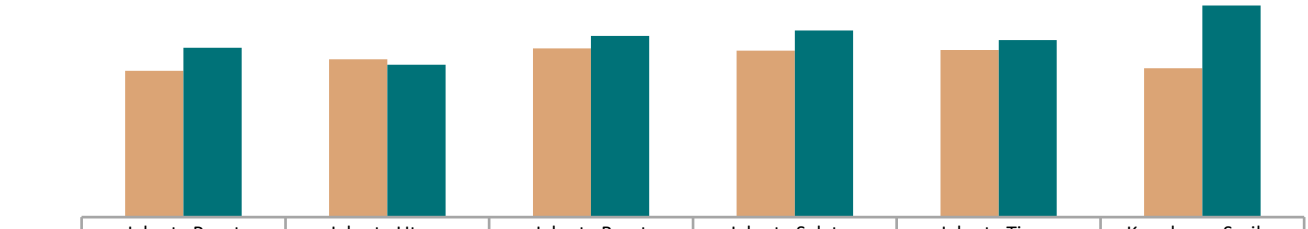


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	40,00	39,80	40,40	39,50	39,80	48,40
2024	44,80	44,80	44,60	44,60	44,60	44,80

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Menurut Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta, sarana kefarmasian meliputi apotek, toko obat berizin, industri rumah tangga pangan, serta usaha mikro obat tradisional yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan standarisasi pelayanan kefarmasian adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan, menjamin keselamatan pasien, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien. Berdasarkan grafik di atas, terlihat adanya peningkatan persentase yang signifikan dalam mutu standarisasi kefarmasian di seluruh wilayah DKI Jakarta. Peningkatan terbesar terjadi di wilayah Jakarta Selatan sebesar 5,10%, disusul Jakarta Utara sebesar 5,00%, Jakarta Timur sebesar 4,80%, Jakarta Pusat sebesar 4,80%, Jakarta Barat sebesar 4,20%, dan Kepulauan Seribu sebesar 3,60%. Peningkatan mutu standar kefarmasian di wilayah DKI Jakarta tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Gambar 5.86. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	69,11%	74,58%	79,71%	78,76%	79,05%	70,37%
2024	80,07%	71,97%	85,73%	88,25%	83,71%	100,00%

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

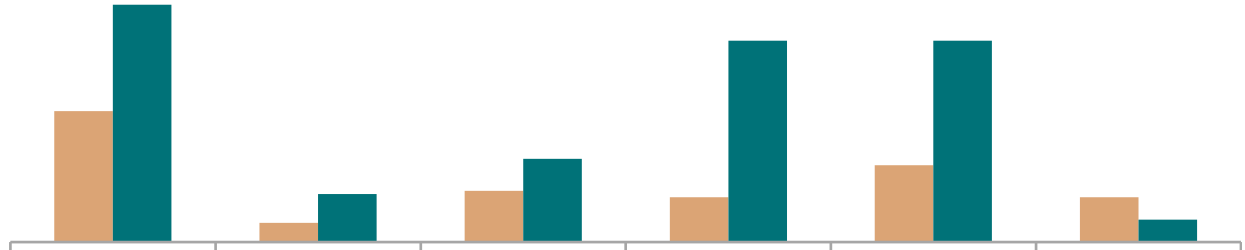
Jenis-jenis Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dapat berupa rumah makan, restoran, kantin, katering, dan warung makan. Pengelolaan TPP harus dilakukan secara higienis dan memenuhi standar sanitasi yang layak agar pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Berdasarkan data dan grafik di atas, ditunjukkan persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi persyaratan sesuai standar di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2023–2024. Peningkatan terbesar terjadi

di wilayah Kepulauan Seribu sebesar 29,63%, disusul Jakarta Pusat sebesar 10,96%, Jakarta Selatan sebesar 9,49%, Jakarta Barat sebesar 6,02%, dan Jakarta Timur sebesar 4,66%. Sebaliknya, wilayah Jakarta Utara mengalami penurunan sebesar 2,61%.

Secara keseluruhan, data tersebut mengindikasikan bahwa wilayah DKI Jakarta memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam menjaga mutu dan pelayanan pangan bagi masyarakat, khususnya pada Tempat Pengelolaan Pangan (TPP). Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui konsumsi makanan yang higienis. Namun demikian, diperlukan evaluasi dan upaya peningkatan kualitas secara khusus di wilayah Jakarta Utara agar standar pengelolaan pangan dapat terus ditingkatkan.

Gambar 5.87. Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Melaksanakan Revitalisasi pelayanan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	41	6	16	14	24	14
2024	84	15	26	63	63	7

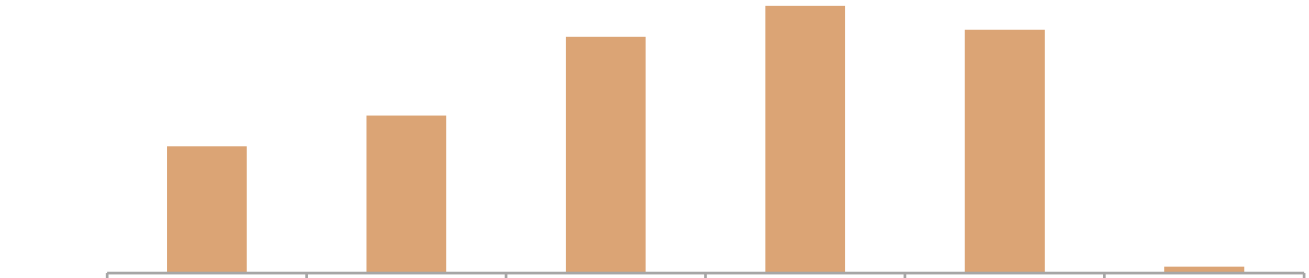
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) merupakan bentuk pengintegrasian layanan kesehatan bagi bayi, balita, usia produktif, ibu, dan/atau lansia yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pemeliharaan kesehatan, edukasi, serta upaya perlindungan diri, baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat dari berbagai ancaman kesehatan. Revitalisasi pelayanan UKBM perlu dilakukan secara berkelanjutan agar UKBM dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Ketentuan teknis yang mengatur jenis serta pembinaan UKBM diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan[17].

Revitalisasi pelayanan UKBM di wilayah DKI Jakarta. Terdapat peningkatan yang signifikan di beberapa wilayah, antara lain Jakarta Selatan sebanyak 49 UKBM, Jakarta Pusat sebanyak 43 UKBM, Jakarta Timur sebanyak 39 UKBM, dan Jakarta Barat sebanyak 10 UKBM. Sementara itu, wilayah Jakarta Utara mengalami penurunan sebanyak 9 UKBM, demikian pula wilayah Kepulauan Seribu yang juga mengalami penurunan sebanyak 9 UKBM. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya tantangan geografis wilayah kepulauan yang menyulitkan jangkauan dan akses pelayanan kesehatan. Namun demikian, secara keseluruhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan peningkatan revitalisasi pelayanan kesehatan, khususnya melalui implementasi UKBM. Hal ini menjadi perhatian penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

17 https://peraturan.bpk.go.id/Details/111722/permenkes-no-8-tahun-2019

Gambar 5.88. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jumlah	917	1.140	1.709	2.052	1.762	45

Sumber: Dinas Kesehatan DKI Jakarta

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan untuk masyarakat di wilayah DKI Jakarta, Peran Pemprov DKI Jakarta sebagai penyedia fasilitas kesehatan dengan aksesibilitas terdekat di seluruh wilayah nya baik perkotaan ataupun kepulauan. Agar masyarakat di wilayah tersebut segera mendapatkan pelayanan kesehatan baik dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Dari data dan grafik di atas menunjukkan bahwa persebaran jumlah fasilitas kesehatan di DKI Jakarta pada tahun 2.025 paling banyak berada di wilayah Jakarta Selatan sebanyak 2.052 faskes, lalu wilayah Jakarta Timur sebanyak 1.762 sebanyak faskes, lalu Jakarta Barat sebanyak 1.709 sebanyak 1709 faskes, diikuti wilayah Jakarta Utara sebanyak 1.140 faskes, lalu wilayah Jakarta Pusat sebanyak 917 faskes, dan paling sedikit wilayah Kepulauan Seribu sebanyak 45 faskes. Secara keseluruhan, DKI Jakarta telah memberikan penyediaan yang optimum dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan paling dekat untuk masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

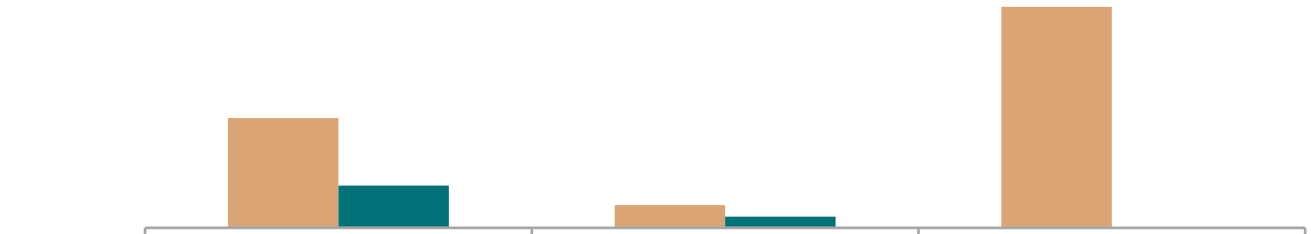
5.4.2. Tenaga Kesehatan

Selain fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di DKI Jakarta. Tenaga kesehatan tersebut meliputi tenaga medis seperti dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis, serta tenaga psikologi klinis, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga biomedik, dan lain-lain.



Tenaga kesehatan tersebut harus memiliki kompetensi, sertifikat profesi, surat izin praktik, serta kualitas kerja yang diakui oleh organisasi profesi kesehatan, baik nasional maupun internasional. Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, masyarakat dapat merasa lebih yakin dan percaya untuk memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang tersedia di DKI Jakarta.

Gambar 5.89. Jumlah Jenis Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis, Umum dan Gigi di DKI Jakarta Tahun 2025



	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis
Rumah Sakit	5.195	1.078	11.667
Puskesmas	2.000	526	13

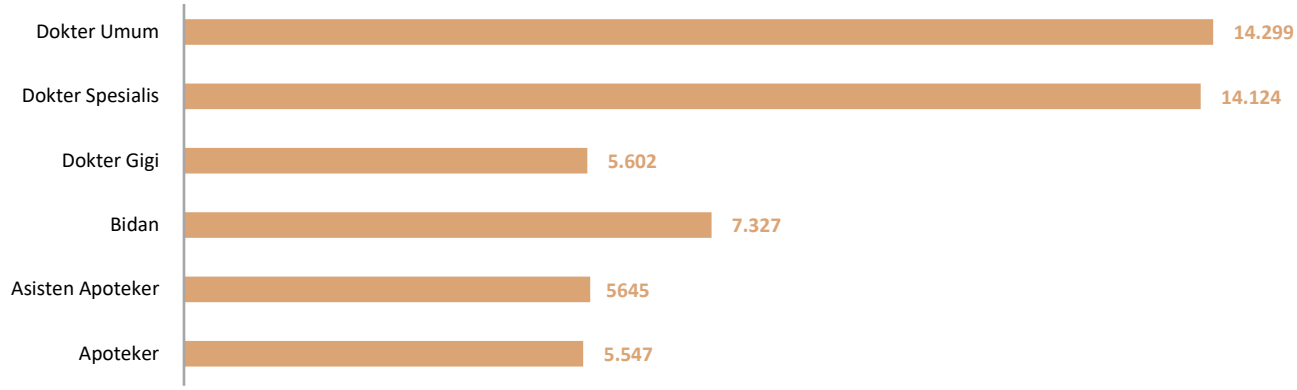
Sumber: Dinas Kesehatan

Dokter Umum, Spesialis, dan Gigi merupakan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menangani pelayanan dasar untuk pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, ketersediaanya sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan dasar baik Rumah Sakit ataupun Puskesmas. menurut laporan dari PERMENKES, indikator yang digunakan untuk ketersediaan jumlah tenaga kesehatan untuk Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi adalah indikator WHO dengan masing-masing nilai adalah sebagai berikut : 21

- Rasio 1 : 10.000 penduduk untuk Dokter Umum
- Rasio 1 : 1.000 Penduduk untuk Dokter Gigi Benchmarking negara Singapura.

Dari data dan grafik diatas menjelaskan perbandingan antara Tenaga kesehatan (Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis) pada Rumah Sakit. Secara garis besar jumlah tenaga kesehatan di Rumah Sakit lebih banyak dibandingkan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas. Dengan rasio antara Tenaga Kesehatan yang ada di Rumah Sakit dengan Puskesmas yaitu : Dokter Umum (2.59 : 1), Dokter Gigi (2.05 : 1) dan Dokter Spesialis (897.46:1). Hal tersebut merupakan suatu kewajaran dikarenakan perbedaan fungsi dari Rumah Sakit dan Puskesmas itu sendiri, yaitu Puskesmas adalah tempat pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat sedangkan Rumah Sakit merupakan tempat pelayanan kesehatan menyeluruh untuk masyarakat. Namun tingginya gaps antara Dokter Spesialis antara Rumah Sakit dengan Puskesmas harus menjadi perhatian dikarenakan perlunya masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang secara khusus di jarak terdekat yang ada disekitarnya.

Gambar 5.90. Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025



Sumber: Dinas Kesehatan DKI Jakarta

Dari data dan grafik di atas menunjukkan jumlah dari tenaga kesehatan yang ada di provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Secara keseluruhan didominiasi oleh Dokter meliputi Dokter Umum sebanyak 14.299, lalu Dokter Spesialisi sebanyak 14.124 profesi, lalu Bidan sebanyak 7.327 profesi, lalu lalu Asisten Apoteker sebanyak 5.645 profesi, diikuti Dokter Gigi sebanyak 5.602 profesi, dan paling sedikit adalah Apoteker sebanyak 5.547 profesi. Secara keseluruhan, Pemprov DKI Jakarta menyediakan tenaga-tenaga ahli kesehatan baik untuk penanganan kesehatan, konsultasi kesehatan, pelayanan persalinan, penyediaan obat-obat berkualitas guna turut serta dalam menghasilkan derajat kesehatan yang lebih baik untuk masyarkat di wilayah DKI Jakarta.

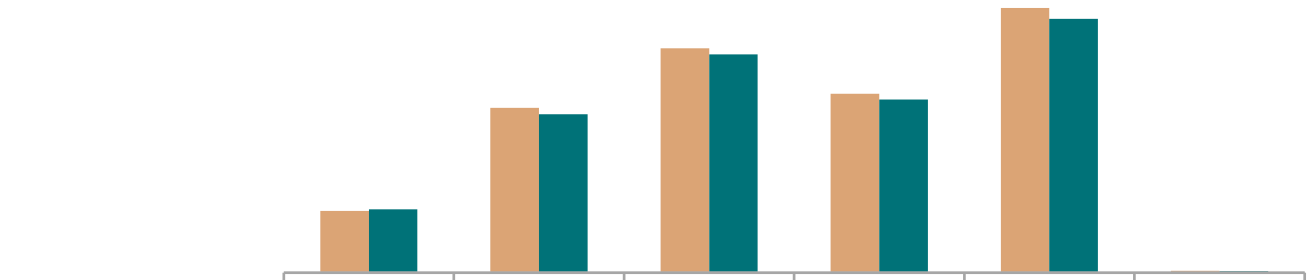
5.4.3. Penyakit Menular

Penyakit menular merupakan penyakit yang dapat menular kepada manusia dan disebabkan oleh agen biologis, seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Contoh penyakit menular antara lain tuberkulosis, demam berdarah, campak, hepatitis, diare, leptospirosis, pneumonia, tifoid, kusta, penyakit zoonosis, AFP nonpolio, penyakit berpotensi wabah, dan lain-lain.

Penanggulangan penyakit menular bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit, menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit menular, serta mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi yang ditimbulkan pada individu, keluarga, dan masyarakat. Ketentuan tersebut diatur pada Peraturan Kementerian Kesehatan RI No. 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular[18].

Di wilayah DKI Jakarta, edukasi mengenai penyakit menular dan upaya pencegahannya terus digalakkan kepada masyarakat. Upaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang sehat dan bersih, serta meminimalkan risiko penularan dan kematian akibat penyakit menular, termasuk penyakit yang berasal dari hewan.

Gambar 5.91. Jumlah Deteksi Dini Hepatitis B bagi Ibu Hamil (Bumil) di DKI Jakarta Tahun 2024

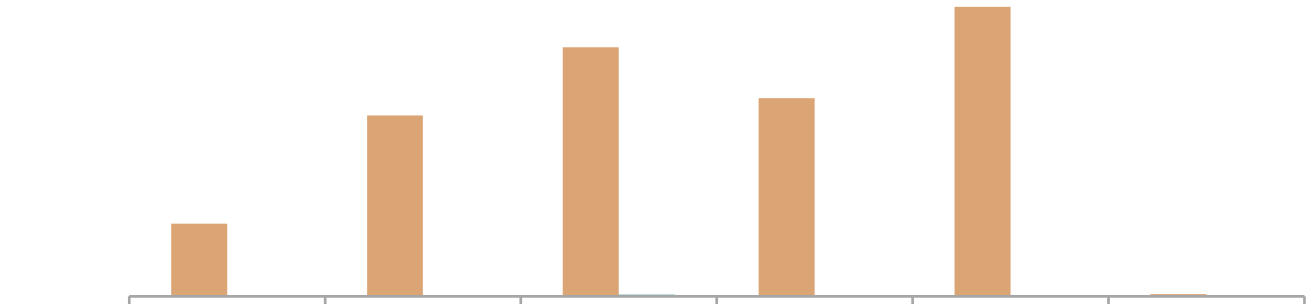


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jumlah Sasaran	13.808	36.884	50.209	39.996	59.234	479
Jumlah Bumil yang Diperiksa	14.232	35.435	48.830	38.762	56.745	406

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

18 https://pamki.or.id/download/peraturan-menteri-kesehatan-republik-indonesia-nomor-82-tahun-2014-tentang-penanggulangan-penyakit-menular/

Gambar 5.92. Jumlah Deteksi Dini Hepatitis B bagi Ibu Hamil (Bumil) Jenis Reaktif dan Non Reaktif di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Nonreaktif	14.153	35.250	48.571	38.625	56.575	400
Reaktif	79	185	259	137	170	6

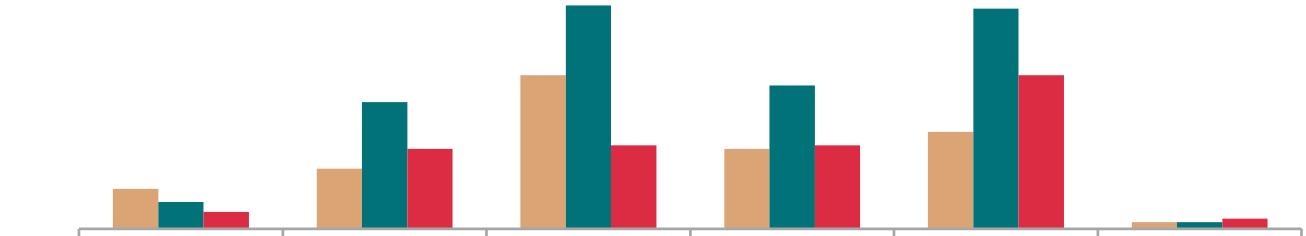
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Hepatitis B merupakan infeksi virus yang menyerang hati. Penyakit ini rentan terjadi pada ibu hamil dan dapat menular melalui kontak dengan darah atau cairan tubuh yang terinfeksi, termasuk melalui darah dan sekresi vagina saat proses persalinan. Oleh karena itu, setiap ibu hamil wajib menjalani pemeriksaan hepatitis B (HBV) pada kunjungan antenatal pertama sebelum persalinan. Pemberian imunisasi merupakan salah satu upaya pencegahan untuk menurunkan risiko penularan virus hepatitis. Ketentuan mengenai penanggulangan virus hepatitis, khususnya pada ibu hamil, diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI no 53 Tahun 2015[19]. Berdasarkan data dan grafik di atas, ditunjukkan perbandingan antara cakupan pemeriksaan ibu hamil yang telah diperiksa dengan jumlah sasaran. Persentase cakupan pemeriksaan dari wilayah dengan nilai tertinggi hingga terendah adalah Jakarta Pusat sebesar 103%, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan masing-masing sebesar 97%, Jakarta Timur dan Jakarta Utara masing-masing sebesar 96%, serta Kepulauan Seribu sebesar 85%. Data tersebut mengindikasikan bahwa cakupan pelayanan pemeriksaan tertinggi terdapat di wilayah Jakarta Pusat, di mana ibu hamil yang mengikuti tes hepatitis B tidak hanya berasal dari domisili Jakarta Pusat, tetapi juga dari wilayah lain di luar Jakarta Pusat. Selain itu, capaian persentase ≥ 85% di seluruh wilayah menunjukkan keberhasilan program deteksi dini dalam mencegah penularan hepatitis B pada ibu hamil dan bayi. Data dan grafik kedua membandingkan jumlah ibu hamil dengan hasil pemeriksaan hepatitis B reaktif dan nonreaktif. Hasil reaktif menunjukkan ibu hamil memiliki indikasi hepatitis B, sedangkan hasil nonreaktif menunjukkan tidak adanya indikasi penyakit hepatitis B. Berdasarkan data tersebut, persentase ibu hamil dengan hasil reaktif dari total 194.410 ibu hamil yang diperiksa adalah Kepulauan Seribu sebesar 1,50%, Jakarta Pusat sebesar 0,56%, Jakarta Barat sebesar 0,53%, Jakarta Utara sebesar 0,52%, Jakarta Selatan sebesar 0,35%, dan Jakarta Timur sebesar 0,30%.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan keberhasilan program imunisasi hepatitis B di hampir seluruh wilayah DKI Jakarta. Namun demikian, diperlukan peningkatan kewaspadaan dan kehati-hatian, khususnya di wilayah Kepulauan Seribu, mengingat hepatitis B merupakan penyakit yang mudah menular dan berpotensi menimbulkan risiko serius, termasuk kematian, bagi ibu hamil dan bayi.

19 https://pamki.or.id/download/peraturan-menteri-kesehatan-republik-indonesia-nomor-82-tahun-2014-tentang-penanggulangan-penyakit-menular/

Gambar 5.93. Jumlah kasus AFP Nonpolio yang dilaporkan di DKI Jakarta periode tahun 2022-2024



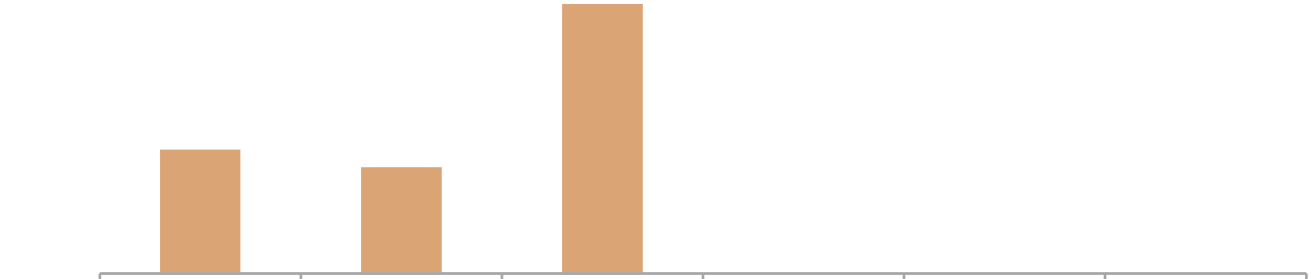
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2022	12	18	46	24	29	2
2023	8	38	67	43	66	2
2024	5	24	25	25	46	3

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Acute Flaccid Paralysis (AFP) Nonpolio merupakan kondisi kelumpuhan akut yang dapat terjadi pada anak berusia kurang dari 15 tahun. Penderita mengalami kondisi layuh atau lemas (flaccid) yang muncul secara mendadak dan umumnya berlangsung kurang dari 14 hari. AFP Nonpolio disebabkan oleh virus nonpolio, seperti Enterovirus D68 (EV-D68) dan Enterovirus A71 (EV-A71). Jumlah kasus AFP Nonpolio dihitung berdasarkan temuan kasus per 100.000 penduduk berusia kurang dari 15 tahun dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan data dan grafik di atas, ditunjukkan perbandingan jumlah kasus AFP Nonpolio yang dilaporkan pada tahun 2022–2023. Jumlah kasus terbanyak terdapat di wilayah Jakarta Timur sebanyak 37 kasus, disusul Jakarta Barat sebanyak 21 kasus, Jakarta Utara sebanyak 20 kasus, dan Jakarta Selatan sebanyak 19 kasus. Wilayah Kepulauan Seribu relatif stabil dengan jumlah 2 kasus dan mengalami peningkatan sebanyak 1 kasus. Sementara itu, wilayah Jakarta Pusat mengalami tren penurunan sebanyak 4 kasus.

Pada tahun 2024, terjadi penurunan yang signifikan hampir di seluruh wilayah DKI Jakarta. Wilayah Jakarta Barat mengalami penurunan sebanyak 42 kasus, disusul Jakarta Timur sebanyak 20 kasus, Jakarta Selatan sebanyak 18 kasus, Jakarta Utara sebanyak 14 kasus, dan Jakarta Pusat sebanyak 3 kasus. Sebaliknya, wilayah Kepulauan Seribu mengalami kenaikan sebanyak 1 kasus. Secara keseluruhan, data dan grafik tersebut menunjukkan respons Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tanggap dalam penanganan kasus AFP Nonpolio. Meskipun terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan pada tahun 2023, jumlah kasus dapat ditekan pada tahun 2024 melalui kerja sama antara masyarakat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam pelaporan dan pemantauan kasus AFP Nonpolio.

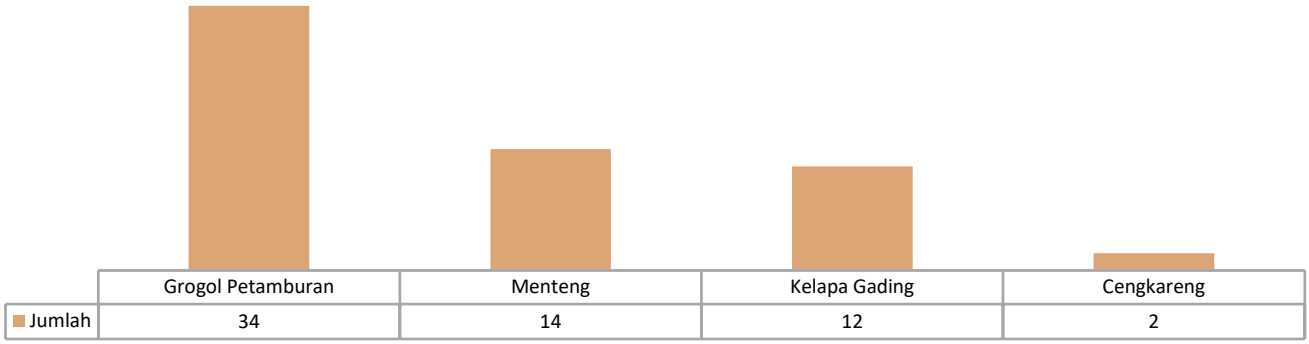
Gambar 5.94. Jumlah kasus pelaporan akibat keracunan pada waktu tertentu di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jumlah	14	12	36	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 5.95. Jumlah Kecamatan yang terjangkit akibat keracunan di DKI Jakarta Tahun 2024



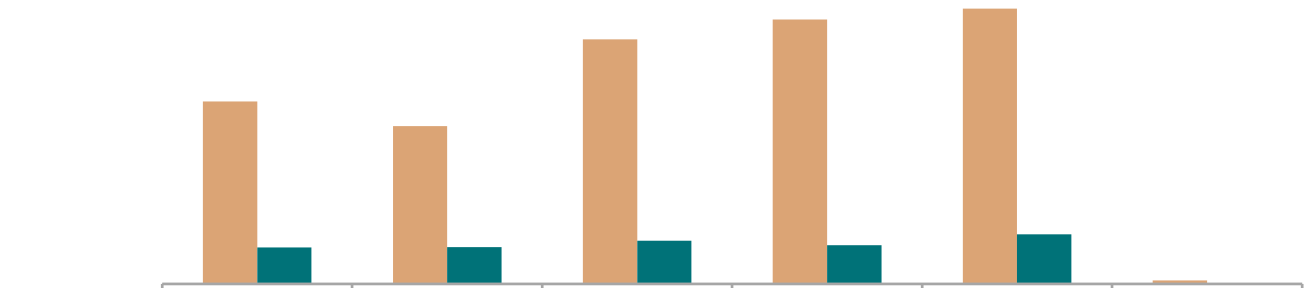
	Grogol Petamburan	Menteng	Kelapa Gading	Cengkareng
Jumlah	34	14	12	2

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Keracunan makanan merupakan gangguan metabolisme pencernaan yang disebabkan oleh konsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri, virus, parasit, bahan kimia, atau jamur tertentu. Peristiwa keracunan makanan di suatu wilayah dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) apabila menyebabkan banyak korban. KLB keracunan makanan umumnya ditandai dengan munculnya gejala seperti mual, pusing, muntah, hingga dapat menimbulkan korban jiwa. Mekanisme pelaporan dan pencegahan KLB akibat keracunan makanan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan[20].

Berdasarkan data dan grafik di atas, ditunjukkan perbandingan jumlah kasus keracunan makanan yang dilaporkan pada tahun 2024. Berdasarkan sebaran wilayah, jumlah kasus terbanyak dilaporkan di wilayah Jakarta Barat sebanyak 36 kasus, Jakarta Pusat sebanyak 14 kasus, dan Jakarta Utara sebanyak 12 kasus. Sementara itu, belum ditemukan laporan kasus di beberapa wilayah, seperti Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Wilayah kecamatan yang tercatat mengalami kasus keracunan makanan antara lain Grogol Petamburan di Jakarta Barat, Menteng di Jakarta Pusat, dan Kelapa Gading di Jakarta Utara. Dengan mengetahui lokasi kejadian secara presisi hingga tingkat kecamatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas pangan di wilayah tersebut. Upaya ini diharapkan dapat mencegah terjadinya KLB akibat keracunan makanan serta melindungi masyarakat dari risiko gangguan kesehatan.

Gambar 5.96. Jumlah Kasus Penderita Tuberkulosis (TBC) di DKI Jakarta tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Terduga TB	54.288	46.972	72.816	78.688	81.983	967
Penderita TB	10.870	10.924	12.879	11.545	14.730	84

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

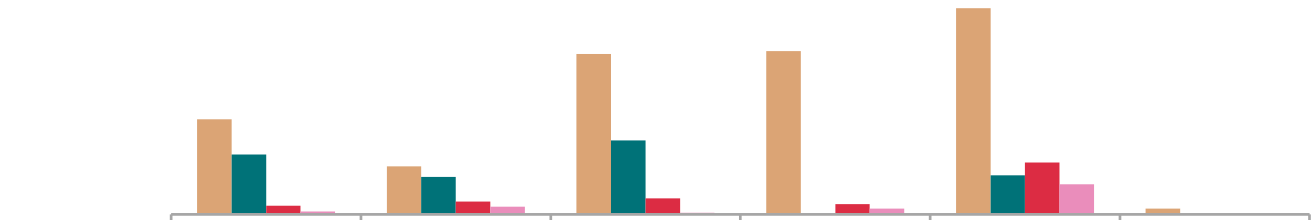
20 https://peraturan.go.id/files/bn127-2013.pdf

Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi tantangan kesehatan di wilayah DKI Jakarta. Faktor utama penyebab penularannya antara lain kepadatan penduduk dan tingginya mobilitas masyarakat. Dalam upaya mengatasi penyebaran penyakit tersebut, salah satu program utama penanggulangan TBC adalah *Directly Observed Treatment Short Course* (DOTS). Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis[21], beberapa strategi yang dianjurkan dalam penanggulangan TBC antara lain komitmen politik dari para pengambil keputusan, diagnosis melalui pemeriksaan mikroskopis, jaminan ketersediaan obat, Pengawasan Menelan Obat (PMO), serta pencatatan dan pelaporan yang baik.

Berdasarkan grafik di atas, ditunjukkan perbandingan antara jumlah terduga kasus TBC dan penderita TBC terkonfirmasi di wilayah DKI Jakarta. Persentase penderita TBC terkonfirmasi yang ditangani melalui program DOTS berdasarkan sebaran wilayah menunjukkan nilai tertinggi di Jakarta Utara sebesar 23%, disusul Jakarta Pusat sebesar 20%, Jakarta Barat dan Jakarta Timur masing-masing sebesar 18%, Jakarta Selatan sebesar 15%, serta Kepulauan Seribu sebesar 9%.

Secara keseluruhan, data tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme deteksi dini dan skrining TBC melalui program DOTS di DKI Jakarta telah berjalan cukup luas. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta edukasi masyarakat terkait program DOTS guna memperkuat upaya penanggulangan TBC di wilayah DKI Jakarta.

Gambar 5.97. Jumlah Kasus Potensi Wabah Penyakit di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Suspek Campak	232	117	391	398	502	14
Hepatitis B	146	91	180	-	95	-
Pertusis	21	31	39	25	126	-
Difteri	7	19	4	14	73	-

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Wabah penyakit merupakan kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular di masyarakat, yang ditandai dengan peningkatan jumlah penderita secara nyata melampaui keadaan yang lazim pada tempat dan waktu tertentu, serta dapat menimbulkan bencana. Ketentuan mengenai wabah penyakit diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor PERMENKES RI no 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Penyakit Menular Tertentu[22]. Contoh penyakit yang berpotensi menjadi wabah antara lain suspek campak, hepatitis B, pertusis, dan difteri.

21 https://peraturan.bpk.go.id/Details/174557/perpres-no-67-tahun-2021
22 https://labkesmasbatam.id/wp-content/uploads/2022/10/PMK-No.-1501-Th-2010-ttg-Jenis-Penyakit-Menular-Tertentu-Yang-Menimbulkan-Wabah.pdf

Berdasarkan data dan grafik di atas, ditunjukkan perbandingan potensi wabah penyakit di wilayah DKI Jakarta. Secara keseluruhan, pola potensi wabah menunjukkan bahwa suspek campak merupakan penyakit dengan jumlah laporan tertinggi di seluruh wilayah DKI Jakarta. Wilayah dengan jumlah kasus terbanyak adalah Jakarta Timur sebanyak 502 kasus, disusul Jakarta Selatan sebanyak 398 kasus, Jakarta Pusat sebanyak 232 kasus, Jakarta Utara sebanyak 117 kasus, dan Kepulauan Seribu sebanyak 14 kasus. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan imunisasi dasar sebagai upaya pencegahan penyakit campak di wilayah tersebut.

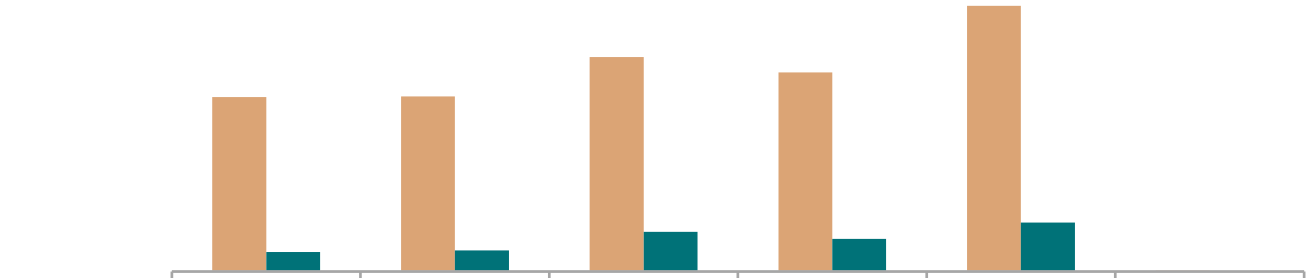
Pada kasus hepatitis B, jumlah kasus tertinggi tercatat di wilayah Jakarta Barat sebanyak 180 kasus, sedangkan jumlah terendah terdapat di wilayah Jakarta Utara sebanyak 91 kasus. Namun demikian, diperlukan konfirmasi dan pendataan lebih lanjut untuk wilayah Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu terkait penyakit ini.

Pada kasus pertusis, terlihat pola yang menonjol, di mana wilayah Jakarta Timur mencatat jumlah kasus tertinggi sebanyak 126 kasus, jauh melebihi wilayah lainnya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus mengingat pertusis merupakan penyakit yang sangat menular dan rentan menyerang anak-anak.

Sementara itu, pada kasus difteri, wilayah Jakarta Timur kembali menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu sebanyak 73 kasus, sedangkan jumlah terendah terdapat di wilayah Jakarta Pusat sebanyak 7 kasus.

Secara keseluruhan, data dan grafik tersebut menunjukkan bahwa wilayah Jakarta Timur merupakan wilayah dengan beban potensi wabah penyakit terbesar sepanjang tahun 2024. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan imunisasi, peningkatan surveilans epidemiologi, serta langkah pencegahan yang berkelanjutan untuk menekan potensi terjadinya wabah penyakit di wilayah DKI Jakarta.

Gambar 5.98. Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam Program *Direct Observed Treatment Short* (DOTS) di DKI Jakarta tahun 2024



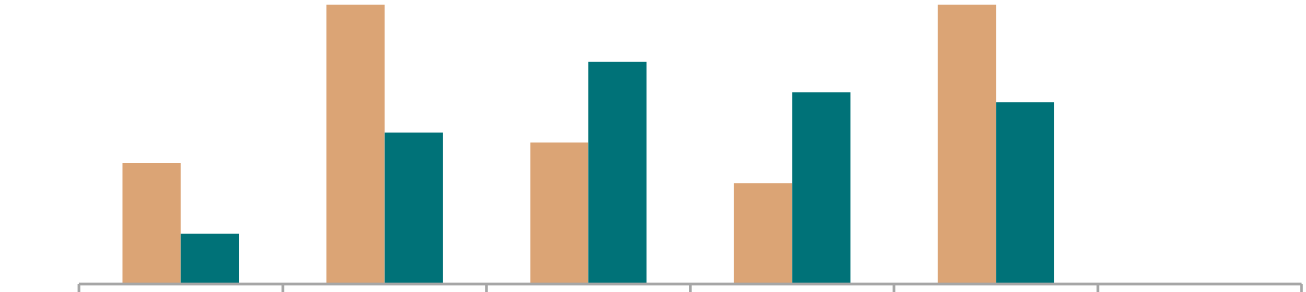
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
TB Terdiagnosis	9.003	9.043	11.067	10.277	13.709	48
TB Diobati	1.004	1.086	2.055	1.683	2.523	16

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Tuberkulosis masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia, termasuk di wilayah DKI Jakarta. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya kepadatan penduduk dan tingginya mobilitas masyarakat yang mempercepat penyebaran TB. Program *Directly Observed Treatment Short Course* (DOTS) masih menjadi metode yang efektif dalam penanganan dan penyembuhan TB karena telah direkomendasikan oleh *World Health Organization* (WHO) dan diadopsi oleh Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia. Berdasarkan data dan grafik di atas, ditunjukkan perbandingan proporsi kasus TB yang diobati dan sembuh dengan jumlah TB yang terdiagnosis di seluruh wilayah DKI Jakarta. Proporsi tertinggi hingga terendah berdasarkan sebaran wilayah adalah Kepulauan Seribu sebesar 33%, Jakarta Barat sebesar 19%, Jakarta Timur sebesar 18%, Jakarta Selatan sebesar 16%, Jakarta Utara sebesar 12%, dan Jakarta Pusat sebesar 11%. Temuan menarik dari data tersebut adalah wilayah Kepulauan Seribu yang memiliki tantangan geografis justru menunjukkan proporsi kesembuhan tertinggi dibandingkan wilayah daratan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh tingkat kepadatan dan mobilitas penduduk yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah daratan lainnya. Secara keseluruhan, data dan grafik tersebut mencerminkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penanggulangan penyakit TB, dengan capaian proporsi kesembuhan penderita di wilayah daratan DKI Jakarta yang berada di atas 10%.

Gambar 5.99. Jumlah Kematian Ibu Hamil di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



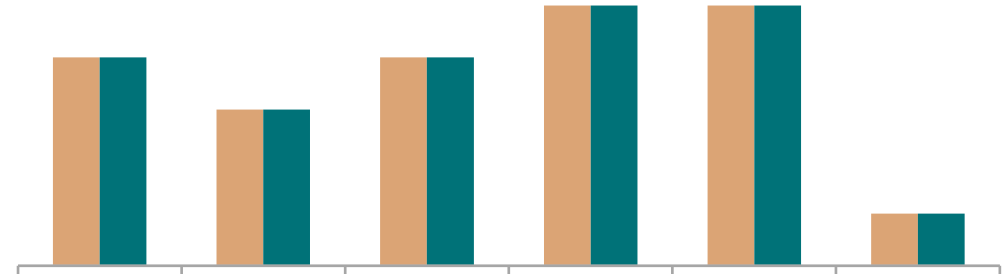
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	12	28	14	10	28	0
2024	5	15	22	19	18	0

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan kematian seorang perempuan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, abortus, dan dalam kurun waktu 48 hari setelah berakhirnya kehamilan, tanpa memperhatikan usia gestasi, serta tidak termasuk kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental. AKI menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan ibu di suatu wilayah atau negara. menurut WHO, faktor-faktor yang menjadi penyebab AKI adalah anemia, perdarahan obstetri, komplikasi kehamilan dan persalinan, kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat, serta keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan[23]. Berdasarkan data dan grafik di atas, ditunjukkan fluktuasi Angka Kematian Ibu (AKI) di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2023–2024. Terdapat tren penurunan yang signifikan di beberapa wilayah, khususnya Jakarta Utara sebanyak 13 kasus, Jakarta Timur sebanyak 10 kasus, dan Jakarta Pusat sebanyak 7 kasus. Sebaliknya, terjadi tren peningkatan di beberapa wilayah, yaitu Jakarta Selatan sebanyak 9 kasus dan Jakarta Barat sebanyak 8 kasus. Menariknya, wilayah Kepulauan Seribu tidak mencatatkan kasus AKI baik pada tahun 2023 maupun 2024. Secara keseluruhan, Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi tantangan kesehatan di wilayah DKI Jakarta. Penurunan signifikan di beberapa wilayah dapat menjadi apresiasi dan dorongan untuk terus menekan angka AKI.

23 *"Maternal Mortality"*, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality, (Kamis, 29 Januari 2026, 09:30)

Gambar 5.100. Cakupan Jumlah Puskesmas dengan Ketersediaan ≥ 80% Obat dan Vaksin Essensial di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Puskesmas	8	6	8	10	10	2
Ketersedian Obat Vaksin Esensial	8	6	8	10	10	2

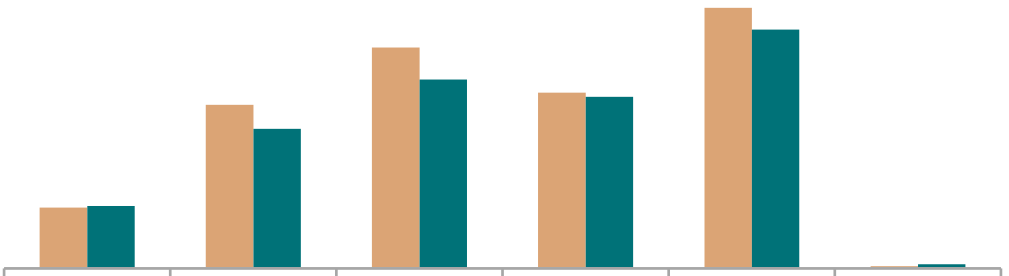
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Puskesmas merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan obat, khususnya obat vaksin esensial. menurut ketentuan Kementerian Kesehatan, ketersediaan obat vaksin esensial di suatu wilayah kabupaten/kota harus mencapai ≥ 80% dan mencakup 40 item obat indikator yang dipantau. Kategori obat vaksin esensial merujuk pada Daftar Obat Esensial WHO dan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), yang antara lain digunakan untuk mendukung program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), gizi, tuberkulosis, dan malaria.

Hal tersebut di atur berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No HK. 01.07/MENKES/6477/2021 tentang Daftar Obat Esensial Nasional[24]. Penyediaan obat esensial merupakan salah satu indikator sasaran strategis Kementerian Kesehatan, yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas. Upaya ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan data dan grafik di atas, ditunjukkan bahwa ketersediaan obat vaksin esensial dengan capaian ≥ 80% di seluruh wilayah DKI Jakarta telah mencapai 100%. Data tersebut mengindikasikan bahwa puskesmas di seluruh wilayah DKI Jakarta telah memberikan pelayanan yang optimal dalam penyediaan dan pengelolaan stok obat vaksin esensial, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan WHO.

Gambar 5.101. Jumlah Ibu Hamil dengan Komplikasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standard di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Perkiraan Ibu Hamil Komplikasi	2.762	7.437	10.041	7.999	11.848	96
Penanganan Komplikasi	2.841	6.345	8.591	7.805	10.859	189

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

24 https://farmalkes.kemkes.go.id/unduh/kepmenkes-6477-2021/

Salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan maternal, mulai dari proses kehamilan hingga persalinan, adalah kemampuan fasilitas kesehatan dalam mendeteksi dan menangani komplikasi pada ibu hamil. Contoh komplikasi kehamilan antara lain tekanan darah tinggi, diabetes gestasional (kadar gula darah tinggi yang muncul selama kehamilan dan dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan besar), anemia, infeksi, gangguan jantung, depresi, serta hyperemesis gravidarum (mual dan muntah berat serta berkepanjangan yang dapat menyebabkan dehidrasi atau penurunan berat badan).

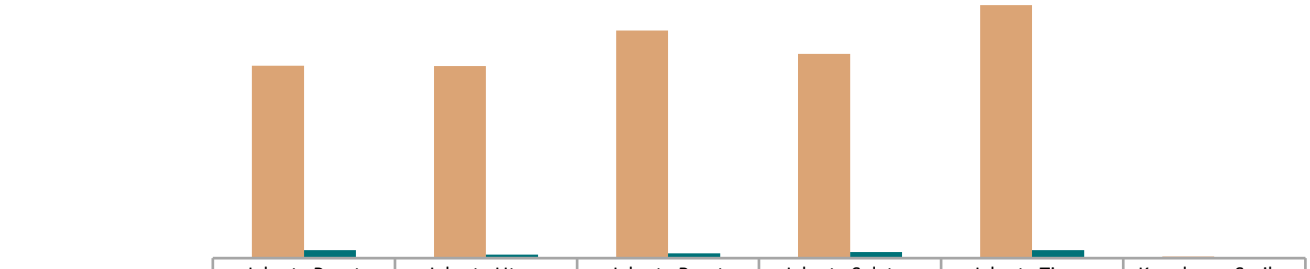
Ketentuan teknis yang mengatur pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dengan komplikasi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Komplikasi Kehamilan[25]. Pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan, yaitu melalui penerapan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) sebagai upaya penanganan komplikasi pada ibu hamil.

Berdasarkan data dan grafik di atas, ditunjukkan perbandingan antara perkiraan jumlah ibu hamil yang mengalami komplikasi dengan jumlah ibu hamil komplikasi yang telah mendapatkan penanganan di wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan persentase capaian per wilayah, diperoleh hasil sebagai berikut: Kepulauan Seribu sebesar 197%, Jakarta Pusat sebesar 103%, Jakarta Selatan sebesar 98%, Jakarta Timur sebesar 92%, Jakarta Barat sebesar 86%, dan persentase terendah terdapat di Jakarta Utara sebesar 85%.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan layanan melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) untuk menangani komplikasi pada ibu hamil telah berjalan sangat baik. Hal ini terlihat dari capaian persentase di seluruh wilayah DKI Jakarta yang telah mencapai ≥ 85%.

Menariknya, wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Pusat mencatatkan capaian di atas 100%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan P4K di kedua wilayah tersebut berjalan sangat optimal, sehingga ibu hamil yang mengalami komplikasi dapat terdeteksi lebih awal melalui program P4K dan memperoleh penanganan yang tepat.

Gambar 5.102. Data Pasien Tuberkulosis (TB) yang Meninggal di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jumlah Kasus	10.870	10.862	12.879	11.545	14.730	84
Jumlah Kematian TB	454	208	271	340	459	2

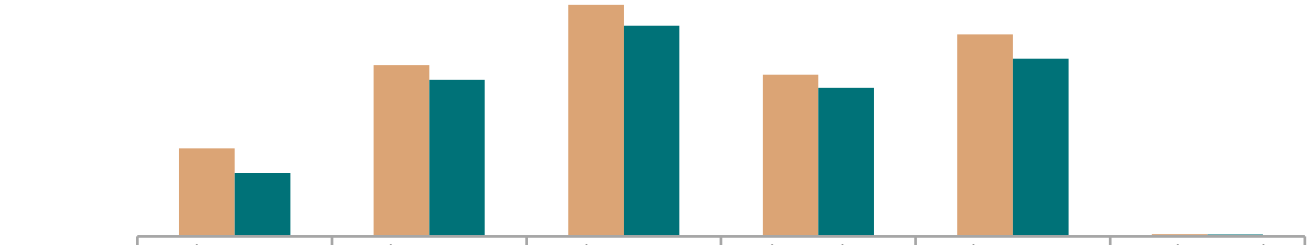
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

25 https://farmalkes.kemkes.go.id/unduh/kepmenkes-6477-2021/

Tuberkulosis adalah salah satu penyakit serius yang menjadi tantangan secara khusus di Indonesia. Pada tahun 2023 di DKI Jakarta terjadi 60.420 kasus, termasuk 9.684 kasus TBC di dalamnya. Salah satu langkah Pemprov DKI Jakarta dalam mengantisipasi penyakit dan penyebaran TB ini adalah menciptakan kampung siaga TBC sehingga harapannya Jakarta terbebas dari penyakit TB. Tujuan dari kampung siaga TBC ini adalah memperkuat edukasi dan dan koordinasi dalam upaya pengendalian TBC dan sasarannya meliputi: Dinas Kesehatan Kabupaten/Kita, Puskesmas, Kelurahan, Perangkat Daerah Setempat, TP PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta Organisasi Komunitas lokal seperti Posyandu dan Posbindu[26].

Dari data dan grafik diatas membandingkan antara jumlah kematian TB dengan jumlah kasus TB yang ada di masyarakat. Rasio jumlah kematian TB dengan jumlah kasus yang ada paling besar ke paling kecil sepanjang tahun 2024 antara lain : Jakarta Pusat (0,041), Jakarta Timur (0,031), Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu (0,029), Jakarta Barat (0,021), dan Jakarta Utara (0,019). Untuk memperkecil jumlah kematian TB di DKI Jakarta, perlu sinergitas antara stake holder dan elemen masyarakat dalam mengimplementasikan program kampung siaga TBC di wilayahnya.

Gambar 5.103. Jumlah Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Demam Berdarah di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Laki-laki	724	1.411	1.963	1.332	1.664	18
Perempuan	523	1.290	1.735	1.223	1.463	16

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Demam Berdarah masih menjadi salah satu penyakit yang menjadi perhatian di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah DKI Jakarta. Penyakit ini umumnya banyak ditemukan di wilayah dengan tingkat kepadatan dan mobilitas penduduk yang tinggi serta pengendalian demam berdarah yang belum optimal. Kondisi tersebut memengaruhi proses penularan penyakit yang dapat berlangsung dengan sangat cepat.

menurut Kementerian Kesehatan[27], ciri-ciri penderita demam berdarah antara lain demam tinggi yang muncul secara mendadak selama 2–7 hari dan disertai manifestasi perdarahan, tubuh terasa lemah dan lesu, muncul bintik-bintik merah pada kulit, serta nyeri di ulu hati. Pada tahap lanjut, dapat terjadi perdarahan pada hidung (mimisan) atau di bawah kulit, muntah atau buang air besar berdarah. Apabila kondisi semakin parah, penderita dapat mengalami kegelisahan, tangan dan kaki terasa dingin, serta berkeringat dingin.

26 Kampung Siaga TBC: Langkah Nyata Melawan Tuberkulosis – PPTI. (2024). Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia.

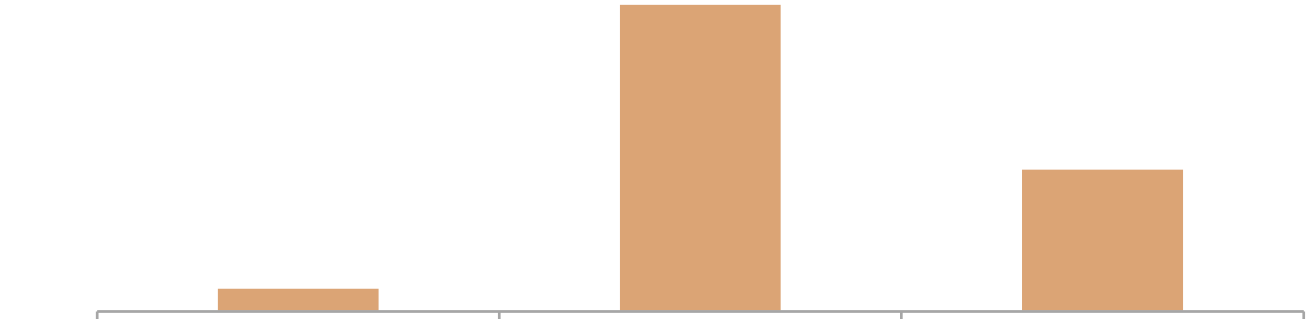
27 Kementerian Kesehatan, "Gejala Demam Berdarah yang Perlu Diwasapadi", https://ayosehat.kemkes.go.id/gejala-demam-berdarah-yang-perlu-diwaspadai (28 Januari 2026, 15:45)

Penanganan awal pada penderita yang menunjukkan gejala awal demam berdarah dapat dilakukan dengan memberikan asupan cairan yang cukup, mengompres tubuh untuk menurunkan suhu, serta memberikan obat penurun panas. Namun, apabila gejala telah berkembang ke tahap lanjut, penderita perlu segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Berdasarkan data dan grafik di atas, ditunjukkan bahwa penderita demam berdarah di wilayah DKI Jakarta lebih didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Berdasarkan sebaran wilayah, jumlah penemuan dan penanganan kasus demam berdarah paling banyak terdapat di Jakarta Barat sebanyak 3.698 kasus, disusul Jakarta Timur sebanyak 3.127 kasus, Jakarta Utara sebanyak 2.701 kasus, Jakarta Selatan sebanyak 2.555 kasus, Jakarta Pusat sebanyak 1.247 kasus, dan Kepulauan Seribu sebanyak 34 kasus.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap pelaporan kasus demam berdarah di DKI Jakarta sudah sangat baik, seiring dengan proses penanganan yang berjalan sebanding dengan jumlah dan kepadatan penduduk di masing-masing wilayah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terkait pencegahan dan penanganan demam berdarah di wilayah DKI Jakarta tergolong tinggi.

Gambar 5.104. Jumlah Penderita HIV/AIDS di DKI Jakarta tahun 2022-2024



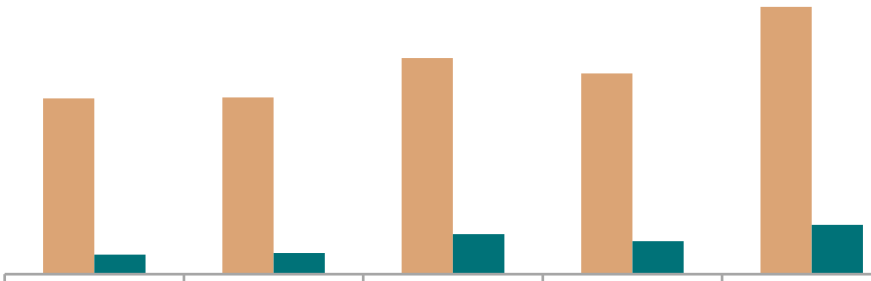
	2022	2023	2024
Jumlah	5.982	82.673	37.581

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

HIV/AIDS ditularkan melalui cairan kontak langsung dengan lapisan kulit dalam seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan preseminal, ASI, dll. Faktor penularan HIV paling banyak disebabkan karena saling berganti jarum suntik dengan pecandu narkoba, perilaku seks bebas secara (homoseksual ataupun heteseksual). Untuk mengatasi permasalahan HIV/AIDS di DKI Jakarta, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencanangkan program "Jakarta Memanggil"program tersebut merupakan program permainan interaktif (Gamifikasi) yang berkonsep untuk menggalakan 44 puskesmas kecamatan dan 5 suku dinasikesehatan di DKI Jakarta yang dapat meningkatkan jangkauan serta pelayanan untuk Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) guna menurunkan persebaran virus HIV, tidak memperburuk kondisi ODHA, sehingga harapannya tahun 2030 Jakarta terbebas dari AIDS.

Terjadi lonjakan yang tinggi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 82.673 kasus lalu menurun menjadi 37.581 kasus. Salah satu kendala terbesar dalam penanganan ODHA di DKI Jakarta adalah komitmen penderita untuk melakukan pemeriksaan rutin secara tuntas dan mengonsumsi obat retrivoral secara tuntas.

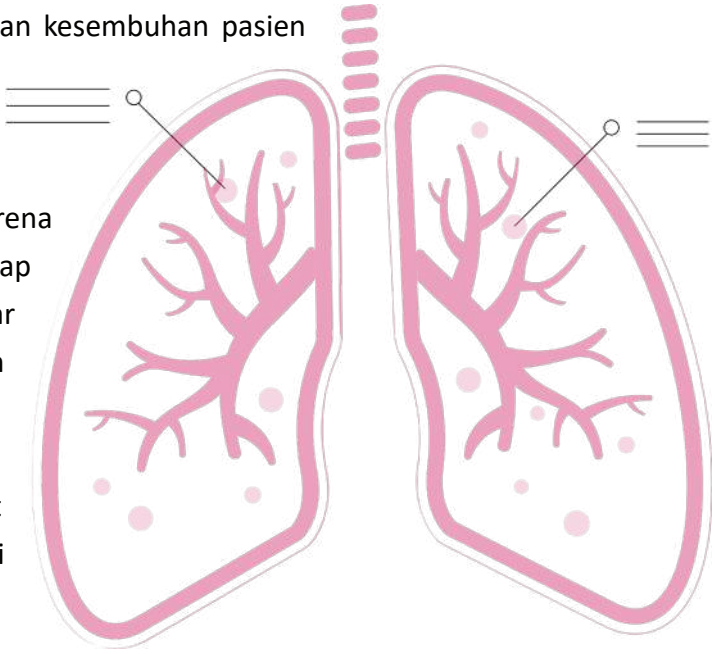
Gambar 5.105. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobat dan sembuh dengan program DOTS di DKI Jakarta Tahun 2024



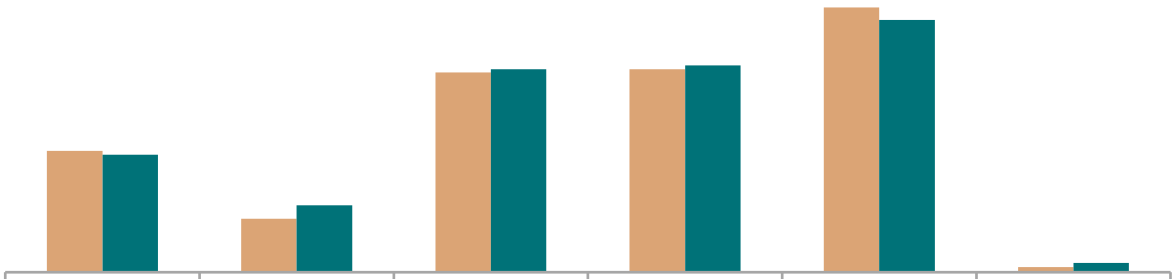
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Kasus TB Terdiagnosis	9.003	9.043	11.067	10.277	13.709	48
Kasus TB Diobati	1.004	1.086	2.055	1.683	2.523	16

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Tuberkulosis atau penyakit TB masih menjadi tantangan kesehatan dan merupakan salah satu beban penyakit tertinggi di Indonesia, termasuk di wilayah DKI Jakarta. Salah satu strategi utama dalam penanggulangan TB adalah penerapan strategi *Directly Observed Treatment Short Course* (DOTS). Strategi DOTS berfokus pada penemuan dan penyembuhan kasus TB untuk memutus rantai penularan, sehingga angka kesakitan dan kematian akibat TB dapat ditekan. Salah satu faktor utama tingginya penularan TB adalah kepadatan dan mobilitas penduduk yang tinggi. Strategi DOTS memiliki lima komponen utama, yaitu komitmen politik, deteksi kasus, Pengawasan Menelan Obat (PMO), jaminan ketersediaan Obat Anti-Tuberkulosis (OAT), serta sistem pencatatan dan pelaporan. Tujuan penerapan strategi ini adalah mencapai angka kesembuhan yang tinggi, mencegah putus berobat, menangani efek samping obat apabila muncul, serta mencegah terjadinya resistensi TB. Berdasarkan data dan grafik di atas, ditunjukkan perbandingan proporsi kasus TB yang terdiagnosis serta telah diobati dan sembuh melalui Program DOTS di wilayah DKI Jakarta sepanjang tahun 2024. Berdasarkan sebaran wilayah, proporsi tertinggi terdapat di Kepulauan Seribu sebesar 33%, disusul Jakarta Barat sebesar 19%, Jakarta Timur sebesar 18%, Jakarta Selatan sebesar 16%, Jakarta Utara sebesar 12%, dan Jakarta Pusat sebesar 11%. Menariknya, meskipun secara geografis Kepulauan Seribu merupakan wilayah kepulauan, wilayah ini mampu menunjukkan capaian pengobatan dan kesembuhan pasien TB melalui strategi DOTS secara optimal. Sementara itu, wilayah daratan atau perkotaan menunjukkan proporsi kesembuhan yang relatif lebih rendah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan Program DOTS agar implementasinya lebih tepat sasaran. Selain itu, penguatan edukasi mengenai strategi DOTS perlu terus dilakukan agar baik tenaga kesehatan maupun masyarakat dapat merasakan manfaat dari penerapan strategi tersebut secara optimal.



Gambar 5.106. Jumlah Suspek Kasus Campak menurut Jenis Kelamin di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Laki-laki	118	52	194	197	257	5
Perempuan	114	65	197	201	245	9

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Penyakit campak, yang juga dikenal dengan sebutan rubeola, campak 9 hari, atau measles, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus campak *(Morbillivirus)*. Penyakit ini sangat menular dan menyebar melalui udara, terutama saat penderita batuk atau bersin. Infeksi virus campak biasanya ditandai dengan gejala demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, peradangan selaput mata, serta munculnya ruam merah pada kulit.

Campak dapat menimbulkan komplikasi, seperti infeksi telinga, diare, dan infeksi paru-paru (pneumonia). Selain itu, meskipun jarang terjadi, campak juga dapat menyebabkan kerusakan otak hingga kematian. Sebagai upaya pencegahan, diberikan imunisasi vaksin MMR kepada anak-anak dan orang dewasa. Untuk anak-anak, vaksin MMR diberikan sebanyak dua dosis, yaitu:

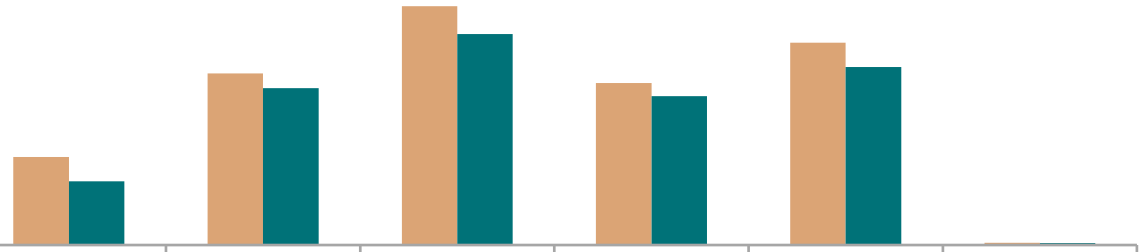
1. Dosis pertama (Usia 12 bulan hingga 15 bulan)
2. Dosis kedua (usia 4 tahun hingga 6 taun).
3. Sedangkan untuk dewasa, vaksin MMR dapat diberikan juga kepada penderita usia > 18 Tahun.

Berdasarkan data dan grafik di atas, ditunjukkan perbandingan jumlah kasus suspek campak di wilayah DKI Jakarta sepanjang tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin. Jumlah kasus tertinggi terdapat di wilayah Jakarta Timur, dengan penderita laki-laki sebanyak 257 kasus dan perempuan sebanyak 245 kasus, disusul Jakarta Selatan dengan penderita laki-laki sebanyak 197 kasus dan perempuan sebanyak 245 kasus, serta Jakarta Pusat dengan penderita laki-laki sebanyak 118 kasus dan perempuan sebanyak 114 kasus.

Wilayah Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan jumlah kasus paling sedikit, yaitu sebanyak 5 kasus pada laki-laki dan 9 kasus pada perempuan. Meskipun jumlah kasus relatif rendah, kondisi ini tetap perlu menjadi perhatian mengingat karakteristik wilayah Kepulauan Seribu yang berupa kepulauan berpotensi memperlambat respons pelayanan kesehatan apabila terjadi lonjakan kasus.

Secara keseluruhan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah penderita laki-laki dan perempuan pada kasus suspek campak di hampir seluruh wilayah DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa risiko penularan campak tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin, melainkan oleh faktor eksternal, seperti kepadatan penduduk dan cakupan imunisasi.

Gambar 5.107. Jumlah Kasus Demam Berdarah menurut Jenis Kelamin di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Laki-laki	724	1.411	1.963	1.332	1.664	18
Perempuan	523	1.290	1.735	1.223	1.463	16

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Penyakit demam berdarah atau yang sering dikenal dengan Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit demam akut yang muncul secara mendadak dan disertai tanda-tanda perdarahan, yang dapat menimbulkan syok hingga kematian. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Jangkauan terbang nyamuk ini dapat mencapai hingga 100 meter.

Berdasarkan tingkat keparahannya, penyakit DBD dibagi ke dalam empat derajat, yaitu:

1. **Derajat I:** Demam yang disertai gejala tidak khas.
2. **Derajat II:** Sama dengan derajat I, disertai perdarahan spontan seperti pada kulit, mimisan, dan gusi berdarah.
3. **Derajat III:** Sama dengan derajat II, namun disertai kegelisahan, kulit dingin dan lembap, denyut nadi cepat dan lemah, serta tekanan darah menurun.
4. **Derajat IV:** Denyut nadi tidak teraba dan tekanan darah tidak dapat diukur (syok).

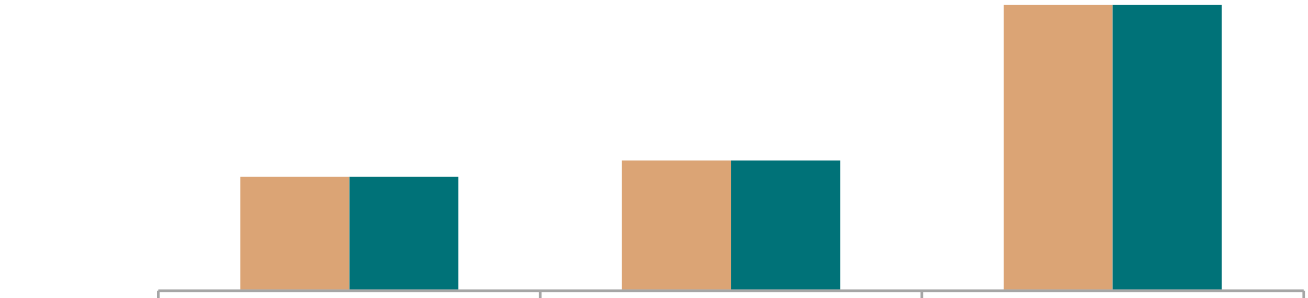
Upaya pencegahan penularan virus demam berdarah di lingkungan dilakukan melalui penerapan 3M Plus, yaitu menguras, menutup, dan mengubur tempat penampungan air, serta melakukan langkah pencegahan tambahan lainnya.

Berdasarkan data dan grafik di atas, ditunjukkan sebaran kasus demam berdarah di wilayah DKI Jakarta sepanjang tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin. Secara umum, penderita DBD di seluruh wilayah DKI Jakarta didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Wilayah dengan jumlah kasus tertinggi adalah Jakarta Barat, dengan 1.963 kasus pada laki-laki dan 1.735 kasus pada perempuan. Sementara itu, jumlah kasus terendah terdapat di wilayah Kepulauan Seribu, yaitu sebanyak 18 kasus pada laki-laki dan 16 kasus pada perempuan.



Secara keseluruhan, tingginya jumlah kasus DBD di suatu wilayah dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan upaya pencegahan lingkungan, khususnya penerapan 3M Plus, dalam mengendalikan populasi nyamuk penular demam berdarah.

Gambar 5.108. Jumlah Kasus Diare menurut Kategori Usia di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jumlah yang Dilayani	Diberikan Obat Oralit	Diberikan Zinc
Balita	52.554	52.663	53.692
Semua Umur	52.554	52.663	53.692

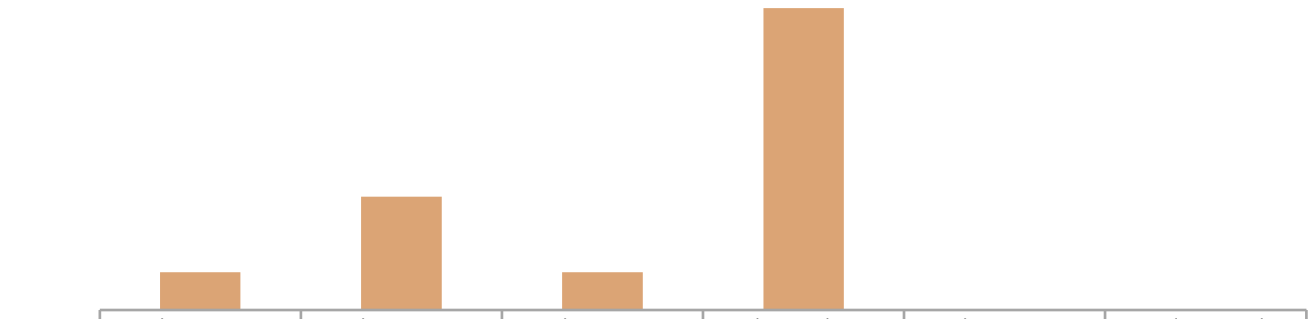
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Diare merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi masalah serius dan memerlukan perhatian khusus, terutama pada kelompok rentan seperti balita. menurut standar pelayanan kesehatan, penanganan utama diare dilakukan melalui pemberian oralit dan zinc. Oralit berfungsi untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang guna mencegah terjadinya dehidrasi, sedangkan zinc (seng) berperan dalam mempercepat proses pemulihan dengan membantu perbaikan fungsi usus serta meningkatkan daya tahan tubuh. Pemberian zinc dianjurkan selama 10–14 hari, meskipun gejala diare telah berkurang.

Berdasarkan data dan grafik di atas, ditunjukkan perbandingan jumlah kasus diare pada balita dan semua kelompok umur dengan jumlah kasus yang mendapatkan pelayanan melalui pemberian oralit dan zinc. Di wilayah DKI Jakarta, cakupan pemberian oralit dan zinc tercatat sama pada kategori balita maupun semua kelompok umur.

Secara keseluruhan, data tersebut mengindikasikan bahwa upaya pengobatan dan pemulihan diare di wilayah DKI Jakarta telah berjalan secara optimal, baik pada balita maupun pada seluruh kelompok umur. Kondisi ini menjadi indikator positif bahwa tenaga kesehatan di DKI Jakarta telah menerapkan standar klinis pelayanan kesehatan yang berlaku dalam penanganan kasus diare.

Gambar 5.109. Jumlah Kasus Penyakit Hepatitis di DKI Jakarta tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jumlah	1	3	1	8	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Hepatitis merupakan penyakit akibat peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti virus, bakteri, proses autoimun, obat-obatan, perlemakan hati, konsumsi alkohol, serta paparan zat berbahaya lainnya. Penyakit hepatitis terdiri atas lima jenis, yaitu hepatitis A, B, C, D, dan E. Faktor infeksi, terutama yang disebabkan oleh virus, merupakan penyebab paling umum terjadinya hepatitis.

Beberapa strategi pencegahan penyakit hepatitis antara lain:

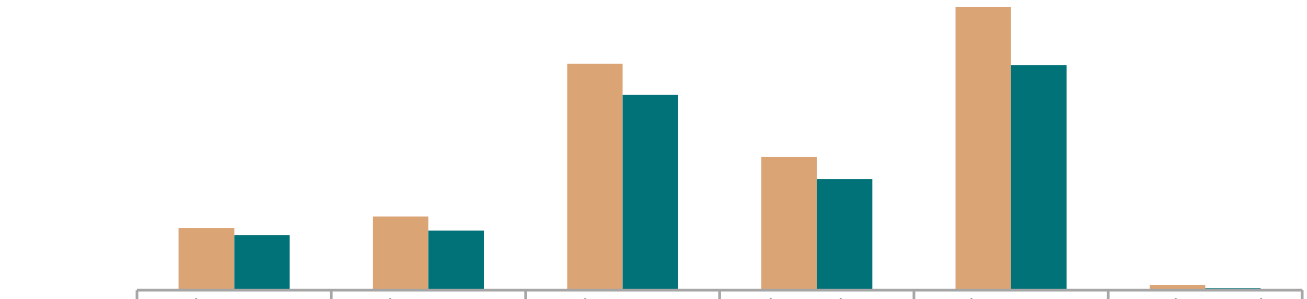
- Vaksinasi.
- Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti mencuci tangan, mengonsumsi makanan yang bersih, serta tidak berbagi alat pribadi (misalnya sikat gigi dan jarum suntik).
- Menghindari konsumsi alkohol dan narkoba.

Gejala yang dapat muncul pada penderita hepatitis antara lain demam, mual dan muntah, penurunan nafsu makan, mudah lelah, penyakit kuning yang terlihat pada kulit atau mata, serta urine berwarna cokelat.

Berdasarkan data dan grafik di atas, ditunjukkan sebaran jumlah kasus hepatitis di wilayah DKI Jakarta sepanjang tahun 2024. Wilayah dengan jumlah kasus tertinggi adalah Jakarta Selatan sebanyak 8 kasus, disusul Jakarta Utara sebanyak 3 kasus, serta Jakarta Barat dan Jakarta Pusat masing-masing sebanyak 1 kasus. Menariknya, di wilayah Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu tidak ditemukan kasus hepatitis.

Data tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan upaya vaksinasi serta edukasi terkait pencegahan dan penanggulangan penyakit hepatitis, khususnya di wilayah Jakarta Selatan. Di sisi lain, kondisi di wilayah Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu dapat menjadi bentuk apresiasi karena tidak ditemukannya kasus hepatitis pada periode tersebut.

Gambar 5.110. Jumlah Kasus Penyakit Pneunomia berdasarkan Jenis Kelamin di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Laki-laki	816	968	2.977	1.750	3.752	69
Perempuan	724	784	2.568	1.459	2.960	24

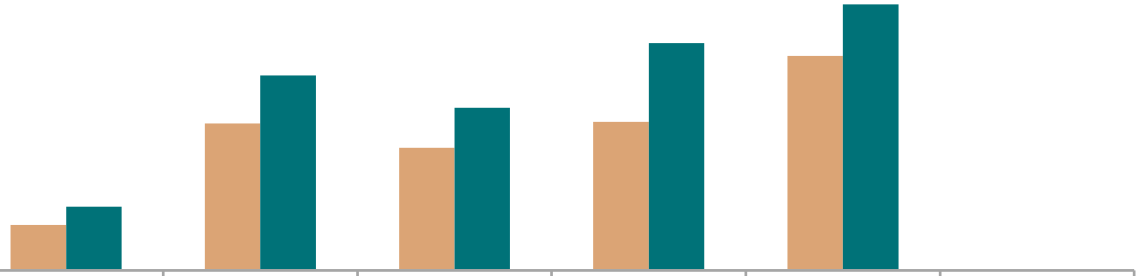
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Pneumonia, atau yang sering dikenal sebagai penyakit paru, merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Streptococcus pneumoniae*. Bakteri ini umumnya hidup di saluran pernapasan bagian atas dan dapat menyebar melalui droplet air liur atau dahak penderita saat batuk. Penyakit ini lebih rentan terjadi pada orang dewasa berusia 55–65 tahun, yang disebabkan oleh penurunan imunitas seiring bertambahnya usia. Pada anak-anak, faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pneumonia antara lain

status gizi balita yang buruk, penggunaan bahan bakar memasak yang tidak aman, serta kebiasaan merokok di dalam lingkungan keluarga. Gejala yang dapat muncul pada penderita pneumonia meliputi nyeri dada, kelelahan, demam, berkeringat, menggigil, suhu tubuh lebih rendah dari normal, mual dan muntah, diare, serta penurunan nafsu makan. menurut World Health Organization (WHO), pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian terbesar pada anak-anak dan lanjut usia[28].

Berdasarkan data dan grafik di atas, ditunjukkan sebaran jumlah kasus pneumonia berdasarkan jenis kelamin di wilayah DKI Jakarta. Secara umum, penderita pneumonia lebih didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kondisi tersebut adalah kebiasaan merokok pada laki-laki, yang dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga lebih rentan terhadap infeksi *Streptococcus pneumoniae*. Secara keseluruhan, data dan grafik tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus pneumonia berdasarkan sebaran wilayah di DKI Jakarta adalah Jakarta Timur sebanyak 6.712 kasus, Jakarta Barat sebanyak 5.545 kasus, Jakarta Selatan sebanyak 3.209 kasus, Jakarta Utara sebanyak 1.752 kasus, Jakarta Pusat sebanyak 1.540 kasus, dan Kepulauan Seribu sebanyak 93 kasus.

Gambar 5.111. Jumlah Kasus Penyakit Tyhpoid Jenis Kelamin di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Laki-laki	375	1.214	1.013	1.227	1.772	1
Perempuan	526	1.610	1.344	1.879	2.200	2

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Penyakit tifoid, atau yang sering dikenal sebagai tipes, merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri *Salmonella typhi*. Bakteri ini umumnya hidup di air dan makanan yang terkontaminasi, sehingga dapat masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi makanan atau minuman yang tidak higienis. Oleh sebab itu, penyakit tifoid sering berkaitan dengan kondisi kebersihan dan sanitasi yang tidak memadai. Tifoid termasuk salah satu penyakit menular yang masih banyak ditemukan di Indonesia dan dapat menyerang semua kelompok umur.

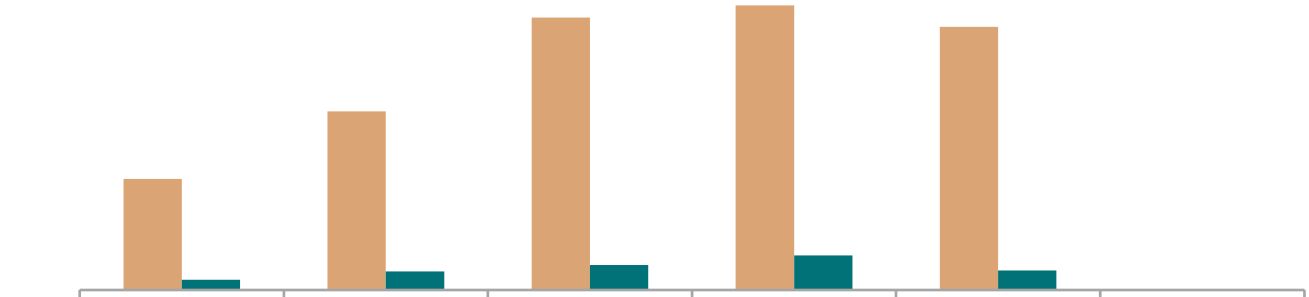
Gejala yang muncul pada penderita tifoid antara lain demam, sakit kepala, serta gangguan pada saluran pencernaan, seperti mual, muntah, rasa tidak nyaman di ulu hati, dan penurunan nafsu makan.

Berdasarkan data dan grafik di atas, ditunjukkan sebaran kasus penyakit tifoid berdasarkan jenis kelamin di seluruh wilayah DKI Jakarta. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus tifoid didominasi oleh jenis kelamin perempuan dengan jumlah sebanyak 2.200 kasus, sedangkan pada laki-laki tercatat sebanyak 1.772 kasus, yang keduanya paling banyak ditemukan di wilayah Jakarta Timur.

28 ”Pneunomia in Chilidre”, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia, (Kamis, 29 Januari 2026, 09:37).

Berdasarkan sebaran wilayah, Jakarta Timur menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu sebanyak 3.972 kasus, sedangkan wilayah Kepulauan Seribu mencatat jumlah kasus terendah sebanyak 3 kasus. Secara keseluruhan, data tersebut mengindikasikan bahwa penyakit tifoid masih banyak ditemukan di wilayah dengan luas kawasan dan kepadatan penduduk yang tinggi. Selain itu, kondisi kebersihan dan sanitasi lingkungan yang belum memadai juga menjadi faktor penting yang memengaruhi tingginya kasus tifoid di wilayah tersebut.

Gambar 5.112. Jumlah Kasus Positif Covid-19 di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	2.441	3.934	5.997	6.263	5.793	12
2024	229	411	552	762	430	2

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

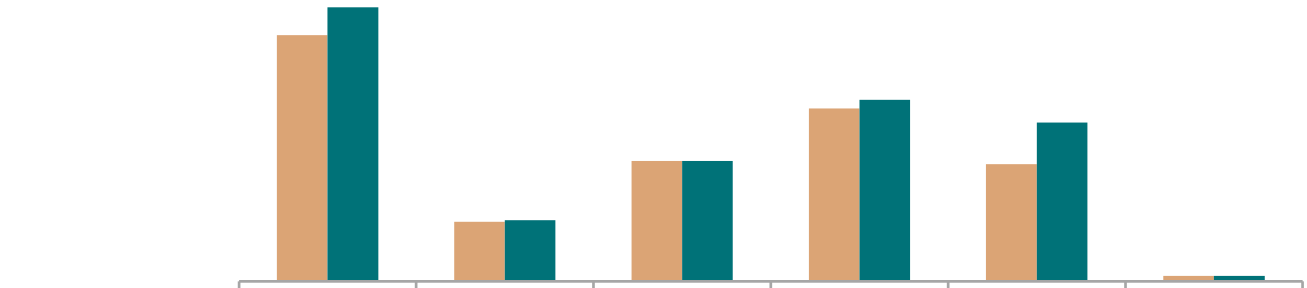
Pandemi Covid-19 di Indonesia telah berakhir mengingat kasus jumlahnya sudah berangsur menurun. Hal tersebut juga ditegaskan melalui Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2023 tentang Status Pandemi Covid-19 di Indonesi[29]. Meskipun begitu, gejala dan kasus positif dari Covid-19 ini masih terjadi di beberapa wilayah tidak terkecuali di DKI Jakarta.

Dari data dan grafik di atas menjelaskan terjadinya tren perubahan jumlah kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta di tahun 2023 ke 2024. Secara umum, terlihat adanya tren penurunan yang sangat signifikan di seluruh wilayah DKI Jakarta hingga 9x lipat dari tahun sebelumnya. Jumlah penurunan paling besar terjadi di wilayah Jakarta Selatan yaitu sebanyak 5.501 kasus, di susul oleh Jakarta Barat sebanyak 5.445 kasus, lalu Jakarta Timur sebanyak 5.363 kasus, Jakarta Utara sebanyak 3.523 kasus, Jakarta Pusat sebanyak 2.212 kasus, dan paling kecil terjadi di wilayah Kepulauan Seribu sebanyak 10 kasus. Hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa situasi penularan Covid-19 di DKI Jakarta sudah jauh menurun, keadaanya sudah kondusif dan sangat terkendali. Penurunan yang sangat signfiikan tersebut dipengaruhi upaya dalam peningkatan cakupan vaksinasi Covid-19, penerapan perilaku hidup sehat, dan kesiapan layanan kesehatan. Hal tersebut berkontribusi dalam penurunan angka kasus Covid-19 sehingga membuat mobilitas dan aktivitas masyarakat yang semakin aman.



29 https://peraturan.bpk.go.id/Details/253985/keppres-no-17-tahun-2023

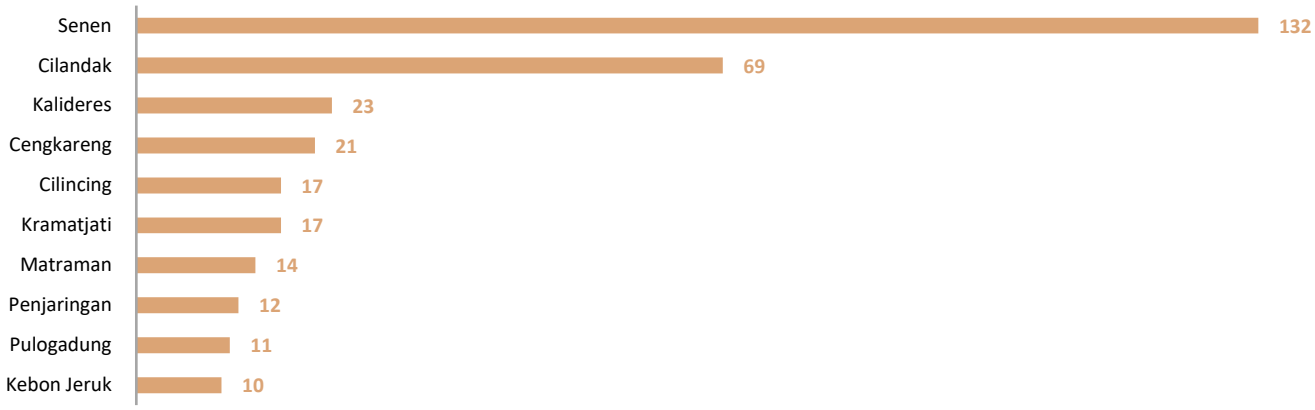
Gambar 5.113. Jumlah Penemuan Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Kasus Baru tanpa Cacat	141	34	69	99	67	3
Total Kasus	157	35	69	104	91	3

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 5.114. Sepuluh Kecamatan Terbanyak Penemuan Kusta Baru Tanpa Cacat di DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Kusta merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium Lepreae* dan bersifat menular. Bakteri ini menyerang kulit, saraf tepi, dan organ tubuh yang lain. menurut WHO, kusta dibagi kedalam 3 tingkat kecacatan yaitu:

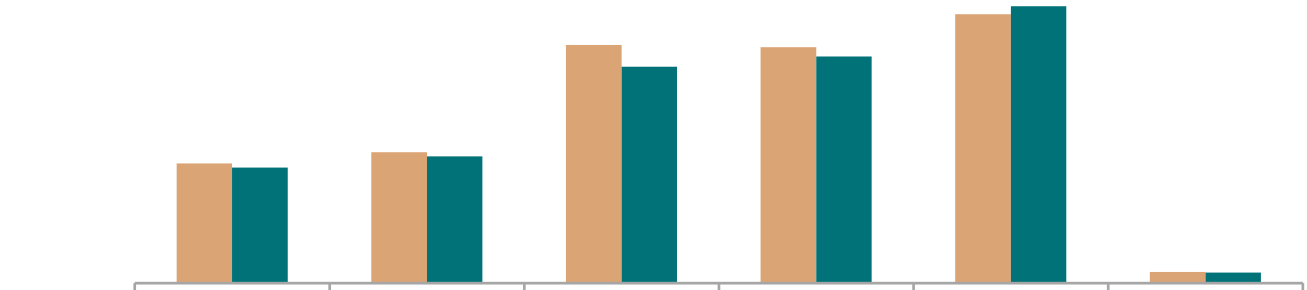
- **Tingkat 0** = tidak adanya cacat/disabilitas pada penderita kusta
- **Tingkat 1** = adanya cacat yang bersifat sedang dengan ciri-ciri seperti : adanya kelainan pada mata dan adanya anestesi dan kelemahan otot pada telapak tangan/kaki.
- **Tingkat 2** = adanya kelainan mata yang terlihat seperti : kekeruhan pada kornea mata dan adanya kerusakan pada telapak tangan dan kaki seperti : ulkus, jari kiting, dan kaki semper.

Dalam upaya penanggulangan kusta kecara dini perlu strategi dan penanggulangan khusus dalam upaya mencari penderita kusta secara khusus penderita tingkat 0 guna mengatasi penyebaran kusta secara khusus. Strategi dan penanggulangan khusus dalam mengatur penderita kusta di atur oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta[30]. Dari data dan grafik pertama menunjukkan proprosi tren perbandingan kasus penderita kusta baru dengan penderita kusta baru tanpa cacat. Berdasarkan persentase sebaran wilayahnya antara lain : Kepulauan Seribu sebanyak 100%, Jakarta Barat sebanyak 100%, Jakarta Utara sebanyak 97%, Jakarta Selatan sebanyak 95%, Jakarat

30 https://peraturan.bpk.go.id/Download/129871/Permenkes%20Nomor%2011%20Tahun%202019.pdf

pusat sebanyak 90%, dan Jakarta TImur 74%. dengan jumlah paling banyak ditemukan kasus adalah wilayah Jakarta Pusat dan paling sedikit adalah wilayah Kepulauan Seribu. Berdasarkan persentase keseluruhan, sebagai indikasi bahwa keberhasilan wilayah di DKI Jakarta dalam menerapkan strategi penanggulangan kusta sebagai mata rantai pemutus angka penularan dengan 5 wilayah memiliki persentase ≥ 90%. namun tetap menjadi evaluasi khususnya di wilayah Jakarta Timur mengingat banyak nya kasus penderita kusta di wilayah tersebut. Dari data dan grafik kedua menggambarkan sepuluh kecamatan penemuan kusta tanpa cacat di wilayah DKI Jakarta. Kecamatan paling besar yaitu senen yang berada di wilayah Jakarta Pusat sebanyak 132, lalu Cilandak yang berada di wilayah Jakarta Selatan sebanyak 69 kasus, dan Kalideres di wilayah Jakarta Barat sebanyak 23 kasus, dll. Melihat ketiga kecamatan berada di wilayah yang berbeda. Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan wilayah Pemprov DKI Jakarta dalam penerapan strategi penanggulangan kusta hingga tingkat kecamatan. Sehingga dapat memutuskan rantai penyebaran kusta secara presisi.

Gambar 5.115. Proporsi UKBM Aktif di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
UKBM	1.190	1.299	2.368	2.343	2.672	110
UKBM Aktif	1.148	1.258	2.151	2.253	2.751	104

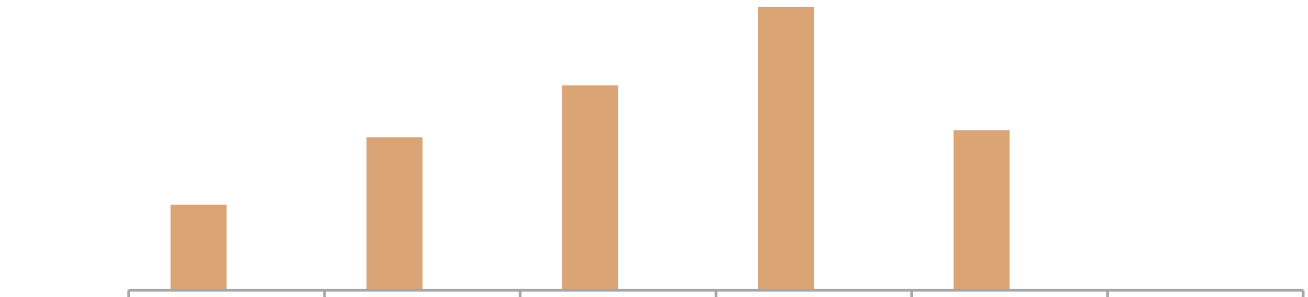
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Bentuk UKBM aktif di DKI Jakarta antara lain: Posyandu, Posyandu Lansia, Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), Saka Bakti Huda (SBH). Contoh kegiatan SBH adalah partisipasi generasi muda dalam kegiatan pramuka untuk bidang Kesehatan, contoh kegiatan Posbindu adalah kegiatan pemantauan Penyakit Tidak Menular (PTM) di lingkungan masyarakat secara terpadu, rutin, dll. Dari data dan grafik di atas membandingkan nilai perkembangan UKBM aktif di DKI Jakarta selama periode tahun 2023-2024.

Secara umum, terlihat bahwa proposi UKBM dan UKBM aktif relative stabil dengan kecenderungan peningkatan kecil di tahun 2024 di Salah satu wilayah (Jakarta Timur). Pada tahun 2023, wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat merupakan wilayah dengan proposi UKBM aktif tertinggi, yakni 2.536 kegiatan di Jakarta Timur dan 2.132 kegiatan di Jakarta Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa populasi wilayah dan aktivitas komunitas mayarakat yang kuat mendukung pertumbuhan fasilitas Kesehatan berbasis masyarakat di DKI Jakarta.

Lalu Kepulayan Seribu secara konsisten mempunyai proposi terendah karena jumlah penduduk dan cakupan wilayah yang kecil. Pada data dan grafik kedua menunjuukan tren Unit Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) aktif di hampir semua wilayah dengan proposi terbesar di wilayah Jakarta Timur sebanyak 2.751 aktif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat terlibat aktif dalam upaya Kesehatan preventif (pencegahan penyakit) dan promotif (peningkatan atau promosi Kesehatan.

Gambar 5.116. Total Kasus Sembuh dan Meninggal Covid-19 di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Sembuh	230	411	551	762	430	2
Meninggal	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Sejak diberlakukan Peraturan Presiden RI No. 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia[31]. Hal tersebut menandakan berhentinya kasus Pandemi Covid-19 di Indonesia. Tolak ukur berakhirnya pandemi Covid-19 tersebut berdasarkan turunnya banyaknya pasien yang sembuh serta turunnya angka kasus meninggal akibat Covid-19 secara khusus DKI Jakarta sebagai barometer wilayah di Indonesia. Relevan dengan strategi Penanganan Covid-19 dengan Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Perda No.2 Tahun 2020 tentang Penanggulaan Covid-19 dengan butir-butir poin strateginya adalah sebagai berikut:

- Membentuk Tim Tanggap Covid-19 menjadi pusat kendali untuk pemantauan, pencegahan, dan penanggulangan COVID-19.
- Rutin mengirimkan pesan publik melalui WhatsApp dan SMS seputar COVID-19, seperti potensi risiko jika ada tempat baru yang perlu dihindari.
- Tidak mengeluarkan izin baru untuk keramaian dan meninjau kembali izin yang telah dikeluarkan.
- Mendiagnosis kondisi masyarakat dengan gejala COVID-19 melalui telepon 112 dan 119, hingga mendatangi / menjemput orang tersebut untuk mengurangi potensi penularan.
- Mengimbau masyarakat untuk tidak ikut membeli barang secara berlebihan, karena stok kebutuhan di Jakarta masih cukup.
- Mengimbau masyarakat untuk rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir[32].



Dari data dan grafik di atas mencerminkan bahwa keberhasilan penanganan Covid-19 di DKI Jakarta pada tahun 2024. Dengan pasien yang berhasil sembuh sebanyak 2.386 pasien dan tidak adanya pasien yang meninggal akibat Covid-19 tersebut. Secara keseluruhan, strategi penanganan Covid-19 di wilayah DKI Jakarta sangat tepat dan berhasil dilakukan.

31 https://peraturan.bpk.go.id/Details/257684/perpres-no-48-tahun-2023
32 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/155082/perda-prov-dki-jakarta-no-2-tahun-2020

Gambar 5.117. Total Vaksin Covid-19 di DKI Jakarta tahun 2024

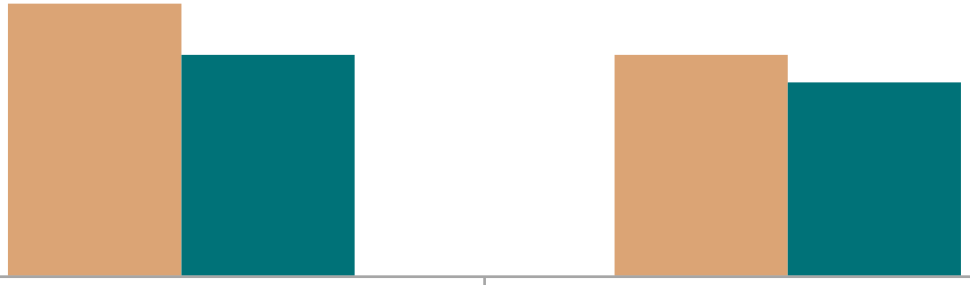


	2023	2024
Jumlah Vaksin	779.545	0

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Vaksinasi Covid-19 adalah salah satu bentuk kegiatan preventif yang berguna untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19 di suatu wilayah secara khusus wilayah DKI Jakarta. Namun, dikarenakan jumlah kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta telah menurun signifikan dan tidak adanya kasus yang meninggal sepanjang tahun 2024, telah dilakukan penurunan kegiatan vaksinasi Covid-19 Dari data dan grafik di atas menunjukkan bahwa penurunan yang signifikan dalam kegiatan vaksinasi di tahun 2024 untuk wilayah DKI Jakarta. Hal tersebut mencerminkan berkurangnya kebutuhan vaksinasi Covid-19, mengingat banyaknya populasi yang sudah mendapatkan dosis vaksin pada periode tahun sebelumnya sehingga dapat dialternatifkan pada kegiatan kesehatan lainnya.

Gambar 5.118. Jumlah Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Kejadian atau Kasus Penyakit Hewan Menular Tahun Sebelumnya	Kejadian atau Kasus Penyakit Hewan Menular Tahun Berjalan
2023	10	8
2024	8	7

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

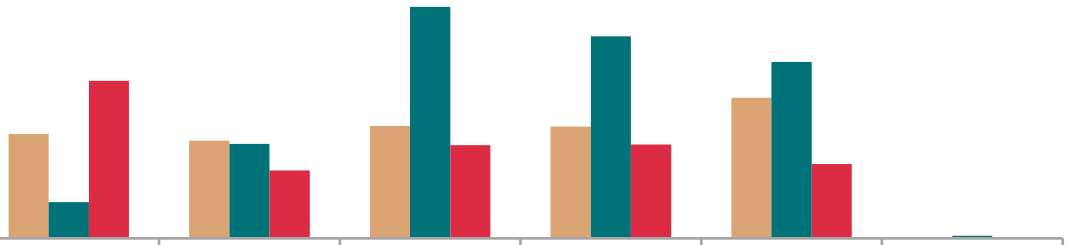
Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) adalah penyakit hewan yang berbahaya karena dapat menyebabkan kerugian ekonomi besar, keresahan masyarakat, dan menyabbkan kematian ke manusia. Jenis-jenis PHMS diantaranya : Brucellosis, AI, SE, Anthrax, dan leptospirosis. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah membuat peraturan mengenai pengendalian PHMS berdasarkan No. 47 Tahun 2014 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia [33]. menurut peraturan tersebut, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengendalikan PHMS diantaranya:

33 https://peraturan.bpk.go.id/Details/253985/keppres-no-17-tahun-2023

1. Pengamatan dan pengindetifikasian penyakit hewan
2. Pencegahan penyakit hewan
3. Pengamanan penyakit hewan
4. Pemberantasan penyakit hewan
5. Pengobatan penyakit hewan
6. Pengamanan penyakit hewan
7. Pemberantasan penyakit hewan
8. Pengobatan penyakit hewan.

Dari data dan grafik di atas menjelaskan bahwa terjadi penurunan nilai PHSS di tahun 2023 dan tahun 2024. Terjadi penurunan yang signifikan yaitu sebesar 20% di tahun 2023 dan 12,25% di tahun 2024. Walaupun terjadi penurunan, dari angka tersebut dapat menunjukkan bahwa Pemprov DKI turut untuk mengantisipasi kejadian penyakit terutama berasal dari faktor PHMS yang menggangu masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertainan (DKPKP) melalui program-program strategis seperti : Vaksinasi HPR (Hewan Penular Rabies dan Ternak), Surveillans aktif dan monitoring penyakit, pelayanan kesehatan hewan "Jemput Bola", KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), Sterilisasi Bersubsidi, dan pengawasan keamanan produk hewan, dll.

Gambar 5.119. Tiga Penyakit Menular Terbanyak di DKI Jakarta Tahun 2025



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
TB Paru	11.048	10.311	11.870	11.807	14.862	76
Pneumonia	3.830	9.998	24.494	21.369	18.659	252
AIDS Kasus Kumulatif	16.673	7.161	9.837	9.925	7.852	18

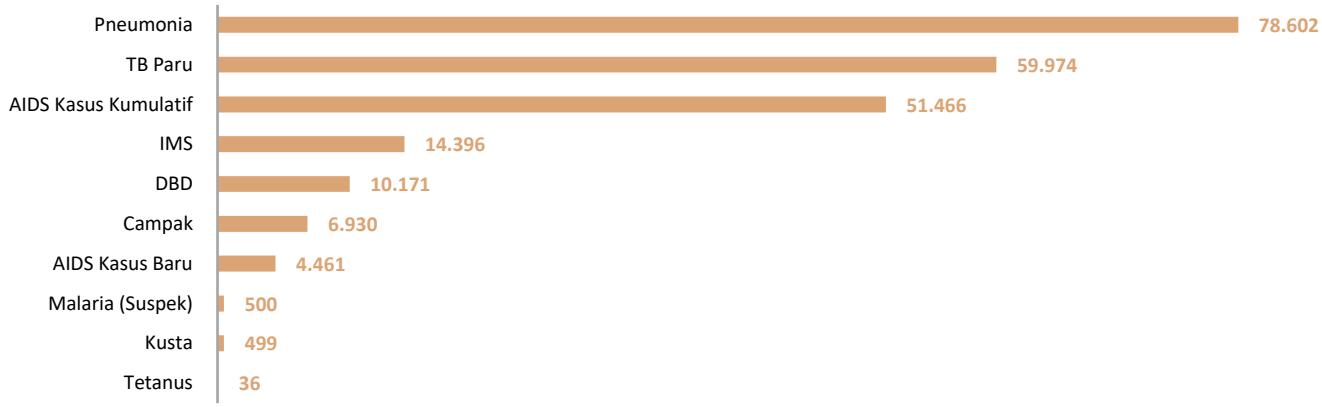
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Secara umum, penyakit menular merupakan penyakit yang menular ke manusia yang ditularkan melalui agen virus, bakteri, jamur, parasit, dll[34]. Penyakit menular masih menjadi momok dan tantangan di masyarakat karena dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Dari visualisasi grafik di atas menunjukkan distribusi tiga penyakit menular terbanyak di wilayah DKI Jakarta sepanjang tahun 2025. Pneunomia merupakan penyakit menular terbesar dengan total sebanyak 78.602 kasus dengan distribusi paling besar berada di wilayah Jakarta Barat sebanyak 24.494 kasus dan wilayah Jakarta Selatan sebanyak 21.369 kasus. Melihat data tersebut pola penyebaran penyakit Pneunomia berkaitan dengan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi serta disertai kondisi kualitas udara dan permukiman di wilayah tersebut. Lalu penyakit TB Paru sebanyak 59.974 kasus dengan

34 Republik Indonesia. (2014). Peraturan Kementerian Kesehatan RI No. 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Jakarta. Kementerian Kesehatan.
Link. https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2017/03/bn1755-2014.pdf

distribusi paling banyak berada di wilayah Jakarta Timur sebanyak 14.862 kasus. meskipun pola penyebaran penyakit TB Paru terkonsentrasi di seluruh wilayah DKI Jakarta. Sehingga diperlukan penguatan program eliminasi TB dan screening aktif guna memutus rantai penyebaran dari TB Paru di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dan selanjutnya adalah AIDS yang menjadi beban penyakit menular ketiga terbesar dengan total sebanyak 51.466 kasus dengan distribusi paling banyak berada di wilayah Jakarta Pusat sebanyak 16.673 kasus. Hal tersebut menunjukkan kasus AIDS lebih terkonsentrasi di wilayah pusat kota Jakarta. Sehingga memerlukan adanya intervensi sosial, edukasi kesehatan reproduksi, serta perluasan layanan dan tes konseling HIV di wilayah tersebut.

Gambar 5.120. Jumlah Penyakit Menular Terbanyak di DKI Jakarta Tahun 2025



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

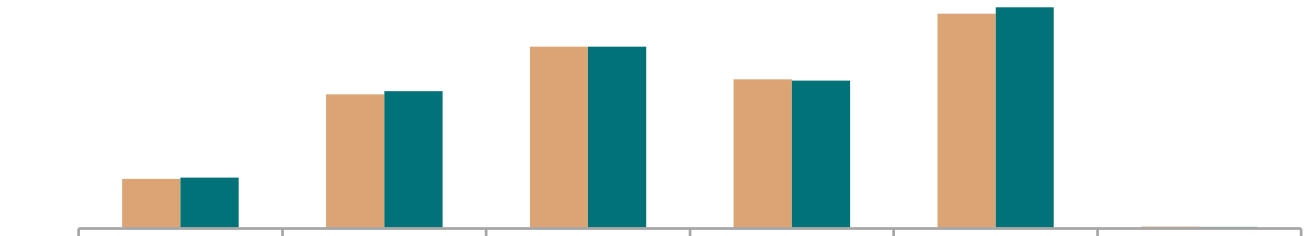
Berdasarkan visualisasi grafik di atas yang memperlihatkan jumlah penyakit menular terbanyak di wilayah DKI Jakarta sepanjang tahun 2025. Jika diambil 5 terbanyak dari data di atas, dapat ditunjukkan tiga pola karakteristik utama terbesar penyakit yaitu penyakit karena pernapasan (Pneunomia dan TB Paru), penyakit karena perilaku kesehatan dan reproduksi (HIV/AIDS dan IMS), dan penyakit berbasis lingkungan (DBD). Total dari penyakit pernapasan adalah 138.576 kasus dengan masing-masing Pneunomia sebanyak 78.602 kasus dan TB Paru sebanyak 59.974 kasus. Tingginya angka Pneunomia, sering dipengaruhi faktor seperti: kepadatan penduduk, mobilitas tinggi, kualitas udara, serta kondisi pemukiman di wilayah tersebut. Sedangkan TB Paru sering dipengaruhi oleh kepadatan pemukiman dan akses terhadap layanan kesehatan di wilayah tersebut. Lalu untuk pola penyakit perilaku kesehatan dan reproduksi, tingginya angka kasus AIDS sebanyak 51.466 kasus, menunjukkan pentingnya layanan tes HIV, konseling kesehatan reproduksi, serta edukasi masyarakat terhadap mengenai pencegahan penularan di wilayah tersebut. Lalu Infeksi Menular Seksual (IMS) sebanyak 14.396 kasus, tinggi angka kasus IMS menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi perlu ditingkatkan. Serta Demam Berdarah Dengue (DBD) sebanyak 10.171 kasus, pola penyakit ini berkaitan erat dengan kondisi lingkungan, pengelolaan air, serta keberadaan tempat berkembang biaknya nyamuk aedes aegypti di wilayah tersebut. Meskipun angka DBS lebih rendah dibandingkan empat penyakit di atas, namun DBD mempunyai karakteristik tersendiri dengan sifatnya yang musiman sehingga dapat meningkat tajam pada peride tertentu.

5.4.4. Kesehatan Lainnya

5.4.5. Kesehatan Ibu dan Anak

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan salah satu pondasi yang vital dalam menciptakan generasi yang sehat serta keluarga yang kokoh. Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung kegiatan KIA tersebut seperti pelayanan dan pemeliharaan bagi ibu hamil, dukungan proses persalinan ibu sebelum melahirkan hingga memasuki masa nifas, antisipasi komplikasi kepada ibu, pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang memadai di posyandu. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan anak secara khusus di wilayah DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta berupaya dalam mendukung dan meningkatkan kualitas upaya tersebut dengan menghadirkan program-progam yang ada di Posyandu, Dasa WIsma, dan Pendidikan Dasar, dll. sehingga output yang akan dihasilkan adalah balita terhindar dari gizi buruk, bayi normal, kematian ibu, ibu dan bayi yang sehat.

Gambar 5.121. Jumlah Kematian Ibu pada proses persalinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024



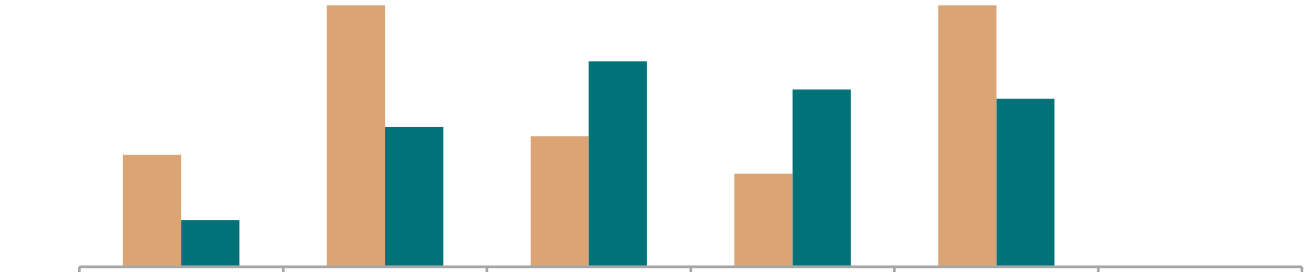
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	13.878	37.381	50.669	41.571	59.894	515
2024	14.227	38.283	50.712	41.235	61.666	413

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Proses persalinan yang baik tidak hanya memperhatikan kelahiran bayi tetapi juga keselamatan seorang Ibu. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainabel Development Goals* (SDGs) di Indonesia adalah 70 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2030. Berbagai langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah memastikan semua perempuan mendapatkan perawatan yang dibutuhkan sehingga selamat dan sehat selama kehamilan dan persalinannya. Dari Grafik di atas membandingkan perkembangan jumlah kematian Ibu pada proses persalinan di Provinsi DKI Jakarta menurut wilayah di tahun 2023 dan 2024. Secara umum, terlihat bahwa sebagian besar wilayah di Jakarta mengalami penurunan jumlah kematian ibu pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya khususnya di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Di Jakarta Pusat, jumlah kematian ibu turun sebanyak 41,67%, di Jakarta Utara terjadi penurunan sebanyak 53,67%, dan Jakarta Timur turun sebanyak 64,29%. Berbeda dengan dua wilayah tersebut, Jakarta Barat justru mengalami peningkatan jumlah kematian sebesar 1,57% dan Jakarta Selatan naik sebesar 1,9%. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pelayanan kesehatan maternal yang perlu memperoleh perhatian lebih. Sedangkan untuk wilayah Kepulauan Seribu tidak mencatat adanya kasus kematian ibu baik pada tahun 2023 maupun 2024 Secara keseluruhan, data pada grafik menunjukkan bahwa DKI Jakarta berhasil menurunkan jumlah kematian ibu di beberapa wilayah,

terutama Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Namun, peningkatan kasus di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan menandakan perlunya evaluasi mendalam terhadap pelayanan kesehatan ibu di wilayah tersebut. Upaya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) akan efektif jika berkolaborasi antara masyarakat, PEMDA, swasta yang turut berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.

Gambar 5.122. Jumlah Kematian Ibu Hamil di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	12	28	14	10	28	0
2024	5	15	22	19	18	0

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

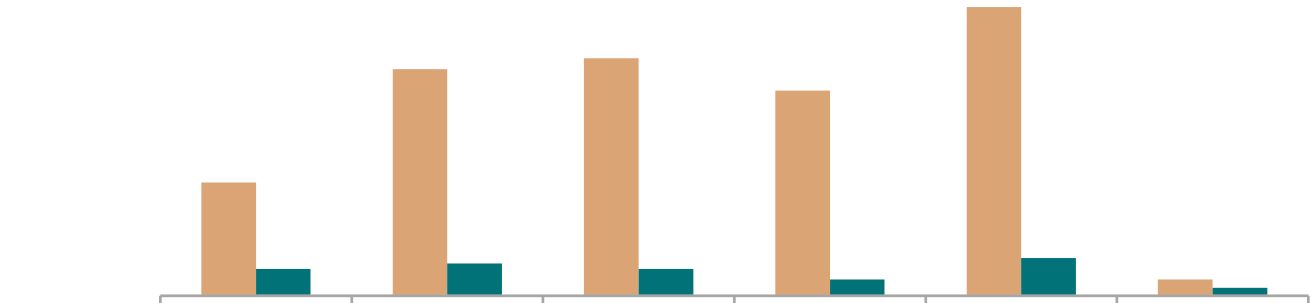
Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (BPS) dan World Health Organizations (WHO), Angka Kematian Ibu (AKI) / *Maternal Mortality Ratio*[35] sebagai angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup. (AKI) umumnya terjadi saat komplikasi saat dan pasca kelahiran. Adapun jenis-jenis komplikasi yang menyebabkan mayoritas dari penyebab kasus AKI adalah pendarahan, infeksi, tekanan darah tinggi saat kehamilan, komplikasi persalinan, dan aborsi yang tidak normal.

Dari data dan grafik di atas membandingkan nilai perubahan jumlah kematian ibu hamil di wilayah DKI Jakarta selama periode tahun 2023-2024. Di tahun 2023, wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara mencatat pada jumlah kematian tertinggi sebanyak 28 kasus AKI, lalu disusul Jakarta Barat dan Jakarta Selatan sebanyak 14 dan 12 kasus, diikuti Jakarta Selatan sebanyak 10 kasus. sedangkan di tahun 2024, angka tersebut mengalami tren penurunan di hampir seluruh wilayah DKI Jakarta Misalnya, wilayah Jakarta Timur turun sebanyak 10 kasus, lalu wilayah Jakarta Utara turun sebanyak 13 kasus, wilayah Jakarta Pusat turun sebanyak 7 kasus. Berbeda dengan wilayah lainnya, wilayah Jakarta barat mengalami kenaikan sebanyak 8 kasus dan Jakarta Selatan sebanyak 9 kasus. Namun menariknya, nilai AKI di wilayah Kepulauan Seribu tidak terjadi di tahun 2023 dan 2024. Hal ini menjadi apresiasi yang sangat baik dikarenakan pada wilayah tersebut merupakan geografis Kepulauan sehingga nilainya berbeda dengan sebaran wilayah lainnya. Secara keseluruhan, dari data dan grafik di atas menunjukkan nilai AKI di wilayah DKI Jakarta sepanjang tahun 2023-2024 yang sudah mengalami tren yang konsisten dan stabil. Namun perlu juga evaluasi dan peningkatan akan akses layanan antenatal (perawatan kehamilan ibu hamil sampai persalinan) khusus di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.



35 Arief Rahadian, *Maternal Mortality and Efforts to to Address it*. https://pkbi.or.id/kematian-ibu-dan-upaya-upaya-penanggulangannya (28 Januari 2026, 16:00).

Gambar 5.123. Jumlah Kematian Bayi Neonatal dan Post Neonatal di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Neonatal	42	84	88	76	107	6
Post Neonatal	10	12	10	6	14	3

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

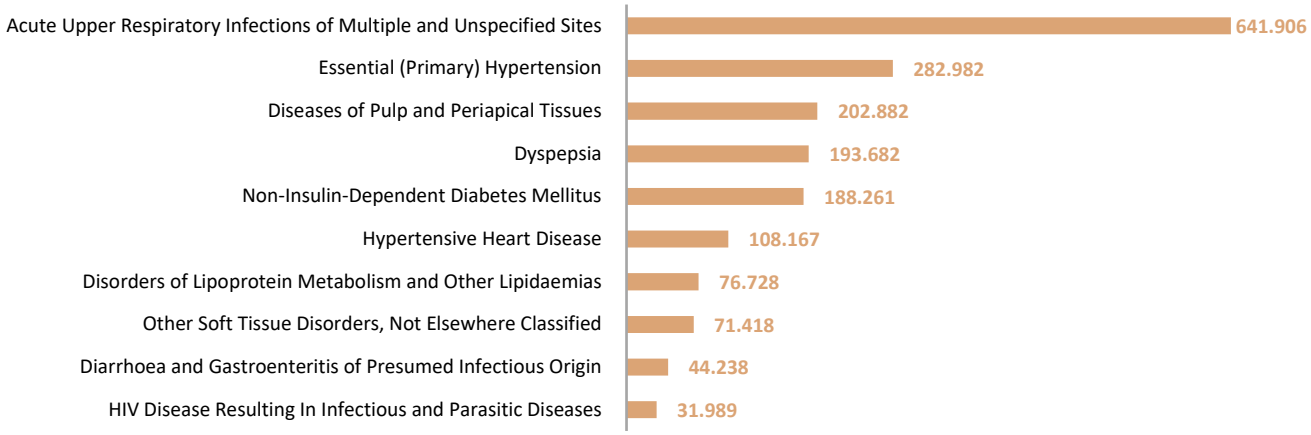
Pelayanan Kesehatan yang baik tidak hanya intensif diberikan untuk orang dewasa namun juga untuk diberikan untuk tumbuh dan kembangnya bayi secara khusus mengantisipasi kematian bayi fase keemasannya yaitu fase neonatal (0-28) hari dan fase post neonatal (29-11) bulan. menurut S.Soemantri dan Tin Afifah, Perbedaan antara fase neonatal dan fase post neonatal, fase neonatal[36] merupakan periode kritis 28 hari pertama saat kehidupan bayi baru lahir atau saat organ bayi beradaptasi dengan dunia luar. Sedangkan fase post neonatal adalah periode kematian bayi yang terjadi setelah usia 1 bulan sampai menjelang usia 1 tahun yang dipengaruhi oleh faktor dari lingkungan luar.

Dari data dan grafik diatas menggambarkan bahwa jumlah kematian bayi pada fase neonatal lebih besar dibandingkan kematian bayi pada fase post neonatal untuk seluruh sebaran wilayah DKI Jakarta. Wilayah Jakarta Timur tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kematian bayi neonatal tertinggi yaitu sebanyak 107 kasus, disusul oleh Jakarta Barat sebanyak 88 kasus dan Jakarta Utara sebanyak 42 kasus. Sedangkan wilayah Kepulauan seribu menunjukkan angka yang lebih kecil yaitu sebanyak 6 kasus. Sedangkan untuk kematian bayi post neonatal, wilayah paling banyak terjadi di Jakarta Timur sebanyak 14 kasus, disusul Jakarta Utara sebanak 12 kasus, Jakarta Pusat dan Jakarta Barat masing-masing sebanyak 10 kasus, dan paling kecil adalah Kepulauan Seribu sebanyak 6 kasus. Rendahnya angka post neonatal dibandingkan dengan fase neonatal menunjukkan bahwa kualitas layanan Kesehatan bayi setelah usia 1 bulan di Pemprov DKI Jakarta sangat baik. Hal tersebut dapat berupa intervensi pemberian ASI, imunisasi, serta pemantauan tumbuh kembang nya bayi yang berjalan sangat efektif. menurut Penelitian yang dilakukan oleh Raesita, Sulistiwati, dan Risa[37], banyaknya kematian bayi pada fase neonatal biasanya disebabkan karena faktor internal seperti kurangnya berat pada bayi itu sendiri, dan faktor eksternal seperti pengetahuan dan tingkat ekonomi dari si Ibu. Secara keseluruhan dari data diatas, upaya menurunkan kematian bayi di Pemprov DKI Jakarta perlu fokus pada periode neonatal dan sudah sangat baik pada fase post neonatal.

36 S. Soemantri & Tin Afifah, Kematian Anak dan Umur Harapan Hidup di Naggroe Aceh Darussalam. (Jakarta,2007) Jurnal media kesehatan Vol XVII Tahun 2007.

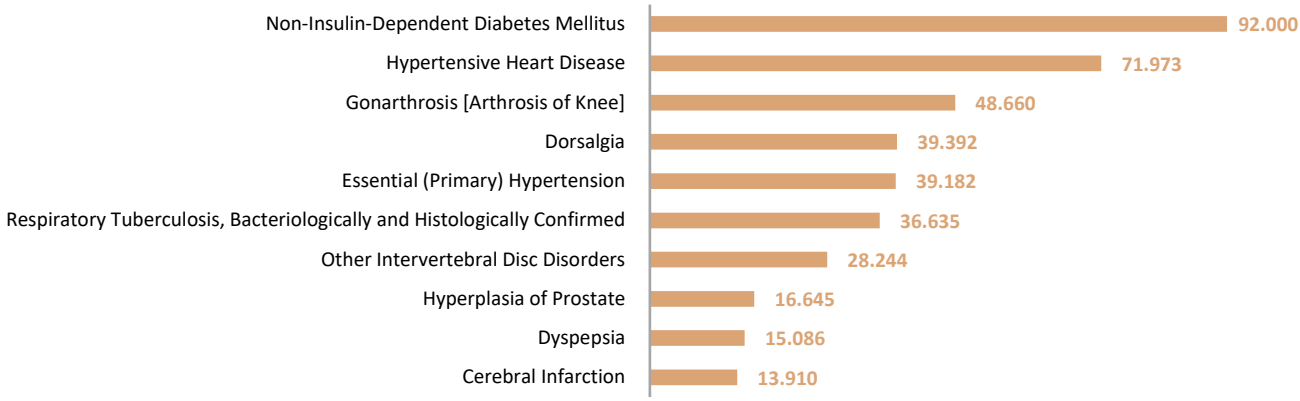
37 Wildan Azky, "Faktor Risiko Kematian Neonatal", https://news.unair.ac.id/2020/12/22/faktor-risiko-kematian-neonatal/ (2020/12/20) (Kamis, 29 Januari 2026, 09:40).

Gambar 5.124. Sepuluh Jenis Penyakit Terbanyak Rawat Jalan di Puskesmas DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 5.125. Sepuluh Penyakit Terbanyak Rawat Jalan di RSUD DKI Jakarta Tahun 2024



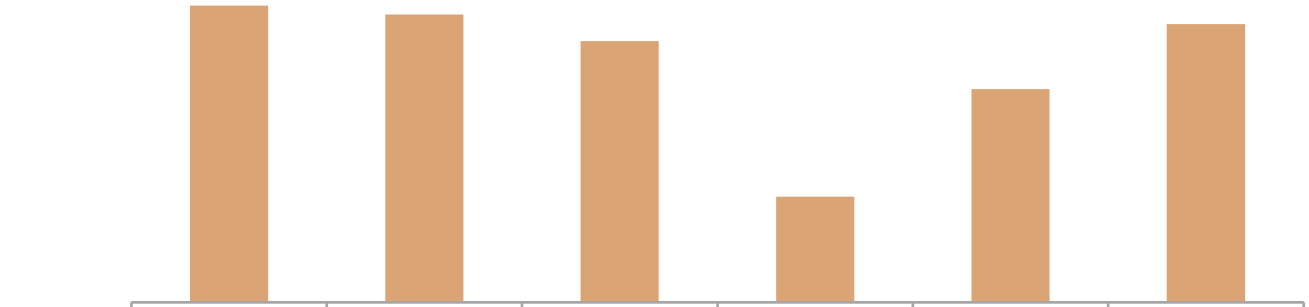
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Kesehatan merupakan salah satu pondasi penting dalam kehidupan yang harus dicermati dengan seksama. Tanpa kesehatan yang baik, kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti bersosialisasi, bekerja, berolahraga, belajar, dll. Namun sejatinya saat kita merasakan gejala yang muncul dari tubuh, alangkah baiknya kita bisa memutuskan untuk pergi ke faskes terdekat seperti Puskesmas atau RSUD bisa untuk rawat inap atau rawat jalan.

Dari grafik di atas menunjukkan sepuluh jenis penyakit terbanyak rawat jalan baik di Puskesmas atau RSUD di DKI Jakarta tahun 2.024. Berdasarkan faskes di Puskesmas, didominasi oleh penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) sebanyak 641.906 kasus, lalu disusul jenis penyakit darah tinggi sebanyak 282.982 kasus, lalu penyakit pulpa gigi (jaringan lunk di dalam gigi) sebanyak 202.822 kasus dan penyakit dispesia sebanyak 193.682 kasus. Penyakit-penyakit tersebut biasanya sangat dipengaruhi oleh gaya hidup, pola makan, serta paparan lingkungan di perkotaan. Sedangkan berdasarkan sebaran penyakit, menunjukkan daftar penyakit yang berbeda dengan Puskesmas seperti penyakit kronis diabetes melitus non-insulin dependent (NIDDM)/ Diabetes Tipe 2 sebanyak 92.000 kasus dan penyakit jantung intensif sebanyak 71.973 kasus, disusul penyakit gonarthosis dan dorsalgia sebanyak 39.392 kasus. Dari data tersebut, menunjukkan RSUD lebih banyak menangani penyakit yang membutuhkan penanganan lanjutan dan kontrol intensif seperti penyakit kronis dan sifatnya

komplikasi sedangkan untuk Puskesmas menangani penyakit dan infeksi yang bersifat keluhan umum. Selain itu, menunjukkan bahwa sistem pelayanan Kesehatan di DKI Jakarta telah berjalan sesuai fungsi kontrolnya yaitu Puskesmas untuk layanan primer yang bertujuan untuk deteksi dini dan pengobatan awal, serta RSUD untuk layanan sekunder untuk penanganan penyakit kronik dan serius.

Gambar 5.126. Persentase Balita Kurus yang telah mendapatkan PMT di DKI Jakarta Tahun 2024



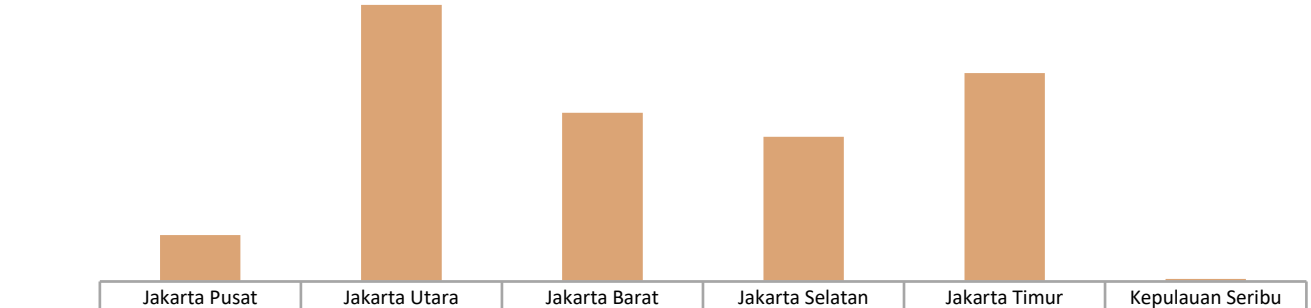
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Persentase	100,00%	99,41%	97,81%	88,38%	94,90%	98,84%

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) merupakan program intervensi dari Pemerintah yang ditujukan untuk balita kurang gizi/kurus. Tujuan pemberian PMT adalah membantu asupan zat gizi anak agar status gizinya meningkat sesuai usia. Jenis-jenis PMT adalah makanan lengkap siap santap atau kudapan sehat, protein hewani yang berasal dari dua jenis bahan yang berbeda seperti telur dan ikan, telur dan ayam, telur dan daging. Sasaran dari PMT adalah balita kurang gIzi, balita berat badan kurang, balita dengan berat badan tidak naik. Pemberian tersebut dilakukan agar berat badan balita kembali naik secara memadai dan mengikuti kurva pertumbuhan.

Dari data dan grafik diatas menggambarkan persentase grafik antara balita dibawah 5 tahun yang telah menerima manfaat program PMT di sebaran wilayah DKI Jakarta. Posisi tertinggi adalah Jakarta Pusat sebanyak 100%, lalu diikuti Jakarta Utara sebanyak 99,41%, lalu oleh Kepulauan Seribu sebanyak 98,84%, disusul Jakarta Barat sebanyak 97,81%, dan paling kecil Jakarta Selatan sebanyak 88,38%. Dari besarnya persentase di atas mengindikasikan Pemprov DKI Jakarta telah mampu memberikan respons yang cukup komprehensif dalam mengurangi risiko gizi buruk dan kasus stunting dengan pemberian PMT. Namun tetap menjadi sinyal peringatan untuk wilayah Jakarta Selatan karena persentase < 90%. agar bayi di wilayah tersebut menerima manfaat dari PMT dengan baik.

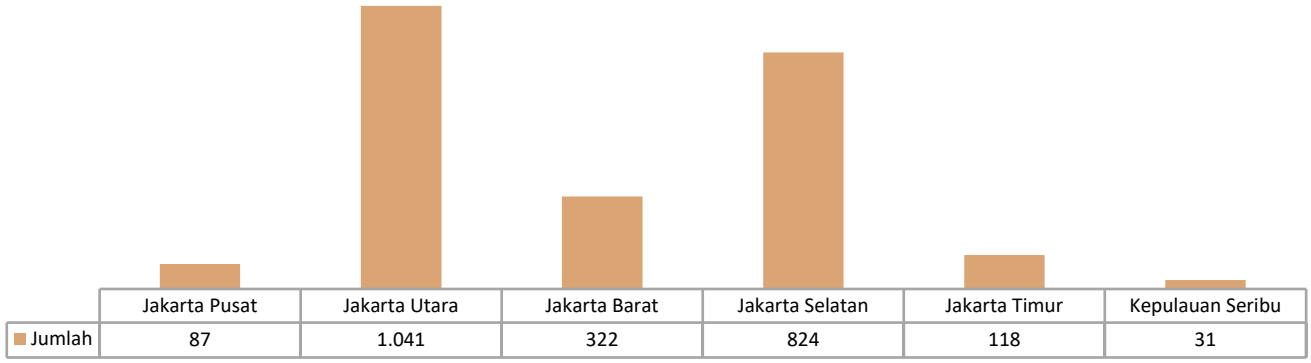
Gambar 5.127. Jumlah Balita 0-59 Bulan yang ditimbang di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jumlah	45.213	292.313	164.271	140.872	203.240	2.204

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 5.128. Jumlah Balita Berat Badan Kurang (BB/U) di DKI Jakarta Tahun 2024

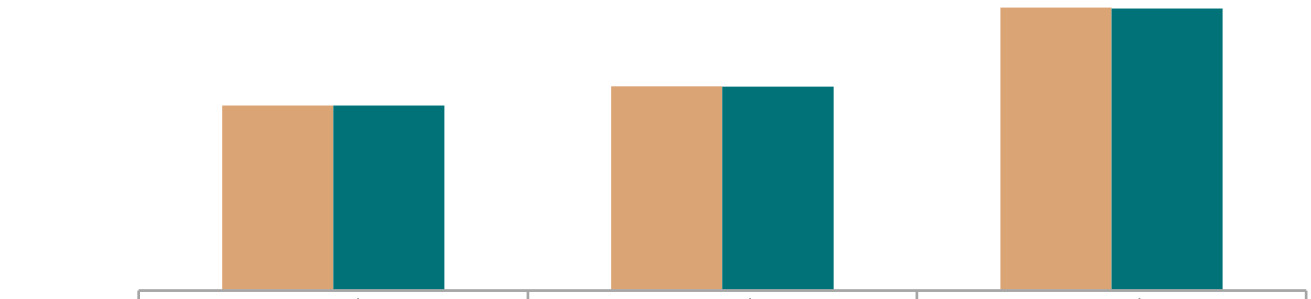


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jumlah	87	1.041	322	824	118	31

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Pertumbuhan dan Perkembangan balita sangat vital dalam menciptakan generasi yang sehat. Dalam pemantauannya, variabel yang diukur adalah tinggi badan dan berat badan. Masing-masing diukur setidaknya 8 kali dalam setahun 1 dan minimal 2 kali dalam 1 tahun. Saat proses penimbangan terjadi, kita dapat mengetahui apakah balita tersebut dalam keadaan stunting yang sangat mempengaruhi proses tumbuh dan kembangnya balita tersebut. Stunting merupakan gangguan tumbuh dan kembanya balita yang dipengaruhi karena kekurangan gizi *(underweight)*. Faktor penyebab *underweight* ini bermacama-macam seperti: kurangnya pengetahuan dan pola asuh dari Ibu, finansial pada keluarga, lingkungan yang tidak sehat, dan tidak optimalnya Pemberian Makan Tambahan (PMT) pada balita, dll. Dari grafik pertama menunjukkan perbandingan antara Jumlah balita yang ditimbang dengan jumlah balita berat badan yang kurang *(Underweight)* di DKI Jakarta tahun 2024. Dari total jumlah balita berusia (0-59 bulan) sebanyak 848.111 balita dengan jumlah balita terbanyak berada di wilayah Jakarta Utara sebanyak 292.313 balita dan paling sedikit di wilayah Kepulauan Seribu sebanyak 2.304 balita. Persentase rasio jumlah balita yang mengalami underweight di wilayah tersebut adalah wilayah Kepulauan Seribu sebanyak 1,41%, di wilayah Jakarta Selatan sebanyak 0,58%, lalu di wilayah Jakarta Utara sebanyak 0,36%, lalu wilayah Jakarta Barat sebanyak 0,20%, lalu wilayah Jakarta Pusat 0,19%, dan wilayah Jakarta Timur sebanyak 0,06%. Secara keseluruhan dari data tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan program di Pemprov DKI Jakarta dalam mengantisipasi kasus underweight di wilayah Pemprov DKI Jakarta.

Gambar 5.129. Pelayanan Kesehatan Balita Berusia 0-59 Bulan Sesuai Standar menurut Jenis Kelamin di DKI Jakarta Tahun 2024



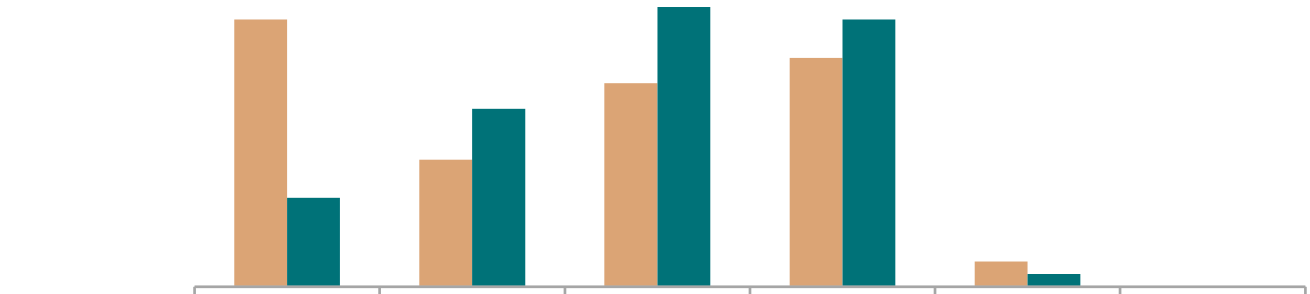
	0- 11 Bulan	12-23 Bulan	24-59 Bulan
Laki-laki	94.540	104.282	144.508
Perempuan	94.529	104.156	144.035

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Pelayanan kesehatan balita merupakan pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan yang dipantau melalu buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Hal tersebut tertuang berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan No. 4 Tahun tentang standard teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar.4546 Kategori usia pada pelayanan kesehatan balita dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu: 0-11 bulan, 12-23 bulan, dan 24-59 bulan. Contoh-contoh pelayanan kesehatan balita adalah dengan: pemberian kapsul vitamin A, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan tinggi badan balita, serta edukasi dan informasi kepada Ibu.

Dari data dan grafik di atas membandingkan antara pelayanan balita berusia 0-59 bulan berdasarkan jenis kelaminnya. Secara garis besar, balita laki-laki lebih banyak mendapatkan pelayanan dibandingkan balita perempuan untuk semua kelompok umur. Dan jenis kategori yang paling banyak mendapatkan pelayanan di DKI Jakarta sepanjang tahun 2024 adalah kelompok umur 24-59 bulan. Pemberian layanan pada kategori balita 0-11 bulan, 12-23 bulan, dan 24-59 bulan sangat penting dilakukan karena pada masa tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mentalnya sangat cepat.

Gambar 5.130. Jumlah balita gizi buruk menurut kelompok usia di DKI Jakarta Tahun 2024



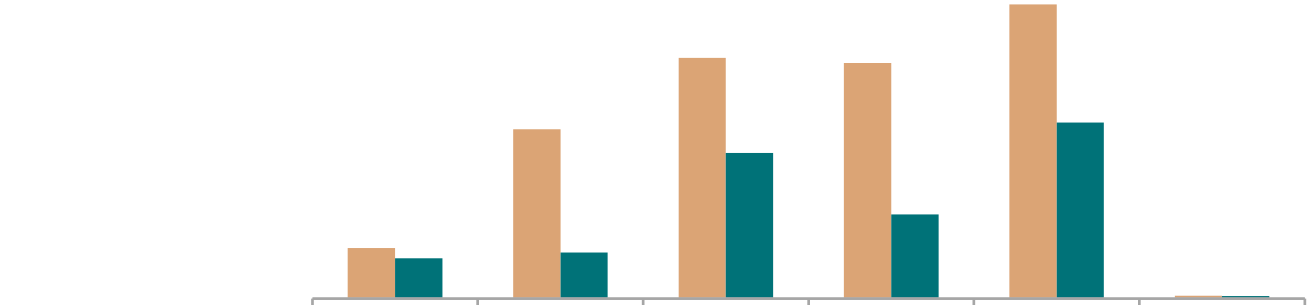
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Balita 12-23 bulan	21	10	16	18	2	0
Balita 24-59 bulan	7	14	22	21	1	0

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Balita dalam kategori usia (0-5) tahun adalah kelompok umur yang paling rentan menderita akibat kekurangan gizi atau disebut stunting. Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan kurang gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Terdapat dua dampak akibat pengaruh kekurangan gizi pada balita yaitu dampak pendek dan dampak panjang. Contoh akibat dampak pendek adalah penurunan perkembangan otak, gangguan tingkat kecemasan, serta terjadinya gangguan metabolisme tubuh sedangkan dampak dari jangka panjang antara lain menurunnya kemampuan kognitif pada prestasi belajar, menurunnya sistem imunitas tubuh sehingga mudah terkena penyakit, dan mempunyai risiko penyakit seperti diabetes mellitus, kanker, stroke, disabillitas, dll. Untuk menghindari dampak tersebut maka dibuat kategori usia, agar intervensi gizi dari kategori tersebut dapat tepat sasaran.

Dari grafik di atas menunjukkan perbandingan dua kelompok kategori usia balita 12-23 bulan dan balita usia 24 – 59 bulan. Untuk kelompok usia 12 – 23 bulan, paling tinggi adalah wilayah Jakarta Pusat sebanyak 21 kasus, lalu disusul oleh wilayah Jakarta Selatan sebanyak 18 kasus, lalu wilayah Jakarta Barat sebanyak 16 kasus, dan wilayah Jakarta Utara sebanyak 10 kasus. Paling sedikit adalah wilayah Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu yang masing-masing sebanyak 2 dan 0 kasus. Besarnya jumlah kasus balita gizi buruk pada kategori tersebut menandakan dalam periode masa transisi makan *(weakining period)* sekitar usia 1-2 tahun yang merupakan titik yang paling krusial dan rentan terhadap gangguan asupan gizi Sedangkan untuk kategori usia 24 – 59 bulan menunjukkan pola yang agak berbeda dengan wilayah tertinggi adalah Jakarta Barat sebanyak 22 kasus, disusul wilayah Jakarta Selatan sebanyak 21 kasus, dan wilayah Jakarta Utara sebanyak 14 kasus, lalu wilayah Jakarta Pusat sebanyak 7 kasus. paling sedikit adalah wilayah Jakarta Timur dan wilayah Kepulauan Seribu dengan masing-masing 1 dan 0 kasus.

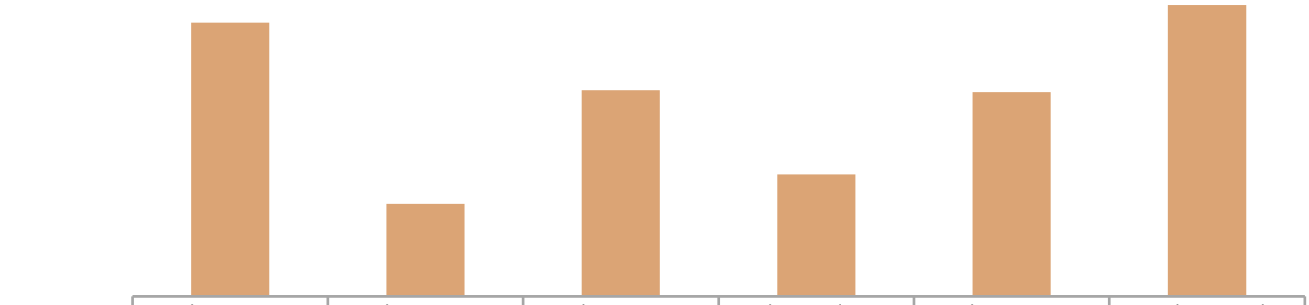
Gambar 5.131. Jumlah Perkiraan dan Realisasi Penemuan Pneunomia Balita di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Perkiraan Pneumonia	1.919	6.448	9.170	8.978	11.214	107
Realisasi Penemuan Pneumonia	1.540	1.752	5.545	3.209	6.712	93

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 5.132. Persentase Realisasi Penemuan Pneunomia Balita di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Persentase	80,25%	27,17%	60,47%	35,74%	59,85%	86,92%

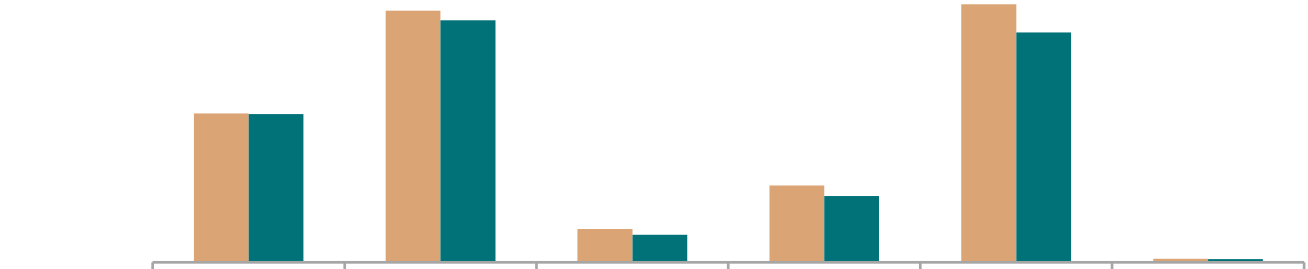
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Pneunomia atau sering dikenal dengan nama Radang Paru-Paru merupakan penyebab kematian menular terbesar pada anak-anak di seluruh dunia. menurut World Health Organizations (WHO) setiap 43 detik seorang balita meninggal karena Pneunomia[38]. Kejadian Pneunomia pada balita berkorelasi dengan memburuknya status gizi pada balita tersebut, jenis lantai rumah pada keluarga, jenis bahan bakar yang dipakai, dan meningkatnya kebiasaan merokok pada keluarga tersebut. Salah satu antisipasi penyebaran. Dari

38 ”Pnenunomia”, https://data.unicef.org/topic/child-health/pneumonia/, 2025/11 (Kamis, 29 Januari 2026, 09:40).

grafik pertama dan kedua menjelaskan jumlah realisasi penemuan Pneumoa pada balita di sebaran wilayah DKI Jakarta tahun 2024 dan persentase penemuannya. Jumlah realisasi penemuannya pneunomia pada balita ditemukan paling banyak di wilayah Jakarta Timur 6.712 penemuan dan paling sedikit di wilayah 93 penemuan. Sedangkan nilai persentase terbesar penemuan paling banyak berada di wilayah Kepulauan Seribu sebanyak 86,92%, disusul wilayah Jakarta Pusat sebanyak 80,25%, lalu wilauah Jakarta Barat sebanyak 60,47%, lalu wilayah Jakarta Timur sebanyak wilayah 59,85%, wilayah Jakarta Selatan sebanyak 35,74%, dan wilayah Jakarta Utara sebanyak 27,1%. Secara keseluruhan, angka keberhasilan persentase penemuan Pneunomia pada balita telah diimplementasikan pada wilayah Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu, Jakarta Timur, dan Jakarta Barta karena telah mencangkup angka ≥ 50%. hal tersebut mengindikasikan keberhasilan Pemprov DKI Jakarta dalam memetakan cakupan pelayanan Pneunomia pada balita di wilayah tersebut.

Gambar 5.133. Data Bayi Usia 0-6 Bulan Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif Tahun 2024

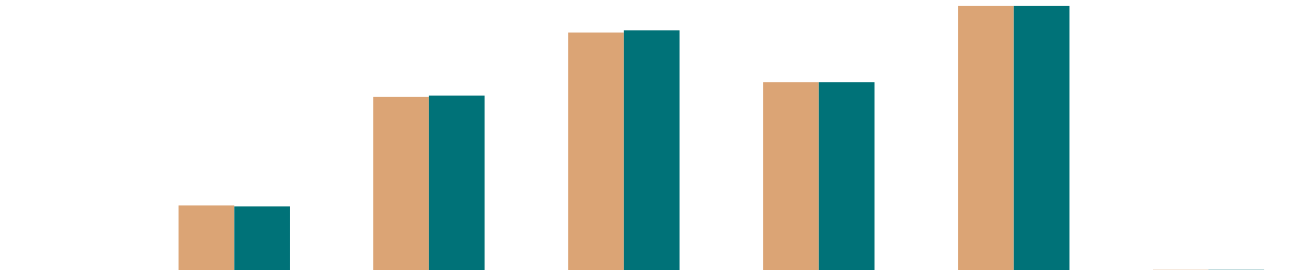


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Bayi <6 Bulan	14.227	24.064	3.192	7.341	24.691	347
Bayi 6 Bulan	14.169	23.154	2.627	6.326	21.987	309

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Dari data dan grafik diatas memperlihatkan perbandingan antara pemberian ASI ekslusif untuk kategori bayi usia < 6 bulan dan bayi 6 bulan. Secara garis besar untuk semua wilayah di DKI Jakarta mengalami penurunan pemberian bayi di usia 6 bulan di semua wilayah DKI Jakarta. Wilayah di DKI Jakarta yang dimana bayi mendapatkan ASI ekslusif terbesar adalah Jakarta Timur, Jakarta Utar, dan Jakarta Pusat. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor yang salah satunya adalah edukasi yang baik lewat Posyandu dalam program promosi dan pentingnya pemberian ASI ekslusif untuk bayi < 6 bulan.

Gambar 5.134. Cakupan Kunjungan Bayi yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Laki-laki	7.145	18.894	25.875	20.506	30.869	204
Perempuan	7.063	19.043	26.117	20.487	30.689	204

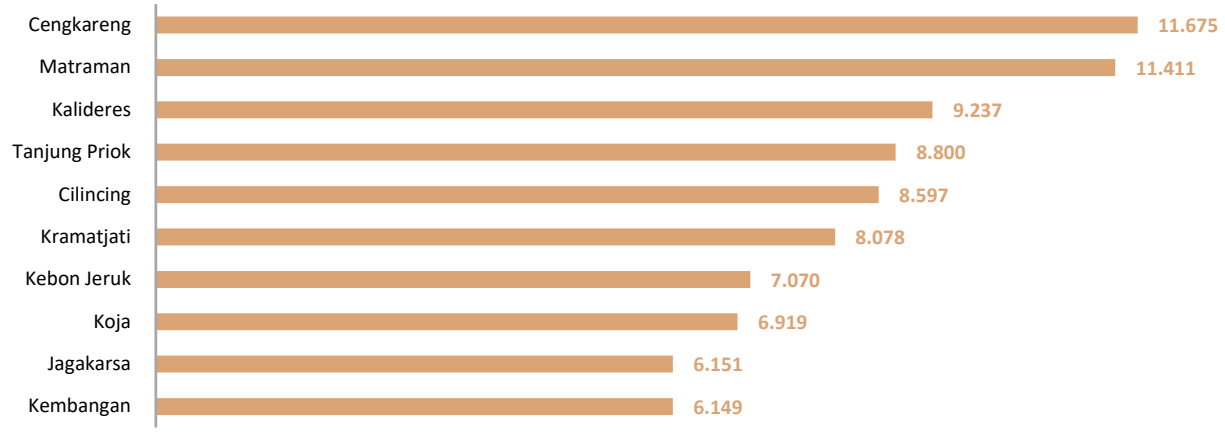
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar oleh tenaga kesehatan meliputi: Dokter, Bidan, Perawat, yang telah memiliki kompetensi klinis untuk kesehatan bayi, paling sedikitnya 4 kali yaitu:

- 1 kali (Umur 1 – 3 bulan)
- 1 kali (Umur 3 – 6 bulan)
- 1 kali (Umur 6 – 9 bulan)
- 1 kali (Umur 9 – 12 bulan)

Jenis-jenis pelayanan kesehatan pada balita antara lain: deteksi dini kelainan bayi (DDTS), stimulasi perkembangan bayi, manajemen terpadu balita sakit, dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi di rumah menggunakan KIA. Dari data dan grafik di atas menunjukkan perbandingan antara cakupan kunjungan bayi yang telah memperoleh pelayanan standar sepanjang tahun 2024 berdasarkan jenis kelaminnya. Secara garis besar, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan untuk seluruh wilayah di DKI Jakarta dalam pemberian cakupan kunjungan bayi. Sedikit kesenjangan yang dapat menjadi perhatian hanya terjadi di wilayah Jakarta Barat dimana perbedaan 242 cakupan kunjungan bayi antara bayi perempuan atau laki-laki.

Gambar 5.135. Sepuluh Kecamatan Terbanyak Kunjungan Ibu Hamil Antenatal Keempat (K4) di DKI Jakarta Tahun 2024

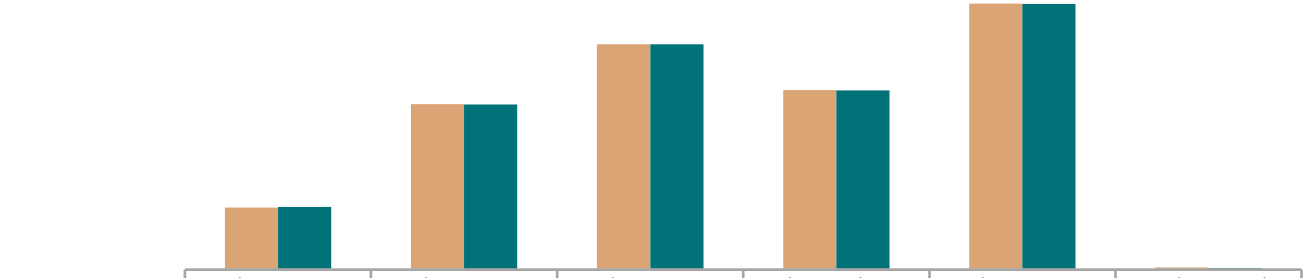


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Kunjungan Antenental *(Antenental Care)* yang dilakukan oleh ibu hamil merupakan pemeriksaan kehamilan yang dilakukan untuk memantau kesehatan ibu hamil dan janin. Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah untuk memastikan kehamilan berjalan normal, mempersiapkan ibu hamil untuk persalinan, meminimalkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, serta membantu ibu hamil untuk mempersiapkan diri untuk masa nifas dan pemberian ASI Eksklusif. Salah satu indikator penting dalam memantau kualitas pelayanan Kesehatan ibu hamil/kunjungan antenental tersebut disebut cakupan pelayanan kesehatan antenatal keempat (K4). menurut WHO dan Kementerian Kesehatan, Kunjungan K4 menggambarkan sejauh mana ibu hamil memperoleh layanan pemeriksaan rutin yang dilakukan minimal empat kali selama masa kehamilan oleh tenaga kesehatan yang

mempunyai kompetensi sesuai standard[39]. Dari data dan grafik di atas menunjukan list 10 kecamatan yang memiliki cakupan K4 terbesar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Cengkareng menjadi kecamatan dengan jumlah cakupan K4 terbesar di seluruh wilayah DKI Jakarta sebanyak 11.675 kunjungan. Disusul wilayah Matraman sebanyak 11.411 kunjungan. Lalu diikuti Kalideres, Tanjung Priok, Cibinong, Kramat jati, Kebon Jeruk, Koja, dll. Hal tersebut menunjukkan edukasi dan sosialisasi dari Pemprov DKI Jakarta telah memberikan kesadaran yang penting untuk layanan Antenental Care bagi Ibu hamil hingga tingkat kecamatan.

Gambar 5.136. Jumlah Ibu Hamil dengan Komplikasi yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jumlah Ibu Hamil	13.808	36.884	50.209	39.996	59.234	479
Jumlah K4	13.974	36.805	50.209	39.906	59.183	326

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

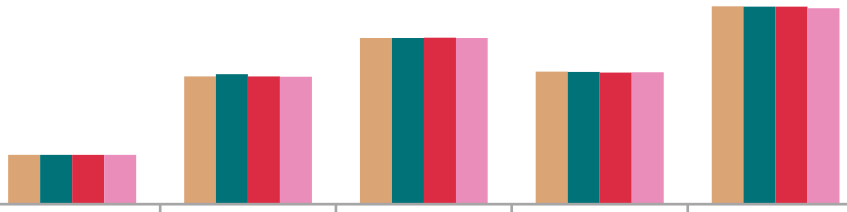
Standarisasi dalam pelayanan kepada ibu hamil dilakukan guna memastikan ibu dan bayi sehat selama proses persalinan atau disebut Antenental Care. Tujuan dilaksanakan Antenental Care bagi ibu hamil adalah memastikan proses kehamilan berjalan normal, mempersiapkan ibu hamil untuk persalinan, dan meminimalkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan. Pengaturan yang mengatur mengenai pelayanan Antenental Care yang diberikan kepada ibu hamil adalah Peraturan Menteri Kesehatan RI No 21 Tahun 2021 terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual[40].

Dari data dan grafik diatas membandingkan jumlah perkiraan ibu hamil yang mengalami komplikasi dengan pelayanan sesuai standard. Berdasarkan rasio persentase antara perkiraan ibu hamil komplikasi dengan penanganan komplikasi untuk seluruh sebaran wilayah di DKI Jakarta, diperoleh persentase nya adalah wilayah Kepulauan Seribu sebanyak 197%, Jakarta Pusat sebanyak 103%, wilayah Jakarta Selatan sebanyak 98%, wilayah Jakarta Timur sebanyak 92%, dan paling kecil wilayah Jakarta Barat 85%, dan Jakarta Utara 85%.

Secara keseluruhan, dari data dan grafik diatas persentase perkiraan ibu hamil yang mengalami komplikasi dengan penanganan standard adalah ≥ 85%. Dan menariknya, walaupun secara geografis wilayahnya berbentuk kepulauan, wilayah Kepulauan Seribu tetap memberikan pelayanan terbaik guna memastikan ibu hamil yang mengalamai komplikasi di wilayah Kepulauan Seribu tetap tertangani dengan baik sehingga bayi dan ibu hamil tetap sehat di wilayah tersebut.

39 Jenny Cresswel, "*Antenatal Care Coverage - at least four visits* (%), https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/80, (Kamis, 29 Januari 2026, 09:40).
40 https://peraturan.bpk.go.id/Details/314519/permenkes-no-21-tahun-2021

Gambar 5.137. Jumlah Kunjungan Ibu Nifas Pasca Melahirkan di DKI Jakarta Tahun 2024

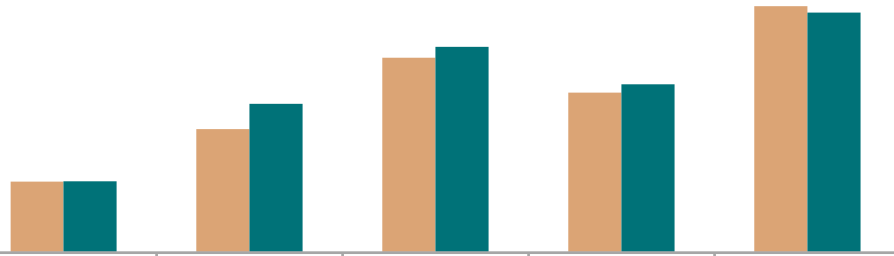


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
KF1 (6 jam - 2 hari)	14.204	36.834	47.928	38.223	57.011	410
KF2 (3 - 7 hari)	14.204	37.498	47.879	38.111	56.957	410
KF3 (8 - 28 hari)	14.203	36.798	47.959	37.942	56.926	410
Mendapatkan Vitamin A	14.204	36.693	47.927	38.026	56.502	410

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Masa Nifas adalah periode penting yang dimulai setelah proses melahirkan ketika tubuh ibu mengalami berbagai perubahan besar untuk kembali ke kondisi sebelum Ibu tersebut hamil. Pada masa ini terjadi pembersihan rahim secara alami yang ditandai dengan adanya cairan darah. Pada fase Periode ini biasanya terjadi sekitar 40 – 42 hari setelah proses persalinan. Masa nifas merupakan masa rawan terhadap berbagai penyakit komplikasi seperti infeksi, pendarahan berat, dan trombosis. Kunjungan Ibu Nifas adalah yang terdiri dari 4 fase yaitu KF1 (6-48 Jam), KF2 (3-7) Hari, KF3 (8-28) Hari dan mendapatkan Vitamin A yang dilakukan untuk memantau kesehatan ibu setelah proses melahirkan. Dari data dan grafik di atas membandingkan jumlah kunjungan ibu nifas pasca melahirkan di seluruh wilayah DKI Jakarta sepanjang tahun 2024. Wilayah Kepulauan Seribu mempunyai nilai yang paling kecil untuk semua fase kunjungan yaitu sebanyak 410 kasus. Dengan pemantauan lebih lanjut yang sangat perlu diperlukan guna meningkatkan keseteraan akses kesehatan untuk fase nifas ibu secara khusus wilayah yang masih mempunyai angka kunjungan yang rendah seperti Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu.

Gambar 5.138. Jumlah Cakupan Imunisasi Dasar pada Bayi menurut Jenis Kelamin di DKI Jakarta Tahun 2024

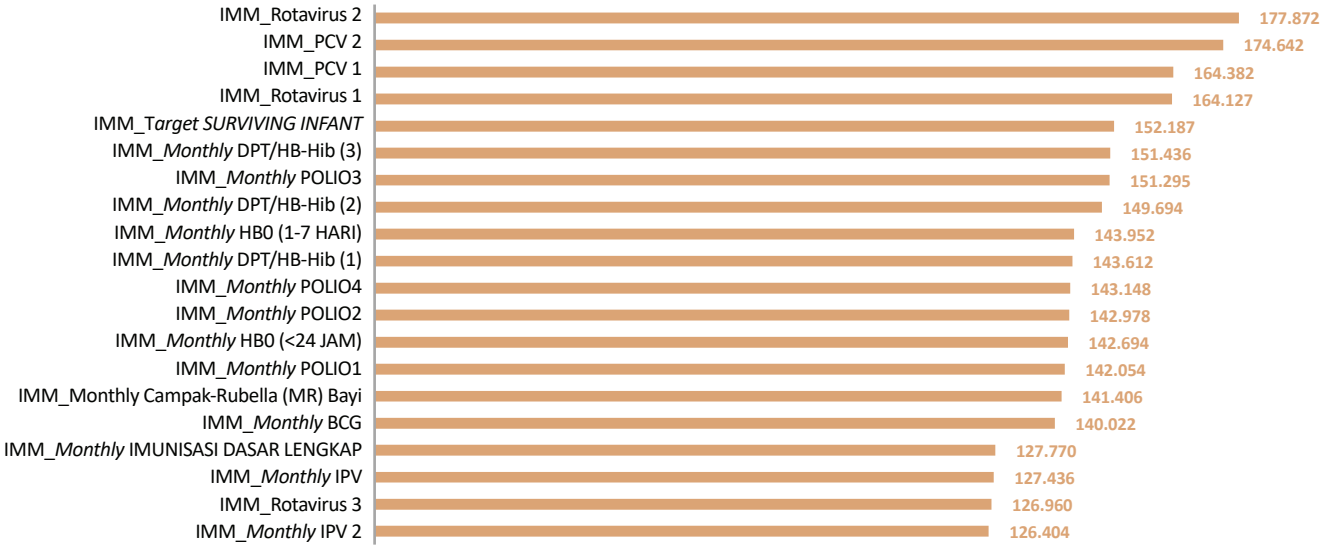


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jumlah Bayi Lahir	248.240	433.400	683.560	561.060	863.620	10.560
Jumlah Cakupan	250.059	521.576	721.697	590.414	841.472	8.853

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta



Gambar 5.139. Jumlah cakupan imunisasi dasar pada bayi menurut jenis kelamin di DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

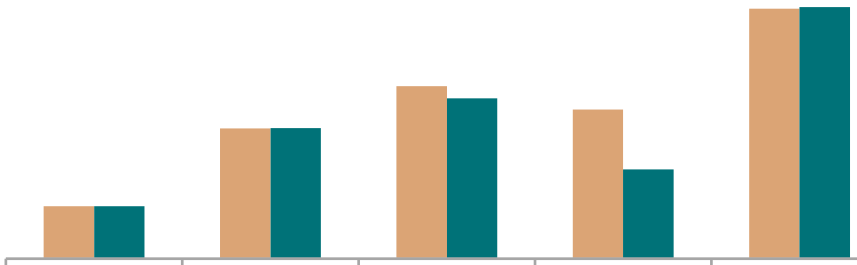
Imunisasi dasar adalah imunisasi yang diberikan kepada bayi untuk menangkal penyakit hepatitis, poliomyletis, tuberculosis, difteri, pertusis, tetanus, pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh *Haemophilus influenzae* tipe B dan campak. Tujuan pemberian imunisasi dasar adalah membentuk kekebalan tubuh kepada bayi agar tidak mudah terinfeksi dari penyakit menular. Pemberian imunisasi dan teknis pemberian imunisasi dasar kepada bayi diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi[41]. Dari data dan grafik pertama menggambarkan distribusi imunisasi kepada bayi berdasarkan jenis kelaminnya untuk sebaran wilayah di DKI Jakarta. cakupan imunisasi dasar untuk bayi perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kepada bayi laki-laki untuk seluruh wilayah di DKI Jakarta. Berdasarkan jumlahnya, wilayah paling banyak dalam cakupan imunisasi dasar yaitu Jakarta Timur sebanyak 841.471 bayi, disusul wilayah Jakarta barat sebanyak 721.697 sebanyak 721.697 bayi, lalu Jakarta Selatan sebanyak 590.414 bayi, lalu Jakarta Utara sebanyak 521,576 bayi, Jakarta Pusat sebanyak 250.059 bayi, dan paling sedikit wilayah Kepulauan Seribu sebanyak 8.813 bayi.

Selanjutnya pada data dan grafik kedua membandingkan jenis imunisasi dasar yang diterima bayi dengan nilai cakupan tertinggi adalah jenis *Inactivated Poliovirus Vaccine* (IPV) sebanyak 177.872 buah, Rotavirus 3 sebanyak 177.642 dosis, dan IPV 1 sebanyak 164.382 dosis, dll. Jenis imunisasi IPV paling banyak diberikan untuk mencegah polio, sedangkan jenis Rotavirus 3 digunakan untuk mencegah infeksi rotavirus penyebab diare akut atau muntaber pada bayi.

Secara keseluruhan dari data di atas, mengindikasikan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah memberikan pelayanan imunisasi dasar secara komprehensif kepada bayi dengan pemberian imunisasi dasar guna menciptakan generasi yang sehat dan kuat sejak dini.

41 https://peraturan.bpk.go.id/Download/102930/Permenkes%20Nomor%2012%20Tahun%202017.pdf

Gambar 5.140. Jumlah Balita dan Balita ditimbang di DKI Jakarta Tahun 2024



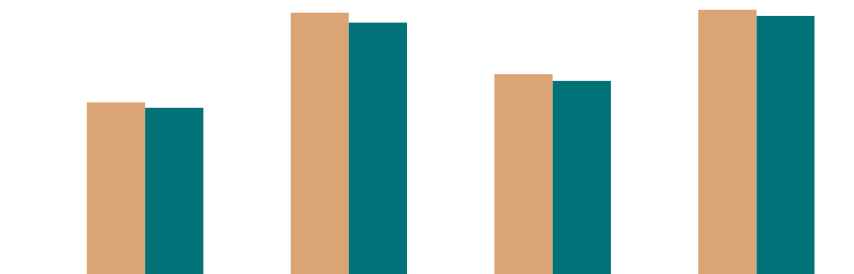
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jumlah Balita	19.994	49.637	65.699	56.732	95.187	1.294
Jumlah Balita Ditimbang	19.994	49.667	61.034	34.052	95.799	1.294

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Penimbangan balita adalah salah satu hal yang dilakukan untuk memantau tumbuh dan kembangnya balita. Variabel penimbangan pada balita diantaranya Tinggi Badan (TB) dan Berat Badan (BB). Hal tersebut dilakukan agar pertumbuhan anak tidak terhambat seiring bertambah umurnya. Pertumbuhan yang terhambat merupakan suatu tanda adanya masalah kesehatan yang terjadi pada balita. Semakin cepat masalah tersebut ditangani maka semakin cepatnya balita untuk mengejar perbaikan pertumbuhan yang terganggu serta mencegah terjadinya kasus stunting pada balita tersebut.

Grafik di atas menggambarkan perbandingan antara balita dengan jumlah balita yang ditimbang untuk sebaran wilayah di DKI Jakarta tahun 2024. Secara umum, persentase antara jumlah balita dengan jumlah balita yang ditimbang paling besar ditemui pada wilayah Jakarta Timur sebanyak 101%, lalu wilayah Kepulauan Seribu sebanyak 100%, Jakarta Utara sebanyak 100%, wilayah Jakarta Pusat sebanyak 100%, lalu wilayah Jakarta Barat sebanyak 93%, dan paling kecil adalah wilayah Jakarta Selatan sebanyak 60%. Nilai persentase pada Jakarta Timur melewati > 100% dikarenakan banyak balita yang ikut penimbangan berasal dari non wilayah tersebut Secara keseluruhan, persentase proses layanan kesehatan untuk penimbangan balita sudah sangat baik. Namun perlu sosialisasi dan evaluasi kembali khususnya di wilayah Jakarta Selatan agar layanan kesehatan untuk balita di wilayah tersebut dapat bermanfaat lebih baik untuk masyarakat khususnya pada balita.

Gambar 5.141. Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Belanja Daerah (PBI APBD) yang telah dilakukan validasi di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



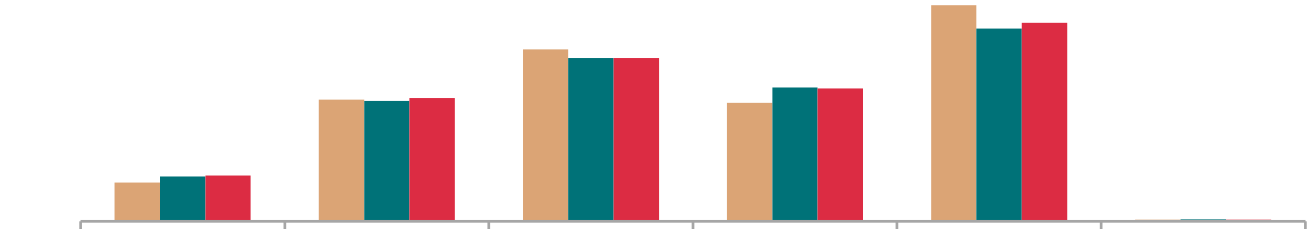
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	484.050	777.725	1.178.606	904.691	1.191.514	12.126
2024	465.018	754.352	1.133.950	874.031	1.165.308	12.112

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Peserta Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PBI APBD) merupakan program Jaminan Kesehatan nasional (JKN) yang bersumber dari APBD. Penerimanya adalah masyarakat yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu. Seluruh pembiayaannya dibebankan oleh PEMDA setempat sehingga dana tersebut dapat tepat sasaran. Peraturan yang mengatur mengenai anggaran PBI APBD diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah[42].

Dari data dan grafik di atas menggambarkantren jumlah peserta penerima bantuan iuran (PBI APBD) yang telah melalui proses validasi di seluruh wilayah DKI Jakarta tahun 2023-2024. Secara umum mengalami tren penurunan jumlah beserta dengan besarnya nilai yang bervariasi di tahun 2.024. Tren penurunan yang paling signifikan adalah di wilayah Jakarta Barat sebanyak 44.656 peserta, disusul wilayah Jakarta Selatan sebanyak 30.660 peserta, lalu Jakarta Timur sebanyak 26.206 peserta, lalu wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat masing-masing sebanyak 23.373 dan 19.032 peserta. Sedangkan wilayah Kepulauan Seribu adalah turun sebanyak 14 peserta. Secara keseluruhan, dari data dan grafik di atas menggambarkan proses validasi jumlah peserta PBI APBD di wilayah DKI Jakarta yang berlangsung relatif stabil. Namun demikian, jumlah peserta yang tinggi terutama di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat menegaskan kebutuhan bantuan iuran masih tetap signifikan diperlukan untuk kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

Gambar 5.142. Jumlah kelahiran Bayi Hidup menurut Kota/Kabupaten di DKI Jakarta Tahun 2022-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2022	12.033	37.790	53.427	36.786	67.147	485
2023	13.878	37.381	50.669	41.571	59.894	515
2024	14.227	38.283	50.712	41.235	61.666	413

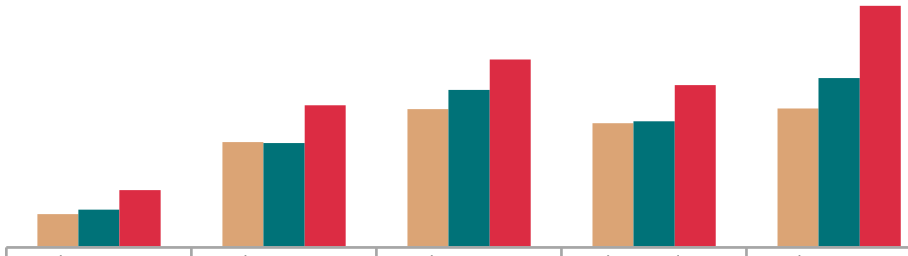
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Angka Kelahiran Hidup *(Live Birth)* merupakan terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan tanda-tanda kehidupan seperti berteriak, bernafas, jantung, berdenyut, dsb. Angka kelahiran hidup dikelompokkan ke dalam 3 jenis yaitu Angka Kelahiran Kasar (CBR), Angka Kelahiran Umum (GFR), dan Angka Kelahiran Total (TFR). CBR adalah banyaknya kelahiran bayi hidup per 1.000 penduduk pada tahun tertentu, sedangkan GFR merupakan jumlah per 1.000 wanita dalam usia reproduksi (15–49 tahun). Sementara itu, TFR merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang usia

42 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139916/pmk-no-78pmk022020

produktifnya. Data dan grafik di atas membandingkan angka kelahiran hidup di DKI Jakarta sepanjang periode 2022–2024 yang cenderung stabil dengan sedikit tren kenaikan di beberapa wilayah, khususnya Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Jakarta Timur tetap menjadi wilayah dengan jumlah kelahiran bayi hidup tertinggi selama periode tersebut. Di wilayah ini, tercatat 67.147 kelahiran yang sempat mengalami penurunan sebanyak 7.253 bayi, namun kembali naik pada tahun 2024 sebanyak 1.172 kelahiran. Disusul kemudian oleh wilayah Jakarta Utara yang mengalami fluktuasi nilai, yaitu turun sebanyak 409 kelahiran dan naik kembali sebanyak 902 kelahiran pada tahun 2024. Wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan juga menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Jakarta Pusat mengalami penurunan sebanyak 2.758 kelahiran dan naik tipis sebanyak 43 kelahiran. Sementara itu, Jakarta Selatan sempat naik sebanyak 4.785 kelahiran sebelum turun kembali sebanyak 336 kelahiran. Di wilayah Kepulauan Seribu, angka kelahiran naik sebanyak 30 bayi pada tahun 2023 dan turun sebanyak 102 kelahiran pada tahun berikutnya. Meskipun terjadi fluktuasi dalam skala kecil, tren angka ini sangat penting guna memastikan pemerataan layanan kesehatan ibu dan anak di seluruh wilayah tersebut.

Gambar 5.143. Data pelayanan kesehatan balita Berusia 0-59 bulan sesuai standar di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Balita 0-11 Bulan	11.637	36.767	48.275	43.382	48.544	464
Balita 12-23 Bulan	13.197	36.485	55.084	44.090	59.136	446
Balita 24-59 Bulan	19.994	49.637	65.699	56.732	95.187	1.294

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan untuk Ibu dan Anak (KIA) serta melakukan proses skrining tumbuh dan kembangnya anak. Contoh pelayanan kesehatan balita antara lain: pemberian kapsul vitamin A, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan, serta edukasi dan informasi ibu dan anak (KIA), serta pelayanan kesehatan pada balita yang berusia 0-59 bulan. Peraturan yang mengatur terkait pelayanan Kesehatan pada balita khususnya yang berusia 0-59 bulan diatur pada Peraturan kementerian Kesehatan No. 4 tahun 2019 mengenai standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar[43].

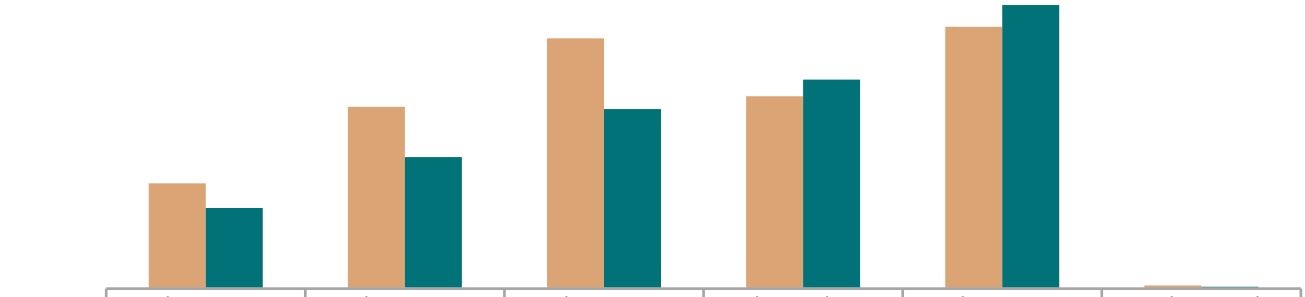
Dari data dan grafik di atas menjelaskan bahwa semakin bertambah nya usia balita maka semakin tinggi jumlah pelayanan kesehatan yang akan diterima pada balita. Hal tersebut sesuai dengan standard minimal kesehatan secara khusus untuk balita. Pada wilayah Jakarta Timur merupakan kontibutor pelayanan terbesar untuk semua kelompok usia balita di sebaran wilayah di DKI Jakarta dengan masing-masing angka layanan sebagai berikut :

43 https://peraturan.bpk.go.id/Details/111713/permenkes-no-4-tahun-2019

- 0 – 11 bulan (48.544) layanan,
- 12 – 23 bulan (59.136) layanan,
- 24 – 59 bulan (95.187) layanan.

Diikuti wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan , Jakarta Utara Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu yang menunjukkan pola peningkatan layanan yang sama untuk setiap jenjang usianya. Sehingga dari pola distribusi pelayanan balita tersebut mencerminkan standar layanan konsisten balita di DKI Jakarta serta program kesehatan balita yang ada di DKI Jakarta yang telah memenuhi standard pelayanan minimal kesehatan.

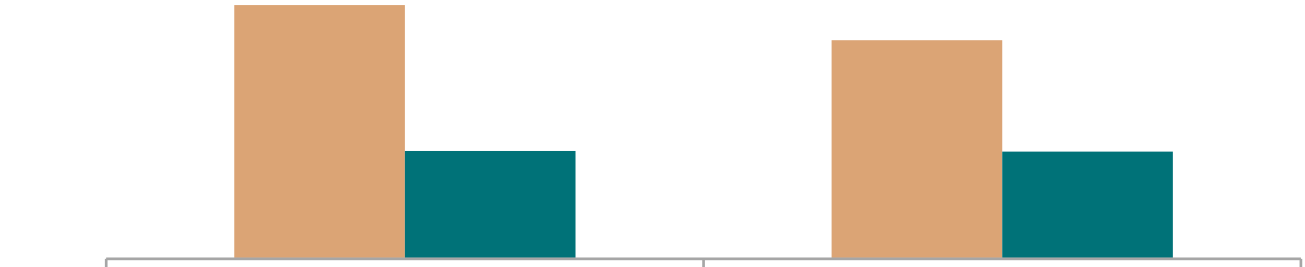
Gambar 5.144. Jumlah Penduduk DKI Jakarta yang menjadi Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan di wilayah DKI Jakarta tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
PBI	610.907	1.054.625	1.453.435	1.116.571	1.519.443	18.670
Non PBI	468.123	762.968	1.043.152	1.212.802	1.677.756	11.606

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 5.145. Jumlah Penduduk DKI Jakarta yang menjadi Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menurut jenisnya di DKI Jakarta



	2023	2024
PBI	5.999.600	5.773.651
Non PBI	5.179.786	5.176.407

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) merupakan program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh untuk seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Dalam mengimplementasikan tujuan tersebut, Pemerintah mengeluarkan UU. No 40 Tahun 2004 terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)[44]. Asas pembiayaan SJSN ini diselenggarakan sesuai mekanisme Asuransi Sosial sehingga setiap peserta wajib membayar iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonominya yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

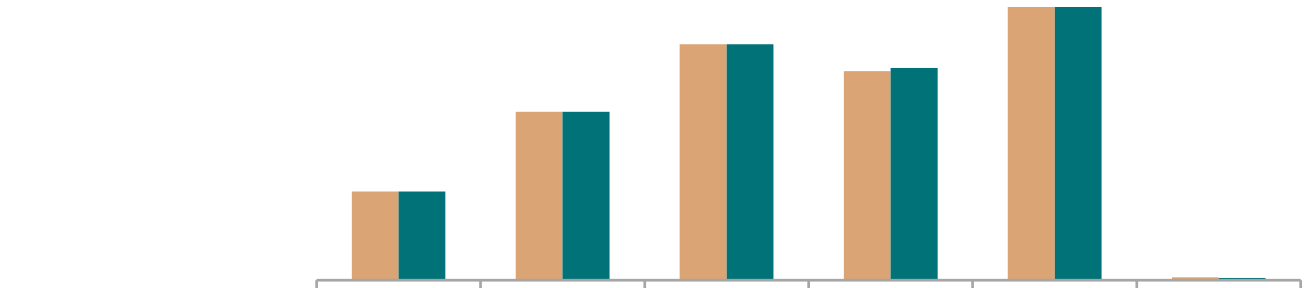
44 https://peraturan.bpk.go.id/Details/40787

Peserta JKN bersifat wajib untuk setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia. Peserta JKB dibagi ke dalam 2 jenis yaitu :

1. PBI (Penerima Bantuan Iuran) contohnya kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang ditetapkan BPS dan divalidasi oleh Kementerian Sosial
2. Peserta Non PBI (Peserta Non Penerima Bantuan Iuran) contohnya : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN), Pegawai Swasta, Investor, Pemberi kerja, Penerima pensiun, Veteran, Perintis kemerdakaan, dan bukan pekerja lainnya yang memenuhi kriteria bukan pekerja penerima upah.

Hal tersebut sejalan dengan grafik kedua. Di saat yang bersamaan, peserta Non-PBI relatif stabil. Secara aggregasi peserta JKN bidang kesehatan di tahun 2024 mencapai 10.950.058 peserta jika dibandingkan aggregasi peserta JKN di tahun 2023 mencapai 11.179.386 peserta dengan penurun sebanyak 225.949 peserta untuk PBI dan 3.379 peserta Non PBI. Jika berdasarkan sisi wilayah, Jakarta Timur menjadi wilayah jumlah peserta JKN tertinggi baik untuk jenis PBI ataupun Non-PBI. Hal ini mengindikasikan tingginya kebutuhan sekaligus pertipasi masyarakat terhadap jaminan kesehatan. Hal yang menarik di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur memiliki jumlah peserta Non-PBI yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan PBI. Hal ini menggambarkan intervensi Pemprov DKI Jakarta dalam menjamin akases layanan kesehatan bagi kelompok rentan. Dan wilayah Kepulauan Seribu mempunyai jumlah peserta JKN paling kecil dibandingkan wilayah lainnya, baik jenis PBI atau Non-PBI. Hal ini relevan dengan karakteristik wilayah yang mempunyai populasi penduduk yang relatif sedikit namun tetap memerlukan perhatian khusus mengingat keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, program JKN di DKI Jakarta telah menjangkau sebagian besar penduduk dengan ketergantungan yang cukup besar pada skema PBI kesehatan.

Gambar 5.146. Jumlah Penjaringan Kesehatan Siswa Sekolah Dasar (SD) Tahun 2024



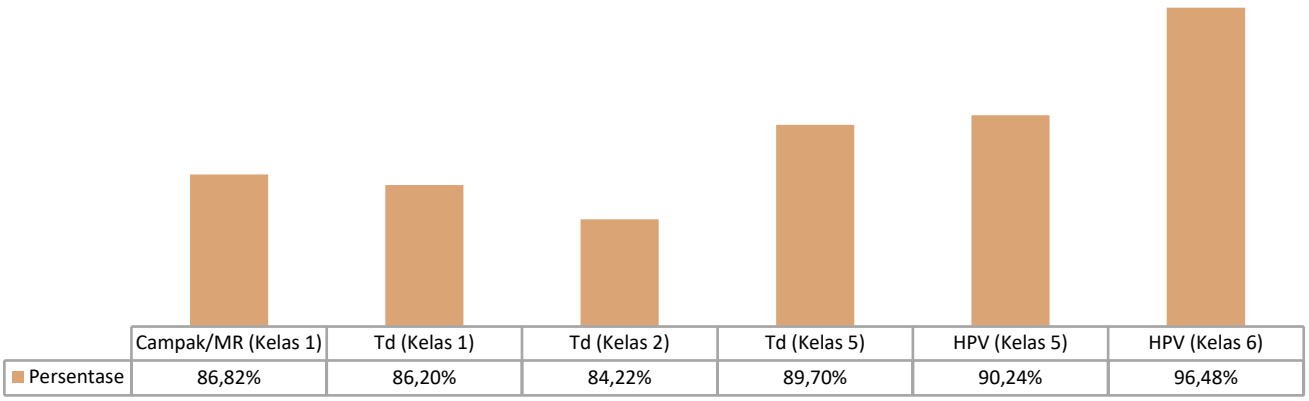
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Usia Pendidikan Dasar	166.899	317.158	444.574	394.093	532.774	5.334
Mendapat Pelayanan Kesehatan	166.899	317.354	444.573	399.969	531.773	4.283

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Penjaringan kesehatan adalah rangkaian pemeriksaan kesehatan disebut skrinning yang dilakukan pada siswa didik baru yaitu kelas 1 SD/MI, kelas 7 SMP/MTs dan kelas 10 SMA/SMK/MA *(entry level)*. Penjaringan kesehatan biasanya menggunakan kuesioner yang berisi list pertanyaan riwayat kesehatan keluarga, imunisasi dan perilaku terkait kesehatan lainnya. Kuesioner diisi oleh masing-masing siswa.

Dari data dan grafik di atas menunjukkan program penjaringan kesehatan siswa SD di DKI Jakarta tahun 2024 telah berjalan sangat efektif dengan tingkat cakupan yang mendekati 100% di antaranya : Jakarta Selatan 101%, Jakarta Pusat 100%, Jakarta Utara 100%, Jakarta Barat 100%, dan Jakarta Timur 100%. Hanya daerah Kepulauan Seribu yang mempunyai persentase sebesar 80%. Secara keseluruhan nilai aggregasi dari jumlah siswa SD untuk usia rentang pendidikan dasar di DKI Jakarta tahun 2024 mencapai 1.860.832 siswa, sehingga hampir seluruh siswa telah mendapatkan pelayanan kesehatan. Tingginya angka tersebut sejalan dengan jumlah penduduk usia Sekolah Dasar (SD) di wilayah tersebut. Selanjutnya untuk wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan juga mencatat jumlah penjaringan kesehatan yang tinggi, Jakarta Barat tercatat sekitar 444.574 sasaran sedangkan Jakarta Selatan mencatat 394.093 sasaran. Di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan penjaringan kesehatan juga relatif seimbang dengan jumlah sasaran masing-masing 317.354 Siswa dan 399.573 Siswa. Adapun wilayah Kepulauan Seribu mencatat jumlah sasaran pelayanan jaringan kesehatan paling kecil yakni sekitar 5.334 siswa dengan 4.283 siswa yang telah memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan frekuensi angka yang kecil, hal ini mengindikasikan tantangan tersendiri dalam menjangkau dengan wilayah kepulauan yang memiliki akses dan fasilitas yang terbatas. Secara keseluruhan, dari data dan grafik di atas menegaskan bahwa program penjaringan kesehatan siswa SD di DKI Jakarta untuk periode tahun 2024 telah berjlan sangat efektif dan merata.

Gambar 5.147. Persentase Anak Sekolah yang Imunisasi menurut Kategori Imunisasi di DKI Jakarta Tahun 2024



	Campak/MR (Kelas 1)	Td (Kelas 1)	Td (Kelas 2)	Td (Kelas 5)	HPV (Kelas 5)	HPV (Kelas 6)
Persentase	86,82%	86,20%	84,22%	89,70%	90,24%	96,48%

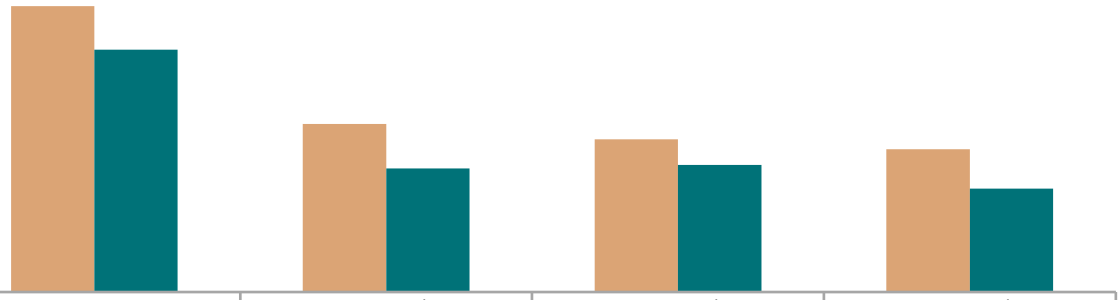
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Imunisasi Anak Sekolah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyakit Campak/MR, Rubella, Difteri, Tetanus dan Kanker Serviks pada anak sekolah. Biasanya dilaksana setiap tahun pada bulan Agustus dan November di Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah bagi yang bersekolah dan juga dapat dilaksanakan bagi yang tidak bersekolah di Yayasan/Panti Asuhan, Balai Permasyarakat, Sekolah non-formal, dll. Pelaksanaan imunisasi anak sekolah disebut Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). menurut Kementerian Kesehatan, manfaat pelaksanaan Imunisasi Anak Sekolah Seperti[45]: Campak Rubella adalah melindungi anak dari penyakit Campak yang dapat menyebabkan komplikasi berupa Pneunomia, ensafalitis, kebutaan bahkan berakibat pada kematian. Manfaat Imunisasi DT dan TD adalah melindungi bayi dan anak dari penyakit berbahaya seperti Difteri dan

45 "Bulan Imunisasi Anak Sekolah", https://ayosehat.kemkes.go.id/agenda-kegiatan/bulan-imunisasi-anak-sekolah-bias (Kamis, 29 Januari 2026, 09:45).

Tetanus, sedangkan manfaat dari Imunisasi HPV adalah melindungi anak perempuan dari kankers leher rahim di masa depan. Dari data dan grafik diatas menggambarkan nilai realisasi Imunisasi Anak Sekolah berdasarkan kategori Imunisasi di sebaran wilayah DKI Jakarta tahun 2024. Secara keseluruhan nilai persentase pada masing-masing kategori adalah ≥ 80%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kesadaran Pemprov DKI Jakarta kepada anak-anak di pendidikan dasar dalam memberikan pelayanan kesehatan berupa imunisasi anak sekolah sangat tinggi sehingga dapat menghasilkan generasi yang sehat sejak dini.

Gambar 5.148. Hasil Imunisasi Bacilus Calmetter Guerin (BCG) dan Dipheri Pertusis Tetaus (DPT) Bayi di Puskesmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



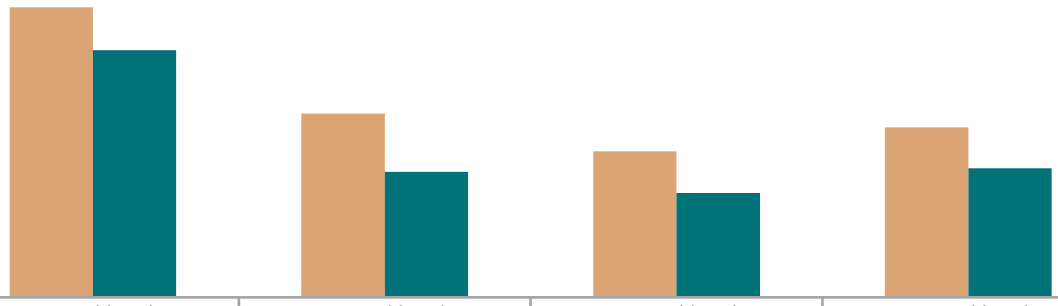
	IMM Monthly BCG	IMM Monthly DPT/HB-Hib (1)	IMM Monthly DPT/HB-Hib (2)	IMM Monthly DPT/HB-Hib (3)
Laki-Laki	76.924	72.421	71.841	71.451
Perempuan	75.263	70.727	70.853	69.955

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Imunisasi dasar merupakan vaksin yang diberikan kepada balita agar mempunyai imunitas terhadap suatu penyakit tertentu. Penyakit tersebut bila tidak dicegah dapat menyebakan kecacatan atau kematian. Terdapat dua jenis imunisasi yang sangat vital diberikan kepada bayi yang berusia 0-11 bulan yaitu imunisasi Bacilus Calmette Guerin (BCG) dan Imuniasi Dipheri Pertusis Tetanus (DPT). Vaksin BCG bertujuan untuk melindungi bayi dari infeksi virus Tuberkulosis (TB). Vaksin BCG diberikan kepada bayi saat berusia 1 bulan. Sedangkan vaksin DPT bertujuan untuk melindungi bayi dari bakteri difteri, pertusi (batuk rejan) dan tetanus. Vaksin DPT dibedakan ke dalam 4 kelompok yaitu: Imunisasi DPT/Hb1 diberikan untuk bayi 2 bulan, imunisasi DPT/Hb2 untuk bayi 3 bulan, imunisasi DPT/Hb3 untuk bayi 4 bulan, dan imunisasi DPT/Hb4 untuk bayi 5 bulan. Dari grafik di atas menggambarkan pemberian vaksinasi dasar kepada balita berusia kurang dari 1 tahun berdasarkan jenis kelaminnya. Dari total perbandingan kategori imunisasinya, paling banyak imunisasi BCG sebanyak 152.187 vaksin, lalu disusul imunisasi DPT/Hb1 sebanyak 143.148 vaksin, lalu IMM DPT/Hb2 sebanyak 142.694 vaksin, dan IMM DPT/Hb3 sebanyak 141.406. Melihat jumlah kesenjangan yang tidak terlalu jauh mengindikasikan bahwa perhatian Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan vaksinasi dasar kepada balita sangat tinggi guna menghasilkan generasi yang sehat.



Gambar 5.149. Data Imunisasi Polio Bayi di Puskesmas DKI Jakarta Tahun 2024



	IMM Monthly Polio 1	IMM Monthly Polio 2	IMM Monthly Polio 3	IMM Monthly Polio 4
Laki-Laki	76.337	72.916	71.696	72.464
Perempuan	74.958	71.036	70.358	71.148

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Polio atau yang sering dikenal dengan nama Poliomyletis adalah penyakit yang menyerang sarah permanen sehingga mengakibatkan lumpuh layu yang disertai dengan kaku pada leher dan punggung. Saat dewasa, sebanyak 30% anak dan remaja yang terinfeksi polio mengalami kematian. Imunisasi Polio diberikan minimal 2 kali sebelum usia 12 bulan. Pada pemberiannya, terdapat 4 dosis sebelum anak berusia genap 1 tahun yaitu :

- Dosis 1 pada saat lahir
- Dosis 2 pada saat berusia 2 bulan
- Dosis 3 pada saat berusia 3 bulan
- Dan Dosis 4 pada saat berusia 4 bulan.

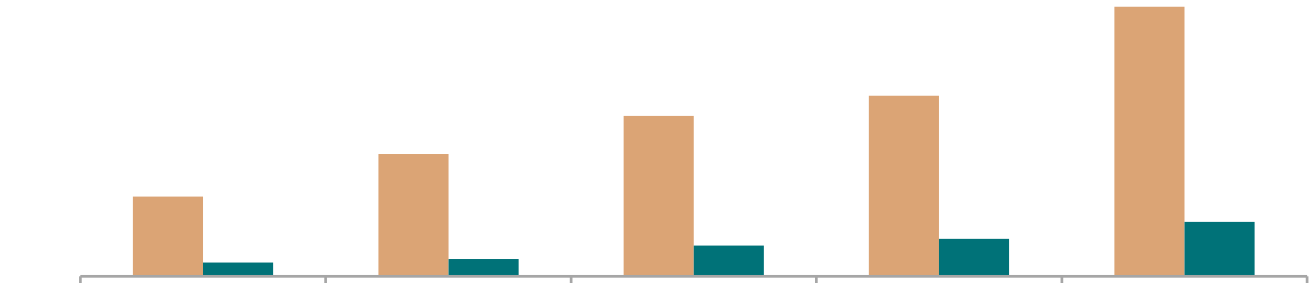
menurut Kementerian Kesehatan, Vaksinasi Polio wajib diberikan kepada anak di Indonesia serta bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit Polio dan melindungi anak-anak dari terinfeksinya virus Polio. Selain itu manfaat dari pemberian Vaksin Polio antara lain:

- Menstimulus produksi zat antibodi tubuh yang dapat meningkatkan imunitas terhadap polio.
- Meminimalisir resiko tertularnya terhadap virus Polio.
- Meminimalisir tingkat keparahan dan komplikasi saat terinfeksi virus Polio.
- Memenimalisir tingkat penularan dari orang ke orang.



Dari data dan grafik diatas menjelaskan banyaknya balita yang mendapatkan imunisasi Polio sebelum berusia 12 bulan. Tren data diatas menjelaskan bahwa balita yang paling banyak adalah IMM *Monthly* Polio 1 sebanyak 151.295 balita, disusul IMM *Monthly* Polio 2 sebanyak 143.952 sebanyak 143.952, lalu IMM *Monthly* Polio 3 sebanyak 142.054, dan IMM *Monthly* Polio 4 sebanyak 143.612 balita. Dari data tersebut tidak ada rentang jarak yang jauh terhadap pemberian vaksin Polio sehingga secara keseluruhan mengindikasikan bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki perhatian khusus terhadap balita berusia < 12 bulan sehingga setiap balita di DKI Jakarta terhindar dari infeksi Polio.

Gambar 5.150. Hasil Imunisasi Wanita Usia Subur menurut Kategori Suntik di Puskesmas Provinsi DKI Jakarta



	T1	T2	T3	T4	T5
2023	41.576	63.788	83.489	94.071	140.307
2024	7.214	9.146	15.999	19.484	28.373

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Tidak hanya pada balita, Imunisasi juga diberikan kepada Wanita Usia Subur. Wanita Usia Subur diberikan kepada wanita berusia 15-49 Tahun sehingga pada usia tersebut merupakan puncak dari produktvitas wanita pada sosial, karir, dan keluarga sehingga membuat wanita terlindungi dari penyakit. Selan itu, mencegah potensi penularan penyakit kepada anak-anak dan keluarga mereka. Imunisasi Wanita Subur memiliki beberapa jenis varian dan salah satu yang paling penting adalah Imunisasi Tetanus Tokosid (TT/Td). Pemberian WUS sebaliknya dilakukan dengan perencanaan yang matang. Imunisasi tersebut berperan penting untuk mencegah penularan wanita dan bayi terhadap penyakit tetaus yang dapat mengakibatkan kematian kepada keduanya. Berdasarkan Inteveral pemberian dan masa perlindungannya, Imunisasi WUS dibagi ke dalam beberapa kelompok antara lain :

Tabel 5.1. Status Penerima Imunisasi Wanita Usia Subur Tahun 2024

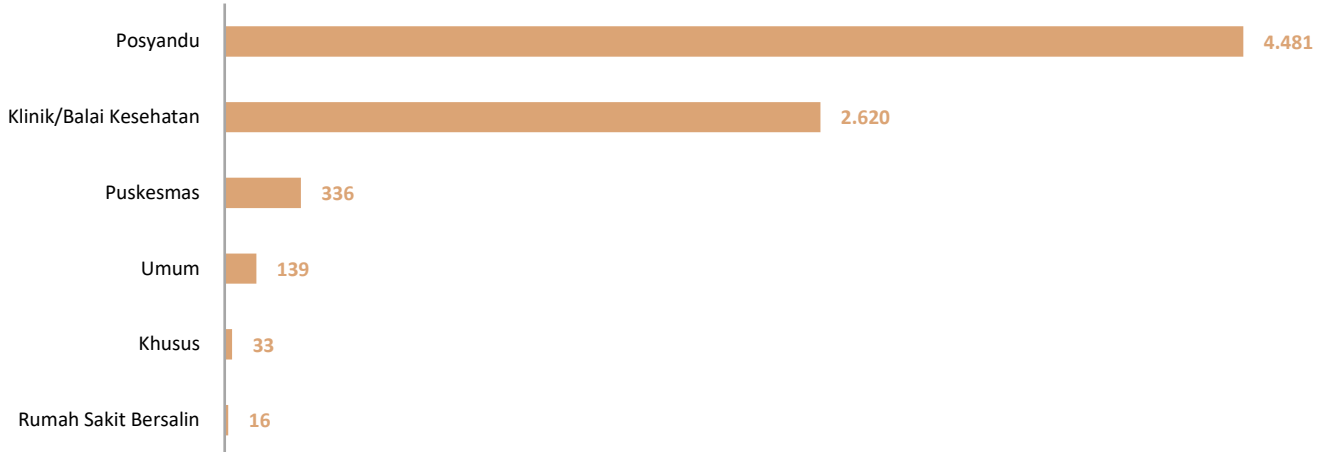
Status Imunisasi	Interval Pemberian minimal	Masa Perlindungan
T_1	-	-
T_2	4 Minggu setelah T_1	3 Tahun
T_3	6 Bulan setelah T_2	5 Tahun
T_4	1 Tahun setelah T_3	10 Tahun
T_5	1 Tahun setelah T_4	> 25 Tahun

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Dari data dan grafik di atas menggambarkan bahwa terjadi tren penurunan Imunsasi WUS dari tahun 2023 ke 2024 di wilayah DKI Jakarta. Dari total sebanyak penerima imunisasi 423.231 wanita mengalami penurunan sebanyak 343.015 menjadi 80.216 wanita. Dengan masing-masing penerima terbanyak pada Status Imunisasi (T5). Karena pentingnya dan manfaat dari Imunisasi WUS menjadi bahan evaluasi dan sosialisasi bagi Pemprov DKI Jakarta agar wanita di wilayah DKI Jakarta semakin banyak menerima Imunisasi Wanita Usia Subur (WUS).



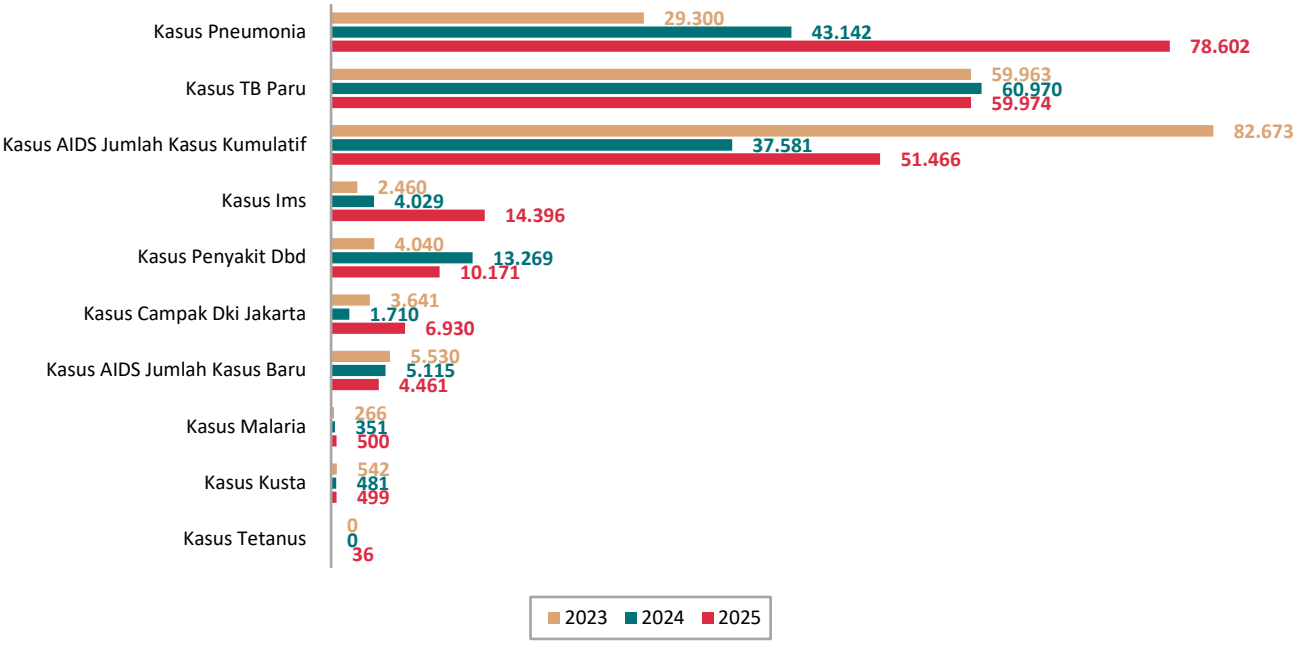
Gambar 5.151. Jumlah Jenis Fasilitas Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025



Sumber: Dinas Kesehatan DKI Jakarta

Kesehatan merupakan keadaan sehat baik individu maupun masyarakat baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit sehingga memungkinnya hidup produktif. Guna menyediakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan dalam akses paling dekat di setiap wilayah. menurut Undang-Undang No 17 tahun 2023 mengenai Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Posyandu, dll. dari data dan grafik di atas mencerminkan jumlah jenis fasilitas kesehatan di DKI Jakarta paling banyak di dominasi oleh Posyandu sebanyak 4.481 faskes, lalu klinik sebanyak 2.620 faskes, lalu diikuti Puskesmas sebanyak 336 faskes, Rumah Sakit Umum sebanyak 189 faskes, Rumah Sakit khusus sebanyak 33 faskes, dan paling sedikit Rumah Sakit Bersalin sebanyak 16 faskes. Secara keseluruhan, Pemprov DKI Jakarta turut serta dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan secara khusus untuk pelayanan bagi kesehatan ibu dan tumbuh kembangnya anak di setiap wilayahnya.

Gambar 5.152. Jumlah Kasus Penyakit menurut Jenis Penyakit di DKI Jakarta Tahun 2023-2025



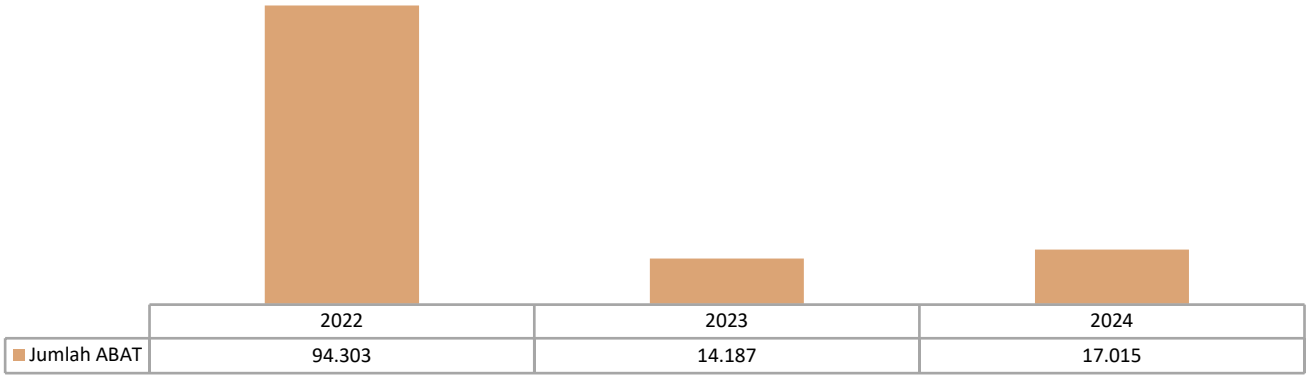
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Gambar di atas memperlihatkan perbandingan antara 10 jenis penyakit menular terbanyak di DKI Jakarta sepanjang tahun 2023-2025. Berdasarkan polanya terdapat 3 karakteristik dari tren penyakit di atas yaitu:

- Pola meningkat
- Pola Fluktuatif
- Pola menurun

Suatu intervensi dan penanganan penyakit menular dikatakan berhasil jika membuat jumlah pola penyakit menurun tiap tahunnya sedangkan intervensi penangan penyakit menular tersebut dikatakan perlu evaluasi atau awarenes untuk intervensi yang lain dari Pemda jika pola tersebut meningkat atau sifatnya fluktuatif. Pola penyakit yang meningkat dari grafik di atas yaitu: Pneunomia, IMS, dan Tetasu. Pola penyakit yang menurun yaitu: AIDS Jumlah kasus baru dan kusta. Sedangkan daftar penyakit yang termasuk ke dalam pola fluktuatif yaitu: TB Paru, Kasus AIDS jumlah kasus kumulatif, DBD, campak DKI Jakarta, dan malaria. Secara keseluruhan, intervensi dari Pemprov DKI akan penyakit kasus baru AIDS dan kusta telah berhasil sepanjang tahun 2023-2025.

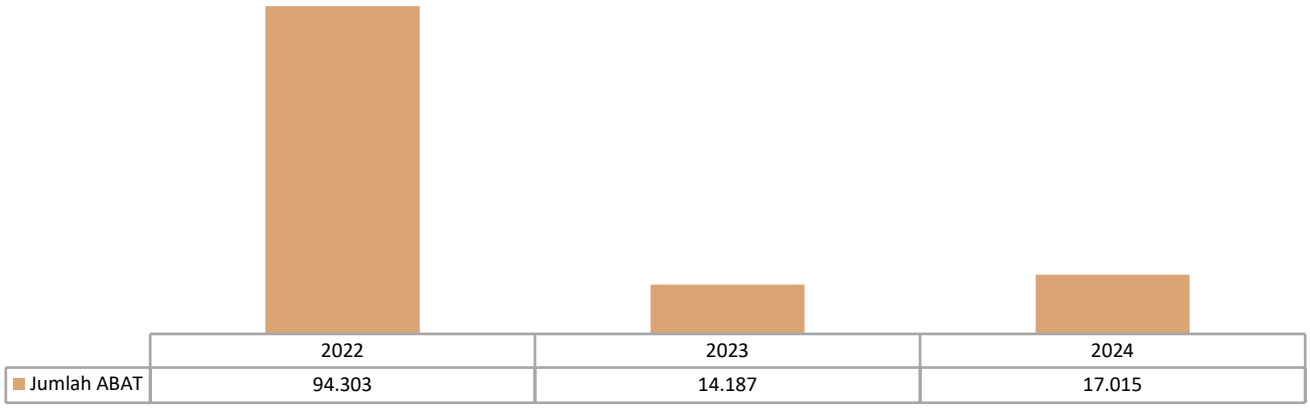
Gambar 5.153. Jumlah Capaian ABAT Program Edukasi HIV/AIDS di DKI Jakarta



	2022	2023	2024
Jumlah ABAT	94.303	14.187	17.015

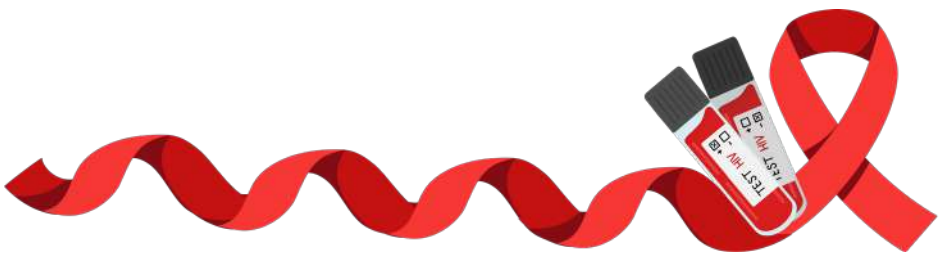
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 5.154. Jumlah Capaian ABAT Program Edukasi HIV/AIDS di DKI Jakarta Tahun 2022-2024

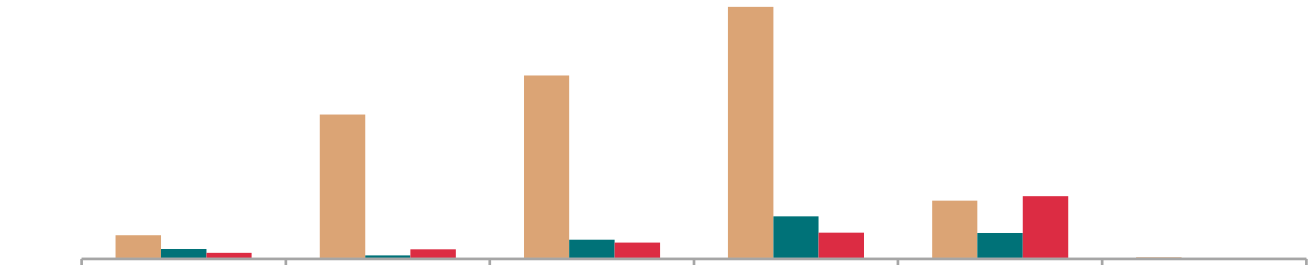


	2022	2023	2024
Jumlah ABAT	94.303	14.187	17.015

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta



Gambar 5.155. Jumlah Capaian ABAT Program Edukasi HIV/AIDS untuk Kaum Muda menurut Kota/Kabupaten di DKI Jakarta Tahun 2022-2024



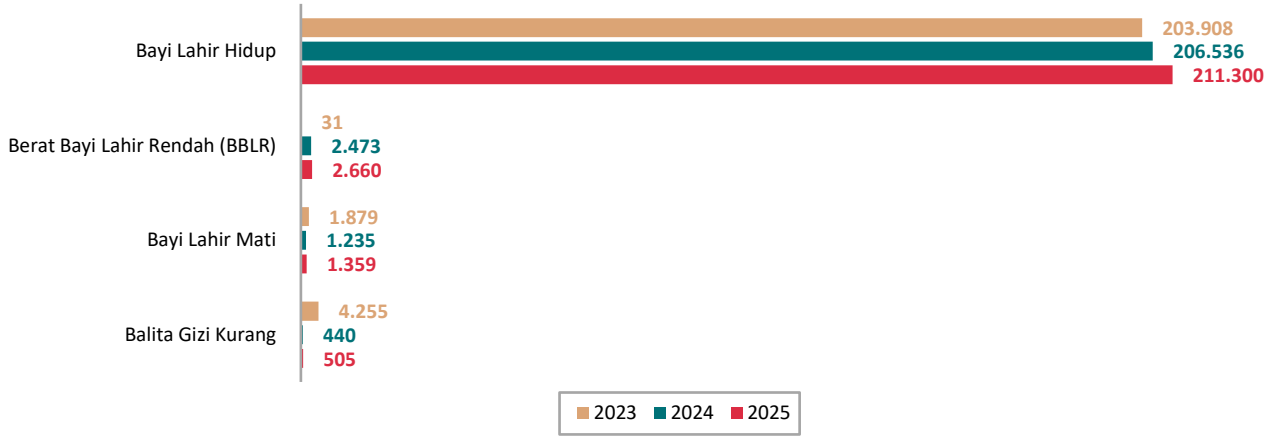
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2022	3.319	20.400	25.909	36.251	8.239	185
2023	1.362	482	2.714	5.993	3.636	0
2024	840	1.334	2.279	3.673	8.842	47

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Kampanye ABAT (Aku Bangga Aku Tahu) adalah Kampanye yang dilakukan guna memberikan pengetahuan khususnya untuk kaum muda berusia 15-24 Tahun terkait HIV dan AIDS beserta dampaknya. Tempat sasaran dari kampanye ini biasanya di lingkungan pendidikan seperti SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi, dan tempat kerja (Formal dan Non Formal) serta Organisasi kepemudaan. Pesan moral dari kampanye ini adalah Jiwa yang tegar dengan "NO Narkoba", "Hati yang Murni" dan "No Seks bebas". Pesan-pesan ini diambil dari data bahwa penyebab penyebaran HIV di Indonesia adalah cairan kelamin pada hubungan seks, dan darah di antara pengguna narkoba. Dari data dan grafik pertama menunjukkan di tahun 2022 adalah aggregasi kampanye puncak capaian ABAT dengan total 94.303 peserta, lalu turun secara signfiikan menjadi 14.187 peserta, lalu meningkat Kembali di tahun 2024 menjadi 17.015 peserta. Belum diketauhi alasan jelas hal yang menyebabkan penurunan tersebut. Namun dengan adanya peningkatan kembali di tahun 2024 menjadi sinyal awal bahwa program ABAT kembali menyasar kelompok sasaran khususnya kaum muda di usia 15-24 Tahun di DKI Jakarta.

Dari data dan grafik kedua membandingkan capaian dari kampanye ABAT untuk sebaran wilayah di DKI Jakarta. Jakarta Selatan dan Jakarta Barat secara konsisten menjadi kontributor terbesar capaian kampanye ini secara khusus di tahun 2022 masing-masing 36.251 dan 25.909 kampanye. Hal ini dapat dijadikan indikasi dalam kolaborasi antara fasilitas kesehatan, sekolah, dan komunitas baik organisasi di masyarakat. Menariknya, di Jakarta Timur meskipun sempat tinggi pada tahun 2.022, dan turun menjadi 3.362 dan naik kembali menjadi 8.842 kampanye. Hal ini mengindikasikan adanya penguatan strategi lokal seperti inovasi pendekatan yang berhasil menjangkau kaum muda di usia 15-24 Tahun. Sedangkan untuk Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu memiliki capaian yang paling rendah dengan Jakarta Pusat masing-masing sebanyak 3.319 di tahun 2.022, 1.362 di tahun 2023 dan 840 di tahun 2024. Sedangkan yang paling sedikit, wilayah Kepulauan Seribu kontributor terbanyak adalah 185 di tahun 2022, tidak data data di tahun 2023 dan 47 kampanye di tahun 2024. Salah satu penyebab hal tersebut adalah Jakarta Pusat didominasi lebih banyak aktivitas perkantoran dan Kepulauan Seribu yang terbatas dengan wilayah geografis. Ketimpangan capaian antarawiayah ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih kontekstual seperti pendekatan berbasis sekolah, komunitas digital, dan kegiatan kreatif sesuai dengan gaya hidup kaum muda.

Gambar 5.156. Jumlah Kondisi Bayi Lahir di DKI Jakarta Tahun 2023 – 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Saat bayi lahir, terdapat empat kondisi kesehatan yang dipantau, yaitu: lahir hidup normal, bayi lahir mati (stillbirth), berat bayi lahir rendah (BBLR), dan balita gizi kurang *(underweight)*.

Bayi lahir hidup normal merupakan kondisi bayi hasil persalinan dalam keadaan sehat dengan berat badan serta status gizi yang normal. Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) didefinisikan sebagai bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram. Bayi lahir mati (stillbirth) merupakan kematian janin yang terjadi sebelum lahir, namun setelah usia kehamilan mencapai 20 minggu. Sementara itu, balita gizi kurang (underweight) adalah kondisi gizi yang ditandai dengan keadaan tubuh yang sangat kurus.

Faktor yang memengaruhi kondisi bayi tersebut antara lain tingkat stres dan kesehatan ibu selama persalinan, asupan gizi pada janin, kesehatan lingkungan rumah, serta tingkat pendapatan keluarga. Upaya penanggulangan masalah gizi diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi Anak Akibat Penyakit42.

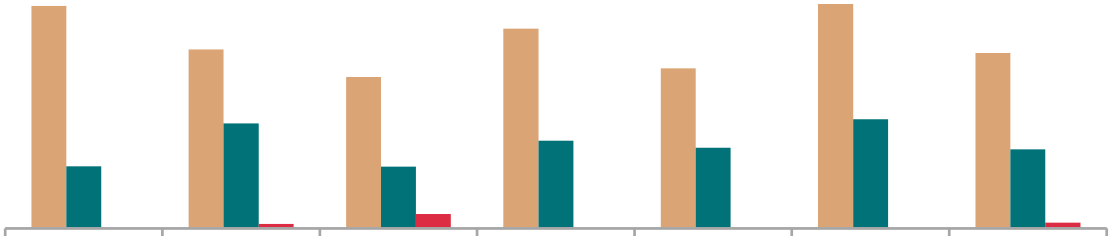
Data dan grafik di atas membandingkan nilai antara bayi lahir hidup, BBLR, bayi lahir mati, dan balita gizi kurang. Tren bayi lahir hidup sepanjang tahun 2023–2024 di DKI Jakarta masuk dalam kategori sangat tinggi dengan kenaikan yang signifikan, yaitu sebanyak 2.628 kelahiran.

Di sisi lain, BBLR mengalami kenaikan sebanyak 2.442 kasus, bayi lahir mati turun sebanyak 644 kasus, dan balita gizi kurang turun signifikan sebanyak 3.815 kasus. Secara keseluruhan, data tersebut mengindikasikan keberhasilan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dalam menurunkan angka kelahiran mati dan gizi kurang.

Selain itu, program kesehatan seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pemberian ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, serta penyediaan MPASI yang kaya gizi dan protein hewani untuk bayi di atas 6 bulan terbukti efektif dalam mencegah kasus stunting.



Gambar 5.157. Persentase Alasan Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Tidak Berobat Jalan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta
Mengobati Sendiri	80,64	64,85	54,85	72,48	58,09	81,35	63,65
Merasa Tidak Perlu	22,49	38,07	22,44	31,76	29,25	39,54	28,63
Lainnya	-	1,55	5,15	-	-	-	2,07

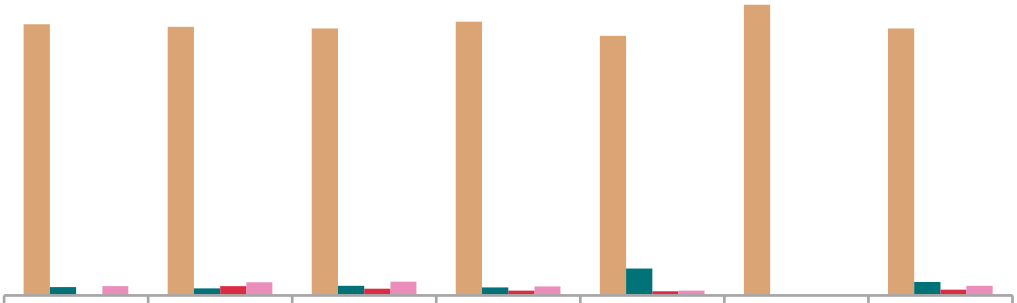
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pelayanan rawat jalan atau yang sering dikenal dengan Ambulatory merupakan bentuk dari pelayanan kedokteran kepada pasien yang tidak diberikan penginapan. Pelayanan rawat inap ini tidak hanya diberikan kepada Rumah Sakit atau Klinik, tetapi juga dapat diselenggarakan di Rumah Pasien *(home care)* serta di rumah Perawatan *(Nursing Homes)*. Tujuan dari pelayanan rawat jalan adalah mengupayakan kesembuhan dan pemulihan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari data dan grafik diatas menjelaskan alasan beberapa masyarakat tidak berobat jalan ketika mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir yang dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori yaitu: dapat mengobati sendiri, merasa tidak perlu, dan hal lainnya. Nilai persentase rata-rata dari kategori dapat mengobati sendiri di DKI Jakarta sepanjang tahun 2025 adalah 63,65%, sehingga persentase terbesar berada di dua wilayah yaitu Kepulauan Seribu sebanyak 81,35%, dan Jakarta Pusat sebanyak 80,64%. Hal tersebut dapat menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk melakukan self-medication sebagai respons awal terhadap keluhan penyakit. Sedangkan kategori persepsi tidak perlu mendapatkan nilai aggregasi rata-rata sebanyak 28,63% dan termasuk dalam kategori yang cukup signfiikan. Menjadikan wilayah yang paling banyak adalah Kepulauan Seribu sebanyak 39,54%, dan wilayah Jakarta Utara sebanyak 38,07%. Hal ini menggambarkan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat menilai keluhan kesehatan masih tergolong ringan sehingga tidak memerlukan tindakan medis. Alasannya hal lainnya hanya memiliki rata-rata sebesar 2,07%. Sehingga keputusan untuk tidak berobat rawat jalan penduduk di DKI Jakarta sepanjang tahun 2025 adalah berdasarkan dapat mengobat sendiri dan merasa tidak perlu.



Gambar 5.158. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta
BPJS Kesehatan (PBI/Non-PBI)	93,05	92,15	91,60	93,96	89,03	99,75	91,64
Perusahaan Kantor	2,93	2,43	3,34	2,74	9,21	-	4,62
Asuransi Swasta	-	3,20	2,28	1,67	1,45	-	1,95
Tidak Menggunakan	3,17	4,51	4,78	3,10	1,68	-	3,37

Sumber: Badan Pusat Statisik Provinsi DKI Jakarta

Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia. Hal tersebut menjadi fondasi bagi setiap individu untuk mengaktualisasikan peran dan kontribusinya terhadap bangsa dan negara guna menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Oleh sebab itu, setiap warga negara wajib mendapatkan jaminan dan perlindungan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan[46], jaminan kesehatan adalah bentuk perlindungan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan ini diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran secara mandiri atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

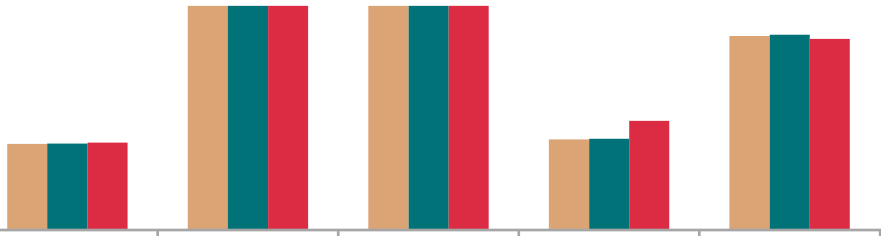
Di Indonesia, jaminan kesehatan terdiri dari beberapa jenis, antara lain BPJS Kesehatan (PBI/Non-PBI), asuransi swasta, serta jaminan kesehatan dari perusahaan tempat bekerja. Sesuai dengan Pasal 1 regulasi tersebut, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dikhususkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.

Data dan grafik di atas menunjukkan persentase kepemilikan jaminan kesehatan di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2025. Secara garis besar, masyarakat di DKI Jakarta masih didominasi oleh pengguna jaminan kesehatan dari pemerintah, yaitu BPJS Kesehatan (PBI/Non-PBI), dengan rata-rata cakupan mencapai 91,64% di seluruh wilayah. Posisi berikutnya ditempati oleh jaminan kesehatan dari perusahaan (4,62%), penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan (3,37%), dan pengguna asuransi swasta (1,96%).

Secara keseluruhan, jaminan kesehatan dari pemerintah tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat DKI Jakarta karena manfaat penyelenggaraannya yang luas. Namun, hal ini juga menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesadaran (awareness) dan jangkauan layanan, mengingat masih adanya masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, khususnya di wilayah Jakarta Utara.

46 Republik Indonesia. (2024). Peraturan Presiden no. 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta. Kementerian Kesehatan. Link. https://peraturan.bpk.go.id/Details/285181/perpres-no-59-tahun-2024

Gambar 5.159. Jumlah Kasus Diare di DKI Jakarta Tahun 2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jumlah yang Dilayani	10.868	28.790	28.868	11.438	24.506	638
Diberikan Obat Oralit	10.910	28.758	28.868	11.504	24.648	638
Diberikan Zinc	11.014	28.928	28.868	13.788	24.148	638

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Diare pada balita merupakan buang air besar yang lebih sering (> 3 kali sehari) dan tinja yang dikeluarkan lebih lunak dari biasanya (dianggap tidak normal oleh ibu) yang terjadi pada usia < 5 tahun. Penyebab diare pada balita bermacam-macam antara lain : virus, kuman/bakteri, Parasit, susu yang tidak cocok (biasanya pada bayi). Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan diare pada balita adalah sebagai berikut:

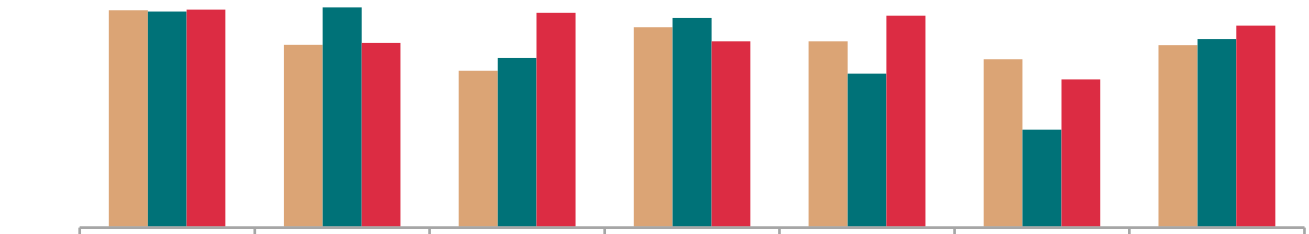
1. Makan tanpa cuci tangan yang bersih.
2. Minum air mentah.
3. Makan makanan yang dihinggapi lalat.
4. Buang air besar di sembarang tempat. Lingkungan rumah yang kumuh dan kotor.
5. Pemberian makanan tambahan ASI yang terlalu dini pada bayi.

Salah satu antisipasi untuk mengatasi diare pada balita adalah memberi Zinc dan Oralit. Zinc dapat mempercepat penyembuhan diare sedangkan oralit dapat mencegah terjadinya dehidrasi.



Dari data dan grafik di atas menjelaskan sebaran jumlah balita yang dilayani dengan pemberian obat oralit dan zinc untuk sebaran wilayah di DKI Jakarta sepanjang tahun 2024. Dari rasio persentase antara pemberian obat oralit dan zinc dengan jumlah balita yang dilayani nilai persentase untuk seluruh wilayah DKI Jakarta, mayoritas ≥ 99% bahkan ada yang mencapai 101% dan 121% pemberian Zinc. Hal tersebut menandakan bahwa perioda jumlah balita yang dilayani dalam setahun dapat lebih dari satu kali. Dari keseluruhan data tersebut mengindikasikan bahwa pencegahan dan pengobatan balita di DKI Jakarta sudah berjalan sangat baik dan sesuai standard kesehatan yang berlaku.

Gambar 5.160. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selaam Sebulan Terakhir di DKI Jakarta Tahun 2023-2025



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta
2023	49,35	41,56	35,63	45,54	42,30	38,24	41,49
2024	49,12	50,02	38,54	47,65	35,00	22,26	42,80
2025	49,53	41,95	48,81	42,36	48,17	33,67	45,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

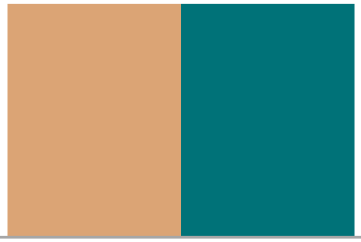
Pemahaman untuk berobat jalan ketika masyarakat mengalami keluhan kesehatan sangat penting. Hal tersebut guna menghindari diagnosa yang salah dan mendapatkan penangan yang salah sehingga menyebabkan pemulihan kesehatan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Dari data di atas menunjukkan nilai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan selama sebulan terakhir di DKI Jakarta sepanjang tahun 2023-2025. Terbagi menjadi dua pola untuk menggambarkan tren sepanjang tahun 2023-2025 untuk seluruh wilayah di DKI Jakarta yaitu pola meningkat dan pola fluktuatif. Pola meningkat menggambarkan tingginya pemahaman masyarakat di wilayah tersebut akan pentingnya berobat jalan ketika mengalami keluhan penyakit yaitu di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta TImur sedangkan pola fluktuatif menggambarkan masih terjadi naik dan turunnya persepsi masyarakat untuk secara aktif mengikuti berobat jalan ketika mendapatkan keluhan penyakit. Hal tersebut terjadi di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. Namun secara garis besar, untuk seluruh wilayah di DKI Jakarta telah mengalami peningkatan pemahaman akan pentignnya berobat jalan ketika masyarakat mengalami keluhan penyakit. Tren tertinggi terjadi di tahun 2024-2025 yang naik sebesar 3,11%.

5.5. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Wilayah DKI Jakarta adalah wilayah yang sangat bervariatif yaitu terdiri dari wilayah perkotaan dan wilayah kepulauan. Sebagai kota yang bergerak menuju kota yang ramah terhadap wisatawan lokal dan turis asing. Wilayah DKI Jakarta di desain ke dalam bentuk tata ruang yang bersifat TOD *(Transit Oriented Development)*. Kawasan TOD merupakan pola pembangunan rancang tata kota yang terintegrasi dengan sistem transportasi TOD yaitu memiliki tujuan pemukiman warga, pusat perdagangan, pusat jasa, perkantoran, ruang terbuka, ruang publik, dan layanan masyarakat sehingga dapat diakses dengan mudah. Pembangunan fasilitas umum seperti jembatan penyebaran orang (JPO), lokasi halte, pedestrian, panjang jalan harus memenuhi karakteristik dan aksesibilitas dari TOD.

Gambar 5.161. Jumlah Kesesuaian Panduan Rancang Kota Sistem Pusat Pelayanan dengan Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit di DKI Jakarta



	Jumlah Rancangan	Jumlah Sesuai
2023	12	11
2024	12	11

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 5.162. Persentanse Kesesuain Panduan Rancang Kota Sistem Pusat Pelayanan dengan Pedoman Kawasan Berorientasi Transit Provinsi DKI Jakarta



	2023	2024
Persentase	92,00	91,60

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

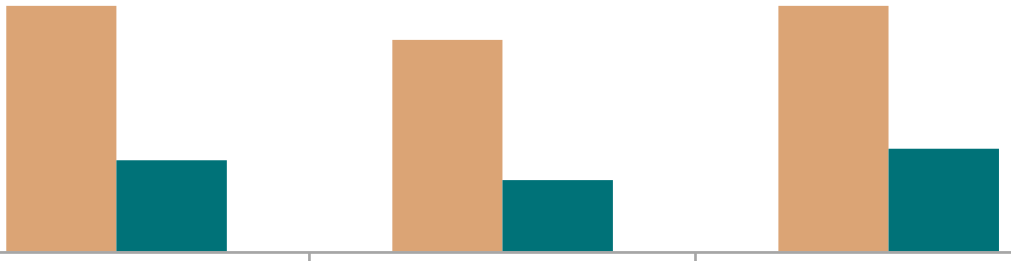
Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit atau sering disebut *Transit Oriented Development* (TOD) merupakan sebuah konsep pengembangan Kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit agar mempunyai nilai tambah yang menitikberatkan pada interasi antar jaringan, angkutan massal, dan antara jaringan angkutan umum massal. Pengembangan TOD ini mengubah cara kota berkembang yang semula menempatkan kendaraan sebagai pusat menjadi manusia. Manfaat dari pengembangan TOD ini adalah akses ke pekerjaan layanan, dan perumahan terjangkau, penciptaan yang waktu luang lebih banyak bersama keluarga, pelestarian warisan budaya, dan kesehatan yang jauh lebih baik. Secara khusus peraturan yang Gubernur DKI Jakarta yang mengatur tentang pengembangan TOD di DKI Jakarta adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 44 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kawasan *Transit Oriented Development*[47].



Dari data dan grafik di atas membandingkan jumlah rancangan dengan realisasi jumlah kesesuaian pengembangan TOD dari tahun 2023-2024. Berdasarkan rasio jumlah rancangan per jumlah di atas nilai kesesuaian persentase kesesuaian pengembangan TOD di DKI Jakarta adalah 92% di tahun 2023 sedangkan di tahun 2024 sebesar 91,60%. Secara keseluruhan, dari nilai dan dan data di atas mengindikasikan bahwa keseriusan Pemprov DKI dalam mengembangkan kawasan berbasis TOD yakni sudah > 90% artinya pengembangan kawasan TOD di DKI Jakarta sudah sangat baik.

47 https://peraturan.bpk.go.id/Details/61252

Gambar 5.163. Jumlah Lokasi Halte menurut Jenis Halte di DKI Jakarta Tahun 2022-2024



	2022	2023	2024
Reguler	655	482	578
Transjakarta	209	164	235

Sumber: Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

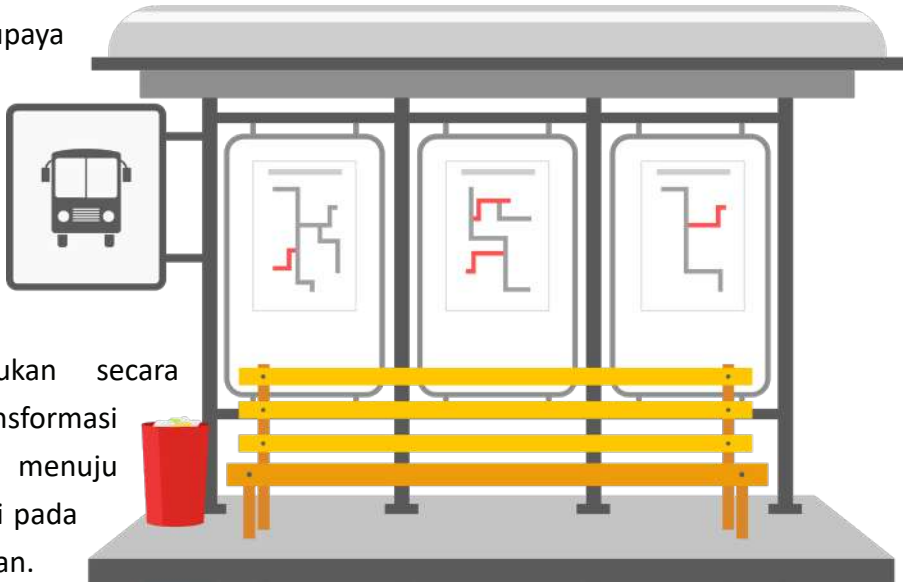
Halte merupakan tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, baik berupa halte reguler maupun halte Transjakarta di wilayah DKI Jakarta. Ketersediaan informasi terkait lokasi halte menjadi elemen penting dalam mendukung sistem transportasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Secara umum, halte di DKI Jakarta dibagi menjadi dua jenis:

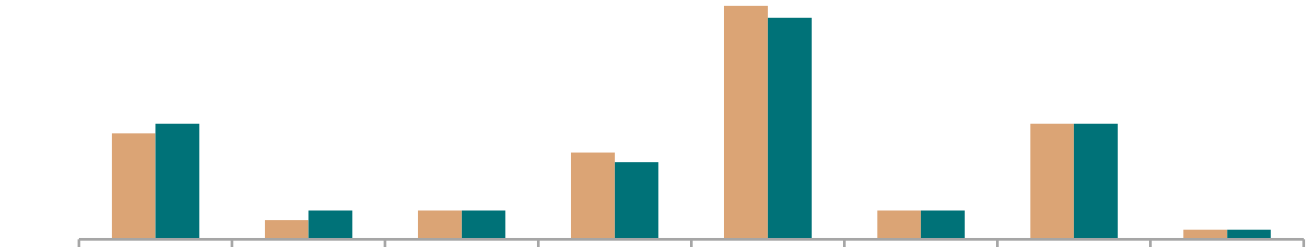
- Halte Reguler: Halte yang berada di pinggir jalan utama dan berbatasan langsung dengan trotoar, sehingga memudahkan akses bagi pejalan kaki, pengguna angkutan kota (angkot), maupun transportasi daring.
- Halte Transjakarta (BRT - *Bus Rapid Transit*): Halte yang umumnya berada di tengah jalan dengan akses khusus (jembatan penyeberangan atau pelican *crossing*) sebagai bagian dari sistem transportasi terpadu Transjakarta.

Data dan grafik di atas menggambarkan fluktuasi jumlah halte di DKI Jakarta. Halte reguler tercatat memiliki jumlah terbanyak, yaitu 655 lokasi pada tahun 2022, namun sempat menurun menjadi 482 halte pada tahun 2023 sebelum akhirnya meningkat tajam menjadi 578 halte pada tahun 2024. Sejalan dengan itu, jumlah halte Transjakarta tercatat sebanyak 209 lokasi pada tahun 2022, sempat turun menjadi 164 halte, dan melonjak signifikan menjadi 235 halte pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, data di atas menjelaskan adanya upaya revitalisasi dan penguatan kembali infrastruktur halte sebagai titik pelayanan angkutan umum, baik untuk layanan Transjakarta maupun non-Transjakarta. Pengembangan yang dilakukan secara bertahap ini menegaskan transformasi sistem transportasi Jakarta menuju layanan yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat perkotaan.



Gambar 5.164. Data Lokasi Jalan *Flyover/Underpass* menurut Wilayah di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Pusat - Jakarta Selatan	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Selatan - Jakarta Pusat	Jakarta Timur	Jakarta Timur - Jakarta Pusat
2023	11	2	3	9	25	3	12	1
2024	12	3	3	8	23	3	12	1

Sumber: Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

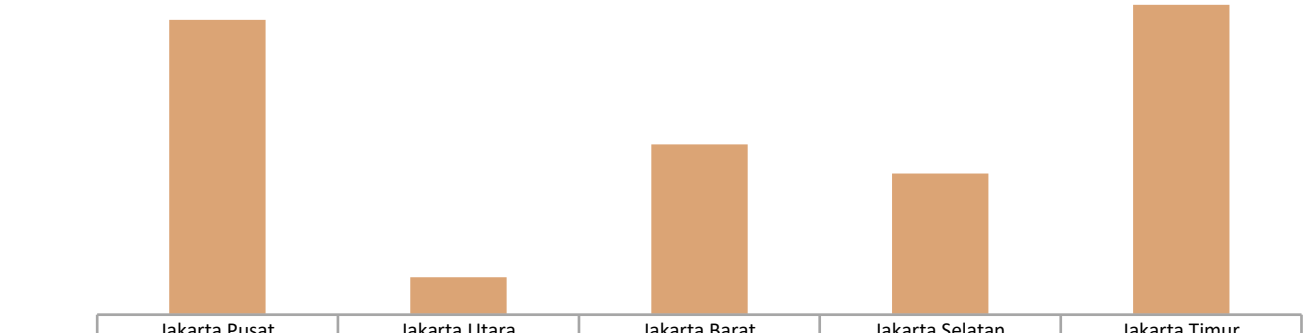
Dalam upaya mengurai dan mengantisipasi kemacetan di ibu kota, pembangunan jalan layang *(flyover)* dan jalan bawah tanah *(underpass)* menjadi solusi alternatif yang strategis. Kedua jenis infrastruktur ini efektif dalam meningkatkan efisiensi lalu lintas perkotaan dengan memisahkan arus kendaraan di titik pertemuan yang padat.

Perbedaan utama antara keduanya terletak pada posisi konstruksinya: *underpass* adalah terowongan yang dibangun di bawah permukaan tanah, berfungsi untuk mengatasi hambatan seperti perlintasan sebidang rel kereta api atau persimpangan jalan utama yang melintang. Sementara *flyover* adalah jalan yang dibangun di atas permukaan tanah (melayang), berfungsi untuk memisahkan jalur lalu lintas di persimpangan jalan yang memiliki volume kendaraan tinggi.

Data dan grafik di atas menunjukkan fluktuasi jumlah lokasi *flyover* dan *underpass* menurut wilayah di DKI Jakarta sepanjang periode 2023–2024. Terjadi tren peningkatan jumlah infrastruktur ini di wilayah Jakarta Pusat serta jalur penghubung Jakarta Pusat–Jakarta Selatan sebanyak satu unit jalan.

Sebaliknya, tercatat penurunan jumlah unit di Jakarta Selatan sebanyak dua jalan dan Jakarta Barat sebanyak satu jalan. Sementara itu, jumlah unit tetap konsisten di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, serta jalur penghubung Jakarta Selatan–Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Timur–Jakarta Pusat. Secara keseluruhan, keberadaan *flyover* dan underpass di DKI Jakarta dinilai sudah berjalan optimal, di mana pembangunannya senantiasa mempertimbangkan ketersediaan anggaran serta urgensi kebutuhan transportasi di setiap titik wilayah.

Gambar 5.165. Data Lokasi Jembatan Penyeberangan Orang di DKI Jakarta Tahun 2024



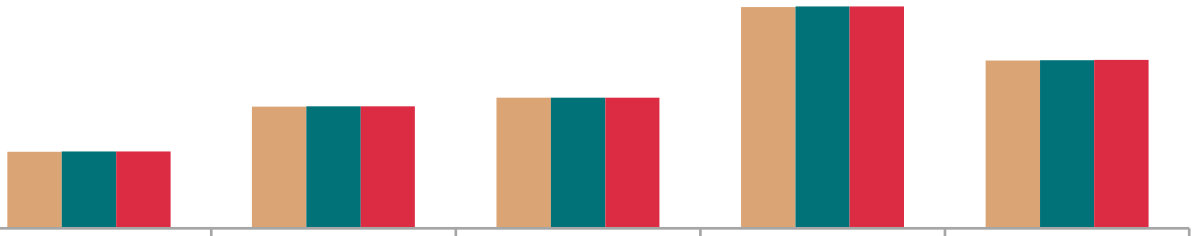
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
Jumlah	71	9	41	34	75

Sumbr : Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Tujuan utama pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) adalah untuk mengurangi risiko kecelakaan bagi pejalan kaki yang menyeberangi jalan di tengah arus lalu lintas yang padat. Selain fungsi keselamatannya, inovasi desain JPO saat ini juga berperan dalam mempercantik estetika kawasan perkotaan. Keberadaan JPO merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung keselamatan dan kenyamanan mobilitas masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

Data dan grafik di atas menunjukkan bahwa sebaran distribusi JPO di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2024 masih belum merata, meskipun sudah menjangkau seluruh wilayah administratif. Jakarta Timur tercatat sebagai wilayah dengan jumlah JPO terbanyak, yaitu 75 unit, disusul oleh Jakarta Pusat sebanyak 71 unit, dan Jakarta Barat sebanyak 41 unit. Tingginya jumlah JPO di wilayah-wilayah tersebut mengindikasikan karakteristik kawasan dengan aktivitas lalu lintas yang padat, intensitas mobilitas manusia yang tinggi, serta kebutuhan penyeberangan yang signifikan. Sebaliknya, wilayah dengan jumlah JPO paling sedikit adalah Jakarta Utara dengan 9 lokasi. Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam struktur jaringan jalan serta tingkat kepadatan aktivitas pejalan kaki antarwilayah. Secara keseluruhan, data tahun 2024 mencerminkan masih adanya ketimpangan spasial dalam pemerataan penyediaan infrastruktur JPO di DKI Jakarta.

Gambar 5.166. Panjang Jalan (Km) berdasarkan klasifikasi Provinsi di DKI Jakarta Tahun 2022-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2022	692,16	1.100,58	1.181,96	1.999,82	1.517,83
2023	693,38	1.102,70	1.180,95	2.006,02	1.520,66
2024	693,38	1.102,70	1.181,95	2.006,03	1.521,88

Sumber: Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Panjang jalan kota kabupaten/administrasi merupakan panjang prasarana transportasi darat Pemerintah kabupaten/kota yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang ditujukkan untuk lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Panjang jalan administrasi dibagi ke dalam dua klasifikasi yaitu : jalan kabupaten dan jalan desa. Satuan dalam pengukuran panjang jalan menggunakan Km. Dari data dan grafik di atas membandingkan tren penambahan panjang paling besar terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan penambahan 6,20 km, disusul wilayah Jakarta Timur sepanjang 2,83 km, Jakarta Utara sepanjang 2,12 km, dan Jakarta Pusat sepanjang 1,22 km. Sebaliknya terdapat tren pengurangan pada wilayah Jakarta Barat sepanjang 1,01 km. Sedangkan di tahun 2024, tren penambahan panjang terjadi di wilayah Jakarta Timur sepanjang 1,22 km, lalu disusul Jakarta Barat sepanjang 1,0 km, lalu Jakarta Selatan

sepanjang 0,01 km. Secara keseluruhan, tren penambahan panjang sesuai administrasi pada tahun 2023 untuk meingkatkan mobilitas perjalanan secara khusus di wilayah yang mobilitas dan padat penduduknya seperti wilayah Jakarta Timur.

Gambar 5.167. Persentase Panjang Jalan dengan kondisi mantap di Provinsi DKI Jakarta



	2023	2024
Persentase	97,27	97,30

Sumber: Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jalan mantap adalah jalan nasional dalam kondisi baik dan sedang, sedangkan jalan tidak mantap adalah jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat[48]. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemantapan ini adalah *International Roughness Index* (IRI) serta Indeks Kondisi Perkerasan. Berdasarkan standar kementerian, IRI mengukur tingkat kerataan permukaan jalan yang dinyatakan dengan jumlah perubahan vertikal permukaan untuk setiap satuan panjang jalan (mm/km)[49]. Kondisi kemantapan jalan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas infrastruktur perkotaan. Data dan grafik di atas membandingkan persentase panjang jalan dengan kondisi mantap di Provinsi DKI Jakarta. Hasilnya menunjukkan capaian yang sangat tinggi dan relatif stabil pada periode 2023–2024. Pada tahun 2023, persentase panjang jalan dalam kondisi mantap berada di angka 97,27%. Angka ini kemudian mengalami peningkatan tipis sebesar 0,03% pada tahun 2024 sehingga mencapai 97,30%. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan yang konsisten di tengah tingginya intensitas penggunaan jalan di wilayah DKI Jakarta. Tingginya persentase kemantapan jalan ini mencerminkan kinerja pengelolaan infrastruktur yang sangat baik. Secara keseluruhan, data di atas menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mempertahankan standar kualitas jalan secara berkelanjutan.

Gambar 5.168. Jalur Pedestrian yang dilengkapi Fasilitas Pendukung pada Lokasi Transportasi Massal di DKI Jakarta



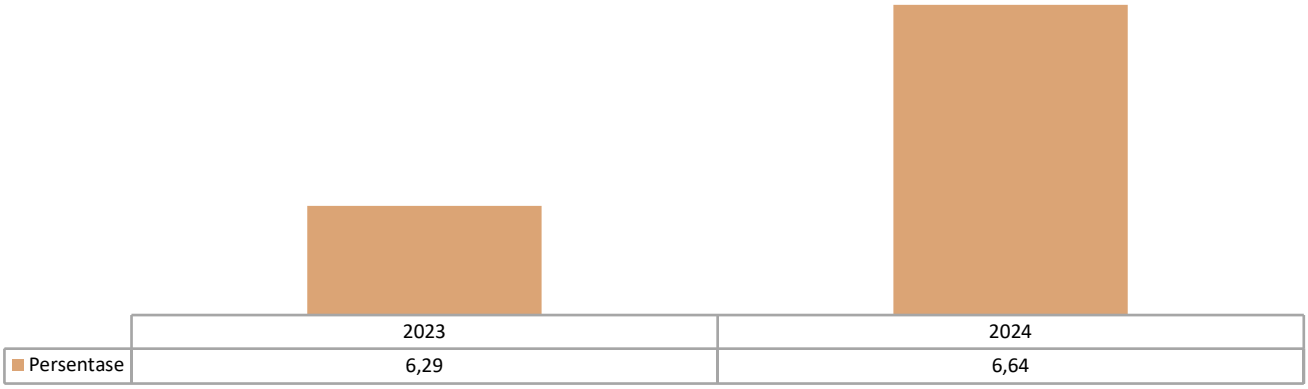
	Panjang Jalur Pedestrian	Total Panjang Jalan
2023	404,80	6.432,47
2024	427,07	6.432,47

Sumber: Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

48 ”Kemantapan Jalan Nasional”, https://data.pu.go.id/dataset/kemantapan-jalan-nasional (Kamis, 29 Januari 2026, 09:40).

49 "*Internaonal Roughness Index*”https://bpiw.pu.go.id/bankdata/dictionary/words?q=International+roughness+index%2FIRI&id=788 (Kamis, 29 Januari 2026, 09:40).

Gambar 5.169. Persentase Jalur Pedestrian yang dilengkapi Fasilitas Pendukung pada Lokasi Transportasi Massal Provinsi DKI Jakarta



	2023	2024
Persentase	6,29	6,64

Sumber: Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Fasilitas pejalan kaki atau jalur pedestrian merupakan elemen krusial dalam sistem transportasi yang berkelanjutan. Keberadaan jalur pedestrian yang dilengkapi fasilitas pendukung, seperti trotoar dan jalur penyeberangan, dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki, terutama di area transportasi massal. Ketersediaan jalur ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan, khususnya di DKI Jakarta.

Data dan grafik pertama menunjukkan adanya peningkatan total panjang jalur pedestrian dari 404,80 km pada tahun 2023 menjadi 427,07 km pada tahun 2024. Sementara itu, total panjang jalan di DKI Jakarta tercatat mengalami penyesuaian dari 6.342,47 km menjadi 6.432,47 km pada periode yang sama. Data ini menunjukkan upaya penambahan jalur pedestrian melalui optimalisasi dan penataan ulang ruang jalan guna mendukung mobilitas pejalan kaki secara lebih luas.

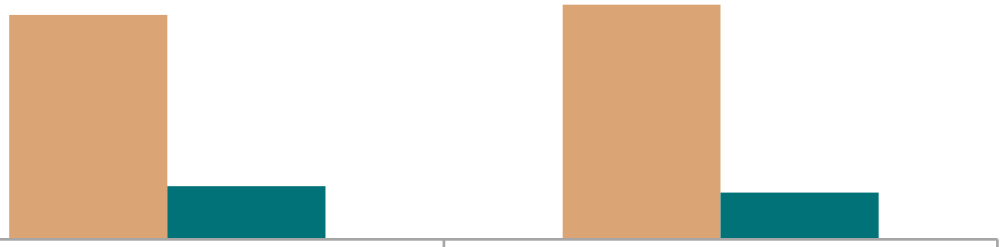
Data dan grafik kedua menggambarkan peningkatan persentase jalan yang telah dilengkapi dengan fasilitas pedestrian, yakni dari 6,29% naik menjadi 6,64% pada tahun 2024. Tren kenaikan ini mengindikasikan arah kebijakan yang konsisten dalam memperkuat integrasi antara moda transportasi massal dengan akses pejalan kaki. Pembangunan ini menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem transportasi yang ramah lingkungan dan inklusif bagi seluruh warga Jakarta.

5.6. Sosial

5.6.1. Pembangunan Manusia

Salah satu faktor dari kemajuan suatu bangsa adalah kualitas sumber daya manusianya. Oleh sebab itu pembangunan dari kualitas SDM adalah wajib dilaksanakan secara berkelanjutan. Berbagai upaya Pemprov DKI dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah mendapatkan hasil yang sangat memuaskan/sangat tinggi yaitu mendapatkan nilai tertinggi tingkat provinsi di Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peran serta partisipasi dan aspirasi masyarakat sangat diperlukan untuk berkolaborasi dan turut serta memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah secara khusus Pemprov DKI Jakarta melalui program seperti : Karang Taruna, Pengurus PKK, Ormas Masyarakat serta Forum Kerukunan Umat Beragama, dll berperan penting dalam merancang dan menggagas pembangunan di wilayah DKI Jakarta.

Gambar 5.170. Status Aspirasi Masyarakat dari Forum Musrenbang/Rembuk RW di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	2023	2024
Diterima	4.759	4.978
Belum Diakodomir	1.129	988

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Forum Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah selain itu forum musrenbang dapat digunakan untuk menyelaraskan program Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan riil masyarakat. Forum Musrenbang dapat dilakukan secara *bottom to up* di masyarakat seperti : Musrenbang RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD/ Gabungan SKPP, Musrenbang Kabupaten/Kota, Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional. menurut Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Forum Rembuk RW adalah kegiatan rembuk masyarakat di tingkat RW untuk mengindetifikasi masalah, kebutuhan, dan menemukan kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah di tingkat RW tersebut berdasarkan skala prioritas. jenis-jenis program Musrenbang/Rembuk RW yang sudah berjalan di DKI Jakarta antara lain : perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan barang pada posyandu, penyediaan lampu jalan, penyediaan alat olahraga, dll.

Dari data dan grafik diatas menggambarkan bahwa terjadi tren peningkatan usulan rembuk RW di DKI Jakarta yaitu naik sebanyak 219 usulan pada tahun 2024. Namun terjadi penurunan akan jumlah usulan yang belum diakomodir yaitu turun sebanyak 141 usulan. Dari data tersebut mengindikasikan adanya partisipasi masyarakat akan perencanaan pembangunan sampai tingkat RW diwilayah DKI Jakarta namun setiap usulan tetap mempertimbangkan secara hati-hati dengan melihat manfaat dan dampak yang akan dirasakan masyarakat DKI Jakarta.

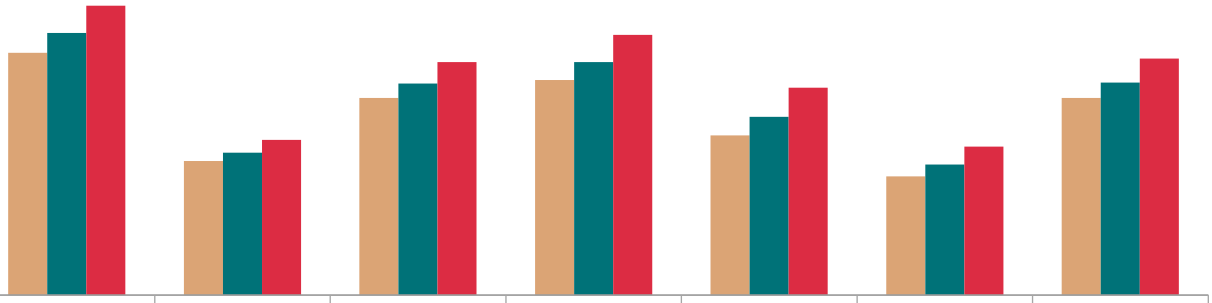
5.6.2. Kesejahteraan Sosial

Dalam rangka mengatasi permasalahan sosial, pemerintah melakukan berbagai cara dan meluncurkan berbagai program mulai dari akses pendidikan, hingga fasilitas kesehatan yang terus diupayakan agar penyebarannya merata. Hal tersebut tentunya sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan komitmen global dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal tersebut juga tertuang, tepatnya pada pilar sosial, yakni tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejatera, pendidikan berkualitas, dan kesetaran gender.

Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang disahkan pada 16 Januari 2009, penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria sosial di antaranya kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan

perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Adapun penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial. menurut Permensos No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan /atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Gambar 5.171. Angka Harapan Hidup menurut Kota/Kabupaten dan Jenis Kelamin di DKI Jakarta Tahun 2024



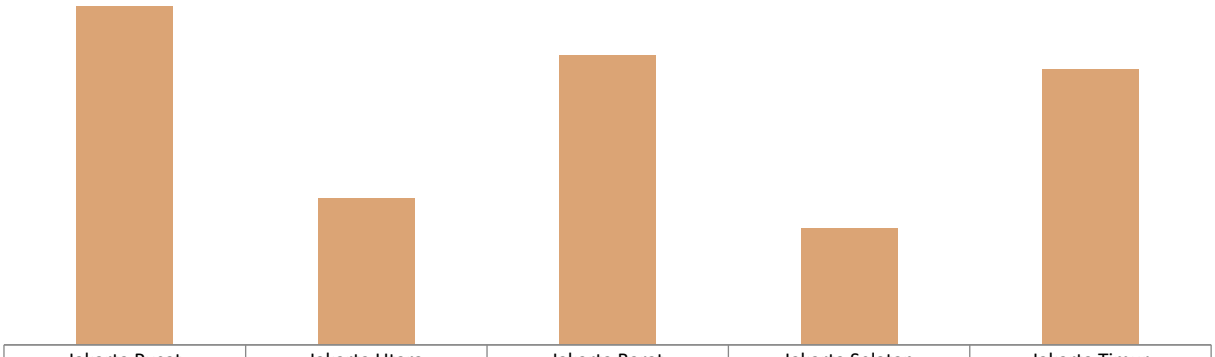
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta
2023	76,34	75,07	75,81	76,02	75,37	74,89	75,81
2024	76,57	75,17	75,98	76,23	75,59	75,03	75,99
2025	76,91	75,32	76,23	76,55	75,93	75,24	76,27

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak lahir pada suatu wilayah dan waktu tertentu, yang mencerminkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup populasi. Pada tahun 2025, angka AHH di DKI Jakarta adalah 76,27 dari target 73,42. Dengan kata lain, capaian pada tahun 2025 adalah 103,88% dari target.

Jika dibandingkan, secara year-on-year, terjadi pertumbuhan 0,28 tahun atau sekitar 0,37%. Jakarta Pusat memiliki AHH tertinggi dengan 76,91 tahun, disusul Jakarta Selatan 76,55 tahun, dan Jakarta Barat 76,23 tahun. Seluruh wilayah alami peningkatan AHH.

Gambar 5.172. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial Provinsi DKI Jakarta Semester 2 2024

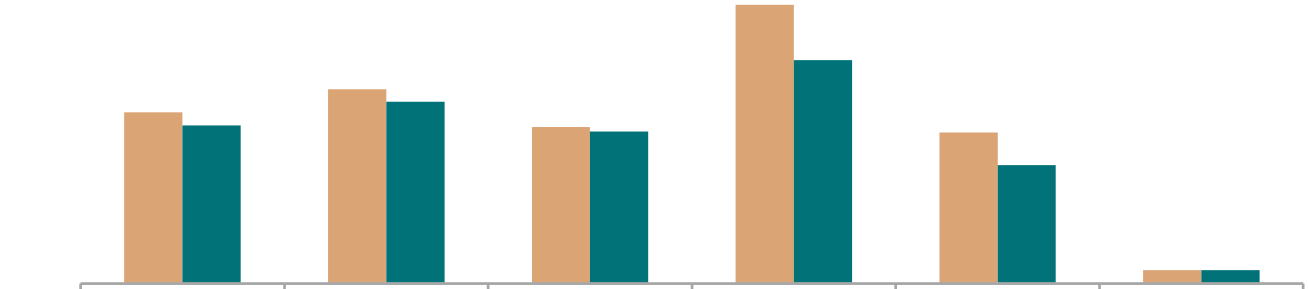


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
Jumlah	2.225	765	1.506	606	1.438

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Kinerja pelayanan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta pada Semester 2 tahun 2024 mencatatkan pencapaian target kinerja yang sempurna, di mana seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdata berhasil mencapai status keberfungsian sosial secara utuh. Rasio keberhasilan 100% tercatat pada seluruh kategori layanan, dengan kontribusi volume terbesar berasal dari kategori Korban Bencana dengan angka 21.325 orang, baik pada sisi data terdata maupun yang berfungsi sosial. Kategori ini mendominasi struktur PPKS yang mencakup 54,41% dari total populasi yang ditangani. Posisi kedua ditempati oleh PPKS dalam lingkungan Panti dengan jumlah 14.927 orang atau setara 38,09%. Sementara itu, kategori Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial mencatatkan jumlah terkecil sebanyak 161 orang, namun tetap mempertahankan tingkat keberhasilan pemulihan yang sama, yang secara keseluruhan mencerminkan optimalisasi intervensi dinas sosial dalam mengembalikan fungsi sosial masyarakat sasaran pada periode tersebut.

Gambar 5.173. Jumlah Binaan Pusat Santunan Keluarga Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024



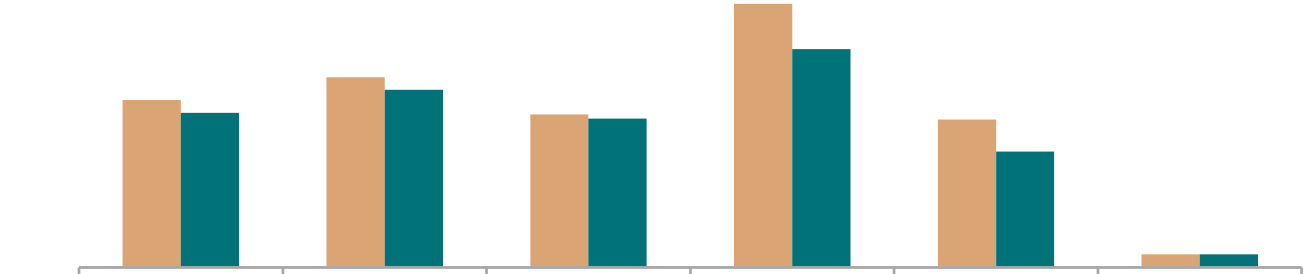
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	1.356	1.538	1.238	2.229	1.196	106
2024	1.251	1.438	1.204	1.767	937	106

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Profil penerima manfaat pada Pusat Santunan Keluarga Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sepanjang periode 2023 hingga 2024 memperlihatkan tren penurunan jumlah binaan yang hamper merata di seluruh wilayah kota administrasi, mengindikasikan adanya dinamika graduasi atau penyesuaian target layanan. Jakarta Selatan, meskipun tetap menjadi wilayah dengan basis binaan terbesar, mengalami kontraksi penurunan sebesar 20,73%, menyusut dari 2.229 orang pada tahun 2023 menjadi 1.767 orang pada tahun 2024. Penurunan dengan persentase tertinggi terjadi di Jakarta Timur yang berkurang sebesar 21,66% menjadi 937 orang. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Seribu mencatatkan jumlah binaan yang bertahan konstan sebanyak 106 orang selama dua tahun berturut-turut.



Gambar 5.174. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

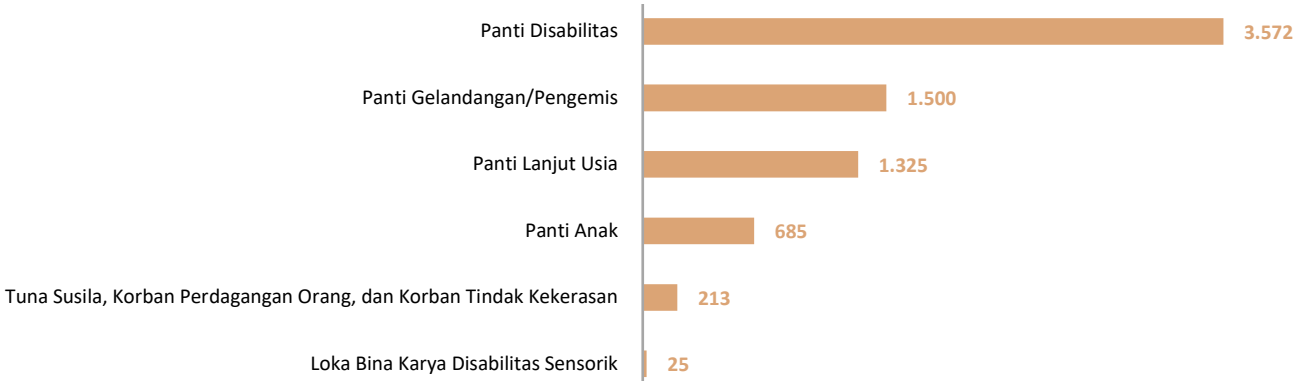


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	1.356	1.538	1.238	2.229	1.196	106
2024	1.251	1.438	1.204	1.767	937	106

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Dari total akumulasi 39.192 jiwa PPKS yang terdata, seluruhnya telah dinyatakan berhasil mencapai status berfungsi sosial kembali di masyarakat. Secara struktural, beban layanan didominasi oleh penanganan Korban Bencana yang mencatatkan volume terbesar sebanyak 21.325 orang, atau mencakup 54,41% dari total populasi PPKS. Posisi kedua ditempati oleh intervensi pemulihan melalui layanan dalam Panti yang berhasil membina 14.927 orang, memberikan kontribusi signifikan sebesar 38,09%. Di samping penanganan berbasis panti dan kebencanaan, dukungan instrumen melalui layanan Alat Bantu sukses memulihkan keberfungsian 2.779 orang atau mencakup 7,09% dari total layanan. Capaian tersebut secara umum menunjukkan komitmen dan keberhasilan program jaring pengaman sosial pemerintah daerah dalam menangani berbagai spektrum kerentanan warga.

Gambar 5.175. Jumlah Kapasitas Panti Sosial Loka Bina Karya di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

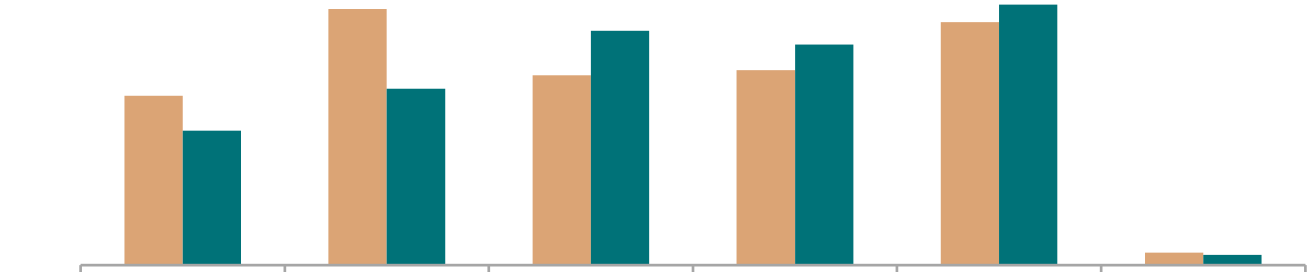


Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Kapasitas daya tampung panti sosial di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 menunjukkan fokus pelayanan yang terpusat pada rehabilitasi kelompok penyandang disabilitas dan penanganan masalah kesejahteraan sosial jalanan Panti Disabilitas mendominasi secara mutlak dengan alokasi kapasitas terbesar yang mampu menampung 3.572 orang, atau menguasai porsi hampir separuh (48,80%) dari total ketersediaan fasilitas sosial yang mencapai 7.320 tempat. Prioritas penanganan skala besar juga ditujukan pada Panti Gelandangan/Pengemis yang memiliki kapasitas 1.500 orang (20,49%) dan Panti Lanjut Usia dengan daya tampung 1.325 orang (18,10%). Di sisi lain, daya tampung untuk penanganan

kasus-kasus perlindungan spesifik dan habilitasi khusus masih tergolong masih terbatas; fasilitas untuk Tuna Susila, Korban Perdagangan Orang, dan Korban Tindak Kekerasan hanya berkapasitas 213 orang (2,91%), sedangkan Loka Bina Karya Disabilitas Sensorik mencatatkan alokasi paling minim dengan hanya 25 tempat (0,34%).

Gambar 5.176. Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menurut Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024

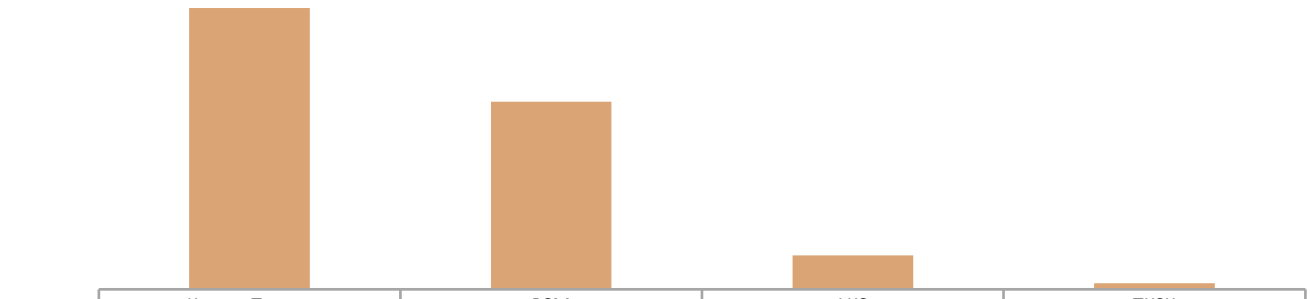


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	611	924	685	704	877	45
2024	485	637	846	796	960	37

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Jakarta Barat mencatatkan akselerasi pertumbuhan potensi tertinggi sebesar 23,50%, meningkat dari 685 unit pada tahun 2023 menjadi 846 unit pada tahun 2024. Pertumbuhan positif juga diikuti oleh Jakarta Selatan yang naik 13,07% menjadi 796 unit dan Jakarta Timur yang tumbuh 9,46% menjadi 960 unit, sekaligus menjadikan Jakarta Timur sebagai wilayah dengan basis PSKS terbesar pada tahun 2024. Sebaliknya, Jakarta Utara yang mengalami penurunan potensi sebesar 31,06% menjadi 637 unit, serta Jakarta Pusat yang menyusut 20,62% menjadi 485 unit.

Gambar 5.177. Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menurut Kecamatan di provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



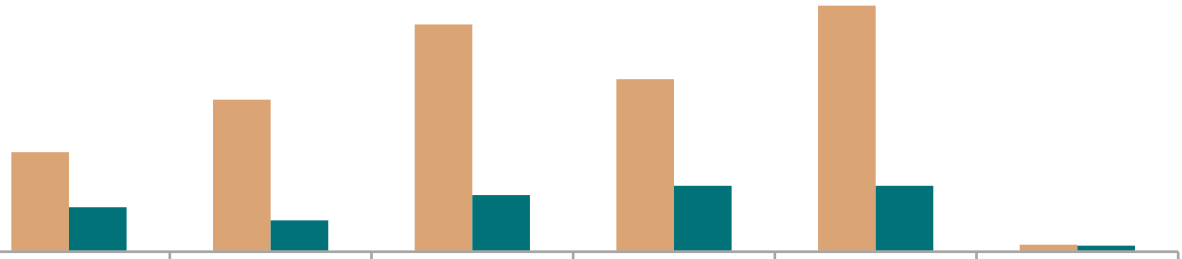
	Karang Taruna	PSM	LKS	TKSK
Jumlah	2.084	1.383	250	44

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Di sisi lain, profil Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 menunjukkan dominasi kuat dari unsur kepemudaan dan partisipasi masyarakat dalam struktur jejaring sosial daerah. Karang Taruna menempati posisi puncak sebagai pilar utama potensi sosial dengan jumlah mencapai 2.084 unit, yang secara signifikan mencakup 55,41% dari total potensi yang ada. Peran strategis juga ditunjukkan oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang berjumlah 1.383 orang, berkontribusi sebesar

36,77% dalam mendukung layanan kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput. Sementara itu, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) melengkapi struktur potensi dengan kontribusi yang lebih spesifik dan terbatas, masing-masing tercatat sebanyak 250 unit (6,65%) dan 44 orang (1,17%), yang menegaskan bahwa tulang punggung sistem kesejahteraan sosial di ibu kota sangat bertumpu pada aktivisme pemuda dan relawan masyarakat.

Gambar 5.178. Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Petugas Pembantu Keluarga Berencana Daerah (PPKB) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

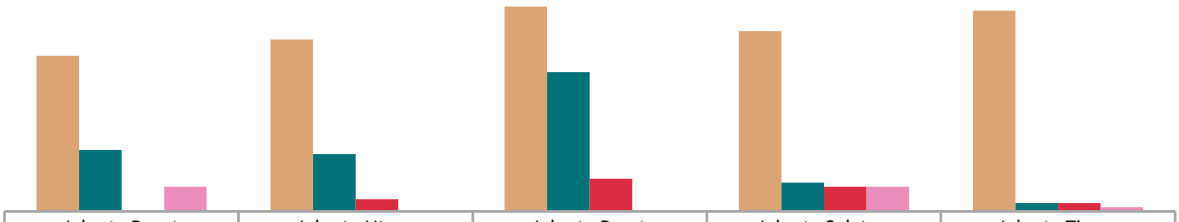


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
KKB	98	150	224	170	265	7
PPKBD	44	31	56	65	65	6

Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2024, terjadi peningkatan jumlah petugas di semua kota administrasi, dengan Jakarta Pusat mencatatkan pertumbuhan tertinggi secara proporsional, meningkat lebih dari dua kali lipat dari 21 orang pada tahun 2023 menjadi 56 orang. Jakarta Barat dan Jakarta Selatan sama-sama memperkokoh barisan petugasnya menjadi 65 orang, naik dari masing-masing 35 dan 38 orang.

Gambar 5.179. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial menurut Jenisnya di DKI Jakarta Tahun 2024



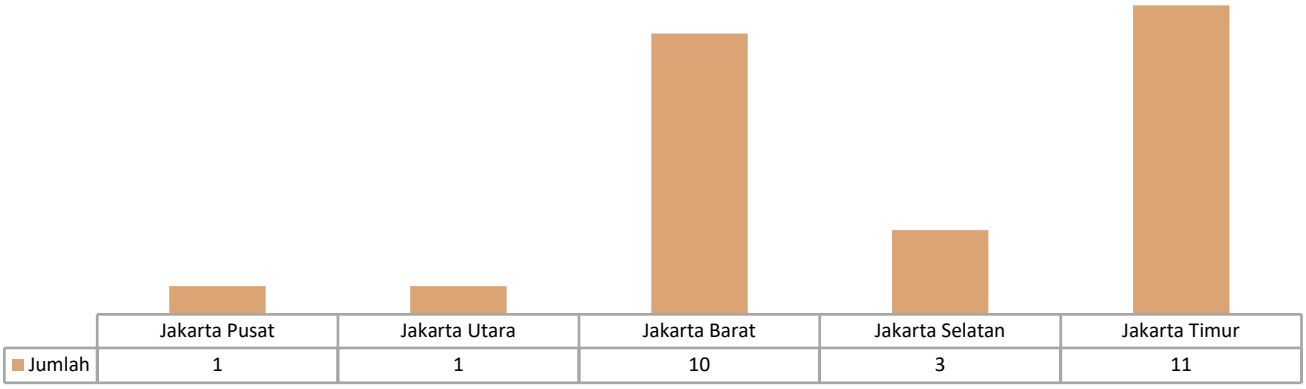
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
Anak	38	42	50	44	49
Lansia	15	14	34	7	2
Disabilitas	0	3	8	6	2
Tuna Sosial	6	0	0	6	1

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Sebaran Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) menurut jenisnya di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 didominasi oleh layanan kesejahteraan anak yang menjadi fokus utama di seluruh wilayah administrasi. LKS kategori Anak memiliki populasi terbesar di setiap kota, dengan akumulasi total mencapai 223 unit atau mencakup 68,20% dari keseluruhan infrastruktur sosial yang terdata. Secara kewilayahan, Jakarta Barat tampil sebagai sentra pelayanan sosial terlengkap dan terbanyak dengan total 92 unit lembaga,

didukung oleh tingginya jumlah LKS Lansia sebanyak 34 unit yang merupakan angka tertinggi di tingkat provinsi. Sebaliknya, ketersediaan layanan untuk penyandang disabilitas dan tuna sosial masih relatif minim dan tersebar tidak merata; LKS Disabilitas hanya berjumlah total 19 unit dengan kekosongan layanan di Jakarta Pusat, sedangkan LKS Tuna Sosial berjumlah 13 unit dengan ketiadaan fasilitas di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, yang mengindikasikan perlunya pemerataan akses layanan spesifik bagi kelompok rentan tersebut di masa mendatang.

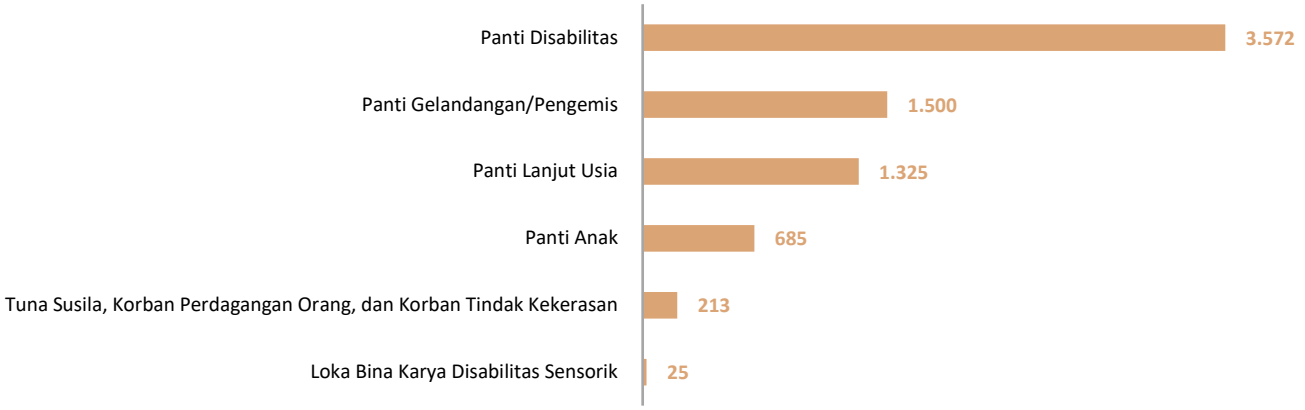
Gambar 5.180. Jumlah Kapasitas Panti Sosial Loka Binaan Karya menurut Jenis Binaan Di Provinsi DKI Jakarta



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
Jumlah	1	1	10	3	11

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Gambar 5.181. Jumlah Kapasitas Panti Sosial Loka Bina Karya menurut Jenis Binaan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

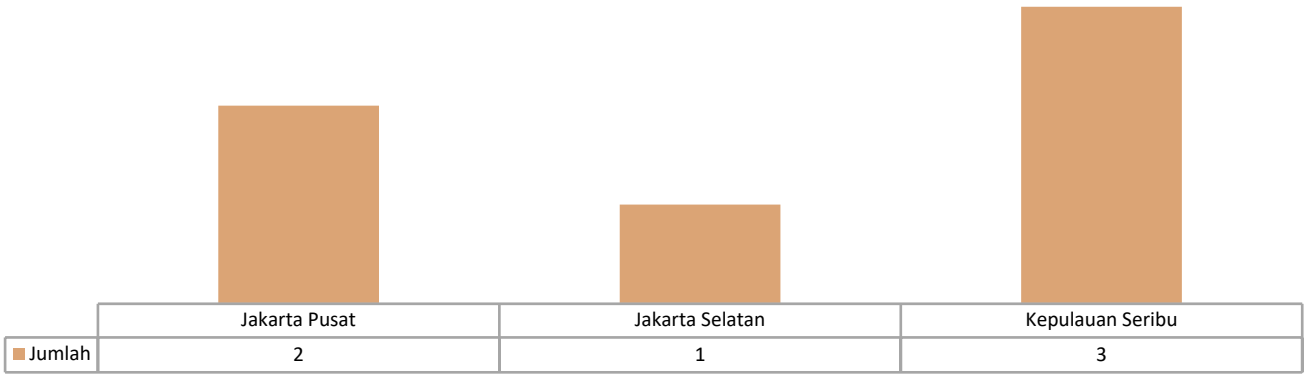
Struktur infrastruktur pelayanan sosial melalui Panti Sosial Loka Bina Karya pada tahun 2024 memperlihatkan distribusi fasilitas fisik yang terpusat di dua wilayah utama, serta prioritas kapasitas yang sangat dominan pada layanan disabilitas. Secara kewilayahan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat mendominasi ketersediaan sarana dengan masing-masing memiliki 11 unit dan 10 unit panti, yang secara akumulatif mencakup 80,77% dari total 26 unit panti yang tersedia di seluruh provinsi, sementara wilayah lain hanya memiliki 1 hingga 3 unit. Dari sisi daya tampung, kapasitas layanan terbesar dialokasikan untuk Panti Disabilitas yang mampu menampung 3.572 orang, jauh melampaui jenis layanan lainnya seperti Panti Gelandangan/Pengemis dengan kapasitas 1.500 orang dan Panti Lanjut Usia sebanyak 1.325 orang. Sementara itu, kapasitas terkecil tercatat pada Loka Bina Karya Disabilitas Sensorik yang hanya menyediakan daya tampung untuk 25 orang.

5.7. Kebudayaan

5.7.1. Museum dan Cagar Budaya

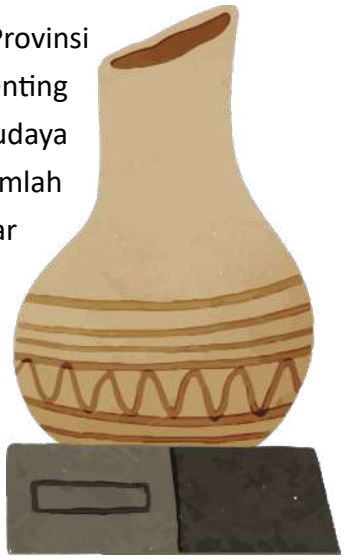
Pelestarian cagar budaya merupakan hal penting dalam menjaga identitas sejarah dan warisan budaya suatu daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya dalam melakukan perlindungan mengenai struktur, benda, serta objek yang mempunyai nilai sejarah dan budaya, termasuk objek yang diduga sebagai cagar budaya. Guna mengetahui gambaran tersebut, tersaji data mengenai jumlah struktur dan benda cagar budaya/objek diduga cagar budaya yang dilindungi di DKI Jakarta pada 2024.

Gambar 5.182. Data Struktur dan Benda Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya yang Dilindungi



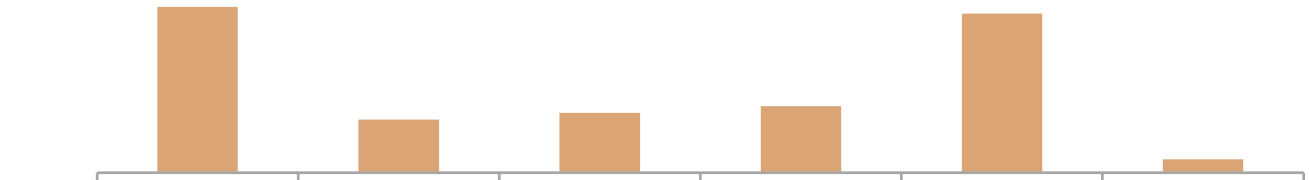
Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Data di atas menggambarkan Kepulauan Seribu menjadi area dengan jumlah struktur dan benda cagar budaya paling banyak dilindungi, yaitu sebanyak tiga objek. Hal tersebut memperlihatkan wilayah tersebut mempunyai potensi warisan budaya yang signifikan sehingga memerlukan upaya pelestarian yang lebih intensif. Selanjutnya, terdapat Jakarta Pusat dengan dua objek cagar budaya atau objek diduga cagar budaya yang dilindungi. Pada sisi lain terdapat Jakarta Selatan dengan satu objek cagar budaya yang dilindungi. Meski menunjukkan jumlah yang sedikit, wilayah tersebut tetap memiliki elemen penting terkait warisan budaya yang perlu dijaga. Secara keseluruhan, penyebaran jumlah objek pelestarian budaya di tahun 2024 memperlihatkan adanya perbedaan karakter wilayah dalam hal keberadaan peninggalan sejarah.



Pembahasan selanjutnya mengenai upaya pelestarian cagar budaya di Provinsi DKI Jakarta, keberadaan museum turut menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga, merawat, serta menyebarluaskan nilai sejarah serta budaya kepada masyarakat. Apabila pada data sebelumnya memperlihatkan jumlah struktur dan benda cagar budaya maupun objek yang diduga sebagai cagar budaya dilindungi, maka data di bawah ini menyajikan gambaran mengenai jumlah museum di setiap wilayah DKI Jakarta pada 2024. Penyajian data tersebut memiliki tujuan untuk melengkapi pemahaman terhadap sarana pendukung pelestarian budaya, khususnya melalui peran museum sebagai pusat edukasi, konservasi dan publikasi warisan budaya di DKI Jakarta.

Gambar 5.183. Data Museum di Provinsi DKI Jakarta

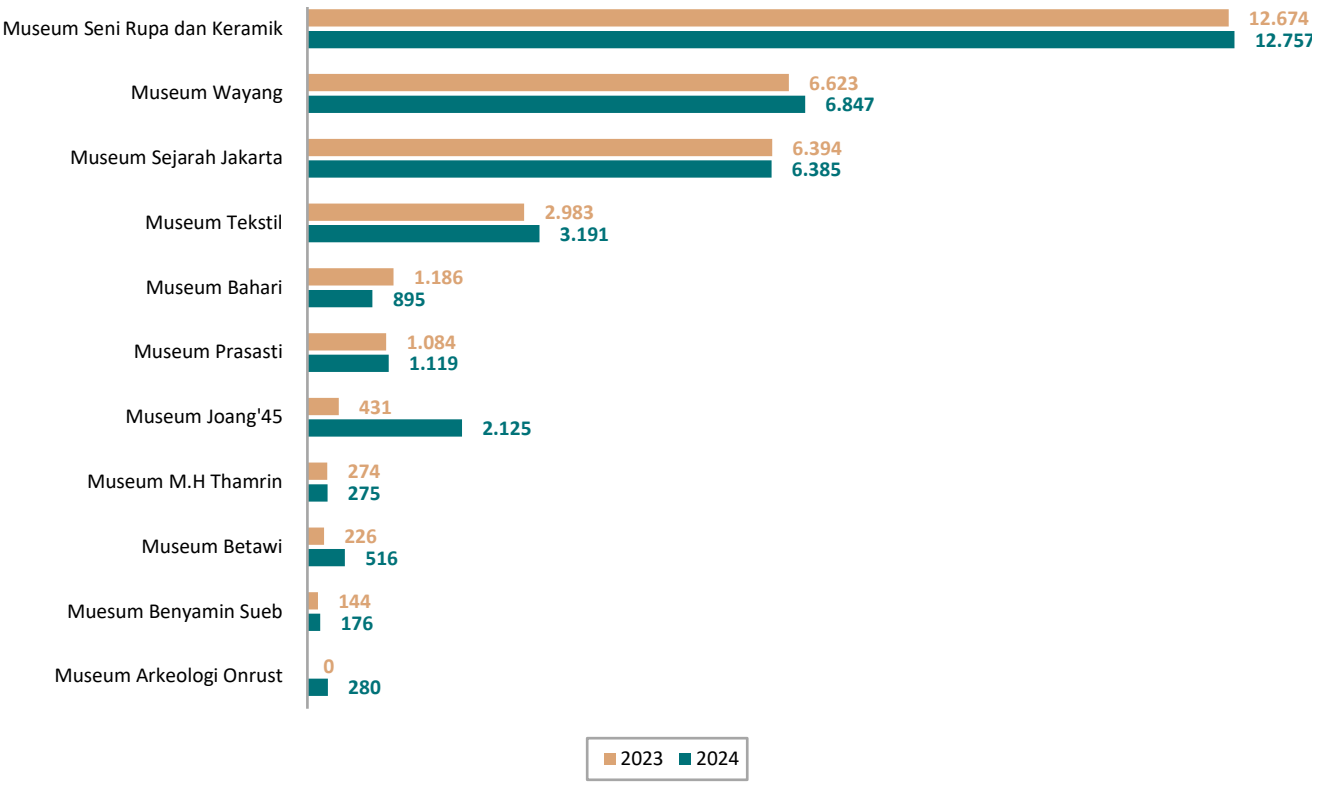


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Jumlah	25	8	9	10	24	2

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Terdapat 78 museum yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta. Jakarta Pusat terdapat 25 museum, Jakarta Timur dengan 24 museum, Jakarta Selatan sebanyak 10 museum, Jakarta Barat sebanyak 9 museum, Jakarta Utara sebanyak 8 museum, dan Kepulauan Seribu dengan 2 museum. Secara lebih lanjut, data tersebut menggambarkan adanya keberagaman mengenai jumlah museum di Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.

Gambar 5.184. Data Koleksi Museum



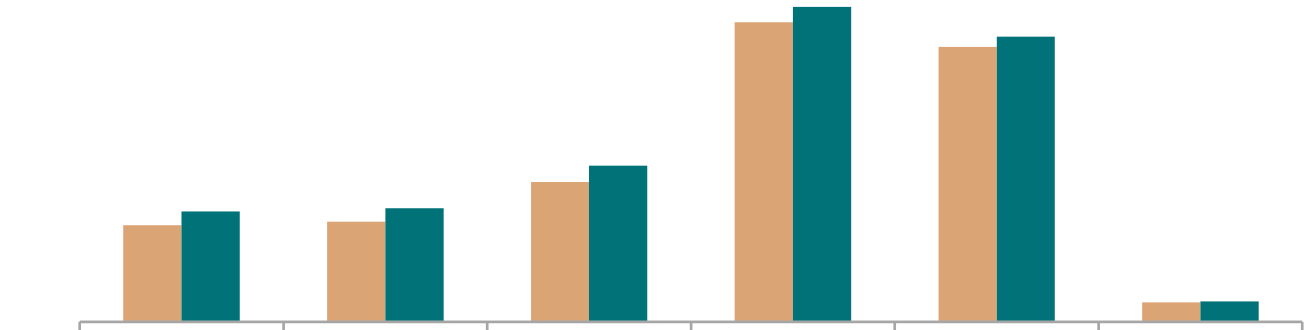
Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data yang tersaji di atas bahwa, total koleksi museum di DKI Jakarta mencapai 66.585 koleksi pada 2024. Jumlah koleksi terbesar berada pada Museum Seni Rupa dengan 12.674 koleksi pada 2023 meningkat menjadi 12.757 koleksi pada 2024. Jumlah koleksi terbesar berikutnya terdapat pada Museum Wayang dengan 6.623 koleksi pada 2023 dan meningkat menjadi 6.847 koleksi pada 2024. Posisi ketiga dengan koleksi terbanyak adalah Museum Sejarah Jakarta dengan 6.394 koleksi pada 2023

dan turun menjadi 6.385 koleksi pada 2024. Terdapat Museum Tekstil dengan 2.983 koleksi pada 2023 meningkat pada tahun berikutnya menjadi 3.191 koleksi. Museum Bahari berjumlah 1.186 koleksi pada 2023 kemudian turun menjadi 895 koleksi pada 2024. Museum Prasasti berjumlah 1.084 koleksi pada 2023 meningkat menjadi 1.119 koleksi pada 2024. Museum Joang'45 memiliki jumlah yang lebih sedikit daripada museum yang dijelaskan sebelumnya yaitu sebanyak 431 koleksi pada 2023 namun memiliki jumlah yang meningkat pesat pada 2024 dengan 2.125 koleksi. Selanjutnya terdapat Museum M.H Thamrin dengan 274 koleksi pada 2023 kemudian bertambah satu koleksi pada 2024. Museum Betawi turut menunjukkan catatan sebanyak 226 koleksi pada 2023 dan meningkat menjadi 516 koleksi pada 2024. Kemudian terdapat Museum Benyamin Sueb dengan 144 koleksi pada 2023 bertambah menjadi 176 koleksi pada 2024. Sementara itu, terdapat koleksi paling sedikit yaitu pada Museum Arkeologi Onrust yang tidak terdapat catatan selama 2023 namun mengalami peningkatan signifikan menjadi 280 koleksi pada 2024. Berdasarkan uraian di atas, koleksi museum Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 dan 2024 menggambarkan keberagaman kapasitas serta perkembangan koleksi antar museum. Secara keseluruhan, kondisi tersebut dapat tergambarkan bahwa museum-museum di DKI Jakarta terus berupaya dalam menjaga serta mengembangkan koleksi kesenian.

Keberadaan sanggar seni budaya menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung keberlanjutan aktivitas seni dan budaya di suatu wilayah. Sanggar bukan hanya tempat yang digunakan untuk berkumpul dan berlatih bagi para pelaku seni, melainkan juga berperan dalam menjaga dan meneruskan nilai-nilai budaya kepada masyarakat. Secara lebih lanjut, berikut tersaji data mengenai jumlah sanggar seni budaya di DKI Jakarta tahun 2023-2024.

Gambar 5.185. Data Sanggar Seni Budaya



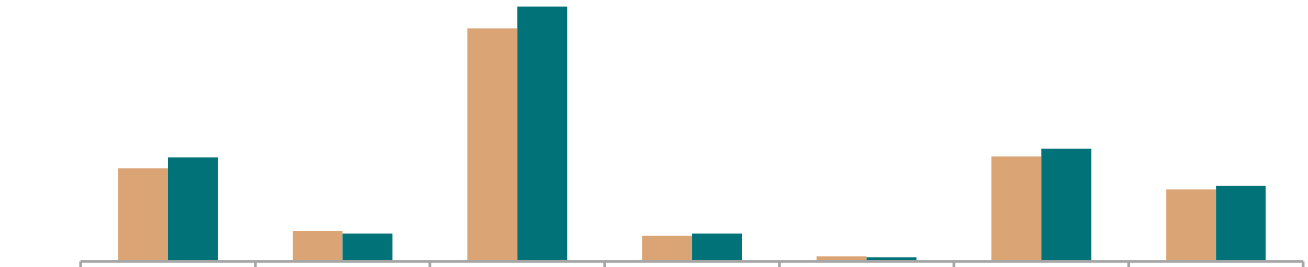
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	114	118	165	353	324	23
2024	130	134	184	371	336	24

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Pada 2023 wilayah yang memiliki jumlah sanggar seni budaya paling banyak berada pada Jakarta Selatan, yaitu sebanyak 353 sanggar. Sementara itu, terdapat Jakarta Timur dengan 324 sanggar dan Jakarta Barat dengan 165 sanggar. Selanjutnya terdapat Jakarta Utara dan Jakarta Pusat dengan masing-masing berjumlah 118 sanggar dan 114 sanggar. Jumlah paling sedikit terdapat di Kepulauan Seribu dengan 23 sanggar. Jumlah sanggar mengalami perubahan pada 2024, yaitu pada Jakarta Selatan dengan 371 sanggar dan Jakarta Timur dengan 336 sangar. Jumlah yang tidak kalah sedikit terdapat pada Jakarta Barat dengan 184 sanggar dan Jakarta Utara dengan 134 sanggar. Selanjutnya terdapat Jakarta Pusat

sebanyak 130 sanggar. Sementara itu, jumlah paling sedikit berada di Kepulauan Seribu dengan 24 sanggar. Berdasarkan uraian di atas dapat simpulkan bahwa, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur menjadi pusat kegiatan kesenian seni budaya di DKI Jakarta. Sementara itu, wilayah lain turut memberikan kontribusi meski terdapat variasi jumlah. Secara lebih lanjut, peningkatan jumlah sanggar dari 2023 ke 2024 menunjukkan adanya perkembangan yang positif sebagai bentuk perwujudan ruang ekspresi seni dan budaya di tingkat kota/kabupaten.

Gambar 5.186. Data Sanggar Seni Budaya di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



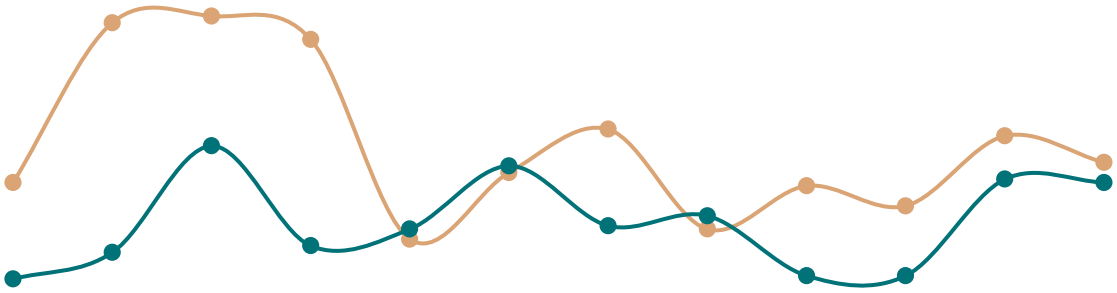
	Seni Beladiri	Seni Cinematografi	Seni Musik	Seni Rupa	Seni Sastra	Seni Tari	Seni Teater
2023	181	59	453	50	10	204	140
2024	202	54	495	54	8	219	147

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data di atas apabila dilihat dari jenisnya, Seni Musik memiliki jumlah paling banyak yaitu 453 sanggar pada 2023 dan mengalami peningkatan menjadi 495 sanggar pada 2024. Seni Tari memiliki 204 sanggar pada 2023 meningkat menjadi 219 sanggar pada 2024. Seni Beladiri turut menunjukkan peningkatan mulai dari 181 sanggar pada 2023 menjadi 202 sanggar pada 2024. Selanjutnya terdapat Seni Teater dengan 140 sanggar pada 2023 menjadi 147 sanggar pada 2024. Jumlah yang jauh lebih sedikit terdapat pada Seni Cinematografi dengan 59 sanggar pada 2023 dan mengalami penurunan manjadi 54 sanggar pada 2024. Seni Rupa memperlihatkan catatan sebanyak 50 sanggar pada 2023 menjadi 54 sanggar pada 2024. Pada sisi lain, Seni Sastra memiliki 10 sanggar pada 2023 menjadi 54 sanggar pada 2024. Seni Musik memiliki sanggar terbanyak, sementara itu Seni Sastra mempunyai sanggar dengan jumlah paling sedikit. Pada sisi lain, terdapat jumlah sanggar yang mengalami penurunan, yaitu terdapat pada Seni Cinematografi dan Seni Sastra. Meski dengan demikian, keberagaman jenis sanggar tetap menunjukkan ekosistem seni di DKI Jakarta yang sangat luas serta mencakup banyak bentuk ekspresi budaya. Setelah dilakukan pembahasan mengenai perkembangan jumlah sanggar seni budaya berdasarkan jenis seni di DKI Jakarta, berikut terdapat data mengenai gambaran lanjutan terhadap aktivitas kesenian yang berlangsung dalam bentuk penyelenggaraan gelaran seni budaya sepanjang tahun 2023-2024. APenyelenggaraan gelaran seni menjadi indikator nyata dari dinamika aktivitas budaya di Jakarta. Semakin banyak gelaran seni yang berlangsung, semakin terlihat bahwa ruang ekspresi yang difasilitasi oleh sanggar seni memiliki manfaat secara signifikan bagi masyarakat. Sehingga dengan demikian, data di bawah ini berguna sebagai kelanjutan logis dari perkembangan ekosistem seni budaya, menunjukkan bagaimana struktur (sanggar seni) bertransformasi menjadi aktivitas budaya yang konkret.



Gambar 5.187. Data Penyelenggaraan Pergelaran Seni dan Budaya



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2023	36	84	86	79	19	39	52	22	35	29	50	42
2024	7	15	47	17	22	41	23	26	8	8	37	36

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

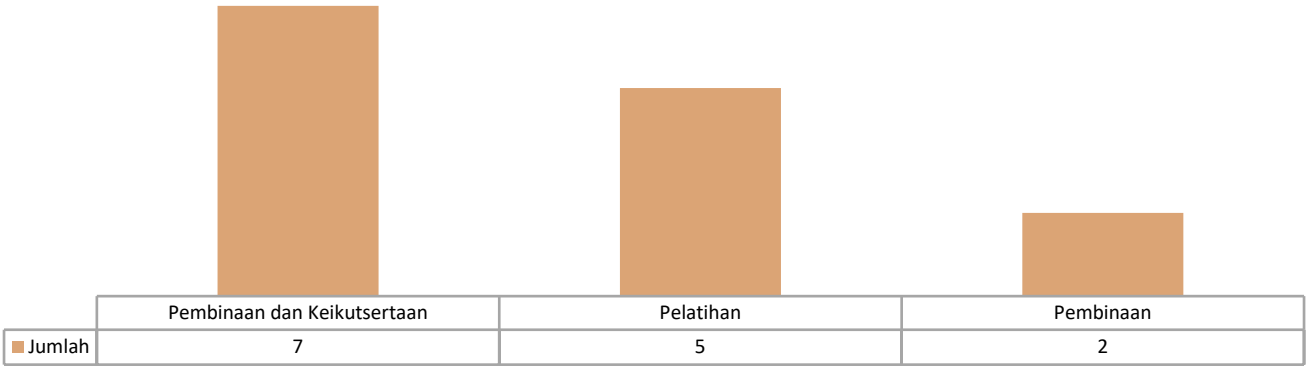
Pada Januari tercatat terdapat 36 gelaran seni. Pada bulan berikutnya menunjukkan peningkatan yang signifikan menjadi 84 gelaran seni dan kembali meningkat mkenjadi 86 gelaran seni pada Maret. Pada bulan April mengalami penurunan menjadi 79 gelaran seni dan kembali menurun menjadi 19 gelaran seni pada Mei. Peningkatan kembali terjadi pada Juni dengan 39 gelaran seni dan Juli dengan 52 gelaran seni. Pada bulan berikutnya mengalami fluktuasi menjadi 22 gelaran seni, September dengan 35 gelaran seni, Oktober dengan 29 gelaran seni. November mencatat sebanyak 50 gelaran seni dan Desember dengan 42 gelaran seni. Awal bulan pada 2024 tercatat sebanyak tujuh gelaran seni. Februari mencatat peningkatan menjadi 15 gelaran seni, Maret dengan 47 gelaran seni, dan April dengan 17 gelaran seni. Mei tercatat sebanyak 22 gelaran seni, Juni dengan 41 gelaran seni, Juli sebanyak 23 gelaran seni, dan Agustus sejumlah 26 gelaran seni. Jumlah terendah tercatat pada bulan September dan Oktober yang masing-masing sebanyak delapan gelaran seni. Peningkatan kembali terjadi pada November dengan 37 gelaran seni kemudian kembali menurun menjadi 36 gelaran seni pada akhir tahun. Secara lebih lanjut, kedua tahun tersebut memperlihatkan dinamika yang berbeda tetapi tetap menggambarkan adanya keberlanjutan aktivitas seni budaya di Jakarta. Frekuensi gelaran seni yang mengalami fluktuasi memperlihatkan respons berbagai komunitas seni terhadap momentum tertentu dalam kalender budaya.

5.8. Kepemudaan dan Olahraga

5.8.1. Kegiatan Kepemudaan

Data mengenai kegiatan kepemudaan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 memberikan gambaran terkait jenis aktivitas yang diselenggarakan guna memberikan dukungan terhadap perkembangan kapasitas serta partisipasi pemuda. Kegiatan tersebut berisikan berbagai bentuk pembinaan serta pelatihan yang didesain untuk meningkatkan keterampilan, wawasan, serta keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah. Informasi tersebut menunjukkan bagaimana setiap jenis kegiatan memiliki jumlah penyelenggaraan yang berbeda. Melalui data di bawah ini, terlihat upaya pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam menyediakan program-program yang sesuai bagi para pemuda Jakarta. Variasi mengenai jumlah kegiatan pada masing-masing kategori menjadi dasar dalam mengetahui fokus serta prioritas dalam pengembangan kepemudaan.

Gambar 5.188. Data Kegiatan Kepemudaan di Provinsi DKI Jakarta



	Pembinaan dan Keikutsertaan	Pelatihan	Pembinaan
Jumlah	7	5	2

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

Data di atas menunjukkan kategori Pembinaan dan Keikutsertaan menjadi kegiatan dengan jumlah penyelenggaraan paling banyak dengan tujuh kegiatan pada tahun 2024. Data tersebut menggambarkan adanya fokus yang besar pada kegiatan yang melibatkan pemuda secara langsung dalam berbagai aktivitas pembinaan dan partisipasi. Upaya tersebut dapat memberikan ruang bagi pemuda guna mengembangkan potensi diri sekaligus meningkatkan rasa tanggung jawab sosial mereka.

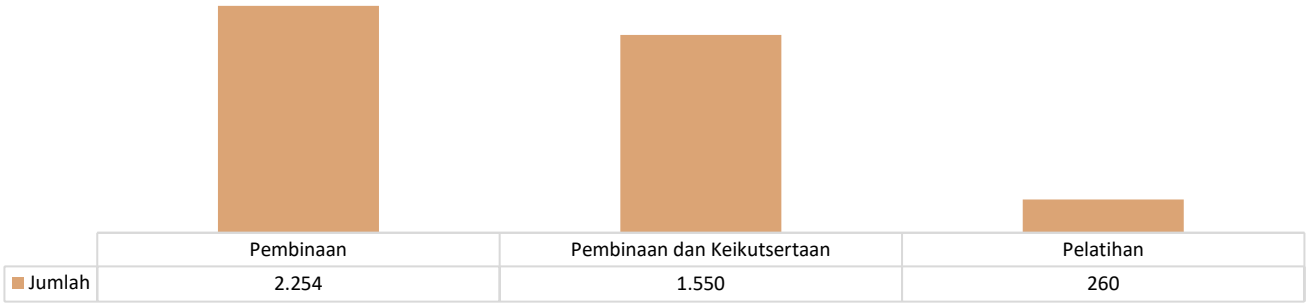
Kategori Pelatihan dengan lima kegiatan. Hal tersebut menandakan adanya perhatian terkait peningkatan kapasitas teknis maupun soft skills. Pada sisi lain, kategori Pembinaan menunjukkan dua kegiatan. Catatan tersebut menandakan porsi yang jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan kategori yang lain. Meski terdapat jumlah kegiatan yang sedikit, kegiatan tersebut tetap memiliki peran dalam memberikan dukungan dasar dalam pengembangan karakter serta kemampuan pemuda.

Secara lebih lanjut, komposisi kepemudaan yang diuraikan di atas menunjukkan variasi pendekatan yang dilakukan guna memberikan dukungan dalam perkembangan pemuda di DKI Jakarta. Ketiga kategori kegiatan memiliki keterkaitan dalam menyediakan ruang yang lebar bagi pemuda. Ruang tersebut berupa belajar, beradaptasi, serta meningkatkan kualitas diri. Setelah diuraikan data jumlah kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, selanjutnya akan dilakukan pembahasan mengenai jumlah peserta yang terlibat dalam setiap jenis kegiatan tersebut. Apabila dilihat pada kegiatan Pembinaan dan Keikutsertaan yang mendominasi dari segi jumlah penyelenggaraan, maka pada data di bawah ini tergambarkan bagaimana partisipasi pemuda tersebar pada masing-masing jenis kegiatan.



Secara lebih lanjut, informasi mengenai jumlah peserta menjadi hal penting guna memahami efektivitas dan jangkauan dari program-program kepemudaan yang telah dilaksanakan. Tingkat partisipasi yang berbeda pada tiap jenis kegiatan turut menunjukkan minat, kebutuhan, dan relevansi program pada pemuda di Jakarta sepanjang tahun 2024.

Gambar 5.189. Data Kegiatan Kepemudaan di Provinsi DKI Jakarta



	Pembinaan	Pembinaan dan Keikutsertaan	Pelatihan
Jumlah	2.254	1.550	260

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

Data di atas menggambarkan bahwa, kegiatan Pembinaan merupakan jenis kegiatan dengan jumlah peserta terbesar, yaitu sebanyak 2.254 peserta. Tingginya angka tersebut menunjukkan program pembinaan masih menjadi kebutuhan utama bagi para pemuda. Selanjutnya terdapat kategori Pembinaan dan Keikutsertaan yang diikut oleh 1.550 peserta. Besarnya peserta pada kategori tersebut menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup signifikan. Pada sisi lain, kategori Pelatihan terdapat sebanyak 260 peserta. Jumlah tersebut menunjukkan jumlah paling sedikit apabila dibandingkan dengan kategori lainnya. Secara lebih lanjut, data di atas menunjukkan kegiatan kepemudaan yang berhasil menjangkau jumlah peserta yang besar. Hal tersebut dengan variasi tingkat partisipasi pada tiap jenis kegiatan. Secara lebih lanjut, data tersebut dapat menjadi rujukan dalam merancang program-program kedepannya agar semakin sesuai dengan kebutuhan serta minat pemuda di DKI Jakarta. Setelah mengetahui partisipasi pemuda dalam berbagai kegiatan kepemudaan di DKI Jakarta pada 2024, selanjutnya terdapat data yang dapat memberikan gambaran secara lebih spesifik terkait pembinaan prestasi pada bidang olahraga. Data tersebut mengenai informasi terkait jumlah atlet pelajar yang mengikuti pusat pelatihan olahraga dari 2023-2024. Data tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 5.190. Data Nama Atlet Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar



	2023	2024
Laki-laki	219	242
Perempuan	171	194

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

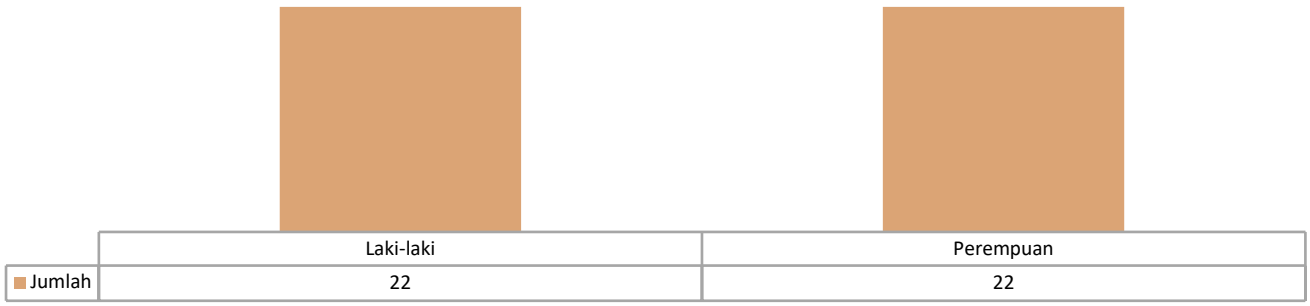
Data di atas menggambarkan jumlah atlet pelajar yang mengikuti pusat pelatihan olahraga di DKI Jakarta yang mengalami peningkatan pada 2024. Atlet laki-laki meningkat dari 219 orang pada 2023 menjadi 242 orang pada tahun berikutnya. Terjadinya peningkatan menggambarkan bertambahnya minat atau kesempatan bagi pelajar laki-laki dalam keikutsertaan pembinaan olahraga secara lebih intensif.

Selanjutnya terdapat atlet perempuan yang turut menunjukkan peningkatan secara konsisten. Pada 2023 tercatat terdapat 171 atlet perempuan, dan jumlah tersebut meningkat menjadi 194 atlet pada 2024. Kenaikan ini memberikan gambaran bahwa akses dan partisipasi perempuan dalam kegiatan pembinaan olahraga yang semakin baik. Selain itu, turut memberikan peluang yang tinggi bagi mereka untuk berkembang.

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah atlet menunjukkan adanya penguatan pembinaan olahraga pelajar di DKI Jakarta. Data tersebut turut serta menunjukkan bahwa, pelatihan olahraga berhasil menarik lebih banyak peserta. Secara lebih lanjut, hal tersebut memiliki potensi meningkatkan kualitas atlet pelajar yang akan berkontribusi pada berbagai kompetisi di masa yang akan datang.

Setelah mengetahui bagaimana peningkatan jumlah atlet pelajar yang mengikuti pusat pelatihan olahraga di DKI Jakarta sejak 2023-2024, selanjutnya terdapat data yang menggambarkan terkait bentuk lain dari pembinaan generasi muda. Data tersebut mengenai seleksi Paskibraka tingkat provinsi. Paskibraka melengkapi potret dalam keterlibatan pemuda dalam kegiatan yang menanamkan nilai kedisiplinan, kepemimpinan, serta nasionalisme. Secara lebih lanjut, keikutsertaan pemuda sebagai Paskibraka turut menjadi tahap lanjutan dalam pembinaan karakter yang tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga mental serta kemampuan bekerja dalam tim. Maka dengan demikian, data jumlah Paskibraka memiliki hubungan erat dengan upaya pengembangan kapasitas pemuda.

Gambar 5.191. Data Paskibraka Provinsi DKI Jakarta



	Laki-laki	Perempuan
Jumlah	22	22

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

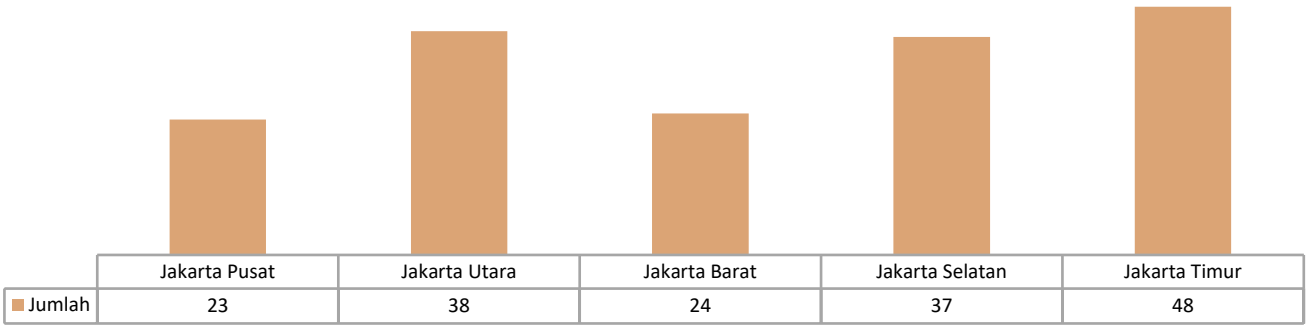
Data terkait jumlah Paskibraka Provinsi DKI Jakarta di atas menunjukkan total terdapat 44 anggota Paskibraka pada 2024. Anggota tersebut terdiri dari 22 laki-laki dan 22 perempuan. Keseimbangan komposisi ini menunjukkan adanya penerapan prinsip kesetaraan gender dalam proses seleksi. Selain itu, memberikan kesempatan yang sama bagi pemuda dan pemudi untuk berperan dalam tugas kenegaraan tersebut. Keseimbangan jumlah tersebut turut menggambarkan seleksi yang kompetitif dan representatif dari berbagai wilayah di DKI Jakarta. Secara keseluruhan, data tersebut memperlihatkan pembinaan kepemudaan yang berjalan dalam berbagai bentuk, mulai dari olahraga, kegiatan pengembangan diri, hingga peran simbolis dalam upacara kenegaraan, yang secara keseluruhan berkontribusi dalam peningkatan kualitas generasi muda di DKI Jakarta.



5.8.2. Fasilitas Olahraga

Berikut terdapat data yang menyajikan mengenai jumlah fasilitas olahraga yang berada di bawah koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta pada 2024. Informasi tersebut menunjukkan ketersediaan sarana olahraga di lima wilayah kota administrasi yang memiliki peran dalam memberikan dukungan terhadap aktivitas fisik serta pembinaan olahraga di masyarakat. Secara lebih lanjut, ketersediaan fasilitas olahraga di setiap wilayah menggambarkan tingkat kapasitas daerah dalam menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berlatih, berolahraga, serta meningkuti pembinaan olahraga. Penyebaran fasilitas ini turut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup serta memberikan dorongan gaya hidup aktif bagi warga di DKI Jakarta.

Gambar 5.192. Jumlah Fasilitas Olahraga menurut Jenisnya

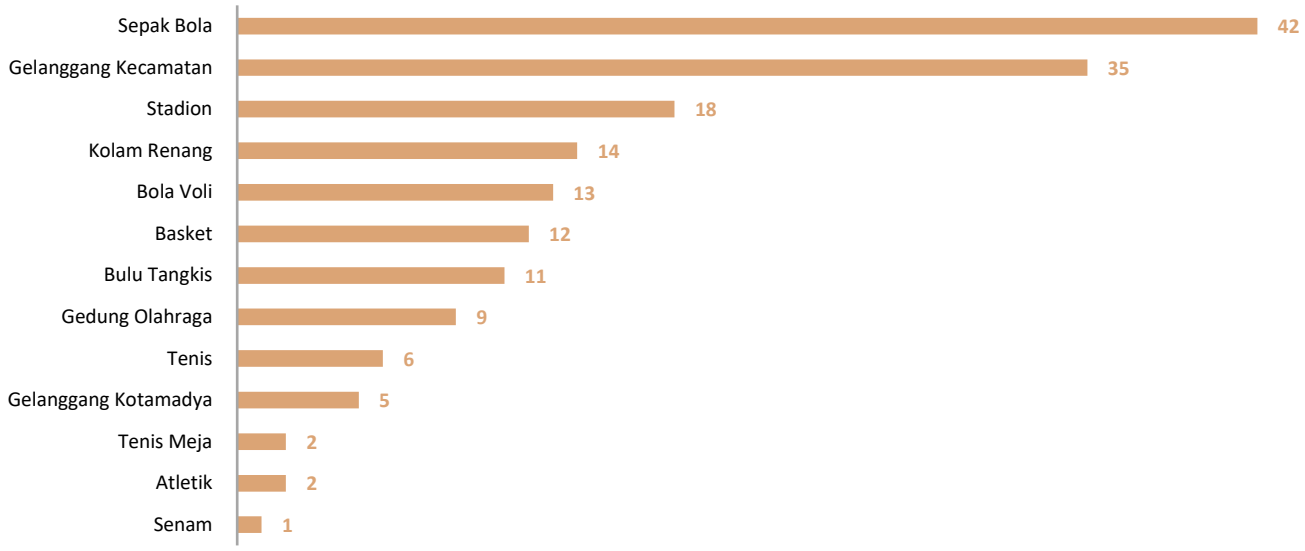


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
Jumlah	23	38	24	37	48

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data mengenai jumlah fasilitas olahraga di bawah koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta pada 2024 bahwa, Jakarta Timur mempunyai fasilitas olahraga dengan jumlah paling banyak yaitu dengan 48 fasilitas olahraga. Jumlah tersebut menjadikan wilayah dengan kapasitas sarana olahraga paling besar. Selanjutnya terdapat Jakarta Utara yang memiliki 38 fasilitas olahraga dan Jakarta Selatan dengan 37 fasilitas olahraga. Jumlah tersebut menggambarkan ketersediaan sarana yang relatif baik dalam memberikan dukungan kegiatan olahraga di masyarakat. Pada sisi lain terdapat Jakarta Barat yang mencatat 24 fasilitas dan Jakarta Pusat dengan 23 fasilitas. Meski memiliki jumlah yang lebih sedikit apabila dibandingkan dengan wilayah lain, fasilitas yang tersedia tetap memiliki kegunaan yang penting dalam menyediakan ruang aktivitas olahraga bagi masyarakat. Secara keseluruhan, penyebaran fasilitas olahraga menggambarkan variasi mengenai kapasitas yang dimiliki antarwilayah. Meski dengan demikian, tetap mencerminkan upaya dalam memberikan akses yang memadai bagi masyarakat. Adanya penyebaran fasilitas olahraga tersebut turut serta mengembangkan minat dan bakat masyarakat di bidang olahraga. Setelah mengetahui sebaran jumlah fasilitas olahraga menurut wilayah di DKI Jakarta, berikut terdapat data yang memperlihatkan variasi terkait jenis fasilitas olaraga yang berada di bawah koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta pada 2024. Informasi tersebut melengkapi gambaran dari data sebelumnya dengan menunjukkan tidak hanya sebarannya per wilayah, melainkan juga ragam sarana yang tersedia untuk mendukung berbagai cabang olahraga. Mengenali jenis-jenis fasilitas tersebut, dapat memahami bagaimana infrastruktur olahraga di Jakarta disiapkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara spesifik.

Gambar 5.193. Jumlah Fasilitas Olahraga menurut Jenisnya



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data mengenai jenis fasilitas olahraga di bawah koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta tahun 2024 bahwa, fasilitas Sepak Bola paling banyak tersedia dengan 42 unit. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya prioritas serta minat masyarakat mengenai olahraga tersebut. Selanjutnya terdapat Gelanggang Kecamatan sebanyak 35 unit dengan fungsi sebagai pusat aktivitas olahraga masyarakat di tingkat kecamatan. Stadion turut hadir dalam jumlah yang cukup besar dengan 18 unit, sebagai fasilitas pendukung kegiatan olahraga yang memiliki skala besar maupun pembinaan atlet.

Sementara itu, beberapa fasilitas lain seperti Kolam Renang dengan 14 unit, Bola Voli sebanyak 13 unit, dan Basket sejumlah 12 unit. Jenis fasilitas tersebut memberikan kontribusi penting dalam pengembangan olahraga di berbagai komunitas. Selanjutnya terdapat Bulu Tangkis dengan sebelas unit, Gedung Olahraga sebanyak sembilan unit, Tenis dengan enam unit, serta Gelanggang Kotamadya sebanyak lima unit yang melengkapi keragaman sarana yang tersedia.

Terdapat jenis fasilitas yang memiliki jumlah sedikit, yaitu terdapat pada Tenis Meja dan Atletik dengan dua unit serta Senam hanya satu unit. Secara lebih lanjut, jumlah tersebut memainkan peran dalam penyediaan ruang latihan bagi cabang olahraga tertentu meski memiliki kapasitas yang terbatas. Variasi yang ada menggambarkan bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan menyediakan infrastruktur olahraga yang beragam guna mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari olahraga populer hingga olahraga yang lebih spesifik.

Setelah mengetahui terkait jenis dan jumlah fasilitas olahraga yang terdapat di DKI Jakarta, data berikut membantu dalam memperluas perspektif dengan menunjukkan jumlah cabang olahraga yang berprestasi dan cabang olahraga yang diikuti pada 2023-2024. Informasi ini secara lebih lanjut menunjukkan bagaimana ketersediaan fasilitas dan pembinaan yang telah dibahas sebelumnya berkorelasi dengan capaian prestasi atlet di berbagai cabang olahraga. Data tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 5.194. Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi



	Cabang Olahraga Berprestasi	Cabang Olahraga Diikuti
2023	26	27
2024	87	89

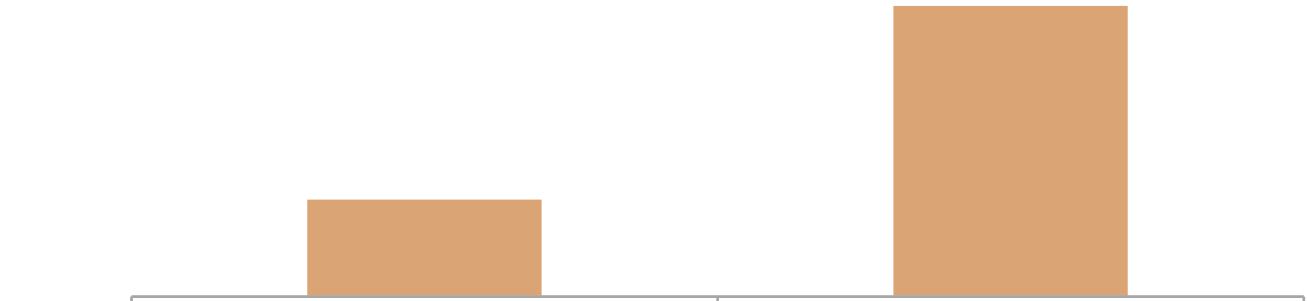
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

Data di atas dapat dijelaskan bahwa, terdapat peningkatan secara signifikan mengenai jumlah cabang olahraga yang berprestasi. Pada 2023, terdapat sebanyak 26 cabang olahraga berprestasi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 87 cabang olahraga pada tahun berikutnya. Terjadinya peningkatan menggambarkan semakin intensifnya pembinaan serta meningkatnya jumlah atlet yang mengikuti program pelatihan serta pengembangan olahraga.

Jumlah cabang olahraga turut mengalami peningkatan dari 27 cabang pada 2023 menjadi 89 cabang pada 2024. Kenaikan tersebut menggambarkan partisipasi dalam berbagai kompetisi olahraga yang mengalami perluasan. Secara keseluruhan, tren tersebut menggambarkan peningkatan kapasitas atlet serta semakin menguatnya ekosistem olahraga di DKI Jakarta

Data sebelumnya memperlihatkan adanya peningkatan jumlah cabang olahraga yang berprestasi dan jumlah cabang olahraga yang diikuti pada 2023-2024. Berikut terdapat data yang berguna dalam memberikan gambaran secara konkret mengenai persentase cabang olahraga yang berprestasi di DKI Jakarta. Informasi tersebut memperkuat temuan sebelumnya bahwa peningkatan fasilitas, pembinaan, dan partisipasi atlet turut serta mendorong perbaikan kinerja olahraga daerah. Adanya indikator persentase, capaian prestasi tidak hanya dilihat dari jumlah absolut, melainkan juga dari proporsi keberhasilan setiap tahunnya.

Gambar 5.195. Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi



	2023	2024
Persentase	96%	98%

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

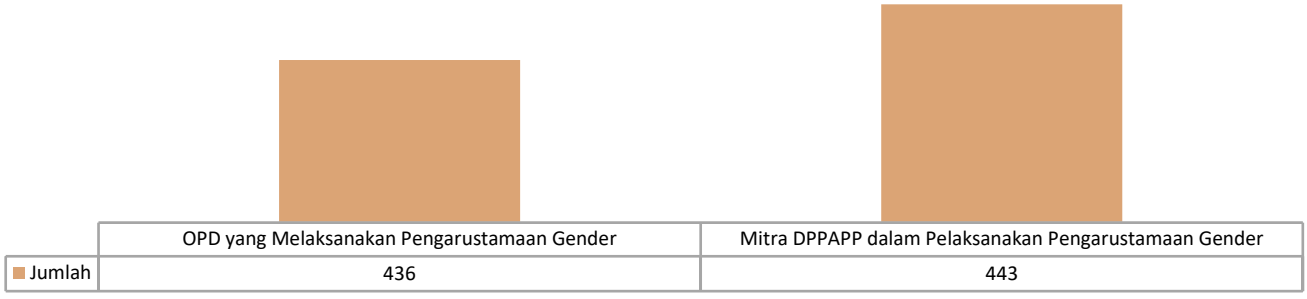
Berdasarkan data di atas memperlihatkan bahwa, persentase cabang olahraga yang berprestasi mengalami peningkatan dari 96% pada 2023 menjadi 98% pada 2024. Kenaikan tersebut menggambarkan hampir seluruh cabang olahraga yang diikuti berhasil memberikan kontribusi prestasi bagi DKI Jakarta. Tingkat keberhasilan yang tinggi menandakan adanya efektivitas pembinaan serta kesiapan atlet dalam menghadapi berbagai kompetisi. Secara lebih lanjut, data ini menegaskan bahwa, upaya pengembangan olahraga di DKI Jakarta menunjukkan hasil yang semakin positif dari tahun ke tahun.

5.9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan infrastuktur dan layanan publik, tetapi juga pada penguatan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Setelah pada bagian sebelumnya dibahas mengenai fasilitas olahraga sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, pada bagian ini pembahasan diarahkan pada aspek pemberdayaan perempuan perlindungan anak sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan serta laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan. Hal ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa seluruh instansi pemerintah wajib mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, yang menekankan peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan PUG secara terencana dan sistematis.

Gambar 5.196. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Lembaga Masyarakat yang Melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan di DKI Jakarta Tahun 2024

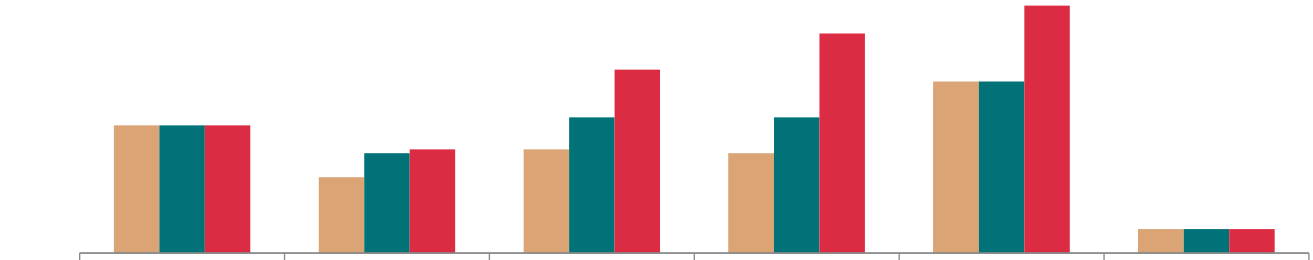


	OPD yang Melaksanakan Pengarustamaan Gender	Mitra DPPAPP dalam Pelaksanakan Pengarustamaan Gender
Jumlah	436	443

Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Dalam konteks DKI Jakarta, pelaksanaan PUG melibatkan berbagai perangkat daerah serta dukungan dari lembaga masyarakat. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 436 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah melaksanakan PUG. Selain itu, terdapat 443 lembaga masyarakat yang menjadi mitra Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) dalam pelaksanaan PUG dan pemberdayaan perempuan. Jumlah lembaga mitra tersebut sekitar 1,61% lebih banyak dibandingkan jumlah OPD yang melaksanakan PUG.

Gambar 5.197. Jumlah Daftar Kampung Keluarga Berkualitas di DKI Jakarta Tahun 2022-2024)

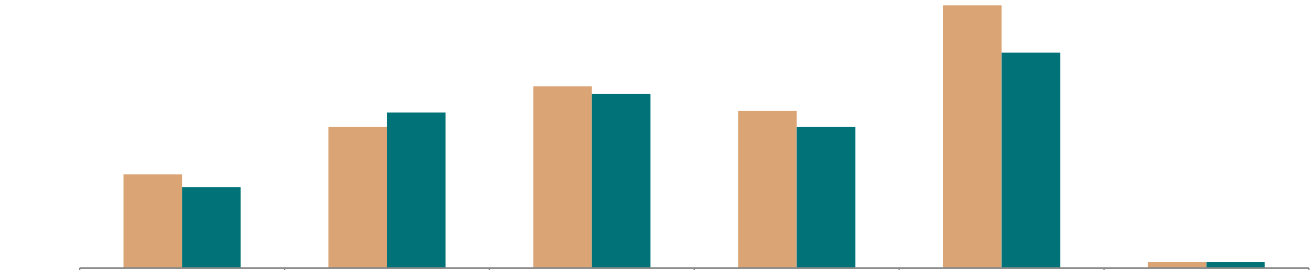


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2022	32	19	26	25	43	6
2023	32	25	34	34	43	6
2024	32	26	46	55	62	6

Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di DKI Jakarta menunjukkan tren peningkatan dalam periode 2022-2024. Pada tahun 2024, sebagian besar wilayah administrasi mengalami penambahan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan paling signifikan pada periode 2023-2024 terjadi di Jakarta Selatan yang bertambah 21 kampung, atau meningkat sekitar 61,76%, disusul Jakarta Timur yang bertambah 19 kampung atau 44,19%, serta Jakarta Barat yang mengalami kenaikan bertahap sekitar 35,29%. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2022-2024), pertumbuhan tertinggi juga tercatat di Jakarta Selatan yang meningkat lebih dari 100,00%. Jakarta Barat meningkat 76,92%, sedangkan Jakarta Timur bertambah sekitar 44,19%. Jakarta Utara mengalami kenaikan bertahap sebanyak 36,84%, sementara Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu relatif stabil tanpa penambahan jumlah kampung dalam periode tersebut. Dilihat dari distribusi tahun 2024, Jakarta Timur memiliki jumlah Kampung Keluarga Berkualitas terbanyak yaitu 62 kampung, atau 1,94 kali lebih banyak dibandingkan Jakarta Pusat. Sementara itu, Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan jumlah paling sedikit yaitu 6 kampung, dengan selisih 56 kampung dibandingkan Jakarta Timur. Selain itu, penguatan pembangunan keluarga tidak hanya dilakukan melalui pendekatan berbasis wilayah seperti Kampung Keluarga Berkualitas, tetapi juga melalui ketersediaan layanan kesehatan yang mendukung program Keluarga Berencana (KB). Akses terhadap fasilitas pelayanan KB menjadi faktor penting dalam menjamin keberlangsungan program pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga.

Gambar 5.198. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melayani Keluarga Berencana (KB) di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

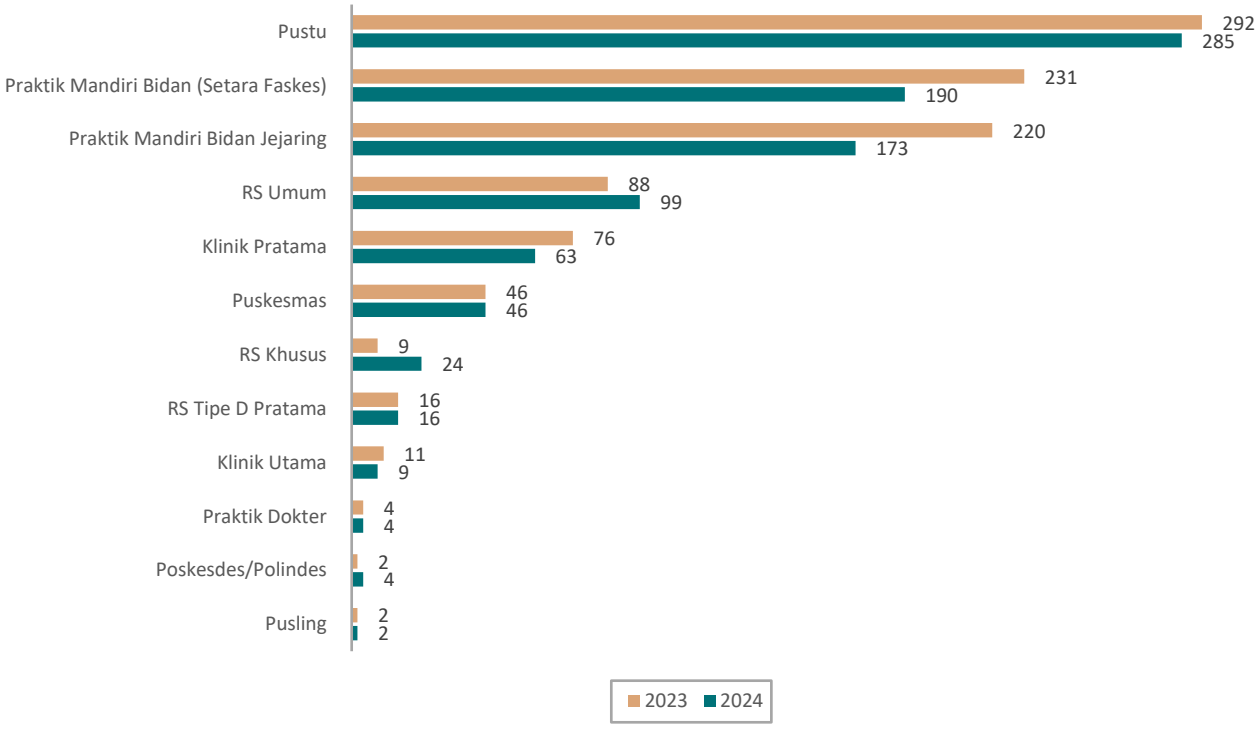


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	111	167	215	186	311	7
2024	96	184	206	167	255	7

Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Pada periode 2023-2024, jumlah fasilitas kesehatan yang melayani KB di DKI Jakarta menunjukkan kecenderungan menurun di sebagian besar wilayah. Penurunan terbesar tercatat di Jakarta Timur yang berkurang hingga 56 fasilitas, atau turun sebanyak 18,01%. Penurunan juga terjadi di Jakarta Pusat yang berkurang 15 fasilitas (13,51%), Jakarta Selatan berkurang 19 fasilitas (10,22%), serta Jakarta Barat berkurang 9 fasilitas atau sekitar 4,19%. Sebaliknya, Jakarta Utara mengalami peningkatan sebanyak 17 fasilitas, atau tumbuh sekitar 10,18% secara *year on year* (y-on-y). Sementara itu, Kepulauan Seribu tetap stabil dengan 7 fasilitas, tanpa perubahan dalam satu tahun terakhir. Secara distribusi tahun 2024, Jakarta Timur masih menjadi wilayah dengan jumlah fasilitas pelayanan KB terbanyak, yakni 36,43 kali lebih banyak dibandingkan Kepulauan Seribu.

Gambar 5.199. Jumlah Jenis Fasilitas Kesehatan yang Melayani Keluarga Berencana (KB) di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

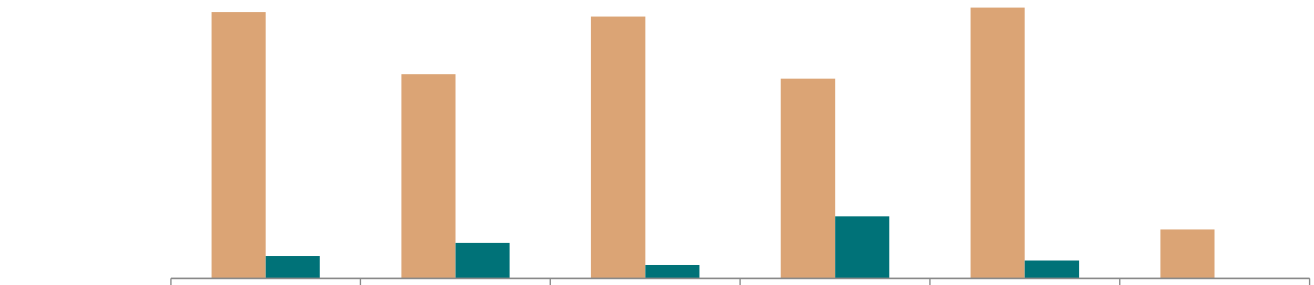


Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Jika dilihat berdasarkan jenis fasilitas kesehatan yang melayani KB, pada tahun 2023 tercatat total 997 unit, sedangkan pada tahun 2024 menjadi 915 unit. Dengan demikian, secara rekapitulasi terjadi penurunan sebanyak 82 unit dalam satu tahun. Secara rinci, beberapa jenis fasilitas kesehatan mengalami penurunan cukup signifikan. Praktik Mandiri Bidan (Setara Faskes) turun sebanyak 17,75% atau berkurang 41 unit. Praktik Mandiri Bidan Jejaring juga berkurang sebanyak 47 unit. Klinik Pratama turun 17,11% atau 13 unit, dan Pustu berkurang 2,40% atau 7 unit. Sebaliknya, beberapa jenis fasilitas justru mengalami peningkatan. RS Umum mengalami kenaikan sebanyak 12,50% atau 11 unit. RS Khusus meningkat cukup tajam, dari 9 unit menjadi 24 unit, atau naik hingga 166,67% secara y-on-y. Poskesdes/Polindes juga meningkat 100,00%, dari 2 unit menjadi 4 unit. Sementara itu, Puskesmas tetap stabil pada 46 unit, begitu pula dengan Pusling dan Praktik Dokter yang tidak mengalami perubahan jumlah.

Dilihat dari komposisi tahun 2024, jenis fasilitas terbanyak masih didominasi oleh Pustu, dengan 31,15% dari total fasilitas. Diikuti Praktik Mandiri Bidan (Setara Faskes) dengan 20,77% dan Praktik Mandiri Bidan Jejaring sebnayak 18,91% dari total. Ketiga jenis ini secara bersama-sama mencakup sebesar 70,82% dari total fasilitas pelayanan KB di tahun 2024. Namun secara umum, meskipun terdapat penurunan jumlah total fasilitas pelayanan KB pada tahun 2024, struktur layanan tetap menunjukkan dominasi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Upaya pembangunan keluarga tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan reproduksi melalui fasilitas KB, namun juga diarahkan pada pembinaan generasi muda melalui pembentukan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa (R/M). Keberadaan PIK R/M berperan untuk membantu remaja dalam mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan remaja. PIK R/M sendiri merupakan suatu wadah kegiatan PKBR (Pusat Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya[50].

Gambar 5.200. Jumlah Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa di Provinsi DKI Jakarta



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
PIK Pendidikan	60	46	59	45	61	11
PIK Masyarakat	5	8	3	14	4	0

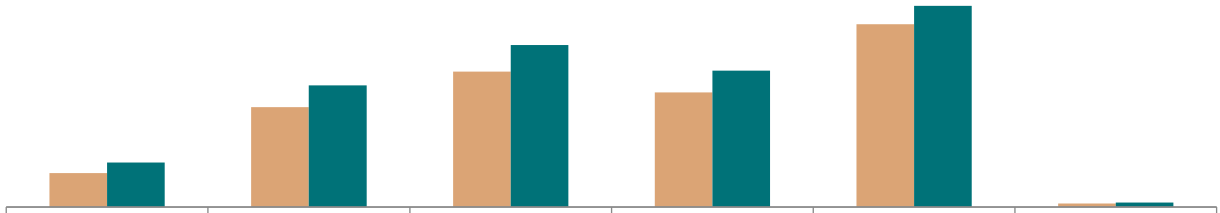
Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2024, jumlah PIK di Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh PIK jalur pendidikan. Secara total, PIK Pendidikan tercatat sebanyak 282 kelompok, sedangkan PIK Masyarakat sebanyak 34 kelompok. Dengan demikian, sekitar 89,24% PIK berada pada jalur pendidikan, mengindikasikan bahwa pendekatan pembinaan remaja lebih banyak dilakukan melalui institusi pendidikan formal.

Berdasarkan distribusi wilayah, PIK Pendidikan terbanyak terdapat di Jakarta Timur, diikuti Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Sementara itu, jumlah terendah berada di Kepulauan Seribu. Jika dibandingkan, jumlah PIK Pendidikan Jakarta Timur 5,55 kali lebih banyak dibandingkan Kepulauan Seribu. Untuk PIK Masyarakat, distribusinya relatif lebih kecil dan tidak merata. Jakarta Selatan memiliki jumlah tertinggi, sebanyak 41,18% dari total, yang artinya lebih dari 40% PIK Masyarakat di DKI Jakarta terkonsentrasi di Jakarta Selatan.

50 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. "Pertemuan dan Pembinaan Kelompok Kegiatan PIK R/M (Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa) Sembago Arutala Triasih", https://kampungkb.kemendukbangga.go.id/kampung/43385/intervensi/930493/pertemuan-dan-pembinaan-kelompok-kegiatan-pik-r-m-pusat-informasi-dan-konseling-remaja-mahasiswa-sembagi-arutala-triasih , (Sabtu, 21 Februari 2026, 15.49)

Gambar 5.201. Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

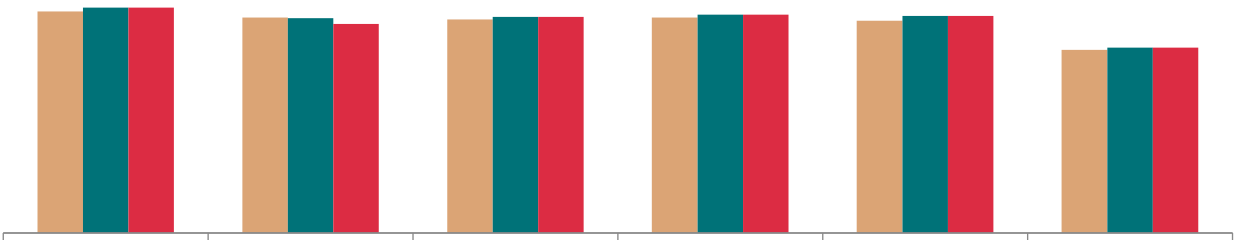


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	21.187	62.460	84.726	71.689	114.449	2.329
2024	27.986	76.127	101.409	85.350	137.185	2.868

Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Melihat perkembangan jumlah peserta KB aktif memperlihatkan gambaran langsung keterlibatan pasangan usia subur dalam mendukung pengendalian kelahiran dan peningkatan kualitas keluarga. Pada periode 2023-2024, jumlah peserta KB aktif di DKI Jakarta menunjukkan peningkatan di seluruh wilayah. Secara total provinsi, jumlah peserta meningkat dari 356.840 menjadi 430.925, atau tumbuh sebanyak 20,76% (y-on-y). Secara total, kenaikan terbesar terjadi di Jakarta Timur yang bertambah 22.736 peserta, diikuti Jakarta Barat 16.683 peserta. Jakarta Utara dan Jakarta Selatan juga menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi, masing-masing sekitar 21,88% dan 19,06%. Sementara itu, secara persentase, Jakarta Pusat mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 32,09%, disusul Kepulauan Seribu sekitar 23,14%, meskipun secara total relatif kecil. Dilihat dari distribusi tahun 2024, Jakarta Timur masih menjadi wilayah dengan jumlah peserta KB aktif terbanyak, sekitar 47,83 kali lebih banyak dibandingkan Kepulauan Seribu sebagai wilayah dengan jumlah peserta terendah, serta hampir lima kali lebih besar dibandingkan Jakarta Pusat.

Gambar 5.202. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di DKI Jakarta Tahun 2022-2024



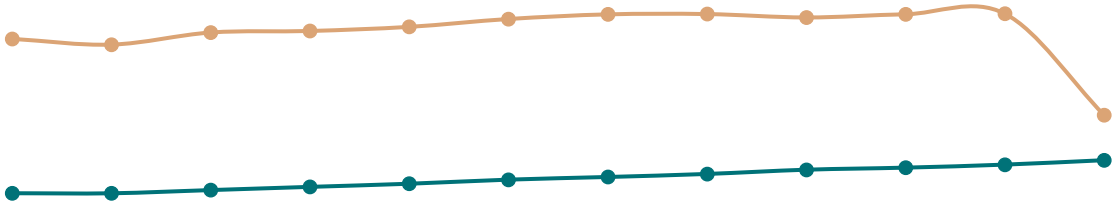
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2022	77,75	75,61	74,92	75,59	74,43	64,21
2023	79,02	75,33	75,77	76,60	76,18	65,08
2024	79,02	73,33	75,77	76,60	76,18	65,08

Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Pada periode 2022-2024, IPG di DKI Jakarta secara umum menunjukkan kecenderungan stabil dengan variasi antarwilayah. Jakarta Pusat secara konsisten mencatat nilai IPG tertinggi, meningkat dari tahun 2022 hingga 2024. Jakarta Selatan dan Jakarta Timur juga memperlihatkan peningkatan dari tahun 2022 ke 2023, masing masing naik menjadi 76,60 dan 76,18, kemudian bertahan pada level yang sama di tahun 2024. Jakarta Barat

mengalami kenaikan pada tahun 2023 dari tahun sebelumnya, kemudian tetap stabil hingga tahun 2024. Sementara itu, Kepulauan Seribu meningkat dari 64,21 pada tahun 2022 menjadi 65,08 pada tahun 2023 dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2024. Berbeda dengan wilayah lain, Jakarta Utara mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024, setelah sebelumnya berada pada kisaran 75,61 pada tahun 2022. Penurunan ini menyebabkan kesenjangan antarwilayah pada tahun 2024 menjadi lebih terlihat. Dilihat dari distribusi tahun 2024, selisih antara wilayah dengan IPG tertinggi yakni Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu sebagai wilayah terendah, mencapai sekitar 13,94 poin. Secara umum, perkembangan IPG di DKI Jakarta selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang cenderung stabil dengan perbaikan pada beberapa wilayah.

Gambar 5.203. Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif menurut Bulan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

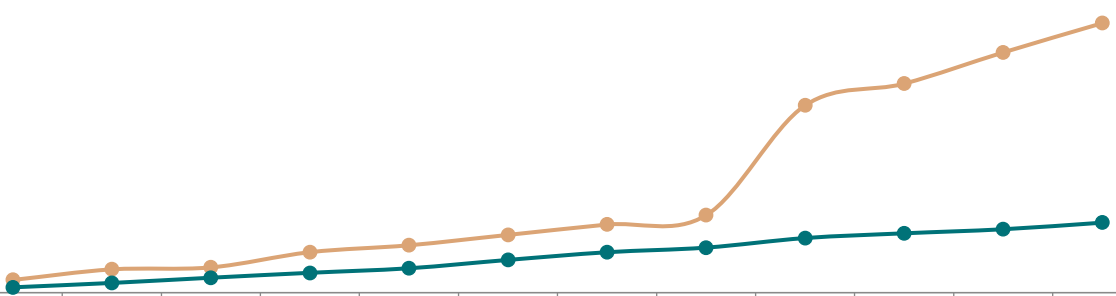


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2023	971.892	949.113	997.305	1.003.331	1.019.769	1.051.006	1.069.437	1.070.627	1.057.142	1.069.779	1.072.049	668.683
2024	357.547	357.398	370.157	382.965	395.444	411.775	422.349	434.437	451.328	459.593	471.638	489.276

Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Perkembangan peserta KB di DKI Jakarta menunjukkan dinamika berbeda antara tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, jumlah peserta KB aktif meningkat dari Januari hingga November, sebelum turun signifikan pada Desember. Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah peserta aktif menunjukkan tren peningkatan yang lebih stabil sepanjang tahun, dengan pertumbuhan dari Januari hingga Desember sebesar 36,84% dalam satu tahun. Meskipun demikian, secara kumulatif tahunan jumlah peserta KB aktif tahun 2024 tercatat lebih rendah dibandingkan 2023, dengan selisih sebesar 58,30%.

Gambar 5.204. Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) Baru menurut Bulan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

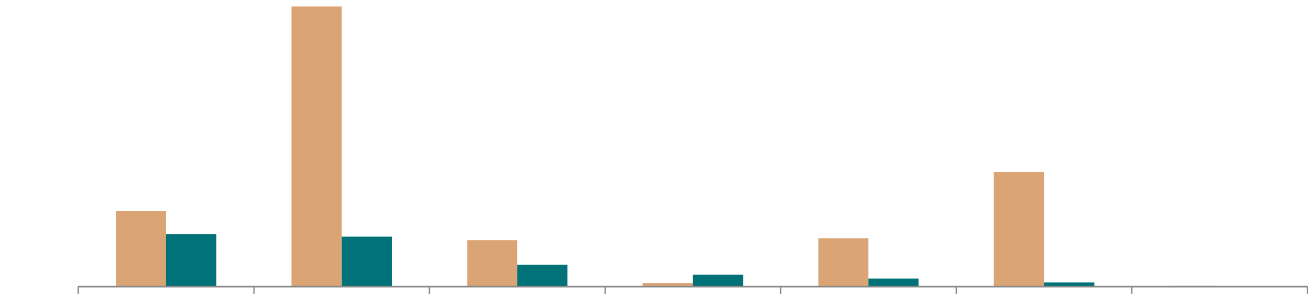


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2023	8.523	15.711	17.053	27.383	32.076	39.125	46.158	52.414	127.027	141.844	163.030	182.916
2024	3.386	6.370	9.926	13.269	16.350	22.037	27.266	30.411	36.919	40.150	42.906	47.400

Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Pola serupa juga terlihat pada peserta KB baru. Tahun 2023 mencatat lonjakan tajam terutama pada triwulan akhir, dengan jumlah peserta baru meningkat dari 8.523 pada Januari menjadi 182.916 pada Desember. Adapun pada 2024, pertumbuhan berlangsung lebih bertahap dari 3.386 pada Januari menjadi 47.400 pada Desember. Namun secara *year-on-year*, jumlah peserta KB baru 2024 (296.390) lebih rendah sekitar 65,26% dibandingkan tahun 2023.

Gambar 5.205. Peserta Keluarga Berencana Baru menurut Metode Kontrasepsi di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

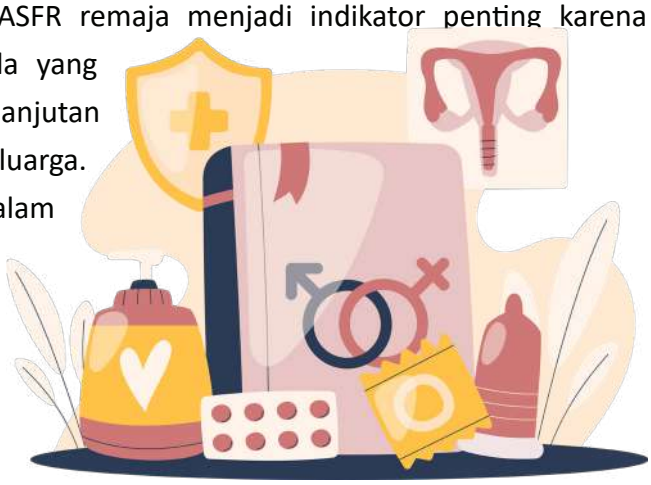


	IUD	Suntik	Implan	MOW	Kondom	Pil	MOP
2023	24.287	90.121	14.951	1.038	15.522	36.852	145
2024	16.880	16.010	6.967	3.719	2.505	1.281	51

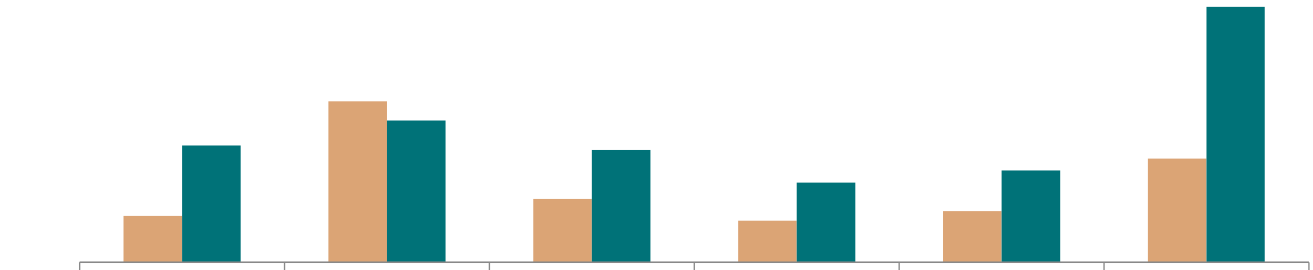
Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2023, metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh peserta KB baru adalah suntuk suntik, mencakup 49,27% dari total peserta KB baru tahun tersebut. Sebaliknya, metode kontrasepsi MOP menjadi yang paling sedikit digunakan dengan hanya 0,08% dari total peserta. Sementara itu, pada tahun 2024 terjadi perubahan komposisi yang cukup signifikan. Metode IUD menjadi yang terbanyak, sedikit lebih tinggi dibanding suntik dengan selisih 870 peserta. Secara umum, seluruh metode mengalami penurunan jumlah peserta dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan penurunan total peserta KB baru secara tahunan. Penurunan paling tajam terjadi pada metode suntik dan pil, sedangkan metode kontrasepsi MOW justru meningkat hingga 258,29%.

Setelah melihat distribusi KB baru menurut metode kontrasepsi, *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) menjadi parameter yang relevan dalam mengevaluasi efektivitas program pengendalian kelahiran, khususnya pada kelompok umur 15-19 tahun. ASFR remaja menjadi indikator penting karena mencerminkan tingkat kelahiran pada usia muda yang berimplikasi terhadap kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, serta kualitas pembangunan keluarga. Pengendalian fertilitas remaja juga tertera dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta kebijakan kesehatan reproduksi remaja yang didorong oleh BKKBN.



Gambar 5.206. *Age Specific Fertility Rate* (Kelompok Umur 15-19 Tahun) di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	3,80	13,20	5,20	3,40	4,20	8,50
2024	9,57	11,63	9,20	6,54	7,54	20,97

Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data tahun 2023-2024, terjadi dinamika yang cukup signifikan antarwilayah di DKI Jakarta. Pada tahun 2023, ASFR kelompok umur 15-19 tahun tertinggi tercatat di Jakarta Utara, diikuti Kepulauan Seribu, sedangkan Jakarta Selatan menjadi wilayah terendah. Namun pada tahun 2024, pola ini berubah. Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan ASFR remaja tertinggi, dengan lonjakan sebesar 146,71% secara year on year. Jakarta Pusat turut mengalami peningkatan signifikan, dengan kenaikan sebesar 151,84%, sementara Jakarta Barat naik sekitar 76,92%. Di sisi lain, Jakarta Utara justru mengalami penurunan sebanyak 11,89%, meskipun masih tergolong tinggi dibanding wilayah lain.

Gambar 5.207. Jumlah Keluarga yang Diintervensi Kesenjangan Gender dan Anak



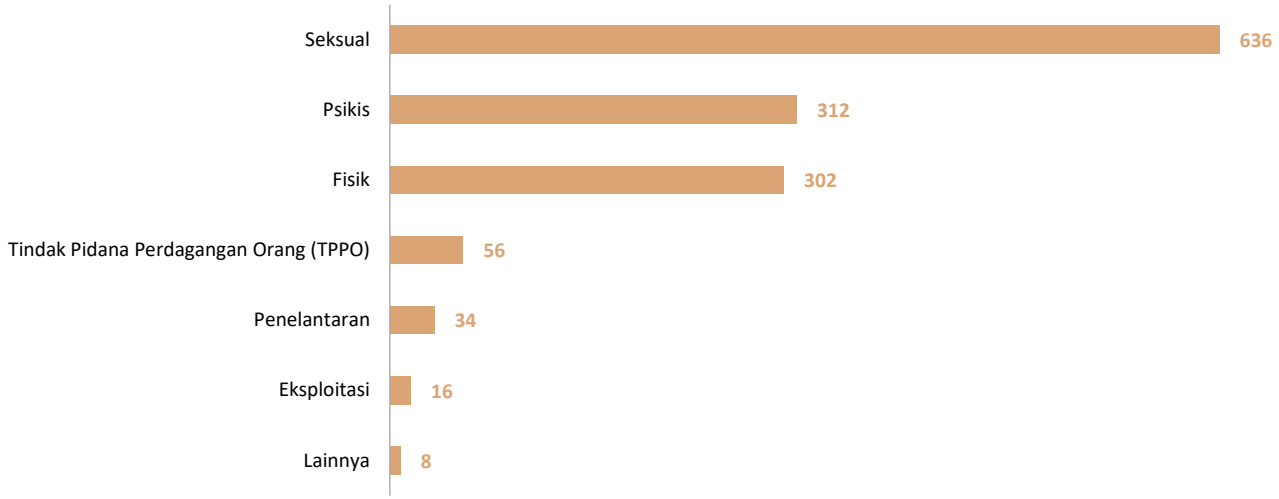
	Kepala Keluarga yang Memiliki Kesenjangan Gender dan Anak	Kepala Keluarga yang Diintervensi Permasalahan Kesenjangan Gender dan Anak
2023	3.156	3.156
2024	3.807	3.807

Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2023 tercatat lebih dari tiga ribu kepala keluarga yang memiliki permasalahan kesenjangan gender dan anak, dan seluruhnya telah diintervensi pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, jumlah tersebut meningkat, atau bertambah sebanyak 651 keluarga dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini setara dengan pertumbuhan sekitar 20,63% secara year-on-year. Konsistensi antara jumlah keluarga yang teridentifikasi dan jumlah yang diintervensi pada kedua tahun tersebut menunjukkan bahwa cakupan intervensi mencapai 100%, sehingga seluruh kasus yang terdata telah mendapatkan penanganan. Intervensi terhadap keluarga pada dasarnya merupakan langkah hulu dalam pencegahan, namun efektivitasnya juga perlu dibaca berdampingan dengan data kekerasan terhadap anak sebagai

indikator hilir. Pendekatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa negara dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak dari berbagai bentuk kekerasan. Selain itu, kebijakan nasional mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga diperkuat melalui kerangka kerja KemenPPPA, yang mendorong upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban secara terintegrasi[51].

Gambar 5.208. Jumlah Kekerasan Terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan yang Dialami di DKI Jakarta Tahun 2024



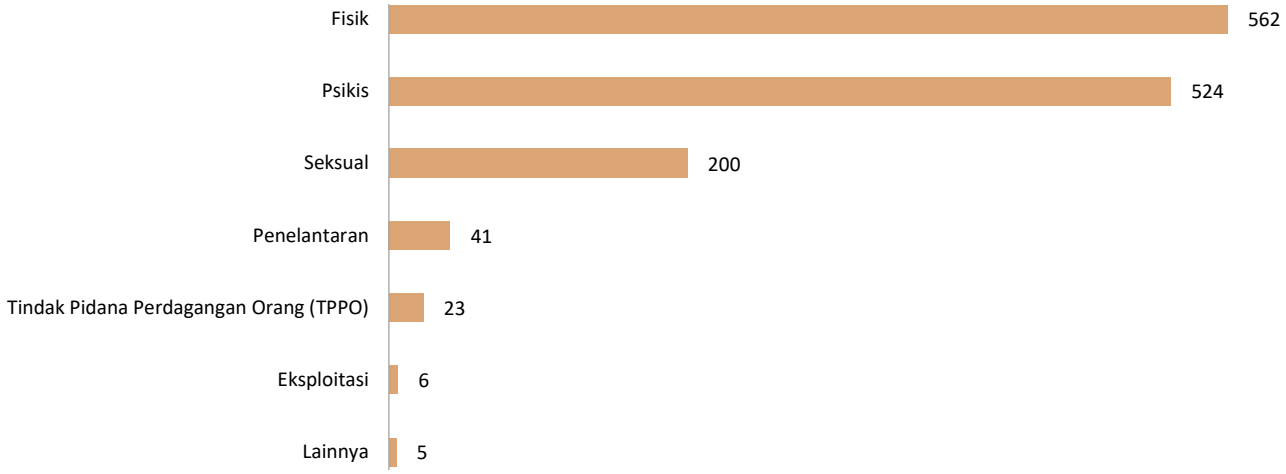
Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)

Berdasarkan data yang tercatat pada tahun 2024, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan yang paling banyak dialami anak di DKI Jakarta, sebanyak 46,63% dari total 1.364 kasus yang tercatat. Disusul kekerasan psikis sebesar 22,87%, dan kekerasan fisik 22,14%. Sementara itu, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tercatat 4,11%, penelantaran 2,49%, eksploitasi 1,17%, dan kategori lainnya sebanyak 0,6% dari total kasus tercatat. Komposisi ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari total kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2024 merupakan kekerasan seksual, sehingga menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah. Dominasi kekerasan seksual dan tingginya angka kekerasan psikis serta fisik memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak hanya memerlukan intervensi berbasis keluarga, tetapi juga penguatan sistem pelaporan, penegakan hukum, serta layanan rehabilitasi korban. Hal ini juga selaras dengan mandat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memperluas perlindungan hukum dan mekanisme pemulihan bagi korban, termasuk anak. Serta sejalan dengan Peraturan Pemerintahlah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual[52].

51 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). ”KemenPPPA: Respon Cepat, Kolaboratif, dan Pemulihan Korban pada Penanganan Kasus Kekerasan”. https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemenpppa-respons-cepat-kolaboratif-dan-pemulihan-korban-pada-penanganan-kasus-kekerasan#:~:text=Ke%20depan%2C%20KemenPPPA%20akan%20terus,kita%2C%E2%80%9D%20tutup%20Menteri%20PPPA. (Sabtu, 21 Februari 2026, 22.37 WIB)

52 JDIH Kemen PPPA. https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-pemerintah-nomor-30-tahun-2025, (Sabtu, 21 Februari 2026. 22.50 WIB)

Gambar 5.209. Jumlah Korban Terhadap Perempuan Dewasa menurut Jenis Kekerasan yang Dialami di DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)

Sejalan dengan tingginya kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2024, data kekerasan terhadap perempuan dewasa di DKI Jakarta menunjukkan pola yang juga memerlukan perhatian serius. Namun, berbeda dengan pola kekerasan terhadap anak yang didominasi kekerasan seksual, pada perempuan dewasa kekerasan fisik dan psikis menjadi bentuk yang paling dominan, dengan kontribusi gabungan mencapai 79,79% dari total kasus. Kekerasan fisik menjadi jenis kekerasan yang paling banyak dialami perempuan dewasa di DKI Jakarta pada tahun 2024, dengan 41,29% kasus dari total keseluruhan. Disusul kekerasan psikis sebesar 38,50%, dan kekerasan seksual 14,70% kasus dari total. Sementara itu, kasus penelantaran tercatat 3,01% kasus, TPPO sebanyak 1,69% kasus, eksploitasi 0,44% kasus, dan kategori lainnya 0,37% kasus dari total keseluruhan.

Gambar 5.210. Persentase Pembinaan kepada Perempuan dan Anak dalam Keluarga untuk Meningkatkan Kualitas Keluarga

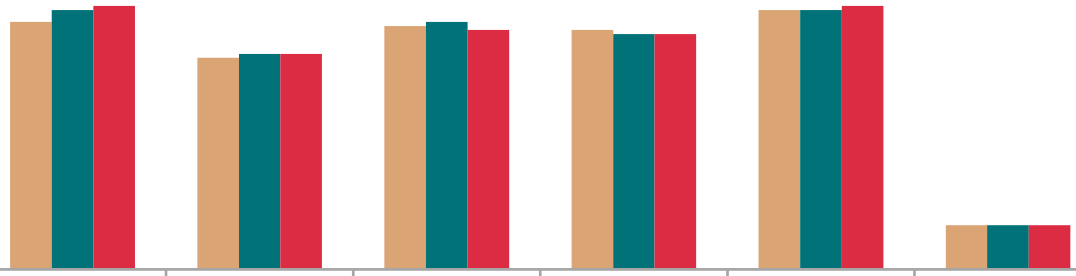


	Jumlah Perempuan dan Anak dalam Keluarga Pra Sejahtera dapat Pembinaan	Jumlah Perempuan dan Anak dalam Keluarga Pra Sejahtera
2023	196.638	113.316
2024	83.767	418.831

Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Jumlah penerima pembinaan pada tahun 2024 menurun hingga 57,40% dibandingkan tahun 2023. Sebaliknya, jumlah perempuan dan anak dalam keluarga pra sejahtera meningkat tajam sekitar 269,61%. Dampaknya, cakupan pembinaan terhadap total sasaran mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, cakupan pembinaan secara nominal sangat tinggi, sedangkan pada tahun 2024 proporsi penerima pembinaan terhadap total sasaran menjadi jauh lebih kecil.

Gambar 5.211. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa di DKI Jakarta



	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
Semester I 2024	62	53	61	60	65	11
Semester II 2024	65	54	62	59	65	11
Semester I 2025	66	54	60	59	66	11

Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Kehidupan remaja adalah kehidupan yang kompleks, menarik, dan memerlukan arahan yang baik agar mereka mempunyai masa depan yang lebih baik dan mempunyai peran serta di kehidupan masyarakat. menurut Bank Dunia, tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangan remaja pada masa sosial dibagi ke dalam lima transisi yaitu :

- Melanjutkan sekolah *(Continue Learning)*
- Mencari pekerjaan *(Start Working)*
- Memulai kehidupan berkeluarga *(From Families)*
- Menjadi anggota masyarakat *(exercise citizenship)*
- Mempraktikkan hidup sehat *(Practice Healty Life).*

Peran PIK (Pusat Informasi dan Konseling) Remaja/Mahasiswa adalah membantu remaja/mahasiswa untuk memperoleh informasi dan pelayanan konseling yang cukup dan benar mengenai persiapan kehidupan dalam 5 transisi diatas. Tujuan umum dari pelaksanaan PIK Remaja/Mahasiswa adalah mengedukasi tentang usia perkawinan, 8 fungsi keluarga, TRIAD KKR (Seksualitas, HIV, AIDS, serta NAPZA), keterampilan hidup *(Life skills)* seperti keahlian untuk bekerja, memasak, dll.

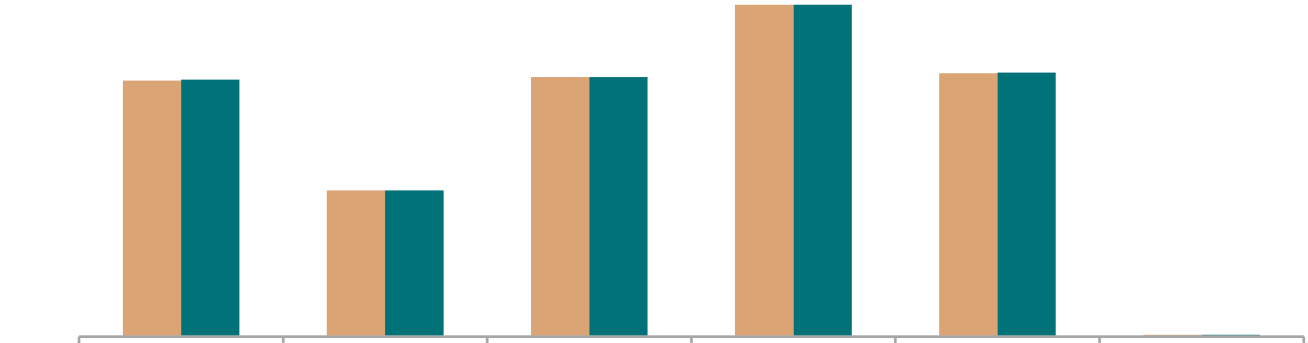
Dari data dan grafik diatas menggambarkan tren flukutasi dan konsistensi nilai dari cakupan remaja yang termasuk PIKR/Mahasiswa di sebaran wilayah DKI Jakarta sepanjang tahun 2024-2025. Untuk wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur mengalami tren peningkatan sepanjang semester I dan II sebanyak masing-masing 1 dan 2 remaja yang masuk dalam cakupan tersebut. Berbeda dengan wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan yang turun sebanyak 1 remaja tiap semesternya. Dan wilayah Kepulauan Seribu yang tetap konstan sebanyak 11 remaja yang termasuk bagian cakupan PIKR/Mahasiwa. Secara keseluruhan, data tersebut mengindikasikan peran PIK Remaja dan Mahasiswa dalam membina dan mengedukasi remaja di wilayah DKI Jakarta semakin baik dan optimal guna menghasilkan remaja yang tangguh dan siap dalam menjalankan transisi pertumbuhan dan perkembangan pada masa sosial sesuai kaidah Bank Dunia di wilayah DKI Jakarta.



5.10. Perpustakaan dan kearsipan

Perpustakaan dan kearsipan merupakan bagian penting dari infrastruktur pelayanan publik yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian pengetahuan, serta penguatan literasi masyarakat. Hal ini turut didasari pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Keberadaan perpustakaan, baik di lingkungan pendidikan, tempat ibadah, maupun perguruan tinggi, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan akses terhadap sumber informasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks Provinsi DKI Jakarta, distribusi dan perkembangan jumlah perpustakaan menjadi indikator awal untuk melihat sejauh mana fasilitas literasi tersedia dan tersebar di seluruh wilayah administrasi.

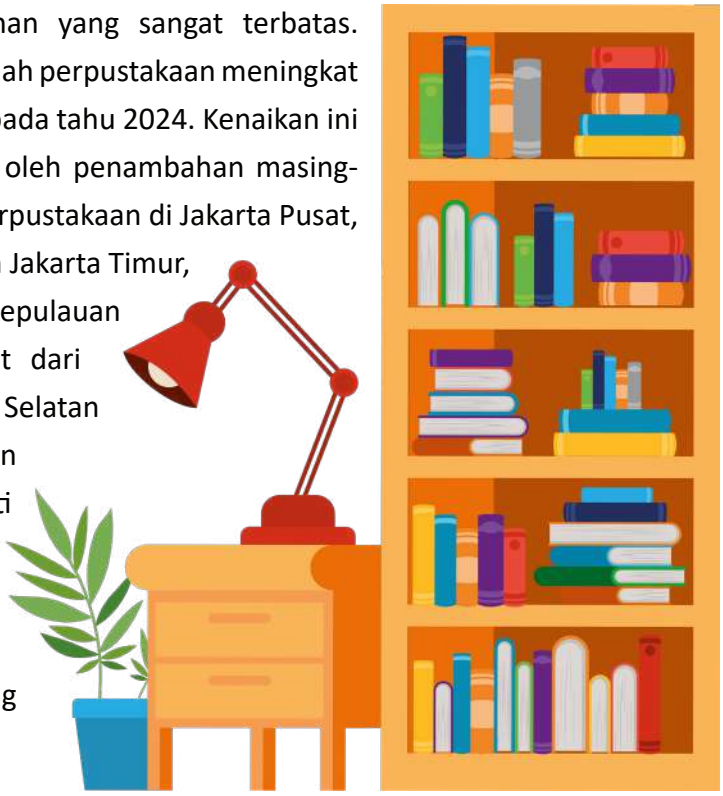
Gambar 5.212. Jumlah Perpustakaan Sekolah, Ibadah, dan Perguruan Tinggi di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



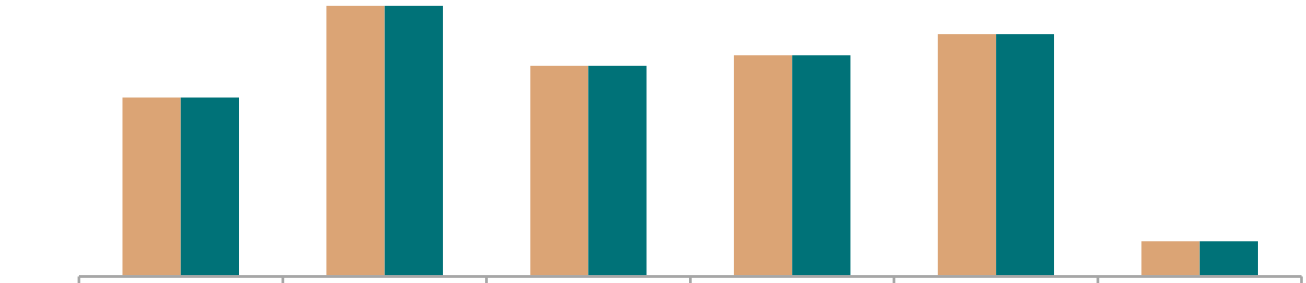
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	282	161	286	437	290	2
2024	283	161	286	438	291	2

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Jumlah perpustakaan sekolah, ibadah, dan perguruan tinggi di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2023-2024 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan pertumbuhan yang sangat terbatas. Secara agregat, jumlah perpustakaan meningkat tipis sekitar 0,21% pada tahu 2024. Kenaikan ini terutama didorong oleh penambahan masing-masing satu unit perpustakaan di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, sementara Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu tidak mengalami perubahan. Dilihat dari distribusi wilayah pada tahun 2024, Jakarta Selatan tetap menjadi kontributor terbesar dengan 29,98% unit dari total perpustakaan, diikuti Jakarta Timur 19,92%, Jakarta Barat 19,58%, dan Jakarta Pusat 19,37%. Sementara itu Jakarta Utara menyumbang sekitar 11,02% dan Kepulauan Seribu memiliki proporsi yang sangat kecil, yakni hanya 0,14%.



Gambar 5.213. Jumlah Perpustakaan Umum di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

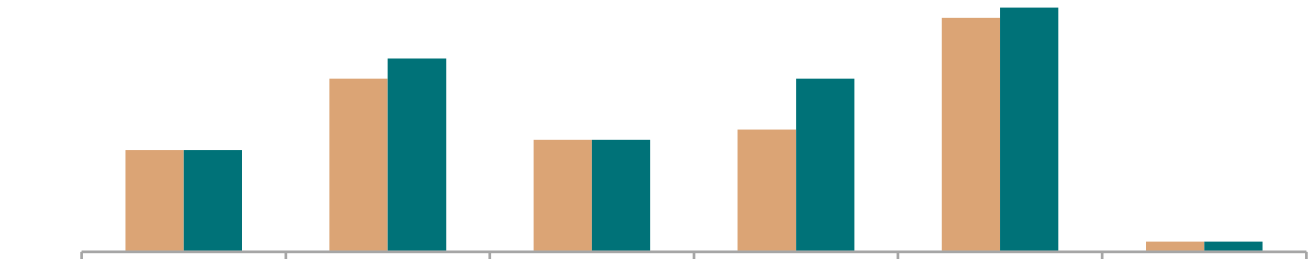


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	51	79	60	63	69	10
2024	51	79	60	63	69	10

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Jumlah perpustakaan umum di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2023-2024 menunjukkan kondisi yang sepenuhnya stagnan tanpa adanya penambahan maupun pengurangan unit. Total perpustakaan umum tercatat tetap sebanyak 332 unit selama dua tahun ke belakang, yang mengindikasikan tidak adanya ekspansi fisik layanan perpustakaan umum dalam periode pengamatan. Dari sisi distribusi wilayah pada tahun 2024, Jakarta Utara memiliki jumlah perpustakaan umum terbanyak dengan 23,80% unit dari total keseluruhan. Diikuti Jakarta Timur 20,78%, Jakarta Selatan 18,98%, Jakarta Barat 18,07%, dan Jakarta Pusat 15,36%. Kepulauan Seribu meskipun secara absolut hanya memiliki 10 unit, berkontribusi sekitar 3,01% dan menunjukkan pentingnya keberadaan perpustakaan umum sebagai fasilitas literasi dasar di wilayah kepulauan.

Gambar 5.214. Jumlah Taman Bacaan Masyarakat di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

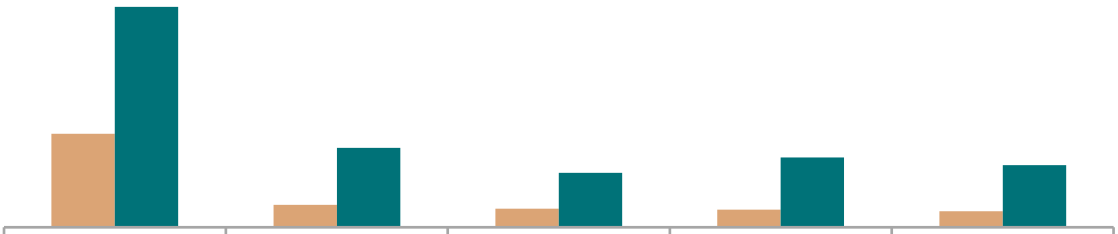


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	10	17	11	12	23	1
2024	10	19	11	17	24	1

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Secara keseluruhan, jumlah TBM meningkat sebanyak 10,81%. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan jumlah TBM di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara, dengan masing-masing bertambah 5 unit dan 2 unit, yang mencerminkan penguatan inisiatif literasi berbasis komunitas di wilayah tersebut. Sementara itu, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu tidak mengalami perubahan jumlah TBM selama periode pengamatan. Dilihat dari distribusi wilayah pada tahun 2024, Jakarta Timur menjadi wilayah dengan jumlah TBM terbesar, yaitu sekitar 29,27% dari total TBM, diikuti Jakarta Utara 23,17%, dan Jakarta Selatan 20,73%. Adapun Jakarta Pusat dan Jakarta Barat masing-masing 12,20% dan 13,41%, sedangkan Kepulauan Seribu memiliki proporsi paling kecil, yaitu 1,22%.

Gambar 5.215. Jumlah Judul Buku dan Eksemplar berdasarkan Wilayah di Perpustakaan DKI Jakarta Tahun 2024

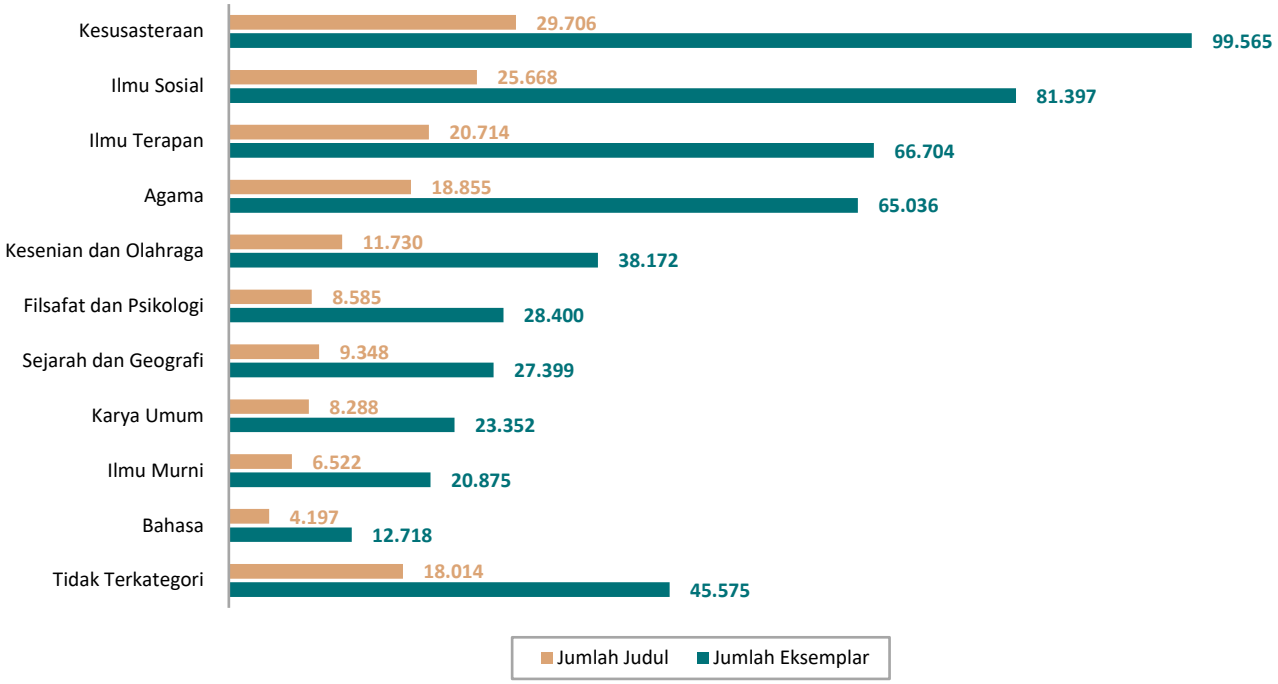


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
Jumlah Judul	89.734	21.652	17.724	17.020	15.497
Jumlah Eksemplar	254.137	76.252	52.193	66.969	59.642

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Koleksi perpustakaan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 menunjukkan konsentrasi yang cukup tinggi di wilayah tertentu, terutama Jakarta Pusat. Dari total 161.627 judul buku, 55,52% di antaranya berada di Jakarta Pusat, yang juga menampung 49,91% eksemplar dari total. Sebaliknya, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat masing-masing hanya menguasai kisaran 9,59%-10,97% judul buku, meskipun secara demografis wilayah-wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk yang lebih besar.

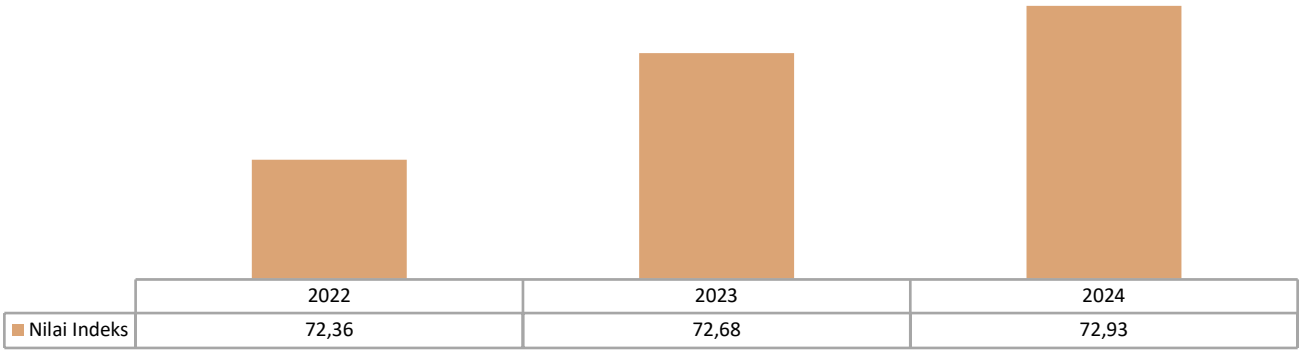
Gambar 5.216. Jumlah Judul Buku dan Eksemplar berdasarkan Jenis Buku di Perpustakaan DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Kesusastraan menjadi kategori terbesar dengan 18,38% total buku yang ada, dan 19,55% dari total eksemplar. Diikuti oleh Ilmu Sosial yang mencakup 15,88% judul dari total yang ada, dan 15,99% eksemplar. Sementara itu, kategori Ilmu Terapan dan Agama juga menempati posisi signifikan, masing-masing menyumbang lebih dari 12,00% judul buku. Namun, masih ada proporsi kategori tertentu yang lebih kecil, seperti Bahasa dan Ilmu Murni yang berkontribusi kurang dari 5,00% judul.

Gambar 5.217. Nilai Indeks Tingkat Kegemaran Membaca di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024



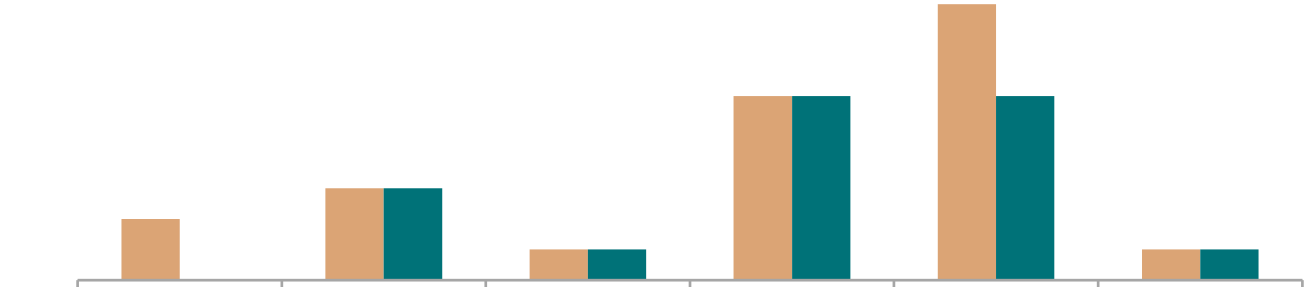
	2022	2023	2024
Nilai Indeks	72,36	72,68	72,93

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan nilai indeks Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Provinsi DKI Jakarta tahun 2022-2024, terlihat tren peningkatan yang konsisten. Nilai TGM meningkat dari 72,36 pada 2022 menjadi 72,93 pada 2024, atau bertambah sekitar 0,57 poin dalam dua tahun, setara dengan 0,79%.

Secara tahunan, laju peningkatan TGM relatif stabil, dengan kenaikan 0,44% dari 2022 ke 2023, dan 0,34% dari 2023 ke 2024. Dengan demikian, meskipun peningkatannya tidak signifikan secara numerik, tren positif ini menegaskan peran ekosistem perpustakaan dan literasi sebagai faktor pendukung penting dalam membangun budaya baca masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 5.218. Jumlah Komunitas Perpustakaan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



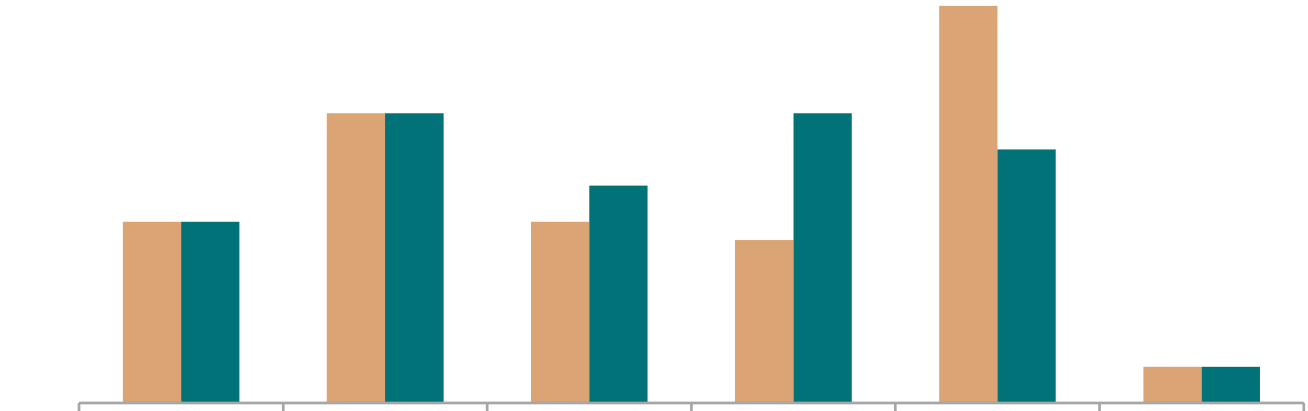
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	2	3	1	6	9	1
2024	0	3	1	6	6	1

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKi jakarta

Peran komunitas dalam penguatan ekosistem literasi di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan pada periode 2023-2024. Jumlah komunitas perpustakaan secara agregat menurun sebesar 22,73%. Penurunan paling mencolok terjadi di Jakarta Timur yang berkurang sekitar 33,33%, serta Jakarta Pusat yang tidak lagi tercatat memiliki komunitas aktif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan komunitas literasi masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjaga konsistensi aktivitas dan dukungan kelembagaan.



Gambar 5.219. Jumlah Taman Bacaan Masyarakat di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

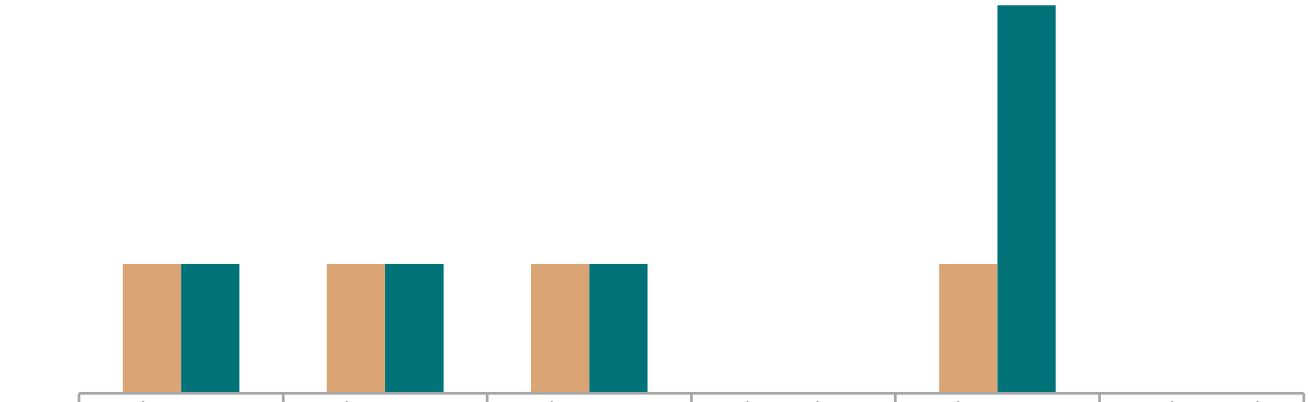


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	10	16	10	9	22	2
2024	10	16	12	16	14	2

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Di sisi lain, keberadaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) menunjukkan perkembangan yang relatif beragam antarwilayah. Secara total, jumlah TBM meningkat sekitar 1,45%. Peningkatan signifikan terjadi di Jakarta Selatan, yang hampir dua kali lipatnya dengan kenaikan sebesar 77,78%, sementara Jakarta Timur justru mengalami penurunan sebanyak 36,36%.

Gambar 5.220. Jumlah Perpustakaan Berbasis Teknologi di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

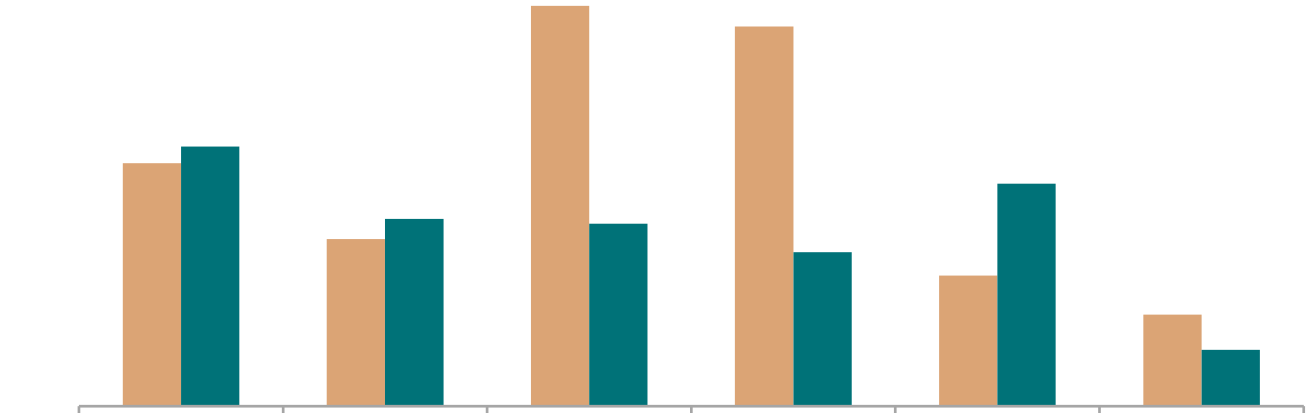


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	1	1	1	0	1	0
2024	1	1	1	0	3	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Transformasi layanan perpustakaan berbasis teknologi juga mulai terlihat, meskipun skalanya masih terbatas. Jumlah perpustakaan berbasis teknologi meningkat hingga 50,00%, dengan penambahan seluruhnya terjadi di Jakarta Timur. Konsentrasi ini mencerminkan adanya fokus pengembangan layanan digital di wilayah tertentu, namun sekaligus menunjukkan perlunya perluasan transformasi teknologi agar tidak menimbulkan kesenjangan layanan antarwilayah.

Gambar 5.221. Jumlah Pengguna Jasa Perpustakaan Keliling di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

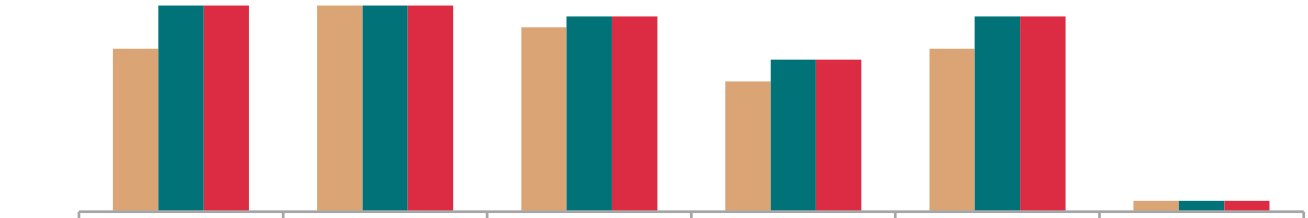


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	187.950	129.361	309.808	293.861	101.038	71.023
2024	200.937	144.991	141.179	119.298	172.288	43.750

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKi Jakarta

Dari sisi jangkauan layanan aktif, jumlah pengguna jasa perpustakaan keliling mengalami penurunan cukup tajam. Total pengguna turun hingga 24,76% secara year on year. Penurunan terbesar terjadi di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, masing-masing mengalami penurunan 54,43% dan 59,40%, sementara Jakarta Timur justru mengalami kenaikan sekitar 70,52%. Dari perubahan ini, terlihat pergeseran pola kebutuhan layanan, sekaligus memperlihatkan bahwa efektivitas perpustakaan keliling sangat bergantung pada strategi wilayah dan intensitas operasional.

Gambar 5.222. Daftar Armada Perpustakaan Keliling di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024

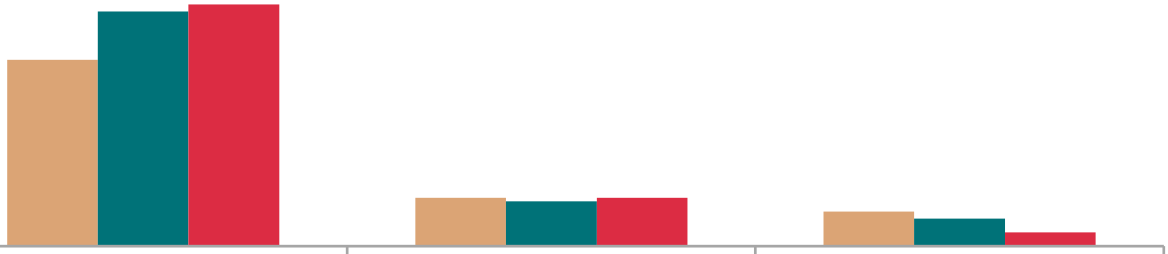


	Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat	Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Utara	Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Barat	Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Selatan	Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Timur	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
2022	15	19	17	12	15	1
2023	19	19	18	14	18	1
2024	19	19	18	14	18	1

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKi Jakarta

Perkembangan perpustakaan keliling di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan penguatan kapasitas pada tahun 2023 yang kemudian dijaga stabil hingga 2024. Dibandingkan tahun 2022, hampir seluruh Suku Dinas (Sudin) mengalami penambahan armada pada tahun 2023. Jakarta Pusat mencatat kenaikan paling besar dengan penambahan 4 unit, disusul Jakarta Timur yang naik 3 unit, dan Jakarta Selatan yang bertambah 2 unit. Jakarta Barat meningkat lebih sedikit, sementara Jakarta Utara dan armada di tingkat provinsi tidak mengalami perubahan. Memasuki tahun 2024, jumlah armada tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023 di seluruh wilayah.

Gambar 5.223. Daftar Kondisi Kendaraan Armada Perpustakaan Keliling di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024

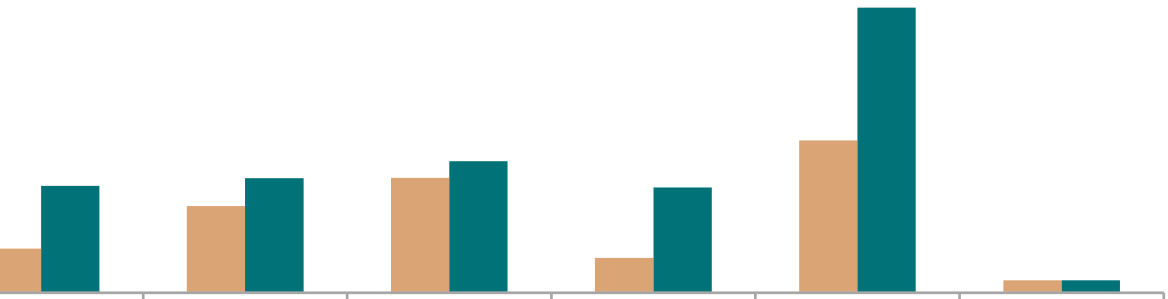


	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan
2022	54	14	10
2023	68	13	8
2024	70	14	4

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Sejalan dengan stabilnya jumlah armada, kondisi kendaraan menunjukkan tren perbaikan kualitas. Proporsi kendaraan dalam kondisi baik meningkat signifikan dari 2022 ke 2023, bertambah 14 unit. Pada periode yang sama, jumlah kendaraan rusak berat dan rusak ringan justru menurun, masing-masing berkurang 1 unit dan 2 unit. Pada tahun 2024, tren positif terus berlanjut, dengan jumlah kendaraan dalam kondisi baik kembali meningkat 2 unit, sementara kendaraan rusak ringan turun tajam hingga 50.00% dibandingkan 2023. Meski kendaraan rusak berat mengalami sedikit kenaikan, secara keseluruhan komposisi armada menunjukkan pergeseran ke arah kondisi yang lebih layah operasional, yang mendukung keberlanjutan layanan perpustakaan keliling secara lebih andal dan merata.

Gambar 5.224. Jumlah Pengunjung Perpustakaan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



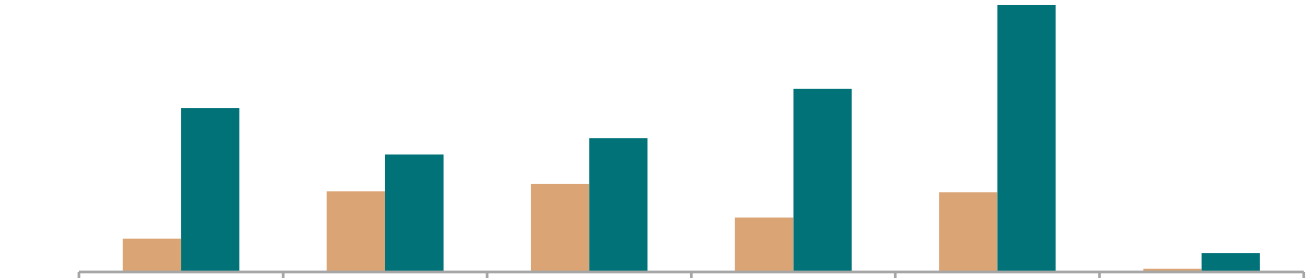
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	218.299	428.589	568.503	173.897	753.018	63.001
2024	528.702	567.362	650.048	521.089	1.498.400	62.886

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Sebaliknya, tingkat pemanfaatan fasilitas perpustakaan justru menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan. Jumlah pengunjung perpustakaan meningkat hingga 73,60%. Jakarta Timur menjadi kontributor utama dengan lonjakan hingga 98,99%, sekaligus menyumbang sekitar 39,14% pengunjung di tahun 2024 tersebut.



Gambar 5.225. Jumlah Anggota Perpustakaan di DKI Jakarta Tahun 2023-2024

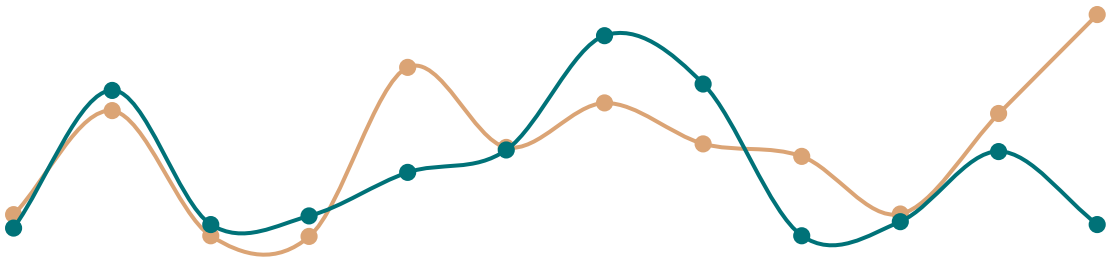


	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
2023	9.366	22.754	24.836	15.323	22.435	873
2024	46.206	33.112	37.712	51.569	75.243	5.341

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Total anggota meningkat dari 95.587 orang menjadi 249.183 orang, atau melonjak hingga 160,69%. Jakarta Timur mencatat jumlah anggota terbesar dengan menyumbang hingga 30,20% dari total, disusul Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Lonjakan ini memperlihatkan keterikatan masyarakat terhadap layanan perpustakaan secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran perpustakaan sebagai bagian penting dalam ekosistem literasi di Provinsi DKI Jakarta. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai sumber data historis, melainkan juga sebagai instrumen pelayanan publik yang mendukung administrasi, edukasi, serta pelindungan memori kolektif masyarakat.

Gambar 5.226. Jumlah Masyarakat yang Dilayani Terkait dengan Kearsipan Baik Konsultasi Arsip, Penyelamatan Arsip, serta Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip di DKI Jakarta Tahun 2024-Juli 2025

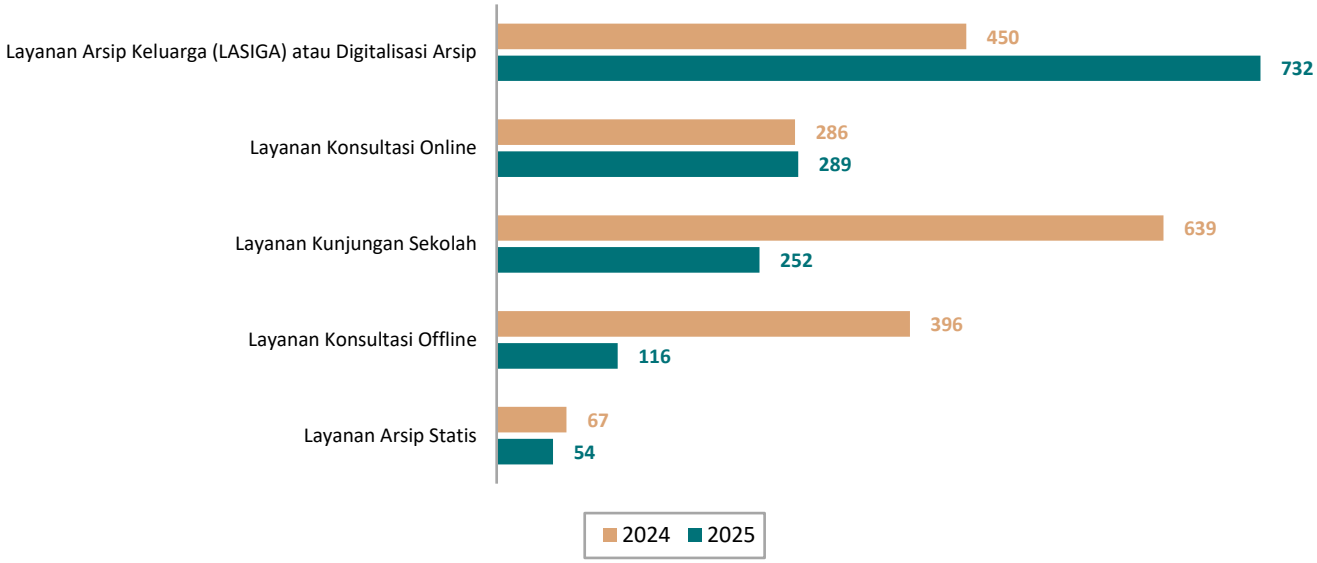


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2024	56	204	26	25	266	152	215	157	139	57	200	341
2025	37	233	42	54	116	148	311	242	26	46	146	42

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Pelayanan kearsipan kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2024 hingga Juli 2025 menunjukkan dinamika permintaan yang cukup fluktuatif, namun dengan kecenderungan intensitas layanan yang tetap tinggi. Sepanjang tahun 2024, jumlah masyarakat yang dilayani mencapai 1.838 orang, dengan puncak pelayanan terjadi pada Desember dan Mei, yang secara bersama-sama menyumbang sekitar 29,43% dari total layanan tahunan. Memasuki tahun 2025 (Januari-Juli), jumlah masyarakat yang dilayani tercatat sebanyak 941 orang, dengan lonjakan terjadi di bulan Juli sebanyak 33m05% dari total layanan tahun berjalan.

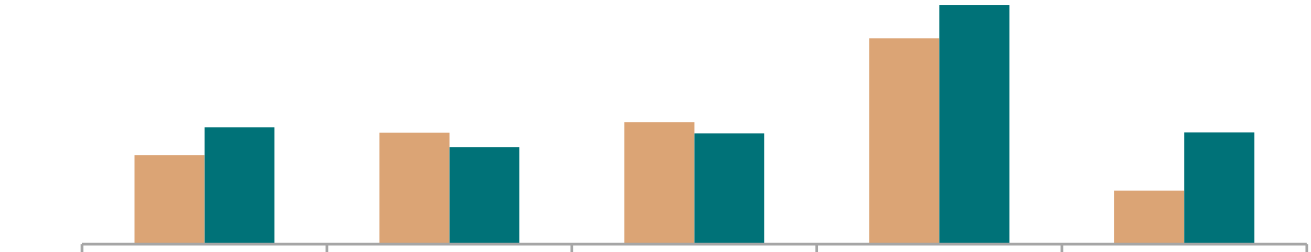
Gambar 5.227. Jumlah Jenis Layanan Masyarakat yang Dilayani Terkait dengan Kearsipan Baik Konsultasi Arsip, Penyelamatan Arsip, serta Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip di DKI Jakarta Tahun 2024-Juli 2025



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Layanan kunjungan sekolah menjadi yang paling banyak diberikan, sekitar 34,77% dari total layanan, diikuti Layanan Arsip Keluarga (LASIGA) dan digitalisasi arsip sebanyak 24,48%, dan layanan konsultasi offline dan online yang secara kumulatif mencapai 37,11%. Pada periode Januari-Juli 2025, meskipun total jenis layanan menurun seiring dengan periode waktu yang lebih pendek, Layanan Arsip Keluarga (LASIGA) tetap menjadi layanan dominan dengan 46,76% layanan daro total yang ada.

Gambar 5.228. Daftar Titik Layanan Perpustakaan Keliling menurut Wilayah Administrasi di DKI Jakarta Tahun 2023-2024



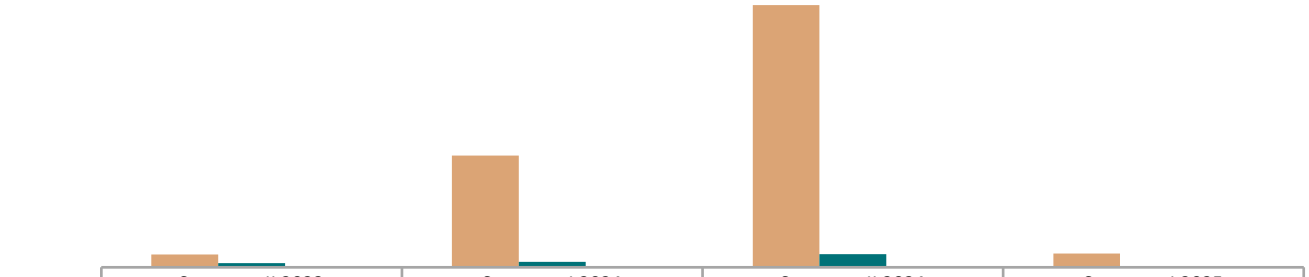
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2023	866	1.084	1.187	2.000	519
2024	1.137	943	1.078	2.850	1.087

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Pada periode 2023-2024, titik layanan Perpustakaan Keliling di DKI Jakarta menunjukkan dinamika yang berbeda antarwilayah. Jakarta Selatan konsisten menjadi wilayah dengan cakupan layanan terluas dan mencatat peningkatan paling menonjol, dengan kenaikan sebesar 42,50%. Kenaikan juga terlihat signifikan di Jakarta Timur yang hampir dua kali lipat. Sementara itu, Jakarta Pusat mengalami peningkatan sebesar 31,29%. Di sisi lain, Jakarta Utara dan Jakarta Barat justru mengalami penurunan jumlah titik, dengan pengurangan sebanyak 13,01% dan 9,18%. Seiring meningkatnya perhatian terhadap literasi dan

pengelolaan pengetahuan di DKI Jakarta, upaya menjaga dan membuka akses terhadap informasi publik juga terus diperkuat. Salah satunya melalui transformasi arsip konvensional ke bentuk digital, agar dokumen penting dapat tersimpan lebih aman, mudah diakses, dan berkelanjutan. Upaya ini juga terlihat dari adanya ARJUNA (Arsip Jakarta Mendunia), yang merupakan aplikasi digital resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dirancang oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip), dengan salah satu isu yakni mendukung kebijakan nasional Satu Data Indonesia dan SPBE untuk tata kelola pemerintahan berbasis teknologi[53].

Gambar 5.229. Jumlah Arsip Statis yang Telah Dialihmediakan ke Dalam Format Digital di DKI Jakarta Semester I Tahun 2024, Semester II Tahun 2024, Semester I Tahun 2025



	Semester II 2023	Semester I 2024	Semester II 2024	Semester I 2025
Lembar	32.432	283.335	664.971	35.199
Berkas	10.162	13.504	32.942	198
Boks	222	497	587	6

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKi Jakarta

Dibandingkan semester sebelumnya, capaian pada semester II 2024 mengalami lonjakan sangat signifikan. Jumlah arsip yang dialihmediakan meningkat lebih dari dua kali lipat, baik dari sisi lembar maupun berkas, dengan kenaikan masing-masing sekitar 134,69% dan 143,94%. Peningkatan ini juga tercermin dari jumlah boks arsip yang berhasil dialihmediakan, yang bertambah secara konsisten dibandingkan semester pertama. Sementara itu, pada semester I 2025, capaian alih media tercatat menurun cukup tajam dibandingkan periode sebelumnya. Sebagai pusat aktivitas intelektual dan budaya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan pentingnya upaya untuk memodernisasi sistem perpustakaan dan kearsipan. Melalui inisiatif pelaksanaan digitalisasi arsip statis, pemerintah melalui Dispusip Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk mempermudah akses dan distribusi informasi yang berkaitan dengan sejarah, budaya, dan perkembangan wilayahnya. Langkah maju yang dilakukan DKI Jakarta dalam digitalisasi arsip statis memberikan gambaran yang cukup signifikan. Selama tahun 2024, Dispusip DKI Jakarta mencatat terdapat 497 boks, 13.504 berkas dan 283.335 lembar arsip yang telah berhasil diubah menjadi format digital. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, digitalisasi arsip dengan satuan berkas jumlahnya meningkat 32,89%, boks meningkat 123,87%, dan yang paling signifikan adalah lembar yang meningkat hingga 773%. Hasil tersebut memperlihatkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas bagi masyarakat. Dengan banyaknya boks, berkas dan lembaran arsip yang telah dikonversi ke dalam format digital, yang mana hal tersebut menggambarkan transformasi yang signifikan.

53 Kementerian Dalam Negeri, "ARJUNA, Arsip Jakarta Mendunia", https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/detail_inovasi/152335,(Kamis, 29 Januari 2026, 08.30)

Daftar Pustaka

Al Alsyary. (2022). Open Defecation Free (ODF): *Pengelolaan Risiko Penyakit Berbasis Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan*. Jakarta.

Arief Rahadian. *Maternal Mortality and Efforts to Address it*. PKBI.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. *Pertemuan dan Pembinaan Kelompok Kegiatan PIK R/M (Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa) Sembago Arutala Triasih*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2022). *Mengenal metode baru penghitungan IDI dan membedah Indeks Demokrasi Jambi*.

Badan Pusat Statistik. (2025). *[Metode baru] Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut provinsi.*

Badan Pusat Statistik. *Detail Metadata Indikator Statistik.*

Bappenas Working Papers. *Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Demography. Encyclopedia Britannica.

Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. *Penjelasan DO Indikator Posyandu Aktif (Jakarta).*

Dorrance, G. S. (1963). *The Effect of Inflation on Economic Development (Les conséquences de l'inflation sur la croissance économique)(Los efectos de la inflación sobre el desarrollo económico). Staff Papers-International Monetary Fund,* 1-47.

Hartono, et al. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*.

International Monetary Fund. *Inflation.*

JDIH Kemen PPPA. *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

Jenny Cresswel. *Antenatal Care Coverage - at least four visits (%). World Health Organization.*

Kementerian Dalam Negeri. ARJUNA, A*rsip Jakarta Mendunia.*

Kementerian Kesehatan. Bulan Imunisasi Anak Sekolah. *Ayo Sehat Kemkes.*

Kementerian Kesehatan. Gejala Demam Berdarah yang Perlu Diwaspadai. *Ayo Sehat Kemkes.*

Kementerian Kesehatan. *Turunkan Angka Penyakit Menular Melalui STBM.*

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *International Roughness Index/IRI.*

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). K*emenPPPA: Respon Cepat, Kolaboratif, dan Pemulihan Korban pada Penanganan Kasus Kekerasan.*

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. *Jadi Penopang Kemajuan Bangsa, Kursus dan Pelatihan Berkualitas Mampu Meningkatkan Daya Saing.*

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/6477/2021 tentang *Daftar Obat Esensial Nasional.*

Keputusan Presiden (Keppres) No. 17 Tahun 2023 tentang *Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.*

Lincoln, A. (1863). *Gettysburg Address.*

OECD iLibrary. (2022). *The Role of Local Governments in Economic Development Policy.*

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang *Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 44 Tahun 2017 tentang P*engembangan Kawasan Transit Oriented Development.*

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2019 tentang *Penanggulangan Kusta.*

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 12 Tahun 2017 tentang *Penyelenggaraan Imunisasi.*

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang *Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.*

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 21 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dll.*

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2013 tentang *Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan.*

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 34 Tahun 2022 tentang *Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Dll.*

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2014 tentang *Tenaga Kesehatan.*

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 3 Tahun 2020 tentang *Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.*

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 47 Tahun 2018 tentang *Pelayanan Kegawatdaruratan.*

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2019 tentang *Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.*

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 6 Tahun 2024 tentang *Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.*

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 82 Tahun 2014 tentang *Penanggulangan Penyakit Menular.*

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 8 Tahun 2019 tentang *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.*

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.02/2020 tentang *Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Dll.*

Peraturan Presiden RI No. 48 Tahun 2023 tentang *Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2024 tentang *Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.*

Peraturan Presiden RI No. 67 Tahun 2021 tentang *Penanggulangan Tuberkulosis.*

Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI). (2024). *Kampung Siaga TBC: Langkah Nyata Melawan Tuberkulosis.*

PPID DKI Jakarta. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.*

Pusat Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Asesmen Kompetensi Minimum.*

Pusat Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Asesmen Nasional – Tahun 2025.*

S. Soemantri & Tin Afifah. (2007). Kematian Anak dan Umur Harapan Hidup di Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Media Kesehatan Vol XVII Tahun 2007.*

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Penyusunan Kebijakan Pemerintah.*

Sokoloff, K. L., & Engerman, S. L. (2000). *History lessons: institutions, factor endowments, and paths of development in the new world. Journal of Economic perspectives, 14(3),* 217-232.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang *Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).*

Universitas Negeri Surabaya (UNESA). *Kebijakan Pemerintah Untuk Pendidikan Inklusi: Apa yang Perlu Diketahui?*

Wildan Azky. (2020). *Faktor Risiko Kematian Neonatal.* Universitas Airlangga.

World Health Organization (WHO). *Maternal Mortality.*

World Health Organization (WHO). *Pneumonia in Children.*

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9 Gedung Balaikota Blok H Lantai 13
Jakarta Pusat, 10110, Indonesia

Publikasi ini merupakan hasil kompilasi data statistik sektoral dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Pusat Statistik, dan instansi lain sampai dengan tahun 2025.

Publikasi ini memuat data dan informasi mulai dari Geografi dan Demografi, Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, dan Kesejahteraan Rakyat. Tabel dan grafik disajikan pada tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. Untuk memudahkan pemahaman, setiap statistik yang disajikan dilengkapi dengan narasi deskriptif dan visualisasi data. Kami juga menyediakan QR code untuk akses cepat ke sumber data.

Dengan kehadiran buku ini, kami berharap pembaca dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data statistik sektoral yang tersaji.

www.satudata.jakarta.go.id